



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Audited



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025
Audited

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026



GOVERNOR OF BANTEN

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, kegiatan Operasional Keuangan, Arus Kas, perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten



Andra Soni

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selanjutnya, Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sebelum diserahkan kepada BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dan selanjutnya dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah selaku entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2025 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
5. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Daerah pada tahun anggaran 2025.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan tersebut diatas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian LKPD ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten



Andra Soni



GUBERNUR BANTEN

Serang, 22 Mei 2026

Nomor : B-000-1.3.10/464/BPKAD/2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Representasi Manajemen

Yth. Kepala BPK RI
Perwakilan Provinsi Banten
di-
Serang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAP. Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Provinsi Banten memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Provinsi Banten telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Banten dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.

17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Gubernur Banten



Andra Soni



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (Audited)	%	REALISASI 2024 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LRA (2 + 7 + 16)	5.1.1	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA (3 s.d 6)	5.1.1.1	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.956
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.968.258
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA (8 + 13)	5.1.1.2	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (9 s.d 13)	5.1.1.2.a	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.122.216.839.000	986.117.518.100	87,87	988.546.837.000
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.a.1)	1.108.071.000	1.057.839.000	95,47	5.887.789.000
11	Bagi Hasil Lainnya - LRA	5.1.1.2.a.1)	906.874.000	906.874.000	100,00	-
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.a.2)	1.167.199.457.000	1.146.642.838.212	98,24	1.146.248.432.968
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.a.3)	1.228.503.948.000	1.265.613.302.359	103,02	1.212.441.264.199
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA (15 s.d 16)	5.1.1.2.b	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000
15	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	5.1.1.2.b.1	-	-	-	-
16	Insentif Fiskal - LRA	5.1.1.2.b.2	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (18 s.d 19)	5.1.1.3	6.348.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000
18	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3	6.348.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000
19	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3	-	-	-	-
20	BELANJA (21 + 27 + 34)	5.1.2	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85	8.302.564.419.071
21	BELANJA OPERASI (22 s.d 26)	5.1.2.1	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562
22	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242
23	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502
24	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	-	-	-	1.029.672.328
25	Belanja Hibah	5.1.2.1.d	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012
26	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478
27	BELANJA MODAL (28 s.d 33)	5.1.2.2	1.189.128.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508
28	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	186.613.866.304	117.739.329.059	63,09	46.082.332.880
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	234.096.580.988	205.662.940.358	87,81	171.787.754.271
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	318.031.145.447	299.055.592.016	94,03	536.407.648.367
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663
33	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769
34	BELANJA TAK TERDUGA (35)	5.1.2.3	32.756.687.505	-	-	75.000.000
35	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	32.756.687.505	-	-	75.000.000
36	TRANSFER (37 + 39)	5.1.3	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510
37	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (38)	5.1.3.1	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438
38	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438
39	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (40 s.d 41)	5.1.3.2	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072
40	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.a	30.352.620.000	30.342.620.000	99,97	95.923.928.072
41	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.b	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000
42	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (20 + 36)		10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581
43	SURPLUS/ (DEFISIT) (1 - 42)	5.1.4	(305.987.541.412)	(261.284.118.385)	85,39	496.108.214.282
44	PEMBIAYAAN	5.1.5	-	-	-	-
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (46+47)	5.1.5.1	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165
46	Penggunaan SILPA	5.1.5.1	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165
47	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (49 s.d 51)	5.1.5.2	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.a	-	-	-	-
50	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	5.1.5.2.a	-	-	-	-
51	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.b	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036
52	PEMBIAYAAN NETO (45 - 48)		305.987.541.412	305.987.808.375	100,00	(51.622.672.871)
53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43+52)	5.1.6	-	44.703.689.990	-	444.485.541.411

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten

Andra Soni

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2025 (Audited)	SALDO 2024 (Audited)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	444.485.541.411	86.875.060.165
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	444.485.541.411	86.875.060.165
3	Sub Total	-	(0)
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (Silpa/Sikpa)	44.703.689.990	444.485.541.412
5	Sub Total	44.703.689.990	444.485.541.412
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-
7	LAIN-LAIN	-	-
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	44.703.689.990	444.485.541.411

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten

Andra Soni

3. Neraca Komparatif



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN NERACA DAERAH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas (4+5+6+7+8+9)	5.3.1.1.a	38.846.840.739	444.532.811.411
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.b	335.671.538	429.351.948.995
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.d	-	4.956.875.281
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.e	35.713.661.608	9.071.167.006
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.f	2.797.507.593	1.105.550.130
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.g	-	47.270.000
10	Piutang Pajak Netto (11 + 12)	5.3.1.1.h	3.950.747	273.741.488
11	Piutang Pajak		3.970.600	275.117.073
12	Penyisihan Piutang Pajak		(19.853)	(1.375.585)
13	Piutang Retribusi Netto (14 + 15)	5.3.1.1.i	545.115.887	5.819.072.362
14	Piutang Retribusi		547.855.163	5.848.313.932
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(2.739.276)	(29.241.570)
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto (17 + 18)	5.3.1.1.j	17.641.180	17.641.180
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		19.601.311	19.601.311
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		(1.960.131)	(1.960.131)
19	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto (20 + 21)	5.3.1.1.k	349.914.788	1.473.519.541
20	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		350.763.862	1.480.924.162
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		(849.074)	(7.404.621)
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto (23 + 24)	5.3.1.1.k	576.641.493.000	-
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		576.641.493.000	-
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
25	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.l	4.609.749.111	6.596.759.060
26	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (27 + 28)	5.3.1.1.m	7.747.344.013	7.978.291.158
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		9.874.226.886	10.279.299.907
28	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		(2.126.882.873)	(2.301.008.749)
29	Piutang Lainnya Netto (30 + 31)	5.3.1.1.n	5.856.849.251	-
30	Piutang Lainnya		10.897.963.851	12.333.916.600
31	Penyisihan Piutang Lainnya		(5.041.114.600)	(12.333.916.600)
32	Persediaan	5.3.1.1.o	368.278.517.071	243.017.054.176
33	JUMLAH ASET LANCAR (3+10+13+16+19+22+25+26+29+32)		1.002.897.415.788	709.708.890.375
34				
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
36	Investasi Permanen			
37	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2	1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
38	Jumlah Investasi Permanen (37)		1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
39	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (38)		1.791.961.406.968	1.771.897.960.504
40				
41	ASET TETAP	5.3.1.3		
42	Tanah	5.3.1.3.a	9.363.770.901.401	9.287.817.013.353
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	4.539.113.218.722	4.224.775.742.903
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	5.383.991.912.324	5.021.714.531.995
45	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	9.506.088.574.010	9.015.649.850.754
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	514.565.838.910	469.710.626.512
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	52.248.913.064	198.760.372.691
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(12.332.640.474.699)	(11.249.738.861.872)
49	JUMLAH ASET TETAP (42 s.d. 48)		17.027.138.893.732	16.968.689.276.337
50				
51	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
52	Properti Investasi	5.3.1.4	1.111.582.210.562	1.074.975.737.196
53	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4	(218.454.368.795)	(155.362.470.973)
54	JUMLAH PROPERTI INVESTASI (52 + 53)		893.127.841.767	919.613.266.223
55				
56	DANA CADANGAN	5.3.1.5		
57	Dana Cadangan	5.3.1.5	-	-
58	JUMLAH DANA CADANGAN (57)		-	-
59				

NO	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	2	3	4	5
60	ASET LAINNYA	5.3.1.6		
61	Tagihan Jangka Panjang		13.570.000	19.714.286
62	Aset Tak Berwujud Neto (63 + 64)	5.3.1.6.b	24.223.634.234	24.901.470.548
63	Aset Tak Berwujud		43.236.427.125	35.732.344.452
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(19.012.792.891)	(10.830.873.904)
65	Aset Lain-lain Neto (66 + 67)	5.3.1.6.c	504.419.451.480	495.913.275.032
66	Aset Lain-lain		972.489.567.920	950.748.796.252
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(468.070.116.440)	(454.835.521.220)
68	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.d	-	-
69	JUMLAH ASET LAINNYA (60+63+66+67)		528.656.655.714	520.834.459.866
70				
71	JUMLAH ASET (33+39+49+54+58+69)		21.243.782.203.969	20.690.743.853.304
72				
73	KEWAJIBAN	5.3.2		
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	-	-
76	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.b	138.497.733.036	138.497.733.036
77	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.c	2.990.941.315	1.996.670.086
78	Utang Belanja	5.3.2.1.d	359.628.410.728	719.769.537.084
79	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.e	-	-
80	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (74 s/d 78)		501.117.085.079	860.263.940.206
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.3.2.2	244.959.737.253	383.457.470.289
83	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (81)		244.959.737.253	383.457.470.289
84				
85	JUMLAH KEWAJIBAN (79+82)		746.076.822.332	1.243.721.410.495
86				
87	EKUITAS	5.3.3	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (80+83)		21.243.782.203.969	20.690.743.853.304

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten



Andra Soni

4. Laporan Operasional



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	PENDAPATAN - LO	10.516.289.484.924	12.628.955.688.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	6.347.267.487.408	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.719.802.391.393	8.552.678.801.720	(2.832.776.410.336)	(33,12)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	320.429.298.709	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	71.459.059.576	79.327.988.050	(7.871.928.471)	(9,92)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	235.479.737.686	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.976.969.381.771	3.058.848.218.167	920.121.143.604	30,10
9	Bagi Hasil Pajak - LO	1.581.949.285.100	685.585.550.000	896.362.715.100	124,50
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.669.585.000	2.611.971.000	(743.386.000)	(28,46)
	Bagi Hasil Lainnya - LO	909.874.000	-	909.874.000	-
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.146.642.638.212	1.146.248.432.988	394.405.244	0,03
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	1.285.602.799.459	1.212.422.264.199	53.180.535.260	4,39
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.489.293.000	19.819.982.000	(13.330.689.000)	(69,93)
14	Dana Penyesuaian - LO	6.489.293.000	19.819.982.000	(13.330.689.000)	(69,93)
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,28)
16	Pendapatan Hibah - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,28)
17	Dana Donatur - LO	-	-	-	-
18	Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	-
19	BEBAN	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)
20	BEBAN OPERASI	7.820.102.521.384	8.178.822.137.234	(358.719.615.870)	(4,36)
21	Beban Pegawai - LO	2.646.806.457.534	2.387.855.754.242	258.952.703.292	10,84
22	Beban Persediaan	382.301.487.682	384.397.060.097	(22.095.572.415)	(5,75)
23	Beban Jasa	1.673.969.314.320	1.894.097.138.935	(220.127.824.615)	(11,62)
24	Beban Pemeliharaan	182.159.328.802	206.936.231.188	(20.776.904.387)	(12,82)
25	Beban perjalanan Dinas	204.889.719.835	268.981.180.578	(62.074.470.743)	(23,25)
26	Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	100.867.175.380	12.082.009.654	88.785.165.505	734,85
27	Beban Barang dan Jasa BOS	181.199.138.299	172.847.583.849	8.351.544.450	4,83
28	Beban Barang dan Jasa BLUD	133.315.037.293	103.284.860.303	30.030.176.990	29,10
29	Beban Bunga	-	1.029.672.328	(1.029.672.328)	-
30	Beban Subsidi	-	-	-	-
31	Beban Hibah	1.150.834.432.879	1.554.988.397.167	(404.333.964.288)	(29,00)
32	Beban Bantuan Sosial	37.891.434.638	42.989.034.478	(5.098.599.840)	(12,32)
33	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.144.283.735.242	1.141.648.570.703	2.435.164.539	0,21
34	Beban Penyisihan Piutang	(8.628.688)	94.199.631	(102.828.518)	(109,18)
35	Beban Lain-lain	-	75.000.000	(75.000.000)	-
36	Beban Aset Ekstrakomplekabel	1.994.910.388	5.376.423.880	(3.381.513.514)	(62,90)
37	BEBAN TRANSFER	1.764.457.681.728	3.685.186.163.521	(1.930.730.481.793)	(62,25)
38	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.823.253.281.088	3.476.484.235.449	(1.653.210.954.361)	(63,31)
39	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
40	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	30.342.620.000	95.923.928.072	(65.581.308.072)	(69,37)
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.861.810.658	122.800.000.000	(11.938.189.342)	(9,72)
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
43	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
44	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58
45	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(53.784.160.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19
46	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
47	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
49	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
50	DEFISIT NON OPERASIONAL	54.062.805.219	41.728.621.165	12.332.984.055	29,65
51	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	30.377.499.561	40.762.274.451	(1.384.774.890)	(3,40)
52	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	14.085.105.658	987.346.714	13.717.758.944	1.418,09
54	POS LUAR BIASA	-	-	-	-
55	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-	-	-
56	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
57	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
58	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
59	SURPLUS/(DEFISIT) - LO	877.945.111.615	712.315.084.003	165.630.027.612	23,25

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026
 Gubernur Banten

Andra Soni

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a.1	6.720.173.537.866	8.552.409.195.856
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.2	326.976.698.150	238.989.988.258
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.a.3	51.598.879.729	51.909.734.739
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.a.4	235.632.368.589	180.454.955.943
7	Penerimaan Denda Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.5	988.117.518.100	988.548.837.000
8	Penerimaan Denda Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.a.5	1.057.839.000	5.887.789.000
9	Penerimaan Denda Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.a.5	906.874.000	-
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.5	1.148.842.838.212	1.146.248.432.968
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.5	1.285.613.302.359	1.212.441.264.199
12	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.a.5	6.489.293.000	19.619.982.000
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.a.6	6.383.604.000	6.430.560.000
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)		9.747.582.753.005	12.402.938.739.983
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.b		
16	Pembayaran Pegawai	5.5.1.b.1	2.646.806.177.534	2.387.855.754.242
17	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.b.2	3.612.190.835.012	3.762.827.581.502
18	Pembayaran Bunga	5.5.1.b.3	0,00	1.029.672.328
19	Pembayaran Beban Hibah	5.5.1.b.4	513.376.712.647	977.158.618.012
20	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	5.5.1.b.6	37.691.434.638	42.988.034.478
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.b.6	0,00	75.000.000
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dan Desa	5.5.1.b.7	2.024.610.361.548	3.386.606.564.438
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.8	141.204.430.658	216.723.928.072
24	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 23)		8.975.879.952.837	10.777.285.153.072
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 24)		771.712.800.969	1.625.673.586.891
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.a		
28	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.a	2.063.474.900	1.064.385.900
29	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.a	-	-
30	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s/d 29)		2.063.474.900	1.064.385.900
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.b		
32	Perolehan Tanah	5.5.2.b.1	117.738.329.059	46.092.332.880
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.1	380.377.599.640	337.794.670.558
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.1	205.562.940.358	171.787.754.271
35	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.b.1	299.055.992.018	536.407.648.367
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.1	48.066.730.408	35.525.505.663
37	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.1	4.257.802.773	3.021.846.769
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.b.2	-	-
39	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.b.3	-	-
40	Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39)		1.035.060.394.254	1.130.829.758.508
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)		(1.032.996.919.354)	(1.129.585.372.608)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3		
44	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44)		-	-
46	Arus Keluar Kas	5.5.3		
47	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.5.3	138.497.733.036	138.497.733.036
48	Jumlah Arus Keluar Kas (47)		138.497.733.036	138.497.733.036
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)		(138.497.733.036)	(138.497.733.036)
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
51	Arus Masuk Kas	5.5.4.a		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	534.105.593.385	560.104.246.397
53	Koreksi Silpa	5.5.4.a	-	-
54	Penerimaan Transito	5.5.4.a	-	47.270.000
55	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 54)		534.105.593.385	560.151.516.397
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.b		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1	534.105.593.385	560.104.246.397
58	Koreksi Silpa	5.5.4.b.2	-	-
59	Pengeluaran Transito	5.5.4.b.3	5.904.119.251	593.448.591
60	Jumlah Arus Keluar Kas (57 s/d 59)		540.009.712.636	560.697.694.988
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55 - 60)		(5.904.119.251)	(546.178.591)
62	Kenaiikan/Penurunan Kas (25+41+49+61)	5.5.5	(405.685.970.673)	357.064.302.655
63	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	444.532.811.411,48	87.488.508.758
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di B. Pengeluaran, Kas BOS, Kas di	5.5.7	38.846.840.739	444.532.811.411
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	-	-
66	Saldo Akhir Kas (54+65)	5.5.9	38.846.840.739	444.532.811.411

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026
 Gubernur Banten

Andra Soni

6. Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024 (Audited)
1	EKUITAS AWAL	19.647.022.442.809	19.184.343.785.908
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	877.945.111.615	712.315.084.003
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN (4 s.d 11)	(27.262.172.787)	(249.636.427.102)
4	KOREKSI KAS	(47.267.100)	(9.251.736)
5	KOREKSI PIUTANG	196.910.563	52.492.913
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	2.970.414.116	-
7	KOREKSI ASET TETAP	(7.666.487.273)	(247.690.258.932)
8	KOREKSI ASET LAINNYA	(5.982.529.800)	195.517.708
9	KOREKSI KEWAJIBAN	62.384.502	195.161.758
10	KOREKSI PENDAPATAN	-	-
11	KOREKSI INVESTASI	206.266.616	(2.180.088.813)
12	LAIN-LAIN	(17.001.864.412)	-
12	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

Serang, Mei 2026
 Gubernur Banten

 Andra Soni



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Provinsi Banten TA 2025 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 disajikan dengan sistem Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- b. Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- r. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- w. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dengan nomenklatur struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45/46/47/48 dan 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk:

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tipe A;
4. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe A sejumlah 12 (dua belas) Perangkat Daerah;
5. Dinas Daerah Provinsi Banten Tipe B sejumlah 9 (sembilan) Perangkat Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tipe A;
7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah;
8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 4 (empat) Perangkat Daerah;
9. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Provinsi Banten dipimpin oleh Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2025 sampai dengan sekarang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten pada periode bulan September 2024 sampai dengan Tahun 2029 diketuai oleh H. Fahmi Hakim, S.E. dengan empat wakilnya sebagai berikut:

1. Yudi Budi Wibowo
2. H. Imron Rosadi, Lc.
3. Eko Susilo, S.E.
4. Barhum HS, S.IP.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi
- 3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
- 3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025
- 6.2. Mandatory Spending
- 6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan
- 6.5. Hubungan antara Kewajiban Jangka Pendek, Silpa TA 2025 dan Penyediaan Dukungan Dana untuk Pembayaran Kewajiban Pada APBD TA 2026

BAB VII. PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan penjabaran sasaran dan program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah serta program kewilayahan. Penjabaran tersebut disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang memprioritaskan 4 (empat) upaya di antaranya:

- 1) Kolaborasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan ketenteraman masyarakat dengan berbagai stakeholders;
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi kolaborasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis;
- 3) Mendorong kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip green ecosystem, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan; dan
- 4) Reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan *Good and Clean Governance* serta Layanan Berbasis *E-government*.

Adapun tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu *Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk Memperkokoh Masyarakat Banten yang Modern dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing*.

Pencapaian target pembangunan menjadi ukuran keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Indikator makroekonomi digunakan dalam menilai ketercapaian target pembangunan tersebut. Indikator makroekonomi mencakup beberapa aspek seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pencapaian Pembangunan merupakan akumulasi hasil dari interaksi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Penetapan target makro ekonomi Provinsi Banten tahun 2025, juga telah dilakukan sinkronisasi terhadap target makro ekonomi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Tabel 2.1 Sasaran Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,20	5,37
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,24	6,63
3	Tingkat Kemiskinan	5,50	5,51
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,00 - 76,50	77,25
5	Indeks Gini	0,344 - 0,365	0,312

Selanjutnya pencapaian kondisi makro ekonomi Provinsi Banten Tahun 2025 secara rinci, dipaparkan, sebagai berikut.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Banten pada Tahun 2025 Tumbuh 5,37 Persen. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 10/02/36/Th.XX tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan bahwa Perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp74,67 juta. Ekonomi Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh sebesar 5,37 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,60 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,27 persen.

Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,42 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,09 persen.

Ekonomi Provinsi Banten Triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,22 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 27,76 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,41 persen.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Menurut
Lapangan Usaha (persen), Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,6	0,48
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,85	~0
C.	Industri Pengolahan	5,37	1,8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,22	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,4	~0
F.	Konstruksi	5,89	0,61
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	0,61
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,2	0,26
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	0,18
J.	Informasi dan Komunikasi	5,62	0,4
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,72	-0,05
L.	Real Estat	5,94	0,53
M,N.	Jasa Perusahaan	6,51	0,07
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	0,09
P.	Jasa Pendidikan	7,57	0,22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	0,06
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	5,58	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,37	5,37

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, diolah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan)

Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 telah melaksanakan program peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, magang, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, pelatihan ketenagakerjaan, pemberdayaan industri ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Seiring dengan meningkatnya kompetensi/keterampilan tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Berita Resmi Statistik No. 13/02/36/Th. XX, tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 6,48 juta orang, naik 314 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,75 persen, naik sebesar 3,09 persen poin dibanding Agustus 2025. Penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 6,05 juta orang, naik 296,34 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami

peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 159,35 ribu orang.

Pada November 2025 penduduk bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,19 juta orang (52,72 persen), turun 2,16 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat setengah pengangguran sebesar 7,35 persen naik sebesar 0,69 persen poin, sementara tingkat pekerja paruh waktu sebesar 17,55 persen turun 0,04 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 6,63 persen, turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025.

Tabel 2.3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–November 2025

KONDISI KETENAGAKERJAAN	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025–Nov 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	9.441,30	9.539,82	9.567,77	27,95	0,29
Angkatan Kerja	6.213,96	6.168,28	6.482,28	314	5,09
- Bekerja	5.801,25	5.755,93	6.052,26	296,34	5,15
- Pengangguran	412,71	412,36	430,02	17,66	4,28
Bukan Angkatan Kerja	3.227,34	3.371,54	3.085,49	-286,05	-8,48
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,82	64,66	67,75	3,09	
- Laki-Laki	84,11	81,96	83,87	1,91	
- Perempuan	46,99	46,87	51,18	4,32	

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, diolah

2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan program pembangunan dalam rangka menangani kemiskinan telah dilaksanakan melalui program perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan krisis kesehatan, pengurangan pengangguran, pengamanan persediaan pangan melalui *buffer stock* beras cadangan pangan, dan pengendalian inflasi.

Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menjadi dasar bagi pelaksanaan optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Damanatkan agar menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor 11/07/36/Th. XX tanggal 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,19 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 760,85 ribu orang, turun 11,9 ribu orang terhadap Maret 2025 dan turun 16,64 ribu orang terhadap September 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 5,35 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025 (5,58 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 sebesar 6,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 (5,89 persen). Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan turun sebanyak 12,9 ribu orang (dari 627,88 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 615,02 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,9 ribu orang (dari 144,90 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 145,84 ribu orang pada September 2025).

Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp715,288/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp524,678 (73,35 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp190,610 (26,65 persen). Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 5,17 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.698.039/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2.4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2024 – September 2025

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	1	2	3
1	Perkotaan		
	Sep-24	606,52	5,57
	Maret 2025	627,88	5,58
	Sep-25	615,02	5,35
2	Perdesaan		
	Sep-24	170,98	6,2
	Maret 2025	144,9	5,89
	Maret 2025	145,84	6,27
	Total		
	Sep-24	777,49	5,7
	Maret 2025	772,78	5,63
	Sep-25	760,85	5,51

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025



2.1.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25, meningkat 0,90 poin atau 1,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 76,35. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Banten rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 sebesar 75,33 tahun, meningkat 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 tahun menjadi 13,11 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun, dari 9,23 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat sebesar 401 ribu rupiah menjadi 13,50 juta rupiah (tumbuh 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya).

Peningkatan IPM Provinsi Banten tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Terdapat indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,48 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 3,58 persen. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Banten adalah 74,12 tahun dan pada 2025 mencapai 75,33 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,36 tahun atau 0,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,27 persen per tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Banten rata-rata meningkat 0,34 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,46 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,01 tahun atau 0,08 persen dibandingkan tahun 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,40 persen. Sementara itu, RLS pada 2025 meningkat 0,33 tahun atau 3,58 persen dibandingkan 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,94 persen.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Banten mencapai 13,50 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 401 ribu rupiah atau 3,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

2024 yang sebesar 2,29 persen per tahun. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama tahun 2020–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,12	74,17	74,46	74,77	74,97	75,33
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,89	13,02	13,05	13,09	13,1	13,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,89	8,93	9,13	9,15	9,23	9,56
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu (Rp)	11.964	12.033	12.216	12.601	13.097	13.498

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

2.1.5. GINI RATIO

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 12/02/36/Th. XX tanggal 5 Februari 2026 menyebutkan bahwa pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,312. Angka ini menurun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,330 dan menurun 0,047 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,359.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,314; turun dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,335 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,361. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,234; naik dibanding Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,221 dan Gini Ratio September 2024 yang sebesar 0,246.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2025 adalah sebesar 21,84 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,82 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 25,77 persen. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

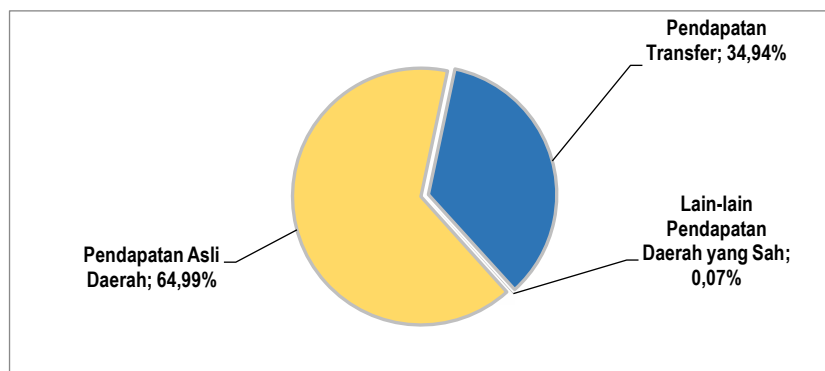
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2025–September 2025 di antaranya distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2025 mengalami penurunan 1,55 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,10 poin persen dan sebesar 0,45 poin persen.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, bagian PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

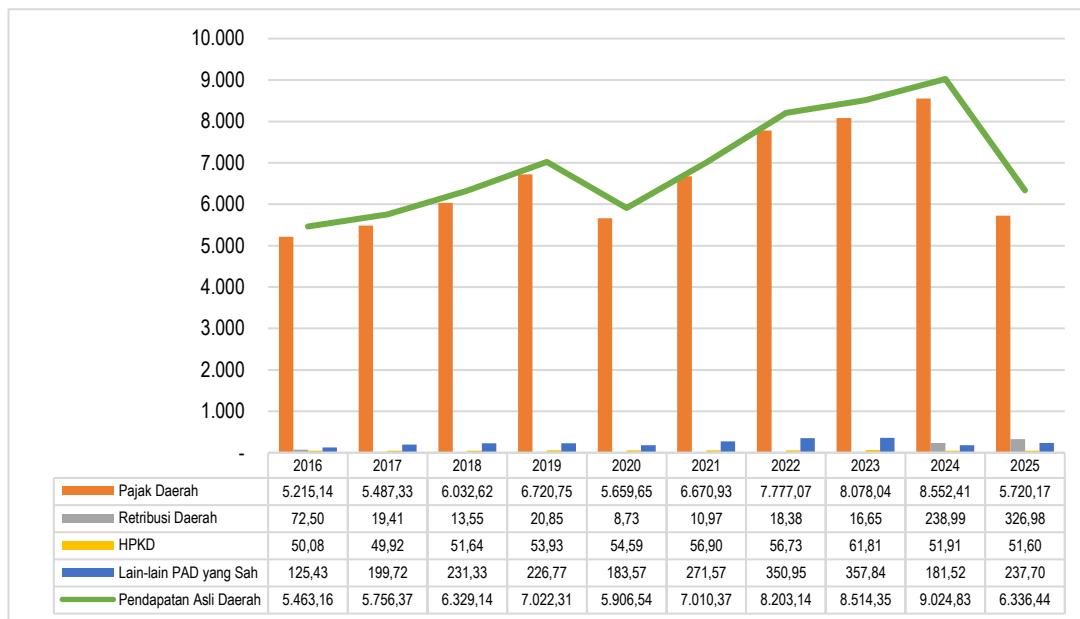
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 64,99% lebih kecil dari rasio Tahun 2024 yaitu sebesar 72,76%.

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2025



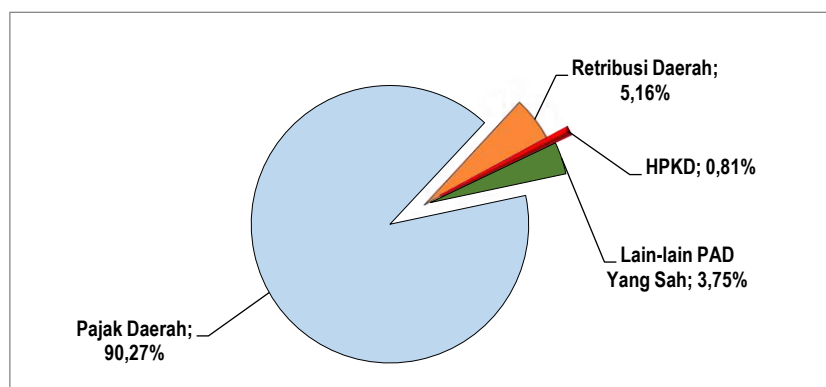
Pendapatan Asli Daerah dalam rentang tahun 2016-2024 selalu menunjukkan tren meningkat kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Sedangkan, pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 2,668 triliun rupiah atau 29,79% menjadi sebesar 6,336 triliun rupiah, sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 2.2 Perkembangan Nilai PAD TA 2016 - 2025 (dalam miliar rupiah)



Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 disebabkan oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak dengan mekanisme *split payment*, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tersebut diberlakukan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Setelah Undang-Undang tersebut berjalan, penerimaan PKB dan BBNKB tidak lagi ditampung sementara pada RKUD Provinsi Banten, melainkan langsung masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Penurunan Pendapatan Asli Daerah juga disebabkan tidak tercapainya target pendapatan pada Tahun Anggaran 2025, khususnya pada penerimaan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Komposisi masing-masing objek pendapatan dari kelompok PAD TA 2025 yaitu: Pajak Daerah sebesar 90,27%, Retribusi Daerah sebesar 5,16%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,81% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,75%.

Grafik 2.3 Komposisi Realisasi PAD TA 2025

2.3. Kebijakan Keuangan

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBD;
- e. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- 1. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - 1) Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, SKPD Penghasil harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
 - 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016;

- 6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis Pendapatan Retribusi Daerah, objek Pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 11) Pemanfaatan penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

publik serta kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;

- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- c. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil kerja sama daerah;
 - c) Jasa giro;
 - d) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e) Pendapatan bunga;
 - f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h) Pendapatan denda pajak daerah;
 - i) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k) Pendapatan dari pengembalian;
 - l) Pendapatan dari BLUD; dan
 - m) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

2. Dana Perimbangan/Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 serta pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Penganggaran DBH Pajak tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika realisasi penerimaan negara, antara lain dengan mempertimbangkan realisasi DBH Pajak Tahun Anggaran sebelumnya pada Pemerintah Provinsi Banten, serta prinsip kehati-hatian fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Sehubungan dengan penetapan kurang bayar dan/atau lebih bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025, penyaluran kurang bayar dan/atau penyelesaian lebih bayar DBH dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Oleh karena itu, pengakuan realisasi DBH Pajak dalam APBD Provinsi Banten hanya dilakukan setelah terdapat penyaluran resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Dalam hal alokasi DBH Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengalami perubahan atau penetapan lanjutan setelah Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Banten wajib menyesuaikan alokasi DBH Pajak tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dilakukan, maka realisasi pendapatan DBH Pajak, termasuk yang bersumber dari penyaluran kurang bayar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025, dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sisa DBH-CHT di Rekening Kas Umum Daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2025 secara bertahap atau sekaligus;
- 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran Dana



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dana Bagi Hasil Sawit

DBH Sawit dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar penyaluran dan ketentuan pengelolaannya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 6) Dalam penyusunan penganggaran saat Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas: a) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum; c) Dana Alokasi Khusus Fisik; d) Dana Otonomi Khusus; e) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan f) Dana Desa.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, memperhatikan hal hal sebagai berikut:

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Target pendapatan daerah dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapatan Daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kenaikan Pendapatan Daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Namun, target pendapatan daerah pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebab mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Penyesuaian target pendapatan ini juga dipengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pajak daerah kewenangan kabupaten/kota. Skema opsen ini mengubah struktur pendapatan dari pola bagi hasil menjadi hak pemungutan langsung oleh kabupaten/kota.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp11.837.699.357.260 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp8.319.775.525.770 turun 4,02% atau Rp348.276.507.779 dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.668.052.033.549. Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.934.779.242.245;
2. Pendapatan Transfer sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp3.511.577.068.000 naik 14,32% atau Rp439.946.459.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.071.630.609.000. Pendapatan Transfer setelah Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.526.424.482.000;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya ditargetkan berasal dari hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp6.346.763.490 naik 0,32% atau Rp20.000.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.326.763.490. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan tidak mengalami perubahan tetap dianggarkan sebesar Rp6.346.763.490. Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah pihak ketiga yaitu PT Jasa Raharja.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tahun 2025, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencapaian target pendapatan melalui Perangkat Daerah yang menangani Pendapatan:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 1) Melakukan Intensifikasi/tindak lanjut status 8 hasil penelusuran KBMDU, untuk dilakukan Penagihan di masing-masing UPTD;
 - 2) Optimalisasi pelaksanaan Razia Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD;
 - 3) Optimalisasi Penambahan Jam Pelayanan Samsat Induk, Samling dan Gerai dimasing-masing UPTD;
 - 4) Pelaksanaan Penghargaan Pajak Award;
 - 5) Informasi Pajak melalui WA Blast;
 - 6) Sinergitas Pendataan dan Penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 1) Berperan serta dalam Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week dan Adira Expo;
 - 2) Koordinasi Tim Pembina Samsat terkait Percepatan Proses Kendaraan Baru/BBN I;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Dealer atau Asosiasi Otomotif Banten (AOB) yang ada di Provinsi Banten, melalui Percepatan Proses STNK dan BBN I (kendaraan baru) di Samsat;
 - 4) Koordinasi dengan Perusahaan Angkutan, khususnya Taxi di Tangerang Selatan;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 1) Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka sinergitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBBKB;
 - 2) Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh wajib PBBKB se-Povinsi Banten dalam rangka mensosialisasikan kebijakankebijakan yang ada di Provinsi Banten sekaligus mengedukasi seluruh Wajib PBBKB untuk selalu taat membayar pajak.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

d. Pajak Air Permukaan

- 1) Melakukan pendataan terhadap potensi AP dan melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
- 2) Berkoordinasi dengan perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum menjadi wajib pajak dan belum memiliki SIPPA agar segera mendaftar sebagai WP Air Permukaan dengan melengkapi persyaratan seperti tercantum pada Peraturan Gubernur Banten nomor: 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Menerbitkan SK NPWPD bagi perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan pemanfaatan air permukaan;
- 4) Melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Orang Prbadi/Badan Usaha yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum memiliki SIPPA tetapi sudah memiliki SK NPWPD;
- 5) Memberitahukan kepada WP Air Permukaan agar segera mengurus perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air jika masa berlakunya sudah habis;
- 6) Berkoordinasi dengan WP Air Permukaan agar dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan harus sesuai dengan nilai yang tertera pada SKPD untuk mencegah terjadinya lebih bayar atau kurang bayar;
- 7) Melakukan penagihan piutang Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak apabila memiliki piutang;
- 8) Melakukan penetapan SKPD bagi wajib pajak baru dan sudah memiliki NPWPD;
- 9) Berkoordinasi dengan WP AP agar membayar tagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

e. Pajak Rokok

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk penyaluran alokasi bagi hasil pajak rokok yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan estimasi pemungutan atas Cukai Rokok;
- 2) Kesepakatan penyaluran dan penggunaan bagi hasil Pajak Rokok telah dilakukan sesuai rencana dan dapat membiayai berbagai klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Banten;

f. Pajak Alat Berat

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Perda tersebut mengamanatkan tahun 2024 pajak alat berat mulai dipungut;
- 2) Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 3) Koordinasi dengan OPD Kesatuan Pol PP Penegakan PERDA;
 - 4) Koordinasi dengan OPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait data alat berat di perusahaan seluruh Provinsi Banten;
 - 5) koordinasi dengan BAPENDA/BPKAD kota/kabupaten yang memiliki penerimaan pajak MBLB meminta data WP MBLB dimana di WP MBLB terdapat Alat Berat;
 - 6) melakukan Pendataan Potensi Alat Berat di setiap wilayah UPTD PPD.
- g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- 1) Kerjasama teknis dengan ESDM Provinsi Banten, dalam rangka Optimalisasi Pendapatan MBLB.
- h. Retribusi Daerah
- 1) Optimalisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah seperti sewa stadion BIS, Kawasan KP3B, Situ atau Danau, Sewa BMD untuk Perbankan;
 - 2) Melakukan sosialisasi melalui media online, media cetak, media luar ruang terkait layanan Retribusi apa saja yang ada di Provinsi Banten;
 - 3) Memfasilitasi Bina Konsumen (Calon Konsumen dan Pelanggan) kepada OPD Penghasil, terhadap Layanan dan Kebijakan;
 - 4) Bersama - sama dengan OPD Penghasil melaksanakan inventarisasi aset daerah yang dapat di manfaatkan, sebagai sumber Pendapatan Retribusi Daerah (pemanfaatan aset situ, bangunan yang tidak dimanfaatkan, serta lahan yang kosong);
 - 5) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait Pengelola Retribusi (OPD, Perbankan, dll) dalam rangka inventarisasi permasalahan yang ada, dan bersama - sama melakukan upaya penyelesaiannya;
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan retribusi daerah, seperti rekonsiliasi data penerimaan (antara Rekening koran RKUD, SIREDA, Kuarta dan SIPD), supaya tidak ada lebih setor, kurang setor, kesalahan penetapan SKRD, dan kesalahan pelunasan pada STS.
- i. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh BUMD di Provinsi Banten beserta perangkat daerah terkait, dalam rangka menginventarisasi permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan;
 - 2) Melakukan koordinasi langsung ke BUMD dalam rangka konfirmasi penyetoran deviden (bagi yang belum menyetorkan) dan menginventarisasi permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada pimpinan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

j. Lain-lain PAD yang Sah

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan lain-lain PAD yang Sah seperti rekonsiliasi data penerimaan lain-lain PAD yang Sah dengan OPD agar dapat mengidentifikasi transaksi dengan tepat
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait antara lain dengan kepolisian, pelaku usaha dan masyarakat;
- a. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Retribusi Pemakaian Bahu Jalan, pengujian bahan, pengujian konstruksi, pemanfaatan sempadan SDA, dan penyediaan tempat kegiatan usaha (kantin KP3B);
 - 2) Retribusi Alat Berat, meningkatkan potensi alat berat di wilayah Provinsi Banten yang dalam tahap pembangunan infrastruktur dan alat berat sebagai penunjang pembangunan tersebut.
 - b. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Pertanian
 - 1) Melaksanakan pemanfaatan aset daerah serta hasil produksi usaha daerah;
 - 2) Membuat dan mengembangkan tempat wisata edukasi.
 - c. Pendapatan Retribusi lewat Dinas Kelautan dan Perikanan
Retribusi Jalan Kepelabuhan, melakukan pengawasan secara intensif terhadap tempat, serta penjualan hasil produksi usaha daerah.

2.3.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp444.485.541.412 yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp138.498.000.000 yang ditujukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2025 seluruhnya merupakan pengembalian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp138.497.733.036.



2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja merupakan hasil perhitungan untuk melihat perkembangan suatu pekerjaan (kegiatan) dibandingkan dengan target yang hendak dicapai atau perkembangan periode sebelumnya yang biasanya dilambangkan dengan angka persentase/indeks/rasio atau klasifikasi dengan skala ordinal dalam suatu kurun waktu tertentu. Kegunaan indikator adalah sebagai salah satu bahan untuk membuat evaluasi kemajuan pekerjaan sekaligus dapat dijadikan bahan untuk menyusun perencanaan kegiatan/program ke depan.

2.4.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah, dalam APBD TA 2025 ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp11.837.699.357.260 dan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten setelah Perubahan sebesar Rp10.467.550.487.735 dengan realisasi mencapai 93,14% atau sebesar Rp9.749.656.227.905. Capaian realisasi Pendapatan TA 2025 lebih rendah sebesar Rp2.654.346.897.958 dari TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.404.003.125.863 atau turun sebesar 21,40%.

Pemerintah Provinsi Banten sudah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten;
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PD Bank Perkreditan Rakyat Serang dan Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
15. Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Banten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah;
16. Pergub Banten Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan TA 2025 ini berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.319.775.525.770 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.934.779.242.245 tercapai sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37%, sedangkan Pendapatan Transfer ditargetkan pada APBD sebesar Rp3.511.577.068.000 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.526.424.482.000 tercapai sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61% yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian, sedangkan Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan pada APBD sebesar Rp6.346.763.490 dan pada Perubahan APBD sebesar Rp6.346.763.490 tercapai sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58%. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



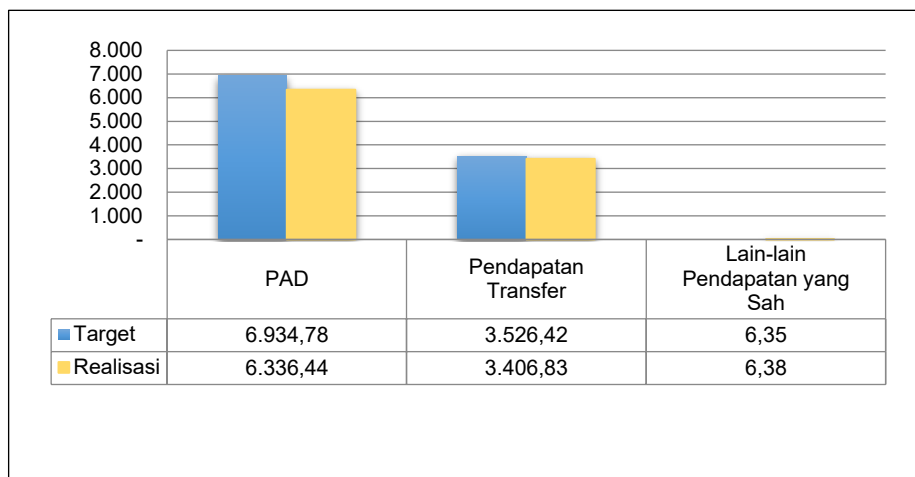
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

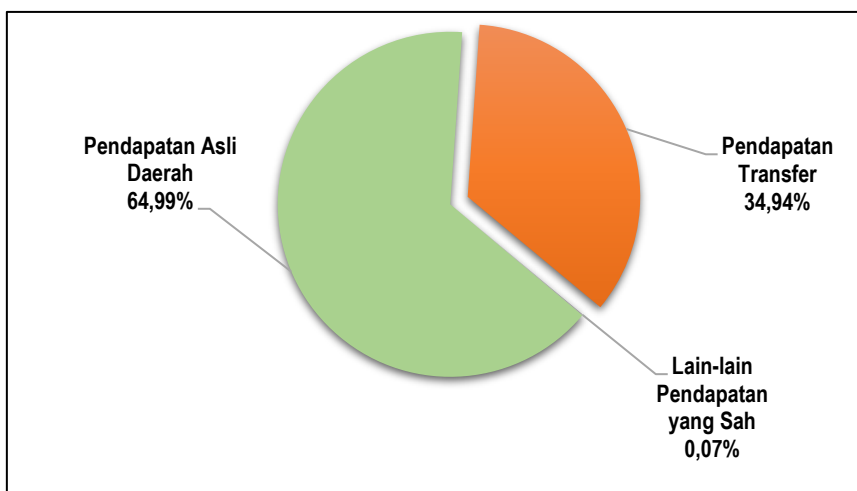
Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	8.319.775.525.770	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37
Pendapatan Transfer	3.511.577.068.000	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.346.763.490	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58
JUMLAH	11.837.699.357.260	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14

Grafik 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025 (Milyar Rupiah)



Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2025





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

2.4.2. Belanja

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam APBD Provinsi Banten TA 2025 sebesar Rp9.604.643.652.748 dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2025 sebesar Rp8.359.013.298.241 dengan realisasi sebesar Rp7.845.125.554.085 atau 93,85% dengan rincian sebagai berikut:

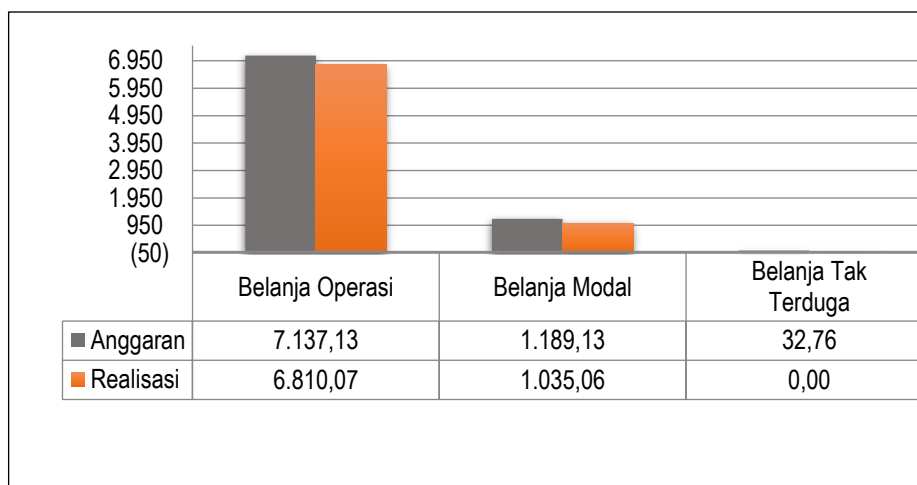
1. Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan program pembangunan Kabupaten/Kota ditargetkan pada APBD sebesar Rp8.019.522.158.684 dan Perubahan APBD sebesar Rp7.137.130.606.275 dengan realisasi sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42%
2. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana publik ditargetkan pada APBD sebesar Rp1.525.026.595.733 dan Perubahan APBD sebesar Rp1.189.126.004.461 dengan realisasi sebesar Rp1.035.060.394.254 atau 87,04%
3. Belanja Tak Terduga ditargetkan pada APBD sebesar Rp60.094.898.331 dan Perubahan APBD sebesar Rp32.756.687.505 dengan realisasi sebesar Rp0 atau 0,00%

Secara ringkas target dan realisasi belanja TA 2025 seperti yang tercantum dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	% NAIK
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(TURUN)
Belanja Operasi	8.019.522.158.684	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42
Belanja Modal	1.525.026.595.733	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04
Belanja Tak Terduga	60.094.898.331	32.756.687.505	-	0,00
JUMLAH	9.604.643.652.748	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85

Grafik 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Belanja TA 2025 (Milyar Rupiah)



2.4.3. Transfer

Transfer TA 2025 ditargetkan pada APBD Murni sebesar Rp2.237.093.338.749 dan Perubahan APBD sebesar Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70%. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Transfer TA 2025

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.113.293.338.749	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	123.800.000.000	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	30.352.620.000	30.342.620.000	99,97
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	123.800.000.000	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77
JUMLAH	2.237.093.338.749	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70

2.4.4. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp147.535.634.237 dan Perubahan APBD sebesar Rp444.485.541.412 dengan realisasi sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan dalam APBD sebesar Rp143.498.000.000 dan Perubahan APBD sebesar Rp138.498.000.000 dengan realisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto ditargetkan dalam APBD sebesar Rp4.037.634.237 dan Perubahan APBD sebesar Rp305.987.541.412 dengan realisasi sebesar Rp305.987.808.375 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025

URAIAN	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan	147.535.634.237	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	143.498.000.000	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00
PEMBIAYAAN NETO	4.037.634.237	305.987.541.412	305.987.808.375	100,00

2.5. Capaian Kinerja dan Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai macam inovasi daerah dan telah memperoleh berbagai penghargaan yang merupakan *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Banten, antara lain:

2.4.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten TA. 2025

- Penjabat Gubernur Banten raih BAZNAS *Award* 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik dari BAZNAS (2/2024);
- Penjabat Gubernur Banten raih Ekbispar *Award* 2024 Provinsi Banten kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/ Lembaga Terbaik (3/2024);
- Pemerintah Provinsi Banten raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (4/2024);
- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Lencana Abdi Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas Kontribusi dan Kerja Keras dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Inovasi Desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (7/2024);
- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tertinggi ke-4 Tingkat Nasional dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (8/2024);



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- g. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan atas Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8/2024);
- h. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Penghargaan atas capaian 99% *Universal Health Coverage* Provinsi Banten dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (8/2024);
- i. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) *Award* 2024 kategori Inisiator dan Berkomitmen Dalam Pelaksanaan RAN PE dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (8/2024);
- j. Pemerintahan Provinsi Banten sebagai Pengelola Terbaik IV Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (8/2024);
- k. Provinsi Banten meraih Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Terbaik Tahun 2024 dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (8/2024);
- l. Penjabat Gubernur Banten meraih Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (8/2024);
- m. Provinsi Banten meraih Stand Terbaik, Terunik, dan Inspiratif pada Pameran Kriyanusa 2024 dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Indonesia (8/2024);
- n. Pemerintah Provinsi Banten meraih Penghargaan Atas Komitmen Mencapai *Universal Health Coverage* Tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (8/2024);
- o. Pemerintah Provinsi Banten meraih Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Silver sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Memuaskan tingkat Provinsi dari *Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)* (9/2024);
- p. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar meraih Apresiasi Tokoh Indonesia Tahun 2024 kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Tempo Media Group (9/2024);
- q. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
- r. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Penurunan *Stunting* Tahun 2024 dari Wakil Presiden Republik Indonesia (9/2024);
- s. Pemerintah Provinsi Banten terima Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Kategori Daerah Berkinerja Baik Dalam Percepatan Belanja Daerah Tahun 2024 (9/2024);
- t. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Investasi 2024 kategori Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (9/2024);
- u. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Provinsi Yang Tidak Ditemukan Kasus Rabies Pada Hewan 14 Tahun Terakhir dari Kementerian Pertanian (10/2024);



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- v. Masjid Raya Al-Bantani Pemerintah Provinsi Banten Juara 2 Masjid Percontohan Nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia (10/2024);
- w. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar raih Anugerah Upakarya Wanua Nugraha atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (10/2024);
- x. Pemerintah Provinsi Banten sebagai Daerah Penyalur Bantuan Pangan Pengentasan *Stunting* dari ID FOOD, Induk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero (10/2024);
- y. Gubernur Provinsi Banten sebagai Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (10/2024);
- z. Provinsi Banten merupakan Daerah Capaian Tertinggi Nasional dalam Pelaksanaan PIN Polio dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (10/2024);
- aa. Pemerintah Provinsi Banten raih Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Kepatuhan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia (11/2024);
- bb. Pemerintah Provinsi Banten menerima 5 sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. yakni: Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Toapekong 12 Tahunan, dan Carita Pantun Baduy (11/2024);
- cc. Pemerintah Provinsi Banten Terbaik ke-2 Pelaksanaan Program Tuberkulosis Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (12/2024);
- dd. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan terbaik kedua Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Daerah pada SIPD Republik Indonesia terhadap Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri (12/2024).

2.4.2 Inovasi Pemerintah Provinsi Banten

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, diantaranya:
 - 1. Sistem Informasi Penatausahaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas (SIPELNAS);
 - 2. SIBANKUM (Sistem Layanan Bantuan Hukum);
 - 3. Elektronik Medical Record (EMR) RSUD Banten;
 - 4. Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - 5. Tita Gina (Tim Tatalaksana Gizi Anak) di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping;
 - 6. LMS Banten Ceria;
 - 7. Lumbung Data;
 - 8. Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SIMAKIP);
 - 9. Absensi Siswa Digital SMAN 1 CINANGKA;
 - 10. PAKU KUMKM (Pusat Asistensi, Kompetensi, dan Usaha Koperasi dan UMKM);
 - 11. Grand Design E - Audit Di Lingkungan Pem Provinsi Banten (Masa Depan Transformasi Digital Pembinaan dan Pengawasan);
 - 12. KATANA (Keluarga Tanggap Bencana);
 - 13. DESTANA (Desa Tangguh Bencana);
 - 14. Dashboard Pimpinan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

15. Satu Portal Layanan Provinsi Banten;
 16. Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD Online);
 17. Klinik Holistik Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Banten;
 18. Layanan Cuti Online ASN;
 19. Layanan Presensi Online ASN;
 20. Layanan Kenaikan Gaji Berkala ASN;
 21. Sistem Informasi Biro Umum (SIBIRU);
 22. Sileupeut Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
 23. Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS);
 24. Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Banten (SIMASTEN);
 25. Layanan Izin Belajar Bagi ASN Secara Online;
 26. Klinik Reformasi Birokrasi (KLINIK RB);
 27. SIM CERIA;
 28. BanKeuDes (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintahan Desa) Provinsi Banten;
 29. Legal Drafter (Hybrid);
 30. KPU LC (Klinik Perundang-Undangan) Legislation Clinic;
 31. SiDAKEP (Sistem Informasi Data Ketahanan Pangan);
 32. Sistem Informasi Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ);
 33. SIBENDA (Sistem Informasi Bencana Daerah);
 34. Jambore Relawan FPRB BPBD Provinsi Banten;
 35. Edukasi Penanggulangan Bencana Tingkat Pendidikan;
 36. Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA);
 37. Dawai Denova;
 38. Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP);
 39. GERTAM Goes To Ponpes (Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Goes To Ponpes);
 40. Serambi Banten.
- b. Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Banten, diantaranya:
1. SIG Potensi Investasi Banten;
 2. SIJALU (Sistem Informasi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan);
 3. Jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah (JKPD) dengan Open Journal Sistem (OJS);
 4. Batupusaka Mobile (Banten Satu Pustaka Mobile);
 5. Geliat Asa;
 6. E-Reservasi RSUD Banten;
 7. Laboratorium Information System (LIS) RSUD Banten;
 8. Loket Samsat Sonten (SAMSON);
 9. Aplikasi Samsat Banten Hebat (SAMBAT);
 10. Aplikasi Samsat Cepat, Ringkas dan Aman (SAMSAT CERIA);
 11. Pelayanan Kolaborasi Untuk Lindungi, Tanggulangi dan Intervensi Penurunan Stunting (KULINTANG INTERNUSA) RSUD Banten;
 12. Upaya Menurunkan Angka Stunting melalui Digitalisasi Pelayanan Gizi Pasien Post Rawat Inap RSUD Malingping;
 13. BETA RAKIT ANTING (Bergandengan Tangan, Rumah Sakit Turunkan Stunting);
 14. MUDA Integrated Project - Model Produksi Kolaboratif Lintas Keahlian Siswa SMK 02 Tangsel;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

15. PIN SHOLAT (SMKS TI PGRI 11 Serpong Tangerang Selatan);
16. Hidroponik Cerdas Berbasis IoT Dengan Energi Terbarukan (SMKN 2 Kota Tangsel);
17. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
18. 12 Hijau Berkilau;
19. Program Pembelajaran Berbasis Industri di SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
20. Mobile Learning System (MLS) SKENSA BESTARI;
21. MANAGE-OBSERVE TEACH SYSTEM (MOCHY) - Pengawas SMK KAB. LEBAK;
22. EDUTRACK DKV SKENSA BESTARI;
23. Alat Pendeteksi Kekeringan Tanaman Pot;
24. Penerapan KURASSAKI (Kurangi Sampah Sekolah Kita) di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang;
25. Sistem Informasi Pelayanan LPSE;
26. Sabtu Seru Bersama Pendongeng (SARUNDENG);
27. Layanan Klinik Kemasan Keliling (LAKI KELING);
28. Geographic Information System (GIS) Tata Ruang;
29. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah berbasis SLiMS (Senayan Library Management System);
30. HARGA BAPOK;
31. Poster Cetting Banten;
32. Sisik Ikan Banten;
33. Jawara Mudik;
34. Sistem Informasi Jaringan Jalan (SIJJ);
35. Pengaduan Jalan Banten;
36. Belajar Berkarya Bersama Menyajikan Menu Nusantara;
37. Motor Roda Tiga dari Kompresor Bekas: Solusi Mobilitas dan Edukasi Berbasis Green Engineering di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang;
38. Sistem Informasi Telusur Status Pajak (SITAPAK);
39. Samsat Drive Thru;
40. Inovasi Pembuatan Aplikasi SIP-TRIKABTA (Sistem Informasi Parenting) sebagai Transformasi Digital dalam Sarana Pelayanan Publik;
41. Sistem Informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (SITAPAP);
42. Ruang Layanan Pengaduan dan Informasi Samsat;
43. Sistem Pembayaran Retribusi Daerah (SIREDA);
44. Info Pajak Kendaraan Bermotor (INPAK);
45. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC);
46. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QRIS;
47. Loket Samsat Non Tunai (SANTUN);
48. Pendaftaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QR-Code;
49. Pintu Perlindungan Sebidang;
50. Rumah Singgah Peduli Masyarakat Banten;
51. Sidataperum Perkim Banten;
52. Ruang Pojok Baca Samsat;
53. Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Metode Risha;
54. SIORMAS/Sistem Informasi Ormas;
55. Journal of Civil Engineering, Technology and Sciences (JOCETS) - Open Jurnal



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- Sistem DPUPR;
56. Media Informasi Digital di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
57. Smart DPRD;
58. Program Bangun Jalan Desa Rakyat Sejahtera (BANG ANDRA);
59. Kelas Pemustaka;
60. SiLOKER;
61. Pembangunan Akses Jalan Banten Lama;
62. TV DPUPR Banten;
63. Pembangunan Akses Jalan Sumur – Taman Jaya;
64. SIMONOV SDA DPUPR Provinsi Banten;
65. e-PPID;
66. Gada Banten (Penegakan Peraturan Daerah Banten);
67. Jari Banten;
68. SIL (SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN);
69. Sikadu (Sistem informasi Koperasi Terpadu);
70. SiDatuk (Sistem Informasi Pendataan Usaha Kecil);
71. Peningkatan Kapasitas Klinik Hewan menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten;
72. Love Banten (Layanan Online Veteriner Provinsi Banten);
73. E-Dasawisma (Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Banten);
74. New Sport Science (Seleksi Atlet Berbasis Teknologi);
75. Silat Banten;
76. SAYAP MALIK (Sentra Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik);
77. Siaga Wisata;
78. Sistem Informasi dan Data Ketenagalistrikan (SIDAK);
79. Sistem Informasi Pertambangan (SIP);
80. Akses permodalan bagi Nelayan di Provinsi Banten;
81. RIS (Radiologi Information System);
82. Online Campaign Specialist (OCS);
83. PTS (Pneumatic Tube System);
84. Program Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Personalized Learning di Sekolah Citra Berkas Tangerang;
85. SIMANTAP (Sistem Manajemen Transportasi);
86. SisDEWI (Sistem Informasi Standardisasi Destinasi Wisata);
87. Gerak Cepat Atasi Aduan Masyarakat (GERCEP SI DUMAS);
88. Notifikasi Informasi masa Kadaluwarsa Izin dan Penyampaian LKPM;
89. mobil layanan perizinan dan investasi;
90. Aplikasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Online;
91. Banten Parlemen TV atau BPTV;
92. Sistem Pemanfaatan Agens Pengendali Hayati (SIAPH);
93. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Digital;
94. Banten Satu Pustaka V.2 (BATUPUSAKA V.2);
95. Banten Satu Pustaka V.3 (BATUPUSAKA V.3);
96. Survei Kepuasan Masyarakat Banten (SUKA BANTEN).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- c. Inovasi Daerah Lainnya, diantaranya:
1. Pendidikan Anti Korupsi;
 2. Gya Inovasi;
 3. Pagelaran Seni Budaya Banten;
 4. Gipang Ketan (Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kelembagaan desa pada desa tertinggal di Provinsi Banten);
 5. GAUNG SDGs;
 6. Strategi Kebijakan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Jalan Melalui Program Bangun Jalan Mantap Untuk Rakyat;
 7. Aplikasi Jawara Menabung;
 8. Mini Jumper Accu (AZEDU);
 9. LUDO RAKSASA SEJARAH (Mengajarkan Computational Thinking Di Sekolah);
 10. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Strategi B-Komfleks di SMAN 10 Pandeglang;
 11. KP3B Report;
 12. PSP3B (Pemasaran Sektor Publik Pemerintah Provinsi Banten);
 13. *Influencer/content creator* sebagai mitra komunikasi pimpinan;
 14. Komunikasi Strategis Pemerintah Daerah;
 15. Impelementasi Pembelajaran Terdiferensiasi pada Materi Perakitan Produk di SMKN 2 Kab. Tangerang;
 16. Program Kewirausahaan Karya Inovasi Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Pot Bunga;
 17. Mobile Klinik Berbasis Telemedicine;
 18. Penentuan Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP);
 19. Sistem Satu Data Indonesia;
 20. Sipanganten (Sistem Informasi Pengelolaan dan Penyebarluasan Konten);
 21. Verifikasi faktual pada sub-kegiatan hibah dan bansos;
 22. Perjanjian Kerjasama Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat tentang pengendalian penyakit hewan menular strategis/zoonosis, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta penguatan pelayanan;
 23. Banten ASIK (Atasi Stunting dengan Kolaborasi);
 24. T&J Teh Berbahan Dasar Bunga Telang Dan Jeruk Nipis Sebagai Minuman Kesehatan;
 25. NHI Tinta Dari Bahan Alam Yang Aman Dan Ramah Lingkungan - SMKN 5 Tangsel;
 26. SMKN 5 Tangsel One Stop Information;
 27. Satu Data Geospasial;
 28. Fasilitas Bantuan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 29. Sabun Dari Minyak Jelantah Dan Ekstrak Bayam Merah Untu Mengurangi Pencemaran Lingkungan;
 30. Aplikasi Sistem Pelaporan Sahabat Perempuan Dan Anak (e-SAPA);
 31. Inovasi Kompor Berbahan Bakar Limbah Aluminium (ALUFLAME) SMKN 1 CIRUAS;
 32. Electrical Smart Monitoring System (Sistim Pemantauan Penggunaan Energi Listrik Cerdas);
 33. KATIBAN INTEN (Konsultasi Berkelanjutan Integrasi Pengarusutamaan Gender Banten);
 34. Si Jagur.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 adalah Rp11.837.699.357.260.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 menjadi Rp10.467.550.487.735.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan TA 2025 sebesar Rp9.749.656.227.905 atau 93,14% dari target yang direncanakan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp10.467.550.487.735. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.404.003.125.863 realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.654.346.897.958 atau 21,40%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kemudian alokasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp7.137.130.606.275, untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.189.126.004.461 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp32.756.687.505. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42% dari nilai anggaran Belanja Operasi. Sedangkan realisasi Belanja Modal Rp1.035.060.394.254 atau 87,04% dari nilai anggaran Belanja Modal dan realisasi Belanja Tak Terduga 0,00% dari nilai anggaran belanja tak terduga. Untuk Belanja Transfer dialokasikan Rp2.414.524.730.906 dengan realisasi sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp444.485.541.412 terealisasi sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari nilai penerimaan pembiayaan yang dianggarkan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp138.498.000.000 terealisasi sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari nilai pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

3.2. Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi

Adapun Realisasi anggaran Per Urusan dan Fungsi Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Per Urusan dan Fungsi TA 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01	PELAYANAN UMUM	4.144.914.972.577	3.734.910.816.713	90,11
01.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	971.269.000	853.863.279	87,91
01.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690	23.321.581.764	84,01
01.2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	470.189.000	464.230.800	98,73
01.2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.419.981.700	1.246.191.705	87,76
01.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880	225.561.933.716	92,01
01.4.02	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379	550.137.227.637	89,76
01.5.01	PERENCANAAN	46.127.867.410	43.577.404.595,00	94,47
01.5.02	KEUANGAN	2.767.140.819.466	2.468.607.463.031	89,21
01.5.03	KEPEGAWAIAN	230.722.447.163	228.388.845.400	98,99
01.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.426.266.039	45.797.137.653	85,72
01.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.621.461.900	1.470.025.644	90,66
01.5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	10.426.928.200	9.663.781.403	92,68
01.6.01	INSPEKTORAT DAERAH	73.677.043.110	64.896.370.157	88,08
01.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640	70.924.759.929	96,99
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	61.967.440.202	56.515.288.318	91,20
03.1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	61.967.440.202	56.515.288.318	91,20
04	EKONOMI	1.510.661.820.271	1.404.200.609.866	92,95
04.1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943	877.785.453.408	93,33
04.2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	82.196.919.551	77.167.438.691	93,88
04.2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.778.421.750	24.567.741.872	91,74
04.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	85.218.919.822	77.190.639.579	90,58
04.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52.506.108.904	48.464.027.666	92,30
04.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	34.485.845.802	30.655.055.153	88,89
04.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.706.399.676	26.891.770.616	93,68



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
04.2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	485.676.000	466.856.450	96,13
04.3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260	50.329.965.199	90,83
04.3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	110.360.240.015	104.180.975.011	94,40
04.3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700	45.555.457.905	93,27
04.3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.954.176.000	5.125.029.622	86,07
04.3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	39.158.157.848	35.820.198.694	91,48
05	LINGKUNGAN HIDUP	70.307.368.805	68.720.383.651	97,74
05.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	468.700.000	384.692.297	82,08
05.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.765.052.805	61.578.114.175	98,11
05.3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	7.073.616.000,00	6.757.577.179	95,53
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	520.244.504.386	509.110.021.285	97,86
06.1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.244.504.386	509.110.021.285	97,86
07	KESEHATAN	1.075.493.713.415	1.067.165.212.920	99,23
07.1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.071.638.341.515	1.063.396.486.338	99,23
07.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.855.371.900	3.768.726.582	97,75
08	PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	91,92
08.3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	91,92
10	PENDIDIKAN	3.244.252.067.370	3.034.640.875.406	93,54
10.1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.156.060.369.670	2.951.318.579.248	93,51
10.2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53.706.010.700	50.722.729.424	94,45
10.2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.974.181.600	7.549.751.591	94,68
10.2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	26.511.505.400	25.049.815.143	94,49
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	105.339.761.331	98.580.527.060	93,58
11.1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.139.945.562	69.329.216.110	96,10
11.2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	33.199.815.769	29.251.310.950	88,11
	JUMLAH	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

3.3. Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja

Adapun Realisasi anggaran Per Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, yang telah diurutkan berdasarkan serapan realisasi tertinggi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja TA 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	S/D Periode Ini	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN				
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.540.000	13.680.000	7.140.000	209,17
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.290.464.800	6.620.503.670	2.330.038.870	154,31
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44.500.000	65.245.000	20.745.000	146,62
4	DINAS PERTANIAN	1.240.163.500	1.811.767.500	571.604.000	146,09
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.276.721.814	1.686.041.654	409.319.840	132,06
6	BADAN PENGHUBUNG	29.800.000	36.000.000	6.200.000	120,81
7	DINAS KESEHATAN	277.500.000.000	313.363.522.756	35.863.522.756	112,92
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.190.420.000	2.254.566.852	64.146.852	102,93
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	(119.596.817.329)	96,61
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.386.558.000	1.338.819.932	(47.738.068)	96,56
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	335.420.000	312.141.500	(23.278.500)	93,06
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	205.900.000	189.825.000	(16.075.000)	92,19
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.652.619.517.621	6.015.136.449.370	(637.483.068.251)	90,42
	JUMLAH PENDAPATAN	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	(717.894.259.830)	93,14
	BELANJA				
1	DINAS KESEHATAN	1.071.638.341.515	1.063.396.486.338	(8.241.855.177)	99,23
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	230.722.447.163	228.388.845.400	(2.333.601.763)	98,99
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	69.838.668.805	68.335.691.354	(1.502.977.451)	97,85
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.713.204.386	509.494.713.582	(11.218.490.804)	97,85
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.126.477.640	70.924.759.929	(2.201.717.711)	96,99
6	DINAS SOSIAL	72.139.945.562	69.329.216.110	(2.810.729.452)	96,10
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.852.699.005	254.243.246.449	(14.609.452.556)	94,57
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	53.706.010.700	50.722.729.424	(2.983.281.276)	94,45
9	DINAS PERTANIAN	110.360.240.015	104.180.975.011	(6.179.265.004)	94,40
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47.749.329.310	45.047.430.239	(2.701.899.071)	94,34
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	27.931.487.100	26.296.006.848	(1.635.480.252)	94,14
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	82.196.919.551	77.167.438.691	(5.029.480.860)	93,88
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28.706.399.676	26.891.770.616	(1.814.629.060)	93,68
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.164.034.551.270	2.958.868.330.839	(205.166.220.431)	93,52



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	S/D Periode Ini	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	940.558.351.943	877.785.453.408	(62.772.898.535)	93,33
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.841.963.700	45.555.457.905	(3.286.505.795)	93,27
17	BADAN PENGHUBUNG	10.426.928.200	9.663.781.403	(763.146.797)	92,68
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	53.461.973.904	49.395.114.916	(4.066.858.988)	92,39
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.762.908.280	33.884.428.447	(2.878.479.833)	92,17
20	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880	225.561.933.716	(19.575.498.164)	92,01
21	DINAS PARIWISATA	40.356.380.790	37.096.611.072	(3.259.769.718)	91,92
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	26.778.421.750	24.567.741.872	(2.210.679.878)	91,74
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.410.639.260	50.329.965.199	(5.080.674.061)	90,83
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.112.333.848	40.945.228.316	(4.167.105.532)	90,76
25	DINAS PERHUBUNGAN	85.218.919.822	77.190.639.579	(8.028.280.243)	90,58
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.204.531.922	22.630.859.871	(2.573.672.051)	89,79
27	SEKRETARIAT DPRD	612.886.069.379	550.137.227.637	(62.748.841.742)	89,76
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	38.026.456.669	33.873.900.811	(4.152.555.858)	89,08
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	34.485.845.802	30.655.055.153	(3.830.790.649)	88,89
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.498.288.120.461	2.214.364.216.582	(283.923.903.879)	88,64
31	INSPEKTORAT	73.677.043.110	64.896.370.157	(8.780.672.953)	88,08
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.426.266.039	45.797.137.653	(7.629.128.386)	85,72
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27.760.720.690	23.321.581.764	(4.439.138.927)	84,01
	JUMLAH BELANJA	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	(762.597.682.856)	92,92

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan meskipun tidak semua jenis pendapatan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Pajak Daerah mencapai realisasi sebesar Rp5.720.173.537.866 atau 91,47% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.253.493.581.987. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya beberapa penerimaan pajak, yaitu:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditargetkan sebesar Rp2.183.554.967.000 dengan realisasi sebesar Rp2.112.638.943.700 atau 96,75%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditargetkan sebesar Rp1.627.134.122.550 dengan realisasi sebesar Rp1.272.028.812.300 atau 78,18%;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditargetkan sebesar Rp1.347.285.989.000 dengan realisasi sebesar Rp1.295.383.786.757 atau 96,15%;
- d. Pajak Rokok dari yang ditargetkan sebesar Rp1.027.591.869.237 dengan realisasi Rp976.234.701.211 atau 95,00%;
- e. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) yang ditargetkan sebesar Rp23.683.549.000 dengan realisasi sebesar Rp16.309.820.498 atau 68,87%.

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai dikarenakan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat, mengakibatkan menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional sehingga turut mengurangi penerimaan pajaknya, kemudian terdapat adanya penurunan tarif pajak kendaraan bermotor dinas dan angkutan umum yang semula 1% menjadi 0,5%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan listrik karena diberikannya subsidi 100% dan dihapusnya BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya;
 - c. Terjadi penurunan PBBKB dikarenakan adanya kebijakan terkait insentif fiskal untuk kendaraan pribadi dan/atau alat berat sebesar 50% serta untuk kendaraan yang digunakan untuk operasional komponen utama atau penunjang alat peralatan pertahanan keamanan TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar 80%, selain itu terjadi penurunan konsumsi BBM seperti peningkatan efisiensi BBKB. Kemudian terjadinya *out of stock* di sebagian besar perusahaan BBM swasta seperti diantaranya PT. Shell Indonesia, PT. Vivo Energy Indonesia dan beberapa perusahaan swasta lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan PBBKB;
 - d. Realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto;
 - e. Tidak tercapainya Opsen Pajak MLB dikarenakan bahwa Opsen MLB merupakan sumber pendapatan baru diterapkan di Tahun 2025, sehingga masih ada penyesuaian aturan dan proses di lapangan, realisasi Opsen Pajak MLB sangat bergantung pada efektifitas Kabupaten/Kota dalam memungut Pajak MLB.
2. Lain-lain PAD yang Sah mencapai realisasi sebesar Rp237.695.843.489 atau sebesar 69,11% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp343.934.086.891. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp137.355.870.027 tercapai realisasi sebesar Rp23.366.145.489 atau 17,01%. Tidak tercapainya target merupakan dampak pemberian insentif pajak kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar Rp3.406.827.664.671 atau sebesar 96,61% dari target yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.526.424.482.000. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditargetkan sebesar Rp1.124.231.784.000 dengan realisasi Rp988.082.231.100 atau 87,89%;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) dari yang ditargetkan sebesar Rp1.167.199.457.000 tercapai realisasi Rp1.146.642.838.212 atau 98,00%;

Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan dari Pendapatan Transfer tersebut adalah:

- a. Penyaluran dana transfer DBH Pajak (DBH PPh 21, DBH PPh 25/29 dan DBH PBB) pada bulan desember tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf F Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana lokasi Umum bahwa Periode penyaluran DBH Pajak mulai tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan ketentuan bulan Desember sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya yaitu sebesar Rp100.062.703.900. Kemudian terdapat sisa DBH Kurang Bayar s.d 2023 yang masih belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 sebesar Rp69.353.669.000;
- b. Tidak tercapainya target realisasi Dana Alokasi Umum disebabkan adanya Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah, yaitu akibat pengangkatan dan penggajian PPPK tahun 2025 hanya sebanyak 11.265 orang sebesar Rp196.636.648.162 tidak sesuai dengan KMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebanyak 11.737 orang yaitu sebesar Rp218.133.328.000.

Berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran. Namun demikian, realisasi belanja dari program dan kegiatan mencapai 92,92%. Belum optimalnya realisasi belanja tersebut, secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kendala Rendahnya Realisasi Belanja TA 2025

No	Uraian	Kendala
1	Belanja Modal Tanah	Belum optimalnya realisasi disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disebabkan tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk kebutuhan SKHN 01 Kota Tangerang, SMK 12 Kota Tangerang, dan SMKN 6 Kota Serang, hal tersebut terjadi karena belum tercapainya kesepakatan harga tanah antara Pemerintah Daerah dan pihak pemilik tanah, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Atas kondisi tersebut, anggaran Belanja Modal Tanah yang telah dialokasikan menjadi tidak terealisasi seluruhnya. Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat kendala realisasi untuk alokasi pembayaran uang ganti rugi Rumah Sakit Adhyaksa yaitu terdapat Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu rekomendasi Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian yang sampai saat ini masih dalam proses.

Rincian lebih lanjut realisasi kegiatan dibawah 80% dapat dilihat pada **Lampiran 1 CaLK**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses akuntansi. Sedangkan Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi. Selanjutnya, output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

1. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
2. Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh SKPD; atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD;
3. Pendapatan – LRA dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan-LRA. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan Penerimaan Bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan – LRA dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN, dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.
8. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek Pendapatan-LRA yang mencakup Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan Atau pun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Oleh Daerah, Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan Dari Pengembalian, Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum, Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
9. Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menurut jenis yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

10. Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
11. Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirinci menurut rincian objek yang mencakup Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal.
12. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis Pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Penganggaran dan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya dicatat sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan asli daerah mencatat Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi daerah mencatat Pendapatan Retribusi Daerah.
15. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Penerimaan Jasa Giro-LRA, Pendapatan Bunga-LRA, Tuntutan Ganti Rugi Daerah-LRA, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA;
 - b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah Pendapatan Denda Pajak-LRA; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang menjadi kewenangan SKPKD adalah sebagai berikut Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA, Pendapatan Denda Retribusi LRA, Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LRA, Pendapatan Denda Pelanggaran Perda-LRA, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LRA, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA, Pendapatan BLUD-LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA.
16. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
2. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan–LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA periode berikutnya. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diotorisasi untuk terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;

3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan;
4. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial;
6. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
7. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal Perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya;
8. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat Pertanian	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00
1.8	Alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Persenjataan	1.000.000,00
1.10	Komputer	1.000.000,00
1.11	Alat Eksplorasi	2.500.000,00
1.12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	2.500.000,00
	- Alat Pengeboran Non Mesin	1.000.000,00
1.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10.000.000,00
1.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00
1.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
	- Alat Kerja Penerbangan	2.500.000,00
1.16	Alat Peraga	1.000.000,00
1.17	Peralatan Proses/Produksi	2.500.000,00
1.18	Rambu-Rambu	15.000.000,00
1.19	Peralatan Olah Raga	1.000.000,00
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Monumen	15.000.000,00
2.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
2.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	
3.1	Alat Musik	
	- Alat Musik Modern	1.000.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
4.1	Jalan	50.000.000,00
4.2	Jembatan	50.000.000,00
4.3	Bangunan Air Irigasi	50.000.000,00
4.4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50.000.000,00
4.5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	50.000.000,00
4.6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000,00
4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	50.000.000,00
4.8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
4.9	Bangunan Air Kotor	50.000.000,00
4.10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00
4.11	Instalasi Air Kotor	50.000.000,00
4.12	Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00
4.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	50.000.000,00
4.14	Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00
4.15	Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00
4.16	Instalasi Pertahanan	50.000.000,00
4.17	Instalasi Gas	50.000.000,00
4.18	Instalasi Pengaman	50.000.000,00
4.19	Instalasi Lain	50.000.000,00
4.20	Jaringan Air Minum	50.000.000,00
4.21	Jaringan Listrik	50.000.000,00
4.22	Jaringan Telepon	50.000.000,00
4.23	Jaringan Gas	50.000.000,00

9. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap pada paragraf 8.e akan diperlakukan sebagai Aset Lainnya;
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam (wabah/pandemi), bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, seperti pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan kebutuhan tanggap darurat bencana;
11. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kab/kota termasuk pemerintah desa;
12. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan Sosial
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Transfer
13. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah;

14. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
15. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual;
16. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah;
2. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal Badan Layanan Umum, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada Laporan Arus Kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi;
8. Seluruh pendapatan transfer baik berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai pendapatan transfer;
9. Seluruh beban transfer baik berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang oleh entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan operasional sebagai beban transfer.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;

2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/ hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan;
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan;
4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
6. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;
7. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
8. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO berbasis akrual atau Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO, Surplus Non Operasional – LO; dan Pendapatan Luar Biasa – LO;
3. Pendapatan – LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
4. Pendapatan – LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
 - b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5. Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
6. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
7. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
8. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan;
9. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi;
10. Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas;
11. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan;
12. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
13. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
14. Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

16. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
17. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
18. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
19. Akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan – LO untuk SKPD;
20. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan-LO yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
21. Pendapatan-LO berbasis akrual pada saat diakui timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
22. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah – LO yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Pajak daerah yang menggunakan sistem *official assessment* terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan pajak daerah – LO yang berasal dari sistem *self assessment*:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak;
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan – LO;
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan – LO.Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
23. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut obyek Pendapatan-LO sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

25. Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut obyek Pendapatan-LO yang mencakup Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Daerah, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
26. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berupa Pendapatan atas bagian laba BUMD-LO diakui pada saat suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah;
27. Pendapatan Bunga/Jasa Giro – LO diakui saat kas diterima di RKUD;
28. Pendapatan Penjualan dan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pengelolaannya-LO diakui saat serah terima aset dan kas diterima;
29. Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-LO diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
30. Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD;
31. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO secara umum diakui pada saat sudah menjadi hak dan pendapatan diterima RKUD;
32. Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO;
33. Pengakuan Surplus Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul;
34. Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima;
35. Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul;
36. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (*basis kas*) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi;
37. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

40. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
41. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan – LO;
42. Transaksi Pendapatan – LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah;
4. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
8. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah;
9. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

10. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
11. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban;
12. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
13. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul;
14. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian;
15. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini;
16. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
17. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*);
18. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas;
20. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
21. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
22. Termasuk dalam Beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Beban Penjualan Aset Non Lancar, Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

24. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
25. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
26. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
27. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi;
- c. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Dari sudut peruntukan selanjutnya masing-masing penguasa kas perlu memilah kas menjadi:

- Kas yang belum ditentukan penggunaannya;
- Kas yang telah ditentukan penggunaannya



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- e. Kas yang belum ditentukan penggunaannya adalah kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- f. Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa BPJS, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).
- g. Kas lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS termasuk di dalamnya transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga dan saldo kas yang berasal dari hibah yang tidak teranggarkan dalam APBD. Termasuk dalam transaksi retur yang mempengaruhi utang pihak ketiga adalah Retur SP2D terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya kesalahan nomor dan nama pemilik rekening tujuan) sehingga oleh bank penerima SP2D tersebut dikembalikan ke rekening penampung (*escrow account*) pada bank tempat penyimpanan RKUD.
- h. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- i. Kas Pemerintah di luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kas Pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum meliputi:
 - 1) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;

Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja pemerintah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
 - 2) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;

Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

- i. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
- ii. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
- iii. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

3) Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;

Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

5) Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung Saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.

- j. Pada akhir periode pelaporan di mungkin terdapat dana yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah, namun pembayaran tersebut belum sampai pada pihak penerima. Dan dana tersebut tersimpan di bank tempat kas daerah, tetapi bukan pada rekening kas daerah. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam saldo kas daerah, karena sudah menjadi belanja daerah. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan mengenai jumlah pembayaran yang belum sampai ke penerima.

2. Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
- b. Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain;
- c. Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, Piutang dari Perikatan, Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan, Piutang dari Kerugian Daerah, dan Piutang Lainnya;
- d. Piutang atas pungutan Pendapatan Daerah terdiri atas Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam sub bagian tersendiri;
- f. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang dipersamakan;
- g. Piutang Pajak yang berasal dari sistem *official assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan;
- h. Piutang pajak yang berasal dari sistem *self assessment* diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- i. Pajak daerah yang menggunakan sistem *self assessment* terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- j. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapus Pembukuan dan Penghapustagihan Piutang:

- a. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- b. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca;
- c. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- e. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;
- f. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo- saldo piutang yang masih *outstanding*;
- g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- h. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib:
 - 1) Menilai Kualitas Piutang;
 - 2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- i. Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo Piutang; dan
 - 2) upaya penagihan.
- j. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet;
- k. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- l. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - 2) Pajak ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*).
- m. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- a) Umur piutang 0 (nol) tahun s.d. 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- n. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- o. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

p. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

q. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

r. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor termasuk didalamnya adalah seluruh komponen rekening Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan (*supplies*) dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas contoh ban mobil bekas pakai.
- d. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- e. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- f. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti pupuk, cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kerbau, kambing, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman diakui sebagai Persediaan.
- h. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam kategori usang adalah barang kuasi yang sudah tidak berlaku lagi.
- i. Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah" diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak dan hilang.
- j. Barang berupa *wallpaper* dan barang sejenis diperlakukan sebagai barang pakai habis
- k. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 3) Pada akhir periode pelaporan, persediaan dicatat disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) di gudang/tempat penyimpanan lain yang diakui OPD sedangkan untuk Rumah Sakit dilakukan di gudang dan Depo.
 - 4) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar).
 - 5) Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan.
- l. Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- m. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.
- n. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First in First out* (FIFO).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- o. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - p. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
 - q. Pada akhir periode pelaporan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*), yaitu dicatat berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
 - r. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
4. Investasi
- a. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh investor (dhi. Pemerintah Daerah) berupa kas dan/atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya;
 - b. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar;
 - d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen;
 - e. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
 - f. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
 - g. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas;
 - h. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
 - i. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
 - j. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan;
 - k. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 3) Berisiko rendah.
- l. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
- 1) Investasi yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - 2) Investasi yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - 3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- m. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas
- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual Kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - 4) Reksa dana.
- n. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- o. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- p. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- q. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - 4) Investasi nonpermanen lainnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- r. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau Lembaga/Organisasi tertentu;
- s. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini;
- t. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri;
- u. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- v. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- w. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul;
- x. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan;
- y. Penilaian investasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah daerah;

- z. Penggunaan metode-metode ini berdasarkan pada kriteria:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% s.d. 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - aa. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - 3) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
 - bb. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
 - cc. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari perhitungan perolehan dana bergulir ditambah dengan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir yang tidak bisa tertagih.
5. Aset Tetap
- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
 - c. Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah:
 - 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - 2) Hak atas tanah.
 - d. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
 - e. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 3) Gedung dan bangunan
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan.
- f. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- g. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- h. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- i. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- j. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi;
- k. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- l. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- m. Masa manfaat adalah:
- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- n. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
- o. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- p. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- q. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
- r. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- s. Aset Tetap Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan;
- t. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai asetnya Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan;
- u. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang berkenaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya Perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 4) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - 5) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi;
- v. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- w. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (valuasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- x. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut. Misalnya Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) yang digunakan bersama, biaya perawatan dan pemeliharaan dianggarkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga pengakuan aset tetap Gedung SKPD terpadu diakui/dicatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- y. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak;
- z. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- aa. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap;
- bb. Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam pengeluaran setelah perolehan) dan memenuhi kriteria:
 - a. Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang tercatat;
 - b. Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata;
 - c. Memenuhi batas kapitalisasi sebagaimana tabel umur masa manfaat, batas minimal kapitalisasi BMD dan penambahan umur masa manfaat.
- cc. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- ee. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap pakai, terdiri atas:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan;
 - 2) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 3) Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan;
 - 4) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- ff. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- gg. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- hh. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya persiapan tempat;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 5) Biaya konstruksi.
- ii. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- jj. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- kk. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;
- ll. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- mm. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- nn. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- oo. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
- pp. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
- qq. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
- rr. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- ss. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - tt. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - uu. Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
 - b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena adanya perubahan tata ruang;
 - c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - d. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.
 - e. secara fisik barang tidak dapat digunakan, dan tidak ekonomis bila dilanjutkan;
 - f. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat moderisasi;
 - g. barang telah melewati batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa; dan
 - h. barang mengalami perubahan dasar spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
 - i. menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aset Lainnya
- a. Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
 - b. Aset Lainnya terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - Sewa
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang
 - Bangun, Kelola/Guna, Serah
Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
 - Bangun, Serah, Kelola/Guna
Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 4) Aset Tak Berwujud, merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain Perangkat Lunak (*software*), hak paten, hak cipta, hak merek, serta Hasil riset dan pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang;
- 5) Aset lain-lain. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- c. Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah
 - Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.
 - Bangun, Kelola/Guna, Serah
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Kelola/Guna, Serah ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
 - Bangun, Serah, Kelola/Guna
Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset Bangun, Serah, Kelola/Guna ini harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
- d. Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan;
- e. Aset Tidak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- f. Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tidak Berwujud berupa:
- 1) *Software* komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu;
 - 2) Lisensi dan *Franchise*;
 - 3) Hak Paten dan Hak Cipta;
 - 4) Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - 5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti Film/Karya Seni/Budaya yang mempunyai manfaat dimasa depan bagi Pemerintah;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 6) ATB dalam Pengerjaan yaitu suatu perolehan ATB khususnya yang diperoleh secara internal namun belum selesai dikerjakan menjadi ATB, namun diniatkan akan digunakan dalam operasional pemerintahan.
- g. Berdasarkan cara perolehannya, ATB Pemerintah dapat berasal dari:
- 1) Pembelian
 - 2) Pengembangan Secara Internal
 - 3) Pertukaran
 - 4) Kerjasama
 - 5) Donasi/Hibah
 - 6) Warisan Budaya/Sejarah (*Intangible Heritage Assets*).
- h. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*).
 - 2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- i. Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran dan untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah;
- j. Nilai Wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran;
- k. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- 1) Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Instansi Pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri atau dikembangkan oleh Pihak Ketiga / Kontraktor. Dalam hal dikembangkan oleh Instansi Pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga;
 - 2) Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus perkasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah maka *software* seperti ini dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian dari harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- l. Aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
- a) Tahap Awal Kegiatan;
 - b) Tahap Pengembangan Aplikasi;
 - c) Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi. Semua aktivitas pada Tahap Setelah Implementasi/Operasionalisasi dapat dibagi menjadi:
 - (1) *Upgrade* (Peningkatan). Aktivitas dapat dikategorikan *upgrade* jika memenuhi kriteria meningkatkan fungsi dan/atau efisiensi *software/website* termasuk peningkatan versi yang lama menjadi yang paling mutakhir.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

(2) *Update* (Pembaharuan). Aktivitas *Update* cenderung terkait dengan penambahan atau pembaharuan database *software* maupun konten website.

(3) *Maintenance* (perawatan/perbaikan). Aktivitas *maintenance* terkait dengan perawatan maupun perbaikan *software/website* ke kondisi semula agar dapat dioperasikan kembali.

Setiap aktivitas *upgrade* dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB, sedangkan aktivitas *update* dan *maintenance* dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

- m. Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
- Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
 - Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi;
 - Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- n. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya;
- o. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
- Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
 - Lisensi;
 - Waralaba (*franchise*);
 - Hak Cipta (*copyright*); dan
 - Hak Paten.
- p. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dan lain-lain) tidak diamortisasi;
- q. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup;
- r. Metode Amortisasi untuk ATB menggunakan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis ATB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Nilai Amortisasi ATB

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	4 Tahun	25%
Lisensi	10 Tahun	10%
Waralaba (<i>Franchise</i>)	5 Tahun	20%
Hak Paten	10 Tahun	10%
Hak Cipta (<i>Copyright</i>)	50 Tahun	2%



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (*government-related events*);
 - d. kejadian yang diakui pemerintah daerah (*government-acknowledged events*).
4. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;
6. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
7. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya;
8. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
9. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
10. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
11. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang;

12. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

1. BLUD merupakan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai SKPD/Unit Kerja, BLUD menerapkan Kebijakan Akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan;
2. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
3. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
4. Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.
6. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD;
7. Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun. Dan sebagai entitas akuntansi, periode pelaporan mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Banten yang berlaku untuk seluruh entitas;
8. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu;
9. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit – LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan – LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Surplus/defisit – LRA;
 - 4) Penerimaan pembiayaan;
 - 5) Pengeluaran pembiayaan;
 - 6) Pembiayaan neto; dan
 - 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah Provinsi Banten;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- d. SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan;
- e. Pendapatan – LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- f. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan – LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan – LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD;
- g. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- h. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu disebabkan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- i. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada Pemerintah Provinsi Banten;
- k. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Provinsi Banten;
- l. Pendapatan – LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- m. Pendapatan – LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- n. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - 1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - 5) Pendapatan BLUD lainnya
- o. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 1) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- p. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- q. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 3) adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- r. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 4) adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa;
- s. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 5), antara lain berupa:
 - 1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - 2) jasa giro;
 - 3) pendapatan bunga;
 - 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau;
 - 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- t. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual;
- u. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf n angka 2) adalah RSUD yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari pembayaran jasa pelayanan masyarakat miskin;
- v. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- w. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- x. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- y. Selisih antara pendapatan – LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit;
- z. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang;
- aa. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- bb. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- cc. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- dd. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- ee. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- ff. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut;
- gg. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ff adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD;

10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari Kebijakan. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan Kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan;

11. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan setara kas;
 - 2) Investasi jangka pendek;
 - 3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - 4) persediaan;
 - 5) Investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) aset lainnya;
 - 8) kewajiban jangka pendek;
 - 9) kewajiban jangka panjang; dan
 - 10) ekuitas.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- c. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - d. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
 - f. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD;
 - g. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas;
 - h. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g antara lain:
 - 1) Dana titipan pihak ketiga;
 - 2) Uang jaminan; dan
 - 3) Uang muka pasien rumah sakit.
 - i. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya;
 - j. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah;
 - k. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Gubernur. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen;
 - l. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal;
 - m. Investasi non permanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - 3) Investasi nonpermanen lainnya.
 - n. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD;
 - o. BLUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.
12. Laporan Operasional
- a. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
 - b. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan – LO;
 - 2) Beban;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - 4) Kegiatan non operasional;
 - 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - 6) Pos Luar Biasa; dan
 - 7) Surplus/Defisit – LO.
- c. BLUD menyajikan pendapatan – LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
- 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - 4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - 6) Pendapatan BLUD lainnya.
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Pendapatan – LO pada BLUD diakui pada saat:
- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- f. Pendapatan – LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- g. Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- h. Pendapatan – LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak;
- i. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- j. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- k. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO;
- l. Beban pada BLUD diakui pada saat:
- 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- m. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- n. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD;
- o. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- p. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- q. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi;

13. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD;

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;

a. Aktifitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai;
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga; dan
- 4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas;

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang;

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap;
- 2) Penjualan Aset Lainnya;
- 3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- 4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 3) dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf g angka 4) merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD;

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Penyertaan Modal;
- 4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf l angka 3), pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf i angka 4), dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf angka 5) merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pinjaman; dan
- 2) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf m angka 2) merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada Neraca;

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 2) Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf p angka 2) merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

d. Aktivitas Transitoris



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

14. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- c. BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

15. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

- a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- b. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan kedalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- c. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD;
- d. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- e. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah;
- f. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah;
- g. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya;
- h. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan;

16. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa

- a. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja/Unit Kerja pemerintah daerah;
- b. Dalam hal satuan kerja/unit kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas:
2. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
4. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
5. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
7. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
8. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
9. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
10. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - e. Penerimaan Transfer.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- f. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
11. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- Pembayaran Pegawai;
 - Pembayaran Barang dan jasa;
 - Pembayaran Bunga;
 - Pembayaran Subsidi;
 - Pembayaran Hibah;
 - Pembayaran Bantuan Sosial;
 - Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa/tak terduga; dan
 - Pembayaran Transfer.
12. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
13. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
14. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
15. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
16. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Penjualan Aset Tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Penerimaan dari Divestasi;
 - Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
17. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Pembentukan Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal Pemerintah;
 - Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.
18. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
19. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
20. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- Penerimaan utang dalam negeri maupun luar negeri;
 - Penerimaan dari utang obligasi;
 - Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
21. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- Pembayaran pokok utang dalam negeri maupun luar negeri;
 - Pembayaran pokok utang obligasi;
 - Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

22. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
23. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, kiriman uang, dan transaksi penerimaan transitoris/pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
24. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran serta transaksi penerimaan transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.
25. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran serta transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D retur yang mempengaruhi Utang Pihak Ketiga.
26. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
27. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
28. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
29. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
30. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
31. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
32. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
33. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
34. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
35. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
36. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

37. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
38. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
39. Investasi pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
40. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
41. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
42. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
43. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.
44. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
46. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
47. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
48. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
49. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa

50. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
51. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra;
52. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;
53. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. disediakan oleh mitra, yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
54. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
55. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud;
56. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset;
57. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra;
58. Pengakuan kewajiban awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi;
59. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan;
60. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
61. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

62. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra;
63. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa;
64. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur;
65. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi;
66. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran;
67. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan;
68. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
3. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
5. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut;
6. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan;
7. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut);
8. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan;
9. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya;
10. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
11. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit;
12. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar;
13. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama;
14. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya;
15. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan;
16. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan;
17. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci;
 18. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 19. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 20. Pengukuran setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
 21. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten yang mengatur Aset Tetap;
 22. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
 23. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
 24. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya;
 25. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui;
 26. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut;
 27. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas;
 28. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti;
 29. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
30. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi;
31. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
32. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa;
33. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan;
34. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;
35. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya;
36. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut;
37. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga;
38. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut;
39. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang;
40. Penyajian Laporan Keuangan Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar;
41. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya;
42. Dalam hal pengungkapan entitas mengungkapkan paling sedikit:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
 - f. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit.
43. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya;
44. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

BAB V
PENJELASAN POS-POS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

5.1.1. Pendapatan – LRA **Rp9.749.656.227.905**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp10.467.550.487.735 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.749.656.227.905 atau 93,14% dari anggaran. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Asli Daerah	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696	(29,79)
Pendapatan Transfer	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167	1,01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.346.763.490	6.383.604.000	100,58	6.430.560.000	(0,73)
JUMLAH	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863	(21,40)

Tabel 5.1.1 di atas menunjukkan realisasi pendapatan Tahun 2025 menurun sebesar Rp2.654.346.897.958 atau 21,40% dibandingkan pendapatan tahun 2024. Penurunan jumlah pendapatan daerah terutama dikarenakan:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak dengan mekanisme *split payment*, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sebelumnya, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota;
2. Tidak tercapainya target pendapatan terutama pada Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah.

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.1.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Rp6.336.444.959.234

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp6.336.444.959.234 atau 91,37% dari target sebesar Rp6.934.779.242.245 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.024.828.260.696, realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat penurunan Rp2.688.383.301.462 atau berkurang 29,79%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pajak Daerah	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.856	(33,12)
Retribusi Daerah	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.988.258	36,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739	(0,60)
Lain-lain PAD yang Sah	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843	30,95
JUMLAH	6.934.779.242.245	6.336.444.959.234	91,37	9.024.828.260.696	(29,79)

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah

Rp5.720.173.537.866

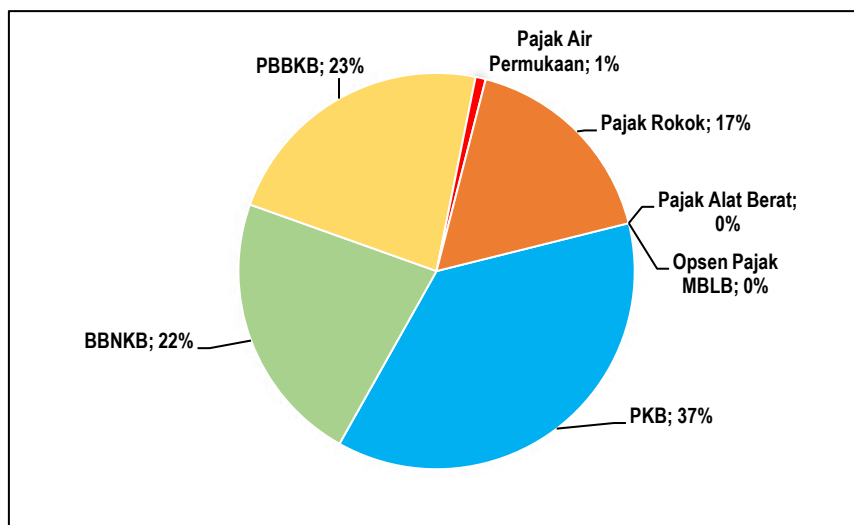
Rekening Pendapatan Pajak Daerah menampung sumber Pendapatan dari Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp5.720.173.537.866 atau 91,47% dari target sebesar Rp6.253.493.581.987 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.552.409.195.856, realisasi Pajak Daerah berkurang Rp2.832.235.657.990 atau turun 33,12%.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Pajak Daerah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PKB	2.183.554.967.000	2.112.638.943.700	96,75	3.570.962.779.800	(40,84)
BBNKB	1.627.134.122.550	1.272.028.812.300	78,18	2.676.106.930.100	(52,47)
PBBKB	1.347.285.989.000	1.295.383.786.757	96,15	1.307.931.401.139	(0,96)
Pajak Air Permukaan	44.176.880.000	47.446.353.000	107,40	43.583.445.000	8,86
Pajak Rokok	1.027.591.869.237	976.234.701.211	95,00	953.821.306.817	2,35
Pajak Alat Berat	66.205.200	131.120.400	198,05	3.333.000	3834,01
Opsen MBLB	23.683.549.000	16.309.820.498	68,87	-	0,00
JUMLAH	6.253.493.581.987	5.720.173.537.866	91,47	8.552.409.195.856	(33,12)

Grafik 5.1.1 Komposisi Pajak Daerah TA 2025

Adapun rincian jenis penerimaan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.112.638.943.700

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700 atau 96,75% dari target sebesar Rp2.183.554.967.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berkurang Rp1.458.323.836.100 atau turun 40,84%.

Tidak tercapainya target realisasi PKB tersebut diantaranya disebabkan:

1. Adanya penurunan tarif PKB untuk kendaraan dinas dan angkutan umum di Banten dari 1% menjadi 0,5%, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Perda tersebut menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang spesifik atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5%, menggantikan tarif progresif sebelumnya yang lebih tinggi, dengan tujuan mendukung sektor transportasi dan meringankan beban masyarakat;
2. Menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional dikarenakan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh Masyarakat yang dibebaskan dari objek PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
3. Adanya Pengurangan Pokok PKB sebesar 12,15% dari tarif pokok PKB



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

yang telah ditetapkan sebesar 1,2% dan/atau tarif progresif yang dikenakan kepada wajib pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Melakukan Intensifikasi/tindak lanjut status 8 (wajib pajak siap membayar) berdasarkan hasil penelusuran Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), yang kemudian dilakukan Penagihan di masing-masing UPTD;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Razia Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD;
- c. Optimalisasi Pelayanan Samsat Induk, Samling dan Gerai di masing-masing UPTD melalui penambahan Jam Pelayanan;
- d. Pelaksanaan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor (Penghargaan Pajak Award) yang berlangsung pada 24 November 2025 sampai dengan 20 Desember 2025;
- e. Penyampaian Informasi Pajak melalui WA Blast;
- f. Sinergitas Pendataan dan Penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.272.028.812.300**

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300 atau 78,18% dari target sebesar Rp1.627.134.122.550 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkurang Rp1.404.078.117.800 atau turun 52,47%.

Tidak tercapainya target realisasi pendapatan pajak BBNKB tersebut diantaranya disebabkan:

1. Menurunnya penjualan kendaraan bermotor konvensional dikarenakan meningkatnya pembelian kendaraan listrik oleh Masyarakat yang dibebaskan dari objek BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
2. Dibatasinya objek Pajak BBNKB hanya pada penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya tidak lagi menjadi objek Pajak BBNKB sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

3. Adanya Pengurangan Pokok BBNKB sebesar 37,25% dari tarif pokok BBNKB yang telah ditetapkan sebesar 12% yang dikenakan kepada wajib pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Berperan serta dalam Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 30 November 2025 di ICE BSD City, dan Turut berperan serta dalam Event-Event Adira Expo 2025;
- b. Melakukan koordinasi Tim Pembina Samsat terkait Percepatan Proses Kendaraan Baru/BBN I;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dealer atau Asosiasi Otomotif Banten (AOB) yang ada di Provinsi Banten, melalui Percepatan Proses STNK dan BBN I (kendaraan baru) di Samsat;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Angkutan, khususnya Taxi di Tangerang Selatan.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.295.383.786.757

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp1.295.383.786.757 atau 96,15% dari target sebesar Rp1.347.285.989.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.307.931.401.139, realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkurang Rp12.547.614.382 atau turun 0,96%.

Tidak tercapainya target PBBKB di antaranya disebabkan Penerapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 285 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

1. Adanya Pengurangan Pokok PBBKB sebesar 50% dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB yang digunakan untuk kendaraan pribadi dan/atau alat berat;
2. Adanya Pengurangan Pokok PBBKB sebesar 80% dari tarif pokok PBBKB yang telah ditetapkan sebesar 10% terhadap penyerahan BBKB oleh Wajib PBBKB yang digunakan untuk operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka sinergitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBBKB;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- b. Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh wajib PBBKB se-Provinsi Banten dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten sekaligus mengedukasi seluruh Wajib PBBKB untuk selalu taat membayar pajak.

4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Rp47.446.353.000

Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2025 sebesar Rp47.446.353.000 atau 107,40% dari target sebesar Rp44.176.880.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp43.583.445.000, realisasi Pajak Air Permukaan bertambah Rp3.862.908.000 atau naik 8,86%.

Pelampauan target realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap potensi PAP dan melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;
- b. Melakukan penertiban terhadap perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum menjadi wajib pajak dan belum memiliki Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) agar segera mendaftar sebagai wajib pajak Air Permukaan dengan melengkapi persyaratan seperti tercantum pada Peraturan Gubernur Banten nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menerbitkan SK Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi perusahaan yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- d. Melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Orang Pribadi/Badan Usaha yang sudah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan namun belum memiliki SIPA tetapi sudah memiliki SK NPWPD;
- e. Menyampaikan kepada wajib pajak Air Permukaan agar segera mengurus perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air jika masa berlakunya sudah habis;
- f. Berkoordinasi dengan wajib pajak Air Permukaan agar dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan harus sesuai dengan nilai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk mencegah terjadinya lebih bayar atau kurang bayar;
- g. Melakukan penagihan piutang Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak apabila memiliki piutang;
- h. Melakukan penetapan SKPD bagi wajib pajak baru dan sudah memiliki NPWPD; dan
- i. Berkoordinasi dengan wajib pajak AP agar membayar tagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5) Pajak Rokok

Rp976.234.701.211

Realisasi Pajak Rokok TA 2025 sebesar Rp976.234.701.211 atau 95,00% dari target sebesar Rp1.027.591.869.237 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp953.821.306.817, realisasi Pajak Rokok bertambah Rp22.413.394.394 atau naik 2,35%.

Tidak tercapainya target dikarenakan realisasi Pajak Rokok dicatat berdasarkan nilai bersih setelah dikurangi potongan ke BPJS Kesehatan, sedangkan target Pajak Rokok yang tercantum adalah sebesar nilai bruto.

6) Pajak Alat Berat

Rp131.120.400

Realisasi Pajak Alat Berat TA 2025 sebesar Rp131.120.400 atau 198,05% dari target sebesar Rp66.205.200 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.333.000, realisasi Pajak Alat Berat bertambah Rp127.787.400 atau naik 3.834,01%.

Pelampauan target realisasi Pajak Alat Berat (PAB) tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya yaitu:

1. Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui pendataan dan penagihan Pajak Alat Berat;
2. Sosialisasi Peraturan Pajak Alat Berat diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait data alat berat di seluruh perusahaan se-Provinsi Banten;
5. Melaksanakan koordinasi dengan BAPENDA dan BPKAD/BPKD/BKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang memiliki penerimaan pajak MBLB guna mendapatkan data WP MBLB, dimana WP MBLB tentu memiliki Alat Berat yang juga seharusnya menjadi WP PAB;
6. melakukan Pendataan Potensi Alat Berat di setiap wilayah UPTD PPD.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MBLB) Rp16.309.820.498

Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2025 sebesar Rp16.309.820.498 atau 68,87% dari target sebesar Rp23.683.549.000.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Opsen Pajak MBLB merupakan sumber pendapatan yang baru diterapkan di Tahun 2025, sehingga masih terdapat penyesuaian aturan dan proses di lapangan, dimana realisasi Opsen Pajak MBLB sangat bergantung pada efektifitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memungut Pajak MBLB.

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp326.976.698.150

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp326.976.698.150 atau 113,57% dari target sebesar Rp287.906.730.367 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp238.989.988.258, realisasi Retribusi Daerah bertambah Rp87.986.709.893 atau naik 36,82%.

Peningkatan realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, diantaranya:

1. Optimalisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah seperti sewa Banten International Stadium (BIS), Kawasan KP3B, Situ atau Danau, dan Penyewaan Barang Milik Daerah untuk Perbankan;
2. Melakukan sosialisasi melalui media online, media cetak, maupun media luar ruang untuk memperkenalkan layanan-layanan Retribusi yang disediakan Provinsi Banten;
3. Memfasilitasi Bina Konsumen (Calon Konsumen dan Pelanggan) terhadap Layanan dan Kebijakan;
4. Melaksanakan inventarisasi aset daerah yang dapat di dimanfaatkan, sebagai sumber Pendapatan Retribusi Daerah (pemanfaatan aset situ, bangunan yang tidak dimanfaatkan, serta lahan yang kosong);
5. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait pengelola retribusi dalam rangka inventarisir permasalahan yang ada, dan bersama-sama melakukan upaya penyelesaiannya.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Retribusi Jasa Umum	275.500.560.000	310.614.687.336	112,75	228.658.468.898	35,84
Retribusi Pelayanan Kesehatan	275.500.560.000	310.614.687.336	112,75	228.658.468.898	35,84
Retribusi Jasa Usaha	10.246.170.367	14.145.231.962	138,05	8.634.759.600	63,82
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	21.000.000	25.000.000	119,05	22.000.000	13,64
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.689.456.824	2.251.346.134	133,26	7.555.847.600	(70,20)
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	772.258.000	703.820.932	91,14	346.434.500	103,16
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	86.370.000	95.163.000	110,18	57.187.000	66,41
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.187.543.500	1.664.261.500	140,14	603.318.000	175,85
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.489.542.043	9.405.640.396	144,94	49.972.500	18.721,63
Retribusi Perizinan Tertentu	2.160.000.000	2.216.778.852	102,63	1.696.759.760	30,65
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.160.000.000	2.216.778.852	102,63	1.696.759.760	30,65
JUMLAH	287.906.730.367	326.976.698.150	113,57	238.989.988.258	36,82

Adapun Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum **Rp310.614.687.336**

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 sebesar Rp310.614.687.336 atau 112,75% dari target sebesar Rp275.500.560.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp228.658.468.898, realisasi Retribusi Jasa Umum bertambah Rp81.956.218.439 atau naik 35,84%.

Retribusi Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 seluruhnya bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terdapat pada beberapa UPTD dan BLUD di Dinas Kesehatan, yaitu:

1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten dengan realisasi sebesar Rp2.129.466.000 atau 121,68% dari target sebesar Rp1.750.000.000 dengan kontribusi utama bersumber dari realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.081.970.000 atau 132,23% dari target sebesar 1.574.560.000;
2. BLUD RSUD Banten dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp238.977.528.683 atau 113,15% dari target sebesar Rp211.200.000.000;
3. BLUD RSUD Malingping dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp56.377.299.245 atau 108,97% dari target sebesar Rp51.736.000.000.
4. BLUD RSUD Ciligrang dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp4.091.468.443 atau 102,54% dari target sebesar Rp3.990.000.000;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5. BLUD RSUD Labuan dengan realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp9.086.420.965 atau 129,81% dari target sebesar Rp7.000.000.000.

Pelampauan tersebut dikarenakan:

1. Terdapat peningkatan retribusi melalui kegiatan MCU calon mahasiswa baru POLTEKKES Banten di bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025;
2. Terdapat pemeriksaan Narkotika yang signifikan pada bulan-bulan tertentu;
3. Telah dilakukan kerjasama antara Labkesda Banten dengan 3 (Tiga) Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, serta Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Banten dalam pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, sehingga secara rutin dan berkala specimen hadir dan diperiksa di Labkesda Banten;
4. Meningkatnya frekuensi jadwal kegiatan Prolanis dengan beberapa PKM di Kabupaten Serang.
5. Meningkatnya jumlah klaim BPJS Kesehatan melalui pengembangan layanan medis dan penunjang serta perbaikan casemix yang berdampak pada tingginya nilai klaim BPJS Kesehatan di RSUD Malingping dan RSUD Ciligrang pada TA 2025;
6. Adanya peningkatan sarana, prasarana, serta tenaga medis dokter spesialis sehingga meningkatkan pelayanan terhadap pasien dan klaim yang lebih tinggi;
7. Tingginya antusias masyarakat untuk berobat di RSUD Labuan dikarenakan Lokasi RSUD Labuan yang strategis dan sarana prasarana serta jumlah dokter spesialis yang memadai;
8. Adanya klaim covid yang di bayarkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan hasil revidi BPKP terkait klaim kedaluwarsa dibuka Kembali untuk tahun layanan 2020, 2021, dan 2022 pada RSUD Banten.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Rp14.145.231.962

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 sebesar Rp14.145.231.962 atau 138,05% dari target sebesar Rp10.246.170.367 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.634.759.600, realisasi Retribusi Jasa Usaha bertambah Rp5.510.472.362 atau naik 63,82%.

Pelampauan target terutama bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Adapun penjelasan rincian Retribusi Jasa Usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

a) **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

Rp25.000.000

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila TA 2025 sebesar Rp25.000.000 atau 119,05% dari target sebesar Rp21.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp22.000.000,



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

realisasi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila bertambah Rp3.000.000 atau naik 13,64%.

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diterima/dipungut dan dicatat oleh Badan Penghubung Provinsi Banten yang merupakan hasil dari penyewaan kamar di Wisma Banten.

b) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp2.251.346.134

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya TA 2025 sebesar Rp2.251.346.134 atau 133,26% dari target sebesar Rp1.689.456.824 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.555.847.600, realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berkurang Rp5.304.501.466 atau turun 70,20%.

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diterima/dipungut dan dicatat oleh 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana sebanyak 8 dari 9 Perangkat Daerah berhasil mencapai target realisasi Retribusi tersebut. 9 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp440.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp2.700.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, dengan realisasi Sebesar Rp9.375.000 Atau 133,93% dari Target Sebesar Rp7.000.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin. Pelampauan target tersebut karena adanya penambahan luasan ruang usaha yang disewa oleh subjek retribusi yang diperuntukkan sebagai ruang saji, sehingga menambah nilai sewa dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa objek retribusi berbasis sewa ruang usaha di lingkungan BPSDMD memiliki potensi yang dapat dioptimalkan melalui pengelolaan pemanfaatan ruang yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penyewa;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp333.408.200 Atau 142,83% Dari Target Sebesar Rp233.437.800 yang diantaranya merupakan hasil dari penyewaan kantin di DPUPR, Kantin di Danau KP3B, tempat usaha (tenant) di Situ Cipondoh, tempat usaha di Pasar



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Rajeg, dan tempat usaha di Sepatan. Pelampauan target tersebut diantaranya karena:

- (a) Terdapat Perusahaan (PT Ghi Gha Company) yang melakukan pembayaran retribusi secara sekaligus untuk periode 4 tahun (2022-2025). Pembayaran tersebut mencakup 10 titik billboard yang dimiliki Perusahaan yang sebelumnya tidak teranggarkan;
 - (b) Terdapat wajib retribusi baru yaitu PT. Jesclean Hidro Power yang memulai konstruksi di area sempadan Sungai Ciliman untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan Sungai Cilemer untuk Pariwisata Curug Goong yang sebelumnya tidak teranggarkan;
 - (c) Terdapat penambahan penyewaan diluar PKS dan MoU dalam rangka peminjaman Banten International Stadium untuk pertandingan liga 1 dan liga 2 2025/2026 secara rutin sesuai dengan jadwal PSSI serta pemanfaatan BMD Situ Cipondoh.
5. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp11.780.000 atau 87,78% dari target sebesar Rp13.420.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin di Disnakertrans dan UPTD Latihan Kerja Disnakertrans. Tidak tercapainya target diantaranya karena adanya penyewa yang tidak memperpanjang sewa tempat usaha;
 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp6.120.000 atau 100% yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.680.000 atau 109,09% dari target sebesar Rp1.540.000 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin;
 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.686.020.054 Atau 132,06% dari target sebesar Rp1.276.721.814 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin SMAN/SMKN/SKhN se-Provinsi Banten.
 9. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp199.822.880 atau 134,95% dari target sebesar Rp148.077.210 yang merupakan hasil dari penyewaan kantin di Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kantin di Bappeda, serta Kantin dan Fotocopy di Bapenda, Samsat Bapenda, dan BPKAD.

Pada TA 2025 terdapat perubahan nomenkelatur sub rekening objek yang sebelumnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi dua sub rekening objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; dan
- (2) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila.

c) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Rp703.820.932

Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan TA 2025 sebesar Rp703.820.932 atau 91,14% dari target sebesar Rp772.258.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp346.434.500, realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan bertambah Rp357.386.432 atau naik 103,16%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tidak tercapainya target dikarenakan pada UPT PPP Labuan terdapat docking kapal yang peralatannya mengalami kerusakan diantaranya roda dan rel untuk menarik kapal dari laut ke darat tidak berfungsi.

d) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Rp95.163.000

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp95.163.000 atau 110,18% dari target sebesar Rp86.370.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp57.187.000, realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga bertambah Rp37.976.000 atau naik 66,41%.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diterima/dipungut dan dicatat oleh perangkat daerah sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp0 dari target sebesar Rp600.000. Tidak tercapainya realisasi disebabkan oleh rendahnya minat konsumen terhadap fasilitas olahraga yang tersedia di BPSDMD Provinsi Banten, seperti lapangan bulutangkis dan lapangan tenis, karena kondisi lapangan yang belum memenuhi standar;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp41.100.000 atau 135,78% dari target sebesar Rp30.270.000. Pelampauan target dikarenakan meningkatnya volume penyewaan tempat olahraga DPUPR Provinsi Banten oleh masyarakat;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp51.233.000 atau 103,5% dari target sebesar Rp49.500.000. Pelampauan target dikarenakan meningkatnya kunjungan wisata Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dikelola oleh DLHK Provinsi Banten ; dan
4. Dinas Pertanian Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Rp2.830.000 atau 47,17% dari target sebesar Rp6.000.000. tidak tercapainya target disebabkan pada TA 2025 banyak dilakukan Pemeliharaan terhadap Kandang Hewan di UPT PPPT Sitandu sehingga kunjungan wisata edukasi sempat ditutup sementara.

e) **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha** **Rp1.664.261.500** **Pemerintah Daerah**

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah TA 2025 sebesar Rp1.664.261.500 atau 140,14% dari target sebesar Rp1.187.543.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp603.318.000, realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah bertambah Rp1.060.943.500 atau naik 175,85%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Hasil Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp88.154.000 atau 73,62% dari target sebesar Rp119.750.000. tidak tercapainya target diantaranya dikarenakan:
 1. Produksi ikan berkurang disebabkan pasokan air terhambat karena adanya perbaikan aliran air sungai besar;
 2. Menurunnya penjualan ikan konsumsi;
 3. hasil benih banyak dihibahkan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan.
2. Dinas Pertanian Provinsi Banten, dengan realisasi sebesar Rp1.576.107.500 atau 147,60% dari target sebesar Rp1.067.793.500. Realisasi tersebut bersumber dari Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak) sebesar Rp567.762.500 dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah (UPTD PPV) sebesar Rp 1.008.345.000. Pelampauan target diantaranya karena:
 1. Harga jual baik produk ternak (telur dan susu) maupun ternak lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran;
 2. Adanya peningkatan kelahiran ternak dan peningkatan produksi produk hasil ternak;
 3. Pelanggan yang datang ke UPTD PPV meningkat baik pelayanan laboratorium maupun Rumah Sakit Hewan (RSH);
 4. Sarana di Rumah Sakit Hewan meningkat (terdapat USG, X-Ray dan penunjang lainnya);
 5. Ruang lingkup akreditasi pengujian bertambah (penambahan kemampuan pengujian dan peningkatan kompetensi penguji);
 6. Penerapan pembayaran dengan Qris.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

f) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp9.405.640.396

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 sebesar Rp9.405.640.396 atau 144,94% dari target sebesar Rp6.489.542.043 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp49.972.500, realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah bertambah Rp9.355.667.896 atau naik 18.721,63%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diterima/dipungut dan dicatat oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan – UPTD Labkesda, dengan realisasi sebesar Rp 47.056.000 atau 26,89% dari target sebesar Rp175.000.000. Tidak tercapainya target dikarenakan terdapat potensi pendapatan dari layanan unggulan Labkesda Banten yang tidak diatur dalam regulasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti layanan kalibrasi, Magang/Praktek Kerja Lapangan, dan penelitian bagi mahasiswa. Sehingga layanan tersebut tidak dapat dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan.
2. Badan Penghubung, dengan realisasi sebesar Rp11.000.000 atau 125% dari target sebesar Rp8.800.000. Pelampauan target dikarenakan tingginya permintaan sewa ruang rapat di Wisma Banten;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp544.145.000 atau 110,63% dari target sebesar Rp491.850.000. Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa Mutu Pakan Ternak (UPTD P3T) sebesar Rp238.985.000 dan pemanfaatan aset daerah lainnya sebesar Rp305.160.000. Pelampauan target tersebut diantaranya karena:
 - (a) Menjalinkan Kerjasama Pelayanan Pengujian melalui MoU dengan UPT BPPMHKP KKP yang berlokasi di Bandara Soekarno Hata dan SKIPM Merak;
 - (b) Adanya realisasi dari Sewa Bangunan Permanen dan gedung TPI Binuangeun yang sebelumnya tidak ditargetkan;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan realisasi sebesar Rp180.450.000 atau 91% dari target sebesar Rp198.300.000. Tidak tercapainya target disebabkan Aset daerah yang dimiliki khususnya ruang kelas, asrama, guest house, dan aula lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan, terutama bagi peserta pelatihan yang berasal dari kabupaten/kota, instansi vertikal, serta instansi lainnya, sehingga pemanfaatan aset untuk tujuan komersial (objek retribusi) menjadi terbatas.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan realisasi



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

sebesar Rp6.245.664.250 atau 155,10% dari target sebesar Rp4.026.757.000 yang bersumber dari:

- (a) pemanfaatan aset daerah berupa Pemakaian Bahu Jalan sebesar Rp2.093.476.000;
- (b) Pengujian Bahan sebesar Rp371.155.000;
- (c) Pengujian Konstruksi sebesar Rp1.051.775.000;
- (d) Pemanfaatan Sempadan SDA sebesar Rp 85.501.000; dan
- (e) Pemanfaatan Aset Daerah lainnya sebesar Rp2.508.608.000.

Pelampauan target tersebut diantaranya karena:

- (a) Adanya peningkatan permintaan pengujian *quality control* pada kegiatan dibidang kebinamargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (b) Adanya peningkatan permintaan pengujian kuat tekan paving blok;
 - (c) Adanya peningkatan permohonan pengujian bahan baik dari sektor pemerintahan seperti pekerjaan pembangunan Kementerian PUPR dan pembangunan jalan tol maupun dari pihak swasta; dan
 - (d) Banyaknya permintaan penggunaan alat berat untuk membuka lahan program ketahanan pangan dan penanggulangan bencana alam.
6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dengan realisasi sebesar Rp26.000.000 atau 152,94% dari target sebesar Rp17.000.000 yang bersumber dari penyewaan aula/ ruangan pelatihan pada UPTD Latihan Kerja. target pendapatan tahun 2025 mengalami penyesuaian dikarenakan beberapa ruangan pelatihan pada UPTD Latihan Kerja dimanfaatkan menjadi sekolah rakyat.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan realisasi sebesar Rp254.788.500 atau 91,06% dari target sebesar Rp279.800.000; Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa:
- (a) Pemanfaatan Aset Daerah (Laboratorium) sebesar Rp246.512.500; dan
 - (b) Pemanfaatan Aset Daerah (Taman Hutan Raya) sebesar Rp8.276.000.
8. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi sebesar Rp12.000.000 atau 240% dari target sebesar Rp5.000.000. pelampauan target tersebut dikarenakan adanya peningkatan permintaan masyarakat atas layanan sewa mobil toilet portable, seiring meningkatnya jumlah pertandingan olah raga dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Banten;
9. Badan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp1.786.461.646 atau 166% dari target sebesar Rp1.076.165.043. Realisasi bersumber dari perpanjangan sewa aset untuk Lahan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

ATM, Kantor Kas Bank Banten, BJB, dan BRI yang habis masa perjanjiannya pada tahun 2025. Pelampauan target tersebut dikarenakan adanya penambahan sewa kantor pusat Bank Banten dan kantor cabang Bank Banten yang sebelumnya direncanakan sebagai inbreng pada bank banten, namun proses inbreng belum selesai pada tahun 2025.

10. Dinas Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp232.830.000 atau 139,95% dari target sebesar Rp166.370.000. Pelampauan target tersebut dikarenakan:

- (a) Ruang lingkup akreditasi pengujian bertambah (penambahan kemampuan pengujian dan peningkatan kompetensi penguji)
- (b) Sudah terakreditasinya Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak ISO 17025: 2018 dan ISO 9001:2015;
- (c) Meningkatnya Pelanggan yang datang ke UPT Pelayanan dan Pengujian Veteriner (PPV), baik pelayanan laboratorium maupun klinik hewan;
- (d) Adanya peningkatan pengawasan dan audit Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di unit usaha sehingga unit usaha banyak yang mengirimkan sampel uji laboratorium di UPTD PPV; dan
- (e) Manajemen UPTD PPV memberikan pelayanan secara proaktif dan mempermudah cara pembayaran ke pelanggan dari bendahara UPT.

11. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, dengan realisasi sebesar Rp65.245.000 atau 146,62% dari target sebesar Rp44.500.000. Realisasi tersebut bersumber dari pemanfaatan aset daerah berupa:

- (a) Pelayanan Rumah Kemasan oleh UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (PTSI) sebesar Rp57.000.000; dan
- (b) Pemanfaatan Aset Daerah Lainnya oleh UPTD PTSI sebesar Rp8.245.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Rp2.216.778.852

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 sebesar Rp2.216.778.852 atau 102,63% dari target sebesar Rp2.160.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.696.759.760, realisasi Retribusi Perizinan Tertentu bertambah Rp520.019.092 atau naik 30,65%.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 seluruhnya bersumber dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) diterima/dipungut dan dicatat oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pelampauan target tersebut dikarenakan adanya



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang semula pada tahun 2024 berjumlah 93 orang TKA menjadi 114 orang TKA pada tahun 2025.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp51.598.879.729

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan dividen yang diterima dari investasi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp51.598.879.729 atau 104,36% dari target sebesar Rp49.444.843.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp51.909.734.739, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang Rp310.855.010 atau turun 0,60%. Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2025 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk.	44.380.285.224	44.380.285.224	100,00	49.482.065.813	(10,31)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK	734.609.134	2.888.645.863	393,20	2.427.668.926	18,99
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten	4.329.948.642	4.329.948.642	100,00	-	0,00
JUMLAH	49.444.843.000	51.598.879.729	104,36	51.909.734.739	(0,60)

Adapun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Rp44.380.285.224

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. TA 2025 sebesar Rp44.380.285.224 atau 100% dari target sebesar Rp44.380.285.224 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp49.482.065.813, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jabar Banten Tbk. berkurang Rp5.101.780.589 atau turun 10,31%.

2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK Rp 2.888.645.863

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2025 sebesar Rp2.888.645.863 atau 393,2% dari target sebesar Rp734.609.134 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.427.668.926, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK bertambah Rp460.976.937 atau naik 18,99%.

Tabel rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK TA 2025 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN****Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025****Tabel 5.1.6 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR/LPK
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PT. BPR BERKAH	44.198.349	60.504.259	(26,95)
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	-	2.900	(100,00)
PT. LKM RANGKASBITUNG	19.785.311	19.455.276	1,70
PT. BPR LEBAK SEJAHTERA	84.660.172	106.928.054	(20,83)
PT. BPR SERANG	2.049.590.915	1.716.744.179	19,39
PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG	690.411.116	524.034.258	31,75
PT. BPR LPK BERKAH KAB. PANDEGLANG	-	-	-
JUMLAH	2.888.645.863	2.427.668.926	18,99

**3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten
Rp4.329.948.642**

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT. Jamkrida Banten TA 2025 sebesar Rp4.329.948.642. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.Jamkrida Banten bertambah Rp4.329.948.642 atau naik 100%.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp237.695.843.489

Rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp237.695.843.489 atau 69,11% dari target sebesar Rp343.934.086.891 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp181.519.341.843, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah Rp56.176.501.646 atau naik 30,95%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.592.698.600	2.063.474.900	129,56	1.064.385.900	93,87
Hasil Kerja Sama Daerah	6.687.190.000	7.050.778.000	105,44	6.566.193.200	7,38
Jasa Giro	17.064.710.000	19.610.625.109	114,92	20.983.882.679	(6,54)
Pendapatan Bunga	428.715.632	428.715.632	100,00	4.909.702.882	(91,27)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	103.181.450	441.700.307	428,08	558.961.572	(20,98)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	66.501.985	111.346.114	167,43	133.726.463	(16,74)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	28.131.145	1.354.883.748	4.816,31	2.699.948.075	(49,82)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	137.355.870.027	23.366.145.489	17,01	129.571.115.205	(81,97)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.541.260	-	33.624	28.276,34
Pendapatan Dari Pengembalian	178.783.088.052	180.557.293.511	100,99	2.171.897.700	8.213,34
Pendapatan BLUD	1.824.000.000	2.701.339.420	148,10	2.319.539.021	16,46
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	10.539.955.522	(100,00)
JUMLAH	343.934.086.891	237.695.843.489	69,11	181.519.341.843	30,95

Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Rp2.063.474.900

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp2.063.474.900 atau 129,56% dari target sebesar Rp1.592.698.600 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.064.385.900, realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan bertambah Rp999.089.000 atau naik 93,87%.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/ Usang). Pelampauan target pada TA 2025 disebabkan meningkatnya lelang bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten (sekolah, gedung, dll).

2) Hasil Kerja Sama Daerah Rp7.050.778.000

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 sebesar Rp7.050.778.000 atau 105,44% dari target sebesar Rp6.687.190.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.566.193.200, realisasi Hasil Kerja Sama Daerah bertambah Rp484.584.800 atau naik 7,38%.

Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah TA 2025 bersumber dari Fasilitas Pelatihan (diklat) di BPSDMD yang sebelumnya dikategorikan sebagai pendapatan Retribusi.

3) Jasa Giro Rp19.610.625.109

Realisasi Jasa Giro TA 2025 sebesar Rp19.610.625.109 atau 114,92% dari target sebesar Rp17.064.710.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp20.983.882.679, realisasi Jasa Giro berkurang Rp1.373.257.570 atau turun 6,54%.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2025 antara lain bersumber dari:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

(a) Jasa Giro pada Kas Daerah (RKUD Provinsi Banten) sebesar Rp16.643.770.461,55 atau 115,06% dari target sebesar Rp14.464.710.000; dan

(b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara (Rekening Giro Pemerintah Provinsi Banten lainnya) sebesar Rp2.966.854.647,46 atau 114,11% dari target sebesar Rp2.600.000.000;

Realisasi jasa Giro dihitung berdasarkan saldo akhir harian dengan tingkat bunga per tahun sebesar 2,5%. Realisasi tersebut sudah termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2024, namun belum termasuk Jasa Giro per tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2025 yang diakui sebagai piutang Jasa Giro TA 2025.

Penurunan realisasi TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan perhitungan Jasa Giro mengikuti jumlah saldo pada RKUD.

4) Pendapatan Bunga Rp428.715.632

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 sebesar Rp428.715.632 atau 100,00% dari target sebesar Rp428.715.632 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4.909.702.882, realisasi Pendapatan Bunga berkurang Rp4.480.987.250 atau turun 91,27%.

Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang ditempatkan pada Bank Indonesia pada 29 Desember 2024.

Penurunan Pendapatan Bunga TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan saldo TDF pada TA 2025 lebih kecil dibandingkan saldo TDF pada TA 2024, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Rp441.700.307 Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 sebesar Rp441.700.307 atau 428,08% dari target sebesar Rp103.181.450 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp558.961.572, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berkurang Rp117.261.265 atau turun 20,98%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 bersumber dari pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pelampauan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Tahun Anggaran 2025 di karenakan upaya optimalisasi penagihan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp111.346.114

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp111.346.114 atau 167,43% dari target sebesar Rp66.501.985 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp133.726.463, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain berkurang Rp22.380.350 atau turun 16,74%.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari transaksi kelebihan setoran retribusi, pajak, serta denda keterlambatan pelaporan PBBKB, serta penerimaan-penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada kode rekening lainnya.

7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.354.883.748

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 sebesar Rp1.354.883.748 atau 4.816,31% dari target sebesar Rp28.131.145 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.699.948.075, realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berkurang Rp1.345.064.328 atau turun 49,82%.

Pendapatan Denda tersebut bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah. Pelampauan target Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 disebabkan adanya paket pekerjaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten yang belum dilaksanakan secara tepat waktu.

8) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp23.366.145.489

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp23.366.145.489 atau 17,01% dari target sebesar Rp137.355.870.027 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp129.571.115.205, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berkurang Rp106.204.969.716 atau turun 81,97%.

Realisasi pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 tersebut diantaranya bersumber dari:

- (a) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp21.535.014.473 atau 15,87% dari target sebesar Rp135.709.688.543. Realisasi tersebut terutama dari Pendapatan Denda PKB Mobil Penumpang Minibus sebesar Rp11.045.155.200, Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp4.703.983.800, dan Mobil Penumpang Jeep sebesar Rp2.271.556.800.
- (b) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan realisasi sebesar Rp413.154.300,00 atau 161,76% dari target sebesar Rp255.414.300. Realisasi tersebut terutama dari Pendapatan Denda BBNKB Mobil Barang/ Beban Light Truck sebesar Rp116.019.000,



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp 89.418.800, dan Mobil Penumpang Minibus sebesar Rp77.060.500. Pelampauan Denda BBNKB khususnya pada mobil barang (light truck), sepeda motor roda dua, dan minibus dikarenakan banyak pemilik kendaraan/pihak dealer yang tidak segera melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan setelah transaksi pembelian, sehingga dikenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda BBNKB.

- (c) Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan realisasi sebesar Rp1.384.039.131 atau 100,23% dari target sebesar Rp1.380.798.562.
- (d) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan dengan realisasi sebesar Rp6.885.900 atau 331,28% dari target sebesar Rp2.078.600. pelampauan tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar kewajiban.

9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp9.541.260

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp9.541.260 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp33.624, realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah bertambah Rp9.507.636 atau naik 28.276,34%.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2025 bersumber dari:

- (a) Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dengan realisasi sebesar Rp29.600;
- (b) Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp9.511.660.

10) Pendapatan Dari Pengembalian Rp180.557.293.511

Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian TA 2025 sebesar Rp180.557.293.511 atau 100,99% dari target sebesar Rp178.783.088.052 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.171.897.700, realisasi Pendapatan Dari Pengembalian bertambah Rp178.385.395.811 atau naik 8.213,34%.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari:

- (a) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp22.740.820 atau 126,02% dari target sebesar Rp18.044.820;
- (b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp184.913.261 atau 221,39% dari target sebesar Rp83.523.523;
- (c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp2.047.905.062,50 atau 101,63% dari target sebesar Rp2.015.137.163;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- (d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa dengan realisasi sebesar Rp125.035.950 dari target sebesar Rp0;
- (e) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp7.000.000 atau 140% dari target sebesar Rp5.000.000;
- (f) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp174.041.840.897 atau 100% dari target sebesar Rp174.041.840.897 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) KPU sebesar Rp149.384.281.340;
 - (2) Bawaslu sebesar Rp24.657.011.981;
 - (3) Sisa dana hibah Pilkada sebesar Rp47.576;
 - (4) Pendapatan dari pengembalian belanja Kwarda sebesar Rp500.000.
- (g) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan realisasi sebesar Rp47.802.024 atau 100% dari target sebesar Rp47.802.024;
- (h) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan realisasi sebesar Rp 2.204.500.000 atau 100,07% dari target sebesar Rp 2.203.000.000;
- (i) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp 1.116.886.000 atau 558,44% dari target sebesar Rp200.000.000;
- (j) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan dengan realisasi sebesar Rp175.610.808,12 dari target sebesar Rp0;
- (k) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi dengan realisasi sebesar Rp9.727.997 dari target sebesar Rp0;
- (l) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp 827.000 dari target sebesar Rp0;
- (m) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp307.809.425 atau 182,42% dari target sebesar Rp168.739.625;
- (n) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP dengan realisasi sebesar Rp176.324.643 dari target sebesar Rp0;
- (o) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dengan realisasi sebesar Rp 88.369.623,13 dari target sebesar Rp0.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

11) Pendapatan BLUD

Rp2.701.339.420

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 sebesar Rp2.701.339.420 atau 148,10% dari target sebesar Rp1.824.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.319.539.021, realisasi Pendapatan BLUD bertambah Rp381.800.399 atau naik 16,46%.

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 bersumber dari:

- (a) Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dengan realisasi sebesar Rp1.841.926.175,29 atau 171,50% dari target sebesar Rp1.074.000.000;
- (b) Lain-Lain Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp859.413.244,89 atau 114,59% dari target sebesar Rp750.000.000. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp822.688.309,89 dan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD sebesar Rp36.724.935.

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Rp0

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.539.955.522. Hal ini dikarenakan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 telah dikelompokkan dalam pendapatan atas pengembalian belanja berkenaan.

5.1.1.3. Pendapatan Transfer

Rp3.406.827.664.671

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp3.406.827.664.671 atau 96,61% dari target sebesar Rp3.526.424.482.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.372.744.305.167, realisasi Pendapatan Transfer terdapat kenaikan Rp34.083.359.504 atau bertambah 1,01%. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8 Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167	1,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)
JUMLAH	3.526.424.482.000	3.406.827.664.671	96,61	3.372.744.305.167	1,01

Adapun penjelasan rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp3.400.338.371.671

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp3.400.338.371.671 atau 96,60% dari target sebesar Rp3.519.935.189.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.353.124.323.167, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah Rp47.214.048.504 atau naik 1,41%.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.124.231.784.000	988.082.231.100	87,89	994.434.626.000	(0,64)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.640.869.000	6.761.789.300	88,50	7.388.386.000	(8,48)
DBH PPh Pasal 21	1.074.805.005.000	944.663.936.800	87,89	942.425.758.000	0,24
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	39.770.965.000	34.691.792.000	87,23	38.719.273.000	(10,40)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	0,00	13.420.000	(100,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	530.228.000	488.386.000	92,11	552.270.000	(11,57)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	409.832.000	401.440.000	97,95	377.914.000	6,23
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.406.000	1.407.000	100,07	2.885.376.000	(99,95)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	166.605.000	166.606.000	100,00	259.794.000	(35,87)
DBH Sawit	906.874.000	906.874.000	100,00	1.812.435.000	(49,96)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.167.199.457.000	1.146.642.838.212	98,24	1.146.248.432.968	0,03
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	809.119.261.000	809.039.537.900	99,99	984.894.795.000	(17,86)
DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	358.080.196.000	337.603.300.312	94,28	161.353.637.968	109,23
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	218.133.328.000	197.656.432.312	90,61	14.443.947.968	1268,44
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	94.757.611.000	94.757.611.000	100,00	134.395.612.000	(29,49)
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	45.189.257.000	45.189.257.000	100,00	12.514.078.000	261,11
Dana Alokasi Khusus (DAK) :	1.228.503.948.000	1.265.613.302.359	103,02	1.212.441.264.199	4,39
Dana Alokasi Khusus Fisik	123.222.552.000	119.572.322.275	97,04	151.638.021.459	(21,15)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.105.281.396.000	1.146.040.980.084	103,69	1.060.803.242.740	8,04
JUMLAH	3.519.935.189.000	3.400.338.371.671	96,60	3.353.124.323.167	1,41

Penjelasan lebih rinci dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) **Rp988.082.231.100**

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 sebesar Rp988.082.231.100 atau 87,89% dari target sebesar Rp1.124.231.784.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp994.434.626.000, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang Rp6.352.394.900 atau turun 0,64%.

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pendapatan transfer mengacu pada Peraturan Presiden 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025, dan mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil tidak mencapai target karena:

1. Penyaluran dana transfer DBH Pajak (DBH PPh 21, DBH PPh 25/29 dan DBH PBB) pada bulan desember tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf F Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana lokasi Umum bahwa Periode penyaluran DBH Pajak mulai tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan ketentuan bulan Desember sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah penyaluran sebelumnya.
2. Terdapat sisa DBH Kurang Bayar s.d 2023 yang masih belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Berikut rincian Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang belum ditransfer :

Tabel 5.1.10 Pendapatan Rincian Dana Transfer Yang Belum di Transfer ke Pemerintah Daerah TA 2025 dan 2024

No	Jenis Dana Transfer	Sisa Anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024	DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	Total
1	2	3	4	5=3+4
1	DBH PBB	693.305.700	403.094.000	1.096.399.700
2	DBH PPh Pasal 21	96.070.620.200	64.978.599.000	161.049.219.200
3	DBH PPh Pasal 25/29	3.298.778.000	3.862.984.000	7.161.762.000
4	DBH SDA Minerba Landrent	0	18.208.000	18.208.000
5	DBH SDA Panas Bumi	0	90.784.000	90.784.000
TOTAL		100.062.703.900	69.353.669.000	169.416.372.900

Selisih penyaluran DBH TA 2025 sebesar Rp100.062.703.900 belum diatur sebagai kurang salur oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan DBH Kurang Bayar sebesar Rp69.353.669.000 telah diatur dalam PMK 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 dan telah diakui sebagai piutang transfer.

Rincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan **Rp6.761.789.300**

Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp6.761.789.300 atau 88,50% dari target sebesar Rp7.640.869.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.388.386.000, realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan berkurang Rp626.596.700 atau turun 8,48%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11 Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	6.239.751.300	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	217.320.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	304.718.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		6.761.789.300	

b) DBH PPh Pasal 21 **Rp944.663.936.800**

Realisasi DBH PPh Pasal 21 TA 2025 sebesar Rp944.663.936.800 atau 87,89% dari target sebesar Rp1.074.805.005.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp942.425.758.000, realisasi DBH PPh Pasal 21 bertambah Rp2.238.178.800 atau naik 0,24%. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 DBH PPh Pasal 21 Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	864.635.581.800	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	30.908.151.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	49.120.204.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		944.663.936.800	

c) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND **Rp34.691.792.000**

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND TA 2025 sebesar Rp34.691.792.000 atau 87,23% dari target sebesar Rp39.770.965.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp38.719.273.000, realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND berkurang Rp4.027.481.000 atau turun 10,40%. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

**Tabel 5.1.13 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	29.689.002.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	2.082.589.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	2.920.201.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		34.691.792.000	

d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp0

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.420.000.

Pada Tahun 2025 tidak ada penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang disalurkan ke RKUD.

**e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp488.386.000
Pengusahaan Panas Bumi**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2025 sebesar Rp488.386.000 atau 92,11% dari target sebesar Rp530.228.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp552.270.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi berkurang Rp63.884.000 atau turun 11,57%.

**Tabel 5.1.14 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	370.818.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	48.942.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	68.626.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		488.386.000	

**f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp401.440.000
Mineral dan Batubara - Landrent**

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent TA 2025 sebesar Rp401.440.000 atau 97,95% dari target sebesar Rp409.832.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp377.914.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent bertambah Rp23.526.000 atau naik 6,23%.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

**Tabel 5.1.15 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-Landrent Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	377.859.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	9.816.000	KMK 44/KM.7/2024
3	Penyaluran DBH Kurang Bayar s.d Tahun 2023	13.765.000	KMK 29/MK/PK/2025
Total		401.440.000	

g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp1.407.000
Mineral dan Batubara-Royalty

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty TA 2025 sebesar Rp1.407.000 atau 100,07% dari target sebesar Rp1.406.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.885.376.000, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty berkurang Rp2.883.969.000 atau turun 99,95%.

**Tabel 5.1.16 Tahapan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-RoyaltyTahun 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	1.406.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran melalui TDF	1.000	KMK 44/KM.7/2024
Total		1.407.000	

h) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Rp166.606.000
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2025 sebesar Rp166.606.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp166.605.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp259.794.000, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berkurang Rp93.188.000 atau turun 35,87%.

**Tabel 5.1.17 DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Penyaluran Tahun Berjalan	166.605.000	Perpres 201 Tahun 2024
2	Penyaluran Melalui TDF	1.000	KMK 44/KM.7/2024
Total		166.606.000	



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

i) DBH Sawit

Rp906.874.000

Realisasi DBH Sawit TA 2025 sebesar Rp906.874.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp906.874.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.812.435.000, realisasi DBH Sawit berkurang Rp905.561.000 atau turun 49,96%.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp1.146.642.838.212

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 sebesar Rp1.146.642.838.212 atau 98,24% dari target sebesar Rp1.167.199.457.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.146.248.432.968, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp394.405.244 atau naik 0,03%.

Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari :

a) Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Realisasi Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp809.039.537.900,- atau 99,99% dari target. Realisasi ini tidak tercapai 100% diakibatkan adanya pemotongan dikarenakan terdapat sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) sebesar Rp79.723.100,- tahun sebelumnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.18 Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Tahun 2025

Jenis	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyaluran 2025 (Rp)	%	Sisa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Belanja 2025 (Rp)	Sisa di RKUD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6
DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah	218.133.328.000	197.656.432.312	90,61%	0	196.636.648.162	1.019.784.150
DAU Dukungan Bidang Pendidikan	94.757.611.000	94.757.611.000	100%	1.022.060	90.254.477.940	4.504.155.120
DAU Dukungan Bidang Kesehatan	45.189.257.000	45.189.257.000	100%	547.000.766	45.351.472.687	384.785.079
TOTAL	358.080.196.000	337.603.300.312	94,28%	548.022.826	332.242.598.789	5.908.724.349

Tidak tercapainya target realisasi Dana Alokasi Umum disebabkan adanya Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah, yaitu akibat Pengangkatan dan penggajian PPPK tahun 2025 hanya sebanyak 11.265 orang sebesar



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Rp196.636.648.162 tidak sesuai dengan KMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebanyak 11.737 orang sebesar Rp218.133.328.000.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) **Rp1.265.613.302.359**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 sebesar Rp1.265.613.302.359 atau 103,02% dari target sebesar Rp1.228.503.948.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.212.441.264.199, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp53.172.038.160 atau naik 4,39%. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

a) DAK Fisik **Rp119.572.322.275**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 sebesar Rp119.572.322.275 atau 97,04% dari target sebesar Rp123.222.552.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp151.638.021.459, realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik berkurang Rp32.065.699.184 atau turun 21,15%.

Realisasi DAK Fisik diterima dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah secara bertahap dan sekaligus berdasarkan PMK 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Tidak tercapainya target DAK Fisik disebabkan penyaluran dilakukan berdasarkan nilai yang sudah terkontrak dan efisiensi.

Tabel 5.1.19 Rekapitulasi DAK Fisik Tahun 2025

Sub Bidang	Anggaran	Realisasi Penyaluran	%	Realisasi Belanja	Sisa TA 2025
1	2	3	4	5	6=3-5
Sekolah Menengah Kejuruan (SMA)	1.086.762.000	1.054.316.024	97,01%	1.054.316.024	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	115.251.140.000	111.826.814.186	97,03%	109.740.507.413	2.086.306.773
Sekolah Luar Biasa (SLB)	2.182.150.000	2.173.165.545	99,59%	2.161.965.545	11.200.000
DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan (RSUD Banten dan RSUD Malingping)	4.702.500.000	4.518.026.520	96,08%	4.518.026.520	0
Jumlah	123.222.552.000	119.572.322.275	97,04%	117.474.815.502	2.097.506.773

b) DAK Non Fisik **Rp1.146.040.980.084**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 sebesar Rp1.146.040.980.084 atau 103,69% dari target sebesar Rp1.105.281.396.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.060.803.242.740, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik bertambah Rp85.237.737.344 atau naik 8,04%. Tahapan dan Realisasi DAK Non Fisik terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.20 DAK Non Fisik Tahun 2025

DAK Non Fisik	Sisa Dana di RKUD 2024 dan di Bendahara BOS	Anggaran 2025	Potongan	Realisasi Transfer/ Penyaluran dari pusat	Pengembalian atas TGR	%	Realisasi (penyerapan) Belanja	Sisa Dana di RKUD 2025 dan di Bendahara BOS
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8	9=(2+5)-8
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.105.550.130	778.812.926.000	0	776.705.666.873	23.641.400	99,73%	775.037.350.810	2.797.507.593
DAK Non Fisik-TPG PNSD	6.929.586.432	293.771.347.000	0	337.246.437.300		114,80%	341.826.649.992	2.349.373.740
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	107.953.101	1.295.750.000	0	1.082.000.000		83,50%	1.189.000.000	953.101
DAK Non Fisik-TKG PNSD	41.167.933	755.182.000	0	735.960.300		97,45%	774.163.900	2.964.333
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	123.759.272	18.569.584.000	123.759.272	18.445.824.728		99,33%	18.544.579.553	25.004.447
DAK Non Fisik-PK2UKM	267.930.048	6.694.587.000	267.930.048	6.426.656.952		96,00%	6.093.293.000	601.294.000
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0	4.640.000.000	0	4.640.000.000		100,00%	2.371.426.704	2.268.573.296
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	7.227.469	400.660.000	7.227.469	393.432.531		98,20%	266.754.887	133.905.113
DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	200.000.000	0	200.000.000		100,00%	184.669.108	15.330.892
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0	141.360.000	0	141.360.000		100,00%	130.720.000	10.640.000
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	79.723.100	0	79.723.100	0		0,00%	0	0
Jumlah	8.662.897.485	1.105.281.396.000	478.639.889	1.146.017.338.684	23.641.400	103,69%	1.146.418.607.954	8.205.546.515

Penjelasan rincian realisasi DAK Non Fisik sebagai berikut:

- (1) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp337.246.437.300 atau 114,80% dari target sebesar Rp293.771.347.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp273.356.152.600, bertambah Rp63.890.284.700 atau naik 23,37%.
- (2) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp735.960.300 atau 97,45% dari target sebesar Rp755.182.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp495.153.000, bertambah Rp240.807.300 atau naik 48,63%.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

(3) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.082.000.000 atau 83,50% dari target sebesar Rp1.295.750.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.642.599.000, berkurang Rp560.599.000 atau turun 34,13%.

(4) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebesar Rp762.050.416.873 atau 99,73% dari target sebesar Rp764.157.676.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp761.603.210.805 bertambah Rp470.847.468 atau naik 0,06% dari tahun sebelumnya.

Dan terdapat Penerimaan TGR an. Muksin SMKN 13 Pandeglang Rp10.500.000, STS tahun berjalan SMAN 2 Kota Serang Rp13.138.500 dan koreksi tambah SKH 3 Lebak Rp2.900, dengan total Rp23.641.400.

(5) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2024 atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebesar Rp14.655.250.000 atau 100,00% dari target. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.431.250.000. meningkat sebesar Rp1.224.000.000 atau berkurang 9,11%.

(6) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp6.426.656.952 atau 96,00% dari target sebesar Rp6.694.587.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.161.338.724 bertambah Rp4.265.318.228 atau 197,35%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp267.930.048 atas sisa salur tahun 2024.

(7) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp393.432.531 atau 98,20% dari target sebesar Rp400.660.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp316.551.566 menurun sebesar Rp76.880.965 atau 24,29%. Tidak maksimalnya penyaluran karena adanya pemotongan sebesar Rp7.227.469 atas sisa salur tahun 2024.

(8) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp4.640.000.000 atau 100,00% dari target.

(9) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp200.000.000 atau 100,00% dari target.

(10) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp141.360.000 atau 100,00% dari target.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

(11) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 bahwa Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Banten tidak mendapatkan alokasi anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal tetapi masih terdapat sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp79.723.100 di RKUD, sehingga terbit KMK Nomor 43 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa dilakukan pemotongan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Bulan Oktober sebesar Rp79.723.100 atas sisa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal TA. 2025 tersebut.

(12) Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik TA. 2025 atas Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp18.544.579.553 atau 99,33% dari target sebesar Rp18.445.824.728. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.470.070.245 atau menurun sebesar 146,93%. Tidak maksimalnya penyaluran tahun 2025 karena adanya pemotongan atas sisa salur pada tahun 2024 sebesar Rp123.759.272.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya **Rp6.489.293.000**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya TA 2025 sebesar Rp6.489.293.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.489.293.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp19.619.982.000, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berkurang Rp13.130.689.000 atau turun 66,93%. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya seluruhnya berupa Dana insentif Fiskal.

Secara ringkas, perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Dana Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)	Sisa Dana di RKUD
Insentif Fiskal	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)	17.659.276
JUMLAH	6.489.293.000	6.489.293.000	100,00	19.619.982.000	(66,93)	17.659.276

Dana Insentif Fiskal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah Dana Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya yang berdasarkan Pasal 8 ayat 2 PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah bahwa indikator kinerja yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah
2. Pelayanan Umum Pemerintahan
3. Pelayanan Dasar

Yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp6.383.604.000

Rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp6.383.604.000 atau 100,58% dari target sebesar Rp6.346.763.490 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.430.560.000, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat penurunan Rp46.956.000 atau berkurang 0,73%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Realisasi Hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp6.383.604.000.

5.1.2. Belanja dan Transfer

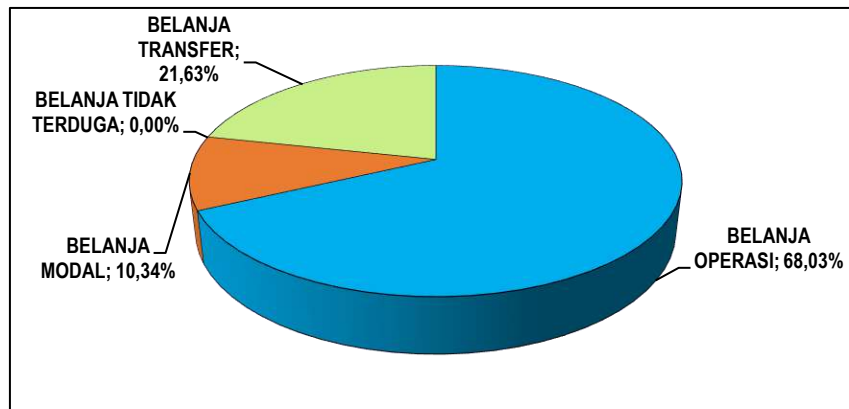
Rp10.010.940.346.291

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebesar Rp10.010.940.346.291 atau 92,92% dari target sebesar Rp10.773.538.029.147 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.907.894.911.581, realisasi Belanja dan Transfer terdapat penurunan Rp1.896.954.565.290 atau berkurang 15,93%. Secara ringkas Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
BELANJA OPERASI	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562	(5,04)
BELANJA MODAL	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508	(8,45)
BELANJA TAK TERDUGA	32.756.687.505	-	0,00	75.000.000	(100,00)
BELANJA TRANSFER	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)
JUMLAH	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581	(15,93)

Grafik 5.1.2 Komposisi Belanja dan Transfer TA 2025



Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja dan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Rp6.810.065.159.831

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp6.810.065.159.831 atau 95,42% dari target sebesar Rp7.137.130.606.275 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.171.859.660.562, realisasi Belanja Operasi berkurang Rp361.794.500.732 atau turun 5,04%. Secara ringkas perbandingan Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242	10,84
Belanja Barang dan Jasa	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502	(4,00)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bunga	-	-	0,00	1.029.672.328	(100,00)
Belanja Hibah	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012	(47,46)
Belanja Bantuan Sosial	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478	(12,32)
JUMLAH	7.137.130.606.275	6.810.065.159.831	95,42	7.171.859.660.562	(5,04)

Adapun penjelasan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rp2.646.806.177.534

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp2.646.806.177.534 atau 98,21% dari target sebesar Rp2.695.013.553.512 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242, realisasi Belanja Pegawai bertambah Rp258.950.423.292 atau naik 10,84%.

Pada tahun 2025, terdapat pengalihan kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN ke kode rekening belanja tambahan penghasilan ASN.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Pegawai 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.031.059.940.543	994.346.146.816	96,44	802.999.872.291	23,83
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.470.700.106.335	1.462.633.081.415	99,45	1.058.296.870.636	38,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	0,00	391.251.955.793	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	128.645.892.489	127.216.268.244	98,89	90.446.260.739	40,65
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.845.241.641	1.687.001.656	91,42	1.251.132.000	34,84
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	11.243.187.359	9.566.892.900	85,09	12.917.398.500	(25,94)
Belanja Pegawai BLUD	51.519.185.145	51.356.786.503	99,68	30.692.264.283	67,33
JUMLAH	2.695.013.553.512	2.646.806.177.534	98,21	2.387.855.754.242	10,84

Kenaikan belanja pegawai sebesar 10,84% diantaranya disebabkan karena:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan disebabkan adanya Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025 .
2. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota dewan sebanyak 15 orang. Yaitu dari periode 2019 s.d 2024 sebanyak 85 orang dan periode 2025 s.d 2029 sebanyak 100 orang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

3. Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH disebabkan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif pada tahun 2025.
4. Terdapat kenaikan pada Belanja Pegawai BLUD dikarenakan pada tahun 2025 belanja pegawai honorer periode Januari sampai dengan Juli yang semula bersumber dana APBD beralih ke sumber dana BLUD. Setelah pangangkatan status menjadi PPPK maka Periode Agustus sampai dengan Desember belanja pegawai bersumber dana DAU.

Kurang optimalnya realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH disebabkan biaya penunjang operasional KDH dan WKDH dihitung berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp3.612.190.835.012

Belanja Barang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp3.612.190.835.012 atau 93,01% dari target sebesar Rp3.883.634.692.693 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.762.827.581.502, realisasi Belanja Barang dan Jasa berkurang Rp150.636.746.491 atau turun 4,00%.

Termasuk dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 adalah Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp61.997.830.179 terdiri dari:

1) Peralatan dan Mesin	Rp	1.323.916.512
Terdiri dari:		
a) Atribusi	Rp	9.975.000
b) Kapitalisasi	Rp	1.313.941.512
2) Gedung dan Bangunan	Rp	58.415.475.156
Terdiri dari:		
a) Atribusi	Rp	28.330.000
b) Kapitalisasi	Rp	58.387.145.156
3) Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.149.441.011
4) Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	Rp	7.830.000
5) Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	709.356.600
6) Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	391.810.900

Secara ringkas, perbandingan Belanja Barang dan Jasa 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang	1.140.652.576.178	1.087.176.991.796	95,31	1.033.034.186.729	5,24
Belanja Jasa	1.654.592.310.034	1.505.623.672.416	91,00	1.746.148.002.634	(13,77)
Belanja Pemeliharaan	248.334.211.683	231.821.079.954	93,35	235.104.649.989	(1,40)
Belanja Perjalanan Dinas	231.206.802.300	204.886.719.835	88,62	265.476.636.938	(22,82)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.158.200.000	102.605.675.360	91,48	26.930.389.104	281,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	280.655.401.427	264.039.976.675	94,08	285.938.548.010	(7,66)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	216.035.191.071	216.036.718.976	100,00	170.195.168.099	26,93
JUMLAH	3.883.634.692.693	3.612.190.835.012	93,01	3.762.827.581.502	(4,00)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Rp1.087.176.991.796

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp1.087.176.991.796 atau 95,31% dari target sebesar Rp1.140.652.576.178 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.033.034.186.729, realisasi Belanja Barang bertambah Rp54.142.805.067 atau naik 5,24%. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Pakai Habis	1.140.030.122.178	1.086.637.761.696	95,32	1.031.785.146.729	5,32
Belanja Barang Tak Pakai Habis	622.454.000	539.230.100	86,63	1.204.075.000	(55,22)
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	0,00	44.965.000	(100,00)
JUMLAH	1.140.652.576.178	1.087.176.991.796	95,31	1.033.034.186.729	5,24

Adapun rincian dari Belanja Barang Pakai Habis dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.707.446.240	4.827.933.186	84,59
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.324.770.100	2.244.756.591	96,56
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.829.111.940	11.076.845.246	86,34
Belanja Bahan-Bahan Baku	85.157.000	68.160.750	80,04
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	799.460.200	777.505.195	97,25
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.148.749.000	828.422.008	72,12
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	921.753.097	804.828.727	87,32
Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	242.019.000	139.132.800	57,49
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.433.000	7.160.180	84,91
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	391.212.200	373.299.200	95,42
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	43.714.000	43.190.150	98,80
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	29.708.118.266	29.574.853.077	99,55
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.499.436.023	3.486.332.467	99,63
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.288.000	6.141.550	84,27
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	567.783.000	478.640.877	84,30
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	20.508.800	19.173.135	93,49
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.846.000	3.826.500	99,49
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.632.061.862	44.430.331.712	89,52
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.287.881.350	7.770.650.449	93,76
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.299.783.250	6.905.342.341	94,60
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	833.420.300	646.297.325	77,55
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.006.021.612	10.167.002.462	92,38
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.396.180.565	7.661.098.640	91,25
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.587.948.029	4.299.075.250	93,70
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.168.298.000	4.866.374.887	94,16
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.329.217.000	3.241.402.319	97,36
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	14.168.308.900	12.486.911.925	88,13
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	807.865.000	739.423.158	91,53
Belanja Obat-Obatan-Obat	33.594.263.718	33.346.784.042	99,26
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	70.303.000	69.690.073	99,13
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	172.763.522.472	165.295.356.932	95,68
Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	562.832.114.158	543.904.545.814	96,64
Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.723.616.846	16.608.830.310	93,71
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.439.864.000	2.104.231.655	86,24
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	607.471.000	591.702.460	97,40
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.506.328.250	35.739.046.031	90,46



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	101.262.513.000	99.575.317.429	98,33
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	23.922.619.000	19.365.915.450	80,95
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.360.025.000	2.003.342.036	84,89
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.490.570.000	3.286.725.493	94,16
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	333.500.000	260.128.500	78,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	474.088.000	403.963.800	85,21
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.651.073.000	1.567.513.831	94,94
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	146.305.000	143.605.939	98,16
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	233.192.000	202.980.000	87,04
Belanja Pakaian KORPRI	20.350.000	13.261.892	65,17
Belanja Pakaian Adat Daerah	558.260.000	412.622.000	73,91
Belanja Pakaian Batik Tradisional	920.415.000	745.641.439	81,01
Belanja Pakaian Olahraga	3.293.937.000	3.022.444.463	91,76
JUMLAH	1.140.030.122.178	1.086.637.761.696	95,32

Adapun rincian dari Belanja Barang Tak Pakai Habis dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 5.1.28 Rincian Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	521.404.000	438.460.000	84,09
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	101.050.000	100.770.100	99,72
JUMLAH	622.454.000	539.230.100	86,63

2) Belanja Jasa

Rp1.505.623.672.416

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp1.505.623.672.416 atau 91,00% dari target sebesar Rp1.654.592.310.034 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.746.148.002.634, realisasi Belanja Jasa berkurang Rp240.524.330.217 atau turun 13,77%. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29 Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Jasa Kantor	1.120.492.423.914	994.846.904.394	88,79	1.192.914.558.892	(16,60)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	404.509.485.160	398.590.812.514	98,54	393.784.764.965	1,22
Belanja Sewa Tanah	131.553.000	108.051.000	82,13	-	0,00



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.516.825.400	10.722.711.147	85,67	14.948.742.132	(28,27)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.372.841.360	18.765.385.366	87,80	25.743.939.457	(27,11)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.188.201.000	1.139.657.345	95,91	1.401.198.388	(18,67)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	23.854.037.600	22.752.289.326	95,38	13.735.723.230	65,64
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	27.011.219.500	23.683.985.899	87,68	50.770.553.493	(53,35)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	0,00	5.130.115.550	(100,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.975.259.000	14.143.499.310	67,43	11.490.784.363	23,09
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	22.540.344.100	20.870.376.115	92,59	35.833.022.164	(41,76)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	120.000	-	0,00	394.600.000	(100,00)
JUMLAH	1.654.592.310.034	1.505.623.672.416	91,00	1.746.148.002.634	(13,77)

Peningkatan Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar 65,64% antara lain dipengaruhi oleh naiknya Belanja Modal untuk pembangunan gedung dan bangunan tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sehingga kebutuhan akan perencanaan dan pengawasan yang biasanya menyertai kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi bertambah.

Kurang Optimalnya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan fasilitas internal, metode pelatihan blended learning serta penyesuaian kebutuhan peserta dan narasumber yang berdampak pada pengurangan biaya operasional.

Adapun rincian dari Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Rincian Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.583.670.000	45.994.179.500	84,26
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.866.700.000	5.255.615.000	89,58
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	614.800.000	614.800.000	100,00



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.883.560.000	5.459.747.334	92,80
Honorarium Rohaniwan	56.400.000	22.000.000	39,01
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	578.220.000	549.370.000	95,01
Honorarium Penyelenggara Ujian	132.750.000	129.250.000	97,36
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000	10.000.000	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.254.675.000	6.904.130.000	74,60
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	693.400.000	667.300.000	96,24
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	417.265.178.760	351.650.256.740	84,28
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	81.155.273.504	79.962.721.482	98,53
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.931.015.120	1.825.176.189	94,52
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.893.544.000	23.366.771.000	97,80
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.217.400.000	6.083.070.000	97,84
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	98.000.000	98.000.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.931.540.000	2.831.915.000	96,60
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	327.450.000	327.450.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.534.400.000	1.184.225.000	77,18
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.123.200.000	3.270.354.272	79,32
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.253.620.000	74.090.957.500	94,68
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	911.334.000	847.430.000	92,99
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.008.653.658	50.421.837.275	96,95
Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.741.185.000	41.862.734.675	91,52
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.181.568.000	54.574.652.858	90,68
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.672.776.460	52.720.935.213	89,86
Belanja Jasa Tenaga Supir	5.306.680.000	4.621.475.000	87,09
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.700.000.000	2.326.789.400	86,18
Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	118.000.000	118.000.000	100,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	2.562.000.000	2.262.400.000	88,31
Belanja Jasa Tata Rias	100.002.000	99.465.000	99,46
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.604.000.000	5.307.500.000	94,71
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.642.000	7.603.500	99,50
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	774.000.000	773.451.522	99,93
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	17.000.000	17.000.000	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	550.000.000	546.064.500	99,28
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.466.163.965	11.674.938.597	93,65
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	171.050.000	142.205.800	83,14
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	459.580.000	390.692.983	85,01
Belanja Jasa Kalibrasi	613.703.000	500.857.693	81,61



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.423.715.158	1.135.945.714	79,79
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	655.364.000	580.215.255	88,53
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	225.986.120	9.603.264	4,25
Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	58.927.057.000	55.129.507.903	93,56
Belanja Tagihan Telepon	1.161.652.000	597.223.416	51,41
Belanja Tagihan Air	493.272.775	392.769.724	79,63
Belanja Tagihan Listrik	43.876.499.565	36.933.598.940	84,18
Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.408.341.600	2.136.732.903	88,72
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	21.368.072.929	18.449.441.459	86,34
Belanja Paket / Pengiriman	2.644.723.000	2.277.480.796	86,11
Belanja Penambahan Daya	37.503.000	12.501.000	33,33
Belanja Registrasi / Keanggotaan	1.307.682.000	1.150.538.300	87,98
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	827.537.800	486.200.080	58,75
Belanja Pengolahan Air Limbah	57.059.000	57.014.929	99,92
Belanja Lembur	2.323.345.000	1.859.401.000	80,03
Belanja Medical Check Up	485.000.000	396.362.900	81,72
Belanja Sewa Jasa Internet	3.180.908.000	2.892.869.678	90,94
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33.672.770.500	30.297.376.100	89,98
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.045.800.000	538.798.000	51,52
JUMLAH	1.120.492.423.914	994.846.904.394	88,79

Dalam Belanja Jasa Kantor termasuk didalamnya Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan yang merupakan biaya pengelolaan pinjaman ke-6 tahun 2025 kepada PT. SMI sebesar Rp774.000.000, sedangkan tahun 2024 dianggarkan pada kode rekening Belanja Bunga dengan realisasi sebesar Rp1.029.672.328.

3) Belanja Pemeliharaan **Rp231.821.079.954**

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp231.821.079.954 atau 93,35% dari target sebesar Rp248.334.211.683 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp235.104.649.989, realisasi Belanja Pemeliharaan berkurang Rp3.283.570.035 atau turun 1,40%. Rincian Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.31 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Tanah	5.483.767.500	5.428.849.000	99,00	13.359.775.175	(59,36)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.017.398.600	55.711.889.622	88,41	56.125.346.541	(0,74)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.898.848.074	75.298.814.367	93,08	60.082.596.101	25,33
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.886.197.509	95.351.782.965	96,43	105.487.242.888	(9,61)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48.000.000	29.744.000	61,97	49.689.284	(40,14)
JUMLAH	248.334.211.683	231.821.079.954	93,35	235.104.649.989	(1,40)

Pada tahun 2025, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar 25,33%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp32.533.158.727,83 yang dialokasikan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten diantaranya untuk Kantin, Gudang APK, Partisi Dinding (Lantai 1, 2 dan 3), Ruang Paripurna (Lantai 1 dan 2), Pagar dan Pos Jaga, dan Ruang Komisi 1 sampai dengan Komisi 5.
2. Pada Dinas Sosial sebesar Rp3.815.210.632,72 yang dialokasikan untuk Gedung kantor induk pada ruangan pada bidang perlindungan sosial, ruangan pada UPTD Perlindungan sosial (seperti Wisma Isolasi/Bayi, Gudang, Kantor Utama, Wisma Anak, Mushola, Pos Satpam, Dapur Umum, Wisma Mawar dan Wisma Melati), dan ruangan pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial untuk gedung pendidikan (ruang kelas A, B, C dan ruang seksi penerimaan dan penyaluran).
3. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.191.465.726,31 yang dialokasikan diantaranya untuk Pemeliharaan lobby, lapangan, ruang server, pagar dan jaringan air bersih.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Rp204.886.719.835

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp204.886.719.835 atau 88,62% dari target sebesar Rp231.206.802.300 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp265.476.636.938, realisasi Belanja Perjalanan Dinas berkurang Rp60.589.917.103 atau turun 22,82%.

Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 seluruhnya merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Tidak optimalnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 disebabkan terdapat efisiensi anggaran tahun 2025.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp102.605.675.360**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp102.605.675.360 atau 91,48% dari target sebesar Rp112.158.200.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp26.930.389.104, realisasi Belanja Uang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat bertambah Rp75.675.286.256 atau naik 281,00%.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 terdiri dari:

1) Hadiah Perlombaan	Rp	1.109.500.000
2) Penghargaan atas Prestasi	Rp	7.937.170.360
3) Beasiswa	Rp	93.559.005.000

Belanja Beasiswa terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.405.000 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp93.538.600.000. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang diberikan untuk:

1) Program Sekolah Gratis untuk SMA Swasta	Rp	13.530.600.000
2) Program Sekolah Gratis untuk SMK Swasta	Rp	74.376.820.000
3) Program Sekolah Gratis untuk SKH Swasta	Rp	5.631.180.000

6) Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp264.039.976.675

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp264.039.976.675 atau 94,08% dari target sebesar Rp280.655.401.427 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp285.938.548.010, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP berkurang Rp21.898.571.335 atau turun 7,66%.

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp216.036.718.976

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp216.036.718.976 atau 100,00% dari target sebesar Rp216.035.191.071 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp170.195.168.099, realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD bertambah Rp45.841.550.877 atau naik 26,93%.

c. Belanja Bunga Rp0

Tidak ada realisasi Belanja Bunga pada tahun 2025, disebabkan biaya pengelolaan pinjaman pada PT. SMI dialihkan penganggarannya ke kode rekening Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan.

d. Belanja Hibah Rp513.376.712.647

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOS, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp513.376.712.647 atau 98,60% dari target sebesar Rp520.643.952.320 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp977.158.618.012, realisasi Belanja Hibah berkurang Rp463.781.905.365 atau turun 47,46%.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.734.009.500	53.068.193.359	93,54	429.040.590.380	(87,63)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.301.000.000	35.233.144.026	97,06	124.641.687.161	(71,73)
Belanja Hibah Dana BOS	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000	30.500.640.000	100,00	28.774.909.666	6,00
Belanja Hibah Dana BOSP	130.300.858.000	134.021.623.121	102,86	-	0,00
JUMLAH	520.643.952.320	513.376.712.647	98,60	977.158.618.012	(47,46)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp53.068.193.359

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat merupakan Hibah yang diberikan kepada satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten yang berupa uang dan barang.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp53.068.193.359 atau 93,54% dari target sebesar Rp56.734.009.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp429.040.590.380, realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat berkurang Rp375.972.397.021 atau turun 87,63%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.245.189.000	15.135.661.455	99,28	394.679.209.875	(96,17)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	41.488.820.500	37.932.531.904	91,43	34.361.380.505	10,39
JUMLAH	56.734.009.500	53.068.193.359	93,54	429.040.590.380	(87,63)

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 15.135.661.455

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp15.135.661.455 atau 99,28% dari target sebesar Rp15.245.189.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp394.679.209.875, realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat berkurang Rp379.543.548.420 atau turun 96,17%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.34 Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten	-	-	0,00	287.120.264.000	(100,00)
Badan Narkotika Nasional Provinsi banten	3.500.000.000	3.453.972.469	98,68	749.128.125	361,07
Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	6.454.339.000	6.397.652.800	99,12	31.000.000.000	(79,36)
Kepolisian Daerah (POLDA) Metro Jaya	-	-	0,00	6.415.678.000	(100,00)
Satgas Andalas Bais TNI	300.000.000	300.000.000	100,00	-	0,00
Komando Pasukan Khusus Grup I	500.000.000	500.000.000	100,00	1.819.421.750	(72,52)
Komando Resort Militer 052/Wijayakrama	400.000.000	399.999.900	99,99	3.000.000.000	(86,67)
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	6.265.770.000	(84,04)
Detasemen Polisi Militer III/4	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	750.000.000	33,33
Pangkalan TNI AL Banten	400.000.000	400.000.000	100,00	1.000.000.000	(60,00)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten	1.454.420.000	1.447.606.286	99,53	55.558.948.000	(97,39)
Komando Daerah Militer III/Siliwangi Detasemen Intelijen	-	-	0,00	1.000.000.000	(100,00)
SUBKOGARTAP 0623 / CILEGON	236.430.000	236.430.000,00	100,00	-	0,00
Jumlah	15.245.189.000	15.135.661.455	99,28	394.679.209.875	(96,17)

Penurunan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2025 terbesar pada Belanja Hibah untuk KPU. Hal ini dikarenakan telah selesainya kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2024. Sedangkan kenaikan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 terbesar pada Belanja Hibah untuk BNN. Hal ini dalam rangka mendukung kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Rincian penerima Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.1 CaLK**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.932.531.904

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp37.932.531.904 atau 91,43% dari target sebesar Rp41.488.820.500 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.361.380.505, realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat bertambah Rp3.571.151.399 atau naik 10,39%.

Rincian perbandingan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten	16.599.946.000	15.617.312.717	94,08	11.491.934.541	35,90
Polda Banten	-	-	0,00	3.209.550.000	(100,00)
Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf	-	-	0,00	2.898.104.575	(100,00)
Grup 1 Kopassus	300.000.000	296.109.100	98,70	3.202.261.800	(90,75)
Kementerian Agama	-	-	0,00	9.664.699.000	(100,00)
BPK Perwakilan Provinsi Banten	13.385.250.500	12.624.003.975	94,31	3.894.830.589	224,12
Badan Intelijen Daerah Banten/ Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten	9.800.000.000	8.031.846.112	81,96	-	0,00
Brimob Banten	1.403.624.000	1.363.260.000	97,12	-	0,00
Jumlah	41.488.820.500	37.932.531.904	91,43	34.361.380.505	10,39

Alokasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 digunakan untuk:

1. Pada Kejaksaan Tinggi Banten, pembangunan peningkatan infrastruktur layanan berupa pembebasan lahan dan pembangunan gedung TK Adhyaksa, gedung tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta pendopo Kejaksaan Tinggi Banten.
2. Pada BPK Perwakilan Provinsi Banten, pembangunan mess BPK tahap II;
3. Pada Grup 1 Koppasus, renovasi Lapangan Tenis Grup 1 Kopassus;
4. Pada Badan Intelijen Daerah Banten/ Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten, Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap I;
5. Brimob Banten, Pembangunan Gedung PPID Satuan Brimob Polda Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Rincian penerima Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 6.2 CALK**.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia **Rp35.233.144.026**

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp35.233.144.026 atau 97,06% dari target sebesar Rp36.301.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp124.641.687.161, realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berkurang Rp89.408.543.135 atau turun 71,73%.

Tabel 5.1.36 Belanja Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.251.000.000	34.183.942.842	96,97	69.424.687.714	(50,76)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	0,00	52.581.675.000	(100,00)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.050.000.000	1.049.201.184	99,92	2.635.324.447	(60,19)
JUMLAH	36.301.000.000	35.233.144.026	97,06	124.641.687.161	(71,73)

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 6.3 CALK**.

Pada tahun 2024 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar adalah belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) / Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Pada Tahun 2025 Belanja Hibah tersebut dianggarkan pada kode rekening sub rincian objek Belanja Beasiswa rekening jenis Belanja Barang dan Jasa.

Rincian penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 6.4 CALK**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

3) Belanja Hibah Dana BOS

Rp260.553.112.141

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2025 sebesar Rp260.553.112.141 atau 97,66% dari target sebesar Rp266.807.444.820 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp394.701.430.805, realisasi Belanja Hibah Dana BOS berkurang Rp134.148.318.664 atau turun 33,99%.

Penurunan belanja Hibah Dana BOS dikarenakan beralihnya alokasi belanja Hibah Dana Bos untuk SMA dan SKH Swasta ke sub kode rekening belanja Hibah Dana BOSP-BOS. Pada Tahun 2025, belanja hibah dana BOS hanya dialokasikan untuk belanja hibah bos kepada SMK Swasta.

Secara ringkas Realisasi Belanja Hibah Dana BOS 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.37 Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	15.123.600.000	13.985.441.000	92,47	22.839.855.900	(38,77)
Kabupaten Pandeglang	19.370.800.000	18.281.208.500	94,38	29.088.742.980	(37,15)
Kota Cilegon	11.060.890.000	10.866.486.068	98,24	36.799.960.200	(70,47)
Kota Serang	10.181.004.820	9.442.800.000	92,75	120.938.380.446	(92,19)
Kabupaten Serang	26.768.640.000	24.318.511.706	90,85	16.062.490.550	51,40
Kabupaten Tangerang	82.245.720.000	81.522.425.870	99,12	13.565.296.455	500,96
Kota Tangerang	56.833.290.000	56.329.064.900	99,11	85.887.431.735	(34,42)
Kota Tangerang Selatan	45.223.500.000	45.807.174.097	101,29	69.519.272.539	(34,11)
Jumlah	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)

Tabel diatas merupakan Belanja Hibah Dana BOS berdasarkan kabupaten/kota. Lebih rinci lagi, Belanja Hibah Dana BOS dibedakan kepada tujuan penerimanya, yakni Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.38 Belanja Hibah Dana Bos Tahun 2025 dan 2024 berdasarkan kode rekening per Kabupaten/Kota

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	368.346.432.146	(29,26)
Kabupaten Lebak	15.123.600.000	13.985.441.000	92,47	20.599.455.900	(32,11)
Kabupaten Pandeglang	19.370.800.000	18.281.208.500	94,38	23.819.492.980	(23,25)
Kota Cilegon	11.060.890.000	10.866.486.068	98,24	35.119.960.200	(69,06)
Kota Serang	10.181.004.820	9.442.800.000	92,75	115.792.869.656	(91,85)
Kabupaten Serang	26.768.640.000	24.318.511.706	90,85	15.080.340.550	61,26
Kabupaten Tangerang	82.245.720.000	81.522.425.870	99,12	12.448.955.586	554,85



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	NAIK /(TURUN)
Kota Tangerang	56.833.290.000	56.329.064.900	99,11	80.805.371.735	(30,29)
Kota Tangerang Selatan	45.223.500.000	45.807.174.097	101,29	64.679.985.539	(29,18)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	-	-	26.354.998.659	(100,00)
Kabupaten Lebak	-	-	-	2.240.400.000	(100,00)
Kabupaten Pandeglang	-	-	-	5.269.250.000	(100,00)
Kota Cilegon	-	-	-	1.680.000.000	(100,00)
Kota Serang	-	-	-	5.145.510.790	(100,00)
Kabupaten Serang	-	-	-	982.150.000	(100,00)
Kabupaten Tangerang	-	-	-	1.116.340.869	(100,00)
Kota Tangerang	-	-	-	5.082.060.000	(100,00)
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	4.839.287.000	(100,00)
Total	266.807.444.820	260.553.112.141	97,66	394.701.430.805	(33,99)

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 6.5 CALK**.

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik **Rp30.500.640.000**

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 sebesar Rp30.500.640.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp30.500.640.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp28.774.909.666, realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertambah Rp1.725.730.334 atau naik 6,00%.

Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.39 Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 Kepada Partai Politik

URAIAN	Jumlah Per Suara Sah	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Partai Demokrat Provinsi Banten	586.689	2.933.445.000	2.933.445.000,00	100	2.758.668.333	6,34
DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	886.432	4.432.160.000	4.432.160.000	100	4.498.028.333	(1,46)
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Banten	932.670	4.663.350.000	4.663.350.000	100	4.020.596.667	15,99



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	Jumlah Per Suara Sah	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Banten	-	-	-	0,00	446.263.333	(100,00)
DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Banten	525.069	2.625.345.000	2.625.345.000	100,00	1.799.991.667	45,85
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten	217.762	1.088.810.000	1.088.810.000	100,00	852.295.000	27,75
DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten	853.565	4.267.825.000	4.267.825.000	100,00	4.324.801.667	(1,32)
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten	442.724	2.213.620.000	2.213.620.000	100,00	1.863.690.000	18,78
DPW Partai Berkarya Banten	-	-	-	0,00	608.263.333	(100,00)
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten	773.102	3.865.510.000	3.865.510.000	100,00	3.492.276.333	10,69
DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten	566.720	2.833.600.000	2.833.600.000	100,00	2.432.930.000	16,47
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten	315.395	1.576.975.000	1.576.975.000	100,00	1.677.105.000	(5,97)
JUMLAH	6.100.128	30.500.640.000	30.500.640.000	100,00	28.774.909.666	6,00

Rincian penerima Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 6.6 CALK**.

5) Belanja Hibah Dana BOSP

Rp134.021.623.121

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP TA 2025 sebesar Rp134.021.623.121 atau 102,86% dari target sebesar Rp130.300.858.000.

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS terdiri dari belanja hibah kepada SMA dan SKH Swasta, yang pada tahun 2024 direalisasikan pada kode rekening objek Belanja Hibah Bos.

Tabel 5.1.40 Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 Dana BOSP per Kabupaten/Kota

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Lebak	6.823.458.000	6.882.958.000	100,87	-	100
Kabupaten Pandeglang	9.553.000.000	9.909.483.037	103,73	-	100
Kota Cilegon	4.588.660.000	4.782.725.000	104,23	-	100
Kota Serang	3.156.000.000	3.243.945.313	102,79	-	100
Kabupaten Serang	10.615.750.000	11.070.216.530	104,28	-	100
Kabupaten Tangerang	39.633.800.000	40.378.152.647	101,88	-	100



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kota Tangerang	29.800.710.000	30.801.489.931	103,36	-	100
Kota Tangerang Selatan	26.085.340.000	26.952.652.663	103,32	-	100
SKH Swasta di provinsi banten	44.140.000	-	0,00	-	100
Jumlah	130.300.858.000	134.021.623.121	102,86	-	100

Rincian sekolah penerima Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dapat dilihat pada **Lampiran 6.7 CALK**.

e. Belanja Bantuan Sosial

Rp37.691.434.638

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp37.691.434.638 atau 99,61% dari target sebesar Rp37.838.407.750 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp42.988.034.478, realisasi Belanja Bantuan Sosial berkurang Rp5.296.599.840 atau turun 12,32%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bantuan Sosial 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.41 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.100.000.000	1.096.499.850	99,68	10.588.034.478	(89,64)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	36.738.407.750	36.594.934.788	99,61	32.400.000.000	12,95
JUMLAH	37.838.407.750	37.691.434.638	99,61	42.988.034.478	(12,32)

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.096.499.850 seluruhnya merupakan Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial. Belanja bantuan sosial terdiri dari:
 - a. Bantuan kepada 600 orang Anak Terlantar dengan total sebesar Rp298.500.120 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 780 gram;
 - b. Bantuan kepada 1.000 orang Lanjut Usia Terlantar dengan total sebesar Rp499.499.610 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 600 gram; dan
 - c. Bantuan kepada 600 orang Penyandang Disabilitas dengan total sebesar Rp298.500.120 masing-masing berupa beras sebanyak 25 kg dan susu sebanyak 780 gram.

Rincian lebih lanjut sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.42 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Anak Terlantar Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kota Cilegon	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
2	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
3	Kab. Serang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
4	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
5	Kab. Pandeglang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
6	Kab. Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
7	Kota Tangerang	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
8	Kota Tangerang Selatan	75	500.000	37.500.000	75	497.500	37.312.515	99,50
TOTAL		600		300.000.000	600		298.500.120	99,50

Tabel 5.1.43 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Lanjut Usia Terlantar Tahun 2025 dan 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kota Cilegon	85	500.000	42.500.000	85	499.500	42.457.467	99,90
2	Kota Serang	75	500.000	37.500.000	75	499.500	37.462.471	99,90
3	Kab. Serang	135	500.000	67.500.000	135	499.500	67.432.447	99,90
4	Kab. Lebak	75	500.000	37.500.000	75	499.500	37.462.471	99,90
5	Kab. Pandeglang	145	500.000	72.500.000	145	499.500	72.427.443	99,90
6	Kab. Tangerang	145	500.000	72.500.000	145	499.500	72.427.443	99,90
7	Kota Tangerang	175	500.000	87.500.000	175	499.500	87.412.432	99,90
8	Kota Tangerang Selatan	165	500.000	82.500.000	165	499.500	82.417.436	99,90
JUMLAH		1.000		500.000.000	1.000		499.499.610	99,90

**Tabel 5.1.44 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Penyandang Disabilitas
Tahun 2025 dan 2024**

NO	KABUPATEN /KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMA (ORANG)	BANTUAN PER ORANG (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	KABUPATEN SERANG	100	500.000	50.000.000	100	497.500	49.750.020	99,50
2	KABUPATEN PANDEGLANG	100	500.000	50.000.000	100	497.500	49.750.020	99,50
3	KABUPATEN LEBAK	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
4	KABUPATEN TANGERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
5	KOTA SERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
6	KOTA TANGERANG SELATAN	60	500.000	30.000.000	60	497.500	29.850.012	99,50
7	KOTA TANGERANG	70	500.000	35.000.000	70	497.500	34.825.014	99,50
8	KOTA CILEGON	60	500.000	30.000.000	60	497.500	29.850.012	99,50
JUMLAH		600		300.000.000	600		298.500.120	99,50

- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp36.594.934.788 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan Barang yang direncanakan kepada keluarga, dengan rincian berikut:
- a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp23.770.500.000 pada Dinas Sosial yang digunakan untuk Bantuan Jaminan Sosial Keluarga dalam rangka Penanganan Kemiskinan sebesar Rp18.870.500.000 dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp4.900.000.000, dengan peruntukan rincian berikut:

**Tabel 5.1.15 Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Keluarga Bantuan Jaminan Sosial
Keluarga Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan
Tahun 2025 dan 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kab. Serang	5.649	500.000	2.824.500.000	5.649	500.000	2.824.500.000	100,00
2	Kab. Pandeglang	8.610	500.000	4.305.000.000	8.610	500.000	4.305.000.000	100,00
3	Kab. Lebak	9.069	500.000	4.534.500.000	9.069	500.000	4.534.500.000	100,00
4	Kab. Tangerang	4.869	500.000	2.434.500.000	4.869	500.000	2.434.500.000	100,00
5	Kota Serang	2.422	500.000	1.211.000.000	2.422	500.000	1.211.000.000	100,00
6	Kota Tangerang Selatan	1.089	500.000	544.500.000	1.089	500.000	544.500.000	100,00



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
7	Kota Tangerang	3.610	500.000	1.805.000.000	3.610	500.000	1.805.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	2.423	500.000	1.211.500.000	2.423	500.000	1.211.500.000	100,00
JUMLAH		37.741		18.870.500.000	37.741		18.870.500.000	100,00

Tabel 5.1.16 Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Keluarga Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2025 dan 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI			REALISASI			%
		KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KPM	BANTUAN PER KELUARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Kab. Serang	420	2.000.000	840.000.000	420	2.000.000	840.000.000	100,00
2	Kab. Pandeglang	420	2.000.000	840.000.000	420	2.000.000	840.000.000	100,00
3	Kab. Lebak	120	2.000.000	240.000.000	120	2.000.000	240.000.000	100,00
4	Kab. Tangerang	435	2.000.000	870.000.000	435	2.000.000	870.000.000	100,00
5	Kota Serang	100	2.000.000	200.000.000	100	2.000.000	200.000.000	100,00
6	Kota Tangerang Selatan	355	2.000.000	710.000.000	355	2.000.000	710.000.000	100,00
7	Kota Tangerang	500	2.000.000	1.000.000.000	500	2.000.000	1.000.000.000	100,00
8	Kota Cilegon	100	2.000.000	200.000.000	100	2.000.000	200.000.000	100,00
TOTAL		2.450		4.900.000.000	2.450		4.900.000.000	100,00

- b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp12.824.434.788,00 pada Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral yang digunakan untuk Pembangunan Listrik Pedesaan berupa program bantuan listrik untuk Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Belanja Bantuan Sosial berupa Barang Kepada Keluarga Program Bantuan Listrik Untuk Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) Tahun 2025 dan 2024

No	KABUPATEN / KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp)	JUMLAH SR (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kabupaten Serang	1.384	1.323.270.080	1.211.658.905	2.534.928.985
2	Kabupaten Pandeglang	1.750	1.674.575.000	1.532.083.153	3.206.658.153
3	Kabupaten Lebak	1.750	1.674.575.000	1.532.083.153	3.206.658.153



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

No	KABUPATEN / KOTA	SATUAN SAMBUNGAN	JUMLAH IR (Rp)	JUMLAH SR (Rp)	TOTAL (Rp)
4	Kabupaten Tangerang	1.750	1.673.742.175	1.532.083.153	3.205.825.328
5	Kota Serang	354	338.466.480	309.918.535	648.385.015
6	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
7	Kota Tangerang	0	0	0	0
8	Kota Cilegon	12	11.473.440	10.505.713	21.979.153
JUMLAH		7.000	6.696.102.175	6.128.332.613	12.824.434.788

5.1.2.2. Belanja Modal

Rp1.035.060.394.254

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

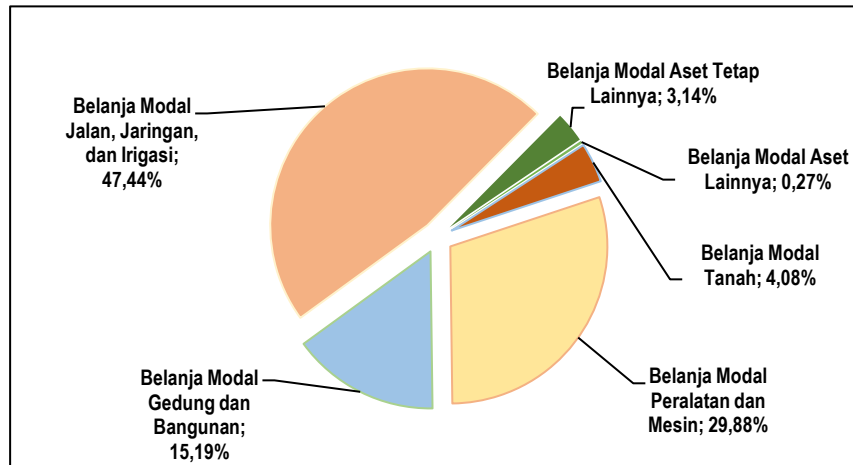
Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp1.035.060.394.254 atau 87,04% dari target sebesar Rp1.189.126.004.461 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.130.629.758.508, realisasi Belanja Modal berkurang Rp95.569.364.254 atau turun 8,45%.

Secara ringkas perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.18 Rincian Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09	46.092.332.880	155,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558	6,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81	171.787.754.271	19,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	318.031.145.447	299.055.992.016	94,03	536.407.648.367	(44,25)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663	35,30
Belanja Modal Aset Lainnya	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769	40,90
JUMLAH	1.189.126.004.461	1.035.060.394.254	87,04	1.130.629.758.508	(8,45)

Grafik 5.1.3 Komposisi Belanja Modal TA 2025



Penjelasan rinci mengenai realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Rp117.739.329.059

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp117.739.329.059 atau 63,09% dari target sebesar Rp186.613.886.304 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp46.092.332.880, realisasi Belanja Modal Tanah bertambah Rp71.646.996.179 atau naik 155,44%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.19 Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Persil	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)
Belanja Modal Lapangan	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50
JUMLAH	186.613.886.304	117.739.329.059	63,09	46.092.332.880	155,44

Penjelasan lebih rinci beberapa realisasi Belanja Modal Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah Persil

Rp61.519.366.328

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2025 sebesar Rp61.519.366.328 atau 50,02% dari target sebesar Rp122.996.463.200. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.1.20 Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00
JUMLAH	122.996.463.200	61.519.366.328	50,02	-	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja seluruhnya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rendahnya realisasi Belanja Modal tersebut disebabkan tidak terlaksananya pengadaan tanah untuk SKHN 01 Kota Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, dan SMKN 6 Kota Serang. Hal ini terjadi karena belum tercapainya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dan pemilik tanah, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan hingga akhir tahun anggaran.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.519.366.328 untuk pengadaan tanah pada SMKN Cihara Kabupaten Lebak, SMKN 17 Pandeglang, SMKN 11 Kota Tangerang, SMKN 6 Kota Serang, SMKN 15 Pandeglang.

2) Belanja Modal Tanah Non Persil

Rp0

Belanja Modal Tanah Non Persil TA 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.704.490.361. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Tanah Persil 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Belanja Modal Tanah Non Persil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah Basah	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)
JUMLAH	-	-	0,00	9.704.490.361	(100,00)

3) Belanja Modal Lapangan

Rp56.219.962.731

Realisasi Belanja Modal Lapangan TA 2025 sebesar Rp56.219.962.731 atau 88,37% dari target sebesar Rp63.617.423.104 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp36.387.842.519, realisasi Belanja Modal Lapangan bertambah Rp19.832.120.212 atau naik 54,50%.

Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Lapangan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.1.22 Belanja Modal Lapangan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50
JUMLAH	63.617.423.104	56.219.962.731	88,37	36.387.842.519	54,50

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Jalan digunakan untuk pembebasan lahan pada ruas jalan sebagai berikut:

- a) Akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten (Kabupaten Serang) Rp 7.130.407.288
- b) Sempu - Dukuh Kawung (Kota Serang) Rp 47.968.910.537
- c) Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP) Pelaksanaan Rp 1.120.644.906

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp360.377.599.640

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp360.377.599.640 atau 90,50% dari target sebesar Rp398.196.494.582 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp337.794.670.558, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah Rp22.582.929.082 atau naik 6,69%. Rincian perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Besar	3.853.303.630	3.733.288.639	96,89	17.709.667.601	(78,92)
Belanja Modal Alat Angkutan	15.335.695.000	14.920.520.089	97,29	22.082.036.000	(32,43)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.082.000	170.094.265	93,93	4.242.645.709	(95,99)
Belanja Modal Alat Pertanian	1.490.350.000	1.124.585.150	75,46	1.060.682.000	6,02
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.423.801.264	58.524.483.183	84,30	60.433.862.800	(3,16)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.443.543.500	22.166.386.596	77,93	12.218.453.905	81,42
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.811.090.277	26.599.695.476	99,21	28.402.715.721	(6,35)
Belanja Modal Alat Laboratorium	144.481.959.816	126.389.673.428	87,48	51.803.018.293	143,98
Belanja Modal Komputer	24.030.227.000	22.794.385.170	94,86	29.398.912.256	(22,47)
Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	0,00	10.186.031.200	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	78.382.000	77.866.500	99,34	422.940.000	(81,59)
Belanja Modal Alat Peraga	-	-	0,00	1.765.515.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan Proses / Produksi	25.779.000	21.794.850	84,54	210.792.000	(89,66)
Belanja Modal Rambu-Rambu	5.545.856.100	5.389.628.115	97,18	13.570.963.757	(60,29)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	0,00	142.900.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	68.930.933.613	68.911.180.753	99,97	58.242.979.357	18,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.564.491.382	9.554.017.426	99,89	25.900.554.959	(63,11)
JUMLAH	398.196.494.582	360.377.599.640	90,50	337.794.670.558	6,69

Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang rendah diantaranya:

1. Belanja Modal Alat Pertanian realisasi sebesar 75,46% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian disebabkan efisiensi sisa kontrak;
2. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar realisasi sebesar 77,93% hal ini disebabkan rendahnya realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Sekretariat DPRD disebabkan estimasi waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi serta adanya penyesuaian jadwal probity audit.
3. Belanja Modal Alat Laboratorium realisasi sebesar 87,48% hal ini disebabkan rendahnya realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium pada Sekretariat DPRD disebabkan penyesuaian pembayaran dan tindak lanjut berdasarkan hasil probity audit.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp205.562.940.358

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp205.562.940.358 atau 87,81% dari target sebesar Rp234.096.580.988 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp171.787.754.271, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah Rp33.775.186.087 atau naik 19,66%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Tabel 5.1.24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bangunan Gedung	229.984.503.888	201.681.900.798	87,69	151.206.136.223	33,38
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.909.334.000	2.686.437.940	92,34	2.406.854.998	11,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.202.743.100	1.194.601.620	99,32	18.174.763.049	(93,43)
JUMLAH	234.096.580.988	205.562.940.358	87,81	171.787.754.271	19,66

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp201.681.900.798

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp201.681.900.798 atau 87,69% dari target sebesar Rp229.984.503.888 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp151.206.136.223, realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung bertambah Rp50.475.764.575 atau naik 33,38%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja realisasi sebesar Rp201.521.160.668 terdiri dari:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp 20.325.056.853
 - (a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 15.946.102.772
 - (b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 398.341.000
 - (c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 2.338.863.922
 - (d) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 352.617.716
 - (e) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 49.501.258
 - (f) Dinas Pertanian Rp 100.492.430
 - (g) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Rp 96.480.294
 - (h) Badan Pendapatan Daerah Rp 1.042.657.461
2. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar Rp 3.609.869.000
 - (a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Realisasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp 3.211.253.067
 - (a) Dinas Kesehatan
4. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 167.783.152.832
 - (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp 743.606.800
 - (a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp 291.865.620



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
7. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandara	Rp	553.027.524
(a) Dinas Perhubungan		
8. Realisasi Belanja Modal Bangunan Peternakan / Perikanan	Rp	547.859.755
(a) Dinas Kelautan dan Perikanan		
9. Realisasi Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp	861.102.721
(a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	520.983.224
(b) Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	148.879.497
(c) Dinas Pariwisata	Rp	191.240.000
10. Realisasi Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp	895.620.396
(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	54.323.400
(b) Dinas Kesehatan	Rp	285.897.330
(c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	97.578.300
(d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	399.546.366
(e) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	58.275.000
11. Realisasi Belanja Modal Taman	Rp	2.698.746.101
(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	189.442.035
(b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp	349.484.066
(c) Sekretariat DPRD	Rp	2.159.820.000
b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal realisasi sebesar Rp160.740.130 seluruhnya merupakan Belanja Modal Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Belanja Modal Cottage pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.		

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp2.686.437.940**

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 sebesar Rp2.686.437.940 atau 92,34% dari target sebesar Rp2.909.334.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.406.854.998, realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti bertambah Rp279.582.942 atau naik 11,62%. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti seluruhnya berupa Belanja Modal Pagar terdapat pada SKPD:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	486.867.560
2. Dinas Sosial	Rp	91.393.000
3. Badan Pendapatan Daerah	Rp	2.108.177.380



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD **Rp1.194.601.620**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2025 sebesar Rp1.194.601.620 atau 99,32% dari target sebesar Rp1.202.743.100 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.174.763.049, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD berkurang Rp16.980.161.429 atau turun 93,43%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdapat pada:

a) RSUD Banten sebesar Rp222.728.800 digunakan untuk pembiayaan pekerjaan sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Jasa konsultasi Perencanaan Rumah Singgah | Rp | 91.985.700 |
| 2. Pembayaran Sisa 1% Pembangunan Bunker Radioterapi | Rp | 130.743.100 |

b) RSUD Malingping sebesar Rp 971.872.820 digunakan untuk pembiayaan pekerjaan sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Renovasi Gedung Instalasi Gizi | Rp | 958.730.820 |
| 2. Pembayaran Belanja Modal Pembuatan Kanopi | Rp | 13.142.000 |

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp299.055.992.016**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp299.055.992.016 atau 94,03% dari target sebesar Rp318.031.145.447 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp536.407.648.367, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang Rp237.351.656.352 atau turun 44,25%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	208.160.433.390	199.136.205.774	95,66	459.801.210.945	(56,69)
Belanja Modal Bangunan Air	82.630.735.749	73.533.328.233	88,99	64.574.711.422	13,87
Belanja Modal Instalasi	5.000.000.000	4.734.534.330	94,69	-	0,00
Belanja Modal Jaringan	15.790.420.000	15.202.486.050	96,28	12.031.726.000	26,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	6.449.556.308	6.449.437.629	100,00	-	0,00
JUMLAH	318.031.145.447	299.055.992.016	94,03	536.407.648.367	(44,25)

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan **Rp199.136.205.774**

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 sebesar Rp199.136.205.774 atau 95,66% dari target sebesar Rp208.160.433.390 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp459.801.210.945, realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan berkurang Rp260.665.005.171 atau turun 56,69%. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri dari:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp166.645.507.274 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|-----------------|
| 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 166.357.205.815 |
| 2. Dinas Kesehatan | Rp | 111.495.720 |
| 3. Badan Pendapatan Daerah | Rp | 176.805.739 |

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp32.490.698.500 seluruhnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Belanja Modal Bangunan Air **Rp73.533.328.233**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 sebesar Rp73.533.328.233 atau 88,99% dari target sebesar Rp82.630.735.749 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp64.574.711.422, realisasi Belanja Modal Bangunan Air bertambah Rp8.958.616.811 atau naik 13,87%. Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Air terdiri dari:

a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp50.084.973.111 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 49.988.803.618 |
| 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp | 96.169.493 |

b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp23.448.355.122 seluruhnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3) Belanja Modal Instalasi **Rp4.734.534.330**

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2025 sebesar Rp4.734.534.330 atau 94,69% dari target sebesar Rp5.000.000.000.

Belanja Modal Instalasi seluruhnya merupakan Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

4) Belanja Modal Jaringan **Rp15.202.486.050**

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 sebesar Rp15.202.486.050 atau 96,28% dari target sebesar Rp15.790.420.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp12.031.726.000, realisasi Belanja Modal Jaringan bertambah Rp3.170.760.050 atau naik 26,35%. Belanja Modal Jaringan terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- a) Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp15.103.561.050 seluruhnya terdapat pada Dinas Perhubungan;
- b) Belanja Modal Jaringan Telepon sebesar Rp98.925.000 seluruhnya terdapat pada Dinas Kesehatan.

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp6.449.437.629

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2025 sebesar Rp6.449.437.629 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.449.556.308. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD seluruhnya terdapat pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Banten berupa:

- | | | |
|--|----|---------------|
| a) Alat penangkal petir | Rp | 128.728.500 |
| b) Pipa saluran pembuangan air limbah | Rp | 70.004.592 |
| c) Jaringan listrik bawah tanah dari Trafo induk pln ke genset baru dan bunker radioterapi uang muka | Rp | 1.236.545.261 |
| d) Pengadaan genset baru 1000 kva | Rp | 5.002.959.276 |
| e) Printer Epson L121 sebanyak 7 unit | Rp | 11.200.000 |

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp48.066.730.408

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp48.066.730.408 atau 100,75% dari target sebesar Rp47.707.402.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.525.505.663, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah Rp12.541.224.745 atau naik 35,30%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	591.414.000	555.272.288	93,89	348.505.389	59,33
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000	-	0,00	5.200.000	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	47.110.988.140	47.511.458.120	100,85	35.171.800.274	35,08
JUMLAH	47.707.402.140	48.066.730.408	100,75	35.525.505.663	35,30

Penjelasan lebih rinci realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan **Rp555.272.288**

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 sebesar Rp555.272.288 atau 93,89% dari target sebesar Rp591.414.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp348.505.389, realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan bertambah Rp206.766.899 atau naik 59,33%. Belanja Modal Bahan Perpustakaan terdapat pada:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	39.666.014
b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	512.720.274
c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp	2.886.000

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga **Rp0**

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 tidak terdapat realisasi dari target sebesar Rp5.000.000 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.200.000.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP **Rp47.511.458.120**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 sebesar Rp47.511.458.120 atau 100,85% dari target sebesar Rp47.110.988.140 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp35.171.800.274, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP bertambah Rp12.339.657.846 atau naik 35,08%.

f. Belanja Modal Aset Lainnya **Rp4.257.802.773**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 sebesar Rp4.257.802.773 atau 95,03% dari target sebesar Rp4.480.495.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.021.846.769, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya bertambah Rp1.235.956.004 atau naik 40,90%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Modal Aset Lainnya 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	738.495.000	634.275.273	85,89	2.807.753.248	(77,41)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	3.742.000.000	3.623.527.500	96,83	214.093.521	1592,50
JUMLAH	4.480.495.000	4.257.802.773	95,03	3.021.846.769	40,90



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan	Rp	7.514.000
b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	17.000.000
c) Daerah	Rp	609.761.273

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise pada Dinas kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Lisensi *Zoom Meeting*. Sedangkan pada Badan Pendapatan Daerah berupa Lisensi *Fortigate & RMA FG-80F*

2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan	Rp	3.429.277.500
b) Inspektorat	Rp	194.250.000

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada Dinas Kesehatan terdapat pada RSUD Labuan sebesar Rp1.714.605.000 untuk *Radiology Information System* (RIS) dan *Smart Laboratory Information System* dan pada RSUD Ciligrang sebesar Rp1.714.672.500 untuk paket *Laboratory Information System* dan paket *Radiology Information System*. Sedangkan pada Inspektorat berupa Software tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan.

g. Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan

Dalam realisasi belanja modal, termasuk di dalamnya adalah pembayaran retensi atas jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh rekanan yang melewati tanggal 31 Desember 2025. Rincian Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.1.28 Bank Garansi/Jaminan Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.736.526.019	4.535.778.373
Dinas Kesehatan	-	3.603.561.432
RSUD Banten	309.136.315	914.884.838
RSUD Malingping	108.715.653	-
RSUD Ciligrang	33.809.156	-
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.892.312.038	18.641.081.020
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.620.014.975	11.449.676.064
Dinas Perhubungan	-	2.311.142.981
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	438.763.670
Sekretariat DPRD	1.158.104.443	-
Badan Pendapatan Daerah	173.267.559	-
JUMLAH	29.031.886.158	41.894.888.378

Secara lengkap rincian pekerjaan per dinas dapat dilihat pada **Lampiran 2 CaLK**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Rp0

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Belanja Tak Terduga TA 2025 tidak terdapat realisasi dari target sebesar Rp32.756.687.505 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp75.000.000.

5.1.3. Belanja Transfer

Rp2.165.814.792.206

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp2.165.814.792.206 atau 89,70% dari target sebesar Rp2.414.524.730.906 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.605.330.492.510, realisasi Belanja Transfer berkurang Rp1.439.515.700.304 atau turun 39,93%. Secara ringkas Realisasi Transfer 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.29 Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)
Belanja Bantuan Keuangan	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072	(35,44)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	95.923.928.072	(97,83)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)
JUMLAH	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Belanja Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil

Rp2.024.610.361.548

Realisasi Belanja Bagi Hasil seluruhnya merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 tahun 2021 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp2.024.610.361.548 atau 89,56% dari target sebesar Rp2.260.672.110.906 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.386.606.564.438, realisasi Belanja Bagi Hasil berkurang Rp1.361.996.202.890 atau turun 40,22%. Secara ringkas, perbandingan Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30 Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.069.066.904.673	949.881.064.893	88,85	1.479.906.422.584	(35,81)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	1.191.605.206.233	1.074.729.296.655	90,19	1.906.700.141.854	(43,63)
JUMLAH	2.260.672.110.906	2.024.610.361.548	89,56	3.386.606.564.438	(40,22)

Penurunan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 diakibatkan pelaksanaan Opsen yang berlaku mulai tahun 2025 sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 191 ayat (1) yang berbunyi bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Rendahnya realisasi tahun 2025 akibat penurunan realisasi pendapatan dari pajak serta pelunasan hutang atas tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 tidak tercapai dan menjadi hutang Bagi Hasil Pajak.

Adapun penjelasan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.31 Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 2025 beserta Utang Pajak 2024 yang dibayar di tahun 2025

Uraian	Realisasi Pembayaran Utang Transfer 2024 (Rp)	Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 (Rp)	Total (Rp)
Kabupaten Lebak	4.097.245.190	134.848.420.971	138.945.666.161
Kabupaten Pandeglang	3.379.670.510	107.349.998.994	110.729.669.504
Kabupaten Serang	10.054.649.523	152.493.133.021	162.547.782.544
Kabupaten Tangerang	232.202.758.854	305.455.187.830	537.657.946.684
Kota Cilegon	35.921.293.736	86.425.502.578	122.346.796.314
Kota Serang	16.402.930.464	107.124.670.002	123.527.600.466
Kota Tangerang	220.107.361.478	232.221.219.788	452.328.581.266
Kota Tangerang Selatan	187.820.835.712	188.705.482.897	376.526.318.609
Jumlah	709.986.745.467	1.314.623.616.081	2.024.610.361.548

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Rp141.204.430.658

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp141.204.430.658 atau 91,78% dari target sebesar Rp153.852.620.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp218.723.928.072, realisasi Belanja Bantuan Keuangan berkurang Rp77.519.497.414 atau turun 35,44%. Secara ringkas perbandingan Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.32 Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	95.923.928.072	(97,83)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)
JUMLAH	153.852.620.000	141.204.430.658	91,78	218.723.928.072	(35,44)

Adapun penjelasan rincian Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi **Rp3.000.000.000**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi TA 2025 sebesar Rp3.000.000.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.000.000.000.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.33 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
a) Pemerintah Aceh	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
b) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
c) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	-	100,00%
JUMLAH	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	-	100,00%

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Tanggal 1 Desember 2025 Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, penyediaan anggaran dan/atau Pemberian bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada daerah lain yang dilanda bencana alam/non alam, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 663 Tahun 2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

b. Belanja Bantuan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota **Rp25.257.620.000**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota TA 2025 sebesar Rp25.257.620.000 atau 100,00% dari target sebesar Rp25.257.620.000.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

**Tabel 5.1.34 Transfer Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Serang	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00%	0	100,00%
JUMLAH	25.257.620.000	25.257.620.000	100,00%	0	100,00%

Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota Merupakan bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan PSU Kabupaten Serang. Berdasarkan Hasil verifikasi oleh tim dan Berita Acara hasil Kesepakatan pembahasan antara TAPD Provinsi Banten dan TAPD Kabupaten Serang sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan rincian alokasi anggaran bantuan pembiayaan PSU Kabupaten Serang untuk Badan Adhoc KPU Rp20.044.350.000,-
- 2) Jumlah dan Rincian alokasi anggaran bantuan pembiayaan PSU Kabupaten Serang untuk Bawaslu sebesar Rp5.213.270.000,-

Terdapat kesalahan penempatan kode rekening pada saat penganggaran yang seharusnya di alokasikan pada kode rekening belanja Transfer Bantuan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

c. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Rp2.085.000.000

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota TA 2025 sebesar Rp2.085.000.000 atau 99,52% dari target sebesar Rp2.095.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp95.923.928.072, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten / Kota berkurang Rp93.838.928.072 atau turun 97,83%.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35 Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kota Serang	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	15.489.997.300	(86,54)
Kabupaten Serang	0	0	0,00	24.922.518.298	(100,00)
Kabupaten Pandeglang	0	0	0,00	15.185.254.852	(100,00)
Kabupaten Lebak	0	0	0,00	18.310.177.372	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Kabupaten Tangerang	0	0	0,00	5.678.915.700	(100,00)
Kota Cilegon	0	0	0,00	5.284.290.550	(100,00)
Kota Tangerang	0	0	0,00	5.407.316.000	(100,00)
Kota Tangerang Selatan	0	0	0,00	5.645.459.000	(100,00)
JUMLAH	2.095.000.000	2.085.000.000	99,52	95.923.929.072	(97,83)

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan Dana Kerohiman dalam rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Normalisasi Kali Pembuang Cibanten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 631 Tahun 2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Serang dalam Rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Normalisasi Kali Pembuang Cibanten, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Kerohiman untuk 242 KK x Rp5.000.000 = Rp1.210.000.000,00 di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen;
2. Dana Kerohiman untuk 175 KK x Rp5.000.000 = Rp875.000.000,00 di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen;

Realisasi tidak mencapai 100% disebabkan terdapat 2 KK yang tidak memenuhi syarat dan tidak diajukan oleh Pemerintah Kota Serang pada Kelurahan Kasemen.

Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 tidak dianggarkan seperti tahun 2024 dikarenakan Pemerintah Provinsi Banten mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pada prinsipnya Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa **Rp110.861.810.658**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp110.861.810.658 atau 89,77% dari target sebesar Rp123.500.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp122.800.000.000, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa berkurang Rp11.938.189.342 atau turun 9,72%. Realisasi tahun anggaran 2025 sudah memperhitungkan pengembalian belanja



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

yang disetor ke RKUD pada tahun 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp970.000.000 dengan total 46 STS yang belum dapat teridentifikasi.

Secara ringkas, perbandingan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang	32.600.000.000	30.560.000.000	93,74	32.600.000.000	(6,26)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Lebak	33.900.000.000	31.168.029.400	91,94	33.900.000.000	(8,06)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang	24.600.000.000	21.346.781.258	86,78	24.000.000.000	(11,06)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Wilayah Kabupaten Serang	32.400.000.000	28.757.000.000	88,76	32.300.000.000	(10,97)
Pengembalian Belanja yang Belum Teridentifikasi	-	(970.000.000)	0,00	-	0,00
JUMLAH	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000	(9,72)

Terdapat data pengembalian Bantuan Keuangan yang belum teridentifikasi desa penerima Bantuan Keuangan sebesar Rp970.000.000.

Berikut Jumlah Desa dan Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Per Kabupaten/Kota pada Tahun 2025:

Tabel 5.1.37 Jumlah Desa yang mendapatkan Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025

Kabupaten	Jumlah Desa	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Kabupaten Pandeglang	326	32.600.000.000	30.560.000.000	93,74	32.600.000.000
Kabupaten Lebak	339	33.900.000.000	31.168.029.400	91,94	33.900.000.000
Kabupaten Tangerang	246	24.600.000.000	21.346.781.258	86,78	24.000.000.000
Kabupaten Serang	324	32.400.000.000	28.757.000.000	88,76	32.300.000.000
Pengembalian Belanja yang Belum Teridentifikasi	-	-	(970.000.000)	0,00	-
JUMLAH	1.235	123.500.000.000	110.861.810.658	89,77	122.800.000.000

Dari 1.235 desa yang dianggarkan terdapat 8 desa yang tidak disalurkan Bantuan Keuangan tahun 2025 karena beberapa hal, sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.38 Alasan tidak tersalurnya Bantuan Keuangan Desa

KABUPATEN LEBAK			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Banjarsari	Kerta	Belum ada penetapan peraturan desa tentang APBDesa Tahun 2025
KABUPATEN SERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Ciruas	Citerep	Ada permasalahan administrasi keuangan desa
2	Tunjung Teja	Tanjung Teja	Belum menyampaikan pertanggungjawaban Tahun 2023
3	Padarincang	Ciomas	Belum menyampaikan pertanggungjawaban Tahun 2024
KABUPATEN TANGERANG			
NO	KECAMATAN	DESA	ALASAN TIDAK MENGAJUKAN
1	Pakuhaji	Kohod	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
2	Pakuhaji	Kalibaru	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
3	Sindang Jaya	Wanakerta	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa
4	Sepatan Timur	Lebak Wangi	Ada permasalahan Administrasi keuangan desa

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Rp(261.284.118.385)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD TA 2025 Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp305.987.541.412 dengan realisasi defisit sebesar Rp(261.284.118.385). Hal ini terjadi karena realisasi Belanja dan Transfer masih lebih besar yaitu 92,92% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan yang hanya 93,14%, meskipun keduanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, baik Pendapatan maupun Belanja dan Transfer. Secara ringkas, realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.39 Realisasi Perhitungan Surplus/(Defisit) Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
PENDAPATAN	10.467.550.487.735	9.749.656.227.905	93,14	12.404.003.125.863	(21,40)
BELANJA	8.359.013.298.241	7.845.125.554.085	93,85	8.302.564.419.071	(5,51)
TRANSFER	2.414.524.730.906	2.165.814.792.206	89,70	3.605.330.492.510	(39,93)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.773.538.029.147	10.010.940.346.291	92,92	11.907.894.911.581	(15,93)
SURPLUS/(DEFISIT)	(305.987.541.412)	(261.284.118.385)	85,39	496.108.214.282	(152,67)

5.1.5. Pembiayaan

Rp305.987.808.375

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp305.987.808.375 atau 100,00% dari target sebesar Rp305.987.541.412. Secara ringkas, realisasi Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.40 Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00
JUMLAH	305.987.541.412	305.987.808.375	100,00	(51.622.672.871)	(692,74)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rp444.485.541.411

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp444.485.541.411 atau 100,00% dari target sebesar Rp444.485.541.412 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp86.875.060.165, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah bertambah Rp357.610.481.246 atau naik 411,64%. Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.1.41 Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64
JUMLAH	444.485.541.412	444.485.541.411	100,00	86.875.060.165	411,64

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp138.497.733.036

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2025 sebesar Rp138.497.733.036 atau 100,00% dari target sebesar Rp138.498.000.000 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp138.497.733.036, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berkurang Rp0 atau turun 0,00%. Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan 2025 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.42 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)	% NAIK (TURUN)
Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00	-	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00
JUMLAH	138.498.000.000	138.497.733.036	100,00	138.497.733.036	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp138.497.733.036 berupa Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT. SMI untuk Periode Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 Serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan SAL TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (2)	444.485.541.411	86.875.060.165	411,64
Subtotal (3=1-2)	-	-	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (4)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)
Subtotal (5=3+4)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	-	-	0,00
Lain-lain (7)	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+5+6+7)	44.703.689.990	444.485.541.411	(89,94)

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp444.485.541.411**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 yaitu sebesar Rp444.485.541.411.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp444.485.541.411**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan seluruhnya merupakan SAL awal tahun 2025.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) **Rp44.703.689.990**

SiLPA sebesar Rp44.703.689.990 merupakan SiLPA pada TA 2025.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp0**

Tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain-lain **Rp0**

Tidak Terdapat transaksi yang mempengaruhi Lain-lain.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp44.703.689.990**

SAL Akhir sebesar Rp44.703.689.990 merupakan perhitungan dari SAL Awal Rp444.485.541.411 dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp444.485.541.411 ditambah SiLPA tahun berjalan Rp44.703.689.990 ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0 ditambah Lain-lain Rp0.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Laporan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

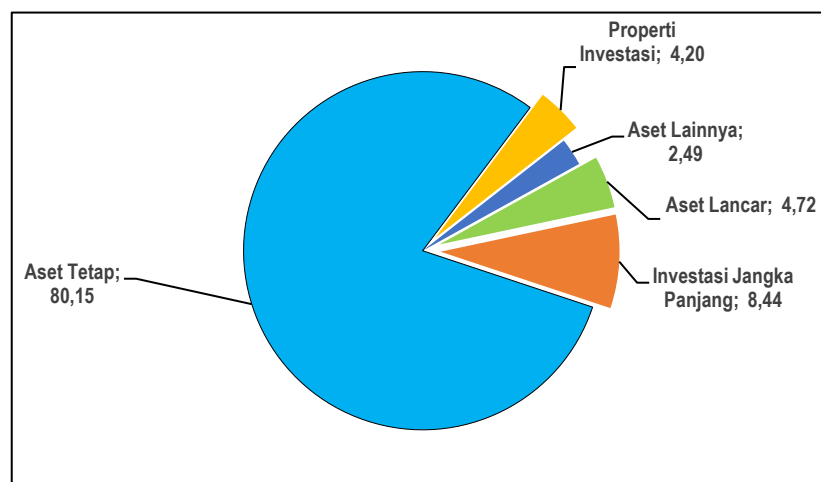
5.3.1 Aset Rp21.243.782.203.969

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.243.782.203.969 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Aset Lancar	1.002.897.415.788	709.708.890.375	293.188.525.413	41,31
Investasi Jangka Panjang	1.791.961.406.968	1.771.897.960.504	20.063.446.464	1,13
Aset Tetap	17.027.138.883.732	16.968.689.276.337	58.449.607.396	0,34
Properti Investasi	893.127.841.767	919.613.266.223	(26.485.424.456)	(2,88)
Aset Lainnya	528.656.655.714	520.834.459.866	7.822.195.848	1,50
JUMLAH	21.243.782.203.969	20.890.743.853.304	353.038.350.665	1,69

Grafik 5.3.1 Komposisi Aset Tahun 2025



Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp353.038.350.665 atau 1,69%.

Penjelasan lebih rinci mengenai Saldo Aset per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

5.3.1.1 Aset Lancar

Rp1.002.897.415.788

Aset Lancar terdiri dari kas, setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.002.897.415.788 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	335.671.538	429.351.948.995	(429.016.277.457)	(99,92)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	4.956.875.281	(4.956.875.281)	(100,00)
Kas di BLUD	35.713.661.608	9.071.167.006	26.642.494.602	293,71
Kas di Bendahara BOS	2.797.507.593	1.105.550.130	1.691.957.463	153,04
Kas Lainnya	-	47.270.000	(47.270.000)	(100,00)
Piutang Pajak Neto	3.950.747	273.741.488	(269.790.741)	(98,56)
Piutang Pajak	3.970.600	275.117.073	(271.146.473)	(98,56)
Penyisihan Piutang Pajak	(19.853)	(1.375.585)	1.355.732	(98,56)
Piutang Retribusi Neto	545.115.887	5.819.072.362	(5.273.956.475)	(90,63)
Piutang Retribusi	547.855.163	5.848.313.932	(5.300.458.769)	(90,63)
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.739.276)	(29.241.570)	26.502.294	(90,63)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	17.641.180	-	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.601.311	19.601.311	-	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(1.960.131)	-	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	349.914.788	1.473.519.541	(1.123.604.753)	(76,25)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	350.763.862	1.480.924.162	(1.130.160.300)	(76,31)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(849.074)	(7.404.621)	6.555.546	(88,53)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Neto	576.641.493.000	-	576.641.493.000	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	576.641.493.000	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
Beban Dibayar di Muka	4.609.749.111	6.596.759.060	(1.987.009.948)	(30,12)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.747.344.013	7.978.291.158	(230.947.145)	(2,89)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.126.882.873)	(2.301.008.749)	174.125.877	(7,57)
Piutang Lainnya Neto	5.856.849.251	-	5.856.849.251	0,00
Piutang Lainnya	10.897.963.851	12.333.916.600	(1.435.952.749)	(11,64)
Penyisihan Piutang Lainnya	(5.041.114.600)	(12.333.916.600)	7.292.802.000	(59,13)
Persediaan	368.278.517.071	243.017.054.176	125.261.462.895	51,54
JUMLAH	1.002.897.415.788	709.708.890.375	293.188.525.412	41,31



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Adapun rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah **Rp335.671.538**

Kas di Kas Daerah merupakan uang kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp335.671.538 tersimpan seluruhnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dengan nomor rekening 0801202021 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten.

Nomor rekening tersebut sesuai SK Gubernur Banten Nomor 583/Kep.127-Huk/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Serang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan **Rp0**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah. Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum di setor ke kas daerah dan pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan serta jasa giro yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca.

Pada tanggal 31 Desember 2025 seluruh Bendahara Pengeluaran telah menyetor sisa UP/TUP, pungutan pajak dan jasa giro.

d. Kas di BLUD **Rp35.713.661.608**

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo Kas RSUD Malingping dan RSUD Banten yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.713.661.608 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) saldo Kas BLUD di RSUD Banten di Bank Banten Nomor Rekening 0801000479 sebesar 28.880.239.670;
- 2) saldo Kas BLUD di RSUD Malingping di Bank Banten Nomor Rekening 0821000009 sebesar 4.596.978.197;
- 3) saldo Kas BLUD di RSUD Labuan di Bank Banten Nomor Rekening 0764008006 sebesar 2.119.099.816;
- 4) saldo Kas BLUD di RSUD Ciligrang di Bank Banten Nomor Rekening 0764008006 sebesar 117.343.926.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

e. Kas di Bendahara BOS Rp2.797.507.593

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo Kas Dana BOS pada satuan pendidikan negeri tingkat menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.797.507.593, yang seluruhnya berada pada Rekening Bendahara Bos di Bank Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 4 Neraca**.

f. Kas Lainnya Rp0

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung Saldo Kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Tidak terdapat saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025.

g. Piutang Pajak Rp3.950.747

Piutang Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Pajak neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.950.747 yang berasal dari saldo Piutang Pajak sebesar Rp3.970.600 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp19.853 yang seluruhnya merupakan saldo piutang Pajak Air Permukaan (PAP). Rekapitulasi Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 7 Neraca**.

Tabel 5.3.3 Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025

Nama WP	No SKPD	Tanggal SKPD	Masa Pajak	Jumlah	UPT	Tanggal disetor
PT.PANDJIWARINGIN	0035/SKPD/MLP/III/2025	14/03/2025	Februari	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0052/SKPD/MLP/IV/2025	15/04/2025	Maret	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0068/SKPD/MLP/V/2025	15/05/2025	April	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0097/SKPD/MLP/VI/2025	30/06/2025	Mei	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0101/SKPD/MLP/VII/2025	15/07/2025	Juni	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
	0169/SKPD/MLP/VIII/2025	15/08/2025	Juli	65.400	UPTD Malingping	10/02/2026
Perkebunan Nusantara VII Kerta Jaya	0187/SKPD/MLP/IX/2025	16/09/2025	Agustus	1.800	UPTD Malingping	10/02/2026
	0040/SKPD/MLP/III/2025	14/03/2025	Februari	3.576.400	UPTD Malingping	
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Bruto				3.970.600		
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan				(19.853)		
Jumlah Piutang Pajak Air Permukaan Neto				3.950.747		



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

h. Piutang Retribusi

Rp545.115.887

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Retribusi neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp545.115.887 berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Banten Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp413.805.500 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp415.884.925 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar 2.079.425;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp129.113.427 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp129.762.238 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar Rp648.811;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ciligrang Saldo Piutang Retribusi neto sebesar Rp2.196.960 merupakan hasil saldo Piutang Retribusi bruto sebesar Rp2.208.000 dikurangi penyisihan piutang Retribusi sebesar Rp11.040.

Rekapitulasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 8 Neraca**.

i. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp17.641.180

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.641.180 merupakan hasil dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bruto sebesar Rp19.601.311 dikurangi penyisihan piutangnya sebesar Rp1.960.131.

Rincian Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Tabel 5.3.4 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.601.311	19.601.311	-	0,00
Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(1.960.131)	(1.960.131)	-	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto	17.641.180	17.641.180	-	0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.601.311 merupakan Deviden tahun buku 2022 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2023 yang sampai saat ini belum bisa dibayarkan deviden dikarenakan PT.LKM Pandeglang di tahun buku 2024 masih mengalami kerugian.

j. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp349.914.788

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah netto per 31 Desember 2025 sebesar Rp349.914.788 merupakan hasil dari saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah bruto sebesar Rp350.763.862 dikurangi penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp849.074.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 5 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Piutang BLUD	-	-	-	0,00
Piutang Jasa Giro	180.948.977	366.671.526	(185.722.549)	(50,65)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Denda PBBKB	168.276.785	1.113.771.536	(945.494.751)	(84,89)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Denda Pajak AP	1.538.100	481.100	1.057.000	219,70
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bruto	350.763.862	1.480.924.162	(1.130.160.300)	(76,31)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(849.074)	(7.404.621)	6.555.546	(88,53)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	349.914.788	1.473.519.541	(1.123.604.753)	(76,25)

**Tabel 5.3.6 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

JENIS PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=2-7
Piutang Jasa Giro Rekening Pemerintah Daerah	180.948.977	-	-	-	-	-	180.948.977
Denda PBBKB	168.276.785	841.384	-	-	-	841.384	167.435.401
Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.691	-	-	-	7.691	1.530.410
Total	350.763.862	849.074	-	-	-	849.074	349.914.788

Saldo piutang Jasa Giro sebesar Rp180.948.977 merupakan Jasa Giro untuk periode tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2025 atas saldo RKUD, Rekening Bendahara, Rekening BOS, Rekening BLUD RSUD Banten, BLUD RSUD Malingping, Rekening BLUD RSUD Labuan dan Rekening BLUD RSUD Ciligrang serta Rekening penerima hibah Baznas pada Bank Banten yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena penyetoran Jasa Giro oleh Bank Banten dilakukan secara *auto kredit* setiap tanggal 25 berdasarkan hasil perhitungan per tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk setiap periode dan seluruhnya telah diterima di RKUD pada tanggal 25 Januari 2026 dan penyetoran Jasa Giro Baznas tanggal 6 Januari 2026.

Rincian lebih lanjut Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran 10 dan 11 Neraca**.

k. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Rp576.641.493.000

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Pada Tahun 2025, Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Banten berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak pemerintah daerah yang belum ditransfer dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp576.641.493.000. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang di atur dalam perundang-undangan.

Rincian lebih lanjut Piutang Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 12 Neraca**.

I. **Beban Dibayar Dimuka** **Rp4.609.749.111**

Beban Dibayar Dimuka merupakan akun untuk menampung sejumlah pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diterima prestasi kerjanya atau belum dirasakan manfaatnya setelah tanggal neraca namun telah dibayar pada TA 2025.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.609.749.111 dan Rp6.596.759.060. Rincian untuk tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.7 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BEBAN DIBAYAR DIMUKA (Rp)
1	2	3	4	5=2+3+4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.904.110	-	-	216.904.110
Dinas Kesehatan	-	-	-	-
UPT RSUD Banten	-	-	-	-
UPT RSUD Malingping	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.338.798	174.757.563	-	281.096.361
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	20.371.738	-	20.371.738
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	22.027.397	-	-	22.027.397
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	57.869.863	-	-	57.869.863
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.808.743	-	-	104.808.743
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	12.600.000	-	12.600.000
Dinas Perhubungan	-	76.678.962	93.845.455	170.524.416
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	89.913.093	89.913.093
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	8.677.049	-	8.677.049



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	SEWA TEMPAT (Rp)	PREMI ASURANSI (Rp)	LAINNYA (Rp)	BEBAN DIBAYAR DIMUKA (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	11.886.509	-	11.886.509
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	59.280.435	-	59.280.435
Dinas Pariwisata	114.042.819	-	-	114.042.819
Dinas Pertanian	-	5.175.401	-	5.175.401
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	41.516.339	-	41.516.339
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.186.760	54.380.150	-	107.566.910
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-
Biro Hukum	-	-	-	-
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
Biro Umum	89.051.781	13.825.137	-	102.876.917
Biro Pengadaan Barang/Jasa	68.154.000	-	-	68.154.000
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
Biro Administrasi Pimpinan	13.643.836	-	-	13.643.836
Sekretariat DPRD	43.961.644	408.063.760	-	452.025.404
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	85.352.003	-	85.352.003
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.852.459	-	6.502.732	15.355.191
Badan Pendapatan Daerah	2.316.821.577	161.002.603	-	2.477.824.180
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	22.906.557	22.906.557
Badan Penghubung	-	-	13.725.249	13.725.249
Inspektorat	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	33.624.590	-	33.624.590
JUMLAH	3.215.663.786	1.167.192.239	226.893.086	4.609.749.111

Rincian Sewa Tempat dapat dilihat pada **Lampiran 15.1 Neraca**, rincian Premi Asuransi dapat dilihat pada **Lampiran 15.2 Neraca** dan rincian lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15.3 Neraca**.

m. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi **Rp7.747.344.013**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun untuk menampung saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.747.344.013 dan Rp7.978.291.158. Rincian untuk tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.3.8 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto	9.874.226.886	10.279.299.907	(405.073.021)	(3,94)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(2.126.882.873)	(2.301.008.749)	174.125.877	(7,57)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	7.747.344.013	7.978.291.158	(230.947.145)	(2,89)

Terdapat penambahan (pengurangan) nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto) sebesar Rp405.073.021 yang disebabkan:

- koreksi kurang saldo awal sebesar (Rp3.000.000) karena adanya setoran tahun sebelumnya yang baru dicatat sebagai setoran piutang Tuntutan Ganti Kerugian;
- adanya penambahan bagian lancar piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas SKTJM yang terbit di tahun 2025 sebesar Rp43.983.000;
- reklasifikasi dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sudah jatuh tempo sebesar Rp6.144.286;
- adanya pembayaran cicilan sebesar (Rp452.200.307).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13 Neraca**.

n. Piutang Lainnya **Rp5.856.849.251**

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo Piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan tetapi tidak termasuk dalam Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD.

Saldo Piutang Lainnya bruto per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.897.963.851 dengan akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp5.041.114.600 atau piutang bersih sebesar Rp5.856.849.251, terdiri dari:

- Piutang Pengadaan ALKES sebesar Rp5.041.114.600 yang telah di sisihkan seluruhnya;
- Piutang atas Pengembalian Belanja sebesar Rp5.856.849.251 yang tersebar pada beberapa SKPD tanpa dilakukan penyisihan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14 Neraca**.

Tambahan informasi terkait Piutang Pengadaan ALKES dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Palugada Mandiri Pengadaan sarana penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp10.790.264.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.158.052.800;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- b) PT. Mikkindo Adiguna Pratama Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Ruang Operasi RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.415.309.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.883.061.800.

Bila dibandingkan saldo tahun 2024 sebesar Rp12.333.916.600, terdapat penurunan saldo piutang lainnya sebesar Rp7.292.802.000, dikarenakan telah direklas menjadi aset tetap-alat kesehatan, dengan rincian penurunan sebagai berikut:

- a. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp21.575.992.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp4.315.198.400;
- b. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscoy*) RS Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp14.888.018.000 dengan Uang Muka 20% sebesar Rp2.977.603.600.

Hal ini disebabkan telah inkrah putusan Mahkamah Agung Nomor 1641 K/Pdt/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 yang mengabulkan tuntutan agar Provinsi Banten memenuhi kewajiban membayar sisa dana yang belum dibayar sebesar Rp10.230.128.400 kepada CV. Bina Sadaya, dan Provinsi Banten telah membayar tagihan sejumlah tersebut pada tanggal 10 November 2025 melalui SP2D Nomor: 959.4/011182/LS/BUD/2025.dengan rincian sebagai berikut:

- a. Atas kontrak Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah RS Rujukan Provinsi Banten dengan Nilai Kontrak Rp21.575.992.000, nilai barang yang sudah dikirim berdasarkan putusan sidang sebesar Rp9.992.785.000, sehingga dengan telah dibayarkannya uang muka sebesar Rp4.315.198.400 pada tanggal 26 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10745/DINKES/LS/09.02/2013, sisa kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp5.677.586.600;
- b. Atas kontrak Pekerjaan Pengadaan sarana penunjang Radiologi (*Digital Radiologi Flouroscoy*) RS Provinsi Banten dengan Nilai Kontrak Rp14.888.018.000, nilai barang yang sudah dikirim berdasarkan putusan sidang sebesar Rp7.530.146.000, sehingga dengan telah dibayarkannya uang muka sebesar sebesar Rp2.977.603.600 pada tanggal 24 September 2013 melalui SP2D Nomor: 10651/DINKES/LS/09.02/2013, sisa kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.552.542.400.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 14 Neraca**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

o. Persediaan

Rp368.278.517.071

Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk dikonsumsi dalam kegiatan operasional pemerintah, atau dimaksudkan dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024. Masing-masing sebesar Rp368.278.517.071 dan Rp243.017.054.177. Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berdasarkan *stock opname* yang dilakukan oleh SKPD dan *monitoring* Inspektorat Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 s.d 9 Januari 2026 yang tertuang di dalam BA Rekonsiliasi barang persediaan dan BA *monitoring stock opname* barang persediaan.

Selengkapnya rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024
Berdasarkan jenis Persediaan

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.060.757.342	2.810.344.982
Bahan Kimia	577.222.654	290.811.947
Bahan Bakar dan Pelumas	86.837.255	51.103.750
Bahan Baku	29.376.348	22.812.500
Bahan/Bibit Tanaman	243.077.116	45.808.720
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.284.630	2.000.000
Isi Tabung Gas	181.712.135	2.357.801
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.061.171.732	1.269.984.132
Bahan Lainnya	119.741.023	116.011.000
Suku Cadang Alat Angkutan	16.158.000	3.955.500
Suku Cadang Alat Besar	2.052.000	1.550.000
Suku Cadang Alat Kedokteran	35.685.304.512	48.066.003.010
Suku Cadang Alat Laboratorium	4.359.657.404	6.347.914.923
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.624.759	6.483.500
Suku Cadang Alat Pertanian	61.868.653	175.003.612
Suku Cadang Alat Bengkel	126.028.399	27.651.900
Suku Cadang Lainnya	10.229.781	-
Alat Tulis Kantor	11.269.966.188	12.502.442.384
Kertas dan Cover	2.373.361.397	1.694.277.567
Bahan Cetak	10.528.500	2.450.000
Benda Pos	29.580.000	27.476.253
Bahan Komputer	4.331.907.715	3.695.783.283
Perabot Kantor	4.636.803.194	4.023.207.692
Alat Listrik	1.586.639.402	1.746.708.298



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Perlengkapan Dinas	120.571.647	286.734.000
Perlengkapan Pendukung Olahraga	565.317.948	294.379.220
Suvenir/Cendera Mata	890.597.280	698.854.300
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.664.763	1.022.046.226
Obat	37.471.978.496	40.178.271.006
Obat-obatan Lainnya	7.254.513	440.000
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	56.400.045.298	69.915.010.992
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	194.237.242.612	21.718.173.655
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	3.833.693.237	17.099.332.384
Natura	5.456.823.757	8.463.540.014
Pakan	128.450.875	407.092.750
Natura dan Pakan Lainnya	184.523.506	1.036.875
Komponen Rambu-Rambu	128.463.000	-
JUMLAH	368.278.517.071	243.017.054.177

Rincian Saldo persediaan per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 17 Neraca**.

**Tabel 5.3.10 Rincian Persediaan berdasarkan Penggunaan persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)
Persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda	113.807.535.924	134.284.537.146
Persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat	254.470.981.147	108.732.517.030
JUMLAH	368.278.517.071	243.017.054.177

Rincian persediaan yang digunakan untuk Operasional Pemda per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 18 Neraca**.

Rincian persediaan yang digunakan untuk di jual atau diserahkan kepada masyarakat per SKPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 19 Neraca**.

Rincian mutasi persediaan selama tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.3.11 Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024	243.017.054.177
Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025	452.425.618
Mutasi Tambah:	1.163.548.567.672
Belanja Barang Persediaan	918.994.873.493
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	87.689.720.653
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	101.173.280.145
Reklasifikasi dari Belanja Modal	7.424.543.772
Reklasifikasi dari Belanja Hibah	37.932.531.904
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat dan BUMD	396.531.683
Penerimaan Lainnya	9.937.086.021
Mutasi Kurang:	(1.038.739.530.395)
Beban Persediaan	(362.301.467.682)
Reklasifikasi ke Beban Hibah	(673.547.388.211)
Reklasifikasi ke Aset Tetap	(1.366.411.884)
Rusak/Kedaluwarsa	(1.114.917.065)
Pengeluaran Lainnya	(409.345.554)
Saldo Per 31 Desember 2025	368.278.517.071

Penjelasan Rincian Selisih adalah sebagai berikut:

Penjelasan Rincian Koreksi Saldo Awal sebesar Rp452.425.618 terdapat pada:

- a) Koreksi tambah Saldo Awal pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp510.025.618 berupa penyesuaian harga satuan beras menjadi senilai Rp12.607,29/kg terhadap hasil *stockopname* beras Provinsi Banten di Gudang BULOG yang dilakukan oleh Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
- b) Koreksi kurang Saldo Awal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp57.600.000 berupa pengurangan nilai hasil PHO Inspektorat terhadap Persediaan PSU Tahun 2024 atas 2 Paket Pekerjaan yang menjadi Kewajiban Pembayaran pada Tahun 2025, yaitu:
 - 1) Pembangunan/peningkatan kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 008, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang berkurang senilai Rp9.480.000 dari Nilai Kontrak Rp187.630.000 menjadi Rp178.150.000 sesuai SP2D Nomor 959.4/011185/LS/BUD/2025 Tanggal 10 November 2025
 - 2) Pembangunan/ peningkatan kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, RW. 007 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang senilai Rp48.120.000 dari nilai kontrak Rp562.630.000 menjadi Rp514.510.000 sesuai SP2D Nomor 959.4/011183/LS/BUD/2025 Tanggal 10 November 2025



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Penjelasan Rincian Mutasi Tambah yaitu:

- a) Belanja Barang Persediaan sebesar Rp918.994.873.493 merupakan belanja barang persediaan pada tahun anggaran 2025 yang tersebar pada seluruh SKPD sebesar Rp920.434.483.493 dikurangi koreksi senilai Rp1.439.610.000 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa barang telah dicatat atas perolehan PSU Tahun 2024

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.134.484.629
- Dinas Kesehatan	81.339.308.196
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.681.727.594
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	464.557.918.033
- Satuan Polisi Pamong Praja	734.089.814
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.664.441.550
- Dinas Sosial	6.645.213.325
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.216.874.888
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	3.470.930.531
- Dinas Ketahanan Pangan	4.795.755.292
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.874.785.425
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.298.587.484
- Dinas Perhubungan	2.531.393.855
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.641.934.818
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	665.017.118
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	706.383.561
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.146.119.361
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	673.352.860
- Dinas Kelautan dan Perikanan	6.490.613.341
- Dinas Pariwisata	4.924.006.677
- Dinas Pertanian	35.301.884.379
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	669.997.760
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.374.292.523
- Sekretariat Daerah	12.502.985.832
- Sekretariat DPRD	32.943.346.216
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.863.679.525
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.406.473.352
- Badan Pendapatan Daerah	17.471.058.809
- Badan Kepegawaian Daerah	1.124.028.513
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.226.646.596
- Badan Penghubung	308.673.974
- Inspektorat Provinsi	1.106.245.144
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.502.622.518
JUMLAH	918.994.873.493

- b) Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD sebesar Rp87.689.720.653 terdapat pada Dinas Kesehatan yang tersebar pada

- RSUD Banten	69.336.678.944
- RSUD Malingping	13.867.112.000
- RSUD Ciligrang	1.746.013.179
- RSUD Labuan	2.739.916.530
JUMLAH	87.689.720.653

- c) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp101.173.280.145 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebar pada seluruh Unit Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Khusus.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

d) Reklasifikasi dari Belanja Modal sebesar Rp7.424.543.772 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Perlengkapan Praktek Siswa Sekolah Menengah Kejuruan senilai Rp1.219.512.122 dan Barang Persediaan bersumber dari BOS pada unit sekolah senilai Rp35.868.000	1.255.380.122
- Dinas Kesehatan pada RSUD Banten berupa Perlengkapan untuk Pelayanan Pendaftaran Pasien	6.659.400
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Konsultan Pengawasan pada persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain	273.950.500
- Dinas Perhubungan berupa Stok Lampu Penerangan Jalan	5.859.000.000
- Sekretariat Daerah pada Biro Umum dan Perlengkapan berupa Perlengkapan Rumah Tangga	29.553.750
JUMLAH	7.424.543.772

e) Reklasifikasi dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yang belum diserahterimakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp37.932.531.904 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:

- Pembangunan Peningkatan Infrastruktur layanan Kejaksaan Tinggi Banten	13.039.162.152
- Pembangunan TK Adyaksa Kejaksaan Tinggi Banten	2.578.150.565
- Pembangunan Gedung Kantor BIN Daerah Provinsi Banten	8.031.846.112
- Pembangunan Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Banten	12.624.003.975
- Pembangunan Gedung PPID Satuan Brimob Polda Banten	1.363.260.000
- Renovasi Lapangan Tennis Grup 1 Kopasus	296.109.100
JUMLAH	37.932.531.904

f) Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat dan BUMD sebesar Rp396.531.683 terdapat pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Barang Persediaan peruntukan Siswa dan Layanan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Khusus perolehan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	329.311.683
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Perlengkapan Rumah Tangga peruntukan Korban Bencana perolehan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	58.640.000
- Badan Penghubung berupa Perlengkapan Rumah Singgah perolehan dari <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Bank Banten	8.580.000
JUMLAH	396.531.683



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

g) Penerimaan Perolehan Lainnya sebesar Rp9.937.086.021 terdapat pada:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kewajiban Pembayaran Tahun 2026 atas pekerjaan tahun 2025	9.098.712.627
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Kewajiban Pembayaran Tahun 2026 atas pekerjaan tahun 2025	630.293.394
- Dinas Kelautan dan Perikanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut berupa Produksi Perikanan terdiri dari Benih Ikan senilai Rp8.175.000,00 dan Ikan Konsumsi senilai Rp33.475.000,00	41.650.000
- Dinas Pertanian pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak berupa kelahiran hewan ternak terdiri dari Kerbau, Sapi, Domba dan Kambing	166.430.000
JUMLAH	9.937.086.021

Penjelasan Rincian Mutasi Kurang yaitu:

a) Beban Persediaan sebesar Rp362.301.467.682 tersebar pada SKPD sebagai penggunaan barang persediaan;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.042.996.147
- Dinas Kesehatan	121.430.472.830
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.760.768.144,38
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.708.903.131
- Satuan Polisi Pamong Praja	853.767.914
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.593.087.285
- Dinas Sosial	4.104.136.895
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.603.804.180
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.126.013.589
- Dinas Ketahanan Pangan	712.211.858
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.888.864.671
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	793.774.644
- Dinas Perhubungan	8.514.774.034
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.640.257.243
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	464.715.183
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	650.917.126
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.702.683.420
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	619.771.560
- Dinas Kelautan dan Perikanan	3.946.189.875
- Dinas Pariwisata	1.219.829.541
- Dinas Pertanian	5.776.851.638
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	592.845.460
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.456.526.004
- Sekretariat Daerah	12.540.935.245
- Sekretariat DPRD	33.055.906.492
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.890.246.615
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.961.414.286
- Badan Pendapatan Daerah	18.371.804.751
- Badan Kepegawaian Daerah	1.130.786.093
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.231.996.096
- Badan Penghubung	322.632.093



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- Inspektorat Provinsi	1.114.798.363
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.476.785.276
TOTAL	362.301.467.682

b) Reklasifikasi ke Beban Hibah berupa Barang Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat/ sebesar Rp673.547.388.211 tersebar pada:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.906.991.161
- Dinas Kesehatan	66.769.742.818
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.519.531.722
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	475.700.928.864
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.582.396.765
- Dinas Sosial	2.616.057.341
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.637.255.426
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.343.769.947
- Dinas Ketahanan Pangan	16.082.182.594
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.916.134.628
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	522.185.240
- Dinas Perhubungan	161.541.630
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196.630.000
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68.022.003
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	469.050.591
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	53.262.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan	2.353.992.255
- Dinas Pariwisata	3.706.394.256
- Dinas Pertanian	29.694.872.160
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	88.436.275
- Badan Pendapatan Daerah	444.347.998
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	478.690.495
- Inspektorat Provinsi	217.452.069
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.519.974
JUMLAH	673.547.388.211

c) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.366.411.884 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	843.748.560
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.880.000
- Dinas Sosial	12.765.000
- Dinas Perhubungan	6.990.780
- Dinas Pertanian	23.963.790
- Sekretariat Daerah	92.078.400
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000
- Badan Pendapatan Daerah	308.931.300
- Inspektorat Provinsi	3.054.054
JUMLAH	1.366.411.884

d) Rusak/Kedaluwarsa sebesar Rp1.114.917.065 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan yang tersebar pada:

- RSUD Banten berupa Suku Cadang Alat Kedokteran dan Obat	370.041.325
- RSUD Malingping berupa Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang Alat Laboratorium dan Obat	93.901.029
- RSUD Ciligrang berupa Natura	818.780



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- Badan Pendapatan Daerah berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	650.155.930
JUMLAH	1.114.917.065

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi rusak/kedaluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran 20 Neraca**.

- e) Pengeluaran Lainnya sebesar Rp409.345.554 terdapat pada Dinas Pertanian pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak berupa penjualan dan kematian hewan ternak pada tahun 2025.

Rekapitulasi Saldo persediaan per SKPD dan Jenis Persediaan dalam kondisi lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 20 Neraca**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp1.791.961.406.968

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar.

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten pada perusahaan *investee* atau BUMD tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.791.961.406.968 dan Rp1.771.897.960.504. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Banten tidak melakukan tambahan penyertaan modal. Rincian penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Setoran Modal Provinsi Banten per 31 Desember 2025

PERUSAHAAN/ LEMBAGA	NILAI PENYETORAN (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN	METODE PERHITUNGAN	NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp)
PT. BGD	35.361.227.000	99,57%	METODE EKUITAS	39.236.911.389
PT. BPD BANTEN	2.165.600.000.000	66,11%	METODE EKUITAS	1.417.603.945.900
PT. JAMKRIDA	51.000.000.000	90,27%	METODE EKUITAS	73.686.344.126
PD. BPR SERANG	15.000.000.000	30,97%	METODE EKUITAS	38.845.243.179
PD. BPR KERTA RAHARJA	15.000.000.000	20,94%	METODE EKUITAS	28.703.460.193
PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	80.000.000.000	100,00%	METODE EKUITAS	57.138.038.182
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	4,95%	METODE HARGA PEROLEHAN	130.147.464.000
PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	6,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	3.000.000.000
PT. LKM RANGKASBITUNG	470.700.000	6,27%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.350.000.000
PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	1,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	300.000.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

PERUSAHAAN/ LEMBAGA	NILAI PENYETORAN (Rp)	PERSENTASE KEPEMILIKAN	METODE PERHITUNGAN	NILAI PENYERTAAN MODAL (Rp)
PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	7,32%	METODE HARGA PEROLEHAN	900.000.000
PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	7,00%	METODE HARGA PEROLEHAN	1.050.000.000
TOTAL	2.497.829.391.000			1.791.961.406.968

Penghitungan nilai investasi pada perusahaan *investee* secara metode ekuitas. Terdapat penambahan/(pengurangan) nilai pernyataan modal yang bersumber dari:

- a) Kapitalisasi atas Laba sebesar Rp47.198.307.551 yaitu pada:
 1. PT. BGD Rp4.309.105.229
 2. PT. BPD Banten Rp34.143.170.600
 3. PT. Jamkrida Rp4.825.144.137
 4. PD. BPR Serang Rp2.008.449.973
 5. PD. BPR KERTA RAHARJA Rp1.912.437.613
- b) Kapitalisasi atas rugi sebesar (Rp20.271.177.029) pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda);
- c) Deviden 2024 sebagai pengurangan investasi sebesar (Rp7.069.950.673) yaitu pada:
 1. PT. Jamkrida (Rp4.329.948.642)
 2. PD. BPR Serang (Rp2.049.590.915)
 3. PD. BPR KERTA RAHARJA (Rp690.411.116)
- d) Terdapat koreksi tambah pencatatan pada PT. BGD sebesar Rp206.266.615 dikarenakan pada saat penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten *Audited* 2024, Laporan Keuangan PT.BGD masih *un-Audited*, sehingga dilakukan koreksi atas laba yang kurang catat pada tahun 2024.

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka tanggal 30 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal kepada PT. BPD Banten berupa tanah dan bangunan sebesar Rp139.569.320.000, dengan rincian:

1. eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan senilai Rp96.269.120.000;
2. gedung lama pusat layanan usaha terpadu (PLUT) senilai Rp13.645.600.000;
3. gedung samsat Cikokol lama senilai Rp22.278.300.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

4. Tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten senilai Rp7.376.300.000

SK Penghapusan empat lokasi tersebut masih dalam proses sehingga Pemerintah Provinsi Banten masih mencatat pada aset lain-lain dan belum mengakui penambahan penyertaan modal pada PT. BPD Banten.

Perhitungan Nilai penyertaan modal Banten selanjutnya dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Rp17.027.138.883.732

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan metode akuntansi berbasis akrual, dimana pengaruhnya terhadap aset tetap adalah diterapkannya penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan aset tetap yang diberlakukan di Provinsi Banten adalah metode garis lurus (*straight line*) bulanan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.027.138.883.732. Saldo Aset Tetap disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

URAIAN	Per 31 Desember 2025		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	9.363.770.901.401	-	9.363.770.901.401
Peralatan dan Mesin	4.539.113.218.722	(3.668.547.668.380)	870.565.550.342
Gedung dan Bangunan	5.383.991.912.324	(2.338.707.763.571)	3.045.284.148.752
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.506.088.574.010	(6.286.748.522.861)	3.219.340.051.149
Aset Tetap Lainnya	514.565.838.910	(38.636.519.886)	475.929.319.024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

URAIAN	Per 31 Desember 2025		
	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	52.248.913.064	-	52.248.913.064
JUMLAH	29.359.779.358.431	(12.332.640.474.699)	17.027.138.883.732

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 22 Neraca**. Adapun mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

URAIAN	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)		Per 31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	9.287.817.013.353	149.880.006.472	(73.926.118.424)	9.363.770.901.401
Peralatan dan Mesin	4.224.775.742.903	398.424.652.523	(84.087.176.704)	4.539.113.218.722
Gedung dan Bangunan	5.021.714.531.995	426.773.920.258	(64.496.539.929)	5.383.991.912.324
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.015.649.850.754	526.042.416.392	(35.603.693.136)	9.506.088.574.010
Aset Tetap Lainnya	469.710.626.512	48.255.570.408	(3.400.358.010)	514.565.838.910
Konstruksi dalam Pengerjaan	198.760.372.691	38.920.302.322	(185.431.761.949)	52.248.913.064
JUMLAH	28.218.428.138.209	1.588.296.868.375	(446.945.648.152)	29.359.779.358.431

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 23 Neraca**. Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah

Rp9.363.770.901.401

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah pada tahun 2025 sebesar Rp9.363.770.901.401 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp9.287.817.013.353 atau mengalami peningkatan sebesar Rp75.953.888.048 (0,82%). Rincian mutasi aset tetap Tanah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.15 Saldo Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	9.287.817.013.353
Mutasi Tambah:	149.880.006.472
Belanja Modal Tahun 2025	117.739.329.059
Kapitalisasi dari akun Hibah/lainnya	9.104.437.613
Koreksi atas Data Baru Catat	22.838.904.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	197.335.800
Mutasi Kurang:	(73.926.118.424)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Reklasifikasi atas perubahan Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(37.026.371.218)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(212.416.830)
Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi	(36.606.473.366)
Mutasi Antar KIB (Keluar) ke Akun Konstruksi dalam Pengerjaan	(80.857.010)
Saldo Per 31 Desember 2025	9.363.770.901.401

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp149.880.006.472 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp117.739.329.059 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp61.519.366.328
Berupa pengadaan Tanah untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Unit Sekolah Baru untuk SMKN 15 Kabupaten Pandeglang, SMKN 6 Kota Serang, SMKN 17 Kabupaten Pandeglang, SMKN 2 Cihara, SMKN 11 Kota Tangerang, SMAN 30 Kabupaten Tangerang
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp56.219.962.731
berupa pengadaan Tanah untuk ruas Jalan Sempu - Dukuh Kawung (Cipocok -Sp. Boru) dan Akses Tol Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten.
- 2) Kapitalisasi dari akun Hibah sebesar Rp9.104.437.613 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.104.437.613
berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan, Tanah Ruang Terbuka Hijau Hibah dari Pemerintah Kota Tangerang ke Pemerintah Provinsi Banten peruntukan SMKN 12 Kota Tangerang seluas 3000 m2 berlokasi di Jl. Raden Fatah Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan SMKN 3 Kota Serang hibah dari Masyarakat seluas 423 m2 berlokasi di Jl Kimara Walantaka Kota Serang.
- 3) Koreksi atas data baru catat berdasarkan hasil Inventarisasi BMD tahun 2025 sebesar Rp22.838.904.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan di SMAN 8 Kota Serang dan SMAN 6 Kota Serang.
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp197.335.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Appraisal Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan di SMKN 11 Kota Tangerang, SMKN 2 Cihara, SMKN 17 Pandeglang dan SMKN 6 Kota Serang.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp73.926.118.424 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi atas perubahan Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (Rusak Berat) berdasarkan Surat Keputusan Hibah dan Surat Pernyataan Kepala



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

OPD tentang Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Tanah sebesar Rp37.026.371.218, Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan masih dalam proses terdapat pada SKPD:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14.636.736.696
berupa Tanah Pengganti Polsek Cipocok Jaya dan Tanah Pengadilan Agama Banten dan Situ Rawa Kambing
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp892.242.000
berupa 2 Bidang Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Mesjid Alfaizah Cikoneng Anyer yang dihibahkan ke Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Wilayah Kabupaten Serang
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp24.075.786
berupa Tanah Puskesmas Majasari Kabupaten Pandeglang
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp296.501.000
berupa BOP Tanah Jalan Serdang-Bojonegara-Merak dan Jalan Raya Cilegon-Pasuruan yang status kewenangannya Kementerian PUPR Pusat
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp21.176.815.736
berupa Penyertaan Modal Pemerintah berbentuk non tunai / barang (Inbreng) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah berlokasi di:
 - a) Jl. Syech Nawawi Al- Bantani Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang (Gedung Plut)
 - b) Jl. Raya Jakarta km 4,5 Pakupatan
 - c) Jl. Veteran Kel/Desa Cipare, Kec. Serang, Kota Serang
 - d) Jl. Yumaga Kelurahan Cipare, Kec Serang, Kota Serang
 - e) Jl. Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerangdan Hibah Ke KEMENDIKTISAINTEK berlokasi di Jl. Syech Nawawi Al- Bantani Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
- 2) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp212.416.830 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan batalnya pengadaan lahan berupa:
- a) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Cihara dikarenakan atas dasar pertimbangan bahwa SMKN 1 Cihara akan di Marger dengan SMKN 2 Cihara sehingga pengadaan lahan untuk SMKN 1 Cihara tidak jadi dilaksanakan
 - b) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 12 Kota Tangerang dikarenakan atas dasar pertimbangan Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 sehingga pengadaan lahan untuk SMKN 12 Kota Tangerang tidak jadi dilaksanakan
 - c) Jasa Feasibility Study (FS) Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SKHN 01 Kota Tangerang dikarenakan atas dasar pertimbangan split bidang tanah SMKN 10 Kota Tangerang peruntukan SKHN 01 Kota Tangerang sehingga pengadaan lahan untuk SKHN 01 Kota Tangerang tidak jadi dilaksanakan

- 3) Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp36.606.473.366
- 4) Mutasi Antar KIB (Keluar) ke Akun Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp80.857.010 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Jasa Feasibility Study (FS) Lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Tanah:

1. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang dipinjam pakai oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.16 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2025

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M ²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
1.	264/2024 181-28-A	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kwarda Pramuka Banten	Luas Bangunan 1.288 M ² Luas Tanah 5.620 M ²	Tgl 23-10-2024 s/d Tgl 22-10-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000004	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000004
2.	41/2025 PL.01/4DPD RI/II/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPD RI	Bangunan 180 M ²	Tgl 12-02-2025 s/d Tgl 11-02-2027	Biro Umum 01.01.11.04.001 000001	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000006
3.	25/2025 032/99-BPKAD/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (BPKAD)	Tanah 500 M ² Bangunan 200 M ²	Tgl 02-01-2025 s/d Tgl 01-01-2027	Dinas Pertanian 01.01.11.04.001 000002	
4	42/2025 12/HM.04.01/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Kepegawaian Negara	Tanah 760 M ² Bangunan 297 M ²	Tgl 03-03-2025 s/d Tgl 02-03-2027	Bapenda 01.01.11.04.001 000001	Bapenda 03.11.01.01.001 000001
5.	02/2024 2/PR.08-PKS/36/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten	Tanah 2.400 M ² Bangunan 2.717 M ²	Tgl 03-03-2024 s/d Tgl 03-03-2026	Biro Umum 01.01.11.04.001 000002	Dinas PRKP 03.11.01.01.001 000005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

No	Nomor Perjanjian Pinjam Pakai	Uraian Perjanjian	Luasan Tanah M ²	Masa Pinjam Pakai	Pencatatan Barang	
					Lahan	Gedung
6.	26/2025 PL 03.05.2.01.25.01	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Tanah 9.063 M ²	Tgl 31-01-2025 s/d Tgl 30-01-2027	Biro Umum 01.01.11.04.014	
7.	24/2025 01/I/KaILG.03.02./2025/BNNP Banten	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNN Banten)	Tanah 5.522 M ²	Tgl 01-02-2025 s/d Tgl 31-01-2027	Biro Umum 01.01.11.04.001	
8.	000.2.3.2/4736-BPKAD/2023 593/4208/BPKAD/2023	Perjanjian Pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Dispura)	Tanah 1.190 M ²	Tgl 24-12-2023 s/d Tgl 23-12-2025	1.3.1.01.01.04.001	
9	032/879-BPKAD/2022 01/III/2022	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Komando Resort Militer 064 Maulana Yusuf	Tanah 4.000 M ²	Tgl 15-03-2022 s/d Tgl 14-03-2027	01.01.11.04.001	
10.	3/2025 B/14/MOU/XI/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Resort Lebak	Tanah 154 M ²	Tgl 02-01-2025 s/d Tgl 31-01-2027	1.3.1.01.01.04.017 000001	
11.	23/2025 B/II/LOG.1.7/2025	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Banten	Tanah 665 M ²	Tgl 05-02-2025 s/d Tgl 04-02-2027	1.3.1.01.01.04.001 000001	

2. Terdapat tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang disewakan oleh instansi/lembaga sebagaimana tabel berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN****Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025****Tabel 5.3.17 Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2025**

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M ²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
1	032/2538-BPKAD/2020 001/SPK/BKS/XI/2020	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Karya Sukses (SPBN Panimbang)	68.310.000	414	Tgl 28-11-2020 s/d Tgl 29-11-2025	Biro Umum 01.01.13.09.004 000017	
2	032/4063-BPKAD/2022	Perjanjian Sewa menyewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	53.506.500		Tgl 01-01-2023 s/d Tgl. 31-12-2025	Bapenda (UPT PPD Ciledug/ Provinsi Banten 1.3.1.01.01.04. 001/479/479	
3	900.1.14.3/012-BPKAD/2025 001/PKS/Dir-BB/II/2025	Perjanjian Sewa Menyewaan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten TBK . Lokasi : 2. Kantor BPKAD (ATM)	48.608.000	8,68	Tgl 01-01-2025 s/d	Biro Umum dan Perlengkapan 01.01.11.04.001	BPKAD BPKAD 03.11.01.01.001
		3. DPRD Banten (ATM)	33.600.000	6,00	Tgl 01-01-2027 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 01-01-2027	000012 Biro Umum 01.01.11.04.001 000012	000001
4	032/2771-DKP/2022 01/SP/UWJ/IX/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Utama Wana Jaya (SPBN Binuangeun)	158.400.000	480	Tgl 01-01-2021 s/d Tgl 31-12-2026	DKP 01.3.1.01.01.04. 017/000001	
5	032/4071-Bapenda/2022 102/PKS-BB/XII/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Kantor Bapenda (Kantor Kas) Kantor Bapenda (ATM) UPT PPD Serang (ATM) UPT PPD Pandeglang(ATM) UPT PPD Rangkasbitung(ATM) UPT PPD Cilegon(ATM) UPT PPD Balaraja(ATM) UPT PPD Cikokol (ATM) UPT PPD Ciledug (ATM) UPT PPD Ciputat (ATM)	49.624.000 33.600.000 67.200.000 27.440.000 7.788.000 37.382.000 25.688.000 47.290.000 62.619.000 40.376.000	34,8 6,00 12,00 7,84 2,28 8,96 6,60 7,28 7,00 7,00	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026 Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026	Berkas di BAPENDA	



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

No	Nomor Perjanjian Sewa	Uraian Perjanjian	Besaran Sewa Rp	Luasan Tanah M ²	Masa Sewa	Pencatatan Barang	
						Lahan	Gedung
		UPT PPD Serpong (ATM)	62.916.000	10,50	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPD Cikande (ATM)	25.446.000	12,80	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
		UPT PPDS Malingping (ATM)	20.980.000	20,25	Tgl 01-01-2025 s/d Tgl 31-12-2026		
6	032/4074-BAPENDA/2022 064/KW4-SUP/2022	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (ATM)					
		UPT PPD Ciledug	53.506.500	8,75	Tgl 01-01-2023 s/d Tgl 31-12-2025		
7	100.3.7/011-BAPENDA/2025 B.1427-KC-XV/LOG/04/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk					
		UPTD PPD Cikokol (ATM)	47.290.000	7,28	Tgl 21-04-2025 s/d Tgl 21-04-2027		
8	100.3.7/010-BAPENDA/2025 B.1427 KC-XV /LOG/04/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk UPT PPD Serpong (ATM)	40.826.600	10,50	Tgl 21-04-2025 s/d Tgl 21-04-2027		
9	B-000.2.3.2/1125/BPKAD/2024 017/PKS/DIR-BB/III/2024	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ATM Setda Provinsi Banten	49.972.500	12	Tgl. 01-01-2024 s/d 31-01-2026		
10	100.3.7/5217-DPUK/2025 08/Pop12/2025	Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Populer Kaca Utama	1.798.609.000	6.382	Tgl. 21-09-2025 s/d 20-09-2026		

3. Rekap Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat

Tabel 5.3.18 Aset Tetap Tanah Bersertifikat per 31 Desember 2025

SKPD	S.D TAHUN 2024	TAHUN 2025	S/D 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	375	18	393
Dinas Kesehatan	51	0	51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	352	96	448
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	155	1	156
Dinas Sosial	13	0	13
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5	0	5
Dinas Perhubungan	3	0	3
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	0	1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	0	4
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	0	3



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

SKPD	S.D TAHUN 2024	TAHUN 2025	S/D 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	0	2
Dinas Kelautan dan Perikanan	27	0	27
Dinas Pertanian	21	0	21
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	0	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56	0	56
Biro Umum	10	0	10
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	0	1
Badan Penghubung	1	0	1
Badan Pendapatan Daerah	28	0	28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	0	7
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	0	1
Dinas DP3AKKB	0	1	1
TOTAL	1.118	116	1.234

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 3 CALK** dan **Lampiran 4 CALK**.

4. Upaya pengamanan tanah (sertifikasi) sampai dengan tahun 2025, dari 1.528 bidang tanah milik Provinsi Banten sebagai berikut:
 - a) Sebanyak 1.234 bidang Tanah sudah bersertifikat Pada Tahun 2025 a.n. Pemerintah Provinsi Banten;
 - b) Sebanyak 116 bidang tanah telah terbit sertifikat pada tahun 2025;
 - c) Total tanah Pemerintah Provinsi Banten yang telah bersertifikat sejumlah 1.234 bidang (80,75%). Termasuk didalamnya Sertifikat 20 buah Situ/Danau/Embung/Waduk (SDEW), yaitu : Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Cihuni, Situ Palayangan, Situ Cilembun, Situ Sindang Mandi, Situ Cibirai, Situ Citaman, Situ Telagawangsa, Situ Ciwaka, Situ Gonggong, Situ gambar, Situ Ciranjen, Situ Cikempong, Situ Cikamunding, Situ Cimaesta, Situ Rempoa/Rompong, Situ Gintung, Waduk Sindang heula dan Situ Lebak Keusik.
 - d) Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Banten merencanakan target sertifikasi tanah sejumlah 112 bidang yang berada di kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
 - e) Dalam percepatan pengamanan BMD melalui sertifikasi tanah Pemerintah Provinsi Banten menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kejati Banten, melalui :
 - 1) Penetapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 670 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pelaksanaan Percepatan Pensertifikatan Atas Hak Tanah Situ Provinsi Banten tanggal 12 Desember 2025.
 - 2) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten Dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tentang Percepatan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Dan Asistensi pencegahan Serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah provinsi Banten Tanggal 5 September 2024 yang berlaku selama lima tahun.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 3) Perjanjian Kerjasama Antara BPKAD Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten Tentang Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor : 000.2.4/002-BPKAD/2024 dan NKS-08/M.6/GS/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan masa berlaku dua tahun.
5. Informasi selanjutnya terkait bidang tanah, terdapat 2 (dua) tanah rawa/situ yang digugat masyarakat dan berperkara di pengadilan:
 - a) Situ Ranca Gede Jakung beralamat Ds. Babakan Kec. Pamarayan Kab. Serang dengan luas 250.000 m² (25 ha) dan Kode Barang : 1.3.1.01.02.01.002 / 213/213. Berperkara di PTUN Serang tanggal 27 Nopember 2024 dengan nomor perkara 49/G/2024/PTUN.SRG. Para Pihak terdiri dari PT. Modern Industrial Estat sebagai Penggugat, Penjabat Gubernur Banten sebagai Tergugat I dan Kepala BPKAD Provinsi Banten sebagai Tergugat II. Isi gugatan menggugat Surat Keputusan Status Penggunaan BMD Tahun 2024 dan untuk Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Sidang pertama pada tanggal 23 Desember 2024. Perkara tersebut telah melalui 12 kali persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan untuk pembacaan Putusan diagendakan pada tanggal 20 Mei 2025.

Pada tanggal 20 Mei 2025 majelis hakim telah mengeluarkan amar putusan (1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan (2) menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.854.000

Pada tanggal 4 Juni 2025 pihak penggugat mengajukan Memori Banding nomor 046/BW-BJHMP/MMR_BDG/VI/2025 Ke Ketua PTUN Jakarta melalui Kepaniteraan PTUN Serang. Pada tanggal 28 Mei 2025 Majelis hakim PTUN Jakarta melalui amar putusan banding perkara nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT telah menerima permohonan banding dari pembanding dengan amar putusan 1) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2) menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Gubernur Banten Nomor 95 Tahun 2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan Kartu Inventaris Barang (KIB A) tanah Provinsi Banten Kabupaten Serang, Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD Dinas PUPR Bagian 2 UPTD Pengelolaan DAS Ciujung-Cidanau, nomor urut 11, nomor kode lokasi 11.01.28.00000000.00000.00000, Kode Barang/ID Barang/ID Awal : 1.3.1.01.02.01.002/213, Nama Barang Tanah Danau/Situ/Embung, Luas 250.000 m², tahun perolehan 1999, Letak/Alamat Situ Ranca Gede Jakung , Ds/Kel Babakan. Kec. Pamarayan, Kabupaten Serang, Sebatas tanah milik pengugat; 3) Memerintahkan Terbanding I dahulu Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan Gubernur nomor 95 tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan Status penggunaan BMD Di lingkungan Provinsi Banten; 4) Memerintahkan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dari daftar aset Provinsi Banten, berupa situ Ranca gede Jakung, seluas kurang lebih 250.000 M² sebagai aset Provinsi Banten dengan nomor kode lokasi 11.01.28.00000000.00000.00000, Kode Barang/ID Barang/ID Awal : 1.3.1.01.02.01.002/213, yang diploting diatas sebagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak setempat dikenal sebagai Kampung Rancagede, Desa Babakan, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Provinsi Banten, dan 5) menghukum para terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menanggapi putusan tersebut pemerintah Provinsi Banten mengajukan Upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh PTUN Jakarta yang merugikan kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Banten, pada tanggal 22 September 2025 permohonan Perkara Kasasi sudah terdaftar di Mahkamah Agung dan Tanggal 12 Januari 2026 berkas Memori Kasasi telah teregister, dan saat ini dalam proses menunggu amar putusan Mahkamah agung.

- b) Situ Setingin beralamat Ds. Klebet Kec. Mauk Kab. Tangerang dengan Luas 264.000 m² (26,4 ha) dan Kode Barang : 01.01.07.01.01 / 0007. Terdapat dua perkara :
- 1) Perkara 666/Pdt.G/2024/PN.Tng terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Juni 2024 dan sidang pertama pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Para Pihaknya yaitu : Hony Adhiwana Dkk sebagai Para Penggugat, Penjabat Gubernur Banten sebagai Tergugat I dan Penjabat Gubernur Jawa Barat sebagai Tergugat II. Isi gugatan Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Setelah sidang pertama, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak lima kali. Hingga saat ini, perkara tersebut telah melalui 24 kali persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tanggal 20 Mei 2025 telah keluar putusan : 1) Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima; dan 2) menghukum para pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.434.000. Perkara dimenangkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.
 - 2) Perkara 1232/Pdt.G/2024/PN terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2024 dan sidang pertama pada tanggal 11 November 2024 dengan Para Pihak yaitu : Tanmi sebagai Penggugat, Kepala BPKAD Provinsi Banten sebagai Tergugat dan BPN Kabupaten Tangerang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

sebagai Turut Tergugat. Isi gugatan Menghapus Bidang Tanah Dalam KIB Provinsi Banten. Setelah sidang pertama, telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali. Hingga pada tanggal 19 Februari 2025 perkara tersebut telah melalui 10 kali persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tanggal 26 Februari 2025 terdapat permohonan intervensi dari Hony Adhiwana Dkk yang sebelumnya sebagai Para Penggugat pada perkara 666/Pdt.G/2024/PN.Tng Sehingga pihaknya berubah menjadi Hony Adhiwana Dkk sebagai Penggugat Intervensi, Tanmi sebagai Tergugat I Intervensi yang sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi, Kepala BPKAD sebagai Tergugat II Intervensi yang sebelumnya sebagai Tergugat Konvensi dan BPN Kab. Tangerang sebagai Turut Tergugat Intervensi yang sebelumnya sebagai Turut Tergugat Konvensi. Pada tanggal 23 Oktober 2025 majelis hakim mengabulkan eksepsi.

Pada tanggal 22 Oktober 2025, Majelis Hakim telah mengeluarkan amar putusan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengenai eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan dalam Pokok Perkara menyatakan 1) gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi tidak dapat diterima, 2) menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dan; 3) menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.395.000 (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Perkara dimenangkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten.

6. Progres capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Pemerintah Provinsi Banten

a) Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat ke 8 (Delapan) dengan persentase sebesar 88.77% dalam 8 Area penilaian yaitu:

- Perencanaan	85.50%
- Penganggaran	86.69%
- Pengadaan Barang dan Jasa	94.40%
- Pelayanan Publik	94.19%
- Pengawasan APIP	82.71%
- Manajemen ASN	89,57%
- Pengelolaan BMD	77.45%
- Optimalisasi Pajak	97.24%

Nilai tertinggi 94 % diperoleh oleh provinsi Bali

b) Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat Provinsi se Indonesia ke 11 (sebelas) dengan persentase sebesar 77.45% dalam indikator Pengelolaan BMD meliputi:

- Aspek Transparansi (100%)

a. Database	100%
-------------	------



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- Aspek Regulasi dan kebijakan (40%)	
a. Pengelolaan BMD	40%
- Aspek Akuntabilitas (92,3%)	
a. Pengamanan Hukum	80,63%
b. Pemanfaatan BMD	97.78%
c. Rencana Kebutuhan BMD dan Pelaporan BMD	99,39%
d. Rekon dan Inventarisasi BMD	100%
e. Penyalahgunaan BMD	100%
f. Penertiban BMD	68,88%
g. Tindak lanjut reviu pengelolaan BMD	100%

Pemerintah Provinsi Banten lebih tinggi dari daerah induknya Jawa Barat memperoleh nilai 75% dan nilai tertinggi diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Barat 88 %. Kontribusi nilai Pemerintah Provinsi Banten terendah pada aspek regulasi dan kebijakan (40%) hal ini disebabkan belum tersedia Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, yang pada saat penilaian MCSP KPK 2025 masih berbentuk draft Perda, pembahasan Perda telah berproses yaitu pada tanggal 25 November 2025 telah diputuskan dalam pembahasan Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, bahwa Perubahan Perda pengelolaan BMD Baru akan dibahas dalam Pansus DPRD tahun anggaran 2026.

- c) Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 berada di peringkat ke 1 (satu) untuk wilayah Se Provinsi Banten dengan persentase sebesar 77.45% dalam indikator Pengelolaan BMD, dengan urutan berdasarkan penilaian:

- Pemerintah Provinsi Banten	77.45%
- Pemerintah Kabupaten Tangerang	74.99%
- Pemerintah Kabupaten pandeglang	73.55%
- Pemerintah Kota Tangerang	71.16%
- Pemerintah Kota Serang	70.28%
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan	66.25%
- Pemerintah Kabupaten Lebak	66.21%
- Pemerintah Kota Cilegon	63.29%
- Pemerintah Kabupaten Serang	57.69%

7. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Pada Ruas Jalan Provinsi

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten Sudah Mencatat Tanah Di bawah Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer, tetapi belum memperhitungkan Ruang Milik Jalan berdasarkan inventarisasi jalan dalam leger jalan yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

8. Tanah dibawah Saluran Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi Banten belum mencatat Daerah Irigasi berupa Tanah dibawah Saluran Irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi serta memberikan kepastian hukum mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, kriteria pembagian tanggung jawab didasarkan pada keberadaan jaringan terhadap wilayah administrasi dan strata luasan daerah irigasi.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang memiliki luas antara 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Penetapan status ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pencatatan aset, penganggaran biaya operasi dan pemeliharaan, serta pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan status, nama, atau luasan daerah irigasi dapat dilakukan secara berkala setelah 2 (dua) tahun ditetapkan melalui usulan tertulis sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan. Berikut Tabel Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Banten:

Tabel 5.3.19 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten Lintas Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
1	DI. Cisangu Atas	446	Kabupaten Lebak = 50 Ha Kabupaten Serang = 396 Ha	7.550,00	1,50	11.325,00
2	DI. Cicinta	1,344	Kabupaten Lebak = 46 Ha Kabupaten Serang = 1.298 Ha	12.300,00	4,00	49.200,00
3	DI. Kadugenep	200	Kabupaten Pandeglang = 36 Ha Kabupaten Serang = 164 Ha	7.450,00	1,00	7.450,00
4	DI. Cikarang Udik	200	Kabupaten Serang = 60 Ha Kota Serang = 140 Ha	8.166,00	1,20	9.799,20
5	DI. Ciwaka Bawah	1,210	Kabupaten Serang = 210 Ha Kota Serang = 1.000 Ha	15.950,00	7,00	111.650,00
6	DI. Cilemer	2,672	Kabupaten Lebak = 150 Ha Kabupaten Pandeglang = 2.522 Ha	38.800,00	2,70	104.760,00
	Jumlah			90.216,00	17,40	294.184,20



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

Tabel 5.3.20 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten Utuh Kabupaten/Kota

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
Kab. Lebak						
1	D.I. Cibuungeun	2,570		46.100,00	6,00	276.600,00
2	D.I. Cihara	2,000		0,00	0,00	0,00
3	D.I. Cikamunding I	1,700		8.250,00	1,50	12.375,00
4	D.I. Cikamunding II	1,030		99.500,00	1,20	119.400,00
5	D.I. Cikoncang	1,805		27.450,00	3,50	96.075,00
6	D.I. Cilangkahan I	1,798		31.850,00	5,57	177.404,50
7	D.I. Cimanyangray	1,500		13.155,00	1,00	13.155,00
8	D.I. Cipalabuh	1,020		18.637,00	1,35	25.159,95
9	D.I. Cisihi	1,000		9.500,00	1,00	9.500,00
Kab. Pandeglang						
1	D.I. Cisata	2,112		15.155,00	2,50	37.887,50
2	D.I. Pasir Eurih	1,245		16.285,00	8,20	133.537,00
Kab. Serang						
1	D.I. Cikalumpang	1,000		26.326,00	3,50	92.141,00
2	D.I. Cipari/Ciwuni	1,644		11.580,00	7,00	81.060,00
3	D.I. Cisangu Bawah	1,436		21.757,00	1,00	21.757,00
Kota Serang						
1	D.I. Cibanten	1,289		21.850,00	5,30	115.805,00
Jumlah		23,149		367.395,00	48,62	1.211.856,95

Tabel 5.3.21 Daerah Irigasi Tambak Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Keterangan	Panjang	Lebar	Luas
1	DIT. Mekarsari	1,635	Kabupaten Pandeglang			

Provinsi Banten masih dalam proses Inventarisasi dan Pendataan terhadap luasan dan harga perolehan yang menggunakan nilai pada NJOP atau Zona Nilai Tanah pada aplikasi Bhumi ATR/BPN.

b. Peralatan dan Mesin

Rp4.539.113.218.722

Peralatan dan mesin mencakup kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp4.539.113.218.722 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp4.224.775.742.902



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

atau mengalami peningkatan sebesar Rp314.337.475.820 (7,44%). Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.3.22 Saldo Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	4.224.775.742.902
Mutasi Tambah:	398.424.652.523
Belanja Modal Tahun 2025	360.377.599.640
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	9.975.000
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.313.941.512
Kapitalisasi dari akun Hibah	6.273.943.059
Koreksi atas Data Baru Catat	8.074.444.000
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang	218.653.000
Reklasi atas perubahan Akun Klasifikasi Barang	5.624.554.385
Reklasifikasi Ekstracomptable menjadi Intracomptable	408.000.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	16.123.541.927
Mutasi Kurang:	(84.087.176.704)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(30.332.266.472)
Penghapusan	(1.150.598.240)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(6.802.125.475)
Reklasifikasi ke Akun Beban	(5.945.946)
Reklasifikasi ke akun aset lain-lain	(31.058.234.690)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun GB, JIJ, ATL dan ATB	(14.738.005.881)
Saldo Per 31 Desember 2025	4.539.113.218.722

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp398.424.652.523 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp360.377.599.640 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp218.185.743.001
- Dinas Kesehatan	Rp55.301.856.197
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp5.349.424.979
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp1.829.093.771
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp360.095.100
- Satuan Polisi Pamong Praja	Rp209.742.270
- Dinas Sosial	Rp825.230.763
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp5.442.081.579
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp170.049.151
- Dinas Ketahanan Pangan	Rp231.900.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp839.222.631
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp1.638.460.350
-	Dinas Perhubungan	Rp8.714.673.373
-	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Rp6.181.557.714
-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp576.314.660
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp1.292.780.720
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp1.086.605.286
-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp1.134.573.142
-	Dinas Pariwisata	Rp349.112.700
-	Dinas Pertanian	Rp2.288.577.770
-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp7.800.000
-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp354.887.192
-	Biro Umum dan Perlengkapan	Rp4.313.183.540
-	Sekretariat DPRD	Rp29.464.550.643
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp319.559.246
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp133.726.140
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp11.763.094.589
-	Badan Kepegawaian Daerah	Rp881.250.000
-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp720.176.835
-	Badan Penghubung	Rp71.484.000
-	Inspektorat Provinsi	Rp328.659.998
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp12.132.300
2)	Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.975.000 terdapat pada SKPD:	
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp9.975.000
3)	Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.313.941.512 terdapat pada SKPD:	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp551.125.761
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp16.650.000
-	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp12.765.000
-	Dinas Perhubungan	Rp6.990.780
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp8.880.000
-	Dinas Pertanian	Rp23.963.790
-	Biro Umum dan Perlengkapan	Rp97.132.785
-	Badan Pendapatan Daerah	Rp298.956.300
-	Badan Penghubung	Rp252.935.000
-	Inspektorat Provinsi	Rp44.542.095



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- 4) Kapitalisasi dari akun Pendapatan Hibah sebesar Rp6.273.943.059 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp5.377.363.059
 - Dinas Perhubungan Rp82.000.000
 - Dinas Pertanian Rp814.580.000
- 5) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp8.074.444.000 terdiri dari:
 - a) Merupakan Aset yang diterima sebelum tahun 2025 namun baru dilakukan pencatatan berdasarkan dokumen BAST yang diterima tahun 2025 pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp390.742.000
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp144.400.000
 - b) Merupakan Aset yang dilakukan pencatatan berdasarkan Hasil Keputusan Pengadilan MA nomor 215/PDT/2023/PT BTN pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.292.802.000
 - c) Merupakan Aset yang dilakukan pencatatan berdasarkan Hasil Inventarisasi
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp8.000.000
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp238.500.000
- 6) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang sebesar Rp218.653.000 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp197.600.000
Berupa kendaraan roda empat yang sebelumnya tercatat Rusak Berat menjadi naik status ke aset tetap karena dimanfaatkan menjadi Alat Praktik SMKN 1 Ciruas
 - Biro Umum dan Perlengkapan Rp21.053.000
Berupa kendaraan roda dua yang baru diketemukan hasil inventarisasi tahun 2025
- 7) Reklasifikasi atas perubahan akun Klasifikasi Barang sebesar Rp5.624.554.385 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp211.836.160
 - Dinas Kesehatan Rp792.071.380
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.567.047.161
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp53.599.684
- 8) Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Intracomptable pada SMKN 2 Kota Serang senilai Rp408.000.000 berupa 4 (empat) kendaraan untuk Alat simulator Pendidikan yang dilakukan Penilaian berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.
- 9) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp16.123.541.927 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp428.053.300
 - Dinas Kesehatan Rp8.577.932.482



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp378.140.183
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp21.211.787
- Dinas Perhubungan	Rp6.671.000.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp47.204.175

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.087.176.704 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp30.332.266.472 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp28.208.786.982
- Dinas Kesehatan	Rp940.566.605
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp29.916.000
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp39.631.800
- Satuan Polisi Pamong Praja	Rp47.563.500
- Dinas Sosial	Rp83.706.260
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp168.276.000
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp1.959.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp16.171.787
- Dinas Perhubungan	Rp569.548.491
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Rp41.192.214
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp23.375.000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp4.050.000
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp62.643.152
- Dinas Pertanian	Rp34.718.000
- Biro Umum dan Perlengkapan	Rp54.607.242
- Badan Pendapatan Daerah	Rp5.554.440
- 2) Penghapusan atas Temuan TLHP BPK terhadap Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp1.150.598.240 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp6.802.125.475 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp910.300.425
- Dinas Kesehatan	Rp3.271.300
- Dinas Perhubungan	Rp5.859.000.000
- Biro Umum dan Perlengkapan	Rp29.553.750
- 4) Reklasifikasi ke Akun Beban sebesar Rp5.945.946 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5) Reklasifikasi ke akun aset lain-lain sebesar Rp31.058.234.690 karena kondisi rusak berat, terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp5.351.531.085
- Dinas Kesehatan	Rp821.762.380
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp592.618.309
- Satuan Polisi Pamong Praja	Rp575.961.600
- Dinas Sosial	Rp1.511.611.756



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp815.296.865
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp38.725.000
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp53.599.684
- Dinas Perhubungan	Rp23.582.500
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp30.750.000
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Rp1.979.719.204
- Dinas Pertanian	Rp627.688.858
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp258.000.000
- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp432.250.000
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Rp126.000.000
- Biro Umum dan Perlengkapan	Rp4.299.125.914
- Biro Pengadaan Barang/Jasa	Rp147.865.014
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Rp21.910.000
- Biro Administrasi Pimpinan	Rp173.840.500
- Sekretariat DPRD	Rp2.249.000.000
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp150.600.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp4.805.547.161
- Badan Pendapatan Daerah	Rp5.615.717.831
- Badan Penghubung	Rp355.531.030

6) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.738.005.881 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp399.012.500
- Dinas Kesehatan	Rp4.157.860.500
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp331.800.000
- Dinas Perhubungan	Rp1.935.020.820
- Sekretariat DPRD	Rp 7.914.312.061

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8622/C/DM.00.03/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/Dm.00.03/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 September 2025, Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menerima bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran berupa:

Tabel 5.3.23 Jenis Barang Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran

No	Jenis Barang	Anggaran per Paket Bantuan
1	Smartboard (<i>berupa IFP</i>)	Rp 26.640.000
2	Laptop	Rp. 6.496.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

No	Jenis Barang	Anggaran per Paket Bantuan
3	Media Penyimpanan Eksternal	Rp. 408.000

Tabel 5.3.24 Rekapitulasi Barang Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran

NO	WILAYAH	JUMLAH UNIT BANTUAN			HARGA PEROLEHAN			TOTAL	
		SMARTBOARD (BERUPA IFP)	LAPTOP	MEDIA PENYIMPANAN EKSTERNAL	SMARTBOARD (BERUPA IFP)	LAPTOP	MEDIA PENYIMPANAN EKSTERNAL	BARANG	HARGA PEROLEHAN
1	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Lebak	68	23	23	1.811.520.000	149.408.000	9.384.000	114	1.970.312.000
2	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Pandeglang	40	6	6	1.065.600.000	38.976.000	2.448.000	52	1.107.024.000
3	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD SERAGON	72	24	23	1.918.080.000	155.904.000	9.384.000	119	2.083.368.000
4	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kabupaten Tangerang	57	30	30	1.518.480.000	194.880.000	12.240.000	117	1.725.600.000
5	SMAN/SMKN/SKHN Wilayah KCD Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	62	29	26	1.651.680.000	188.384.000	10.608.000	117	1.850.672.000
TOTAL		299	112	108	7.965.360.000	727.552.000	44.064.000	519	8.736.976.000

Rincian barang-barang penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut belum tercatat pada Laporan Keuangan dikarenakan sampai dengan tanggal pelaporan berakhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Gedung dan Bangunan **Rp5.383.991.912.324**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp5.383.991.912.324 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp5.021.714.531.995 atau mengalami peningkatan sebesar Rp362.277.380.329 (7,21%). Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.25 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	5.021.714.531.995
Mutasi Tambah:	426.773.920.258
Belanja Modal Tahun 2025	205.562.940.358
Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	28.330.000
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	58.387.145.156
Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah	114.514.917.723



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	801.851.620
Koreksi atas Data Baru Catat	4.083.660.114
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang	89.350.000
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	40.068.927.638
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	1.276.081.829
Mutasi Antar KIB (Masuk)	1.960.715.820
Mutasi Kurang:	(64.496.539.929)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(157.263.249)
Reklasifikasi atas Koreksi Harga	(10.000.000)
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(36.553.482.524)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah	(4.794.187.409)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	(22.981.606.747)
Saldo Per 31 Desember 2025	5.383.991.912.324

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp426.773.920.258 dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp205.562.940.358 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp167.837.476.232
- Dinas Kesehatan	Rp4.691.752.017
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp17.011.856.287
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp4.008.210.000
- Dinas Sosial	Rp91.393.000
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp2.338.863.922
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp1.383.825.136
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp399.546.366
- Dinas Perhubungan	Rp553.027.524
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp743.606.800
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp746.240.510
- Dinas Pariwisata	Rp191.240.000
- Dinas Pertanian	Rp100.492.430
- Sekretariat DPRD	Rp2.159.820.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp96.480.294
- Badan Pendapatan Daerah	Rp3.150.834.841
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp58.275.000

2) Atribusi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.330.000 terdapat pada SKPD:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp21.120.000
- Dinas Pertanian	Rp7.210.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- 3) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp58.387.145.156 terdapat pada SKPD:
- | | |
|--|------------------|
| - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp11.292.733.282 |
| - Dinas Kesehatan | Rp615.077.590 |
| - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp1.653.964.725 |
| - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Rp866.670.893 |
| - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp1.685.944.139 |
| - Dinas Perhubungan | Rp996.108.281 |
| - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rp390.977.700 |
| - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp396.206.955 |
| - Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp676.908.979 |
| - Dinas Pertanian | Rp668.934.484 |
| - Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp394.972.400 |
| - Biro Umum dan Perlengkapan | Rp49.282.110 |
| - Sekretariat DPRD | Rp35.976.847.856 |
| - Badan Pendapatan Daerah | Rp917.571.374 |
| - Badan Penghubung | Rp706.104.964 |
| - Inspektorat Daerah | Rp908.242.788 |
| - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp190.596.636 |
- 4) Kapitalisasi dari akun Pendapatan Hibah sebesar Rp114.514.917.723 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Selasar dan Bangunan Parkir pada sekolah Penerima Hibah Revitalisasi Tahun 2025.
- 5) Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp801.851.620 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 6) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp4.083.660.114 berupa Gedung dan Bangunan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat sebelum tahun 2025 namun berita acara serah terima nya baru diperoleh pada tahun 2025 terdapat pada SKPD:
- | | |
|---|-----------------|
| - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp2.971.098.064 |
| Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen di SMAN 14 Kabupaten Pandeglang, Bangunan Gudang Tertutup Permanen di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Pagar Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Gedung Pos Jaga Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen di SMAN 32 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Malingping, Bangunan Tempat Parkir di SMKN 1 Kota Cilegon, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen di SMKN 1 Kramatwatu, Bangunan Gedung Kantor Permanen di SMKN 1 Malingping. | |
| - Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp1.112.562.050 |



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen – Gedung Pusat Pembelajaran Masyarakat (PBM) Cikuh Wetan di Dinas Kelautan dan Perikanan.

- 7) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tetap sesuai Klasifikasi Barang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp89.350.000 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen berlokasi di jl perintis kemerdekaan II desa/kelurahan babakan kecamatan tangerang kabupaten tangerang.
- 8) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp40.068.927.638 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp745.437.970
Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen.
 - Dinas Kesehatan Rp18.733.150.660
Berupa Bangunan Rumah Sakit Umum pada UPT RSUD Banten
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp20.565.339.008
Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen – Pembangunan Gedung Bank Banten berlokasi di ruas jalan veteran
 - Dinas Pertanian Rp25.000.000
- 9) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp1.276.081.829 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 10) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp1.960.715.820 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp54.000.000
Berupa Pembangunan Pagar Semi Permanen pada SMAN 1 Mancak dan Pagar Permanen pada SKHN 01 Kabupaten Tangerang dan SMAN 15 Kabupaten Pandeglang
 - Dinas Perhubungan Rp1.906.715.820
Berupa Pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen pada Pos Perlintasan Kereta Api yang berlokasi di Nyomplong Kabupaten Lebak, Bojong Cae Kabupaten Lebak, Bojong Pandan Kabupaten Serang, Jambu Kabupaten Serang, Dahu Kabupaten Serang, Bogeg Kota Serang, Ciceri Kota Serang, Sumur Pecung Kota Serang, Kebaharan Kota Serang, Jatake Kabupaten Tangerang dan Tonjong Baru Kabupaten Serang

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.496.539.929 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp157.263.249 karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp144.121.249
 - Dinas Kesehatan Rp13.142.000
- 2) Reklasifikasi atas Koreksi Harga sebesar Rp10.000.000 terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) berdasarkan Surat Keputusan Hibah dan Surat Keputusan Bongkaran Gedung dan Bangunan, Surat Pernyataan Kepala OPD atas perubahan Kondisi Aset sebesar Rp36.553.482.524, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp250.000.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp2.851.278.910
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp2.671.923.000
- Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	Rp1.706.000.000
- Dinas Kelautan Dan Perikanan	Rp3.680.927.050
- Dinas Koperasi Dan Umkm	Rp209.700.000
- Biro Umum dan Perlengkapan	Rp256.255.000
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp24.927.398.564

4) Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang daerah sebesar Rp4.794.187.409 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.981.606.747 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp21.281.358.779
- Dinas Kesehatan	Rp509.336.983
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp378.140.183
- Dinas Sosial	Rp91.393.000
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp234.169.777
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp199.473.500
- Dinas Pariwisata	Rp191.240.000
- Dinas Pertanian	Rp49.290.350
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp47.204.175

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp9.506.088.574.010**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 sebesar Rp9.506.088.574.010 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp9.015.649.850.754 atau mengalami peningkatan sebesar Rp490.438.723.256 (5,44%). Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.26 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	9.015.649.850.754
Mutasi Tambah:	526.042.416.392
Belanja Modal Tahun 2025	299.055.992.016
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	1.419.441.011
Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah	48.592.001.318
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	14.340.399.393
Koreksi atas Data Baru Catat	212.636.720
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	143.254.506.210
Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset	373.903.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	18.793.536.724



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Mutasi Kurang:	(35.603.693.136)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(273.950.500)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(1.148.855.430)
Reklasifikasi atas perubahan akun klasifikasi barang	(1.293.866.191)
Penghapusan	(8.733.793.778)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	(24.153.227.237)
Saldo Per 31 Desember 2025	9.506.088.574.010

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp526.042.416.392 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp299.055.992.016 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp6.659.858.349
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp272.285.063.055
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp96.169.493
 - Dinas Perhubungan Rp15.103.561.050
 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp4.734.534.330
 - Badan Pendapatan Daerah Rp176.805.739
- 2) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.419.441.011 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.220.396.341
 - Dinas Kesehatan Rp149.880.000
 - Dinas Pertanian Rp49.164.670
- 3) Kapitalisasi dari Pendapatan Hibah sebesar Rp48.592.001.318 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp8.365.638.721
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp40.226.362.597
- 4) Koreksi atas Data Baru Catat sebesar Rp212.636.720 yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Dana BOSP sebelum tahun 2025 dengan surat pernyataan Kepala Sekolah pada SMKN 1 Kramatwatu.
- 5) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp143.254.506.210 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa ruas jalan ciparay-cikumpay dan ruas jalan sumur-taman jaya.
- 6) Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset sebesar Rp373.903.000 terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jalan Provinsi Arteri.
- 7) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp18.793.536.724 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp9.538.775.986
 - Dinas Kesehatan Rp327.381.838
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp331.800.000
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp212.957.990
 - Dinas Perhubungan Rp28.305.000
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp199.473.500
 - Dinas Pariwisata Rp191.240.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

- Dinas Pertanian Rp49.290.350
- Sekretariat DPRD Rp7.914.312.060

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.603.693.136 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp273.950.500 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Konsultan Pengawasan yang semula dianggarkan pada belanja modal yang merupakan peruntukan belanja persediaan diserahkan kepada Masyarakat pada UPTD PJJ Tangerang
- 2) Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp1.148.855.430 berdasarkan Hasil Surat Keputusan Penjualan dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025, terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp162.498.360
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp827.047.070
 - Badan Pendapatan Daerah Rp159.310.000
- 3) Reklas atas perubahan akun klasifikasi barang sebesar Rp1.293.866.191 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Penghapusan sebesar Rp8.733.793.778 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Bahan Bangunan dan Konstruksi yang telah diserahkan ke Masyarakat.
- 5) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp24.153.227.237 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan Rp6.478.358.037
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp11.003.869.200
 - Dinas Perhubungan Rp6.671.000.000

e. Aset Tetap Lainnya Rp514.565.838.910

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp514.565.838.910 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp469.710.626.512 atau mengalami peningkatan sebesar Rp44.855.212.398 (9,55%). Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.27 Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 <i>Audited</i>	469.710.626.512
Mutasi Tambah:	48.255.570.408
Belanja Modal Tahun 2025	48.066.730.408
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	7.830.000
Mutasi Antar KIB (Masuk)	181.010.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Mutasi Kurang:	(3.400.358.010)
Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel	(375.000)
Penghapusan atas Temuan TLHP BPK pada Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024	(192.544.800)
Reklasifikasi ke Akun Persediaan	(180.000)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(1.685.181.160)
Penghapusan	(1.054.578.200)
Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(467.498.850)
Saldo Per 31 Desember 2025	514.565.838.910

Mutasi tambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.255.570.408 dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp48.066.730.408 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp47.551.124.134
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Rp512.720.274
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp2.886.000
- 2) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.830.000 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa aset buku yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Dana BOSP pada SMKN 4 Kota Cilegon
- 3) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp181.010.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.400.358.010 berasal dari:

- 1) Reklasifikasi Ke Akun Ekstrakomptabel sebesar Rp375.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi atas barang bercorak kesenian Alat Musik Modern/Band pada SMAN 2 Kabupaten Tangerang
- 2) Penghapusan atas Temuan TLHP BPK pada Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp192.544.800 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Reklasifikasi ke Akun Persediaan sebesar Rp180.000 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan aset kategori barang persediaan berupa bingkai foto pada SMKN 4 Kota Cilegon;
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp1.685.181.160 berdasarkan Surat Keputusan Penjualan terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.655.181.160
 - Badan Penghubung Rp30.000.000
- 5) Penghapusan sebesar Rp1.054.578.200 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp12.400.000
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp9.905.600
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Rp197.600.000
 - Dinas Pertanian Rp834.672.600



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 6) Mutasi Antar KIB (Keluar) Ke Akun Peralatan dan Mesin dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp467.498.850 terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp52.248.913.064

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp52.248.913.064 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp198.760.372.691 atau mengalami penurunan sebesar Rp146.511.459.627 (73,71%). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 24 Neraca**. Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.28 Saldo KDP per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024 Audited	198.760.372.691
Mutasi Tambah:	38.920.302.322
Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa	709.356.600
Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025	14.938.400.069
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap	420.463.200
Mutasi Antar KIB (Masuk)	22.852.082.453
Mutasi Kurang:	(185.431.761.949)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset	(183.078.509.238)
Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat)	(2.279.002.711)
Penghapusan	(74.250.000)
Saldo Per 31 Desember 2025	52.248.913.064

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp38.920.302.322 dirinci sebagai berikut:

- 1) Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp709.356.600 terdapat pada Biro Umum dan Perlengkapan Berupa Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi DED Penataan.
- 2) Kewajiban Pembayaran Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp14.938.400.069 terdapat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain menjadi Aset Tetap sebesar Rp420.463.200 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4) Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp22.852.082.453 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp11.664.834.553
 - Dinas Kesehatan Rp91.985.700
 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp11.003.869.200
 - Dinas Sosial Rp91.393.000



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp185.431.761.949 dirinci sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi KDP menjadi Aset sebesar Rp183.078.509.238 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp745.437.970
 - Dinas Kesehatan Rp18.733.150.660
 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Rp163.525.398.608
 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rp49.522.000
 - Dinas Pertanian Rp25.000.000
- 2) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp2.279.002.711 disebabkan KDP berupa DED secara teknis sudah tidak sesuai kondisi saat ini dan secara penganggaran sudah tidak masuk rencana Kerja OPD terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp579.978.500
 - Dinas Kesehatan Rp243.379.675
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.455.644.536
- 3) Penghapusan sebesar Rp74.250.000 terdapat pada Dinas Pertanian berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan jasa Konsultan yang sudah tidak akan dilaksanakan Pembangunan Fisiknya.

g. Akumulasi Penyusutan Rp12.332.640.474.699

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.332.640.474.699 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

URAIAN	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	3.347.991.260.989	15.793.206.939	336.349.614.329	3.668.547.668.380
Gedung dan Bangunan	2.067.062.785.793	183.683.598	271.828.661.376	2.338.707.763.571
Jalan Irigasi Jaringan	5.801.098.266.090	(25.303.096.738)	460.347.160.033	6.286.748.522.861
Aset Tetap Lainnya	33.586.548.999	9.403.475	5.059.374.362	38.636.519.886
Jumlah	11.249.738.861.872	(9.316.802.727)	1.073.584.810.100	12.332.640.474.699

5.3.1.4 Properti Investasi Rp893.127.841.767

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp893.127.841.767, berupa Banten Internasional Stadium (BIS) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.30 Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
Tanah	216.595.791.126
Gedung dan Bangunan	894.986.419.436
Jumlah Properti Investasi Bruto	1.111.582.210.562
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(218.454.368.795)
Jumlah Properti Investasi Neto	893.127.841.767

5.3.1.5 Aset Lainnya

Rp528.656.655.714

Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25 Neraca**. Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.31 Aset Lainnya per 31 Desember 2025

URAIAN	Tahun 2024 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Neto 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	19.714.286	13.570.000	19.714.286	13.570.000
Aset Tak Berwujud Neto	24.901.470.548			24.223.634.234
Aset Tak Berwujud	35.732.344.452	9.587.201.673	2.083.119.000	43.236.427.125
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.830.873.904)	53.125.000	8.235.043.987	(19.012.792.891)
Aset Lain-lain Neto	495.913.275.032			504.419.451.480
Aset Lain-lain	950.748.796.252	110.531.007.705	88.790.236.038	972.489.567.920
Akumulasi Penyusutan	(454.835.521.220)	19.275.854.191	32.510.449.412	(468.070.116.440)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-
Jumlah	520.834.459.866			528.656.655.714

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

- Tagihan Jangka Panjang** **Rp13.570.000**
Saldo Tagihan Jangka Panjang Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.570.000. Saldo tersebut merupakan piutang tuntutan ganti kerugian yang jatuh temponya di atas 1 (satu) tahun.
- Aset Tidak Berwujud** **Rp24.223.634.234**
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.223.634.234 turun sebesar Rp677.836.314 atau 2,72% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp24.901.470.548. Saldo tersebut seluruhnya merupakan perangkat lunak (*software*) dan Lisensi. Penjelasan mutasi saldo aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 1) Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.587.201.673 berasal dari:
 - a. Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp4.257.802.773;
 - b. Kapitalisasi dari Akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp391.810.900;
 - c. Reklasifikasi Aset Lain-Lain menjadi Aset Tak Berwujud sesuai Klasifikasi Barang Rp615.725.000 dikarenakan terdapat upgrade atas software yang sebelumnya sudah tidak digunakan namun dimanfaatkan kembali;
 - d. Mutasi Antar KIB (Masuk) sebesar Rp4.321.863.000.
- 2) Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.083.119.000 berasal dari:
 - a. Reklas ke Akun Beban sebesar Rp7.514.000;
 - b. Reklas Aset Tetap menjadi aset Lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp49.000.000;
 - c. Reklas dikarenakan sebab lainnya sebesar Rp17.000.000
 - d. Mutasi Antar KIB (Keluar) sebesar Rp2.009.605.000.

c. Aset Lain-lain

Rp504.419.451.480

Nilai Aset Lain-lain bruto per 31 Desember 2025 sebesar Rp972.489.567.920 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp468.070.116.440 sehingga nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp504.419.451.480 naik sebesar Rp8.506.176.447 atau 1,72% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp950.748.796.252. Rekapitulasi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25.2 Neraca**. Penjelasan saldo aset lain-lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa piutang atas tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp237.655.000;
- 2) Uang sitaan Kejaksaan Negeri Serang yang disita dari anggota DPRD yang menerima tunjangan perumahan masa bakti 1999 – 2004 sebesar Rp169.000.000. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Serang nomor: B-572/M,6,10/Fs.1/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 disampaikan bahwa:
 - a) Uang sitaan dan uang titipan atas tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Banten tersebut tersimpan dalam rekening titipan Kejaksaan Negeri Serang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Serang atas nama RPL 020 Kejari Serang UTK PDT Perkara Nomor Rekening: 0084-01-003443-30-0 dengan saldo sejumlah Rp169.000.000;
 - b) Status atas uang sebesar Rp169.000.000 memiliki rincian Rp109.000.000 belum bisa diambil karena memiliki dua putusan berbeda yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2097K/PID.2006 tanggal 8 Mei 2008 atas nama terdakwa Dr.Ir.H. Djoko Munandar, M.Eng dengan amar putusan terkait uang sitaan tersebut yaitu "dikembalikan dari mana asal barang bukti itu disita". sedangkan dalam putusan Pengadilan negeri Serang Nomor: 900/Pid.B/2008/PN.Srg tanggal 1 April 2009 atas nama terdakwa

Rosyid dan James Tangka, SH dengan amar putusan "Dirampas untuk Negara", sehingga masih menunggu fatwa Mahkamah Agung RI. Serta uang sebesar Rp60.000.000 belum dikembalikan kepada mantan anggota dewan yaitu: atas nama HM. Sayuti, BA sebesar Rp2.000.000, atas nama Maman S sebesar Rp8.000.000 dan atas nama H. Achmad Fachruji sebesar Rp50.000.000 dikarenakan belum diketahui alamat terakhir yang bersangkutan.

- 3) Aset tetap dalam kondisi rusak berat sebesar Rp480.329.975.588 dengan rincian lampiran pada **Lampiran 25.3 Neraca**.
- 4) Aset Lain-Lain berupa Kerugian Daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua sebesar Rp4.829.369.200 yang belum dikembalikan ke RKUD. Terkait hal tersebut Gubernur telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 951/Kep.45-Huk/2023 dan Nomor 951/Kep.46-Huk/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah terhadap saudara Zulfikar dan saudara Ahmad Pridasya, namun kedua SK Penetapan Pembebanan tersebut belum didukung Jaminan Penyelesaian TGR. Pj Sekretaris Daerah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) telah menyampaikan surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan nomor: P-900.1.11.4/001-MPPKD/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Konfirmasi Hasil Putusan Sidang.
- 5) Aset Tetap dalam proses hibah ke Kabupaten Kota sebesar Rp18.853.451.691 berupa:
 - a. Tanah dibawah Jalan sebesar Rp11.337.309.750 sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Daftar Tanah di Bawah Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	LUAS	HARGA PEROLEHAN
	Tanah dibawah Jalan		11.337.309.750
1	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13.900	1.944.783.750
2	Ruas Jl. H. Usman (Ciputat) (KOTA TANGSEL Kec. Ciputat)	3.649	9.392.526.000

- b. Jalan sebesar Rp7.516.141.941 pada ruas Ciparay-Warung Banten dan Ruas Jalan Haji Usman sebagai berikut:

Tabel 5.3.33 Daftar Ruas Jalan yang dicatat di aset lain-lain

NO	URAIAN	PANJANG (KM)	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	Jalan		19.441.737.438	11.925.595.497	7.516.141.941
1	Ruas Jalan Cipanas – Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	13,9	19.190.149.638	11.674.007.697	7.516.141.941
2	Ruas Jalan Haji Usman	3,6	251.587.800	251.587.800	-



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

d. **Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)** **Rp0**

Pada tanggal 11 April 2025 telah disalurkan Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) melalui rekening 519000639980 Rek Lain BI TDF TKD Provinsi Banten ke Rekening Kas Daerah Provinsi Banten sebesar Rp33.266.821.000.

Nilai TDF tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, serta diketahui telah disalurkan DBH Kurang Bayar sebesar Rp52.427.514.000 pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Sehingga menyisakan DBH Kurang Bayar yang Rp69.244.677.000 yang selanjutnya di tetapkan kedalam komponen DBH Kurang Bayar dan Lebih Bayar s.d Tahun 2024 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 sebesar Rp576.641.493.000.

5.3.2 Kewajiban **Rp746.076.822.332**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 terdiri dari:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp501.117.085.079**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp501.117.085.079 turun sebesar Rp359.146.855.127 atau 41,75% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp860.263.940.206. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.34 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036,00	138.497.733.036,00	-	0,00
Pendapatan di terima di muka	2.990.941.314,84	1.996.670.086,07	994.271.229	49,80
Utang Belanja	359.628.410.728,30	719.769.537.084,00	(360.141.126.356)	(50,04)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	0,00
JUMLAH	501.117.085.079	860.263.940.206	(359.146.855.127)	(41,75)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26 Neraca**. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** **Rp0**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo.

b. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** **Rp138.497.733.036**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.497.733.036 merupakan bagian lancar utang pada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2025. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 28 Neraca**.

c. **Pendapatan Diterima di Muka** **Rp2.990.941.315**

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.990.941.315 merupakan pendapatan atas sewa bangunan yang masa sewanya melewati Tahun 2025 namun pembayarannya telah dilakukan seluruhnya pada Tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Pendapatan diterima dimuka retribusi daerah sebesar Rp2.940.879.782 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pendapatan Daerah, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 29 Neraca**.
- 2) Pendapatan diterima dimuka lain - lain PAD yang sah - hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa sebesar Rp50.061.533 terdapat pada RSUD Banten, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 29 Neraca**.

d. **Utang Belanja** **Rp359.628.410.728**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp359.628.410.728 terdiri dari:

- 1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.280.000 terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah berupa Tagihan Pemeriksaan Kesehatan - Medical Check Up Uji Kesehatan Tertentu Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.1 Neraca**.
- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.423.313.038 terdiri dari:
 - a) Utang Belanja Barang sebesar Rp7.142.678.325 terdapat pada:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp630.293.394 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Dan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.2 Neraca**;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.840.000 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis - Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.3 Neraca**;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.510.544.931 berupa Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp126.131.257 dan Utang Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp6.384.413.674. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.4 Neraca** dan **Lampiran 30.5 Neraca**.
- b) Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp87.050.775 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pemeliharaan Kantor Gedung Ex BLKI Serpong. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.5 Neraca**.
- c) Utang Belanja Jasa sebesar Rp4.278.420.221 yang tersebar pada SKPD. Rincian Utang Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.35 Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.208.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	32.667.300
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	21.905.042
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	61.191.090
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.747.000.954
Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.950.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	99.674.288
Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	270.874.300
Utang Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi-Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	8.585.300
Utang Belanja Jasa Kantor-Sewa Jasa Internet	28.363.947
TOTAL	4.278.420.221

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.6 Neraca**.

- d) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp6.915.163.718 terdapat pada RSUD Banten. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.7 Neraca**.
- 3) Utang Belanja Hibah sebesar Rp2.579.582.397 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.4 Neraca**.
- 4) Utang Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp29.993.600.306 terdiri dari:
 - a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.653.200.913 terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp14.938.400.068 berupa pembangunan unit sekolah baru pada SMKN 16 Kabupaten Tangerang dan SMKN 12 Kota Tangerang,



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

pembangunan ruang kelas baru pada SMKN 1 Baros, pembangunan ruang laboratorium pada SMKN 1 Panggarangan dan rehabilitasi ruang praktek peserta didik pada SMKN 1 Wanasalam;

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp714.800.845 berupa Penataan Pagar dan Parkir BIS;

- b) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp14.340.399.393 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pembangunan Jembatan Pelawad 2 Kota Tangerang, Pembangunan Jembatan Speelwijk Ruas Jalan Terate - Banten Lama, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikoncang, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilampe, Pembangunan Pengendali Banjir Kali Angke, Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Zaitun, Rehabilitasi Ruas Jalan Cipanas – Ciparay, Rehabilitasi Ruas Jalan Ciparay – Cikumpay, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibinuangeun, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilemer, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisata, Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisangu Atas, Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.8 Neraca**.

- 5) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp308.629.634.987 terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian Utang Belanja bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.36 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
per 31 Desember 2025**

KABUPATEN / KOTA	Kurang Salur (Rp)	Pelampauan (Rp)	Utang Bagi Hasil Pajak (Rp)
1	2	3	4=2+3
KABUPATEN LEBAK	18.847.381.693	60.456.650	18.907.838.343
KABUPATEN PANDEGLANG	17.618.906.787	4.889.800	17.623.796.587
KABUPATEN SERANG	39.407.096.652	698.848.400	40.105.945.052
KABUPATEN TANGERANG	80.402.038.373	231.180.900	80.633.219.273
KOTA CILEGON	22.278.179.144	0	22.278.179.144
KOTA SERANG	13.902.333.930	49.000.700	13.951.334.630
KOTA TANGERANG	63.214.445.569	297.901.250	63.512.346.819
KOTA TANGERANG SELATAN	51.324.516.339	292.458.800	51.616.975.139
TOTAL	306.994.898.490	1.634.736.504	308.629.634.987

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 30.9 Neraca**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp0

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tidak termasuk dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Belanja.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rp244.959.737.253

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp244.959.737.253 merupakan Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berasal dari Pinjaman PT SMI Persero. Berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor: 577/PKS/.08-Huk/IX/2020 dan Nomor PERJ-113/SMI/0920, jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 8 (delapan) tahun.

Tabel 5.3.37 Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Saldo Awal Utang Jangka Panjang (Pinjaman ke PT. SMI)	244.959.737.253	383.457.470.289	(138.497.733.036)	(36,12)
JUMLAH	244.959.737.253	383.457.470.289	(138.497.733.036)	(36,12)

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 32 Neraca**.

5.3.3 Ekuitas

Rp20.497.705.381.637

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.497.705.381.637 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Ekuitas	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809	850.682.938.828	4,33

Penjelasan atas saldo Ekuitas secara lebih rinci disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Poin 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya dan beban yang timbul untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun penjelasan pos-pos Laporan Operasional ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening LO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, dengan rincian dan uraian penjelasan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

Rp10.516.289.464.924

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan - LO tahun 2025 sebesar Rp10.516.289.464.924 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.625.955.695.423 berkurang Rp2.109.666.230.498 atau turun 16,71%. Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO sebesar Rp766.633.237.019 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan LO TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	6.347.267.487.406	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)
Pendapatan Transfer - LO	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)
JUMLAH	10.516.289.464.924	12.625.955.695.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Rp6.347.267.487.406

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO tahun 2025 sebesar Rp6.347.267.487.406 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.044.382.161.953 berkurang Rp2.697.114.674.547 atau turun 29,82%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah LRA dengan Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp10.822.528.172 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.4.2 Pendapatan (PAD) - LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Daerah-LO	5.719.902.391.393	8.552.678.801.729	(2.832.776.410.336)	(33,12)
Retribusi Daerah-LO	320.429.298.769	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	71.456.059.578	79.327.988.050	(7.871.928.471)	(9,92)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	235.479.737.666	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97
JUMLAH	6.347.267.487.406	9.044.382.161.953	(2.697.114.674.547)	(29,82)

Adapun rincian Pendapatan – LO adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO **Rp5.719.902.391.393**

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp5.719.902.391.393 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.552.678.801.729 berkurang Rp2.832.776.410.336 atau turun 33,12%. Penurunan Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2025 disebabkan diantaranya oleh penurunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp271.146.473, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak Daerah	5.720.173.537.866	5.719.902.391.393	(271.146.473)

Hal ini merupakan selisih dari saldo Piutang Pajak Tahun 2025 sebesar Rp3.970.600 dikurangi dengan Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun sebelumnya sebesar Rp275.117.073.

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	2.112.638.943.700	3.570.962.779.800	(1.458.323.836.100)	(40,84)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.272.028.812.300	2.676.106.930.100	(1.404.078.117.800)	(52,47)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	1.295.115.597.084	1.308.199.590.812	(13.083.993.728)	(1,00)
Pajak Air Permukaan-LO	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85
Pajak Rokok-LO	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35
Pajak Alat Berat-LO	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	16.309.820.498	0	16.309.820.498	0,00
JUMLAH	5.719.902.391.393	8.552.678.801.729	(2.832.776.410.336)	(33,12)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Adapun rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO **Rp2.112.638.943.700**

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.570.962.779.800 berkurang Rp1.458.323.836.100 atau turun 40,84%. Selengkapnya rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan PKB-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	102.731.247.000	182.990.516.600	(80.259.269.600)	(43,86)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	240.467.653.400	418.061.999.900	(177.594.346.500)	(42,48)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.118.875.377.600	1.940.445.740.800	(821.570.363.200)	(42,34)
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	9.935.891.200	14.244.140.800	(4.308.249.600)	(30,25)
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	2.804.319.400	3.954.528.200	(1.150.208.800)	(29,09)
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	87.501.211.500	138.081.481.700	(50.580.270.200)	(36,63)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	118.837.810.200	186.462.408.000	(67.624.597.800)	(36,27)
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	53.491.237.200	83.624.669.200	(30.133.432.000)	(36,03)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	377.347.051.000	602.058.719.400	(224.711.668.400)	(37,32)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	621.287.400	986.719.500	(365.432.100)	(37,04)
PKB-Mobil Roda Tiga-LO	25.857.800	51.855.700	(25.997.900)	(50,14)
JUMLAH	2.112.638.943.700	3.570.962.779.800	(1.458.323.836.100)	(40,84)

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO **Rp1.272.028.812.300**

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.676.106.930.100 berkurang Rp1.404.078.117.800 atau turun 52,47%. Selengkapnya rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan BBNKB-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	33.246.914.000	85.657.955.000	(52.411.041.000)	(61,19)
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	123.001.496.000	268.769.340.400	(145.767.844.400)	(54,24)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	592.461.107.500	1.359.620.337.100	(767.159.229.600)	(56,42)
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	13.231.484.500	19.905.185.500	(6.673.701.000)	(33,53)
BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	3.839.974.000	3.394.740.500	445.233.500	13,12
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	54.151.141.000	87.312.031.000	(33.160.890.000)	(37,98)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	41.165.084.000	105.768.626.500	(64.603.542.500)	(61,08)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	22.279.301.000	46.628.795.000	(24.349.494.000)	(52,22)
BBNKB-Sepeda Motor-Roda Dua-LO	386.601.960.800	696.181.410.600	(309.579.449.800)	(44,47)
BBNKB-Sepeda Motor-Roda Tiga-LO	2.004.437.000	2.725.383.500	(720.946.500)	(26,45)
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	45.912.500	143.125.000	(97.212.500)	(67,92)
JUMLAH	1.272.028.812.300	2.676.106.930.100	(1.404.078.117.800)	(52,47)

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO **Rp1.295.115.597.084**

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp1.295.115.597.084 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.308.199.590.812 berkurang Rp13.083.993.728 atau turun 1,00%. Selengkapnya rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	923.305.743.195	925.390.783.327	(2.085.040.132)	(0,23)
PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	371.809.853.889	382.808.807.485	(10.998.953.596)	(2,87)
JUMLAH	1.295.115.597.084	1.308.199.590.812	(13.083.993.728)	(1,00)

4) Pajak Air Permukaan – LO **Rp47.443.396.200**

Realisasi Pajak Air Permukaan-LO tahun 2025 sebesar Rp47.443.396.200 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp43.584.861.200 bertambah Rp3.858.535.000 atau naik 8,85%.

Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO sudah termasuk Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.970.600. Selengkapnya rincian Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Pendapatan Pajak Air Permukaan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Air Permukaan-LO	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85
JUMLAH	47.443.396.200	43.584.861.200	3.858.535.000	8,85



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5) Pajak Rokok – LO

Rp976.234.701.211

Realisasi Pajak Rokok–LO tahun 2025 sebesar Rp976.234.701.211 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp953.821.306.817 bertambah Rp22.413.394.394 atau naik 2,35%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Pendapatan Pajak Rokok – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Rokok–LO	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35
JUMLAH	976.234.701.211	953.821.306.817	22.413.394.394	2,35

6) Pajak Alat Berat – LO

Rp131.120.400

Realisasi Pajak Alat Berat–LO tahun 2025 sebesar Rp131.120.400 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.333.000 bertambah Rp127.787.400 atau naik 3.834,01%. Selengkapnya rincian Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Pajak Alat Berat – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pajak Alat Berat–LO	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01
JUMLAH	131.120.400	3.333.000	127.787.400	3.834,01

7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO

Rp16.309.820.498

Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO tahun 2025 sebesar Rp16.309.820.498. Selengkapnya rincian Pendapatan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	16.309.820.498	-	16.309.820.498	0,00
JUMLAH	16.309.820.498	-	16.309.820.498	0,00



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

b. Retribusi Daerah – LO

Rp320.429.298.769

Realisasi Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp320.429.298.769 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp229.785.216.380 bertambah Rp90.644.082.389 atau naik 39,45%. Bertambahnya realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LO ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Adapun rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum - LO	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34
Retribusi Jasa Usaha - LO	12.898.291.350	8.977.004.529	3.921.286.821	43,68
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65
JUMLAH	320.429.298.769	229.785.216.380	90.644.082.389	39,45

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp6.547.399.381, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Retribusi Daerah	326.976.698.150	320.429.298.769	(6.547.399.381)

Hal ini merupakan selisih dari saldo Piutang Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp547.855.163 dikurangi dengan Pembayaran atas Piutang Retribusi Tahun sebelumnya sebesar Rp5.848.313.932 dan terdapat Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.693.939.170 dikurangi Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp2.940.879.782.

Secara ringkas rincian penjelasan rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum – LO

Rp305.314.228.567

Realisasi Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2025 sebesar Rp305.314.228.567 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp219.111.452.092 bertambah Rp86.202.776.476 atau naik 39,34%. Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan karena beroperasinya dua UPTD Rumah Sakit Daerah baru yaitu UPTD Rumah Sakit Labuan dan UPTD Rumah Sakit Ciligrang dan hal ini berpengaruh terhadap capaian realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025. Selengkapnnya rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.4.12 Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34
JUMLAH	305.314.228.567	219.111.452.092	86.202.776.476	39,34

2) Retribusi Jasa Usaha – LO

Rp12.898.291.350

Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2025 sebesar Rp12.898.291.350 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.977.004.529 bertambah Rp3.921.286.821 atau naik 43,68%. Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi penerimaan untuk retribusi jasa kepelabuhanan dan juga peningkatan pada penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah yang cukup signifikan. Selengkapnya rincian Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.13 Retribusi Jasa usaha – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	7.920.092.529	(7.920.092.529)	(100,00)
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila - LO	25.000.000	-	25.000.000	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	-	549.305.500	(549.305.500)	(100,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	2.251.346.134	-	2.251.346.134	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	703.820.932	346.434.500	357.386.432	103,16
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	95.163.000	57.187.000	37.976.000	66,41
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.664.261.500	54.012.500	1.610.249.000	2.981,25
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	8.158.699.784	49.972.500	8.108.727.284	16.226,38
JUMLAH	12.898.291.350	8.977.004.529	3.921.286.821	43,68

3) Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Rp2.216.778.852

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2025 sebesar Rp2.216.778.852 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.696.759.760 bertambah Rp520.019.092 atau naik 30,65%.

Kenaikan realisasi tersebut diantaranya dikarenakan adanya peningkatan target realisasi penerimaan untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Asing (TKA), meningkatnya jumlah tenaga kerja asing dan tidak ada keterlambatan pembayaran retribusi TKA serta diiringi dengan naiknya nilai tukar mata uang asing USD. Selengkapannya rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65
JUMLAH	2.216.778.852	1.696.759.760	520.019.092	30,65

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO **Rp71.456.059.578**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp71.456.059.578 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp79.327.988.050 berkurang Rp7.871.928.471 atau turun 9,92%. Kenaikan realisasi tersebut diantaranya disebabkan adanya peningkatan Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD. Secara ringkas perbandingan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	71.456.059.578	79.327.988.049	(7.871.928.471)	(9,92)
JUMLAH	71.456.059.578	79.327.988.049	(7.871.928.471)	(9,92)

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp19.857.179.849, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.598.879.729	71.456.059.578	19.857.179.849

Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan laba/rugi dan dividen pada BUMD TA 2025, terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Uraian	Kapitalisasi Laba/Rugi
PT. BGD	4.309.105.229
PT. BPD BANTEN	34.143.170.600
PT. JAMKRIDA	495.195.495
PD. BPR SERANG	-41.140.942
PD. BPR KERTA RAHARJA	1.222.026.497
PT. AGRO BISNIS BANTEN MANDIRI	-20.271.177.029
JUMLAH	19.857.179.849

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO **Rp235.479.737.666**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp235.479.737.666 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp182.590.155.795 bertambah Rp52.889.581.871 atau naik 28,97%. Kenaikan realisasi tersebut diantaranya disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan dari BLUD. Secara ringkas perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.16 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah - LO	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)
JUMLAH	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp2.216.105.823, sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah	237.695.843.489	235.479.737.666	(2.216.105.823)

Dengan penjelasan sebagaimana tabel dibawah ini:

URAIAN	Saldo (Rp)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025	350.763.862
Pembayaran Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	-1.480.924.162
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2025 (Neraca)	-50.061.533



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	Saldo (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2024 (Neraca)	302.730.917
Hasil Penjualan Kendaraan pada Sekretariat DPRD	-737.497.600
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Yang sudah terbayar (BPKAD)	-441.700.307
Koreksi pengakuan surplus atas klaim asuransi kendaraan pada Disperindag	-203.400.000
Penerbitan SKTJM 2025-BPKAD	43.983.000
JUMLAH	-2.216.105.823

Secara ringkas rincian perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.122.577.300	1.064.385.900	58.191.400	5,47
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	252.669.383	435.665.405	(182.996.022)	(42,00)
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	7.050.778.000	6.566.193.200	484.584.800	7,38
Jasa Giro-LO	19.424.902.560	21.142.719.183	(1.717.816.623)	(8,12)
Pendapatan Bunga-LO	428.715.632	4.909.702.882	(4.480.987.250)	(91,27)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	43.983.000	62.231.250	(18.248.250)	(29,32)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	22.421.707.738	130.685.367.841	(108.263.660.103)	(82,84)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34
Pendapatan dari Pengembalian-LO	180.557.293.511	2.171.897.700	178.385.395.811	8.213,34
Pendapatan dari BLUD-LO	2.701.339.420	2.233.410.749	467.928.671	20,95
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)
JUMLAH	235.479.737.666	182.590.155.795	52.889.581.871	28,97

Penjelasan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO Rp1.122.577.300

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO tahun 2025 sebesar Rp1.122.577.300 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.064.385.900 bertambah Rp58.191.400 atau naik 5,47%.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO tersebut merupakan pendapatan penjualan peralatan/mesin yang sudah tidak digunakan.

2) Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO **Rp252.669.383**

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp252.669.383 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp435.665.405 berkurang Rp182.996.022 atau turun 42,00%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya karena menurunnya pendapatan sewa kantor kas ATM Banten dan Kantin pada UPTD RSUD Banten dan Bapenda.

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan intensifikasi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan potensi Barang Milik Daerah yang memenuhi persyaratan untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak ketiga.

3) Hasil Kerja Sama Daerah - LO **Rp7.050.778.000**

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp7.050.778.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.566.193.200 bertambah Rp484.584.800 atau naik 7,38%.

Bertambahnya Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah - LO tersebut diantaranya bersumber dari Fasilitas Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Orientasi DPRD, Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS dan lain sebagainya oleh Pemerintah Daerah lain yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten. Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah – LO tersebut dicatat pada Badan Pendapatan Daerah.

4) Jasa Giro - LO **Rp19.424.902.560**

Realisasi Jasa Giro-LO tahun 2025 sebesar Rp19.424.902.560 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.142.719.183 berkurang Rp1.717.816.623 atau turun 8,12%.

Jasa Giro-LO tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro – LO atas dana yang disimpan di Bank Banten berupa:

- a) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp16.643.770.462; dan
- b) Jasa Giro pada Kas Bendahara sebesar Rp2.781.132.099.

5) Pendapatan Bunga - LO **Rp428.715.632**

Realisasi Pendapatan Bunga-LO tahun 2025 sebesar Rp428.715.632 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.909.702.882 berkurang Rp4.480.987.250 atau turun 91,27%. Penurunan realisasi Pendapatan Bunga-LO ini disebabkan oleh menurunnya uang milik Pemerintah Provinsi Banten berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berada pada Bank Indonesia.

6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO **Rp43.983.000**

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-

LO tahun 2025 sebesar Rp43.983.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp62.231.250 berkurang Rp18.248.250 atau turun 29,32%.

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO bersumber dari pendapatan atas Kerugian Uang Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan – LO yang merupakan SKTJM baru terbit di Tahun 2025. Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO tahun 2025 sebesar Rp43.983.000 terdiri dari:

Tabel 5.4.18 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada TA 2025 atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	KREDIT (Rp)
1	Bustomi	13.400.000
2	Ani Kurniasih	1.283.000
3	Hendra Gunawan	11.700.000
4	Iip Muripudin Tarigan, AMTE	9.200.000
5	Ajum Suryana	8.400.000
JUMLAH		43.983.000

7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO Rp111.346.114

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2025 sebesar Rp111.346.114 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp133.726.463 berkurang Rp22.380.350 atau turun 16,74%. Berkurangnya realisasi ini diantaranya disebabkan oleh menurunnya Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain bersumber dari transaksi kelebihan setoran retribusi, pajak, serta denda keterlambatan pelaporan PBBKB, serta penerimaan-penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada kode rekening lainnya.

Selengkapnya rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)
JUMLAH	111.346.114	133.726.463	(22.380.350)	(16,74)

8) Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Rp1.354.883.748

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO tahun 2025 sebesar Rp1.354.883.748 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.644.866.075 berkurang Rp1.289.982.328 atau turun



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

48,77%. Turunnya realisasi Pendapatan Denda tersebut bersumber dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah. Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)
JUMLAH	1.354.883.748	2.644.866.075	(1.289.982.328)	(48,77)

9) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Rp22.421.707.738

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp22.421.707.738 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp130.685.367.841 berkurang Rp108.263.660.103 atau turun 82,84%.

Penurunan realisasi ini diantaranya disebabkan adanya insentif pajak dari pemerintah Provinsi Banten yang diberikan kepada masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	21.535.014.473	127.528.474.100	(105.993.459.627)	(83,11)
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	413.154.300	2.021.437.100	(1.608.282.800)	(79,56)
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	438.544.380	1.129.851.941	(691.307.561)	(61,19)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	7.942.900	5.604.700	2.338.200	41,72
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	27.051.685	0	27.051.685	0,00
JUMLAH	22.421.707.738	130.685.367.841	(108.263.660.103)	(82,84)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Rp9.541.260

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp9.541.260 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.624 bertambah Rp9.507.636 atau naik 28.276,34%. Bertambahnya realisasi ini diantaranya disebabkan oleh naiknya penerimaan pendapatan denda retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK/(TURUN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34
JUMLAH	9.541.260	33.624	9.507.636	28.276,34

11) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Rp180.557.293.511

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2025 sebesar Rp180.557.293.511 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.171.897.700 bertambah Rp178.385.395.811 atau naik 8.213,34%. Bertambahnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Selengkapnya rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN****Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025****Tabel 5.4.23 Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	22.740.820	2.069.138.248	(2.046.397.428)	(98,90)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO	184.913.261	102.759.452	82.153.809	79,95
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang - LO	2.047.905.063	-	2.047.905.063	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LO	125.035.950	-	125.035.950	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan - LO	7.000.000	-	7.000.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	174.041.840.897	-	174.041.840.897	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	47.802.024	-	47.802.024	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	2.204.500.000	-	2.204.500.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS - LO	1.116.886.000	-	1.116.886.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan - LO	175.610.808	-	175.610.808	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi - LO	9.727.997	-	9.727.997	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga - LO	827.000	-	827.000	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada Desa - LO	307.809.425	-	307.809.425	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah DanaBOSP-LO	176.324.643	-	176.324.643	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LO	88.369.623	-	88.369.623	0,00
JUMLAH	180.557.293.511	2.171.897.700	178.385.395.811	8.213,34

12) Pendapatan dari BLUD - LO**Rp2.701.339.420**

Realisasi Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2025 sebesar Rp2.701.339.420 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.233.410.749 bertambah Rp467.928.671 atau naik 20,95%. Bertambahnya realisasi tersebut disebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dan Lain-Lain Pendapatan BLUD. Selengkapnya rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Tabel 5.4.24 Pendapatan dari BLUD – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD - LO	-	-	-	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	1.841.926.175	1.249.344.603	592.581.572	47,43
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	859.413.245	984.066.146	(124.652.901)	(12,67)
JUMLAH	2.701.339.420	2.233.410.749	467.928.671	20,95

13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Rp0

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp10.539.955.522. Berkurangnya realisasi tersebut Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 telah dikelompokkan dalam pendapatan atas pengembalian belanja berkenaan dan telah dipindahbukukan ke rek bendahara umum negara dengan Nomor SI: 900.1/011-BPKAD/2025 tanggal 13 Juni 2025.

Selengkapnya rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.25 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)
JUMLAH	-	10.539.955.522	(10.539.955.522)	(100,00)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Rp3.983.458.654.771

Realisasi Pendapatan Transfer - LO tahun 2025 sebesar Rp3.983.458.654.771 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.076.468.200.167 bertambah Rp906.990.454.604 atau naik 29,48%. Bertambahnya realisasi Pendapatan Transfer-LO diantaranya disebabkan oleh naiknya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang berasal dari Bagi Hasil Pajak-LO, Bagi Hasil Lainnya-LO, Dana Alokasi Umum (DAU-LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO.

Adapun secara ringkas rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Tabel 5.4.26 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.976.969.361.771	3.056.848.218.167	920.121.143.604	30,10
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
JUMLAH	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Transfer – LRA dengan Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp576.630.990.100 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.400.338.371.671	3.976.969.361.771	(576.630.990.100)
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO	6.489.293.000	6.489.293.000	-
JUMLAH	3.406.827.664.671	3.983.458.654.771	(576.630.990.100)

Hal ini dikarenakan terdapat akumulasi DBH kurang bayar s.d tahun 2025 sebesar Rp576.641.493.000, reklas dari Pendapatan DAK Non Fisik BOS Reguler-LO menjadi Pendapatan TGR-LO sebesar (Rp10.500.000) dan Koreksi SKH 3 Lebak (Rp2.900) serta reklas Pendapatan DAK Non Fisik Non Reguler ke Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Rp264.322.350)

Secara ringkas perbandingan Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.976.969.361.771	3.056.848.218.167	920.121.143.604	30,10
Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	1.562.759.011.100	695.565.550.000	867.193.461.100	124,67
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.057.839.000	2.611.971.000	(1.554.132.000)	(59,50)
Bagi Hasil Lainnya - LO	906.874.000	-	906.874.000	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.146.642.838.212	1.146.248.432.968	394.405.244	0,03
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	1.265.602.799.459	1.212.422.264.199	53.180.535.260	4,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Dana Penyesuaian - LO	6.489.293.000	19.619.982.000	(13.130.689.000)	(66,93)
JUMLAH	3.983.458.654.771	3.076.468.200.167	906.990.454.604	29,48

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO **Rp185.563.322.747**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2025 sebesar Rp185.563.322.747 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp505.105.333.302 berkurang Rp319.542.010.555 atau turun 63,26%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh berkurangnya pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah Provinsi Banten.

Secara ringkas perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.28 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	179.164.238.747	34.978.633.235	144.185.605.512	412,21
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	460.231.319.677	(460.231.319.677)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri-LO	-	2.679.886.750	(2.679.886.750)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	6.399.084.000	7.215.493.640	(816.409.640)	(11,31)
JUMLAH	185.563.322.747	505.105.333.302	(319.542.010.555)	(63,26)

Terdapat perbedaan antara realisasi Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah LO sebesar Rp179.179.718.747 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah yang Sah	6.383.604.000	185.563.322.747	(179.179.718.747,33)

Selisih tersebut disebabkan terdapat Pendapatan Hibah berupa barang yang tersebar pada Perangkat Daerah berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jumlah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah	137.941.006.150
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.640.000
Dinas Kelautan Dan Perikanan	41.650.000
Dinas Perhubungan	82.000.000
Dinas Pertanian	814.580.000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.226.362.597
Badan Penghubung	15.480.000
Jumlah	179.179.718.747

5.4.2 Beban

Rp9.584.560.203.090

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

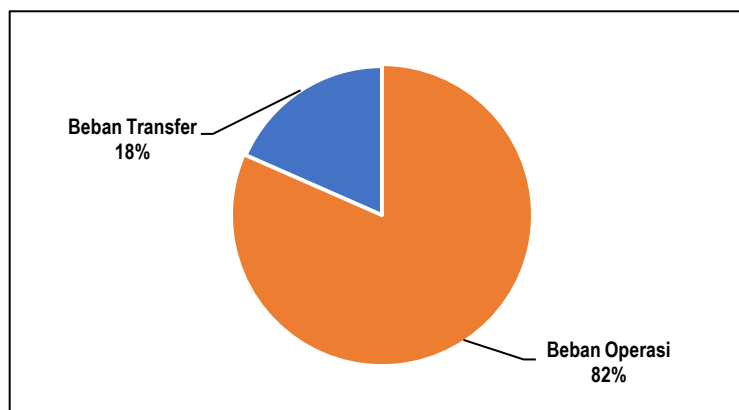
Realisasi Beban tahun 2025 sebesar Rp9.584.560.203.090 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.872.010.300.755 berkurang Rp2.287.450.097.665 atau turun 19,27%. Berkurangnya realisasi tersebut diantaranya disebabkan oleh turunnya Beban Operasi dan Beban Transfer.

Secara ringkas perbandingan Beban Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Jumlah Beban Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Operasi	7.820.102.521.364	8.176.822.137.234	(356.719.615.870)	(4,36)
Beban Transfer	1.764.457.681.726	3.695.188.163.521	(1.930.730.481.795)	(52,25)
JUMLAH	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)

Grafik 5.4.1 Komposisi Jumlah Beban Tahun 2025





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja LRA dengan Beban LO sebesar Rp608.680.251.053 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya. Sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Operasi	6.810.065.159.831	7.820.102.521.364	(1.010.037.361.533)
Beban Transfer	2.165.814.792.206	1.764.457.681.726	401.357.110.480
JUMLAH	8.975.879.952.037	9.584.560.203.090	(608.680.251.053)

5.4.2.1 Beban Operasi

Rp7.820.102.521.364

Realisasi Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp7.820.102.521.364 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.176.822.137.234 berkurang Rp356.719.615.870 atau turun 4,36%.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Operasi dengan Beban Operasi sebesar Rp1.010.037.361.533 yang akan dijelaskan lebih rinci pada setiap akun jenisnya.

Secara ringkas perbandingan Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Pegawai	2.646.808.457.534	2.387.855.754.242	258.952.703.292	10,84
Beban Persediaan	362.301.467.682	384.397.060.097	(22.095.592.415)	(5,75)
Beban Jasa	1.673.969.314.320	1.894.097.138.935	(220.127.824.615)	(11,62)
Beban Pemeliharaan	182.159.326.802	208.936.231.188	(26.776.904.387)	(12,82)
Beban Perjalanan Dinas	204.886.719.835	266.961.190.578	(62.074.470.743)	(23,25)
Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	100.867.175.360	12.082.009.854	88.785.165.506	734,85
Beban Barang dan Jasa BOS	181.199.138.299	172.847.593.849	8.351.544.450	4,83
Beban Barang dan Jasa BLUD	133.315.037.293	103.264.860.303	30.050.176.990	29,10
Beban Bunga	-	1.029.672.328	(1.029.672.328)	(100,00)
Beban Hibah	1.150.634.432.879	1.554.968.397.167	(404.333.964.288)	(26,00)
Beban Bantuan Sosial	37.691.434.638	42.988.034.478	(5.296.599.840)	(12,32)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.144.283.735.242	1.141.848.570.703	2.435.164.539	0,21
Beban Penyisihan Piutang	(8.628.886)	94.199.631	(102.828.518)	(109,16)
Beban Lain-lain	-	75.000.000	(75.000.000)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi)	1.994.910.366	5.376.423.880	(3.381.513.514)	(62,90)
JUMLAH	7.820.102.521.364	8.176.822.137.234	(356.719.615.870)	(4,36)

Rincian beban di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

a. Beban Pegawai

Rp2.646.808.457.534

Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp2.646.808.457.534 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.387.855.754.242 bertambah Rp258.952.703.292 atau naik 10,84%. Beban Pegawai meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai. Adapun perbandingan antara Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pegawai	2.646.806.177.534	2.646.808.457.534	2.280.000

Perbedaan tersebut disebabkan adanya Utang Belanja Pegawai Pemeriksaan MCU Pegawai pada OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebesar Rp2.280.000.

b. Beban Persediaan

Rp362.301.467.682

Realisasi Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp362.301.467.682 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp384.397.060.097 berkurang Rp22.095.592.415 atau turun 5,75%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Penurunan Beban Persediaan tersebut dikarenakan berkurangnya pemakaian barang-barang habis pakai selama Tahun 2025.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp556.693.405.811 sebagaimana rincian berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Persediaan	918.995.356.044	362.511.245.933	-556.693.405.811

Adapun penjelasan selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	Saldo (Rp)
Persediaan 2025	-368.278.517.071
Persediaan 2024	243.017.054.176
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	87.689.720.653
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	101.173.280.145
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Modal	7.424.543.772



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

URAIAN	Saldo (Rp)
Bertambahnya persediaan karena Reklasifikasi dari Belanja Hibah	37.932.531.904
Bertambahnya persediaan karena Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	396.531.683
Bertambahnya persediaan karena Penerimaan Lainnya	9.937.086.021
Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025	452.425.618
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Beban Hibah	-673.547.388.211
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap	-1.366.411.884
Berkurangnya persediaan karena Reklasifikasi ke Rusak/Kadaluarsa/Lainnya	-1.114.917.065
Berkurangnya persediaan karena Lainnya	-409.345.553
Jumlah	-556.693.405.811

c. **Beban Jasa** **Rp1.673.969.314.320**

Realisasi Beban Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.673.969.314.320 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.894.097.138.935 berkurang Rp220.127.824.615 atau turun 11,62%. Beban Jasa merupakan beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp414.336.729.106. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian mapping dari beban jasa ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Aset Ekstrakomtabel, Beban Hibah serta terdapat penyesuaian jurnal balik, penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	selisih (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	803.178.732.787	460.834.069.515	342.344.663.272
DINAS KESEHATAN	698.923.059.572	487.186.908.710	211.736.150.862
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.180.864.422	123.277.163.804	-1.096.299.382
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.445.147.442	17.384.887.731	-939.740.289
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.236.356.008	7.978.425.618	-742.069.610
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.229.792.158	5.736.746.493	-506.954.335
DINAS SOSIAL	9.218.640.464	12.106.966.829	-2.888.326.365
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.537.076.129	15.573.584.771	-2.036.508.642
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.650.582.673	9.278.195.256	-1.627.612.583



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	selisih (Rp)
DINAS KETAHANAN PANGAN	2.622.786.639	3.079.820.321	-457.033.682
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.909.254.775	14.548.521.384	-1.639.266.609
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.775.067.531	5.131.941.924	-356.874.393
DINAS PERHUBUNGAN	16.145.222.977	16.709.535.336	-564.312.359
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25.982.689.161	26.585.142.406	-602.453.245
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.985.668.355	12.835.791.532	-850.123.177
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.168.948.494	5.748.423.564	-579.475.070
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.669.429.538	13.744.582.600	-2.075.153.062
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.988.493.591	5.603.835.812	-615.342.221
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.337.304.198	8.933.194.866	-595.890.668
DINAS PARIWISATA	13.876.566.706	14.639.503.834	-762.937.128
DINAS PERTANIAN	13.895.806.137	15.080.213.629	-1.184.407.492
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.893.023.694	5.983.379.107	-90.355.413
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.577.144.554	13.421.310.755	-844.166.201
SEKRETARIAT DAERAH	45.993.418.847	58.640.562.132	-12.647.143.285
SEKRETARIAT DPRD	88.093.000.352	175.390.059.118	-87.297.058.766
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.241.913.390	9.061.932.311	-2.820.018.921
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.735.502.289	18.091.596.525	-1.356.094.236
BADAN PENDAPATAN DAERAH	69.406.397.130	73.264.415.716	-3.858.018.586
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.142.985.076	6.482.133.898	-1.339.148.822
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.416.850.274	18.003.600.540	-6.586.750.266
BADAN PENGHUBUNG	1.515.594.918	1.763.800.201	-248.205.283
INSPEKTORAT	3.142.116.375	4.052.072.945	-909.956.570
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.161.606.771	7.787.995.136	-1.626.388.365
JUMLAH	2.088.277.043.427	1.673.940.314.320	414.336.729.106

d. Beban Pemeliharaan

Rp182.159.326.802

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp182.159.326.802 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp208.936.231.188 berkurang Rp26.776.904.387 atau turun 12,82%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp49.661.753.152. Hal ini disebabkan secara dominan oleh adanya reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan menjadi aset tetap yang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

tersebar di beberapa perangkat daerah, kemudian terdapat pengakuan Beban Pemeliharaan dari Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Pemeliharaan	231.821.079.954	182.159.326.802	49.661.753.152

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.152.793.193	1.965.719.034	2.187.074.159
DINAS KESEHATAN	9.127.547.869	8.478.439.869	649.108.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.728.254.619	112.144.690.669	1.583.563.950
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.804.374.274	1.804.374.274	0
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.006.463.680	1.006.463.680	0
DINAS SOSIAL	4.773.980.469	4.479.006.908	294.973.561
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.796.938.546	1.089.874.407	1.707.064.139
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	604.972.278	604.972.278	0
DINAS PERHUBUNGAN	9.423.292.057	8.427.183.776	996.108.281
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	557.953.600	557.953.600	0
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.112.630.126	721.652.426	390.977.700
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	801.868.007	405.661.052	396.206.955
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	569.740.985	569.740.985	0
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.529.515.447	1.529.515.447	0
DINAS PERTANIAN	2.135.157.642	1.417.058.488	718.099.154
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	412.847.687	412.847.687	0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.665.446.071	1.270.473.671	394.972.400
SEKRETARIAT DAERAH	10.802.928.038	10.743.754.718	59.173.320
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.468.807.970	1.468.807.970	0
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	829.680.981	829.680.981	0
BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.555.970.925	8.638.399.551	917.571.374



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.820.205.493	1.820.205.493	0
BADAN PENGHUBUNG	1.318.429.464	612.324.500	706.104.964
INSPEKTORAT	1.399.379.480	449.648.650	949.730.830
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	902.151.285	711.554.649	190.596.636
DINAS KETAHANAN PANGAN	678.942.082	678.942.082	0
SEKRETARIAT DPRD	38.595.487.563	2.618.639.707	35.976.847.856
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.971.970.993	2.295.062.014	676.908.979
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	785.908.048	785.908.048	0
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.041.612.837	1.041.612.837	0
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.983.132.322	1.116.461.429	866.670.893
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	649.874.359	649.874.359	0
DINAS PARIWISATA	812.821.564	812.821.564	0
JUMLAH	231.821.079.954	182.159.326.802	49.661.753.152

e. Beban perjalanan Dinas Rp204.886.719.835

Realisasi Beban perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp204.886.719.835 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp266.961.190.578 berkurang Rp62.074.470.743 atau turun 23,25%. Beban perjalanan Dinas merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas.

f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp100.867.175.360

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp100.867.175.360 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.082.009.854 bertambah Rp88.785.165.506 atau naik 734,85%. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

g. Beban Barang Jasa BOS **Rp181.199.138.299**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2025 sebesar Rp181.199.138.299 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp172.847.593.849 bertambah Rp8.351.544.450 atau naik 4,83%. Beban Barang dan Jasa BOS adalah jenis pengeluaran rutin yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari sekolah, yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban ini mencakup pembelian barang habis pakai, penggunaan jasa, serta honorarium, yang diakui sebagai pengurangan nilai ekonomi dalam satu periode tertentu.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp82.840.838.376. Sebagaimana tabel di bawah ini:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BOS	264.039.976.675	181.199.138.299	82.840.838.376

Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS menjadi Aset Tetap dan menjadi Persediaan. Kemudian terdapat Kapitalisasi Kredit dari Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomtabel menjadi Beban Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di SMAN/SMKN se Provinsi Banten.

h. Beban Barang Jasa BLUD **Rp133.315.037.293**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp133.315.037.293 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp103.264.860.303 bertambah Rp30.050.176.990 atau naik 29,10%. Beban Barang Jasa BLUD merupakan pengeluaran yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari dalam bentuk barang dan jasa.

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp82.721.681.683. Sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Barang dan Jasa BLUD	216.036.718.976	133.315.037.293	82.721.681.683

Hal ini disebabkan adanya penyesuaian untuk pengakuan Persediaan dan Kapitalisasi Debet Aset Tetap, yang tersebar pada UPTD RSUD Banten, RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Ciligrang.

i. Beban Bunga **Rp0**

Realisasi Beban Bunga tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp1.029.672.328. Beban Bunga tahun 2024 merupakan beban



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

pengelolaan pinjaman dan biaya provisi yang timbul akibat pinjaman terhadap PT. SMI.

j. Beban Hibah **Rp1.150.634.432.879**

Realisasi Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp1.150.634.432.879 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.554.968.397.167 berkurang Rp404.333.964.288 atau turun 26,00%. Secara ringkas perbandingan Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	50.197.120.852	394.679.209.875	(344.482.089.023)	(87,28)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	675.361.936.765	736.812.846.821	(61.450.910.056)	(8,34)
Beban Hibah Dana BOS	260.553.112.141	394.701.430.805	(134.148.318.664)	(33,99)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	30.500.640.000	28.774.909.666	1.725.730.334	6,00
Beban Hibah Dana BOSP	134.021.623.121	-	134.021.623.121	0,00
JUMLAH	1.150.634.432.879	1.554.968.397.167	(404.333.964.288)	(26,00)

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp637.257.720.232 sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Hibah	513.376.712.647	1.150.634.432.879	637.257.720.232

Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pengakuan Beban Persediaan yang diserahkan ke Masyarakat menjadi Beban Hibah dan reklasifikasi dari Persediaan ke Beban Hibah. Penyesuaian tersebut tersebar di beberapa Perangkat Daerah Adapun rincian Perangkat Daerah yang memiliki perbedaan antara realisasi Belanja Hibah dengan Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	53.068.193.359	50.197.120.852	2.871.072.507
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.135.661.455	15.135.661.455	0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.932.531.904	35.061.459.397	2.871.072.507
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.233.144.026	675.361.936.765	-640.128.792.739
DINAS KESEHATAN	6.230.760.182	73.000.503.000	-66.769.742.818



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Perangkat Daerah	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	250.000.000	1.593.769.947	-1.343.769.947
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.524.880.000	2.524.880.000	0
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.087.736.832	17.295.287.423	-2.207.550.591
SEKRETARIAT DAERAH	8.465.670.383	8.465.670.383	0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.674.895.445	1.692.415.419	-17.519.974
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	999.201.184	999.201.184	0
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	3.637.255.426	-3.637.255.426
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	1.906.991.161	-1.906.991.161
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	21.362.436.250	-21.362.436.250
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	475.700.928.864	-475.700.928.864
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1.582.396.765	-1.582.396.765
DINAS SOSIAL	0	2.616.057.341	-2.616.057.341
DINAS KETAHANAN PANGAN	0	16.082.182.594	-16.082.182.594
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	8.916.134.628	-8.916.134.628
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	522.185.240	-522.185.240
DINAS PERHUBUNGAN	0	161.541.630	-161.541.630
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	196.630.000	-196.630.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	68.022.003	-68.022.003
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	53.262.000	-53.262.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2.353.992.255	-2.353.992.255
DINAS PARIWISATA	0	3.706.394.256	-3.706.394.256
DINAS PERTANIAN	0	29.694.872.160	-29.694.872.160
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	88.436.275	-88.436.275
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	478.690.495	-478.690.495
BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	444.347.998	-444.347.998
INSPEKTORAT	0	217.452.069	-217.452.069
Belanja Hibah Dana BOS	260.553.112.141	260.553.112.141	0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	260.553.112.141	260.553.112.141	0
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000	30.500.640.000	0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.500.640.000	30.500.640.000	0
Belanja Hibah Dana BOSP	134.021.623.121	134.021.623.121	0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	134.021.623.121	134.021.623.121	0
JUMLAH	513.376.712.647	1.150.634.432.879	-637.257.720.232



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

k. Beban Bantuan Sosial

Rp37.691.434.638

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp37.691.434.638 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.988.034.478 berkurang Rp5.296.599.840 atau turun 12,32%. Beban bantuan sosial adalah merupakan pengeluaran pemerintah (pusat/daerah) berupa uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan, yang bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Secara ringkas perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.096.499.850	10.588.034.478	(9.491.534.628)	(89,64)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	36.594.934.788	32.400.000.000	4.194.934.788	12,95
JUMLAH	37.691.434.638	42.988.034.478	(5.296.599.840)	(12,32)

l. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp1.144.283.735.242

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp1.144.283.735.242 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.141.848.570.703 bertambah Rp2.435.164.539 atau naik 0,21%.

Beban penyusutan berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jembatan, dan Irigasi selama tahun berjalan, sedangkan Beban Amortisasi berasal dari alokasi beban penggunaan Aset Tidak Berwujud selama setahun. Secara ringkas perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	336.349.614.329	337.234.119.251	(884.504.921)	(0,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.828.661.376	247.364.542.753	24.464.118.623	9,89
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	460.347.160.033	485.812.803.063	(25.465.643.029)	(5,24)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.059.374.362	5.044.215.344	15.159.018	0,30
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.607.027.320	3.300.992.468	4.306.034.853	130,45
Beban Penyusutan Properti Investasi	63.091.897.822	63.091.897.825	(3)	(0,00)
JUMLAH	1.144.283.735.242	1.141.848.570.703	2.435.164.539	0,21



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

m. **Beban Penyisihan Piutang** **Rp(8.628.886)**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp94.199.631.

Beban Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang Retribusi, Lain-Lain PAD yang sah dan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, serta penyisihan uang muka. Secara ringkas perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.853	1.375.585	(1.355.732)	(98,56)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(9.104.900)	11.844.176	(20.949.075)	(176,87)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	1.862.124	(1.862.124)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	456.161	24.802.016	(24.345.855)	(98,16)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	54.315.731	(54.315.731)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	0,00
JUMLAH	(8.628.886)	94.199.631	(102.828.518)	(109,16)

n. **Beban Lain-lain** **Rp0**

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2025 tidak terdapat realisasi sedangkan tahun 2024 sebesar Rp75.000.000. Realisasi beban lain-lain tahun 2024 merupakan realisasi dari beban tak terduga.

o. **Beban Aset Ekstrakomptabel** **Rp1.994.910.366**

Realisasi Beban Aset Ekstrakomptabel tahun 2025 sebesar Rp1.994.910.366 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.376.423.880 berkurang Rp3.381.513.514 atau turun 62,90%.

Beban Aset Ekstrakomptabel merupakan beban atas Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.4.2.2 Beban Transfer

Rp1.764.457.681.726

Realisasi Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp1.764.457.681.726 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.695.188.163.521 berkurang Rp1.930.730.481.795 atau turun 52,25%.

URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
Transfer	2.165.814.792.206	1.764.457.681.726	401.357.110.480

Terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Transfer dengan Beban Transfer pada rekening Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian untuk Pembayaran Utang BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2025 dan Pelampauan BHPP Kota Menjadi Kewajiban 2025.

Secara ringkas perbandingan Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.35 Beban Transfer TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.623.253.251.068	3.476.464.235.449	(1.853.210.984.381)	(53,31)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	30.342.620.000	95.923.928.072	(65.581.308.072)	(68,37)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	110.861.810.658	122.800.000.000	(11.938.189.342)	(9,72)
JUMLAH	1.764.457.681.726	3.695.188.163.521	(1.930.730.481.795)	(52,25)

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Rp931.729.261.835

Realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2025 sebesar Rp931.729.261.835 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp753.945.394.668 bertambah Rp177.783.867.167 atau naik 23,58%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.36 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Pendapatan – LO	10.516.289.464.924	12.625.955.695.423	(2.109.666.230.498)	(16,71)
Beban	9.584.560.203.090	11.872.010.300.755	(2.287.450.097.665)	(19,27)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp53.784.150.219)

Realisasi Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 tidak terdapat realisasi. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.37 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	278.455.000	99.310.500	179.144.500	180,39
Defisit Non Operasional	54.062.605.219	41.729.621.165	12.332.984.055	29,55
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(53.784.150.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19

Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.4.4.1 Surplus Non Operasional Rp278.455.000

Realisasi Surplus Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp278.455.000 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp99.310.500 bertambah Rp179.144.500 atau naik 180,39%. Pada tahun 2025 terdapat Realisasi Surplus Non Operasional dari hasil ternak biologis sapi, kambing, domba sesuai dokumen kelahiran TA 2025 sebesar 166.430.000 pada Dinas Pertanian.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional Rp54.062.605.219

Realisasi Defisit Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp54.062.605.219 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp41.729.621.165 bertambah Rp12.332.984.055 atau naik 29,55%.

Realisasi Defisit Non Operasional berasal dari penghapusan aset lain-lain serta penghapusan atas barang-barang persediaan kedaluwarsa yang sudah tidak dapat digunakan kembali yang masih terdapat nilai buku. Adapun rincian dari realisasi Defisit Non Operasional tahun 2025 tersebar di beberapa OPD sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp7.993.434.345;
- UPT RSUD Banten
Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp370.041.325;
- UPT RSUD Malingping
Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp93.901.029;
- UPT RSUD Ciligrang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Penghapusan barang pakai habis berupa obat-obatan dan suku cadang alat kedokteran kedaluwarsa Rp818.780;

- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp2.669.393.529;
- Dinas Perhubungan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp819.893.333;
- Dinas Pertanian
Penghapusan barang persediaan berupa hewan ternak dikarenakan mati Rp409.345.554;
- Sekretariat DPRD
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp35.596.150;
- Badan Penghubung
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp21.700.000;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp5.945.946;
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp1.583.811.521;
- Badan Pendapatan Daerah
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp681.224.146;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penghapusan aset lain-lain barang usang/rusak berat Rp39.377.499.561;

5.4.5 Pos Luar Biasa

Rp0

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2025 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Rp877.945.111.615

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO tahun 2025 sebesar Rp877.945.111.615 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp712.315.084.003 bertambah Rp165.630.027.612 atau naik 23,25%. Secara ringkas perbandingan Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.38 Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	NAIK/(TURUN) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Dari Operasional	931.729.261.835	753.945.394.668	177.783.867.167	23,58
Surplus/(Defisit) Dari Non Operasional	(53.784.150.219)	(41.630.310.665)	(12.153.839.555)	29,19
Surplus/(Defisit) - LO	877.945.111.615	712.315.084.003	165.630.027.612	23,25



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	19.647.022.442.809	19.184.343.785.908
SURPLUS/DEFISIT-LO	877.945.111.615	712.315.084.003
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(27.262.172.787)	(249.636.427.102)
EKUITAS AKHIR	20.497.705.381.637	19.647.022.442.809

Penjelasan lebih rinci dari Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Rp19.647.022.442.809

Jumlah Ekuitas Awal TA 2025 adalah sebesar Rp19.647.022.442.809. Nilai Ekuitas Awal tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.6.2 Surplus / Defisit – LO

Rp 877.945.111.615

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp877.945.111.615 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp712.315.084.003, saldo Surplus-LO TA 2025 bertambah Rp165.630.027.612 atau naik 23,25%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan

Rp(27.262.172.787)

Dampak Kumulatif Perubahan sebesar minus Rp10.254.992.670 Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar minus Rp27.262.172.787, bertambah Rp222.374.254.315 atau turun sebesar 89,08%.

Tabel 5.6.2 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Koreksi Kas	(47.267.100)	(9.251.736)
Koreksi Piutang	196.910.563	52.492.913
Koreksi Nilai Persediaan	2.970.414.116	-
Koreksi Aset Tetap	(7.666.487.273)	(247.890.258.932)
Koreksi Aset Lainnya	(5.982.529.800)	195.517.708
Koreksi kewajiban	62.384.502	195.161.758
Koreksi Investasi	206.266.615	(2.180.088.813)
Lain-Lain	(17.001.864.412)	-
Jumlah	(27.262.172.787)	(249.636.427.102)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Penjelasan lebih rinci dari Dampak Kumulatif Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi minus Kas sebesar Rp47.267.100 merupakan Sisa Kas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan yang sudah Disetorkan ke RKUN pada 3 Januari 2025;

Rincian Koreksi minus Kas terdapat pada **Lampiran 1 LPE**;

- b. Koreksi Piutang sebesar Rp196.910.563 yang berasal dari:

- 1) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp19.784.687 karena pelunasan;
 - a) Penyisihan Piutang Retribusi TA. 2024 sebesar Rp17.397.394 pada RSUD Malingping;
 - b) Penyisihan Piutang Jasa Giro 2024 sebesar Rp1.833.358, Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2024 sebesar Rp37.043 dan Penyisihan Piutang PBBKB sebesar Rp6.516.892 pada Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Koreksi minus saldo awal piutang TGR atas nama Mukhsin sebesar Rp3.000.000 atas setoran tahun lalu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Koreksi penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian sebesar Rp174.125.876 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Rincian Koreksi Piutang terdapat pada **Lampiran 2 LPE**;

- c. Koreksi Nilai Persediaan di tahun 2025 sebesar Rp2.970.414.116 terdiri dari:

- 1) Koreksi minus atas kurang pencatatan saldo awal sebesar Rp57.600.000 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) koreksi nilai persediaan tahun lalu yang sudah di catat sebagai kewajiban sebesar Rp2.517.988.498 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) koreksi atas Saldo Awal, Saldo Akhir dan Saldo Persediaan diserahkan ke masyarakat untuk untuk Tujuan Berjaga-jaga sebesar Rp510.025.618,18 pada Dinas Ketahanan Pangan.

Rincian Koreksi Piutang terdapat pada **Lampiran 3 LPE**;

- d. Koreksi minus Aset Tetap di tahun 2025 sebesar Rp7.666.487.273 terdiri dari:

- 1) Koreksi atas Aset Tanah sebesar Rp22.838.904.000;
- 2) Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.920.574.460;
- 3) Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.083.660.114;
- 4) Koreksi atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp212.636.720;
- 5) Koreksi minus atas Aset tetap Lainnya sebesar Rp192.544.800;
- 6) Koreksi minus atas Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp41.519.717.766;

Rincian Koreksi minus atas Aset Tetap terdapat pada **Lampiran 4 LPE**;

- e. Koreksi minus atas Aset Lainnya yaitu uang sitaan perkara terpidana Zulfikar (kasus samsat kelapa dua) ke kas negara sesuai dengan surat kejaksan tinggi banten nomor: B-194/m.6.5/Fu.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 sebesar Rp5.982.529.800 pada Badan Pendapatan Daerah;

Rincian Koreksi minus atas Aset Lainnya terdapat pada **Lampiran 5 LPE**;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- f. Koreksi Kewajiban sebesar Rp62.384.502 atas kelebihan nilai kewajiban prasarana sarana umum yang dibayarkan pada TA 2024;
Rincian Koreksi Kewajiban terdapat pada **Lampiran 6 LPE**.
- g. Koreksi atas investasi sebesar Rp206.266.615 yang berasal dari penyesuaian Laba atas Laporan Keuangan PT.Banten Global Development Audited 2024 yang terbit setelah Pelaporan LKPD Audited Provinsi Banten 2024 pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Rincian Koreksi Investasi terdapat pada **Lampiran 7 LPE**;
- h. Lain-Lain sebesar minus Rp 17.001.864.412 yang berasal dari:
- 1) Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, JII Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp2.540.346.841;
 - 2) Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yakni Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung dan Bangunan pada RSUD Banten sebesar minus Rp243.379.675;
 - 3) Penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar minus Rp11.605.557.346 yang terdiri dari penghapusan Aset Tetap Tanah berupa Lahan Akses Tol Serang Timur tidak dilanjutkan karena merupakan Jalan Nasional sebesar minus Rp31.170.200, Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar minus Rp8.018.358.610 dan penghapusan aset lain-lain berupa tanah untuk jalan sebesar minus Rp3.556.028.536;
 - 4) Penghapusan Tanaman Perkebunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar minus Rp9.905.600;
 - 5) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar minus Rp98.800.000;
 - 6) Penghapusan Hewan Ternak Ikan Air Tawar Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar minus Rp197.600.000;
 - 7) Penghapusan pada Dinas Pertanian sebesar minus Rp1.188.332.600 yang terdiri dari penghapusan Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp353.660.000 serta penghapusan Hewan Ternak Sapi, Kambing Domba dan Tanaman sebesar minus Rp834.672.600;
 - 8) Penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar minus Rp624.509.500 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 9) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp211.058.850 pada Biro Umum;
 - 10) Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp282.374.000 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp20.497.705.381.637

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp20.497.705.381.637 merupakan nilai ekuitas awal ditambah surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Penjelasan Proses Penganggaran TA 2025

6.1.1. Proses Penganggaran pada APBD Induk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024. Struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp11.837.699.357.260
b. Belanja Daerah	<u>Rp11.841.736.991.497</u>
c. Surplus/(defisit)	Rp (4.037.634.237)
d. Pembiayaan Daerah	Rp 4.037.634.237

Sesuai amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit Kebijakan Makro Ekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah yang dimaksud meliputi:

- Struktur ekonomi daerah;
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah;
- Ketimpangan pendapatan;
- Indeks pembangunan manusia;
- Kemandirian fiskal;
- Tingkat pengangguran;
- Tingkat kemiskinan; dan
- Daya saing daerah.

Sementara itu pada Pasal 140 dan 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
- penganggaran terpadu; dan
- penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun program Pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program tersebut disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

6.1.2. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024

Pada tanggal 21 Maret 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp11.837.699.357.260
b. Berkurang	<u>Rp 69.897.827.000</u>
c. Jumlah Pendapatan	Rp 11.767.801.530.260
d. Belanja (semula)	Rp11.841.736.991.497
Berkurang	<u>Rp 69.897.827.000</u>
Jumlah Belanja	Rp11.771.839.164.497



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

e. Surplus/(defisit)	Rp	(4.037.634.237)
f. Pembiayaan (semula)	Rp	4.037.634.237
Berkurang	Rp	0
Jumlah Pembiayaan	Rp	4.037.634.237

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah semula Rp11.837.699.357.260 menjadi Rp11.767.801.530.260 berkurang sebesar Rp69.897.827.000 yaitu pada Pendapatan Transfer sebagai tindak lanjut terbitnya:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2025 dengan nilai pengurangan alokasi untuk Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp70.039.187.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Alokasi Umum Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dukungan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp9.505.456.000;
 - 2) DAK Fisik Jalan Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri sebesar Rp21.211.573.000;
 - 3) DAK Fisik Jalan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sebesar Rp14.641.648.000;
 - 4) DAK Fisik Irigasi Layanan Dasar sebesar Rp18.505.510.000;
 - 5) DAK Fisik Pangan Akuatik Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sebesar Rp6.175.000.000.

Perangkat Daerah Terdampak:

 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp63.864.187.000;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.175.000.000.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 29 Desember 2024 dengan nilai penambahan sebesar Rp141.360.000 meliputi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian;
2. Belanja Daerah semula Rp11.841.736.991.497 menjadi Rp11.771.839.164.497 berkurang sebesar Rp69.897.827.000 sebagai tindak lanjut terbitnya:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD TA. 2025 yaitu:
 - 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas 50% (lima puluh persen);
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan Publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 1) Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025;
- 2) Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
 - d) Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f) Dukungan swasembada pangan; dan
 - g) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA. 2025 yaitu:
 - 1) Melakukan efisiensi sebagaimana Inpres 1/2025.
 - 2) Hasil Efisiensi dialihkan untuk digunakan:
 - a) Bidang Pendidikan;
 - b) Bidang Kesehatan;
 - c) Infrastruktur dan sanitasi;
 - d) Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - e) Penyediaan Cadangan pangan; dan
 - f) Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi;

Berdasarkan hal diatas terdapat perubahan Belanja Daerah meliputi:

- a. Belanja Pegawai semula Rp2.675.338.274.770 menjadi Rp2.675.018.220.360 berkurang sebesar Rp320.054.410 yaitu berkurangnya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp320.000.000 dan berkurangnya Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp54.410;
- b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp4.614.456.611.914,00 menjadi Rp4.054.207.352.271 berkurang sebesar Rp560.249.259.643 antara lain Belanja Barang Pakai Habis berkurang sebesar Rp447.584.280.041 terutama Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan dan Belanja Jasa Kantor berkurang sebesar Rp152.776.948.180;
- c. Belanja Hibah semula Rp689.127.272.000 menjadi Rp514.989.602.000 berkurang sebesar Rp174.137.670.000 antara lain Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berkurang sebesar Rp155.873.670.000 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berkurang sebesar Rp17.064.000.000;
- d. Belanja Bantuan Sosial semula Rp40.600.000.000 menjadi Rp37.970.500.000 berkurang sebesar Rp2.629.500.000 yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berkurang sebesar Rp3.000.000.000 dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga bertambah sebesar Rp370.500.000;
- e. Belanja Modal semula Rp1.525.026.595.733 menjadi Rp1.120.391.534.483 berkurang sebesar Rp404.635.061.250 antara lain Belanja Modal Jalan sebesar Rp199.239.118.100, Belanja Modal Jembatan sebesar Rp37.068.190.000, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp35.619.856.900 dan Belanja Modal Lapangan sebesar Rp28.204.342.900;
- f. Belanja Tidak terduga semula Rp60.094.898.331,00 menjadi Rp1.104.908.696.634 bertambah sebesar Rp1.044.813.798.303;
- g. Belanja Transfer semula Rp2.237.093.338.749 menjadi Rp2.264.353.258.749 bertambah sebesar Rp27.259.920.000 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/1539/SJ tentang Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD TA.2025.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

6.1.3. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025

Pada tanggal 11 April 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut terdapat pada rekening rincian obyeknya yaitu:

1. Belanja Barang semula Rp928.980.493.449 menjadi Rp930.446.926.029 bertambah sebesar Rp1.466.432.580 antara lain Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan bertambah sebesar Rp830.372.000.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat bertambah sebesar Rp468.600.000 dan Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp116.760.000;
2. Belanja Jasa semula Rp1.875.663.099.662 menjadi Rp1.874.155.837.082 berkurang sebesar Rp1.507.262.580 antara lain Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berkurang sebesar Rp1.875.800.000, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan berkurang sebesar Rp1.013.900.000 dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum bertambah sebesar Rp1.863.000.000;
3. Belanja Perjalanan Dinas semula Rp191.598.920.500 menjadi Rp191.639.750.500 bertambah sebesar Rp40.830.000 yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

6.1.4. Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 13 Oktober 2025, dengan struktur sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp11.837.699.357.260
b. Berkurang	<u>Rp 1.333.112.927.525</u>
c. Jumlah Pendapatan	Rp10.504.586.429.735
d. Belanja (semula)	Rp11.841.736.991.497
Berkurang	<u>Rp 1.031.163.020.350</u>
Jumlah Belanja	Rp 10.810.573.971.147
e. Surplus/(defisit)	Rp (305.987.541.412)
f. Pembiayaan (semula)	Rp 4.037.634.237
Bertambah	<u>Rp 301.949.907.175</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp 305.987.541.412

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah semula Rp8.319.775.525.770 menjadi Rp6.934.779.242.245 Berkurang sebesar Rp1.384.996.283.525 antara lain diakibatkan oleh terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 286 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Program yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025 diperpanjang hingga 31 Oktober 2025 sehingga memberikan kesempatan kembali bagi masyarakat untuk mengurus tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa dibebani sanksi denda maupun pokok pajak tertentu;
2. Pendapatan Transfer semula Rp3.511.577.068.000 menjadi Rp3.563.460.424.000 bertambah sebesar Rp51.883.356.000 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan PMK 89 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
3. Terkait belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2025 ini, Fokus utama perubahan APBD 2025 yaitu Peningkatan mutu pendidikan & layanan Kesehatan, Penurunan angka stunting, Pengendalian inflasi Pemberdayaan UMKM & industri kerajinan lokal, Pembangunan jalan desa sejahtera "Bang Andra" untuk konektivitas Lebak & Pandeglang serta Transparansi pengelolaan keuangan melalui sistem digital



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

untuk Belanja Operasi semula Rp8.019.522.158.684 menjadi Rp7.169.161.051.275 berkurang sebesar Rp850.361.107.409 yang disebabkan oleh:

- a. anggaran belanja pegawai bertambah sebesar Rp54.937.571.742 antara lain karena Belanja Gaji Pokok ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - b. Belanja Barang dan jasa berkurang sebesar Rp734.053.767.221 antara lain untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja Hibah berkurang Rp168.483.319.680 yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp2.761.592.250 yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
4. Belanja modal semula Rp1.525.026.595.733 menjadi Rp1.190.899.653.461 berkurang sebesar Rp334.126.942.277 yang disebabkan oleh:
- a. Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp99.787.553.246 antara lain Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Lapangan;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp27.641.851.625 antara lain untuk Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Komputer, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp38.209.134.658 antara lain karena Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp231.597.629.613 yaitu karena Belanja Modal Jalan dan Belanja Modal Jembatan.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp9.588.002.620 yaitu karena Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

6.1.5. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025

Pada tanggal 5 Desember 2025 Gubernur Banten menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan (semula)	Rp10.504.586.429.735,00
b. Berkurang	<u>Rp 37.035.942.000,00</u>
c. Jumlah Pendapatan	Rp10.467.550.487.735,00
d. Belanja (semula)	Rp10.810.573.971.147,00
Berkurang	<u>Rp 37.035.942.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp10.773.538.029.147,00
e. Surplus/(defisit)	Rp (305.987.541.412,00)
f. Pembiayaan (semula)	Rp 305.987.541.412,00
Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp 305.987.541.412,00

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan transfer semula Rp3.563.460.424.000,00 menjadi Rp3.526.424.482.000,00 berkurang sebesar Rp37.035.942.000,00 diakibatkan oleh terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta terbitnya Surat Gubernur Banten Nomor B.900.114/1344-DP3AKKB/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Dana Alokasi Khusus Fisik Renovasi Gedung UPTD PPA Provinsi Banten Mohon Diluncurkan di TA. 2026;



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

2. Belanja Pegawai semula Rp2.730.275.846.512,00 menjadi Rp2.695.013.553.512,00 berkurang sebesar Rp35.262.293.000,00 yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
3. Belanja Barang dan Jasa semula Rp3.880.402.844.692,68 menjadi Rp3.883.634.692.692,68 bertambah sebesar Rp3.231.848.000,00 menindaklanjuti Keputusan Gubernur Banten nomor 581 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp3.193.152.000,00 dan Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp38.696.000,00;
4. Belanja Modal semula Rp1.190.899.653.461,32 menjadi Rp1.189.126.004.461,32 berkurang sebesar Rp1.773.649.000,00 yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
5. Belanja Tidak terduga semula Rp38.988.535.505,00 menjadi Rp32.756.687.505,00 berkurang sebesar Rp6.231.848.000,00;
6. Belanja Transfer semula Rp2.411.524.730.906,00 menjadi Rp2.414.524.730.906,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

6.2. Mandatory Spending

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 dan diselaraskan dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025. Kebijakan anggaran disusun menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta prinsip money follows program untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja daerah. dengan rincian Alokasi pada Fungsi Pendidikan dan Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

a) Fungsi Pendidikan

Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengampu utama. Prioritas realisasi anggaran mencakup pemenuhan kesejahteraan pendidik melalui pembayaran Gaji dan Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik), serta akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, optimalisasi DAU Specific Grant turut dimanfaatkan untuk mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi pendidikan juga didukung sinergi lintas Perangkat Daerah yang terintegrasi, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam penguatan literasi, BPSDM pada pengembangan kompetensi aparatur, Biro Kesra melalui bantuan pendidikan keagamaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembangunan karakter pemuda. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan terwujudnya layanan pendidikan yang holistik, mencakup aspek formal, literasi, kompetensi SDM, hingga pembinaan mental generasi muda di Provinsi Banten. Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp2.729.019.002.246 atau 83,46% dari total yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.114.243.775.642	2.579.136.211.813	82,82%
2	Dinas Kesehatan	926.761.000	890.400.824	96,08%
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	76.000.000	66.256.000	87,18%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	541.315.000	427.473.100	78,97%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.319.170.400	1.197.567.718	90,78%
6	Dinas Sosial	858.328.000	813.858.903	94,82%



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	322.626.000	296.168.500	91,80%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana	6.358.768.900	6.110.184.669	96,09%
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.152.229.000	1.131.641.000	98,21%
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.704.825.000	1.649.465.158	96,75%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.404.974.000	1.197.847.380	85,26%
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	741.893.900	682.806.429	92,04%
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.082.624.200	928.421.045	85,76%
14	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	26.203.050.300	25.557.230.306	97,54%
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.549.233.300	2.275.826.622	89,27%
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	351.672.600	338.741.000	96,32%
17	Dinas Pariwisata	2.351.184.000	2.299.173.603	97,79%
18	Dinas Pertanian	394.178.000	377.006.000	95,64%
19	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	15.872.811.800	13.231.517.033	83,36%
20	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	18.372.000	18.309.656	99,66%
21	Sekretariat DPRD	82.784.324.200	82.335.952.600	99,46%
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.461.934.300	1.325.587.864	90,67%
23	Badan Pendapatan Daerah	4.190.621.200	4.031.006.208	96,19%
24	Badan Kepegawaian Daerah	33.177.904	32.819.575	98,92%
25	Badan Penghubung	500.000	499.800	99,96%
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.768.291.520	2.667.029.440	96,34%
JUMLAH		3.269.712.642.166	2.729.019.002.246	

b) Inflasi

Pelaksanaan Belanja Daerah untuk pengendalian inflasi pada Tahun Anggaran 2025 diimplementasikan melalui pendekatan tematik yang komprehensif dengan mengacu pada Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Kebijakan ini dijalankan melalui sinergi lintas Perangkat Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Fokus intervensi mencakup strategi Ketersediaan Pasokan (K1) yang menysar stabilitas pendapatan dan produksi, serta strategi Kelancaran Distribusi (K3) melalui penguatan kerjasama antar daerah guna memastikan rantai pasok barang kebutuhan pokok tetap terjaga. Realisasi Rp2.582.531.768.358 atau mencapai 82,83% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2 Realisasi Anggaran Inflasi

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.114.243.775.642	2.579.136.211.813	82,82%
2	Dinas Ketahanan Pangan	926.761.000	890.400.824	96,08%
3	Dinas Perhubungan	76.000.000	66.256.000	87,18%
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	541.315.000	427.473.100	78,97%



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	%
5	Dinas Pertanian	1.319.170.400	1.197.567.718	90,78%
6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	858.328.000	813.858.903	94,82%
JUMLAH		3.117.965.350.042	2.582.531.768.358	

6.3. Penjelasan Opsen Pajak Kendaraan

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Jenis-jenis Opsen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain:

- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84, tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- dihitung dari besaran Pajak terutang. Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagikan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di antaranya mengatur:

- 1) Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- 2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
- 3) Sinergi Pemungutan Opsen.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

6.3.1. Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD;
- b) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD;
- c) SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
- d) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi;
- e) Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan;
- f) Penagihan termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- g) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

6.3.2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB;
- 2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105;
- 3) Salinan SKPDLB disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan;
- 4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

6.3.3. Sinergi Pemungutan Opsen

Sinergi Pemungutan Opsen diatur dalam Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten / kota tersebut berada.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

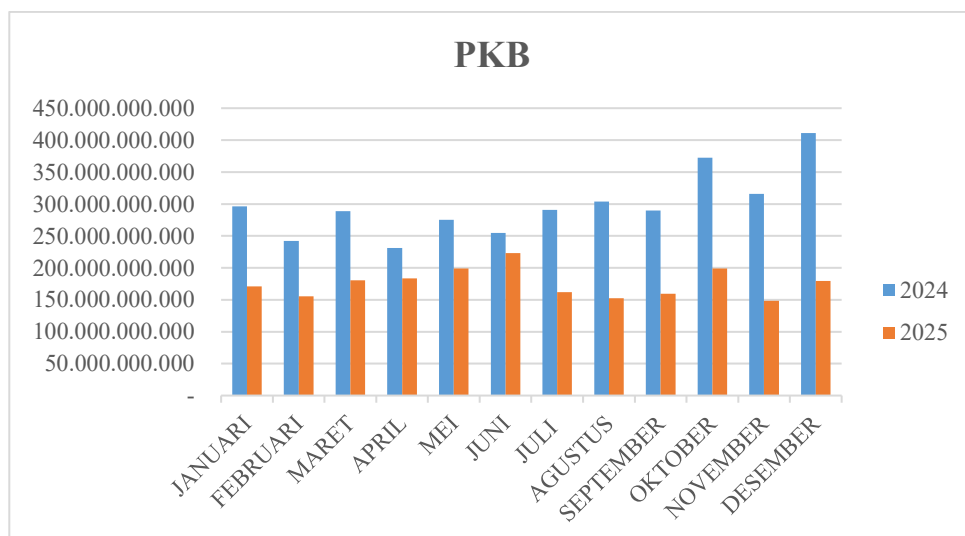
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

6.4. Penerapan Opsen Pajak Kendaraan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak PKB dan BBNKB sejak Januari 2025 berdampak pada penurunan jumlah pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (PKB dan BBNKB) melalui mekanisme *split payment* ke rekening Pemerintah Provinsi dan ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian pajak secara langsung dari pembayaran pajak masyarakat. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan PKB dan BBNKB ditampung sementara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sehingga dicatat sebagai pendapatan provinsi dan selanjutnya hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan melalui belanja bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota. Berikut perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Banten sebelum diterapkannya Opsen Pajak (Tahun 2024) dan setelah diterapkannya Opsen Pajak (Tahun 2025).

6.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025 sebesar Rp2.112.638.943.700,- turun Rp1.458.323.836.100,- atau 40,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.570.962.779.800,- dengan rincian sebagai berikut:

PKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
JANUARI	296.112.073.800	171.176.864.700	- 124.935.209.100	-42,19%
FEBRUARI	242.235.901.900	155.578.654.800	- 86.657.247.100	-35,77%
MARET	288.720.767.400	180.524.191.000	- 108.196.576.400	-37,47%
APRIL	231.115.521.600	183.250.492.800	- 47.865.028.800	-20,71%
MEI	275.075.650.200	198.808.309.000	- 76.267.341.200	-27,73%
JUNI	254.427.963.650	222.840.169.000	- 31.587.794.650	-12,42%



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

PKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
JULI	290.524.786.850	161.855.322.900	- 128.669.463.950	-44,29%
AGUSTUS	303.784.601.800	152.318.770.300	- 151.465.831.500	-49,86%
SEPTEMBER	289.569.817.500	159.632.591.200	- 129.937.226.300	-44,87%
OKTOBER	372.387.072.300	198.893.282.200	- 173.493.790.100	-46,59%
NOVEMBER	315.910.838.200	148.186.592.100	- 167.724.246.100	-53,09%
DESEMBER	411.097.784.600	179.573.703.700	- 231.524.080.900	-56,32%
TOTAL	3.570.962.779.800	2.112.638.943.700	-1.458.323.836.100	-40,84%

Pada tahun 2024 PKB disetorkan secara utuh (ditampung sementara) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya PKB hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan kepada Kabupaten/Kota melalui belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP). Belanja BHPP PKB kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar Rp1.071.288.833.940,- atau 30% dari realisasi pendapatan PKB yang masuk dalam RKUD. Persentase BHPP tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten.

Sedangkan pada tahun 2025 PKB disetorkan langsung ke masing-masing Rekening melalui mekanisme *split payment*, yaitu ke rekening Pemerintah Provinsi sebagai pendapatan PKB Provinsi dan ke Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan opsen PKB, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi tahun 2025 hanya mencatat PKB yang merupakan hak Pemerintah Provinsi saja. Perbedaan mekanisme penyetoran tersebut berdampak pada penurunan nilai yang signifikan atas pendapatan PKB Provinsi tahun 2025.

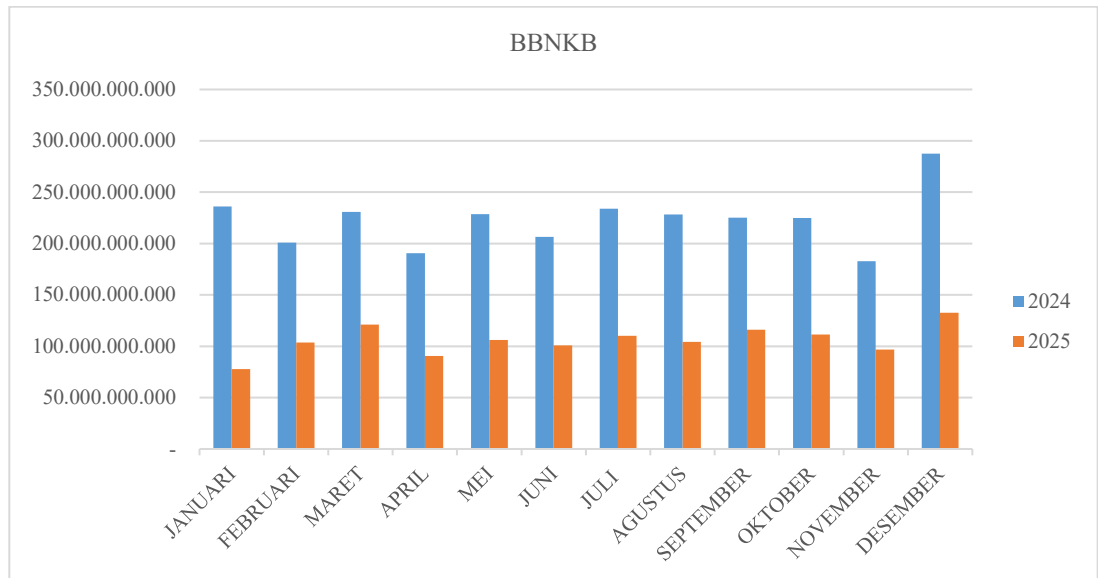
Rincian Realisasi pendapatan PKB, Hak PKB Provinsi, dan Hak Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

BULAN	2024			2025		
	REALISASI PKB	HAK PROVINSI 70% DARI REALISASI PKB	HAK KAB/KOTA (BHPP) 30% DARI REALISASI PKB	REALISASI PKB	HAK PROVINSI (PKB)	HAK KAB/KOTA (OPSEN PKB) 66% DARI PKB PROVINSI
(1)	(2)	(3) = 70%*(2)	(4) = 30%*(2)	(5) = (6)+(7)	(6)	(7) = 66%*(6)
JANUARI	296.112.073.800	207.278.451.660	88.833.622.140	284.153.595.402	171.176.864.700	112.976.730.702
FEBRUARI	242.235.901.900	169.565.131.330	72.670.770.570	258.260.566.968	155.578.654.800	102.681.912.168
MARET	288.720.767.400	202.104.537.180	86.616.230.220	299.670.157.060	180.524.191.000	119.145.966.060
APRIL	231.115.521.600	161.780.865.120	69.334.656.480	304.195.818.048	183.250.492.800	120.945.325.248
MEI	275.075.650.200	192.552.955.140	82.522.695.060	330.021.792.940	198.808.309.000	131.213.483.940
JUNI	254.427.963.650	178.099.574.555	76.328.389.095	369.914.680.540	222.840.169.000	147.074.511.540
JULI	290.524.786.850	203.367.350.795	87.157.436.055	268.679.836.014	161.855.322.900	106.824.513.114
AGUSTUS	303.784.601.800	212.649.221.260	91.135.380.540	252.849.158.698	152.318.770.300	100.530.388.398
SEPTEMBER	289.569.817.500	202.698.872.250	86.870.945.250	264.990.101.392	159.632.591.200	105.357.510.192
OKTOBER	372.387.072.300	260.670.950.610	111.716.121.690	330.162.848.452	198.893.282.200	131.269.566.252
NOVEMBER	315.910.838.200	221.137.586.740	94.773.251.460	245.989.742.886	148.186.592.100	97.803.150.786
DESEMBER	411.097.784.600	287.768.449.220	123.329.335.380	298.092.348.142	179.573.703.700	118.518.644.442
TOTAL	3.570.962.779.800	2.499.673.945.860	1.071.288.833.940	3.506.980.646.542	2.112.638.943.700	1.394.341.702.842



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

6.4.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 sebesar Rp1.272.028.812.300,- turun Rp1.404.078.117.800,- atau 52,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.676.106.930.100,- dengan rincian sebagai berikut:

BBNKB				
BULAN	2024	2025	SELISIH	DEVIASI
JANUARI	236.202.312.800	77.801.116.300	- 158.401.196.500	-67,06%
FEBRUARI	201.031.594.600	103.682.751.000	- 97.348.843.600	-48,42%
MARET	230.664.346.900	120.983.404.000	- 109.680.942.900	-47,55%
APRIL	190.592.647.300	90.627.941.000	- 99.964.706.300	-52,45%
MEI	228.585.921.800	106.024.546.000	- 122.561.375.800	-53,62%
JUNI	206.521.968.400	100.989.536.000	- 105.532.432.400	-51,10%
JULI	233.816.356.000	110.232.821.500	- 123.583.534.500	-52,85%
AGUSTUS	228.192.821.600	104.367.855.000	- 123.824.966.600	-54,26%
SEPTEMBER	225.100.938.900	116.100.074.000	- 109.000.864.900	-48,42%
OKTOBER	224.828.207.400	111.578.022.000	- 113.250.185.400	-50,37%
NOVEMBER	182.956.481.700	96.896.947.500	- 86.059.534.200	-47,04%
DESEMBER	287.613.332.700	132.743.798.000	- 154.869.534.700	-53,85%
TOTAL	2.676.106.930.100	1.272.028.812.300	-1.404.078.117.800	-52,47%

Pada tahun 2024 Pajak BBNKB disetorkan secara utuh (ditampung sementara) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi dicatat sebagai pendapatan. Selanjutnya Pajak BBNKB hak Kabupaten/Kota dianggarkan dan disalurkan kepada Kabupaten/Kota melalui belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP). Belanja BHPP BBNKB kepada Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar Rp 802.832.079.030,- atau 30% dari realisasi pendapatan BBNKB yang masuk dalam RKUD. Persentase BHPP tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun 2025

Sedangkan pada tahun 2025 Pajak BBNKB disetorkan langsung ke masing-masing Rekening melalui mekanisme *split payment*, yaitu ke rekening Pemerintah Provinsi sebagai pendapatan BBNKB Provinsi dan ke Rekening Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan opsen BBNKB, sehingga dalam Laporan Keuangan provinsi tahun 2025 hanya mencatat BBNKB yang merupakan hak Pemerintah Provinsi saja. Perbedaan mekanisme penyetoran tersebut berdampak pada penurunan nilai yang signifikan atas pendapatan BBNKB Provinsi tahun 2025.

Rincian Realisasi pendapatan BBNKB, Hak BBNKB Provinsi, dan Hak Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

BULAN	2024			2025		
	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI 70% DARI REALISASI BBNKB	HAK KAB/KOTA (BHPP) 30% DARI REALISASI BBNKB	REALISASI BBNKB	HAK PROVINSI (BBNKB)	HAK KAB/KOTA (OPSEN BBNKB) 66% DARI BBNKB PROVINSI
(1)	(2)	(3) = 70%*(2)	(4) = 30%*(2)	(5) = (6)+(7)	(6)	(7) = 66%*(6)
JANUARI	236.202.312.800	165.341.618.960	70.860.693.840	129.149.853.058	77.801.116.300	51.348.736.758
FEBRUARI	201.031.594.600	140.722.116.220	60.309.478.380	172.113.366.660	103.682.751.000	68.430.615.660
MARET	230.664.346.900	161.465.042.830	69.199.304.070	200.832.450.640	120.983.404.000	79.849.046.640
APRIL	190.592.647.300	133.414.853.110	57.177.794.190	150.442.382.060	90.627.941.000	59.814.441.060
MEI	228.585.921.800	160.010.145.260	68.575.776.540	176.000.746.360	106.024.546.000	69.976.200.360
JUNI	206.521.968.400	144.565.377.880	61.956.590.520	167.642.629.760	100.989.536.000	66.653.093.760
JULI	233.816.356.000	163.671.449.200	70.144.906.800	182.986.483.690	110.232.821.500	72.753.662.190
AGUSTUS	228.192.821.600	159.734.975.120	68.457.846.480	173.250.639.300	104.367.855.000	68.882.784.300
SEPTEMBER	225.100.938.900	157.570.657.230	67.530.281.670	192.726.122.840	116.100.074.000	76.626.048.840
OKTOBER	224.828.207.400	157.379.745.180	67.448.462.220	185.219.516.520	111.578.022.000	73.641.494.520
NOVEMBER	182.956.481.700	128.069.537.190	54.886.944.510	160.848.932.850	96.896.947.500	63.951.985.350
DESEMBER	287.613.332.700	201.329.332.890	86.283.999.810	220.354.704.680	132.743.798.000	87.610.906.680
TOTAL	2.676.106.930.100	1.873.274.851.070	802.832.079.030	2.111.567.828.418	1.272.028.812.300	839.539.016.118

6.5. HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN JANGKA PENDEK, SILPA TA 2025, DAN PENYEDIAAN DUKUNGAN DANA UNTUK PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA APBD TA 2026

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp44.703.689.990** sebagaimana yang tercatat pada saldo Kas dan Piutang di Neraca per 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

- Saldo RKUD (a)	Rp	335.671.538
- Saldo Kas BLUD (b)	Rp	35.713.661.608
- Dana Bendahara Sekolah Bosnas (b)	Rp	2.797.507.593
Kas dan Setara Kas(c=a+b+c)	Rp	38.846.840.739
- Piutang Lainnya (d)	Rp	5.856.849.251
SILPA (e=c+d)	Rp	44.703.689.990

SILPA sebesar **Rp44.703.689.990** berasal dari efisiensi belanja dan transfer daerah **Rp762.597.682.856**, ditambah surplus pembiayaan netto **Rp266.964**, dikurangi tidak tercapainya target pendapatan TA 2025 **Rp717.894.259.830**.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Dari SILPA sebesar **Rp44.703.689.990** di atas, yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan TA 2026 hanya sebesar Rp6.192.520.789 (Rp335.671.538 + Rp5.856.849.251) yang berada pada saldo Kas di RKUD Provinsi Banten dan Piutang Lainnya yang sudah disetor ke RKUD di Tahun 2026, sedangkan sisanya sebesar Rp38.511.169.201 digunakan untuk keperluan operasional BLUD dan sekolah pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten mencatat piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp576.641.493.000**. Dengan demikian, terdapat sumber pembiayaan yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten mencatat kewajiban sebesar **Rp494.127.183.144** yang terdiri dari:

No	Kewajiban	Jumlah
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	138.497.733.036
2	Utang Belanja Pegawai	2.280.000
3	Utang Belanja Barang dan Jasa (di Luar Jasa Kantor)	14.424.352.418
4	Utang Belanja Hibah	2.579.582.397
5	Utang Belanja Modal	29.993.600.306
6	Utang Belanja Bagi Hasil	308.629.634.987
	TOTAL	494.127.183.144

Terdapat surat permohonan untuk pembayaran kewajiban pada tahun anggaran 2026 dari:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten nomor 900.1.2/13/Perkim/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Permohonan Pembayaran Kewajiban Bayar Tahun 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua TAPD Provinsi Banten, terdapat 3 (tiga) pekerjaan fisik dan 1 (satu) pekerjaan pengawasan yang belum dibayarkan pada Tahun 2025 dengan total sebesar **Rp823.517.000**, berdasarkan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025, yang dicatat sebagai kewajiban di LKPD Tahun 2025 sebesar **Rp630.293.394** sehingga terdapat potensi penambahan nilai kewajiban sebesar **Rp193.223.606**;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor:900.1.1/577-DPUKPR/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Penganggaran Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Terhadap Pekerjaan TA.2025, sebesar **Rp24.240.963.640** yang terdiri dari paket pekerjaan yang diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp11.253.368.635 dan kewajiban retensi (5%) sebesar Rp12.987.595.005, seluruhnya sudah tercatat di LKPD Tahun 2025;
3. Kepala Dinas Pendidikan nomor B-400.3.13/0725/Dindikbud/2026 tanggal 19 Februari 2026 hal Permohonan Tambahan Anggaran untuk Penyelesaian Kewajiban Kegiatan Tahun 2025 terdapat 6 (enam) paket pekerjaan yang belum dibayarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2025 berdasarkan sebesar **Rp18.131.262.853**, berdasarkan progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025, yang dicatat sebagai kewajiban di LKPD Tahun 2025 sebesar **Rp14.938.400.068** sehingga terdapat potensi penambahan nilai kewajiban sebesar **Rp3.192.862.785**.

Dari data di atas, maka potensi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar **Rp497.513.269.535** (**Rp494.127.183.144 + Rp193.223.606 + Rp3.192.862.785**). Potensi kewajiban tersebut akan dipenuhi dari sumber pembiayaan sebesar **Rp582.834.013.789** (**Rp6.192.520.789 + Rp576.641.493.000**).



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2025

BAB VII
PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta posisi keuangan daerah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Serang, Mei 2026

Gubernur Banten



Andra Soni



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Audited



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025
Audited

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026

REALISASI KEGIATAN DIBAWAH 80%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	258.812.500,00	193.901.300,00	74,92	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia alasan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan penganggaran dan kegiatan serupa dilaksanakan oleh bidang Aset BPKAD Provinsi Banten b. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.250.403.280,00	5.939.268.219,00	71,99	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan karena kesalahan penganggaran sehingga tidak dapat direalisasikan b. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.920.262.000,00	2.248.417.330,00	22,66	a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penggunaan kendaraan dinas dan kebutuhan penggantian suku cadang b. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor karena pekerjaan tidak dapat dilaksanakan terkait status pinjam pakai gedung yang akan direhabilitasi belum selesai.
4.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2.807.302.400,00	1.254.876.300,00	44,70	a. tidak diserap pada Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak direalisasikan karena pengadaan Buku sudah tidak relevan, sedangkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan disesuaikan dengan kebutuhan b. daya serap rendah pada Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Kursus Singkat / Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota rencana awal kegiatan akan dilaksanakan di 5 wilayah Kab/Kota tetapi karena waktu tidak memungkinkan sehingga hanya dilakukan 1 kali
5.	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	68.190.000,00	36.634.000,00	53,72	a. daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota koordinasi dilakukan secara daring b. tidak diserap pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia karena disesuaikan dengan kebutuhan
6.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	940.761.270,00	711.230.240,00	75,60	a. daya serap rendah pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas karena disesuaikan dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
					b. daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan c. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan
7.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	219.599.780,00	165.379.550,00	75,31	a. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan b. Daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dikarenakan terdapat efisiensi dari biaya perjalanan dinas yang bersifat at – Cost
8.	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	69.073.300,00	51.332.000,00	74,32	a. daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas karena koordinasi banyak dilakukan secara daring b. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan
	Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang				
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	37.400.000,00	74,80	tidak diserap pada Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) daya serap rendah pada Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan Personal Computer karena menyesuaikan dengan harga pasar dan sisa dari pengadaan
	UPTD Taman Budaya Dan Museum				
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.656.000,00	5.440.000,00	42,98	daya serap rendah pada Belanja Perjalanan Dinas karena koordinasi banyak dilakukan secara daring
	UPTD TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.100.000,00	9.300.000,00	76,86	Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	240.000.000,00	109.029.800,00	45,43	a. daya serap rendah pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia terdapat kesalahan penganggaran sehingga kegiatan pembuatan SIPAK tidak dapat dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh pusdatin b. terdapat kesalahan penganggaran sehingga kegiatan tidak dilaksanakan karena sistem sudah dibuat oleh PUSDATIN yang terserap hanya belanja pendukung c. Efisiensi kontrak dan sisa pengadaan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.526.000,00	134.188.000,00	75,59	Sisa Anggaran
2.	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	370.462.000,00	257.287.251,00	69,45	Sisa Anggaran
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	4.500.000,00	0	0	Sisa Anggaran
4	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	45.342.000,00	34.829.580,00	76,82	Sisa Anggaran

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.181.110.500,00	2.385.157.125,00	74,98	Semua barang barang kantor tidak mengalami kerusakan yg ada kerusakan ringan sehingga anggaran yg tersedia tidak terpakai semuanya, barang barang atau peralatan kantor masih layak digunakan
2.	Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	117.278.000,00	77.077.000,00	65,72	Kegiatan itu didalamnya ada sinkronisasi data perumahan tiap kab/kota, seharusnya dilaksanakan di awal tahun, tapi kenyataannya kegiatan tsb dianggarkan di akhir tahun jadi tidak jadi dilaksanakan
3.	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) HA	864.192.000,00	606.121.503,00	70,14	Pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh telah mencapai target, namun terdapat efesiensi honorarium narasumber hal tersebut dikarenakan pembayaran honorarium narasumber telah terpenuhi
4.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi	84.350.000,00	62.055.599,00	73,57	Rapat pendataan awal lokasi rencana pembangunan telah mencapai target, namun terdapat efesiensi belanja honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas. Pembayaran honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas telah terpenuhi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17.431.600,00	13.119.312,00	75	Efisiensi belanja dan selisih nilai kontrak

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	691.964.000,00	428.222.122,00	61,89	a. Efisiensi Kontrak Belanja Komponen Instalasi Listrik b. Efisiensi Kontrak Belanja Alat Tulis kantor, Kertas dan Cover, bahan Komputer serta Belanja Box Container c. Belanja makan minum rapat tidak terealisasi sepenuhnya karena pelaksanaan Fasilitasi Rapat bersifat tentative d. Efisiensi Kontrak Belanja Cetak Blanko SPPD, Agenda Surat, Lembar Disposisi dan Kop Surat SKPD e. Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi sepenuhnya karena pelaksanaan Perjalanan Dinas bersifat tentative berdasarkan Undangan f. Honor Tenaga Arsip dan Perpustakaan tidak terealisasi karena Non ASN menjadi PPPK g. Efisiensi Kontrak Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Whatsapp Bussines Service Service (Interactive) BankeuDesa

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
2.	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.510.324.300,00	4.518.738.092,00	60,17	a. Pelaksanaan Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara Provinsi Banten Tahun 2025 dimana Provinsi Banten menjadi Tuan Rumah, Diundur pelaksanaannya ke Tahun 2026 oleh Pemerintah Pusat (Kemendesa), sesuai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor : 2101/BPI.01.02/X/2025 tentang Pemberitahuan Penundaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXVI 2025 b. Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang semula akan dilaksanakan di 2 Kabupten, terealisasi hanya di 1 Kabupaten karena keterbatasan waktu. c. Pelaksanaan Kegiatan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena sebagian besar dilaksanakan di APBD-Perubahan, dan menyesuaikan jadwal pimpinan d. Efisiensi Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dimana Susu UHT tidak direalisasikan karena beririsan dengan MBG dan Efisiensi Harga Beras Fortifikasi Stunting e. Efisiensi Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator ,Perjalanan Dinas dan makan minum rapat pada Aktivitas kegiatan

DINAS KOPERASI DAN UMKM

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	706.425.600,00	514.131.200,00	72,78	a. Efisiensi Kontrak Makan Minum, Narasumber dan Belanja Lembur b. Efisiensi Kontrak ATK dan Belanja Lembur c. Kegiatan ini terdampak Tagging Efiesiesi Anggaran d. Efisiensi Anggaran dari Pembayaran Honor Narasumber yang di bayarkan dari Internal Dinas serta Pembayaran Uang pengganti transport dari Peserta dalam ibu kota Provinsi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.700.000,00	7.633.470,00	33,63	Efisiensi belanja pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah khususnya pada belanja barang pakai habis (belanja ATK). Belanja ATK berdasarkan kebutuhan, belanja dilakukan sesuai dengan harga pasar sesuai dengan survei harga perkiraan (HPS)
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.579.553.400,00	1.238.216.220,00	78,39	Eefisiensi belanja pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.062.352.000,00	831.868.007,00	78,30	Efisiensi belanja pada kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
4.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	275.000.000,00	210.053.485,00	76,38	Efisiensi belanja pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.500.200,00	0,00	0,00	Efisiensi belanja
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.663.540,00	0,00	0,00	Efisiensi belanja

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.280.000,00	15.780.000,00	43,50	Tidak terserap Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	831.396.000,00	649.096.000,00	78,07	Sisa Kontrak
	KCD Wilayah Utara				
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	98.721.056,00	75,94	Efisiensi Tagihan listrik dan Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan
4.	Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	45.300.000,00	32.353.000,00	71,42	Efisiensi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
	KCD Wilayah Selatan				
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.500.000,00	218.994.021,00	76,17	Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.787.000,00	87.990.000,00	49,77	Efisiensi Belanja Modal Peralatan Mini Computer
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.583.100,00	306.959.100,00	30,22	Efisiensi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
	UPT Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan				
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.526.000,00	115.630.618,00	37,97	Sisa Kontrak
	UPT Produksi Dan Pengembangan Perikanan Budidaya				
9.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	3.053.121.800,00	2.084.703.787,00	68,28	Sisa Kontrak Belanja pakan dan Belanja Modal
	UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan				
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	112.880.769,00	70,55	Efisiensi Belanja tagihan Listrik. Air dan Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian	220.000.000,00	131.380.934,00	59,72	Efisiensi anggaran bersumber dari belanja ATK, belanja makan dan minum yang sebagian difasilitasi oleh pemangku kepentingan, penyesuaian jam penggunaan narasumber sesuai kebutuhan riil kegiatan, serta tidak terserapnya sebagian belanja

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
					perjalanan dinas akibat penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian output. Selain itu, terdapat sisa anggaran fasilitasi KDEKS yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian agenda anggota KDEKS Provinsi Banten

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	5.333.000,00	3.380.000,00	63,38	Tarif diklat yang di tetapkan lebih murah dari pada DPA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mutasi Dan Promosi ASN	788.577.096	396.119.834	50,23	Efisiensi belanja barang pakai habis, manmin, honor tim internal, belanja jasa kantor, SPPD serta STS dari anggaran Hibah KORPRI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	4.900.625.000	2.786.792.495	56,87	a. adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan retreat yang tidak dilaksanakan karena belum adanya regulasi yang jelas. Kemudian terdapat efisiensi dari belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan b. urusan pendidikan dan honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dikarenakan kegiatan yang semula di rencanakan dengan tatap muka, karena sesuatu hal menjadi blended learning.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	44.544.000	31.720.000	71,21	Efisiensi Belanja Narasumber dan Tenaga ahli yang disesuaikan dengan SSH dan pedoman pelaksanaan APBD 2025
2.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	43.562.000	33.321.000	76,49	Efisiensi Belanja Narasumber Disesuaikan dengan SSH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak				
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.697.000	1.500.000	3,21	pekerjaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja UPT PPA atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat korban kekerasan perempuan dan anak gagal bayar dikarenakan kendala teknis dan administrasi
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.590.500	232.151.931	71,74	Sisa pembayaran belanja tenaga administrasi, supir dan lembur akibat pengangkatan Tenaga Non Asn menjadi P3K Penuh Waktu dan Paruh Waktu dan sisa pembayaran telephone dan listrik yang disesuaikan dengan pemakaian.
5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.416.500	114.593.000	49,73	Gagal bayar atas pekerjaan belanja operasi karena kendala teknis dan administrasi
6.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	464.635.500	173.874.000	37,42	Gagal bayar atas pekerjaan belanja operasi karena kendala teknis dan administrasi

INSPEKTORAT

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.255.500,00	125.046.174,00	58,64	Terdapat SiLPA atas efisiensi penyesuaian harga satuan pada belanja Belanja ATK, Kertas dan cover dan penyesuaian efisiensi pagu anggaran pada belanja makan minum, belanja narasumber dan belanja perjalanan dinas
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.862.342.000,00	1.280.892.310,00	68,78	Terdapat SiLPA yang disebabkan adanya efisiensi kontrak pada belanja pakaian dinas, dan efisiensi atas penyesuaian pengiriman pengiriman diklat, adanya efisiensi penyesuaian harga tiket serta efisiensi penyesuaian pagu anggaran pada belanja narasumber dan tenaga ahli
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.872.700,00	783.368.519,00	66,39	Terdapat SiLPA yang disebabkan adanya efisiensi kontrak pada belanja alat listrik, logistik, cetak dan penggandaan, dan tenaga ahli, selain itu terdapat efisiensi penyesuaian pagu anggaran, dan belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan yang ada di berjalan
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.321.470.250,00	1.835.171.076,00	79,05	Adanya SiLPA disebabkan penyesuaian tarif tagihan listrik bulanan dan penyesuaian efisiensi pagu anggaran perubahan, serta SiLPA atas berkurangnya jumlah pegawai NON ASN yang menjadi PPPK
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.834.922.100,00	1.448.679.480,00	78,95	Terdapat efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan service masing-masing unit kendaraan, adanya efisiensi kontrak pada belanja pemeliharaan gedung dan terdapat penyesuaian efisiensi pagu anggaran.
6.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.866.634.760,00	1.383.740.714,00	74,13	Terdapat Efisiensi belanja perjalanan dinas pengawasan dan penyesuaian efisiensi pagu anggaran.

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
7.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	627.288.000,00	319.653.000,00	50,96	Terdapat SiLPA disebabkan penyesuaian efisiensi pagu anggaran
8.	Pendampingan dan Asistensi	1.308.825.400,00	783.086.704,00	59,83	Terdapat Efisiensi belanja perjalanan dinas pengawasan dan penyesuaian efisiensi pagu anggaran

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.820.000,00	38.271.243,00	75,31	Perjalanan Dinas Luar Kota dan Makan Minum Rapat Bulanan serta uang lembur kegiatan Penyusunan DPA 2024 yang tidak dilaksanakan untuk efisiensi
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.463.000,00	56.507.610,00	62,46	Belanja kursus singkat atau pelatihan hanya dilaksanakan satu kali sedangkan sisanya karena tidak ada pengajuan dari pegawai untuk diklat berbayar
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.590.800,00	263.916.510,00	75,28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer serta sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota menyesuaikan kebutuhan Biro dan sisanya untuk efisiensi
4.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	165.000.000,00	122.992.500,00	74,54	Beasiswa untuk Mahasiswa tidak dapat dilaksanakan karena masih menunggu terbit PERGUB yang masih di evaluasi Kemendagri
5.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	239.960.000,00	168.680.800,00	70,30	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pariwisata dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat terlaksana karena dalam pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dikembalikan ke kas daerah

DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandang dan Pengemis di Dalam Panti	1.365.612.000,00	1.034.908.814,00	75,78	Efesiensi dari sisa belanja

DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	30.100.000,00	20.675.790,00	68,69	Efisiensi anggaran
2.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	216.304.000,00	111.991.324,00	51,77	Pekerjaan tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena terdapat permasalahan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dan keterbatasan anggaran pada akhir tahun. Waktu pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
					tahapan kegiatan, termasuk proses pengumpulan data, verifikasi data, penyusunan dokumen, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Selain itu, adanya penyesuaian anggaran pada penghujung tahun menyebabkan beberapa komponen kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak terselesaikannya penyusunan dokumen pendahuluan, laporan pendahuluan, laporan akhir, serta kegiatan rapat evaluasi Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Pariwisata di WKP II dan III tepat waktu.
3.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	15.560.000,00	8.094.800,00	52,02	Efisiensi anggaran
4.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	246.287.500,00	154.932.554,00	62,91	Realisasi berdasarkan Tanggapan atas Pemberian Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) Tahun 2025 / 1446 H nomor : 700/117-Inspektorat/2025 Tanggal 26 Maret 2025 dan efisiensi anggaran

UPTD RSUD CILOGRANG

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.597.130.376,00	882.983.000,00	55,29	Penyesuaian kebutuhan belanja

UPTD RSUD LABUAN

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.863.120.363,00	1.160.370.392,00	62,28	Sisa Anggaran Berasal dari Gaji dan Tunjangan Pejabat Struktural

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.300.000,00	2.481.900,00	5,87	Karena belum ada usulan yang diajukan dari bidang teknis untuk diklat/kursus yang ditawarkan, tarif Diklat/Kursus prabayar pada SHS tidak sesuai (lebih kecil) dari tarif yang di tawarkan penyelenggara diklat eksternal

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.361.760,00	38.262.837,00	79,12	Optimalisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.405.260.900,00	998.846.880,00	71,08	Optimalisasi anggaran dari belanja atk, perjalanan dinas
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	49.161.000,00	33.057.387,00	67,24	Optimalisasi anggaran / anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

SEKRETARIAT DPRD

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	370.214.000,00	273.518.000,00	73,88	Realisasi Anggaran Kurang dari 80% Efisiensi Anggaran dan adanya ketidaksesuaian uraian dalam DPA dengan Kebutuhan Belanja
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.215.496.500,00	31.059.642.143,00	52,45	Realisasi Anggaran Kurang dari 80% Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan Studio audio tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan diperkirakan tidak cukup & penyesuaian jadwal probity dan Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya terdapat penyesuaian pembayaran terhadap hasil probity dan tindak lanjut berdasarkan hasil probity
3.	Layanan Administrasi DPRD	2.444.093.600,00	1.619.943.000,00	66,28	Realisasi Anggaran Kurang dari 80% Karena Terdapat Efisiensi Anggaran dan tidak dibelanjakan
4.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.144.660.000,00	3.837.286.600,00	74,59	Realisasi Anggaran Kurang dari 80% Karena Terdapat Efisiensi Anggaran

DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	266.344.000,00	200.610.845,00	75,32	terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan merupakan efisiensi kegiatan
2.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	200.000,00	0	0	merupakan kegiatan yang terkena efisiensi anggaran pada triwulan 1 acara rapat koordinasi penyusunan RKBMD dihapuskan pada rekening makan minum rapat dan Honorarium narasumber yang mmerupakan inti dari kegiatan tersebut
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.074.800,00	244.239.745,00	79,28	merupakan kegiatan yang terkena efisiensi anggaran pada Anggaran Perubahan
4.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.649.606.000,00	406.753.000,00	11,15	merupakan kegiatan yang terkena efisiensi anggaran pada Anggaran Perubahan

BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	421.280.000	203.024.700	48%	Pada Perencanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik pada perubahan anggaran mendapat tambahan anggaran sebesar 200.000.000 diperuntukan bagi kegiatan Survey Provinsi Banten Face to Face Interview, yang pelaksanaannya menggunakan jasa konsultasi. Memperhatikan bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 masih proses input RKA SKPD, pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultasi dan waktu pelaksanaan kegiatan survey yang waktu efektifnya tinggal tersisa 35 hari kerja maka atas kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu proses pengadaan jasa konsultasi dan kegiatan survey yang tidak memungkinkan pelaksanaannya di Tahun 2025; Adanya ketentuan pemberian honorarium narasumber internal sebesar 50 % menyebabkan anggaran yang telah direncanakan tidak direalisasikan guna menghindari potensi ketidaksesuaian dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	13.753.000	4.200.000	30,54	Untuk kegiatan ini pencapaiannya keuangannya 30,54% namun pencapaian fisiknya 100%. Karena kegiatan ini lebih cenderung berkoordinasi dengan UPTD Latker dan bagian aset di BPKAD. dalam rangka penyusunan rkbmd dan rkp bmd. Kegiatannya sdh dilaksanakan sedikit menggunakan anggaran yang tersedia. Jadi tidak diserap anggarannya dan anggaran tersebut bersifat antisipatif."
2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	179.330.600	126.408.100	70,49	Silpa dari akun belanja alat tulis kantor dan efisiensi transport perjalidin pada sub keg. Penyusunan rencana tenaga kerja makro
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	187.870.000	109.304.500	58,18	Efisiensi akun belanja barang jasa dan honorarium narasumber yang tidak cukup waktu di akhir tahun
4.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	513.187.000	381.391.435	74,32	Efisiensi perubahan anggaran pada akun belanja alat tulis kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas meeting dalam kota pada keg. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.499.740,00	119.665.770,00	62,49	Efisiensi Anggaran Sesuai Maksimal Prosentase Realisasi Anggaran SKPD 93%
2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	465.747.000,00	229.357.833,00	49,25	Efisiensi Anggaran Maksimal Realisasi OPD 93%
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi	595.825.000,00	336.260.200,00	56,44	Efisiensi Anggaran Maksimal Realisasi OPD 93%
4.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	2.189.481.000,00	848.838.422,00	38,77	Efisiensi Anggaran Maksimal Realisasi OPD 93%

BADAN PENGHUBUNG

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.076.000	10.253.600	63,78	Efisiensi

DINAS PARIWISATA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.001.000,00	630.609.270,00	76,07	a. Dikarenakan selisih harga SIPD yang terlampau jauh b. Tidak terserapnya sebagian anggaran belanja makan minum dan sebagian belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor c. SPPD yang tidak terserap.
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.263.600,00	351.553.035,0	66,55	Efisiensi Anggaran Kontrak
3.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	705.339.000,00	540.973.050,0	76,70	Efisiensi Anggaran Kontrak

REALISASI JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BELANJA MODAL KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 2 Calk

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

6.736.526.018,90

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
UMUM											
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat)	215.607.900,00	000.3.2/01/03.0215/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	0010/SULIHARA/01/2026	10.780.395,00	90	24 Desember 2025	23 Maret 2026	5	
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor KCD Pandeglang)	847.374.000,00	000.3.2/01/03.0096/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	1956/SULIHARA/12/2025	42.368.700,00	90	1 Desember 2025	28 Februari 2026	5	
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor KCD Lebak)	398.166.533,00	000.3.2/01/03.0068/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	0732/SULIHARA/09/2025	19.908.327,50	180	23 September 2025	11 Maret 2026	5	
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Pagar Tembok Pembatas Kantor KCD Seragon)	99.801.044,00	000.3.2/01/03.0212/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. ASURANSI JASA TANIA	PP021011125169473	4.990.052,20	180	24 Desember 2025	21 Juni 2026	5	
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Ruang Kantor Induk)	69.563.024,00	000.3.2/01/03.0211/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. ASURANSI JASA TANIA	PP021011125169472	3.478.151,20	180	24 Desember 2025	21 Juni 2026	5	
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Penataan Lingkungan dan Pembabatan)	69.560.306,00	000.3.2/01/03.0213/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. ASURANSI JASA TANIA	0011/SULIHARA/01/2026	3.478.015,00	180	24 Desember 2025	21 Juni 2026	5	
TOTAL		1.700.072.807,00				85.003.640,90					
SMAN											
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 9 Kota Serang	13.346.085.000,00	000.3.2/03/02.0009/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2761/SULIHARA/12/2025	667.304.250,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 33 Kab. Tangerang	13.811.937.000,00	000.3.2/03/02.0010/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2765/SULIHARA/12/2025	690.596.850,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Cigembong	1.219.708.000,00	000.3.2/03/02.0024/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2567/SULIHARA/12/2025	60.985.400,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
4	Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Cipanas	977.144.000,00	000.3.2/03/02.0025/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2545/SULIHARA/12/2025	48.857.200,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
5	Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 1 Gunung Kencana	1.221.379.000,00	000.3.2/03/02.0026/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2561/SULIHARA/12/2025	61.068.950,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
6	Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Cibeber	976.787.000,00	000.3.2/03/02.0027/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2565/SULIHARA/12/2025	48.839.350,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
7	Pembangunan Ruang SMAN 3 Cibeber	1.167.906.000,00	000.3.2/03/02.0028/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2566/SULIHARA/12/2025	58.395.300,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
8	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Wil. Kab. Pandeglang	2.870.793.000,00	000.3.2/03/02.0035/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2036/SULIHARA/12/2025	143.539.650,00	365	3 Desember 2025	3 Desember 2026	5	
9	Rehabilitasi Ruang SMAN CMBBS	2.038.515.000,00	000.3.2/03/02.0022/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2785/SULIHARA/12/2025	101.925.750,00	365	21 Desember 2025	30 Desember 2026	5	
10	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN 1 Anyer	2.221.321.000,00	000.3.2/03/02.0029/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2157/SULIHARA/12/2025	111.066.050,00	365	9 Desember 2025	8 Desember 2026	5	
11	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Wil. Kab. Serang	3.197.266.000,00	000.3.2/03/02.0030/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2546/SULIHARA/12/2025	159.863.300,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Tirtayasa	2.152.512.000,00	000.3.2/03/02.0023/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2784/SULIHARA/12/2025	107.625.600,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
13	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Kab. Tangerang Wil. 1	1.460.190.000,00	000.3.2/03/02.0011/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2176/SULIHARA/12/2025	73.009.500,00	365	6 Desember 2025	5 Desember 2026	5	
14	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Kab. Tangerang Wil. 2	3.396.985.000,00	000.3.2/03/02.0012/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2562/SULIHARA/12/2025	169.849.250,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
15	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Kab. Tangerang Wil. 3	4.818.875.000,00	000.3.2/03/02.0013/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2051/SULIHARA/12/2025	240.943.750,00	365	6 Desember 2025	5 Desember 2026	5	
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Kab. Tangerang	2.456.032.000,00	000.3.2/03/02.0014/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2455/SULIHARA/12/2025	122.801.600,00	365	6 Desember 2025	5 Desember 2026	5	
17	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN 2 Kab. Tangerang	2.056.594.000,00	000.3.2/03/02.0015/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2454/SULIHARA/12/2025	102.829.700,00	365	6 Desember 2025	5 Desember 2026	5	
18	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN 21 Kab. Tangerang	3.915.996.000,00	000.3.2/03/02.0021/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2044/SULIHARA/12/2025	195.799.800,00	365	5 Desember 2025	4 Desember 2026	5	
19	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Wil. Kota Cilegon	2.583.114.000,00	000.3.2/03/02.0031/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2563/SULIHARA/12/2025	129.155.700,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
20	Pembangunan dan Rehabilitasi SMAN Wil. Kota Serang	1.906.057.000,00	000.3.2/03/02.0016/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2564/SULIHARA/12/2025	95.302.850,00	365	21 Desember 2025	20 Desember 2026	5	
21	Rehabilitasi SMAN Wil. Kota Tangerang	2.711.768.000,00	000.3.2/03/02.0017/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2040/SULIHARA/12/2025	135.588.400,00	365	4 Desember 2025	3 Desember 2026	5	
22	Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 10 Tangerang	2.436.215.000,00	000.3.2/03/02.0018/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2041/SULIHARA/12/2025	121.810.750,00	365	4 Desember 2025	3 Desember 2026	5	
23	Rehabilitasi SMAN Kota Tangerang Selatan Wil. 1	2.706.728.000,00	000.3.2/03/02.0019/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2043/SULIHARA/12/2025	135.336.400,00	365	3 Desember 2025	2 Desember 2026	5	
24	Rehabilitasi SMAN Kota Tangerang Selatan Wil. 2	2.213.852.000,00	000.3.2/03/02.0020/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	2042/SULIHARA/12/2025	110.692.600,00	365	3 Desember 2025	2 Desember 2026	5	

25	Penataan Infrastruktur SMAN Wilayah Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang	1.447.804.000,00	000.3.2/03/02.0032/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	1599/SULIHARA/10/2025	72.390.200,00	180	27 Oktober 2025	24 April 2026	5	
26	Penataan Infrastruktur SMAN Wilayah Serang	1.466.011.000,00	000.3.2/03/02.0033/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	1632/SULIHARA/11/2025	73.300.550,00	180	27 Oktober 2025	24 April 2026	5	
27	Penataan Infrastruktur SMAN Wilayah Kab. Tangerang	1.460.778.000,00	000.3.2/03/02.0034/KKPPK/Dindikbud/2025	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	1597/SULIHARA/10/2025	73.038.900,00	180	27 Oktober 2025	24 April 2026	5	

TOTAL

82.238.352.000,00

4.111.917.600,00

SMKN

1	Pembangunan Turap SMKN 18 Pandeglang	299.215.591	000.3.2/04/02.0111/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	53/SULIHARA/12/2025	14.960.780	365	1 Desember 2025	30 November 2026	5	
2	Pembangunan Pagar SMKN 1 Baros	296.060.424	000.3.2/04/02.0120/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	933/SULIHARA/12/2025	14.803.021	365	28 November 2025	27 November 2026	5	
3	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 17 Pandeglang	2.472.649.000	000.3.2/04/02.0107/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	848/SULIHARA/12/2025	123.632.450	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
4	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah SMKN 1 Wanasalam	198.344.128	000.3.2/04/02.0112/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	546/SULIHARA/12/2025	9.917.206	365	9 Desember 2025	8 Desember 2026	5	
5	Pembangunan Turap SMKN 1 Wanasalam	296.024.792	000.3.2/04/02.0118/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	647/SULIHARA/12/2025	14.801.240	365	9 Desember 2025	8 Desember 2026	5	
6	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 15 Kabupaten Tangerang Tahap 2	7.441.247.056	000.3.2/04/02.0128/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	981/SULIHARA/12/2025	372.062.353	365	31 Desember 2025	31 Desember 2026	5	
7	Pembangunan Pagar SMKN 5 Kabupaten Tangerang	398.504.192	000.3.2/04/02.0116/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	54/SULIHARA/12/2025	19.925.210	365	1 Desember 2025	30 November 2026	5	
8	Pembangunan Pagar SMKN 1 Kalanganyar	476.323.810	000.3.2/04/02.0134/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	222/SULIHARA/12/2025	23.816.191	365	5 Desember 2025	4 Desember 2026	5	
9	Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMKN 1 Pandeglang	2.572.530.000	000.3.2/04/02.0109/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	853/SULIHARA/12/2025	128.626.500	365	22 Desember 2025	21 Desember 2026	5	
10	Pembangunan Lapangan SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	298.695.563	000.3.2/04/02.0115/SPK/DINDIKBUD/2025	PT ASURANSI TAKAFUL UMUM	TCK2760/12/25	14.934.778	365	5 Desember 2025	2 Juni 2026	5	
11	Pembangunan Lapangan SMKN 10 Kota Tangerang	298.863.260	000.3.2/04/02.0119/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	723/SULIHARA/12/2025	14.943.163	365	16 Desember 2025	15 Desember 2026	5	
12	Pembangunan Toilet SMKN 1 Kota Tangerang	159.384.190	000.3.2/04/02.0125/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	559/SULIHARA/12/2025	7.969.210	365	5 Desember 2025	4 Desember 2026	5	
13	Pembangunan Pagar SMKN 8 Kabupaten Tangerang	299.390.354	000.3.2/04/02.0113/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	534/SULIHARA/12/2025	14.969.518	365	11 Desember 2025	10 Desember 2026	5	
14	Pembangunan Turap 14 Pandeglang	510.000.007	000.3.2/04/02.0137/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	764/SULIHARA/12/2025	25.500.000	365	12 Desember 2025	11 Desember 2026	5	
15	Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMKN 1 Wanasalam	973.385.260	000.3.2/04/02.0138/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	866/SULIHARA/12/2025	48.669.263	365	31 Desember 2025	30 Desember 2026	5	
16	Pembangunan Pagar SMKN 1 Maja	399.233.562	000.3.2/04/02.0124/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	545/SULIHARA/12/2025	19.961.678	365	13 Desember 2025	12 Desember 2026	5	
17	Pembangunan Sarana ibadah SMKN 11 Kota Tangerang	1.454.697.664	000.3.2/04/02.0135/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	885/SULIHARA/12/2025	72.734.883	365	31 Desember 2025	30 Desember 2026	5	
18	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMKN 1 Wanasalam	149.675.404	000.3.2/04/02.0117/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	426/SULIHARA/12/2025	7.483.770	365	9 Desember 2025	8 Desember 2026	5	
19	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN Cihara 2 Kabupaten Lebak	1.968.477.563	000.3.2/04/02.0140/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	935/SULIHARA/12/2025	98.423.878	365	26 Desember 2025	25 Desember 2026	5	
20	Pembangunan Paving Block SMKN 1 Baros	637.000.000	000.3.2/04/02.0126/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	739/SULIHARA/12/2025	31.850.000	365	11 Desember 2025	10 Desember 2026	5	
21	Pembangunan Pagar SMKN 1 Sajira	396.726.948	000.3.2/04/02.0142/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	973/SULIHARA/12/2025	19.836.347	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
22	Pembangunan Turap SMKN 1 Sajira	396.501.171	000.3.2/04/02.0143/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	793/SULIHARA/12/2025	19.825.059	365	15 Desember 2025	15 Desember 2026	5	
23	Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMKN 1 Wanasalam	199.573.969	000.3.2/04/02.0144/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	740/SULIHARA/12/2025	9.978.698	365	18 Desember 2025	17 Desember 2026	5	
24	Pembangunan Pagar SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	1.211.649.130	000.3.2/04/02.0133/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	897/SULIHARA/12/2025	60.582.457	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
25	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMKN 1 Baros	3.000.000.000	000.3.2/04/02.0108/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	887/SULIHARA/12/2025	150.000.000	365	31 Desember 2025	30 Desember 2026	5	
26	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMKN 13 Kabupaten Tangerang	3.398.456.129	000.3.2/04/02.0130/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	825/SULIHARA/12/2025	169.922.806	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
27	Pembangunan Pagar SMKN 13 Kabupaten Tangerang	298.154.738	000.3.2/04/02.0121/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	250/SULIHARA/12/2025	14.907.737	365	5 Desember 2025	4 Desember 2026	5	
28	Pembangunan Pagar SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	299.292.669	000.3.2/04/02.0114/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	727/SULIHARA/12/2025	14.964.633	365	18 Desember 2025	17 Desember 2026	5	
29	Pembangunan Fasilitas Parkir SMKN 11 Kota Tangerang	317.997.190	000.3.2/04/02.0122/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	337/SULIHARA/12/2025	15.899.860	365	1 Desember 2025	30 November 2026	5	
30	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN 1 Baros	3.136.005.085	000.3.2/04/02.0131/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	900/SULIHARA/12/2025	156.800.254	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
31	Pembangunan Sarana ibadah SMKN 13 Kabupaten Tangerang	1.468.960.440	000.3.2/04/02.0136/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	882/SULIHARA/12/2025	73.448.022	365	31 Desember 2025	31 Desember 2026	5	
32	Pembangunan Pagar SMKN 14 Kabupaten Tangerang	475.819.160	000.3.2/04/02.0145/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	465/SULIHARA/12/2025	23.790.958	365	16 Desember 2025	15 Desember 2026	5	
33	Pembangunan Lapangan SMKN 10 Tangerang	319.467.756	000.3.2/04/02.0176/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	723/SULIHARA/12/2025	15.973.388	365	16 Desember 2025	15 Desember 2026	5	
34	Pembangunan Pagar SMKN 6 Pandeglang	339.601.303	000.3.2/04/02.0177/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	875/SULIHARA/12/2025	16.980.065	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
35	Pembangunan Pagar SMKN 16 Pandeglang	339.220.098	000.3.2/04/02.0178/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	852/SULIHARA/12/2025	16.961.005	365	22 Desember 2025	21 Desember 2026	5	
36	Pembangunan Pagar SMKN 8 Kota Serang	339.475.713	000.3.2/04/02.0180/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	901/SULIHARA/12/2025	16.973.786	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
37	Pembangunan Pagar SMKN 7 Kota Serang	314.676.470	000.3.2/04/02.0181/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	843/SULIHARA/12/2025	15.733.824	365	26 Desember 2025	25 Desember 2026	5	
38	Pembangunan Pagar SMKN 3 Tangerang	339.517.000	000.3.2/04/02.0182/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	841/SULIHARA/12/2025	16.975.850	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
39	Pembangunan Pagar SMKN 4 Tangerang	339.589.888	000.3.2/04/02.0183/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	876/SULIHARA/12/2025	16.979.494	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
40	Pembangunan Pagar SMKN 7 Tangerang	339.633.901	000.3.2/04/02.0184/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	879/SULIHARA/12/2025	16.981.695	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
41	Pembangunan Pagar SMKN 15 Kabupaten Tangerang	339.685.880	000.3.2/04/02.0185/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	894/SULIHARA/12/2025	16.984.294	365	29 Desember 2025	29 Desember 2026	5	
42	Pembangunan Pagar SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	338.770.888	000.3.2/04/02.0186/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	847/SULIHARA/12/2025	16.938.544	365	22 Desember 2025	23 Desember 2026	5	
43	Pembangunan Pagar SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	339.649.894	000.3.2/04/02.0187/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	851/SULIHARA/12/2025	16.982.495	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
44	Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMKN 11 Tangerang	339.551.979	000.3.2/04/02.0188/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	850/SULIHARA/12/2025	16.977.599	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
45	Pembangunan Lapangan SMKN 13 Kabupaten Tangerang	319.167.959	000.3.2/04/02.0189/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	903/SULIHARA/12/2025	15.958.398	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
46	Pembangunan Lapangan SMKN 1 Baros	319.552.360	000.3.2/04/02.0190/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	862/SULIHARA/12/2025	15.977.618	365	29 Desember 2025	28 Desember 2026	5	
47	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 4 Cilegon	218.180.562	000.3.2/04/02.0191/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	812/SULIHARA/12/2025	10.909.028	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
48	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 14 Kabupaten Tangerang	218.181.422	000.3.2/04/02.0192/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	811/SULIHARA/12/2025	10.909.071	365	23 Desember 2025	22 Desember 2026	5	
49	Pembangunan Pagar SMKN 7 Pandeglang	339.146.555	000.3.2/04/02.0193/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	824/SULIHARA/12/2025	16.957.328	365	24 Desember 2025	23 Desember 2026	5	
50	Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMKN 10 Tangerang	171.612.183	000.3.2/04/02.0194/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	880/SULIHARA/12/2025	8.580.609	365	22 Desember 2025	21 Desember 2026	5	
51	Pembangunan Lapangan SMKN 4 Cilegon	319.588.257	000.3.2/04/02.0195/SPK/DINDIKBUD/2025	PT. JAMKRIDA BANTEN	863/SULIHARA/12/2025	15.979.413	365	26 Desember 2025	25 Desember 2026	5	

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.620.014.975,00
---	-------------------------

1.620.014.975,00

[illegible]

			Jaminan Pemeliharaan	388.506.800	000.1.8/SPK.32.48/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800340	19.425.340	180	03/10/2025	31/03/2026	5	
		2	Pemeliharaan Bangunan Gedung di Kawasan Sport Center										
			Jaminan Pemeliharaan	621.903.000	000.1.8/SP.32.44/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800341	31.095.150	180	02/10/2025	30/03/2026	5	
		3	Pemeliharaan Gedung Aspirasi										
			Jaminan Pemeliharaan	386.835.800	000.1.8/SPK.32.52/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800343	19.341.790	180	08/10/2025	05/04/2026	5	
		4	Pemeliharaan Masjid Raya Al-Bantani										
			Jaminan Pemeliharaan	634.677.500	00.1.8/SP.32.56/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800344	31.733.875	180	07/10/2025	04/04/2026	5	
		5	Pembangunan Gedung Bank Banten										
			Jaminan Pemeliharaan	22.642.867.500	000.3.3/SP.19.49/CK-DPUPR/2024	ASURANSI RAMAYANA	16110425000567	1.129.636.100	359	14/02/2025	07/02/2026	5	
		6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Utilitas dan Fasilitas Penunjang KP3B										
			Jaminan Pemeliharaan	228.122.100	000.1.8/SP.33.14/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800346	11.406.105	180	09/10/2025	06/04/2025	5	
		7	Pemeliharaan Gedung Pancaniti										
			Jaminan Pemeliharaan	361.627.900	000.1.8/SP.33.10/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800345	19.061.395	180	06/10/2025	03/04/2026	5	
		8	Pemeliharaan Infrastruktur Gedung Strategis Provinsi (Pemeliharaan 2%) Pekerjaan Pengecatan Lapangan Upacara Gedung Setda KP3B Tahap I										
			Jaminan Pemeliharaan	397.903.800	000.18/SP.44.76/CK-DPUPR/2025	PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM	TCK5679/11/25	19.895.190	180	14/11/2025	12/05/2026	5	
		9	Pemeliharaan Masjid Raya Al-Bantani (Tahap II)										
			Jaminan Pemeliharaan	303.478.600	000.1.8/SP.44.15/CK-DPUPR/2025	PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM	TCK0838/12/25	15.173.930	180	25/11/2025	23/05/2026	5	
		10	Pemeliharaan Gedung SKPD Terpadu (Tahap II)										
			Jaminan Pemeliharaan	398.981.300	000.18/SP.44.23/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800357	19.949.065	180	11/12/2025	08/06/2026	5	
		11	Pemeliharaan Infrastruktur Gedung Strategis Provinsi (pPemeliharaan 2%) (Pemeliharaan TPS, Kolam Retensi 3 dan Gedung Instalasi Air Bersih)										
			Jaminan Pemeliharaan	237.985.000	000.18/SP.49.14/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800367	11.899.250	180	17/12/2025	14/06/2026	5	
		10	Pemeliharaan Jalan KP3B										
			Jaminan Pemeliharaan	363.958.000	000.1.8/SP.44.20/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800368	18.197.900	180	17/12/2025	14/06/2026	5	
		11	Pembangunan Gedung PPID Sat Erimob Polda Banten										
			Jaminan Pemeliharaan	1.317.325.000	600.1.1/SP.38.42/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800363	65.866.250	180	12/12/2025	09/12/2025	5	
		12	Renovasi Lapangan Teknis Group 1 kopasus (Tahap III)										
			Jaminan Pemeliharaan	296.109.100	600.1.1/SP.47.106/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800372	14.805.455	180	19/12/2025	16/06/2026	5	
		13	Pemeliharaan bangunan Gedung di kawasan Sport Center (Pembangunan PJU)										
			Jaminan Pemeliharaan	382.295.900	600.1.1/SP.49.23/CK-DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800371	19.114.795	180	12/12/2025	09/06/2026	5	
		III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI										
		A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor										
			Jaminan Pemeliharaan	145.068.800	000.2.3.2/SPK/149/UM/DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800359	7.253.440	180	26/11/2025	24/05/2026	5	
		2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor										
			Jaminan Pemeliharaan	94.543.000	000.2.3.2/SPK/172/UM/DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800358	4.727.150	180	24/11/2025	22/05/2026	5	
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor										
			Jaminan Pemeliharaan	284.150.600	000.2.3.2/216-SPK/UM/DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800366	14.207.530	180	17/12/2025	14/07/2026	5	
		4	Belanja Modal bangunan Gedung Kantor (Penataan Aula Lt.7 Kantor DPUPR)										
			Jaminan Pemeliharaan	909.385.300	000.2.3.2/SPK/194/UM/DPUPR/2025	BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG	D0800373	45.469.265	180	24/12/2025	21/06/2026	5	
			TOTAL	32.350.339.589,00				1.620.014.975,00					

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1	Pengadaan Genset dan Instalasi Jaringan Listrik	6.182.726.308,00	EP--01JSSETWOAD6Z1MMP4KA8-AD01	Jasa Raharja Putera	102031104072500000	309.136.315,00	360	22/07/2025	21/07/2026	5	

4 RSUD MALINGPING

108.715.653,00

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1	Belanja Renovasi Gedung IGD dan Kebidanan	2.174.313.054,00	027/01/10043613000/Tender/SP/DAK/RSUM/2025	CV ADREENA KHEY	D0800365	108.715.653,00	150 Hari	15 Juli 2025	11 Desember 2025	5	

5 RSUD CILOGRANG

33.809.156,00

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1	Pembangunan Gedung TPS B3										
	Bangunan Gedung Kantor										
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pembangunan Gedung TPS B3 Rumah Sakit	676.183.113,00	MC-01K9P11HC6MHYBA29GK4E4DF3C-ADD002	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN	0008/SULIHARA/01/2026	33.809.156,00	365	31/12/2025	28/12/2026	5	

6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

18.892.312.038,00

1	Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											
		Sub. Keg. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi										
	1	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Curug Panjang Kec Cikurul Kab Lebak	3.456.800.000,00	000.1.3/012.9/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0445/SULAKSANA/07/2025	172.840.589,00	180 Hari	30 Juli 2025	31 december 2025	5	
	2	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Candi Kec Curug Bitung Kab Lebak	1.004.322,00	000.1.3/012.8/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0559/SULAKSANA/08/2025	50.216.100,00	180 Hari	15 August 2025	12 November 2025	5	
	3	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Sukrame Kec Carita Kab Pandeglang	1.330.990.000,00	000.1.3/012.7/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0548/SULAKSANA/08/2025	68.549.500,00	180 Hari	15 August 2025	27 November 2025	5	
	4	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Sumber Jaya Kec Sumur Kab Pandeglang	4.241.820.000,00	000.1.3/012.6/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0643/SULAKSANA/08/2025	212.091.000,00	180 Hari	27 August 2025	24 december 2025	5	
	5	Pelaksanaan Pematangan Lahan Kawasan Hunian Tetap Desa Banjarsari Kec Lebak Gedong Kab Lebak	399.125.000,00	000.1.3/012.13/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0930/SULAKSANA/11/2025	19.956.250,00	180 Hari	21 November 2025	29 december 2025	5	
	6	Pelaksanaan Perkerasan Jalan Menuju Hunian Tetap Desa Banjarsari Kec Lebak Gedong Kab Lebak	399.520.000,00	000.1.3/012.14/Perkim-Bid.Perum/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0931/SULAKSANA/11/2025	19.976.000,00	180 Hari	21 November 2025	29 december 2025	5	
2	Keg. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman											
		Sub. Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman										
	1	Pembangunan Landscape di Kab. Pandeglang	940.660.000,00	600/SPK.1351.UPPSU/DPerkim-3/2025	BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN	B0800512	47.033.000,00	94 Hari	13 October 2025	14 Januari 2026	5	
	2	Pembangunan Masjid di Kab. Tangerang Balaraja	2.926.820.000,00	600/SPK.1352.UPPSU/DPerkim-3/2025	BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN	B0800514	146.341.000,00	94 Hari	13 October 2025	14 Januari 2026	5	
	3	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pondok Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang (KONSOL 56)	736.500.000,00	600/SPK.0116.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN	B0800515	36.825.000,00	74 Hari	13 October 2025	25 Desember 2025	5	
	4	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Sukaharja Kec. Sindangjaya Kab. Tangerang (KONSOL 59)	738.090.000,00	600/SPK.0124.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN	B0800513	36.904.500,00	74 Hari	13 October 2025	25 Desember 2025	5	
	5	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kesampangan Rt. 006 Rw. 004, Ds. Cigelam, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.220.000,00	600/SPK.1293.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0523/SULIHARA/09/2025	9.461.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
	6	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Bop 2 Rt. 035 Rw. 005, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.150.000,00	600/SPK.1320.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0522/SULIHARA/09/2025	9.457.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	

		7	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tegal Jetak Rt. 002 Rw. 003, Ds. Citerep, Kec. Cirusas, Kab. Serang	190.160.000,00	600/SPK.0920.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0542/SULIHARA/09/2025	9.508.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		8	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikuar Rw. 003, Ds. Cibojong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.590.000,00	600/SPK.1077.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0704/SULIHARA/09/2025	9.479.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		9	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cangkuang Rt. 009 Rw. 002, Ds. Tunjung Teja, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.610.000,00	600/SPK.0026.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0534/SULIHARA/09/2025	9.480.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		10	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Sukasari, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.800.000,00	600/SPK.0626.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0626/SULIHARA/09/2025	9.490.000,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		11	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cidapad Rw. 002, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	190.110.000,00	600/SPK.0449.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0670/SULIHARA/09/2025	9.505.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		12	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cikareo, Kec. Cileles, Kab. Lebak	189.300.000,00	600/SPK.0264.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0610/SULIHARA/09/2025	9.465.000,00	180 Hari	21 August 2025	17 Februari 2026	5	
		13	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang	189.990.000,00	600/SPK.0645.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0683/SULIHARA/09/2025	9.499.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		14	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Panongan Kec. Panongan Kab. Tangerang (KONSOL 47)	376.420.000,00	600/SPK.0566.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0749/SULIHARA/09/2025	18.821.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		15	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Pancur Meleti Rw. 005, Kel. Pancur, Kec. Taklakan, Kota Serang	190.070.000,00	600/SPK.0453.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0697/SULIHARA/09/2025	9.503.500,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		16	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 008 Rw. 004, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	190.160.000,00	600/SPK.0921.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0699/SULIHARA/09/2025	9.508.000,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		17	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jambu Bol Rt. 003 Rw. 001, Ds. Panyabrangan, Kec. Cikeusol, Kab. Serang	189.050.000,00	600/SPK.1270.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0650/SULIHARA/09/2025	9.452.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		18	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sampay Lor Rw. 001, Ds. Sukarendah, Kec. Warungnung, Kab. Lebak	189.440.000,00	600/SPK.0996.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0521/SULIHARA/09/2025	9.472.000,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		19	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cijambe Rt. 009 Rw. 001, Ds. Pasirbungur, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.1268.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0580/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		20	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Bea Cukai Blok 1, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.940.000,00	600/SPK.0939.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0675/SULIHARA/09/2025	9.447.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		21	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Bea Cukai Blok 2, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.980.000,00	600/SPK.0940.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0576/SULIHARA/09/2025	9.449.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		22	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Permatas Sukatani Rt. 002 - 004 Rw. 014, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.100.000,00	600/SPK.0729.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0569/SULIHARA/09/2025	9.405.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		23	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cirungge Tegal Duhur Rt. 016 Rw. 004, Kel. Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.460.000,00	600/SPK.1069.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0561/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		24	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.440.000,00	600/SPK.1079.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0733/SULIHARA/09/2025	9.472.000,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		25	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Onjong Rt. 007 Rw. 004, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.270.000,00	600/SPK.1309.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0529/SULIHARA/09/2025	9.463.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		26	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Anpian Timur Rw. 004, Kel. Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.090.000,00	600/SPK.0446.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0694/SULIHARA/09/2025	9.504.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		27	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalapa Capang Rw. 002, Ds. Batu Kuda, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.730.000,00	600/SPK.0532.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0736/SULIHARA/09/2025	9.486.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		28	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebon Awi Rt. 001 Rw. 002, Ds. Bojongleles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.1034.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1126/SULIHARA/10/2025	9.473.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		29	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kadudamas Kec. Cirinten Kab. Lebak (KONSOL 6)	379.090.000,00	600/SPK.0704.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0856/SULIHARA/09/2025	18.954.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		30	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 0030 Rw. 0003, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.930.000,00	600/SPK.0905.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0696/SULIHARA/09/2025	9.496.500,00	180 Hari	01 September 2025	28 Februari 2026	5	

		31	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Suwakan Rt 001 Rw. 008, Ds. Suwakan, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.290.000,00	600/SPK.0835.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0604/SULIHARA/09/2025	9.464.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		32	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Nagara, Kec. Kibin, Kab. Serang	189.870.000,00	600/SPK.0647.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0798/SULIHARA/09/2025	9.493.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		33	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikarae, Ds. Bintangasari, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.620.000,00	600/SPK.1155.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0726/SULIHARA/09/2025	9.481.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		34	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Nuansa 2 Rt. 001 - 004, Ds. Rajeg Mulya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0727.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0776/SULIHARA/09/2025	9.398.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		35	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Barengkok, Kec. Kibin, Kab. Serang	189.870.000,00	600/SPK.0644.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0685/SULIHARA/09/2025	9.493.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		36	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibacang Rt. 006 Rw. 002, Ds. Mekarjaya, Kec. Cijaku, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.0596.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0644/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		37	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kelebut Rw. 005, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	190.080.000,00	600/SPK.0461.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0714/SULIHARA/09/2025	9.504.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		38	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciemas Rw. 003, Ds. Buyut Mekar, Kec. Maja, Kab. Lebak	189.960.000,00	600/SPK.1263.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0746/SULIHARA/09/2025	9.498.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		39	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Handam Rt. 002 Rw. 003, Ds. Cikarang, Kec. Muncang, Kab. Lebak	189.940.000,00	600/SPK.1264.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0857/SULIHARA/09/2025	9.497.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		40	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cireundeu Tengah Rt. 001 Rw. 004, Ds. Cireundeu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.480.000,00	600/SPK.0848.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0817/SULIHARA/09/2025	9.474.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		41	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Wargasari Rt. 018 Rw. 001, Ds. Pondokpanjang, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.350.000,00	600/SPK.0842.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0814/SULIHARA/09/2025	9.467.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		42	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cirogol Rw. 001, Ds. Cibojong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.360.000,00	600/SPK.0533.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0826/SULIHARA/09/2025	9.468.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		43	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Nagreg Rw. 001, Ds. Siketug, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.030.000,00	600/SPK.0538.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0768/SULIHARA/09/2025	9.401.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		44	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Astana Rt. 003-004-020 Rw. 001, Ds. Walikukun, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.230.000,00	600/SPK.1305.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0628/SULIHARA/09/2025	9.461.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		45	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibarengkok, Ds. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.220.000,00	600/SPK.0287.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0725/SULIHARA/09/2025	9.411.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		46	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pabuaran Rt. 005 Rw. 003, Ds. Suka Indah, Kec. Baros, Kab. Serang	189.940.000,00	600/SPK.0001.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0593/SULIHARA/09/2025	9.497.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		47	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Wulangasari Rt. 011 Rw. 004, Ds. Kadujajar, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.0588.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0883/SULIHARA/09/2025	9.468.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		48	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cidarandang Rt. 005 Rw. 002, Ds. Cireundeu, Kec. Petir, Kab. Serang	189.830.000,00	600/SPK.0008.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0819/SULIHARA/09/2025	9.491.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		49	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang (KONSOL 95)	377.320.000,00	600/SPK.0668.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0847/SULIHARA/09/2026	18.866.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		50	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Cluster Kedaung Rw. 002, Kel. Kedaung Wetan, Kec. Negasari, Kota Tangerang	186.980.000,00	600/SPK.0672.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0846/SULIHARA/09/2025	9.349.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		51	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Carenang Udik, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.930.000,00	600/SPK.0632.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1287/SULIHARA/10/2025	9.496.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		52	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Wakap Rw. 011, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1240.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0879/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		53	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Nusa Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang (KONSOL 99)	377.320.000,00	600/SPK.0683.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0918/SULIHARA/09/2025	18.866.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	

		54	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk Kab. Tangerang (KONSOL 45)	377.330.000,00	600/SPK.0328.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0845/SULIHARA/09/2025	18.866.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		55	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukamanah Rt. 003 Rw. 010, Ds. Sukadana, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.0986.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0790/SULIHARA/09/2025	9.465.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		56	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilogok Pakuhaji Rt. 003 Rw. 004, Ds. Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.510.000,00	600/SPK.0780.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0805/SULIHARA/09/2025	9.425.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		57	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 007, Ds. Parigi, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.0631.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0855/SULIHARA/09/2025	9.484.000,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		58	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kadu Beruk Rt. 001, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	187.780.000,00	600/SPK.1082.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0899/SULIHARA/09/2025	9.389.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		59	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Paya Rt. 012 Rw. 005, Ds. Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.0032.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1235/SULIHARA/09/2025	9.479.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		60	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang (KONSOL 32)	376.670.000,00	600/SPK.0271.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0770/SULIHARA/09/2025	18.833.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		61	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalapa Pipir Rt. 008, Ds. Cistitu, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.720.000,00	600/SPK.0513.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1164/SULIHARA/10/2025	9.486.000,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		62	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Sujung Kec. Tirtayasa Kab. Serang (KONSOL 23)	380.130.000,00	600/SPK.0903.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0651/SULIHARA/09/2025	19.006.500,00	180 Hari	25 August 2025	21 Februari 2026	5	
		63	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pancur Gede Rw. 004, Kel. Pancur, Kec. Taklukan, Kota Serang	189.370.000,00	600/SPK.1124.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0916/SULIHARA/09/2025	9.468.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		64	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Teras Bojong Rt. 003 - 006 - 007 Rw. 001, Ds. Teras, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.970.000,00	600/SPK.0908.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1022/SULIHARA/09/2025	9.498.500,00	180 Hari	01 September 2025	28 Februari 2026	5	
		65	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang (KONSOL 15)	380.210.000,00	600/SPK.0918.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1131/SULIHARA/10/2025	19.010.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		66	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Badur Kec. Cirinten Kab. Lebak (KONSOL 1)	378.880.000,00	600/SPK.0697.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1053/SULIHARA/09/2025	18.944.000,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		67	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gag) Permata Banjar Asri Rt. 006, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	183.260.000,00	600/SPK.1029.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0781/SULIHARA/09/2025	9.163.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		68	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 009, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.600.000,00	600/SPK.0947.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0884/SULIHARA/09/2025	9.430.000,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		69	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Bencong Indah Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang (KONSOL 38)	377.100.000,00	600/SPK.0894.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0945/SULIHARA/09/2025	18.855.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		70	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 007, Kel. Pakulonon Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.450.000,00	600/SPK.0893.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0911/SULIHARA/09/2025	9.422.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		71	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pakuhaji Rt. 001 Rw. 008, Ds. Pakualam, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.080.000,00	600/SPK.0776.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0958/SULIHARA/09/2025	9.404.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		72	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 009 Ciracas, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.440.000,00	600/SPK.0269.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0944/SULIHARA/09/2025	9.472.000,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		73	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 002 Rw. 004 Cikulur, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	188.400.000,00	600/SPK.0183.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1346/SULIHARA/10/2025	9.420.000,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		74	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Rt. 002 Rw. 018, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	189.880.000,00	600/SPK.1234.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0990/SULIHARA/09/2025	9.494.000,00	180 Hari	01 Oktober 2025	30 Maret 2026	5	
		75	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kijaid Rt. 003 Rw. 002, Ds. Cipaeh, Kec. Gunung Kaler, Kab. Kab. Tangerang	188.320.000,00	600/SPK.0128.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0946/SULIHARA/09/2025	9.416.000,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		76	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Merak Rt. 001 Rw. 002, Ds. Merak, Kec. Sukamulya, Kab. Kab. Tangerang	188.330.000,00	600/SPK.0125.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0695/SULIHARA/09/2025	9.416.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		77	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Kel. Keranggan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	188.770.000,00	600/SPK.0095.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1075/SULIHARA/09/2025	9.438.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	

		78	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibarunai Masjid Rw. 004, Ds. Ujung Tebu, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.470.000,00	600/SPK.0539.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0995/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		79	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Idul Rt. 001 Rw. 001, Ds. Tirtayasa, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.470.000,00	600/SPK.0912.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1030/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		80	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baringkung Rt. 003 Rw. 006, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1063.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1150/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		81	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Koer Rt. 003 Rw. 002, Ds. Kubangkondang, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	190.250.000,00	600/SPK.0401.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1151/SULIHARA/10/2025	9.512.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		82	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Setu Rt. 001 - 006 Rw. 002, Ds. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.360.000,00	600/SPK.1104.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0949/SULIHARA/09/2025	9.418.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		83	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 - 012 - 013 Rw. 001, Ds. Talagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.650.000,00	600/SPK.0571.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1047/SULIHARA/09/2025	9.382.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		84	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sampok Rt. 015 - 016 - 017 - 022 Rw. 007, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.0563.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0588/SULIHARA/09/2025	9.384.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		85	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Rt. 006 - 007 Rw. 003, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.340.000,00	600/SPK.1103.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0993/SULIHARA/09/2025	9.417.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		86	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pengkolan Rt. 011 - 012 Rw. 002, Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.780.000,00	600/SPK.0561.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1325/SULIHARA/09/2025	9.439.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		87	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Bantar Panjang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.0304.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1112/SULIHARA/10/2025	9.413.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		88	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigodag Rw. 001, Ds. Harjatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1208.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1081/SULIHARA/10/2025	9.460.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		89	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pontang Legon Kec. Tirtayasa Kab. Serang (KONSOL 21)	379.990.000,00	600/SPK.0898.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1079/SULIHARA/10/2025	18.999.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		90	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang (KONSOL 100)	376.330.000,00	600/SPK.0502.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1063/SULIHARA/09/2025	18.816.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		91	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Gebang Raya, Kec. Peruk, Kota Tangerang	188.310.000,00	600/SPK.0685.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1141/SULIHARA/09/2025	9.415.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		92	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Asrama Polsek Menes Rt. 002 Rw. 006, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.120.000,00	600/SPK.0412.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1091/SULIHARA/09/2025	9.506.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		93	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Susukan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Susukan, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.1322.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	923/SULIHARA/09/2025	9.465.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		94	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mck) Kp. Nagreg Rw. 002, Ds. Cistiu, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.030.000,00	600/SPK.1076.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1347/SULIHARA/10/2025	9.451.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		95	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukabakti Rt. 008 Rw. 004, Ds. Lembangsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	187.830.000,00	600/SPK.0778.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1147/SULIHARA/10/2025	9.391.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		96	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Carang Pulang Rt. 001 Rw. 001, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.0550.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1083/SULIHARA/09/2025	9.378.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		97	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kijaid Rt. 016 Rw. 004, Ds. Gunung Kaler, Kec. Gunung Kaler, Kab. Kab. Tangerang	188.510.000,00	600/SPK.0127.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0996/SULIHARA/09/2025	9.425.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		98	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Sukatani Kec. Rajeg Kab. Tangerang (KONSOL 55)	376.520.000,00	600/SPK.0805.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1108/SULIHARA/09/2025	18.826.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		99	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 006, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.0474.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1161/SULIHARA/09/2025	9.428.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		100	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pulo Kempis Rt. 017 Rw. 004, Ds. Selaraja, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.1119.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1080/SULIHARA/09/2025	9.468.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	

		101	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tajur Rt. 015 Rw. 003, Ds. Girijaya, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	190.140.000,00	600/SPK.0437.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1080/SULIHARA/09/2025	9.507.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		102	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tebet Rt. 006 Rw. 006, Ds. Montor, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	190.030.000,00	600/SPK.0423.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1120/SULIHARA/09/2025	9.501.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		103	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sindang Laya Rt. 008 Rw. 004, Ds. Surakarta, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.940.000,00	600/SPK.0422.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0972/SULIHARA/09/2025	9.497.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		104	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.190.000,00	600/SPK.0220.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0971/SULIHARA/09/2025	9.359.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		105	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 004 Rw. 003, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.0214.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1159/SULIHARA/10/2025	9.387.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		106	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukaraja Sukamanah Cibetus Rw. 002, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.560.000,00	600/SPK.0526.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1211/SULIHARA/10/2025	9.478.000,00	180 Hari	10 Oktober 2025	08 April 2026	5	
		107	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Gandasari Residen, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.300.000,00	600/SPK.0207.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1233/SULIHARA/10/2025	9.365.000,00	180 Hari	07 Oktober 2025	05 April 2026	5	
		108	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	188.180.000,00	600/SPK.0193.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1234/SULIHARA/10/2025	9.409.000,00	180 Hari	07 Oktober 2025	05 April 2026	5	
		109	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang	188.070.000,00	600/SPK.0210.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1230/SULIHARA/10/2025	9.403.500,00	180 Hari	07 Oktober 2025	05 April 2026	5	
		110	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cisaat, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.950.000,00	600/SPK.0860.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1271/SULIHARA/10/2025	9.497.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		111	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.680.000,00	600/SPK.0096.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1330/SULIHARA/10/2025	9.434.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		112	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tunggul Tutung Rw. 003, Ds. Cikuya, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.380.000,00	600/SPK.0787.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1170/SULIHARA/10/2025	9.469.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		113	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lempuyang Rt. 008 Rw. 002, Ds. Lempuyang, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.1339.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1259/SULIHARA/10/2025	9.464.000,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		114	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gisg) Taman Laguna Rw. 002, Ds. Sukaharja, Kec. Sindangjaya, Kab. Tangerang	183.720.000,00	600/SPK.0548.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1215/SULIHARA/10/2025	9.186.000,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		115	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Komplek Padma Raya Rt. 004 Rw. 003, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	188.220.000,00	600/SPK.1003.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1025/SULIHARA/09/2025	9.411.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		116	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0212.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1118/SULIHARA/10/2025	9.398.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		117	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0217.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1123/SULIHARA/10/2025	9.398.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		118	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang	188.070.000,00	600/SPK.0205.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1309/SULIHARA/10/2025	9.403.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		119	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Santri, Rw. 003, Ds. Sangiang, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.450.000,00	600/SPK.0977.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1157/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		120	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Solor-Lor, Ds. Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.0862.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1272/SULIHARA/10/2025	9.484.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		121	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Tilu Rt. 003 Rw. 004, Ds. Kramatjaya, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.0393.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1299/SULIHARA/10/2025	9.502.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		122	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pamatang Luhur Rt. 0010 Rw. 003, Ds. Mangkuatam, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.740.000,00	600/SPK.0394.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1275/SULIHARA/10/2025	9.487.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		123	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Polos Rt. 002 Rw. 002, Ds. Waringinkurung, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.670.000,00	600/SPK.0397.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	974/SULIHARA/09/2025	9.483.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	

		124	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 008, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.490.000,00	600/SPK.0092.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1468/SULIHARA/10/2025	9.424.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		125	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bor Rt. 008 Rw. 003, Ds. Sujung, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.320.000,00	600/SPK.1301.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1263/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		126	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Sepang Elok Rt. 002 Rw. 014, Kel. Sepang, Kec. Taktakan , Kota Serang	189.780.000,00	600/SPK.0459.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1387/SULIHARA/10/2025	9.489.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		127	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Parung Kokosan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Parungkokosan, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	190.020.000,00	600/SPK.0390.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1364/SULIHARA/10/2025	9.501.000,00	180 Hari	01 Oktober 2025	30 Maret 2026	5	
		128	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tugu Hilir Rt. 002 Rw. 002, Ds. Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.0392.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1363/SULIHARA/10/2025	9.502.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		129	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cired Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sukadamei, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.0600.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1427/SULIHARA/10/2025	9.413.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		130	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Kaweng Rw. 001, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.0240.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1373/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		131	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Banten Indah Permai Rw. 030, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.900.000,00	600/SPK.0445.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1411/SULIHARA/10/2025	9.495.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		132	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Joga Rt. 015 Rw. 005, Ds. Carita, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	190.390.000,00	600/SPK.0377.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1221/SULIHARA/10/2025	9.519.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		133	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kramat Tanjung Rw. 006, Ds. Bunihara, Kec. Anyar, Kab. Serang	189.620.000,00	600/SPK.1178.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1197/SULIHARA/10/2025	9.481.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		134	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Sumbul Rw. 001, Ds. Citaman, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.690.000,00	600/SPK.0527.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1393/SULIHARA/10/2025	9.484.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		135	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Nangka Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kramatjaya, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.010.000,00	600/SPK.0398.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1367/SULIHARA/10/2025	9.500.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		136	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jln. Gang Masjid 1 - 2 Kadu Sabrang Rt. 001 Rw. 002, Ds. Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.390.000,00	600/SPK.0610.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1570/SULIHARA/10/2025	9.369.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		137	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Rss Penda, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.060.000,00	600/SPK.1055.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1385/SULIHARA/10/2025	9.453.000,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		138	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Burung Cayut, Ds. Pondokpanjang, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.520.000,00	600/SPK.0846.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1134/SULIHARA/10/2025	9.476.000,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		139	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadugede Rt. 022 Rw. 006, Ds. Mekarsari, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.0837.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1133/SULIHARA/10/2025	9.469.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		140	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.800.000,00	600/SPK.0490.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1463/SULIHARA/10/2025	9.390.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		141	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Tejamari Kec. Baros Kab. Serang (KONSOL 14)	378.550.000,00	600/SPK.0922.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1449/SULIHARA/10/2025	18.927.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		142	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Mekar Baru Kec. Petir Kab. Serang (KONSOL 17)	379.090.000,00	600/SPK.0637.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1419/SULIHARA/10/2025	18.954.500,00	180 Hari	07 Oktober 2025	05 April 2026	5	
		143	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gawanta Rt. 001 Rw. 002, Ds. Datarcae, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.0720.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1413/SULIHARA/10/2025	9.470.500,00	180 Hari	06 Oktober 2025	04 April 2026	5	
		144	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Solear Rw. 004, Ds. Solear, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.470.000,00	600/SPK.0755.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1239/SULIHARA/10/2025	9.423.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		145	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.660.000,00	600/SPK.0102.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1454/SULIHARA/10/2025	9.383.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		146	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Keraksan Rt. 005 Rw. 002, Ds. Puser, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.320.000,00	600/SPK.1312.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1590/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	

		147	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Munjul Kec. Solear Kab. Tangerang (KONSOL 83)	377.240.000,00	600/SPK.0315.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1261/SULIHARA/10/2025	18.862.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		148	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang (KONSOL 28)	376.410.000,00	600/SPK.0611.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1557/SULIHARA/10/2025	18.820.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		149	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 005 Cilalung, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.160.000,00	600/SPK.0159.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1522/SULIHARA/10/2025	9.408.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		150	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bonghas Tonggoh Rt. 001 Rw. 003, Ds. Sukaraja, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang	190.100.000,00	600/SPK.0435.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1572/SULIHARA/10/2025	9.505.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		151	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kadu Jaya Kec. Curug Kab. Tangerang (KONSOL 33)	377.860.000,00	600/SPK.0275.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0991/SULIHARA/09/2025	18.893.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		152	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 009 Rw. 009 Jl. Kavling Pdk, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.050.000,00	600/SPK.0147.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1406/SULIHARA/10/2025	9.402.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		153	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kesuren Rt. 001 - 002 Rw. 023, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang	189.490.000,00	600/SPK.1016.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1542/SULIHARA/10/2025	9.474.500,00	180 Hari	22 Oktober 2025	20 April 2026	5	
		154	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciasah Rt. 001 Rw. 002, Ds. Cihujan, Kec. Cijaku, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.0712.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1392/SULIHARA/10/2025	9.470.500,00	180 Hari	16 Oktober 2025	14 April 2026	5	
		155	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 006, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.050.000,00	600/SPK.0155.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1506/SULIHARA/10/2025	9.402.500,00	180 Hari	10 Oktober 2025	08 April 2026	5	
		156	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Cidapad Pengasinan Rt. 009 Rw. 004, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.410.000,00	600/SPK.1195.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1644/SULIHARA/11/2025	9.470.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		157	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kamalaka, Kel. Panggunjat, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.430.000,00	600/SPK.1037.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1514/SULIHARA/10/2025	9.471.500,00	180 Hari	17 Oktober 2025	15 April 2026	5	
		158	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panimbang Rt. 001 Rw. 004, Ds. Pancanegara, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.660.000,00	600/SPK.0090.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1521/SULIHARA/10/2025	9.483.000,00	180 Hari	14 Oktober 2025	12 April 2026	5	
		159	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Salabentar Legok, Kel. Cilaja, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.410.000,00	600/SPK.1143.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1474/SULIHARA/10/2025	9.470.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		160	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jln. Kp. Cigeudeug Rt. 006 Rw. 004, Ds. Sukamulya, Kec. Mekarjaya, Kab. Pandeglang	189.360.000,00	600/SPK.1213.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1501/SULIHARA/10/2025	9.468.000,00	180 Hari	21 Oktober 2025	19 April 2026	5	
		161	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bayah 2 Rt. 001 Rw. 006, Ds. Bayah Barat, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.280.000,00	600/SPK.0843.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1527/SULIHARA/10/2025	9.464.000,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		162	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipancur Rt. 04 Rw. 05. Ds. Sukamanah, Kec. Baros, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.0993.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1648/SULIHARA/11/2025	9.460.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		163	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.0099.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1532/SULIHARA/10/2025	9.395.500,00	180 Hari	24 Oktober 2025	22 April 2026	5	
		164	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Batu Luhur Rt. 016 Rw. 005, Ds. Bojong Menteng, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.0025.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1530/SULIHARA/10/2025	9.464.000,00	180 Hari	06 Oktober 2025	04 April 2026	5	
		165	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Buah, Ds. Samblawang, Kec. Waringinkurung, Kab. Serang	189.450.000,00	600/SPK.1207.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1546/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	17 Oktober 2025	15 April 2026	5	
		166	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Batusari Kec. Batuaceper Kota Tangerang (KONSOL 94)	375.190.000,00	600/SPK.0509.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1540/SULIHARA/10/2025	18.759.500,00	180 Hari	21 Oktober 2025	19 April 2026	5	
		167	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunungtumpang, Kec. Cibareno, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.0991.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1609/SULIHARA/10/2025	9.470.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		168	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Kadeper Rt. 002 Rw. 001, Kel. Pagadungan, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	184.240.000,00	600/SPK.0366.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1498/SULIHARA/10/2025	9.212.000,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		169	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pagadungan Rt. 002 Rw. 001, Ds. Tenjoayu, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.1325.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1484/SULIHARA/10/2025	9.465.000,00	180 Hari	13 Oktober 2025	11 April 2026	5	

		170	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Tampak Depan Kp. Cidadap Lebak Rt. 008 Rw. 002, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.420.000,00	600/SPK.0187.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1654/SULIHARA/10/2025	9.471.000,00	180 Hari	20 Oktober 2025	18 April 2026	5	
		171	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 010, Kel. Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.360.000,00	600/SPK.1172.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1588/SULIHARA/10/2025	9.418.000,00	180 Hari	04 November 2025	03 Mei 2026	5	
		172	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Dandang Rt. 001 Rw. 006, Kel. Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.470.000,00	600/SPK.0180.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1486/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	13 Oktober 2025	11 April 2026	5	
		173	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cicurug Rt. 001 Rw. 004, Ds. Citorek Tengah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.420.000,00	600/SPK.1012.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1639/SULIHARA/11/2025	9.471.000,00	180 Hari	06 November 2025	05 Mei 2026	5	
		174	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bulakan Rw. 001, Ds. Nayagati, Kec. Lauwidamar, Kab. Lebak	189.130.000,00	600/SPK.0799.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1669/SULIHARA/11/2025	9.456.500,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		175	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Banda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan (KONSOL 78)	376.510.000,00	600/SPK.0141.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1724/SULIHARA/11/2025	18.825.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		176	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Bayongbong Kadeper Rt. 003-013 Rw. 003, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	188.350.000,00	600/SPK.1284.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1625/SULIHARA/10/2025	9.417.500,00	180 Hari	16 Oktober 2025	14 April 2026	5	
		177	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Jengkol Rw. 001, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	188.590.000,00	600/SPK.0455.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0875/SULIHARA/11/2025	9.429.500,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		178	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Puri Anggrek Rw. 005, Kel. Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.100.000,00	600/SPK.1086.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1583/SULIHARA/10/2025	9.505.000,00	180 Hari	21 Oktober 2025	19 April 2026	5	
		179	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Graha Mulitara Permal 2 (Gmp2) Jl Raya Cadas Kukun Rw. 008, Ds. Karet, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.380.000,00	600/SPK.0815.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1594/SULIHARA/10/2025	9.419.000,00	180 Hari	24 Oktober 2025	22 April 2026	5	
		180	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Ds. Situ Gadung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.0363.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1682/SULIHARA/11/2025	9.407.500,00	180 Hari	10 Oktober 2025	08 April 2026	5	
		181	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0355.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1678/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		182	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Bumi Sari Rw. 010, Kel. Kasemen, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.870.000,00	600/SPK.1088.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1586/SULIHARA/10/2025	9.493.500,00	180 Hari	21 Oktober 2025	19 April 2026	5	
		183	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadeper Rt. 013 Rw. 003, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.240.000,00	600/SPK.1303.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1627/SULIHARA/10/2025	9.462.000,00	180 Hari	17 Oktober 2025	15 April 2026	5	
		184	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 005 Rw. 002, Ds. Kampung Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	188.590.000,00	600/SPK.0810.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1598/SULIHARA/10/2025	9.429.500,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		185	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Babat, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.590.000,00	600/SPK.0354.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1591/SULIHARA/10/2025	9.379.500,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		186	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Beji Rt. 002-004 Rw. 001, Ds. Kosambi, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang	188.770.000,00	600/SPK.1337.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1677/SULIHARA/11/2025	9.438.500,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		187	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sidayu Rt. 001 Rw. 001, Ds. Kebon, Kec. Tiriyasa, Kab. Serang	189.410.000,00	600/SPK.1292.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1666/SULIHARA/11/2025	9.470.500,00	180 Hari	20 Oktober 2025	18 April 2026	5	
		188	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Puser Kec. Tiriyasa Kab. Serang (KONSOL 22)	378.590.000,00	600/SPK.0899.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1703/SULIHARA/11/2025	18.929.500,00	180 Hari	16 Oktober 2025	14 April 2026	5	
		189	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Warakas, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1298.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1705/SULIHARA/11/2025	9.460.500,00	180 Hari	16 Oktober 2025	14 April 2026	5	
		190	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Citra Gading Rt. 004 Rw. 006, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.500.000,00	600/SPK.0955.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	17076SULIHARA/11/2025	9.475.000,00	180 Hari	10 Maret 2025	06 September 2025	5	
		191	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Bantar Wangi, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.590.000,00	600/SPK.0856.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1660/SULIHARA/11/2025	9.479.500,00	180 Hari	06 Oktober 2025	04 April 2026	5	

		192	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Ds. Sukadmai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0348.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1786/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	10 Oktober 2025	08 April 2026	5	
		193	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang (KONSOL 88)	375.300.000,00	600/SPK.0882.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1746/SULIHARA/11/2025	18.765.000,00	180 Hari	24 Oktober 2025	22 April 2026	5	
		194	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Laban Rt. 007 Rw. 003, Ds. Puser, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.730.000,00	600/SPK.0081.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1777/SULIHARA/11/2025	9.486.500,00	180 Hari	10 Oktober 2025	08 April 2026	5	
		195	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kamasan Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kamasan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.590.000,00	600/SPK.0858.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1722/SULIHARA/11/2025	9.479.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		196	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Ciakar Kec. Panongan Kab. Tangerang (KONSOL 93)	375.660.000,00	600/SPK.0339.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1773/SULIHARA/11/2025	18.783.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		197	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang (KONSOL 83)	375.730.000,00	600/SPK.0346.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1784/SULIHARA/11/2025	18.786.500,00	180 Hari	07 Oktober 2025	05 April 2026	5	
		198	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Grand Serang Asri Residence Rt. 001 Rw. 010, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.580.000,00	600/SPK.1227.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1684/SULIHARA/11/2025	9.479.000,00	180 Hari	12 November 2025	11 Mei 2026	5	
		199	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Grand Serang Asri Residence Rt. 002 Rw. 010, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.530.000,00	600/SPK.1228.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1768/SULIHARA/11/2025	9.476.500,00	180 Hari	12 November 2025	11 Mei 2026	5	
		200	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebayuan Rt. 007 Rw. 002, Ds. Siremen, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.800.000,00	600/SPK.0084.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1729/SULIHARA/11/2025	9.490.000,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		201	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimanggu, Ds. Sodong, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.530.000,00	600/SPK.0150.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1807/SULIHARA/11/2025	9.426.500,00	180 Hari	29 october 2025	27 April 2026	5	
		202	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Keramat,Jombang Rawa Lale Rt. 005 Rw. 017, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.0164.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1797/SULIHARA/11/2025	9.395.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		203	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisereh Sabrang Rw. 001, Kel. Cisereh, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.890.000,00	600/SPK.1174.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1739/SULIHARA/11/2025	9.444.500,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		204	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 007, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.410.000,00	600/SPK.0284.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1782/SULIHARA/11/2025	9.420.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		205	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sondol Rt. 001 Rw. 002, Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.530.000,00	600/SPK.0765.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1889/SULIHARA/11/2025	9.426.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		206	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Pesantren Rt. 003 Rw. 003 Ceger, Kel. Jurang Mangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.0152.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1803/SULIHARA/11/2025	9.395.500,00	180 Hari	22 Oktober 2025	20 April 2026	5	
		207	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Sejahtera Rt. 002 Rw. 004, Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.900.000,00	600/SPK.0162.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1809/SULIHARA/11/2025	9.395.000,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		208	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Flamboyan Puri Bintaro Hijau Rt. 006 Rw. 012, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.0161.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1799/SULIHARA/11/2025	9.395.500,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		209	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Ciater Permai Rw. 004, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.020.000,00	600/SPK.0153.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1800/SULIHARA/11/2025	9.401.000,00	180 Hari	15 Oktober 2025	13 April 2026	5	
		210	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan (KONSOL 81)	376.370.000,00	600/SPK.0145.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1808/SULIHARA/11/2025	18.818.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		211	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Cluster Pesona Bintaro Jl. Masjid Al Mubarakah Rt. 003 Rw. 003, Kel. Sawah, Lama, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.070.000,00	600/SPK.0148.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1842/SULIHARA/11/2025	9.403.500,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		212	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (KONSOL 79)	376.620.000,00	600/SPK.0160.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1810/SULIHARA/11/2025	18.831.000,00	180 Hari	14 Oktober 2025	12 April 2026	5	

		213	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Candu Rt. 005 Rw. 001, Ds. Serdang Wetan, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.0619.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1888/SULIHARA/11/2025	9.407.500,00	180 Hari	14 Oktober 2025	12 April 2026	5	
		214	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 001, Ds. Panyabangan, Kec. Cikeusai, Kab. Serang	189.530.000,00	600/SPK.1053.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1873/SULIHARA/11/2025	9.476.500,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		215	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Kademangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	186.520.000,00	600/SPK.0151.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1819/SULIHARA/11/2025	9.326.000,00	180 Hari	25 November 2025	24 Mei 2026	5	
		216	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kiara Rw. 001, Kel. Kiara, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.450.000,00	600/SPK.1244.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1886/SULIHARA/11/2025	9.472.500,00	180 Hari	21 November 2025	20 Mei 2026	5	
		217	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0362.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1681/SULIHARA/11/2025	9.404.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		218	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Rt. 006 Rw. 007, Ds. Kayu Agung, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	184.080.000,00	600/SPK.0801.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1793/SULIHARA/11/2025	9.204.000,00	180 Hari	05 November 2025	04 Mei 2026	5	
		219	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Paku Alam Rt. 003 Rw. 001, Ds. Pakualan, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	183.750.000,00	600/SPK.0775.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1825/SULIHARA/11/2025	9.187.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		220	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.030.000,00	600/SPK.2044.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2172/SULIHARA/12/2025	9.401.500,00	180 Hari	02 december 2025	31 Mei 2026	5	
		221	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perum Mediterania Residence 01 & 02, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.890.000,00	600/SPK.1423.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2171/SULIHARA/12/2025	9.394.500,00	180 Hari	02 december 2025	31 Mei 2026	5	
		222	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 025 Rw.004, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	190.110.000,00	600/SPK.1677.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1963/SULIHARA/12/2025	9.505.500,00	180 Hari	03 december 2025	01 Juni 2026	5	
		223	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komp. Graha Walantaka Rw. 006, Kel. Pengampelan, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.130.000,00	600/SPK.1907.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1962/SULIHARA/12/2025	9.506.500,00	180 Hari	03 december 2025	01 Juni 2026	5	
		224	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 019, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1689.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1987/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		225	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 007, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1687.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1988/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		226	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Bcp 2 Rw. 006, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.180.000,00	600/SPK.1795.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1946/SULIHARA/12/2025	9.459.000,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		227	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Tembong Indah Pancuran Mas Rw. 009, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.690.000,00	600/SPK.1827.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2121/SULIHARA/12/2025	9.484.500,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		228	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006 Kp. Babakan, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.710.000,00	600/SPK.1550.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2119/SULIHARA/12/2025	9.435.500,00	180 Hari	03 december 2025	01 Juni 2026	5	
		229	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 015 Perumahan Binong Permai, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.450.000,00	600/SPK.1549.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2033/SULIHARA/12/2025	9.422.500,00	180 Hari	03 december 2025	01 Juni 2026	5	
		230	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tanjung Ilir Rw. 004, Kel. Sayar, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.120.000,00	600/SPK.1991.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2115/SULIHARA/12/2025	9.456.000,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		231	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Gembor, Kec. Periu, Kota Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.1434.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1954/SULIHARA/12/2025	9.404.500,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		232	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 008, Kel. Gembor, Kec. Periu, Kota Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.1436.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2092/SULIHARA/12/2025	9.378.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		233	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.930.000,00	600/SPK.1665.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2142/SULIHARA/12/2025	9.396.500,00	180 Hari	08 Desember 2025	06 Juni 2026	5	
		234	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Tamensari, Kec. Baros, Kab. Serang	189.460.000,00	600/SPK.1784.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2057/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		235	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Ds. Carenang Udik, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.1897.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1945/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	

		236	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sadepe Rt. 001 Rw. 005, Ds. Parakanlima, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.350.000,00	600/SPK.1726.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2077/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		237	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Sindangsari, Kec. Petir, Kab. Serang	189.440.000,00	600/SPK.1369.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2076/SULIHARA/12/2025	9.472.000,00	180 Hari	09 Desember 2025	07 Juni 2026	5	
		238	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Cluster Fontana Vista, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.1411.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1981/SULIHARA/12/2025	9.410.000,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		239	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1968.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1960/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		240	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Sukaraja, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.550.000,00	600/SPK.1372.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2010/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		241	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gaok Rt. 006 Rw. 008, Ds. Pangadegan, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.410.000,00	600/SPK.1499.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2105/SULIHARA/12/2025	9.420.500,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		242	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lamporan Rt. 004 Rw. 005, Ds. Pangadegan, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1500.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2104/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		243	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukacai Lebak Rt. 004 Rw. 001, Ds. Sukacai, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.1457.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1952/SULIHARA/12/2025	9.502.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		244	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Asem Margaluyu, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.190.000,00	600/SPK.2061.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2070/SULIHARA/12/2025	9.459.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		245	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Sabrang Rw. 005, Ds. Cibojong, Kec. Paderincang, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1924.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2262/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	09 Desember 2025	07 Juni 2026	5	
		246	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Villa Meletti Vista Rw. 008, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	188.250.000,00	600/SPK.1932.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2046/SULIHARA/12/2025	9.412.500,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		247	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Pamulang 2 Jl. Benda Barat 13 Den Jl. Benda Barat 14 C Rt. 004 - 008 Rw. 010, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.350.000,00	600/SPK.1652.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2237/SULIHARA/12/2025	9.417.500,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		248	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Griya Permata Asri Rt. 002 Rw. 005, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.700.000,00	600/SPK.1986.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2273/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	09 Desember 2025	07 Juni 2026	5	
		249	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 027 Rw. 005, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1985.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2111/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		250	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciwini Engan Rw. 003, Kel. Pasuluhan, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.420.000,00	600/SPK.1865.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2323/SULIHARA/12/2025	9.471.000,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		251	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipancur Pasir Rw. 005, Ds. Pasirtanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.840.000,00	600/SPK.1514.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2209/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		252	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Ds. Cimaung, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1737.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2135/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		253	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Kamasan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.590.000,00	600/SPK.1656.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2139/SULIHARA/12/2025	9.479.500,00	180 Hari	03 december 2025	01 Juni 2026	5	
		254	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Sukadana, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1730.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2133/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		255	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pabuaran Cemara Rw. 002, Kel. Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.840.000,00	600/SPK.1551.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2130/SULIHARA/12/2025	9.392.000,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		256	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kubang Kepuh, Ds. Karang Kepuh, Kec. Bojonegara, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1698.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2245/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	09 Desember 2025	07 Juni 2026	5	
		257	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pengarengan Rt. 001 Rw. 004, Ds. Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.1704.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2472/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		258	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Panunggulan, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.700.000,00	600/SPK.1361.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2470/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	

		259	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 001, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1953.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1977/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		260	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 004, Ds. Solear, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.710.000,00	600/SPK.1975.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2197/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		261	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kebon Jahe Rt. 003 Rw. 014, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	188.360.000,00	600/SPK.1530.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2251/SULIHARA/12/2025	9.418.000,00	180 Hari	05 Desember 2025	03 Juni 2026	5	
		262	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Panongan Ambon Rt. 004 Rw. 004, Ds. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1475.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2102/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	19 Desember 2025	17 Juni 2026	5	
		263	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Libudak Rt. 012 Rw. 001, Ds. Sambilawang, Kec. Waringinkurung, Kab. Serang	189.600.000,00	600/SPK.2008.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2535/SULIHARA/12/2025	9.480.000,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		264	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Cmt Rt. 020 Rw. 005, Ds. Jambé, Kec. Jambé, Kab. Tangerang	188.800.000,00	600/SPK.1963.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2160/SULIHARA/12/2025	9.440.000,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		265	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.2046.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2191/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		266	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kamurang Atas Rt. 004 Rw. 001, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	188.130.000,00	600/SPK.1867.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2482/SULIHARA/12/2025	9.406.500,00	180 Hari	09 Desember 2025	07 Juni 2026	5	
		267	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Ciherang Blingbing Rw. 001, Ds. Ciherang, Kec. Gunung Sari, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1759.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2310/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	08 Desember 2025	06 Juni 2026	5	
		268	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 006-008, Ds. Parigi, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.1793.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2388/SULIHARA/12/2025	9.484.000,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		269	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001, Ds. Cragkong, Kec. Petir, Kab. Serang	189.410.000,00	600/SPK.1904.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2263/SULIHARA/12/2025	9.470.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		270	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Sukapaksa Rw. 002, Ds. Sukabares, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1754.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2260/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	08 Desember 2025	06 Juni 2026	5	
		271	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Bamahilir Rw. 002, Ds. Margagin, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.540.000,00	600/SPK.2012.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2389/SULIHARA/12/2025	9.477.000,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		272	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 006, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.050.000,00	600/SPK.1868.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2083/SULIHARA/12/2025	9.402.500,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		273	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kampung Kedaung Rw. 003, Ds. Tamiang, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang	187.150.000,00	600/SPK.1545.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2481/SULIHARA/12/2025	9.357.500,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		274	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 005, Ds. Sangiang, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.370.000,00	600/SPK.1363.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2131/SULIHARA/12/2025	9.468.500,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		275	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001, Kel. Bojong, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	188.240.000,00	600/SPK.1440.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2361/SULIHARA/12/2025	9.412.000,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		276	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Kadu Gobang Rw. 005, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1538.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2264/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	04 Desember 2025	02 Juni 2026	5	
		277	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Gaga Baru Rw. 003, Ds. Tanjung Pasir, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.470.000,00	600/SPK.1885.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2402/SULIHARA/12/2025	9.423.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		278	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sondol Rw. 003, Kel. Kolelet Wetan, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.730.000,00	600/SPK.1871.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2612/SULIHARA/12/2025	9.486.500,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		279	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 001, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.770.000,00	600/SPK.1426.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2639/SULIHARA/12/2025	9.388.500,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		280	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Jalan Cattleya Blok H Rw. 005, Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon	189.080.000,00	600/SPK.1541.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2386/SULIHARA/12/2025	9.454.000,00	180 Hari	22 Desember 2025	20 Juni 2026	5	
		281	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Majalawang Rt. 003 Rw. 001, Kel. Umbul Tengah, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.690.000,00	600/SPK.1823.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2780/SULIHARA/12/2025	9.484.500,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	

		282	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Salam Tonggoh, Ds. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.330.000,00	600/SPK.1992.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2442/SULIHARA/12/2025	9.466.500,00	180 Hari	08 Desember 2025	06 Juni 2026	5	
		283	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw.004, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.120.000,00	600/SPK.1638.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2294/SULIHARA/12/2025	9.406.000,00	180 Hari	08 Desember 2025	06 Juni 2026	5	
		284	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Permata Balara, Rw. 001, Ds. Saga, Kec. Balara, Kab. Tangerang	187.630.000,00	600/SPK.1980.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2285/SULIHARA/12/2025	9.381.500,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		285	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Mongkok, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.1371.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2423/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	19 Desember 2025	17 Juni 2026	5	
		286	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Dalem Balar, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.550.000,00	600/SPK.2022.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2411/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	19 Desember 2025	17 Juni 2026	5	
		287	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kabayan Kota Rw. 013, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.520.000,00	600/SPK.2021.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2324/SULIHARA/12/2025	9.476.000,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		288	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Maninjau Rt. 003 Rw. 001, Ds. Cidahu, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.1898.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2611/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		289	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kaduronyok Rt. 005 Rw. 003, Ds. Kaduronyok, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	188.210.000,00	600/SPK.1825.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2373/SULIHARA/12/2025	9.410.500,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		290	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Dahu Rt. 001 Rw. 001, Ds. Bantar Panjang, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.350.000,00	600/SPK.1866.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2521/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		291	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 011, Kel. Paninggilan Utara, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	187.530.000,00	600/SPK.1921.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2519/SULIHARA/12/2025	9.376.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		292	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Bumi Agung Permai 1 Rw. 016, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.400.000,00	600/SPK.1766.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2520/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		293	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Dongkal Rt. 002 Rw. 002, Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.750.000,00	600/SPK.1522.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2609/SULIHARA/12/2025	9.387.500,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		294	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Amd Gang Haji Dani, Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.960.000,00	600/SPK.1650.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2335/SULIHARA/12/2025	9.398.000,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		295	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Buaran Paku Jaya Rw. 001, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.890.000,00	600/SPK.1521.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2610/SULIHARA/12/2025	9.394.500,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		296	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Tribata Link. Cipocok Tegal Rt. 002 Rw. 015, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.120.000,00	600/SPK.1767.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2381/SULIHARA/12/2025	9.456.000,00	180 Hari	23 Desember 2025	21 Juni 2026	5	
		297	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Tegal Asem Rw. 003, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.280.000,00	600/SPK.1775.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2424/SULIHARA/12/2025	9.414.000,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		298	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 004 Rw. 001, Ds. Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.690.000,00	600/SPK.1512.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2460/SULIHARA/12/2025	9.484.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		299	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 003, Kel. Pons Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.1536.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2397/SULIHARA/12/2025	9.396.000,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		300	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karet Rw. 003, Ds. Karet, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.640.000,00	600/SPK.1484.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2476/SULIHARA/12/2025	9.432.000,00	180 Hari	18 Desember 2025	16 Juni 2026	5	
		301	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 010, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.420.000,00	600/SPK.1381.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2286/SULIHARA/12/2025	9.421.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		302	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Wakap Rw. 004, Ds. Kramatlaban, Kec. Paderincang, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.1537.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2320/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	16 Desember 2025	14 Juni 2026	5	
		303	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pintu Kapuk Rt. 024 Rw. 010, Ds. Bojong Renged, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.860.000,00	600/SPK.1560.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2553/SULIHARA/12/2025	9.393.000,00	180 Hari	19 Desember 2025	17 Juni 2026	5	

		304	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Catang Kolelet Rt. 008 Rw. 002, Ds. Bojong Catang, Kec. Tanjung Teja, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.1905.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2300/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		305	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pegadangan, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.190.000,00	600/SPK.1696.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2473/SULIHARA/12/2025	9.459.500,00	180 Hari	10 Desember 2025	08 Juni 2026	5	
		306	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Bakung, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.670.000,00	600/SPK.1794.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2412/SULIHARA/12/2025	9.483.500,00	180 Hari	16 Desember 2025	14 Juni 2026	5	
		307	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cislak Rw. 005, Ds. Mekarsari, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.180.000,00	600/SPK.1852.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2340/SULIHARA/12/2025	9.459.000,00	180 Hari	11 Desember 2025	09 Juni 2026	5	
		308	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.140.000,00	600/SPK.1570.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2428/SULIHARA/12/2025	9.407.000,00	180 Hari	16 Desember 2025	14 Juni 2026	5	
		309	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.1967.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2347/SULIHARA/12/2025	9.389.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		310	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nambo Rt. 006 Rw. 003, Ds. Kaserangan, Kec. Cirusas, Kab. Serang	189.220.000,00	600/SPK.1895.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2820/SULIHARA/12/2025	9.461.000,00	180 Hari	15 Desember 2025	13 Juni 2026	5	
		311	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pasir Kuntul Rt. 001 Rw. 013, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.180.000,00	600/SPK.2039.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2350/SULIHARA/12/2025	9.459.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		312	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1428.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2336/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		313	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Ranca Iyuh, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.2051.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2195/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		314	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumnas 3 Rw. 018, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.620.000,00	600/SPK.1671.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2355/SULIHARA/12/2025	9.431.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		315	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pasir Muncang Rw. 003, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1751.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2256/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	08 december 2025	06 Juni 2026	5	
		316	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.730.000,00	600/SPK.1409.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2219/SULIHARA/12/2025	9.436.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		317	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gerobogan Rw.003, Ds. Sukamulya, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang	188.750.000,00	600/SPK.1673.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2631/SULIHARA/12/2025	9.437.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		318	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perum Salaka Nagara Rw. 002, Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	187.830.000,00	600/SPK.1947.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2349/SULIHARA/12/2025	9.391.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		319	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Cluster Fiera Vista Rw. 008, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.640.000,00	600/SPK.1410.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2009/SULIHARA/12/2025	9.382.000,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		320	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perum Korpri Blok N Rt. 001 Rw. 005, Kel. Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	187.320.000,00	600/SPK.1667.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2586/SULIHARA/12/2025	9.366.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		321	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.470.000,00	600/SPK.1365.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2568/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		322	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukarame Rt. 004 Rw. 001, Ds. Sukatani, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.270.000,00	600/SPK.1892.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2573/SULIHARA/12/2025	9.463.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		323	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 006, Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1969.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2173/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		324	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Jagarayu Rt. 002 Rw. 003, Kel. Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.580.000,00	600/SPK.1870.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2511/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		325	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Ds. Jembe, Kec. Jembe, Kab. Tangerang	187.760.000,00	600/SPK.1962.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2846/SULIHARA/12/2025	9.388.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		326	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Walang, Ds. Surakarta, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	190.040.000,00	600/SPK.1628.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2662/SULIHARA/12/2025	9.502.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	

		327	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Ceger Rt. 010 Rw. 006, Ds. Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	187.540.000,00	600/SPK.1453.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2416/SULIHARA/12/2025	9.377.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		328	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Kayu Bongkok Rt. 005 Rw. 004, Ds. Kayu Bongkok, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	187.510.000,00	600/SPK.1449.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2660/SULIHARA/12/2025	9.375.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		329	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Jalan Jaro Alfa Rt. 003 Rw. 003 Kampung Gelam Timur, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1448.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2728/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		330	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cilogkrang Rw. 005, Ds. Ciomas, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1812.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2578/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		331	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Mengger, Ds. Kertasana, Kec. Bojonegara, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1699.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2854/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		332	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Wates Rw. 011, Ds. Kampung Melayu Timur, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.620.000,00	600/SPK.1402.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2699/SULIHARA/12/2025	9.381.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		333	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cipait Barat Rw. 006, Ds. Ciomas, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1813.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2579/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		334	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Pesona Lebak Wangi 2 Rt. 003 Rw. 010, Ds. Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	187.550.000,00	600/SPK.1394.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2306/SULIHARA/12/2025	9.377.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		335	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Griya Asri Bsd City Rw. 007, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.860.000,00	600/SPK.1940.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2501/SULIHARA/12/2025	9.393.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		336	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Besar Rt. 006-007 Rw. 014, Ds. Kampung Besar, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.510.000,00	600/SPK.1392.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2304/SULIHARA/12/2025	9.425.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		337	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sido Mulya Rw. 004, Ds. Warakas, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.1563.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2279/SULIHARA/12/2025	9.481.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		338	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Jl. Cimandiri Rw. 007, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.150.000,00	600/SPK.2005.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2634/SULIHARA/12/2025	9.407.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		339	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rt. 001 Rw. 015, Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.1456.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2401/SULIHARA/12/2025	9.395.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		340	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 002, Ds. Kedung, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang	187.440.000,00	600/SPK.1611.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2630/SULIHARA/12/2025	9.372.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		341	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cidangdeur - Kp. Kadu Rampayak Rt. 003 Rw. 004, Ds. Wirasinga, Kec. Mekarjaya, Kab. Pandeglang	189.370.000,00	600/SPK.1594.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2729/SULIHARA/12/2025	9.468.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		342	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Pajagan Rt. 002 Rw. 001, Ds. Mangkualam, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.530.000,00	600/SPK.1461.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2330/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		343	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cikareo Rt. 004 Rw. 002, Ds. Karamelmanik, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang	189.390.000,00	600/SPK.1463.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2783/SULIHARA/12/2025	9.469.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		344	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rt. 006 Rw. 003, Ds. Tirtayasa, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1684.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2779/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		345	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Gg. Kebon Jeruk VI Jl. Padasuka Rt. 002 Rw. 010, Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	188.560.000,00	600/SPK.1618.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2838/SULIHARA/12/2025	9.428.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		346	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Jl. Halim Perdana Kusuma Kp. Jurumudi Rt. 003 Rw. 006, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang	188.410.000,00	600/SPK.1606.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2674/SULIHARA/12/2025	9.420.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		347	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Gelam Tengah Rt. 003 Rw. 002, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.1714.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2748/SULIHARA/12/2025	9.428.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	

		348	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.940.000,00	600/SPK.1939.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2614/SULIHARA/12/2025	9.397.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		349	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Pesona Rt. 003 Rw. 006, Ds. Jeungjing, Kec. Cisoaka, Kab. Tangerang	188.000.000,00	600/SPK.1487.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2503/SULIHARA/12/2025	9.400.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		350	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Berlian Raya Rt. 009 - 011 Rw. 007, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.1620.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2929/SULIHARA/12/2025	9.401.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		351	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Pakujaya Rt. 004 Rw. 005, Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.1455.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2751/SULIHARA/12/2025	9.395.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		352	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kaduclung Sabrang Rt. 008 Rw. 003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.630.000,00	600/SPK.1876.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2883/SULIHARA/12/2025	9.481.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		353	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pondok Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang (KONSOL 56)	736.500.000,00	600/SPK.0116.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2834/SULIHARA/12/2025	36.825.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		354	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Harundang Rt. 001 Rw. 001, Ds. Harundang, Kec. Cikeusat, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1894.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2787/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		355	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Bakung, Kec. Cikande, Kab. Serang	298.450.000,00	600/SPK.2066.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2815/SULIHARA/12/2025	14.922.500,00	180 Hari	23 december 2025	21 Juni 2026	5	
		356	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 004 Rw. 007 Kampung Kali Jaya, Ds. Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1454.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2894/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		357	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Goong Permai Rt. 011 Rw. 004, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.270.000,00	600/SPK.1491.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2825/SULIHARA/12/2025	9.463.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		358	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Terate Udik Rw. 002, Kel. Masigit, Kec. Jombang, Kota Cilegon	189.180.000,00	600/SPK.1490.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2870/SULIHARA/12/2025	9.459.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		359	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Sukaharja Kec. Sindangjaya Kab. Tangerang (KONSOL 59)	738.090.000,00	600/SPK.0124.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2768/SULIHARA/12/2025	36.904.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		360	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kaloran Madrasah Rw. 005, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang	189.620.000,00	600/SPK.1644.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2829/SULIHARA/12/2025	9.481.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		361	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Dawa Barat Rw. 007, Kel. Pancur, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.790.000,00	600/SPK.1878.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2856/SULIHARA/12/2025	9.489.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		362	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 012, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Kab. Tangerang	188.470.000,00	600/SPK.0136.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2830/SULIHARA/12/2025	9.423.500,00	180 Hari	22 December 2025	20 Juni 2026	5	
		363	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Rt. 003 Rw. 002, Ds. Pamong, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1295.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0525/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		364	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Jengkol Rw. 001, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya , Kota Serang	190.070.000,00	600/SPK.0462.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0501/SULIHARA/09/2025	9.503.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		365	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Singarjan Kec. Pontang Kab. Serang (KONSOL 19)	379.970.000,00	600/SPK.0909.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0541/SULIHARA/09/2025	18.998.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		366	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciburuy Kidul Rt. 004 Rw. 002, Ds. Kubang Jaya, Kec. Pelir, Kab. Serang	189.550.000,00	600/SPK.0009.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0530/SULIHARA/09/2025	9.477.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		367	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kondang Rt. 015 Rw. 004, Ds. Bandung, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.660.000,00	600/SPK.0031.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0537/SULIHARA/09/2025	9.483.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		368	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gardu Baru Rt. 008 Rw. 003, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.530.000,00	600/SPK.0089.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0669/SULIHARA/09/2025	9.476.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		369	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Karundang Kolektor Rw. 005, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	190.250.000,00	600/SPK.0448.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0510/SULIHARA/09/2025	9.512.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	

		370	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang (KONSOL 70)	379.600.000,00	600/SPK.0655.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0535/SULIHARA/09/2025	18.980.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		371	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gintung Rt. 002 Rw. 006. Ds. Banjarsari, Kec. Anyer, Kab. Serang	189.670.000,00	600/SPK.0265.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0707/SULIHARA/09/2025	9.483.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		372	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kokosan Rt. 002 Rw. 003, Ds. Padasuka, Kec. Baros, Kab. Serang	189.260.000,00	600/SPK.1070.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0698/SULIHARA/09/2025	9.463.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		373	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Bukit Kramatwati Indah, Ds. Lebakwana, Kec. Kramatwati, Kab. Serang	189.920.000,00	600/SPK.0873.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0724/SULIHARA/09/2025	9.496.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		374	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Blokang Tengah Rw. 002, Ds. Balekambang, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.800.000,00	600/SPK.0531.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0562/SULIHARA/09/2025	9.490.000,00	180 Hari	08 November 2025	07 Mei 2026	5	
		375	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukasari, Ds. Kumpay, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak	189.520.000,00	600/SPK.1141.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0667/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		376	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kayang Bandung Kidul Rt. 003 Rw. 010, Ds. Situregen, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.1266.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0664/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		377	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Pejatan Kec. Kramatwati Kab. Serang (KONSOL 108)	379.300.000,00	600/SPK.0868.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0676/SULIHARA/09/2025	9.402.000,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		378	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Dawa Rw. 002, Kel. Pancur, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.570.000,00	600/SPK.1068.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0560/SULIHARA/09/2025	9.478.500,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		379	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Nuansa 1 Rt. 006 Rw. 006, Ds. Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0728.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0578/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		380	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 021, Kel. Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.320.000,00	600/SPK.0725.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0567/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	16 November 2025	15 Mei 2026	5	
		381	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Mengger Rw. 001, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.920.000,00	600/SPK.0465.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0673/SULIHARA/09/2025	9.416.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		382	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigondok - Jamidah Rt. 001 Rw. 006, Ds. Pasirbungur, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.0593.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0692/SULIHARA/09/2025	9.496.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		383	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 011, Ds. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.600.000,00	600/SPK.0722.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0505/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		384	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Citeureup Rt. 006 Rw. 002, Ds. Rahong, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.190.000,00	600/SPK.0584.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0674/SULIHARA/09/2025	9.380.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		385	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Singandaru Indah Rw. 022, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	190.000.000,00	600/SPK.0456.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0504/SULIHARA/09/2025	9.459.500,00	180 Hari	06 November 2025	05 Mei 2026	5	
		386	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukamulya Rw. 001, Ds. Sukaraja, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.0592.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0908/SULIHARA/09/2025	9.500.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		387	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang (KONSOL 41)	376.790.000,00	600/SPK.0555.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0565/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		388	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Kepuren Residen Rt. 012 Rw. 003, Kel. Kepuren, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.350.000,00	600/SPK.1326.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0571/SULIHARA/09/2025	18.797.500,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		389	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nagrak Rt. 002 Rw. 007, Ds. Situregen, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.1265.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0741/SULIHARA/09/2025	9.414.500,00	180 Hari	01 Desember 2025	30 Mei 2026	5	
		390	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lebak Jambu, Ds. Pasirtanjung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.840.000,00	600/SPK.1156.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0867/SULIHARA/09/2025	9.492.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		391	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Panongan Kec. Panongan Kab. Tangerang (KONSOL 48)	376.450.000,00	600/SPK.0568.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0506/SULIHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		392	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang (KONSOL 75)	375.950.000,00	600/SPK.0669.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0738/SULIHARA/09/2025	9.467.500,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	

		393	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Parumasan, Kel. Kalang Anyar, Kec. Taktakan, Kota Serang	188.290.000,00	600/SPK.1080.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0553/SULIHARA/09/2025	18.822.500,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		394	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Ciboteng Rt. 001 Rw. 001, Kel. Lebakwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.560.000,00	600/SPK.1342.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0598/SULIHARA/09/2025	9.485.500,00	180 Hari	14 November 2025	13 Mei 2026	5	
		395	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Barani Rt. 011 Rw. 004, Ds. Sangiang, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.710.000,00	600/SPK.0030.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0785/SULIHARA/09/2026	9.478.000,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		396	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 011 Rw. 007, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.1171.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0728/SULIHARA/09/2025	9.405.500,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		397	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Banten Indah Permai Rt.008 .Rw. 019, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	190.200.000,00	600/SPK.0469.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0748/SULIHARA/09/2025	9.510.000,00	180 Hari	02 November 2025	01 Mei 2026	5	
		398	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bangkalok Rt. 001 Rw. 001, Kel. Pasuluhan, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.460.000,00	600/SPK.1345.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0784/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	15 November 2025	14 Mei 2026	5	
		399	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Payung Rt. 021 Rw. 008, Ds. Mekarsari, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang	189.990.000,00	600/SPK.0368.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0998/SULIHARA/09/2025	9.499.500,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		400	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Pereng Rw. 004, Kel. Cibendung, Kec. Taktakan, Kota Serang	190.040.000,00	600/SPK.0466.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0751/SULIHARA/09/2025	9.418.500,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		401	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rajeg Mulya Residence Rw. 006, Ds. Rajeg Mulya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.370.000,00	600/SPK.1166.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0747/SULIHARA/09/2025	9.502.000,00	180 Hari	01 November 2025	30 April 2026	5	
		402	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Sepang Elok Rt. 001 Rw. 014, Kel. Sepang, Kec. Taktakan , Kota Serang	189.990.000,00	600/SPK.0458.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0822/SULIHARA/09/2025	9.499.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		403	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Manggu Rw. 007, Ds. Padarincang, Kec. Padarincang, Kab. Serang	190.050.000,00	600/SPK.0517.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1000/SULIHARA/09/2025	9.502.500,00	180 Hari	23 November 2025	22 Mei 2026	5	
		404	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Cigintung Rw. 005, Kel. Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.470.000,00	600/SPK.1048.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0878/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	01 November 2025	30 April 2026	5	
		405	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Cipocok Mesjid Rw. 001, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.540.000,00	600/SPK.0450.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0877/SULIHARA/09/2025	9.465.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		406	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komp. Korem Cilaku Rw. 004, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	189.300.000,00	600/SPK.1142.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0875/SULIHARA/09/2025	9.427.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		407	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Puri Anggrek Rw. 008, Kel. Terith, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.860.000,00	600/SPK.0447.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0668/SULIHARA/09/2025	9.493.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		408	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Cakung, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.0624.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0905/SULIHARA/09/2025	9.484.000,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		409	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komp. Puri Anggrek Rw. 005, Kel. Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.070.000,00	600/SPK.0661.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0600/SULIHARA/09/2025	9.503.500,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		410	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Gabus, Kec. Kopo, Kab. Serang	190.010.000,00	600/SPK.0633.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0900/SULIHARA/09/2025	9.500.500,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		411	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Sukarena Kec. Ciomas Kab. Serang (KONSOL 82)	376.340.000,00	600/SPK.0515.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0720/SULIHARA/09/2025	18.817.000,00	180 Hari	06 November 2025	05 Mei 2026	5	
		412	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.660.000,00	600/SPK.0093.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0823/SULIHARA/09/2025	9.383.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		413	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 004, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.710.000,00	600/SPK.0342.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0808/SULIHARA/09/2025	9.435.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		414	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Carang Pulang Rt. 003 Rw. 002, Ds. Wanakarta, Kec. Sindangjaya, Kab. Tangerang	188.650.000,00	600/SPK.0139.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0848/SULIHARA/09/2025	9.432.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		415	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 004, Kel. Parigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	188.570.000,00	600/SPK.0950.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0811/SULIHARA/09/2025	9.428.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		416	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Nyompok, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.910.000,00	600/SPK.0634.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0902/SULIHARA/09/2025	9.495.500,00	180 Hari	16 November 2025	15 Mei 2026	5	

		417	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gndug Rt. 001 Rw. 001, Ds. Mekar Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.130.000,00	600/SPK.0774.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0807/SULIHARA/09/2025	9.406.500,00	180 Hari	02 November 2025	01 Mei 2026	5	
		418	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Jahe Rt. 002 Rw. 007, Ds. Pancanegara, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1123.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0912/SULIHARA/09/2025	9.512.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		419	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Puri Angrek Rt.022 Rw. 005, Kel. Kelodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.510.000,00	600/SPK.1199.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1145/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		420	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Timbang, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	190.250.000,00	600/SPK.1186.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0778/SULIHARA/09/2025	9.467.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		421	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Buled Rt. 001 Rw. 004, Ds. Cimandiri, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.1269.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0840/SULIHARA/09/2025	9.475.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		422	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Berung Rt. 002 Rw. 006, Ds. Ciinjuk, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.260.000,00	600/SPK.1049.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0917/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	16 November 2025	15 Mei 2026	5	
		423	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link Padukan Rw. 010, Kel. Sayar, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.330.000,00	600/SPK.1056.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0981/SULIHARA/09/2025	94.630.000,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		424	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Komplek Ciceri Indah Rw. 011, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang	189.880.000,00	600/SPK.0629.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1012/SULIHARA/09/2025	9.448.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		425	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Ranji Rt.002 Rw. 005, Ds. Sukamanah, Kec. Rangsabitung, Kab. Lebak	188.960.000,00	600/SPK.0838.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1035/SULIHARA/09/2025	9.471.500,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		426	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Parungsentul Rt. 001 Rw. 009, Kel. Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.430.000,00	600/SPK.1040.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0955/SULIHARA/09/2025	18.929.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		427	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bama Hilir Rt. 003 - 005 Rw. 002, Ds. Margagiri, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.420.000,00	600/SPK.1096.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0999/SULIHARA/09/2025	9.499.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		428	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Parakanlima Kec. Cirinten Kab. Lebak (KONSOL 9)	378.580.000,00	600/SPK.0689.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0963/SULIHARA/09/2025	9.494.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		429	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikasungka Rt. 015 Rw. 004, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.590.000,00	600/SPK.1100.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1039/SULIHARA/09/2025	9.471.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		430	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ranca Serdang Rt. 015 Rw. 004, Ds. Ranca Iyuh, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.080.000,00	600/SPK.1105.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1294/SULIHARA/10/2025	9.491.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		431	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Talang Mas Rt. 001 Rw. 001, Ds. Cerukcuk, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.670.000,00	600/SPK.0086.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1040/SULIHARA/09/2025	9.468.000,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		432	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Menteng Rw. 002, Ds. Lebak, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.980.000,00	600/SPK.0519.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1034/SULIHARA/09/2025	9.471.500,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		433	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Barat Rt.003 Rw.002, Ds. Gunungkencana, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak	189.420.000,00	600/SPK.0711.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1026/SULIHARA/09/2025	9.429.500,00	180 Hari	02 November 2025	01 Mei 2026	5	
		434	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lebak Peundeuy Rw. 006, Ds. Sumberwaras, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.430.000,00	600/SPK.0586.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0595/SULIHARA/09/2025	9.486.000,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		435	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komp. Bumi Cipacung Indah, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.360.000,00	600/SPK.1204.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1003/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		436	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.430.000,00	600/SPK.1039.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1051/SULIHARA/09/2025	9.471.500,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		437	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Margamulya Rt. 002 Rw. 004, Ds. Sukajadi, Kec. Carile, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1007.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0954/SULIHARA/09/2025	9.471.000,00	180 Hari	07 November 2025	06 Mei 2026	5	
		438	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Guha Rw. 002, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.520.000,00	600/SPK.0536.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1065/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		439	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Langkob Rt. 004 Rw. 003, Ds. Kadubadak, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang	189.820.000,00	600/SPK.0364.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1061/SULIHARA/09/2025	9.483.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		440	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikray Girang Rt. 003 Rw. 007, Kel. Cigadung, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.390.000,00	600/SPK.1214.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1031/SULIHARA/09/2025	9.512.000,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	

		441	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Salahaur Rw. 011, Kel. Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	190.000.000,00	600/SPK.1257.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1046/SULIHARA/09/2025	9.415.500,00	180 Hari	09 November 2025	08 Mei 2026	5	
		442	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 008, Ds. Mekarjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	190.240.000,00	600/SPK.0428.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0950/SULIHARA/09/2025	9.404.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		443	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukapura Rt. 001 Rw. 001, Ds. Malangnengah, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.660.000,00	600/SPK.0380.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0979/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		444	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baru Masjid Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kampung Baru, Kec. Pelir, Kab. Serang	189.510.000,00	600/SPK.0013.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1089/SULIHARA/10/2025	947.500,00	180 Hari	22 November 2025	21 Mei 2026	5	
		445	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kronjo Pulo Cangkir Rt. 008 Rw. 004, Ds. Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.310.000,00	600/SPK.1329.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1062/SULIHARA/09/2025	9.509.000,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		446	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Koer Rt. 003 Rw. 001, Ds. Kubangkondang, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	190.250.000,00	600/SPK.0402.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1062/SULIHARA/09/2025	9.509.000,00	180 Hari	14 November 2025	13 Mei 2026	5	
		447	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Citangkli Rt. 003 Rw. 001, Ds. Tangkilsari, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.180.000,00	600/SPK.0400.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0882/SULIHARA/09/2025	9.500.000,00	180 Hari	09 November 2025	08 Mei 2026	5	
		448	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibawang Rt. 002 Rw. 006, Ds. Kubang Baros, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1044.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1069/SULIHARA/10/2025	9.491.500,00	180 Hari	28 November 2025	27 Mei 2026	5	
		449	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikalahi Hillir, Ds. Mekarsari, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.830.000,00	600/SPK.1135.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1071/SULIHARA/10/2025	9.496.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		450	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikalahi Tengah, Ds. Mekarsari, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.930.000,00	600/SPK.1136.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1082/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 November 2025	05 Mei 2026	5	
		451	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Sukabakti Kec. Curug Kab. Tangerang (KONSOL 34)	376.580.000,00	600/SPK.0280.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1044/SULIHARA/09/2025	9.512.000,00	180 Hari	01 Desember 2025	30 Mei 2026	5	
		452	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang (KONSOL 102)	375.610.000,00	600/SPK.0492.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1096/SULIHARA/10/2025	18.780.500,00	180 Hari	30 November 2025	29 Mei 2026	5	
		453	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang (KONSOL 103)	375.580.000,00	600/SPK.0494.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1097/SULIHARA/10/2025	18.779.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		454	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kampung Pabuaran Rt. 003 Rw. 001, Ds. Rajeg, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0804.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0701/SULIHARA/09/2025	18.901.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		455	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kavling 5 Rt. 004 Rw. 003, Ds. Rajeg, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.0803.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1340/SULIHARA/10/2025	9.410.000,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		456	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Palasari Rt. 003 Rw. 001, Ds. Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.980.000,00	600/SPK.0573.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1319/SULIHARA/10/2025	9.404.500,00	180 Hari	23 November 2025	22 Mei 2026	5	
		457	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sawah Baru Rt. 001 Rw. 008, Ds. Panyaungan, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.1267.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1111/SULIHARA/10/2025	9.399.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		458	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cinanggerang Rt. 016 Rw. 004, Ds. Pasirlimus, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.160.000,00	600/SPK.1157.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1016/SULIHARA/09/2025	9.472.500,00	180 Hari	08 November 2025	07 Mei 2026	5	
		459	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Ciruas Kulon Rt. 007 Rw. 003, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	187.950.000,00	600/SPK.1287.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1163/SULIHARA/10/2025	9.458.000,00	180 Hari	06 december 2025	04 Juni 2026	5	
		460	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.450.000,00	600/SPK.0861.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1252/SULIHARA/10/2025	9.397.500,00	180 Hari	01 Desember 2025	30 Mei 2026	5	
		461	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Palawijo Rt. 002 Rw. 003, Ds. Cikalong, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.810.000,00	600/SPK.0381.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1119/SULIHARA/10/2025	9.387.500,00	180 Hari	13 december 2025	11 Juni 2026	5	
		462	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 006 Rw. 002, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.0213.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1121/SULIHARA/10/2025	9.387.500,00	180 Hari	06 december 2025	04 Juni 2026	5	
		463	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 005 Rw. 004, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.0218.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0988/SULIHARA/09/2025	18.803.000,00	180 Hari	22 November 2025	21 Mei 2026	5	
		464	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kiera Payung Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang (KONSOL 46)	376.060.000,00	600/SPK.0811.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1269/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	

		465	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Cidema Rw. 003, Ds. Siketug, Kec. Cimas, Kab. Serang	184.370.000,00	600/SPK.0529.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1285/SULIHARA/10/2025	9.490.500,00	180 Hari	29 November 2025	28 Mei 2026	5	
		466	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 010, Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang	187.300.000,00	600/SPK.0204.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1267/SULIHARA/10/2025	9.218.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		467	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 007, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.300.000,00	600/SPK.0203.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1556/SULIHARA/10/2025	9.430.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		468	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.600.000,00	600/SPK.0111.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1231/SULIHARA/10/2025	9.365.000,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		469	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Puyuh Koneng Rt. 001 Rw. 002, Ds. Kencana Harapan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.370.000,00	600/SPK.1311.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1232/SULIHARA/10/2025	93.650.000,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		470	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Cikebel Rt. 001 Rw. 001 Dan Cikebel Rt. 013 Rw. 001, Ds. Banyuwangi, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang	189.940.000,00	600/SPK.0853.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1256/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		471	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Rt. 007 Rw. 003, Ds. Sukamanah, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.320.000,00	600/SPK.1315.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1270/SULIHARA/10/2025	9.497.000,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		472	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Laban Rt. 008 Rw. 002, Ds. Cerucuk, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.1306.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1254/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		473	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 009, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	186.960.000,00	600/SPK.0231.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1255/SULIHARA/10/2025	9.464.000,00	180 Hari	23 November 2025	22 Mei 2026	5	
		474	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa Kab. Serang (KONSOL 25)	379.510.000,00	600/SPK.0911.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1117/SULIHARA/10/2025	9.348.000,00	180 Hari	21 November 2025	20 Mei 2026	5	
		475	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Parumasan Rt. 007 Rw. 004, Ds. Sidamukti, Kec. Baros, Kab. Serang	189.600.000,00	600/SPK.0004.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1116/SULIHARA/10/2025	18.975.500,00	180 Hari	01 Desember 2025	30 Mei 2026	5	
		476	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tajur Rt. 003 Rw. 001, Ds. Palurahan, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	188.100.000,00	600/SPK.0970.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1307/SULIHARA/10/2025	9.480.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		477	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bumi Jaya Rt. 001 Rw. 001, Ds. Bumijaya, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.620.000,00	600/SPK.0060.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1280/SULIHARA/10/2025	9.405.000,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		478	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Bop 2 Blok J Rt. 041 Rw. 006, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.950.000,00	600/SPK.0055.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1304/SULIHARA/10/2025	94.975.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		479	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kareo Pasir Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kareo, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.720.000,00	600/SPK.0248.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1302/SULIHARA/10/2025	9.481.000,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		480	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Begog Pasar Rt. 009 Rw. 002, Ds. Singarajan, Kec. Pontang, Kab. Serang	189.770.000,00	600/SPK.0066.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1204/SULIHARA/10/2025	9.486.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		481	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.640.000,00	600/SPK.0107.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1401/SULIHARA/10/2025	9.468.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		482	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciekek Lor, Kel. Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.360.000,00	600/SPK.1222.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1467/SULIHARA/10/2027	9.432.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		483	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Mulih Rt. 021 Rw. 004, Ds. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang	190.010.000,00	600/SPK.0250.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1301/SULIHARA/10/2025	9.488.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		484	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Pematang , Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.640.000,00	600/SPK.0639.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1199/SULIHARA/10/2025	9.500.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		485	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Palasan Kec. Legok Kab. Tangerang (KONSOL 92)	375.730.000,00	600/SPK.0572.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1359/SULIHARA/10/2025	9.482.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		486	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Waru Rt. 002 Rw. 006, Ds. Menes, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.240.000,00	600/SPK.1251.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1243/SULIHARA/10/2025	9.462.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		487	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001 , Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.390.000,00	600/SPK.0483.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1212/SULIHARA/10/2025	18.786.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	

		488	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Gawanta, Ds. Datarcae, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	188.880.000,00	600/SPK.1057.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1345/SULIHARA/10/2025	9.444.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		489	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kisepet Rw. 005, Ds. Gunung Sari, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	188.650.000,00	600/SPK.0744.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1369/SULIHARA/10/2025	9.510.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		490	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kemiri Lio Rw. 01, Ds. Kemiri, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	188.600.000,00	600/SPK.0757.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1395/SULIHARA/10/2025	9.432.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		491	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Buntut Rt. 002 Rw. 004, Ds. Rahayu, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	190.200.000,00	600/SPK.0430.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1397/SULIHARA/10/2025	9.430.000,00	180 Hari	08 december 2025	06 Juni 2026	5	
		492	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Peureup Rw. 003, Ds. Kubang Baros, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.820.000,00	600/SPK.0268.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1195/SULIHARA/10/2025	94.910.000,00	180 Hari	08 december 2025	06 Juni 2026	5	
		493	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilaban Rt. 001 Rw. 005, Ds. Sindanglaut, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	190.390.000,00	600/SPK.0372.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1412/SULIHARA/10/2025	9.369.500,00	180 Hari	20 Desember 2025	18 Juni 2026	5	
		494	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Griya Permata Asri Rt. 010 Rw. 004, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.980.000,00	600/SPK.0169.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0970/SULIHARA/09/2025	9.519.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		495	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Candu Rt. 005 Rw. 001, Ds. Serdang Wetan, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.030.000,00	600/SPK.0618.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1178/SULIHARA/10/2025	9.499.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		496	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Koncang, Ds. Gunungcupu, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1066.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0994/SULIHARA/09/2025	9.401.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		497	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pandan Rt. 007 Rw. 002, Ds. Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.810.000,00	600/SPK.0042.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1384/SULIHARA/10/2025	9.474.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		498	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kuaron Rt. 004 Rw. 001, Ds. Citerep, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.510.000,00	600/SPK.0058.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1362/SULIHARA/10/2025	9.490.500,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		499	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukanaju Rw. 002, Ds. Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1031.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1179/SULIHARA/10/2025	9.467.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		500	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikobak Rt. 004 Rw. 002, Ds. Kencana Harapan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.980.000,00	600/SPK.0070.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1179/SULIHARA/10/2025	9.467.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		501	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karingan Rw. 001, Kel. Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang	189.700.000,00	600/SPK.1223.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1441/SULIHARA/10/2025	9.499.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		502	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciangsana Rw. 005, Ds. Cisimeut Raya, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.280.000,00	600/SPK.0800.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1442/SULIHARA/10/2025	9.475.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		503	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.0484.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1478/SULIHARA/10/2025	9.464.000,00	180 Hari	20 december 2025	18 Juni 2026	5	
		504	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.010.000,00	600/SPK.0488.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1381/SULIHARA/10/2025	9.485.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		505	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bunar Tegal Rt. 006 Rw. 001, Ds. Silebu, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.650.000,00	600/SPK.0046.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1422/SULIHARA/10/2025	9.378.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		506	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lempuyang Rt. 005 Rw. 002, Ds. Lempuyang, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.790.000,00	600/SPK.0085.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1488/SULIHARA/10/2025	9.489.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		507	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Citra Gading Rw. 006, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.400.000,00	600/SPK.1030.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1444/SULIHARA/10/2025	9.482.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		508	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipicung Rt. 001 Rw. 005, Ds. Karyasan, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	190.010.000,00	600/SPK.0388.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0913/SULIHARA/09/2025	9.420.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		509	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Psp Rt. 005 Rw. 003, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.480.000,00	600/SPK.1170.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1500/SULIHARA/10/2025	9.489.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		510	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukadana Rt. 007 Rw. 007, Ds. Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.1336.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1403/SULIHARA/10/2025	9.500.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		511	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kerangan Rt. 005 Rw. 004, Ds. Penggalang, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.610.000,00	600/SPK.0057.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1649/SULIHARA/11/2025	9.474.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	

		512	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Pinang Rt. 001 Rw. 005, Ds. Sukajadi, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.480.000,00	600/SPK.0845.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1489/SULIHARA/10/2025	9.424.000,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		513	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Pamarian Rt. 003 Rw. 002, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	189.590.000,00	600/SPK.1024.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1476/SULIHARA/10/2025	9.480.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		514	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigoong Rt. 001 Rw. 001, Kel. Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.370.000,00	600/SPK.1343.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1310/SULIHARA/10/2025	9.413.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		515	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Nancang Cilik Rw. 003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.580.000,00	600/SPK.1095.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1515/SULIHARA/10/2025	9.463.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		516	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Limpar Rt. 001 Rw. 006, Kel. Curug, Kec. Curug, Kota Serang	189.270.000,00	600/SPK.1196.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1543/SULIHARA/10/2025	9.479.000,00	180 Hari	22 october 2025	20 April 2026	5	
		517	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tajur Rt.003 Rw. 002, Ds. Panisi, Kec. Koroncang, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1176.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1415/SULIHARA/10/2025	9.479.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		518	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan D'Saruni Residence Rt. 004 Rw. 013, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1064.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1174/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		519	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gawanta, Ds. Datarcae, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.240.000,00	600/SPK.0270.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1526/SULIHARA/10/2025	9.473.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		520	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babalan Rw. 003, Ds. Margawangi, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.0797.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1208/SULIHARA/10/2025	9.462.000,00	180 Hari	2 october2025	31 Maret 2026	5	
		521	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 007, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.0112.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1523/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		522	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pulo Rt. 003 Rw. 001, Ds. Pulo, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.170.000,00	600/SPK.0054.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1207/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		523	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang (KONSOL 101)	376.800.000,00	600/SPK.0504.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1531/SULIHARA/10/2025	9.395.500,00	180 Hari	29 october 2025	27 April 2026	5	
		524	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kosambi Rt. 003 Rw. 002, Ds. Pangenjahan, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.170.000,00	600/SPK.1331.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1518/SULIHARA/10/2025	9.458.500,00	180 Hari	6 october 2025	04 April 2026	5	
		525	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cicaringin, Kec. Gunungkenana, Kab. Lebak	189.480.000,00	600/SPK.0989.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1541/SULIHARA/10/2025	18.840.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		526	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Sukanegara Kec. Pontang Kab. Serang (KONSOL 18)	378.350.000,00	600/SPK.0906.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1324/SULIHARA/10/2025	9.408.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		527	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 013 Rw. 005, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.720.000,00	600/SPK.0813.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1608/SULIHARA/10/2025	9.474.000,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		528	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Puri Angrek Rw. 005, Kel. Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.150.000,00	600/SPK.1238.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1457/SULIHARA/10/2025	18.917.500,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		529	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Armata Rw. 004, Ds. Tegai Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	188.790.000,00	600/SPK.0743.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	159/SULIHARA/10/2025	9.346.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		530	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 017, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang	187.860.000,00	600/SPK.0253.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1587/SULIHARA/10/2025	9.457.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		531	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciangsana Rt. 002 Rw. 004, Ds. Cisimeut Raya, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.470.000,00	600/SPK.1013.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1459/SULIHARA/10/2025	9.439.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		532	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciekek Talaga Rw. 007, Kel. Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.520.000,00	600/SPK.1032.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1529/SULIHARA/10/2025	93.930.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		533	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mck) Kp. Ciwaluran Rt. 012 Rw. 003, Ds. Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.170.000,00	600/SPK.0960.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1640/SULIHARA/11/2025	9473500	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		534	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Banten Indah Permai .Rw. 019, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	188.500.000,00	600/SPK.0470.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1753/SULIHARA/11/2025	9.476.000,00	180 Hari	23 october 2025	21 April 2026	5	

		535	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kadumula Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kolelet, Kec. Picing, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1179.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1755/SULIHARA/11/2025	9.474.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		536	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Taman Cimuncang Indah Rw. 015, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	188.990.000,00	600/SPK.0181.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1652/SULIHARA/11/2025	9.458.500,00	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		537	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gintung Rw. 002, Ds. Pasir Gintung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang	188.480.000,00	600/SPK.0746.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1755/SULIHARA/11/2025	9.474.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		538	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Jeruk Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cinoyong, Kec. Canla, Kab. Pandeglang	190.340.000,00	600/SPK.0376.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1450/SULIHARA/10/2025	9.424.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		539	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Angin Rt. 001 Rw. 007, Ds. Cimanis, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	190.430.000,00	600/SPK.0441.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1711/SULIHARA/11/2025	9.521.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		540	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Griya Permata Asri Rw. 004, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.950.000,00	600/SPK.1083.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1708/SULIHARA/11/2025	9.517.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		541	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kawao Rt. 009 Rw. 001, Ds. Warakas, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.360.000,00	600/SPK.1299.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1584/SULIHARA/10/2025	9.497.500,00	180 Hari	21 october2025	19 April 2026	5	
		542	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Rw. 022, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	183.720.000,00	600/SPK.0877.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1706/SULIHARA/11/2025	9.468.000,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		543	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bom Rt. 008 Rw. 003, Ds. Pedaleman, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.550.000,00	600/SPK.0083.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1620/SULIHARA/10/2025	9.186.000,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		544	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 015, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.320.000,00	600/SPK.0227.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1672/SULIHARA/11/2025	9.477.500,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		545	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Perumahan Safira Blok F, Kel. Sepang, Kec. Taktakan, Kota Serang	184.250.000,00	600/SPK.1038.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1699/SULIHARA/11/2025	9.416.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		546	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Argawana Kec. Pulo Ampel Kab. Serang (KONSOL 65)	379.510.000,00	600/SPK.0874.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1673/SULIHARA/11/2025	9.212.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		547	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Rt. 004 Rw. 006, Ds. Mekar Agung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.820.000,00	600/SPK.0966.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1778/SULIHARA/11/2025	18.975.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		548	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasar Kopi Baru, Ds. Cinangka, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.470.000,00	600/SPK.0857.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1774/SULIHARA/11/2025	9.473.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		549	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 022 Rw. 011, Ds. Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	188.340.000,00	600/SPK.0767.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1885/SULIHARA/11/2025	9.417.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		550	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 - 003 Rw. 003, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.510.000,00	600/SPK.1004.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1731/SULIHARA/11/2025	9.491.000,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		551	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Golat Timur Rt. 004 Rw. 002, Ds. Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	190.160.000,00	600/SPK.0440.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1712/SULIHARA/11/2025	9.475.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		552	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tegal Sari Rt. 007 Rw. 003, Ds. Samparwadi, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.0080.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1710/SULIHARA/11/2025	9.508.000,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		553	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sidayu Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kebon, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.0082.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1748/SULIHARA/11/2025	9.481.500,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		554	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Suradita Kec. Cisaug Kab. Tangerang (KONSOL 84)	375.550.000,00	600/SPK.0359.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1747/SULIHARA/11/2025	9.481.500,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		555	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Karundang Kajeroan Rt. 004 Rw. 001, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.500.000,00	600/SPK.1147.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1770/SULIHARA/11/2025	18.777.500,00	180 Hari	23 SEPTEMBER 2025	22 Maret 2026	5	
		556	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.230.000,00	600/SPK.0219.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1667/SULIHARA/11/2025	9.425.000,00	180 Hari	12 NOVEMBER 2025	11 Mei 2026	5	
		557	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ragas Pulo Rt. 013 Rw. 004, Ds. Bolang, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.790.000,00	600/SPK.0068.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1744/SULIHARA/11/2025	9.411.500,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		558	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Samprok Rt. 022 Rw. 007, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0613.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1730/SULIHARA/11/2025	9.489.500,00	180 Hari	7 November 2025	06 Mei 2026	5	

		559	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Namprak Rt. 001 Rw. 004, Ds. Bantar Panjang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.1161.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1872/SULIHARA/11/2025	9.404.500,00	180 Hari	7 october 2025	05 April 2026	5	
		560	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tanjung Rt. 005 Rw. 002, Ds. Laban, Kec. Tirayasa, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.0079.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1767/SULIHARA/11/2025	18.768.500,00	180 Hari	26 SEPTEMBER 2025	25 Maret 2026	5	
		561	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang (KONSOL 85)	375.370.000,00	600/SPK.0343.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1688/SULIHARA/11/2025	9.484.000,00	180 Hari	5 November 2025	04 Mei 2026	5	
		562	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimentul Rt. 008 Rw. 002, Ds. Bakung, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.350.000,00	600/SPK.1333.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1740/SULIHARA/11/2025	9.401.000,00	180 Hari	10 NOVEMBER 2025	09 Mei 2026	5	
		563	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.0274.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1323/SULIHARA/10/2025	9.417.500,00	180 Hari	08 Oktober 2025	06 April 2026	5	
		564	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Cikareo, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.210.000,00	600/SPK.0334.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1779/SULIHARA/11/2025	9.407.500,00	180 Hari	30 Oktober 2025	28 April 2026	5	
		565	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Sangiang Jaya, Kec. Peruk, Kota Tangerang	187.190.000,00	600/SPK.0209.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1780/SULIHARA/11/2025	9.410.500,00	180 Hari	29 october 2025	27 April 2026	5	
		566	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003 - 005, Ds. Sobang, Kec. Sobang, Kab. Lebak	189.430.000,00	600/SPK.1127.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1370/SULIHARA/10/2025	9.449.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		567	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Cendana Raya No. 9 Rt. 019 Rw. 004, Ds. Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0614.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1866/SULIHARA/11/2025	9.471.500,00	180 Hari	17 NOVEMBER 2025	16 Mei 2026	5	
		568	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Mayabon Komplek Permata Banjar Asri Rt. 009 Rt. 018, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.920.000,00	600/SPK.0144.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1701/SULIHARA/11/2025	9.359.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		569	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Maulana Hasanudin Rt. 002 Rw. 003 Gg. Pesona, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.340.000,00	600/SPK.0479.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1878/SULIHARA/11/2025	9.404.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		570	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0486.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1881/SULIHARA/11/2025	9.384.000,00	180 Hari	30 Oktober 2025	28 April 2026	5	
		571	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Patekong Rt. 005 Rw. 003, Ds. Pangenjahan, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.400.000,00	600/SPK.1330.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1882/SULIHARA/11/2025	9.417.000,00	180 Hari	30 Oktober 2025	28 April 2026	5	
		572	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 015 Rw. 005, Ds. Mekar Wangi, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang	187.870.000,00	600/SPK.0617.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1856/SULIHARA/11/2025	9.496.000,00	180 Hari	17 NOVEMBER 2025	16 Mei 2026	5	
		573	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Sabrang Rt. 001 Rw. 005, Ds. Katumbiri, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	184.310.000,00	600/SPK.0384.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1875/SULIHARA/11/2025	9.420.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		574	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jagarhayu - Kp. Kadu Kasintu, Ds. Kaungcaang, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.0959.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1879/SULIHARA/11/2025	9.393.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		575	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Masjid Nurul Iman Komplek Griya Permata Asri Blok C9 Rt. 005 Rw. 004, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	183.630.000,00	600/SPK.0175.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1868/SULIHARA/11/2025	9.215.500,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		576	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mck) Kp. Sangiang Rt. 003 - 004 Rw. 003, Ds. Sangiang, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	188.610.000,00	600/SPK.0772.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1895/SULIHARA/11/2025	9.473.000,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		577	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nagajaya Rt. 001 Rw. 010, Ds. Cikatomas, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.520.000,00	600/SPK.0994.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1833/SULIHARA/11/2025	9.181.500,00	180 Hari	13 NOVEMBER 2025	12 Mei 2026	5	
		578	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Salem Rt. 002 Rw. 006, Ds. Cilograng, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.0995.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1826/SULIHARA/11/2025	9.430.500,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		579	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kondang Rw. 005, Ds. Kadujajar, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.690.000,00	600/SPK.1996.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1894/SULIHARA/11/2025	9.469.500,00	180 Hari	24 NOVEMBER 2025	23 Mei 2026	5	
		580	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Kobong Rt. 011 Rw. 004, Ds. Bendung, Kec. Tanara, Kab. Serang	190.110.000,00	600/SPK.1676.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1893/ISULIHARA/11/2025	9.476.000,00	180 Hari	24 NOVEMBER 2025	23 Mei 2026	5	

		581	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link Karangasem Rw. 001, Kel. Pancur, Kec. Taklakan, Kota Serang	190.030.000,00	600/SPK.1777.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1921/SULIHARA/12/2025	9.484.500,00	180 Hari	2 december2025	31 Mei 2026	5	
		582	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1691.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1964/SULIHARA/12/2025	9.505.500,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		583	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 011, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.1664.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2002/SULIHARA/12/2025	9.501.500,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		584	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Komplek Vila Inti Persada , Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1688.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1968/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		585	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Kedauang, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.1685.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1984/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		586	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 009, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1686.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1982/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		587	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Griya Permata Asri Rw. 003, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.930.000,00	600/SPK.1654.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1985/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		588	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link Ciblewuk, Kel. Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang	190.140.000,00	600/SPK.1995.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1983/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		589	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.020.000,00	600/SPK.1578.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2027/SULIHARA/12/2025	9.496.599,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		590	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukajadi Rw. 006, Ds. Sukajadi, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.550.000,00	600/SPK.1837.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2056/SULIHARA/12/2025	9.401.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		591	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Gunalong Rt. 009 Rw. 003, Ds. Tejamari, Kec. Baros, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1674.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2029/SULIHARA/12/2025	9.507.000,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		592	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Sukamandi Rw. 007, Kel. Karangasri, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	187.260.000,00	600/SPK.1919.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2067/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		593	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Puri Anggrek Rt. 017 Rw. 005, Kel. Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.290.000,00	600/SPK.1820.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2025/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		594	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Parakanlima Rt. 002 Rw. 006, Ds. Parakanlima, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1727.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2095/SULIHARA/12/2025	9.363.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		595	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Sukasari, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.450.000,00	600/SPK.1362.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2143/SULIHARA/12/2025	9.469.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		596	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Ancol Pasir, Kec. Jembe, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1959.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2026/SULIHARA/12/2025	9.464.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		597	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gajug Cipariuk Rw. 002, Ds. Bintangresmi, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.230.000,00	600/SPK.1830.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2073/SULIHARA/12/2025	9.472.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		598	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Rw. 001, Ds. Sipayung, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.280.000,00	600/SPK.1832.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1980/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		599	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kanaga Masjid Rt. 012 Rw. 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.320.000,00	600/SPK.1493.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2030/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		600	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kanaga Cikuya Rw. 005, Ds. Warunggunung, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.130.000,00	600/SPK.1494.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2031/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		601	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lamepayung Rw. 001, Ds. Muncakpong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak	189.480.000,00	600/SPK.1581.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2184/SULIHARA/12/2025	9.466.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		602	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Sawah Baru Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cibatad, Kec. Cibatad, Kab. Lebak	189.990.000,00	600/SPK.1582.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2185/SULIHARA/12/2025	9.456.500,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		603	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kosambi I, Ds. Karang Suraga, Kec. Cinangka, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1923.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2175/SULIHARA/12/2025	9.474.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	

		604	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Griyaloka Sektor 1 1 Bsd Rw. 019, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.300.000,00	600/SPK.1672.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2174/SULIHARA/12/2025	9.499.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		605	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jaha Masjid Rw. 003, Ds. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1807.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2081/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		606	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 010, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.830.000,00	600/SPK.2043.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2257/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		607	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Taman Kuranten Asri Rt. 005 Rw. 004, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.860.000,00	600/SPK.2009.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2231/SULIHARA/12/2025	9.415.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		608	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lebak Rw. 004, Kel. Lebakwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.260.000,00	600/SPK.1984.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2199/SULIHARA/12/2025	9.391.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		609	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Kembang Rw. 004, Ds. Pasir Kembang, Kec. Maja, Kab. Lebak	190.010.000,00	600/SPK.1746.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2089/SULIHARA/12/2025	9.493.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		610	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cicadas Rw. 002, Ds. Gunungsari, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak	189.570.000,00	600/SPK.2029.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2210/SULIHARA/12/2025	9.463.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		611	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Ds. Kadugenep, Kec. Petir, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1736.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2113/SULIHARA/12/2025	9.500.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		612	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 007, Ds. Parigi, Kec. Cikande, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1738.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2079/SULIHARA/12/2025	9.478.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		613	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.500.000,00	600/SPK.1408.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2140/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		614	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Saninten Rw. 004, Ds. Gunungsari, Kec. Banjarsari, Kab. Lebak	189.270.000,00	600/SPK.1525.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2125/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		615	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Tomon Eka Harapan Jaya, Ds. Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.150.000,00	600/SPK.1703.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2221/SULIHARA/12/2025	9.425.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		616	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Cisoka, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1951.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2194/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		617	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cikatomas, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.560.000,00	600/SPK.1657.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2149/SULIHARA/12/2025	9.463.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		618	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.820.000,00	600/SPK.1693.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2471/SULIHARA/12/2025	9.457.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		619	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sidumara Rw. 003, Ds. Talaga, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.670.000,00	600/SPK.2014.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2054/SULIHARA/12/2025	9.478.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		620	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Griya Serdang Indah Rw. 005, Ds. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.910.000,00	600/SPK.1572.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2061/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		621	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Ds. Tunjung Teja, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.420.000,00	600/SPK.1358.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2343/SULIHARA/12/2025	9.483.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		622	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Ds. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.1950.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2290/SULIHARA/12/2025	9.495.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		623	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Situ Jaya Rt. 003 Rw. 002, Ds. Curugpanjang, Kec. Cikulur, Kab. Lebak	189.280.000,00	600/SPK.1660.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2370/SULIHARA/12/2025	9.471.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		624	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Ds. Ranca Iyuh, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.740.000,00	600/SPK.2052.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2193/SULIHARA/12/2025	9.387.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		625	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 003 Rw. 008, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.2048.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2212/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		626	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kampung Baru, Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	188.340.000,00	600/SPK.1858.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2012/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	

		627	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.490.000,00	600/SPK.1658.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2189/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		628	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Hegarmanah, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.060.000,00	600/SPK.1997.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2377/SULIHARA/12/2025	9.453.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		629	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Maja Barat Rt. 002 Rw. 003, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	190.010.000,00	600/SPK.2007.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2055/SULIHARA/12/2025	9.453.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		630	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalumpang, Ds. Rancateureup, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.580.000,00	600/SPK.2013.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2280/SULIHARA/12/2025	9.474.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		631	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Gembor Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.1779.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2329/SULIHARA/12/2025	9.500.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		632	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Griya Labuan Asri Rw. 006, Ds. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.590.000,00	600/SPK.2018.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2080/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		633	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Barata Karya Rw. 007 Komp. Barata, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang	187.580.000,00	600/SPK.1553.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2308/SULIHARA/12/2025	9.494.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		634	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jln. Kh. Muhamad Zain Rt. 002 Rw. 003, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.010.000,00	600/SPK.1583.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2213/SULIHARA/12/2025	9.379.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		635	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 005 Rw. 002, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.710.000,00	600/SPK.1955.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2338/SULIHARA/12/2025	9.479.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		636	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibuntu 1 Rt. 001 Rw. 002, Ds. Suwakan, Kec. Bayah, Kab. Lebak	190.070.000,00	600/SPK.1857.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2098/SULIHARA/12/2025	9.400.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		637	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perum Griya Yasa, Ds. Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.700.000,00	600/SPK.1413.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1974/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		638	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bantamaga, Rt. 013 Rw. 003, Ds. Bejod, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.530.000,00	600/SPK.1442.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2239/SULIHARA/12/2025	9.503.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		639	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Taman Banten Lestari Blok C Rt. 001 Rw. 016, Kel. Ujnyur, Kec. Serang, Kota Serang	188.160.000,00	600/SPK.1822.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2228/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		640	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Ds. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.610.000,00	600/SPK.1977.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2624/SULIHARA/12/2025	9.385.000,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		641	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sumur Picung Rw. 005, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.170.000,00	600/SPK.2036.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2226/SULIHARA/12/2025	9.479.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		642	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Muncang Hilir Rt. 002 Rw. 003, Ds. Cibarengkok, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.590.000,00	600/SPK.1443.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2099/SULIHARA/12/2025	9.486.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		643	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Rancaet Rt. 017 Rw. 003, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.410.000,00	600/SPK.1464.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2413/SULIHARA/12/2025	9.458.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		644	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Balegede Rw. 003, Ds. Gunungsari, Kec. Mandelawangi, Kab. Pandeglang	189.170.000,00	600/SPK.2026.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2763/SULIHARA/12/2025	9.408.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		645	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jln. Raya Telaga Sari – Bulakan Kp. Talagasan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Talagasari, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.270.000,00	600/SPK.1470.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2480/SULIHARA/12/2025	9.463.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		646	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 006, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	187.310.000,00	600/SPK.1920.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2773/SULIHARA/12/2025	9.458.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		647	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Lmk. Kuranji Kavling Banyu Bagus Rt. 001 Rw. 002, Kel. Kuranji, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.440.000,00	600/SPK.1836.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2337/SULIHARA/12/2025	9.470.500,00	180 Hari	12 Desember 2025	10 Juni 2026	5	
		648	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cirawang Rt. 009 Rw. 005, Ds. Gunung Kencana, Kec. Gunung Kencana, Kab. Lebak	189.540.000,00	600/SPK.1446.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2374/SULIHARA/12/2025	9.365.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	

		649	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Graha Gardenia Rw. 011, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.830.000,00	600/SPK.2047.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2433/SULIHARA/12/2025	9.472.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		650	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Perumahan Gcp Cibogo, Ds. Cibogo, Kec. Cisaik, Kab. Tangerang	187.740.000,00	600/SPK.1948.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2222/SULIHARA/12/2025	9.477.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		651	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Perum Puri Anggrek Rt. 013 Rw. 004, Kel. Kelodran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.350.000,00	600/SPK.1849.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2849/SULIHARA/12/2025	9.391.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		652	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sepang Waru Rt. 001 Rw. 007, Kel. Sepang, Kec. Taklakan, Kota Serang	189.580.000,00	600/SPK.1819.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2429/SULIHARA/2025	9.479.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		653	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Pos Layanan Desa Sejahtera] Ds. Ragasmasigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	298.480.000,00	600/SPK.2065.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2169/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		654	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cileget Rw. 002, Ds. Nyompok, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.2015.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2435/SULIHARA/2025	9.469.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		655	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.620.000,00	600/SPK.1555.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2297/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		656	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Lingk. Lebak Sili Rt. 002 - Rt. 003 Rw. 008, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	188.360.000,00	600/SPK.1587.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2513/SULIHARA/12/2025	14.924.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		657	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 010, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.1422.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2266/SULIHARA/12/2025	9.389.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		658	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cadas Rw. 001 - 002, Ds. Karet, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.460.000,00	600/SPK.1483.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2216/SULIHARA/12/2025	9.381.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		659	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Babakan Girang Rw. 003, Ds. Nayagati, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.760.000,00	600/SPK.1815.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2719/SULIHARA/12/2025	9.418.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		660	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 004, Ds. Wirana, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1781.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2736/SULIHARA/12/2025	9.488.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		661	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Jembatan Kayu, Ds. Sumberwaras, Kec. Malingping, Kab. Lebak	190.290.000,00	600/SPK.1616.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2287/SULIHARA/12/2025	9.423.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		662	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 004, Ds. Kemuning, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.570.000,00	600/SPK.1359.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2641/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		663	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kubang Cowe Rt. 004 Rw. 002, Kel. Sepang, Kec. Taklakan, Kota Serang	189.150.000,00	600/SPK.1850.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2656/SULIHARA/12/2025	9.514.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		664	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rt. 001 - 002 Rw. 003, Ds. Jatmulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1659.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2246/SULIHARA/12/2025	9.478.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		665	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Citundun Lor Rt. 008 Rw. 002, Ds. Banjarsari, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.240.000,00	600/SPK.2034.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	TCK45/12/25	9.405.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		666	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Jl. Sukahati Iv Rt. 02 Rw. 014, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.100.000,00	600/SPK.1598.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2348/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		667	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 001, Ds. Cainingin, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1966.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2581/SULIHARA/12/2025	9.453.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		668	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001-003, Ds. Pansogogan, Kec. Cikeusil, Kab. Serang	189.060.000,00	600/SPK.1787.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2427/SULIHARA/12/2025	9.457.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		669	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Warudoyong Rw. 007, Ds. Glimukti, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.1845.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2487/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		670	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cibunar Rw. 002, Ds. Ciligrang, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	190.030.000,00	600/SPK.1841.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2782/SULIHARA/12/2025	9.462.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		671	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Lebak Manggu Rt. 005 Rw. 003, Ds. Padasuka, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.080.000,00	600/SPK.1460.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2550/SULIHARA/12.2025	9.472.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		672	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Po Blok D99 D100 D103 Rw. 005, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon	189.810.000,00	600/SPK.1542.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2652/SULIHARA/12/2025	9.501.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	

		673	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baluk Rt. 007 Rw. 001, Ds. Nambo Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.640.000,00	600/SPK.1533.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2328/SULIHARA/12/2025	9.504.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		674	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Jae, Ds. Pancanegara, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.660.000,00	600/SPK.1706.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2683/SULIHARA/12/2025	9.490.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		675	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 002, Ds. Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	190.400.000,00	600/SPK.1511.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2756/SULIHARA/12/2025	9.482.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		676	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciburuluk Rt. 005 Rw. 003, Ds. Cigorondong, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang	190.360.000,00	600/SPK.1624.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2461/SULIHARA/12/2025	9.520.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		677	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 007, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang	187.860.000,00	600/SPK.1558.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2594/SULIHARA/12/2025	9.518.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		678	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cileles, Ds. Labuan, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.350.000,00	600/SPK.1824.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2399/SULIHARA/12/2025	9.483.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		679	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Torjong Rt. 003 Rw. 001, Ds. Kemuning, Kec. Kresek, Kab. Tangerang	188.670.000,00	600/SPK.1802.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2667/SULIHARA/12/2025	9.393.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		680	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Lengkong Rt. 004 Rw. 001, Ds. Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.940.000,00	600/SPK.1636.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2638/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		681	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jaha Pojok Rt. 004 Rw. 002, Ds. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1806.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2333/SULIHARA/12/2025	9.474.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		682	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebon Kopi Rw. 009, Ds. Pangkalan, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.380.000,00	600/SPK.1390.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2570/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		683	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalapasan Rt. 006 Rw. 003, Ds. Pasirputeuy, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.790.000,00	600/SPK.1637.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2230/SULIHARA/12/2025	9.379.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		684	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Gang H.Ojak Kp. Kawung Timur Rt. 004 Rw. 011, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	190.360.000,00	600/SPK.1629.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2583/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		685	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Secang Rw. 010, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	188.540.000,00	600/SPK.1810.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2678/SULIHARA/12/2025	9.427.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		686	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Cendana Raya Rt. 001 Rw. 005, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.580.000,00	600/SPK.1507.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2670/SULIHARA/12/2025	9.380.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		687	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004 - 006, Ds. Cimas, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1783.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2596/SULIHARA/12/2025	9.497.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		688	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Blok 008-020 Rt. 001 Rw. 008, Ds. Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.1889.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2504/SULIHARA/12/2025	9.433.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		689	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Cengklong Rt. 024 Rw. 012, Ds. Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	187.600.000,00	600/SPK.1710.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2509/SULIHARA/12/2025	9.419.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		690	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Melayu Barat Rt. 003 Rw. 007, Ds. Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1397.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2710/SULIHARA/12/2025	9.518.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		691	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 020 Rw. 005, Ds. Rawa Boni, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.1383.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2595/SULIHARA/12/2025	9.489.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		692	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Kel. Sindangsari, Kec. Pasarkemis, Kab. Tangerang	187.560.000,00	600/SPK.1712.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2507/SULIHARA/12/2025	9.413.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		693	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 010, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	187.710.000,00	600/SPK.1935.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2601/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		694	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Waru li Rt. 002-007 Rw. 004, Ds. Sukaharja, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1715.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2672/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	

		695	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rt. 006 Rw. 002, Ds. Sujung, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1682.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2499/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		696	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kupahandap Rw. 001, Ds. Sukadana, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.840.000,00	600/SPK.1818.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2675/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		697	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Babulak Empetan Rt. 002 Rw. 018, Ds. Kramat, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	187.580.000,00	600/SPK.1401.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2655/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		698	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Komplek Pondok Bahar Rw. 004, Kel. Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.1567.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2491/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		699	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Pematang Buntu Rw. 004, Ds. Cikeusik, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	189.530.000,00	600/SPK.1540.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2747/SULIHARA/12/2025	9.401.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		700	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cilancar 2 Rw. 002, Ds. Nanggala, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	189.700.000,00	600/SPK.1539.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2618/SULIHARA/12/2025	9.379.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		701	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cikalang Rt. 001 Rw. 003, Ds. Cikalang, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.390.000,00	600/SPK.1466.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2332/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		702	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Ganjur, Ds. Sodong, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.220.000,00	600/SPK.2027.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2327/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		703	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Komplek Bumi Cipacung Indah Rw. 005, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.230.000,00	600/SPK.2028.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2774/SULIHARA/12/2025	9.469.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		704	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Pos Layanan Desa Sejahtera] Ds. Jagabaya, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	298.510.000,00	600/SPK.2062.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2777/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		705	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Kayu Apuh Rt. 008 Rw. 005, Ds. Klebet, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.1592.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2776/SULIHARA/12/2025	9.461.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		706	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Link. Unyur Rt. 001 Rw. 001, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	188.460.000,00	600/SPK.1874.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2814/SULIHARA/12/2025	14.925.500,00	180 Hari	23 december 2025	21 Juni 2026	5	
		707	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kamp Pabuaran Gg. Angrek 3 Rt. 003 Rw. 006, Kel. Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	187.300.000,00	600/SPK.1617.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2845/SULIHARA/12/2025	9.423.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		708	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Gang Flamboyan, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	188.370.000,00	600/SPK.1523.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2628/SULIHARA/12/2025	9.387.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		709	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Meraang Rt. 012 Rw. 004, Ds. Kendayakan, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.530.000,00	600/SPK.1899.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2615/SULIHARA/12/2025	9.365.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		710	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Domas Blok Panggang Rw. 002, Ds. Domas, Kec. Pontang, Kab. Serang	189.840.000,00	600/SPK.1505.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2865/SULIHARA/12/2025	9.418.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		711	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Legok Sukamaju Rt. 001 Rw. 001, Ds. Legok Sukamaju, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	187.440.000,00	600/SPK.1595.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2841/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		712	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Perum Bumi Nagara Lestari Rw. 005, Ds. Nagara, Kec. Kibin, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1506.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2829/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		713	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sasak Rt. 008 Rw. 003, Ds. Gembor, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.1887.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2714/SULIHARA/12/2025	9.372.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		714	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 004, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1917.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2843/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		715	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Tegal Wangi Rw. 006, Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol, Kota Cilegon	189.400.000,00	600/SPK.1642.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2861/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		716	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kronjo Rt. 003 Rw. 002, Ds. Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.650.000,00	600/SPK.1585.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2749/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	

		717	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Cluster Maribaya Villa Dago, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.720.000,00	600/SPK.1497.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2855/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		718	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Bolang Beji Rw. 003, Ds. Teras Bendung, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1681.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2891/SULIHARA/12/2025	9.432.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		719	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Goong Permai Rt. 010 Rw. 004, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1492.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2930/SULIHARA/12/2025	9.386.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		720	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Salek 5 Rw. 004 Tengah Danau, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.080.000,00	600/SPK.1498.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2839/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		721	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pamong Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pamong, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1294.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0526/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		722	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jalupang Rt. 016 Rw. 004, Ds. Padasuka, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0491.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0499/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		723	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cayur Rt. 022 Rw. 005, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1289.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0518/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		724	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Malanggah, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0627.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0625/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		725	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Mentrung Rt. 005 Rw. 001, Ds. Sukasari, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0024.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0533/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		726	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Pancaregang, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0640.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0623/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		727	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001 - Rw. 003, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0335.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0592/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		728	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Siturate, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0620.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0608/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 August 2025	17 Februari 2026	5	
		729	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panjapan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Karyajaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1273.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0509/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		730	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Mekar Agung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0990.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0682/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		731	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rajeg Asri Rt. 002 Dan Rt. 008 Rw. 001, Ds. Rajeg, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.1167.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0681/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		732	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Hanja Rw. 003, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0516.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0721/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		733	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukajaya Rt. 001 Rw. 003, Ds. Bayah Timur, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0590.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0568/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		734	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cileungsir Rw. 001, Ds. Banjarsari, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1115.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0575/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		735	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panungtung Rw. 001, Ds. Banjarsari, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1116.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0573/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		736	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Cijeruk, Kec. Kibin, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0643.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0609/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		737	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pedomas Rt. 008 Rw. 003, Ds. Tejamari, Kec. Baros, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1072.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0563/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		738	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 011, Kel. Sindangsari, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0723.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0672/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	

		739	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 009, Ds. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.1169.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0677/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		740	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sudimara Rw. 002, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0467.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0691/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		741	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Gununggede Kec. Panggarangan Kab. Lebak (KONSOL 13)	189.310.000,00	600/SPK.0580.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0502/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		742	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Bumi Sari, Kel. Kasemen, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0649.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0693/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		743	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Kp. Parigi Rw. 004, Ds. Padarincang, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1078.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0866/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		744	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cempaka Kec. Cirinten Kab. Lebak (KONSOL 3)	189.310.000,00	600/SPK.0702.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0813/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		745	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Ds. Sukasari, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0636.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0624/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		746	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Mekarjaya Rt. 002 Rw. 0013, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0424.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0708/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 September 2025	02 Maret 2026	5	
		747	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 016, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0892.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0852/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		748	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bugel Rt. 003 Rw. 002, Kel. Kaduagung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0541.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0555/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 September 2025	01 Maret 2026	5	
		749	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Curug Wetan Kec. Curug Kab. Tangerang (KONSOL 30)	189.310.000,00	600/SPK.0290.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0703/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		750	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0630.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0730/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		751	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 005 Rw. 014, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1005.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0740/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		752	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Taman Mutiara Indah 1 Rt. 005 Rw. 018, Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1190.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0656/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		753	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tegal Rt. 001 Rw. 004, Ds. Tegal, Kec. Cikedel, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1246.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0755/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 September 2025	02 Maret 2026	5	
		754	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Simpang Rt. 001 Rw. 003, Ds. Banyuwasih, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1247.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0756/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 September 2025	02 Maret 2026	5	
		755	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Pabuaran Tumpeng Kec. Karawaci Kota Tangerang (KONSOL 77)	189.310.000,00	600/SPK.0676.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0587/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		756	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Banten Indah Permai Rt.002. Rw. 019, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0468.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0745/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		757	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Huni Masjid Rt. 002 Rw. 015, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1254.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0757/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 September 2025	02 Maret 2026	5	
		758	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cipadang, Kec. Cileles, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0263.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0771/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		759	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipurat Pasir Rt. 004 Rw. 001, Ds. Asem Margaluyu, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1117.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0574/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		760	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Kaduagung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0302.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0788/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		761	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciakar Rt. 001 Rw. 006, Ds. Sukamanah, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1253.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0849/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		762	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Sawan Rw. 003, Ds. Cemplang, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0514.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0964/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	

		763	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Palasari Kec. Legok Kab. Tangerang (KONSOL 40)	189.310.000,00	600/SPK.0293.UPPSU/SLDPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0750/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		764	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Kandang Rt. 002 Rw. 011, Ds. Cikolelet, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1193.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0760/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		765	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipandu Rt. 009 Rw.0005, Ds. Cimaung, Kec. Cikeusai, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1201.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0842/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		766	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curugpong Permai Rw. 004, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0537.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0828/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		767	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Onjong Rt. 036 Rw. 005, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0156.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0897/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		768	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Salahaur Rw. 010, Ds. Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0972.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0779/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		769	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tegal Rt. 010 Rw. 004, Ds. Selaraja, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0262.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0940/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		770	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Vila Inti Persada Rw. 019, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0347.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0810/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	01 September 2025	28 Februari 2026	5	
		771	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Vila Dago Cluster Maribaya, Rw. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0340.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0812/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	01 September 2025	28 Februari 2026	5	
		772	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 003, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0949.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0809/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		773	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Maja Barat Rt. 002 Rw. 003, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1224.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0881/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		774	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 014, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0948.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0885/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		775	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tancang Rt. 009 Rw. 005, Ds. Sukarame, Kec. Cikeusai, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0016.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0907/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		776	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Lingkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0097.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0638/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		777	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sanepa Rw. 005, Ds. Sukabares, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0512.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1206/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 September 2025	07 Maret 2026	5	
		778	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Rt. 009 Rw. 003, Ds. Bojong Renged, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0770.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0806/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		779	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panancangan Rw. 002, Ds. Cimenteng Jaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0961.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0684/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		780	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Citarate Rt. 001 Rw. 005, Ds. Gunungbatu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0255.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0975/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		781	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Tanjakan Panjang Kp. Datar Lame, Ds. Pasirburgur, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0256.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0976/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		782	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciman Rt. 001 Rw. 010, Ds. Situregen, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0257.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0977/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		783	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cembah Rt. 001 Rw. 001, Ds. Ciruas, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0897.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1132/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		784	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Cipeucang, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0598.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1014/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	

		785	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Bumi Caringin, Ds. Caringin, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1059.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1067/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		786	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikomara Rt. 003 Rw. 002, Ds. Banjar Ingasi, Kec. Lebakgedong, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1259.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0717/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		787	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Bulakan Kec. Gunungkencana Kab. Lebak (KONSOL 11)	189.310.000,00	600/SPK.0734.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0799/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		788	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Ciakar Kec. Gunungkencana Kab. Lebak (KONSOL 67)	189.310.000,00	600/SPK.0737.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0800/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		789	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Badak Permai Rt. 001-003 Rw. 009, Ds. Sukamanah, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1020.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1033/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		790	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cirinten Kec. Cirinten Kab. Lebak (KONSOL 5)	189.310.000,00	600/SPK.0718.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0801/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		791	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kubang Rt. 002 Rw. 002, Ds. Kramatjaya, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0733.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0941/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		792	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Pipitan Rw. 002, Kel. Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0457.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1021/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		793	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kaduronyok Rt. 005 Rw. 003, Ds. Kaduronyok, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1000.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1055/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 September 2025	02 Maret 2026	5	
		794	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Bpi Rw. 006, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1203.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0987/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		795	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sanghiang Rt. 016 Rw. 005, Ds. Sukarama, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0370.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1028/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		796	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Lingkungan Rw. 004, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0353.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0936/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	01 September 2025	28 Februari 2026	5	
		797	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sinar Sari Rw. 005, Ds. Cibingbin, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0782.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1052/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		798	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciparasi Rw. 008, Ds. Cipicung, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1094.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1094/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		799	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tanjung Sari Rt. 003 Rw. 005, Ds. Teluk, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0407.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1042/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		800	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pangampoan Rt. 001 Rw. 004, Kel. Babakan Kalanganyar, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1218.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1067/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		801	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukasari Rt. 013 Rw. 003, Ds. Panunggulan, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0023.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1087/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		802	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Baru Pabuaran Rt. 011 Rw. 002, Ds. Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0777.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0937/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		803	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Sempu Cipayang Jl. Ki Ajuum Sempu Gedang Rt. 002 Rw. 018, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1133.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0914/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		804	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baros Mesjid Rt. 014 Rw. 003, Ds. Baros, Kec. Baros, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0006.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1088/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		805	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Kramatlaban, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1098.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1070/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		806	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kaum Luwak Rt. 003 Rw. 002, Ds. Candi, Kec. Cunugbitung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1261.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1104/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	

		807	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cihuni Rw. 002, Ds. Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0832.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1103/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		808	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukajadi Rt. 013 Rw. 004, Ds. Rahong, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0829.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1102/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		809	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pamong Rt. 002 Rw. 003, Ds. Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.1332.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1110/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		810	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mok) Kp. Cipayanggu Rt. 012 Rw. 004, Ds. Harjawana, Kec. Bojongmanik, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1125.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1125/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		811	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Rego Baros, Ds. Padasuka, Kec. Petir, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0012.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1090/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		812	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Rt. 007 Rw. 002, Ds. Pancaregang, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0028.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1086/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		813	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipogor Rt. 002 Rw. 003, Ds. Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0409.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0926/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		814	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kamaruton Rt. 006 Rw. 003, Ds. Kamaruton, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1279.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1253/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		815	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Darussalam Rt. 002 Rw. 004, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0418.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1160/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		816	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Keramat Masjid Rt. 003 Rw. 004, Ds. Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0369.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0925/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		817	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Susukan Rt. 003 Rw. 001, Ds. Susukan, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1323.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1142/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		818	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigentur Rt. 009 Rw. 004, Ds. Kaduengang, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1230.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1241/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		819	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikukuk Landeuh Rt. 006 Rw. 002, Ds. Pasanggrahan, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1122.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1181/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		820	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikuning Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sukamaju, Kec. Sobang, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0834.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0909/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		821	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tangsi Kidul Rt. 016 Rw. 004, Ds. Labuan, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0849.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1274/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		822	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jambu Rt. 002 Rw. 001, Ds. Bulakan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0859.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1149/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		823	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pematang Warung, Ds. Kamasan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1113.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1154/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		824	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tampakaso Rt. 013 Rw. 004, Ds. Angsana, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0850.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1273/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		825	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Kendi Rt. 012 Rw. 004, Ds. Cilabanbulan, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0945.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1352/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		826	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 001 Rw. 001, Ds. Kurungkambang, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1021.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1192/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		827	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Menggong Rt. 001 Rw. 004, Ds. Sampangbitung, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1250.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1220/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		828	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ganjur Tari Kolot Lebak Rt. 010 Rw. 004, Ds. Ciandur, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1110.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1190/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		829	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pegandikan Iir Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pegandikan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1277.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1251/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		830	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pegandikan Rt. 007 Rw. 002, Ds. Pegandikan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1307.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1249/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	

		831	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pinang Rw. 003, Ds. Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0788.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1351/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		832	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Koroncong Rw. 001, Ds. Koroncong, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0795.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1311/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		833	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Purut, Ds. Kertasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0952.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1218/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		834	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kertasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0953.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1216/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		835	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jengkol Rw. 006, Ds. Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0789.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1331/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		836	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Sawer Rw. 009, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0963.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1279/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		837	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Cukang Rt. 001 Rw. 001, Ds. Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0410.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1277/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		838	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Rancajaya Rw. 002, Ds. Karyasari, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0786.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1350/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		839	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Sumbul, Kel. Pagadungan, Kec. Karanglanjung, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1211.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1167/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		840	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Saung Jangkung Rt. 001 Rw. 013, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0429.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1343/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		841	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilanggawe Rt. 009 Rw. 007, Ds. Karyautama, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1245.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1219/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		842	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Tegal Padang Rw. 014, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1091.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1293/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		843	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Sempu Banten Girang Rw. 017, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0451.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1386/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 october 2025	06 April 2026	5	
		844	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Kedung Dalam Kec. Mauk Kab. Tangerang (KONSOL 43)	189.310.000,00	600/SPK.0748.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1240/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	07 october 2025	05 April 2026	5	
		845	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lor Rw. 004, Ds. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0749.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1237/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		846	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Kadumalam Rt. 014 Rw. 004, Ds. Badur, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0696.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1312/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		847	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Palasari Kec. Legok Kab. Tangerang (KONSOL 91)	189.310.000,00	600/SPK.0546.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1214/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		848	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang (KONSOL 64)	189.310.000,00	600/SPK.0751.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1428/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 october 2025	07 April 2026	5	
		849	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilurah Rt. 002 Rw. 006, Ds. Sukanagara, Kec. Cantis, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0373.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0969/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		850	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kopibera, Ds. Cinangka, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1019.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1388/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		851	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadongdong 001 Rw. 004, Ds. Cipinang, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1248.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1245/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		852	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebon Kopi, Ds. Curugbadak, Kec. Maja, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0241.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1377/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		853	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0198.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1124/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	

		854	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Griya Asri Blok B Rt. 001 Rw. 011, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0039.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1320/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		855	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Graha Aman Mandiri Blok C1 Rt. 005 Rw. 005, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1252.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1244/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		856	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Cipancur Rt.001 Rw. 001, Ds. Sogong, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0840.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1295/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		857	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cijulang Rt. 001 Rw. 002, Ds. Cempaka, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0701.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1417/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		858	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bama Pasir Tengah Rt. 001 Rw. 005, Ds. Bama, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0421.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1278/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		859	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kandang Kurung Rt. 002 Rw. 006, Kel. Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1023.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1414/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		860	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Boru Masjid Rw. 007, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1027.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1416/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		861	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ragas Grenyang Rt. 015 Rw. 008, Ds. Argawana, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0876.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1268/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		862	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lebak Gaga Rt. 003 Rw. 002, Ds. Lebak Wangi, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0067.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1443/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		863	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ketiban Rt. 009 Rw. 004, Ds. Kaserangan, Kec. Pontang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0065.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1452/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 october 2025	06 April 2026	5	
		864	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Padma Raya Rt. 004 Rw. 003, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1002.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1378/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		865	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Balida Rw. 009, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0997.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1236/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		866	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibadak Rt. 015 Rw. 006, Kel. Bojong, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0603.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1578/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		867	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pentas Rt. 001 Rw. 005, Ds. Karyasari, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0389.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1404/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		868	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisaat Rt. 013 Rw. 006, Ds. Bolang, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0585.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1447/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		869	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gosara Rt. 003 Rw. 002, Ds. Gosara, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0061.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1477/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		870	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Perumahan Permata Balaraja Rw. 001.Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.1051.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1336/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		871	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. H. Rawit Rw. 008, Kel. Paninggilan Utara, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0473.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1567/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		872	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Serdang Rt. 017 Rw. 002, Kel. Cipete, Kec. Curug, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1350.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1175/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		873	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Curug Sawer Rw. 009, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0962.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1593/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		874	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Rancayomas Rt. 002 Rw. 005, Kel. Curug, Kec. Curug, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1197.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1516/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		875	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sambilawang, Kec. Waringinkurung, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1206.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1545/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		876	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Gang Pancawarna Kavling Saruni Indah, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1151.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1524/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 october 2025	06 April 2026	5	

		877	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibengkung Babakan Rw. 004, Ds. Bojongmenteng, Kec. Lewudamar, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0798.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1577/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		878	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 005, Kel. Sudimara Selatan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0477.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1655/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		879	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Jagarhayu - Kp. Kadu Kasintu, Ds. Kaungcaang, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0958.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1534/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		880	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Talaya Banten Girang Rt. 002 Rw. 024, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0186.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1483/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		881	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kedung Kuali Rt. 009 Rw. 003, Ds. Bendung, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0087.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1499/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		882	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Ranggem Rt. 014 Rw. 006, Ds. Kadubale, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1212.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1579/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 october 2025	06 April 2026	5	
		883	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cutug Tutul Rt. 002, Ds. Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1060.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1610/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		884	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Buah Gede Rt. 022 Rw. 005, Ds. Sentul, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0050.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1519/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		885	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ruas Jalan Kp. Cibeunying Rt. 001 Rw. 003 (Jalan Akses Perumahan), Kel. Cilaja, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1152.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1631/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		886	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Langgana Rt. 15 Rw. 04 Ds. Curugpanjang, Kec. Cikulur, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1050.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1580/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	07 october 2025	05 April 2026	5	
		887	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Pinang Rw. 03, Ds. Bunar, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0756.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1460/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		888	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 002, Ds. Babakan Asem, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0826.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1520/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 october 2025	06 April 2026	5	
		889	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Naga 1 Rt. 008 Rw. 001 - Kp. Naga 2 Rt. 009 Rw. 002, Ds. Citorek Tengah, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.1011.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1638/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 Novemeber 2025	#VALUE!	5	
		890	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pematang Binglu Rt. 018 Rw. 001, Ds. Babakankeusik, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0433.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1854/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	02 october 2025	31 Maret 2026	5	
		891	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jatiwaringin Rw. 002, Ds. Jatiwaringin, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0747.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1398/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	07 october 2025	05 April 2026	5	
		892	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Ragas Tegat Rw. 002, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1283.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1624/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		893	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link Katulisan Rw. 007, Kel. Kasemen, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.0651.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1585/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		894	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Puri Anggrek Rt. 006 Rw. 008, Kel. Tenith, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1085.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1582/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		895	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Rw. 003 Cluster Mutiara Korelet 3, Ds. Ranca Kalapa, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0878.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1621/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		896	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimanis Rt. 004 Rw. 001, Ds. Cimanis, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0442.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1738/SILIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		897	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Malingping Rt. 012,013 Rt. 006 Ds. Pasirmae, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1185.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1651/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		898	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Banten Indah Permai Rw. 019, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1089.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1581/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	

		899	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Herang Rt. 016 Rw. 002, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1304.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1628/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		900	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pule Rw. 004, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.310.000,00	600/SPK.1026.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1082/SULIHARA/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		901	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciwuni Rt. 004 Rw. 001, Ds. Beberan, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0056.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1592/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	22 october 2025	20 April 2026	5	
		902	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Cibawang Rt. 001 Rw. 006, Ds. Kubang Baros, Kec. Cinaanika, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1043.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1665/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		903	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Sembung Rt. 015 Rw. 005, Ds. Gembor, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1297.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1704/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		904	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Kp. Pasir Binglu Rw. 001, Ds. Cirinten, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0710.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1803/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		905	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kahwa Rt. 002 Rw. 006, Ds. Banjarsari, Kec. Anyer, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1139.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1429/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		906	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0191.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1733/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		907	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 006, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0200.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1732/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		908	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 008, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0202.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1735/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		909	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bubuy, Ds. Cibarengkok, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0258.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1646/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		910	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Jl. Raya Gunungkenana-Cirinten Km. 09, Ds. Parakanlima, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0688.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1605/SULIHARA/10/2025	9.465.500,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		911	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Astana Bojong Rt. 020 Rw. 001, Ds. Walikukun, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0075.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1750/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		912	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Padali Rt. 006 Rw. 003, Ds. Padasuka, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0396.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1696/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		913	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukapuraw. 001, Ds. Malangnengah, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1132.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1846/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		914	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0197.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1741/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 November 2025	03 Mei 2026	5	
		915	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Rt. 003 - 006 Rw. 003, Ds. Pematang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.1102.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1764/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		916	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bagbag Rt. 002 Rw. 001, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0072.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1752/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		917	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pamanuk Rt. 008 Rw. 004, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0074.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1751/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		918	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciwajik Rt. 003 Rw. 002, Ds. Kibin, Kec. Kibin, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0071.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1687/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		919	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Punt Rt. 003 Rw. 006, Ds. Kadubeureum, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0985.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1727/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		920	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0320.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1877/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	29 october 2025	27 April 2026	5	
		921	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Banyuwangi Kec. Pulo Ampel Kab. Serang (KONSOL 27)	189.310.000,00	600/SPK.0852.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1892/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 october 2025	07 April 2026	5	
		922	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0192.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1734/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	

		923	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pakishaji Rt. 003 Rw. 003, Ds. Pringwulung, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1159.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1689/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	05 November 2025	04 Mei 2026	5	
		924	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang (KONSOL 62)	189.310.000,00	600/SPK.0318.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1769/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	06 october 2025	04 April 2026	5	
		925	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pabuaran Rt. 002 Rw. 001, Ds. Pagintungan, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.0034.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1828/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		926	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Taman Walet Rw. 010, Kel. Sindangsari, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0766.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1783/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 october 2025	01 April 2026	5	
		927	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Menuju Pemakaman Seri Mulya Jl. Kp. Jeleiteng No. 41, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	189.310.000,00	600/SPK.0146.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1801/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		928	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 015, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0478.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1883/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		929	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Waas Rt. 005 Rw. 003, Ds. Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0956.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1657/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		930	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0957.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1658/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		931	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Gadung Rt. 001 Rw. 004, Ds. Pasirgadung, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.0432.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1874/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		932	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 004, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0215.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1813/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		933	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mok) Kp. Sikapudang Rt. 024 Rw. 005, Ds. Sindang Mandi, Kec. Baros, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1001.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1887/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		934	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 011 Rw. 006, Ds. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0827.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1794/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		935	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 005 Rw. 016, Kel. Periu, Kec. Periu, Kota Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0495.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1867/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	03 November 2025	02 Mei 2026	5	
		936	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gili Rt. 010 Rw. 018, Ds. Kampung Besar, Kec. Teluknaga, Kab. Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0117.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1902/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 November 2025	25 Mei 2026	5	
		937	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 003 Rw. 012, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0137.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1903/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 November 2025	25 Mei 2026	5	
		938	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 003 Rw. 002, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0138.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1904/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 November 2025	25 Mei 2026	5	
		939	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pondok Bahagia Rt. 001 Rw. 004, Ds. Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0122.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1927/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	26 November 2025	25 Mei 2026	5	
		940	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasirgombong Rw. 001 - 002, Ds. Pasirgombong, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.310.000,00	600/SPK.0831.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1961/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	27 November 2025	26 Mei 2026	5	
		941	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Onom Rt. 003 Rw. 003, Ds. Badak Anom, Kec. Sindangjaya, Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0814.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1891/SULIHARA/11/2025	9.465.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		942	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Suka Tani Rt. 004 Rw. 005, Ds. Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Kab. Tangerang	189.310.000,00	600/SPK.0123.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2441/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	08 december 2025	06 Juni 2026	5	
		943	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Sukajadi, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.630.000,00	600/SPK.2059.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1922/SULIHARA/12/2025	9.481.500,00	180 Hari	02 december 2025		5	
		944	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Cugung Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.1653.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1948/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		945	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Tambakbaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.1914.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1947/SULIHARA/12/2025	9.468.500,00	180 Hari	28 November 2025		5	

		946	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalapa Tiliu Rt. 004. Rw. 07, Ds. Citeras, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.230.000,00	600/SPK.1376.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2005/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		947	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Henca Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pabuaran, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.160.000,00	600/SPK.1375.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2007/SULIHARA/12/2025	9.458.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		948	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cidadap Rt. 005 Rw.001, Ds. Cidadap, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak	189.300.000,00	600/SPK.1377.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2008/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		949	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Bungur Rt. 004 Rw. 004, Ds. Cimarga, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.300.000,00	600/SPK.1922.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2006/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		950	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 012, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.690.000,00	600/SPK.1577.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2060/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		951	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciruten Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.400.000,00	600/SPK.1723.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2047/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		952	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Puri Serang Hijau Rw. 013, Kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.210.000,00	600/SPK.1831.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2296/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		953	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Cimadang Rw. 001, Ds. Cempaka, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.360.000,00	600/SPK.1728.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2144/SULIHARA/12/2025	9.468.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		954	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.020.000,00	600/SPK.1695.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2065/SULIHARA/12/2025	9.401.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		955	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Sukacai, Kec. Baros, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1367.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2074/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		956	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Sukamenak, Kec. Baros, Kab. Serang	189.760.000,00	600/SPK.1785.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2116/SULIHARA/12/2025	9.488.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		957	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cinangerang, Rt. 016 Rw. 004, Ds. Pasir Limus, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.550.000,00	600/SPK.1861.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2278/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		958	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Mancak Rw. 002, Ds. Labuan, Kec. Mancak, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1755.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2204/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		959	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Tangsi Rw. 001, Ds. Labuan, Kec. Mancak, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1756.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2203/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		960	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Kemuning Rw. 005, Ds. Jeungjing, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang	188.440.000,00	600/SPK.1527.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2106/SULIHARA/12/2025	9.422.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		961	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciraab, Ds. Cikolelet, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1826.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2255/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	03 december 2025		5	
		962	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikamunding Rw. 005, Ds. Cikamunding, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.420.000,00	600/SPK.1843.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2240/SULIHARA/12/2025	9.471.000,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		963	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipariuk Rw. 001, Ds. Bintangresmi, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.510.000,00	600/SPK.1833.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1955/SULIHARA/12/2025	9.475.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		964	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasirwaru Rw. 002, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.910.000,00	600/SPK.1990.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2086/SULIHARA/12/2025	9.495.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		965	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Raya Palka Rw. 001, Kedung Kemang, Sukaraja, Ds. Curug Goong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.200.000,00	600/SPK.1916.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2293/SULIHARA/12/2025	9.460.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		966	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pabuaran Asem Rt. 001 Rw. 002, Ds. Pete, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	187.590.000,00	600/SPK.1528.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2101/SULIHARA/12/2025	9.379.500,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		967	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kabayan Ciburut Rw. 004, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.530.000,00	600/SPK.2020.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2084/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		968	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Pamulang 2 Rw. 012, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.730.000,00	600/SPK.1519.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2274/SULIHARA/12/2025	9.436.500,00	180 Hari	09 december 2025		5	

		969	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cireuma Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pajagan, Kec. Sajira, Kab. Lebak	189.860.000,00	600/SPK.1643.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2110/SULIHARA/12/2025	9.493.000,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		970	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Rumbut, Ds. Kadu Agung Barat, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.730.000,00	600/SPK.1747.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2108/SULIHARA/12/2025	9.486.500,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		971	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Kaju Rw. 006, Kel. Babakan Kalanganyar, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.680.000,00	600/SPK.2023.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2087/SULIHARA/12/2025	9.484.000,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		972	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Sumbul Rt. 002 - Rt. 004 Rw. 005, Kel. Pagadungan, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	189.860.000,00	600/SPK.2011.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2090/SULIHARA/12/2025	9.493.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		973	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Koper, Kec. Cikande, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1731.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2136/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	05 december 2025		5	
		974	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Carenang Udik, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.1735.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2138/SULIHARA/12/2025	9.494.500,00	180 Hari	03 december 2025		5	
		975	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lembur Sawah Rt. 022-023 Rw. 004, Ds. Seuat, Kec. Petir, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1902.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2244/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		976	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jambangan, Ds. Pamengkang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.540.000,00	600/SPK.1700.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2469/SULIHARA/12/2025	9.477.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		977	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Pandan Rw. 004 Kp. Kebon Kopi, Kel. Pondok Belung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.860.000,00	600/SPK.1486.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2352/SULIHARA/12/2025	9.393.000,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		978	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Gang Nisan Rw. 002, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.1485.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2353/SULIHARA/12/2025	9.395.500,00	180 Hari	09 december 2025		5	
		979	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005 Kencana Loka Sektor 12.5 Blok 1, Kel. Cialer, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.330.000,00	600/SPK.1936.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2238/SULIHARA/12/2025	9.416.500,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		980	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Lebak Rt. 002 Rw. 002, Ds. Pasirimus, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.460.000,00	600/SPK.1571.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2291/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		981	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Pamarayan, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1364.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2369/SULIHARA/12/2025	9.467.000,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		982	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Wijaya Graha Pesona Rw. 010, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.1421.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2265/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		983	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Taman Adiyasa Rw. 006, Ds. Cikuya, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.1420.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2200/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		984	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Kadu Sirung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.660.000,00	600/SPK.1976.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2100/SULIHARA/12/2025	9.383.000,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		985	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Ds. Pasirgadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.670.000,00	600/SPK.1979.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2633/SULIHARA/12/2025	9.383.500,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		986	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Talagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.620.000,00	600/SPK.1473.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2602/SULIHARA/12/2025	9.381.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		987	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Hamberang Rw. 003, Ds. Luhurjaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.300.000,00	600/SPK.1834.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2032/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		988	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-003, Ds. Nambo Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.760.000,00	600/SPK.1789.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2309/SULIHARA/12/2025	9.488.000,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		989	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jln. Kh. Mansyur Rt. 003 Rw. 005, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.010.000,00	600/SPK.1584.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2097/SULIHARA/12/2025	9.400.500,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		990	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Juhut, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang	189.890.000,00	600/SPK.1829.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2085/SULIHARA/12/2025	9.494.500,00	180 Hari	10 december 2025		5	

		991	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Pancaregang, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.590.000,00	600/SPK.1360.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2390/SULIHARA/12/2025	9.479.500,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		992	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Gandasari Residen, Kel. Gandasari, Kec. Jatuwung, Kota Tangerang	187.350.000,00	600/SPK.1438.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2364/SULIHARA/12/2025	9.367.500,00	180 Hari	18 december 2025		5	
		993	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.490.000,00	600/SPK.1797.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2440/SULIHARA/12/2025	9.474.500,00	180 Hari	17 december 2025		5	
		994	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Ds. Dangdang, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	188.010.000,00	600/SPK.1949.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2190/SULIHARA/12/2025	9.400.500,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		995	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tawakal Rw. 004, Ds. Teluklada, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1987.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2404/SULIHARA/12/2025	9.474.500,00	180 Hari	19 december 2025		5	
		996	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisantri Rt. 003 Rw. 005, Ds. Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.340.000,00	600/SPK.1983.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2398/SULIHARA/12/2025	9.467.000,00	180 Hari	19 december 2025		5	
		997	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Pasirgadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.430.000,00	600/SPK.1474.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2603/SULIHARA/12/2025	9.421.500,00	180 Hari	18 december 2025		5	
		998	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigatel, Rt. 020 Rw. 001, Ds. Bandung, Kec. Bandung, Kab. Serang	188.960.000,00	600/SPK.1854.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2380/SULIHARA/12/2025	9.448.000,00	180 Hari	17 december 2025		5	
		999	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Paku Sajj Rt. 001 Rw. 003, Ds. Pringwulung, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.1600.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2486/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	17 december 2025		5	
		1000	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Buek Rt. 012 Rw. 005, Ds. Cisangu, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.2037.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2037/SULIHARA/12/2025	9.466.500,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1001	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nagrak Rt. 001 Rw. 004, Ds. Warung Banten, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.550.000,00	600/SPK.1444.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2225/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1002	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadutis Rw. 003, Ds. Pasirurih, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.580.000,00	600/SPK.2031.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2088/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	10 december 2025		5	
		1003	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sabrang Rw. 001, Ds. Malangengah, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.560.000,00	600/SPK.1465.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2326/SULIHARA/12/2025	9.478.000,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1004	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sompok Rt. 002 Rw. 004, Ds. Kramatjaya, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1462.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2331/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1005	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Mengger, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.450.000,00	600/SPK.1821.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2430/SULIHARA/12/2025	9.472.500,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1006	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ling. Ciwuni Mesjid Rw. 001, Kel. Pabuaran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.450.000,00	600/SPK.1529.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2379/SULIHARA/12/2025	9.472.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1007	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Seti Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pasir Sedang, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	189.960.000,00	600/SPK.1623.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2394/SULIHARA/12/2025	9.498.000,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1008	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Sentul, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.1378.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2378/SULIHARA/12/2025	9.494.500,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		1009	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Wadas Wetan Rt. 009 Rw. 003, Ds. Sindangsari, Kec. Petir, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1668.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2495/SULIHARA/12/2025	9.467.000,00	180 Hari	15 december 2025		5	
		1010	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 001, Ds. Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.1479.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2484/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	18 december 2025		5	
		1011	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jengkol Rt. 003 Rw. 001, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.410.000,00	600/SPK.1848.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2432/SULIHARA/12/2025	9.470.500,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1012	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Mauk Timur, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	187.770.000,00	600/SPK.1971.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2275/SULIHARA/12/2025	9.388.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1013	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadubeureum Lor Rt. 02 Rw. 07, Ds. Kadubeureum, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.640.000,00	600/SPK.1515.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2690/SULIHARA/12/2025	9.482.000,00	180 Hari	19 december 2025		5	
		1014	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Konar Lebak Rw. 002, Ds. Rancasumur, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.2016.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2261/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	10 december 2025		5	

		1015	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 001 Rw. 003, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.220.000,00	600/SPK.1535.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2396/SULIHARA/12/2025	9.411.000,00	180 Hari	18 december 2025		5	
		1016	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-002, Kel. Mauk Timur, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	188.730.000,00	600/SPK.1883.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2403/SULIHARA/12/2025	9.436.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1017	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Seliong Rt. 002 Rw. 001, Ds. Bojong Renged, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.1389.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2303/SULIHARA/12/2025	9.428.500,00	180 Hari	15 december 2025		5	
		1018	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Mekar Sari Residence 2 Rt. 013 Rw. 001, Ds. Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.440.000,00	600/SPK.1382.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2301/SULIHARA/12/2025	9.422.000,00	180 Hari	11 december 2025		5	
		1019	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 005, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.120.000,00	600/SPK.1403.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2307/SULIHARA/12/2025	9.406.000,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1020	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Salam Rt. 012 Rw. 005, Ds. Kemuning, Kec. Kresik, Kab. Tangerang	188.620.000,00	600/SPK.1801.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2354/SULIHARA/12/2025	9.431.000,00	180 Hari	17 december 2025		5	
		1021	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Graha Pesona Rw. 010, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.640.000,00	600/SPK.1407.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2345/SULIHARA/12/2025	9.432.000,00	180 Hari	04 december 2025		5	
		1022	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kopi Rw. 001, Ds. Sukalaba, Kec. Gunungsari, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.1994.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2292/SULIHARA/12/2025	9.481.500,00	180 Hari	08 december 2025		5	
		1023	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kedung Sapi Sebelah Barat Rt. 009 Rw. 003 - Kp. Golok Sebelah Barat Rt. 011 Rw. 004, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.1750.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2697/SULIHARA/12/2025	9.494.500,00	180 Hari	18 december 2025		5	
		1024	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 - 003 Rw. 001 - 002, Ds. Singamerta, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.1896.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2434/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	16 december 2025		5	
		1025	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Syeikh Abd. Jabar Ponges Nurul Mursidah Kp. Pasir Putri Rt. 004, Kel. Pagadungan, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.1742.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2607/SULIHARA/12/2025	9.502.500,00	180 Hari	12 december 2025		5	
		1026	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Sindangmandi, Kec. Baros, Kab. Serang	348.600.000,00	600/SPK.2063.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2552/SULIHARA/12/2025	17.430.000,00	180 Hari	15 december 2025		5	
		1027	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cicalung Rt. 003 Rw. 004, Kel. Kadomas, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	190.020.000,00	600/SPK.1741.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2621/SULIHARA/12/2025	9.501.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1028	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 006 Rw. 021, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.1532.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2497/SULIHARA/12/2025	9.404.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1029	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalanganyer Lebak Rt. 002 Rw. 003, Ds. Gerendong, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	190.150.000,00	600/SPK.1911.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2517/SULIHARA/12/2025	9.507.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1030	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kubang Rt. 011 Rw. 005, Ds. Panis, Kec. Keroncong, Kab. Pandeglang	190.280.000,00	600/SPK.1912.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2518/SULIHARA/12/2025	9.514.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1031	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Permata Serang, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang	189.710.000,00	600/SPK.1808.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2730/SULIHARA/12/2025	9.485.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1032	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Gunung Sumbul Rw. 001, Ds. Citaman, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1760.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2261/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	04 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1033	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikusik Timur Rw. 013, Ds. Cikatomas, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	190.090.000,00	600/SPK.1842.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2653/SULIHARA/12/2025	9.504.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1034	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Awilega Rt. 003 Rw. 001, Ds. Awilega, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	190.220.000,00	600/SPK.1910.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2516/SULIHARA/12/2025	9.511.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1035	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pipitan Rt. 007 - Rt. 008 Rw. 002, Kel. Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.1588.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2718/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1036	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sijungjang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cikeusal, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1893.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2572/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	

		1037	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Cendana Raya Rt. 002 Rw. 005, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.560.000,00	600/SPK.1508.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2229/SULIHARA/12/2025	9.378.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1038	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Villa Tangerang Regency 1 Rw. 017, Kel. Gebang Raya, Kec. Periak, Kota Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.1575.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2475/SULIHARA/12/2025	9.401.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1039	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadudampit Rt. 002 Rw. 004, Ds. Pasikarag, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	189.960.000,00	600/SPK.1913.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2515/SULIHARA/12/2025	9.498.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1040	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jaha Munjul Rt. 016 Rw. 006, Ds. Kadudodol, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1613.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2658/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1041	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Pogor Rt. 014 Rw. 005, Ds. Kadubelang, Kec. Mekarjaya, Kab. Pandeglang	189.550.000,00	600/SPK.1614.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2659/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1042	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimaista Rt. 002 Rw. 008, Ds. Cijengkot, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1544.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2666/SULIHARA/12/2025	9.469.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1043	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Badak Rt. 006 Rw. 001, Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1713.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2673/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1044	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimupak Rt. 012 Rw. 006, Ds. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.690.000,00	600/SPK.1915.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2679/SULIHARA/12/2025	9.434.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1045	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Jambu Puri Agung Permai Rt. 003 Rw. 004, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.480.000,00	600/SPK.1716.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2676/SULIHARA/12/2025	9.374.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1046	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Cimuncang Sukamanah Rt. 004, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.1765.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2737/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1047	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumas 3 Rt. 004 Rw. 031, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1608.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2685/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1048	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Tangerang Residence Rt. 001 Rw. 006, Ds. Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	187.860.000,00	600/SPK.1380.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2508/SULIHARA/12/2025	9.393.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1049	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Mutlara Garuda Rw. 016, Ds. Kampung Melayu Timur, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.190.000,00	600/SPK.1388.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2302/SULIHARA/12/2025	9.409.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1050	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pagenjahan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Pagenjahan, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.1591.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2627/SULIHARA/12/2025	9.389.500,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1051	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Cimoncor Rw. 003, Kel. Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.080.000,00	600/SPK.1516.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2702/SULIHARA/12/2025	9.504.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1052	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kalapa Rw. 003, Ds. Cislit, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1753.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2259/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	08 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1053	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Keboncau Rt. 001 Rw. 001, Ds. Keboncau, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.1399.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2616/SULIHARA/12/2025	9.389.500,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1054	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Cendrawasih Gg. Swadaya Rw. 011, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.180.000,00	600/SPK.2003.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2635/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1055	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Candu Rw. 001, Ds. Serdang Wetan, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.350.000,00	600/SPK.1749.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2712/SULIHARA/12/2025	9.417.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1056	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002-005 Rw. 008, Ds. Parigi, Kec. Cikande, Kab. Serang	190.040.000,00	600/SPK.1675.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2837/SULIHARA/12/2025	9.502.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1057	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cente Rt. 002 Rw. 001, Ds. Mendung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang	190.040.000,00	600/SPK.1909.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2514/SULIHARA/12/2025	9.502.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	

		1058	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimoyan Rt. 013 Rw. 004, Ds. Sukadana, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.520.000,00	600/SPK.1740.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2771/SULIHARA/12/2025	9.476.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1059	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisantri Rt. 002 Rw. 005, Ds. Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.700.000,00	600/SPK.1982.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2724/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1060	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Bernis Rt. 001 Rw. 005 Gang Alpukat, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1707.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2895/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1061	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 002, Ds. Pegandikan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1683.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2836/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1062	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisantri Rw. 005, Ds. Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.1981.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2725/SULIHARA/12/2025	9.466.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1063	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pasilian Anyar Rt. 003 Rw. 002, Ds. Pasilian, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1669.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2626/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1064	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Tanjung Burung Rt. 004 Rw. 002, Ds. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	186.900.000,00	600/SPK.1395.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2479/SULIHARA/12/2025	9.345.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1065	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 002, Ds. Kramat, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.1385.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2800/SULIHARA/12/2025	9.407.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1066	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Anilen Rt. 001 Rw. 010, Ds. Cempaka, Kec. Cisolok, Kab. Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.1488.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2928/SULIHARA/12/2025	9.405.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1067	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Belendung, Kec. Benda, Kota Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1705.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2874/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1068	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasilian Rt. 002 Rw. 002, Ds. Pasilian, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.800.000,00	600/SPK.1586.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2713/SULIHARA/12/2025	9.440.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1069	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Citra Gading Rw. 006, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.870.000,00	600/SPK.1875.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2827/SULIHARA/12/2025	9.493.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1070	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sawah Girang, Ds. Cislitu, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.150.000,00	600/SPK.1702.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2872/SULIHARA/12/2025	9.457.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1071	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-Rw. 004, Ds. Penamping, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.480.000,00	600/SPK.1373.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2842/SULIHARA/12/2025	9.474.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1072	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cakung Serewu Rt. 002 Rw. 003, Ds. Cakung, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1886.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2844/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1073	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sentul, Ds. Kamasan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1989.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2684/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	23 december 2025	21 Juni 2026	5	
		1074	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 026, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.750.000,00	600/SPK.1531.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2498/SULIHARA/12/2025	9.437.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1075	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005 Perumahan Villa Balaraja, Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	188.180.000,00	600/SPK.1518.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2910/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1076	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Kaduclung Sabrang Rw. 003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.540.000,00	600/SPK.1872.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2826/SULIHARA/12/2025	9.427.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1077	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ragas Rt. 005 Rw. 006, Ds. Purwadadi, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.1901.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2788/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1078	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Sukadiri Rw. 006, Kel. Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.1880.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2832/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1079	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002 Link. Krotek, Kel. Kalitimbang, Kec. Cibeer, Kota Cilegon	189.200.000,00	600/SPK.1489.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2832/SULIHARA/12/2025	9.460.000,00	180 Hari	29 december 2025	27 Juni 2026	5	
		1080	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Pasirgadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.430.000,00	600/SPK.1288.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0519/SULIHARA/09/2025	9.421.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	

		1081	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigatel, Rt. 020 Rw. 001, Ds. Bandung, Kec. Bandung, Kab. Serang	188.960.000,00	600/SPK.0463.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0500/SULIHARA/09/2025	9.448.000,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1082	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Paku Saji Rt. 001 Rw. 003, Ds. Pringwulung, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.0306.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0557/SULIHARA/09/2025	9.470.000,00	180 Hari	04 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1083	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Buek Rt. 012 Rw. 005, Ds. Cisangu, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.1052.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0572/SULIHARA/09/2025	9.466.500,00	180 Hari	09 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1084	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nagrak Rt. 001 Rw. 004, Ds. Warung Banten, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.550.000,00	600/SPK.0654.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0512/SULIHARA/09/2025	9.477.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1085	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadutis Rw. 003, Ds. Pasireuh, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.580.000,00	600/SPK.0035.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0538/SULIHARA/09/2025	9.479.000,00	180 Hari	22 August 2025	18 Februari 2026	5	
		1086	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Saarang Rw. 001, Ds. Malangnengah, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.560.000,00	600/SPK.0158.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0652/SULIHARA/09/2025	9.478.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1087	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sompok Rt. 002 Rw. 004, Ds. Kramatjaya, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1075.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0705/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1088	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Mengger, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.450.000,00	600/SPK.0564.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0584/SULIHARA/09/2025	9.472.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1089	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Lingk. Ciwuni Mesjid Rw. 001, Kel. Pabuaran, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.450.000,00	600/SPK.0545.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0545/SULIHARA/09/2025	9.472.500,00	180 Hari	2 September 2025	01 Maret 2026	5	
		1090	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Seti Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pasir Sedang, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	189.960.000,00	600/SPK.0869.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0665/SULIHARA/09/2025	9.498.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1091	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Sentul, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.0522.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0762/SULIHARA/09/2025	9.494.500,00	180 Hari	25 August 2025	21 Februari 2026	5	
		1092	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Wadas Wetan Rt. 009 Rw. 003, Ds. Sindangsari, Kec. Petir, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1073.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0559/SULIHARA/09/2025	9.467.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1093	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 003 Rw. 001, Ds. Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.0671.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0590/SULIHARA/09/2025	9.464.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1094	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jengkol Rt. 003 Rw. 001, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kota Serang	189.410.000,00	600/SPK.0686.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0570/SULIHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1095	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 001, Kel. Mauk Timur, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	187.770.000,00	600/SPK.0721.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0063/SULIHARA/09/2025	9.388.500,00	180 Hari	1 September 2025	28 Februari 2026	5	
		1096	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadubeureum Lor Rt. 02 Rw. 07, Ds. Kadubeureum, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.640.000,00	600/SPK.0591.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0566/SULIHARA/09/2025	9.482.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1097	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Konar Lebak Rw. 002, Ds. Rancasumur, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.210.000,00	600/SPK.0599.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0579/SULIHARA/09/2025	9.460.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1098	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 001 Rw. 003, Kel. Portis Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.220.000,00	600/SPK.0242.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0735/SULIHARA/09/2025	9.411.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1099	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-002, Kel. Mauk Timur, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	188.730.000,00	600/SPK.0003.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0594/SULIHARA/09/2025	9.436.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1100	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Seliong Rt. 002 Rw. 001, Ds. Bojong Renged, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.0583.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0503/SULIHARA/09/2025	9.428.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1101	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perum Mekar Sari Residence 2 Rt. 013 Rw. 001, Ds. Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.440.000,00	600/SPK.1191.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0657/SULIHARA/09/2025	9.422.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1102	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 005, Ds. Pisanan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.120.000,00	600/SPK.0982.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0689/SULIHARA/09/2025	9.406.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1103	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Salam Rt. 012 Rw. 005, Ds. Kemuning, Kec. Kresek, Kab. Tangerang	188.620.000,00	600/SPK.0984.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0687/SULIHARA/09/2025	9.431.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	

		1104	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Graha Pesona Rw. 010, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.640.000,00	600/SPK.0693.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1334/SULIHARA/10/2025	9.432.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1105	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kopi Rw. 001, Ds. Sukalaba, Kec. Gunung Sari, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.0715.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1425/SULIHARA/10/2025	9.481.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1106	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kedung Sapi Sebelah Barat Rt. 009 Rw. 003 - Kp. Golok Sebelah Barat Rt. 011 Rw. 004, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.890.000,00	600/SPK.0981.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0686/SULIHARA/09/2025	9.494.500,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1107	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 - 003 Rw. 001 - 002, Ds. Singamerta, Kec. Cirusas, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.0999.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0690/SULIHARA/09/2025	9.464.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1108	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Syekh Abd. Jabar Ponpes Nurul Mursidah Kp. Pasir Putri Rw. 004, Kel. Pagadungan, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.0983.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0688/SULIHARA/09/2025	9.502.500,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1109	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Sindangmandi, Kec. Baros, Kab. Serang	348.600.000,00	600/SPK.0681.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0585/SULIHARA/09/2025	17.430.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1110	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cicalung Rt. 003 Rw. 004, Kel. Kadomas, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	190.020.000,00	600/SPK.0594.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0777/SULIHARA/09/2025	9.501.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1111	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 006 Rw. 021, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0552.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0558/SULIHARA/09/2025	9.404.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1112	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kalanganyar Lebak Rt. 002 Rw. 003, Ds. Gerendong, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	190.150.000,00	600/SPK.1260.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0718/SULIHARA/09/2025	9.507.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1113	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kubang Rt. 011 Rw. 005, Ds. Panis, Kec. Keroncong, Kab. Pandeglang	190.280.000,00	600/SPK.1255.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0715/SULIHARA/09/2025	9.514.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1114	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Permata Serang, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang	189.710.000,00	600/SPK.0005.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0595/SULIHARA/09/2025	9.485.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1115	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Gunung Sumbul Rw. 001, Ds. Citaman, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.0460.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0742/SULIHARA/09/2025	9.403.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1116	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikesusik Timur Rw. 013, Ds. Cikatomas, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	190.090.000,00	600/SPK.1346.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0786/SULIHARA/09/2025	9.504.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1117	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Awilega Rt. 003 Rw. 001, Ds. Awilega, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	190.220.000,00	600/SPK.1137.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0764/SULIHARA/09/2025	9.511.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1118	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Piptan Rt. 007 - Rt. 008 Rw. 002, Kel. Piptan, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.0760.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0773/SULIHARA/09/2025	9.488.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1119	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sijunggang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cikesusal, Kec. Cikesusal, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1318.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0527/SULIHARA/09/2025	9.469.000,00	180 Hari	1 September 2025	28 Februari 2026	5	
		1120	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Cendana Raya Rt. 002 Rw. 005, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.560.000,00	600/SPK.1194.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0841/SULIHARA/09/2025	9.378.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1121	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Villa Tangerang Regency 1 Rw. 017, Kel. Gebang Raya, Kec. Perbuk, Kota Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.0524.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0939/SULIHARA/09/2025	9.401.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1122	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadudampit Rt. 002 Rw. 004, Ds. Pasirkarag, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	189.960.000,00	600/SPK.0014.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0821/SULIHARA/09/2025	9.498.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1123	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jaha Muijul Rt. 016 Rw. 005, Ds. Kadudodol, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.0002.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0818/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1124	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Pogor Rt. 014 Rw. 005, Ds. Kadubelang, Kec. Mekariaya, Kab. Pandeglang	189.550.000,00	600/SPK.0298.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0789/SULIHARA/09/2025	9.477.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		1125	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimaista Rt. 002 Rw. 008, Ds. Cijengkol, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.0998.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0763/SULIHARA/09/2026	9.469.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	

		1126	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Badak Rt. 006 Rw. 001, Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1148.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0853/SULIHARA/09/2025	9.390.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1127	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cirumpak Rt. 012 Rw. 006, Ds. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.690.000,00	600/SPK.0019.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0820/SULIHARA/09/2025	9.434.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1128	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Jambu Puri Agung Permai Rt. 003 Rw. 004, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.480.000,00	600/SPK.1239.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0880/SULIHARA/09/2025	9.374.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1129	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Cimuncang Sukamanah Rw. 004, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.1290.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0520/SULIHARA/09/2025	9.488.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1130	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Perumnas 3 Rt. 004 Rw. 031, Kel. Bencong, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.0836.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0915/SULIHARA/09/2025	9.429.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1131	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Perumahan Tangerang Residence Rt. 001 Rw. 006, Ds. Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	187.860.000,00	600/SPK.0104.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0642/SULIHARA/09/2025	9.393.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1132	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Komplek Mutiara Saruda Rw. 016, Ds. Kampung Melayu Timur, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.190.000,00	600/SPK.0535.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0827/SULIHARA/09/2025	9.409.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1133	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Pagenjahan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Pagenjahan, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.0951.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0854/SULIHARA/09/2025	9.389.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		1134	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Cimuncor Rw. 003, Kel. Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang	190.080.000,00	600/SPK.0113.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0639/SULIHARA/09/2025	9.504.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1135	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Kalapa Rw. 003, Ds. Cislir, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.0098.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0641/SULIHARA/09/2025	9.429.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1136	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Keboncau Rt. 001 Rw. 001, Ds. Keboncau, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.0114.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0640/SULIHARA/09/2025	9.389.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1137	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Jl. Cendrawasih Gg. Swadaya Rw. 011, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.180.000,00	600/SPK.0726.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0727/SULIHARA/09/2025	9.409.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1138	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Candu Rw. 001, Ds. Serdang Wetan, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.350.000,00	600/SPK.1047.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0780/SULIHARA/09/2025	9.417.500,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1139	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rt. 002-005 Rw. 008, Ds. Parigi, Kec. Cikande, Kab. Serang	190.040.000,00	600/SPK.0973.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0780/SULIHARA/09/2025	9.502.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1140	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cente Rt. 002 Rw. 001, Ds. Mendung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang	190.040.000,00	600/SPK.1046.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0765/SULIHARA/09/2025	9.502.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1141	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cimoyan Rt. 013 Rw. 004, Ds. Sukadana, Kec. Ciomas, Kab. Serang	189.520.000,00	600/SPK.1045.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0766/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1142	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cisartri Rt. 002 Rw. 005, Ds. Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.700.000,00	600/SPK.0595.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1013/SULIHARA/09/2025	9.485.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1143	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Perumahan Bermis Rt. 001 Rw. 005 Gang Alpukat, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.0452.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1020/SULIHARA/09/2025	9.429.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1144	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Ds. Pegandikan, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1181.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1309/SULIHARA/10/2025	9.434.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1145	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cisantri Rw. 005, Ds. Curugbarang, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.1062.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1038/SULIHARA/09/2025	9.466.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1146	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Pasilian Anyar Rt. 003 Rw. 002, Ds. Pasilian, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0895.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0947/SULIHARA/09/2025	9.384.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1147	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Tanjung Burung Rt. 004 Rw. 002, Ds. Tanjung Burung, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	186.900.000,00	600/SPK.1140.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0989/SULIHARA/09/2025	9.345.000,00	180 Hari	1 Oktober 2025	#VALUE!	5	

		1148	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 002, Ds. Kramat, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.0891.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0948/SULIHARA/09/2025	9.407.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1149	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Anilen Rt. 001 Rw. 010, Ds. Cempaka, Kec. Cisolok, Kab. Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.0706.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0802/SULIHARA/09/2025	9.405.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1150	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kel. Belendung, Kec. Benda, Kota Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.0691.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0956/SULIHARA/09/2025	9.395.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1151	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasilian Rt. 002 Rw. 002, Ds. Pasilian, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.800.000,00	600/SPK.0987.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1344/SULIHARA/10/2025	9.440.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1152	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Citra Gading Rw. 006, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.870.000,00	600/SPK.0374.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1029/SULIHARA/09/2025	9.493.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1153	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sawah Girang, Ds. Cisitu, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.150.000,00	600/SPK.1209.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1041/SULIHARA/09/2025	9.457.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1154	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-Rw. 004, Ds. Penamping, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.480.000,00	600/SPK.1217.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1066/SULIHARA/09/2025	9.474.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1155	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cakung Serewu Rt. 002 Rw. 003, Ds. Cakung, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.0968.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0978/SULIHARA/09/2025	9.475.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1156	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sentul, Ds. Kamasan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1153.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0985/SULIHARA/09/2025	9.465.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1157	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 026, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.750.000,00	600/SPK.1219.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1333/SULIHARA/10/2025	9.437.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1158	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005 Perumahan Villa Balaraja, Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	188.180.000,00	600/SPK.0781.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1146/SULIHARA/10/2025	9.409.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1159	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Kaduclung Sabrang Rw. 003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.540.000,00	600/SPK.0785.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1056/SULIHARA/09/2025	9.427.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1160	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ragas Rt. 005 Rw. 006, Ds. Purwadadi, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.0379.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1060/SULIHARA/09/2025	9.470.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1161	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Sukadiri Rw. 006, Kel. Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.770.000,00	600/SPK.0419.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1032/SULIHARA/09/2025	9.488.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1162	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002 Link. Krotek, Kel. Kalimbang, Kec. Cibeer, Kota Cilegon	189.200.000,00	600/SPK.0662.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1017/SULIHARA/09/2025	9.460.000,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1163	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sindangmangu Rt. 003, Kel. Kuranji, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.730.000,00	600/SPK.0653.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1019/SULIHARA/09/2025	9.486.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1164	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Safira Rw. 012, Kel. Sepang, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.700.000,00	600/SPK.0444.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1074/SULIHARA/09/2025	9.485.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1165	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Soyog Rt. 001 Rw. 002, Kel. Taktakan, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.470.000,00	600/SPK.0954.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0910/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1166	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sipayung, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.920.000,00	600/SPK.1262.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1105/SULIHARA/09/2025	9.496.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1167	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadomas Rw. 001, Kel. Kadomas, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.430.000,00	600/SPK.1041.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1036/SULIHARA/09/2025	9.471.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1168	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Dukuh Rt. 011 Rw. 004, Ds. Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.790.000,00	600/SPK.1106.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1048/SULIHARA/09/2025	9.439.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1169	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Suksari Kec. Tangerang Kota Tangerang (KONSOL 104)	374.700.000,00	600/SPK.0497.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1077/SULIHARA/10/2025	18.735.000,00	180 Hari	26 Septeber 2025	#VALUE!	5	
		1170	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 005, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.100.000,00	600/SPK.0501.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1078/SULIHARA/10/2025	9.405.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1171	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sangkan Rt. 002 Rw. 005, Ds. Kananga, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.990.000,00	600/SPK.0414.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0921/SULIHARA/10/2025	9.499.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	

		1172	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Waringin Rt. 014 Rw. 002, Ds. Rawasari, Kec. Cislata, Kab. Pandeglang	189.990.000,00	600/SPK.0403.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0920/SULIHARA/10/2025	9.499.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1173	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukajaya Rw. 012, Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.930.000,00	600/SPK.0464.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1246/SULIHARA/10/2025	9.496.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1174	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bojong Rt. 001 Rw. 002, Ds. Gerendong, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	190.120.000,00	600/SPK.0371.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0973/SULIHARA/09/2025	9.506.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1175	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gunung Batu Rt. 001 Rw. 005, Ds. Ciballing, Kec. Ciballing, Kab. Pandeglang	189.970.000,00	600/SPK.0378.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0924/SULIHARA/09/2025	9.498.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1176	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Susukan Kec. Tirtayasa Kab. Serang (KONSOL 24)	380.030.000,00	600/SPK.0915.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1113/SULIHARA/09/2025	19.001.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1177	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigundi Rt. 003 Rw. 004, Ds. Mekar Agung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.0967.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1180/SULIHARA/09/2025	9.468.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1178	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	188.700.000,00	600/SPK.0109.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1172/SULIHARA/09/2025	9.435.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1179	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baru Rt. 008 Rw. 004, Ds. Kaduengang, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.500.000,00	600/SPK.1231.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1284/SULIHARA/09/2025	9.475.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1180	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadutunggul Rw. 09, Kel. Cigadung, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.430.000,00	600/SPK.0731.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1353/SULIHARA/10/2025	9.471.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1181	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tenjolaya Hilir Rw. 008, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.380.000,00	600/SPK.0732.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1355/SULIHARA/10/2025	9.469.000,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1182	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 004 Rw. 003, Ds. Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.760.000,00	600/SPK.1111.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1191/SULHARA/10/2025	9.488.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1183	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bama Hilir, Ds. Margagiri, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.430.000,00	600/SPK.1058.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1291/SULIHARA/09/2025	9.471.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1184	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimadang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Cijakan, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang	189.850.000,00	600/SPK.1065.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1223/SULHARA/10/2025	9.492.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1185	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tegal Rt. 002 Rw. 001, Ds. Tegal, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	189.410.000,00	600/SPK.1121.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1015/SULHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1186	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sumur Kopo Rt. 002 Rw. 007, Ds. Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	190.270.000,00	600/SPK.0408.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1043/SULHARA/09/2025	9.513.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1187	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasauran Rt. Rw. 002 Rw. 001, Ds. Pasauran, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.730.000,00	600/SPK.0855.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1148/SULHARA/10/2025	9.486.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1188	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Hileut Rt. 006 Rw. 003, Ds. Cening, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	189.910.000,00	600/SPK.0387.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0968/SULHARA/09/2025	9.495.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1189	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cipapais Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1241.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1283/SULHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1190	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Weru Rw. 001 , Ds. Weru, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.0790.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1332/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1191	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Grand Mitra Residence Rt. 006 Rw. 010, Kel. Cigadung, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.970.000,00	600/SPK.0236.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1187/SULIHARA/09/2025	9.498.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1192	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sengked Rt. 001 Rw. 008, Ds. Cigeulis, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	189.880.000,00	600/SPK.1237.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1189/SULIHARA/10/2025	9.494.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1193	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Nagrek Rt. 003 Rw. 007, Ds. Karangbolong, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	189.880.000,00	600/SPK.1112.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1188/SULIHARA/10/2025	9.494.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1194	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cinangkis Rt. 009 Rw. 001, Ds. Cijakan, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang	189.840.000,00	600/SPK.0367.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1349/SULIHARA/10/2025	9.492.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	

		1195	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kareo Tegal Rt. 005 Rw. 001, Ds. Kareo, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.820.000,00	600/SPK.0033.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1321/SULIHARA/10/2025	9.491.000,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1196	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibongo Rt. 001 Rw. 001, Ds. Situlerate, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.650.000,00	600/SPK.0043.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1322/SULIHARA/10/2025	9.482.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1197	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jambu Rw. 001, Ds. Bulakan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.450.000,00	600/SPK.1180.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1158/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1198	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.490.000,00	600/SPK.0091.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1296/SULIHARA/10/2025	9.424.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1199	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Priuk Rt. 023 Rw. 001, Ds. Ragas Masigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.290.000,00	600/SPK.1317.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1569/SULIHA/2025	9.464.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1200	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Kandang Rt. 001 Rw. 001, Ds. Turus, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	190.130.000,00	600/SPK.0426.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1508/SULIHARA/10/2025	9.506.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1201	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sinar Baru Rt. 003 Rw. 007, Ds. Tanjungjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	190.160.000,00	600/SPK.0427.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1504/SULIHARA/10/2025	9.508.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1202	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kaung Rt. 001 Rw. 011, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	190.230.000,00	600/SPK.0425.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1505/SULIHARA/10/2025	9.511.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1203	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigintung Girang Rt. 023 Rw. 012, Ds. Kadudempit, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1036.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1505/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	2 October 2025	31 Maret 2026	5	
		1204	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Griya Arta Rw. 008, Ds. Rajeg Mulya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.630.000,00	600/SPK.1168.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1341/SULIHARA/10/2025	9.431.500,00	180 Hari	7 October 2025	05 April 2026	5	
		1205	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Tangkil Rw. 003, Ds. Baros Jaya, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.1177.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1198/SULIHARA/10/2025	9.484.000,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1206	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gag) Graha Indra Rt. 003 Rw. 009, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	183.750.000,00	600/SPK.0542.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1106/SULIHARA/10/2026	9.187.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1207	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 004, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	189.200.000,00	600/SPK.0964.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1292/SULIHARA/10/2025	9.460.000,00	180 Hari	6 october 2025	04 April 2026	5	
		1208	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panis Rt. 003 Rw. 014, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	189.400.000,00	600/SPK.0235.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1643/SULIHARA/11/2025	9.470.000,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1209	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 006, Ds. Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	189.350.000,00	600/SPK.0234.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1374/SULIHAR/10/2025	9.467.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1210	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gag) Sordang Asri 1 Rt. 008 Rw. 003, Ds. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	183.630.000,00	600/SPK.0577.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1480/SULIHARA/10/2025	9.181.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1211	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukamanah Rt. 002 Rw. 004, Ds. Budi Mulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.310.000,00	600/SPK.0606.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1613/SULIHARA/10/2002 5	9.365.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1212	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Cendana Raya No. 9 Rt. 019 Rw. 004, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	188.300.000,00	600/SPK.0615.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0965/SULIHAR/10/2025	9.415.000,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1213	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Cerukcuk Kec. Tanara Kab. Serang (KONSOL 20)	380.130.000,00	600/SPK.0901.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1402/SULIHAR/10/2025	19.006.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1214	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cihandam Rw 004, Ds. Cisimeut Raya, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.0796.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1576/SULIHARA/10/2025	9.466.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1215	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Patirahut Rt. 009 Rw. 005, Ds. Palembang, Kec. Cisaia, Kab. Pandeglang	190.140.000,00	600/SPK.0405.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1575/SULIHARA/10/2025	9.507.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1216	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Babakan, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.730.000,00	600/SPK.0642.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1360/SULIHARA/10/2025	9.486.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1217	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Sukamaju, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.700.000,00	600/SPK.0641.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1420/SULIHARA/10/2025	9.485.000,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1218	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Keterembel Rt. 002 Rw. 002, Ds. Cisaat, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.620.000,00	600/SPK.0052.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1440/SULIHARA/10/2025	9.481.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	

		1219	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kepaskan Rt. 004-005 Rw. 001, Ds. Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1313.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1265/SULIHARA/10/2025	9.469.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1220	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Penyelagan Rt. 001 Rw. 001, Ds. Kemisanan, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.320.000,00	600/SPK.1291.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1262/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1221	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Laban Rt. 006-007 Rw. 002, Ds. Laban, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	188.340.000,00	600/SPK.1281.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1266/SULIHARA/10/2025	9.417.000,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		1222	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibuluh Rt. 009 Rw. 004, Ds. Barugbug, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.330.000,00	600/SPK.1018.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1424/SULIHARA/10/2025	9.466.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1223	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Pisangan Rt. 004 Rw. 004, Ds. Kayu Agung, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	187.240.000,00	600/SPK.0802.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1493/SULIHARA/10/2025	9.362.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1224	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cembelh Rt. 003 Rw. 001, Ds. Ciruas, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.870.000,00	600/SPK.0063.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1475/SULIHARA/10/2025	9.493.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1225	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Tanggai Rt. 003 Rw. 007, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.910.000,00	600/SPK.0413.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1405/SULIHARA/10/2025	9.495.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1226	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.880.000,00	600/SPK.0487.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1558/SULIHARA/10/2025	9.394.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1227	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikaret, Ds. Situregen, Kec. Pangarangen, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.0582.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1050/SULIHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1228	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Muntl Rt. 023, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	190.150.000,00	600/SPK.0471.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1492/SULIHARA/10/2025	9.507.500,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		1229	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Permata Banjar Asri, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	188.280.000,00	600/SPK.1149.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1391/SULIHARA/10/2025	9.414.000,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		1230	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mok) Kp. Cimoyan Rt. 002 Rw. 005, Ds. Ciherang, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	188.970.000,00	600/SPK.1028.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1510/SULIHARA/10/2025	9.448.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1231	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pasir Ceri Rt. 013 Rw. 005, Ds. Jayamekar, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	190.190.000,00	600/SPK.0406.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1409/SULIHARA/10/2029	9.509.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1232	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciluluk Rt. 004 Rw. 003, Ds. Menes, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.990.000,00	600/SPK.0415.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1408/SULIHARA/10/2025	9.499.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1233	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.550.000,00	600/SPK.1198.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1517/SULIHARA/10/2025	9.477.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1234	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciomonzor Rt. 011 Rw. 003, Kel. Cigoong, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.260.000,00	600/SPK.1347.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1347/SULIHARA/10/2025	9.463.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1235	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Pabrik Rt. 001 Rw. 001, Ds. Tegalmaja, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.690.000,00	600/SPK.0051.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1453/SULIHARA/10/2025	9.484.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1236	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilogok Rt. 005 Rw. 002, Ds. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0816.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1494/SULIHARA/10/2025	9.404.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1237	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.880.000,00	600/SPK.0115.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1533/SULIHARA/10/2025	9.394.000,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		1238	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Rau Timur Rt. 001 Rw. 018, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	189.290.000,00	600/SPK.0176.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1485/SULIHARA/10/2025	9.464.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		1239	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karang Mulya Rt. 003 Rw. 001, Ds. Tagel Wangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.020.000,00	600/SPK.0416.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1366/SULIHARA/10/2025	9.501.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1240	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rt. 001 Rw. 005, Kel. Batusari, Kec. Batuoeper, Kota Tangerang	187.540.000,00	600/SPK.0508.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1539/SULIHARA/10/2025	9.377.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1241	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lame Payung, Ds. Muncang Kopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1154.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1611/SULIHARA/10/2025	9.469.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		1242	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kemiri Kongs Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kemiri, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	188.590.000,00	600/SPK.1334.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1300/SULIHARA/10/2025	9.429.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	

		1243	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Ds. Padarinrang, Kec. Padarinrang, Kab. Serang	184.370.000,00	600/SPK.0525.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1574/SULIHARA/10/2025	9.218.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1244	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Koncang Panjang Rw. 002, Ds. Gunung Cupu, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1205.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1630/SULIHARA/11/2025	9.474.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1245	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 009, Ds. Pasisi Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0886.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1662/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1246	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 015, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.510.000,00	600/SPK.1173.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1589/SULIHARA/10/2025	9.425.500,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1247	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jalan Kasasi Raya, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	189.070.000,00	600/SPK.0499.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1538/SULIHARA/10/2025	9.453.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1248	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jatake - Cicalung, Ds. Mekarjaya, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.0254.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1637/SULIHARA/11/2025	9.470.500,00	180 Hari	21 October 2025	19 April 2026	5	
		1249	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sangiang Rw. 005, Ds. Sukarame, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.490.000,00	600/SPK.1189.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1641/SULIHARA/11/2025	9.474.500,00	180 Hari	28 October 2025	26 April 2026	5	
		1250	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadu Kokosan Rt. 004 Rw. 002, Ds. Tembong, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.370.000,00	600/SPK.1129.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1642/SULIHARA/11/2025	9.468.500,00	180 Hari	27 October 2025	25 April 2026	5	
		1251	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tjackson Asem Rt. 001 Rw. 002, Ds. Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	190.350.000,00	600/SPK.0438.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1671/SULIHARA/11/2025	9.517.500,00	180 Hari	2 October 2025	31 Maret 2026	5	
		1252	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Curug Lebak Rt. 003 Rw. 007, Ds. Narimbang Mulya, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.830.000,00	600/SPK.1134.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1073/SULIHARA/10/2025	9.491.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1253	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Gsg) Mekar Asri 2 Rw. 006, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	183.710.000,00	600/SPK.0881.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1619/SULIHARA/10/2025	9.185.500,00	180 Hari	16 October 2025	14 April 2026	5	
		1254	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Citra Gading Rw. 005, Kel. Cilaku, Kec. Curug, Kota Serang	189.380.000,00	600/SPK.1243.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1243/SULIHARA/10/2025	9.469.000,00	180 Hari	30 October 2025	28 April 2026	5	
		1255	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 011, Ds. Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.980.000,00	600/SPK.0341.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1676/SULIHARA/11/2025	9.399.000,00	180 Hari	10 October 2025	08 April 2026	5	
		1256	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kel. Bojong Nangka Kec. Kelsapa Dua Kab. Tangerang (KONSOL 87)	375.440.000,00	600/SPK.0885.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1650/SULIHARA/11/2025	18.772.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1257	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Erjeruk Rt. 005 Rw. 007, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.170.000,00	600/SPK.0391.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1368/SULIHARA/10/2025	9.508.500,00	180 Hari	2 October 2025	31 Maret 2026	5	
		1258	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Mok) Kp. Tangsi, Ds. Bale Kencana, Kec. Mancak, Kab. Serang	188.140.000,00	600/SPK.0979.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1674/SULIHARA/11/2025	9.407.000,00	180 Hari	10 October 2025	08 April 2026	5	
		1259	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Kebon, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.1316.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1707/SULIHARA/11/2025	9.465.000,00	180 Hari	16 October 2025	14 April 2026	5	
		1260	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang (KONSOL 89)	375.370.000,00	600/SPK.0132.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1675/SULIHARA/11/2025	18.768.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1261	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 012, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.0226.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1698/SULIHARA/11/2025	9.410.000,00	180 Hari	30 October 2025	28 April 2026	5	
		1262	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Puri Kartika, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	190.210.000,00	600/SPK.1232.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1661/SULIHARA/11/2025	9.510.500,00	180 Hari	6 October 2025	04 April 2026	5	
		1263	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisdang Kadu Pandak Rt. 006 Rw. 004, Ds. Gunungkendeng, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak	189.550.000,00	600/SPK.0739.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1602/SULIHARA/10/2025	9.477.500,00	180 Hari	14 October 2025	12 April 2026	5	
		1264	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cilamba Rt. 003 Rw. 001, Ds. Sukanegara, Kec. Gunungkencana, Kab. Lebak	189.300.000,00	600/SPK.0740.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1606/SULIHARA/10/2025	9.465.000,00	180 Hari	14 October 2025	12 April 2026	5	
		1265	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Ds. Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.620.000,00	600/SPK.0345.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1785/SULIHARA/11/2025	9.381.000,00	180 Hari	10 October 2025	08 April 2026	5	

		1266	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Perumahan Kelapa Dua Rw. 007, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0358.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1679/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1267	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 003, Ds. Talaga, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.0352.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1787/SULIHARA/11/2025	9.378.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1268	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bolong Rt. 003 Rw. 003, Ds. Karangbolong, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	190.210.000,00	600/SPK.0383.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1693/SULIHARA/11/2025	9.510.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		1269	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sobang Lebak Rt. 04 Rw. 05, Ds. Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.0980.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1647/SULIHARA/11/2025	9.473.500,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		1270	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Baru Rt. 012 Rw. 004, Ds. Sukamampir, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.570.000,00	600/SPK.0078.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1749/SULIHARA/11/2025	9.478.500,00	180 Hari	24 Oktober 2025	#VALUE!	5	
		1271	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Tengah Rt. 003 Rw. 003, Ds. Katumbiri, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	190.100.000,00	600/SPK.0385.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1725/SULIHARA/11/2025	9.505.000,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		1272	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cibeber Rt. 001 Rw. 002, Ds. Padasuka, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	190.220.000,00	600/SPK.0395.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1694/SULIHARA/11/2025	9.511.000,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		1273	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komplek Permata Balaraja Rt. 003 Rw. 001, Ds. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	188.810.000,00	600/SPK.1183.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1763/SULIHARA/11/2025	9.440.500,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		1274	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Link. Rau Timur Rt. 001 Rw. 018, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	188.500.000,00	600/SPK.0177.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1815/SULIHARA/11/2025	9.425.000,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		1275	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cimanggu, Ds. Karangamulyan, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.560.000,00	600/SPK.1144.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1823/SULIHARA/11/2025	9.478.000,00	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		1276	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikapek Rt. 009 Rw. 003, Ds. Sarageni, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.360.000,00	600/SPK.1008.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1822/SULIHARA/11/2025	9.468.000,00	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		1277	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Haur, Ds. Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.1128.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1821/SULIHARA/11/2025	9.472.500,00	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		1278	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gajug Sigeuring Rt. 007 Rw. 002, Ds. Bintangresmi, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.150.000,00	600/SPK.0833.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1839/SULIHARA/11/2025	9.457.500,00	180 Hari	10 November 2025	09 Mei 2026	5	
		1279	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cisereh Sabrang Rt. 003 Rw. 001, Kel. Cisereh, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	187.220.000,00	600/SPK.1340.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1765/SULIHARA/11/2025	9.361.000,00	180 Hari	5 November 2025	04 Mei 2026	5	
		1280	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Jeungjing, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang	188.270.000,00	600/SPK.0314.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1781/SULIHARA/11/2025	9.413.500,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		1281	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Kp. Dangdang Rt. 001 Rw. 001, Ds. Dangdang, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang	187.980.000,00	600/SPK.0616.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1876/SULIHARA/11/2025	9.399.000,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1282	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Malang Rt. 002 Rw. 005, Ds. Gempol Sari, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.0771.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1772/SULIHARA/11/2025	9.378.500,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1283	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Grand Permata Rt. 003 Rw. 010, Ds. Pisanan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.520.000,00	600/SPK.0773.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1890/SULIHARA/11/2025	9.426.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1284	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Karangjengkeng, Ds. Rancaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang	189.400.000,00	600/SPK.1236.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1858/SULIHARA/11/2025	9.470.000,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		1285	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jln. Stadion Badak Perum Saruni Indah Resident Rt. 007 Rw. 009, Kel. Saruni, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	190.000.000,00	600/SPK.1145.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1857/SULIHARA/11/2025	9.500.000,00	180 Hari	23 october 2025	21 April 2026	5	
		1286	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Jl. Utama Binong Permai Block F22/F29 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0142.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1802/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	29 october 2025	27 April 2026	5	
		1287	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perumahan Griya Reang Indah Rw. 010, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.510.000,00	600/SPK.1165.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1860/SULIHARA/11/2025	9.475.500,00	180 Hari	17 November 2025	16 Mei 2026	5	
		1288	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Rawalini Rt. 001 Rw. 007, Ds. Teluknaga, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0769.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1771/SULIHARA/11/2025	9.384.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	

		1289	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.890.000,00	600/SPK.0223.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1804/SULIHARA/11/2025	9.394.500,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		1290	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 004 Rw. 004, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.850.000,00	600/SPK.0221.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1814/SULIHARA/11/2025	9.392.500,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		1291	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cikareo Rt. 001 Rw. 005, Ds. Girimukti, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	189.470.000,00	600/SPK.0992.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1852/SULIHARA/11/2025	9.473.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		1292	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Jatake, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	189.430.000,00	600/SPK.0975.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1853/SULIHARA/11/2025	9.471.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		1293	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebon Kecap Rt. 004 Rw. 013, Ds. Kampung Besar, Kec. Teluknaga, Kab. Kab. Tangerang	188.460.000,00	600/SPK.0119.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1838/SULIHARA/11/2025	9.423.000,00	180 Hari	24 November 2025	23 Mei 2026	5	
		1294	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cigunung Rt. 006 Rw. 003, Ds. Ciburuy, Kec. Curingbung, Kab. Lebak	189.210.000,00	600/SPK.1126.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1840/SULIHARA/11/2025	9.460.500,00	180 Hari	11 November 2025	10 Mei 2026	5	
		1295	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kadubincaring Rt. 009 Rw. 004, Ds. Kadubale, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.880.000,00	600/SPK.1942.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2382/SULIHARA/12/2025	9.494.000,00	180 Hari	1 december 2025	30 Mei 2026	5	
		1296	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 006, Ds. Kupahandap, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.980.000,00	600/SPK.1946.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2385/SULIHARA/12/2025	9.499.000,00	180 Hari	1 december 2025	30 Mei 2026	5	
		1297	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Lembur Sawah Rt. 001 Rw. 001, Ds. Mandalasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.840.000,00	600/SPK.1945.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2384/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	1 december 2025	30 Mei 2026	5	
		1298	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Heas Kebon Kiseh Rt. 009 Rw. 004, Ds. Pasir Awi, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.670.000,00	600/SPK.1943.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2383/SULIHARA/12/2025	9.483.500,00	180 Hari	1 december 2025	30 Mei 2026	5	
		1299	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 004, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.1662.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1966/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1300	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.1663.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1967/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1301	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Bojong Nangka, Kec. Petir, Kab. Serang	189.620.000,00	600/SPK.1780.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2117/SULIHARA/12/2025	9.481.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1302	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Ds. Mekar Jaya, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.840.000,00	600/SPK.1972.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1979/SULIHARA/12/2025	9.392.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1303	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.1974.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1978/SULIHARA/12/2025	9.396.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1304	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jami Rw. 004, Ds. Tejamari, Kec. Baros, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1998.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2034/SULIHARA/12/2025	9.467.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1305	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Kadu Hileud Rt. 004 Rw. 002, Ds. Tejamari, Kec. Baros, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1679.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2068/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1306	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 001, Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang	188.450.000,00	600/SPK.1433.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1953/SULIHARA/12/2025	9.422.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1307	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1432.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2093/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1308	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Sabrang Rw. 004, Ds. Kadugene, Kec. Petir, Kab. Serang	187.970.000,00	600/SPK.2040.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1965/SULIHARA/12/2025	9.398.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1309	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Dungkuk Rt. 009 Rw. 003, Ds. Cirinten, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.220.000,00	600/SPK.1725.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2141/SULIHARA/12/2025	9.461.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1310	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.720.000,00	600/SPK.1694.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2059/SULIHARA/12/2025	9.386.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1311	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003-Rw. 004, Ds. Sukandah, Kec. Baros, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.1368.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2027/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	

		1312	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001-Rw. 004, Ds. Malanggah, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.510.000,00	600/SPK.1354.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2072/SULIHARA/12/2025	9.475.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1313	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cidapad, Ds. Sukatani, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.1476.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1971/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1314	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciapus, Ds. Cipeucang, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.370.000,00	600/SPK.1478.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1969/SULIHARA/12/2025	9.468.500,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1315	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukasari, Ds. Sukatani, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.320.000,00	600/SPK.1477.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1970/SULIHARA/12/2025	9.466.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1316	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Caringin Kurung, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.960.000,00	600/SPK.1944.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2035/SULIHARA/12/2025	9.498.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1317	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cirarab Rw. 002, Ds. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.740.000,00	600/SPK.1978.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2103/SULIHARA/12/2025	9.437.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1318	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sikupa Rw. 006, Ds. Tamansari, Kec. Baros, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.2006.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2277/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1319	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Villa Pelamunan Asri Rw. 001, Ds. Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.1817.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2183/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1320	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Pamulang Permai 3 Rt. 001 Rw. 010 Jalan Arah Menuju Smpn 4, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.430.000,00	600/SPK.1520.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2272/SULIHARA/12/2025	9.421.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1321	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Nusaloka Sektor 14.4 Blok 2 Rw. 005, Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.330.000,00	600/SPK.1933.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2233/SULIHARA/12/2025	9.416.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1322	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	188.380.000,00	600/SPK.1937.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2235/SULIHARA/12/2025	9.419.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1323	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 011, Kel. Sindangsari, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1603.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2107/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1324	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Dengung Timur Rt. 003 Rw. 001, Ds. Sindangmulya, Kec. Maja, Kab. Lebak	189.770.000,00	600/SPK.1513.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2112/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1325	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Ujung Jl. Citra Gading Rt. 003 - 005 Rw. 006, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.920.000,00	600/SPK.1873.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2211/SULIHARA/12/2025	9.496.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1326	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kusambi Cawang Rw. 001, Ds. Kendayakan, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.480.000,00	600/SPK.1601.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2254/SULIHARA/12/2025	9.474.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1327	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Ds. Sindangmandi, Kec. Baros, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1739.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2123/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1328	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 004, Ds. Koper, Kec. Cikande, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1732.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2137/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1329	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001, Ds. Petir, Kec. Petir, Kab. Serang	189.880.000,00	600/SPK.1733.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2128/SULIHARA/12/2025	9.494.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1330	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 001 Kp. Jambu Karya, Ds. Jambu Karya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.690.000,00	600/SPK.1655.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2127/SULIHARA/12/2025	9.434.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1331	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ds. Gembor, Kec. Binuang, Kab. Serang	189.700.000,00	600/SPK.1602.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2253/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1332	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Golat Rt. 005 Rw. 001, Ds. Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1458.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2711/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1333	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Bumi Pusptek Asri Rw. 001, Ds. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.910.000,00	600/SPK.1415.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2162/SULIHARA/12/2025	9.395.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	

		1334	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rt. 002 Rw. 002, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1954.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1973/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1335	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001-002, Ds. Cisaat, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.280.000,00	600/SPK.1791.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2155/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1336	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 007, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1958.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2270/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1337	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rt 004 Rw 008, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.720.000,00	600/SPK.1957.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2269/SULIHARA/12/2025	9.386.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1338	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 002, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.470.000,00	600/SPK.1604.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2202/SULIHARA/12/2025	9.423.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1339	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Perumahan Taman Adiyasa Rw. 006, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.2053.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2201/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1340	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Jagaraksa Rw. 003, Kel. Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang	189.600.000,00	600/SPK.1869.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2368/SULIHARA/12/2025	9.480.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1341	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 002, Ds. Bojong Pandan, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.520.000,00	600/SPK.1357.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2242/SULIHARA/12/2025	9.476.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1342	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Tunjung Teja Rw. 001, Ds. Tunjung Teja, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.770.000,00	600/SPK.1743.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2448/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1343	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sanding Sakola Rw. 001, Ds. Sanding, Kec. Petir, Kab. Serang	189.810.000,00	600/SPK.1744.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2449/SULIHARA/12/2025	9.490.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1344	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Wudulan Rw. 007, Ds. Pasirbuyut, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.560.000,00	600/SPK.1564.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2281/SULIHARA/12/2025	9.478.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1345	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Ciekek Paburan Rw. 013, Kel. Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.300.000,00	600/SPK.2025.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2468/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1346	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Sukatani Rw. 003, Ds. Ciputri, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.280.000,00	600/SPK.2030.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2451/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1347	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Bci Pakuluran, Kel. Pakuluran, Kec. Kroncong, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.2033.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2452/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1348	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001-Rw. 004, Ds. Situterate, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.460.000,00	600/SPK.1782.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2311/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1349	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rt. 004 Rw. 003, Ds. Rancateureup, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.510.000,00	600/SPK.1573.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2453/SULIHARA/12/2025	9.475.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1350	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 010, Kel. Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.1435.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2362/SULIHARA/12/2025	9.378.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1351	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 005, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	188.230.000,00	600/SPK.1439.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2363/SULIHARA/12/2025	9.411.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1352	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cibitung Rw. 014, Ds. Cijengkol, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak	189.810.000,00	600/SPK.1847.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2392/SULIHARA/12/2025	9.490.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1353	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Bumi Puspitek Asri Rw. 002, Ds. Cicalengka, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.600.000,00	600/SPK.1416.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2163/SULIHARA/12/2025	9.380.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1354	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 002, Ds. Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.730.000,00	600/SPK.2045.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2662/SULIHARA/12/2025	9.386.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1355	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Gajah Barong Kp. Munjul Rt. 001 Rw. 003, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.530.000,00	600/SPK.1884.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2284/SULIHARA/12/2025	9.426.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1356	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 003, Ds. Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.850.000,00	600/SPK.1427.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2623/SULIHARA/12/2025	9.392.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1357	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Padarincang Masjid Rw. 001, Ds. Padarincang, Kec. Padarincang, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1758.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2258/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	

		1358	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Panggelangan Masjid Rt. 002 Rw. 002, Ds. Karoya, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.330.000,00	600/SPK.1720.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2695/SULIHARA/12/2025	9.466.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1359	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 005, Ds. Sukamanah, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.440.000,00	600/SPK.2038.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2415/SULIHARA/12/2025	9.472.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1360	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Bengala Neglasari Rw. 013, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	190.070.000,00	600/SPK.1776.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2588/SULIHARA/12/2025	9.503.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1361	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Gintung Rw. 003, Ds. Gintung, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang	189.130.000,00	600/SPK.1546.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0503/SULIHARA/09/2286	9.456.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1362	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cjengkol Rt. 003 Rw. 001, Ds. Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak	189.230.000,00	600/SPK.1724.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2693/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1363	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Waringin Rt. 002 Rw. 003, Ds. Rawasari, Kec. Cislata, Kab. Pandeglang	189.810.000,00	600/SPK.1634.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2541/SULIHARA/12/2025	9.490.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1364	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Griya Serdang Indah Rw. 007, Ds. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.330.000,00	600/SPK.1641.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2485/SULIHARA/12/2025	9.466.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1365	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rt. 002 Rw. 003, Ds. Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.170.000,00	600/SPK.1480.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2483/SULIHARA/12/2025	9.458.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1366	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cinangka Rt. 014 Rw. 002, Ds. Cibarani, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.290.000,00	600/SPK.1722.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2694/SULIHARA/12/2025	9.464.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1367	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Bangkonol Rt. 018 Rw. 006, Ds. Saketi, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.350.000,00	600/SPK.1609.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2489/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1368	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 008, Kel. Lopang, Kec. Serang, Kota Serang	188.520.000,00	600/SPK.1814.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2492/SULIHARA/12/2025	9.426.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1369	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 006, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang	187.310.000,00	600/SPK.1568.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2186/SULIHARA/12/2025	9.365.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1370	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Gajah Barong Kp. Munjul Rw. 003, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.420.000,00	600/SPK.1882.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2283/SULIHARA/12/2025	9.421.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1371	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Golok Rt. 014 Rw. 004, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.360.000,00	600/SPK.1903.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2464/SULIHARA/12/2025	9.468.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1372	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kavling Brimob Rt. 002 Rw. 009, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang	189.820.000,00	600/SPK.1763.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2589/SULIHARA/12/2025	9.491.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1373	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002, Ds. Talagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.430.000,00	600/SPK.1472.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2604/SULIHARA/12/2025	9.421.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1374	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Bukit Tiara Rw. 004, Ds. Pasirjaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.830.000,00	600/SPK.1648.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2605/SULIHARA/12/2025	9.391.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1375	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Parung Rw. 001, Ds. Interjaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.140.000,00	600/SPK.1835.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2544/SULIHARA/12/2025	9.457.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1376	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Kavling Brimob Rt. 001 Rw. 009, Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang	189.700.000,00	600/SPK.1762.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2591/SULIHARA/12/2025	9.485.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1377	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Jakung Pasar Rw. 002, Kel. Cilogwong, Kec. Taktakan, Kota Serang	190.020.000,00	600/SPK.2002.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2590/SULIHARA/12/2025	9.501.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1378	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Bojong Catang, Kec. Turjunng Teja, Kab. Serang	189.530.000,00	600/SPK.1355.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2319/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1379	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Pasir Gadung - Pasir Jaya Rt. 001 Rw. 002, Ds. Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.400.000,00	600/SPK.1929.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2700/SULIHARA/12/2025	9.420.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1380	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Sepang Sempu Rw. 010, Kel. Sepang, Kec. Taktakan, Kota Serang	190.110.000,00	600/SPK.1771.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2592/SULIHARA/12/2025	9.505.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	

		1381	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kulung Baya Rt. 006 Rw. 002, Ds. Sidoko, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang	189.070.000,00	600/SPK.1853.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2629/SULIHARA/12/2025	9.453.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1382	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 005 - 008, Ds. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.530.000,00	600/SPK.2055.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2543/SULIHARA/12/2025	9.476.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1383	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 006, Ds. Cikuya, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.490.000,00	600/SPK.1412.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2346/SULIHARA/12/2025	9.424.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1384	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sukatani Rt. 003 - Rt. 004 Rw. 005, Ds. Tegal Angus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.470.000,00	600/SPK.0807.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2322/SULIHARSA/12/2025	9.423.500,00	180 Hari	18 Desember 2025	#VALUE!	5	
		1385	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Beberan Rw. 003, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.840.000,00	600/SPK.1769.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2587/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1386	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Griya Ciracas Indah Rw. 012, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	190.070.000,00	600/SPK.1773.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2686/SULIHARA/09/2025	9.503.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1387	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Jengkol Rt. 004 Rw. 004, Ds. Bojan Wetan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1459.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2750/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1388	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Cangkeuteuk Rt. 001 Rw. 003, Ds. Padasuka, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.210.000,00	600/SPK.1561.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2708/SULIHARA/12/2025	9.460.500,00	180 Hari	19 Desemer 2025	#VALUE!	5	
		1389	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Tarogong Rt. 002 Rw. 001, Ds. Margasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1562.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2707/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1390	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Ciandur Rt. 002, Rw. 001, Ds. Ciandur, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.510.000,00	600/SPK.1670.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2488/SULIHARA/12/2025	9.475.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1391	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Legok Dalam Rw. 002, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.830.000,00	600/SPK.1768.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2685/SULIHARA/12/2025	9.491.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1392	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kebon Kopi Rw. 010, Ds. Pangkalan, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.330.000,00	600/SPK.1387.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2510/SULIHARA	9.416.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1393	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Cidap Rt. 004 Rw. 003, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	190.030.000,00	600/SPK.1504.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2664/SULIHARA/2025	9.501.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1394	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Perummas 3 Rw. 005, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.710.000,00	600/SPK.1607.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2584/SULIHARA/12/2025	9.435.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1395	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 003, Ds. Bantar Panjang, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.350.000,00	600/SPK.1786.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2582/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1396	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Rw. 006, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.2042.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2014/SULIHARA/12/2025	9.387.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1397	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Babalan Rt. 004 Rw. 004, Ds. Cisimeut, Kec. Lewidamar, Kab. Lebak	189.500.000,00	600/SPK.1445.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2223/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1398	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Sukamaju Rw. 006, Ds. Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.1393.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2305/SULIHARA/12/025	9.378.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1399	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kadubereum Lor Rw. 007, Ds. Kadubereum, Kec. Padarincang, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1757.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2598/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1400	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kubang Hilir Rw. 003, Ds. Sukarena, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1752.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2704/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1401	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Ds. Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.150.000,00	600/SPK.1366.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2571/SULIHARA/12/2025	9.457.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1402	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Giliraya Lebak Rw. 005, Ds. Pasireunih, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.870.000,00	600/SPK.1501.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2709/SULIHARA/12/2025	9.493.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1403	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Komp. Ciputat Indah Rw. 010, Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang	189.280.000,00	600/SPK.1988.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2680/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1404	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Jungkel Rt. 002 Rw. 001, Ds. Tanjakan Mekar, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1709.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2669/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	

		1405	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Rw. 003, Ds. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	187.790.000,00	600/SPK.1970.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2608/SULIHARA/12/2025	9.389.500,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1406	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Babakan Asen Rt. 004 Rw. 005, Ds. Babakan Asen, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.1396.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2477/SULIHARA/09/2025	9.378.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1407	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Kp. Besar Rw. 002, Ds. Kampung Besar, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.700.000,00	600/SPK.1386.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2478/SULIHARA/12/2025	9.385.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1408	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Seloyong Rt. 001 Rw. 006, Ds. Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.460.000,00	600/SPK.1391.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2754/SULIHARA/12/2025	9.423.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1409	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Jl. Nyimas Melati Rt. 001 Rw. 001, Ds. Pondok Kelor, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	188.730.000,00	600/SPK.1452.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2661/SULIHARA/12/2025	9.436.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1410	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 001, Ds. Gandayasa, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.060.000,00	600/SPK.1790.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2580/SULIHARA/12/2025	9.453.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1411	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Melayu Timur Rw. 016, Ds. Kampung Melayu Timur, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.1400.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2619/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1412	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Drainase Lingkungan] Jl. Re Martadinata Gg. Dukuh Rw. 004, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.180.000,00	600/SPK.2004.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2636/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1413	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 005, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	188.030.000,00	600/SPK.1556.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2214/SULIHARA/12/2025	9.401.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1414	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rt. 003 Rw. 004, Ds. Buaran Bambu, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.060.000,00	600/SPK.1379.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1379/SULIHARA/09/2025	9.403.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1415	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 002, Ds. Selaraja, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	190.030.000,00	600/SPK.2057.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2649/SULIHARA/12/2025	9.501.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1416	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kadu Kolecer Blok Lame Gede, Ds. Babakan Lor, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang	189.610.000,00	600/SPK.1627.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2706/SULIHARA/12/2025	9.480.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1417	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Komplek Pepabri Griya Purna Indah Rt. 003-004 Rw. 006, Ds. Bojong Leles, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.760.000,00	600/SPK.1800.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2677/SULIHARA/12/2025	9.488.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1418	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cigintung Rt. 001 Rw. 003, Ds. Sukamanah, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	190.030.000,00	600/SPK.1631.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2877/SULIHARA/12/2025	9.501.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1419	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Banyuasih Rt. 001 Rw. 003, Ds. Banyumundu, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.910.000,00	600/SPK.1632.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2876/SULIHARA/12/2025	9.495.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1420	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kadu Logak Rw. 012, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.070.000,00	600/SPK.1471.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2850/SULIHARA/12/2025	9.503.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1421	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kadu Tanggai Rw. 004, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.130.000,00	600/SPK.1649.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2851/SULIHARA/12/2025	9.506.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1422	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Kadu Badak Rt. 005 Rw. 002, Ds. Babakanlor, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang	190.080.000,00	600/SPK.1625.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2808/SULIHARA/12/2025	9.504.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1423	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cidongke Rt. 003 Rw. 002, Ds. Talagasari, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.830.000,00	600/SPK.1622.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2807/SULIHARA/12/2025	9.491.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1424	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Kp. Cibeber, Ds. Mekarsari, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.410.000,00	600/SPK.1543.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2665/SULIHARA/12/2025	9.470.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1425	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Rw. 005, Ds. Banjarsari, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.2035.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2781/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1426	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman [Jalan Lingkungan] Link. Legok Assalem Rw. 011, Kel. Drangong, Kec. Takakan, Kota Serang	189.730.000,00	600/SPK.1770.UPPSUI/Perkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2823/SULIHARA/12/2025	9.486.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	

		1427	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Kramat Rt. 001 Rw. 005, Ds. Sukawali, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.510.000,00	600/SPK.1451.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2893/SULIHARA/12/2025	9.425.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1428	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Kuleuk Legut Rw. 004, Ds. Siketug, Kec. Ciomas, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1761.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2705/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1429	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Mangkunegara, Kec. Bojonegara, Kab. Serang	298.450.000,00	600/SPK.2064.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2835/SULIHARA/12/2025	14.922.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1430	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 002-004, Ds. Mander, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.920.000,00	600/SPK.1788.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2821/SULIHARA/12/2025	9.496.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1431	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Legok Sukameju Rt. 008 Rw. 002, Ds. Legok Sukameju, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	188.560.000,00	600/SPK.1596.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2715/SULIHARA/12/2025	9.428.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1432	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Swadaya Rt. 003 Rw. 004, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1928.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2864/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1433	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Rw. 004, Kel. Balaraja, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	188.800.000,00	600/SPK.1517.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2909/SULIHARA/12/2025	9.440.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1434	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Ling. Bengala Tengah Masjid Rw. 011, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang	189.570.000,00	600/SPK.1993.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2887/SULIHARA/12/2025	9.478.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1435	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Link. Nancang Cilik Rt. 003 Rw. 003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.640.000,00	600/SPK.1877.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2828/SULIHARA/12/2025	9.482.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1436	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kp. Bolang Bunut Rw. 001, Ds. Teras Bendung, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	188.680.000,00	600/SPK.1680.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2840/SULIHARA/12/2025	9.434.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1437	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Lingkungan Rw. 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	187.840.000,00	600/SPK.1496.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2931/SULIHARA/12/2025	9.392.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1438	Komplek Bop 2 Rt. 034 Rw. 005, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.010.000,00	600/SPK.1321.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0524/SULIHARA/09/2025	9.450.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1439	Kampung Pakem Kidul Rt. 009 Rw. 003, Ds. Petir, Kec. Petir, Kab. Serang	189.650.000,00	600/SPK.0917.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0540/SULIHARA/09/2025	9.482.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1440	Griya Permai Rt. 004 Rw. 006, Ds. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.0553.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0556/SULIHARA/09/2025	9.405.500,00	180 Hari	2 September 2025	01 Maret 2026	5	
		1441	Kp. Sanding Nyomplong Rt. 001 Rw. 002, Ds. Sanding, Kec. Petir, Kab. Serang	189.770.000,00	600/SPK.0011.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0531/SULIHARA/09/2025	9.488.500,00	180 Hari	5 September 2025	04 Maret 2026	5	
		1442	Rw. 001, Kel. Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.410.000,00	600/SPK.0305.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0591/SULIHARA/09/2025	9.420.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1443	Perumahan Banten Indah Permai Rw. 027, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	379.840.000,00	600/SPK.0650.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0513/SULIHARA/09/2025	18.992.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1444	Perumahan Taman Banten Lestari Rw. 026 - 022, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	379.830.000,00	600/SPK.0658.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0511/SULIHARA/09/2025	18.991.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1445	Kp. Jambu Rt. 016 Rw. 004, Ds. Bojong Pandan, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.770.000,00	600/SPK.0021.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0532/SULIHARA/09/2025	9.488.500,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1446	Kp. Bengras Rt. 005 Rw. 003, Ds. Sindang Mandi, Kec. Anyar, Kab. Serang	189.520.000,00	600/SPK.0266.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0706/SULIHARA/09/2025	9.476.000,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		1447	Kp. Katupang Kumbili Rt. 009 Rw. 004, Ds. Cilayang, Kec. Cikeusil, Kab. Serang	189.810.000,00	600/SPK.0017.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0536/SULIHARA/09/2025	9.490.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1448	Kp. Cikiara Rw. 006, Ds. Bulakan, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.610.000,00	600/SPK.0518.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0722/SULIHARA/09/2025	9.480.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1449	Kp. Sebelah Rw. 004, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.860.000,00	600/SPK.0521.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0825/SULIHARA/09/2025	9.493.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1450	Rw. 002, Ds. Gembor Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.900.000,00	600/SPK.0625.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0606/SULIHARA/09/2025	9.495.000,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1451	Jl. Puma Bakti Rw. 003, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	188.450.000,00	600/SPK.0682.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0586/SULIHARA/09/2025	9.422.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1452	Rt. 001 Rw. 004, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	376.110.000,00	600/SPK.0188.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0662/SULIHARA/09/2025	18.805.500,00	180 Hari	1 September 2025	28 Februari 2026	5	
		1453	Perumahan Kramat Permai, Ds. Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	379.240.000,00	600/SPK.0871.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0666/SULIHARA/09/2025	18.962.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1454	Nusaloka Sektor 14.5 Rt. 004 Rw. 007, Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	378.340.000,00	600/SPK.0933.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0719/SULIHARA/09/2025	18.917.000,00	180 Hari	26 August 2025	22 Februari 2026	5	
		1455	Rw. 003, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1120.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0577/SULIHARA/09/2025	9.469.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1456	Kp. Calincing Rt. 002 Rw. 005, Ds. Kopo, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.0246.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0737/SULIHARA/09/2025	9.479.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	

		1457	Kp. Pasir Laban, Ds. Teras, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.670.000,00	600/SPK.0261.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0734/SULIHARA/09/2025	9.483.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1458	Kp. Sarongge Rt. 007 Rw. 002, Ds. Cipeundeuy, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.0587.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0564/SULIHARA/09/2025	9.472.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1459	Kp. Lebak Picung Rt. 014 Rw. 004, Ds. Margatirta, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.230.000,00	600/SPK.1271.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0507/SULIHARA/09/2025	9.461.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1460	Kp. Jidol Rt. 004 Rw. 002, Ds. Lebakwana, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.410.000,00	600/SPK.1215.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0671/SULIHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	12 September 2055	10 Maret 2056	5	
		1461	Rw. 001, Ds. Padasuka , Kec. Petir, Kab. Serang	189.850.000,00	600/SPK.0622.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0783/SULIHARA/09/2025	9.492.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1462	Kp. Cibitung Utara Rt. 011 Rw. 004, Ds. Margatirta, Kec. Cimarga, Kab. Lebak	189.490.000,00	600/SPK.1272.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0508/SULIHARA/09/2025	9.474.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1463	Rw. 002, Ds. Kibin, Kec. Kibin, Kab. Serang	379.610.000,00	600/SPK.0621.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0803/SULIHARA/09/2025	18.980.500,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1464	Perumahan Kepuren Residen Rt. 013-015 Rw. 003, Kel. Kepuren, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.410.000,00	600/SPK.1327.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0739/SULIHARA/09/2025	9.470.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1465	Rw. 001, Ds. Ranca lyuh, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	376.620.000,00	600/SPK.0288.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0700/SULIHARA/09/2025	18.831.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1466	Kp. Sareweh Timur Rw. 003, Ds. Karangnunggal, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	379.280.000,00	600/SPK.0708.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1125/SULIHARA/10/2025	18.964.000,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1467	Kp. Korelet Rt. 001 Rw. 003, Ds. Ranca Kalapa, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.0565.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0582/SULIHARA/09/2025	9.396.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1468	Rw. 003, Kel. Sumur Pacing, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	188.460.000,00	600/SPK.0673.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0583/SULIHARA/09/2025	9.423.000,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1469	Rw. 016, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.700.000,00	600/SPK.0675.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0589/SULIHARA/09/2025	9.435.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1470	Kp. Pasir Kuntul Rt. 007 Rw. 003, Ds. Cisangu, Kec. Cibeidak, Kab. Lebak	189.790.000,00	600/SPK.1118.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0868/SULIHARA/09/2025	9.489.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1471	Kp. Cikuda Rt. 005 Rw. 001, Kel. Cisauk, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.0578.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0581/SULIHARA/09/2025	9.384.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1472	Komp. Taman Lopang Indah Rw. 013, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	379.730.000,00	600/SPK.0665.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0514/SULIHARA/09/2025	18.986.500,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1473	Kp. Lebak Koneng Rt. 003 Rw. 005, Ds. Cireundeuy, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.510.000,00	600/SPK.0847.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0816/SULIHARA/09/2025	9.475.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1474	Kp. Pabuaran Elor Rt. 002 Rw. 001, Ds. Kemuning, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.0027.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0596/SULIHARA/09/2025	9.475.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1475	Kp. Geredug Pintu Rt. 001 Rw. 001, Ds. Gabus, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.960.000,00	600/SPK.0036.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0539/SULIHARA/09/2025	9.498.000,00	180 Hari	29 August 2025	25 Februari 2026	5	
		1476	Kp. Cikaung Rt. 002 Rw. 006, Ds. Lebak, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang	190.190.000,00	600/SPK.0420.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1076/SULIHARA/10/2025	9.509.500,00	180 Hari	1 September 2025	28 Februari 2026	5	
		1477	Kp. Pasir Putri, Kel. Pagadungan, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1033.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1057/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1478	Kp. Kadu Kupa, Ds. Koranj, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.540.000,00	600/SPK.1035.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1058/SULIHARA/09/2025	9.477.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1479	Kp. Cipicung Rw. 005, Ds. Karyasari, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1074.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0743/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1480	Kp. Cibecet Rt. 010 Rw. 006, Ds. Cimaung, Kec. Cikeusal, Kab. Serang	189.130.000,00	600/SPK.1202.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0843/SULIHARA/09/2025	9.456.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1481	Kp. Padurung Rt. 004 Rw. 001, Ds. Lebak Sangka, Kec. Lebakgedong, Kab. Lebak	189.980.000,00	600/SPK.1258.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0716/SULIHARA/09/2025	9.499.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1482	Rw. 004, Ds. Bojongkamal, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.0295.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0769/SULIHARA/09/2025	9.413.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1483	Kp. Baru Dalem Rt. 002 Rw. 010, Ds. Cikolelet, Kec. Cinangka, Kab. Serang	188.830.000,00	600/SPK.1192.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0759/SULIHARA/09/2025	9.441.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1484	Kp. Cikaso Rt. 002 Rw. 002, Ds. Lebak, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang	189.440.000,00	600/SPK.1249.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0804/SULIHARA/09/2025	9.472.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1485	Rw. 003, Ds. Parakan, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.630.000,00	600/SPK.0635.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0901/SULIHARA/09/2025	9.481.500,00	180 Hari	12 September 2025	11 Maret 2026	5	
		1486	Rw. 003, Ds. Sukadana, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.660.000,00	600/SPK.0628.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0904/SULIHARA/09/2025	9.483.000,00	180 Hari	28 August 2025	24 Februari 2026	5	
		1487	Rw. 007, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.660.000,00	600/SPK.0101.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0824/SULIHARA/09/2025	9.383.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1488	Kp. Kosambi 1 Rw. 003, Ds. Karang Suraga, Kec. Cinangka, Kab. Serang	189.400.000,00	600/SPK.0534.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1001/SULIHARA/09/2025	9.470.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1489	Jl. Swadaya Kp. Parakan Rt. 004 Rw. 008, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.830.000,00	600/SPK.0932.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0678/SULIHARA/09/2025	9.391.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1490	Kp. Pondok Rt. 003 Rw. 004, Ds. Sindang Panon , Kec. Sindangjaya, Kab. Tangerang	188.700.000,00	600/SPK.0134.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0775/SULIHARA/09/2025	9.435.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1491	Rt. 004 Rw. 005, Ds. Sindang Sono, Kec. Sindangjaya, Kab. Kab. Tangerang	188.600.000,00	600/SPK.0140.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0774/SULIHARA/09/2025	9.430.000,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	

		1492	Kp. Pabuaran Rt. 001 Rw. 001, Kel. Kaduagung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.550.000,00	600/SPK.0303.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0787/SULIHARA/09/2025	9.427.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1493	Griya Permai Rt. 006 Rw. 006, Ds. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.000.000,00	600/SPK.0554.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0752/SULIHARA/09/2025	9.400.000,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1494	Legok Indah Rt. 003 Rw. 012, Kel. Babakan, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.570.000,00	600/SPK.0557.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0754/SULIHARA/09/2025	9.378.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1495	Griya Asri Bsd City Rw. 007, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.0936.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0680/SULIHARA/09/2025	9.387.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1496	Rw. 009, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0194.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0942/SULIHARA/09/2025	9.398.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1497	Rw. 007, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0196.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0943/SULIHARA/09/2025	9.398.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1498	Rw. 002, Ds. Penggalang, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.690.000,00	600/SPK.0623.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0903/SULIHARA/09/2025	9.484.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1499	Kp. Peuntas Rt. 001 Rw. 005, Ds. Kupahandap, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	189.360.000,00	600/SPK.1188.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0986/SULIHARA/09/2025	9.468.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1500	Kp. Rawacana Rw. 003, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.0679.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0962/SULIHARA/09/2025	9.410.000,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1501	Kp. Laksana Rt. 002 Rw. 001, Ds. Laksana, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.230.000,00	600/SPK.0779.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1054/SULIHARA/09/2025	9.411.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1502	Kp. Kelepu Rt. 005 Rw. 002, Ds. Cirinten, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	379.230.000,00	600/SPK.0716.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0797/SULIHARA/09/2025	18.961.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1503	Rw. 004, Ds. Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.560.000,00	600/SPK.0294.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0992/SULIHARA/09/2025	9.428.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1504	Rw. 003, Ds. Babat, Kec. Legok, Kab. Tangerang	188.020.000,00	600/SPK.0296.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1382/SULIHARA/10/2025	9.401.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1505	Kp. Pasir Heulang Rt. 010 Rw. 004, Ds. Kramatmanik, Kec. Angsana, Kab. Pandeglang	190.050.000,00	600/SPK.0365.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1242/SULIHARA/10/2025	9.502.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1506	Kp. Cipogor, Ds. Alaswangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	189.360.000,00	600/SPK.1108.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0983/SULIHARA/09/2025	9.468.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1507	Kp. Ciharang Rt. 005 Rw. 003, Ds. Ciharangjaya, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.0988.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1217/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	9 September 2025	08 Maret 2026	5	
		1508	Kp. Cinayong Rt. 005 Rw. 001, Ds. Malangah, Kec. Turjunga Teja, Kab. Serang	189.810.000,00	600/SPK.0020.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0597/SULIHARA/09/2025	9.490.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1509	Kp. Tanjungan Rt. 002 Rw. 001, Ds. Pamong, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.720.000,00	600/SPK.0064.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0959/SULIHARA/09/2025	9.486.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1510	Kp. Sidungkul Rt. 027 Rw. 014, Ds. Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	187.700.000,00	600/SPK.0768.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0938/SULIHARA/09/2025	9.385.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1511	Rw. 009, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.0883.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0851/SULIHARA/09/2025	9.407.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1512	Rw. 006, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.070.000,00	600/SPK.0888.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0850/SULIHARA/09/2025	9.403.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1513	Rt. 029 Rw. 005, Ds. Ranjeng, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.1014.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0952/SULIHARA/09/2025	9.479.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1514	Kp. Cikasungka Rw. 004, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.400.000,00	600/SPK.1101.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1027/SULIHARA/09/2025	9.420.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1515	Kp. Cikauang (Tajur Malang) Rw. 005, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1138.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1064/SULIHARA/09/2025	9.473.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1516	Kp. Kata Manik Rt. 004 Rw. 004, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.1220.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1068/SULIHARA/09/2025	9.473.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1517	Kp. Pasir Waru Rw. 002, Kel. Babakan Kalanganyar, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.450.000,00	600/SPK.0238.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1059/SULIHARA/09/2025	9.472.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	
		1518	Kp. Babakan Cibaliung Rw. 006, Ds. Cibaliung, Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang	189.350.000,00	600/SPK.0783.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1286/SULIHARA/10/2025	9.467.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1519	Perum Puri Anggrek Rw. 008, Kel. Terith, Kec. Walantaka, Kota Serang	379.750.000,00	600/SPK.0660.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1018/SULIHARA/09/2025	18.987.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1520	Cluster Mutiara Tigaraksa 2, Ds. Jambe, Kec. Jambe, Kab. Tangerang	188.270.000,00	600/SPK.0333.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0702/SULIHARA/09/2025	9.413.500,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1521	Kp. Cibadak Tegal Rt. 002 Rw. 001, Ds. Sukanagara, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.650.000,00	600/SPK.0562.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1049/SULIHARA/09/2025	9.382.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1522	Rt. 004 Rw. 001, Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0677.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1092/SULIHARA/09/2025	9.384.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1523	Jl. Jati No. 19 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	187.820.000,00	600/SPK.0935.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0679/SULIHARA/09/2025	9.391.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1524	Madrasah Nurul Islam Sempur Rt. 003 Rw. 003, Ds. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.1107.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0951/SULIHARA/09/2025	9.405.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1525	Kp. Bedeng Rt. 009 Rw. 006, Ds. Rawasari, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	190.330.000,00	600/SPK.0404.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0922/SULIHARA/09/2025	9.516.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1526	Kp. Salabentar Rt. 002 Rw. 006, Kel. Cilaja, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.390.000,00	600/SPK.1042.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0980/SULIHARA/09/2025	9.469.500,00	180 Hari	4 September 2025	03 Maret 2026	5	

		1527	Rw. 001 Ds. Renged, Ds. Renged, Kec. Kresek, Kab. Kab. Tangerang	188.360.000,00	600/SPK.0131.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0997/SULIHARA/09/2025	9.418.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1528	Kp. Ragas Rt. 004 Rw. 001, Ds. Purwadadi, Kec. Lebak Wangi, Kab. Serang	187.940.000,00	600/SPK.1280.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1257/SULIHARA/10/2025	9.397.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1529	Kp. Suradita Rt. 011 Rw. 005, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	187.980.000,00	600/SPK.0543.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1107/SULIHARA/10/2025	9.399.000,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1530	Medang Lestari Rt. 007 Rw. 009, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0559.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1109/SULIHARA/10/2025	9.402.000,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1531	Rw. 002, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	188.490.000,00	600/SPK.0103.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1045/SULIHARA/09/2025	9.424.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1532	Kp. Ciharang Hilir Rt. 007 Rw. 002, Ds. Pasanggrahan, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.190.000,00	600/SPK.0969.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1162/SULIHARA/10/2025	9.459.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1533	Rw. 001, Ds. Bumiaya, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.140.000,00	600/SPK.1348.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1250/SULIHARA/10/2025	9.457.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1534	Perumahan Palem Semi Jl. Palem 7 Rw. 019, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.450.000,00	600/SPK.0259.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1155/SULIHARA/10/2025	9.422.500,00	180 Hari	1 october 2025	30 Maret 2026	5	
		1535	Kp. Salahaur Rt. 04 Rw. 011, Kel. Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.350.000,00	600/SPK.0713.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0953/SULIHARA/09/2025	9.467.500,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1536	Rw. 003, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.680.000,00	600/SPK.0110.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1171/SULIHARA/10/2025	9.434.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1537	Rw. 006, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.070.000,00	600/SPK.0224.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1128/SULIHARA/10/2025	9.403.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1538	Rw. 013, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.190.000,00	600/SPK.0225.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1129/SULIHARA/10/2025	9.359.500,00	180 Hari	22 September 2025	21 Maret 2026	5	
		1539	Kp. Kadu Gajah Rw. 008, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.450.000,00	600/SPK.0946.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1354/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	11 September 2025	10 Maret 2026	5	
		1540	Kp. Sobong Rt. 002 Rw. 001, Ds. Padasuka, Kec. Baros, Kab. Serang	189.900.000,00	600/SPK.1235.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1072/SULIHARA/10/2025	9.495.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1541	Kp. Sirna Galih Rw. 002, Ds. Sukadana, Kec. Cimas, Kab. Serang	189.600.000,00	600/SPK.0530.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1002/SULIHARA/09/2025	9.480.000,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1542	Kp. Bama Hilir Rt. 002 - 004 Rw. 003, Ds. Margagiri, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1097.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1282/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1543	Rw. 004, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.970.000,00	600/SPK.0216.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1122/SULIHARA/10/2025	9.398.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1544	Kp. Kadaung Rt. 001 - 002 Rw. 006, Ds. Rancagong, Kec. Legok, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0544.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	0753/SULIHARA/09/2025	9.384.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1545	Dasana Indah Rt. 005 Rw. 015, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	375.730.000,00	600/SPK.0551.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1213/SULIHARA/10/2025	18.786.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1546	Kp. Ciburial Tonggoh Rt. 012 Rw. 001, Ds. Ciburial, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang	189.980.000,00	600/SPK.0399.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1276/SULIHARA/10/2025	9.499.000,00	180 Hari	10 September 2025	09 Maret 2026	5	
		1547	Kp. Kadu Jengkolw. 004, Ds. Kurungdahu, Kec. Cadasan, Kab. Pandeglang	189.830.000,00	600/SPK.1182.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1335/SULIHARA/10/2025	9.491.500,00	180 Hari	18 September 2025	17 Maret 2026	5	
		1548	Rw. 001, Ds. Cerukcuk, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1296.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1260/SULIHARA/10/2025	9.467.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1549	Kp. Carang Pulang Rt. 001 Rw. 001, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	183.660.000,00	600/SPK.0549.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1209/SULIHARA/10/2025	9.183.000,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1550	Rt. 004 Rw. 006, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	183.690.000,00	600/SPK.0579.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1210/SULIHARA/10/2025	9.184.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1551	Komp. Kadu Hejo Residence Rt. 006 Rw. 001, Ds. Palurahan, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.0971.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1281/SULIHARA/10/2025	9.473.000,00	180 Hari	3 September 2025	02 Maret 2026	5	
		1552	Kp. Dumus Rt. 009 Rw. 003, Ds. Pematang, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.840.000,00	600/SPK.0049.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1305/SULIHARA/10/2025	9.492.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1553	Rt. 002 Rw. 003, Ds. Pelawad, Kec. Ciruas, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.0059.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1303/SULIHARA/10/2025	9.484.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1554	Kp. Pabuaran Rt. 001 Rw. 002, Ds. Pagintungan, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.830.000,00	600/SPK.0244.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1200/SULIHARA/10/2025	9.491.500,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1555	Kp. Kalapa Ciung Rt.001 Rw.002, Ds. Pasirbuyut, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.780.000,00	600/SPK.0247.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1203/SULIHARA/10/2025	9.489.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1556	Kp. Masjid Pasir Rt. 012 Rw. 003, Ds. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.700.000,00	600/SPK.0249.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1201/SULIHARA/10/2025	9.485.000,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1557	Kp. Pasirbuah Rt. 013 Rw. 004, Ds. Sindangari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	378.990.000,00	600/SPK.0863.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1193/SULIHARA/10/2025	18.949.500,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1558	Kp. Pasagi Kembang Rt. 011 Rw. 004, Ds. Sindangheula, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.620.000,00	600/SPK.0867.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1326/SULIHARA/10/2025	9.481.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1559	Kp. Sibideng Rt. 012 Rw. 004, Ds. Lempuyang, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.320.000,00	600/SPK.1328.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1258/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1560	Rw. 002, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.660.000,00	600/SPK.0108.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1298/SULIHARA/10/2025	9.383.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1561	Kp. Bajeg Rt. 008 Rw. 003, Ds. Kolelet, Kec. Picung, Kab. Pandeglang	189.370.000,00	600/SPK.0267.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1372/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	

		1562	Kp. Kadu Pasir Rt. 001 Rw. 001, Ds. Karyawangi, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang	189.830.000,00	600/SPK.0434.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1365/SULIHARA/10/2025	9.491.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1563	Kp. Buaran Asem Rt. 006 Rw. 005, Ds. Tanjung Anom, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	377.640.000,00	600/SPK.0741.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1238/SULIHARA/10/2025	18.882.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1564	Kp. Sukasari Rt. 020 Rw. 004, Ds. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.780.000,00	600/SPK.0243.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1205/SULIHARA/10/2025	9.489.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1565	Kp. Ciawet Malang Rt. 013 Rw. 003, Ds. Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang	189.940.000,00	600/SPK.0245.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1202/SULIHARA/10/2025	9.497.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1566	Link Kp. Klebet Rw. 004, Ds. Klebet, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	188.600.000,00	600/SPK.0750.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1396/SULIHARA/10/2025	9.430.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1567	Kp. Ketos (Arah Masjid) Rt. 003 Rw. 004, Kel. Sindangsari, Kec. Paser Kemis, Kab. Tangerang	188.260.000,00	600/SPK.0817.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1399/SULIHARA/10/2025	9.413.000,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1568	Kp. Pangarengan Rt. 014 Rw. 003, Ds. Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.010.000,00	600/SPK.0820.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1400/SULIHARA/10/2025	9.400.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1569	Perumahan Griya Serdang Indah, Ds. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.1216.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1196/SULIHARA/10/2025	9.484.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1570	Kp. Candali Rt. 009 Rw. 003, Ds. Sinarmukti, Kec. Baros, Kab. Serang	189.660.000,00	600/SPK.0007.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1306/SULIHARA/10/2025	9.483.000,00	180 Hari	6 october 2025	04 April 2026	5	
		1571	Rw. 003, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	187.660.000,00	600/SPK.0105.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1297/SULIHARA/10/2025	9.383.000,00	180 Hari	29 September 2025	28 Maret 2026	5	
		1572	Kp. Kadumerak Rt. 002 Rw. 001, Kel. Kadumerak, Kec. Karangtanjung, Kab. Pandeglang	189.230.000,00	600/SPK.1146.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1342/SULIHARA/10/2025	9.461.500,00	180 Hari	16 September 2025	15 Maret 2026	5	
		1573	Kp. Pisangan 1 Rt. 002 Rw. 003 (Rt. Gebok), Ds. Sarakan, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	376.690.000,00	600/SPK.0821.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1430/SULIHARA/10/2025	18.834.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1574	Kp. Susukan Rt. 007 Rw. 002, Ds. Sukrame, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.320.000,00	600/SPK.0237.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1375/SULIHARA/10/2025	9.466.000,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1575	Rw. 001, Ds. Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.140.000,00	600/SPK.0239.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1376/SULIHARA/10/2025	9.457.000,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1576	Link. Ciracas Lama, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.440.000,00	600/SPK.1164.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1451/SULIHARA/10/2025	9.472.000,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1577	Jl. Pasir Jaya - Pasir Gadung Rt. 005 Rw. 002 No. 1, Ds. Pasir Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.780.000,00	600/SPK.0604.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1479/SULIHARA/10/2025	9.389.000,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1578	Jl. Banten Lama Link. Unyur Rt. 001 Rw. 001, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	189.270.000,00	600/SPK.1006.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1380/SULIHARA/10/2025	9.463.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1579	Jl. Ir. Slamet Santoso, Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	189.330.000,00	600/SPK.1093.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1379/SULIHARA/10/2025	9.466.500,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1580	Rw. 007, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	188.520.000,00	600/SPK.0278.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1571/SULIHARA/10/2025	9.426.000,00	180 Hari	24 September 2025	23 Maret 2026	5	
		1581	Kp. Onjong Rw. 005, Ds. Ragas Mesigit, Kec. Carenang, Kab. Serang	188.270.000,00	600/SPK.1282.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1264/SULIHARA/10/2025	9.413.500,00	180 Hari	19 September 2025	18 Maret 2026	5	
		1582	Rw. 008, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	377.560.000,00	600/SPK.0323.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1562/SULIHARA/10/2025	18.878.000,00	180 Hari	15 September 2025	14 Maret 2026	5	
		1583	Kp. Kebon Cau, Kel. Jatake, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.0199.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1446/SULIHARA/10/2025	9.410.000,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1584	Kp. Kadu Bangkong Rt. 003 Rw. 006, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.230.000,00	600/SPK.0411.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1407/SULIHARA/10/2025	9.511.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1585	Kp. Leweng Kolot Rt. 002 Rw. 003, Ds. Tegalwangi, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	190.190.000,00	600/SPK.0417.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1513/SULIHARA/10/2025	9.509.500,00	180 Hari	25 September 2025	24 Maret 2026	5	
		1586	Kp. Pasir Jengkol Rt. 019 Rw. 004, Ds. Sindanghayu, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	190.010.000,00	600/SPK.0436.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1464/SULIHARA/10/2025	9.500.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1587	Kp. Kelampean Rt. 002 Rw. 004, Ds. Badak Anom, Kec. Sindangjaya, Kab. Tangerang	377.990.000,00	600/SPK.0763.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1448/SULIHARA/10/2025	18.899.500,00	180 Hari	7 october 2025	05 April 2026	5	
		1588	Kp. Salahaur Rt. 004 Rw. 009, Kel. Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.1061.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1490/SULIHARA/10/2025	9.472.500,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		1589	Kp. Cijulang, Ds. Ciparahu, Kec. Cihara, Kab. Lebak	189.100.000,00	600/SPK.0839.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1327/SULIHARA/10/2025	9.455.000,00	180 Hari	7 october 2025	05 April 2026	5	
		1590	Kp. Kembang Rt. 002 Rw. 006, Kel. Curug, Kec. Curug, Kota Serang	189.420.000,00	600/SPK.1349.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1177/SULIHARA/10/2025	9.471.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1591	Kp. Benoa Kidul Rt. 007 Rw. 002, Ds. Sindangheula, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	379.340.000,00	600/SPK.0865.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1507/SULIHARA/10/2025	18.967.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1592	Kp. Combong Rt. 012 Rw. 003, Ds. Baros, Kec. Baros, Kab. Serang	189.080.000,00	600/SPK.1010.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1561/SULIHARA/10/2025	9.454.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1593	Kp. Tinggar, Kel. Sukalaksana, Kec. Curug, Kota Serang	189.340.000,00	600/SPK.1187.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1544/SULIHARA/10/2025	9.467.000,00	180 Hari	22 october 2025	20 April 2026	5	
		1594	Kp. Kadujangkung Rt. 001 Rw. 005, Ds. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1175.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1525/SULIHARA/10/2025	9.473.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	
		1595	Kp. Hamberang Rt. 001-002 Rw. 004, Ds. Luhu Jaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1017.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1426/SULIHARA/10/2025	9.469.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1596	Jalan Lingkungan Kp. Cisereh Rw. 001, Ds. Cisereh, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.370.000,00	600/SPK.1210.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1547/SULIHARA/10/2025	9.468.500,00	180 Hari	8 october 2025	06 April 2026	5	

		1597	Link Rt. 002 Rw. 003 Kaujon - Cikulur, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.050.000,00	600/SPK.0182.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1482/SULIHARA/10/2025	9.452.500,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1598	Kp. Kabayan Cilis Rt. 001, Kel. Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	189.560.000,00	600/SPK.1221.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1612/SULIHARA/10/2025	9.478.000,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1599	Kp. Karang Kobong Rt. 011 Rw. 004, Ds. Bendung, Kec. Tanara, Kab. Serang	189.770.000,00	600/SPK.0914.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1566/SULIHARA/10/2025	9.488.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		1600	Kp. Pondok Lor Rt. 003-004 Rw. 003, Ds. Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.620.000,00	600/SPK.1335.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1645/SULIHARA/11/2025	9.431.000,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1601	Kp. Baru Indah Rt. 004 Rw. 003, Ds. Calungbungur, Kec. Sajira, Kab. Lebak	189.460.000,00	600/SPK.0714.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1537/SULIHARA/10/2025	9.473.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1602	Kp. Satong Rt. 003 Rw. 003, Ds. Cisuren, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.430.000,00	600/SPK.0978.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1607/SULIHARA/10/2025	9.471.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		1603	Kp. Sadiah Rt. 001 Rw. 001, Kel. Warung Jaud, Kec. Kasemen, Kota Serang	189.710.000,00	600/SPK.0167.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1481/SULIHARA/10/2025	9.485.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		1604	Perumahan Palem Semi Rt. 019, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	183.860.000,00	600/SPK.0260.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1470/SULIHARA/10/2025	9.193.000,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		1605	Rw. 005 Perumahan Griya Yasa, Ds. Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.090.000,00	600/SPK.0884.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1664/SULIHARA/11/2025	9.404.500,00	180 Hari	30 September 2025	29 Maret 2026	5	
		1606	Rt. 005 Rw. 004 Gandasari Residence, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	184.340.000,00	600/SPK.0211.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1469/SULIHARA/10/2025	9.217.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1607	Kp. Pasir Hantap Rt. 014 Rw. 004, Ds. Badur, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	379.020.000,00	600/SPK.0699.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1313/SULIHARA/10/2025	18.951.000,00	180 Hari	3 october 2025	01 April 2026	5	
		1608	Rw. 002, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.0229.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1528/SULIHARA/10/2025	9.391.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1609	Rw. 008, Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.0476.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1715/SULIHARA/11/2025	9.387.500,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1610	Kp. Bojong Warna, Ds. Mekarsari, Kec. Carenang, Kab. Serang	188.340.000,00	600/SPK.1275.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1623/SULIHARA/11/2025	9.417.000,00	180 Hari	21 october 2025	19 April 2026	5	
		1611	Jl. Bhakti 1 - 3, Kel. Paninggilan Utara, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	376.440.000,00	600/SPK.0472.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1836/SULIHARA/11/2025	18.822.000,00	180 Hari	2 october 2025	31 Maret 2026	5	
		1612	Rw. 005 Perumahan Graha Mitra Citra, Ds. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	183.630.000,00	600/SPK.0879.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1622/SULIHAAAARA/10/2025	9.181.500,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		1613	Rw. 006 Perumahan Griya Yasa, Ds. Talagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	183.690.000,00	600/SPK.0880.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1663/SULIHAAAARA/11/2025	9.184.500,00	180 Hari	8 September 2025	07 Maret 2026	5	
		1614	Rw. 002, Ds. Kadu Sirung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	188.040.000,00	600/SPK.0361.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1680/SULIHARA/11/2025	9.402.000,00	180 Hari	10 october 2025	08 April 2026	5	
		1615	Kp. Bayongbong Ciguha Rt. 001 Rw. 003, Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.290.000,00	600/SPK.1302.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1626/SULIHARA/11/2025	9.464.500,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		1616	Kp. Mandaya Lor Rt. 017 Rw. 005, Ds. Panenjoan, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.230.000,00	600/SPK.1310.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1629/SULIHARA/11/2025	9.461.500,00	180 Hari	16 october 2025	14 April 2026	5	
		1617	Kp. Pabuaran Rt. 001-002 Rw. 004, Ds. Rawakidang, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang	188.550.000,00	600/SPK.1338.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1812/SULIHARA/11/2025	9.427.500,00	180 Hari	13 october 2025	11 April 2026	5	
		1618	Perumahan Persada Banten Rw. 004, Kel. Kepuren, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.200.000,00	600/SPK.1233.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1723/SULIHARA/11/2025	9.460.000,00	180 Hari	14 october 2025	12 April 2026	5	
		1619	Rw. 011, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.270.000,00	600/SPK.0228.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1700/SULIHARA/11/2025	9.413.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		1620	Kp. Cadas Gantung Masjid Rt. 007 Rw. 003, Ds. Sigedong, Kec. Mancak, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.0851.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1775/SULIHARA/11/2025	9.467.000,00	180 Hari	15 october 2025	13 April 2026	5	
		1621	Kp. Wakapsari Rt. 001 Rw. 002, Ds. Parakanlima, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	188.790.000,00	600/SPK.0695.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1604/SULIHARA/10/2025	9.439.500,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1622	Rw. 012 , Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.610.000,00	600/SPK.0481.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1864/SULIHARA/11/2025	9.430.500,00	180 Hari	23 September 2025	22 Maret 2026	5	
		1623	Kp. Sukamulya Rt. 005 Rw. 003, Kel. Pakuhaji, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	188.410.000,00	600/SPK.0828.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1726/SULIHARA/11/2025	9.420.500,00	180 Hari	24 october 2025	22 April 2026	5	
		1624	Kp. Rancalutung Rt. 018 Rw. 002, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.300.000,00	600/SPK.0965.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1737/SULIHARA/11/2025	9.465.000,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		1625	Kepandean Rt. 007 Rw. 002, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	188.950.000,00	600/SPK.1081.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1736/SULIHARA/11/2025	9.447.500,00	180 Hari	3 November 2025	02 Mei 2026	5	
		1626	Kp. Katileng Rt. 014 Rw. 004, Ds. Babakankeusik, Kec. Patia, Kab. Pandeglang	190.140.000,00	600/SPK.0431.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1847/SULIHARA/11/2025	9.507.000,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		1627	Kp. Waled Rt. 003 Rw. 007, Ds. Sobang, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	190.430.000,00	600/SPK.0439.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1709/SULIHARA/11/2025	9.521.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		1628	Rw. 004, Ds. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang	375.770.000,00	600/SPK.0356.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1766/SULIHARA/11/2025	18.788.500,00	180 Hari	26 September 2025	25 Maret 2026	5	
		1629	Kp. Sabelah Rt. 002 Rw. 002, Ds. Kiarajanglung, Kec. Cibitung, Kab. Pandeglang	189.980.000,00	600/SPK.0382.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1695/SULIHARA/11/2025	9.499.000,00	180 Hari	27 october 2025	25 April 2026	5	
		1630	Bumi Agung Sukatani Rt. 005 Rw. 007, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	377.220.000,00	600/SPK.0761.UPPSU/KSL/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1156/SULIHARA/10/2025	18.861.000,00	180 Hari	17 September 2025	16 Maret 2026	5	
		1631	Rw. 002, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.630.000,00	600/SPK.0208.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1743/SULIHARA/11/2025	9.381.500,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	

		1632	Kp. Sumur Batu Rt. 003 Rw. 004, Ds. Bojenwetan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang	190.430.000,00	600/SPK.0443.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1854/SULIHARA/11/2025	9.521.500,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		1633	Rw. 004, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	188.180.000,00	600/SPK.0206.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1742/SULIHARA/11/2025	9.409.000,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1634	Rt. 003 Rw. 004, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.0222.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1745/SULIHARA/11/2025	9.395.000,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1635	Rt. 003 - 006, Ds. Cileles, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.900.000,00	600/SPK.1160.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1845/SULIHARA/11/2025	9.445.000,00	180 Hari	12 November 2025	11 Mei 2026	5	
		1636	Kp. Cangring Rw. 004, Ds. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.1184.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1843/SULIHARA/11/2025	9.428.500,00	180 Hari	5 November 2025	04 Mei 2026	5	
		1637	Kp. Sukamanah Rt. 002 Rw. 004, Ds. Budi Mulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0607.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1871/SULIHARA/11/2025	9.384.000,00	180 Hari	7 october 2025	05 April 2026	5	
		1638	Kp. Salembaran Jati Rt. 034 Rw. 027, Ds. Salembaran Jati, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.0809.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1811/SULIHARA/11/2025	9.429.000,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1639	Kp. Sinangpalai Rw. 001, Ds. Situgadung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.0338.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1768/SULIHARA/11/2025	9.384.000,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1640	Kp. Langgar Tengah Rt. 003 Rw. 004, Ds. Blukbuk, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.330.000,00	600/SPK.0808.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1855/SULIHARA/11/2025	9.416.500,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1641	Vila Rizky Ilhami Blok C6 Rt. 008 Rw. 035, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	188.590.000,00	600/SPK.0252.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1844/SULIHARA/11/2025	9.429.500,00	180 Hari	20 November 2025	19 Mei 2026	5	
		1642	Rw. 004, Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	187.420.000,00	600/SPK.0482.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1880/SULIHARA/11/2025	9.371.000,00	180 Hari	30 october 2025	28 April 2026	5	
		1643	Kp. Cireded Rt. 001 Rw. 001, Ds. Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.590.000,00	600/SPK.0601.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1917/SULIHARA/11/2025	9.379.500,00	180 Hari	7 october 2025	05 April 2026	5	
		1644	Rt. 006 Rw. 006, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.240.000,00	600/SPK.0157.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1798/SULIHARA/11/2025	9.412.000,00	180 Hari	6 october 2025	04 April 2026	5	
		1645	Taman Cimuncang Indah, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang	189.500.000,00	600/SPK.1131.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1861/SULIHARA/11/2025	9.475.000,00	180 Hari	17 November 2025	16 Mei 2026	5	
		1646	Kavling Puri Raya, Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang	189.490.000,00	600/SPK.1163.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1859/SULIHARA/11/2025	9.474.500,00	180 Hari	17 November 2025	16 Mei 2026	5	
		1647	Kp. Ganggaeng Rt. 011 Rw. 006, Ds. Cincayong, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	190.080.000,00	600/SPK.0375.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1835/SULIHARA/11/2025	9.504.000,00	180 Hari	17 october 2025	15 April 2026	5	
		1648	Rw. 005, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.0201.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1805/SULIHARA/11/2025	9.391.000,00	180 Hari	13 November 2025	12 Mei 2026	5	
		1649	Kp. Lebak Jaya Rt. 001 Rw. 006, Ds. Karangbolong, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	189.900.000,00	600/SPK.0386.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1869/SULIHARA/11/2025	9.495.000,00	180 Hari	28 october 2025	26 April 2026	5	
		1650	Kp. Kaduhejo Rt. 001 Rw. 004, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	184.050.000,00	600/SPK.1109.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1761/SULIHARA/11/2025	9.202.500,00	180 Hari	31 october 2025	29 April 2026	5	
		1651	Kp. Selatip Rt. 009 Rw. 003 Gang Makam Kitaeng, Ds. Lontar, Kec. Kemiri, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.0818.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1795/SULIHARA/11/2025	9.428.500,00	180 Hari	4 November 2025	03 Mei 2026	5	
		1652	Rt. 031 Rw. 016, Ds. Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	188.520.000,00	600/SPK.0824.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1796/SULIHARA/11/2025	9.426.000,00	180 Hari	6 November 2025	05 Mei 2026	5	
		1653	Kp. Cibayawak Rw. 001, Ds. Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.800.000,00	600/SPK.1666.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1918/SULIHARA/12/2025	9.490.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1654	Rw. 003, Ds. Sukaraja, Kec. Malingping, Kab. Lebak	189.690.000,00	600/SPK.1851.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1920/SULIHARA/12/2025	9.484.500,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1655	Perumahan Pejaten Mas Rt. 002, Ds. Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	189.970.000,00	600/SPK.1548.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2000/SULIHARA/12/2025	9.498.500,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1656	Link. Puncuran Rw. 006, Kel. Pancur, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.860.000,00	600/SPK.1772.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2001/SULIHARA/12/2025	9.493.000,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		1657	Rw. 003, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	187.740.000,00	600/SPK.1690.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1986/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1658	Rw. 001 Kp. Panjembir, Ds. Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.460.000,00	600/SPK.1481.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2004/SULIHARA/12/2025	9.423.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1659	Rw. 003, Ds. Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang	189.480.000,00	600/SPK.1778.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2118/SULIHARA/12/2025	9.474.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1660	Rw. 001, Ds. Curug Wetan, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.660.000,00	600/SPK.1956.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1976/SULIHARA/12/2025	9.383.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1661	Rw. 005, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.700.000,00	600/SPK.1424.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2299/SULIHARA/12/2025	9.385.000,00	180 Hari	2 december 2025	31 Mei 2026	5	
		1662	Kp. Sandu Rw. 02 Ds. Ranca Buaya, Kec. Jambé, Kab. Tangerang	187.890.000,00	600/SPK.1961.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1972/SULIHARA/12/2025	9.394.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1663	Rw. 005 Griya Jakarta, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.930.000,00	600/SPK.1692.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2058/SULIHARA/12/2025	9.396.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1664	Komp. Bap 1 Rw. 012, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	190.040.000,00	600/SPK.1906.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2028/SULIHARA/12/2025	9.502.000,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		1665	Kp. Belendung Rw. 004, Ds. Nayagati, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak	189.430.000,00	600/SPK.1566.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2217/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		1666	Rw. 003, Ds. Dahu, Kec. Cikeusai, Kab. Serang	189.540.000,00	600/SPK.1792.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2120/SULIHARA/12/2025	9.477.000,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	

		1667	Kp. Karees Kosrek Rw. 004, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak	189.550.000,00	600/SPK.2032.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2606/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1668	Jl. Amd Manunggal X Rw. 002, Kel. Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang	188.110.000,00	600/SPK.1918.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2096/SULIHARA/12/2025	9.405.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1669	Kp. Ciminyak Rt. 003 Rw. 001, Ds. Ciminyak, Kec. Muncang, Kab. Lebak	189.390.000,00	600/SPK.1565.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2218/SULIHARA/12/2025	9.469.500,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		1670	Kp. Nyompok Rt. 001 Rw. 003, Ds. Suwakan, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.770.000,00	600/SPK.2000.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2053/SULIHARA/12/2025	9.488.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1671	Kp. Kandang Palon, Ds. Sukaraja, Kec. Malingping, Kab. Lebak	190.330.000,00	600/SPK.1615.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2066/SULIHARA/12/2025	9.516.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1672	Rw. 006, Kel. Alam Jaya, Kec. Jatuwung, Kota Tangerang	188.200.000,00	600/SPK.1437.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2094/SULIHARA/12/2025	9.410.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1673	Rw. 002, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	188.150.000,00	600/SPK.1441.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2091/SULIHARA/12/2025	9.407.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1674	Kp. Pasir Padudukan, Rt. 021 Rw. 006, Ds. Kampung Baru, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.580.000,00	600/SPK.1862.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2276/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1675	Jalan Serpong Hill Residence Rt. 003 Rw. 006 Blok 1, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	188.090.000,00	600/SPK.2060.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2236/SULIHARA/12/2025	9.404.500,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1676	Kp. Ciboncah Rt.003 Rw. 001, Ds. Kaungcaang, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	189.460.000,00	600/SPK.2010.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2082/SULIHARA/12/2025	9.473.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1677	Kp. Dahu, Ds. Mekarjaya, Kec. Cikadal, Kab. Pandeglang	189.990.000,00	600/SPK.1468.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2071/SULIHARA/12/2025	9.499.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1678	Kp. Sebe Rw. 005, Ds. Rancasumur, Kec. Kopo, Kab. Serang	189.840.000,00	600/SPK.2017.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2344/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1679	Komplek Serua Permai Rw. 008, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	188.180.000,00	600/SPK.1930.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2232/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1680	Perumahan Residence One Rw. 014, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	188.180.000,00	600/SPK.1941.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2234/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1681	Bumi Puspilek Asri Rt. 005 - Rt.006 Rw. 001, Ds. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1417.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2161/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1682	Rw. 002 - 003, Ds. Citalahab, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.470.000,00	600/SPK.1593.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2024/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1683	Kp. Ciseke Rw. 002, Ds. Jati Mulya, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak	189.930.000,00	600/SPK.1745.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2109/SULIHARA/12/2025	9.496.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1684	Kp. Lebak Rt. 002-003 Rw. 004, Kel. Lebakwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.620.000,00	600/SPK.1864.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2208/SULIHARA/12/2025	9.481.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1685	Kp. Sukamaju, Ds. Citausk, Kec. Padarincang, Kab. Serang	188.070.000,00	600/SPK.1729.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2134/SULIHARA/12/2025	9.403.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1686	Ds. Sukasari, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	188.590.000,00	600/SPK.1734.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2124/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1687	Perumahan Bukit Pelamunan Permai Blok G, Ds. Pelamunan, Kec. Kramatawatu, Kab. Serang	189.950.000,00	600/SPK.1547.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2132/SULIHARA/12/2025	9.497.500,00	180 Hari	3 december 2025	01 Juni 2026	5	
		1688	Rt. 006 Rw. 001, Ds. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang	188.140.000,00	600/SPK.1405.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2220/SULIHARA/12/2025	9.407.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1689	Perum Griya Serpong Asri Rw. 005, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	187.740.000,00	600/SPK.1419.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2167/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1690	Rw. 001 , Ds. Bojong Menteng, Kec. Tunjung Teja, Kab. Serang	189.420.000,00	600/SPK.1356.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2243/SULIHARA/12/2025	9.471.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1691	Kp. Palahar, Ds. Budi Mulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	188.430.000,00	600/SPK.1482.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2512/SULIHARA/12/2025	9.421.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1692	Kp. Kadu Beureum - Kp. Cinangka Rw. 001, Ds. Prabugantungan, Kec. Cileles, Kab. Lebak	189.160.000,00	600/SPK.1526.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2148/SULIHARA/12/2025	9.458.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1693	Rw. 009, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.700.000,00	600/SPK.1431.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2267/SULIHARA/12/2025	9.385.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1694	Kp. Ciwadas, Ds. Pancanegara, Kec. Pabuaran, Kab. Serang	189.120.000,00	600/SPK.1828.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2156/SULIHARA/12/2025	9.456.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1695	Rw. 008, Ds. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.720.000,00	600/SPK.1952.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2268/SULIHARA/12/2025	9.386.000,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1696	Rw. 001, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	187.710.000,00	600/SPK.2041.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	1975/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1697	Perumahan Taman Adiyasa Rw. 008, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.1429.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2168/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1698	Kp. Lilaban Rt. 004 Rw. 002, Ds. Cangkudu, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1579.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2015/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1699	Rw. 010 Villa Tangerang Elok, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.1960.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2271/SULIHARA/12/2025	9.396.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1700	Kp. Bugel Impres, Rt. 017 Rw. 002, Ds. Pasir Limus, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.350.000,00	600/SPK.1860.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2420/SULIHARA/12/2025	9.467.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1701	Kp. Lewi Banteng Pasir, Rt. 014 Rw. 005, Ds. Sangiang, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.230.000,00	600/SPK.1859.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2419/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	

		1702	Kp. Kademangan Besar Rw. 002, Ds. Sukajaya, Kec. Pontang, Kab. Serang	190.030.000,00	600/SPK.1678.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2372/SULIHARA/XII/2025	9.501.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1703	Pesona Lebak Wangi 1 Blok F Dan H Rw. 007, Ds. Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang	188.520.000,00	600/SPK.1552.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2126/SULIHARA/12/2025	9.426.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1704	Kp. Kadusekul Rw. 008, Ds. Sukamanah, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang	189.140.000,00	600/SPK.1816.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2025/SULIHARA/12/2025	9.457.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1705	Kp. Talaga Rw. 007, Kel. Karaton, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	189.300.000,00	600/SPK.2024.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2474/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1706	Kp. Pasir Soreang Rw. 007, Ds. Gunungbatu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.800.000,00	600/SPK.1846.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2393/SULIHARA/12/2025	9.490.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1707	Rw. 001, Ds. Tambilik, Kec. Petir, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1370.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2387/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1708	Kp. Sukamaju Rt. 002 Rw. 001, Ds. Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang	189.420.000,00	600/SPK.1574.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2493/SULIHARA/12/2025	9.471.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1709	Kp. Cibadak Rw. 002, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	187.740.000,00	600/SPK.2049.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2166/SULIHARA/12/2025	9.387.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1710	Bumi Puspilek Asri Rw. 007, Ds. Situgadung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.550.000,00	600/SPK.1418.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2164/SULIHARA/12/2025	9.377.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1711	Komp. Bap 1 Rw. 023, Kel. Unyur, Kec. Serang, Kota Serang	188.550.000,00	600/SPK.1908.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2207/SULIHARA/12/2025	9.427.500,00	180 Hari	9 december 2025	07 Juni 2026	5	
		1712	Jl. Panglima Polim Gg. H. Fadli Rw. 005, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	188.180.000,00	600/SPK.1554.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2215/SULIHARA/12/2025	9.409.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1713	Rw. 002, Ds. Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.710.000,00	600/SPK.1425.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2295/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1714	Kp. Girilaya Rt. 003, Ds. Pasireuh, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.870.000,00	600/SPK.1502.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2406/SULIHARA/12/2025	9.493.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1715	Kp. Sindanghayu Rt. 001 Rw. 007, Ds. Pasireuh, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	189.800.000,00	600/SPK.1633.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2408/SULIHARA/12/2025	9.490.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1716	Link. Gowok Sentul Rw. 003, Kel. Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang	189.380.000,00	600/SPK.1811.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2494/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1717	Kp. Cilangkong Pasir Rt. 001 Rw. 004, Ds. Karoya, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.450.000,00	600/SPK.1719.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2696/SULIHARA/12/2025	9.472.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1718	Rw. 015, Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.600.000,00	600/SPK.1569.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2282/SULIHARA/12/2025	9.430.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1719	Bumi Puspilek Asri Sektor 03 Rw. 004, Ds. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.820.000,00	600/SPK.1414.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2165/SULIHARA/12/2025	9.391.000,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	
		1720	Rt. 005 Rw. 002, Ds. Pasir, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang	188.960.000,00	600/SPK.1580.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2339/SULIHARA/12/2025	9.448.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1721	Link. Sepang Kelapa Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sepang, Kec. Taikatan, Kota Serang	189.270.000,00	600/SPK.1809.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2431/SULIHARA/12/2025	9.463.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1722	Kp. Lapangan, Ds. Kondangjaya, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang	190.070.000,00	600/SPK.1621.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2407/SULIHARA/12/2025	9.503.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1723	Kp. Pasar Panimbang Rt. 001 Rw. 006, Ds. Panimbang Jaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang	190.350.000,00	600/SPK.1626.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2395/SULIHARA/12/2025	9.517.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1724	Kp. Rokoy Barat, Ds. Sukasari, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	190.390.000,00	600/SPK.1799.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2325/SULIHARA/12/2025	9.519.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1725	Rw. 003, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1965.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2192/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1726	Kp. Cigintung Rt. 024 Rw. 012, Ds. Kadudampit, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang	189.550.000,00	600/SPK.1610.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2490/SULIHARA/12/2025	9.477.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1727	Kp. Malang Nengah Rt. 004 Rw. 001, Ds. Sukajadi, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.500.000,00	600/SPK.1900.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2462/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1728	Kp. Bojong Buah Rt. 002 Rw. 001, Ds. Mekasari, Kec. Carenang, Kab. Serang	189.430.000,00	600/SPK.1888.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2463/SULIHARA/12/2025	9.471.500,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1729	Kp. Citarate Rw. 001, Ds. Cireunde, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	188.820.000,00	600/SPK.1838.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2405/SULIHARA/12/2025	9.441.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1730	Kp. Kangkung, Rt. 005 Rw. 004, Ds. Mander, Kec. Bandung, Kab. Serang	188.340.000,00	600/SPK.1856.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2447/SULIHARA/12/2025	9.417.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1731	Perumnas Suradita, Ds. Suradita, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang	187.710.000,00	600/SPK.2050.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2170/SULIHARA/12/2025	9.385.500,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1732	Kp. Cipinang Rt. 001 Rw. 004, Ds. Pamubulan, Kec. Bayah, Kab. Lebak	189.230.000,00	600/SPK.1999.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2224/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1733	Kp. Situmekar Rt. 001 Rw. 006, Ds. Cikotok, Kec. Cibeber, Kab. Lebak	189.500.000,00	600/SPK.2001.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2450/SULIHARA/12/2025	9.475.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1734	Kp. Harapan Rt. 023 Rw. 007, Ds. Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	189.400.000,00	600/SPK.1589.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2716/SULIHARA/12/2025	9.470.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1735	Kp. Asem Pasir Rt. 004 Rw. 001, Ds. Binong, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.310.000,00	600/SPK.1599.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2496/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1736	Kp. Kopeng Rt. 016 Rw. 004, Ds. Wirana, Kec. Pamarayan, Kab. Serang	189.880.000,00	600/SPK.1534.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2632/SULIHARA/12/2025	9.494.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	

		1737	Jl. Widara Graha Pesona Rw. 010, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang	188.640.000,00	600/SPK.1406.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2011/SULIHARA/12/2025	9.432.000,00	180 Hari	4 december 2025	02 Juni 2026	5	
		1738	Rt. 002 - 003 Rw. 009, Kel. Sindangsari, Kec. Pasarkemis, Kab. Tangerang	187.750.000,00	600/SPK.1661.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2288/SULIHARA/12/2025	9.387.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1739	Jl. Pasir Jaya - Pasir Gadung Rw. 003 No. 1, Ds. Pasir Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	187.620.000,00	600/SPK.1926.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2701/SULIHARA/12/2025	9.381.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1740	Kp. Rawa Lini Rt. 002 - 003 Rw. 008, Ds. Teluknaga, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.1559.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2341/SULIHARA/12/2025	9.428.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1741	Kp. Babakan Rw. 003, Ds. Cisangu, Kec. Cibadak, Kab. Lebak	189.580.000,00	600/SPK.1447.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2227/SULIHARA/12/2025	9.479.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1742	Kp. Jati Rt. 019 Rw. 005, Ds. Muara, Kec. Wanassalam, Kab. Lebak	189.470.000,00	600/SPK.1590.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2717/SULIHARA/12/2025	9.473.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1743	Kp. Cijau Masjid Rt. 002 Rw. 005, Ds. Karoya, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.240.000,00	600/SPK.1721.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2691/SULIHARA/2025	9.462.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1744	Kp. Cijau Timur Rt. 003 Rw. 005, Ds. Karoya, Kec. Cirinten, Kab. Lebak	189.240.000,00	600/SPK.1718.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2692/SULIHARA/12/2025	9.462.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1745	Link. Sidapurna Rt. 003 Rw. 003, Kel. Terith, Kec. Walantaka, Kota Serang	188.590.000,00	600/SPK.1503.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2663/SULIHARA/12/2025	9.429.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1746	Rw. 001, Ds. Lebak Tipar, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.380.000,00	600/SPK.1844.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2549/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1747	Komplek Empang Sari Rw. 006, Ds. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Pandeglang	189.840.000,00	600/SPK.2019.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2334/SULIHARA/12/2025	9.492.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1748	Rw. 004, Ds. Cukangalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang	187.900.000,00	600/SPK.1430.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2196/SULIHARA/12/2025	9.395.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1749	Perum Guru Rw. 001, Ds. Pasanggahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.2054.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2360/SULIHARA/12/2025	9.396.000,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1750	Kp. Malabar, Rt. 001 Rw. 001, Ds. Malabar, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.340.000,00	600/SPK.1863.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2445/SULIHARA/12/2025	9.467.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1751	Kp. Lembur Kandang, Rt. 017 Rw. 005, Ds. Penamping, Kec. Bandung, Kab. Serang	189.160.000,00	600/SPK.1855.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2446/SULIHARA/12/2025	9.458.000,00	180 Hari	17 december 2025	15 Juni 2026	5	
		1752	Jl. Harbano Raya Kp. Pesona Rt. 003 Rw. 006, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.740.000,00	600/SPK.1597.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	TCK45467/12/25	9.387.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1753	Kp. Tonjong Rt. 006 Rw. 002, Ds. Kemuning, Kec. Kresek, Kab. Tangerang	188.910.000,00	600/SPK.1803.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2505/SULIHARA/12/2025	9.445.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1754	Perumahan Duta Asri 3, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	187.730.000,00	600/SPK.1576.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2847/SULIHARA/12/2025	9.386.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1755	Rw. 004, Ds. Tipar Raya, Kec. Jembe, Kab. Tangerang	187.920.000,00	600/SPK.1964.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2013/SULIHARA/2025	9.396.000,00	180 Hari	10 december 2025	08 Juni 2026	5	
		1756	Rw. 006, Ds. Cikasungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang	187.680.000,00	600/SPK.1973.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2198/SULIHARA/12/2025	9.384.000,00	180 Hari	5 december 2025	03 Juni 2026	5	
		1757	Jl. Adi Suoipto Kp. Belendung Rt. 002 Rw. 009, Kel. Belendung, Kec. Benda, Kota Tangerang	187.160.000,00	600/SPK.1605.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2772/SULIHARA/12/2025	9.358.000,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1758	Kp. Pasir Jambu Rw. 002, Ds. Cibareno, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	189.950.000,00	600/SPK.1839.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2650/SULIHARA/12/2025	9.497.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1759	Kp. Bantar Awi, Ds. Pasirbungur, Kec. Cilograng, Kab. Lebak	190.020.000,00	600/SPK.1840.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2651/SULIHARA/12/2025	9.501.000,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1760	Kp. Kayu Bongkok Rt. 004 Rw. 004, Ds. Kayu Bongkok, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	188.640.000,00	600/SPK.1717.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2757/SULIHARA/12/2025	9.432.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1761	Rw. 005 - 006, Ds. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang	187.520.000,00	600/SPK.1640.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2289/SULIHARA/12/2025	9.376.000,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1762	Jl. Utama Dasana Indah Rw. 018, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	187.810.000,00	600/SPK.1748.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2625/SULIHARA/12/2025	9.390.500,00	180 Hari	15 december 2025	13 Juni 2026	5	
		1763	Kp. Kiara Payung Rt. 002 Rw. 004, Ds. Kiara Payung, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	187.500.000,00	600/SPK.1708.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2668/SULIHARA/12/2025	9.375.000,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1764	Kp. Koper Eretan Rt. 001 Rw. 002, Ds. Koper, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.490.000,00	600/SPK.1891.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2569/SULIHARA/12/2025	9.474.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1765	Rw. 010, Ds. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang	188.350.000,00	600/SPK.2058.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2681/SULIHARA/12/2025	9.417.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1766	Rw. 008, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.290.000,00	600/SPK.1925.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2356/SULIHARA/12/2025	9.414.500,00	180 Hari	12 december 2025	10 Juni 2026	5	
		1767	Kp. Kukun Rt. 001 Rw. 009, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.570.000,00	600/SPK.1711.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2671/SULIHARA/12/2025	9.428.500,00	180 Hari	18 december 2025	16 Juni 2026	5	
		1768	Link. Padukan Rt. 001 - 002 Rw. 010, Kel. Sayar, Kec. Taktakan, Kota Serang	190.010.000,00	600/SPK.1764.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2737/SULIHARA/12/2025	9.500.500,00	180 Hari	19 december 2025	17 Juni 2026	5	
		1769	Rw. 005 Kencana Loka Sektor 12.5 Blok 2, Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	187.490.000,00	600/SPK.1938.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2500/SULIHARA/12/2025	9.374.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1770	Rt. 014 Rw. 004, Ds. Rawa Boni, Kec. Pakuhaji, Kab. Kab. Tangerang	187.650.000,00	600/SPK.1384.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2506/SULIHARA/12/2025	9.382.500,00	180 Hari	16 december 2025	14 Juni 2026	5	
		1771	Komplek Graha Raya Cluster Fedora, Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.330.000,00	600/SPK.1645.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2400/SULIHARA/12/2025	9.366.500,00	180 Hari	8 december 2025	06 Juni 2026	5	

		1772	Rw. 002, Ds. Merak, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang	189.230.000,00	600/SPK.1612.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2699/SULIHARA/12/2025	9.461.500,00	180 Hari	11 december 2025	09 Juni 2026	5	
		1773	Kp. Kalapa Koneng Rt. 001 Rw. 001, Ds. Banyuasih, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang	189.160.000,00	600/SPK.1467.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2775/SULIHARA/12/2025	9.458.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1774	Perumahan Ciujung Damai Rw. 007, Ds. Kendayakan, Kec. Kragilan, Kab. Serang	189.680.000,00	600/SPK.1796.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2722/SULIHARA/XII/2025	9.484.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1775	Kp. Kadu Betus Rt. 003 Rw. 002, Ds. Kawoyang, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.310.000,00	600/SPK.1805.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2703/SULIHARA/12/2025	9.465.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1776	Kp. Cikawung Kidul Rt. 001 Rw. 006, Ds. Labak, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang	189.280.000,00	600/SPK.1469.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2778/SULIHARA/12/2025	9.464.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1777	Kp. Kayu Manis, Ds. Kawoyang, Kec. Carita, Kab. Pandeglang	189.710.000,00	600/SPK.1804.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2752/SULIHARA/12/2025	9.485.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1778	Kp. Cipicung Rw. 004, Ds. Giripawana, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	189.680.000,00	600/SPK.1798.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2753/SULIHARA/12/2025	9.484.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1779	Teluknaga Rt. 003 Rw. 003, Ds. Teluknaga, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.230.000,00	600/SPK.1398.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2620/SULIHARA/12/2025	9.411.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1780	Kp. Salam Rt. 001 Rw. 002, Ds. Saninten, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang	189.920.000,00	600/SPK.1630.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2878/SULIHARA/2025	9.496.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1781	Rw. 004, Ds. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang	188.580.000,00	600/SPK.1404.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2813/SULIHARA/12/2025	9.429.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1782	Rw. 005, Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	188.150.000,00	600/SPK.1939.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2502/SULIHARA/12/2025	9.407.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1783	Rw. 014, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	187.940.000,00	600/SPK.1557.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2746/SULIHARA/12/2025	9.397.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1784	Link. Ranca Sawah Rw. 006, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang	189.910.000,00	600/SPK.1881.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2833/SULIHARA/12/2025	9.495.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1785	Link. Sidapura Rw. 003, Kel. Terith, Kec. Walantaka, Kota Serang	189.750.000,00	600/SPK.1879.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2831/SULIHARA/12/2025	9.487.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1786	Kp. Jambangan 002 Rw. 003, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kab. Serang	189.030.000,00	600/SPK.1890.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2786/SULIHARA/12/2025	9.451.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1787	Kp. Ranca Kalahang, Ds. Kalumpang, Kec. Padarincang, Kab. Serang	189.380.000,00	600/SPK.1697.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2873/SULIHARA/12/2025	9.469.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1788	Jl. Lingkungan Rw. 002, Ds. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang	188.850.000,00	600/SPK.1701.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2886/SULIHARA/12/2025	9.442.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1789	Rt. 004 Rw. 003 [Belakang Polek Teluknaga], Ds. Kampung Melayu Barat, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang	188.530.000,00	600/SPK.1450.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2892/SULIHARA/12/2025	9.426.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1790	Link. Jerang Barat Rw. 004, Kel. Karang Asem, Kec. Cibeber, Kota Cilegon	189.300.000,00	600/SPK.1510.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2770/SULIHARA/12/2025	9.465.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1791	Jalan Tegal Wetan Rt. 013 Rw. 006, Ds. Tanjakan Mekar, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang	188.500.000,00	600/SPK.0823.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2954/SULIHARA/12/2025	9.425.000,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1792	Jalan Salak 5 Rt. 002 Rw. 004 Tengah Danau, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	187.910.000,00	600/SPK.1639.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2934/SULIHARA/12/2025	9.395.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1793	Link. Kebedilan Rw. 005, Kel. Kalanganyar, Kec. Taktakan, Kota Serang	188.550.000,00	600/SPK.1774.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2822/SULIHARA/12/2025	9.427.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1794	Perumahan Griya Asri Bad Rt. 035 Rw. 007, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	187.890.000,00	600/SPK.1495.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2933/SULIHARA/12/2025	9.394.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
		1795	Jl.Gg. Haji Utan Rt. 004 Rw. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	187.690.000,00	600/SPK.1927.UPPSU/DPerkim-3/2025	PT JAMKRIDA BANTEN	2698/SULIHARA/12/2025	9.384.500,00	180 Hari	22 december 2025	20 Juni 2026	5	
TOTAL				369.034.539.322,00				18.892.312.038,00					

7 SEKRETARIAT DPRD

1.158.104.443,00

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1	Pemeliharaan/Renovasi lantai 1 Paripurna	1.809.440.000	000.3.1/PLK.11.A/BA.PHO/PPK/Set.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	1559/SULIHARA/10/2025	90.472.000	180	22 Juli 2025	17 Januari 2026		
2	Pemeliharaan/Renovasi lantai 2 Paripurna	1.017.463.000	000.3.1/PLK.12.A/BA.PHO/PPK/Set.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	0896/SULIHARA/09/2025	50.873.150	180	29 Juli 2025	24 Januari 2026		
3	Pemeliharaan/Renovasi Partisi Dinding Lantai 3	1.564.811.000	000.3.1/PLK.10.A/BA.PHO/PPK/Set.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	0895/SULIHARA/09/2025	78.240.550	180	16 Agustus 2025	1 Februari 2026		
4	Pemeliharaan/Renovasi Partisi Dinding Lantai 1	4.507.838.000	000.3.1/PLK.08.A/BA.PHO/PPK/Set.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	1560/SULIHARA/10/2025	225.391.900	180	18 Agustus 2025	3 Februari 2026		
5	Landscape Taman Luar dan Dalam Sekretariat DPRD Prov Banten	2.163.850.000	000.3.1/PLK.19.A-BASTHP/PPTK/Set.DPRD/2025	TAKAFUL UMUM	TCK5188/09/25	108.192.500	180	25 Agustus 2025	20 Februari 2026		
6	Pemeliharaan/Renovasi Partisi Dinding Lantai 2	4.144.506.000	000.3.1/PLK.09.A/BA.PHO/PPK/Set.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	0894/SULIHARA/09/2025	207.225.300	180	26 Agustus 2025	21 Februari 2026		
7	Pemeliharaan/Renovasi Ruang Komisi 1	1.879.877.000	000.3.1/PLK.05.A-BASTHP/PPTK/SET.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	1194/SULIHARA/10/2025	93.993.850	180	18 Agustus 2025	3 Februari 2026		

8	Pemeliharaan/Renovasi Kantin menjadi Gudang APK dan Kantin	6.074.303.856	000.3.1/PLK.22.A-UM-BASTHP/PPTK/SET.DPRD/2025	JAMKRIDA BANTEN	2952/SULIHARA/12/2025	303.715.193	180	24 Desember 2025	25 Juni 2026		
TOTAL		23.162.088.855,74				1.158.104.443,00					

8 BADAN PENDAPATAN DAERAH

173.267.559,00

No.	Rincian Pekerjaan	Nilai Kontrak	NO KONTRAK	Perusahaan Penjamin	Nomor Jaminan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu Jaminan			(%)	Ket
							Jml Hari	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1	Pemeliharaan Pagar Bapenda Induk	387.011.679,00	EP-01KBM3T5QXVN11FGNMQ3P1MVCY	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800387	17.560.186,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
2	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Balaraja	316.651.000,00	EP-01KBM37N1XYMZTV6SWYN6NJGPH	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800377	15.832.550,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
3	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Ciledug	234.571.576,00	EP-01KBMAG6SV3BH26V9YRKRWNTHC	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800389	6.966.776,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
4	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Ciruas	235.252.464,00	EP-01KBBZHKB27HN9SBRERCJOBYN	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800391	11.762.623,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
5	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Pandeglang	237.394.718,00	EP-01KBKZRM6E7WD7SH7D44ENEERE	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800384	11.869.736,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
6	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Serang	232.082.127,00	EP-01KBCE48J86CWNXVPAJB3NSDSK	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800390	11.604.106,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
7	Pemeliharaan Pagar UPT PPD Serpong	241.274.655,00	EP-01KBPGKEYKNMYTVHJ27J2AXHXC	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800379	12.063.733,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
8	Pemeliharaan Lapangan	222.743.350,00	EP-01KBCEP2FBF4C69V7H9SDP3DTY	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800382	11.137.168,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
9	Pemeliharaan Genteng Lobby	267.290.215,00	EP-01KBY4QG9P7H2CJM21DM6S168T	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800386	13.364.511,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
10	Pemeliharaan Kantin Bapenda	294.815.467,00	EP-01KBM9SXD4Y8MZRAECJ18EJFAE	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800385	14.740.773,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
11	Pemeliharaan Pos Jaga	351.259.047,00	EP-01KBC4J1AQ5ZVTGH6ZGV0HE1HB	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800381	17.562.952,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
12	Pemeliharaan Lahan Parkir Roda 2 Epoxy	100.788.401,00	000.3.2/10698041000/SPK/PJKon/BAPEND A/2025	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800383	5.039.420,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
13	Pemeliharaan Lahan Parkir (Roda 4)	134.854.455,00	000.3.2/10698266000/SPK/PJKon/BAPEND A/2025	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800380	6.742.723,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
14	Pemeliharaan Ruang Genset	195.080.227,00	000.3.2/10622683000/SPK/PJKon/BAPEND A/2025	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800388	9.754.011,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
15	Pemeliharaan Ruang Lobby	145.325.824,00	000.3.2/10699645000/SPK/PJKon/BAPEND A/2025	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Kantor Cabang Khusus Serang	D0800378	7.266.291,00	150	30 Desember 2025	28 Mei 2026	5	
TOTAL		3.596.395.205,00				173.267.559,00					

LAMPIRAN REKAP SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

NO	OPD	SAMPAI DENGAN TAHUN 2024		PENAMBAHAN TAHUN 2025		KET
		JUMLAH BIDANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH BIDANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	BIRO UMUM	9	316.640.404.299,00	-	-	
2	BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN	1	10.013.000.000,00	-	-	
3	BADAN PENGHUBUNG	1	11.120.990.000,00	-	-	
4	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	7.972.600.000,00	-	-	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	372	1.763.730.603.343,24	96	3.756.535.573.228,82	
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	127	129.130.905.602,00	1	206.498.500,00	
7	DINAS PERHUBUNGAN	2	4.484.750.000,00	-	-	
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1	6.000.000,00	-	-	
9	DINAS KESEHATAN	40	92.169.285.947,00	-	-	
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	534.493.020,00	-	-	
11	DINAS SOSIAL	12	4.641.850.000,00	-	-	
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	76.666.250.000,00	-	-	
13	DINAS PERTANIAN	20	48.521.528.526,00	-	-	
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	27	6.951.567.146,00	-	-	
15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	1.309.850.000,00	-	-	
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60	62.376.075.906,00	-	-	
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4	141.500.000,00	-	-	
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27	66.113.427.630,00	-	-	
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	40.148.741.375,00	-	-	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	6.784.504.400,00	-	-	
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2	366.950.000,00	-	-	
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	395	721.571.482.550,16	18	16.180.024.113,44	
23	DINAS DP3AKKB	0	-	1	208.085.777,00	
TOTAL		1.118	3.371.396.759.744,40	116	3.773.130.181.619,26	

**REKAP TANAH YANG SUDAH SERTIPIKAT
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SD. TAHUN 2025**

Lampiran 4 CaLK

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	Biro Umum	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	44.905	1999	Jl. Brigjen K.H. Sya'mun No. 5 Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	28/03/1992	15	Pendopo Lama Gubernur Banten	Hibah	36.501.050.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
2	Biro Umum	Tanah Bangunan Pembihtian	01.01.11.04.019	0001	50.205	2003	Jl. Taman Nisinal Ujung Kulon Ds. Cigarondong Kec. Sumur Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	27/07/2004	00003	Kantor Balai Benih Ikan Pantar (BBIP)	Pembelian	2.206.803.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
3	Biro Umum	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Bahan Ba	01.01.13.09.004	0001	50.205	2003	Jl. Raya Panimbang (Pasar Panimbang Lokasi di Bawah Jembatan) Ds. Sidamukti Kec. Patia Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	12/04/2004	00017	Lahan Pangkalan BBM Nelayan Panimbang	Pembelian	60.070.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
4	Biro Umum	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0002	103.281	2008	Jl. Serang - Pandeglang Ds/Kel. Kemanisan Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	31/10/2017	00041, 00042, 00043, & 00044	Lahan Sarana Perumahan DPRD	Pembelian	13.464.343.000	Hasil Clustering 2016 Lahan Sarana Perumahan DPRD, Sertifikat Asli A.n. Prov. Banten yang ada di Berangkas BPKAD dengan rincian Luas = 33.914 M ² + 7.195 M ² + 3.226 M ² + 58.946 M ² = 103.281 M ²
5	Biro Umum	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0012	546.411	2002	Jl. Syech Nawawi Al. Bantani (RP3B) Palima Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	10/08/2018	00004	KP3B	Pembelian	97.488.590.764	Hasil Clustering 2016 Tanah KP3B, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 546.411 M ²
6	Biro Umum	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	527.108	2008	Kel. Kemanisan Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00048	Lahan Sport Center	Pembelian	159.700.367.260	Hasil Clustering 2016 Lahan Sport Center, 2 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 525.200 M ² dan Luas = 1.908 M ²
7	Biro Umum	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 4946757/ 45	0001	6.253	2014	Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Kota. Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00048	PLUT	Mutasi /- /inventaris /Baik	4.932.801.020	Luas tanah 6.253 m ²
8	Biro Umum	Kwarda	1.3.1.01.01.04.001	000001	7.446	2006	Kel/ Panancangan , Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/12/2021	00009	Kwarda	Mutasi	2.239.878.755 M ²	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.446 M ²
9	Biro Umum	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1.3.1.01.03.09.004/ 43/	000002	300	2003	Kab. Serang, Kec. Tirtayasa, Desa Lontar	Kota. Serang	Hak Pakai	14/09/2022	00005	BBM NELAYAN	Hadiah/Hibah/ P3D/inventaris/B alk	46.500.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 300 M ²
10	BIRO ARTP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0001	7.895	2002	Jl. Ahmad Yani Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	21/12/2004	28	Rumah Dinas Wagub	Pembelian	10.013.000.000,00	Hasil Sensus 2015 (Tanah yang diperuntukan untuk Rumah Dinas Gubernur), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
11	BADAN PENGHUBUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0016	1.229	2007	Jl. Tebet Timur Raya No. 165 Rt/Rw 014/09 Blok U Kel. Tebet Timur Jakarta Selatan	Jakarta	Hak Pakai	09/01/2008	202	Badan Penghubung	Pembelian	11.120.990.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
12	BPSDM	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	199.025	2002	Desa. Kadu Merak Kec. Karang Tanjung. Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	27/07/2004	00008 & 00010	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembelian	7.972.600.000,00	Hasil Sensus 2015 ada 2 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 137.858 M ² + 61.167 M ² = 199.025 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
13	DINAS PUPR	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0003	3.237	2000	Jl. Raya Serang Ds/Kel. Telagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	03/03/2017	00003	Kantor UPT Pengairan	Hibah	185.550.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 3.237 M ²
14	DINAS PUPR	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.007	0001	475	2000	Jl. Raya Menes Ds/Kel. Pamarayan Kec. Jiput Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/04/2017	00003	Tanah Kosong	Hibah	7.350.000,00	Tanah Kosong, Sertifikat Asli a.n. Provinsi Banten dengan luasan 475 M ²
15	DINAS PUPR	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0004	57.106	2009	Kronjo Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	15/08/2016	00006	Kolam Tandon	Pembelian	1.772.702.899,00	Hasil Sensus 2015 nilai (tsk=Rp.1.433.208.000 pendukung=Rp.78.794.899, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di berangkas BPKAD
16	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.025	0001	7.345	2011	Jl. Picung-Munjul Desa Ciberang Kec.Picung Kab.Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	13/11/2017	00001	Base Camp UPR Picung	Pembelian	243.547.200,00	Hasil Sensus 2015 (Peruntukan : Base Camp UPR Picung) Sertifikat Asli a.n. Provinsi Banten dengan luasan 7.345 M ²
17	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.025	0003	10.000	2011	Jl.Cibaliung-Sumur Desa Padasuka Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	13/11/2017	00002	Base Camp UPR Cimanggu	Pembelian	251.163.200,00	Hasil Sensus 2015 (Peruntukan : Base Camp UPR Cimanggu) Sertifikat Asli a.n. Provinsi Banten
18	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	01.01.13.08.004	0002	47.524	2010	Kec. Patia Desa/Kelurahan Surianenm Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	08/02/2013	4 dan 5	Sungai Cilemer	Pembelian	1.453.224.335,00	Gabungan dari 2 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten Seluas (5.631 M ² + 41.893 M ²) Total 47.524 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
19	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	01.01.13.08.004	0003	58.880	2011	Kec. Patia Desa/Kelurahan Surianenm - Rahayu Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	1/16/2013, 2/8/2013	2, 01, dan 02	Sungai Cilemer	Pembelian	1.827.180.225,00	Gabungan dari 3 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten Seluas (17.063 M ² Desa Surianenm) + (10.271 M ² & 31.546 M ² Desa Rahayu) Total 58.880 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
20	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	01.01.13.08.004	0004	37.742	2012	Kec. Pagelaran Desa/Kelurahan Pagelaran Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	1/16/2013,2/8/2013,		Sungai Cilemer	Pembelian	1.915.312.929,00	Gabungan dari 7 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten Seluas (4.099 M ² + 883 M ² + 745 M ² + 1.326 M ² + 4.030 M ² + 22.592 M ² + 4.067 M ²) Total 37,742 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
21	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	01.01.13.08.004	0005	146.792	2013	Kec. Patia Desa/Kelurahan Surianenm - Rahayu - Cikuya - Ciawi Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	08/02/2013		Sungai Cilemer	Pembelian	16.343.107.195,00	Pembebasan lahan Cilemer Luas 146,792 (Ha) Panjang 4,8931 (Km), Gabungan dari 18 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten Seluas (6.723 M ² + 15.827 M ² + 656 M ² + 118 M ² dari Desa Surianenm) + (1.487 M ² + 4.494 M ² + 2.701 M ² dari Desa Rahayu)+ (4.336 M ² + 3.619 M ² +2.153 M ² + 384 M ² + 16.564 M ² + 2.999 M ² + 5.538 M ² dari Desa Cikuya) + (40.017 M ² +17.776 M ² + 18.974 M ² + 2.416 M ² dari Desa Ciawi) Total 146,792 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
22	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.025	0002	6.993	2011	Jl. Cipanas - Warung Banten Desa Sukamaju Kec. Cikuning Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	17/01/2019	00001	Basecamp UPR	Pembelian	242.146.000,00	Hasil Sensus 2015 (Penggunaan : Dinas PUPR & Peruntukan : Basecamp UPR), sertifikat Asli A.n. Prov. Banten dengan luasan 5,052 M ²
23	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0001	621	1998	Jl. Sangego Kel. Koang Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	01/03/2017	2	Mess / Workshop Gudang Genzet	Hibah	311.450.000,00	Sudah sertifikat A.n. Prov. Banten dengan luasan 977 M ² (Sertifikat masih di pegang Dinas SDAP)

OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan		
24	DINAS PUPR	Rawa	01.01.07.01.001	0036	1.420.000	1995	Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pengelolaan	26/07/1996	1	Rawa/Situ Cipondoh (Reservoir/Tandon Air/Pengendali Banjir)	Hibah	345.060.000.000,00	Status Kerja Sama Antara Prov. Jawa Barat dengan PT. Griya Tunggul Eka Paksi awal luas 1.420.000 m² Luas di sertifikat 1,261.757 m², Sertifikat Asli a.n Provinsi Banten
25	DINAS PUPR	Rawa	01.01.07.01.001/ 249/ 249	0008	8.340	1995	Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pengelolaan	28/04/2020	00001	Rawa/Situ Gede/Besar (Reservoir/Tandon Air/Pengendali Banjir)	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	2.800.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.340M²
26	DINAS PUPR	Rawa	01.01.07.01.001/ 278/ 278	0037	50.695	1995	Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	28/04/2020	00001	Rawa/Situ Gede/Besar (Reservoir/Tandon Air/Pengendali Banjir)	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	42.505.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 50.695 M²
27	DINAS PUPR	Tanah Waduk	01.01.11.07.001/ 57/ 57	0002	70.000,00	2000	Jl.Rangkasbitung Leuwidamar Ds/kel.Palayaran Kab.Cimarga Kab.Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	18/02/2019	00001	Situ	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	350.700.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 101.100 M²
28	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	01.01.11.07.004/ 3732635/ 3732635	0001	12.063,00	2018	Pembebasan Lahan Sindangheula dengan Luas 235.435 M2	Kab. Serang	Hak Pakai	28/12/2020	00001	Waduk Sindangheula	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	2.475.231.735,44	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.830 M²
29	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	01.01.11.07.004/ 3732635/ 3732635					Kab. Serang	Hak Pakai	28/12/2020	00002	Waduk Sindangheula	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.233 M²
30	DINAS PUPR	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002/ 3802197/ 3802197	0002	5.400	2018	Desa Kadu Jajar Kec. Malingging Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	08/12/2021	00009	Tanah Kampung Lain-lain	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	2.412.091.668,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5400
31	DINAS PUPR	Rawa	01.01.07.01.001/ 194/ 194	0004	692	1945	RAWA SINDANG MANDI DS.SINDANG MANDI KEC.BAROS KAB.PANDEGLANG	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/03/2021	00001	Rawa	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	45.100.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 692
32	DINAS PUPR	Waduk	01.01.07.02.002/ 226/ 226	0009	3.519	1945	SITU RAMONES DS. SINDANG MANDI KEC. BAROS KAB. SERANG (Taman Sari)	Kab. Serang	Hak Pakai	17/03/2021	00001	Waduk	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	22.550.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3519
33	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	01.01.11.01.002/ 292/ 292	0008	58	1998	JL. KH. Hasyim Ashari Kel. Cipondoh - Kec. Cipondoh - Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pengelolaan	26/07/1996	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	17.450.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 58
34	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	01.01.11.01.002/ 293/ 293	0010	116	1998	JL. KH. Hasyim Ashari Kel. Cipondoh - Kec. Cipondoh - Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pengelolaan	26/07/1996	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	34.900.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 116
35	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 115/ 115	0042	1.366	2016	Ruas Jalan Maja - Kolesang KAB LEBAK KEC. MAJA	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00009	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	63.794.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1366
36	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 119	0046	2.478	2016	Ruas Jalan Cikotok - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. CILOGRANG	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.690.875.000,00	
37	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. CILOGRANG	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00005	Tanah Jalan	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
38	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. CILOGRANG	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00005	Tanah Jalan	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
39	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 120	0047	17.500	2016	Ruas Jalan Gunung Madur - Pulau Manuk(KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00031	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.395.625.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1332
40	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 121/ 121	0048	15.925	2016	Ruas Jl. A. Yani (Rangkasbitung) KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	0058	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.226.225.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15925
41	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 122/ 122	0049	4.491	2016	Ruas Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung) (KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	7.615.736.800,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4491
42	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 115/ 115	0042	89.490	2016	Ruas Jalan Maja - Sangiang KAB LEBAK KEC. MAJA	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	4.273.171.375,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2128
43	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 116/ 116	0043		2016	Ruas Jalan Maja - Sangiang KAB LEBAK KEC. MAJA	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1751
44	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 117/ 11	0044		2016	Ruas Jalan Maja - Sangiang KAB LEBAK KEC. MAJA	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6847
45	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 118/ 118	0045		2016	Ruas Jalan Maja - Sangiang KAB LEBAK KEC. MAJA	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00007	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1416
46	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 119	0047	112.725	2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00008	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.690.875.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3821
47	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 120	0048		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00007	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3339
48	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 121	0049		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1264
49	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 122	0050		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00009	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2122
50	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 123	0051		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2633
51	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 124	0052		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00004	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 579
52	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 125	0053		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3441
53	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 126	0054		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00006	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1285
54	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 119/ 127	0055		2016	Ruas Jalan Cilayang - Bts Jahar KAB LEBAK KEC. Curugitung	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00007	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1183
55	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 120	0047	1.820	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00017	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.906.934.120,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1820
56	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 121	0048	3.973	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00013	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	4.162.774.318,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3973
57	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 122	0049	4.702	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00011	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	4.926.595.732,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4702
58	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 123	0050	1.455	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00009	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.524.499.530,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1455
59	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 124	0051	845	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00016	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	885.362.270,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 845
60	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/ 120/ 125	0052	2.118	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00017	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	2.219.168.388,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2118

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
61	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/120/126	0053	1.297	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00015	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.277.226.753,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1297
62	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/120/127	0054	1.650	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00014	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.728.813.900,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1650
63	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/120/128	0055	9.761	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00012	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	10.227.243.926,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9761
64	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/120/129	0056	10.850	2016	Ruas Jalan Bayah Timur KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00010	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	11.368.261.100,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10850
65	DINAS PUPR	Tanah Jalan	01.01.11.08.001/122/122	0049	15.550	2016	Ruas Jalan Suwakan KAB LEBAK KEC. BAYAH	Kab. Lebak	Hak Pakai	31/12/2021	00005	Tanah Jalan	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	16.292.761.300,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15550
66	DINAS PUPR	Danau/Situ	01.01.07.02.001/205/205	0004	16.000	1945	SITU CIBIRAI KEL.CIBIRAI KEC.PADARINCANG KAB. SERANG	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00003	Danau/Situ	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	64.150.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 16000
67	DINAS PUPR	Danau/Situ	01.01.07.02.001/207/207	0006	10.000	1945	TELAGA WANGSADS.CIPAYUNG KEC.PADARINCANG KAB.SERANG	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00003	Danau/Situ	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	40.100.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10000
68	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	429.940	2016	Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/12/2022	00004	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	29.164.263.333	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 429.940 m2
69	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
70	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
71	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
72	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
73	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
74	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
75	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
76	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	241.900	2016	Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/12/2022	00005	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	8.254.837.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1618
77	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
78	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
79	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
80	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
81	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
82	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
83	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044			Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
84	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
85	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
86	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
87	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
88	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
89	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
90	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
91	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
92	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
93	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
94	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
95	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
96	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
97	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							
98	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik							

OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
99	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	112.725	2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten (KAB LEBAK KEC. CIPANAS)	Kab. Lebak			Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik			
100	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	1.690.875.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2372
101	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
102	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
103	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
104	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
105	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
106	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
107	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
108	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
109	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
110	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
111	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
112	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046			Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
113	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046	Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik				
114	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/119/119	0046	Ruas Jalan Cikotok - Bts Jabar (KAB LEBAK KEC. CILOGRANG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik				
115	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/122/122	0049	12577,6	2016	Ruas Jl. Suman Kalijaga (Rangkasbitung) (KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	7.615.736.800	
116	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/122/122	0049			Ruas Jl. Suman Kalijaga (Rangkasbitung) (KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	04/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
117	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/122/122	0049			Ruas Jl. Suman Kalijaga (Rangkasbitung) (KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	05/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
118	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/122/122	0049			Ruas Jl. Suman Kalijaga (Rangkasbitung) (KAB LEBAK KEC. RANGKASBITUNG)	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/02/2022	18	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		
119	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054	28168	2016	Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	78	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	2.866.094.000	Sertifikat Asli dengan Luas = 2.473
120	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			77	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 5.923
121	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			15	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 2.364
122	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			14	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 7.016
123	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			13	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 2.398
124	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			20	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 6.194
125	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 5.157
126	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/127/127	0054			Ruas Jl. Raya Labuan (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. MAJASARI/KEL. SARUNI)	Kab. Pandeglang			5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 3.813
127	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/126/126	0053	959	2016	Ruas Jl. Abdul Rahim (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. PANDEGLANG)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00076	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	551.664.750	
128	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/126/126	0053	7290	2016	Ruas Jl. Widagdo (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. PANDEGLANG)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00011	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	1.167.757.500	Sertifikat Asli dengan Luas = 5.614
129	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/129/129	0056	12702,2	2016	Ruas Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. KABAYAN)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00012	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	1.588.727.665	Sertifikat Asli dengan Luas = 14.332
130	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/129/129	0056			Ruas Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. KABAYAN)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00013	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 15.412
131	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/124/124	0051	10752	2016	Ruas Jl. A. Yani (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. PANDEGLANG)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00007	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik	6.185.088.000	
132	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/124/125	0052			Ruas Jl. A. Yani (Pandeglang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. PANDEGLANG)	Kab. Pandeglang				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiab/Hibab /- /Inventaris /Baik		

No	OPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
133	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/124/126	0053			Ruas Jl. A. Yani (Pandeplang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. PANDEGLANG)	Kab. Pandeglang				Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
134	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/125/125	0052	1218	2016	Ruas Jl. Th. Asnawi (Pandeplang) (KAB PANDEGLANG KEC. PANDEGLANG/ KEL. KABAYAN)	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	11/12/2014	00076	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	152.341.350	Sertifikat Asli dengan Luas = 5.156
135	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108	4851	2016	Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	1982	0001	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	3.261.084.750	Sertifikat Asli dengan Luas = 64.470
136	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108			Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/07/2014	00029	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 1.129
137	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108			Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/07/2014	00027	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 4.903
138	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108			Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/09/2014	00030	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 964
139	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108			Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/09/2014	00028	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 537
140	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/181/181	0108			Ruas Jl. Mayor Safei (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/09/2014	00031	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 661
141	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/178/178	0105	22379	2016	Ruas Jl. A. Yani (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	26/06/1982	0001	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	23.095.128.000	Sertifikat Asli dengan Luas = 29.395
142	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/178/178	0105			Ruas Jl. A. Yani (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/08/2014	00084	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 7.156
143	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/178/178	0105			Ruas Jl. A. Yani (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/08/2014	00086	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli dengan Luas = 980
144	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/184/184	0111	8110,4	2016	Ruas Jl. Yusuf Martadilaga (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/08/2014	23	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	3.809.860.400	
145	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/184/184	0111			Ruas Jl. Yusuf Martadilaga (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	22/08/2014	23	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
146	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/183/183	0110	5638,5	2016	Ruas Jl. TB. A. Karib (Serang) (KOTA SERANG)	Kota. Serang	Hak Pakai	21/08/2014	87	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	2.655.733.500	Sertifikat Asli dengan Luas = 6.955
147	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.01.01.002/288/288	0004	2.000	1998	JL. Raya Jeggot Desa Kresak Kec. Kresak Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	29/11/2022	0001	Kantor dan Rumah Tinggal	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	40.100.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.955
148	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.01.01.002/291/291	0007	700	1998	JL. Kampung Melayu Desa Kampung Melayu Kec. Teluk Naga - Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	29/11/2022	00010	Kantor dan Rumah Dinas	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	90.800.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 700
149	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.01.01.004/54/54	0008	70	2000	JL.Keboan Jeruk Ds/kef. Pangkalan Kec.Teluk Naga Kab.Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	29/11/2022	00011	Kantor dan Rumah Dinas	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	700.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 70
150	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.01.01.002/290/290	0006	600	1998	JL. Raya Pasar Kemis Desa Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis - Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	04/11/2022		Kantor dan Rumah Dinas	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	30.100.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 586
151	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.01.01.002/289/289	0005	392	1998	JL. Ir Sutarni 18 Kel. Padalarangan Uduk Kec. Kreojo Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022		Kantor dan Rumah Tinggal	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	1.950.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 329
152	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.3.1.01.01.01.002/286/286	0005	459	1998	JL. Cadas Daon Desa Mekarsari-Kec. Rajeg Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	28/12/2022		Kantor dan Rumah Tinggal	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	4.600.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 459
153	DINAS PUPR	Jalan Provinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001	000013	16.271	2006	Desa/Kel Sangiang, Kec. Maja, Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00009	Ruas Jalan Maja - Koleang	Pembelian	16.424.089.428	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.128 M ²
154	DINAS PUPR	Jalan Provinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001	000013			Desa/Kel Maja , Kec. Maja, Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00022	Ruas Jalan Maja - Koleang	Pembelian		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.366 M ²
155	DINAS PUPR	Jalan Provinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001	000013			Desa/Kel Ciburuy, Kec. Curug Bitung, Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00004	Ruas Jalan Maja - Koleang	Pembelian		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 579 M ²
156	DINAS PUPR	Jalan Provinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001	000013			Desa/Kel Sangiang , Kec. Maja, Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00008	Ruas Jalan Maja - Koleang	Pembelian		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.847 M ²
157	DINAS PUPR	Jalan Provinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001	000010	15.080	2000	Desa/Kel Bayah Timur , Kec. Bayah, Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/02/2022	00018	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Pembelian	6.519.187.250 M ²	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.118 M ²
158	DINAS PUPR	Situ Telaga Wangsa	1.3.1.01.02.01.002	000006	10.000	1945	Desa/ Cipayung , Kec. Padalarangan, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00003	Situ Telaga Wangsa	Hadiah/Hibah	40.100.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.624 M ²
159	DINAS PUPR	Situ Cibirai	1.3.1.01.02.01.002	000004	16.000	1945	Desa/ Tanjung Sari , Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	0003	Situ Cibirai	Hadiah/Hibah	64.150.000 M ²	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.082 M ²
160	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	429.940	2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00011	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	29.164.263.333	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.216 M ²
161	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00012	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.457 M ²
162	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00017	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.257 M ²
163	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00010	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.354 M ²
164	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00013	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 972 M ²
165	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00014	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 593 M ²
166	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00016	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.007 M ²
167	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043		2016	Ruas Jalan Saketi - Malinging - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI)	Kab. Lebak	Pakai	14/07/2023	00015	Ruas Jalan Saketi - Malinging-Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.009 M ²
168	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080	64.350	2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00002	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	1.237.128.750	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.332 M ²
169	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00005	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.827M ²
170	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00006	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 197 M ²
171	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00010	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 366 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
172	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00011	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 103 M ²
173	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00012	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.114 M ²
174	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	23/06/23	00014	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 946 M ²
175	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00013	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 918 M ²
176	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00009	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 524 M ²
177	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00008	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 723 M ²
178	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00004	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 191 M ²
179	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	23/06/23	00015	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 614 M ²
180	DINAS PUPR	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	1.3.1.01.03.07.003/153/153	0080		2016	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Kab. Serang	PAKAI	16/06/23	00007	Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 429 M ²
181	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	241.900	2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00005	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	8.254.837.500	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.420 M ²
182	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00006	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.079 M ²
183	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00003	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.220 M ²
184	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00004	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.375 M ²
185	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00002	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.886 M ²
186	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00011	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.608 M ²
187	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00006	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.541 M ²
188	DINAS PUPR	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044		2016	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00012	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.112 M ²
189	DINAS PUPR	Ruas Jalan Saketi - Malingsing - Simpang	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	69.368	2016	Ruas Jalan Saketi - Malingsing - Simpang (KAB LEBAK KEC. BANJARSARI) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00002	Ruas Jalan Saketi - Malingsing Simpang	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	3.208.270.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.216 M ²
190	DINAS PUPR	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	1.3.1.01.03.07.003/118/118	0045		2016	Ruas Jalan Bayah - Cikotok (KAB LEBAK KEC. BAYAH) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00005	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.286 M ²
191	DINAS PUPR	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	1.3.1.01.03.07.003/118/119	0046		2016	Ruas Jalan Bayah - Cikotok (KAB LEBAK KEC. BAYAH) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00007	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.973M ²
192	DINAS PUPR	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	1.3.1.01.03.07.003/118/120	0047		2016	Ruas Jalan Bayah - Cikotok (KAB LEBAK KEC. BAYAH) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00006	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.878 M ²
193	DINAS PUPR	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	1.3.1.01.03.07.003/118/121	0048		2016	Ruas Jalan Bayah - Cikotok (KAB LEBAK KEC. BAYAH) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00006	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.391 M ²
194	DINAS PUPR	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	1.3.1.01.03.07.003/118/122	0049		2016	Ruas Jalan Bayah - Cikotok (KAB LEBAK KEC. BAYAH) RTRW, -/- Kp/Komp. - Kec. KAB. LEBAK KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Pakai	20/06/2023	00005	Ruas Jalan Bayah - Cikotok	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.865M ²
195	DINAS PUPR	RUAS JALAN SAKETI- MALIMPING	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	429.940	2023	Desa Jalupang Girang Kec. Banjarsari, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	21/09/23	00004	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	29.164.263.333	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.240 M ²
196	DINAS PUPR	RUAS JALAN SAKETI- MALIMPING	1.3.1.01.03.07.003/116/116	0043	429.940	2023	Desa/Kelurahan Cipeundeuy Kec. Malimping, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	19/10/23	00008	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	29.164.263.333	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.654 M ²
197	DINAS PUPR	RUAS JALAN CIPANAS - WARUNG BANTEN	1.3.1.01.03.07.003/117/117	0044	241.900	2016	Desa Majasari Kec. Sobang, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	19/10/23	00002	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	8.254.837.500	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.130 M ²
198	DINAS PUPR	RUAS JALAN CIPANAS - WARUNG BANTEN	1.3.1.01.03.07.003/117/117	*00012	241.900	2016	Desa/Kelurahan Sukamaju Kec. Sobang, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	20/09/23	00012	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	8.254.837.500	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.869 M ²
199	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI- SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/152	*000079	133910,77	2016	Desa/ Mekarsari Kec. Carenung, Kab Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00001	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20.200 M ²
200	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Cerukuc Kecamatan Tanara, Kab Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00011	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.610 M ²
201	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Kebon Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.370 M ²
202	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Kebon Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	13/11/23	00004	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.177 M ²
203	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Kebon Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00002	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.521 M ²
204	DINAS PUPR	SRUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Sujung Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	13/11/23	00001	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.608M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Setatus Tanah Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
205	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Sijung Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	13/11/23	00002	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 387 M ²
206	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG-KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	129.010,00	2018	Desa Susukan Kec. Tirtayasa, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00001	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.570 M ²
207	DINAS PUPR	RUAS JALAN BANTEN LAMA - PONTANG	1.3.1.01.03.07.002/3804268/	000019	112.560,00	2018	Desa Pontang Kec. Pontang, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00016	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.993.480.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.325 M ²
208	DINAS PUPR	RUAS JALAN BANTEN LAMA - PONTANG	1.3.1.01.03.07.002/3804268/	000019	112.560,00	2018	Desa Sukajaya Kec. Pontang, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.993.480.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 580 M ²
209	DINAS PUPR	RUAS JALAN BANTEN LAMA - PONTANG	1.3.1.01.03.07.002/3804268/	000019	112.560,00	2018	Desa Kubang Puji Kec. Pontang, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00018	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	2.993.480.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.431 M ²
210	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	5.682	2016	Desa kemuning Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/10/2023	00004	RUAS JALAN CURUG LEGOK-PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.682 M ²
211	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	8.216	2016	Desa kemuning Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/10/2023	00003	RUAS JALAN CURUG LEGOK-PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.216 M ²
212	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	23.078	2016	Desa/Curug Kulon Kec. Curug, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/10/2023	00009	RUAS JALAN CURUG LEGOK-PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 23.078 M ²
213	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	25.185	2016	Desa/Caringin Kec.Legok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/10/2023	00005	RUAS JALAN CURUG LEGOK-PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 25.185 M ²
214	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/143/	000070	13.681	2016	Desa/Cukang galih Kec. Curug Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/10/2023	00005	RUAS JALAN SIMPANG BITUNG -CURUG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.780.800.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.681 M ²
215	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Sungai Dan Penanggulangan Bencana	1.3.1.01.03.08.004/65/	000004	2.761	2012	Desa Suka Dame Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	20/11/2023	00018	Tanggai Sungai Cilmer	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	1.915.312.929	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.761 M ²
216	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Sungai Dan Penanggulangan Bencana	1.3.1.01.03.08.004/65/	000004	5.449	2012	Desa Suka Dame Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	20/11/2023	00017	Tanggai Sungai Cilmer	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	1.915.312.929	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.449 M ²
217	DINAS PUPR	Tanah Untuk Bangunan Sungai Dan Penanggulangan Bencana	1.3.1.01.03.08.004/65/	000004	971	2012	Desa Suka Dame Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	20/11/2023	00016	Tanggai Sungai Cilmer	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	1.915.312.929	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 971 M ²
218	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	64.350	2016	Desa Cisitn, Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00004	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.237.128.750	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2520
219	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	1.022	2016	Desa Cisitn, Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00005	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas =
220	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	1.903	2016	Desa Cisitn, Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00003	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1903
221	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	4.134	2016	Desa Citaman, Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00002	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4134
222	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	4.118	2016	Desa Citaman, Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00003	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4118
223	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	2.146	2016	Desa Panyauangan Jaya Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00003	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2146
224	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	262	2016	Desa Panyauangan Jaya Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/2023	00004	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 262
225	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	1.054	2016	Desa sukadana Kec. Ciomas, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	07/12/2023	00006	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1054
226	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	7.709	2016	Desa sukadana Kec. Ciomas, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	07/12/23	00007	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7709
227	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	5.395	2016	Desa Lebak Banten Kec. Ciomas, Kab. Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/12/23	00006	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5395
228	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	4.574	2016	Desa Panyauangan Jaya Kec. Ciomas, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/23	00005	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4574
229	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	3.908	2016	Desa SukalBares, Kec.Ciomas, Kab.Serang	Kab. Serang	PAKAI	07/12/23	00007	RUAS JALAN CIOMAS MANDALAWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3908
230	DINAS PUPR	Tanah Danau/Situ/Embung	1.3.1.01.02.01.002/329/	0005	69.600	1945	Desa Karya Sari Kec. Cikedal Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	13/12/23	00002	SITU SIGONGGONG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.124.250.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 69600
231	DINAS PUPR	Tanah Danau/Situ/Embung	1.3.1.01.02.01.002/355/355	0031	19.320	1945	SITU GAMBAR KEL.MENES KEC.MENES KAB.PANDEGLANG	Kab. Pandeglang	PAKAI	13/12/23	00005	SITU GAMBAR	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	200.400.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19320
232	DINAS PUPR	Tanah Danau/Situ/Embung	1.3.1.01.02.01.002/355/355	0031	7.013	1945	SITU GAMBAR KEL.MENES KEC.MENES KAB.PANDEGLANG	Kab. Pandeglang	PAKAI	13/12/23	00004	SITU GAMBAR	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7013
233	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/386/386	0010	13127	2017	DESA LEBAKWANA KEC.KRAMATWATU	Kab. Serang	PAKAI	07/12/23	00014	SMKN 1 KRAMAT WATU	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	3.521.780.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.127
234	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	16.684	2016	Desa Kadu Sirang Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00006	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.684M ²
235	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	36.220	2016	Desa Situ Gading Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00022	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 36.220 M ²
236	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	17.605	2016	Desa Jatake Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00001	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.605 M ²
237	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	25.841	2016	Desa Sampora Kec. Cisaok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00527	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 25.841 M ²
238	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/143/	*000070	31.017	2016	Desa Kadujaya Kec. Ciurug, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00006	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.780.800.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 31.017M ²
239	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	13.694	2016	Kelurahan Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00015	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.694 M ²
240	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	20.978	2016	Desa Cirarab Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00002	Tanah Untuk Jalan Provinsi	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20.978 M ²
241	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/108/	*000016	19.831	2016	Desa Pasar Keong , Kec. Cibadak, Kab. Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	28/11/2023	00007	UPTD PUPR CIBADAK	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	2.433.187.528	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19.831 M ²
242	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/	000044	1.919	2016	Desa Warung Banten Kec. Cibeber, Kab. Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/11/2023	00007	RUAS JALAN CIPANAS-WARUNG BANTEN	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	8.254.837.500	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.919 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
243	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/117/	000044	2.437	2016	Desa Warung Banten Kec. Cibeber, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/11/2024	00008	RUAS JALAN CIPANAS-WARUNG BANTEN	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	8.254.837.500	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.437 M²
244	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	16.684	2016	Desa Kadu Sirung Kec. Pagedangan, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00006	RUAS JALAN CISAUK - JAJA	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.684M²
245	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	36.220	2016	Desa Situ Gading Kec. Pagedangan, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00022	RUAS JALAN CISAUK - JAJA	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 36.220 M²
246	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	17.605	2016	Desa Jatake Kec. Pagedangan, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00001	RUAS JALAN CISAUK - JAJA	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.605 M²
247	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/145/	000072	25.841	2016	Desa Sampora Kec. Cisauk, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00527	RUAS JALAN CISAUK - JAJA	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	14.657.832.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 25.841 M²
248	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/143/	*000070	31.017	2016	Desa Kadujaya Kec. Clurug, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00006	RUAS SIMPANG -BITUNG CURUG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.780.800.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 31.017M²
249	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	13.694	2016	Kelurahan Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00015	RUAS JALAN CURUG LEGOK PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.694 M²
250	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi	1.3.1.01.03.07.003/144/	000071	20.978	2016	Desa Cisarah Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	19/12/23	00002	RUAS JALAN CURUG LEGOK PARUNG PANJANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	27.116.180.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20.978 M²
251	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/5051800/	*000001	871	2019	Kelurahan Karundang Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00014	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	2.218.092.527	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 871 M²
252	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	-	-	7.450	-	Kelurahan Sumur Pecung Kec. Serang, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00051	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	-	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.450 M²
253	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	-	-	13.190	-	Kelurahan Cipocok Jaya , Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23		Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	-	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.190 M²
254	DINAS PUPR	Tanah Waduk	1.3.1.01.02.01.004/220/	*000003	40.000	1945	Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	Tanah Waduk	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	160.300.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 40.000 M²
255	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	10.190	2016	Desa/ Mekarsari Kec. Carenang, Kab Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00002	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.190 M²
256	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	17.600	2016	Desa Pamanuk Kec. Carenang, Kab Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00007	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.600 M²
257	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	2.454	2016	Desa Koper Kec. Cikande, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00002	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.454 M²
258	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	27.600	2016	Desa Koper Kec. Cikande, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00003	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 27.600 M²
259	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	23.210	2016	Desa Parigi Kec. Cikande , Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00011	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 23.210 M²
260	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	3.037	2016	Desa Songgom Jaya Kec. Cikande, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00009	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.037 M²
261	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	21.131	2016	Desa Cakung Kec. Binaung, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00002	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 21.131M²
262	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	25.680	2016	Desa Cakung Kec. Binaung, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00001	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 25.680 M²
263	DINAS PUPR	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	1.3.1.01.03.07.003/152/	*000079	3.932	2016	Desa Rongel Kec. Binaung, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00002	RUAS JALAN PARIGI-SUKAMANAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.932 M²
264	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	815	2018	Desa Sukamanah Kec. Tanara, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00032	RUAS JALAN PONTANG KRONJO	Lainnya /APBD /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 815 M²
265	DINAS PUPR	RUAS JALAN PONTANG KRONJO	1.3.1.01.03.07.002/3804269/	*000020	2.583	2018	Desa Sosukan Kec. Tirayana, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	04/01/24	00003	RUAS JALAN PONTANG KRONJO	Lainnya /APBD /Inventaris /Baik	2.323.921.635,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.583 M²
266	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018238/23018238	0000	519	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	421.681.048,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 519
267	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018239/23018239	0000	3.727,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.115.621.778,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.727
268	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018240/23018240	0000	4.736,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.834.286.469,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.736
269	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018241/23018241	0000	131	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	101.598.841,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 131
270	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018242/23018242	0000	167	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	130.131.375,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 167
271	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018243/23018243	0000	171	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	61.344.841,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 171
272	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/23018244/23018244	0000	45	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	16.143.379,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 45

	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
273	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018245/ 23018245	0000	99	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	35.515.435,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 99
274	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018246/ 23018246	0000	3.792,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.507.410.262,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.792
275	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018247/ 23018247	0000	2.513,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.027.997.094,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.513
276	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018248/ 23018248	0000	2.002,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00017	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	816.906.230,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.002
277	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018249/ 23018249	0000	1.662,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	677.657.617,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.662
278	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018439/ 23018439	0000	648	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	249.019.602,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 648
279	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23018440/ 23018440	0000	6.685,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	2.824.958.096,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.685
280	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487115/ 23487115	0000	3.432,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.599.085.476,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.432
281	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487116/ 23487116	0000	254	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	101.004.532,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 254
282	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487117/ 23487117	0000	1.638,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	667.828.302,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.638
283	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487118/ 23487118	0000	322	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	128.854.254,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 322
284	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487119/ 23487119	0000	2.340,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00018	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.007.905.421,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.340
285	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487125/ 23487125	0000	3.023,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00019	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.438.806.082,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.023
286	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487126/ 23487126	0000	2.238,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00019	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.014.119.910,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.238
287	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/ 23487127/ 23487127	0000	3.781,00	2022	TONJONG - BANTEN LAMA TERLETAK DI DESA KASUNYATAN, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	PAKAI	05/01/2024	00019	DPUPR	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.142.245.117,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.781
288	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 131/	0058	132.020	2016	Desa Kadu Madang , Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	24/04/2024	00002	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	4.258.305.100	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 495 M ²
289	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 131/	0058	132.020	2016	Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	08/05/24	NIB. 28.02.000 000024.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	207.399.650,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6430 M ²
290	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 131/	0058	132.020	2016	Desa Dalam Balar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	16/05/24	00002	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	64.219.705,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1991 M ²
291	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 131/	0058	132.020	2016	Desa Kadu Madang Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	16/05/24	00003	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	151.017.910,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.682 M ²
292	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 131/	0058	132.020	2016	Desa Kadu Madang, Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	16/05/24	00003	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	26.320.080,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 816 M ²
293	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.02.01.002/ 341/	0017	35.000	1999	Desa Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	24/06/24	00008	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1,360,800,000.00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8765 M ²
294	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.02.01.002/ 337/	0013	20.000	1999	Kel. Atas Wangi Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	03/06/24	NIB. 28.02.000 000148.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	342,000,000.00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.370 M ²
295	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/ 151/	0078	74.736	2016	Desa Linduk , Kec. Pontang, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	29/04/2024	00059	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	106.753.800	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.864 M ²

	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M²)	Tahun Pengadaaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
296	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Pontang , Kec. Pontang, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/2024	00017	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	103.170.000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.600 M²
297	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Sukanegara, Kec. Pontang, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/2024	00002	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	302.722.500	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 22.300 M²
298	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Kadikaran , Kec. Ciruas, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/2024	00002	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	100.699.350	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 7.418 M²
299	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Pulo Kencana , Kec. Pontang, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/2024	00005	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	91.251.150	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 6.722 M²
300	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Kubang puji, Kec. Pontang, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/2024	00020	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	154.755.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 11.400 M²
301	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/150/	0077	30.579	2016	Desa Pegadigan Kec. Kramatwatu, Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/24	00007	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.049.702.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 12.560 M²
302	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/150/	0077	30.579	2016	Desa kramatwatu Kec. Kramat watu, Kab Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/24	00020	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	390.629.550	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 4.674 M²
303	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/150/	0077	30.579	2016	Desa Margasana Kec. Kramatwatu, Kab Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/24	00009	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	774.238.800	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 9.264 M²
304	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/152/	0079	133.911	2016	Desa Songgom Jaya Kec. Cikande, Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/24	00010	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	893.947.500,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 12.060 M²
305	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/152/	0079	133.911	2016	Desa Linduk Kec. Pontang Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	29/04/24	00058	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.041.233.875,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 14.047 M²
306	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	0081	74.100	2016	Desa Pamengkang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003029.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	303.128.870	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 2.941 M²
307	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	0081	74.100	2016	Desa Tonjong, Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003034.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	157.490.960	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.528 M²
308	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	0081	74.100	2016	Desa Tonjong, Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003026.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	336.008.200	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 3.260 M²
309	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	0081	74.100	2016	Desa Tonjong, Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003032.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	115.850.680	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.124 M²
310	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800	2016	Kel. Angsana, Kec. Mancak, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003028.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.166.379.500,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 14.830 M²
311	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800	2016	Kel. Mancak, Kec. Mancak, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003033.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	355.104.750,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 4.515 M²
312	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800	2016	Desa. Waringin, Kec. Mancak, Kab. Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003030.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	278.027.750,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 3.535 M²
313	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Citerep , Kec. Ciruas, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	03/05/2024	00013	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	117.559.500	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 8.660 M²
314	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/151/	0078	74.736	2016	Desa Pulo Gosara Kec. Ciruas, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003031.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	241.770.750	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 17.810 M²
315	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/150/	0077	74.736	2016	Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu, Kab.Serang	Kab.Serang	PAKA1	14/08/2024	NIB. 28.01.000 003027.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	22.534.500	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.660 M²
316	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/156/	0083	6.300	2016	Kel. Ramanuju ,Kec. Purwakarta kota Cillegon	kota Cillegon	PAKA1	21/03/24	00019	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	3.672.900.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 3.184 M²
317	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.002/287/	0003	1.160	1998	Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKA1	17/05/24	0025	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	116.350.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.160M²
318	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.002/285/	0001	4.000	1998	Desa Jatiwaringin, Kec.Mauk Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKA1	17/05/24	00011	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	401.200.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 2.885M²
319	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.02.01.001/263/	0022	323.400	1995	Kel. Cihuni, Kec. Pagedangan Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKA1	03/09/2024	NIB. 28.04.000 012489.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	41.395.200.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 324.442 M²
320	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.04.001/298/	0001	621	1998	Kel. Koang Jaya, Kec. Karawaci Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKA1	15/07/2024	NIB. 28.01.000 002148.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	311.450.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.903 M²
321	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.04.001/298/	0001	621	1998	Kel.Koang Jaya , Kec Karawaci Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKA1	15/07/2024	NIB. 28.05.000 002147.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	311.450.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 286 M²
322	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.007/297/	0001	378	1998	Kel. Ciruendes, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	0	PAKA1	21/02/2024	00070	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	75.850.000	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 400 M²
323	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/165/	0092	10.850	2016	Kel. Setu, Kec. Setu Kota Tangel	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	03/09/2024	NIB. 28.01.000 003443.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	543.397.860	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 10.574 M²
324	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/165/	0092	10.850	2016	Kel. Setu, Kec. Setu Kota Tangel	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	03/09/2024	NIB. 28.01.000 003469.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	354.847.950	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 6.905 M²
325	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100	2024	Desa Tonjong, Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB. 28.02.000 00647.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	137.495.380,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.334 M²
326	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Pamengkang , Kec. Kramatwatu kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB.28.01 .00000640 4.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	149.348.430	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.449M²
327	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Pamengkang, Kec. Kramatwatu kab.Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB.28.01 .00000640 6.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	262.828.500,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 1.828 M²
328	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Karet, Kec. Kramatwatu kab Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB.28.01 .00000640 9.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	262.828.500,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 2.550M²
329	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	132.020,00	2024	Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB. 28.01.000 006408.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	458.867.640,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 4.452 M²
330	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Teluk Terate Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB. 28.01.000 006415.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	562.349.920,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 5.456 M²
331	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Tonjong Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB. 28.01.000 006405.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	622.027.450,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 6.035 M²
332	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2024	Desa Terate Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	30/09/24	NIB. 28.01.000 006414.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	627.490.160,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 6.088 M²
333	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800,00	2016	Desa Anyar, Kec. Anyar Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB. 28.01.000 016286.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	258.994.450,00	Sertipikat Asli .A.n Pemproo Banten Dengan Luas = 3.293 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
334	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800,00	2016	Desa Waringin, Kec. Mancak kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB.28.01.00001629 0.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.138.852.000,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.480M²
335	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800,00	2016	Kel Mancak, Kec. Mancak kab.Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB.28.01.00001628 9.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	433.282.850,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.509 M²
336	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pancanegara, Kec. Pabuaran kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB.28.01.00001628 8.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	414.878.750,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.275M²
337	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB. 28.01.000 01622.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	428.485.200,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.448 M²
338	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Tanjung Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB. 28.01.000 006415.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	453.181.300,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.762 M²
339	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB. 28.01.000 016223.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	500.292.650,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.361 M²
340	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24	NIB. 28.01.000 016291.0	DPUPR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	287.701.700,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.658 M²
341	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000001	58.005,00	2015	Desa Kadu Beureum, Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/2024	NIB. 28.01.000 020534.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	333.082.750	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.235 M²
342	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000001	58.005,00	2015	Desa Kadu Beureum, Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/2024	NIB. 28.01.000 016287.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	358.722.650	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.561 M²
343	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari, Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/2024	NIB. 28.01.000 020539.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	466.551.800	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.932 M²
344	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Heula, Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/2024	NIB. 28.01.000 016285.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	430.215.500	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.470 M²
345	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/149/	0076	85.800,00	2016	Desa Labuan, Kec. Mancak, Kab.Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/2024	NIB. 28.01.000 020548.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	167.062.500,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.500 M²
346	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Ketapang, Kec. Mauk, Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 028979.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	3.800.259.255,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.611 M²
347	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Tanjungnom, Kec. Mauk, Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 028984.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	2.990.843.960,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.172 M²
348	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Sukawali Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 028991.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.852.024.490,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.378 M²
349	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Marga Mulya Kec. Mauk, Kab. Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024	NIB. 28.04.000 033892.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	3.693.882.150,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.230 M²
350	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Mauk Timur Kec. Mauk, Kab. Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024	NIB. 28.04.000 033893.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.133.293.095,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.059 M²
351	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/140/	000076	125.868,00	2016	Kel. Ketapang, Kec. Mauk Kab Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 028999.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	2.491.067.010,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.922 M²
352	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Lontar, Kec. Kemiri Kab. Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 028995.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.321.714.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.861 M²
353	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Patramanggala, Kec. Kemiri Kab Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	31/10/2024	NIB. 28.04.000 0128971.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.275.982.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.243 M²
354	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Klebet Kec. Kemiri Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024	NIB. 28.04.000 034658.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	117.882.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.593 M²
355	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Karang Anyar, Kec. Kemiri Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024	NIB. 28.04.000 034652.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.393.124.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.826 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
356	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Jenggat, Kec. Mekar Baru Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024 NIB. 28.04.000 033889.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	759.536.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.264 M²
357	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/139/	000066	67.212,80	2016	Kel. Jenggat, Kec. Mekar Baru Kab.Tangerang	Kab.Tangerang	PAKA1	08/11/2024 NIB. 28.04.000 033885.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.112.294.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 15.031 M²
358	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.02.01.001/268/	000027	17.000,00	1995	Kel. Cempaka Putih , Kec Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	12/01/2024 *00036	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	9.129.000.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 403 M²
359	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.02.01.001/268/	000027	17.000,00	1995	Kel. Cempaka Putih , Kec Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	03/07/2024 *00035	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8362 M²
360	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pasanggrihan Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021897.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	2.970.005.599	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.965 M²
361	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pasanggrihan Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021888.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	3.741.532.904,73	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.995 M²
362	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pasanggrihan Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021896.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	3.192.475.123,12	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.262 M²
363	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021892.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.767.739.126,85	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.365 M²
364	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021894.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.498.079.097,68	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.005 M²
365	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021899.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	2.701.094.625,52	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.606 M²
366	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Sindang Heula Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021895.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.199.205.898,68	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.606 M²
367	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021890.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.308.568.021,63	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.752 M²
368	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Kadubeureum Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	09/10/24 NIB. 28.01.000 021898.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	5.487.581.593,61	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.326 M²
369	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/	000001	58.005,00	2015	Desa Kadubeureum Kec. Pabuaran Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.01.000 021893.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.898.856.038,74	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.535 M²
370	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/168/	000095	4.009,50	2016	Kel. Ciputat, Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	18/12/24 NIB. 28.07.000 012274.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baikk	13.371.682.500,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.135M²
371	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/167/	000094	40.225,50	2016	Kel. Jomhang, Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	18/12/24 NIB. 28.07.000 012271.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	34.221.600.000,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 9.349 M²
372	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/174/	000101	59.001,60	2016	Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	18/12/24 NIB. 28.07.000 012337.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	99.830.707.200,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.671 M²
373	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/173/	000100	59.253,50	2016	Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKA1	18/12/24 NIB. 28.07.000 012304.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	124.106.455.750,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 11.460 M²
374	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.002/294/	000011	70,00	1998	Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKA1	12/12/24 NIB. 28.05.000 012065.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	24.550.000,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 70 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
375	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.002/295/	000012	350,00	1999	Kel. Suka Rasa, Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKA1	13/12/24 NIB. 28.05.000 013961.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	351.050.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 509 M ²
376	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.01.01.004/296/	000001	378,00	1998	Kel. Jurumudi, Kec. Benda Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKA1	31/10/24 NIB. 28.05.000 008684.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	151.650.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 318 M ²
377	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/175/	000102	54.120,00	2016	Kel.Untuyur Kec. Serang Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	03/12/24 NIB. 28.08.000 005288.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	611.609.612,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.582 M ²
378	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/175/	000102	54.120,00	2016	Kel.Untuyur Kec. Serang Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	29/11/24 NIB. 28.08.000 005286.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	332.747.250,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.125 M ²
379	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/175/	000102	54.120,00	2016	Kel.Untuyur Kec. Serang Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	29/11/24 NIB. 28.08.000 005287.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	230.220.764,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.854 M ²
380	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/175/	000102	54.120,00	2016	Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	10/12/24 NIB. 28.08.000 021892.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.348.977.518,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.723 M ²
381	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/175/	000102	54.120,00	2016	Kel. Kasanyatan Kec. Kasemen Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	10/12/24 NIB. 28.08.000 006893.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.439.162.106,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.841 M ²
382	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/3804267/	000018	6.972,00	2016	Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	Kota Serang	PAKA1	10/12/24 NIB. 28.08.000 006094.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	484.554.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.554 M ²
383	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/154/	000081	74.100,00	2016	Desa Pamungkahg Kec. Kramatwatu Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	24/12/24 NIB. 28.01.000 023528.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	7.637.520.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.101 M ²
384	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.003/152/	000079	133.910,77	2016	Desa Renged Kec. Binaung Kab. Serang	Kab. Serang	PAKA1	24/12/24 NIB. 28.01.000 023259.0	DPUPR	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	9.926.135.769,23	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.830 M ²
385	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/152/	000079	133.911	2016	Desa Lempuyang, Kec. Tanara Kab. Serang	Desa Lempuyang, Kec. Tanara Kab. Serang	PAKA1	10/12/24 NIB. 28.01.000 023462.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	992.613.576.923,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 30.870 M ²
386	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/	000080	64.350	2016	Desa Panyaungan Jaya, Kec. Ciomas Kab. Serang	Desa Panyaungan Jaya, Kec. Ciomas Kab. Serang	PAKA1	10/12/24 NIB. 28.01.000 023461.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.237.128.750,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 951 M ²
387	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/168/168	000095	4.010	2016	Kel Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang . Selatan	Kel Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang . Selatan	PAKA1	18/12/24 NIB. 28.07.000 012338.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	13.371.682.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.042 M ²
388	DINAS PUPR	Tanah Danau/Situ/Embung	1.3.1.01.02.01.002/350/	000026	5.000	1999	Desa Labanjata Kec. Banjarsari, Kab. Lebak	Desa Labanjata Kec. Banjarsari, Kab. Lebak	PAKA1	25/03/25 NIB. 28.03.000 01.19525.0	Tanah Danau/Situ/Embung	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	65.000.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.214 M ²
389	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/24215898/	000000	2.134	2022	Kelurahan Sukajaya Kec. Curug, Kota Serang	Kelurahan Sukajaya Kec. Curug, Kota Serang	PAKA1	26/03/25 NIB. 28.08.000 007.623.0	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Mutasi (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ APBD/ Inventaris/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	740.338.287.286,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.019 M ²
390	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220410/220410	000397	15.500	2022	Desa Rancayuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	Desa Rancayuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074295.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS) - /Inventaris/ Baik/ - -	173.911.860.034,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.544 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
391	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel. Pasir Barat Kec. Jambes, Kab. Tangerang	Kel. Pasir Barat Kab. Jambes, Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074278.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN/ ATAU YANG SEJENIS) - /Inventaris/ Baik/ -	1.237.128.750,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.709 M ²
392	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel. Babat, Kec. Legok Kab. Tangerang	Kel. Babat, Kec. Legok Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074291.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	10.784.835.846,83	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.182 M ²
393	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel. Babat, Kec. Legok Kab. Tangerang	Kel. Babat, Kec. Legok Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074291.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	12.810.558.982,08	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.531 M ²
394	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel Bojong Kamal, Kec. Legok Kab. Tangerang	Kel Bojong Kamal, Kec. Legok Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074277.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	14.169.550.410,84	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.436 M ²
395	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel Babat, Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kel Babat, Kec. Legok, Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074289.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	16.015.075.787,58	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.665 M ²
396	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang	Kel Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang	PAKA1	22/05/24 NIB. 28.04.000 074286.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	17.432.631.487,86	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 11.609 M ²
397	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Desa Rancaiyuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	Desa Rancaiyuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074297.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	18.703.025.685,35	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.455 M ²
398	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Desa Rancaiyuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	Desa Rancaiyuh Kec. Panongan Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074298.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	20.270.746.184,39	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.499 M ²
399	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel Kutruk, Kec. Jambes Kab. Tangerang	Kel Kutruk, Kec. Jambes Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074294.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	29.783.686.185,73	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19.834 M ²
400	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220410/220410	000397	15.500	2022	Kel Margasari, Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang	Kel Margasari, Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang	PAKA1	15/05/25 NIB. 28.04.000 074295.0	Jalan Propinsi Arteri	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	33.941.749.463,35	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 22.603 M ²
401	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 166/ 166	0093	44.650	2016	Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026744.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	15.408.006.341,70	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.649 M ²
402	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 166/ 166	0093	44.650	2016	Kel. Sarua Indah Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	Kel. Sarua Indah Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026805.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	49.007.999.521,35	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.787 M ²
403	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 166/ 166	0093	15.500	2016	Kel. Sarua Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	Kel. Sarua Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026746.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	18.135.644.375,52	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.472 M ²
404	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 166/ 166	0093	44.650	2016	Kel.Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan	Kel.Cipayung Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026742.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	798.737.261,42	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 241 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
405	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/174/174	0101	59.002	2016	Kel Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026745.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	556.964.540,21	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.396 M²
406	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/174/174	0101	59.002	2016	Kel Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	Kel Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024511.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.701.482.909,62	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 11.784 M²
407	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/174/174	0101	59.002	2016	Kel Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024506.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	61.204.485.504,89	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.467 M²
408	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/174/174	0101	59.002	2016	Kel Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 025968.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	61.555.797.329,42	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.573 M²
409	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/167/167	0094	40.226	2016	Kel Sawah Baru Ilir, Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	Kel Sawah Baru Ilir, Kec. Ciputat, Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024307.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.185.897.877,47	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.373 M²
410	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.1.01.03.07.003/167/167	0094	40.226	2016	Kel Pondok Kacang Timur Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Kacang Timur Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024307.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	12.106.117.628,78	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.863 M²
411	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/167/167	0094	40.226	2016	Kel Parigi Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	Kel Parigi Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 023974.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	12.485.370.913,09	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.078 M²
412	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/167/167	0094	40.226	2016	Kel Pondok Pucung, Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Pucung, Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024509.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	22.111.348.459,38	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.535 M²
413	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/167/167	0094	40.226	2016	Kel Pondok Aren, Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	Kel Pondok Aren, Kec.Pondok Aren Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 024510.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	9.585.406.264,72	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.434 M²
414	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/173/173	0100	59.254	2016	Kel Pamulang Timur, Kec.Pamulang Kota. Tangerang Selatan	Kel Pamulang Timur, Kec.Pamulang Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	26/05/25 NIB. 28.07.000 026747.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	9.347.270.481,55	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.299 M²
415	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/99/99	000001	58.005	2015	Desa, Sindang Heula Kec. Pabuaran Kab. Serang	Desa, Sindang Heula Kec. Pabuaran Kab. Serang	PAKA1	16/06/25 NIB. 28.01.000 037659.0	Tanah Untuk Jalan Propinsi	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD/ APBD/ Inventaris/ Baik	37.465.517.444,97	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.028 M²
416	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.03.07.002/153/99	000001	64.350	2015	Desa, Tanjung Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	Desa, Tanjung Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang	PAKA1	17/06/25 NIB. 28.01.000 037658.0	Tanah Untuk Jalan Propinsi	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD/ APBD/ Inventaris/ Baik	5.983.454.755,03	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 803 M²
417	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/153/153	000080	1.260	2016	Desa, Pondok Kaharu Kec. Ciomas Kab. Serang	Desa, Pondok Kaharu Kec. Ciomas Kab. Serang	PAKA1	16/06/25 NIB. 28.01.000 037661.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS/ Hibah/ Inventaris/ Baik	1.237.128.750,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.147 M²
418	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/112/112	000038	58.005	2017	Desa, Gunung Sari Kab. Serang	Desa, Gunung Sari Kab. Serang	PAKA1	16/06/25 NIB. 28.01.000 037663.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD/ APBD/ Inventaris/ Baik	1.500.318.395,00	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.065M²
419	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/141/141	0068	51.000	2016	Kel.Kosambi Timur, Sari, Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel.Kosambi Timur, Sari, Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	23/07/25 NIB. 28.04.000 089155.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	5.388.657.603,07	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.910 M²
420	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/141/141	0068	51.000	2016	Kel. Dadap, Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel. Dadap, Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	23/07/25 NIB. 28.04.000 089158.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	7.990.129.609,98	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.177 M²
421	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/141/141	0068	51.000	2016	Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	23/07/25 NIB. 28.04.000 089157.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	1.787.987.215,68	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.620 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
422	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/141/141	0068	51.000	2016	Kel. Cengklong Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel. Cengklong Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	23/07/25	NIB. 28.04.000 089156.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	10.612.346.219,95 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 21.486 M²
423	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/141/141	0068	51.000	2016	Kel. Kosambi Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel. Kosambi Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	23/07/25	NIB. 28.04.000 089159.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	2.385.629.351,31 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.830 M²
424	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/160/160	0087	42.000	2016	Kel. Panunggulan Utara, Kec.Ciledug Kota Tangerang.	Kel. Panunggulan Utara, Kec.Ciledug Kota Tangerang.	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026232.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	4.591.214.315,19 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.008 M²
425	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/160/160	0087	42.000	2016	Kel. Tajur, Kec. Ciledug Kota Tangerang	Kel. Tajur, Kec. Ciledug Kota Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026233.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	735.693.251,30 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 482 M²
426	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/160/160	0087	42.000	2016	Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang	Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug KotaTangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026231.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	22.292.116.048,32 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.605 M²
427	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/160/160	0087	42.000	2016	Kel. Purang Serab Kec. Ciledug Kota .Tangerang	Kel. Purang Serab Kec. Ciledug Kota .Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026232.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	25.259.310.406,27 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.549 M²
428	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/160/160	0087	42.000	2016	Kel. Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota. Tangerang	Kel. Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota. Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026230.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	28.496.665.978,92 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.670 M²
429	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/158/158	0085	98.739	2016	Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026227.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	253.704.599.265,77 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 55.253 M²
430	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/158/158	0085	98.739	2016	Kel. SukaSari Kec. Tangerang Kota . Tangerang	Kel. SukaSari Kec. Tangerang Kota . Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026229.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	74.693.007.008,78 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.267 M²
431	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/158/158	0085	98.739	2016	Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota. Tangerang	Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota. Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026228.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	43.354.728.725,45 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 9.442 M²
432	DINAS PUPR	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/71/71	0009	1.600	2011	Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota. Tangerang	Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota. Tangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 026235.0	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	292.850.000,00 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.847 M²
433	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.002/99/99	000001	58.005	2015	Desa Teluk Terate, Kec. Kramat Watu Kab. Serang	Desa Teluk Terate, Kec. Kramat Watu Kab. Serang	PAKA1	13/01/25	NIB. 28.01.000 023465.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	43.448.972.200,000 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas =2.597 M²
434	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/154/154	000081	74.100	2024	Desa Anyar, Kec. Anyar Kab. Serang	Desa Anyar, Kec. Anyar Kab. Serang	PAKA1	13/01/25	NIB. 28.01.000 023465.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS) /P3D /Inventaris /Baik	7.637.520.000,000 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas =1.549 M²
435	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220269/	000055	4.182 KM	2006	Kel.Cikokol, Kec. Tangerang Kota Kota. Tangerang	Kel.Cikokol, Kec. Tangerang Kota Kota. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027018.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)	18.535.246.942,98 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 64.874 M²
436	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220269/	000055	4.182 KM	2006	Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang Kota Kota. Tangerang	Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang Kota Kota. Tangerang	PAKA1	16/10/25	NIB. 28.05.000 032144.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)	4.634.811.725,95 Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.222 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak		Sertifikat				
437	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220269/	000055	4,182 KM	2006	Kel. Panunggangan Kec. Pinang Kota. Tangerang	Kel. Panunggangan Kec. Pinang Kota. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027020.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban APBD (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)	8.821.627.841,84	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 30.876 M²
438	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220269/	000055	4,182 KM	2006	Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Kab. Tangerang	Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Kab. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027019.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban APBD (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)	2.517.689.614,66	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.812 M²
439	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Cipadu Kec. Larangan Kota Kota. Tangerang	Kel. Cipadu Kec. Larangan Kota Kota. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027021.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	244.816.929,53	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.510 M²
440	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Larangan Utara, Kec.Larangan Kota Kota Tangerang.	Kel. Larangan Utara, Kec.Larangan Kota Kota Tangerang.	PAKA1	26/09/25	NIB. 28.05.000 027026.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	1.366.441.158,50	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19.591 M²
441	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug Kota Tangerang	Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug Kota Tangerang	PAKA1	26/09/25	NIB. 28.05.000 027022.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	835.167.496,90	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 11.974 M²
442	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug KotaTangerang	Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug KotaTangerang	PAKA1	26/07/25	NIB. 28.05.000 027024.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	378.106.146,71	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.421 M²
443	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Larangan Indah Kec. Kota . Tangerang	Kel. Larangan Indah Kec. Kota . Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027029.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	736.124.750,49	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 10.554 M²
444	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Kota Tangerang	Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Kota Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027023.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	1.095.259.328,87	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 15.703 M²
445	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Kreo Kec. Larangan Kota Tangerang	Kel. Kreo Kec. Larangan Kota Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027028.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	917.958.863,10	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.161 M²
446	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Kota . Tangerang	Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Kota . Tangerang	PAKA1	19/07/25	NIB. 28.05.000 027027.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	438.787.266,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.291 M²
447	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Kota. Tangerang	Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Kota. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027025.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)	541.387.181,47	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.762 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
448	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220286	000112	4,694 KM	2000	Kel. Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota. Tangerang	Kel. Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota. Tangerang	PAKA1	19/09/25	NIB. 28.05.000 027030.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS) - /Inventaris/ Baik/ --	579.888.305,43	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.314 M ²
449	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 141/ 141	0068	51.000	2016	Kel. Kampung Melayu Timur Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang	Kel. Kampung Melayu Timur Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang	PAKA1	02/09/25	NIB. 28.04.000 100658.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	10.756.585.555,33	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 13.335 M ²
450	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/ 141/ 141	0068	51.000	2016	Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang	Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang	PAKA1	02/09/25	NIB. 28.04.000 100655.0	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	17.408.164.444,67	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 21.581 M ²
451	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota. Tangerang Selatan	Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035285.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	50.652.282.947,03	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.240 M ²
452	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Kademangan Kec. Setu Kota Kota. Tangerang Selatan	Kel. Kademangan Kec. Setu Kota Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035329.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	93.607.405.250,15	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 22.620 M ²
453	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota. Tangerang Selatan	Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 034606.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	71.029.067.361,34	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.164 M ²
454	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Cileggaang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	Kel. Cileggaang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035284.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	13.453.478.093,20	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.251 M ²
455	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Setu Kec. Setu Kota Tangerang Selatan	Kel. Setu Kec. Setu Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035327.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	92.663.882.332,51	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 22.392 M ²
456	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Cileggaang, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan	Kel. Cileggaang, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035298.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	38.924.458.611,09	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 9.406 M ²
457	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035308.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	123.882.903.782,87	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 29.936 M ²
458	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 165/ 165	0092	117,696 M	2016	Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.05.000 027024.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	73.371.321.621,80	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.730 M ²
459	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 163/ 163	0090	128,640 M	2016	Kel.Paku Alam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	Kel.Paku Alam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035337.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	146.055.951,66	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 30.065 M ²
460	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 163/ 163	0090	128,640 M	2016	Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035610.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	291.028.567,98	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 59.907 M ²
461	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 163/ 163	0090	128,640 M	2016	Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035331.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	241.491.480,36	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 49.710 M ²
462	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 170/ 170	0097	16,800 M	2016	Kel. Bambu Apos, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	Kel. Bambu Apos, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035292.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	9.507.056.177,09	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.501 M ²
463	DINAS PUPR	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	1.3.1.01.03.07.003/ 170/ 170	0097	16,800 M	2016	Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota. Tangerang Selatan	Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota. Tangerang Selatan	PAKA1	19/11/25	NIB. 28.07.000 035304.0	Tanah Untuk Jalan Provinsi Banten	Hadiah/Hibah/In ventaris/Baik	24.714.543.822,91	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 16.900 M ²
464	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220277	000096	10	2.005	Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug Kota Tangerang	Kel. Sudimara Barat, Kec. Ciledug Kota Tangerang	PAKA1	05/12/25	NIB. 28.05.000 034712.0	Jalan Propinsi Arteri	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS) - /Inventaris/ Baik/ --	2.076.746.709,53	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4480 M ²
465	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220277	000096	10	2.005	Kel. Poris Plawad Indah, Kec.Cipondoh Kota Kota Tangerang.	Kel. Poris Plawad Indah, Kec.Cipondoh Kota Kota Tangerang.	PAKA1	05/12/25	NIB. 28.05.000 034720.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban APBD (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) - /Inventaris/ Baik/ --	6.956.174.357,85	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 15.006 M ²
466	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220277	000096	10	2.005	Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah Kota Kota Tangerang	Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah Kota Kota Tangerang	PAKA1	05/12/25	NIB. 28.05.000 034678.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban APBD (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) - /Inventaris/ Baik/ --	2.217.205.248,14	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.783 M ²
467	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/ 220277	000096	10	2.005	Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Kota . Tangerang	Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota . Tangerang	PAKA1	05/12/25	NIB. 28.05.000 034683.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban APBD (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) - /Inventaris/ Baik/ --	7.137.889.694,94	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 15.398 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
468	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota . Kota. Tangerang	Kel. Babakan Kec. Tangerang Kota . Kota. Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034721.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	1.497.297.292,81	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.230 M²
469	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang	Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034711.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	10.794.447.294,21	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 23.286 M²
470	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. SukaSari Kec. Tangerang Kota . Tangerang	Kel. SukaSari Kec. Tangerang Kota . Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034710.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	770.899.504,01	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.663 M²
471	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota . Kota. Tangerang	Kel. Gondrong Kec. Cipondoh Kota . Kota. Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034679.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	1.155.190.357,18	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.492 M²
472	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota . Kota. Tangerang	Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota . Kota. Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034694.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	8.188.315.597,57	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 17.664 M²
473	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034680.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	2.636.263.066,31	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.687 M²
474	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Kota Tangerang	Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Kota Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034681.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	8.841.007.420,56	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19.072 M²
475	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota, KotaTangerang	Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota, KotaTangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034693.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Behan Apled (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	3.438.684.618,59	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.418 M²

	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
476	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kel. Poris Plawad Utara, Kec.Cipondoh Kota Kota Tangerang.	Kel. Poris Plawad Utara, Kec.Cipondoh Kota Kota Tangerang.	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034684.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	6.741.546.293,90	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.543 M²
477	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Kota Tangerang	Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Kota Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034682.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	3.455.836.321,32	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7455 M²
478	DINAS PUPR	Jalan Propinsi Arteri	1.3.4.01.01.02.001/220277	000096	10	2005	Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang	Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang	PAKAI	05/12/25	NIB. 28.05.000 034685.0	Jalan Propinsi Arteri	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ - /Inventaris/ Baik/ -	9.310.129.668,34	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20.084 M²
479	DINAS PUPR	Tanah Rawa	1.3.1.01.02.01.001/270/	0029	214.000	1995	Kel. Cireundeu Kec.Ciputat Timur Kota. Tangerang Selatan	Kel. Cireundeu Kec.Ciputat Timur Kota. Tangerang Selatan	PAKAI	09/12/25	NIB. 28.07.000 037196.0	Tanah Rawa	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	60.990.000.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 214000M²
480	DINAS PUPR	Tanah Rawa	1.3.1.01.02.01.001/270/270	0029	50.000	1999	Desa Sukatani, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	Desa Sukatani, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak	Pakai	28/05/2025	NIB.28.03.00002110 5.0	Tanah Rawa	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS/ Hibah/ Inventaris/ Baik	1.300.000.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 50.000 M²
481	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0002	1.063	2018	Pengadaan Lahan Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal di Kel. Kemanisan Kec. Curug 1 bidang an seluas 1063 m2	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00049 + 00050	Pembelian	206.498.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.700 M² dan 16.890 M²	
482	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0003	639	2018	Pengadaan Lahan Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal di Kel. Kemanisan Kec. Curug 1 bidang an.tanah H.Darman seluas 639	Kota. Serang				Pembelian	121.553.811,00		
483	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0004	4.042	2018	Pengadaan Lahan Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal di Kel. Kemanisan Kec. Curug 1 bidang an.Pepen Seluas 4042 m2	Kota. Serang				Pembelian	998.993.272,00		
484	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0005	1.152	2018	.Kp.tonggoh RT/RW 114/004Kel. Kemanisan,Kec.Curug,Kota Serang, Lok.Lahan : Kel. Kemanisan Kec.Curug,Kota Serang,Provinsi Banten,Tanah An. MJuber seluas 1.152 m2	Kota. Serang				Pembelian	282.745.103,00		
485	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0006	2.023	2018	Terletak di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten An. Madudin Tanah seluas 2.023 m2,	Kota. Serang	pakai	15/01/2020	00049 + 00050	Pembelian	488.932.654,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.700 M² dan 16.890 M²	
486	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0007	1.713	2018	Terletak di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Tanah An. Hj. Tat Seluas 1.713 m2	Kota. Serang				Pembelian	422.304.068,00		
487	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0008	615	2018	Terletak DiKelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, provinsi Bnaten. Tanah An.M. Syari Seluas 615 m2,	Kota. Serang				Pembelian	142.179.980,00		
488	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0009	142	2018	Terletak DiKelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Tanah An.M. Syarif Seluas 142 m2	Kota. Serang				Pembelian	27.213.544,00		
489	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0010	1.148	2018	Terletak DiKelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Tanah An. ENI Seluas 1.148 m2	Kota. Serang				Pembelian	223.808.889,00		
490	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0011	892	2018	Kp.Cidebeng Kidul RT/RW 012/003,Kel.Kemanisan,Kec. Curug,Kota Serang,Lok.Lahan : Kel. Kemanisan Kec.Curug,Kota Serang,Provinsi Banten tanah An. Ridah Seluas 892 m2	Kota. Serang				Pembelian	172.746.293,00		
491	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0012	642	2018	Terletak di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, provinsi Banten 1 Bidang An. Mamat Seluas 642, m2,	Kota. Serang				Pembelian	123.173.348,00		
492	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0013	432	2018	Terletak DiKeluraha Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Mamat Seluas 432 m2,	Kota. Serang				Pembelian	81.574.052,00		

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak		Sertifikat				
493	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0014	735	2018	Terletak dikelurahan Kemanis, Kecamatan Curug, kota Serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. A. Hidayat Seluas 735 m2,	Kota. Serang					Pembelian	140.270.910,00	
494	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0015	1.047	2018	Terletak dikelurahan Kemanis, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Amwar Seluas 1.047 m2,	Kota. Serang	pakai	15/01/2020	00049 + 00050		Pembelian	203.344.703,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.700 M² dan 16.890 M²
495	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0016	600	2018	Tanah Seluas 600 m2, Terletak di Kelurahan Kemanis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten	Kota. Serang					Pembelian	113.949.990,00	
496	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0017	2.992	2018	Terletak diKelurahan Kemanis, Kecamatan Curug, Kota serang Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi Seluas 2.992 m2	Kota. Serang					Pembelian	1.081.839.571,00	
497	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0018	1.841	2018	Terletak dikelurahan Kemanis, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi Seluas 1.841 m2,	Kota. Serang					Pembelian	665.447.403,00	
498	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0019	8.874	2018	Terletak dikelurahan Kemanis, Kecamatan Curug Kota serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi seluas 8874 m2,	Kota. Serang					Pembelian	3.846.785.907,00	
499	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0013	7.737	2018	Tanah Seluas 7737 m2 Kasemen	Kota. Serang			00011 + 00012		Pembelian	2.129.906.915,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.910 M² dan 16.890 M²
500	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0001	3.170	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah Iwan Kurniawan Seluas 3.170 m2	Kota. Serang					Pembelian	806.209.866,00	
501	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0002	1.796	2018	-Terletak dikelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang Suhemi Tanah Seluas 1.796 m2	Kota. Serang					Pembelian	457.378.049,00	
502	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0003	1.670	2018	-Terletak dikelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, Muchtar Tanah Seluas 1.670 m2	Kota. Serang					Pembelian	423.284.365,00	
503	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0004	3.744	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen an Samlawi Seluas 3744 m2	Kota. Serang					Pembelian	948.996.403,00	
504	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0005	1.185	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen an. Titi Sumarti tanah seluas 1.185 m2	Kota. Serang					Pembelian	329.956.162,00	
505	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0006	1.846	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah an Hajali Seluas 1.846 m2	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00011 + 00012		Pembelian	466.598.054,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.910 M² dan 4.929 M²
506	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0007	6.591	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah an Rohumin Seluas 6.591 m2	Kota. Serang					Pembelian	1.681.126.634,00	
507	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0008	1.871	2018	-Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah Sutihat Seluas 1.871 m2	Kota. Serang					Pembelian	476.605.551,00	
508	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0009	1.888	2018	Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah an Warihan Seluas 1.888 m2	Kota. Serang					Pembelian	480.963.325,00	
509	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0010	6.812	2018	Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, tanah seluas 6812 m2	Kota. Serang					Pembelian	1.721.325.549,00	
510	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0011	6.386	2018	Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen. Tanah an Rohumin Seluas 6.386 m2	Kota. Serang					Pembelian	1.629.752.630,00	
511	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0012	1.143	2018	Terletak di Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen, Tanah an Mad Marjuki Seluas 1.143 m2	Kota. Serang					Pembelian	288.751.022,00	
512	DINAS PRKP	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	01.01.13.11.006	0014	0	2018	Kawasan Banten Lama, Kec. Kasemen Kota Serang	Kota. Serang					Pembelian	4.351.430.393,00	
513	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Olah Raga	01.01.11.04.008	0001	0	2010	Kel. Kemanis Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00048	Lahan Sport Center	Pembelian	1.990.930.200,00	Catatan Sertipikat menginduk ke Biro Umum Nomor 14, 2 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 525.200 M² dan Luas = 1.908 M²
514	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320089/ 3320089	0001	1.300	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.300 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	508.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M²
515	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320389/ 3320389	0002	1.333	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.333 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	534.400.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M²
516	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320543/ 3320543	0003	1.342	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B an. TB. FAHRUROZI Seluas 1.342 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	522.800.000,00	
517	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320730/ 3320730	0004	225	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 225 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	90.900.000,00	
518	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320824/ 3320834	0005	1.186	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.186 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	456.500.000,00	
519	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3320936/ 3320936	0006	746	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 746 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	329.900.000,00	
520	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321043/ 3321043	0007	745	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 745 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	320.900.000,00	
521	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321330/ 3321330	0008	664	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 664 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	285.700.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M²
522	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321440/ 3321440	0009	1.708	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pembagian Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.708 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	685.600.000,00	

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
523	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321590/ 3321590	0010	68	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 68 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	27.600.000,00	
524	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321684/ 3321684	0011	793	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 793 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	360.300.000,00	
525	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321782/ 3321782	0012	206	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 206 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	260.400.000,00	
526	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3321890/ 3321890	0013	453	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 453 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	182.200.000,00	
527	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3322087/ 3322087	0014	516	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 516 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	221.300.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M ²
528	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3322251/ 3322251	0015	1.680	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. YAYU AGNINA seluas 1.680 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	713.400.000,00	
529	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3322330/ 3322330	0016	456	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. AHMAD SUBADRI seluas 456 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	188.900.000,00	
530	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3322445/ 3322445	0017	751	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. EDI seluas 751 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	313.000.000,00	
531	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323088/ 3323088	0018	550	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 550 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	236.100.000,00	
532	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323207/ 3323207	0019	705	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 705 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	293.700.000,00	
533	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323296/ 3323296	0020	724	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 724 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	311.700.000,00	
534	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323401/ 3323401	0021	80	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 80 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	30.500.000,00	
535	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323492/ 3323492	0022	163	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 163 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	69.400.000,00	
536	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323679/ 3323679	0023	75	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 75 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	30.500.000,00	
537	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323876/ 3323876	0024	583	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 583 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	264.000.000,00	
538	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3323970/ 3323970	0025	616	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 616 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	264.800.000,00	
539	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3324096/ 3324096	0026	2.533	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 2.533 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.052.900.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M ²
540	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3324311/ 3324311	0027	449	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 449 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	180.600.000,00	
541	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3329905/ 3329905	0028	1.680	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.680 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	713.400.000,00	
542	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3330212/ 3330212	0029	1.041	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.041 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	424.300.000,00	
543	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3330525/ 3330525	0030	355	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 355 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	154.700.000,00	
544	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3730962/ 3730962	0031	2.639	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 2.639 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.275.994.000,00	
545	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3735980/ 3735980	0032	85	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 85 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	25.300.000,00	
546	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.005/ 3735981/ 3735981	0033	1.200	2018	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan Lahan KP3B 1 bidang an. TB. FAHRUROZI seluas 1.200 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	266.800.000,00	
547	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/ 4515862/ 4515862	0001	781	2019	Pengadaan Tanah Seluas 781 M2, Terletak di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten, a.n TB FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	354.136.577,00	

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
548	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515863/4515863	0002	307	2019	Pengadaan Tanah Seluas 307 M2, Terletak di Kelurahan Sukajaya, kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. a.n Drs. Ahmad Buati Nasir	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	142.660.896,00	
549	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515864/4515864	0003	874	2019	Pengadaan Tanag Seluas 874 M2, Terletak dikelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. a.n TB FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	395.356.722,00	
550	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515865/4515865	0004	1.454	2019	Pengadaan Tanah Seluas 1.454 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n TB. FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	655.839.556,00	
551	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515866/4515866	0005	507	2019	Pengadaan Tanah Seluas 507 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n TB. FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	229.970.933,00	
552	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515867/4515867	0006	1.445	2019	Pengadaan Tanah Seluas 1.445 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n TB. FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	652.844.841,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 40.020 M ²
553	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515868/4515868	0007	323	2019	Pengadaan Tanah Seluas 323 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n TB. FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	146.101.791,00	
554	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515869/4515869	0008	432	2019	Pengadaan Tanah Seluas 432 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n ASMANAH bin Usup	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	191.291.714,00	
555	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.007/4515870/4515870	0009	377	2019	Pengadaan Tanah Seluas 377 M2, Terletak Di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota serang, Provinsi Banten. a.n TB. FAHRUROJI	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	171.195.901,00	
556	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/3339084/3339084	0001	38.471	2018	Pengadaan Lahan Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal di Kel. Kemisanis Kec. Curug 1 bidang an.Suhbi Mansyur Seluas 38.471 M2	Kota. Serang	Hak Pakai	15/03/2021	00032	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	17.879.400.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 38.471 M ²
557	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100250/4100250	0001	2.714	2019	Pengadaan Tanah Seluas 2.714 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten a.n Juanda	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	706.881.697,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
558	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100251/4100251	0002	1.222	2019	Pengadaan Tanah Seluas 1.222 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. a.n Sartawi	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	281.558.589,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
559	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100252/4100252	0003	938	2019	Pengadaan Tanah Seluas 938 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten. a.n RAMIN	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	184.038.087,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
560	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100253/4100253	0004	2.730	2019	Pengadaan Tanah Seluas 2.730 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten. a.n Eli	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	687.126.767,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
561	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100254/4100254	0005	2.055	2019	Pengadaan Tanah Seluas 2.055 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten. a.n Narmi	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	528.847.228,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
562	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100255/4100255	0006	596	2019	Pengadaan Tanah Seluas 596 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten. a.n Humaedi	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	143.491.974,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
563	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100256/4100256	0007	720	2019	Pengadaan Tanah Seluas 720 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten a.n Andi Suhandi	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	205.319.586,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
564	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/4100258/4100258	0009	5.180	2019	Pengadaan Tanah Seluas 5.180 m2, Terletak Dikelurahan Kemanian, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Bnaten a.n Hj. Padiyem	Kota. Serang	Hak Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.360.519.242,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
565	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875736/5875736	0002	226	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n ZAINI SH, luas tanah 226 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	181.572.341,00	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan
566	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875737/5875737	0003	783	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n SAPRI luas tanah 783 m2,Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	24/02/2020	00010	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	891.582.280,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 23.831 M ²
567	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875739/5875739	0005	999	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB FAHRUROZI, luas tanah 999 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.065.179.475,00	
568	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875742/5875742	0008	2.515	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TOYIBAH, S.Sos, luas tanah 2515 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.987.001.453,00	
569	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875743/5875743	0009	604	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n SUHARTI, luas tanah 604 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	474.896.904,00	
570	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875745/5875745	0011	953	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanag 953 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.015.992.825,00	
571	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntakkan	01.01.11.05.005/5875747/5875747	0013	597	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 597 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	635.330.925,00	
572	DINAS PRKP	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.007/5875749/5875749	0001	619	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 619 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	658.854.975,00	

OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Hak	Sertifikat					
573	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875752/ 5875752	0017	1.003	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 1,003 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.069.456.575,00
574	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875754/ 5875754	0019	218	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 218 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	230.075.700,00
575	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875756/ 5875756	0021	1.209	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 1,209 m2 Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.289.727.225,00
576	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875758/ 5875758	0023	705	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 705 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	750.812.625,00
577	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875760/ 5875760	0025	127	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 127 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	132.771.675,00
578	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875762/ 5875762	0027	205	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 205 m2,Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	216.175.125,00
579	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875764/ 5875764	0029	299	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 299 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	316.686.975,00
580	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875766/ 5875766	0031	264	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 264 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	279.262.350,00
581	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875770/ 5875770	0035	144	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 144 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	150.949.350,00
582	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875772/ 5875772	0037	923	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 923 m2. Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	983.914.575,00
583	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875774/ 5875774	0039	275	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 275 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	291.024.375,00
584	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875776/ 5875776	0041	345	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 345 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	365.873.625,00
585	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875778/ 5875778	0043	2.997	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROJI, luas tanah 2.997 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	3.201.590.925,00
586	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875780/ 5875780	0045	344	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 344 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	364.804.350,00
587	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875782/ 5875782	0047	1.407	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROJI, luas tanah 1407 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.501.443.675,00
588	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875784/ 5875784	0049	453	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 453 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	481.355.325,00
589	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875786/ 5875786	0051	585	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 585 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	622.499.625,00
590	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875788/ 5875788	0053	578	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 578 m2 Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	615.014.700,00
591	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875790/ 5875790	0055	526	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 526 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	559.412.400,00
592	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875792/ 5875792	0057	727	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 727.00 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	774.336.675,00
593	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875794/ 5875794	0059	544	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 544.00 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	578.659.350,00
594	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875796/ 5875796	0061	856	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 856 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	912.273.150,00
595	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875798/ 5875798	0063	1.259	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUROZI, luas tanah 1259 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.343.190.975,00
596	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875799/ 5875799	0064	263	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n IIS NAWANGSI, luas tanah 263 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	910.846.778,00
597	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875801/ 5875801	0066	1.773	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n ASEP SUDRAJAT, luas tanah 1773 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	6.465.651.744,00

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
598	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/ 3732885/ 3732885	0017	2.992	2018	Terletak diKelurahan Kemanisn, Kecamatan Curug, Kota serang Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi Seluas 2.992 m2	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.081.839.571,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
599	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/ 3732886/ 3732886	0018	1.841	2018	Terletak Dikelurahan Kemanisn, Kecamatan Curug, Kota Serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi Seluas 1.841 m2.	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	665.447.403,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
600	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/ 3732887/ 3732887	0019	8.874	2018	Terletak Dikelurahan Kemanisn, Kecamatan Curug Kota serang Provinsi Banten Tanah 1 Bidang An. Ari Awal Washi seluas 8874 m2,	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	3.846.785.907,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
601	DINAS PRKP	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010/ 4100257/ 4100257	0008	1.154	2019	Pengadaan Tanah Seluas 1.154 m2, Terletak Dikelurahan Kemanisn, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten a.n RIZAL SOLIHIN	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00050	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	277.648.279,00	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
602	DINAS PRKP	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002/ 5974582/ 5974582	0070	353	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n HJ. INAYATU ANNISA, ST MPD, luas tanah 353 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.297.985,790	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
603	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875736/ 5875736	0002	226,00	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B. a.n ZAINI SH, luas tanah 226 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	181.572,341	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
604	DINAS PRKP	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005/ 5875758/ 5875758	0023	705,00	2020	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B, a.n TB. FAHRUR021, luas tanah 705 m2, Kel Sukajaya Kec. Curug Kota Serang	Kota. Serang	Pakai	15/01/2020	00049	TANAH KP3B	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	750.812,625	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain
605	DINAS PRKP	Bangunan Perumahan	1.3.1.01.01.01.004/ 000001	38.471	2018	2018	Kel/ Kemanisn , Kec. Curug, Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	19/11/2021	00052	Bangunan Perumahan	Pembelian	17.879.400.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 16,159 M ²
606	DINAS PRKP	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002/ 5875801/ 5875801	00016	1.773	2020	Desa/Kelurahan Suka Jaya Kec. Curug, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	01/08/23	00016	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	6.493.153,654	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1,773 M ²
607	DINAS PRKP	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002/ 5974582/ 5974582	000070	353	2020	Kelurahan Sukajaya Kec. Curug, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	01/08/23	00014	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.297.985,790	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 353 M ²
608	DINAS PRKP	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002/ 3339251/ 000002	1.063,00	2018	2018	Kelurahan Kemanisn Kec. Curug, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	11/03/25	NIB. 28.08.000 007841.0	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Belan Apbd (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) /APBD /Inventaris /Baik	206.498.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1,154 M ²
609	DP3AKKB	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01. 01.01.001/ 23018442/ 000001	240,00	1996	1996	Kelurahan Sukajaya Kec. Curug, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	10/03/25	NIB. 28.08.000 001.7620. 0	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Mutasi (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD)/ -/ Inventaris/ Baik	208.085.777,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 626 M ²
610	DISHUB	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0010	5.000	2013	Ds. Sukamanah Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang	Kota. Serang	Hak Pakai	19/12/1989	1	Digunakan DLLAJR Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang	Hibah	810.000.000,00	Digunakan DLLAJR Dipergunakan DISHUB Kab. Pandeglang, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
611	DISHUB	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/ 363/ 363	0006	12.224	2000	Jl. Raya Jakarta Km. 4 Kel. Penancangan, Kec. Cipocok, Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00033	Dishub Kominfo	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	3.674.750.000,00	Dishub Kominfo Prov. Banten & Kab. Serang 08-11-2000/ Gambar : 0 SKPD: 12. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - 09. PERHUBUNGAN - 01. Dinas Perhubungan - 01. Dinas Perhubungan - 001. Dinas Perhubungan
612	DINAS KOMINFO	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	01.01.11.04.024	0001	200	2013	Jl. Raya Dederan Gunung Kencana Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	24/01/2018	00009	Tower Reapiter Radio Komunikasi	Pembelian	6.000.000,00	Tanah Gunung Kencana SPH,dari Sugiono ke Pemprov Banten. Lahan untuk digunakan pembangunan Tower Reapiter Radio Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten, Sertifikat Asli A.n Provinsi Banten dengan luas 220 M ²
613	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003	0003	93.315	2016	Jl. Cirus - Petir Km 5 Ds. Cigoong Kec. Walantaka Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	07/07/2017	00001	Rencana RS Jiwa	Pembelian	18.549.102.950,00	Pembayaran Ganti Rugi Lahan RS Jiwa Provinsi Banten, Sertifikat Asli a.n Provinsi Banten dengan luas 93.315 M ² (Sertifikat masih di pegang Dinkes)
614	DINKES	Tanah Bangunan Laboratorium	01.01.11.04.014	0002	9.471	2010	Kelurahan Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	29/03/2017	00018	Kantor Labkesda	Pembelian	5.664.508.330,00	Hasil Sensus 2015 Pengguna : Labkesda Pembelian Lahan LABKESDA dan Apraisal (Keg. Rujukan), Sertifikat Asli A.n Provinsi Banten dengan luas 9.471 M ² (Sertifikat masih di pegang Kantor Labkesda)
615	DINKES	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	0003	26.315	2011	Desa Banjar Agung Pakupatan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	12/10/2015	13	Gudang Farmasi	Pembelian	14.770.491.500,00	Hasil Sensus 2015 Pengguna : Gudang Farmasi (26.315 M2) Biaya Appraisal untuk lahan instalasi Farmasi Dinkes (KJPP Firman Azis dan Rekan), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
616	DINKES	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	1.100	2001	Jl. Raya Serang KM. 31 Ds. Sumbarbandung Kec. Jayanti Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	19/09/1994	2	Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKMK)	Pembelian	110.350.000,00	Hasil Sensus 2015 (Lahan Kantor Gedung BKMK), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
617	DINKES	Tanah Bangunan Mesr/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005	0001	4.877	2009	Blok Rahong Desa Rahong Kec. Malinging Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	27/10/2010	3	Gudang dan Asrama RSUD Malinging	Pembelian	315.587.000,00	Hasil Sensus 2015 (RSUD Malinging Prov. Banten & Penuntukan : Gudang dan Asrama), Sertifikat Asli A.n Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
618	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.03	0001	30.498	2008	Kp. Gowok Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/03/2017	46	RSUD Banten	Pembelian	13.302.328.190,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : RSUD Banten & Penuntukan : RSUD Banten)

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
619	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.03	0002	10.892	2007	Kp. Gowok Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai			RSUD Banten	Pembelian	4.477.650.000,00	Tanah Sarana RS (Rumah Sakit Rujukan) pindah ke RSUD Banten, Sertifikat
620	DINKES	Tanah Kebun Campuran Lain-lain	01.01.11.04.003	0001	23.352	2018	Kp. Gowok Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	15/10/2019	00050	RSUD Banten	Pembelian	1.509.178.755,00	Iuas tanah 1675 m2. JAEUNUDIN, S.Pd/SPH (45/BA/PH/36/04/XII/2018) 20-12-2018; Gambar : 0 Nip. / SKPD: 07. UPT RSUD BANTEN - 001. UPT RSUD BANTEN
621	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit			30.580	2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/12/2019	00004	RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	655.137.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 30,580 M ²
622	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	547.808.000,00	
623	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	584.807.000,00	
624	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	156.400.000,00	
625	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	149.256.000,00	
626	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	94.255.000,00	
627	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	137.023.000,00	
628	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	154.826.000,00	
629	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	95.011.000,00	
630	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit				2019	Kp. Pasir Waru Kel. Kadu Merak. Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai			RSUD CILOGRANG	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	2.447.254.000,00	
631	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033760/ 5033760	0001	2.741	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	2.469.969.266,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14,066 M ²
632	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033761/ 5033761	0002	836	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	751.228.441,00	
633	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033762/ 5033762	0003	2.439	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	2.207.640.107,00	
634	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033764/ 5033764	0004	1.024	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	931.354.316,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14,066 M ²
635	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033765/ 5033765	0005	1.897	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	1.725.697.970,00	
636	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033766/ 5033766	0006	1.366	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	1.226.480.890,00	
637	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5033767/ 5033767	0007	643	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	575.720.808,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20,410 M ²
638	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	01.01.11.04.003/ 5239885/ 5239885	0000	3.120	2019	Kp. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/09/2020	00051	RSUD Banten	Pembelian /BLUD /Inventaris /Baik	3.063.952.476,00	
639	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033771/ 5033771	0001	5623	2019	A/n NURHALIM Luas 5,623 M2 Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	933.027.000,00	
640	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033772/ 5033772	0002	1171	2019	A/n ENTIN SUHERNI Luas 1,171 M2 Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	193.312.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20,410 M ²
641	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033773/ 5033773	0003	2254	2019	A/n ANAH Luas 2254 M2 Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	343.980.000,00	
642	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033774/ 5033774	0004	3047	2019	A/n KOSIM ABDUL GANI Luas 3,047 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	535.825.000,00	
643	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033775/ 5033775	0005	1110	2019	A/n HABIBIE Luas 1,110 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	333.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20,410 M ²
644	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033776/ 5033776	0006	2423	2019	A/n SUIAI Luas 2423 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	404.272.000,00	
645	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033777/ 5033777	0007	192	2019	A/n HABIBIE Luas 192 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	57.850.000,00	
646	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033778/ 5033778	0008	358	2019	A/n H. UANG ASYARI Luas 358 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	277.694.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2,536 M ² (Ganti Nama)
647	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033779/ 5033779	0009	1464	2019	A/n SOBRI Luas 1464 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	252.600.000,00	
648	DINKES	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/ 5033780/ 5033780	0010	2766	2019	A/n HABIBIE Luas 2.766 M2, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/10/2020	00011	UPT RSUD MALINGPING	Pembelian /APBD /Inventaris /Baik	1.721.582.000,00	
649	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003/ 5915211/	000002	2.536	2001	Kab. Serang, Kec. Tiruyasa, Desa Lentar	Kab. Serang	Hak Pakai	13/09/2022	00039	RSUD LABUAN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	261.208.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2,536 M ² (Ganti Nama)
650	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003/ 5915210/ 5915210	0001	4.009	2001	JL JENDERAL SUDIRMAN LABUAN KotiDesa. Labuan Kec. Labuan KAB. PANDEGLANG	Kab. Pandeglang	PAKAI	10/05/2023	00039	RS LABUAN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	398.300.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4,009 M ² (Ganti Nama)
651	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003/ 374/	000001	15.250	1977	Desa Malingping Utara, Kec. Malingping, Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	08/11/23	00015	RSUD MALINGPING	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	4.891.808.974	Sertipikat Asli A.n. Pemprov Banten Dengan Luas = 14,010 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
652	DINKES	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003/374/	000001	14.010	1977	Desa Malimping Utara Kec. Malimping, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	16/11/2023	00015	RSUD MALIMPING	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	4.891.808.974	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.010 M ²
653	DISPORA	Tanah Kebun CampuranLain-lain	01.01.04.01.002	0001	2.970	2009	Kp. Pasir Dangdeur Jl. Raya Rego Cadasari Km. 06 Desa Sukajaya RT. 02/01 Kec. Koroncong Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	25/03/2010	01	Gedung Life Skill Kepemudaan Provinsi Banten	Pembelian	209.068.950,00	Hasil Sensus 2015 Digunakan Oleh Dispora Provinsi Banten Untuk Pembangunan Gedung Life Skill Kepemudaan Provinsi Banten Cq. Dinas Pemada & Olahraga Provinsi Banten, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
654	DISPORA	Tanah Kebun CampuranLain-lain	01.01.04.01.002	0002	1.984	2009	Kp. Pasir Dangdeur Jl. Raya Rego Cadasari Km. 06 Desa Sukajaya RT. 02/01 Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	06/10/2010	02	Gedung Life Skill Kepemudaan Provinsi Banten	Pembelian	165.064.670,00	Hasil Sensus 2015 Digunakan Oleh Dispora Provinsi Banten Untuk Pembangunan Gedung Life Skill Kepemudaan Provinsi Banten Cq. Dinas Pemada & Olahraga Provinsi Banten, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
655	DISPORA	Tanah Kebun CampuranLain-lain	01.01.04.01.002	0003	2.554	2010	Jl. Pasir Dangler Jl. Raya Rego Cadasari Km. 06 Desa Sukajaya Rt. 02/01 Kec. Kroncong Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	13/12/2010	02	Kantor Dispora Prov. Banten	Pembelian	160.359.400,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Dispora Prov. Banten & Peruntukan : Kantor Dispora Prov. Banten) Tidak dikontrakan / Pembelian Langsung, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
656	DINSOS	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005	0004	359	1998	Jl. Raya Merak Ds/Kel. Mekar Sari Kec. Palo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	20/11/2009	10	Parti Persinggahan	Hibah	91.100.000,00	Hasil Sensus 2015 Dipergunakan Wisma Parti Persinggahan Dinsos , (Pengguna : Warga Setempat & Peruntukan : Rumah Tinggal) APBN Hibah Ex. Dinsos Jabar,Hak Pakai 20/11/2009 No. 03, Mess/Wisma/Asrama Dinsos Provinsi Banten (bangunan tidak terawat), Sertifikat Asli a.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
657	DINSOS	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0001	1.226	1998	Jl. Yusuf Martadilaga No. 58 Ds/Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang	Kota. Cilegon	Hak Pakai	17/11/2017	00092	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kebudayaan Pariwisata Kab. Serang	Hibah	307.100.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luas 1.190 M ²)
658	DINSOS	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	400	1991	Jl. Petir Ds/Kel. Cilaku Kec. Curug Kota Serang	Kota. Cilegon	Hak Pakai	17/11/2017	00002	LK3M Kab. Serang	Hibah	29.000.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Dinas Sosial Kabupaten Serang & Peruntukan : Kantor Loka Bina Karya) APBN Hibah Ex. Dinsosaker Jabar,Digunakan LK3M Kab. Serang, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luas 440 M ²
659	DINSOS	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	475	1992	Jl. Cilajah Ds/Kel. Keraton Kec. Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/09/1996	2	Loka Bina Karya Dinsos Provinsi Banten	Hibah	34.350.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Tagana Dinas Sosial Kab. Pandeglang & Peruntukan : Base Cam) APBN Hibah Ex. Dinsosaker Jabar,lahan digunakan untuk Loka Bina karya Dinsos Provinsi Banten, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
660	DINSOS	Tanah kosong yang tidak diusahakan	01.01.11.05.001	0001	300	1998	Jl. Panti Asuhan No. 9 Ds/Kel. Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	06/04/2017	00004	Rumah Bangunan Dua Lantai Dipelihara Pegawai Dinsos Kab. Tangerang	Hibah	8.250.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Pegawai Pemkab Tangerang & Peruntukan : Rumah Tinggal) Hibah Ex. Dinsosaker Jabar,Eks. Jabar Rumah Bangunan Dua Lantai Dipelihara Pegawai Dinsos Kab. Tangerang, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luas 294 M ² (Sertifikat Asli masih di pegang Dinsos)
661	DINSOS	Tanah kosong yang sudah diperumahkan	01.01.11.05.005	0002	400	1996	Jl. Yusup Martadilaga Ds/Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	19/12/2017	00037	Lahan Dipelihara Warga Sekitar digunakan Toko Sepatu, Kelontongan dan Kios Bakso Sertifikat Asli A.n. Jawa Barat	Hibah	101.200.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Lahan Dipelihara Warga Sekitar digunakan Toko Sepatu, Kelontongan dan Kios Bakso Sertifikat Asli A.n. Jawa Barat)
662	DINSOS	Makam Umum/Kuburan Umum	01.01.01.03.008	0001	600	1987	Jl. Ki Ajurum No. 3 Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	17/11/2017	00038	Balai Perlindungan Sosial (BPS - Lahan Makam)	Hibah	22.000.000,00	HASIL SENSUS 2015 (Pengguna : Balai Perlindungan Sosial Prov. Banten & Peruntukan : Makam Khusus Lanjut Usia) Tanah Eks. Jabar Digunakan untuk Makam, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luas 627 M ²
663	DINSOS	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005	0001	6.940	1985	Jl. Ki Ajurum No. 3 Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	07/10/1985	04	Balai Perlindungan Sosial (BPS)	Hibah	256.000.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Balai Perlindungan Sosial Prov. Banten & Peruntukan : Kantor/Wisma Balai Perlindungan Sosial) Tanah Eks Jabar digunakan BPS untuk bangunan gedung (Kantor Dinas Sosial,Ruang Koperasi, Mushola, Dapur Umum, Poliklinik, Wisma : Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
664	DINSOS	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005	0002	4.000	1983	Jl. Ki Ajurum No. 3 Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	14/06/1983	02	Balai Perlindungan Sosial (BPS)	Hibah	148.400.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Balai Perlindungan Sosial Prov. Banten & Peruntukan : Kantor/Wisma Balai Perlindungan Sosial) Tanah Eks Jabar digunakan untuk bangunan (kantor BPS, Ruang Keterampilan, Pos Jaga, Garasi, Wisma Mawar, Rumah Dinas Type 36 dan R. Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
665	DINSOS	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	83.405	1983	Jl. Siliwangi Pasir Ona Rt/Rw. 02/02 Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	29/10/1992	7	Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BPPS)	Hibah	3.536.350.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Dinas Sosial Provinsi Banten & Peruntukan : Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BPPS) APBN Exs Kanwil Jabar, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
666	DINSOS	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	410	1992	Jl. Cikada Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	21/04/1993	13	Gedung Pendidikan Bina Loka Karya	Hibah	19.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Tanah Darat Untuk Gedung Loka Bina Karya Kab. Lebak Eks. Depsos Kanwil Pemprov Jabar (Pengguna : Dinas Sosial Provinsi Banten & Peruntukan : Kantor Loka Bina Karya) Dikuasai Oleh Dinas Sosial Kab. Lebak (Tidak Dipakai), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
667	DINSOS	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0003	2.125	1987	Jl. Siliwangi Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	21/08/1997	19	Gedung Diklat Dinas Sosial	Hibah	89.100.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : Pemda Kab. Lebak, Peruntukan : Kantor Dinas Sosial & Dipakai Kantor Diklat Kab. Lebak, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
668	DISNAKER	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005	0001	6.018	1976	Jl. Raya Merak Des/Kel. Tamansari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	31/01/2018	00038	Digunakan Lahan Parkir Terminal Terpadu Merak	Hibah	7.318.350.000,00	Hasil Sensus 2015 (Digunakan lahan parkir Terminal Terpadu Merak) Ex. Jabar. Sertifikat Asli A.n Provinsi Banten dengan luas 2.349 M ²
669	DISNAKER	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.010	0001	4.958	1999	Jl. Raya Merak Des/Kel. Pulo Merak Kec. Pulo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	27/08/2018	29	Gudang Kosong eks Gudang Penghapusan Prov. Banten	Hibah	6.163.800.000,00	Hasil Sensus 2015 Gudang Kosong eks Gudang penghapusan Prov. Banten), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.882 M ²
670	DISNAKER	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	01.01.11.01.001	0001	16.815	1993	Jl. Raya Serpong KM. 12 Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	15/12/1995	1	Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Hibah	12.443.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Tanah Bangunan Rumah Dinas, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
671	DISNAKER	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	26.690	1993	Jln. Raya Serpong KM. 12 Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	15/12/1995	2	Rumah Dinas Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Hibah	50.711.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Ruzsalsak Depnakertrans dengan BSD, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
672	DISNAKER	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	01.01.11.01.002/290/	0006	600	1998	Desa/Pasar Kemis Kec. Pasar Kemis, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	11/01/23	00006	BANGUNAN KANTOR	Hibah	30.100.000,00	A.n Provinsi Banten dengan luas 586 M ²
673	DISTAN	Tanah Sawah	01.01.11.05.002	0001	14.000	2013	Jl. Raya Suka Waris Kp. Cikareo Rt.01/02 Ds. Sukawaris Kec. Cikeseuk Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	19/04/1989	3	UPT Pertanian Kab. Pandeglang Provinsi Banten	Hibah	2.212.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Digunakan UPT Pertanian Kab. Pandeglang Provinsi Banten Tanah Sawah Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
674	DISTAN	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	0003	7.620	2000	Jl. Raya Rangkasbitung-Bogor Des/Kel. Cipanas Kec. Cipanas Kab Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	16/11/1987	1	Perkebunan	Hibah	128.000.000,00	Hasil Sensus 2015 eks Jabar th 1963, ditanami cengkeh, melinjo dan sebagian tanaman pangan. tanah kurang terawat (dalam proses balik nama Tahun 2012), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
675	DISTAN	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	0005	4.000	2000	Jl. Labuan Des/Kel. Sukasari Kec. Kalidjeto Kab Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/07/1986	1	Digunakan Oleh Dispora Provinsi Banten Tanaman Kopi	Hibah	60.100.000,00	Hasil Sensus 2015 Digunakan Oleh Dispora Provinsi Banten eks. Jabar th perolehan, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
676	DISTAN	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	0007	956	2000	Jl. Rangkas bitung-Bogor Des/Kel. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	16/11/1987	7	Ditanami cengkeh, melinjo dan sebagian Tanaman Pangan	Hibah	14.750.000,00	Hasil Sensus 2015 Eks. APBD Jabar tahun 1978 Dikelola Oleh Dinas Hubun Provinsi Banten Ditanami cengkeh, melinjo dan sebagian Tanaman Pangan (dalam proses balik nama tahun 2012), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
677	DISTAN	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	01.01.11.05.005	0003	93.261	2010	Kel. Cungur Kec. Cungur Kota Serang	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/10/2018	00016	SITANDU	Pembelian	35.005.713.526,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 182.400 M ²
678	DISTAN	Tanah Kebun	01.01.11.05.004	0004	20.000	2000	Jl. Desa Des/Kel. Citeras Kec. Rangkas Bitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	26/12/2018	00006 & 00007	Dinas Hubun Kab. Lebak untuk Pembibitan Tanaman Karet	Hibah	106.600.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 15.810 M ² + 4.109 M ² = 19.919 M ²
679	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0009	796	1982	Kp. Kado Pereng Kel. Cigadung Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00004	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah	241.258.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 796 M ²
680	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0010	2.056	1985	Kp. Karet Ds. Caringin Kec Labuan Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah	713.266.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2,056 M ²
681	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0004	1.829	1982	Ds. Bintang Resmi Kec. Cipanas Kab. Lebak	Kab. Lebak	Pakai	21/11/2019	00003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah	860.146.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1,829 M ²
682	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0006	550	1981	Ds. Suka Rendah Kec. Warung Gunung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Pakai	21/11/2019	00004	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah	260.875.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 550 M ²
683	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/429/429	0011	1.086	1981	Des/Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	15/10/2020	1	DINAS PERTANIAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	511995000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.086M ²
684	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/430/430	0012	600	1982	Des/Kel. Suka Bares Kec.Ciomas Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	15/10/2020	1	DINAS PERTANIAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	44.025.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 600 M ²
685	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.05.002/5025601/436	0001	11.580		Des/Kel. Sawah Lahur Kec.Kasemen Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	15/10/2020	1	DINAS PERTANIAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	180.350.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11.580 M ²
686	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/412/412	0003	390	2000	Jl. Raya Cikande Kel. Cijoro Posti Kec. Rangkas Bitung Kab. Lebak	Kab. Serang	Hak Pakai	06/07/2021	00057	DINAS PERTANIAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	25.850.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 390
687	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/425/425	0007	2.000	1981	Ds. Berdungan Kec. Banjar Sari Kab. Lebak	Kab. Serang	Hak Pakai	06/07/2021	00006	DINAS PERTANIAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	120.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2000
688	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/418/418	0001	1.440	2000	Jl. Raya Pandeglang- Labuan Des/Kel. Keratos Kec. Pandeglang Kab. pandeglang Banten	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	02/01/2023	00001	Tanah untuk Bangunan	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	106.750.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 640
689	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/419/419	0002	500	2000	Jl. TB. Bakri Des/Kel. Kota Serang Baru Kec. Serang Kab Serang Banten RT/RW : 002/004 Kp/Komp. Kota Baru Kel/Desa. Kota Baru Kec. Serang KOTA SERANG	Kota. Serang	Hak Pakai	12/12/2022	00041	Gedung Kantor	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	250.500.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 835
690	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/418/418	0001	1.440	2000	Jl. Raya Pandeglang- Labuan Des/Kel. Keratos Kec. Pandeglang Kab. pandeglang Banten	Kab. Pandeglang	PAKAI	02/01/2023	00001	Tanah untuk Bangunan	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	106.750.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 640
691	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/417/	000001	1.778	2000	Kelurahan Dragong Kec. Taktakan, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00026	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	6.312.600.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1,778 M ²
692	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/1900041/	000001	50.722	1967	Kelurahan Dragong Kec. Taktakan, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00027	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Hadiab/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.260.000.000	01-01-2017/ 25b/LHO/XVIII.SRG/05/20 18/ 23-05-2018/ 230518 Aset Tetap

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
693	DISTAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/423/	0005	640	1981	Desa Bungur Mekar Kec. Sajira Kab. Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	21/05/24 NIB. 28.03.000 000018.0	DINAS PERTANIAN	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	62,058,000.00	04-03-2016/ 25b/LHO/XXVIII.SRG-05/20 18/ 23-05-2018/ 230518/ Aset Tetap	
694	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1.565	2002	Jl. Angsana Kasemen Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	04/08/2005	25	Kantor UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP)	Pembelian	130.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Diginakan Balai Dinas Kelautan Perikanan Prov. Banten (Peruntukan : Kantor UPTD BPMHP Serang Prov. Banten) APBD, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
695	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0003	300	2000	Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Kel. Babakan Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	15/09/2017	19	UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP)	Hibah	150.450.000,00	Hasil Sensus 2015 (Peruntukan : Kantor UPTD BPMHP Tangerang Prov. Banten) Limpahan Dari Provinsi Jabar, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan lusan 376 M ² (Sertifikat Asli masih di DKP)
696	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0004	320	1998	Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Kel. Babakan Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	15/09/2017	18	Kantor BPPMHP DKP	Hibah	160.500.000,00	Hasil Sensus 2015 Diginakan Pemerintah Prov Banten Untuk Balai Penguji Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) DKP Prov. Banten, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan lusan 333 M ² (Sertifikat Asli masih di DKP)
697	DKP	Kolam Air Tawar	01.01.06.02.001	0002	20.000	2002	Jl. Raya Labuan KM 12 Desa Curug Barang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	19/09/2017	00001	Kantor UPTD BBAT Curug Barang	Pembelian	900.000.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : BBAT Curug Barang & Peruntukan : Kantor UPTD BBAT Curug Barang) sertifikasi dalam proses dikelola oleh DKP Prov.Banten (PPSPB-Hari Raharjo), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan lusan 20.740 M ² (Sertifikat Asli masih di DKP)
698	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	500	1998	Jl. Raya Labuan Kel. Cipeucang Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	19/09/2017	00010	Balai Dinas Kelautan Perikanan Kab Pandeglang	Hibah	15.050.000,00	Diginakan Balai Dinas Kelautan Perikanan Kab Pandeglang, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan lusan 486 M ² (Sertifikat Asli masih di DKP)
699	DKP	Kolam Air Tawar	01.01.06.02.001	0001	20.178	1974	Jl. Raya Labuan KM 12 Desa Curug Barang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	19/12/2017	00001	Kantor UPTD Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Curug Barang	Hibah	1.096.650.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : BBAT Curug Barang &Peruntukan : Kantor UPTD BBAT Curug Barang), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20.178 M ²
700	DKP	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	0001	10.709	2016	Jl. Raya Labuan KM 12 Desa Curug Barang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	08/11/2018	00002	Instalasi Air Bersih Kolam Ikan	Pembelian	1.055.896.000,00	Instalasi Air Bersih Kolam Ikan
701	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	01.01.11.04.023	0001	6.343	1974	Jl. Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	22/12/2017	00002	Tempat Pelelangan Ikan (TPI Panimbang)	Hibah	635.550.000,00	Hasil Sensus 2015 Penggunaan : Tempat Pelelangan Ikan (TPI Panimbang), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.217M ²
702	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	25.200	1980	Jl. Tenjo Ayu Kel. Tenjo Ayu Kec. Tirtayasa Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00009	Tempat Gudang Laut dan Penjemuran Rumpul Laut Prov. Banten	Hibah	72.750.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 28.688 M ²
703	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0009	5.500	1998	Jl. Tenjo Ayu Kel. Tenjo Ayu Kec. Tirtayasa Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00009	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tenjo Ayu	Hibah	15.050.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 28.688 M ²
704	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/3804266/3804266	0002	5.000	1984	Desa Surya Bahari Kec. Pakuhaji Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/01/2020	6	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cnais	Hibah	180.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.000 M ²
705	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.023/4358036/4358036	0001	12.884	2004	Jl. Karang Malang No. 02 Binuangun, Kec.Wanasalam, Muara, Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/07/2021	00015	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	223.240.146,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12.884
706	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0001	590	-	Desa Kronjo Kec.Kronjo Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	29/12/2021	0001	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	12.331.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 590
707	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0001	760	-	Desa Kronjo Kec.Kronjo Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	05/10/1993	0002	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	15.884.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 760
708	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0001	2.615	-	Desa Tanjung Pasir Kec.Teluknaga Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	29/12/2021	0001	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	28.215.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.615
709	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0001	996	-	Desa Umbul Tanjung Kec.Cinangka Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	29/12/2021	0001	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	20.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 996
710	DKP	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		0001	704	-	Desa Bojonegara Kec.Bojonegara Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	29/12/2021	0001	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	17.600.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 704
711	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/450/450	0001	8.017	1974	Jl. Raya Panimbang Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	13/03/1996	0002	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	635.550.000,00	Sertifikat Asli dengan Luas = 6.343
712	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/6529178/	000005	4.99	1976	Desa Sukanagara Kec. Carita, Kab Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	18/10/2023	00007	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	25.000.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.99 M ²
713	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/6529174/	000002	6.217	1996	Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang, Kab Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	28/08/2023	00002	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Distribasi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	317.150.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.217 M ²
714	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/6529175/	000002	212	2001	Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang, Kab Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	18/10/2023	00022	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	64.170.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 212 M ²
715	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/6529179/	000006	421	2004	Desa/Sumber Jaya, Kec Sumur, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	16/01/23	00005	TPI SUMUR	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	4.210.000	Sertifikat Asli dengan Luas = 421
716	DKP	Tanah Bangunan Garasi/Pool	1.3.1.01.01.02.014/24214888/	000000	1.137	2002	Kelurahan Banten Kec. Kasemen, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00039	Tanah Bangunan Garasi/Pool	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	117.111.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.137 M ²
717	DKP	Kantor Paud	-	-	500	-	Kelurahan Banten Kec. Kasemen, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00038	Kantor Paud	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	-	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 500 M ²
718	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.017/6529179/	0006	421	2004	Desa Sumber Jaya, Kec, Sumur Kab. Pandeglang,	Kab. Pandeglang	PAKAI	25/04/2024	00022	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	4.210.000	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.197 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak		Sertifikat				
719	DKP	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.3.1.01.01.04.01/7/6529181/	0008	40.000	2016	Desa Cikiruh Wetan, Kec. Cikeseik, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	21/02/2024	00011	TEMPAT PELELANGAN IKAN	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.080.000.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 14.050 M ²
720	DKP	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003/138/	0065	3.306	2016	Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	16/05/24	00015	RUAS JALAN DESA TELUK	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	143,811,000.00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3617 M ²
721	DESDM	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Listrik	01.01.13.10.003	0001	26.025	2003	Jl. Raya Saketi Ds. Saketi Kec. Saketi Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pengelolaan	29/10/2003	02	Gardu Induk Listrik Saketi	Pembelian	1.309.850.000,00	Hasil Sensus 2015 Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Gardu Induk Listrik daerah Saketi, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
722	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0009	689	1999	Jl. Siowa 1 Ds/Kel Suka Ashi Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	15/09/2017	7	Dipergunakan Ex Kantor belum digunakan	Hibah	167.950.000,00	Hasil Sensus 2015 (Tanah tercatat dalam SIMDA Kab. Tangerang (Double Pencatatan), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 681 M ² (Sertifikat Asli masih di pegang Disperindag)
723	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0012	567	1989	Jl. Dewi Sartika Ds/Kel Suka Ashi Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	15/09/2017	61	Rumah Dinas Pegawai	Hibah	303.350.000,00	Hasil Sensus 2015 (Tanah tercatat dalam SIMDA Kab. Tangerang (Double Pencatatan), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 595 M ² (Sertifikat Asli masih di pegang Disperindag)
724	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0014	625	1999	Jl. Perintis Kemerdekaan II Ds/Kel Babakan Kec. Tangerang Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	15/09/2017	18	Ex Kantor belum digunakan	Hibah	313.450.000,00	Hasil Sensus 2015 (Tanah tercatat dalam SIMDA Kab. Tangerang (Double Pencatatan), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 716 M ² (Sertifikat Asli masih di pegang Disperindag)
725	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0010	2.400	1948	Jl. Veteran Ds/Kel Cipare Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	03/10/2018	00105	Kantor Cadin & Rumah Dinas Perindustrian	Hibah	629.100.000,00	Hasil Sensus 2015 (Tanah tercatat dalam SIMDA Kab. Serang (Double Pencatatan), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 3.942 M ²
726	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	1.000	2002	Jl. Cwara No. 57, Rt 005/Rw 016, Kel. Cipare, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	18/10/1985	46	Kantor Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI)	Hibah	2.024.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Harga Berdasarkan Laporan Penilaian KUPP Irfan No. Lapora/026/IRF/L-P/XI/2011, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
727	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	6.180	2002	Jl. Raya Jakarta km 4,5 Pakupatan Kel. Panancangan Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	29/10/2019	00018	Balai Laboratorium Metrologi	Pembelian	2.016.074.860,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.180 M ²
728	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	364	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.028.496.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 88.729 M ²
729	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1820	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		974.058.500,00	
730	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	332	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		166.480.800,00	
731	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	650	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		329.384.300,00	
732	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	313	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		156.838.300,00	
733	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	330	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		165.459.600,00	
734	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	594	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		318.637.700,00	
735	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1456	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		739.652.900,00	
736	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	2300	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.194.853.200,00	
737	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	230	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		116.747.200,00	
738	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1257	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		651.633.600,00	
739	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	909	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		489.803.100,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 98.729 M ²
740	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1356	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		703.791.800,00	
741	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	2324	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.207.363.800,00	
742	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	3515	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.827.713.700,00	
743	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	918	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		480.345.900,00	
744	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1762	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		914.770.200,00	
745	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	361	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		184.975.100,00	
746	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	3220	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.674.011.500,00	
747	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	436	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		225.934.300,00	
748	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1251	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		635.733.200,00	
749	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1120	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		569.111.700,00	
750	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	307	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		176.098.200,00	
751	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1211	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		628.089.600,00	
752	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	2699	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		1.402.662.100,00	
753	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	10202	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		5.310.405.900,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 98.729 M ²
754	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	400	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		205.287.300,00	
755	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	4203	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		2.185.981.600,00	
756	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	24750	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Koplo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK		13.662.089.514,00	

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah Hak	Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
757	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	265	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	273.849.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 98.729 M ²	
758	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	520	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	262.475.800,00		
759	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	662	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	334.982.700,00		
760	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	97	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	98.310.300,00		
761	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1096	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	559.684.200,00		
762	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	2703	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	1.377.141.700,00		
763	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	6811	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	3.516.477.700,00		
764	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	3036	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	1.550.318.700,00		
765	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1858	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	945.704.700,00		
766	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	2890	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	1.472.626.100,00		
767	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	160	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	78.655.500,00		
768	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	353	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	183.918.500,00		
769	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1039	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	534.794.900,00		
770	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1671	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	850.458.900,00		
771	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1442	2019	Desa Mekar Baru Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	733.282.731,00		
772	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1751	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	891.250.900,00		
773	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	338	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	169.742.200,00		
774	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	717	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	379.448.100,00		
775	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	416	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	209.709.777,00		
776	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	335	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	168.012.624,00		
777	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1.453	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik		753.715.100
778	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	1.515	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik		796.124.300
779	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	422	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik		212.492.800
780	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	434	2019	Ds. Mekarbaru Kec. Kopo Kab. Serang Prov. Banten	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00003	PASAR INDUK	Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik		218.563.200
781	DISPERINDAG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/ 459/ 459	0001	1.000	2002	JL. CIWARU/NO. 57, RT 005/RW 016, KEL. CIPARE, KEC. CIPOCOK JAYA, KOTA SERANG-PROVINSI BANTEN	Kota. Serang	Hak Pakai	18/10/1985	46	KANTOR BPTSI	Hadiah/Hibah - /Inventaris /Baik		2024000000
782	DINKOP	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003	0001	393	1992	Jl. Raya Serang - Pandeglang Ds./Kel. Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	05/01/2018	00012	Rumah dinas	Hibah	34.500.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Banten & Peruntukan Kantor, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 375 M ²)
783	DINKOP	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003	0006	365	1985	Jl. Gunung Karang Ds. /Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	22/12/2017	00026	Rumah Dinas Koperasi	Hibah	29.250.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Banten & Peruntukan Kantor) Sertifikat Asli A.n. Depertemen Perdagangan Cq. Dinas Koperasi DT.II. Pandeglang
784	DINKOP	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003	0008	2.000	1984	Jl. Lewi Damar Ds./Kel. Aweth Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/11/2018	00007	Kantor Dekopinda Kab. Lebak	Hibah	57.100.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Bntn & Peruntukan Kantor, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan 1.544 M ²)
785	DINKOP	TANAH BANGUNAN	1.3.1.01.01.04.001/ 462/	000003	200,00	1978	Kel. Sumar Pacing, Kec. Karawaci Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKAI	31/10/24	NIB. 28.05.000 008683.0	TANAH BANGUNAN	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	20.650.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 200 M ²
786	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	2.316	2000	Jl. Raya Labuan Km.3 Pandeglang Kec. Majasari Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/12/1989	8	Kantor UPT Samsat Pandeglang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Pembelian	85.500.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : UPT Pandeglang & Peruntukan : UPT Pandeglang), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
787	BAPENDA	Tanah Lapangan Parkir Lain-lain	01.01.13.02.006	0001	1.194	2008	Jl. Raya Labuan Km.3 Pandeglang Kec. Majasari	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	06/06/2008	00013	Parkiran UPT Samsat Pandeglang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Pembelian	402.600.000,00	HASIL SENSUS 2015 Dipergunakan Kantor Samsat UPTD Pandeglang DPKAD Prov. Banten (Pengguna : UPT PANDEGLANG & Peruntukan : UPT PANDEGLANG (LAHAN PARKIR) Perataan, Timbunan dan Pemadatan lahan Parkir, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
788	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	800	1979	Jl. Sunan Kalijaga No. 4 Kel. Muara Cijung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	22/09/1994	16	Kantor UPT Rangkasbitung Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Hibah	106.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Digunakan Oleh Samsat Lebak UPTD DPKAD Lebak Provinsi Banten (Pengguna : UPT Rangkasbitung & Peruntukan : UPT Rangkasbitung), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD
789	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	6.000	1997	Jl.Raya Civic Centre Blok 405/5 BSD Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	25/06/1998	1	Kantor UPT Serpong Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Hibah	9.027.000.000,00	Hasil Sensus 2015 Dipergunakan Kantor Samsat UPTD BSD DPKAD Prov. Banten (Pengguna : UPT Serpong & Peruntukan : UPT Serpong), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Berangkas BPKAD

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
790	BAPENDA	Tanah Kebun Campuran.Lain-lain	01.01.04.01.002	0001	759	2004	Jl. Raya Cilegon Merak KM. 3 No. 19 Tegal Wangi Kec. Pulo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	20/11/2009	21	Lahan Parkir	Pembelian	168.100.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : UPT Cilegon & Peruntukan : UPT Cilegon, Bangunan Kantor dan Lahan Parkir Ex Jaba), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten hanya 785 m ² yang ada di Berangkas BPKAD
791	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	8.630	2016	Kp. Pasir Geleg RT 001/ RW 002 Desa/Kelurahan Cilangkahan, Kec. Malingging, Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	13/04/2017	00003	Kantor UPT Samsat Malingging Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Pembelian	4.770.800.374,00	Pembelian Tanah Alamat Kp. Pasir Geleg RT 001/ RW 002 Desa/Kelurahan Cilangkahan Malingging Lebak, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten (Sertifikat Asli masih di pegang UPT DPPKD Malingging)
792	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0002	650	2016	Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/08/2018	00004	Pengadaan tanah UPT Samsat Cikande Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	Pembelian	1.300.000.000,00	Pembelian Tanah Kantor Samsat Cikande, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 650 M ²
793	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	8.211	2016	Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/08/2018	00005	Pembelian tanah UPT Samsat Cikande Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	Pembelian	11.644.862.400,00	Pembelian Tanah Kantor Samsat Cikande, Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.211 M ²
794	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	760	2000	Jl. KH. Soehari No. 40 Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	01/01/1984	001	UPT Samsat Serang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	Hibah	152.000.000,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : UPT Serang & Peruntukan : UPT Serang), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 661M ²
795	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			6.513	2019	Malimping Selatan Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	07/01/2020	00009	UPT Samsat Malimping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten		1.050.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.513 M ²
796	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					Malimping Selatan Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	07/01/2020	00009	UPT Samsat Malimping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten		2.337.132.500,00	
797	BAPENDA	Tanah Kebun Campuran.Lain-lain	01.01.04.01.002	0001	2.351	2000	Jl. Raya Cilegon Merak KM. 3 No. 19 Tegal Wangi Kec. Pulo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	15/01/2020	00037	Kantor UPT Samsat Cilegon Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Hibah	494.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.105 M ²
798	BAPENDA	Penggalan Lainnya	01.01.10.02.009	0001	154	2005	Jl. Raya Cilegon Merak KM. 3 No. 19 Tegal Wangi Kec. Pulo Merak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai			Kantor UPT Samsat Cilegon Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten	Pembelian	43.807.806,00	
799	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0018	1.000	2007	Jl. Raya Merak Cilegon Km. 3 No. 19 Tegal Wangi Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai			Lahan Parkir UPT Samsat Cilegon Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Pembelian	494.124.300,00	
800	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0014	3.060	2006	Jl. RE. Martadinata No. 10 Kel. Ciputat Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	17/10/2019	00011	Kantor UPT Samsat Ciputat (BAPENDA) Provinsi Banten	Pembelian	3.955.945.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.060 M ²
801	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0017	8.095	2007	Jl. Syech Nawawi Al- Bantani Kel. Banjar Asri Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	07/08/2008	38	Kantor Samsat Kota Serang	Pembelian	3.242.839.050,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
802	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/ 5008251/ 13	0004	5.167,00	2006	JL. RADEN FATAH KM1 CILEDUG KOTA TANGERANG	Kota. Tangerang	Hak Pakai	04/02/2022	0013	SAMSAT CILEDUG	Mutasi /- /Inventaris /Baik	4.736.572.700,00	HASIL SENSUS 2015 PEMBEBASAN LAHAN PERUNTUKAN SAMSAT CILEDUG KOTA TANGERANG + BIAYA ADMINISTRASI, Biaya Administrasi Pengadaan Lahan Samsat Ciledug
803	BAPENDA	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.005/ 468/ 468	0001	1.000,00	2000	Jl. Raya Pandeglang- Serang Km.3 Kel. Kadumerak Kec. Karang Tanjung	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	03/09/2000	-	Mess	Mutasi /- /Inventaris /Baik	73.650.000,00	HASIL SENSUS 2015 (Pengguna : UPT PANDEGLANG & Peruntukan : MES UPT PANDEGLANG)
804	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/ 5008251/ 13	0004	5.167,00	2006	JL. RADEN FATAH KM1 CILEDUG KOTA TANGERANG	Kota. Tangerang	Hak Pakai	04/02/2022	0013	SAMSAT CILEDUG	Mutasi /- /Inventaris /Baik	4.736.572.700,00	HASIL SENSUS 2015 PEMBEBASAN LAHAN PERUNTUKAN SAMSAT CILEDUG KOTA TANGERANG + BIAYA ADMINISTRASI, Biaya Administrasi Pengadaan Lahan Samsat Ciledug No Reg. 0045 Tahun 2006
805	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 475/ 475	0001	1.000	2000	Jl Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	28/04/2022	0023	Kantor UPT DPKAD Prov. Banten Cikokol Kota Tangera	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	5.930.400.000	
806	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 475/ 476	0002	990	2000	Jl Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	03/08/2020	0024	Kantor UPT DPKAD Prov. Banten Cikokol Kota Tangera	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
807	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 475/ 477	0003	1.000	2000	Jl Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	28/04/2022	0026	Kantor UPT DPKAD Prov. Banten Cikokol Kota Tangera	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
808	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 475/ 478	0004	990	2000	Jl Perintis Kemerdekaan II/B Cikokol Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	03/08/2020	0027	Kantor UPT DPKAD Prov. Banten Cikokol Kota Tangera	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
809	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 479/ 479	0001	3.977	2007	Jl.Raden Patah KM I Ciledug Kota Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	04/02/2022	0013	Kantor UPTD samsat ciledug Prov. Banten	Pembelian BM /- /Inventaris /Baik	6.263.675.000	
810	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 5008254/	*00007	3.500	2011	Desa Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	24/08/23	00007	GERAI SAMSAT SEPATAN KAB TANGERANG/	Pembelian BM /- /Inventaris /Baik	2.511.997.900	Sertipikat Asli /A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.500 M ²
811	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 5008254/	*00007	3.500	2011	Desa Kosambi Kec. Sukadiri Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	24/08/23	00006	GERAI SAMSAT SEPATAN KAB TANGERANG/	Pembelian BM /- /Inventaris /Baik	2.511.997.900	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 137 M ²
812	BAPENDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.01.005/ 468/	0001	1.000	2000	Kel. Kadu Merak, Kec. Karang Tanjung Kab Pandeglang	Kab Pandeglang	PAKAI	01/03/1980	NIB. 28.02.000 003015.0	MESS BAPENDA	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	73.650.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1000 M ²
813	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0004	91.050	2000	Jl. Yumaig Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	26/03/2018	00094	Kantor Bazda Kota Serang	Hibah	379.900.000,00	Hasil Sensus 2015 (Digunakan Kantor BAZDA Serang) Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD) dengan rincian Luas = 5.266 M ²
814	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0022	2.400	2011	Kelurahan Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	13/10/2015	10	KPU	Pembelian	1.554.237.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
815	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0023	16.700	2011	Kelurahan Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	13/10/2015	11	BNNP	Pembelian	9.956.112.100,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)
816	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0026	7.555	2011	Kelurahan Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	13/10/2015	12	BPBD	Pembelian	4.548.779.300,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten yang ada di Sub. Bid. Pemanfaatan dan Penggunaan (BPKAD)

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
817	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0028	24.407	2013	Kelurahan Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	23/04/2018	00019	Rencana Detensi Imigrasi	Pembelian	16.537.033.200,00	Hasil Sensus 2015 (Pengadaan Lahan Detensi Imigrasi Kanwil Hukum dan Ham), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 23.830 M ²
818	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001/4946748/11	0001	19.077	2006	Jl. Raya Pakupatan (Keluar Pintu Tol Serang Timur Arah Pakupatan) Blok Kemang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/12/2021	00032	Kuanda dan BKKBN	Mutasi /- /Inventaris /Baik	2.239.878.755,00	HASIL SENSUS 2015 PEMERIKSAAN LAHAN UNTUK UPBJU-UT PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN KONI BANTEN
819	BPKAD	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/4946757/45	000001	6.253	2014	Kelurahan Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	01/08/23	00022	PLUT BPKAD	Mutasi (Pembelian)/ APBD/ Inventaris/	4.932.801.020	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.569 M ²
820	PERPUSDA	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	7.500	2008	Jl. Raya Serang Jakarta Blok Sapih Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	06/04/2009	20 dan 21	Bangunan Kantor DPK	Pembelian	6.784.504.400,00	Hasil Sensus 2015 (Pengguna : DPK Provinsi Banten), ada 2 Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan luasan : 5000 M ² dan 2500 M ² yang ada di Berangkas BPKAD
821	DLHK	Tanah Kebun	01.01.11.05.004/483/483	0001	80.800	2000	Jl. Perkebunan Ds/Kel. Sindang Mulya Kec. Maja Kab Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	08/12/2021	00006	Kebun induk	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	306.850.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 80.800 M ²
822	DLHK	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/484/1900137	000001	3023	2000	Kelurahan Saruni Kec. Majasari, Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	24/12/23	00009	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hadiab/Hibah /Hibah /Inventaris /Baik	60.100.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3023 M ²
823	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.590	1993	Blok Dukuh Ds. Leuwidamar Kec. Leuwidamar Blok Duku Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/04/2004	02	SMAN 1 Leuwidamar	Hibah	50.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.590 M ²
824	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	1	9.284,00	2016	Blok Dukuh Ds. Leuwidamar Kec. Leuwidamar Blok Duku Desa Leuwidamar Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prov. Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/04/2004	02	SMAN 1 Leuwidamar	Hibah	22.745.800,00	
825	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	6.384	1989	Jln. Gunung Kencana Km.1	Kab. Lebak	Hak Pakai	11/05/2010	4	SMAN 1 Banjarsari	Hibah	37.525.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.384 M ²
826	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.068	2005	Jln. Raya Cileles Desa Muaradua	Kab. Lebak	Hak Pakai	15/12/2009	6	SMAN 1 Cikaur	Hibah	48.726.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.068 M ²
827	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	11.080	2000	Jl. Warungkadu No. 49 Cikotok 42394	Kab. Lebak	Hak Pakai	15/04/2004	03	SMAN 1 Cibeber	Hibah	415.240.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11.080 M ²
828	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	13.282	1992	Jln. Kebon Kalapa Desa Maja Kec Maja Kab. Lebak 42381	Kab. Lebak	Hak Pakai	17/02/2004	11	SMAN 1 Maja	Hibah	398.460.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.282 M ²
829	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	755	1959	Jl. RT. Hardiwinangan	Kab. Lebak	Hak Pakai	15/10/2005	28	SMAN 1 Rangkasbitung	Hibah	415.125.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 755 M ²
830	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	17.658	1986	Jl. Silwangi Pasir Ona Rangkas	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/12/2000	23	SMAN 2 Rangkasbitung	Hibah	2.648.700.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 17.658 M ²
831	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	15.317	2009	Jl. Beyeh-Simpang Km. 02 Sukamurah, Malinging	Kab. Lebak	Hak Pakai	14/06/2013	2	SMKN 1 Malingging	Hibah	100.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15.317 M ²
832	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	10.000	1983	Jln. Dewi Sartika No 61 L. Rangkas	Kab. Lebak	Hak Pakai	10/05/2019	6	SMKN 1 Rangkasbitung	Pembelian	1.500.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.000 M ²
833	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	2.076	2016	Blok Jakeling Desa Jagabaya Kec. Warunggunung	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00001	SMKN 1 Warunggunung	Pembelian	41.665.146,50	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.076 M ²
834	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	10.904,00	2010	Blok Jakeling Desa Jagabaya Kec. Warunggunung	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00001	SMKN 1 Warunggunung	Pembelian	218.080.000,00	
835	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	13.406	2016	Blok Posko Desa Cibungsur Kec. Leuwidamar	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00001	SMKN 1 Leuwidamar	Pembelian	297.046.599,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.460 M ²
836	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	4.236	2013		Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00003	SMKN 1 Cipanas	Pembelian	75.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.236 M ²
837	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0004	9.082	2015	Maja Kec. Maja	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00005	SMKN 1 Maja	Pembelian	1.028.392.289,48	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.082 M ²
838	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	602	1991	Jalan Raya Muncang No.44 Cipanas-Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	14/07/2019	00004	SMAN 1 Cipanas	Pembelian	146.718.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 602 M ²
839	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.628	2013	Desa Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	16/10/2019	00004	SMAN 1 Sobang	Pembelian	12.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.628 M ²
840	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	9.724	2014	Desa Ciparasi Kec. Sobang Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	14/10/2019	00001	SMKN 1 Sobang	Pembelian	210.775.218,20	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.724 M ²
841	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	25.570	1987	Jln. Raya Malingging Km. 2,5 Bayah Ds. Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	16/10/2019	00019	SMAN 1 Bayah	Hibah	37.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 25.570 M ²
842	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0003	5.243	2015	Kp. Rancagawe Kec. Kalanganyar	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/10/2019	00006	SMKN 1 Kalanganyar	Pembelian	546.716.371,14	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.243 M ²
843	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	7.260	2002	Jln. Dewi Sartika No 61 L. Rangkas	Kab. Lebak	Hak Pakai	30/07/2019	00187	SMKN 1 Rangkasbitung	Pembelian	1.500.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.260 M ²
844	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	6.000	2007	Komplek Kec. Cirinten Kec. C	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00004	SMKN 1 Cirinten	Pembelian	12.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6,033 M ²
845	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	10.000	2008	Sajira	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00016	SMAN 1 Sajira	Pembelian	114.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10,320 M ²
846	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.125	2000	Cihara Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00018	SMAN 1 Cihara	Hibah	120.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7,125 M ²
847	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	11.980	2010	SMKN 1 Bayah, Bayah Barat	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00023	SMKN 1 Bayah	Pembelian	336.250.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11.980 M ²
848	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	13.560	1983	Jalan Raya Bayah Km. 4 Malingging, Cilangkahan	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00014	SMAN 1 Malingging	Pembelian	33.900.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11,820 M ²
849	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.195	2013	Cimanyangray, Krc. Gunung Kencana, Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00005	SMKN 1 Gunungkencana	Pembelian	260.607.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8,195 M ²
850	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.097	2006	Jln. Raya Kumpang No.28 Banjarsari -Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00006	SMAN 2 Banjarsari	Pembelian	60.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5,097 M ²
851	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.001	2013	blok Cicayur	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00004	SMAN Sawarna/SMAN 2 Bayah	Hibah	30.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7,001 M ²
852	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	11.150	2013	Jln. Raya Bojongmanik	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00005	SMAN 1 Bojongmanik	Pembelian	30.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11,150 M ²
853	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	4.243	2013	Blok Sukamaju Citorek Sabra	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00005	SMAN 2 Cibeber	Pembelian	30.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4,243 M ²
854	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.771	2007	Kp Gunung Batu, Desa Gunung Batu, Kec. Cilograng	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00002	SMAN 1 Cilograng	Hibah	171.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5,771 M ²
855	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.793	2004	Jln. Raya Pasarkupa Km. 01 Cijaku 42395	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00004	SMAN 1 Cijaku	Hibah	35.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9,793 M ²
856	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	3.641	2013	Desa Banjarsari, Kec. Lebak Gedong	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00001	SMKN 1 Lebakgedong	Pembelian	15.960.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3,641 M ²
857	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	17.710	2013	Jalan Raya Pasarkupa-Cimandiri Lautk Km. 03 Cigemblong Kab. Lebak Prop. Banten	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00022	SMAN 1 Cigemblong	Pembelian	150.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 17,710 M ²
858	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.921	1998	Jln. Raya Sempay Gunung Kencana-Pasar Kopi Sajir	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00002	SMAN 1 Cileles	Hibah	75.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.921 M ²
859	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	1.311	2013	Desa Cisimet Kec. Leuwidamar	Kab. Lebak	Hak Pakai	03/01/2020	00002	SMAN 2 Leuwidamar	Pembelian	20.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1,311 M ²

No	OPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
860	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.930	1986	Jln. Raya Pandeglang Km. 12,5 Cibuah	Kab. Lebak	Hak Pakai	29/01/2020	00006	SMAN 1 Warunggunung	Pembelian	38.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5,930 M ²
861	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0003		2001	Jln. Raya pandeglang Km.12,5 Cibuah	Kab. Lebak				SMAN 1 Warunggunung	Pembelian	4.000.000,00	
862	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	4		2002	Jln. Raya pandeglang Km.12,5 Cibuah	Kab. Lebak				SMAN 1 Warunggunung	Pembelian	300.000,00	
863	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0005		2003	Jln. Raya pandeglang Km.12,5 Cibuah	Kab. Lebak				SMAN 1 Warunggunung	Pembelian	7.000.000,00	
864	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0005	500,00	2002	Jln. Raya pandeglang Km.12,5 Cibuah	Kab. Lebak				SMAN 1 Warunggunung	Pembelian	3.000.000,00	
865	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	20.940	2004	Jln. Raya Lewidamar Km. 11 Pasir Roko Kec. Cimarga Kb. Lebak 42361	Kab. Lebak	Hak Pakai	13/01/2020	00002	SMAN 1 Cimarga	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	20.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20,940 M ²
866	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.820	2013		Kab. Lebak	Hak Pakai	19/03/2020	00007	SMKN 1 Cikalur	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	257.961.076,08	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9,820M ²
867	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	4.787	2013	kel. Pada sika Kec. Maja Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	21/02/2020	00006	SMAN 2 Maja	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	206.800.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4,787 M ²
868	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.000	2004	Kp. Sukanagara Ds. Sukanagara Kec. Muncang	Kab. Lebak	Hak Pakai	05/06/2020	00003	SMAN 1 Muncang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	250.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14,400 M ²
869	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900284/1900284	0001	9.985	2004	Jl. Raya Malingsing KM 6,5 Kel. Sukajadi Kec. Panggarangan	Kab. Lebak	Hak Pakai	13/01/2020	00002	SMAN 1 Panggarangan	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	500.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9,985 M ²
870	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900300/1900300	0001	10.000	2013		Kab. Lebak	Hak Pakai	18/11/2020	00002	SMAN 3 Cibeber	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	184.312.452,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10,000 M ²
871	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900267/1900267	0001	14.205,00	2001	Jl. Malaabaar-Ds.Pasarkorong-Cibadak-Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	14/12/2021	00006	SMAN 1 CIBADAK	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	142.050.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13510
872	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900278/1900278	0001	10.000,00	2000	Jl.Raya Cijaku KM.03 Gunungkencana	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/10/2020	00003	SMAN 1 GUNUNGKENCANA	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	60.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10000
873	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900308/1900308	0001	2.000,00	2013	-	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/07/2021	00005	SMKN 1 CIPANAS	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	157.982.102,51	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4427
874	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900298/1900298	0001	8.963,00	2013	-	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/07/2021	00007	SMAN 2 MALINGPING	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	169.919.231,11	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8035
875	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900285/1900285	0001	5.535,00	1959	Jl. RT. Hardiwinangun	Kab. Lebak	Hak Pakai	20/12/2000	00026	SMAN 1 RANGKASBITUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	415.125.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5525
876	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900303/1900303	0001	8.294,00	2013	Jl. Moch Idnis	Kab. Lebak	Hak Pakai	08/12/2021	00005	SMAN 1 KALANGANYAR	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	252.413.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8294
877	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900276/1900276	0001	5.434,00	1991	Jalan Raya Muncang No.44 Cipanas-Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	13/07/2021	00007	SMAN 1 CIPANAS	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	146.718.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2025
878	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/378/378	0002	14.720,00	2017	Desa Parungsari Kec. Wansalam Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	06/07/2021	00006	SMKN Wansalam	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.122.620.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 17750
879	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-	-	2.000		Desa Muara Cijung Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	04/02/1987	8	SKHN Lebak	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	2.000.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.000
880	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-	-	243		Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak	Kab. Lebak	Hak Pakai	27/02/2020	00008	SMKN KALANGANYAR	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	2.430.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 243
881	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900263/1900263	0001	6.384	1989	Jl. Gunung Kencana Km.1	Kab. Lebak	Hak Pakai	11/05/2010	04	SMAN 1 BANJARSARI	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	37.525.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.384
882	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900264/1900264	0002	1.620	2002	Jl. Gunung Kencana Km.1	Kab. Lebak	Hak Pakai	12/08/2002	0006	SMAN 1 BANJARSARI	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	16.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.620
883	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900290/1900290	0002	500	2002	Jl. Raya pandeglang Km. 12,5 Cibuah	Kab. Lebak	Hak Pakai	29/12/2022	0010	SMAN CIBUAH	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	3.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 541
884	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900310/1900310	0001	6.033	2007	Blok Kantor Kecamatan Cirinten KM. 1 RTRW. 003/001 Kp/Komp. Komplek Kecamatan Cirinten Kel/Desa. Cirinten Kec. Cirinten KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Hak Pakai	29/12/2022	0007	SMAN CIRINTEN	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	12.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.584
885	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900320/1900320	0001	10340	1979	JL. DEWI SARTIKA NO. 46 I. RANGKASBITUNG RTRW. 004/013 Kp/Komp. Komplek Pendidikan Kel/Desa. Muara Cijung Timur Kec. Rangkasbitung KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Hak Pakai	02/07/2019	00001	SMKN 2 RANGKASBITUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	10340000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.340
886	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900320/1900320	0001	9.150,00	1987	JL. DEWI SARTIKA NO. 46 I. RANGKASBITUNG RTRW. 004/013 Kp/Komp. Komplek Pendidikan Kel/Desa. Muara Cijung Timur Kec. Rangkasbitung KAB. LEBAK	Kab. Lebak	Hak Pakai	02/07/2019	00001	SMKN 2 RANGKASBITUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	91.500.000,00	
887	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900317/1900317	000001	10.904	2010	Desa / Jagabaya Kec. Warunggunung, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	21/07/23	00006	SMKN 1 WARUNGGUNUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	218.080.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9,078M ²
888	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900318/1900318	000002	920	2013	Desa / Jagabaya Kec. Warunggunung, Kab Lebak	Kab. Lebak				SMKN 1 WARUNGGUNUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	41.665.146,50	
889	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900319/1900319	000003	2.076	2016	Desa / Jagabaya Kec. Warunggunung, Kab Lebak	Kab. Lebak				SMKN 1 WARUNGGUNUNG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	126.514.000,00	
890	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900306/	*000001	46.498	2013	Desa/ Kel Cikotok Kec. Cibeber, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	11/09/23	00034	SMK NEGERI 1 CIBEER (Ganti Nama)	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.231.904.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 46,498 M ²
891	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	BELUM TERCATAT DI ATISISBADA				Desa Parungkujuang Kec. Cileles, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	20/09/23	00005	SMK NEGERI 1 CILELES (Ganti Nama)	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20,000 M ²
892	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900271/	000001	6.837	2004	Desa Mekar Jaya, Kab. Lebak Kec. Cijaku, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/11/2023	00006	SMAN 1 CIJAKU	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	35.000.000	Sertifikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 6.837 M ²
893	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900263/	000001	1.763	2002	Desa Cidahu , Kec. Banjarsari, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/11/2023	00009	SMAN 1 BANJARSARI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	16.200.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1,763 M ²
894	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan			422		Desa Cidahu , Kec. Banjarsari, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	07/11/2023	00010	SMAN 1 BANJARSARI	Hadiah/Hibah /P4D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 422 M ²
895	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900288/	000001	19.830	2003	Desa Sukatani , Kec. Wanasalam, Kab Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	28/11/2023	00023	SMAN 1 WANASALAM	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	280.000.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19,830 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
896	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathian	1.3.1.01.01.04.002/6531183/	000002	7.692	2021	Desa Kersa Ratu Kec. Malimping, Kab.Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	29/12/23	*00005	SMKN 2 MALINGPING	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	374.033.334	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.692 M ²
897	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathian	1.3.1.01.01.04.002/6531207/	000004	7.692	2021	Desa Kersa Ratu Kec. Malimping, Kab.Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	29/12/23	*00005	SMKN 2 MALINGPING	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	528.833.333	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.692 M ²
898	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathian	1.3.1.01.01.04.002/6531208/	000005	7.692	2021	Desa Kersa Ratu Kec. Malimping, Kab.Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	29/12/23	*00005	SMKN 2 MALINGPING	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	374.033.333	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.692 M ²
899	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Lathian	1.3.1.01.01.04.002/23587052/	000002	4.269	2022	Desa Tanjungwangi Kec. Muncang, Kab..Lebak	Kab. Lebak	PAKAI	29/12/23	*00002	SMAN 2 CIMUNCANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	452.710.375	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.269 M ²
900	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	6.850	1972	Jln. Pendidikan No 2 Ciekek Karaton Pandeglang Telp (0253) 201131 Kel Karaton Kec Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0004	SMAN 6 Pandeglang	Hibah	342.500.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.850 M ²
901	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	2.213,00	2010	Jln. Pendidikan No 2 Ciekek Karaton Pandeglang Telp (0253) 201131 Kel Karaton Kec Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0004	SMAN 6 Pandeglang	Hibah	530.000.000	
902	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0004	3.661	2011	Jln. Raya Pandeglang Pari KM 14 Mandalawangi Blok Pertempuran Ds. Cikongeng Kel. Cikongeng Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/07/2012	2	SMKN 8 Pandeglang	Pembelian	137.551.614,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.661 M ²
903	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0002	5.625	2009	Jln. Raya Pandeglang Pari KM 14 Mandalawangi Blok Pertempuran Ds. Cikongeng Kel. Cikongeng Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	28/09/2012	3	SMKN 8 Pandeglang	Pembelian	84.375.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.625 M ²
904	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0003	1.110,00	2010	Jln. Raya Pandeglang Pari KM 14 Mandalawangi Blok Pertempuran Ds. Cikongeng Kel. Cikongeng Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	28/09/2012	3	SMKN 8 Pandeglang	Pembelian	15.750.000,00	
905	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0004	5.000,00	2008	Jln. Raya Pandeglang Pari KM 14 Mandalawangi Blok Pertempuran Ds. Cikongeng Kel. Cikongeng Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	28/09/2012	3	SMKN 8 Pandeglang	Pembelian	188.875.000,00	
906	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	120	2011	Jln. Raya Barusatu Km5 Blok Bulan RT 002/001 Desa Koranji Kec Pulosari, Pandeglang Kel Koranji Kec Pulosari Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	02/07/2012	1	SMKN 10 Pandeglang	Pembelian	3.552.097,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 120 M ²
907	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0003	1.292	2011	Jln. Raya Barusatu Km5 Blok Bulan RT 002/001 Desa Koranji Kec Pulosari, Pandeglang Kel Koranji Kec Pulosari Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	02/07/2012	2	SMKN 10 Pandeglang	Pembelian	37.612.396,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.292 M ²
908	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	10.000	2010	Jln. Raya Barusatu Km5 Blok Bulan RT 002/001 Desa Koranji Kec Pulosari, Pandeglang Kel Koranji Kec Pulosari Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	20/07/2012	3	SMKN 10 Pandeglang	Pembelian	240.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.000 M ²
909	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0004	3.588	2011	Jln. Raya Barusatu Km5 Blok Bulan RT 002/001 Desa Koranji Kec Pulosari, Pandeglang Kel Koranji Kec Pulosari Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/07/2012	04	SMKN 10 Pandeglang	Pembelian	104.724.770,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.588 M ²
910	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.980	2011	Blok ID Mahendra Kec Cibaliung Kel Mahendra Kec Cibaliung Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/07/2012	1	SMKN 12 Pandeglang	Pembelian	249.780.573,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.980 M ²
911	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	4.774	2012	Blok ID Mahendra Kec Cibaliung Kel Mahendra Kec Cibaliung Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	00002	SMKN 12 Pandeglang	Pembelian	123.449.100,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.774 M ²
912	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	4.212	2006	Kp Margamukti Rt/Rw 10/05 Bojong Pdg Kec Bojong Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00003	SMKN 4 Pandeglang	Pembelian	56.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.212 M ²
913	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0004	2.225	2015	Kp Marga Mukti Desa Bojong, Kec Bojong Kab Pandeglang - Banten Kel Bojong Kec Bojong Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00004	SMKN 4 Pandeglang	Pembelian	310.938.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.225 M ²
914	DINDIK	Tanah BangunanTempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.026	0001	246	1997	Jln. Raya Labuan Kp Cipogor Ds. Alaswangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00002	SMAN 4 Pandeglang	Pembelian	4.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 246 M ²
915	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	10.972	2003	Jln.Perintis Kemerdekaan Caringin -Labuan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten 42264 Kec. Labuan Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00009	SMKN 3 Pandeglang	Hibah	22.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.927 M ²
916	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.814	2006	Jln. Raya Pagelaran Km 4 Sumur Waru Pagelaran Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	00007	SMKN 9 Pandeglang	Hibah	343.455.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.813 M ²
917	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0001	10.000	2002	Jln. Raya Menes-Jiput Km 3,5 Simpang Tiga Nanggung Cening Cikerdal Kp Kadugajah Mesjid Ds Cening Kec Cikerdal Kec Cikerdal Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	1	SMAN 11 Pandeglang	Pembelian	285.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.000 M ²
918	DINDIK	Tanah Kampung Lain-lain	01.01.01.01.002	0001	1.420	2014	Jln. Raya Menes-Jiput Km 3,5 Simpang Tiga Nanggung Cening Cikerdal Kp Kadugajah Mesjid Ds Cening Kec Cikerdal Kec Cikerdal Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	1	SMAN 11 Pandeglang	Pembelian	145.000.000,00	
919	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.200	2004	Jln. Maja Cihaiuk Km 7 Banjar Pandeglang Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	00001	SMAN 14 Pandeglang	Pembelian	35.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.034 M ²
920	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.154	2004	SMA Negeri 13 Pandeglang Kec Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	09/10/2019	00002	SMAN 13 Pandeglang	Pembelian	45.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.154 M ²
921	DINDIK	Kampung	01.01.01.01.001	0001	9.300	2004	Jln. Pendidikan Ciekek Karaton No 41 Pandeglang Kec. Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00003	SMAN 2 Pandeglang	Hibah	465.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.300 M ²
922	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	2.758	2015	Jln. Raya Cibaliung Km 02 Desa Karyaabuwa Kel Karyaabuwa Kec Ciegalis Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	00013	SMAN 17 Pandeglang	Pembelian	139.949.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.525 M ² + 1.233 M total luas = 2.758 M ²
923	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.003	2	7.390,00	2002	Jln. Raya Cibaliung Km 02 Desa Karyaabuwa Kel Karyaabuwa Kec Ciegalis Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	00013	SMAN 17 Pandeglang	Pembelian	47.500.000,00	
924	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	2.500	2001	Jln. Alun-alun Barat Sukajadi Cibaliung Pandeglang Kec Cibaliung Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	16/10/2019	00008	SMAN 5 Pandeglang	Hibah	250.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.074 M ²
925	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	14.400	2003	Jln. Raya Masjid Km 1 Kolelel Kecamatan Picung Kec Picung Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00002	SMAN 12 Pandeglang	Pembelian	160.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14.400 M ²
926	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	73.200	1996	Jln. Amd. km 03 Kadubanen Pandeglang Banten Kec. Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00019	SMKN 2 Pandeglang	Hibah	1.944.576.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 73.200 M ²

No	OPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
927	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.494	2008	Jln. Raya Pandeglang Pari KM 14 Mandalawangi Blok Pertempuran Ds. Cikoneg Kel. Cikoneg Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00004	SMKN 8 Pandeglang	Pembelian	188.875.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5,494 M ²
928	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	12.970	2007	Ds. Mekarjaya Kec. Mekarjaya Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00002	SMKN 11 Pandeglang	Pembelian	390.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12,970 M ²
929	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.01.01.002	0001	6.500	2006	Jln. Raya Cibaliung, KM02 Dayah Mangreh Sumur 42283, Pandeglang, Banten Kec Sumur Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/01/2020	00005	SMAN 16 Pandeglang	Pembelian	130.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5,963 M ²
930	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900241/1900241	0001	16.700	1990	Jl raya labuan km 5 pandeglang Kec Labuan Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00001	SMKN 1 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	167.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 16,700 M ²
931	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.02.003/1900220/1900220	0001	5.000	1996	Jl Raya Panimbang KM 1,5 Munjul Kec Panimbang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00004	SMAN 7 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	60.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7,170 M ²
932	DINDIK	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.003/1900221/1900221	0002	500	2004	Jl Raya Panimbang KM 1,5 Munjul Kec Panimbang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00004	SMAN 7 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	6.000.000,00	
933	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900222/1900222	0001	500	2013	Kp Ds/KecMunjul Kec Munjul Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00004	SMAN 7 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	12.000.000,00	
934	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900223/1900223	0002	1.900	2014	Desa Munjul Kecamatan Munjul Kec Munjul Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00004	SMAN 7 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	114.300.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7,170 M ²
935	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900213/1900213	0001	29.970	1983	Kp Cipogor Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Kec Menes Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	1	SMAN 4 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	95.940.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 29,970 M ²
936	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900213/1900214	0002	246,00	1997	Kp Cipogor Desa Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Kec Menes Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	1	SMAN 4 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	4.000.000	
937	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900228/1900228	0001	10.000	1999	Jl Raya Labuan KM24 Cisatapandeglang 42273 Kec Labuan Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	05/11/2020	00002	SMAN 10 Pandeglang	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	500.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10,000 M ²
938	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900250/1900250	0001	26.000	2006	JLN RAYA NANGGOR KARANGTANJUNG PANDEGLANG Kec Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	15/11/2021	00007	SMKN 7 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	15.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =15760
939	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900237/1900237	0001	10.000	2005	Jl Raya Carita Km 05 Labuan Pandeglang 42264 Kec Labuan Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	21/12/2020	00003	SMAN 15 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	360.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =9867
940	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900218/1900218	0001	6.850	1972	Jl Pendidikan No 2 Ciekek Karaton Pandeglang Telp (0253) 201131 Kel Karaton Kec Pandeglang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0001	SMAN 6 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	342.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =6850
941	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900239/1900239	0001	9.500	2002	Jln Raya Cibaliung Km02 Kec Cigulis Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	000118	SMAN 17 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	47.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =9500
942	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900204/1900204	0001	9.100	1979	CIGADUNG	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	000118	SMAN 1 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	3.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =9100
943	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900204/1900204	0002			CIGADUNG	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	000118	SMAN 1 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		
944	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900204/1900207	0004	2.950	2001	CIGADUNG	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	000118	SMAN 1 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	85.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =2949
945	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900205/1900205	0002			CIGADUNG	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	000118	SMAN 1 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		
946	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900230/1900230	0001	2.500	2014	Kp Kadugajah Mesjid Ds Cening Kec Cikedal Kec Cikedal Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0003	SMAN 11 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	145.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =2500
947	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900248/1900248	0001	4.770	2006	Jl. Raya cigulis km. 01 Kec. Cigulis Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0006	SMKN 6 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	188.800.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4770
948	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900249/1900249	0002	1.575	2012	Kp golat/pangkalan sobang Kec. Sobang Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	31/12/2021	0006	SMKN 6 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	78.560.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1,575
949	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.03.01.019/1900209/1900209	0001	1.000	1988	jl perintis kemerdekaan	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/06/2022	0001	SMAN 3 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1000
950	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.01.010/1900210/1900210	0001	2.500	1988	JL PERINTIS KEMERDEKAAN	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/06/2022	0001	SMAN 3 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2500
951	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900211/1900211	0001	30.100	1982	Jl Perintis Kemerdekaan Labuan Kec Labuan Kabupaten Pandeglang	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/06/2022	0001	SMAN 3 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	265.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 30100
952	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.005/1900212/1900212	0001	10.740	1988	jl perintis kemerdekaan	Kab. Pandeglang	Hak Pakai	17/06/2022	0001	SMAN 3 PANDEGLANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	5.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10740
953	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900008/1900008	0002	8.905	2005	Jln. cikande kopu Blok Pasir Laban Kel. kopu Kec. Kopu Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	17/10/2019	00001	SMAN 1 Kopu	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	356.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9,982 M ²
954	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900007/1900007	0001	9.982,00	2005	Jln. cikande kopu Blok Pasir Laban Kel. kopu Kec. Kopu Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	17/10/2019	00001	SMAN 1 Kopu	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	308.100.000,00	
955	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900009/1900009	0003	1.362	2006	Jln. cikdande kopu Blok Pasir Laban Persil 016 Kel. kopu Kec. Kopu Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	17/10/2019	00001	SMAN 1 Kopu	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	68.100.000,00	
956	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.399	2012	Jln. Nambo Teras Bendung Kel. Pulo Kec. Cirus Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/03/2020	3	SMKN 1 Cirus	Pembelian	1.644.825.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20.000 M ²
957	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	6.117	2012	Jln. Nambo Teras Bendung Kel. Pulo Kec. Cirus Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/03/2020	3	SMKN 1 Cirus	Pembelian	1.070.475.000,00	
958	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0003	4.484	2012	Jln. Nambo Teras Bendung Kel. Pulo Kec. Cirus Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/03/2020	3	SMKN 1 Cirus	Pembelian	784.700.000,00	
959	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0004	0	2012	Jln. Nambo Teras Bendung Kel. Pulo Kec. Cirus Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/03/2020	3	SMKN 1 Cirus	Pembelian	48.587.000,00	
960	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	3.845	2007	Jln. Raya Pasar Ciomas Kel Sukabares Kec Ciomas Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	02/04/2020	3	SMAN 1 Ciomas	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	184.400.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3,845 M ²
961	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.003	0000	1.419	2000	Jln. Raya Pasar Ciomas Kel Sukabares Kec Ciomas Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	02/04/2020	4	SMAN 1 Ciomas	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	15.750.000,00	
962	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900021/1900021	0001	13.770,00	2002	JL. RAYA PALKKA KM. 30 Kp. Batu Ceper Kel. Citasuk Kec. Padarincang Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	0003	SMAN 1 PADARINCANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	137.700.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10,240 M ²
963	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900022/1900022	0002	1.000,00	2003	JL. RAYA PALKKA KM. 30 Kp. Batu Ceper Kel. Citasuk Kec. Padarincang Kabupaten Serang	Kab. Serang				SMAN 1 PADARINCANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	40.000.000,00	

OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan		
964	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.627	2013	Jln. Raya Banten Lama, Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/12/2020	26	SMAN 4 Kota Serang	Hibah	5.250.068.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.627 M²
965	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900058/1900058	0001	26.200	2013	Jln. KH Abdul Fatah Hasan No. 89 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	15/10/2020	50	SMKN 2 KOTA Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	53.055.001.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 26.200 M²
966	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900039/1900039	0001	19.668	2011	Kp Kosambi Kel. Karang Suraga Kec. Cinangka Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00026	SMKN 1 CINANGKA KAB. SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	3.750.170.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 19.668 M²
967	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900002/1900002	0001	8.818	2008	Jl Lamud Gorda Km 07 Kp Binaung Kel Binaung Kec Binaung Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00001	SMAN 1 BINUANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	457.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.818 M²
968	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900019/1900019	0001	7.506	2002	Jl Raya Jakarta-Serang KM20 Kp. Mendu Kel. Kibin Kec. Kibin Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00191	SMAN 1 KIBIN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	120.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas =7.506 M²
969	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900031/1900031	0001	6.755	1989	Jalan Raya Batu Kuwung Kel Pabuaran Kec Pabuaran Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	03/12/2020	00004	SMAN 1 PABUARAN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	11.406.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.755 M²
970	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900032/1900032	0001	7.067	1998	Jl Raya Cilayang No 9 Kel Cilayang Kec Cikeusal Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00005	SMAN 1 CIKEUSAL	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	11.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.067 M²
971	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900010/1900010	0001	15.463,00	2005	Jl Raya Serang- Pandeglang KM 14 Kel Panyirpan Kec Baros Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00008	SMAN 1 Baros	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.082.410.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12.500 M²
972	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900051/1900051	0001	4.416	1978	Jl. A. Yani Serang No.39 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00728	SMAN 1 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	14.298.850.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.278 M²
973	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.05.007/1900054/1900054	0001	21.432	1995	Blok Dayon Mas/Dahu, Persil 36/19b Desa Penggung Jati Kec. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00007	SMAN 3 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	399.980.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 22.226 M²
974	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.05.007/1900054/1900054	0001	20.000	2002	Blok Dayon Mas/Dahu, Persil 36/19b Desa Penggung Jati Kec. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00007	SMAN 3 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	6.639.669.000,00	
975	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900030/1900030	0001	16.546	2004	Jl Raya Baros - petir Km 12 Petir Rd04/01 Kel petir Kec Petir Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	20/11/2020	00022	SMAN 1 Petir	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	112.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.095M²
976	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900057/1900057	0001	14.300	2013	Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 88 Serang Kel. cipare Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	25/10/2021	49	SMKN 1 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	28.957.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14300
977	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900059/1900059	0001	9.940	1990	Jl. Kimara No.1, Kp. Dukuh Desa Lebak Wangi, Kec. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	20/12/2021	00002	SMKN 3 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.128.191.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9940
978	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)		0001	20.000	2002		Kota. Serang	Hak Pakai	20/12/2021	00004	SMKN 5 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	2.060.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20000
979	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900024/1900024	0001	4.000	2003	Jln. S.A Tirtayasa Rt.06/03 Kel. Tirtayasa Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	19/02/2021	00010	SMAN 1 TIRTAYASA	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	28.600.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8764
980	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900025/1900025	0002	6.000	2006	Jln. S.A Tirtayasa Rt.06/03 Kel. Tirtayasa Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai			SMAN 1 TIRTAYASA	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	360.000.000,00	
981	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900038/1900038	0001	10.884	2001	Jln Warung Selukur KM 04 Kp Pengsianon Kel Teras Kec Carenang Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	16/04/2021	00001	SMAN 1 CARENANG	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	108.838.700,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15210
982	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900000/1900000	0001	11.330	2015	SMAN 1 Kragilan Kec Kragilan Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	02/02/2021	00012	SMAN 1 KRAGILAN (RINTISAN)	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	2.297.806.200,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12136
983	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900004/1900004	0001	9.885	2011	JlnOsosom Bandung /106344484Situ Terate Kel Siturate Kec Cikande Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	09/04/2021	00001	SMAN 1 CIKANDE	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.220.478.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9498
984	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/381/381	0005	3.433	2017	-	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00018	SMAN Puloampel	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.727.316.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.433
985	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/382/382	0006	3.849	2017	-	Kab. Serang				SMAN Pulo ampel	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.577.258.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.849
986	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900160/1900163	0004	9.158	2019	Jalan Raya Serang Petir KM 04 Cipocok Jaya Serang- Banten	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2013	19	SMAN 6 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	1.172.224.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.158
987	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900160/1900164	0005	664	2019	Jalan Raya Serang Petir KM 04 Cipocok Jaya Serang- Banten	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2013	20	SMAN 6 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	84.992.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 664
988	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900160/1900165	0006	1.762	2019	Jalan Raya Serang Petir KM 04 Cipocok Jaya Serang- Banten	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2013	21	SMAN 6 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	225.536.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.762
989	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900160/1900166	0007	3.004	2019	Jalan Raya Serang Petir KM 04 Cipocok Jaya Serang- Banten	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2013	22	SMAN 6 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	384.512.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.004
990	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900160/1900167	0008	3.892	2019	Jalan Raya Serang Petir KM 04 Cipocok Jaya Serang- Banten	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2013	23	SMAN 6 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	498.176.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.892
991	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	-	-	20.638		Kelurahan Terith Kecamatan Walantaka Kota Serang	Kota. Serang	Hak Pakai	30/12/2021	00004	SMAN 8 Kota Serang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	10.319.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 20.638
992	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900036/1900036	0001	18.116	1984	Jl. Raya Jakarta KM. 9,5 Kel. Citerop Kec. Ciruas Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	30/09/2013	3	SMAN 1 CIRUAS	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	4.403.800.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 18.116
993	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900028/1900028	0002	10.571	2001	Jl KH Bakrie No 02 RT 01/08 Kel Bojonegara Kec Bojonegara Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00031	SMAN 1 BOJONEGARA	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	200.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.571
994	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900029/1900029	0001	27.000	2004	JlnPerum Taman sejahter, kode pos 42177 Kel jawilan Kec Jawilan Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00006	SMAN 1 JAWILAN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	232.440.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 27.000
995	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900034/1900034	0001	15.000	1986	Jl Anyer Sirih Km 127,600 Kel Cikoenng Kec Anyer Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00032	SMAN 1 ANYAR	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	37.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15.000
996	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900035/1900035	0001	21.395	1993	Jl Pancoran No1 Kel Kramatwatu Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	0012	SMAN 1 KRAMAT WATU	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	216.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 21.395
997	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900042/1900042	0001	15.000	2006	Jl Raya Serang Jakarta Km 13 Perum Cisilat Kel Sentul Kec Kragilan Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00010	SMKN 1 KRAGILAN	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	52.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15.000
998	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900050/1900050	0001	18.825	2010	JlnShekh nawawi tanara KpCikeli Kel cerelukic Kec Tanara Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00008	SMKN 1 TANARA	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/B aik	285.915.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 18.825
999	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900040/1900040	0001	1.845	2011	JlnAnyer-muncak kpkamarang Kel grogol indah Kec Anyer Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	24/02/2022	00032	SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH SMAN ANYER	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	411.510.000	
1000	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.03.07.002/1900020/1900020	0001	15000	2003	Kp. Ciparay kel. Sindang Laya Kec. Cinangka Kab. Serang	Kab. Serang	Hak Pakai	30/12/2022	00006	SMAN 1 CINANGKA	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	2.250.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.339
1001	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900052/1900052	0254	21.740	1982	JL RAYA PANDEGLANG KM.5 RTRW. 01.03 Kp/Komp. Nancang Kel/Desa. Karundang Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang	Hak Pakai	23/12/2022	00012	SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH SMAN 2	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	22.223.163.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.763
1002	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529153/6529153	0000	2.530	2021	Blok Keputaran Kelurahan Dalug Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. Blok Keputaran Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang	Hak Pakai	23/10/2021	19	SMAN 9 Kota Serang	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	1.113.200.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12.407

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat						
1003	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529154/6529154	0000	1.157	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	685.080.000		
1004	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529155/6529155	0000	1.192	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	524.480.000		
1005	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529156/6529156	0000	611	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	268.840.000		
1006	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529157/6529157	0000	1.162	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	511.280.000		
1007	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529158/6529158	0000	587	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	258.280.000		
1008	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529159/6529159	0000	748	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	329.120.000		
1009	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529160/6529160	0000	1.163	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	511.720.000		
1010	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529161/6529161	0000	1.001	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	440.440.000		
1011	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529162/6529162	0000	2.256	2021	Jl. Raya Babakan Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang RTRW. -/- Kp/Komp. - Kel/Desa. Gelam Kec. Cipocok Jaya KOTA SERANG	Kota. Serang				SMAN 9 Kota Serang	Hadiab/Hibah /- /Inventaris /Baik	992.640.000		
1012	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	12.136	2015	Desa/Cisait, Kec. Kragilan, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00010	Smkn 1 Kragilan	Hadiab/Hibah	2.297.806.200	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14. 481 M ²
1013	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	18.825	2010	Desa Cerucuk, Kec. Tanara, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00008	Smkn 1 Tanara	Hadiab/Hibah	285.915.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8. 340 M ²
1014	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	27.000	2004	Desa Jawilan Kec. Jawilan Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00006	Sman 1 Jawilan	Hadiab/Hibah	232.440.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 18.134 M ²
1015	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	1845	2011	Desa Cikoneng, Kec. Anyar , Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00032	Sman 1 Anyar	Hadiab/Hibah	411.510.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14. 876 M ²
1016	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	21395	1993	Desa Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00012	Sman 1 Kramatwatu	Hadiab/Hibah	216.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.423 M ²
1017	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000002	10.571	2001	Desa/Bojonegara, Kec. Bojonegara, Kelurahan Lebak Wangi	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00021	Sman 1 Bojonegara	Hadiab/Hibah	200.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.330 M ²
1018	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.4.01.01.02.001	000001	9.947	1990	Kel Lebak wangi, Kec. Walantaka, Kabupaten Serang	Kab. Serang	Hak Pakai		24/02/2022	00002	Smkn 3 Kota Serang	Hadiab/Hibah	1.128.191.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.947M ²
1019	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900044/	000001	16.546	2010	Kab. Serang, Kec. Tunjung Teja, Desa Tunjung Teja	Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00002	SMKN 1 TUNJUNG TEJA	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	902.318.846	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 18. 114 M ²
1020	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900045/	000002	1.546	2011	Kab. Serang, Kec. Tunjung Teja, Desa Tunjung Teja	Kab. Serang	Hak Pakai		14/09/2022	00003	SMKN 1 TUNJUNG TEJA	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	89.212.000	
1021	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900033/	000001	8.000	1989	Kab. Serang, Kec. Pontang, Desa Pontang	Kab. Serang	Hak Pakai		14/09/2022	00014	SMAN 1 PONTANG	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	35.670.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7. 270 M ²
1022	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900011/	000001	1.817	1999	Kab. Serang, Kec. Pamarayan, Desa Pamarayan	Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN	Hadiab/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	7.268.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1023	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900012/	000002	607	1999		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		2.428.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1024	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900013/	000003	1.298	1999		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		5.192.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1025	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900015/	000005	1.235	1999		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		4.940.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1026	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900017/	000007	4.218	2003		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		105.450.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1027	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900018/	000008	1.103	2001		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		40.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.075 M ²
1028	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900016/1900016	0006	3.400	2002		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		68.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3400
1029	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900017/1900017	0007	4.218	2003		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		105.450.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4218
1030	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900018/1900018	0008	1.103	2001		Kab. Serang	Hak Pakai		13/09/2022	00015	SMAN 1 PAMARAYAN		4.412.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1103
1031	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900040/	000006	1.845	2011	Desa/Kelurahan Grogol Indah Kec. Anyar, Kab Serang	Kab. Serang	PAKAI		01/12/23	00002	SMKN 1 ANYAR	Hadiab/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	411.510.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 219 M ²
1032	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tidak tercatat di Atisbada		1.999		Kelurahan Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI		02/08/23	00047	SKHN 01 KOTA SERANG	Hadiab/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.279 M ²
1033	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tidak tercatat di Atisbada		3.874		Kelurahan Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI		01/08/23	00048	SKHN 01 KOTA SERANG	Hadiab/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.279 M ²
1034	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/6531210/	000005	12.980,00	2021	Kelurahan Dalam Pecung Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI		29/12/23	00003	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.148.195.837	Sertipikat Asli A.n Pengprov Banten Dengan Luas = 2.530 M ²
1035	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/6531211/	000006		2021	Kelurahan Gelam, Pecang Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI		29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	720.075.833	Sertipikat Asli A.n Pengprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
1036	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531212/	000007		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	559.475.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1037	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531213/	000008		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	303.835.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1038	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531214/	000009		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	546.275.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1039	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531215/	000010		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	293.275.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1040	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531216/	000011		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	364.115.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1041	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531217/	000012		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	475.435.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1042	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531218/	000013		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	475.435.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1043	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531219/	000014		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.027.635.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1044	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531220/	000015		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	664.635.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1045	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531221/	000016		2021	Kelurahan Gelam Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00005	SMAN 9 KOTA SERANG	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	594.675.833	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 12.980 M ²
1046	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900064/	000006	1.342	2007	Kelurahan Panancangan,Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	Kota. Serang	PAKAI	29/12/23	00036	SMKN 7 KOTA SERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	419.321.700	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 1.342 M ²
1047	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0003	2.618	2003		Kota. Cilegon	Hak Pakai	05/01/2015	1	SMAN 3 Kota Cilegon	Pembelian	8.050.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.618 M ²
1048	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0004	1.787	2004		Kota. Cilegon	Hak Pakai	05/01/2015	2	SMAN 3 Kota Cilegon	Pembelian	33.080.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.787 M ²
1049	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.003	0001	7.065	2000		Kota. Cilegon	Hak Pakai	05/11/2003	10	SMAN 3 Kota Cilegon	Pembelian	600.840.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.065 M ²
1050	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.004	0002	1.787,00	2002		Kota. Cilegon	Hak Pakai	05/11/2003	10	SMAN 3 Kota Cilegon	Pembelian	28.640.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.065 M ²
1051	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.005	0005	4.203,00	2004		Kota. Cilegon	Hak Pakai	05/11/2003	10	SMAN 3 Kota Cilegon	Pembelian	42.030.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.065 M ²
1052	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	4.500	2002	Jln. Ki Kahal, Link Pringori, Suralaya	Kota. Cilegon	Hak Pakai	08/03/2004	7	SMAN 4 Kota Cilegon	Pembelian	229.542.700,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.500 M ²
1053	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	2.000	2006	Jln. Ki Kahal, Link Pringori, Suralaya	Kota. Cilegon	Hak Pakai	15/01/2020	00013	SMAN 4 Kota Cilegon	Pembelian	400.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.313 M ²
1054	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	1.687	2007	SMAN 5 Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	29/01/2015	4	SMAN 5 Kota Cilegon	Pembelian	166.300.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.687 M ²
1055	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	2.507	2005	SMAN 5 Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	30/01/2015	6	SMAN 5 Kota Cilegon	Hibah	243.800.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.507 M ²
1056	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	4.015	2003	SMKN 2 Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	30/12/2021	0006	SMKN 2 Kota Cilegon	Pembelian	281.050.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.015 M ²
1057	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	1.527	2009	SMKN 2 Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	30/12/2021	0006	SMKN 2 Kota Cilegon	Pembelian	206.671.961,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.527 M ²
1058	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.267	2005	Jln. Cigiech-Tunjung Purth	Kota. Cilegon	Hak Pakai	10/05/2019	00012	SMKN 3 Kota Cilegon	Pembelian	500.000.000,00	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah). Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.267 M ²
1059	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	6.000	2010	Jln. Yos Sudarso Link. Baru II RW 06 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	28/12/2012	10	SMKN 4 Kota Cilegon	Pembelian	441.525.700,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.000 M ²
1060	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.003	0002	6.000,00	2011	Jln. Yos Sudarso Link. Baru II RW 06 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	28/12/2012	10	SMKN 4 Kota Cilegon	Pembelian	476.754.100,00	
1061	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.004	0003	118.200,00	2011	Jln. Yos Sudarso Link. Baru II RW 06 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	28/12/2012	10	SMKN 4 Kota Cilegon	Pembelian	27.765.000,00	
1062	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900077/ 1900077	0003	547	2008	SMKN2 Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	30/12/2021	6	SMKN 2 KOTA CILEGON	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	40.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 547 M ²
1063	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900076/ 1900076	0001	16.702	1996	SMKN 1 Cilegon Jl. Kedung Baya No.21 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	08/02/2022	00012	SMKN 1 KOTA CILEGON	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.500.000.000,00	16.702
1064	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900065/ 1900065	0001	8.422	1980	Jl. KH. Th. Ismail Kav Blok F	Kota. Cilegon	Hak Pakai	03/08/2022	00023	SMAN 1 KOTA CILEGON	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	3.370.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8422 M ²
1065	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900085/ 1900085	0001	6.000	2010	Jl. Yos Sudarso Link. Baru II RW 06 Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak Kota Cilegon	Kota. Cilegon	Hak Pakai	28/05/2019	00010	SMKN 4 KOTA CILEGON	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	441.525.700,00	6.000
1066	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/ 1900065/ 1900065	0001	8422,25	1980	Jl. KH. Th. Ismail Kav Blok F Kec. KOTA CILEGON KOTA CILEGON	Kota. Cilegon	Hak Pakai	03/08/2022	00023	SMAN 1 KOTA CILEGON	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	337000000	
1067	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan			2.398		Kel. Banjar Negara, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon	Kota. Cilegon	PAKAI	21/12/23	00011	SMAN 05 CILEGON BELUM TERCATAT DI KIB	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.398 M ²
1068	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0020	3.585	2003	Jln. Daan Mogot No. 50	Kota. Tangerang	Hak Pakai	23/07/2019	51	SMAN 1 Kota Tangerang	Pembelian	2.868.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.585 M ²
1069	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0022	6.350	2003	Jln. KH Hasyim Ashari	Kota. Tangerang	Hak Pakai	23/07/2019	15	SMAN 3 Kota Tangerang	Hibah	3.175.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.350 M ²
1070	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0031	5.564	2013	Jln. Besi Raya	Kota. Tangerang	Hak Pakai	24/12/2016	40	SMAN 8 Kota Tangerang	Hibah	2.787.564.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.564 M ²
1071	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0023	2.685	2003	Jln. Pada Suka 1 Kel/Ds Pabuaran Tumpang Kec. Karawaci Kab. Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	07/07/2022	00005	SMAN 4 Kota Tangerang	Hibah	343.680.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.685 M ²
1072	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900100/ 1900100	0001	14.685	2003	Kab Tangerang Kec. Tangerang, Desa Sukasari	Kota. Tangerang	Hak Pakai	29/07/2020	9	SMKN 1 Kota Tangerang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	5.639.040.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14.685 M ²
1073	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900089/ 1900089	0021	11920	2003	Jl. Makam Pahlawan Taruna Kelurahan Sukasasi, Kecamatan Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00008	SMAN 2 Kota Tangerang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	7.494.238.795,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11.386 M ²
1074	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/ 1900092/ 1900092	0024	8100	2003	Jl. Cijung Raya No. 3 Perumnas 1 Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00012	SMAN 5 Kota Tangerang	Hadiah/Hibah/ P3D/Inventaris/Baik	2.632.500.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 305 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor Kode Barang	Register	Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Hak	Setatus Tanah Sertifikat	Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
1075	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900108/1900108	0001	4.000,00	2003	Kota Tangerang, Kec. Karawaci, Kelurahan Koang Jaya	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00003	SMKN 7 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	3.388.001.064,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.966 M ²
1076	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900096/1900096	0031	10250	2013	Jl. H. Jali No. 9 Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00002	SMAN 9 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	5.873.250.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11.511 M ²
1077	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900097/1900097	0027	2163	2003	Jl. Raya Cipondoh Kp. Salak Kelurahan Floris Plawad Indah, Kecamatan Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00002	SMAN 10 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	557.656.569,68	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.501 M ²
1078	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900104/1900104	0005	9044	2003	Jl. Moch. Yamin, SH Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00022	SMKN 3 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	2.719.211.064,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.397 M ²
1079	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900106/1900106	0018	3500	2013	Jl. Tiripaja No. 1 Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00002	SMKN 5 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	1.879.500.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.337 M ²
1080	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900101/1900101	0002	49.291	2003	Jln. Veteran No. 2 Kel. Sukasari Kec. Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00076	SMKN 2 Kota Tangerang	SMKN 2 KOTA TANGERANG	9.570.557.837,57	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 46.416 M ²
1081	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900105/1900105	0006	39.980	2003	Jl. Veteran no.1 A Kel. Babakan Kec. Tangerang	Kota. Tangerang	Hak Pakai	02/10/2020	00023	SMKN 4 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	8.418.458.330,29	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 39.142 M ²
1082	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900107/1900107	0008	9.000	2003	SMKN Neglasari	Kota. Tangerang	Hak Pakai	03/11/2021	00039	SMKN 6 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	4.176.030.257,74	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.416
1083	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529127/6529127	0000	1.098	2021	Jl. Kp. Gunung Ds. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang RT/RW. -/- Kp/Komp. Jl. Kp. Gunung Ds. Cipondoh Kel/Desa. Cipondoh Kec. Cipondoh KOTA TANGERANG	Kota. Tangerang	Hak Pakai	16/10/2021	6	SMAN 16 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	4.942.309.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3881
1084	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529128/6529128	0000	2.783	2021	Jl. Kp. Gunung Ds. Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang RT/RW. -/- Kp/Komp. Jl. Kp. Gunung Ds. Cipondoh Kel/Desa. Cipondoh Kec. Cipondoh KOTA TANGERANG	Kota. Tangerang				SMAN 16 Kota Tangerang	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	12.530.395.000	
1085	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900091/1900091	0023	2685	2003	Jln. Pada Suka 1 Kel/Ds Pabuaran Tumpeng Kec. Karawaci Kab. Tangerang RT/RW. 002010 Kp/Komp. Pabuaran Tumpeng Kel/Desa. Pabuaran Tumpeng Kec. Karawaci KOTA TANGERANG	Kota. Tangerang	Hak Pakai	07/07/2022	00005	SMAN 4 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab /P3D /Inventaris /Baik	343680000	
1086	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531186/6531186	000004	1.098	2021	Desa/Kelurahan Cipondoh Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	Kota. Tangerang	PAKAI	26/05/23	15	SMAN 16 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab /P3D /Inventaris /Baik	5.028.488.750	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.098 M ²
1087	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531187/6531187	000005	2.783	2021	Desa/Kelurahan Cipondoh Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	Kota. Tangerang	PAKAI	26/05/23	16	SMAN 16 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab /P3D /Inventaris /Baik	5.028.488.750	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.783 M ²
1088	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531186/	"000004	1.098	2021	Kelurahan Cipondoh Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	Kota. Tangerang	PAKAI	26/05/23	"16	SMAN 16 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab /P3D /Inventaris /Baik	5.028.488.750	Sertipikat Asli A.n. Pemprov Banten Dengan Luas = 2.783 M ²
1089	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531187/	"000005	2.783	2021	Kelurahan Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	Kota. Tangerang	PAKAI	26/05/23	"15	SMAN1 16 KOTA TANGERANG	Hadiab/Hibab /P3D /Inventaris /Baik	12.616.574.750	Sertipikat Asli A.n. Pemprov Banten Dengan Luas = 1.098 M ²
1090	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	3.791	2013	SMKN 4, Kel. Jombang Kec. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	15/01/2020	00009	SMKN 4 Tangerang Selatan	APBD	7.631.283.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 3.791 M ²
1091	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002	0002	771	2014	SMKN 4, Kel. Jombang Kec. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	15/01/2020	00010	SMKN 4 Tangerang Selatan	APBD	1.468.053.492,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 820 M ²
1092	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.04.01.002/1900111/1900111	0001	915	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Ciputat Kel. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	03/08/2020	18	SMAN 1 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	686.250.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.914 M ²
1093	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900112/1900112	0002	3124	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Ciputat Kel. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	03/08/2020	18	SMAN 1 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	865.190.366,00	
1094	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.002/1900113/1900113	0003	600	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Ciputat Kel. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	03/08/2020	18	SMAN 1 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	166.160.724,00	
1095	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.02.004/1900114/1900114	0004	636	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Ciputat Kel. Ciputat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	03/08/2020	18	SMAN 1 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	176.139.909,00	
1096	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.001/1900115/1900115	0001	1150	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Pamulang Kel. Benda Baru	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	13/08/2020	5	SMAN 3 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	575.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.864 M ²
1097	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900116/1900116	0001	5000	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Pamulang Kel. Benda Baru	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	13/08/2020	5	SMAN 3 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	2.000.000.000,00	
1098	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900140/1900140	0001	7000	2014	Kp. Sarimulya RT. 002-001 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	18/08/2020	16	SMKN 3 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	1.701.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.337 M ²
1099	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.01.01.001/1900130/1900130	0001	8.000	2010	Villa Melati Mas Blok J Kel. Pondok Jagung Serpong Utara	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	08/09/2020	8	SMAN 7 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	1.280.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.518 M ²
1100	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900131/1900131	0001	7.180	2010	Jln. Cileureud Raya No 5 Ciputat 15419	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	13/08/2020	23	SMAN 8 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	10.770.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.773 M ²
1101	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900129/1900129	0001	10.000	2010	Kota Tangerang Selatan, Kec. Pamulang Kel. Pamulang Barat	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	13/08/2020	2	SMAN 6 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	5.000.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.023 M ²
1102	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900137/1900137	0001	6.710	2011	Kota Tangerang Selatan, Kec. Serpong Kel. Cilenggang	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	13/08/2020	24	SMAN 12 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	4.249.757.100,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.908 M ²
1103	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/383/383	0007	2.997.000	2017	Kel. Rengas Kec. Ciputat - Tangerang	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	23/11/2020	00007	SMKN 7 Tangerang Selatan	Pembelian APBD /Inventaris /Baik	17.996.033.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.969 M ²
1104	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900138/1900138	0001	4497	2014	Jl. Wars Kelurahan Clater, Kecamatan Serpong	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	02/10/2020	00012	SMKN 1 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	2.761.158.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.498 M ²
1105	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900139/1900139	0001	14.614,00	2014	Pondok Aren Rt. 02/04, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	24/12/2008 Ganti Nama tgl 18/11/2020	00047	SMKN 2 Tangerang Selatan	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	7.847.718.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14.614 M ²
1106	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900117/1900117	0001	30,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	30/06/2021	00022	SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	9.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11620
1107	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900118/1900118	0002	3.693,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	1.107.810.000,00	
1108	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.014/1900119/1900119	0001	368,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	110.250.000,00	
1109	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.05.007/1900120/1900120	0001	3.438,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	1.031.280.000,00	
1110	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.08.001/1900121/1900121	0001	871,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	261.360.000,00	
1111	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.002/1900122/1900122	0001	538,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	161.280.000,00	
1112	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.003/1900123/1900123	0001	181,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	54.180.000,00	
1113	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.005/1900124/1900124	0001	1.925,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	577.500.000,00	
1114	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.01.006/1900125/1900125	0001	284,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	85.050.000,00	
1115	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.02.002/1900126/1900126	0001	532,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	159.540.000,00	
1116	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.13.13.001/1900127/1900127	0001	143,00	2010	Jl. Wr. Supratman Komp. Pertamina Pondok Ranji Ciputat Timur	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 4 TANGERANG SELATAN	Hadiab/Hibab/ P3D/Inventaris/B aik	42.750.000,00	

No	OPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
1117	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900133	0001	7.200,00	2010	Jl. Raya Tegul Rotan Bintaro Sektor 9 Ciputat 15413	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	02/07/2021	00009	SMA NEGERI 10 TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	3.640.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5/756
1118	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900134	0001	5.154,00	2010	Jl. Sumatra 1 Desa Jombang Rawa lele RT 002/006	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	02/07/2021	00022	SMA NEGERI 11 TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	1.468.890.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9129
1119	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900135/1900135	0002	2.953,00	2011	SMAN 11	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 11 TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	1.698.974.100,00	
1120	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900136/1900136	0003	1,00	2012	SMAN 11	Kota. Tangerang Selatan				SMA NEGERI 11 TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	333.170.000,00	
1121	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900143/1900143	0001	5.665,00	2014	SMKN 5	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	30/06/2021	00012	SMK NEGERI 5 TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	12.948.203.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5385
1122	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529096/6529096	0000	1.000	2021	Jl. Raya Pondok Kacang Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	19/12/2022	0008	SKh Negeri Kota Tangerang Selatan	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	5.000.000.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.596
1123	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529096/6529096	0000			Jl. Raya Pondok Kacang Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan				SKh Negeri Kota Tangerang Selatan	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik		
1124	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529097/6529097	0000	1.689	2021	Jl. Raya Pondok Kacang Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan				SKh Negeri Kota Tangerang Selatan	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	8.591.613.500	
1125		Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529098/6529098	0000	2.907	2021	Jl. Raya Pondok Kacang Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Kota. Tangerang Selatan				SKh Negeri Kota Tangerang Selatan	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	14.681.613.500	
1126	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	5385	2014	Kel Pondok Aren, Kec. Pondok Aren , Kota Tangel	Kota. Tangerang Selatan	Hak Pakai	02/07/2021	00053	SMAN 5 Kota Tangsel	Hadiah/Hibah	12.948.203.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5000 M ²
1127	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.930	2006	Jln. Cirarab Sukadiri	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2019	00004	SMAN 21 Kabupaten Tangerang	Pembelian	523.380.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.740 M ²
1128	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.134	2008	Kec. Sepatan Timur	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2019	00002	SMAN 25 Kabupaten Tangerang	Pembelian	1.057.420.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.579 M ²
1129	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	15.875	2007	Kp. Pinang Tigaraksa Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2019	00019	SMKN 4 Kabupaten Tangerang	Pembelian	702.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 15.075 M ²
1130	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.545	2004	Jln. Sada Rancabuaya - Jambe Kecamatan Jambe	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2021	00001	SMKN 8 Kabupaten Tangerang	Pembelian	1.279.152.000,00	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah), Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.005 M ²
1131	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	5.143	2013	Kec. Jeyanti	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2019	00001	SMKN 11 Kabupaten Tangerang	Pembelian	550.301.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.100 M ²
1132	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	7.315	2012	Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2019	00001	SMKN 10 Kabupaten Tangerang	Pembelian	327.250.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.315 M ²
1133	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	4.680	2013	Kel. Babakan Kec. Legok	Kab. Tangerang	Hak Pakai	15/01/2020	00011	SMKN 12 Kabupaten Tangerang	Pembelian	1.998.360.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.600 M ²
1134	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.003	0002	4.186,00	2015	Kel. Babakan Kec. Legok	Kab. Tangerang	Hak Pakai	15/01/2020	00011	SMKN 12 Kabupaten Tangerang	Pembelian	3.558.100.000,00	
1135	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	8.000	1986	Desa Cikupa RT.01/04	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/01/2020	00002	Gedung SMAN 4	Pembelian	40.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.000 M ²
1136	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	13.488	1981	Jln. Pendidikan No. 5 Mauk Timur	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/01/2020	00012	SMAN 2 Kabupaten Tangerang	Hibah	541.886.050,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 13.080 M ²
1137	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	11.927	1993	Jln. Aria Jaya Sentika	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/01/2020	00005	SMAN 6 Kabupaten Tangerang	Hibah	322.029.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.417 M ²
1138	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002	0001	9.979	1997	Jln. Raya Kresek Patrasana	Kota. Tangerang	Hak Pakai	28/02/2020	00002	BANGUNAN SMAN 7 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	109.420.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.937 M ²
1139	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900153/1900153	0001	7.860,00	1996	Desa Cisoeka, Kec.Cisoeka, Kab. Tangerang,	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020	00007	SMAN 8 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	58.950.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12.024 M ²
1140	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900154/1900154	0002	720,00	2002		Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020				21.600.000,00	
1141	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900155/1900155	0003	80,00	2002		Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020				2.400.000,00	
1142	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900156/1900156	0004	735,00	2006		Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020				36.750.000,00	
1143	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900157/1900157	0005	3.096,00	2014		Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020				881.400.000,00	
1144	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.13.07.009/1900158/1900158	0001	240,00	2004		Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/08/2020				19.992.000,00	
1145		Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900167/1900167	0001	7.709,00	2005	Desa Jayanti , Kecamatan Jayanti, Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	01/10/2020	000004	SMAN 16 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	800.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.220 M ²
1146	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900167/1900147	0001	12.775	1985	Kab. Tangerang Kec. Curug, Desa Kadu Jaya	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00003	SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	19.162.500,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14.782 M ²
1147	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900177/1900177	0001	7.967	2009	Kab. Tangerang Kec. Soetar, Desa Cireunde	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00002	SMAN 27 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	517.855.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.838 M ²
1148	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900195/1900195	0001	14.800	2015	PR. ARGO SUBUR SOLEAR Re. Pasanggrihan Kec. Soetar	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00002	SMKN 9 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	5.831.200.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 14.782 M ²
1149	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900149/1900149	0001	5.789	1990	Jln. Raya Salenbaran No. 29 Kel. Salenbaran Kec. Koumbi Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00006	SMAN 5 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	28.900.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5.780 M ²
1150	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900162/1900162	0001	10.000	2003	Kab. Tangerang Kec. Teluk Naga, Desa Kampung Besar	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00001	SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	750.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9.023 M ²
1151	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900165/1900165	0001	9.000	2004	Kab. Tangerang Kec. Rajeg, Desa Sukatani	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00003	SMAN 14 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	360.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9000 M ²
1152	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900171/1900171	0002	6.795	2006	Jln. Raya Kramet Pakuhji Desa Baran Bambu Kec. Pakahaji	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00001	SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	871.884.180,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.479 M ²
1153	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900163/1900163	0001	3.550	2003	Kab. Tangerang Kec. Sindang Jaya, Desa Sindang Panoon	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00002	SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	300.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.536 M ²
1154	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900164/1900164	0002	4.500	2004		Kab. Tangerang						500.000.000,00	
1155	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900180/1900180	0001	19.689	1995	Kab. Tangerang Kec, Panongan, Desa Pesar	Kab. Tangerang	Hak Pakai	26/12/2019	00001	SMKN 1 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	984.450.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 21.080 M ²
1156	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900181/1900181	0001	30.000	1983	Kab. Tangerang Kec, Sepatan, Desa Pisangan Jaya	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00001	SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	1.080.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 26.497 M ²
1157	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900144/1900144	0001	6.000,00	1965	Jalan Raya Serang Km. 23.5 Balaraja Desa Telaga Sari Kec. Balaraja	Kab. Tangerang	Hak Pakai			SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	5.496.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8372
1158	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900145/1900145	0002	4.540,00	2014	Jalan Raya Serang Km. 23.5 Balaraja Desa Telaga Sari Kec. Balaraja	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2021	00024	SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	6.860.360.000,00	
1159	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900159/1900159	0001	13.894,00	2002	Jl.Pasar Baru No.1 Krojo	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/07/2021	00008	SMAN 9 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	644.700.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 12979
1160	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900161/1900161	0002	8.960,00	2013	JL. KH. HASYIM ASHARI KM. 01 SEPATAN TANGERANG 15520 Telp./FAX : (021) 59371931	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/07/2021	00024	SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	931.450.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9236
1161	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Lathian (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900168/1900168	0001	10.000,00	2007	PERUM LEGOK INDAH	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/11/2021	00013	SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah/P3D/Inventaris/B aik	3.500.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6762

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
1162	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900173/1900173	0001	5.255,00	2000	PERUMAHAN BUMI PUSPIPETEK ASRI SEKTOR I KEC PAGEDANGAN TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	03/11/2021	00008	SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	315.300.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 5255
1163	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900176/1900176	0001	9.800,00	2006	Desa Kemiri Kec. Kemiri	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2021	00004	SMAN 26 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	642.763.180,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9498
1164	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900178/1900178	0001	10.158,00	2012	Kp. Cisak Erpak kel. Cisak	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/09/2021	00002	SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	1.045.965.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 11001
1165	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900189/1900189	0001	9.200,00	2008	Jl. Ir. Sutarni Km.1,2 Kecamatan Maak Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/07/2021	00001	SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	368.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 16540
1166	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900190/1900190	0002	6.750,00	2011	Jl. Ir. Sutarni Km.1,2 Kecamatan Maak Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai			SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	405.000.000,00	
1167	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900191/1900191	0001	9.700,00	2008	Desa Pegedangan	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/07/2021	00007	SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	351.456.900,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 9630
1168	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900166/1900166	0001	4.838,00	2005	JL.RAYA KORELET NO 1.RANCAKALAPA	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00001	SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	309.632.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2499
1169	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900174/1900174	0001	1.500,00	2012	KP. KELAPADUA RT. 005/01 KELURAHAN KELAPADUA KEC. KELAPADUA	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2020	00007	SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	591.000.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1344
1170	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.002/1900179/1900179	0001	4.663		Desa Keduang Kec. Gunungkaler Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/04/2022	00036	SMAN 29 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	642.763.180,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 4.663
1171	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529046/6529046	0000	16.314	2021	Jl.Rancabuntu RTRW 005/01 Desa Cukanggalih Kec. Curug Kab. Tangerang RTRW. 005/01 Kp/Komp. Jl. Rancabuntu Kel/Desa. Cukanggalih Kec. Curug KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/12/2022		SMKN Kab.Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	20.481.226.368	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 16.314
1172	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529126/6529126	0000	8.249	2021	Jl. AMD Pasir jaya Kel. Pasir jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang RTRW. -/- Kp/Komp. Jl. AMD Pasir jaya Kel. Pasir jaya Kel/Desa. Pasir Jaya Kec. Cikupa KAB.TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/12/2022	000010	SMAN 31 Kab.Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	17.596.392.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 8.249
1173	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529042/6529042	0000	2.246,00	2021	Kp. Blok Limo Rt. 003/1010 Ds. Curug Wetan Kec. Curug Kab. Tangerang RTRW. 003/1010 Kp/Komp. Kp. Blok Limo Rt. 003/1010 Ds. Curug Wetan Kel/Desa. Curug Wetan Kec. Curug KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022	00001	SMAN 32 Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.509.924.375,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.683
1174	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529043/6529043	0000	1.148,00	2021	Kp. Blok Limo Rt. 003/1010 Ds. Curug Wetan Kec. Curug Kab. Tangerang RTRW. 003/1010 Kp/Komp. Kp. Blok Limo Kel/Desa. Curug Wetan Kec. Curug KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	22/12/2022	00002	SMAN 32 Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	1.821.200.375,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.148
1175	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529044/6529044	0000	2.043,00	2021	Kp. Blok Limo Rt. 003/1010 Ds. Curug Wetan Kec. Curug Kab. Tangerang RTRW. 003/1010 Kp/Komp. Kp. Blok Limo Kel/Desa. Curug Wetan Kec. Curug KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/12/2022	00003	SMAN 32 Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.197.710.375,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 2.043
1176	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529045/6529045	0000	2.246,00	2021	Kp. Blok Limo rt. 003/1010 Ds. Curug Wetan Kec. Curug Kab. Tangerang RTRW. 003/1010 Kp/Komp. Kp. Blok Limo Ds. Curug Wetan Kel/Desa. Curug Wetan Kec. Curug KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	24/12/2022	00004	SMAN 32 Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.509.924.375,00	
1177	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529091/6529091	0000	1.485,00	2021	Kp. Mindi RT. 004 RW. 03 Desa Badi Mulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang RTRW. 004/03 Kp/Komp. Kp. Mindi Kel/Desa. Badi Mulya Kec. Cikupa KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022	00006	SMKN Kec. Cikupa Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	2.267.185.000,00	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.000
1178	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529092/6529092	0000	445	2021	Kp. Mindi RT. 004 RW. 03 Desa Badi Mulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang RTRW. 004/03 Kp/Komp. Kp. Mindi Kel/Desa. Badi Mulya Kec. Cikupa KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022	00007	SMKN Kec. Cikupa Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	667.436.500,00	
1179	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529093/6529093	0000	2.475,00	2021	Kp. Mindi RT. 004 RW. 03 Desa Badi Mulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang RTRW. 004/03 Kp/Komp. Kp. Mindi Kel/Desa. Badi Mulya Kec. Cikupa KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022	00008	SMKN Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	3.758.125.000,00	
1180	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/6529094/6529094	0000	1.595,00	2021	Kp. Mindi RT. 004 RW 03, Desa Badi Mulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang RTRW. 004/03 Kp/Komp. Kp. Mindi Kel/Desa. Badi Mulya Kec. Cikupa KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	21/12/2022	00009	SMKN Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	Distribusi Pembelian BM /APBD /Inventaris /Baik	2.312.741.500,00	
1181	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900202/1900202	0001	4.680	2013	JL. BOJONG DS. BABAKAN - LEGOK KAB. TANGERANG RTRW. 001/001 Kp/Komp. Babakan Kel/Desa. Babakan Kec. Legok KAB. TANGERANG	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/12/2022		SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH	Hadiab/Hibah/P3D /Inventaris /Baik	1.998.360.000	
1182	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000005	190	2005	Desa Pasir Nangka. Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	26/10/2021	00006	Sman 6 Kab. Tangerang	Hadiab/Hibah	12.000.000 M ²	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 190 M ²
1183	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002	000001	7315	2012	Desa Tidar Raya, Kec. Jambé, Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	24/02/2022	00003	Sman 10 Kab. Tangerang	Hadiab/Hibah	327.250.000 M ²	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 709 M ²
1184	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900150/1900150	000001	11.927	1993	Desa/Kelurahan Pasir Nangka, Kec. Tiga Raksa, Kab.Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	13/09/2020	00007	SMAN 6 KAB. TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	322.029.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 10.882 M ²
1185	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900169/1900169	000002	7.000	2005	Desa/Kelurahan Matagara, Kec. Tiga Raksa, Kab.Tangerang	Kab. Tangerang	Hak Pakai	23/11/2022	00001	SMAN 18 KAB. TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D/Inventaris/Baik	867.941.800	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 6.926 M ²
1186	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900184/1900184	00010	1.359	2012	Desa/Kelurahan Gunung Kaler Kec. Gunung Kaler, Kab.Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/07/23	00010	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D /Inventaris /Baik	122.310.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.326 M ²
1187	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900183/1900183	000002	1.374	2012	Desa/Kelurahan Gunung Kaler Kec. Gunung Kaler, Kab.Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/07/23	00005	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiab/Hibah/P3D /Inventaris /Baik	123.660.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.392 M ²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat					
1188	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.01.04.002/1900185/1900185	00011	1.289	2012	Desa/Kelurahan Gunung Kaler Kec. Gunung Kaler, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/07/23	00011	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	116.010.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 1.279 M²
1189	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/23586923/23586923	000001	7.268	2022	Desa/Kelurahan Kalliasin Kec. Sukamulya, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	29/09/23	00001	SMAN 30 KAB. TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	15.970.310.000	Sertifikat Asli A.n. Provinsi Banten dengan Luas = 7.268 M²
1190	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/23586923/23586923	000001	7.268	2022	Desa Kalliasin Kec. Sukamulya Kab. Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	29/09/23	00001	SMAN 30 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik		Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.268 M²
1191	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.02.02.001/23836509/	000000	6.828	2021	Desa Mauk Barat, Kec. Mauk, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/09/23	00003	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	614.520.000,00	Sertifikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.023M²
1192	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.02.02.001/23836510/			2017	Kab. Tangerang					SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
1193	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.02.02.001/23836511/			2015	Kab. Tangerang					SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik		
1194	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan	1.3.1.01.02.02.001/23836509/	000000	16.540	2021	Desa Mauk Barat, Kec. Mauk, Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	21/09/23	00003	SMKN 5 KAB.TANGERANG	Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik	773.000.000,00	Sertifikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.023M² (
1195	DINDIK		1.3.1.01.02.02.001/23836510/			2017	Kab. Tangerang					Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik			
1196	DINDIK		1.3.1.01.02.02.001/23836511/			2015	Kab. Tangerang					Hadiah/Hibah /- /Inventaris /Baik			
1197	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900181/	0001	30.000	1983	Kel. Pisangan Jaya, Kec. Sepatan Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	26/08/2024	NIB. 28.04.000 006320.0	SMKN 2 KAB. TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.080.000.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 40.148 M²
1198	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900182/	0001	2.806	2012	Kel. Gunung Kaler, Kec. Gunung Kaler Kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	26/08/2024	NIB. 28.04.000 006316.0	SMKN 3 KAB. TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.719.211.064	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.806 M²
1199	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900196/	0001	7.315	2012	Kel. Cipondoh, Kec Cipondoh Kota Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	15/07/2024	NIB. 28.05.000 002146.0	SMKN 10 KAB. TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	327.250.000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.797 M²
1200	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/103/	000004	38.761	2003	Desa Karet, Kec. Sepatan kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/05/24	00013	SMKN 2 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	7.752.200.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.990 M²
1201	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/103/	000004	38.761	2003	Desa Karet, Kec. Sepatan kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/05/24	00012	SMKN 2 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	7.752.200.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.330 M²
1202	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/103/	000004	38.761	2003	Desa Karet, Kec. Sepatan kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/05/24	00014	SMKN 2 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	7.752.200.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.243 M²
1203	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/103/	000004	38.761	2003	Desa Karet, Kec. Sepatan kab Tangerang	Kab. Tangerang	PAKAI	17/05/24	00011	SMKN 2 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	7.752.200.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 19.120 M²
1204	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/23587004/	0002	952	2022	Kel. Pondok Bahar , Kec Karang Tengah Kab Tangerang	Kota Tangerang	PAKAI	15/07/2024	NIB. 28.05.000 002149.0	SMKN 11 KOTA TANGERANG	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	5.628.019.617	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.278 M²
1205	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531209/	000008	4.037	2021	Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangsel	Kota Tangerang Selatan	PAKAI	07/07/23	00008	SMKN 8 KOTA TANGSEL	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	16.457.610.490,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.037M²
1206	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/23586214/	000	3.170	2022	Kel. Jalupang , Kec Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	PAKAI	03/07/2024	NIB. 28.07.000 001557.0	SMKN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	30.277.389,000	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.000 M²
1207	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6530965/	000002	2.234,00	2021	Desa Sidamukti , Kec. Baros Kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	28/09/24	NIB. 28.01.000 00563.0	SMKN 1 BAROS	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	828.325.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 9.397 M²
1208	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	11.3.1.01.01.04.002/6531222/	000001	3.639,00	2021	Desa Tirem , Kec.Lebakwangi kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	28/09/24	NIB.28.01.00000656 4.0	SMAN 1 LEBAKWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.504.998.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.018M²
1209	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531223/	000002	6.582,00	2021	Desa Pamangking , Kec. Kramatwatu kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	28/09/24	NIB.28.01.00000640 4.0	SMAN 1 LEBAKWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	2.682.198.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.018M²
1210	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531224/	000003	1.103,00	2021	Desa Pamangking , Kec. Kramatwatu kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	28/09/24	NIB.28.01.00000640 4.0	SMAN 1 LEBAKWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	490.598.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.018M²
1211	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531225/	000004	4.762,00	2021	Desa Pamangking , Kec. Kramatwatu kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	30/09/24	NIB.28.01.00000640 4.0	SMAN 1 LEBAKWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	1.954.198.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.018²
1212	DINDIK	Tanah Untuk Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531226/	000005	1.932,00	2021	Desa Pamangking , Kec. Kramatwatu kab. Serang	Kab. Serang	PAKAI	30/09/24	NIB.28.01.00000640 4.0	SMAN 1 LEBAKWANGI	Hadiah/Hibah /P3D /Inventaris /Baik	822.198.500,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 18.018²
1213	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.01.001/1900110/	000001	6.803,00	2010	Kel. Gebang Raya, Kec. Perikut Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKAI	31/10/24	NIB. 28.05.000 00.8680.0	SMKN 9 KOTA TANGERANG	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	6.330.283.537,64	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.014 M²
1214	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tidak Tercatat di Atisibada		5.233,00		Kel. Jatake Kec. Jatiuwung Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKAI	19/11/24	NIB. 28.05.000 011755.0	SMAN 11 KOTA TANGERANG	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	17.661.375.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.990 M²
1215	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Tidak Tercatat di Atisibada		4.324,00		Kel. Sudimara Kec. Cileduk Kota Tangerang	Kota Tangerang	PAKAI	31/10/24	NIB. 28.05.000 008685.0	SMAN 13 KOTA TANGERANG	HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS /Hibah /Inventaris /Baik	16.323.100.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 3.528 M²
1216	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/6531151/	000003	11.630	2021	Desa Pasir Eurih Kec. Cisaat Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	PAKAI	24/12/24	NIB. 28.02.000 021076.0	SMKN 18 PANDEGLANG	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) /APBD /Inventaris /Baik	2.797.509.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 11.630M²
1217	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/379/	000003	24.594,00	2016	Desa Cipayung , Kec. Padarincang Kab. Serang	Desa Cipayung . Kec. Padarincang Kab. Serang	PAKAI	10/12/24	NIB. 28.01.000 023463.0	SMKN 1 PADARINCANG	PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD /APBD /Inventaris /Baik	5.977.975.000,00	Sertipikat Asli A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 24.209 M²

No	OPD	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M²)	Tahun Pengadaa	Letak/ Alamat	Wilayah Kab/Kota	Setatus Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Hak	Sertifikat				
1218	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531063/ 6531063	0001	3.183,00	2021	Desa Sinar Galih, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	Desa Sinar Galih, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang	PAKAI	17/02/24	NIB. 28.02.000 021318.0	SMKN 16 PANDEGLANG (2 Bidang)	958.580.132,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.160 M²
1219	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531063/ 6531063	0001	1.977,00									
1220	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	11.3.1.01.01.04.002/ 1900276/	0001	2.025,00	1991	Desa Haur Gajug Kec. Cipanas, Kab. Lebak	Desa Haur Gajug Kec. Cipanas, Kab. Lebak	PAKAI	25/03/25	NIB. 28.03.000 016106.0	SMAN 1 CIPANAS	146.718.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 4.605 M²
1221	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900301	000001	320,00	1967	Kelurahan Muara Ciujung Barat Kec. Rangkas Bitung, Kab. Lebak	Kelurahan Muara Ciujung Barat Kec. Rangkas Bitung, Kab. Lebak	PAKAI	21/04/25	NIB. 28.03.000 019901.0	SMAN 3 RANGKASBITUNG NO URUT SERTIPIKAT A8728679 (2 BIDANG)	8,000,00000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 2.545 M²
1222	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900302		1.905,00								381,000,00000	
1223	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900303/ 1900303	0001	2.026,00	2010	Desa Pasir Kupa, Kec. Kalang Anyar, Kab. Lebak	Desa Pasir Kupa, Kec. Kalang Anyar, Kab. Lebak	Pakai	28/05/2025	NIB.28.03 .00002110 5.0	SMAN 1 KALANG ANYAR NO URUT SERTIPIKAT A 8729837	47.611.000,00	1.937
1224	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900043/ 1900043	000001	22.844,00	2007	Desa Margasari, Kec. Pulo Ampel Kab. Serang	Desa Margasari, Kec. Pulo Ampel Kab. Serang	PAKAI	18/06/25	NIB. 28.01.000 023365.0	SMKN 1 PULO AMPEL NO URUT SERTIPIKAT A 7202067	5.169.900.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 20.184 M²
1225	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900001/ 1900001	000001	9.878,00	2008	Desa Sukalaba, Kec. Gunung sari Kab. Serang	Desa Sukalaba, Kec. Gunung sari Kab. Serang	PAKAI	07/08/25	NIB. 28.01.000 037660.0	SMAN 1 GUNUNG SARI	592.680.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5.332 M²
1226	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.03.01.005/ 1900227/ 1900227	000001	8.400,00	1998	Kel Teluk Lada, Kec. Sobang Kab. Pandeglang	Kel Teluk Lada, Kec. Sobang Kab. Pandeglang	PAKAI	29/09/25	NIB. 28.02.000 021349.0	SMAN 9 KABUPATEN PANDEGLANG NO URUT SERTIPIKAT A 7198432	33.600.000,000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.497 M²
1227	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 6531157/ 6531157	000002	381,00	2020	Desa Pasir Eurih, Kec. Cisata Kab. Pandeglang	Desa Pasir Eurih, Kec. Cisata Kab. Pandeglang	PAKAI	22/09/25	NIB. 28.02.000 028308.0	SMAN 10 KABUPATEN PANDEGLANG NO URUT SERTIPIKAT A 71984301	30.000.000,000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas =388 M²
1228	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 24274003/ 24274003	000001	10.000,00	2005	Kel Curug, Kec. Curug Kota, Serang	Kel Curug, Kec. Curug Kota, Serang	PAKAI	15/08/25	NIB. 28.08.000 019371.0	SKHN 02 KOTA SERANG NO URUT SERTIPIKAT B 0449390	350.000.000,000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.731 M²
1229	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900063/ 1900063	0005	5.508,00	2026	Kel Panancangan , Kec. Cipocok Jaya Kota, Serang	Kel Panancangan , Kec. Cipocok Jaya Kota, Serang	PAKAI	15/08/25	NIB. 28.08.000 019372.0	SMKN 7 KOTA SERANG NO URUT SERTIPIKAT B 0449389	495.720.000,000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas =7.438M²
1230	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/1900064 /1900064	0006	3.954,00	2027	Kel Tinggar , Kec. Curug. Kota Serang	Kel Tinggar , Kec. Curug. Kota Serang	PAKAI	14/08/25	NIB. 28.08.000 019243.0	SMKN 4 KOTA SERANG NO URUT SERTIPIKAT B 0449900	419.321.700,000	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas =53.190 M²
1231	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 24274001/	0001	5.066,00	2010	Kel.Cibeber Kota Cilegon	Kel.Cibeber Kota Cilegon	PAKAI	14/11/25	NIB. 28.06.000 013465.0	SKHN 01 KOTA CILEGON NO URUT SERTIPIKAT A 8747586	802.812.155,44	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 5066 M²
1232	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 24107335/	0001	8.414,00	1998	Kel.Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang	Kel.Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang	PAKAI	14/11/25	NIB. 28.06.000 013465.0	SKHN 01 KAB. TANGERANG NO URUT SERTIPIKAT B 0478438	370.676.126,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 8.414M²
1233	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900001/	0001	9.878,00	2008	Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sari Kab. Serang	Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sari Kab. Serang	PAKAI	12/12/25	NIB. 28.03.000 032571.0	SMAN 1 GUNUNG SARI NO URUT SERTIPIKAT B 0504733	592.680.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas =4.207M²
1234	DINDIK	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002/ 1900277/	0001	7.670,00	2005	Desa Lebak Aish, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak	Desa Lebak Aish, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak	Pakai	26/11/2025	NIB.28.03 .00003257 1.0	SMAN 1 CURUG BITUNG NO URUT SERTIPIKAT B 052 4807	191.750.000,00	Sertipikat Asli .A.n Pemprov Banten Dengan Luas = 7.077 M²
					25.663.095,31								7.144.526.941.363,65	

**PROGRES TINDAK LANJUT TANAH YANG BERMASALAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
YANG DI KERJASAMAKAN DENGAN ASDATUN KAJATI BANTEN TAHUN 2025**

No	LOKASI LAHAN	Luas (M ²)	Pengguna Barang	Permasalahan	Penyelesaian
1	Jalan Siliwangi Pasir Ona RT/RW 02/02 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	83.405	Dinas Sosial Provinsi Banten	1. Pada Tahun 2002 Pemprov. Jawa Barat menyerahkan Aset tanah kepada Pemprov. Banten dan tercatat pada Dinas Sosial Provinsi Banten UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dengan Kode Barang 01.01.11.04.001 Register: 0001 Tahun perolehan 1983 Luas 83.405 M² dengan Nilai perolehan sebesar Rp 3.536.350.000,00.- dengan Sertipikat Hak Pakai No. 07 Tahun 1992 seluas 83.405 M² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada Tahun 2012 dibalik nama menjadi Pemerintah Provinsi Banten. 2. Diatas tanah lahan kosong tersebut diketahui terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Ahmad Dimyati,SH nomor 02827 seluas 5.050 m² yang dibeli dari Saudara Endang Sumintardja yang berasal dari tanah garapan Tanah Negara (TN) Eks Perkebunan Pasir Ona dan SHM atas nama Endang Sumintaharja nomor 1758 seluas 839 m² 3. Pada tanggal 08 Juni 2021 telah terjadi kegiatan pembuatan jalan secara sepihak oleh Saudara Ahmad Dimyati di atas tanah tersebut tanpa seijin Pemerintah Provinsi Banten. 4. Sudah berperkara di PN Rangkasbitung dan sudah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Rkb ;	1. SKK Nomor : 250/2025; 2. Surat dari Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : B-22/M.6.6/Gp.1/01/2026, tanggal 29 Januari 2026 tentang Undangan Rapat Tindaklanjut terkait penyelesaian permasalahan atas tanah milik Pemerintah Provinsi Banten berupa tanah lahan kosong yang berada pada Dinas Sosial Provinsi Banten (UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial) 3. Rapat berlangsung pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2026 Rapat diikuti Bapak Asdatun Kejati Banten, Kepala UPT Panti Rehabilitasi dan Tuna Susila Dinas Sosial Provinsi Banten, Ibu Siti Barokah,SH,MH Kasi Perdata dan TUN, Bapak Marolop, SH,MH JPN, Bapak Faujul Kasi TUN Kejati Banten, para JPN, Bapak Didin Lukmanul Hakim,ST,M.Si Koordinator Sertifikasi BPKAD Provinsi Banten, dan Tim dari BPKAD Provinsi Banten. 4. <u>Kesimpulan Rapat :</u> 1. Asdatun Kejati Banten menyatakan dengan tegas bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 07 Tahun 1992 seluas 83.405 M² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada Tahun 2012 dibalik nama menjadi Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Rkb adalah syah milik Pemerintah Provinsi Banten 2. BPN Kabupaten Lebak agar segera memproses Penghapusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ahmad Dimyati,SH nomor 02827 seluas 5.050 m² , setelah kelengkapan dan persyaratan yang diajukan oleh pihak BPKAD Provinsi Banten terpenuhi. 3. Kepala Desa Rangkasbitung Timur agar segera menandatangani Surat Penguatan Fisik yang merupakan salah satu syarat yang harus ada agar sertifikat Ahmad Dimyati segera di hapuskan; =====))) Dalam Proses penyelesaian di 2026

No	LOKASI LAHAN	Luas (M ²)	Pengguna Barang	Permasalahan	Penyelesaian
2	Alamat : Jalan Raya Mandalawangi Km.7 RT.04 RW.03 Desa Mandalasari Kecamatan Kadu Hejo Kab.upaten Pandeglang	10.409m ²	DINAS PENDIDIKAN SMAN 8 KABUPATEN PANDEGLANG	1. Tahun 2021 BPKAD Provinsi Banten memfasilitasi 2. pensertifikatan, dengan langkah awal mengidentifikasi penguasaan fisik lahan SMAN 08 Kabupaten Pandeglang dan melakukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 3. SMAN 8 Pandeglang terdapat 3 bidang, setelah dilakukan pengukuran secara keseluruhan terdapat masalah, ada salah satu bidang yang merupakan tanah wakaf sehingga tidak bisa diproses Sertifikat Hak Pakai (harus melalui sidang pembatalan wakaf dari Kemenag) ; 4. Disamping itu ada permasalahan alas hak berupa AJB dan Sertifikat aslinya tidak ada sehingga BPN belum bias bisa memproses Sertifikat SMAN 8 Kabupaten Pandeglang;	1. SKK Nomor : 252/2025 2. Surat dari Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : B-23/M.6.6/Gp.1/01/2026, tanggal 29 Januari 2026 tentang Undangan Rapat Permohonan Bantuan Hukum terkait penyelesaian permasalahan bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Banten yang dikuasai oleh SMAN 8 Pandeglang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 3. Kamis, 05 Februari 2026 Rapat di Ruang Rapat Asdatun Kejati Banten diikuti Diikuti Bapak Asdatun Kejati Banten, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Pandeglang, Kasubag TU KCD Dindikbud Pandeglang, Kepala UPT SMAN 8 Pandeglang, Fungsional Penilai Ahli Muda BPKAD Provinsi Banten, Ketua Komite SMAN 8 Pandeglangdan Tim dari BPKAD Provinsi Banten 4. <u>Keimpulan Rapat :</u> 1) Pihak BPN Pandeglang agar segera membantu mempercepat proses Sertifikasi SMAN 8 Pandeglang, dan bila perlu agar menerapkan prinsip diskresi agar Sertifikatnya segera terbit ; 2) Bidang tanah SMAN 8 secara fisik sudah dikuasai dan terpagar rapih dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang mengklaim; 3) Rapat selanjutnya akan mengundang pihak2 terkait daiantaranya pemilik lahan Jumra dan H.Amung; ----))) tindakanjut dalam proses penyelesaian di 2026

No	LOKASI LAHAN	Luas (M ²)	Pengguna Barang	Permasalahan	Penyelesaian
3	Alamat : Jl. Raya Veteran No.2 RT/RW 07/011 Komplek SMKN 2 Desa Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	49.291 m ²	DINAS PENDIDIKAN SMKN 2 KOTA TANGERANG	1. Tahun 2020 BPKAD Provinsi Banten memfasilitasi pensertifikatan, dengan langkah awal mengidentifikasi penguasaan fisik lahan SMKN 02 Kota Tangerang dan melakukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 2. Lokasi SMKN 2 Kota Tangerang luasannya 49.291 m², namun pada saat proses pengukuran petugas penunjuk batas hanya menunjukan batas pagar sekolah, sehingga begitu terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00076, tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh luas 46.416 m², sehingga kekurangan luas 2.875 m² 3. Setelah dilakukan proses penelusuran oleh kami Kekurangan luas 2.875 m², ternyata telah berdiri banyak bangunan rumah yang dulunya ditempai para pensiunan Guru dan berdiri diatas tanah SMKN 2 Kota Tangerang sebagian besar sudah bersertifikat atas nama warga;	4. SKK Nomor : 251/2025; 5. . Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00076, tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh luas 46.416 m², 6. Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Tangerang, dari Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 032/003085/2016 dan Nomor : 032/MoU.8 Huk/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Wali Kota Tangerang H.ARIEF R.WISMANSYAH,B.Sc, M.Kes Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang selaku yang menyerahkan selanjutnya di sebut PIHAK KESATU, Gubernur Banten H. RANO KARNO,S.IP Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten selaku yang menerima, Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA, Berita Serah Terima Terlampir Luas Tanah Sekolah SMKN 02 Kota Tangerang seluas 49.291 m²; ----))) Tindaklanjutan dalam proses penyelesaian tahun 2026

No	LOKASI LAHAN	Luas (M ²)	Pengguna Barang	Permasalahan	Penyelesaian
4	Alamat : Jl. Ayip Usman No. 26 Kel. Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang	11.138m²	DINAS PENDIDIKAN (SMAN 05 Kota Serang)	1. Tahun 2021 BPKAD Provinsi Banten memfasilitasi pensertifikatan, dengan langkah awal mengidentifikasi penguasaan fisik lahan SMAN 05 Kota Serang dan melakukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kota Serang. 2. SMAN 5 Kota Serang terdapat 1 bidang, yang bidang tanahnya berasal dari Hibah Sekolah BT (Bina Taruna); 3. Pada saat Peralihan dari Pemerintah Kota Serang Ke Pemerintah Provinsi Banten Dokumen yang diberikan hanya Sertifikat Asli tanpa disertai dengan SPH (Surat Pelepasan Hak) dari pemilik awal (SMA BT) ke Pemerintah Kota Serang; 4. BPN Kota Serang meminta SPH dari pemilik Awal yaitu H.Zainal Arifin Maharajo Sutan ke Pemerintah Provinsi Banten	1. SKK Nomor : 253/2025; 2. Sertifikat Nomor 781 atas nama H.Zainal Arifin Maharajo Sutan dengan luas 11.138 m2; 3. Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) Kota Serang, dari Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Provinsi Banten Nomor : 032/003085/2016 dan Nomor : 032/MoU.8 Huk/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Wali Kota Tangerang H. Tb.KHAERUL JAMAN,SE Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang selaku yang menyerahkan selanjutnya di sebut PIHAK KESATU, Gubernur Banten H. RANO KARNO,S.IP Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten selaku yang menerima, Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA, Berita Serah Terima Terlampir Luas Tanah Sekolah SMAN 5 Kota Serang seluas 11.138 m2 -----))) Tindakan lanjut dalam proses penyelesaian tahun 2026

**REKAP REALISASI BELANJA HIBAH
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

Lampiran 6 Calk

Lampiran	Nama Belanja	Nilai Anggaran	Nilai Realisasi	Realisasi
Lampiran 6.1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	15.245.189.000	15.135.661.455	99,28%
Lampiran 6.2	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	41.488.820.500	37.932.531.904	91,43%
Lampiran 6.3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	35.251.000.000	34.183.942.842	96,97%
Lampiran 6.4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.050.000.000,00	1.049.201.184,00	99,92%
Lampiran 6.5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	266.807.444.820,00	260.553.112.141,00	97,66%
Lampiran 6.7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00%
Lampiran 6.6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	30.500.640.000,00	30.500.640.000,00	100,00%
Lampiran 6.7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	130.300.858.000,00	134.021.623.121,00	102,86%
Total		520.643.952.320,00	513.376.712.647,00	98,60%

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan (Pengembalian Belanja)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1		Satgas Agung Bais TNI	Jl. Oxygen I No. 4 Komplek Perumahan Krakatau Steel Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon Prov. Banten	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	-
2		SUBKOGARTAP 0623 / CILEGON	Jl. Madani No. 64 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon	236.430.000,00	236.430.000,00	100,00%	-
3		Komando Resort Militer 064 / Maulana Yusuf	Jl. Maulana Yusuf No. 9 Kota Serang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	-
4		Kepolisian Daerah (POLDA) Banten	Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, 76 Serang	6.454.339.000,00	6.397.652.800,00	99,12%	56.686.200,00
5		Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten	Jl. Kh. Syeh Nawawi Al-Bantani Serang	3.500.000.000,00	3.453.972.469,00		46.027.531,00
6		Komando Pasukan Khusus Grup 1	JL. Cilegon-Merak, Taman Baru Kec. Taktakan, Kota Serang Banten 42162 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Taktakan Kota Serang	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	-
7		Pangkalan TNI AL-Banten	Jl.Yossudarso No. 1 Merak Cilegon Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	-
8		Komando Resor Militer 052 / Wijayakrama	Jl. Boulevard Diponegoro No. 108 Lippo Karawaci Kab. Tangerang	400.000.000,00	399.999.900,00	100,00%	100,00
9		Detasemen Polisi Militer III/4	Jl. Maulana Yusuf No. 1 Kota Serang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	-
10		Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten	Jalan Jenderal Sudirman No. 14 Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten,	1.454.420.000,00	1.447.606.286,00		6.813.714,00
		TOTAL		15.245.189.000	15.135.661.455	99,28%	109.527.545

**Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025**

Lampiran 6.2 Calk

NO	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan (Pengembalian Belanja)
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1		Kejaksaan Tinggi Banten	Jl. Raya Pandeglang	16.599.946.000,00	15.617.312.717,00	94,08%	
2		BPK Perwakilan Provinsi Banten	Grand Serang Asri Bhayangkara	13.385.250.500,00	12.624.003.975,00	94,31%	
3		Group 1 Kopassus	Jl. Cilegon-Merak, Taman Baru, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162	300.000.000,00	296.109.100,00	98,70%	
4		Badan Intelijen Daerah Banten/ Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan KP3B Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten	9.800.000.000,00	8.031.846.112,00	81,96%	
5		Brimob Banten	Jl. Amin Jasuta Serang	1.403.624.000,00	1.363.260.000,00	97,12%	
		TOTAL		41.488.820.500	37.932.531.904	91,43%	-

**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan
Tahun Anggaran 2025**

NO	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan (Pengembalian Belanja)
Dinas Kesehatan				6.300.000.000,00	6.230.760.182,00	98,90%	69.239.818,00
1		Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten	Jl. Raya Serang - Jakarta KM 5 Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang	6.000.000.000,00	5.930.967.927,00	98,85%	69.032.073,00
2		Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten	Jl. KH. Amin Jasuta No.15B, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten	300.000.000,00	299.792.255,00	99,93%	207.745,00
Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana				250.000.000,00	250.000.000,00		
1		Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten	Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Gedung Terpadu Lt.1 Jln Syech Nawawai Al- Bantani Curug Palima Kota Serang - Bante	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	-
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				2.475.000.000,00	2.474.880.000,00	100,00%	120.000,00
1		Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten	Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 Curug Kota Serang 42171	2.475.000.000,00	2.474.880.000,00	100,00%	120.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				15.500.000.000,00	15.087.736.832,00	97,34%	412.263.168,00
1		Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten	Jl. Raya Pandeglang, Km.5 No. 11, Cipocok Jaya, Karundang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42125. Telepon: (0254) 250289. Email : konibanten@gmail.com	13.500.000.000,00	13.093.010.130,00	96,99%	406.989.870,00
2		National Paralympic Committe (NPC) Provinsi Banten	Jl. Medang Lestari, Medang, Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten 15334	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	-
3		Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Banten	Jl. KH. Abdul Hadi Ruko Biru Lt.3 RT 02 RW 014 Kel. Cipare Kec. Serang	1.250.000.000,00	1.249.020.000,00	99,92%	980.000,00
4		Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) Provinsi Banten	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Kota Serang Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	-
5		Gerakan Pramuka Kwarda Banten	Jl. Raya Jakarta-Pakupatan Kemang-Serang Banten.Tlp/Fax (0254) 224655, email: kwardabanten@gmail.com	250.000.000,00	245.706.702,00	98,28%	4.293.298,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				9.051.000.000,00	8.465.670.383,00	93,53%	404.329.617,00
1		Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Banten	Gedung Masjid Raya Al-Bantani Jl. Syeikh Nawawi Al-Bantani KP3B Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang	4.691.000.000,00	4.391.585.203,00	93,62%	243.414.797,00
2		Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Curug Kota Serang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang	1.150.000.000,00	1.149.873.658,00		126.342,00
3		Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten	Jl.Ki Fatoni No.54 Serang- Banten Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang	1.500.000.000,00	1.418.783.466,00		81.216.534,00
4		Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Provinsi Banten	Jl.Banten no.51 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang	150.000.000,00	150.000.000,00		
5		Mathla'ul Anwar Provinsi Banten	Lingk. Pemeriyen RT/RW 02/03 Kel. Cilaku Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten	100.000.000,00	98.686.256,00		1.313.744,00
6		Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten	50.000.000,00	50.000.000,00		
7		Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)	Jl. Serang-Jakarta Kp. Kemang RT. 03/02 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	750.000.000,00	750.000.000,00		
8		Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesarani Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Bante	Jl. H. Abdullah no.2 , Kota Serang Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang	60.000.000,00	60.000.000,00		
9		Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten	Masjid Raya Al Bantani Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP3B Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang	75.000.000,00	-		75.000.000,00
10		Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten	Jl. Ki Ajurum, Komplek Depag, No. 002, Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten	400.000.000,00	396.741.800,00		3.258.200,00
11		MATAKIN Provinsi Banten	KHONGCU BIO, JL. KI SAMAUN NO 145, TANGERANG, TELP 021-5521412	50.000.000,00	-		
12		Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Provinsi Banten	Komplek Bukit Sayar Indah, Jln. Baugenvil No. 10 Ciracas Kelurahan Serang	75.000.000,00	-		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.675.000.000,00	1.674.895.445,00	99,99%	104.555,00
1		Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Banten	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00%	-
2		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jl. Syech Nawawi Albantani KP3B Serang	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	-
3		Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten	Jln. Raya Serang - Pandeglang Lingkungan Komplek	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00%	-
4		Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten	Jalan Syech Nawawi Al Bantani KP3B Blok Instansi Vertikal No. 1 Serang 42171	200.000.000,00	200.000.000,00		-
5		Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Provinsi	Griya Baladika Asri No 64 RT. 003 RW. 015 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang	100.000.000,00	99.895.445,00		104.555,00
6		Pimpinan Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Provinsi Banten	Jl. Ki Mas Jong No.2 Kota Baru Kec. Serang Kota Serang	50.000.000,00	50.000.000,00		-
7		DPW GARNIZUN Banten	Puri Pasundan 1 Blok C2 NO. 1 RT. 01./007 Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	50.000.000,00	50.000.000,00		-
8		DPD LVRI Provinsi Banten	Jl.Kimasjong No.03 Kelurahan Kota Baru Kec. Serang Kota	50.000.000,00	50.000.000,00		-
9		Yayasan RAISA	Jl. Raya Cadas Kukun cluster green leaf blok c8 no 12 Rajeg,	50.000.000,00	50.000.000,00		-
TOTAL				35.251.000.000	34.183.942.842	96,97%	886.057.158

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2025

Lampiran 6.4 Calk

No	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan (Pengembalian Belanja)
1	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Banten	Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Banten (ORARI)	Jl. Orari No.4 Ling Kemuning Kelunjukan, Ling Selatan Rt/Rw. 003/026 Kel. Serang Prov. Banten	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	-
2	Badan Kepegawaian Daerah	KORPRI Provinsi Banten	Jalan Raya Petir, Cilaku, Curug, Serang City, Banten 42171,	1.000.000.000,00	999.201.184,00	99,92%	798.816,00
TOTAL				1.050.000.000	1.049.201.184	99,92%	798.816

NOS	KPI	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	32	SMKS MISYKATUL AZKIYA RANGKASBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	JL. Patih Derus No.18D/6L RT.01 RW. 03 Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	198.400.000	222.400.000	-	112,10%
	33	SMKS MUHAMADIYAH CIKOTOK	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Warungkadu No. 18 Desa : Cikotok Kecamatan : Cibeber Kabupaten : Lebak 42394 Provinsi : Banten Kelurahan Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak	153.800.000	107.400.000	-	69,83%
	34	SMKS MUHAMMADIYAH 1 LEUWIDAMAR	SMK	Kabupaten Lebak	Jln. ciboleger km 14, bojong menteng	177.600.000	153.600.000	-	86,49%
	35	SMKS MUHAMMADIYAH 1 RANGKASBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Bhakti Manunggal No.05, Selahaur 001/009 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	243.200.000	206.400.000	-	84,87%
	36	SMKS MUHAMMADIYAH 2 RANGKASBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	JL. BHAKTI MANUNGAL NO.5 KEL. CIJORO LEBAK, KEC. RANGKASBITUNG, KAB. LEBAK - BANTEN Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	57.600.000	70.400.000	-	122,22%
	37	SMKS NASIONAL 1 BANJARSARI	SMK	Kabupaten Lebak	JL. RAYA SAKETI MALINGPING KM. 24 BANJARSARI Kelurahan Jalupang Girang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak	134.400.000	118.264.000	-	87,99%
	38	SMKS NURUL FAIZIN	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Maulana Hasanudin Kp. Cempa Ds. Cilangkap Kec. Kalanganyar Kab. Lebak - Banten Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak	35.200.000	30.352.000	-	86,23%
	39	SMKS NURUL MADANY	SMK	Kabupaten Lebak	Jl.Raya Rangkasbitung - Cipanas Km.36 Babakanpedes Desa Sipayung kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42372 Kelurahan Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak	235.200.000	188.800.000	-	80,27%
	40	SMKS PGRI MAJA	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Perum Permata Kalimaya Kelurahan Curug Badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak	1.153.600.000	1.036.800.000	-	89,88%
	41	SMKS PGRI RANGKASBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Dewi Sartika No. 45 L Komplek Pendidikan RT. 03 RW 13 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	1.147.200.000	1.107.200.000	-	96,51%
	42	SMKS PLUS MIFTAHUL IHSAN CILOGRANG	SMK	Kabupaten Lebak	Jalan Raya Bayah Cibareno Km 25 Gunungbatu Kelurahan Gunungbatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak	574.400.000	537.600.000	-	93,59%
	43	SMKS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	Jln.Budi Utomo Komplek Pendidikan No.22 L Rangkasbitung42314 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	651.200.000	520.000.000	-	79,85%
	44	SMKS TERPADU BANI RUSYDI	SMK	Kabupaten Lebak	Jl. Raya Leuwidamar Km.17 Rangkasbitung, Kp. Sangiang. Kelurahan Sangkan Manik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak	300.800.000	214.400.000	-	71,28%
	45	SMK MANARUL HIDAYAH CURUGBITUNG	SMK	Kabupaten Lebak	KEC. CURUG BITUNG	-	113.600.000	-	0,00%
	46	SMK KOPTI MALINGPING	SMK	Kabupaten Lebak	KEC. MALINGPING	-	140.800.000	-	0,00%
	47	SMK TRI WICAKSANA	SMK	Kabupaten Lebak	KEC. GUNUNG KENCANA	-	102.400.000	-	0,00%
	48	SMK TERPADU NURUL HIKMAH	SMK	Kabupaten Lebak	Jalan Raya Malingping-Cijaku Km. 07 Kp. Kaduajar Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Kaduajar Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak	254.400.000	140.800.000	-	55,35%
	49	SMK AL-IQRO CIKEDAL	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 09 PLTU 2 Labuan Kp. Kadulanggongg Desa Cipicung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang - Banten Kelurahan Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang	150.400.000	150.400.000	-	100,00%
	50	SMK AL KAFFAH CIKEDAL	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan km. 1 Cikedal Kelurahan Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang	358.400.000	368.000.000	-	102,68%
	51	SMK ARKID MADANI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Muara Km 01 Kp. Kadiri RT.006/002 Kelurahan Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang	232.000.000	169.600.000	-	73,10%
	52	SMK AS SHOF	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Cikupaeun. Desa. Bojongmanik, Kec. Sindangresmi, Kab. Pandeglang - Banten Kelurahan Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang	147.200.000	121.600.000	-	82,61%
	53	SMK AS-SYIFA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Sodong Pintu KM 04 Desa Majau Kelurahan Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	164.800.000	156.800.000	-	95,15%
	54	SMK AT-TAUBAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	KP. WARUCONDONG DESA. BATUBANTAR Kelurahan Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	225.600.000	230.400.000	-	102,13%
	55	SMK AZZAHRA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Heas Rt/Rw. 10/05 Kelurahan Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang	150.400.000	132.800.000	-	88,30%
	56	SMK BAHTRA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Kp. Pasir Walet RT/RW 03/14, Kabayan, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang	136.000.000	115.200.000	-	84,71%
	57	SMK BINA MUDA PRATAMA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Portal Desa Kiarapayung Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Manglid Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang	331.200.000	236.800.000	-	71,50%
	58	SMK BINUSA PICUNG	SMK	Kabupaten Pandeglang	KP. CIHUJAN RT.26 RW.07 Kelurahan Pasirsedang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang	131.400.000	134.600.000	-	102,44%
	59	SMK INFORMATIKA DAAR EL MAARIF	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Rego KM.1 No.02 Kp. Baturjaya RT.02/03 Ds. Ciinjuk Kec. Cadasari Kab.Pandeglang Kelurahan Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang	67.200.000	65.600.000	-	97,62%
	60	SMK IT BANI ISMAIL	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Ciomas Mandalawangi KM. 6 Kp. Lebak Bitung No. 33 RT 002 RW 004 Kelurahan Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	212.800.000	196.800.000	-	92,48%
	61	SMK IT DAAR EL ULUM	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl.Raya Labuan KM.20 Curug. Kp.Bandrong Kelurahan Girjaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	41.600.000	38.400.000	-	92,31%
	62	SMK IT GLOBAL AL-JABAR	SMK	Kabupaten Pandeglang	BELAKANG TERMINAL BUS LABUAN, KP. KADUPARASI 015/005 Kelurahan Margasana Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang	243.200.000	280.000.000	-	115,13%
	63	SMK KBM CISATA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Kadugagala - Cisereh Ds.Cisereh Kec. Cisata Kab. Pandeglang- Banten Kelurahan Cisereh Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang	345.600.000	262.400.000	-	75,93%
	64	SMK KRIDA TARUNA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Cikadu Indah Kelurahan Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	180.800.000	144.000.000	-	79,65%
	65	SMK MANBAEL HUDA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Salangari Desa Pandat Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Kelurahan Pandat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	110.400.000	131.200.000	-	118,84%
	66	SMK MATHLAUL ANWAR CIKALIUNG	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Pandeglang Curug Kadudampit Saketi Pandeglang Banten Kelurahan Kadudampit Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	149.000.000	142.600.000	-	95,70%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
67		SMK MATHLAUL ANWAR SUKALANGU	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. Raya Sodong - Kadumula Km 4,5 Desa Sukalangu Kec. Saketi Kelurahan Sukalangu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	201.600.000	286.400.000	-	142,06%
68		SMK Miftahul Huda Cibitung	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln Raya Curug KM. 05 Ds. Malangnengah kec. cibitung kab pandeglang prov. banten Kelurahan Malangnengah Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang	134.400.000	152.000.000	-	113,10%
69		SMK NU NURUL MURSYIDAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jalan Syech Abdul Jabbar, Kp. Karang Tanjung, Rt 007 Rw 004, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang	265.600.000	187.200.000	-	70,48%
70		SMK NUUR EL QOLAM PULOSARI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Baru Satu, Rt 02 Rw 02, Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Kelurahan Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang	294.400.000	252.768.500	-	85,86%
71		SMKS 19 MARET	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Gunung Karang KM. 02 Kayuambon Desa Saninten Kecamatan Kaduhejo Kab. Pandeglang Kelurahan Saninten Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang	308.800.000	265.600.000	-	86,01%
72		SMKS AL FALAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL Kadosas Ciekak Hilir RT 02 RW 10 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	440.000.000	412.800.000	-	93,82%
73		SMKS AL HASAN SAKETI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Malingping Km.01 Saketi. Kp. Kebonpinang, Ds. saketi, Kec. Saketi Kelurahan Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	126.400.000	100.800.000	-	79,75%
74		SMKS AL HIKMAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. Raya Labuan, Km.15, Cipeucang, Palanyar, Palanyar, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang	760.000.000	782.400.000	-	102,95%
75		SMKS AL IHYA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Pulosari Km.19, Kp/Ds. Kaduronyok Kelurahan Kaduronyok Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang	376.000.000	318.400.000	-	84,68%
76		SMKS AL ITIHAD	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM.08 Cirumput Ds.Karya Utama Kec.Cikedal Pandeglang Banten Kelurahan Karyautama Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang	139.400.000	206.600.000	-	148,21%
77		SMKS AL MYSYARAFAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl Raya Labuan Km 13 Kp Sambolo Rt 04/01 Kelurahan Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang	97.600.000	102.204.000	-	104,72%
78		SMKS AN NAHDLAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl.Kramat Batu Qur'an Km.01 Cimanuk Kelurahan Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	149.000.000	123.400.000	-	82,82%
79		SMKS AR RUJIMAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp Sabi Bahraen 02/04 Desa bangkonol Kelurahan Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang	48.000.000	43.200.000	-	90,00%
80		SMKS AT TAHSIN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Simpang, Ds. Kubang Kampil, Kec. Sukaresmi Kelurahan Kubangkampil Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang	152.000.000	168.000.000	-	110,53%
81		SMKS BABUNNAJAH MENES	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM.12 Kp. Cimedang Kelurahan Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	1.168.000.000	1.072.000.000	-	91,78%
82		SMKS BADAQ PUTIH CIMANGGU	SMK	Kabupaten Pandeglang	RAYA RANCAPINANG KM. 13 SINDANGJAYA, Tugu, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang,	168.000.000	164.164.000	-	97,72%
83		SMKS BAITUL HAMDI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Nanggorak RT004/RW004. Jl. Raya Labuan Pandeglang KM 11 Kelurahan Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	107.200.000	91.200.000	-	85,07%
84		SMKS BANTEN RAYA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Rangkasbitung KM.04 Sabitangtu Kelurahan Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang	254.400.000	259.200.000	-	101,89%
85		SMKS BHAKTI NUSANTARA LABUAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.02 Labuan Kelurahan Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	96.000.000	107.200.000	-	111,67%
86		SMKS BINA INSANI AL BAROKAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Salmin No. 1 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang	187.200.000	177.600.000	-	94,87%
87		SMKS BINA MANDIRI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln. Raya Labuan KM 20 Ciandur - Saketi Kab. Pandeglang Prov. Banten Kelurahan Ciandur Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	140.800.000	86.400.000	-	61,36%
88		SMKS BINA WARGA SAKETI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln. Sodong Kadubera km 2. Kp. Pasirtundun, Ds. Medalsari, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang. Kode Pos 42273. Kelurahan Medalsari Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	270.400.000	233.600.000	-	86,39%
89		SMKS BUDI UTAMA PANIMBANG	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL Raya Tanjung Lesung Km.03 Desa Panimbang Jaya, Panimbang, Pandeglang Kelurahan Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	158.400.000	188.800.000	-	119,19%
90		SMKS CITRA MADANI	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL.RAYA REGO KM.06, AWILEGA, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang	32.000.000	0	-	0,00%
91		SMKS DARMA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. RAYA LABUAN KM. 5 KADULISUNG PALURAHAN KADUHEJO PANDEGLANG Kelurahan Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang	651.200.000	673.600.000	-	103,44%
92		SMKS DARUL FIKRI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Jiput - Caringin KM 1 Kp. Talun Ds. Jiput Kec. Jiput Kab. Pandeglang 42263 - Prov Banten Kelurahan Jiput Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang	320.000.000	212.800.000	-	66,50%
93		SMKS DARUL HIKMAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. PAGADUNGAN Pasir Rt 06/03 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang	38.400.000	24.000.000	-	62,50%
94		SMKS DWI PUTRA BANGSA CIMANGGU	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. RAYA SUMUR KM. 12 Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang	833.600.000	724.800.000	-	86,95%
95		SMKS FA BANI HAMIM	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln. Raya Labuan Km 7,5 Babakan Santri Mengger Rt. 003 Rw. 003 Ds. Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Prov. Banten (42253) Kelurahan Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang	70.400.000	49.600.000	-	70,45%
96		SMKS HUSADA WINAYA PRATAMA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jalan Raya Labuan KM 04 Maja Barat kel.sukaratu, kecamatan Majasari Pandeglang Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	48.000.000	48.000.000	-	100,00%
97		SMKS IBNU HAJAR	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl Raya Menes-Jiput KM 2 Desa Pamarayan Kecamatan Jput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Pamarayan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang	484.800.000	371.200.000	-	76,57%
98		SMKS IKPI LABUAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. jend. Sudirman No. 08 Desa Sukamaju Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	662.400.000	662.400.000	-	100,00%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
99		SMKS IPTEK PATIA	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. ABURIZAL BAKRI KM 05 PATIA-PAGELARAN TELP. 085213872929 Kelurahan Patia Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang	748.800.000	723.200.000	-	96,58%
100		SMKS ISLAM ARRIDHO	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km.20 Kadu Belang Kelurahan Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	235.200.000	254.400.000	-	108,16%
101		SMKS IT AL-HALIM	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl.Saketi-Malingping Km 04 Desa Manggung Jaya-Bojong Dusun Sidampit, Rt.01/Rw.01 kode Pos 42274 Kelurahan Manggungjaya Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang	174.400.000	160.000.000	-	91,74%
102		SMKS KARYA BAKTI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln. RAYA PAGELARAN Km. 01 Kp. TEGAL JAMBU RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang	262.400.000	268.800.000	-	102,44%
103		SMKS KARYA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Panimbang KM.01 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Kelurahan Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang	235.200.000	278.400.000	-	118,37%
104		SMKS KARYA WISATA CIKADU	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Wisata Tanjung Lesung Kp. Cikadu Indah Ds Tanjungjaya Kec Panimbang Kab Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	529.600.000	465.600.000	-	87,92%
105		SMKS LA TAHZAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl.Raya Munjul-Cikeusik, KM. 01, Munjul Pandeglang 42276 Kelurahan Munjul Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang	321.600.000	324.800.000	-	101,00%
106		SMKS MAARIF NU	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jln raya labuan km 03 maja saruni, kec. majasari kab pandeglang provinsi banten Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	262.400.000	270.400.000	-	103,05%
107		SMKS MALNU PUSAT MENES	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl.Raya Labuan Km 15 Kebon Jeruk Menes Pandeglang 42262 Kelurahan Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	414.400.000	408.000.000	-	98,46%
108		SMKS MANDALA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Sobang-Panimbang (Tanjung Lesung), KM.01, Babakan Djati Kelurahan Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	51.200.000	12.800.000	-	25,00%
109		SMKS MARDHATILLAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Ciherang RT/RW 001/007 Desa. Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten pandeglang - Banten Kelurahan Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang	70.400.000	83.200.000	-	118,18%
110		SMKS MATHLABUL HUDA KORONCONG	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. H. Achmad Satibi Km. 1 Ds. Koroncong Kec. Koroncong Kab. Pandeglang Prov. Banten Kelurahan Koroncong Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang	147.200.000	163.200.000	-	110,87%
111		SMKS MATHLAUN NAWAKARTIKA	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. RAYA LABUAN KM.15 LEUWILIANG , Kananga, Kec. Menes, Kab. Pandeglang	326.400.000	272.000.000	-	83,33%
112		SMKS MUHAMMADIYAH PANDEGLANG	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Stadion Badak No 1 Kel. Saruni Kec Majasari Kab Pandeglang Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	107.200.000	134.400.000	-	125,37%
113		SMKS NASYRUL ULUM PANDEGLANG	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jalan Raya Serang Km. 1.5 Rt. 04/10 Cikondang Kel/Kec/Kabupaten Pandeglang Kode Pos : 42213 Banten Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang	293.000.000	286.600.000	-	97,82%
114		SMKS NUR INSANI	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Padamulya Km. 1 Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kelurahan Sumurlaban Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang	267.200.000	236.800.000	-	88,62%
115		SMKS PELITA	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. Cipari Km. 01 RT003/RW 005 Desa Manglid Kec. Cibitung Kabupaten Pandeglang Kelurahan Manglid Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang	217.600.000	291.200.000	-	133,82%
116		SMKS PGRI LABUAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Komplek Griya Labuan Asr RT/RW 13/08 Ds. Sukamaju Kec. Labuan Kab. Pandeglang Kelurahan Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	163.400.000	173.000.000	-	105,88%
117		SMKS PGRI PANDEGLANG	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL.TAMAN PAHLAWAN NO.1 PANDEGLANG Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang	376.000.000	419.200.000	-	111,49%
118		SMKS PRAWIRA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Carita Km.2 Kp. Pamatang Kelurahan Banjarmasin Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang	115.200.000	124.800.000	-	108,33%
119		SMKS RINA HASANAH	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Sodong pintu KM. 03 Kp. Kubang gintung R t/RW 005/002 Kelurahan Majau Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang	216.000.000	198.400.000	-	91,85%
120		SMKS ROUDLOTUL IHSAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Sobang-Panimbang , KM.01, KP. CIBINTAROK 002/003 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang	52.800.000	11.032.000	-	20,89%
121		SMKS TI MUHAMMADIYAH MENES	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. RAYA PASAR MENES KM 01, KAMPUNG KADULOGAK Kelurahan Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	78.400.000	78.400.000	-	100,00%
122		SMKS TUNAS BANGSA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Patiraheut RT/RW. 010/005, Desa. Palembang, Kec. Cisata, Kab. Pandeglang Kelurahan Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang	129.600.000	136.000.000	-	104,94%
123		SMKS WALISONGO MENES	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jalan Raya Labuan Km. 11 Simpang Tiga Komplek Ciputri Menes Kelurahan Alaswangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	539.200.000	313.600.000	-	58,16%
124		SMKS WIDYA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 02 Kp. Namprak Ds. Mendung Kec. Cibaliung Kelurahan Mendung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang	204.800.000	176.000.000	-	85,94%
125		SMKS YANUBA	SMK	Kabupaten Pandeglang	Kp. Tegal Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Kelurahan Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang	113.600.000	88.000.000	-	77,46%
126		SMKS SABILU EL-MUHTADIN	SMK	Kabupaten Pandeglang	KEC. CIMANUK	-	89.600.000	-	#DIV/0!
127		SMKS AL BAYAN	SMK	Kabupaten Pandeglang	KEC. LABUAN	-	55.440.000	-	#DIV/0!
128		SMKS YASDU	SMK	Kabupaten Pandeglang	JL. RAYA CADASARI - REGO KM. 01 CIINJUK CADASARI KAB. PANDEGLANG, Ciinjuk, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang	99.200.000	100.800.000	-	101,61%
129		SMKS YPP PANDEGLANG	SMK	Kabupaten Pandeglang	Jl. Cipanas-Cipacung No. 33 Kelurahan Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang	56.000.000	57.600.000	-	102,86%
130		SMK AL-HAMRA KAIBON	SMK	Kabupaten Serang	JL. SUNGAI CIUJUNG LAMA KAMPUNG KAIBON	118.400.000	113.600.000	-	95,95%
131		SMK AL HIDAYAH KRAGILAN	SMK	Kabupaten Serang	KUBANG CEMPAKA RT 03/03	241.600.000	177.600.000	-	73,51%
132		SMK Al-Husen Tunjung Teja	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Raya Tunjung-Jambu KM. 02 Tunjung Teja Serang - Banten	265.600.000	207.745.000	-	78,22%
133		SMK AL MA ARIF KRAMATWATU	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Lebakpulus	152.000.000	190.399.500	-	125,26%

NOSKPK	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
134	SMK AL-MASHOEM BANTEN	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Raya Bongla Km, 06 Kp. Serut	65.600.000	32.000.000	-	48,78%
135	SMK AL MUAWANAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA GUNUNGSARI-ANYERJL. RAYA GUNUNGSARI-ANYER	467.200.000	460.800.000	-	98,63%
136	SMK ASHHABUL MAIMANAH SIDAYU	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Pontang Tirtayasa Km 2 Sidayu Sebrang	372.800.000	313.600.000	-	84,12%
137	SMK AT-TAKWA BENDUNGAN	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Suryadi Sudirja Kp. Batu Kurung RT/RW 10/02	88.000.000	84.800.000	-	96,36%
138	SMK ATTAUFIQIYYAH	SMK	Kabupaten Serang	SERANG PANDEGLANG KM 14	1.849.800.000	1.673.157.106	-	90,45%
139	SMK BANI HASYIM BOJONEGARA	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA BOJONEGARA NO. 3 KM 7 WADASARI	38.400.000	104.544.000	-	272,25%
140	SMK BINA INSAN	SMK	Kabupaten Serang	JL. Lanud Gorda Km. 07 Binuang	520.000.000	347.200.000	-	66,77%
141	SMK BINA MANDIRI	SMK	Kabupaten Serang	JL. DAHU KM 01	144.000.000	107.200.000	-	74,44%
142	SMK BINA UL HUSNA	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Warung Selikur KM. 09 RT/RW 010/003	235.200.000	201.600.000	-	85,71%
143	SMK CHANDRA KARYA	SMK	Kabupaten Serang	JL. SENTUL - PAMARAYAN KM 06 DS BAGOANG KEC. CIKEUSAL KAB SERANG 42175 Kelurahan Gandayasa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang	187.200.000	177.600.000	-	94,87%
144	SMK DAAR EL QURRO	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Lintas Cikande - Kresek	116.800.000	92.800.000	-	79,45%
145	SMK Darul Qibty	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Leuwi Nanggung RT/RW 8/2	289.800.000	269.000.000	-	92,82%
146	SMK HIKMATUL IMAN	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Panenjoan Ds. Majasari Kelurahan Majasari Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang	289.800.000	264.200.000	-	91,17%
147	SMK IKHLAS JAWILAN	SMK	Kabupaten Serang	JL. CIKANDE - RANGKASBITUNG KM. 10	1.499.200.000	1.499.200.000	-	100,00%
148	SMK IMAM SYAFIYAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. PANCAINTAN	449.600.000	433.600.000	-	96,44%
149	SMK INSAN CENDIKIA	SMK	Kabupaten Serang	JL.SENTUL JONJING KM.5 SIMPANG TIGA	452.800.000	281.600.000	-	62,19%
150	SMK ISLAM CENDIKIA	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Palima Cinangka Km. 34	516.800.000	508.800.000	-	98,45%
151	SMK ISLAM DARUL KHALIFAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. LANUD GORDA KM.05	136.000.000	128.000.000	-	94,12%
152	SMK ISLAM KARYA MANDIRI	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Raya cikande-rangkasbitung km.4	188.800.000	190.400.000	-	100,85%
153	SMK ISLAM TERPADU AT-TOOBA	SMK	Kabupaten Serang	JL. KOPO-MAJA KM 2.3	35.200.000	0	-	0,00%
154	SMK IT ISTANA MULIA	SMK	Kabupaten Serang	Jl Raya Karang Bolong Kp Cikondang	28.800.000	33.544.600	-	116,47%
155	SMK KESEHATAN INSAN HUSADA CENDIKIA	SMK	Kabupaten Serang	JL. WARUNG SELIKUR KM.03 Kp. Kompa Desa.Pasepatan	20.800.000	137.600.000	-	661,54%
156	SMK MIFTAHUL FALAH	SMK	Kabupaten Serang	JL.TUNJUNG TEJA	318.400.000	283.200.000	-	88,94%
157	SMK MIFTAHUSSAADAH	SMK	Kabupaten Serang	JLN KAWASAN MODERN IV KP.BOJONG RANJI	214.400.000	187.200.000	-	87,31%
158	SMK MULTI DIMENSI ANYER	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Raya Anyar - Siring KM. 1 Kp. Penauan	81.600.000	68.800.000	-	84,31%
159	SMK NURUL FALAH BOJONG PANDAN	SMK	Kabupaten Serang	JLN. AHMAD SUDIRJA KAMPUNG PEUJEUH	308.800.000	320.000.000	-	103,63%
160	SMK NURUL HUDA	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA PANDEGLANG KM. 14 KAMPUNGSAWAH	1.379.200.000	1.164.800.000	-	84,45%
161	SMK PARAMESWARA	SMK	Kabupaten Serang	Jl.Tubui No.07 Kp.Sindang Asih	11.200.000	9.600.000	-	85,71%
162	SMK PARIWISATA AL KHAIRIYAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA KARANG BOLONG KM. 132 TAMBANG AYAM	192.000.000	232.000.000	-	120,83%
163	SMK PEMBANGUNAN TERPADU	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Peujeuh, Ds.Bojong Pandan	224.000.000	180.800.000	-	80,71%
164	SMK PLUS AL INAYAH PEGANDIKAN	SMK	Kabupaten Serang	Pegandikan	108.800.000	104.000.000	-	95,59%
165	SMK PRISMA CITRA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA WARUNG SELIKUR - CARENANG KM 5 GARDU KISALAM	284.800.000	264.000.000	-	92,70%
166	SMK RIYADL ASH SHOLIHIN	SMK	Kabupaten Serang	JL. PAMARAYAN KM. 3 DS. SANGIANG	160.000.000	137.600.000	-	86,00%
167	SMKS AL KHAIRIYAH CIKEUSAL	SMK	Kabupaten Serang	Jln. Bojong Neros Panosogan Kec. Cikeusal Kab. Serang	54.400.000	19.200.000	-	35,29%
168	SMKS AL MAARIF	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA CIKANDE CARENANG KM. 2,8	257.600.000	158.400.000	-	61,49%
169	SMKS ART DESIGN	SMK	Kabupaten Serang	RAYA CIKEUSAL-SERANG	603.200.000	236.800.000	-	39,26%
170	SMKS BHAKTI PERTIWI CIPTAYASA	SMK	Kabupaten Serang	JLN. CIPTAYASA KM 05	113.600.000	124.701.500	-	109,77%
171	SMKS BISMILLAH	SMK	Kabupaten Serang	JLN. PALKA KM 22 PADARINCANG	1.520.000.000	1.520.000.000	-	100,00%
172	SMKS DAARUL HIKMAH	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Bolang Pulo Ds. Bolang Kec. Lebak Wangi Kab. Serang	230.400.000	206.400.000	-	89,58%
173	SMKS DARUNNADWAH	SMK	Kabupaten Serang	Jl. SMA Negeri 1 Kramatwatu Ds. Kramatwatu	203.200.000	211.200.000	-	103,94%
174	SMKS DARUNNAJAH PABUARAN	SMK	Kabupaten Serang	JL.RAYA PALKA KM 5 PABUARAN SERANG	19.200.000	31.500.000	-	164,06%
175	SMKS DARUTTAIBIN	SMK	Kabupaten Serang	JLN. PALKA KM 05 CIWADAS PABUARAN	144.000.000	14.400.000	-	10,00%
176	SMK SHOHIBUL MUSLIMIN	SMK	Kabupaten Serang	Jl. KH. Abdul Kabier Blok Pesantren	158.400.000	177.600.000	-	112,12%
177	SMK SINDANG KARYA ISLAMIC SCHOOL SIS	SMK	Kabupaten Serang	JL. ALTERNATIF ANYER BANDULU KP. KAREO	96.000.000	94.400.000	-	98,33%
178	SMKS INFORMATIKA SAFINATUNNAJAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. MAKAM PAHLAWAN BRIGJEN KH. SYAMUN KM 1 Ds. KAMASAN	108.800.000	94.400.000	-	86,76%
179	SMKS INSAN KAMIL	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA PAMARAYAN	52.800.000	0	-	0,00%
180	SMKS INSAN MULYA KIBIN	SMK	Kabupaten Serang	JL. RAYA SERANG-JAKARTA KM. 20	710.400.000	710.400.000	-	100,00%
181	SMKS KARYA FAJAR	SMK	Kabupaten Serang	JL.KH.M.GOZALI KP.PAJARAKAN DS.TAMBILUK KEC.PETIR	182.400.000	190.400.000	-	104,39%
182	SMKS KOPTI	SMK	Kabupaten Serang	JLN. RAYA SERANG - CILEGON KM 9 KRAMATWATU - SERANG	44.800.000	43.200.000	-	96,43%
183	SMKS MABDAIL FALAH BANTEN	SMK	Kabupaten Serang	JL.PAMRAYAN-RANGKAS BITUNG KM.05	193.600.000	152.000.000	-	78,51%
184	SMKS MEDIKA INSAN KREATIF	SMK	Kabupaten Serang	JL.Plawad Mandiri RT.02/RW.01	27.200.000	8.000.000	-	29,41%
185	SMKS MERDESA	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Pontang-Banten Km.05 Kp. Linduk	123.200.000	110.400.000	-	89,61%
186	SMKS MUHAMMADIYAH KRAGILAN	SMK	Kabupaten Serang	JL.RAYA SERANG - JAKARTA KM.17 KRAGILAN	59.200.000	27.200.000	-	45,95%
187	SMKS MUHAMMADIYAH PONTANG	SMK	Kabupaten Serang	JL. KALAPIAN NO 06	366.400.000	387.200.000	-	105,68%
188	SMKS MUHAMMADIYAH TIRTAYASA	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Tirtayasa RT 003/001 Ds. Tirtayasa Kec. Tirtayasa Kab. Serang 42193	201.600.000	144.000.000	-	71,43%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
189	SMKS	MUTAHIR	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Kp. Gerendong Cisema	304.000.000	222.400.000	-	73,16%
190	SMKS	NU CIRUAS	SMK	Kabupaten Serang	JLN. CIPTAYASA KM 03 KAMPUNG KADIKARAN KEC. CIRUAS	260.800.000	86.400.000	-	33,13%
191	SMKS	NUR EL FALAH	SMK	Kabupaten Serang	JL. KH. ABDUL KABIER KUBANG PETIR SERANG	624.200.000	489.800.000	-	78,47%
192	SMKS	NURUL MUHTADIIN	SMK	Kabupaten Serang	JL.RAYA JAKARTA - SERANG KM 20 KIBIN	401.600.000	292.800.000	-	72,91%
193	SMKS	PELAYARAN BAHARI JAYA	SMK	Kabupaten Serang	BUKIT PELAMUNAN PERMAI (KOMPLEKS SANKYU)	89.600.000	129.600.000	-	144,64%
194	SMKS	PRESTASI CIKANDE	SMK	Kabupaten Serang	Perum Cikande Permai I.7 Kp Cimasuk	505.600.000	536.000.000	-	106,01%
195	SMKS	PRIMA MANDIRI	SMK	Kabupaten Serang	JL.RAYA SERANG CILEGON KM.09 PEJATEN SERANG	168.200.000	158.600.000	-	94,29%
196	SMKS	PUTRA TAMA MANDIRI	SMK	Kabupaten Serang	JL. CIKANDE-KOPO KM.12 KP. PADAHAHAN DESA CIDAHAU KEC. KOPO	529.600.000	472.000.000	-	89,12%
197	SMKS	RAUDHATUL MUAWANAH	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Tambak Pamarayan Km. 04 Desa Nagara Kec. Kibin	273.600.000	214.400.000	-	78,36%
198	SMKS	RAUDOTUSSALAM	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Otonom Songgom Jaya Cikande Km. 03 Kode Pos 42186 Serang - Banten	772.800.000	772.800.000	-	100,00%
199	SMKS	TAJIMALELA	SMK	Kabupaten Serang	KP.BOJONG LOA DS.PAMARAYAN	347.200.000	324.800.000	-	93,55%
200	SMK	SULTHAN AGUNG TIRTAYASA	SMK	Kabupaten Serang	TAMAN MAKAM PAHLAWAN SULTHAN AGUNG TIRTAYASA	249.600.000	326.400.000	-	130,77%
201	SMK	SUWARDANA CARENANG	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Warung Selikur Km. 08 Bojonglo RT/RW 001/001	184.000.000	105.600.000	-	57,39%
202	SMKS	YANISBA BOARDING SCHOOL PONTANG	SMK	Kabupaten Serang	JL. CIPTAYASA KM. 02 KP. KUBANG BAHAD KEC. PONTANG KAB. SERANG PROV. BANTEN	161.600.000	92.800.000	-	57,43%
203	SMKS	YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU	SMK	Kabupaten Serang	JL. GRIYA SERDANG INDAH NO.229 SERDANG, KRAMATWATU, SERANG, BANTEN	1.081.600.000	974.400.000	-	90,09%
204	SMK	TERPADU AL WAHDAH	SMK	Kabupaten Serang	PERUM TAMAN SEJAHTERA KP. KANDANG	916.800.000	848.000.000	-	92,50%
205	SMK	T GLOBAL 2 BANDUNG	SMK	Kabupaten Serang	JLN. MODERN- SERDANG KP. CIWIRU DS. BABAKAN KEC BANDUNG SERANG	532.800.000	520.000.000	-	97,60%
206	SMK	YASBAH CARENANG	SMK	Kabupaten Serang	Jl. WARUNG SELIKUR TANARA KM 8	272.000.000	272.000.000	-	100,00%
207	SMK	YASDIKHA	SMK	Kabupaten Serang	JL. OTONOM GABUS BINONG KM 4	168.000.000	88.000.000	-	52,38%
208	SMK	RISHA	SMK	Kabupaten Serang	KEC. PADARINCANG	-	99.200.000	-	#DIV/0!
209	SMK	JAMIATUL IKHWAN	SMK	Kabupaten Serang	KEC. TUNJUNG TEJA	-	65.600.000	-	#DIV/0!
210	SMK	AL KHAIRIYAH CIOMAS	SMK	Kabupaten Serang	KEC. CIOMAS	-	131.200.000	-	#DIV/0!
211	SMK	YAUMIN MULTI PROGRAM	SMK	Kabupaten Serang	PERUM CIKANDE PERMAI BLOK JF	150.600.000	161.800.000	-	107,44%
212	SMK	AL IKHLAS LEGOK	SMK	Kabupaten Serang	Kp. Bojongkamal RT/RW. 003/003	785.700.000	826.200.000	-	105,15%
213	SMK	ANAK BANGSA RAJEG	SMK	Kabupaten Serang	kp. Jawaringan RT/RW 03/03 Ds. Sukamanah	288.360.000	275.400.000	-	95,51%
214	SMK	AN-NABILAH	SMK	Kabupaten Serang	Jl. Syech Nawawi Tanara Km. 8	176.580.000	187.920.000	-	106,42%
215	SMK	ASSALAM JAYANTI	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl.Raya Serang Km.35 Kp.Gandasari	137.700.000	135.994.800	-	98,76%
216	SMK	AS-SALIMIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. KH. Salim Kp. Kulungbaya RT/RW 008/002	217.080.000	168.480.000	-	77,61%
217	SMK	AZ ZAHRA SEPATAN	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Pakuhaji Km.11 Kp. Pisangan Sentra Rt. 04/02	1.223.100.000	1.342.980.000	-	109,80%
218	SMK	BAKTI ISLAM NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl.Raya Kresak Km.11	142.560.000	103.680.000	-	72,73%
219	SMK	BANI IHSAN	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Cadas - Kukun Kp. Leles KM. 5,6 Kelurahan Sindangari Kecamatan Pasar Ke	254.340.000	255.960.000	-	100,64%
220	SMK	CAHAYA PERTIWI	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Kresak Km 0,5	314.280.000	56.700.000	-	18,04%
221	SMK	CENDEKIA BHAKTI MURI	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Kresak Km. 2.8 Simpang Tiga Parahu Gg. Masjid	281.880.000	388.800.000	-	137,93%
222	SMK	CENDIKIA BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Pagedangan No .19 RT/RW 03/03	246.240.000	294.840.000	-	119,74%
223	SMK	DARUL MUIN	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Kalibaru Ilir Rt. 006/007	144.180.000	101.922.200	-	70,69%
224	SMK	DARUL ULUM MAUK	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Tanjung Kait Kp. Kebon Kelapa	278.640.000	191.160.000	-	68,60%
225	SMK	GARUDA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Jawa Ringan RT 001 RW 002 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg	163.620.000	165.162.000	-	100,94%
226	SMK	GEMA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JLn Mauk KM 16 Nomor 7	56.700.000	34.020.000	-	60,00%
227	SMK	HARAPAN UMMAH	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl.KH.Jamhari Kp.Jambu Rt.02/01	168.480.000	134.460.000	-	79,81%
228	SMK	INSAN AQILAH 5 RAJEG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KOBET DESA SUKAMANAH RAJEG	176.580.000	225.180.000	-	127,52%
229	SMK	INSAN KAMIL TARTILA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL Raya Legok KM. 06 No. 89	200.880.000	173.340.000	-	86,29%
230	SMK	INSAN MADANI	SMK	Kabupaten Tangerang	Perum Telaga Bestari Blok F	151.920.000	161.640.000	-	106,40%
231	SMK	Insan Teratai	SMK	Kabupaten Tangerang	Jln Kalimati RT.012 / RW.010, Gelam Jaya, Pasar Kemis	147.060.000	155.280.000	-	105,59%
232	SMK	ISLAM AL UMM	SMK	Kabupaten Tangerang	JL H. MARFU RANCALABUH	233.280.000	173.340.000	-	74,31%
233	SMK	ISLAM CENDEKIA MULIA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. KH.M.Hasan Rawalini RT. 03/06	53.460.000	40.500.000	-	75,76%
234	SMK	Islam Insan Mulia	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Gunung Batu RT/RW 04/05	965.520.000	1.004.400.000	-	104,03%
235	SMK	ISLAM IQRO PASAR KEMIS	SMK	Kabupaten Tangerang	Jalan Otonom Pasar Kemis - Cikupa	311.040.000	411.480.000	-	132,29%
236	SMK	ISLAM YAPSI AL AMIR	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KH. AMIRUDDIN BENYAWAKAN DESA KLEBET	174.960.000	89.100.000	-	50,93%
237	SMK	IT NUR ANTIKA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL KADU MASJID DESA PETE	150.660.000	131.220.000	-	87,10%
238	SMK	KARMEL	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Permata TangerangBlok DC 01 NO.72-111 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang-Banten	249.120.000	256.152.220	-	102,82%
239	SMK	Kihajar Dewantara	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Kp. Ranca Buaya RT/RW 03/01	443.880.000	398.520.000	-	89,78%
240	SMK	KIRANA TALENTA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KP. DADAP RT. 002 RW 02	474.660.000	513.540.000	-	108,19%
241	SMK	KUTABUMI 1	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Cadas Kukun KM. 02 Kp. Pangodokan RT. 003 RW. 002	664.200.000	609.120.000	-	91,71%
242	SMK	MAHAKARYA CIKUPA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Serang Km 14 Pengkolan Pasirgadung	518.400.000	555.660.000	-	107,19%
243	SMK	MITRA PERMATA	SMK	Kabupaten Tangerang	Perum Villa Permata Blok D8 No. 1	417.520.000	401.320.000	-	96,12%

NOSKPK	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
244	SMK MUTIARA BANGSA 6	SMK	Kabupaten Tangerang	Villa Permata Regency 2 Blok CB 01 No. 39B	236.160.000	224.820.000	-	95,20%
245	SMK MUTIARA INSAN NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Rajawali Pulo No. 02 Kampung Nagreg RT/RW 04/02	176.580.000	215.460.000	-	122,02%
246	SMK NURUL HUDA BALARAJA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM.26 BALARAJA TANGERANG	69.660.000	48.600.000	-	69,77%
247	SMK NURUL HUDA CURUG WETAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL MADRASAH DESA CURUG WETAN	560.000	218.700.000	-	39053,57%
248	SMK NUSANTARA SOLEAR	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Wisata Keramat Solear Kp. Pasirkiang RT.002/RW.02 No.12	168.480.000	170.100.000	-	100,96%
249	SMK PENERBANGAN AERO DIRGANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL ISLAMIC RAYA KELAPA DUA	155.520.000	178.200.000	-	114,58%
250	SMK PERJUANGAN BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jln Kresek - Gandaria Kp. Kebon Kirai RT 05/02 Ds.Talok Kec.Kresek	243.000.000	241.380.000	-	99,33%
251	SMK PILAR NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl.Raya Cadas Kukun Kp.Leles,RT.002/004 Desa Pangadengan, Kec.Pasar Kemis 15560	241.380.000	336.960.000	-	139,60%
252	SMK PLUS MULTIMEDIA AS-SAADAH 2	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA RAWA KIDANG RT 14 RW 03	545.940.000	545.940.000	-	100,00%
253	SMK RAUDLATUL FIKRAH	SMK	Kabupaten Tangerang	Kp. Rimpak Kulon Rt 03/06	624.960.000	715.680.000	-	114,52%
254	SMK RIYADUL BASSORIIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	Kp. Cibugel RT. 04/04 Desa Cibugel	116.280.000	96.840.000	-	83,28%
255	SMKS AL AMANAH	SMK	Kabupaten Tangerang	PUSKESMAS SINDANG JAYA	814.860.000	798.660.000	-	98,01%
256	SMKS AL-ANSHOR CIRARAB	SMK	Kabupaten Tangerang	Kp.Cirarab RT.02 RW.01 Desa Cirarab	289.980.000	255.960.000	-	88,27%
257	SMKS AL AROBI RANCAILAT	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA BALARAJA KRONJO KP. CAYUR DESA RANCAILAT	211.860.000	117.900.000	-	55,65%
258	SMKS AL BADAR	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA GEMBONG - CARIU KP. DANGDEUR	1.551.960.000	1.551.960.000	-	100,00%
259	SMKS AL BARKAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA CUKANGGALIH II CURUG	202.500.000	157.140.000	-	77,60%
260	SMKS AL FALAHIIYAH (ALFA)	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. CAMBAY	422.820.000	369.360.000	-	87,36%
261	SMKS AL FATTAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARYA JAYA SANTIKA DESA PASIR BOLANG KEC. TIGARAKSA	119.880.000	35.640.000	-	29,73%
262	SMKS AL GINA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KH. SA ADULLAH KM. 5 KP. PONDOK LOR	1.391.580.000	1.261.901.200	-	90,68%
263	SMKS AL HAFIDZ	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. KH. Dahlan Hafidz No. 4 Kp. Masjid RT 07/02	199.260.000	186.300.000	-	93,50%
264	SMKS AL HASANAH JAYANTI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM. 35 JAYANTI - TANGERANG	157.140.000	123.120.000	-	78,35%
265	SMKS AL-HASYIMIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. PASAR DAON RT. 001/003	218.700.000	191.160.000	-	87,41%
266	SMKS AL HIKMAH CURUG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PLP CURUG KM. 02 NO. 108	1.820.880.000	1.820.880.000	-	100,00%
267	SMKS AL HIKMA TELUK NAGA	SMK	Kabupaten Tangerang	KAMPUNG PANGKALAN	445.500.000	379.080.000	-	85,09%
268	SMKS AL HUSNA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARYA JAYA SENTIKA TIGARAKSA	769.140.000	825.840.000	-	107,37%
269	SMKS AL MULTAZAM SEPATAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KEDAUNG BARAT SEPATAN	513.540.000	385.426.700	-	75,05%
270	SMKS AL MUSTAFIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. DS. RANCABANGO	283.500.000	143.968.500	-	50,78%
271	SMKS AL MUSTAFIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. DS. RANCABANGO	126.360.000	0	-	0,00%
272	SMKS ANGKASA 1 SEPATAN	SMK	Kabupaten Tangerang	OTISTA RAYA MAUK KM. 7 CADAS, SEPATAN - TANGERANG	157.140.000	134.460.000	-	85,57%
273	SMKS ANGKASA 2 SEPATAN	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA MAUK KM 7 CADAS TANGERANG	218.700.000	140.940.000	-	64,44%
274	SMKS ANISA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KRESEK KP. PEGEUH RT. 11/03	207.360.000	208.980.000	-	100,78%
275	SMKS AN NUR BUNAR	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. DESA BUNAR KP. SINDANGASIH	230.040.000	220.320.000	-	95,77%
276	SMKS AR RUSLAN	SMK	Kabupaten Tangerang	KP.LEUWEUNG GEDE RT.03/RW.05	89.100.000	110.160.000	-	123,64%
277	SMKS ASSALAM CURUG	SMK	Kabupaten Tangerang	JALAN PASIRANDU	50.220.000	16.175.000	-	32,21%
278	SMKS ATISA DIPAMKARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. VILLA PERMATA KOMPLEK VIHARA VAJRA BUMI NUSANTARA LIPPO KARAWACI	286.380.000	265.320.000	-	92,65%
279	SMKS AT THOYYIBAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. CIRUMPAK ILIR	194.400.000	129.500.000	-	66,62%
280	SMKS AVICENA RAJEG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA RAJEG-MAUK KM.1	1.743.120.000	2.076.840.000	-	119,14%
281	SMKS BANI ADN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA CANGKUDU CISOKA KP. BANOGA RT 013 RW 04	225.180.000	207.334.500	-	92,08%
282	SMKS BANI USMAN MANUNGAL	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KRESEK KM. 06 KP. TARIKOLOT RT. 07/03	273.780.000	518.400.000	-	189,35%
283	SMKS BERSAMA	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. PABUARAN RT.007/ RW.02 DUKUH CIKUPA	71.280.000	59.940.000	-	84,09%
284	SMKS BINA AM MAMUR	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA SERANG KM 12,5	476.280.000	411.480.000	-	86,39%
285	SMKS BINA INSANI CIJERUK	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Pasar Bolang NO.1	379.080.000	383.940.000	-	101,28%
286	SMKS BINA INSANI CISAUK	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA GUNUNG MALOKO KM. 3,7 Kp. Dukuh RT. 04/02	973.260.000	1.034.820.000	-	106,33%
287	SMKS BINA INSAN MANDIRI KEMIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA LEGOK SUKAMAJU RT. 08/02	335.340.000	251.100.000	-	74,88%
288	SMKS BINA INSAN NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JALAN RAYA SERANG KM 26 BLOK KUD BALARAJA	127.980.000	136.080.000	-	106,33%
289	SMKS BINA KARYA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PASARKEMIS KM. 6,5 GG. PESANTREN KP. CILONGOK	192.780.000	215.460.000	-	111,76%
290	SMKS BINA MANDIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA CADAS KUKUN KM. 2,5 RT. 03/02	29.160.000	38.880.000	-	133,33%
291	SMKS BINA MANDIRI PAGEDANGAN	SMK	Kabupaten Tangerang	Kp.Kandang RT/RW 006/001	225.180.000	236.419.800	-	104,99%
292	SMKS BINA MANDIRI TELUKNAGA	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. KALI JAYA RT. 02/08	283.500.000	288.360.000	-	101,71%
293	SMKS BINA POTENSI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. CADAS KUKUN KP. LELES RT. 007 / RW..04 PANGADEGAN	259.200.000	333.720.000	-	128,75%
294	SMKS BINA PUTRA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. H.SUPRIYADI	426.060.000	340.200.000	-	79,85%
295	SMKS BINONG PERMAI	SMK	Kabupaten Tangerang	PERUM BINONG PERMAI CURUG	1.427.220.000	1.446.660.000	-	101,36%
296	SMKS BINTANG NUSANTARA SCHOOL	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. GATOT SUBROTO TANAH MERAH	477.540.000	571.500.000	-	119,68%
297	SMKS CEMERLANG	SMK	Kabupaten Tangerang	SUKA KARYA	174.960.000	176.580.000	-	100,93%
298	SMKS CITRA MADANI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL PERUM DAON INDAH PRIMA RT 002/03	448.740.000	563.760.000	-	125,63%
299	SMKS CITRA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.RAYA PANONGAN RT.07/05	4.193.820.000	4.193.820.000	-	100,00%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	300	SMKS DAARUL FALAHIIYAH	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. PANGGANG RT. 004 RW.03	53.460.000	55.080.000	-	103,03%
	301	SMKS DAARUT TAUFIQ	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA KEMIRI NO. 34	243.000.000	267.300.000	-	110,00%
	302	SMKS DARUL ISHLAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JLN RAYA SERANG KM 35	523.260.000	474.660.000	-	90,71%
	303	SMKS DARUSSALAM	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. H. MASIRUN NO. 32	233.280.000	254.340.000	-	109,03%
	304	SMKS DHARMA BHAKTI ADY	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. TAMAN ADIYASA CISOKA RT. 07/02	228.420.000	186.300.000	-	81,56%
	305	SMKS DIRGANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. MAUK KM. 16 BUARANJATI	34.020.000	30.780.000	-	90,48%
	306	SMKS EKA DHARMA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KRESEK RT. 01/04 KP. TEGAL ASIH SELON	66.420.000	63.180.000	-	95,12%
	307	SMKS GAPURA KASIH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PERANCIS PERUM TAMAN DADAP INDAH NO. 5	124.380.000	119.520.000	-	96,09%
	308	SMKS GAPURA PERTIWI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KRONJO KM. 1,2	187.920.000	186.300.000	-	99,14%
	309	SMKS GEMA BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Raya Cisoka - Cangkudu Kp. Cilaban RT.13/04	1.419.120.000	1.419.120.000	-	100,00%
	310	SMKS GLOBAL INSAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. LEGOK RAYA GAWIR NO. 9	129.600.000	105.300.000	-	81,25%
	311	SMKS GLOBAL TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL RAYA KEDAUNG BARAT KM 14 SEPATAN TIMUR	327.240.000	327.240.000	-	100,00%
	312	SMKS HANJUANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA MAUK - PASAR KEMIS KM. 2 KP. SAWAH CILADOG	358.020.000	367.740.000	-	102,71%
	313	SMKS HARAPAN BANGSA KEMIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. NIBUNG KARANG ANYAR KEMIRI	163.620.000	149.034.000	-	91,09%
	314	SMKS HARAPAN BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Kp. Sarakan Rt.03/04 Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang-Banten	181.440.000	207.360.000	-	114,29%
	315	SMKS IBNU MASKI	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Pasar Bolang	218.700.000	186.300.000	-	85,19%
	316	SMKS ILHAMI KEMIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	JLN RAYA RANCA LABUH NO.8	489.240.000	416.340.000	-	85,10%
	317	SMKS INSAN MADANI PALASARI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. PANDAWA RT. 001 RW. 004 PALASARI	406.620.000	353.160.000	-	86,85%
	318	SMKS ISLAM AL KHOIROT	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. GEBANG	168.480.000	165.240.000	-	98,08%
	319	SMKS ISLAMIC VILLAGE TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ISLAMIC RAYA NO. 1 KELAPA DUA	441.900.000	501.840.000	-	113,56%
	320	SMKS Islam Informatika	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl Raya Syekh Nawawi No 20 Karang Jetak	163.620.000	174.960.000	-	106,93%
	321	SMKS JAYA BUANA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. BEDENG - TAMIANG	4.190.940.000	4.190.940.000	-	100,00%
	322	SMKS KARYA BANGSA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA MUNJUL PERMAI NO. 99	717.660.000	605.880.000	-	84,42%
	323	SMKS KARYA PEMBANGUNAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. LAPANGAN BOLA NO. 36	596.160.000	805.140.000	-	135,05%
	324	SMKS KESEHATAN BHAKTI INSAN PERSADA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KUTABUMI	42.120.000	14.580.000	-	34,62%
	325	SMKS KESEHATAN BINA PRESTASI TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA MAUK KM. 15 GG SOLO II NO. 99	134.460.000	89.100.000	-	66,27%
	326	SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. AMD No. 9 Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	294.840.000	291.600.000	-	98,90%
	327	SMKS KHARISMA PANONGAN	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA RANCA IYUH KORELET	1.057.860.000	1.057.860.000	-	100,00%
	328	SMKS KORPRI 02 BALARAJA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.RAYA SERANG KM.23,5 BALARAJA	186.300.000	265.680.000	-	142,61%
	329	SMKS KORPRI 1	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KI MAS LAENG TIGARAKSA	93.960.000	0	-	0,00%
	330	SMKS KUSUMA BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ASTER IV BUMI INDAH TAHAP 1	818.100.000	868.320.000	-	106,14%
	331	SMKS LABSCHOOL TANGERANG RAYA	SMK	Kabupaten Tangerang	JALAN RAYA KP. MELAYU	271.800.000	189.180.000	-	69,60%
	332	SMKS LENTERA HARAPAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RUMAH KAYU GOEN NO. 1 RT 003 RW 02	129.600.000	95.551.000	-	73,73%
	333	SMKS LUSIANA TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. NUSA DUA IV NO.48 PERUMNAS II TANGERANG	87.480.000	100.440.000	-	114,81%
	334	SMKS MAESTRO	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KRAMAT PAKUHAJI KM. 3,5 DESA KAYU AGUNG	228.420.000	205.715.000	-	90,06%
	335	SMKS MANDIRI 1 PANONGAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERDANGKULON	348.300.000	254.340.000	-	73,02%
	336	SMKS MANDIRI 2 BALARAJA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.RAYA KRESEK KM.0,5 BALARAJA	874.800.000	712.800.000	-	81,48%
	337	SMKS MARIA MEDIATRIX	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.PINUS II NO. 1 PONDOK REJEKI	192.420.000	174.600.000	-	90,74%
	338	SMKS MATHLAUL ANWAR BUARANJATI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. Raya Mauk Km. 16 Kec. Sukadiri Kab. Tangerang	578.340.000	511.920.000	-	88,52%
	339	SMKS MATHLAUL ANWAR	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PEMDA TIGARAKSA	155.520.000	160.380.000	-	103,13%
	340	SMKS MATHLAUL HUDA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PS. BOLANG JENGGOT KP. PARIDAN	210.600.000	122.870.000	-	58,34%
	341	SMKS MEDIA INFORMATIKA	SMK	Kabupaten Tangerang	BOJONG NANGKA KELAPADUA	166.860.000	147.420.000	-	88,35%
	342	SMKS MIFTAHUL JANNAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM.14,5	1.014.120.000	1.014.120.000	-	100,00%
	343	SMKS MIFTAHUL KHAER	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. DIKLAT PEMDA KP.BABAKAN	401.760.000	393.660.000	-	97,98%
	344	SMKS MUTIARA BANGSA KEMIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA KEMIRI KEC. KEMIRI KAB. TANGERANG	717.660.000	780.840.000	-	108,80%
	345	SMKS MUTIARA BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA KRESEK-GANDARIA	318.780.000	268.560.000	-	84,25%
	346	SMKS NURUL AMIN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA GANDARIA KRONJO	395.280.000	299.700.000	-	75,82%
	347	SMKS NURUL FALAH	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Kp. Rawawaluh Rt/Rw. 005/004	123.120.000	119.880.000	-	97,37%
	348	SMKS NURUL FALAH TIGARAKSA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARYA JAYA SANTIKA TIGARAKSA	183.060.000	184.680.000	-	100,88%
	349	SMKS NURUL HIKMAH	SMK	Kabupaten Tangerang	KH. AMSIR	500.580.000	456.840.000	-	91,26%
	350	SMKS NURUL MUTTAQIEN	SMK	Kabupaten Tangerang	KH.MASDUKI NO.22 KP.RANCAMANEUH TIGARAKSA	288.360.000	236.520.000	-	82,02%
	351	SMKS NUSA JAYA TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	NUSA DUA IV ATAS NO. 48	571.860.000	552.420.000	-	96,60%
	352	SMKS NUSANTARA GLOBAL	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KH. MUALIM LIMAR RT. 007/004	77.760.000	244.620.000	-	314,58%
	353	SMKS PANCAKARYA 2 TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. PERUMAHAN BINONG PERMAI BLOK EE39/09	163.620.000	147.413.350	-	90,09%
	354	SMKS PANTURA 1 MAUK	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA MAUK KM. 20	178.200.000	150.660.000	-	84,55%
	355	SMKS PASUNDAN TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. SAWO III/NO.26 PERUMNAS I	56.700.000	55.080.000	-	97,14%

NOSKPK	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
356	SMKS PATRIOT NUSANTARA TELUKNAGA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl.Patriot Kp.Cogreg Rt.00602 Kel. Teluk Naga	191.160.000	159.045.600	-	83,20%
357	SMKS PEMBANGUNAN TIGARAKSA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARIA JAYA SENTIKA NO.45 TIGARAKSA TANGERANG	103.680.000	76.140.000	-	73,44%
358	SMKS PENERBANGAN DIRGHANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Seneca No. 2 Komplek PPIC, Bandara Budiarto	315.540.000	302.580.000	-	95,89%
359	SMKS PERINTIS 1 SEPATAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KUTABUMI	202.500.000	205.740.000	-	101,60%
360	SMKS PERMATA KEMIRI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KECAMATAN KEMIRI	594.540.000	461.700.000	-	77,66%
361	SMKS PERSADA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PASARKEMIS KM. 6 RT. 02/04 NO. 3	184.680.000	181.440.000	-	98,25%
362	SMKS PGRI 1 BALARAJA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM.24.5 BALARAJA	2.238.840.000	2.238.840.000	-	100,00%
363	SMKS PGRI 31 LEGOK	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ALUN-ALUN KECAMATAN LEGOK	646.380.000	753.300.000	-	116,54%
364	SMKS PGRI CIKUPA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM. 13.1 SUKADAMAI	419.580.000	458.460.000	-	109,27%
365	SMKS PGRI SUKAMULYA	SMK	Kabupaten Tangerang	KP. CEPLAK RT. 001/001	568.620.000	604.260.000	-	106,27%
366	SMKS PLUS PAKUHAJI	SMK	Kabupaten Tangerang	JALAN NAGREG RT.001 RW.09	810.000.000	920.160.000	-	113,60%
367	SMKS PRIMA BAKTI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. CITRA RAYA TIMUR no 2 Ds. CIAKAR Kec. PANONGAN	439.020.000	442.380.000	-	100,77%
368	SMKS PRISMA NUSANTARA	SMK	Kabupaten Tangerang	DESA PASIR KRESEK RT.04 RW.02 KRESEK	79.380.000	76.140.000	-	95,92%
369	SMKS PUJANGGA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. Raya Cikupa Kp. Teureup	622.080.000	892.620.000	-	143,49%
370	SMKS PUSTEK MITRA TIGARAKSA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARIA JAYA SENTIKA 03/01 PASIRBOLANG TIGARAKSA	490.500.000	462.960.000	-	94,39%
371	SMKS PUTRA PERDANA INDONESIA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.RAYA UTAMA BARAT NO.30-32 GRIYA HARSA II BLOK I.10 CITRA RAYA	160.380.000	165.240.000	-	103,03%
372	SMKS PUTRA RIFARA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA BOJONG RENGED	920.160.000	920.160.000	-	100,00%
373	SMKS RAUDLATUL FALAH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM. 33 JAYANTI	97.200.000	97.200.000	-	100,00%
374	SMKS RUHL BAYAN	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA CISAUK-LEGOK KM.4 CISAUK	32.400.000	0	-	0,00%
375	SMKS SEMESTA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA LAPAN CISAUK Kp. CIBADAK RT 03/02	379.080.000	387.180.000	-	102,14%
376	SMKS SIERE CENDEKIA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. Danau Batur Raya No. 62 Perumnas II	432.540.000	432.540.000	-	100,00%
377	SMKS TARUNA KARYA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM. 13.1 CIKUPA	775.980.000	716.040.000	-	92,28%
378	SMKS TEKNOLOGI PILAR BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA MAUK KM. 08 SULANG	1.386.720.000	1.522.800.000	-	109,81%
379	SMKS TEKNOLOGI TELUKNAGA	SMK	Kabupaten Tangerang	RAYA KP. MELAYU KM.09 TELUKNAGA	136.080.000	81.000.000	-	59,52%
380	SMKS TELUK NAGA TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA KAMPUNG MELAYU KM. 9	142.560.000	87.480.000	-	61,36%
381	SMKS TUNAS BANGSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jln raya Francis KM,12 gg tunas bangsa Kosambi timur RT 01 RW 12 NO 45 Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	375.840.000	311.040.000	-	82,76%
382	SMKS TUNAS CISAUK	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. H. M. KADIR RT. 011/05	142.200.000	114.660.000	-	80,63%
383	SMKS TUNAS HARAPAN BALARAJA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA BUNAR DESA SAGA KEC.BALARAJA	100.440.000	113.400.000	-	112,90%
384	SMKS TUNAS HARAPAN	SMK	Kabupaten Tangerang	PERUM BUMI INDAH TAHAP III	442.260.000	464.940.000	-	105,13%
385	SMKS TUNAS PAKUHAJI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. BUARAN BAMBU	613.980.000	584.820.000	-	95,25%
386	SMKS TUNAS PEMUDA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KH. M. DAHLAN NO.11 TANJAKAN	1.202.040.000	1.185.840.000	-	98,65%
387	SMK SUARI TERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	Villa Taman Bandara blok H4/18	30.780.000	21.870.000	-	71,05%
388	SMKS UMUM NABILA	SMK	Kabupaten Tangerang	PERUM TAMAN WALET BLOK SD	100.440.000	84.240.000	-	83,87%
389	SMKS WIPAMA CIKUPA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA SERANG KM.18.5 CIKUPA	1.976.400.000	1.880.820.000	-	95,16%
390	SMKS YADIKA 10 KOSAMBI	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. SALEMBARAN RAYA NO 26 KOSAMBI	583.200.000	583.200.000	-	100,00%
391	SMKS YAPISDA CISOKA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA CISOKA TIGA RAKSA CISOKA	1.404.540.000	1.402.920.000	-	99,88%
392	SMKS YAPPIKA LEGOK	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. LOGAM DS. BABAKAN LEGOK	714.420.000	714.420.000	-	100,00%
393	SMKS YARSI MEDIKA	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. ARIA JAYA SENTIKA PASIRNANGKA RT. 04/05	1.082.160.000	1.091.880.000	-	100,90%
394	SMKS YASPIH	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. KH. MOH. DAHLAN	939.600.000	1.080.540.000	-	115,00%
395	SMKS YUPPENTEK 2 TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL. RAYA PLP KM.4 SUKABAKTI CURUG TANGERANG RT 1 RW 4 Suka	844.020.000	763.020.000	-	90,40%
396	SMKS YUPPENTEK 3 TANGERANG	SMK	Kabupaten Tangerang	JL.RAYA SERANG KM.24 BALARAJA TANGERANG	59.940.000	23.490.000	-	39,19%
397	SMKS YUPPENTEK 5 CURUG	SMK	Kabupaten Tangerang	Jalan Raya Parigi, Kp. Nangewer RT 002/002	1.144.980.000	1.188.720.000	-	103,82%
398	SMK TIGA RAKSA	SMK	Kabupaten Tangerang	Jl. Aria Jaya Santika No 18	165.240.000	158.760.000	-	96,08%
399	SMK IT Bina Pekerti	SMK	Kabupaten Tangerang	KEC. SOLEAR	45.000.000	121.140.000	-	269,20%
400	SMK TARSISIUS VIRETA	SMK	Kabupaten Tangerang	KEC. PASAR KEMIS	45.000.000	148.680.000	-	330,40%
401	SMK TUNAS MUDA UNGGUL	SMK	Kabupaten Tangerang	JLAHMAD YANI KAMPUNG SARAKAN RT.01/08	77.760.000	76.140.000	-	97,92%
402	SMK AL FIKRI	SMK	Kota Cilegon	Jl. Cikerei, Cikerei, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten 42422	174.410.000	167.890.000	-	96,26%
403	SMK AN NIDOMIYAH	SMK	Kota Cilegon	Jl. KH. M. Arif Nomor 99 Link. Kependilan Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon	73.350.000	29.340.000	-	40,00%
404	SMK ISLAM DAARUL FALAH	SMK	Kota Cilegon	Jl. Lingkar Selatan KM.4 RT.006 RW.003	71.720.000	78.240.000	-	109,09%
405	SMK ISLAM TERPADU AL KHAIRIYAH CITANGKIL	SMK	Kota Cilegon	Jl. H. ENGGUS ARJA NO.1 CITANGKIL KEL. CITANGKIL KEC. CITANGKIL KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon	93.900.000	163.990.000	-	174,64%
406	SMK IT TARUNA NUSANTARA	SMK	Kota Cilegon	JL DARMAKUSUMA NO 365 LINK KETILENG BARAT KOTA CILEGON. Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon Kota Cilegon	60.310.000	30.970.000	-	51,35%
407	SMK MAULANA HASANUDDIN	SMK	Kota Cilegon	Jl.Cikerei Link.Bentola Kel.Bulakan Kec.Cibeber-Cilegon Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon	92.910.000	84.760.000	-	91,23%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	408	SMK MIFTAHUL HUDA	SMK	Kota Cilegon	Jl. Pangeran Jayakarta, Link. Terate Udik Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon	123.880.000	117.360.000	-	94,74%
	409	SMK PEMBANGUNAN CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jalan Raya Bukit Baja Sejahtera No.125 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon	68.460.000	104.320.000	-	152,38%
	410	SMKS AL - ARAAF	SMK	Kota Cilegon	Jl. KH. Abdul Jabbar - Jls. Taman Baru, Kec. Citangkil, Kota Cilegon	128.770.000	110.840.000	-	86,08%
	411	SMKS AL INSAN	SMK	Kota Cilegon	Jl. Krotek, Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon	127.140.000	149.960.000	-	117,95%
	412	SMKS AL- ISHLAH	SMK	Kota Cilegon	Jl. AL-ISHLAH No.2, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kode Pos: 42411, Provinsi Banten Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	159.740.000	127.140.000	-	79,59%
	413	SMKS AS SYUHADA AL KHAIRIYAH	SMK	Kota Cilegon	Jl. Bojonegara No. 12 Pegantungan Jombang Wetan Kota Cilegon 42411 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	243.860.000	232.450.000	-	95,32%
	414	SMKS BAHARI CILEGON ABADI CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jl. KH. M. Sadeli Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon	1.328.450.000	1.336.600.000	-	100,61%
	415	SMKS DARUS SYIFA	SMK	Kota Cilegon	Jalan Fatahillah Link. Cilurah Kel. Kepuh Kec. Ciwandan Kota Cilegon Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	301.550.000	267.320.000	-	88,65%
	416	SMKS INFORMATIKA SUKMA MANDIRI	SMK	Kota Cilegon	LINK KUBANG WELINGI NO 16 RT 007 Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	97.800.000	86.390.000	-	88,33%
	417	SMKS MADINATUL HADID	SMK	Kota Cilegon	Jl. S.A. TIRTAYASA SIMPANG , RT.05 RW.01 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	251.020.000	312.960.000	-	124,68%
	418	SMKS MUHAMMADIYAH CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jalan Stasiun No 22 Jombang Kota Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	455.760.000	454.130.000	-	99,64%
	419	SMKS YABHINKA CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jl. Pasar Baru No. 68 Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	1.137.740.000	1.111.660.000	-	97,71%
	420	SMKS YP 17 CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jalan Raden Sastradikarta No. 01 Rt. 001/008 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon	2.224.950.000	2.205.390.000	-	99,12%
	421	SMKS YP FATAHILLAH 1 CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jl. Letjend. R. Soepratto Km.3 Kubang Sepat Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kode Pos 42441 Kota Cilegon Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon	2.366.760.000	2.364.696.068	-	99,91%
	422	SMKS YP FATAHILLAH 2 CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jalan. Letjend R. Soepratto KM.3 Kubang Sepat Citangkil, Kota Cilegon - Banten Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon	573.760.000	533.010.000	-	92,90%
	423	SMKS YPWKS CILEGON	SMK	Kota Cilegon	Jl. Kotabumi No. 1 Komplek KS, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	904.650.000	797.070.000	-	88,11%
	424	SMK AL-KHAERIYAH PENGAMPELAN	SMK	Kota Serang	Jl. Ciwaka Km o3 Kel. Pengampelan Rt 016/001 Kel. Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang	406.400.000	411.200.000	-	101,18%
	425	SMK ARRAHMAN	SMK	Kota Serang	Jln.Raya Petir Km.5 Lingk.Cidadap Kel.Tinggar Kec.Curug Kota Serang Banten 42171 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug Kota Serang	65.600.000	33.600.000	-	51,22%
	426	SMK BANI ZEN	SMK	Kota Serang	Jl. Raya Pandeglang No.KM 05, Karundang. Kec. Serang,	115.200.000	118.400.000	-	102,78%
	427	SMK Buana Madani	SMK	Kota Serang	Jl. Clayam Ling. Legok hilir Kel. Pancalaksana Kec. Curug Kota Serang Banten Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug Kota Serang	67.200.000	24.000.000	-	35,71%
	428	SMK FADILATUL ILMI	SMK	Kota Serang	JL. BAROS - PANCALAKSANA KM. 2 PASIRHUNI CURUG Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang	120.000.000	108.800.000	-	90,67%
	429	SMK KESEHATAN WIDYA HUSADA	SMK	Kota Serang	Jl. Ciawaru Raya. No 26. Cipocok Jaya Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	41.600.000	28.800.000	-	69,23%
	430	SMK MAULANA YUSUF BANTEN	SMK	Kota Serang	Jl. Raya Trip Jamak Sari, Kaligandu, Kec. Serang	9.600.000	0	-	0,00%
	431	SMKS AL AZIZ KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Empat Lima, Serang, Kec. Serang	43.200.000	30.400.000	-	70,37%
	432	SMKS AL BANA TAKTAKAN KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Empat Lima Cipunduh Rt/Rw 01/06 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan Kota Serang	148.800.000	137.600.000	-	92,47%
	433	SMKS AL FALAH MADANI KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Pal 6 - Cikasir Kp. Cidehng Kidul RT. 010 RW. 003 Kel. Kamanisan Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten 42171 Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang	374.400.000	384.000.000	-	102,56%
	434	SMKS AL HAD NUSANTARA KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Panggungjati, Kec. Taktakan, Kota Serang	204.800.000	193.600.000	-	94,53%
	435	SMKS AL WUTSQO	SMK	Kota Serang	Panggungjati, Kec. Taktakan, Kota Serang	104.000.000	49.600.000	-	47,69%
	436	SMKS ARDANIAH KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl Cikulur-Kuranji Komp Pesantren Ardaniah Kp. Pantogan Ds. Panggung Jati Kec. Taktakan Kota Serang Banten Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang	60.800.000	56.000.000	-	92,11%
	437	SMKS ARRASYADIIYAH	SMK	Kota Serang	Jl. Raya Banten km. 04 Cigedong Pamindangan RT. 003/003 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang	454.400.000	305.600.000	-	67,25%
	438	SMKS BANI ISMAIL	SMK	Kota Serang	Jl. 45 Kp. Cikentang, Sayar, Kec. Taktakan,	121.600.000	100.800.000	-	82,89%
	439	SMKS BANTEN JAYA KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Ciwaru Raya no 73 Warung Pojok Kota Serang Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang	51.200.000	35.200.000	-	68,75%
	440	SMKS HARAPAN BANGSA KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jalan Raya Takari Km. 10 Kp. Kubang Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang	155.200.000	140.800.000	-	90,72%
	441	SMKS HASANUDIN 2 SERANG	SMK	Kota Serang	Jln Ciwaru Raya No 26 Serang Banten 42117 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	72.000.000	72.000.000	-	100,00%
	442	SMKS INFORMATIKA KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	JL. KH. AMIN JASUTA NO.15C KALORAN BRIMOB Kelurahan Lontarbaru Kecamatan Serang Kota Serang	558.600.000	542.600.000	-	97,14%
	443	SMKS INSAN AQILAH 2	SMK	Kota Serang	Jl. Raya Serang-Cilegon, Komp. Purna Bhakti, Desa Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Banten 42162 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang	20.800.000	7.200.000	-	34,62%
	444	SMKS INSAN AQILAH	SMK	Kota Serang	Jl. Ciruas-Walantaka Km.01 Kp. Citerepo Ds. Kiara Kec. Walantaka Kota Serang Banten Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang	208.000.000	185.600.000	-	89,23%
	445	SMKS INSAN MADANI	SMK	Kota Serang	Jl. Mayabon POLDA Banten Lingk. Cibekek Kel. Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	163.200.000	124.800.000	-	76,47%

NOS	KPI	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	446	SMKS INTAN HUSADA KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	JALAN JAGARAYU NO. 01 LINGKAR CIRACAS KOTA SERANG Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	168.000.000	156.800.000	-	93,33%
	447	SMKS KESEHATAN HUSADA PRATAMA	SMK	Kota Serang	Jl.Mayor Muslich Lingkar Selatan Cikulur Jelawe Kota Serang 42116 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	520.000.000	510.400.000	-	98,15%
	448	SMKS KIMIA PGRI KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Komp. Perkantoren kav. PGRI Serang, Jl. Letnan Jidun No.25, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115 Kelurahan Lontarbaru Kecamatan Serang Kota Serang	539.200.000	486.400.000	-	90,21%
	449	SMKS MUHAMMADIYAH SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Empat Lima No. 23 Kaujon Kota Serang Banten Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	60.800.000	40.000.000	-	65,79%
	450	SMKS PASUNDAN 1 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	JL. RAYA JAKARTA KM. 3 PAKUPATAN SERANG BANTEN Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	808.000.000	704.000.000	-	87,13%
	451	SMKS PASUNDAN 2 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jalan Letnan Djidun No. 01 Serang Kelurahan Lontarbaru Kecamatan Serang Kota Serang	267.200.000	259.200.000	-	97,01%
	452	SMKS PELAYARAN NUSANTARA	SMK	Kota Serang	Jl. Kp. Baru No.07 Bangdes Panancangan Cipocok Jaya Kota Serang 42124 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	92.800.000	112.000.000	-	120,69%
	453	SMKS PGRI 1 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jalan Ciwaru Raya No. 55 Kota Serang Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang	678.400.000	630.400.000	-	92,92%
	454	SMKS PGRI 2 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jalan KHA. Fatah Hasan No. 258 Kelurahan Sumurpecung Kecamatan Serang Kota Serang	304.000.000	280.000.000	-	92,11%
	455	SMKS PGRI 3 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jalan Sayabulu Kaujon Serang Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	2.520.200.000	2.502.600.000	-	99,30%
	456	SMKS PGRI 4 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Ciruas-Petir Km. 5 Lingk. Cimonor Kel. Cigoong Kec. Walantaka Kota Serang Provinsi Banten Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka Kota Serang	395.200.000	393.600.000	-	99,60%
	457	SMKS SAINS MEDIKA	SMK	Kota Serang	Jl. Ayip Usman, Link. Kebaharan Dukuh, RT/RW:02/04 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang	208.000.000	241.600.000	-	116,15%
	458	SMKS YP 17 KOTA SERANG	SMK	Kota Serang	Jl. Ayip Usman, Unyur, Kec. Serang	51.200.000	35.200.000	-	68,75%
	459	SMK AN-NUQTHAH	SMK	Kota Tangerang	JL. HR.RASUNA SAID GG.H.ISMAIL RT 001/05	273.600.000	280.440.000	-	102,50%
	460	SMK AS-SAIDA TANGERANG SCHOOL	SMK	Kota Tangerang	Jl. KH.Hasyim Ashari KM 03 Poris Plawad Utara Cipondoh Kota Tangerang	250.200.000	234.810.000	-	93,85%
	461	SMK BHAKTI MULYA	SMK	Kota Tangerang	Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Hj. Halimah Rt. 002/01	109.440.000	82.080.000	-	75,00%
	462	SMK BINA INSAN	SMK	Kota Tangerang	Jl. Karyawan 1 No. 1 Rt/Rw 02/02 Karang Tengah	214.290.000	263.880.000	-	123,14%
	463	SMK BINUSTA	SMK	Kota Tangerang	Jln Ki Hajar Dewantoro Gg Musholla Nurul Amal RT 001/002 No 55 Gondrong Cipondoh	138.510.000	114.570.000	-	82,72%
	464	SMK BUDI LUHUR	SMK	Kota Tangerang	Jln. Raden Saleh No 999 Karang Tengah Kota Tangerang	428.040.000	455.400.000	-	106,39%
	465	SMK CAHAYA HATI	SMK	Kota Tangerang	SELAPAJANG JAYA RT. 04/04 NO. 50 SELAPAJANG JAYA	53.010.000	15.240.000	-	28,75%
	466	SMK CIPTA INSANI SCHOOL	SMK	Kota Tangerang	Jl. Prabu Kian Santang Gebang Raya Perluk Kota Tangerang	59.850.000	56.430.000	-	94,29%
	467	SMK CITRA NUSANTARA	SMK	Kota Tangerang	JL. ARYA WANGSAKARA NO. 1 A-C	176.670.000	130.500.000	-	73,87%
	468	SMK DAARUSSAADAH	SMK	Kota Tangerang	Jl. Siliwangi KM 3, Kp. Doyong RT.04/05	111.150.000	135.090.000	-	121,54%
	469	SMK DHARMA SISWA	SMK	Kota Tangerang	JL. Teuku Umar No 76 RT 01 / RW 09	576.270.000	610.470.000	-	105,93%
	470	SMK EXCELLENT 1	SMK	Kota Tangerang	JL. AL MUNAWAROH RT. 02/01 NO. 33	2.392.830.000	2.392.830.000	-	100,00%
	471	SMK ISTIMEWA	SMK	Kota Tangerang	JL. DAAN MOGOT NO 29 C SUKAASIH TANGERANG	42.750.000	58.140.000	-	136,00%
	472	SMK IT ASSAADAH	SMK	Kota Tangerang	Jln. Majlis No 1 RT 04/02 Kota Tangerang	128.250.000	119.700.000	-	93,33%
	473	SMK KESEHATAN BANTEN	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. HASYIM ASHARI GG. HJ. HALIMAH RT. 002/001	530.100.000	418.950.000	-	79,03%
	474	SMK KESEHATAN MUTIARA INSANI	SMK	Kota Tangerang	Jalan Kh. Kuding Rt 05/06	153.900.000	159.030.000	-	103,33%
	475	SMK KI HAJAR DEWANTORO 2	SMK	Kota Tangerang	Jln. KH.Hasyim Ashari KM 9 Pinang Kota Tangerang	164.160.000	157.320.000	-	95,83%
	476	SMK KRISTEN GRACIA	SMK	Kota Tangerang	Kampung Cihahuripan RT 05/05 no 4 Neglasari Kota Tangerang	283.860.000	340.167.900	-	119,84%
	477	SMK MATHLAUL ANWAR	SMK	Kota Tangerang	Jl. Gatot Subroto KM 5,5 KP Ledug Keroncong Jatiuwung Kota Tangerang	147.060.000	138.510.000	-	94,19%
	478	SMK MITRA BISNIS	SMK	Kota Tangerang	Jl. Kp Bayur Rt. 04/04	47.880.000	23.940.000	-	50,00%
	479	SMK MUHAMMADIYAH 2 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	Jln. Raden Fatah RT 01/10 No 100 Parung serab Ciledug Kota Tangerang	751.230.000	735.840.000	-	97,95%
	480	SMK PELITA PERSADA	SMK	Kota Tangerang	Jl. Persada Raya 2 Komplek H.Mujono, Kp Doyong, RT.005/RW.012 Kelurahan Gembor Kecamatan Perluk Kota Tangerang	306.090.000	360.810.000	-	117,88%
	481	SMK Penerus Bangsa	SMK	Kota Tangerang	Jl. Sangiang RT. 005 RW. 015	212.580.000	200.610.000	-	94,37%
	482	SMK PGRI NEGLASARI	SMK	Kota Tangerang	Jl. Markesal Surya Dharma No. 1a RT. 02 RW. 02	177.840.000	174.420.000	-	98,08%
	483	SMKS 2000 AL FITROH	SMK	Kota Tangerang	JL. PANGLIAMA POLIM GG. H. FADHIL	51.300.000	14.535.000	-	28,33%
	484	SMKS ABDI NEGARA	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL	27.360.000	93.897.200	-	343,19%
	485	SMKS AL FUAD	SMK	Kota Tangerang	JL. PERUM PORIS INDAH GG. MASJID AT-TAQWA BLOK TEMPE	27.360.000	13.680.000	-	50,00%
	486	SMKS AL HUSNA	SMK	Kota Tangerang	JL. SISWA DALAM NO: 9-11	466.830.000	554.040.000	-	118,68%
	487	SMKS AL MUIN	SMK	Kota Tangerang	JL. MAULANA HASANUDIN NO 94	325.440.000	352.800.000	-	108,41%
	488	SMKS AMANAH	SMK	Kota Tangerang	DIPATI UKUR - PERUMNAS IV	253.080.000	253.080.000	-	100,00%
	489	SMKS AN NISINIYYAH	SMK	Kota Tangerang	JL. MARSEKAL SURYA DHARMA RT 01/07 NEGLASARI	94.050.000	68.400.000	-	72,73%
	490	SMKS AN NURMANIYAH	SMK	Kota Tangerang	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo (Jl. H. Mencong) No. 62	2.686.410.000	2.460.690.000	-	91,60%
	491	SMKS ARIYA METTA	SMK	Kota Tangerang	Jl. Utama 1 No. 2	477.630.000	469.080.000	-	98,21%
	492	SMKS AR RAHMAN	SMK	Kota Tangerang	JL. DR. SITANALA KARANGSARI NEGLASARI	46.170.000	25.650.000	-	55,56%
	493	SMKS BANDARA	SMK	Kota Tangerang	JL. HUSEN SATRANEGARA RAWA BOKOR	253.080.000	177.634.800	-	70,19%
	494	SMKS BANGUN NUSANTARA	SMK	Kota Tangerang	JL. SAWAH DARAT KETAPANG CIPONDOH TANGERANG	2.017.800.000	2.272.590.000	-	112,63%
	495	SMKS BHAKTI ANINDYA	SMK	Kota Tangerang	JL. KS. Tubun No.11	1.004.310.000	1.000.890.000	-	99,66%

NOS	KPI	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
496		SMKS BHAKTI PERTIWI	SMK	Kota Tangerang	JL. SEDAP MALAM PERUMNAS I KOTA TANGERANG	444.600.000	444.600.000	-	100,00%
497		SMKS BINA BANGSA	SMK	Kota Tangerang	JL. DR.SETIA BUDI NO.8 PARUNG SERAB CILEDUG	2.001.240.000	1.961.910.000	-	98,03%
498		SMKS BINA INSANI	SMK	Kota Tangerang	H MANSUR NO 3	1.759.590.000	1.759.590.000	-	100,00%
499		SMKS BONAVITA	SMK	Kota Tangerang	JL. KANJENG DALEM NO. 32 - 33	534.060.000	429.750.000	-	80,47%
500		SMKS BUDDHI	SMK	Kota Tangerang	IMAM BONJOL NO 41 KARAWACI ILIR	544.320.000	496.440.000	-	91,20%
501		SMKS BUDI MULIA	SMK	Kota Tangerang	JL. HOS COKROAMINOTO NO.1 CILEDUG	457.110.000	477.630.000	-	104,49%
502		SMKS CAHAYA BANGSA	SMK	Kota Tangerang	MAULANA HASANUDIN NO 67	64.980.000	35.910.000	-	55,26%
503		SMKS DEWI SARTIKA	SMK	Kota Tangerang	JL. GATOT SUBROTO KM.5 JATI UWUNG TANGERANG	593.370.000	795.150.000	-	134,01%
504		SMKS DHARMA BHAKTI	SMK	Kota Tangerang	KH. HASYIM ASHARI KM 9	177.840.000	135.090.000	-	75,96%
505		SMKS DHARMA WIDYA	SMK	Kota Tangerang	JLISKANDAR MUDA NO 90 RAWA KUCING	481.050.000	424.620.000	-	88,27%
506		SMKS FARMASI TANGGERANG 1	SMK	Kota Tangerang	Jl. KH Hasyim Ashari No.16, RT.004/RW.002, Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145	566.550.000	588.780.000	-	103,92%
507		SMKS GAMA TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	Jl. HR Rasuna Said RT 06 Rw 01	744.390.000	864.090.000	-	116,08%
508		SMKS GANDASARI	SMK	Kota Tangerang	JL. RAYA PAJAJARAN NOMOR 01.H/96 DUMPIT	337.410.000	313.470.000	-	92,90%
509		SMKS GEMA GAWITA	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II	614.430.000	684.540.000	-	111,41%
510		SMKS GEMILANG MODERNLAND	SMK	Kota Tangerang	JL. JENDERAL SUDIRMAN BY PASS NO. 47 GG. AL-FALAH	247.950.000	254.790.000	-	102,76%
511		SMKS GLOBAL INFORMATIKA	SMK	Kota Tangerang	Jalan Pesantren Rt.01/07	106.020.000	97.470.000	-	91,94%
512		SMKS GLOBAL MANDIRI	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. Hasyim Ashari KM.7 Rt.04/02	401.850.000	396.720.000	-	98,72%
513		SMKS GLOBAL MANDIRI	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. Hasyim Ashari KM.7 Rt.04/02	401.850.000	0	-	0,00%
514		SMKS GRAFIKA	SMK	Kota Tangerang	Jl. Kavling Pemda III No. 262B	793.440.000	713.070.000	-	89,87%
515		SMKS HARAPAN JAYA	SMK	Kota Tangerang	JL. H. MANSUR NO.25	41.040.000	0	-	0,00%
516		SMKS ISLAM BAIDHAUL AHKAM	SMK	Kota Tangerang	JL.VILLA TANGERANG INDAH	1.309.860.000	1.219.230.000	-	93,08%
517		SMKS ISLAM YIA TANGGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO. 56-60	75.240.000	59.850.000	-	79,55%
518		SMKS IT INDRA BANGSA	SMK	Kota Tangerang	JL KH MUSTOFA NO 27 PORIS GAGA BARU BATUCEPER	109.440.000	124.830.000	-	114,06%
519		SMKS KARYA AGUNG	SMK	Kota Tangerang	JL. RADEN FATAH	485.640.000	365.940.000	-	75,35%
520		SMKS KARYA BANGSA	SMK	Kota Tangerang	KP.SINDANGSANA RT.02/02 KEL/KEC.NEGLASARI KOTA TANGERANG 15129	410.400.000	456.570.000	-	111,25%
521		SMKS KESEHATAN ASY SYIFA	SMK	Kota Tangerang	KH. HASYIM ASHARI KM. 9 NO. 36 A	597.330.000	739.260.000	-	123,76%
522		SMKS KESEHATAN BINA INSAN CENDEKIA TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL KENANGAN RAYA UJUNG NO 48	126.540.000	147.060.000	-	116,22%
523		SMKS Kesehatan Harapan Indonesia 3	SMK	Kota Tangerang	Jalan Raden Fatah.Kp Pulo Rt 01/04	63.270.000	66.690.000	-	105,41%
524		SMKS KESEHATAN NUSA HUSADA	SMK	Kota Tangerang	JL. IRIGASI KP. GUNUNG	23.940.000	22.230.000	-	92,86%
525		SMKS KI HAJAR DEWANTORO	SMK	Kota Tangerang	JL. KH HASYIM ASHARI KM. 9 PINANG TANGERANG	2.777.040.000	2.777.040.000	-	100,00%
526		SMKS KRISTEN KANAAN	SMK	Kota Tangerang	JL. MT. HARYONO NO.15	140.760.000	132.210.000	-	93,93%
527		SMKS LAB BUSINESS SCHOOL	SMK	Kota Tangerang	JL.SYEKH-YUSUF PASAR LAMA-SUKASARI KOTA TANGERANG	949.050.000	853.290.000	-	89,91%
528		SMKS MAKARYA	SMK	Kota Tangerang	JL. MASJID RAYA LARANGAN NO. 58	372.780.000	432.630.000	-	116,06%
529		SMKS MANBAUL ULUM	SMK	Kota Tangerang	Jl. Garuda Raya No. 32	222.300.000	179.550.000	-	80,77%
530		SMKS MANDIRI 99	SMK	Kota Tangerang	VILLA MUTIARA PLUIT KM 4	37.620.000	32.490.000	-	86,36%
531		SMKS MANDIRI OTOMOTIF	SMK	Kota Tangerang	JL. PERIUK/VILLA MUTIARA PLUIT KM.4 TANGERANG	22.230.000	17.100.000	-	76,92%
532		SMKS MANGGALA	SMK	Kota Tangerang	JL.HOS COKRO AMINOTO GANG H. ILYAS NO. 63	607.590.000	451.980.000	-	74,39%
533		SMKS MARKUS	SMK	Kota Tangerang	JL. MH.THAMRIN KM 4,5 KEBON NANAS	90.630.000	85.500.000	-	94,34%
534		SMKS MAWAR SARON TAMAN ROYAL	SMK	Kota Tangerang	TAMAN ROYAL 1 KALVING CEMARA BLOK C NO.1	140.220.000	135.090.000	-	96,34%
535		SMKS MITRA BINTARO	SMK	Kota Tangerang	JL.LUMBA-LUMBA NO.3 RT.3/RW.6,	316.350.000	282.150.000	-	89,19%
536		SMKS MITRA INDUSTRI	SMK	Kota Tangerang	JL. PEMBANGUNAN I	92.340.000	85.500.000	-	92,59%
537		SMKS MUHAMMADIYAH 1	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. MAULANA HASANUDDIN NO. 63 TANGERANG	993.510.000	986.670.000	-	99,31%
538		SMKS NURUL HIKMAH	SMK	Kota Tangerang	KH. AMSIR	232.560.000	237.690.000	-	102,21%
539		SMKS NUSANTARA 1 KOTA TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. CISADANE VIII PERUMNAS I	516.420.000	518.130.000	-	100,33%
540		SMKS NUSA PUTRA	SMK	Kota Tangerang	JL. TEUKU UMAR NO. 12	145.350.000	106.020.000	-	72,94%
541		SMKS OTOMOTIF WASKITA	SMK	Kota Tangerang	JL. BENTENG BETAWI	275.310.000	283.860.000	-	103,11%
542		SMKS PANCA KARYA	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN I/3 CIKOKOL	1.571.490.000	1.602.270.000	-	101,96%
543		SMKS PGRI 109 TANGGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL.UNTUNG SUROPATI II NO.14	1.344.600.000	1.344.600.000	-	100,00%
544		SMKS PGRI 11 CILEDUG	SMK	Kota Tangerang	JL.RADEN FATAH	2.930.940.000	2.891.610.000	-	98,66%
545		SMKS PGRI 1 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II	1.424.430.000	1.410.750.000	-	99,04%
546		SMKS PGRI 2 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN I NO.21	107.730.000	0	-	0,00%
547		SMKS PGRI BATUCEPER	SMK	Kota Tangerang	JL. PEMBANGUNAN I	140.220.000	92.340.000	-	65,85%
548		SMKS PGRI LARANGAN	SMK	Kota Tangerang	JL. SISWA NO.5 LARANGAN INDAH	552.330.000	608.760.000	-	110,22%
549		SMKS PGRI PINANG	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. HASYIM ASHARI KM.8 GG. KIJAN RIDI	234.270.000	218.880.000	-	93,43%
550		SMKS PRIMA UNGGUL	SMK	Kota Tangerang	RADEN PATAH NO 98	786.600.000	767.790.000	-	97,61%

NOS	KPL	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	551	SMKS PRUDENT SCHOOL	SMK	Kota Tangerang	JL. TUGU KARYA NO.1A CIPONDOH	450.270.000	450.270.000	-	100,00%
	552	SMKS SETIA BHAKTI	SMK	Kota Tangerang	JL. KI SAMAUN NO.171	737.550.000	652.050.000	-	88,41%
	553	SMKS STRADA DAAN MOGOT	SMK	Kota Tangerang	JL. Kavling Surya RT.02/06 Pabuaran Karawaci Kota Tangerang Banten	1.106.910.000	1.192.410.000	-	107,72%
	554	SMKS TEKNOLOGI INDONESIA	SMK	Kota Tangerang	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	70.110.000	70.110.000	-	100,00%
	555	SMKS TEKNOLOGI INFORMATIKA YPML	SMK	Kota Tangerang	JL. MAULANA HASANUDIN NO.35 SIPON CIPONDOH	596.790.000	586.530.000	-	98,28%
	556	SMKS TIARA AKSARA	SMK	Kota Tangerang	JL. H. ANING SANGIANG JAYA PERIUK	465.660.000	457.110.000	-	98,16%
	557	SMKS TRISULA BHAKTI	SMK	Kota Tangerang	JL. KI AKDAR NO. 22	87.210.000	47.880.000	-	54,90%
	558	SMKS VOCTECH 1 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. RAYA PROKLAMASI NO.55	904.590.000	904.590.000	-	100,00%
	559	SMKS VOCTECH 2	SMK	Kota Tangerang	Jl.Dipati Ukur RT.01/Rw.09 kel. Cibodas Kec. Cibodas	681.120.000	681.120.000	-	100,00%
	560	SMKS YADIKA 4	SMK	Kota Tangerang	JL. RADEN SALEH NO.11 KARANG TENGAH	919.980.000	957.600.000	-	104,09%
	561	SMKS YAPINKTEK	SMK	Kota Tangerang	JL. SILIWANGI NO. 52 RT. 01/04 KEL. KERONCONG KEC. JATIOWUNG KOTA TANGERANG	725.040.000	740.430.000	-	102,12%
	562	SMKS YP KARYA 1	SMK	Kota Tangerang	JL. KH. HASYIM ASHARI KM.03 CIPONDOH	347.130.000	340.290.000	-	98,03%
	563	SMKS YP KARYA 2 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. HASYIM ASHARI GG. KOSAMBI NO.96	326.610.000	389.880.000	-	119,37%
	564	SMKS YP KARYA BANGSA	SMK	Kota Tangerang	JL. PEMBANGUNAN 1 R/Rw. 003/003	788.310.000	909.720.000	-	115,40%
	565	SMKS YUPPENTEK 1 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. VETERAN NO.1 TANGERANG	822.510.000	1.000.350.000	-	121,62%
	566	SMKS YUPPENTEK 4	SMK	Kota Tangerang	JL. RADEN FATAH KM.1	22.230.000	0	-	0,00%
	567	SMKS YUPPENTEK 7 TANGERANG	SMK	Kota Tangerang	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN I NO. 1 RT 07 RW 03	229.140.000	295.830.000	-	129,10%
	568	SMKS AYUDA HUSADA	SMK	Kota Tangerang	KEC. KARAWACI	-	15.390.000	-	#DIV/0!
	569	SMK ELIM	SMK	Kota Tangerang	KEC. TANGERANG	-	41.040.000	-	#DIV/0!
	570	SMK TANGERANG GLOBAL	SMK	Kota Tangerang	Jl. Galeong II no 8	552.330.000	571.140.000	-	103,41%
	571	SMK AL AMANAH	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA PUSPITEK POCIS	901.250.000	973.000.000	-	107,96%
	572	SMK AN-NASHIHIN	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Masjid Jami Al-Latif Kademangan	341.250.000	376.250.000	-	110,26%
	573	SMK INSAN KREATIF	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. H. SARMAH NO.100 RT.04/02 Kel. Parigi, Kec. PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN	87.500.000	68.250.000	-	78,00%
	574	SMK ISLAM FARADISA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Gurame III No. 19 RT/RW 01/01	147.000.000	134.750.000	-	91,67%
	575	SMK KEBANGSAAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA PONDOK AREN NO.31	593.250.000	560.000.000	-	94,40%
	576	SMK KESEHATAN LETRIS INDONESIA 2	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Siliwangi No.55	1.298.500.000	1.298.500.000	-	100,00%
	577	SMK LETRIS INDONESIA 2	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA SILIWANGI NO. 55	3.457.500.000	3.457.500.000	-	100,00%
	578	SMK MEGA BANGSA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Pondok Kacang Raya No.117	250.250.000	232.750.000	-	93,01%
	579	SMK PUSPITA HUSADA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. H. Jamad Gg. Rais No. 9	78.750.000	70.000.000	-	88,89%
	580	SMK PUSTEK SERPONG	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA SERPONG NO.17 PRIYANG	3.825.500.000	3.825.500.000	-	100,00%
	581	SMK PUTRA PERTIWI	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jalan Pondok Cabe Raya No. 57	675.500.000	890.750.000	-	131,87%
	582	SMKS AL FALAH CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	RAYA PAMULANG II / KP.MARUGA RAYA NO. 30	306.250.000	274.750.000	-	89,71%
	583	SMKS AL HIDAYAH CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RE MARTADINATA NO. 07 CIPUTAT	439.250.000	400.750.000	-	91,24%
	584	SMKS AL IKHWANIYAH	SMK	Kota Tangerang Selatan	PANTI ASUHAN KP. CEGER NO. 73	837.750.000	855.250.000	-	102,09%
	585	SMKS ANNAJIYAH	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. PLN NO.80 PONDOK AREN TANGERANG	94.500.000	77.000.000	-	81,48%
	586	SMKS AS-SUUDIYYAH	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. WR. SUPRATMAN NO.7 KEL. CEMPAKA PUTIH	204.750.000	213.500.000	-	104,27%
	587	SMKS BAHAGIA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. KANTOR KELURAHAN PONDOK JAYA	329.000.000	290.500.000	-	88,30%
	588	SMKS BINA INFORMATIKA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Cendrawasih Raya No.9A, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan	601.500.000	599.750.000	-	99,71%
	589	SMKS BINA INSAN NUSANTARA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Suka Mulya II Rt.06/Rw.08	63.000.000	97.934.700	-	155,45%
	590	SMKS BINA KARYA INSAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. MENJANGAN II NO.1 PONDOK RANJI	106.750.000	103.250.000	-	96,72%
	591	SMKS BINA WISATA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Ceger, Ruko Depan Pasar Ceger Pondok Aren	148.250.000	122.000.000	-	82,29%
	592	SMKS BINTANG NUSANTARA BINUSA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. PONDOK AREN-JOMBANG NO. 15	480.750.000	498.250.000	-	103,64%
	593	SMKS DARUSSALAM	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jalan OTISTA NO. 36	2.131.500.000	2.066.750.000	-	96,96%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
594		SMKS DUA MEI	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. H.ABDUL GANI NO.135 CIPUTAT TANGERANG	78.750.000	70.000.000	-	88,89%
595		SMKS DWI PUTRA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. ARIA PUTRA BUKIT NUSA INDAH SERUA CIPUTAT	145.250.000	99.750.000	-	68,67%
596		SMKS FADILAH	SMK	Kota Tangerang Selatan	SETU RAYA PENDIDIKAN II	1.693.500.000	1.693.500.000	-	100,00%
597		SMKS FALATEHAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	AT-TAQWA NO. 2	201.250.000	175.000.000	-	86,96%
598		SMKS FARMASI MINASA MULIA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Ir. H. Juanda, Gg. Masjid Al-Himmah, Ciputat-Tangerang Selatan	59.500.000	87.500.000	-	147,06%
599		SMKS INFORMATIKA CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Wr Supratman No. 50 Pondok Ranji	313.250.000	283.500.000	-	90,50%
600		SMKS IPTEK Tangsel	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Kp. Sengkol Kel. Muncul Kec. Setu	784.000.000	904.750.000	-	115,40%
601		SMKS ISLAM AL FAJAR	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. Aria Putra No. 102 Kedaung	339.500.000	315.000.000	-	92,78%
602		SMKS ISLAMIYAH CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. KHAJAR DEWANTORO NO.23 CIPUTAT TANGERANG	1.681.750.000	1.641.500.000	-	97,61%
603		SMKS ISLAM RUHAMA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. Tarumanegara No. 67	203.000.000	134.650.000	-	66,33%
604		SMKS KESEHATAN LETRIS INDONESIA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL KALIMANTAN I VILLA BINTARO INDAH	678.500.000	710.000.000	-	104,64%
605		SMKS KESEHATAN PRIMA HUSADA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. KELURAHAN JURANG MANGU BARAT PONDOK AREN	52.500.000	28.000.000	-	53,33%
606		SMKS KESEHATAN RIKSA INDRYA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL.RAYA RAWA BUNTU NO. 10 GD STIKES BANTEN, BSD CITY	566.500.000	619.000.000	-	109,27%
607		SMKS KHAZANAH KEBAJIKAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. TALAS I PONDOK CABE ILIR	189.000.000	175.000.000	-	92,59%
608		SMKS LETRIS INDONESIA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL KALIMANTAN I VILLA BINTARO INDAH	1.401.250.000	1.401.250.000	-	100,00%
609		SMKS LINK AND MATCH	SMK	Kota Tangerang Selatan	RAYA TERMINAL PONDOKCABE NO. 95	1.511.500.000	1.562.250.000	-	103,36%
610		SMKS MAHKOTA WISATA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. JAPOS RAYA PONDOK JATI NO.45.b	85.250.000	98.804.500	-	115,90%
611		SMKS MUHAMMADIYAH 01 CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 38 RT 01 RW 03	1.184.750.000	1.249.500.000	-	105,47%
612		SMKS MUHAMMADIYAH 02 TANGERANG SELATAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA PUSPIPTEK GG.ADIL SETU	196.000.000	189.000.000	-	96,43%
613		SMKS MUHAMMADIYAH 3 TANGERANG SELATAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. DEWI SARTIKA GG. NANGKA	1.498.000.000	1.422.750.000	-	94,98%
614		SMKS MUHAMMADIYAH PARAKAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	PENDIDIKAN KOMP. RITAN	182.000.000	187.250.000	-	102,88%
615		SMKS NUSANTARA 1 CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. TARUMANEGARA DALAM NO.1	1.513.750.000	1.470.000.000	-	97,11%
616		SMKS NUSANTARA II KESEHATAN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. TARUMANEGARA DALAM NO. 1 CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN	411.250.000	386.750.000	-	94,04%
617		SMKS PARADUTA BANGSA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Bhayangkara No. 5 RT.04 RW.05	84.000.000	89.250.000	-	106,25%
618		SMKS PARAMARTA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. JOMBANG RAYA GG.TAQWA NO.70	722.750.000	766.500.000	-	106,05%
619		SMKS PARIWISATA PUSPA WISATA PGRI SERPONG	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. PAHLAWAN SERIBU NO. 60 RT 10 RW 4	731.500.000	852.250.000	-	116,51%
620		SMKS PGRI 5 SERPONG	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA PUSPIPTEK SERPONG	652.750.000	703.500.000	-	107,77%
621		SMKS PLUS BLM	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Lengkong kecamatan serpong kota tangerang selatan banten	323.750.000	322.000.000	-	99,46%
622		SMKS PUSPITA BANGSA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. ARIA PUTRA NO.9 CIPUTAT TANGERANG	617.750.000	637.000.000	-	103,12%
623		SMKS SASMITA JAYA 1	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. SURYA KENCANA NO. 2	2.478.000.000	2.754.500.000	-	111,16%
624		SMKS SASMITA JAYA 2	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. SURYA KENCANA NO.1	1.372.000.000	1.344.000.000	-	97,96%
625		SMKS TECHNO MEDIA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. AMPERA KODIKLAT TNI BUARAN SERPONG	150.500.000	245.000.000	-	162,79%
626		SMKS TELEKOM	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. PAMULANG PERMAI II NO.1 PONDOK BENDA PAMULANG TANGERANG	188.500.000	153.500.000	-	81,43%
627		SMKS TI PGRI 11 SERPONG	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL.PAHLAWAN SERIBU NO. 60	763.000.000	868.000.000	-	113,76%
628		SMKS TRIGUNA UTAMA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Ir. H. Juanda Km. 2 Rt. 002/04 Ciputat Timur, Tangerang Selatan	1.170.750.000	1.170.750.000	-	100,00%
629		SMKS UTAMA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. BONJOL NO.98 PONDOK AREN	327.250.000	341.250.000	-	104,28%
630		SMKS WASKITO	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. RAYA PAMULANG PERMAI II NO. 75	899.000.000	935.013.500	-	104,01%

NOS	KP	Nama Penerima	Jenjang	Lokasi	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
631		SMKS YADIKA 5 PONDOK AREN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. JURANGMANGU BARAT RYA NO.25 A PONDOK AREN TANGERANG	1.072.250.000	1.060.599.492	-	98,91%
632		SMKS YAPIA PONDOK AREN	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. KH. WAHID HASYIM NO.18 JURANGMANGU TIMUR - PONDOK AREN	649.250.000	617.750.000	-	95,15%
633		SMKS YAPIPA	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. BHAYANGKARA RAYA PERM PD. PAKULONAN	215.250.000	229.250.000	-	106,50%
634		SMKS YASISKA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Aria Putra Gg Putra Iskandar (Belakang Pom Benis) No.44 RT/RW.09/10	164.500.000	124.250.000	-	75,53%
635		SMK VIA MEDIKA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Wr. Supratman Kp. Utan No.1	45.500.000	26.250.000	-	57,69%
636		SMK YAPPIKA SERPONG	SMK	Kota Tangerang Selatan	Jl. Astek Lengkong Gudang RT/RW 03/09	75.250.000	41.921.905	-	55,71%
637		SMK YMJ CIPUTAT	SMK	Kota Tangerang Selatan	JL. LIMUN No. 27	150.500.000	126.000.000	-	83,72%
638		SMKS MUSIK YAYASAN MUSIK JAKARTA	SMK	Kota Tangerang Selatan	Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	-	7.000.000	-	#DIV/0!
639		BOSKIN SMK SWASTA	SMK	Kota Serang	SERANG	1.404.820	0	-	0,00%
					TOTAL	266.807.444.820	260.553.112.141	-	97,66%

**Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2025**

Lampiran 6.6 Calk

No	SKPD	Nama Penerima	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan (Pengembalian Belanja)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1		PARTAI GOLKAR	Jl. Raya Serang Petir Komplek RSS PEMDA Cipocok Jaya - Serang	4.663.350.000	4.663.350.000	100%	-
2		PARTAI PDI PERJUANGAN (PDIP)	Lingkar Selatan, Jl. H. Muslih Cikulur, Serang - Banten	4.267.825.000	4.267.825.000	100%	-
3		DPD PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(GERINDRA)	jl. Raya Serang - Pandeglang tembong	4.432.160.000	4.432.160.000	100%	-
4		DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI BANTEN	Jl. Raya Petir Serang No. Km3 Cipocok Jaya Serang	2.933.445.000	2.933.445.000	100%	-
5		DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) BANTEN	Jl. KH. Abd Fatah Hasan No 37 Cijawa warung Pojok Serang	3.865.510.000	3.865.510.000	100%	-
6		DPW PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) BANTEN	Jl. Raya Taktakan No.20 Panggungjati Serang	2.213.620.000	2.213.620.000	100%	-
7		DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) BANTEN	Jl. Kiajurno No. 06 Cipocok Jaya	2.833.600.000	2.833.600.000	100%	-
8		DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) BANTEN	Serang	2.625.345.000	2.625.345.000	100%	-
9		DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) BANTEN	Serang	1.088.810.000	1.088.810.000	100%	-
10		DPW PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI BANTEN	Jl. Mayor HM. Muslih No. 50 Linkar Selatan Ciracas- Serang	1.576.975.000	1.576.975.000	100%	-
		TOTAL		30.500.640.000	30.500.640.000	100%	-

Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun Anggaran 2025

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUAYAAN				233.515.036.000	241.247.234.724		103,31%
	SEKOLAH KEBUTUHAN KHUSUS (SKH)				27.086.680.000	26.796.011.518	-	98,93%
	1	SEKOLAH KHUSUS AL-IHSAN 02	Kota Cilegon	Lingkungan Prapatan Kalang Anyar RT.06 RW.01	214.200.000	214.200.000	-	100,00%
	2	SKH MATHLA'UL ANWAR	Kab. Pandeglang	Jl. Prapatan Cimanying	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	3	SKH PERSADA PICUNG	Kab. Pandeglang	Jl. Ahmad 1, Kp. Babakan Teurep	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	4	SKH KORPRI	Kab. Pandeglang	Jl. Ciwasiat No 23 Pandeglang 42213	321.000.000	284.750.000	-	88,71%
	5	SKH DARUL BAYAN	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Teluk Lada Km. 01 Kp. Soge Panimbang	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	6	SKH BAHARI	Kab. Pandeglang	Komp Cipunten Teluk	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	7	SKH PGRI RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	Jl. Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Lebak	246.250.000	260.750.000	-	105,89%
	8	SKH PADESAN	Kab. Lebak	Jl. Pasir tariti No 14 RT.02/05	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	9	SKH ADI SETIA CIKOTOK	Kab. Lebak	Warungkadu no 50	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	10	SKH ASSALAM 01	Kota Tangerang Selatan	CIATER TENGAH RT 02 RW 06	266.050.000	280.550.000	-	105,45%
	11	SKH MUARA SEJAHTERA	Kota Tangerang Selatan	Jl. Trubus II No. 111 RT. 04/04	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	12	SKH ASSALAM 02	Kota Tangerang Selatan	Ciater Tengah RT 02 RW 06	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	13	SKH NURASIH	Kota Tangerang Selatan	Jl. WR. Supratman No.51 Kampung Utan	229.800.000	229.799.850	-	100,00%
	14	SKH MADINA	Kota Serang	Komplek Griya Gemilang Sakti 2 Blok B4 No.4&7	210.000.000	209.964.745	-	99,98%
	15	SKH SAMANTHA	Kota Serang	Link. Panancangan Pasi	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	16	SKH AL KAUTSAR	Kota Cilegon	Jl. Arjuna Kav Blok J 101-102	248.050.000	250.450.000	-	100,97%
	17	SKH TRI DHARMA	Kota Cilegon	Jl. Nuri Perum BCK Blok D22 No. 9	214.200.000	214.200.000	-	100,00%
	18	SKH. AL KHAIRIYAH	Kota Cilegon	Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil	214.200.000	214.200.000	-	100,00%
	19	SEKOLAH KHUSUS SANG TIMUR	Kota Tangerang	Jl. Barata Pahala No. 37	242.450.000	213.899.500	-	88,22%
	20	SKH MARKUS	Kota Tangerang	Jl. Mh. Thamrin Km. 45 Kebon Nanas Tangerang	379.410.000	379.410.000	-	100,00%
	21	SEKOLAH KHUSUS YKDW 02 KOTA TANGERANG	Kota Tangerang	Jl. Teuku Umar No. 76 Nusa Jaya	360.760.000	360.760.000	-	100,00%
	22	SEKOLAH KHUSUS YKDW 01	Kota Tangerang	Jl. Teuku Umar No. 76 Nusa Jaya	562.180.000	562.180.000	-	100,00%
	23	SKH SYAHIDA HARAPAN BUNDA	Kab. Tangerang	Jl. Verdi Timur V Bunderan II Ctra Raya, Kp. Pabuaru	636.350.000	634.850.000	-	99,76%
	24	SKH BHAKTI LUHUR	Kota Tangerang Selatan	Perumahan Bukit Cirendue Blok A-III No.09 RT05/RW	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	25	SEKOLAH KHUSUS PELITA INSANI	Kab. Serang	Margagiri, Jl.raya Serdang-waringin Kurung, Margatari	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	26	SEKOLAH KHUSUS ISTIMEWA	Kota Tangerang	Jl. Daan Mogot No. 29 C	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	27	SKH ANAK MANDIRI	Kota Serang	Jl. Raya Cilegon No 73 A. Kepandean - Serang	210.000.000	209.058.768	-	99,55%
	28	SEKOLAH KHUSUS PELITA NUSANTARA	Kota Tangerang	Jl.Gg.Jambu Rt.001/04 Gondrong	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	29	SEKOLAH KHUSUS ASY SYIFA	Kota Tangerang	Jl. HOS Cokroaminoto No. 16 Larangan	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	30	SEKOLAH KHUSUS YKDW 03	Kota Tangerang	Jl. Teuku Umar No. 76 Nusa Jaya	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	31	SEKOLAH KHUSUS SALSABILAH	Kota Tangerang	Perumahan The Orchid Park Blok N No. 1 Rt. 003/016	223.800.000	223.799.966	-	100,00%
	32	SKH DARMAWATI ARIEF	Kab. Tangerang	Jl.beoraya Blok e 19 No 9-12	540.090.000	540.090.000	-	100,00%
	33	SKH HARAPAN MULYA	Kab. Lebak	Jl. Raya Binuangeun KM.11 Malingping	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	34	SKH MUSTHOFABINAAN UMAT PANDEGLANG	Kab. Pandeglang	Jl. MENES MANDALAWANGI KM.4 KADU PAGER	246.250.000	246.032.200	-	99,91%
	35	SKH ADITIYA SILIH ASIH	Kab. Tangerang	Jl. AMD Serdang Kulon Kp. Serdang RT. 06 RW. 02	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	36	SKH SPECTRUM	Kota Tangerang Selatan	Jl. Masjid Nurul Qomar No. 48 Rt. 02/05	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	37	SKH BOUGENVILLE	Kota Tangerang Selatan	GRAHARAYA BINTARO JAYA BLOK M-1/NO. 19 RT.	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	38	SKH AN NUR	Kota Tangerang Selatan	Jl. Pahlawan Kmp. Dukuh RT.07/01 Kel. Serua Ciputat	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	39	SKH AL-IHSAN 01	Kota Tangerang Selatan	Kp. Perigi Rt. 03/04 No. 19	264.270.000	264.270.000	-	100,00%
	40	SKH DIAN BAHAGIA	Kab. Tangerang	Kp. Cileles Rt 03 Rw 05 Ds. Bantarpanjang Kec. Tigar	229.450.000	229.450.000	-	100,00%
	41	SEKOLAH KHUSUS PELITAAL KAROMAH	Kab. Tangerang	Jl. Raya Serang Km 32	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	42	SKH HEKSAWIYATA	Kab. Tangerang	Jl. Regency 2 Perum Permata Tangerang Blok AE 8/1	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	43	SKH MUTIARAHIKMATULHUDA	Kab. Tangerang	Kp. Sigelung Leuwi RT. 004/001 Ds. Solear Kab. Tang	218.860.000	211.800.000	-	96,77%
	44	SKH CITRA ANINDYA	Kota Tangerang Selatan	Jl. Taman Makam Bahagia Abri No. 388 Parigi Kec. P	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	45	SKH PUTRAPUTRI MANDIRI	Kota Tangerang Selatan	Jl. Aneka Warga No. 51	229.800.000	229.800.000	-	0,00%
	46	SKH NURUL DIYN	Kab. Tangerang	Jl. Baja Raya No. 24 Perumnas li Tangerang	211.800.000	211.024.600	-	0,00%
	47	SKH KEKERABATAN	Kab. Lebak	Jl. M. Amir Hamzah	210.000.000	210.000.000	-	0,00%
	48	SKH YENAIZ	Kota Tangerang	Jl. H. Riwan Rt. 04/14	511.010.000	510.810.000	-	99,96%
	49	SKH MUSLIM CEDEKIA	Kab. Tangerang	Jl. DANAU KELAPADUABLOK 05/5	248.050.000	248.050.000	-	100,00%
	50	SKH SUTMAEMUN	Kab. Serang	Jl. Cikeusal - Petir Ds. Sukaratu	210.000.000	195.000.000	-	92,86%
	51	SKH PURNAMAPANGGARANGAN	Kab. Lebak	JL. RAYA BAYAH - MALINGPING KM. 4	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	52	SKH NURBAYAN 01	Kota Tangerang	JL. METEOROLOGI TANGERANG	290.940.000	290.940.000	-	100,00%
	53	SKH NURBAYAN 02	Kota Tangerang	KOMPLEK CILEDUK INDAH 2 BLOK DB16/12	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	54	SKH MENARAKASHI	Kab. Pandeglang	Jl. KELAPAGADING SELATAN BLOK A3 10 NO. 29	211.800.000	205.209.673	-	96,89%
	55	SKH CARAKAPRATAMA	Kab. Tangerang	VILLATANGERANG ELOK BLOK A 21 No.2	248.050.000	248.050.000	-	100,00%
	56	SKH ATH-THOHARIYYAH 2	Kab. Pandeglang	Jl. KH. ARJASIM KP. SAWAHLEGART. 02/08	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	57	SKH BINACITRAANAK	Kab. Serang	Jl. Simpang Tol Cijujung Kragilan No. 08 Kp. Kebon K	642.250.000	642.250.000	-	100,00%
	58	SKH PANDITA	Kota Serang	CITRAGADING BLOK D6 No. 10,13,14,15 & E5 30,31	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	59	SKH PERMATA	Kota Tangerang Selatan	Perumahan Pondok Pakulonan Blok H 15 No.3	266.050.000	266.050.000	-	100,00%
	60	SKH SAHABAT KITA	Kota Tangerang Selatan	Jl. Jurang Mangru RT.02/02 No.33	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	61	SKH JIPUT MANDIRI	Kab. Pandeglang	Jl. Jiput Caringin Kp. Kadu Bajo RT.004/RW.006	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	62	SKH AL-MUFTI	Kota Tangerang	Jl. OTOH ISKANDARDINATA NO 72 RT 003/003 KAH	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	63	SKH MUTIARAHATIKU	Kota Tangerang Selatan	Jl. Jawa Blok I 4 No 20 nusa Loka BSD Sektor XIV	229.800.000	229.656.216	-	99,94%
	64	SKH SARONGGE	Kab. Lebak	Jl. Raya Kopi Sangiang Kp. Sarongge	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	65	SKH ATH THOHARIYYAH 1	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km 18 Pasar Sodong	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	66	SLB INSAN MULIA	Kab. Tangerang	PERUMAHAN GARDENIASEPATAN BLOK Ano 38-40	293.940.000	293.940.000	-	100,00%
	67	SKH PELANGI ANAKKU	Kota Tangerang	Jl. Villa Mutiara Pluit blok c 6 no 5 Peruk	846.710.000	846.654.000	-	99,99%
	68	SKH ARRAFAT	Kab. Lebak	JL. RAYA BAYAH KM 07 DESAPAGELARAN, KP. NA	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	69	SKH GYTHAKYARA 01	Kab. Pandeglang	JL. MUNJUL TURUS KM. 5 KP. NUNPI RT. 04/04	210.000.000	209.631.000	-	99,82%
	70	SKH GYTHAKYARA 02	Kab. Pandeglang	JL. Kp. Cibango 010/003 Carita - Pandeglang	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	71	SKH ELOK ASRI	Kota Serang	Jl. Angsana Blok Biora Kav. 45 - 47	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	72	SKH BHAKTI LUHUR 02	Kab. Tangerang	JL CITRAKADEMIARAYA BLOK O. 05 NO. 02	285.930.000	285.930.000	-	100,00%
	73	SKH ADRIKAINSANI MANDIRI	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Surianen Pasir Gadung Km 03	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	74	SKH FARKHAN AS SALMAN	Kab. Pandeglang	KP. SOMPOK GIRANG 08/04	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	75	SKH GALUH KINANTI	Kab. Pandeglang	KP. PANDAT 01/02	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	76	SKH GYTHAKYARA 03	Kab. Pandeglang	Kp. Ciputri RT. 001 / RW. 006	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	77	SKH GLOBAL INSANI MADANI	Kab. Serang	Perum Pesona Alam Kencana Blok C Raya	210.000.000	203.523.000	-	96,92%
	78	SKH AL-KARIM	Kab. Pandeglang	KP. GONGGONG 05/06	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	79	SKH AN-NUUR	Kota Tangerang	Jl. SUKABAKTI VII RT 05/15	223.800.000	223.800.000	-	100,00%
	80	SKH BINA INSAN MANDIRI	Kab. Tangerang	PERUM DARU PERMAI BLOK C5 NO. 20 RT 023/05	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	81	SKH GRIYA MANDIRI	Kab. Tangerang	PERUM GRIYAARTHA RAJEG BLOK I2 NO. 9	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	82	SKH MULTI COLOUR LEARNING CENTER	Kota Tangerang Selatan	Ruko Bintaro Baru Jalan Jombang Raya No 28-29	210.000.000	0	-	0,00%
	83	SEKOLAH KHUSUS SAYAP IBU	Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Graha Bintaro No. 33 B RT. 004 RW.01	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	84	SKH MUSTIKA TIGARAKSA	Kab. Tangerang	Perumahan Sudirman Indah Blok G.10/30 RT.002/012	275.340.000	275.340.000	-	100,00%
	85	SKH IDAMAN HATI	Kota Tangerang	Jl. Prabu Siliwangi RT.03 RW.01 Kp. Gembor	260.050.000	260.038.000	-	100,00%
	86	SKH ISLAM TERPADU YARFIN	Kota Tangerang Selatan	Jl. H Jamat Gg. Masjid 1 Kp. Jati No. 10A	266.050.000	266.050.000	-	100,00%
	87	SKH NUR RABBANI	Kab. Serang	Jl. Pasar Cimos Mandalawangi Km. 10 Kp. Peuteuy R	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	88	SKH KARYA INSANI	Kab. Tangerang	Perum Tanjakan Indah Blok D 6 No. 20 - 22	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	89	SKH BHAKTI PUTRA	Kab. Tangerang	Griya Serpong Asri Blok CT 2 No. 7 RT/RW 05/06	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	90	SKH ALGHISAFALABUAN	Kab. Pandeglang	Jl. Kalumpang RT/RW 002/002	210.000.000	246.250.000	-	117,26%
	91	SKH ARISMA	Kab. Pandeglang	Jl. Munjul Turus KM. 01 Komp. Perum Pasanggrahan	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	92	SKH SOFIANA ARRAUF	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Rego Km 1 Kp. Berung	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	93	SKH JANNATUL AULAD	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Serang Km 2.5 Kp. Pasirwaru No 45 Rt 001 Rw	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	94	SKH GENERASI GEMILANG INDONESIA	Kota Tangerang Selatan	Jl. Aria Putra No.41 RT.003 RW.005	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	95	SKH DARU SIFA	Kab. Lebak	Jl. Raya Saketi Malingping Km. 26, Pereweh RT/RW G	246.250.000	246.250.000	-	100,00%
	96	SKH MINDSET SCHOOL	Kota Tangerang Selatan	Jl. Pondok Kacang Prima Gang. Hadi Rt.003 / Rw 005	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	97	SKH KAK SETO	Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Parigi Lama No.3A	229.800.000	229.800.000	-	100,00%
	98	SKH SURYA BANGSA	Kab. Tangerang	Jalan Palem Raja Utara Raya No. 1	211.800.000	211.800.000	-	100,00%
	99	SKH FAUZAN	Kab. Serang	Jl. Raya Bojonegara No.17 Kp. Gedong RT.001/RW.04	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	100	SKH RISMURI JAYA ABADI	Kab. Pandeglang	Jl. Kp. Babakan Karet	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	101	SEKOLAH KHUSUS KARTIKA	Kab. Pandeglang	Jl. Raya Cikeusik Binuangeun KM. 08 Kp. Pamatang B	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	102	SKH AHSAN FIRDAUS	Kab. Pandeglang	Kp. Bojen Lebak RT.003 RW.003	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	103	SKH PERMATA JANNAH	Kab. Serang	Kp. Dumus RT/RW 009/003	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	104	SKH AR RACHMA	Kab. Serang	Perumahan Bumi Baros Blok 13 No. 1 RT/RW 005/005	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	105	SKH HANIFA	Kota Serang	Jl. Empat Lima, Kp. Cipaung RT/RW 04/03	210.000.000	210.000.000	-	100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	106	SKH INSAN MAULANA ASSYAKIM	Kab. Pandeglang	Kp. Pananyaan RT.002 RW.001	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	107	SKH AL MAWADDAH	Kota Serang	Jl. 45 Kaulon Baru RT. 02 RW. 13	210.000.000	210.000.000	-	100,00%
	108	SKH Swasta di Provinsi Banten	Provinsi Banten		44.140.000	0	-	0,00%
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)					103.214.178.000	107.225.611.603		103,89%
	1	SMAS TERPADU AL-QUDWAH	Kabupaten Lebak	SMAS Terpadu Al-Qudwah Alamat: Jl. Maulana Hasanudin RT 01 RW 06 Kp. Cempa Ds. Cilangkap Kodepos 42312 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak	223.500.000	268.500.000		120,13%
	2	SMA LA TAHZAN RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMA La Tahzan Rangkasbitung Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami KM. 07 Kp. Kalapa Tilu Kelurahan Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	183.000.000	183.000.000		100,00%
	3	SMAS QOTHROTUL FALAH CIKULUR	Kabupaten Lebak	SMAS QOTHROTUL FALAH CIKULUR Alamat: KP. Sarian RT/RW 012/003 Desa Sumurbandung Kec. Cikulur Kab. Lebak Prov. Banten 42356 Kelurahan Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak	388.500.000	388.500.000		100,00%
	4	SMAS DAAR EL KUTUB BAYAH	Kabupaten Lebak	SMAS DAAR EL-KUTUB BAYAH Alamat: Jl. Raya Bayah - Malingping Km. 03 Kelurahan Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Kelurahan Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak	9.000.000	9.000.000		100,00%
	5	SMA ISLAM FATHI QALBI - BINUANGEUN	Kabupaten Lebak	SMA ISLAM FATHI QALBI - BINUANGEUN Alamat: Jl.Kampung Harapan Rt.024 Rw.007 Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak Prov.Banten Kelurahan Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	31.500.000	31.500.000		100,00%
	6	SMAS AL BAYAN RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMAS AL-BAYAN RANGKASBITUNG Alamat: JL. RAYA CIKANDE KM. 10 , KP. CIGALEMPONG, DS. NAMENG, KEC. RANGKASBITUNG, KAB. LEBAK, PROV. BANTEN Kelurahan Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	580.500.000	580.500.000		100,00%
	7	SMAS AL HIDAYAH RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMA AL HIDAYAH RANGKASBITUNG Alamat: Jl. Ahmad Yani NO. 18L. Lebakpicung Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	300.000.000	300.000.000		100,00%
	8	SMAS DAAR EL KARIM MALINGPING	Kabupaten Lebak	SMA DAAR EL-KARIM MALINGPING Alamat: Jalan Raya Bayah KM. 7 Malingping, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten Kelurahan Pagelaran Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak	76.500.000	76.500.000		100,00%
	9	SMAS PGRI RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMAS PGRI RANGKASBITUNG Alamat: Jl. Dewi Sartika No. 45 L Komplek Pendidikan Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	106.500.000	106.500.000		100,00%
	10	SMA IT ADDAWAH	Kabupaten Lebak	SMA IT ADDAWAH Alamat: Jl. Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Timur Lebak.Banten Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	109.500.000	109.500.000		100,00%
	11	SMAS ISLAM PEMBANGUNAN SAJIRA	Kabupaten Lebak	SMAS ISLAM PEMBANGUNAN SAJIRA Alamat: Jl. Kopi Maja Km.01 Taman Palm Kelurahan Parungsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	48.000.000	48.000.000		100,00%
	12	SMAS DAAR EL AZHAR RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMAS Daar El Azhar Rangkasbitung Alamat: Jl. Dewi Sartika, Komplek Pendidikan Rt/Rw. 008/009. Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	538.500.000	538.500.000		100,00%
	13	SMAS AL AZKIYA	Kabupaten Lebak	SMAS AL AZKIYA Alamat: Jl. Raya Muncang Leuwidamar KM. 0.5 Kelurahan Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak	67.500.000	67.500.000		100,00%
	14	SMAS TERPADU DARUSSAADAH CIMARGA	Kabupaten Lebak	SMAS TERPADU DAARUSSAADAH CIMARGA Alamat: Jl. Raya Lewidamar Km. 8 Kp. Cimarga Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak Provinsi Banten Kode Pos 42361 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak	133.500.000	133.500.000		100,00%
	15	SMA DARUL IBTIDA	Kabupaten Lebak	SMA DARUL IBTIDA Alamat: JI.R.E.Martadinata, Kampung Tanjong Kelurahan Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	141.000.000	141.000.000		100,00%
	16	SMAS AL FARHAN CIPANAS	Kabupaten Lebak	SMA ALFARHAN Alamat: JI.Raya Rangkasbitung -Bogor Km.34 Kp.babakan Pedes Kelurahan Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak	76.500.000	76.500.000		100,00%
	17	SMAS NURUL HASANAH RANGKASBITUNG	Kabupaten Lebak	SMA Nurul Hasanah Alamat: Jl. Raya Cipanas KM. 07 Kp. Ciheulang RT/RW 004/002 Kelurahan Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak	136.500.000	136.500.000		100,00%
	18	SMAS AL - IZZAH CIPANAS	Kabupaten Lebak	SMAS AL - IZZAH CIPANAS Alamat: Jl. Pasirhaur Kp. Cimarkum Kelurahan Girilaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak	276.000.000	276.000.000		100,00%
	19	SMAS AL MUBASYIRIN SAJIRA	Kabupaten Lebak	SMAS AL MUBASYIRIN Alamat: Jln. Sajira Oko RT 006 RW 001 Desa Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42371 Tlp. 081911122376 Kelurahan Sajiramekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	73.500.000	73.500.000		100,00%
	20	SMAS NURUL MADAANY CIPANAS	Kabupaten Lebak	SMAS NURUL MADAANY CIPANAS Alamat: Jl. Raya Cipanas Km. 36 Rangkasbitung Kp. Babakanpedes Ds. Sipayung Kec. Cipanas Kab. Lebak Provinsi Banten Kode POS 42372 Kelurahan Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak	121.500.000	121.500.000		100,00%
	21	SMA DAAR EL- ROFA	Kabupaten Lebak	SMA DAAR EL-ROFA Alamat: jln.cemplang no 08. Rt/Rw. 06/02 Kelurahan Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak	75.000.000	75.000.000		100,00%
	22	SMA IBNU SINA	Kabupaten Lebak	SMA IBNU SINA Alamat: Kp. Cilaketan Rt/Rw 022/006 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	125.208.000	125.208.000		100,00%
	23	SMA LA TANSA	Kabupaten Lebak	SMA Latansa Alamat: Komplek Ponpes La Tansa Parakansantri Rt 001/002 Banjaririgasi Kec. Lebakgedong Kab. Lebak Provinsi Banten 42372 Kelurahan Banjar Irigasi Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak	1.003.500.000	1.003.500.000		100,00%
	24	SMAS ISLAM PAGELARAN	Kabupaten Pandeglang	SMA ISLAM PAGELARAN Alamat: Jl. Raya Pagelaran Km. 4 Ciputri Pagelaran Kab. Pandeglang Kelurahan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang	168.000.000	168.000.000		100,00%
	25	SMA PRESIDEN 2 (BOARDING SCHOOL)	Kabupaten Pandeglang	SMAS PRESIDEN 2 Alamat: TANJUNG LESUNG-PANDEGLANG	175.500.000	175.179.976		99,82%
	26	SMAS PGRI PANDEGLANG	Kabupaten Pandeglang	SMAS PGRI PANDEGLANG Alamat: KP. PAKUHAJI KEL. PAGERBATU KEC.MAJASARI KAB.PANDEGLANG Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	48.000.000	48.000.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	27	SMAS MUHAMMADIYAH LABUAN	Kabupaten Pandeglang	SMA MUHAMMADIYAH LABUAN Alamat: Jl. Sumur Kopo Komplek Masjid Mujahidin Labuan Kelurahan Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	126.000.000	126.000.000		100,00%
	28	SMA MUHAMMADIYAH BOJONGMANIK	Kabupaten Pandeglang	SMA Muhammadiyah Bojongmanik Alamat: Jl. Lapangan Bojongmanik Sindangresmi Kelurahan Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang	166.500.000	211.500.000		127,03%
	29	SMAS BIDAYATUL HIDAYAH	Kabupaten Pandeglang	SMAS Bidayatul Hidayah Panimbang Alamat: Jl. AMD Kamp Ponpes Bani Utman Pasar Panimbang Kelurahan Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	84.000.000	129.000.000		153,57%
	30	SMAS YANMU PANDEGLANG	Kabupaten Pandeglang	SMAS YANMU PANDEGLANG Alamat: Jalan Syech Abdul Jabbar, Kp. Karang Tanjung, Rt 007 Rw 004, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang	232.500.000	232.500.000		100,00%
	31	SMA AL-QONA AH	Kabupaten Pandeglang	SMA AL - QONA'AH Alamat: Kampung Bojong RT/RW:07/01 Desa Cikuya Kelurahan Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang	205.500.000	250.500.000		121,90%
	32	SMAS MATHLAUL ANWAR MENES	Kabupaten Pandeglang	SMAS MATHLA'UL ANWAR MENES Alamat: Jl. Raya Labuan Km. 28 Kebon Jeruk - Menes - Pandeglang Kelurahan Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	673.500.000	673.500.000		100,00%
	33	SMAS AT-TAAWUN TEGALLEGA	Kabupaten Pandeglang	SMAS At-Taawun Tegallega Alamat: Jalan Raya Labuan Km. 08 Tegallega Cikedal Pandeglang Kelurahan Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang	199.500.000	199.500.000		100,00%
	34	SMAS DAAR EL-FALAH	Kabupaten Pandeglang	SMAS DAAR EL-FALAH Alamat: Jl. Raya Mandalawangi-Ciomas KM.1 RT/RW /003/002 Desa Mandalawangi Kelurahan Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang	52.500.000	97.500.000		185,71%
	35	SMAS SUBIS	Kabupaten Pandeglang	SMAS SUBIS Alamat: Jln. Raya Mandalawangi-Jiput Km 10 Kp. Pasir Ma'mur Rt/Rw. 001/03 Desa Sukaraja Kecmatan Pulosari Kabupaten Pandeglang-Banten Kode Pos : 42254 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang	169.500.000	214.500.000		126,55%
	36	SMA KUN KARIMA	Kabupaten Pandeglang	SMA KUN KARIMA Alamat: Komplek Pondok Pesantren Kun Karima, Jl. Stasiun Kadomas, Ciekak Hilir, Karaton, Majasari, Pandeglang, Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	249.000.000	294.000.000		118,07%
	37	SMAS YPP PANDEGLANG	Kabupaten Pandeglang	SMAS YPP PANDEGLANG Alamat: JALAN BANK BANTEN NO. 03, KELURAHAN KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang	172.500.000	172.500.000		100,00%
	38	SMA DAAR-RUHAMA	Kabupaten Pandeglang	SMA Daar Ruhama Alamat: Jalan Raya Mandalawangi Kp. Cilanggar RT 10 RW 03 Desa Kadumadang Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten 42271 Kelurahan Kadumadang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	106.500.000	106.500.000		100,00%
	39	SMAS TERPADU MATHLAUL ANWAR BOJONG	Kabupaten Pandeglang	SMA TERPADU MATHLA'UL ANWAR BOJONG Alamat: Jalan Raya Saketi - Malingping, km. 10.5, Kp. Kaduhejo, Rt, 06, Rw. 03 Kelurahan Citumenggung Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang	145.500.000	145.500.000		100,00%
	40	SMAS MALNU PUSAT MENES	Kabupaten Pandeglang	SMAS Malnu Pusat Menes Alamat: Jl. Menes - Pulosari Km. 01 Rt/Rw. 01/06 Kp. Kadu Bangkong Kelurahan Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang	232.500.000	276.769.861		119,04%
	41	SMA PEDULI BANGSA	Kabupaten Pandeglang	SMA PEDULI BANGSA Alamat: Jln. Raya Munjul Km. 3 Kp. Bajeg II DesaKoleletKec. PicungKab. Pandeglang Kelurahan Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang	82.500.000	82.500.000		100,00%
	42	SMA ALAM BAHRIATUL ULUM	Kabupaten Pandeglang	SMAS ALAM BAHRIATUL ULUM Alamat: komplek cahaya mandiri rt.02 rw.03 desa sukaratu	31.500.000	31.400.000		99,68%
	43	SMA TAHFIDZ AD-DHIYA	Kabupaten Pandeglang	SMAS TAHFIDZ AD-DHIYA Alamat: Kp. Citeureup, 017/006 Desa. Rocek, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang Kelurahan Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	24.000.000	24.000.000		100,00%
	44	SMAS PASUNDAN	Kabupaten Pandeglang	SMAS PASUNDAN PANDEGLANG Alamat: JL.Raya Labuan Km 3.5 Maja barat - Cidangiang Kelurahan Sukaratu Maja Sari Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	54.000.000	54.000.000		100,00%
	45	SMAS RIYADHUSHSHOLIHIN	Kabupaten Pandeglang	SMAS Riyadhushsholihiin Alamat: Ponpes Riyadhushsholihiin, Jl. Kadu kacang KM 0,5 Kelurahan Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	408.000.000	451.220.000		110,59%
	46	SMAS ISLAM AL-BINA	Kabupaten Pandeglang	SMAS ISLAM AL-BINA Alamat: JL. CIDAHU ABUYA, KP. BANGUN MESJID. RT.001.RW 001. Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang	55.500.000	55.500.000		100,00%
	47	SMAS AL BARKAH	Kabupaten Pandeglang	SMA PLUS AL-BARKAH Alamat: Jl. Kamelangan No. 1 KM. 2 Babakan Sompk Kec. Cimanuk Pandeglang Kelurahan Gunungcupu Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang	69.000.000	69.000.000		100,00%
	48	SMAS MEDANGGILI	Kabupaten Pandeglang	SMA MEDANGGILI CIRUAS Alamat: Jl. Raya Jakarta Km.10 Ciruas Pasar Kec. Ciruas Serang Banten Kelurahan Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	108.000.000	108.000.000		100,00%
	49	SMAS PLUS BAITURRAHMAN	Kabupaten Serang	SMA PLUS BAITURRAHMAN Alamat: Jl.Pasauran-Calung Km 03 Kp.Cipanas Rt 006/003 Kelurahan Pasauran Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang	88.500.000	88.500.000		100,00%
	50	SMA ISLAM TERPADU BAYT AL QUR AN	Kabupaten Serang	SMA Islam Terpadu Bayt Al Qur'an Alamat: Jl. Otonom Gorda-Bandung, Kp Bunian Ds. Sukatani Kec. Cikande Kab. Serang Propinsi Banten 42186 Kelurahan Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	114.000.000	114.000.000		100,00%
	51	SMA FAJRUL KARIM	Kabupaten Serang	SMA FAJRUL KARIM Alamat: Kp. Kadomas Kelurahan Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang	133.500.000	178.500.000		133,71%
	52	SMA AL MASAALIKUL ULUM	Kabupaten Serang	SMA AL MASAALIKUL ULUM Alamat: jalan Pematang - DukuH Kampung Kramat Mesjid RT 010 RW 001 Kelurahan Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang	210.000.000	210.000.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	53	SMAS DAARUL HIKMAH	Kabupaten Serang	SMA DAARUL HIKMAH Alamat: KP. BOLANG PULO DS. BOLANG KEC. LEBAK WANGI KAB. SERANG PROV. BANTEN Kelurahan Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang	123.000.000	123.000.000		100,00%
	54	SMAS NURUL FALAH PETIR	Kabupaten Serang	SMA NURUL FALAH PETIR Alamat: Jl. Petir - Cadasari Km.01 Pasanggrahan Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang Prov. Banten Kelurahan Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang	112.500.000	112.484.520		99,99%
	55	SMA ISLAM TERPADU BINA INSANI	Kabupaten Serang	SMA Islam Terpadu Bina Insani Alamat: Jl. Raya Waringinkurung Km. 4 Pengasinan Kidul RT 002 / 002 Waringinkurung Serang Banten 42453 Kelurahan Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang	42.000.000	87.000.000		207,14%
	56	SMAS AL MUKHTARIAH	Kabupaten Serang	SMA ALMUKHTARIAH Alamat: KP.RENGED RT 01/001 DESA RENGED KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Kelurahan Renged Kecamatan Binuang Kabupaten Serang	55.500.000	55.500.000		100,00%
	57	SMA TERPADU BANI NUR	Kabupaten Serang	SMA TERPADU BANI NUR Alamat: KP. SITU RT 012 RW 004 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang	111.000.000	111.000.000		100,00%
	58	SMAS NURUL FATAH	Kabupaten Serang	SMAS NURUL FATAH CIKANDE Alamat: KP.PASIR MINDI DS.NAMBO UDIK KEC.CIKANDE Kelurahan Nambo Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	130.500.000	130.500.000		100,00%
	59	SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN ANYER	Kabupaten Serang	Sma pesantren unggul al bayan anyer Alamat: Jl. Raya Anyer Karang bolong km 133,7, Ds. Bandulu, Kec. Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Kelurahan Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang	385.500.000	472.500.000		122,57%
	60	SMAS NURUL ISLAH	Kabupaten Serang	SMAS NURUL ISLAH PETIR Alamat: KP.PASIRWARU DESA TAMBILUK KECAMATAN PETIR Kelurahan Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang	250.500.000	295.500.000		117,96%
	61	SMAS NUR EL FALAH KUBANG	Kabupaten Serang	SMA Nur El Falah Alamat: Jl. KH. Abdul Kabier KM.2 Kelurahan Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang	249.000.000	248.000.000		99,60%
	62	SMAIT INSAN CITA SERANG	Kabupaten Serang	SMAIT INSAN CITA SERANG Alamat: Kp Cikundur Rt 03/Rw 03 Desa Gunungsari Kec. Gunungsari Kab. Serang-Banten Kelurahan Gunungsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang	55.500.000	55.500.000		100,00%
	63	SMAS MANBAUL HIKMAT	Kabupaten Serang	SMA MANBAUL HIKMAT PADASUKA Alamat: Jl. Rego Km. 4 Padasuka Kec. Petir Kab. Serang Kelurahan Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang	232.500.000	232.500.000		100,00%
	64	SMA ISLAM DAARUL FIRDAUS	Kabupaten Serang	SMA ISLAM DAARUL FIRDAUS Alamat: JALAN TAMBAK PAMARAYAN KM.7 KP SERDANG Kelurahan Blokang Kecamatan Bandung Kabupaten Serang	100.500.000	100.500.000		100,00%
	65	SMAS PGRI KRAGILAN	Kabupaten Serang	SMA PGRI Kragilan Alamat: JALAN RAYA SERANG KM. 15 NO. 79 Kelurahan Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang	91.500.000	91.500.000		100,00%
	66	SMAS IT AL IZZAH	Kabupaten Serang	SMAS IT AL IZZAH CIRUAS Alamat: Kp. Pelawad Tegal Rt/Rw. 002/003 Ds. Pelawad Ds. Pelawad Kelurahan Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	75.000.000	120.000.000		160,00%
	67	SMAS BINA PUTERA KOPO	Kabupaten Serang	SMA Bina Putera-Kopo Alamat: Kp. Sebe Karamat Kelurahan Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang	325.500.000	325.500.000		100,00%
	68	SMA PLUS 30 JUZ	Kabupaten Serang	SMA PLUS 30 JUZ Alamat: KEC. KRAMATWATU KAB. SERANG	124.500.000	124.500.000		100,00%
	69	SMAS TERPADU AL JAUHAROTUNNAQIYYAH	Kabupaten Serang	SMA TERPADU AL-JAUHARATUNNAQIYYAH Alamat: kp.wanasaba Kelurahan Toyomerto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang	46.500.000	46.330.400		99,64%
	70	SMAS PLUS GEMILANG	Kabupaten Serang	SMA PLUS GEMILANG Alamat: JL. Serang æ" Jakarta KM. 20 Ds. Kibin Kec. Kibin Kab. Serang, Propinsi Banten 42185 Kelurahan Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang	57.000.000	57.000.000		100,00%
	71	SMAS PLUS DOWA AL ISLAMI	Kabupaten Serang	SMAS PLUS DOWA AL-ISLAMI Alamat: jl. dowa al-islami no.02 Ds. Wanayasa Kelurahan Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	117.000.000	162.000.000		138,46%
	72	SMAS BINA PUTRA BANGSA	Kabupaten Serang	SMA BINA PUTRA BANGSA Alamat: Jalan Raya Jakarta Km.09.Citerep.Ciruas Kelurahan Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	28.500.000	14.250.000		50,00%
	73	SMA TERPADU AL HIDAYAH	Kabupaten Serang	SMA TERPADU AL HIDAYAH MANCAK Alamat: JLN. RAYA MANCAK. KP. CIBANTENG DS. WINONG Kelurahan Winong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang	57.000.000	57.000.000		100,00%
	74	SMAS TERPADU PELITA BANGSA LONTAR	Kabupaten Serang	SMA Terpadu Pelita Bangsa Lontar Alamat: Jalan TPI Lontar, Kp. Kebon 06/02 Ds. Alang-Alang Kec. Tirtayasa Kab. Serang 42193 Kelurahan Alang Alang Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang	93.000.000	93.000.000		100,00%
	75	SMA NURUL ILMI DARUNNAJAH	Kabupaten Serang	SMA NURUL ILMI DARUNNAJAH Alamat: Jl. Raya Palka KM.05 Pabuaran - Serang Banten 42163 Kelurahan Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang	90.000.000	82.742.500		91,94%
	76	SMA DAAR EL HASANAH	Kabupaten Serang	SMA Daar El Hasanah Alamat: Jalan H. Sardali, Kp. Dukuh Sabrang, RT/RW 002/001, Desa Jawilan Kelurahan Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang	202.500.000	202.500.000		100,00%
	77	SMAS AL KHAIRIYAH TANARA	Kabupaten Serang	SMA AL-KHAIRIYAH TANARA Alamat: jl. Syekh Nawawi Tanara No.03 Tersaba-Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42194 E-mail Info@smalta.sch.id Kelurahan Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	151.500.000	151.500.000		100,00%
	78	SMAS AL HUSEN	Kabupaten Serang	SMA AL HUSEN TUNJUNG TEJA Alamat: Jl. Kh. Abdul Kabier, Km 02 Tunjung Teja Kabupaten Serang - Banten. Kelurahan Tunjung Jaya Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang	55.500.000	55.395.000		99,81%
	79	SMA DARUL AMANAH	Kabupaten Serang	SMA DARUL AMANAH Alamat: jln. Mongpok - Cikeusal Kp. Mongpok Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang Kelurahan Mongpok Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang	307.500.000	307.500.000		100,00%
	80	SMAS MATHLA UL ANWAR CINANGKA	Kabupaten Serang	SMA MATHLA"UL ANWAR CINANGKA Alamat: Jl. Palka Sadatani Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten Kelurahan Kubang Baros Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang	49.500.000	49.500.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	81	SMAS IT LA TAHZAN	Kabupaten Serang	SMAS IT LA TAHZAN Alamat: Jln. Otonom Cikande-Bandung Km 3,5 Kp. Cibogo Rt 008/Rw 001, Des. Situterate, Kec. Cikande, Serang-Banten 42186 Kelurahan Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	138.000.000	138.000.000		100,00%
	82	SMAS AL KHAIRIYAH KELAPIAN	Kabupaten Serang	SMAS Al-Khairiyah Kelapian Alamat: Jl.Kh. Syamwani KM 06 Kelapian Pontang Kelurahan Kalapian Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	94.500.000	94.500.000		100,00%
	83	SMA PLUS SALSABILA	Kabupaten Serang	SMA PLUS SALSABILA Alamat: Kp. babakan Ds. mander Kec. Bandung Kab. Serang Prov. Banten, Kelurahan Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang	57.000.000	57.000.000		100,00%
	84	SMAS ISLAM DAARUL AHIBBAH	Kabupaten Serang	SMAS ISLAM DAARUL AHIBBAH Alamat: JL. WARUNG SELIKUR KM. 08 KP. CIGUHA RT/RW : 003/001 Kelurahan Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang	109.500.000	109.500.000		100,00%
	85	SMA QURAN DAARUL HUFAADZ	Kabupaten Serang	SMA Quran Daarul Hufaadz Alamat: Carenang	34.500.000	34.500.000		100,00%
	86	SMA MITRA PERSADA	Kabupaten Serang	SMA MITRA PERSADA Alamat: Jl. Harendong - Pagintungan KM. 2,5 Kp. Haurdapung Kelurahan Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang	372.000.000	372.000.000		100,00%
	87	SMAS BINA MACHMUD	Kabupaten Serang	SMAS BINA MACHMUD Alamat: Jl. KH. Machmud No 07 Kadukacapi Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang	312.000.000	312.000.000		100,00%
	88	SMAS ASY SYARIF CIRUAS	Kabupaten Serang	SMA ASY-SYARIF CIRUAS Alamat: Jl. Asy-Syarif No 1 ejaban Ds. Kepandae-an-Ciruas, Serang Banten Kode Pos 42182 (NPSN: 20605322 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	87.000.000	87.000.000		100,00%
	89	SMA ISLAM NURUL FIKRI	Kabupaten Serang	SMA ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG BANTEN Alamat: Jalan Palka Kampung Cihideung Desa Bantarwaru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Banten Kelurahan Bantarwaru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang	654.000.000	754.000.000		115,29%
	90	SMA DARUL HAITAM	Kabupaten Serang	SMAS DARUL HAITAM Alamat: KEC. CINANGKA KABUPATEN SERANG	57.000.000	57.000.000		100,00%
	91	SMAS PLUS ASSA ADAH	Kabupaten Serang	SMA Plus Assa'adah Alamat: Jl. Raya Serang-Pamarayan KM 25 Pasirmangu Cikeusal Serang 42175 Kelurahan Dahu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang	447.000.000	492.000.000		110,07%
	92	SMAS AL IRSYAD WARINGINKURUNG	Kabupaten Serang	SMAS AL IRSYAD WARINGINKURUNG Alamat: Jl. Kubang Putih No. 3 Desa Sukabares Kec. Waringinkurung Kelurahan Sukabares Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang	114.000.000	112.933.060		99,06%
	93	SMAS YAPISA KOPO	Kabupaten Serang	SMA YAPISA KOPO Alamat: Jl. Gabus-Parakan, Kp. Pasepatan RT. 003 RW. 002 Ds. Babakan Jaya Kec. Kopo Kab. Serang Kelurahan Babakan Jaya Kecamatan Kopo Kabupaten Serang	526.500.000	525.979.040		99,90%
	94	SMAS PLUS DAAR EL SYIFA	Kabupaten Serang	SMA Plus Daar El Syifa Alamat: Jl. Padaharan - Kopo Kp. Padaharan Ds. Garut Kec. Kopo Kab. serang - Banten 42178 Kelurahan Garut Kecamatan Kopo Kabupaten Serang	43.500.000	43.500.000		100,00%
	95	SMAS NUSANTARA BINUANG	Kabupaten Serang	SMAS NUSANTARA BINUANG Alamat: KEC. BINUANG	198.000.000	198.000.000		100,00%
	96	SMAS MATHLA UL FALAH	Kabupaten Serang	SMA MATHLAUL FALAH Alamat: JL KYAI ADUNG NO 01 Kelurahan Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	171.000.000	171.000.000		100,00%
	97	SMAS RAUDLATUL ATHFAL	Kabupaten Serang	SMAS RAUDLATUL ATHFAL Alamat: JL. KH FAYUMI THOWIEL NO 01 ASTANA AGUNG Kelurahan Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang	129.000.000	129.000.000		100,00%
	98	SMA ISLAM DARUTTAUFIQ	Kabupaten Serang	SMA Islam Daruttaufiq Alamat: Kp. Tari Kolot Pabuaran Jaha Desa Tanjung manis kecamata anyer - Serang - Banten 42466 Kelurahan Sindangmandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang	126.000.000	126.000.000		100,00%
	99	SMAS PLUS AL-MA ARIF	Kabupaten Serang	SMA PLUS AL-MA*ARIF Alamat: Sekretariat Jln. Raya Cikande-Carenang KM 3, Ds. Songgomjaya, Cikande, Serang, Banten 42186 NPSN : 20605330 Kelurahan Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang	72.000.000	71.880.000		99,83%
	100	SMA BINA INSANI ANYER	Kabupaten Serang	SMA BINA INSANI ANYER Alamat: JL. JAHA DS MEKARSARI KEC. ANYAR KAB SERANG PROV BANTEN 42166 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang	46.500.000	46.500.000		100,00%
	101	SMA ATTAUFIQIYYAH	Kabupaten Serang	SMA ATTAUFIQIYYAH Alamat: Jl. Pandeglang - Serang Km 14 Kp. Sawah Kelurahan Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang	448.500.000	491.949.010		109,69%
	102	SMAS DAARUSSALAM	Kabupaten Tangerang	SMA DAARUSSALAM Alamat: Kp. Badak RT 006/001 Kelurahan Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang	496.790.000	496.790.000		100,00%
	103	SMAS CENDIKIA ALFALLAH	Kabupaten Tangerang	SMA CENDIKIA AL-FALAH Alamat: Jl. Raya Salimah Rt 011/04 Desa Sukamanah No.12 Kecamatan Jambe Kab Tangerang Banten Kelurahan Suka Manah Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang	128.350.000	128.350.000		100,00%
	104	SMAS DAAR EL QOLAM 2	Kabupaten Tangerang	SMAS Daar El Qolam 2 Alamat: Jl. Raya Serang Km. 35 Kelurahan Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	921.100.000	921.100.000		100,00%
	105	SMAS GEMILANG	Kabupaten Tangerang	SMA GEMILANG 1 PAKUHAJI Alamat: Jl. Raya Pakuhaji KM. 01 Gang Pisangan Mangga Dua Kp. Buaran Jarak RT 001/001 Kelurahan Bunisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	206.870.000	206.870.000		100,00%
	106	SMAS HIRO	Kabupaten Tangerang	SMAS HIRO Alamat: Jl. Tanjung Pasir No. 32 Kelurahan Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	1.108.340.000	1.108.340.000		100,00%
	107	SMAS PGRI TELUKNAGA	Kabupaten Tangerang	SMAS PGRI TELUKNAGA Alamat: JL. RAYA TELUKNAGA KM. 12 RT. 004/003 Kelurahan Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	371.460.000	371.460.000		100,00%
	108	SMA IT CORDOVA	Kabupaten Tangerang	SMAIT CORDOVA Alamat: JL. PERTAMINA KP. CIAPUS Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang	297.470.000	297.470.000		100,00%
	109	SMA AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL	Kabupaten Tangerang	SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL Alamat: JL. BIDAR 1NO 2 KELAPA DUA Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	673.460.000	673.210.000		99,96%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	110	SMAS SURYA BANGSA	Kabupaten Tangerang	SMAS SURYA BANGSA Alamat: Jl. Palem Raja Utara Raya No. 123, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	28.690.000	28.584.500		99,63%
	111	SMAS ISLAM NURUL HUDA KEDUNG	Kabupaten Tangerang	SMA ISLAM NURUL HUDA KEDUNG Alamat: Kp. Kedung II Rt. 006./002 Ds. Kedung Kelurahan Kedung Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	220.460.000	265.460.000		120,41%
	112	SMAS CEMERLANG	Kabupaten Tangerang	Sma cemerlang Alamat: Jl. Nyi Mas Melati Rt.01/01 no 36 Ds. Pondok Kelor Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang Prov. Banten 15520 Kelurahan Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang	125.330.000	125.330.000		100,00%
	113	SMAS AL HUSNA TIGARAKSA	Kabupaten Tangerang	SMAS AL HUSNA TIGARAKSA Alamat: Jl. Lingkar Selatan, Kaduagung, Tigaraksa, kabupaten Tangerang- Banten Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	141.940.000	141.940.000		100,00%
	114	SMAS YUSTIKA	Kabupaten Tangerang	SMA YUSTIKA Alamat: Jl. AMD Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Sukawali Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	265.760.000	265.760.000		100,00%
	115	SMAS MASYARIQUL ANWAR	Kabupaten Tangerang	SMA MASYARIQUL ANWAR Alamat: Kp. Gintung RT 007/002 Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	246.130.000	246.130.000		100,00%
	116	SMA AL ANWAR BINA MULIA	Kabupaten Tangerang	SMA AL ANWAR BINA MULIA Alamat: Jl. Perimeter Utara Kp. Kresak Ds. Rawa Burung no. 18 Kelurahan Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	80.030.000	80.030.000		100,00%
	117	SMAS ISLAMIC VILLAGE	Kabupaten Tangerang	SMAS Islamic Village Alamat: Jalan Islamic Raya No 1 Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	302.000.000	402.000.000		133,11%
	118	SMAS BETHEL	Kabupaten Tangerang	SMAS BETHEL Alamat: Villa Taman Bandara Blok G.IV Kelurahan D A D A P Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	270.290.000	315.290.000		116,65%
	119	SMAS DAARUL MUTTAQIEN	Kabupaten Tangerang	SMAS DAARUL MUTTAQIEN Alamat: Jl. Raya Cadas Kukun Kap. Ilat Desa Pangadegan Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang BANTEN 15560 Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	774.630.000	774.625.825		100,00%
	120	SMAS PGRI LEGOK	Kabupaten Tangerang	SMAS PGRI LEGOK Alamat: Jl. Lap. Bola No.74, Babakan, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820 Kelurahan Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang	129.860.000	117.702.815		90,64%
	121	SMAS ISLAM BANI TAMIM	Kabupaten Tangerang	SMA ISLAM BANI TAMIM Alamat: KP.ETEK DS.SINDANG ASIH KECAMATAN SINDANG JAYA Kelurahan Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang	536.050.000	581.050.000		108,39%
	122	SMA CITRA BERKAT	Kabupaten Tangerang	SMAS CITRA BERKAT Alamat: JL. CITRA AKADEMIA RAYA BLOK O-03 NO 1, Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang Prov. Banten	483.200.000	524.038.195		108,45%
	123	SMAS ASA PERTIWI	Kabupaten Tangerang	SMAS ASA PERTIWI Alamat: KP. BEDUGLORA RT. 005 RW. 003 Kelurahan Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	104.190.000	104.190.000		100,00%
	124	SMAS YASPIDAM	Kabupaten Tangerang	SMA YASPIDAM Alamat: KP GANDASARI RT 009 RW 004 DS JAYANTI KEC JAYANTI KAB TANGERANG Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	48.320.000	48.320.000		100,00%
	125	SMAS MATHLAUL ANWAR	Kabupaten Tangerang	SMA MATHLAUL ANWAR Alamat: JL. Raya Mauk Km. 16 Ds. Buaranjati Kec. Sukadiri Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	134.390.000	134.390.000		100,00%
	126	SMAS DAAR EL QOLAM	Kabupaten Tangerang	SMAS DAAR EL-QOLAM Alamat: Jl. Raya Serang Km. 35 Kp Gintung RT 007 RW 02 Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	717.250.000	717.250.000		100,00%
	127	SMA AL-ISHLAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-ISHLAH Alamat: Jl. Rawa Kidang Kp. Kebon Cau Kelurahan Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	129.860.000	129.860.000		100,00%
	128	SMA AL FITYAN SCHOOL TANGERANG	Kabupaten Tangerang	SMA AL FITYAN SCHOOL TANGERANG Alamat: Perumahan Dasana Indah Blok RB 4 No. 17 RT. 001 RW. 018 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	197.810.000	239.373.300		121,01%
	129	SMA IT QONITA ISLAMIC BOARDING SCHOOL	Kabupaten Tangerang	SMA IT Qonita Islamic Boarding School Alamat: Kecamatan Cisauk	64.930.000	109.930.000		169,31%
	130	SMA AL FATTAH TIGARAKSA	Kabupaten Tangerang	SMA AL FATTAH TIGARAKSA Alamat: Jl. Aria Jaya Santika Kp. Seglog, Desa Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang-Banten Kelurahan Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	61.910.000	61.910.000		100,00%
	131	SMAS NUURUL HUDA CISOKA	Kabupaten Tangerang	SMA NURUL HUDA CISOKA Alamat: Jl. Raya cisoka-megu Kp. Secang RT. 05 RW. 04 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	353.340.000	353.340.000		100,00%
	132	SMAS YUPPEN TEK 3	Kabupaten Tangerang	SMA YUPPEN TEK 3 Alamat: Jl. PLP No. 47 Ds. Serdang Wetan Kelurahan Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang	208.380.000	253.380.000		121,60%
	133	SMAS MKGR SEPATAN	Kabupaten Tangerang	SMA MKGR SEPATAN Alamat: Jl. Raya Pakuhaji Km.11 Desa Sarakan Kelurahan Sarakan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	1.173.270.000	1.173.270.000		100,00%
	134	SMAS LENTERA HARAPAN	Kabupaten Tangerang	SMA Lentera Harapan Alamat: Jl. Elang 1b Kp. Babakan Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	359.380.000	403.019.507		112,14%
	135	SMAS RAUDATUL FALLAH JAYANTI	Kabupaten Tangerang	SMA RAUDLATUL FALAH JAYANTI Alamat: Jl. Raya Serang KM.33 Desa Pasimuncang Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	93.620.000	93.620.000		100,00%
	136	SMAS DARUL ABROR KEMIRI	Kabupaten Tangerang	SMA DARUL ABROR KEMIRI Alamat: Jl. Raya KemiriNo. 29 KM. 03 008/002 Desa Kemiri Kelurahan Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang	3.020.000	3.020.000		100,00%
	137	SMAS AL ISTIQOMAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL ISTIQOMAH Alamat: Jl.Raya Pasar Kemis KM. 6,Gh H.Teha 1 Kp.Cilongok Sukamantri RT 02/04 No 3 Kec Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	95.130.000	95.130.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	138	SMA AL-HASANIYAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-HASANIYAH Alamat: KP. BARU CAKOP RT.17/04 Kelurahan Pangarengan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	182.710.000	182.710.000		100,00%
	139	SMAS TARAKANITA CITRA RAYA	Kabupaten Tangerang	SMAS TARAKANITA CITRA RAYA Alamat: JL. CITRA RAYA UTAMA TIMUR, DESA PANONGAN	770.100.000	684.285.076		88,86%
	140	SMAS YADIKA 10	Kabupaten Tangerang	SMA YADIKA 10 Alamat: Jl. Raya Salemban No.26, Cengklong, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15213 Kelurahan Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	300.490.000	300.490.000		100,00%
	141	SMA RAUDLATUL ULUM	Kabupaten Tangerang	SMA RAUDLATUL ULUM Alamat: Kp. Guha RT. 004/002 Desa. Lembangsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Kelurahan Lembang Sari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	126.840.000	126.840.000		100,00%
	142	SMAS MUTIARA BANGSA	Kabupaten Tangerang	SMAS MUTIARA BANGSA Alamat: Jln. Raya Kresek - Gandaria Kp. Maja RT.006 RW.002 Kelurahan Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	138.920.000	183.920.000		132,39%
	143	SMAS IMTEK	Kabupaten Tangerang	SMAS IMTEK Alamat: Jl. Raya Pagedangan Rt.002/001 Ds. Cicalengka Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten 15339 Kelurahan Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang	321.630.000	321.630.000		100,00%
	144	SMA KRISTEN MENARA TIRZA	Kabupaten Tangerang	SMA KRISTEN MENARA TIRZA Alamat: Jl. Kelapa Gading Barat Blok AJ 11 No 16, Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	93.620.000	93.602.109		99,98%
	145	SMA MUTIARA INSAN NUSANTARA	Kabupaten Tangerang	SMA MUTIARA INSAN NUSANTARA Alamat: Jl. Rajawali Pulo No. 02 Kampung Nagreg RT/RW 04/02, Rajegmulya, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang,	265.760.000	265.760.000		100,00%
	146	SMAS DARUL AHSAN	Kabupaten Tangerang	SMAS DARUL AHSAN Alamat: Jl. Raya Serang Km. 31 Ds. Dangdeur Rt. 005/001 Kec. Jayanti Kab. Tangerang Kelurahan Dang Deur Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	404.680.000	404.680.000		100,00%
	147	SMA DAAR EL-JAUHAR	Kabupaten Tangerang	SMA Daar El-Jauhar Alamat: Jl. Kisamaun Desa Gelam Jaya	86.070.000	86.070.000		100,00%
	148	SMA KRISTEN VILLA TAMAN BANDARA	Kabupaten Tangerang	SMA KRISTEN VILLA TAMAN BANDARA Alamat: FLAMBOYAN NO 5 DADAP KOSAMBI TANGERANG REGENCY	75.500.000	75.500.000		100,00%
	149	SMA AL FALAHIYYAH SUKAMANAH	Kabupaten Tangerang	SMA. AL FALAHIYYAH SUKAMANAH Alamat: Kp. Gembong RT.001/001 Kelurahan Suka Manah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	104.190.000	104.090.000		99,90%
	150	SMAS NURUL HIDAYAH	Kabupaten Tangerang	SMAS NURUL HIDAYAH CIKUPA Alamat: Jalan Desa Pasirgadung-Pasirjaya RT 03/04 Desa Pasirgadung Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang Kelurahan Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	135.900.000	135.900.000		100,00%
	151	SMAS AL MUBAROK	Kabupaten Tangerang	SMAS AL MUBAROK Alamat: Jl. Syekh Mubarak Kp. Kalapadua Rt.006 Rw.004 Kelurahan Pete Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	747.450.000	747.450.000		100,00%
	152	SMA DAARUL ABROOR LEBAK WANGI	Kabupaten Tangerang	SMA Daarul Abroor Lebak Wangi Alamat: Kp Rawa Beuruem RT 010 RW 003 Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang	161.570.000	161.570.000		100,00%
	153	SMA IT RUHUL JADID	Kabupaten Tangerang	SMA IT Ruhul Jadid Alamat: Jl. Raya Kutruk RT 02 RW 05 Kampung Nagrak Kelurahan Marga Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	48.320.000	48.320.000		100,00%
	154	SMAS CITRA ISLAMI	Kabupaten Tangerang	SMA Citra Islami Alamat: Jln. Citra Raya Timur No. 1, Citra Raya Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang	371.460.000	371.460.000		100,00%
	155	SMAS AL FASANAHA	Kabupaten Tangerang	SMAS AL FASANAHA Alamat: KP. ANAMUI RT. 003 RW. 003 Kelurahan Suradita Kecamatan Cisaug Kabupaten Tangerang	70.970.000	70.127.150		98,81%
	156	SMAS ISLAM AL-FALAH KRESEK	Kabupaten Tangerang	SMAS ISLAM AL-FALAH KRESEK Alamat: Jl.Syeh Nawawi Tanara Kp.Al-Falah RT.04/02 Ds.Kresek Kec.Kresek Kab.Tangerang Kelurahan Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang	475.650.000	475.650.000		100,00%
	157	SMAS PGRI 58 TIGA RAKSA	Kabupaten Tangerang	SMAS PGRI 58 TIGARAKSA Alamat: Jl. Aria Wangsakara Tigaraksa Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	43.790.000	43.790.000		100,00%
	158	SMA PLUS ARRAHMAN	Kabupaten Tangerang	SMA PLUS ARRAHMAN Alamat: JL.RAYA MAUK KM.12 KP. KOSAMBI RT.002/002 Kelurahan Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	119.290.000	119.290.000		100,00%
	159	SMAS DAARUL MUQIMIEN	Kabupaten Tangerang	SMA Daarul Muqimien Alamat: Jl. Raya Mauk KM. 16 Buaran Jati Rt. 003/002 Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	144.960.000	144.359.500		99,59%
	160	SMAS AL MULTAZAM	Kabupaten Tangerang	SMAS AL MULTAZAM Alamat: Jl. Kedaung Barat Rt 004/Rw 03 Ds. Pondok Jaya Kec, Sepatan Kab. Tangerang Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	439.410.000	439.410.000		100,00%
	161	SMAS PARAHYANGAN	Kabupaten Tangerang	SMAS PARAHYANGAN Alamat: Kecamatan Pakuhaji	37.750.000	37.750.000		100,00%
	162	SMAS TUNAS MULIA	Kabupaten Tangerang	SMA TUNAS MULIA Alamat: Gading Serpong, Jalan Boulevard Rusia Block CB 6 No. 57 Sektor 1 C, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	129.860.000	129.638.500		99,83%
	163	SMAS AL-BASSORIYAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-BASSORIYAH Cisoka Alamat: Kp. Cibugel Rt. 004/004 Kelurahan Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	160.060.000	160.060.000		100,00%
	164	SMA MUTIARA BANGSA 6	Kabupaten Tangerang	SMA MUTIARA BANGSA 6 Alamat: Villa Permata Regency II Blok CB 01 No, 39B	102.680.000	0		0,00%
	165	SMA LANGITAN	Kabupaten Tangerang	SMA LANGITAN Alamat: Jl. Kali Cimanceuri Rt.001/05 Kamp. Gaga Kidurin Ds. Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang 15550 Kelurahan Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang	43.790.000	43.790.000		100,00%
	166	SMA BHAKTI ANANDA	Kabupaten Tangerang	SMA BHAKTI ANANDA Alamat: Kec. Kosambi	80.030.000	125.030.000		156,23%
	167	SMAS PGRI BALARAJA	Kabupaten Tangerang	SMAS PGRI BALARAJA Alamat: Jl. Raya Serang KM.24,5 Balaraja - Tangerang Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang	312.570.000	355.965.950		113,88%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	168	SMAS NURUL IMAN	Kabupaten Tangerang	SMAS NURUL IMAN Alamat: Kp. Baru Desa Pangarengan Kec. Rajeg Kab. Tangerang Kelurahan Pangarengan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	416.760.000	416.760.000		100,00%
	169	SMA MIFTAHUSSALAM	Kabupaten Tangerang	SMA MIFTAHUSSALAM Alamat: Jl. Raya Serang KM. 53 Kp. Cendelekan Rt.007/Rw.002 Ds. Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang Banten Kelurahan Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	31.710.000	31.710.000		100,00%
	170	SMAS IBNU MASKI	Kabupaten Tangerang	SMA IBNU MASKI Alamat: JALAN RAYA PASAR BOLANG - JENGGOT, KAMPUNG TEGAL PARIDAN DESA RANCAGEDE KECAMATAN GUNUNG KALER KAB. TANGERANG Kelurahan Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	187.240.000	187.240.000		100,00%
	171	SMA IT DAARUL IJABAH JAMBE	Kabupaten Tangerang	SMA IT DAARUL IJABAH JAMBE Alamat: Jl. Daraham RT 006 RW 004 Ds. Jambe Kec. Jambe Kab. Tangerang Prov. Banten 15720 Kelurahan Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang	12.080.000	57.080.000		472,52%
	172	SMA IT ASH-SHIBGOH	Kabupaten Tangerang	SMAIT ASH-SHIBGOH Alamat: Jl. Raya Serang KM.12 Kelurahan Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	69.460.000	69.460.000		100,00%
	173	SMA QUR AN INSAN PRATAMA	Kabupaten Tangerang	SMA QUR AN INSAN PRATAMA Alamat: Jalan Parahu Raya No. 7 RT/RW. 06/01 Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Kode os 15610 Kelurahan Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang	415.250.000	460.250.000		110,84%
	174	SMAS AL MAMUNIYAH	Kabupaten Tangerang	SMAS AL MAMUNIYAH Alamat: Kp. Pasirgadung RT. 05 RW. 04 Ds. Pasirgadung Kelurahan Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	46.810.000	46.085.000		98,45%
	175	SMAS DAARUT TASBIH	Kabupaten Tangerang	SMA DAARUT TASBIH Alamat: Jl. Raya Puri Agung Kp. Jambu RT/RW 003/004, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	81.540.000	81.540.000		100,00%
	176	SMAS ALLAYINAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL LAYYINAH Alamat: Jl. MADRASAH AL LAYYINAH, Kp. CIJENGIR, Kel. BINONG, Kec. CURUG, Kab. TANGERANG Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	185.730.000	230.710.000		124,22%
	177	SMAS KUTABUMI	Kabupaten Tangerang	SMA KUTABUMI Alamat: Jl. Raya Cadas Kukun KM. 2.5 Kp. Pangodokan RT. 003/002 Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Banten 15560 Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	164.590.000	164.590.000		100,00%
	178	SMAS MARIA MEDIATRIK	Kabupaten Tangerang	SMA Maria Mediatrix Alamat: Jl. Pinus II No. 1 Pondok Rejeki Kutabaru Pasarkemis Kabupaten Tangerang Banten 15561 Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	167.610.000	212.610.000		126,85%
	179	SMA BABUSSALAM RAJEG	Kabupaten Tangerang	SMA BABUSSALAM RAJEG Alamat: Jl. Lurah Thamrin Rajeg Kosambi Kp. Rajeg Desa Rajeg Rt 001/002 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang 15540 Kelurahan Rajeg Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	218.950.000	218.950.000		100,00%
	180	SMAS DAARUL ARCHAM RAJEG	Kabupaten Tangerang	SMAS Daarul Archam Alamat: Jl. Raya Rajeg, No. 49, RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	99.660.000	99.660.000		100,00%
	181	SMAS PUTRA BANGSA	Kabupaten Tangerang	SMAS PUTRA BANGSA Alamat: JL. AMD Cibarengkok No. 09 RT 01 RW 01 Peusar Kelurahan Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang	312.570.000	312.570.000		100,00%
	182	SMAS SIROJUL ATHFAL	Kabupaten Tangerang	SMA SIROJUL ATHFAL Alamat: KP. CILABAN RT 004/RW005 DS CIBUGEL KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG Kelurahan Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	172.140.000	172.140.000		100,00%
	183	SMAS ISLAM TERPADU ALIA TANGERANG	Kabupaten Tangerang	SMAS IT ALIA Tangerang Alamat: Perum Dasana Indah Blok SO. RT/RW 05/016. Bonang, Kelapa Dua Tangerang, Banten. Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	389.580.000	379.854.000		97,50%
	184	SMA PLUS ISLAMIC VILLAGE	Kabupaten Tangerang	SMA PLUS ISLAMIC VILLAGE Alamat: Jl. Islamic Raya No. 1 Kelapa Dua Tangerang Banten Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	369.950.000	323.850.000		87,54%
	185	SMAS PRAMITA CURUG	Kabupaten Tangerang	SMA Pramita Alamat: Jl. Kampus Pramita Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	442.430.000	412.019.587		93,13%
	186	SMAS NURUL FALAH RAJEG	Kabupaten Tangerang	SMA NURUL FALAH RAJEG Alamat: KP.JUNGKEL RT 006 RW 002 DS.TANJAKAN MEKAR KEC.RAJEG KAB.TANGERANG Kelurahan Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	89.090.000	89.090.000		100,00%
	187	SMAS AL FURQON	Kabupaten Tangerang	SMA AL FURQON Alamat: Jl. Komplek Pendidikan Al-Furqon No. 1 Buaran Asem Kelurahan Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	83.050.000	82.050.000		98,80%
	188	SMAS GENTA SYAPUTRA	Kabupaten Tangerang	SMAS GENTA SYAPUTRA Alamat: JL. RAYA BOJONGRENGED KP. PINTU KAPUK RT. 034/ RW. 014 Kelurahan Bojong Renged Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	813.890.000	813.890.000		100,00%
	189	SMA ISLAM TERPADU AULADI ISLAMI	Kabupaten Tangerang	SMA Islam Terpadu Auladi Islami Alamat: Perumahan Rajeg Terrace	66.440.000	66.440.000		100,00%
	190	SMA HILARIS	Kabupaten Tangerang	SMA Hilaris Alamat: Jl. Empu Barada Raya No. 16 - 28 Perumnas II Karawaci Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	48.320.000	93.320.000		193,13%
	191	SMAS SUNAN BONANG	Kabupaten Tangerang	SMAS SUNAN BONANG Alamat: Perum Dasana Indah Blok. SJ Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	164.590.000	164.589.700		100,00%
	192	SMAS PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL	Kabupaten Tangerang	SMA PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL Alamat: Perumahan Villa Permata Blok G1 Kelurahan Sindang Sari Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang Banten (15560) Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	922.610.000	922.610.000		100,00%
	193	SMA ISLAM TERPADU DAARUL MUKHTARIN	Kabupaten Tangerang	SMA ISLAM TERPADU DAARUL MUKHTARIN Alamat: Jl. KH. Moh. Dahlan Kp. Nunut Kelurahan Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	439.410.000	439.410.000		100,00%
	194	SMAS 46 DAAR EL GUSTI	Kabupaten Tangerang	SMA 46 DAAR EL GUSTI Alamat: Kp. Peusar RT 05/01 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	101.170.000	101.170.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	195	SMAS PRIMA NUSANTARA	Kabupaten Tangerang	SMAS PRIMA NUSANTARA Alamat: Jl. Al-Hikmah Kp. Pondok Jaya RT. 005/001 Ds. Pondok Jaya Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	95.130.000	95.130.000		100,00%
	196	SMAS WIPAMA	Kabupaten Tangerang	SMAS WIPAMA CIKUPA Alamat: Jl. Raya Serang Km. 18,5 Sukanagara Kec. Cikupa Kelurahan Suka Nagara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	75.500.000	75.500.000		100,00%
	197	SMAS NUSANTARA UNGGUL	Kabupaten Tangerang	SMA Nusantara Unggul Alamat: Jl. Raya Pekayon KM. 1 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang - Banten Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	258.210.000	258.210.000		100,00%
	198	SMAS TUNAS BANGSA	Kabupaten Tangerang	SMA TUNAS BANGSA Alamat: Jl. Raya Perancis Km. 12 No. 45 Desa Kosambi Timur Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	120.800.000	120.800.000		100,00%
	199	SMAS AL JUMHURIYAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL JUMHURIYAH Alamat: Jalan Raya Kp Melayu Km 09 Teluknaga Tangerang kode pos 15510 Kelurahan Teluk Naga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	128.350.000	127.750.000		99,53%
	200	SMAS DARUL ISHLAH	Kabupaten Tangerang	SMA DARUL ISHLAH Alamat: Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti Desa Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang-Banten Kelurahan Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang	66.440.000	66.440.000		100,00%
	201	SMAS MANDIRI BALARAJA	Kabupaten Tangerang	SMAS MANDIRI BALARAJA Alamat: Jl raya kresek km 0,5 Kelurahan Bala Raja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang	303.510.000	303.510.000		100,00%
	202	SMA IT SMART SYAHIDA	Kabupaten Tangerang	SMAIT SMART SYAHIDA Alamat: Jl.VerdI Timur V (Bunderan II - Citra Raya) Kp. Pabuaran Ds. Dukuh Kec. Cikupa Kab.Tangerang Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang	363.910.000	363.910.000		100,00%
	203	SMA SUNANUL HAQ	Kabupaten Tangerang	SMA SUNANUL HAQ Alamat: JL.KRONJO JENGOT KP GAGA	182.710.000	182.710.000		100,00%
	204	SMAS PARADIGMA	Kabupaten Tangerang	SMA PARADIGMA Alamat: JL. IR SUTAMI MAUK RT 011/004 KEL. MAUK TIMUR KEC. MAUK KAB. TANGERANG BANTEN Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	765.570.000	765.570.000		100,00%
	205	SMAS ATISA DIPAMKARA	Kabupaten Tangerang	SMAS Atisa Dipamkara Alamat: Jl. Vila Permata no.1 Lippo Karawaci, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang - Banten Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	259.720.000	304.720.000		117,33%
	206	SMA AL-KARIM	Kabupaten Tangerang	SMA AL-KARIM Alamat: KP.GAGA KIDUL Kelurahan Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang	122.310.000	122.310.000		100,00%
	207	SMAS ISLAM GINTUNG MAUK	Kabupaten Tangerang	SMAS ISLAM GINTUNG MAUK Alamat: DESA GINTUNG Kelurahan Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	48.320.000	47.780.000		98,88%
	208	SMAS AL-ASMANIYAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-ASMANIYAH Alamat: Jl. Diklat Pemda Kp. Dukuhpinang Rt. 03/03 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	178.180.000	178.180.000		100,00%
	209	SMAS PGRI SINDANGSONO	Kabupaten Tangerang	SMA PGRI SINDANGSONO Alamat: Jl. Raya Cayur RT. 006/002 Kelurahan Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang	317.100.000	317.100.000		100,00%
	210	SMAS RIYADLUL MUKHLISIEN	Kabupaten Tangerang	SMA RIYADLUL MUKHLISIEN Alamat: Jl. Raya Mauk KM.14, Kp. Beji RT.001/001 Ds. Kosambi Kec. Sukadiri Kelurahan Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	105.700.000	105.700.000		100,00%
	211	SMAS ISLAM DAAR ET TOHIRIN	Kabupaten Tangerang	SMAS ISLAM DAAR ET TOHIRIN Alamat: Jl. Raya Cisoka - Jayanti Kp. Nyompok Gabus RT. 011/004 Kelurahan Carenang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	237.070.000	237.070.000		100,00%
	212	SMAS PERINTIS 1 SEPATAN	Kabupaten Tangerang	SMA Perintis 1 Sepatan Alamat: Jl. Raya KPR BTN Kutabumi Kode Pos 15520 Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang	157.040.000	157.040.000		100,00%
	213	SMAS NUSANTARA	Kabupaten Tangerang	SMA NUSANTARA KRONJO Alamat: Jl. Raya Cayur KM. 1 Kp. Dukuh Kelurahan Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang	140.430.000	140.430.000		100,00%
	214	SMAS BINA PUTRA	Kabupaten Tangerang	SMA BINA PUTRA Alamat: Jl. Gatot Subroto Desa Kedaung Barat Kecamatan sepatan Timur 15520 Kelurahan Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang	84.560.000	84.531.500		99,97%
	215	SMAS BINA BHAKTI KRONJO	Kabupaten Tangerang	SMAS BINA BHAKTI KRONJO Alamat: Jl. Pendidikan No. 1 Pasilian Kelurahan Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang	221.970.000	221.963.800		100,00%
	216	SMAS AL-FALAHIYAH	Kabupaten Tangerang	AL - FALAHIYAH Alamat: Kp. Jengkol Rt. 004/001 Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang	129.860.000	129.602.500		99,80%
	217	SMAS YASPIH RAJEG	Kabupaten Tangerang	SMAS YASPIH RAJEG Alamat: Kp. Kigayor RT 014/003 Kelurahan Sasak Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	599.470.000	599.470.000		100,00%
	218	SMAS SIRRUL HIKMAH	Kabupaten Tangerang	SMA SIRRUL HIKMAH Alamat: Jl. Raya Cisoka Kp. Pasanggrahan RT 002 RW 001 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang	70.970.000	70.260.300		99,00%
	219	SMA PLUS NURUL IMAN ASHOPI	Kabupaten Tangerang	SMA PLUS NURUL IMAN ASHOPI Alamat: Jl. Sultan Hasanudin KM.01, DS SARAKAN, KEC. SEPATAN	179.690.000	179.690.000		100,00%
	220	SMAS TARSISIUS VIRETA	Kabupaten Tangerang	SMAS TARSISIUS VIRETA Alamat: Jl. Danau Singkarak Raya Blok AE 8-9 Villa Regensi Tangerang II Gelam Jaya, Pasar Kemis Kab. Tangerang 15562 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	582.860.000	627.860.000		107,72%
	221	SMAIT LATANSA CENDEKIA	Kabupaten Tangerang	SMA IT LATANSA CENDIKIA Alamat: Kampung Gelam RT.09/02, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	224.990.000	269.990.000		120,00%
	222	SMAS MUSTIKA AL MUJANNAH	Kabupaten Tangerang	SMAS Mustika Al Mujannah Alamat: Jl. Haji Marih Kampung Laksana Timur Kelurahan Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	146.470.000	146.470.000		100,00%
	223	SMAIT BINA PEKERTI	Kabupaten Tangerang	SMA IT BINA PEKERTI Alamat: Jl. Raya Leungsir Kp. Rancagede RT 05/06 Kelurahan Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang	135.900.000	135.875.000		99,98%
	224	SMAS ADITYA KARYA	Kabupaten Tangerang	SMAS Aditya Karya Alamat: Jalan Nagreg RT 01 RW 09 Kelurahan Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	761.040.000	761.040.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	225	SMAS PGRI 095 PASAR KEMIS	Kabupaten Tangerang	SMAS PGRI 095 PASAR KEMIS Alamat: JL. MAWAR 2 PERUM BUMI PASAR KEMIS INDAH KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG 20130 BANTEN Telp. 021 5920242 Kelurahan Pasir Kemis Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang	49.830.000	49.829.400		100,00%
	226	SMA HAROKATUL YAMANIE	Kabupaten Tangerang	SMA HAROKATUL YAMANIE Alamat: JL. Raya Pekayon Km. 0,5 Kp. Jatilio-Ranca Banteng Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang	188.750.000	233.436.000		123,67%
	227	SMAS TARAKANITA GADING SERPONG	Kabupaten Tangerang	SMAS TARAKANITA GADING SERPONG Alamat: JL. KELAPA CENGKIR TENGAH, KELAPA DUA	1.014.720.000	1.033.819.160		101,88%
	228	SMA AL-BAYYINAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-BAYYINAH CISOKA KAB.TANGERANG BANTEN Alamat: JL.RAYA CISOKA TAMAN ADIYASA KP.BUNAR RT.03/02 DS SUKATANI Kelurahan Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang	28.690.000	28.690.000		100,00%
	229	SMAS PLUS DARUL HIKMAH	Kabupaten Tangerang	SMA Plus Darul Hikmah Alamat: Jl.Stasiun KA No.10 Cicayur Rt.01/01 Kelurahan Cisaug Kecamatan Cisaug Kabupaten Tangerang	95.130.000	140.130.000		147,30%
	230	SMAS QUEEN	Kabupaten Tangerang	SMAS QUEEN Alamat: JL. Kh. Moh. Dahlan Tanjakan Rt 007/003 Desa Tanjakan Kec. Rajeg Kab. Tangerang Provinsi Banten Kode Pos 15540 Kelurahan Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	305.020.000	305.020.000		100,00%
	231	SMA DIAN BANGSA	Kabupaten Tangerang	SMA DIAN BANGSA Alamat: VILLA TAMAN BANDARA BLOK 08 NO.7-8 DESA DADAP KEC. KOSAMBI, KAB TANGERANG, BANTEN Kelurahan D A D A P Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang	196.300.000	196.300.000		100,00%
	232	SMAS AL AZHARIYAH	Kabupaten Tangerang	SMA AL-AZHARIYAH RAJEG Alamat: Kp. Sarakan RT/RW.002/005 Ds. Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang Kelurahan Suka Sari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang	67.950.000	67.950.000		100,00%
	233	SMAS BABUSSALAM TELUKNAGA	Kabupaten Tangerang	SMAS Babussalam Teluknaga Alamat: Jl. Babussalam No. 5 03/05 Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Banten Kelurahan Teluk Naga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	96.640.000	96.640.000		100,00%
	234	SMAS INSAN KAMIL TARTILA	Kabupaten Tangerang	SMA INSAN KAMIL TARTILA Alamat: JL. RAYA LEGOK KM. 6 NO. 89 Kelurahan Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang	90.600.000	90.600.000		100,00%
	235	SMAS PELITA NUSANTARA	Kabupaten Tangerang	SMAS PELITA NUSANTARA Alamat: Jalan Raya Serang Km. 31 RT/RW. 002/004 Kelurahan Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang	507.360.000	507.360.000		100,00%
	236	SMAS AL HUSNA CURUG	Kabupaten Tangerang	SMAS AL HUSNA CURUG Alamat: Jl. Raya PLP Curug Kp. Sentul Kelurahan Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	66.440.000	66.440.000		100,00%
	237	SMAS AL HUSNA	Kabupaten Tangerang	SMA AL-HUSNA Alamat: Jl. Kh. Umar No. 2 Rancalang Ds. Kedaung Kec. Mekar Baru Kelurahan Kedaung Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang	206.870.000	206.870.000		100,00%
	238	SMA AL-FATH	Kota Cilegon	SMA Al-Fath Cilegon Alamat: Jalan Sunan Ampel link. Kubang Menyawak Rt. 04/01 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon	423.810.000	468.810.000		110,62%
	239	SMAS AL MUNAWAROH	Kota Cilegon	SMA AL-MUNAWAROH Alamat: Jl. H. Leman Pintu Air No 45 Rt 001/004 Gerem Raya Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon	247.860.000	247.860.000		100,00%
	240	SMAS AL KHAIRIYAH 4	Kota Cilegon	SMAS AL-KHAIRIYAH 4 CILEGON Alamat: Jl. Lingkar Selatan KM 10,8 Link, Kracak RT/RW 12/04 Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	361.080.000	361.080.000		100,00%
	241	SMA BOSOWA AL AZHAR CILEGON	Kota Cilegon	SMA BOSOWA AL AZHAR CILEGON Alamat: JL. BOULEVARD BLOK B NO.5 TAMAN CILEGON INDAH Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon	70.380.000	35.190.000		50,00%
	242	SMAS IT RAUDHATUL JANNAH	Kota Cilegon	SMAIT Raudhatul Jannah Alamat: Grand Cilegon Residence Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon	1.054.170.000	1.104.920.000		104,81%
	243	SMAS AL KHAIRIYAH 3	Kota Cilegon	SMAS AL-KHAIRIYAH 3 CILEGON Alamat: Jl. H. Enggus arja No. 1 Citangkil Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten 41441 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon	71.910.000	116.910.000		162,58%
	244	SMAS AL KHAIRIYAH 2	Kota Cilegon	SMAS AL KHAIRIYAH 2 CILEGON Alamat: Jl. Pintu Tol Cilegon Barat, Link. Gunungwatu Kotasari Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon	59.670.000	59.670.000		100,00%
	245	SMAS MAFLAHUL UMMAH	Kota Cilegon	SMA MAFLAHUL UMMAH Alamat: JL.FATAHILLAH LINGK.SERANG ILIR KELURAHAN RANDAKARI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON. KODE POS 42446 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	264.690.000	264.620.000		99,97%
	246	SMA IT PUTRI AL HANIF	Kota Cilegon	SMAIT Putri Al Hanif Alamat: Perumnas Bumi Cibeber Kencana Jl. Garuda Blok F Komplek Pendidikan Yayasan Al Hanif Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon	344.250.000	389.250.000		113,07%
	247	SMAS AL KHAIRIYAH 1	Kota Cilegon	SMAS Al-Khairiyah 1 Cilegon Alamat: Jl. Sunan Bonang, Link. Penauan rt/rw 03/01, Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan, Kota Cilegon- Banten. Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	292.230.000	292.230.000		100,00%
	248	SMAS MUHAMMADIYAH CILEGON	Kota Cilegon	SMA Muhammadiyah Cilegon Alamat: Jl. Perintis No.03 Link. Rokal Kel. Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42411 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	38.250.000	38.250.000		100,00%
	249	SMAS ISLAM AL AZHAR 6	Kota Cilegon	SMA ISLAM AL AZHAR 6 Alamat: Jalan OXigen Komplek PT. Krakatau Steel Cilegon Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	120.870.000	165.870.000		137,23%
	250	SMAS AL MA ARIF	Kota Cilegon	SMAS AL-MA'ARIF Alamat: Jalan Pabean No.02 Tegal Bunder Purwakarta Kota Cilegon Kode POS 42437 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	180.540.000	180.540.000		100,00%
	251	SMAS AL AMIN	Kota Cilegon	SMAS AL AMIN CILEGON Alamat: Jl. Jangkar Sukun Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	7.650.000	3.825.000		50,00%
	252	SMAS AL ISHLAH CILEGON	Kota Cilegon	SMA AL-ISHLAH CILEGON Alamat: Jl. Al-Ishlah No. 03 Jombang Wetan Kota Cilegon Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon	88.740.000	88.740.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	253	SMAS DAARUL ISHLAH ISLAMIC	Kota Cilegon	SMAS Daarul Ishlah Islamic Alamat: Link. Semendaran, Rt. 001/003 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon	71.910.000	71.910.000		100,00%
	254	SMA IT NURUDZ DZIKRI	Kota Serang	SMA IT Nurudz Dziki Kota Serang Alamat: Jl. Ciruas-Petir Km.06 Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka Kota Serang	40.500.000	40.095.000		99,00%
	255	SMAS ARDANIAH	Kota Serang	SMA ARDANIAH Alamat: Jl. Cikurur - Kuranji, Komp. Pesantren Ardaniah, Ds. Panggung Jati, Kec. Taktakan, Kota Serang Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang	64.500.000	64.500.000		100,00%
	256	SMAS NURUL ISLAM KOTA SERANG	Kota Serang	SMA NURUL ISLAM KOTA SERANG Alamat: Jl. Banten No. 60 Kebakaran Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang	64.500.000	109.500.000		169,77%
	257	SMA PERADABAN	Kota Serang	SMAS Peradaban Alamat: Komp. Ciolang Jaya RT/RW 02/01 Kel. Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang	64.500.000	109.500.000		169,77%
	258	SMAS MARDIYUANA KOTA SERANG	Kota Serang	SMAS Mardi Yuana Serang Alamat: Jl. KH. Syamun No.3 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	99.000.000	99.000.000		100,00%
	259	SMAS AL MUBAROK KOTA SERANG	Kota Serang	SMA S AL-MUBAROK KOTA SERANG Alamat: JL. KH.ABDUL LATIEF NO.07 CIMUNCANG SERANG KOTA SERANG PROPINSI BANTEN KODE POS 42111 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang	249.000.000	249.000.000		100,00%
	260	SMAS MUHAMMADIYAH KOTA SRG	Kota Serang	SMA Muhammadiyah Kota Serang Alamat: Jalan Empat Lima No. 23 Kajon Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	28.500.000	28.500.000		100,00%
	261	SMAS AL HUDA	Kota Serang	SMAS AL HUDA Alamat: JL. MESJID BAETUTTAQWA BANGKALOK RT. 01/01 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka Kota Serang	60.000.000	60.000.000		100,00%
	262	SMAS I T AL FAHMI KOTA SERANG	Kota Serang	SMA IT AL FAHMI KOTA SERANG Alamat: Jl. Warung Jaud, kubang Apu Masjid RT 03/02 Terondol, Serang Banten Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	48.000.000	48.000.000		100,00%
	263	SMAS NURRUROHMAN	Kota Serang	SMA NURURROHMAN SEPANG KOTA SERANG Alamat: Jl. Raya Ciracas Km 08 No.11 Kp. Sepang Masjid Rt 01/Rw 01 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang	124.500.000	124.496.000		100,00%
	264	SMAS DARURROHMAN WALANTAKA	Kota Serang	SMAS DARURROHMAN WALANTAKA Alamat: Jalan Ciruas Walantaka Km. 03 Walantaka Kota Serang, Kp. Pesanggarahan Rt. 007/003 Kel. Walantaka Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang	33.000.000	33.000.000		100,00%
	265	SMAS INFORMATIKA	Kota Serang	SMAS INFORMATIKA KOTA SERANG Alamat: JL. KH. AMIN JASUTA NO.15B KALORAN BRIMOB Kelurahan Lontarbaru Kecamatan Serang Kota Serang	79.500.000	79.500.000		100,00%
	266	SMAS AL KAUTSAR CURUG	Kota Serang	SMAS AL - KAUTSAR CURUG Alamat: KP. WARU, JL. RAYA PANDEGLANG KM 09, KELURAHAN KEMANISAN, KECAMATAN CURUG KOTA SERANG , PROVINSI BANTEN Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang	52.500.000	52.500.000		100,00%
	267	SMAS CITRA AL-ALAWIYAH	Kota Serang	SMA CITRA AL-ALAWIYAH Alamat: Jln. Syekh Moch. Nawawi-Polda, Lingk. Gelam Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya 42122 Kota Serang 86 ^o Banten Kelurahan Banjaragung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	58.500.000	58.500.000		100,00%
	268	SMAIT BAIT ET-TAUHIED	Kota Serang	SMAIT Bait Et-Tauhied Alamat: Jl. Raya - Ciracas , Sepang Link. Batok Bali Kota Serang 42116 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	69.000.000	68.853.800		99,79%
	269	SMAS NUR EL BANTANY KOTA SRG	Kota Serang	SMA Nuur El-Bantany Kota Serang Alamat: Jl. Raya Sayabulu Dalung Km.1,5 Kel.Dalung Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang	111.000.000	110.500.000		99,55%
	270	SMAS PLUS AL - KHAIRIYAH KASEMEN	Kota Serang	SMA PLUS AL KHAIRIYAH KASEMEN Alamat: Jl Raya Sawahluhur KM 07 Badamusalam Sawahluhur Kasemen Kota Serang Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang	64.500.000	64.492.000		99,99%
	271	SMAS MAULANA YUSUF KOTA SRG	Kota Serang	SMA Maulana yusuf Kota Serang Alamat: Jln. Trip Jamaksari No. 44 Kaligandu Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota serang Provinsi Banten Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang	148.500.000	148.500.000		100,00%
	272	SMAS PGRI 1 KOTA SERANG	Kota Serang	SMAS PGRI 1 KOTA SERANG Alamat: Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No.17/B Serang Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang	34.500.000	34.500.000		100,00%
	273	SMAS IT DARUSSALAM PIPITAN	Kota Serang	SMAIT DARUSSALAM PIPITAN Alamat: Jl. Ciruas - Walantaka KM. 02 Pipitan, Walantaka Serang Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang	133.500.000	133.485.000		99,99%
	274	SMAS AGRO TAKTAKAN	Kota Serang	SMAS AGRO TAKTAKAN Alamat: JL. RAYA GUNUNGSARI KM 7 TAKTAKAN SERANG	58.500.000	58.500.000		100,00%
	275	SMAS MUHAMMADIYAH 3	Kota Tangerang	SMA Muhammadiyah 3 Tangerang Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	97.600.000	97.600.000		100,00%
	276	SMAS DHARMA PUTRA	Kota Tangerang	SMAS Dharma Putra Alamat: Jl. Otto Iskandardinata No. 80 RT. 04 RW 10 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	312.000.000	357.000.000		114,42%
	277	SMA ISLAM TERPADU GRANADA	Kota Tangerang	SMAIT Granada Alamat: Jl. Kav Pemda Gg. Ki Mulud No. 20 Rt. 01/03, Kp. Baru, Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang. 15115 Kelurahan Bojongjaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	32.000.000	77.000.000		240,63%
	278	SMAS MAJAPAHIT	Kota Tangerang	SMAS MAJAPAHIT Alamat: JL. BATAS PENINGGILAN, Kota Tangerang, Banten	88.000.000	88.000.000		100,00%
	279	SMAS AL MUBARAK	Kota Tangerang	SMA Al Mubarak Alamat: Jl. Kyai Madja Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang	81.600.000	81.600.000		100,00%
	280	SMAS YADIKA 3	Kota Tangerang	SMAS YADIKA 3 Alamat: Jl Raden Saleh No. 11, Karang Tengah Tangerang. Banten Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	952.000.000	997.000.000		104,73%
	281	SMAS PUSPITA	Kota Tangerang	SMA PUSPITA Alamat: Jl. Cisadane IV No. 124 RT.006/RW.004, Kel. Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	153.600.000	153.600.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	282	SMA DARUSSALAM	Kota Tangerang	SMA Darussalam Kota Tangerang Alamat: Jl. Maulana Hasanudin No. 35 Rt.02/02 Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang	177.600.000	177.600.000		100,00%
	283	SMAS DAARUL QUR AN INTERNASIONAL	Kota Tangerang	SMA Daarul Qur'an Internasional Alamat: Jalan Thamrin Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	539.200.000	539.200.000		100,00%
	284	SMA IT TUNAS HARAPAN ILAHI	Kota Tangerang	SMAIT TUNAS HARAPAN ILAHI Alamat: Jl. Tugu Karya II No.20, Sambi Doyong, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	254.400.000	299.400.000		117,69%
	285	SMAS FATAHILAH	Kota Tangerang	SMA Fatahillah Alamat: Jl. Masjid X-A No. 16 RT 002/07 Kelurahan Sudimara Timur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	328.000.000	328.000.000		100,00%
	286	SMA TANGERANG 1	Kota Tangerang	SMA TANGERANG 1 Alamat: Jl. KH. Hasyim Ashari gg. Hj. Halimah Rt 002/001 Kel. Poris Plawad Utara Kec. Cipondoh Kota Tangerang Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	59.200.000	59.200.000		100,00%
	287	SMAS YISLAH	Kota Tangerang	SMA YISLAH Alamat: Kp. Sangiang Kel. Sangiang Jaya Kec. Periuk Kota Tangerang 15132 Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang	272.000.000	272.000.000		100,00%
	288	SMAS STRADA ST AQUINO	Kota Tangerang	SMA Strada Thomas Aquino Alamat: Jl. Kavling Surya RT002/006 Pabuaran Karawaci, Kota Tangerang 15114 Kelurahan Pabuaran Tumpeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	1.315.200.000	1.360.200.000		103,42%
	289	SMAS AT THAHIRIN	Kota Tangerang	SMA AT THAHIRIN Alamat: Jl. Raden Patah Km. 1 No. 69 Sudimara Selatan- Ciledug Kota Tangerang Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	35.200.000	80.200.000		227,84%
	290	SMAS KRISTEN KANAAN	Kota Tangerang	SMA KRISTEN KANAAN Alamat: Jl.Sukamanah V no 11.Tangerang Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	270.400.000	315.400.000		116,64%
	291	SMAS PERGURUAN BUDDHI	Kota Tangerang	SMA PERGURUAN BUDDHI Alamat: JL. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Kota Tangerang Kelurahan Karawaci Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	392.000.000	437.000.000		111,48%
	292	SMAS AL AYANIAH	Kota Tangerang	SMA AL-AYANIYAH Alamat: Jl. Halim Perdana Kusuma No. 56 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang	163.200.000	160.389.021		98,28%
	293	SMAS PGRI 109	Kota Tangerang	SMA PGRI 109 TANGERANG Alamat: Jl. Untung Suropati II No.14 Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	1.467.200.000	1.467.200.000		100,00%
	294	SMAS AN NURMANIYAH	Kota Tangerang	SMA AN NURMANIYAH Alamat: Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 001 RW 010 No. 62, Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15153. Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	1.590.400.000	1.590.400.000		100,00%
	295	SMAS BABUS SALAM	Kota Tangerang	SMAS BABUS SALAM Alamat: JL. MERDEKA GG. PESANTREN 1 NO. 47 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	332.800.000	332.800.000		100,00%
	296	SMAS MANGGALA	Kota Tangerang	SMA Manggala Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto Gg. H.Ilyas No.63 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	124.800.000	124.800.000		100,00%
	297	SMAS YUPPEN TEK 1	Kota Tangerang	SMA YUPPEN TEK 1 TANGERANG Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kota Tangerang Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	1.817.600.000	1.862.600.000		102,48%
	298	SMA AMORE PRIME SCHOOL	Kota Tangerang	SMA AMORE PRIME SCHOOL Alamat: Metro Permata 1 Blok A1 No 29 Karang Mulya Karang Tengah Kota Tangerang Banten 15157 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	148.800.000	148.800.000		100,00%
	299	SMAS PGRI 117	Kota Tangerang	SMA PGRI 117 Alamat: Jl. HOS Cokroaminoto No 41 Karang Timur - Karang Tengah Kota Tangerang Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	768.000.000	768.000.000		100,00%
	300	SMAS AL HUSNA	Kota Tangerang	SMAS AL HUSNA KOTA TANGERANG Alamat: Jl. A. Damyati No. 43-45 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	238.400.000	238.400.000		100,00%
	301	SMAS DHUHAA ISLAMIC SCHOOL	Kota Tangerang	SMA Dhuhaa Islamic School Alamat: Jl. Sandong Raya, Bulak Santri No. 3 RT.002/Rw.005 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	70.400.000	115.400.000		163,92%
	302	SMAS ISLAM ASY SYAKIRIN	Kota Tangerang	SMA ISLAM ASYSYAKIRIN Alamat: JL. KH. HASYIM ASHARI RT.004/002 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang	219.200.000	219.200.000		100,00%
	303	SMA IT BUNAYYA	Kota Tangerang	SMA IT BUNAYYA Alamat: Jl. Prabu Siliwangi (Jl. Raya Pasar Kemis) KM. 3 RT/RW 004/005, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jati Ujung Kota Tangerang	60.800.000	105.800.000		174,01%
	304	SMAS ISLAM KAFAH UNGGUL	Kota Tangerang	SMA ISLAM KAFAH UNGGUL Alamat: Jl. Raden Saleh No. 56 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	115.200.000	160.200.000		139,06%
	305	SMAS NUSA PUTRA	Kota Tangerang	SMA NUSA PUTRA Alamat: Jl. Teuku Umar No. 12 Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	84.800.000	84.800.000		100,00%
	306	SMAS DAARUL MUQORROBIN	Kota Tangerang	SMA DAARUL MUQORROBIN Alamat: Jl. H. Jali Rt.01/03 Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten (15144) Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang	286.400.000	286.400.000		100,00%
	307	SMAS NUSANTARA 1	Kota Tangerang	SMAS NUSANTARA 1 Alamat: Jl. Cisadane VII Perumnas 1 Kota Tangerang Kelurahan Nusajaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	832.000.000	832.000.000		100,00%
	308	SMAS SYEKH YUSUF	Kota Tangerang	SMA Syekh-Yusuf Alamat: Jl. Syekh Yusuf No. 20 RT 005/006 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	473.600.000	518.565.000		109,49%
	309	SMAS DAAN MOGOT	Kota Tangerang	SMAS DAAN MOGOT Alamat: Jalan Gatot Subroto Km.5 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang	377.600.000	377.600.000		100,00%
	310	SMAS MANBAUL ULUM	Kota Tangerang	SMAS MANBAUL ULUM Alamat: Jl. Kh. Kilin PAP II Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang	364.800.000	409.800.000		112,34%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	311	SMAS DHARMA BAKTI	Kota Tangerang	SMA DHARMA BHAKTI Alamat: Jln. KH. Hasyim Ashari Km9 gg. bhakti II Kel. Sudimara Pinang Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang	76.800.000	121.800.000		158,59%
	312	SMAS MUHAMMADIYAH 4	Kota Tangerang	SMAS Muhammadiyah 4 Kota Tangerang Alamat: Jl. Sawo VI (Ujung) Perumnas 1 Kec. Cibodas Kel. Cibodasari Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang	212.800.000	212.800.000		100,00%
	313	SMAS PLUS IBADURRAHMAN	Kota Tangerang	SMA PLUS IBADURRAHMAN Alamat: JL. KH. HASYIM ASHARI GG. MASJID RT.006/006 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	286.400.000	286.400.000		100,00%
	314	SMA KUMNAMU	Kota Tangerang	SMA KUMNAMU Alamat: Jalan Palembang Raja III No. 6 Komplek Palembang Semi Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang	124.800.000	169.800.000		136,06%
	315	SMAS ISLAM AZ ZAMIR	Kota Tangerang	SMA ISLAM AZ ZAMIR Alamat: Jl. LUMBA-LUMBA NO. 3 PERUMAHAN KUNCIRAN MAS PERMAI Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang	38.400.000	38.369.700		99,92%
	316	SMAS AGAPE BK 3	Kota Tangerang	SMA AGAPE BK-3 Alamat: JALAN KEBON JAHE NO.2 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	126.400.000	171.389.000		135,59%
	317	SMAS SANTA PATRICIA	Kota Tangerang	SMAS SANTA PATRICIA Alamat: JL. PERUM DUTA GARDENIA BLOK G7 NO. 45, Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang	193.600.000	238.600.000		123,24%
	318	SMAS ISLAMIC CENTRE	Kota Tangerang	SMAS Islamic Centre Alamat: Jalan Cuijung Raya No. 4 RT. 009 RW. 002 Perumnas 1 Kec. Karawaci Kota Tangerang Kodepos 15116 Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	968.000.000	1.013.000.000		104,65%
	319	SMAS AL WASATIYAH	Kota Tangerang	SMAS AL WASATIYAH Alamat: Jl.Masjid Assolihin Kp.Dongkal RT.002/003 Kel.Cipondoh Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Kode POS 15148 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	193.600.000	193.600.000		100,00%
	320	SMAS BUDI MULIA	Kota Tangerang	SMAS BUDI MULIA Alamat: Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.1 Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	980.800.000	1.025.800.000		104,59%
	321	SMAS ASY SYUKRIYAH	Kota Tangerang	SMAS ASY-SYUKRIYAH Alamat: Jl. KH. Hasyim Ashari Km. 3 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	763.200.000	808.200.000		105,90%
	322	SMAS MUHAMMADIYAH 1	Kota Tangerang	SMA Muhammadiyah 1 Tangerang Alamat: Jl. Lembang 1 No. 63, Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, Banten Kelurahan Sudimara Barat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	81.600.000	81.600.000		100,00%
	323	SMAS MUHAMMADIYAH 2	Kota Tangerang	SMA Muhammadiyah 2 Alamat: Jl.Kh.Maulana Hasanudin No 63 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	1.038.400.000	1.038.400.000		100,00%
	324	SMA ISLAM AN NUQTHAH	Kota Tangerang	SMA ISLAM AN NUQTHAH Alamat: Jl. H.R. Rasuna Said, Gg. H. Ismail, RT. 01 RW. 05, Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten, Tel. (021) 5575 3914 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang	536.000.000	536.000.000		100,00%
	325	SMAS BINA INSANI	Kota Tangerang	SMA BINA INSANI Alamat: JL. H. MANSYUR NO 3 PRAPATAN GONDONG Kelurahan Neroktog Kecamatan Pinang Kota Tangerang	414.400.000	414.400.000		100,00%
	326	SMA ISLAM AL JABBAR	Kota Tangerang	SMA ISLAM AL JABBAR Alamat: Jl. Ki Usman RT 001 RW 004 Kel. Sangiang Jaya Kec. Perluk Kota Tangerang	235.200.000	235.200.000		100,00%
	327	SMAS ISLAM AL HASYIMIYAH	Kota Tangerang	SMAS ISLAM AL HASYIMIYAH Alamat: JL. SUKAMANDI RT 01/09 NO. 1 KARANGSARI, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten	177.600.000	177.565.000		99,98%
	328	SMAS MARKUS	Kota Tangerang	SMA MARKUS Alamat: JL. M.H. THAMRIN KM 4,5 KEBON NANAS Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang	91.200.000	90.537.744		99,27%
	329	SMAS SETIA BHAKTI	Kota Tangerang	SMA SETIA BHAKTI TANGERANG Alamat: Jl. Ki Samaun No.171. Kota Tangerang Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	73.600.000	73.000.000		99,18%
	330	SMA AL FURQON BOARDING SCHOOL	Kota Tangerang	SMA Al Furqon Boarding School Alamat: Jl. Untung Suropati 1 No.8 RT.003 Rw.003	193.600.000	193.600.000		100,00%
	331	SMAS YP KARYA	Kota Tangerang	SMA YP KARYA Alamat: Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Kosambi Km.3 Cipondoh Tangerang Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang	635.200.000	635.200.000		100,00%
	332	SMAS PRIBADI 2	Kota Tangerang	SMA PRIBADI 2 Alamat: Jl. Kavling Pemda I No. 5, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang	57.600.000	102.600.000		178,13%
	333	SMAS RAUDAH BARMAWIYAH	Kota Tangerang	SMA RAUDHAH BARMAWIYAH Alamat: Jl. H. Jasirin No.45 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang	70.400.000	69.183.000		98,27%
	334	SMAS ISLAM DARUL HASAN	Kota Tangerang	SMA ISLAM DARUL HASAN Alamat: Jl. Sipon Rt 01/ 01 No. 1 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	131.200.000	131.200.000		100,00%
	335	SMAS BUDI LUHUR	Kota Tangerang	SMA Budi Luhur Alamat: Jl. Raden Saleh No. 999, Karang Tengah, Kota Tangerang Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	774.400.000	774.400.000		100,00%
	336	SMAS TERPADU PP DAARUL AMANAH	Kota Tangerang	SMAS Terpadu PP Daarul Amanah Alamat: Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Jambu Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang Banten 15140 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	72.000.000	72.000.000		100,00%
	337	SMAS KI HAJAR DEWANTORO	Kota Tangerang	SMAS KI HAJAR DEWANTORO Alamat: JL. KH. HASYIM ASHARI KM 9 PINANG	1.113.600.000	1.158.600.000		104,04%
	338	SMAS PGRI 56 CIPUTAT	Kota Tangerang Selatan	SMAS PGRI 56 CIPUTAT Alamat: Jl. Pendidikan No. 30 Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15411 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	305.040.000	305.040.000		100,00%
	339	SMA NURUL FURQON	Kota Tangerang Selatan	SMA NURUL FURQON Alamat: Jl. Swadaya No.75 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang SRT RW Desa/Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Kec. Pondok Aren	68.880.000	68.880.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	340	SMAS 1926	Kota Tangerang Selatan	SMA 1926 Alamat: Jl. Pamulang Permai II No. 1, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	68.880.000	68.880.000		100,00%
	341	SMAS AL BARKAH	Kota Tangerang Selatan	SMA ORA ET LABORA Alamat: Kec. Serpong	60.680.000	60.680.000		100,00%
	342	SMAS K ORA ET LABORA BSD	Kota Tangerang Selatan	SMA ORA ET LABORA Alamat: Kec. Serpong	329.640.000	373.847.000		113,41%
	343	SMAS YASPITA	Kota Tangerang Selatan	SMAS YASPITA Alamat: Jl. Raya Serpong Km. 8 No. 22 RT 003 RW 001 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	127.920.000	127.920.000		100,00%
	344	SMAS EFATA SERPONG	Kota Tangerang Selatan	SMAS EFATA SERPONG Alamat: Melati Vista Casa De Verona Blok V 20/20 Melati Mas Residence Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	275.520.000	275.520.000		100,00%
	345	SMA MANBA UL ULUM BOARDING SCHOOL	Kota Tangerang Selatan	SMA MANBA UL ULUM BOARDING SCHOOL Alamat: Jl. Swadaya No. 41 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	150.880.000	150.880.000		100,00%
	346	SMA KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA	Kota Tangerang Selatan	SMA KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA Alamat: Jl. Tentara Pelajar No. 75 RT 003 RW 001 Kampung Lio, Perigi, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten	129.560.000	174.560.000		134,73%
	347	SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 3 BSD CITY	Kota Tangerang Selatan	SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 3 BSD CITY Alamat: Jl. Clater Raya Nomor 48, RT 002 RW 003	634.680.000	634.680.000		100,00%
	348	SMA ISLAM AL SYUKRO UNIVERSAL	Kota Tangerang Selatan	SMA ISLAM AL SYUKRO UNIVERSAL Alamat: Jl. Otista Raya Gg. H. Maung No. 30 Ciputat	147.600.000	147.600.000		100,00%
	349	SMA IT AL-QURANIYYAH	Kota Tangerang Selatan	SMA IT Al-Qur'aniyyah Alamat: Jl. Panti Asuhan Ceger Rt. 03/012 Jurangmangu Timur Pondok Aren Tangerang Selatan Banten 15222 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	551.040.000	551.040.000		100,00%
	350	SMAS TUNAS INDONESIA	Kota Tangerang Selatan	SMAS TUNAS INDONESIA Alamat: Jl. Raya Jombang No. 18 Bintaro Sektor IX Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	67.240.000	67.182.710		99,91%
	351	SMA PELITA BANGSA	Kota Tangerang Selatan	SMA PELITA BANGSA Alamat: Jl. Surya Kencana, Gg. H. Nursaid No.23 Pamulang - Tangerang Selatan Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	57.400.000	102.398.208		178,39%
	352	SMA OLAHRAGA PEMBANGUNAN JAYA RAYA	Kota Tangerang Selatan	SMA Olahraga Pembangunan Jaya Raya Alamat: GOR PB Jaya Raya CBD Sawah Baru Blok B7 / P &e 03A, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	75.440.000	120.440.000		159,65%
	353	SMA CITA MULIA	Kota Tangerang Selatan	SMA CITA MULIA Alamat: Jl. Dr. Setiabudi Gg. Angsana 2, No.64E Rt003/008, Pamulang Timur, PAMULANG, Tangerang Selatan, Banten 15417 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	72.160.000	72.160.000		100,00%
	354	SMA ABDI SISWA BINTARO	Kota Tangerang Selatan	SMA ABDI SISWA BINTARO Alamat: Komplek Perum Graha Raya KV GRB M9/01 RT/RW 004/002, Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	455.920.000	500.920.000		109,87%
	355	SMAS TECHNOSA	Kota Tangerang Selatan	SMA Technosa Alamat: Jl. Pondok Jagung No. 67 Serpong Utara Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	149.240.000	192.204.255		128,79%
	356	SMAS IT ALHUSAINY	Kota Tangerang Selatan	SMAS IT Al Husainy Alamat: Jl. Al Husainy Kp Perigi Rt.002 Rw.010 Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	224.680.000	224.680.000		100,00%
	357	SMAS TARUNA MANDIRI	Kota Tangerang Selatan	SMA Taruna Mandiri Alamat: Jl. Raya pamulang 2 No. 3 Pamulang, Tangerang Selatan Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	201.720.000	201.720.000		100,00%
	358	SMAS HELLOMOTION	Kota Tangerang Selatan	SMA HelloMotion Alamat: JL. Merpati Raya No. 103A Sawah Lama - Ciputat, Tangerang Selatan Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	336.200.000	380.981.391		113,32%
	359	SMA IT BAITUL QURRO	Kota Tangerang Selatan	SMA IT Baitul Qurro Alamat: Jl. Suli Blok D No. KH 26 Ciputat Baru, Sawah Lama RT 04/06, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15413 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	75.440.000	75.440.000		100,00%
	360	SMAS PLUS PEMBANGUNAN JAYA	Kota Tangerang Selatan	SMA Plus Pembangunan Jaya Alamat: Jl. Taman Makam Bahagia ABRI Bintaro Jaya Sektor IX, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15227 Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	587.120.000	620.339.500		105,66%
	361	SMAS MUHAMMADIYAH 8 CIPUTAT	Kota Tangerang Selatan	SMA MUHAMMADIYAH 8 CIPUTAT Alamat: JL. DEWI SARTIKA NO. 4 GG. NANGKA CIPUTAT Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	1.566.200.000	1.566.200.000		100,00%
	362	SMA PLUS BINA INSANI	Kota Tangerang Selatan	SMA Plus Bina Insani Alamat: Jalan Manunggal V No. 27 RT 004/002 Kel. Perigi Baru, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	104.960.000	104.960.000		100,00%
	363	SMAS DHARMA KARYA UT	Kota Tangerang Selatan	SMAS DHARMA KARYA UT Alamat: JL.TALAS II/30 : Desa/Kelurahan: PONDOK CABE ILIR	733.080.000	778.080.000		106,14%
	364	SMA ISLAM SINAR CENDEKIA	Kota Tangerang Selatan	SMA ISLAM SINAR CENDEKIA Alamat: Jln Lengkong Gudang Timur no 10, Serpong, Tangerang Selatan, Banten Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	364.080.000	409.080.000		112,36%
	365	SMA AL-FATH CIRENDEU	Kota Tangerang Selatan	SMA AL-FATH CIRENDEU Alamat: Jl. Cirendeu Raya No. 42 Pisanan Ciputat Timur Tangerang Selatan	291.920.000	336.920.000		115,42%
	366	SMAS AL-MADINAH ISLAMIC CENTER KKMB	Kota Tangerang Selatan	SMAS AL-MADINAH ISLAMIC CENTER KKMB Alamat: I. Puspita Raya Blok L1 No. 1A Sektor III/2 BSD, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan	73.800.000	73.800.000		100,00%
	367	SMAS KEBANGSAAN	Kota Tangerang Selatan	SMAS KEBANGSAAN Alamat: Jl. Raya Pondok Aren No. 31, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	201.720.000	201.720.000		100,00%
	368	SMAS ARIF RAHMAN HAKIM	Kota Tangerang Selatan	SMA Arif Rahman Hakim Alamat: Jl. Taman Makan Makam Bahagia Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	834.760.000	834.760.000		100,00%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	369	SMAS STELLA MARIS BSD	Kota Tangerang Selatan	SMA STELLA MARIS BSD Alamat: Jl. Artha Kencana Kavling C1/1 Kencana Loka Sektor XII BSD Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	250.920.000	217.011.976		86,49%
	370	SMA KATOLIK BHAKTI PRIMA	Kota Tangerang Selatan	SMA KATOLIK BHAKTI PRIMA Alamat: Alamat : Jl.Beringin No.8 RT / RW : / Dusun : Desa / Kelurahan : Pamulang Barat	21.320.000	0		0,00%
	371	SMAS NUSANTARA PLUS	Kota Tangerang Selatan	SMA Nusantara Plus Alamat: Jl. Tarumanegara Dalam No. 01 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	416.560.000	461.560.000		110,80%
	372	SMA INSAN RABBANY	Kota Tangerang Selatan	SMA INSAN RABBANY Alamat: JL RAYA CIATER SEKTOR I.1 KEL RAWAMEKAR JAYA Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	378.840.000	387.039.968		102,16%
	373	SMAS ADZKIA ISLAMIC SCHOOL	Kota Tangerang Selatan	SMA Adzkia Islamic School Alamat: Jl. Suka Mulya V No.1, RT.01/RW.05, Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414 Kelurahan Sarua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	152.520.000	197.520.000		129,50%
	374	SMAS ISLAM CIKAL HARAPAN I	Kota Tangerang Selatan	SMA Islam Cikal Harapan I Alamat: Kencana Loka Blok B.09 No.01 Sektor XII.1 BSD Tangerang Selatan Banten Telepon/fax (021) 75874647 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	326.360.000	371.360.000		113,79%
	375	SMA IT AL-KAUTSAR	Kota Tangerang Selatan	SMA IT AL-KAUTSAR Alamat: Jl. Talas III, Gg. Labu IV, Pondok Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan	113.160.000	158.160.000		139,77%
	376	SMA IT INSAN MADANI 8	Kota Tangerang Selatan	SMA ISLAM TERPADU INSAN MADANI 8 Alamat: Jl. Japos Raya No. 79 Rt. 001/013 Kelurahan Jurang Manggu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	298.480.000	298.480.000		100,00%
	377	SMAS JAYA PLUS MONTESSORI SCHOOL	Kota Tangerang Selatan	SMAS JAYA PLUS MONTESSORI SCHOOL Alamat: Jl Mawi No. 39/50 Rt.003 Rw. 02 Graha Raya, Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan	57.400.000	57.400.000		100,00%
	378	SMAS CENDERAWASIH II	Kota Tangerang Selatan	SMAS CENDERAWASIH II Alamat: Komplek Deplu 74, Kota Tangerang Selatan, Banten	339.480.000	339.480.000		100,00%
	379	SMA MUTIARA HARAPAN	Kota Tangerang Selatan	SMA MUTIARA HARAPAN Alamat: Jl. Raya Pondok Kacang No. 2 Bintaro RT / RW : 6 / 1	31.160.000	0		0,00%
	380	SMAS KATOLIK MATER DEI	Kota Tangerang Selatan	SMAS Katolik Mater Dei Alamat: Jalan Siliwangi Komplek Pamulang Permai I, Pamulang Barat Pamulang Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	672.400.000	717.400.000		106,69%
	381	SMAS IZADA	Kota Tangerang Selatan	SMAS IZADA Alamat: JL. JOMBANG RAYA NO. 25 A Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	442.800.000	487.800.000		110,16%
	382	SMA ERENOS	Kota Tangerang Selatan	SMA ERENOS Alamat: Jl. Palapa Rt. 003 Rw.18 Parung Benyung, Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan	139.400.000	184.400.000		132,28%
	383	SMAS AL MUBARAK	Kota Tangerang Selatan	SMAS ALMUBARAK - Pondok Aren Alamat: Jl. Raya Ciledug Jombang No 15 RT 03 RW 06 Kel. Pd. Kacang Timur Kec. Pd. Aren Kota Tangerang Selatan Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	477.240.000	522.240.000		109,43%
	384	SMAS TRIGUNA UTAMA	Kota Tangerang Selatan	SMA TRIGUNA UTAMA Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No.KM. 2, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	1.136.520.000	1.136.520.000		100,00%
	385	SMAS DARUSSALAM	Kota Tangerang Selatan	SMAS DARUSSALAM Alamat: Jln. Otista No. 36 RT 001/ 010 Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	414.920.000	412.136.891		99,33%
	386	SMA KRISTEN SOLIDEO	Kota Tangerang Selatan	SMA Kristen SoliDEO Alamat: Jl. Batam Sektor XIV-4 Selatan Blok J-11 Kav 02 Nusa Loka, BSD Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	78.720.000	78.719.998		100,00%
	387	SMA IT AULADY	Kota Tangerang Selatan	SMA IT AULADY Alamat: Jl.HS.Nawi Waru, Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten	42.640.000	42.640.000		100,00%
	388	SMA ISLAM ASSA' ADAH	Kota Tangerang Selatan	SMA Islam Assa'adah Alamat: Jl. Raya Puspitek Puri Serpong 1 Blok C Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan	136.120.000	136.095.000		99,98%
	389	SMAS MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG	Kota Tangerang Selatan	SMA Muhammadiyah 25 Pamulang Alamat: Jl. Surya Kencana No. 29 RT. 01 RW. 05 kode pos 15417 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	1.121.760.000	1.121.760.000		100,00%
	390	SMAS DWI PUTRA	Kota Tangerang Selatan	SMA DWI PUTRA Alamat: Jl. Aria PutraBukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	73.800.000	73.800.000		100,00%
	391	SMAS DUA MEI	Kota Tangerang Selatan	SMA Dua Mei Alamat: Jl. H. Abdul Gani No.135 kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	291.920.000	291.920.000		100,00%
	392	SMAS KATOLIK RICCI II	Kota Tangerang Selatan	SMA KATOLIK RICCI II Alamat: Jl, Utama II No.1-2 Pondok Karya, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan 15225 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	365.720.000	410.720.000		112,30%
	393	SMA AL ADZKAR	Kota Tangerang Selatan	SMA AL ADZKAR Alamat: Jl. Pinang RT.002 RW.014 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	382.120.000	426.504.494		111,62%
	394	SMA JAGAT ARSY	Kota Tangerang Selatan	SMA Jagat 'Arsy Alamat: Jl. Yapen Raya, Jalan PAM No. 21 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan - Banten Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	106.600.000	106.600.000		100,00%
	395	SMAS PGRI 22	Kota Tangerang Selatan	SMAS PGRI 22 Alamat: Jl. Pahlawan Seribu No. 60 Telp/Fax ; 021-7562410 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	383.760.000	382.211.206		99,60%
	396	SMA ISLAM TERPADU AULIYA	Kota Tangerang Selatan	SMAIT AULIYA Alamat: Jalan Jombang Raya No 49, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	549.400.000	594.400.000		108,19%

NO	SKPD	Nama Penerima	Kabupaten/Kota	Alamat Penerima	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	%
	397	SMAS EHIPASSIKO SCHOOL	Kota Tangerang Selatan	SMAS EHIPASSIKO SCHOOL Alamat: Jalan Letnan Sutopo Kav. B2 No.1-2 Sektor XIV.4 BSD City, Tangerang Selatan Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan	242.720.000	287.720.000		118,54%
	398	SMAS CANDLE TREE	Kota Tangerang Selatan	SMAS CANDLE TREE Alamat: JL. JATI NO. 1 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	369.000.000	405.250.000		109,82%
	399	SMAS YADIKA 6 PONDOK AREN	Kota Tangerang Selatan	SMAS YADIKA 6 PONDOK AREN Alamat: Jl. Jurangmangu Barat Raya No. 25 A, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Kelurahan Jurang Manggu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	824.920.000	824.920.000		100,00%
	400	SMAS WASKITO	Kota Tangerang Selatan	SMA WASKITO Alamat: Jl.Raya Pamulang Permai II No.75 Sarua Ciputat Kelurahan Sarua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan	1.348.080.000	1.393.080.000		103,34%
	401	SMAS MOH. HUSNI THAMRIN	Kota Tangerang Selatan	SMAS MOH. HUSNI THAMRIN Alamat: Jl. HS Nawi Situ Gintung Ciputat, Tangsel-Banten Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	16.400.000	16.154.000		98,50%
	402	SMA IT AL-LAUZAH	Kota Tangerang Selatan	SMA IT AL-LAUZAH Alamat: Jl. Palapa Raya RT.03 RW.18 Parung Beunying Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan RT / RW : 3 / 18	39.360.000	84.360.000		214,33%
				TOTAL	130.300.858.000	134.021.623.121	-	102,86%

LAPORAN PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKANPEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 7 Calk

No	Nama Kegiatan	Nama Paket/ Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Progress Realisasi Fisik	Sudah Dibayarkan TA. 2025			Sisa Kontrak/ Yang Belum dibayarkan (Rp)
					SP2D			
					No	Tgl	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-8
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 16 Kabupaten Tangerang	7.390.021.235,00	93,82	959.4/010302/LS/BUD/2025	45959	2.217.006.371,00	5.173.014.864,00
2	Rehab Ruang Praktik Siswa SMK	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 12 Kota Tangerang	8.844.467.342,00	89,26	959.4/017640/LS/BUD/2025	46022	2.653.340.203,00	6.191.127.139,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros	5.858.757.600,00	94,95	959.4/010205/LS/BUD/2025	45957	1.757.627.280,00	4.101.130.320,00
4	Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMK	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Panggarangan	881.964.927,00	99,08			-	881.964.927,00
5	Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMK	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam	1.559.971.239,00	89,95	959.4/010298/LS/BUD/2025	45958	467.991.372,00	1.091.979.867,00
6	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Lahan USB SMKN 6 Kota Serang	692.045.736,00	100	-	-	-	692.045.736,00
JUMLAH			25.227.228.079,00					18.131.262.853,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Pasirpeuteuy-Cijahe	4.432.451.000	41,57			2.532.580.775	1.899.870.225,00
2	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak	7.762.700.500	90,00			6.637.108.927	1.125.591.573,00
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibinuangeun	8.419.007.700	98,00			7.838.096.169	580.911.531,00
4	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilemer	7.378.915.860	65,00			4.556.480.544	2.822.435.316,00
5	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisata	8.432.312.320	90,00			7.209.627.034	1.222.685.286,00
6	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisangu Atas	7.621.699.300	80,00			5.792.491.468	1.829.207.832,00
7	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Utama)	3.687.378.100	98,00			3.431.105.322	256.272.778,00
8	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap 1	9.176.705.000	91,00			7.823.241.012	1.353.463.988,00
9	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds. Cemplang Kec. Cimas)	398.556.000	85,00			324.105.739	74.450.261,00
10	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	398.337.800	91,00			346.656.805	51.680.995,00

11	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten	128.958.000	91,00			122.510.100	6.447.900,00
12	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Adiyaksa Tinggi Banten	49.615.000	91,00			47.134.250	2.480.750,00
13	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Binda Provinsi Banten Tahap I	128.566.000,00	91,00			109.281.100,00	19.284.900,00
14	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds. Cemplang Kec. Cimas)	42.920.000,00	91,00			38.628.000,00	4.292.000,00
15	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	42.933.000,00	91,00			38.639.700,00	4.293.300,00
JUMLAH			58.101.055.580				46.847.686.945	11.253.368.635
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jenis Pekerjaan: Jalan Lingkungan Link. Kranggot Rw. 004, Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon						190.700.000,00
2	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Landscape Kab Pandeglang						188.132.000,00
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Perkerasan Jalan Menuju Hunian Tetap Desa Banjarasri Kec Lebak Gedong Kab Lebak						399.520.000,00
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pengawasan Perkerasan Jalan Menuju Hunian Tetap Desa Banjarasri Kec Lebak Gedong Kab Lebak						45.165.000,00
JUMLAH								823.517.000,00

RINCIAN PIUTANG ATAS SURAT TANDA SETORAN (STS)
PENGEMBALIAN BELANJA PER OPD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	TANGGAL SETOR	SALDO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		592.241.558
		09-Jan-26	18.500.000
		15-Jan-26	1.080.000
		15-Jan-26	1.800.000
		15-Jan-26	540.000
		15-Jan-26	4.860.000
		15-Jan-26	540.000
		15-Jan-26	900.000
		15-Jan-26	3.780.000
		19-Jan-26	389.000
		20-Jan-26	497.628
		20-Jan-26	327.000
		21-Jan-26	3.011.384
		21-Jan-26	3.011.384
		21-Jan-26	3.011.384
		21-Jan-26	3.011.384
		21-Jan-26	3.011.384
		27-Jan-26	2.237.186
		28-Jan-26	7.500.000
		03-Feb-26	237.500
		03-Feb-26	237.500
		03-Feb-26	237.500
		03-Feb-26	625.800
		03-Feb-26	758.200
		03-Feb-26	512.900
		03-Feb-26	646.700
		03-Feb-26	379.100
		04-Feb-26	2.218.216
		05-Feb-26	535.000
		10-Feb-26	2.500.000
		10-Feb-26	1.000.000
		11-Feb-26	30.752.100
		13-Feb-26	168.000.000
		13-Feb-26	40.000.000
		18-Feb-26	55.721.049
		19-Feb-26	39.422.381
		24-Feb-26	4.500.000
		24-Feb-26	7.500.000
		26-Feb-26	22.638.200
		26-Feb-26	41.147.619
		27-Feb-26	22.259.790
		27-Feb-26	10.904.269
		27-Feb-26	81.500.000
2	RSUD Labuan	10-Mar-26	482.551
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		321.942.288
		28-Jan-26	4.385.000
		02-Feb-26	7.956.000
		03-Feb-26	30.446.720
		03-Feb-26	46.854.054
		03-Feb-26	28.266.739
		03-Feb-26	2.091.500

NO	OPD	TANGGAL SETOR	SALDO (Rp)
		03-Feb-26	9.890.000
		03-Feb-26	13.538.000
		03-Feb-26	37.074.000
		03-Feb-26	20.590.000
		03-Feb-26	18.466.000
		03-Feb-26	25.446.000
		03-Feb-26	1.713.500
		04-Feb-26	1.520.000
		04-Feb-26	55.805.775
		04-Feb-26	1.330.000
		04-Feb-26	11.073.000
		02-Feb-26	1.246.000
		02-Feb-26	4.250.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		55.089.600
		29-Jan-26	2.810.000
		02-Feb-26	1.700.000
		23-Feb-26	12.190.000
		25-Feb-26	3.362.000
		25-Feb-26	5.234.000
		27-Feb-26	540.000
		27-Feb-26	1.160.000
		27-Feb-26	580.000
		27-Feb-26	4.497.500
		27-Feb-26	6.019.300
		27-Feb-26	3.557.900
		27-Feb-26	6.340.800
		27-Feb-26	5.483.700
		27-Feb-26	1.614.400
5	Dinas Sosial		2.608.860
		02-Feb-26	2.608.860
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		32.327.442
		23-Jan-26	11.963.441
		23-Jan-26	18.409.001
		27-Jan-26	1.955.000
7	Sekretariat DPRD		387.802.328
		02-Jan-26	250.000
		02-Jan-26	250.000
		05-Jan-26	25.003.560
		06-Jan-26	1.750.000
		08-Jan-26	58.453.549
		08-Jan-26	86.838.462
		12-Jan-26	42.408.054
		14-Jan-26	34.510.000
		14-Jan-26	4.050.000
		14-Jan-26	250.000
		14-Jan-26	250.000
		14-Jan-26	800.000
		14-Jan-26	450.000
		14-Jan-26	450.000
		14-Jan-26	450.000
		14-Jan-26	450.000
		14-Jan-26	450.000
		14-Jan-26	654.152
		14-Jan-26	685.395
		14-Jan-26	759.361
		14-Jan-26	628.547

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	OPD	TANGGAL SETOR	SALDO (Rp)
		23-Jan-26	30.000.000
		23-Jan-26	10.000.000
		23-Jan-26	20.000.000
		26-Jan-26	20.000.000
		26-Jan-26	20.000.000
		26-Jan-26	10.000.000
		26-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	10.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	10.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		27-Jan-26	20.000.000
		28-Jan-26	20.000.000
		28-Jan-26	20.000.000
		28-Jan-26	20.000.000
		28-Jan-26	20.000.000
		28-Jan-26	33.000.000
		28-Jan-26	21.000.000
		28-Jan-26	21.540.600
		29-Jan-26	30.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		29-Jan-26	20.000.000
		30-Jan-26	20.000.000
		30-Jan-26	20.000.000
		30-Jan-26	201.500
		02-Feb-26	20.356.500
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		02-Feb-26	20.000.000
		05-Feb-26	20.000.000
		05-Feb-26	20.000.000
05-Feb-26	20.000.000		
05-Feb-26	20.000.000		
05-Feb-26	20.000.000		
09-Feb-26	20.000.000		
10-Feb-26	20.000.000		
10-Feb-26	65.500.000		
11-Feb-26	10.318.500		
11-Feb-26	20.000.000		
11-Feb-26	20.000.000		
11-Feb-26	20.000.000		
11-Feb-26	20.000.000		
11-Feb-26	20.000.000		
12-Feb-26	20.000.000		
12-Feb-26	20.000.000		

NO	OPD	TANGGAL SETOR	SALDO (Rp)
		13-Feb-26	20.000.000
		13-Feb-26	20.000.800
		13-Feb-26	20.000.000
		18-Feb-26	20.000.000
		23-Feb-26	20.000.000
		23-Feb-26	20.000.000
		23-Feb-26	20.000.000
		25-Feb-26	20.000.000
		25-Feb-26	20.000.000
		26-Feb-26	20.000.000
		26-Feb-26	20.287.000
		26-Feb-26	20.000.000
		27-Feb-26	20.000.000
9	Badan Pendapatan Daerah		166.065.800
		08-Jan-26	800.000
		08-Jan-26	3.000.000
		08-Jan-26	4.846.500
		08-Jan-26	4.565.150
		08-Jan-26	1.550.000
		08-Jan-26	750.000
		08-Jan-26	150.000
		08-Jan-26	5.393.450
		08-Jan-26	5.154.200
		08-Jan-26	3.840.000
		09-Jan-26	3.549.450
		09-Jan-26	2.437.200
		09-Jan-26	2.540.000
		09-Jan-26	2.300.000
		09-Jan-26	450.000
		09-Jan-26	150.000
		09-Jan-26	2.510.000
		09-Jan-26	3.734.050
		09-Jan-26	5.185.250
		09-Jan-26	3.485.400
		09-Jan-26	8.820.000
		09-Jan-26	8.905.950
		14-Jan-26	20.873.950
		14-Jan-26	20.089.200
		19-Jan-26	30.254.100
		21-Jan-26	20.731.950
10	Badan Penghubung		100.529.483
		13-Feb-26	8.400.000
		13-Feb-26	12.980.000
		13-Feb-26	7.400.000
		18-Feb-26	7.120.000
		18-Feb-26	390.000
		18-Feb-26	700.000
		18-Feb-26	11.470.000
		18-Feb-26	11.670.000
		18-Feb-26	3.010.000
		18-Feb-26	1.220.000
		18-Feb-26	1.430.000
		18-Feb-26	1.580.000
		18-Feb-26	210.000
		09-Apr-26	32.949.483
	TOTAL		5.856.849.251

SALDO KAS PROVINSI BANTEN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	KETERANGAN	NO REKENING	KAS DAN SETARA KAS		
			SALDO BANK	SALDO TUNAI	TOTAL
1	2	3	3	4	6 = 3+4+5
1	Kas Daerah - Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.	0801202021	335.671.538	-	335.671.538
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	NIHIL
3	Kas di Bendahara BLUD	-	35.713.661.608	-	35.713.661.608
4	Kas di Bendahara BOS	-	2.797.507.593	-	2.797.507.593
5	Kas Lainnya	-	-	-	NIHIL
TOTAL					38.846.840.739

SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	UPT RSUD Banten	-
4	UPT RSUD Malingping	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
15	Dinas Perhubungan	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
22	Dinas Pariwisata	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
27	Biro Hukum	-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
29	Biro Umum	-
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-
32	Biro Administrasi Pimpinan	-
33	Sekretariat DPRD	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
39	Badan Penghubung	-
40	Inspektorat	-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
TOTAL		-

SALDO KAS DI BENDAHARA BLUD
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO REKENING	KAS DI BENDAHARA BLUD		
			SALDO BANK	SALDO TUNAI	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	BLUD RSUD CILOGRANG	0890099157	117.343.925,94	-	117.343.926
2	BLUD RSUD LABUAN	0764008006	2.119.099.815,93	-	2.119.099.816
3	UPT RSUD Banten (BLUD)	0801000479	28.880.239.669,81	-	28.880.239.670
4	UPT RSUD Malingping (BLUD)	0821000009	4.596.978.196,58	-	4.596.978.197
TOTAL			35.713.661.608,26	-	35.713.661.608

SALDO KAS DIBENDAHARA BOS
Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
	KABUPATEN LEBAK			153.770.446
1	SKHN 01 LEBAK	0821000734	20601811 SKHN 01 LEBAK	-
2	SKHN 02 LEBAK	0821000742	20601812 SKHN 02 LEBAK	-
3	SKHN 03 LEBAK	0891000243	69919380 SKHN 03 LEBAK	-
4	SMAN 1 BANJARSARI	0821000521	20601867 SMAN 1 BANJARSARI	-
5	SMAN 1 BAYAH	0891000022	20601881 SMAN 1 BAYAH	68.002.032
6	SMAN 1 BOJONGMANIK	0821000696	20607981 SMAN 1 BOJONGMANIK	-
7	SMAN 1 CIBADAK	0821000572	20607980 SMAN 1 CIBADAK	-
8	SMAN 1 CIBEBER	0891000111	20607866 SMAN 1 CIBEBER	1.246.385
9	SMAN 1 CIGEMBLONG	0891000065	20623096 SMAN 1 CIGEMBLONG	-
10	SMAN 1 CIHARA	0891000006	69816881 SMAN 1 CIHARA	1.605.900
11	SMAN 1 CIJAKU	0891000138	20614930 SMAN 1 CIJAKU	-
12	SMAN 1 CIKULUR	0821000564	20607982 SMAN 1 CIKULUR	-
13	SMAN 1 CILELES	0821000459	20607819 SMAN 1 CILELES	27.726.970
14	SMAN 1 CILOGRANG	0891000057	20607867 SMAN 1 CILOGRANG	4.295.445
15	SMAN 1 CIMARGA	0821000530	20601880 SMAN 1 CIMARGA	-
16	SMAN 1 CIPANAS	0821000441	20601879 SMAN 1 CIPANAS	278.175
17	SMAN 1 CIRINTEN	0821005078	70011608 SMA NEGERI 1 CIRINTEN	-
18	SMAN 1 CURUGBITUNG	0821000513	20613913 SMAN 1 CURUGBITUNG	-
19	SMAN 1 GUNUNG KENCANA	0891000146	20601878 SMAN 1 GUNUNG KENCANA	-
20	SMAN 1 KALANGANYAR	0821000467	69816901 SMAN 1 KALANGANYAR	177.600
21	SMAN 1 LEUWIDAMAR	0821000556	20601877 SMAN 1 LEUWIDAMAR	11.159.200
22	SMAN 1 MAJA	0821000505	20601876 SMAN 1 MAJA	-
23	SMAN 1 MALINGPING	0891000162	20601875 SMAN 1 MALINGPING	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
24	SMAN 1 MUNCANG	0821000475	20607862 SMAN 1 MUNCANG	9.013.000
25	SMAN 1 PANGGARANGAN	0891000031	20607877 SMAN 1 PANGGARANGAN	-
26	SMAN 1 RANGKASBITUNG	0821000653	20601874 SMAN 1 RANGKASBITUNG	9.089.979
27	SMAN 1 SAJIRA	0821000548	20613868 SMAN 1 SAJIRA	-
28	SMAN 1 SOBANG	0821000483	20614150 SMAN 1 SOBANG	184.000
29	SMAN 1 WANASALAM	0891000049	20607854 SMAN 1 WANASALAM	3.250.000
30	SMAN 1 WARUNGGUNUNG	0821000777	20601873 SMAN 1 WARUNGGUNUNG	-
31	SMAN 2 BANJARSARI	0891000120	20613919 SMAN 2 BANJARSARI	-
32	SMAN 2 BAYAH	0891000090	69816866 SMAN 2 BAYAH	211.650
33	SMAN 2 CIBEBER	0821000661	20616229 SMAN 2 CIBEBER	-
34	SMAN 2 CIJAKU	0821005035	70011600 SMA NEGERI 2 CIJAKU	-
35	SMAN 2 LEUWIDAMAR	0821000688	60725227 SMAN 2 LEUWIDAMAR	-
36	SMAN 2 MAJA	0821000602	20623417 SMAN 2 MAJA	700.000
37	SMAN 2 MALINGPING	0891000103	69945798 SMAN 2 MALINGPING	-
38	SMAN 2 MUNCANG	0821005060	70011599 SMA NEGERI 2 MUNCANG	-
39	SMAN 2 Panggarangan	0891000863	69985722 SMAN 2 PANGGARANGAN	-
40	SMAN 2 RANGKASBITUNG	0821000629	20601872 SMAN 2 RANGKASBITUNG	-
41	SMAN 3 CIBEBER	0891000081	69946232 SMAN 3 CIBEBER	-
42	SMAN 3 PANGGARANGAN	0821005043	70011604 SMAN 3 PGRGN	-
43	SMAN 3 RANGKAS BITUNG	0821000491	20601871 SMAN 3 RANGKAS BITUNG	-
44	SMAN 4 PANGGARANGAN	0821005051	70011607 SMAN 4 PGRGN	-
45	SMAN 4 RANGKASBITUNG	0821005027	70011680 SMAN 4 RKSBTG	15.410.000
46	SMKN 1 BAYAH	0891000154	20613910 SMKN 1 BAYAH	-
47	SMKN 1 CIBEBER	0891001100	20615866 SMKN 1 CIBEBER	-
48	SMKN 1 CIHARA	0821005132	70011856 SMK NEGERI 1 CIHARA	-
49	SMKN 1 CIKULUR	0821000637	69883576 SMKN 1 CIKULUR	-
50	SMKN 1 CILELES	0821000700	69883594 SMKN 1 CILELES	-
51	SMKN 1 CIPANAS	0821000726	20607872 SMKN 1 CIPANAS	-
52	SMKN 1 CIRINTEN	0821000611	20616197 SMKN 1 CIRINTEN	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
53	SMKN 1 CURUGBITUNG	0821000645	20623421 SMKN 1 CURUGBITUNG	110,00
54	SMKN 1 GUNUNG KENCANA	0891000073	20616539 SMKN 1 GUNUNG KENCANA	540.000,00
55	SMKN 1 KALANGANYAR	0821005124	70011591 SMKN 1 KALANGANYAR	-
56	SMKN 1 LEBAKGEDONG	0821000751	20614881 SMKN 1 LEBAKGEDONG	-
57	SMKN 1 Leuwidamar	0821004357	70002729 SMKN 1 LEUWIDAMAR	-
58	SMKN 1 MAJA	0821005272	70011614 SMK NEGERI 1 MAJA	-
59	SMKN 1 MALINGPING	0891000201	20607873 SMKN 1 MALINGPING	-
60	SMKN 1 PANGGARANGAN	0821005094	70011857 SMKN 1 PANGGARANGAN	-
61	SMKN 1 RANGKASBITUNG	0821000670	20607803 SMKN 1 RANGKASBITUNG	880.000,00
62	SMKN 1 SAJIRA	0821005086	70011664 SMK NEGERI 1 SAJIRA	-
63	SMKN 1 SOBANG	0821000785	69946179 SMKN 1 SOBANG	-
64	SMKN 1 WANASALAM	0891000855	69987107 SMKN 1 WANASALAM	-
65	SMKN 1 WARUNGGUNUNG	0821000599	20623420 SMKN 1 WARUNGGUNUNG	-
66	SMKN 2 CIHARA	0821005108	70011795 SMK NEGERI 2 CIHARA	-
67	SMKN 2 MALINGPING	0821005116	70011896 SMKN 2 MALINGPING	-
68	SMKN 2 RANGKASBITUNG	0821000581	20601850 SMKN 2 RANGKASBITUNG	-
				-
	KABUPATEN PANDEGLANG			276.273.640
1	SKHN 01 PEMBINA PANDEGLANG	0831001178	20600448 SKHN 01 PEMBINA PDG	-
2	SMAN 1 PANDEGLANG	0831000872	20600451 SMAN 1 PANDEGLANG	-
3	SMAN 2 PANDEGLANG	0831000881	20600468 SMAN 2 PANDEGLANG	142.688.125
4	SMAN 3 PANDEGLANG	0762000091	20600467 SMAN 3 PANDEGLANG	-
5	SMAN 4 PANDEGLANG	0762000083	20600466 SMAN 4 PANDEGLANG	119.654
6	SMAN 5 PANDEGLANG	0831000911	20600465 SMAN 5 PANDEGLANG	14.850.000
7	SMAN 6 PANDEGLANG	0831000929	20600464 SMAN 6 PANDEGLANG	-
8	SMAN 7 PANDEGLANG	0831000937	20600463 SMAN 7 PANDEGLANG	9.220.079
9	SMAN 8 PANDEGLANG	0831000945	20600462 SMAN 8 PANDEGLANG	-
10	SMAN 9 PANDEGLANG	0901000301	20600461 SMAN 9 PANDEGLANG	-
11	SMAN 10 PANDEGLANG	0831000961	20600452 SMAN 10 PANDEGLANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
12	SMAN 11 PANDEGLANG	0831000970	20600453 SMAN 11 PANDEGLANG	-
13	SMAN 12 PANDEGLANG	0831000988	20600471 SMAN 12 PANDEGLANG	-
14	SMAN 13 PANDEGLANG	0831000996	20600470 SMAN 13 PANDEGLANG	-
15	SMAN 14 PANDEGLANG	0831001003	20600469 SMAN 14 PANDEGLANG	-
16	SMAN 15 PANDEGLANG	0762000067	20600460 SMAN 15 PANDEGLANG	-
17	SMAN 16 PANDEGLANG	0831000139	20600459 SMAN 16 PANDEGLANG	-
18	SMAN 17 PANDEGLANG	0831001038	20600434 SMAN 17 PANDEGLANG	522.540
19	SMAN 18 PANDEGLANG	0901000379	69985873 SMAN 18 PANDEGLANG	-
20	SMAN 19 PANDEGLANG	0831003871	70011722 SMAN 19 PANDEGLANG	2.900.000
21	SMAN CMBBS	0831001046	20607805 SMAN CMBBS	-
22	SMKN 1 PANDEGLANG	0831001054	20600458 SMKN 1 PANDEGLANG	-
23	SMKN 2 PANDEGLANG	0831001062	20600565 SMKN 2 PANDEGLANG	-
24	SMKN 3 PANDEGLANG	0762000075	20600571 SMKN 3 PANDEGLANG	-
25	SMKN 4 PANDEGLANG	0831001089	20600570 SMKN 4 PANDEGLANG	1.081.014
26	SMKN 5 PANDEGLANG	0831001097	20600569 SMKN 5 PANDEGLANG	-
34	SMKN 13 PANDEGLANG	0762000059	69986892 SMKN 13 PANDEGLANG	40.600.000
35	SMKN 14 PANDEGLANG	0831004550	69986573 SMKN 14 PANDEGLANG	733.880
36	SMKN 15 PANDEGLANG	0831003901	70011509 SMKN 15 PANDEGLANG	-
37	SMKN 16 PANDEGLANG	0831003898	70011552 SMKN 16 PANDEGLANG	-
38	SMKN 17 PANDEGLANG	0831003880	70011543 SMKN 17 PANDEGLANG	-
39	SMKN 18 PANDEGLANG	0831007818	70046226 SMKN 18 PANDEGLANG	826.500
	KOTA SERANG			201.138.068
1	SKHN 01 KOTA SERANG	0801010326	20605334 SKHN 01 KOTA SERANG	3.511.400
2	SKHN 02 KOTA SERANG	0801011055	20605332 SKHN 02 KOTA SERANG	3.372.350
3	SMAN 1 KOTA SERANG	0801010351	20605093 SMAN 1 KOTA SERANG	-
4	SMAN 2 KOTA SERANG	0801009964	20605103 SMAN 2 KOTA SERANG	-
5	SMAN 3 KOTA SERANG	0801010016	20605094 SMAN 3 KOTA SERANG	-
6	SMAN 4 KOTA SERANG	0801009981	20605106 SMAN 4 KOTA SERANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
7	SMAN 5 KOTA SERANG	0801013449	20605327 SMAN 5 KOTA SERANG	-
8	SMAN 6 KOTA SERANG	0801010024	20607979 SMAN 6 KOTA SERANG	-
9	SMAN 7 KOTA SERANG	0801010253	69734160 SMAN 7 KOTA SERANG	-
10	SMAN 8 KOTA SERANG	0801024335	69758396 SMAN 8 KOTA SERANG	-
11	SMKN 1 KOTA SERANG	0801010075	20605058 SMKN 1 KOTA SERANG	-
12	SMKN 2 KOTA SERANG	0801010164	20605059 SMKN 2 KOTA SERANG	38.735.118
13	SMKN 3 KOTA SERANG	0801010199	20605126 SMKN 3 KOTA SERANG	-
14	SMKN 4 KOTA SERANG	0801010202	20607900 SMKN 4 KOTA SERANG	155.519.200
15	SMKN 5 KOTA SERANG	0801010032	20614350 SMKN 5 KOTA SERANG	-
16	SMKN 6 KOTA SERANG	0801010458	20616187 SMKN 6 KOTA SERANG	-
17	SMKN 7 KOTA SERANG	0801010130	69771387 SMKN 7 KOTA SERANG	-
18	SMKN 8 KOTA SERANG	0801010580	20615095 SMKN 8 KOTA SERANG	-
	KABUPATEN SERANG			512.348.704
1	SMAN 1 ANYER	0811000337	20605353 SMAN 1 ANYER	-
2	SMAN 1 BANDUNG	0801010091	20613795 SMAN 1 BANDUNG	-
3	SMAN 1 BAROS	0801010059	20605097 SMAN 1 BAROS	-
4	SMAN 1 BINUANG	0801010083	20613796 SMAN 1 BINUANG	-
5	SMAN 1 BOJONEGARA	0801010105	20605354 SMAN 1 BOJONEGARA	321.500
6	SMAN 1 CARENANG	0801010440	20605366 SMAN 1 CARENANG	-
7	SMAN 1 CIKANDE	0801009867	20613970 SMAN 1 CIKANDE	-
8	SMAN 1 CIKEUSAL	0801010181	20605228 SMAN 1 CIKEUSAL	-
9	SMAN 1 CINANGKA	0811000213	20605090 SMAN 1 CINANGKA	-
10	SMAN 1 CIOMAS	0801010318	20605102 SMAN 1 CIOMAS	-
11	SMAN 1 CIRUAS	0801010407	20605104 SMAN 1 CIRUAS	65.480.000
12	SMAN 1 GUNUNG SARI	0801024866	20613794 SMAN 1 GUNUNG SARI	-
13	SMAN 1 JAWILAN	0801009930	20605105 SMAN 1 JAWILAN	-
14	SMAN 1 KIBIN	0801010008	20605107 SMAN 1 KIBIN	161.690.601
15	SMAN 1 KOPO	0801009956	20613788 SMAN 1 KOPO	2.560.000

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
16	SMAN 1 KRAGILAN	0801010393	69759246 SMAN 1 KRAGILAN	-
17	SMAN 1 KRAMAT WATU	0801024858	20605108 SMAN 1 KRAMAT WATU	1.600.000
18	SMAN 1 LEBAK WANGI	0801023657	69986036 SMAN 1 LEBAK WANGI	-
19	SMAN 1 MANCAK	0801009948	20605109 SMAN 1 MANCAK	-
20	SMAN 1 PABUARAN	0801009883	20605110 SMAN 1 PABUARAN	-
21	SMAN 1 PADARINCANG	0801009841	20605101 SMAN 1 PADARINCANG	-
22	SMAN 1 PAMARAYAN	0801009859	20605100 SMAN 1 PAMARAYAN	-
23	SMAN 1 PETIR	0801009832	20605091 SMAN 1 PETIR	-
24	SMAN 1 PONTANG	0801010121	20605092 SMAN 1 PONTANG	-
25	SMAN 1 PULOAMPEL	0801010148	20622300 SMAN 1 PULOAMPEL	-
26	SMAN 1 TIRTAYASA	0801009921	20605095 SMAN 1 TIRTAYASA	-
27	SMAN 1 WARINGINKURUNG	0801009999	20605096 SMAN 1 WARINGINKURUNG	-
28	SMKN 1 ANYER	0811000841	20623155 SMK NEGERI 1 ANYER	-
29	SMKN 1 BAROS	0881005123	70046399 SMKN 1 BAROS	9.492.490
30	SMKN 1 CIKANDE	0801010610	20605057 SMKN 1 CIKANDE	-
31	SMKN 1 CINANGKA	0801010229	20622311 SMKN 1 CINANGKA	-
32	SMKN 1 CIRUAS	0801010156	20622312 SMKN 1 CIRUAS	-
33	SMKN 1 KRAGILAN	0801010041	20607901 SMKN 1 KRAGILAN	256.347.430
34	SMKN 1 KRAMATWATU	0811000523	69788590 SMKN 1 KRAMATWATU	-
35	SMKN 1 PADARINCANG	0881001853	69986692 SMKN 1 PADARINCANG	-
36	SMKN 1 PULOAMPEL	0811000612	20613866 SMKN 1 PULOAMPEL	-
37	SMKN 1 TANARA	0801010601	20614541 SMKN 1 TANARA	14.856.683
38	SMKN 1 TUNJUNG TEJA	0801010474	20622313 SMKN 1 TUNJUNG TEJA	-
39	SMKN 1 WARINGINKURUNG	0811010103	69986693 SMKN 1 WARINGINKURUNG	-
	KOTA CILEGON			461.752.676
1	SKHN 01 KOTA CILEGON	0811001724	69994894 SKHN 01 KOTA CILEGON	-
2	SMAN 1 CILEGON	0811000647	20606289 SMAN 1 CILEGON	-
3	SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON	0811000361	20606271 SMAN 2 KS CILEGON	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
4	SMAN 3 CILEGON	0811000272	20606270 SMAN 3 CILEGON	-
5	SMAN 4 CILEGON	0811000426	20613531 SMAN 4 CILEGON	-
6	SMAN 5 CILEGON	0811000302	20606269 SMAN 5 CILEGON	24.057.200
7	SMKN 1 CILEGON	0811000485	20606250 SMKN 1 CILEGON	437.695.476
8	SMKN 2 CILEGON	0811000248	20606249 SMKN 2 CILEGON	-
9	SMKN 3 CILEGON	0811000931	20615483 SMKN 3 CILEGON	-
10	SMKN 4 CILEGON	0811000451	20616304 SMKN 4 CILEGON	-
	KABUPATEN TANGERANG			561.471.169
1	SKHN 01 KABUPATEN TANGERANG	0732001549	20615486 SKHN 01 KAB TANGERANG	-
2	SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	0732000763	20613470 SMAN 1 KAB TANGERANG	-
3	SMAN 2 KABUPATEN TANGERANG	0732001182	20603367 SMAN 2 KAB TANGERANG	-
4	SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG	0732000194	20603361 SMAN 3 KAB TANGERANG	150.784.427
5	SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG	0732000933	20603358 SMAN 4 KAB TANGERANG	10.408.947
6	SMAN 5 KABUPATEN TANGERANG	0732001034	20603364 SMAN 5 KAB TANGERANG	-
7	SMAN 6 KABUPATEN TANGERANG	0732000810	20603269 SMAN 6 KAB TANGERANG	-
8	SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG	0732001158	20603365 SMAN 7 KAB TANGERANG	-
9	SMAN 8 KABUPATEN TANGERANG	0732000160	20603360 SMAN 8 KAB TANGERANG	105.136.657
10	SMAN 9 KABUPATEN TANGERANG	0732001069	20603366 SMAN 9 KAB TANGERANG	100.000
11	SMAN 10 KABUPATEN TANGERANG	0732000968	20603362 SMAN 10 KAB TANGERANG	-
12	SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG	0732000691	20603251 SMAN 11 KAB TANGERANG	-
13	SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG	0732001361	20603268 SMAN 12 KAB TANGERANG	899.810
14	SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG	0732001484	20603384 SMAN 13 KAB TANGERANG	-
15	SMAN 14 KABUPATEN TANGERANG	0732000780	20613543 SMAN 14 KAB TANGERANG	-
16	SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG	0732000721	20613603 SMAN 15 KAB TANGERANG	-
17	SMAN 16 KABUPATEN TANGERANG	0732001247	20603363 SMAN 16 KAB TANGERANG	136.682.460
18	SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG	0732000631	20613528 SMAN 17 KAB TANGERANG	-
19	SMAN 18 KABUPATEN TANGERANG	0732000844	20614413 SMAN 18 KAB TANGERANG	114.000
20	SMAN 19 KABUPATEN TANGERANG	0732000305	20613465 SMAN 19 KAB TANGERANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
21	SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG	0732001093	20613548 SMAN 20 KAB TANGERANG	-
22	SMAN 21 KABUPATEN TANGERANG	0732001123	20613544 SMAN 21 KAB TANGERANG	-
23	SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG	0732001301	20613519 SMAN 22 KAB TANGERANG	-
24	SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG	0732000585	20613785 SMAN 23 KAB TANGERANG	-
25	SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG	0732001450	20613464 SMAN 24 KAB TANGERANG	-
26	SMAN 25 KABUPATEN TANGERANG	0732001514	20613833 SMAN 25 KAB TANGERANG	122.500
27	SMAN 26 KABUPATEN TANGERANG	0732000828	20614057 SMAN 26 KAB TANGERANG	-
28	SMAN 27 KABUPATEN TANGERANG	0732001395	20613471 SMAN 27 KAB TANGERANG	-
29	SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG	0702000131	20613771 SMAN 28 KAB TANGERANG	-
30	SMAN 29 KABUPATEN TANGERANG	0732001271	20613561 SMAN 29 KAB TANGERANG	168.729
31	SMAN 30 KABUPATEN TANGERANG	0732100911	69990896 SMAN 30 KAB TANGERANG	-
32	SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG	0732103635	70011662 SMAN 31 KAB TANGERANG	-
33	SMAN 32 KABUPATEN TANGERANG	0732103660	70011668 SMAN 32 KAB TANGERANG	-
34	SMKN 1 KABUPATEN TANGERANG	0732001336	20607834 SMKN 1 KAB TANGERANG	-
35	SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG	0732000437	20607835 SMKN 2 KAB TANGERANG	156.953.639
36	SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG	0732000135	20614735 SMKN 3 KAB TANGERANG	-
37	SMKN 4 KABUPATEN TANGERANG	0732001212	20613439 SMKN 4 KAB TANGERANG	-
38	SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG	0732001662	20607837 SMKN 5 KAB TANGERANG	-
39	SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG	0732001573	20614727 SMKN 6 KAB TANGERANG	-
40	SMKN 7 KABUPATEN TANGERANG	0732001603	20614509 SMKN 7 KAB TANGERANG	-
41	SMKN 8 KABUPATEN TANGERANG	0732001425	20614732 SMKN 8 KAB TANGERANG	-
42	SMKN 9 KABUPATEN TANGERANG	0732000640	20622176 SMKN 9 KAB TANGERANG	-
43	SMKN 10 KABUPATEN TANGERANG	0732001638	69786933 SMKN 10 KAB TANGERANG	-
44	SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG	0732000658	69824463 SMKN 11 KAB TANGERANG	-
45	SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG	0732001000	69897080 SMKN 12 KAB TANGERANG	100.000
46	SMKN 13 KABUPATEN TANGERANG	0732104488	70046641 SMKN 13 KAB TANGERANG	-
47	SMKN 14 KABUPATEN TANGERANG	0732100466	70046137 SMKN 14 KAB TANGERANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
	KOTA TANGERANG			145.907.907
1	SKHN 01 TANGERANG	0710999813	70046546 SKHN 01 KOTA TGR	-
2	SMAN 1 TANGERANG	0712001194	20606853 SMAN 1 TANGERANG	2.200.372
3	SMAN 2 TANGERANG	0712000040	20606848 SMAN 2 TANGERANG	8.781.868
4	SMAN 3 TANGERANG	0131000103	20606847 SMAN 3 TANGERANG	8.710.615
5	SMAN 4 TANGERANG	0722000021	20606846 SMAN 4 TANGERANG	3.067.605
6	SMAN 5 TANGERANG	0722000072	20606831 SMAN 5 TANGERANG	9.183.152
7	SMAN 6 TANGERANG	0712002883	20606830 SMAN 6 TANGERANG	20.796.622
8	SMAN 7 TANGERANG	0131000090	20606829 SMAN 7 TANGERANG	12.581.552
9	SMAN 8 TANGERANG	0722000048	20606814 SMAN 8 TANGERANG	17.389.803
10	SMAN 9 TANGERANG	0131000111	20606813 SMAN 9 TANGERANG	23.616.432
11	SMAN 10 TANGERANG	0131000120	20606852 SMAN 10 TANGERANG	-
12	SMAN 11 TANGERANG	0722000030	20606851 SMAN 11 TANGERANG	22.606.098
13	SMAN 12 TANGERANG	0137001926	20606850 SMAN 12 TANGERANG	1.995.992
14	SMAN 13 TANGERANG	0131000146	20606849 SMAN 13 TANGERANG	8.209.993
15	SMAN 14 TANGERANG	0712001224	20607501 SMAN 14 TANGERANG	5.462.891
16	SMAN 15 TANGERANG	0722000056	20607924 SMAN 15 TANGERANG	1.304.912
17	SMKN 1 TANGERANG	0712001259	20606915 SMKN 1 TANGERANG	-
18	SMKN 2 TANGERANG	0722000081	20606900 SMKN 2 TANGERANG	-
19	SMKN 3 TANGERANG	0712001283	20606899 SMKN 3 TANGERANG	-
20	SMKN 4 TANGERANG	0712004177	20606898 SMKN 4 TANGERANG	-
21	SMKN 5 TANGERANG	0712001372	20607929 SMKN 5 TANGERANG	-
22	SMKN 6 TANGERANG	0712002913	20614355 SMKN 6 TANGERANG	-
23	SMKN 7 TANGERANG	0722000102	20615542 SMKN 7 TANGERANG	-
24	SMKN 8 TANGERANG	0722000064	20616265 SMKN 8 TANGERANG	-
25	SMKN 9 TANGERANG	0722000099	20616266 SMKN 9 TANGERANG	-
	KOTA TANGERANG SELATAN			484.844.983
1	SKHN 01 KOTA TANGERANG SELATAN	0702002192	70012340 SKHN 01 KOTA TANGSEL	-

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	NAMA DI REKENING	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
2	SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000369	20603359 SMAN 1 KOTA TGR SLTN	-
3	SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000033	20613477 SMAN 2 KOTA TGR SLTN	23.943.000
4	SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000386	20603368 SMAN 3 KOTA TGR SLTN	26.059.346
5	SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000334	20603270 SMAN 4 KOTA TGR SLTN	-
6	SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000393	20603312 SMAN 5 KOTA TGR SLTN	11.561.100
7	SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000416	20613768 SMAN 6 KOTA TGR SLTN	121.426.967
8	SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN	0742000303	20603267 SMAN 7 KOTA TGR SLTN	60.552.000
9	SMAN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	0142000423	20613552 SMAN 8 KOTA TGR SLTN	5.915.301
10	SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000360	20613518 SMAN 9 KOTA TGR SLTN	11.143.927
11	SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN	0702003261	20613553 SMAN 10 KOTA TGR SLTN	21.609.398
12	SMAN 11 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000394	20613563 SMAN 11 KOTA TGR SLTN	58.214.532
13	SMAN 12 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000408	69756084 SMAN 12 KOTA TGR SLTN	47.703.167
14	SMKN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000149	20607836 SMKN 1 KOTA TANGSEL	-
15	SMKN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000173	20614730 SMKN 2 KOTA TANGSEL	87.368.245
16	SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000165	20616038 SMKN 3 KOTA TANGSEL	-
17	SMKN 4 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000424	69760703 SMKN 4 TANGSEL	-
18	SMKN 5 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000084	69757487 SMKN 5 TANGSEL	-
19	SMKN 6 KOTA TANGERANG SELATAN	0742000206	69939071 SMKN 6 KOTA TANGSEL	9.348.000
20	SMKN 7 KOTA TANGERANG SELATAN	0702000106	69939073 SMKN 7 KOTA TANGSEL	-
21	SMKN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	0702005531	70046138 SMKN 8 TANGSEL	-
	TOTAL			2.797.507.593

**SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan	-
3	UPT RSUD Banten	-
4	UPT RSUD Malingping	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
9	Dinas Sosial	-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
15	Dinas Perhubungan	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
22	Dinas Pariwisata	-
23	Dinas Pertanian	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KAS BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
27	Biro Hukum	-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-
29	Biro Umum	-
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa	-
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-
32	Biro Administrasi Pimpinan	-
33	Sekretariat DPRD	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
36	Badan Pendapatan Daerah	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
39	Badan Penghubung	-
40	Inspektorat	-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
TOTAL		-

**REKAPITULASI PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 6 Neraca

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Piutang Pajak Daerah	3.970.600	19.853	3.950.747
	Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I	-	-	-
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II	-	-	-
	Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-
	Pajak Air Permukaan	3.970.600	19.853	3.950.747
	Pajak Rokok	-	-	-
2	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	545.115.887
	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	545.115.887
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311	1.960.131	17.641.180
	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	19.601.311	1.960.131	17.641.180
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	350.763.862	849.074	349.914.788
	Piutang Jasa Giro	180.948.977	0	180.948.977
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	168.276.785	841.384	167.435.401
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.690	1.530.410
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	576.641.493.000
	Piutang Dana Perimbangan	576.641.493.000	-	576.641.493.000
6	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	4.609.749.111
	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	4.609.749.111
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	2.126.882.873	7.747.344.013
	Piutang TP	-	-	-
	Piutang TGR	9.874.226.886	2.126.882.873	7.747.344.013
8	Piutang Lainnya	10.897.963.851	5.041.114.600	5.856.849.251
	Piutang Rekanan atas Uang Muka 20% pengadaan Alkes TA 2013 oleh Dinkes	5.041.114.600	5.041.114.600	-
	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	5.856.849.251	-	5.856.849.251
	Jumlah	602.945.623.784	7.173.565.807	595.772.057.977

REKAPITULASI TOTAL PIUTANG PAJAK LANCAR PKB, BBNKB, ABT/AP, PBBKB
PER 31 DESEMBER 2025

NO	UPTD	TOTAL PIUTANG PAJAK LANCAR					SALDO PENYISIHAN PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG	SALDO PIUTANG BERSIH
		SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN TUNGGAKAN	DALUARSA	PENURUNAN TUNGGAKAN	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	0 - 1 tahun Lancar (0,5%)	2 - 3 tahun Kurang Lancar (10%)	3 - 5 tahun Diragukan (50%)	Diatas 5 tahun Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13= 7-12
1	UPTD SERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	UPTD CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD PANDEGLANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	6.927.400	-	-	6.927.400	-	-	-	-	-	-	-
4	UPTD LEBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	UPTD CIKANDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPTD SERPONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPTD CIKOKOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD CIPUTAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	UPTD BALARAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	UPTD CILEDUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	UPTD MALINGPNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	3.970.600	-	-	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
12	UPTD KELAPA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PBBKB	268.189.673	-	-	268.189.673	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SELURUHNYA		275.117.073	3.970.600	-	275.117.073	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747

REKAPITULASI TOTAL PIUTANG PAJAK PKB, BBNKB, ABT/AP

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TOTAL PIUTANG PAJAK					SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
		SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN TUNGGAKAN	DALUARSA	PENURUNAN TUNGGAKAN	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	0 - 1 tahun Lancar (0,5%)	2 - 3 tahun Kurang Lancar (10%)	3 - 5 tahun Diragukan (50%)	Diatas 5 tahun Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9	10	11	12= 8+9+10+11	13= 7-12
1	PKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BBNKB I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BBNKB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ABT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	AP	-	3.970.600	-	-	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
6	PAJAK ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PBBKB	268.189.673	-	-	268.189.673	-	-	-	-	-	-	-
8	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		268.189.673	3.970.600	-	268.189.673	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747

PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 8 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PIUTANG BLUD)
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan	RSUD BANTEN	2.368.835.100	-	-	2.368.835.100	-	-	-	-	-	-	-
2	Piutang BLUD - BPJS Ketenagakerjaan	RSUD BANTEN	-	-	240.976.600	-	240.976.600	1.204.883	-	-	-	1.204.883	239.771.717
3	Piutang BLUD - PT. Asuransi Jasaraharja	RSUD BANTEN	-	-	98.151.825	-	98.151.825	490.759	-	-	-	490.759	97.661.066
4	Piutang BLUD - PT. Taspen	RSUD BANTEN	-	-	67.976.500	-	67.976.500	339.883	-	-	-	339.883	67.636.618
5	Piutang BLUD - BKD Provinsi Banten	RSUD BANTEN	-	-	2.280.000	-	2.280.000	11.400	-	-	-	11.400	2.268.600
6	Piutang BLUD - RS Drajat Prawiranegara	RSUD BANTEN	-	-	6.500.000	-	6.500.000	32.500	-	-	-	32.500	6.467.500
	SUB JUMLAH RSUD BANTEN		2.368.835.100	-	415.884.925	2.368.835.100	415.884.925	2.079.425	-	-	-	2.079.425	413.805.500
7	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan	RSUD MALINGPING	3.479.478.832	-	-	3.479.478.832	-	-	-	-	-	-	-
8	Piutang BLUD - BPJS Kesehatan Obat Kronis	RSUD MALINGPING	-	-	129.762.238	-	129.762.238	648.811	-	-	-	648.811	129.113.427
	SUB JUMLAH RSUD MALINGPING		3.479.478.832	-	129.762.238	3.479.478.832	129.762.238	648.811	-	-	-	648.811	129.113.427
10	Piutang BLUD - PT Cemindo Gemilang, Tbk	RSUD CILOGRANG	-	-	2.208.000	-	2.208.000	11.040	-	-	-	11.040	2.196.960
	SUB JUMLAH RSUD CILOGRANG		-	-	2.208.000	-	2.208.000	11.040	-	-	-	11.040	2.196.960
	JUMLAH		5.848.313.932	-	547.855.163	5.848.313.932	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA PIUTANG : PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2024	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	BAPENDA	19.601.311	-	-	-	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
	Jumlah		19.601.311	-	-	-	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 10 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Pengembalian Jasa Giro Hibah PWRI	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengembalian Jasa giro LPTQ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembalian Jasa giro Baznas		-		639.147	-	639.147	-	-	-	-	-	639.147
4	Piutang Jasa Giro Rekening Giro Pemerintah Posisi Tanggal 25 s/d 31	Badan Pendapatan Daerah	366.671.526	-	180.309.830	366.671.526	180.309.830	-	-	-	-	0	180.309.830
	20606853 SMAN 1 TANGERANG		19.582	-	904	19.582	904	-				-	904
	BEND PENG PEMB UPTD CIKOKOL		11.231	-	1.561	11.231	1.561	-				-	1.561
	UPTD PENG DAS CIDURIAN CISADAN		237.688	-	0	237.688	0	-				-	0
	20606814 SMAN 8 TANGERANG		6.181	-	7.146	6.181	7.146	-				-	7.146
	20614413 SMAN 18 KAB TANGERANG		58	-	47	58	47	-				-	47
	KCD KABUPATEN TANGERANG		342	-	44	342	44	-				-	44
	BENDPENGPEM KCD WIL KOTANGSEL		3.801	-	-	3.801	-	-				-	-
	BEND PENG PEM UPT KELAPA DUA		3.528	-	234	3.528	234	-				-	234
	UPTDPJJ TANGERANG		-	-	34.116	-	34.116	-				-	34.116
	69986892 SMKN 13 PANDEGLANG		13.815	-	16.685	13.815	16.685	-				-	16.685
	KAS BLUD RSU BANTEN		12.829.568	-		12.829.568	-	-				-	-
	20605094 SMAN 3 KOTA SERANG		-	-	-	-	-	-				-	-
	20605354 SMAN 1 BOJONEGARA		6.464	-	132	6.464	132	-				-	132
	20607900 SMKN 4 KOTA SERANG		-	-	63.912	-	63.912	-				-	63.912
	20605057 SMKN 1 CIKANDE		-	-	-	-	-	-				-	-
	BPKAD PROVINSI BANTEN		10.208	-	15.303	10.208	15.303	-				-	15.303
	BEND PENG DISNAKER PROV BANTEN		8.629	-	1.650	8.629	1.650	-				-	1.650
	DPUPR PROVINSI BANTEN		255.190	-	134.922	255.190	134.922	-				-	134.922
	BEND PENG DIKBUD PROV BANTEN		148.727	-	9.213.797	148.727	9.213.797	-				-	9.213.797
	BEND PENG DKP PROV BANTEN		84.986	-	-	84.986	-	-				-	-
	BIRO ADPIM SETDA PROV BANTEN		14.355	-	15.081	14.355	15.081	-				-	15.081
	BEND PENG DISPAR PROV BANTEN		-	-	-	-	-	-				-	-

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih	
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun			
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13	
	BEND PENG DISHUB PROV BANTEN		189.267	-	278.555	189.267	278.555	-				-	278.555	
	SEKRETARIAT DAERAH PROV BANTEN		41.359	-	105.737	41.359	105.737	-				-	105.737	
	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN		1.463.731	-	2.789.161	1.463.731	2.789.161	-				-	2.789.161	
	BEND PENG DINKES PROV BANTEN		147.791	-	180.367	147.791	180.367	-				-	180.367	
	UPTD DAS CIUJUNG CIDANAU		5.671	-	-	5.671	-	-	-				-	-
	UPTD P DAS CILIMAN CISAWARNA		29.074	-	-	29.074	-	-	-				-	-
	BEND PENG DPK PROV BANTEN		52.876	-	46.001	52.876	46.001	-					-	46.001
	BEND PENG DLHK PROV BANTEN		95.485	-	54.811	95.485	54.811	-					-	54.811
	BEND PENG BAPPEDA PROV BANTEN		324.594	-	-	324.594	-	-					-	-
	BEND PENG DP3AKKB PROV BANTEN		79.007	-	41.315	79.007	41.315	-					-	41.315
	BEND PENG PEM UPTD LABKESDA		19.715	-	62.454	19.715	62.454	-					-	62.454
	BENG PENG PEM UPTD PELKES		28.373	-	77.144	28.373	77.144	-					-	77.144
	BEND PENG PEM UPTD PJJSC		55.809	-	1.827	55.809	1.827	-					-	1.827
	BEND PENG PEM KCD SERAGON		2.444	-	822	2.444	822	-					-	822
	RKUD PROVINSI BANTEN		346.623.285	-	157.507.550	346.623.285	157.507.550	-					-	157.507.550
	BEND PENG PEM UPTD PBKBIK		-	-	19.927	-	19.927	-					-	19.927
	20605090 SMAN 1 CINANGKA		-	-	-	-	-	-					-	-
	BEND PENG PEMB UPT CILEGON		3.066	-	12.842	3.066	12.842	-					-	12.842
	BLUD RSUD MALINGPING		1.339.069	-		1.339.069	-	-					-	-
	UPTDPJL		75.877	-	16.005	75.877	16.005	-					-	16.005
	BEND PENG PEMBANTU KCD LEBAK		1.094	-	1.633	1.094	1.633	-					-	1.633
	BEND PENG PEM UPTD PPD RANGKAS		212	-	8.629	212	8.629	-					-	8.629
	BENDPENGPEM DIKBUD KCD KAB PDG		22	-	3.100	22	3.100	-					-	3.100
	BEND PENG BPSDMD PROV BANTEN		126.568	-	-	126.568	-	-					-	-
	BEND PENG BAPENDA PROV BANTEN		113.358	-	814.446	113.358	814.446	-					-	814.446
	BEND PENG INSPEKTORAT BANTEN		2.238	-	272.518	2.238	272.518	-					-	272.518
	BEND PENG PRKP PROV BANTEN		68.886	-	106.413	68.886	106.413	-					-	106.413
	BEND PENG BPBD PROV BANTEN		12.897	-	45.079	12.897	45.079	-					-	45.079
	BEND PENG DPMTSP PROV BANTEN		58.326	-	220.320	58.326	220.320	-					-	220.320
	BEND PENG DISPERINDAG		6.257	-	-	6.257	-	-					-	-
	BEND PENG PEMB RSUD BANTEN		132.328	-	2.338.555	132.328	2.338.555	-					-	2.338.555
	BEND PENG DISPORA		413.599	-	4.921	413.599	4.921	-					-	4.921
	BEND PENG KETAPANG		49.390	-	1.076	49.390	1.076	-					-	1.076
	BEND PENG KOMINFOTIKSAN BANTEN		44.633	-	10.106	44.633	10.106	-					-	10.106
	BEND PENG PEMB BIRO HUKUM		18.453	-	-	18.453	-	-					-	-
	BEND PENG DPMD PROV BANTEN		3.657	-	-	3.657	-	-					-	-
	BEND PENG DINSOS PROV BANTEN		127.306	-	83.465	127.306	83.465	-					-	83.465
	BEND PENG KESBANGPOL BANTEN		3.153	-	-	3.153	-	-					-	-
	BEND PENG BKD PROV BANTEN		151.098	-	9.192	151.098	9.192	-					-	9.192
	BEND PENG PEM BPTJJP WIL PDG		64.384	-	-	64.384	-	-					-	-
	BEND PENG RSUD MALINGPING		137.875	-	725.493	137.875	725.493	-				-	725.493	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih	
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun			
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13	
	BEND PENG DISTAN PROV BANTEN		173.701		59.622	173.701	59.622	-				-	59.622	
	BEND PENG SATPOLPP PROV BANTEN		152.115		60.182	152.115	60.182	-				-	60.182	
	20603361 SMAN 3 KAB TANGERANG		51.082		61.966	51.082	61.966	-				-	61.966	
	20613563 SMAN 11 KOTA TGR SLTN		48.278		23.924	48.278	23.924	-				-	23.924	
	BEND PENG DINKOP DAN UKM		44.823		-	44.823	-	-	-				-	-
	20601874 SMAN 1 RANGKASBITUNG		43.492		3.736	43.492	3.736	-	-				-	3.736
	20605059 SMKN 2 KOTA SERANG		33.125		15.919	33.125	15.919	-	-				-	15.919
	20601879 SMAN 1 CIPANAS		32.679		114	32.679	114	-	-				-	114
	20603268 SMAN 12 KAB TANGERANG		31.030		370	31.030	370	-	-				-	370
	20601877 SMAN 1 LEUWIDAMAR		24.264		985	24.264	985	-	-				-	985
	20613553 SMAN 10 KOTA TGR SLTN		19.083		8.881	19.083	8.881	-	-				-	8.881
	20603358 SMAN 4 KAB TANGERANG		16.072		4.278	16.072	4.278	-	-				-	4.278
	20607867 SMAN 1 CILOGRANG		15.310		1.765	15.310	1.765	-	-				-	1.765
	20600453 SMAN 11 PANDEGLANG		11.971		-	11.971	-	-	-				-	-
	20613543 SMAN 14 KAB TANGERANG		11.928		-	11.928	-	-	-				-	-
	20614730 SMKN 2 KOTA TANGSEL		11.618		35.905	11.618	35.905	-	-				-	35.905
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		11.222		20.713	11.222	20.713	-	-				-	20.713
	20603312 SMAN 5 KOTA TGR SLTN		9.964		4.751	9.964	4.751	-	-				-	4.751
	BEND PENG PEM UPT CIKANDE		9.671		24.228	9.671	24.228	-	-				-	24.228
	69756084 SMAN 12 KOTA TGR SLTN		7.669		19.604	7.669	19.604	-	-				-	19.604
	20603363 SMAN 16 KAB TANGERANG		6.801		56.171	6.801	56.171	-	-				-	56.171
	20605104 SMAN 1 CIRUAS		6.614		26.910	6.614	26.910	-	-				-	26.910
	20606830 SMAN 6 TANGERANG		6.147		8.547	6.147	8.547	-	-				-	8.547
	BEND PENG PEMB UPT BALARAJAAJA		6.133		1.726	6.133	1.726	-	-				-	1.726
	20613552 SMAN 8 KOTA TGR SLTN		5.623		2.431	5.623	2.431	-	-				-	2.431
	69824463 SMKN 11 KAB TANGERANG		5.596		-	5.596	-	-	-				-	-
	BEND PENG PEMB UPT CILEDUG		5.580		62.642	5.580	62.642	-	-				-	62.642
	20606851 SMAN 11 TANGERANG		5.365		9.290	5.365	9.290	-	-				-	9.290
	20613518 SMAN 9 KOTA TGR SLTN		4.935		4.580	4.935	4.580	-	-				-	4.580
	69994894 SKHN 01 KOTA CILEGON		4.688		-	4.688	-	-	-				-	-
	BEND PENG PEMB UPT SERANG		4.672		14.935	4.672	14.935	-	-				-	14.935
	70011668 SMAN 32 KAB TANGERANG		4.437		-	4.437	-	-	-				-	-
	20613465 SMAN 19 KAB TANGERANG		4.015		-	4.015	-	-	-				-	-
	BEND PENG BPHB PROV BANTEN		3.924		-	3.924	-	-	-				-	-
	UPTD LATIHAN KERJA PROV BANTEN		3.437		19.730	3.437	19.730	-	-				-	19.730
	BEND PENG PEMB UPT CIPUTAT		3.392		11.679	3.392	11.679	-	-				-	11.679
	20603362 SMAN 10 KAB TANGERANG		2.861		-	2.861	-	-	-				-	-
	20606269 SMAN 5 CILEGON		2.772		9.887	2.772	9.887	-	-				-	9.887
	20613470 SMAN 1 KAB TANGERANG		2.605		-	2.605	-	-	-				-	-
	20613471 SMAN 27 KAB TANGERANG		2.525		-	2.525	-	-	-				-	-
	20603270 SMAN 4 KOTA TGR SLTN	2.502		-	2.502	-	-	-				-	-	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	69816866 SMAN 2 BAYAH		2.493		87	2.493	87	-				-	87
	BEND PENG DESDM PROV BANTEN		2.357		968.155	2.357	968.155	-				-	968.155
	69986692 SMKN 1 PADARINCANG		2.191		-	2.191	-	-				-	-
	20622313 SMKN 1 TUNJUNG TEJA		2.055		-	2.055	-	-				-	-
	20605101 SMAN 1 PADARINCANG		2.030		-	2.030	-	-				-	-
	20600463 SMAN 7 PANDEGLANG		1.806		3.789	1.806	3.789	-				-	3.789
	20601876 SMAN 1 MAJA		1.708		-	1.708	-	-				-	-
	20606829 SMAN 7 TANGERANG		1.686		5.171	1.686	5.171	-				-	5.171
	20605332 SKHN 02 KOTA SERANG		1.681		1.386	1.681	1.386	-				-	1.386
	20600467 SMAN 3 PANDEGLANG		1.485		-	1.485	-	-				-	-
	20613785 SMAN 23 KAB TANGERANG		1.449		-	1.449	-	-				-	-
	20605126 SMKN 3 KOTA SERANG		1.393		-	1.393	-	-				-	-
	20601881 SMAN 1 BAYAH		1.288		27.946	1.288	27.946	-				-	27.946
	20605334 SKHN 01 KOTA SERANG		1.192		1.443	1.192	1.443	-				-	1.443
	20600468 SMAN 2 PANDEGLANG		1.161		58.639	1.161	58.639	-				-	58.639
	20613768 SMAN 6 KOTA TGR SLTN		1.149		49.902	1.149	49.902	-				-	49.902
	20606289 SMAN 1 CILEGON		1.117		-	1.117	-	-				-	-
	20607980 SMAN 1 CIBADAK		1.016		-	1.016	-	-				-	-
	BEND PENG PEMB UPT PANDEGLANG		1.007		8.518	1.007	8.518	-				-	8.518
	20603267 SMAN 7 KOTA TGR SLTN		887		24.884	887	24.884	-				-	24.884
	20607982 SMAN 1 CIKULUR		860		-	860	-	-				-	-
	20606271 SMAN 2 KS CILEGON		841		-	841	-	-				-	-
	20601880 SMAN 1 CIMARGA		803		-	803	-	-				-	-
	20607501 SMAN 14 TANGERANG		746		2.245	746	2.245	-				-	2.245
	20615095 SMKN PERTANIAN		737			737	-	-				-	-
	20606831 SMAN 5 TANGERANG		725		3.774	725	3.774	-				-	3.774
	20603251 SMAN 11 KAB TANGERANG		697		-	697	-	-				-	-
	20606852 SMAN 10 TANGERANG		695		-	695	-	-				-	-
	20613868 SMAN 1 SAJIRA		648		-	648	-	-				-	-
	69897080 SMKN 12 KAB TANGERANG		623		41	623	41	-				-	41
	20613833 SMAN 25 KAB TANGERANG		618		50	618	50	-				-	50
	20600452 SMAN 10 PANDEGLANG		609		-	609	-	-				-	-
	20603366 SMAN 9 KAB TANGERANG		577		41	577	41	-				-	41
	20606848 SMAN 2 TANGERANG		570		3.609	570	3.609	-				-	3.609
	20607873 SMKN 1 MALINGPING		566		-	566	-	-				-	-
	20601867 SMAN 1 BANJARSARI		559		-	559	-	-				-	-
	20600448 SKHN 01 PEMBINA PDG		536		-	536	-	-				-	-
	20613603 SMAN 15 KAB TANGERANG		510		-	510	-	-				-	-
	20600451 SMAN 1 PANDEGLANG		472		-	472	-	-				-	-
	69990896 SMAN 30 KAB TANGERANG		468		-	468	-	-				-	-
	20613548 SMAN 20 KAB TANGERANG	459		-	459	-	-				-	-	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	20605091 SMAN 1 PETIR		413		-	413	-	-				-	-
	20613919 SMAN 2 BANJARSARI		409		-	409	-	-				-	-
	20613795 SMAN 1 BANDUNG		401		-	401	-	-				-	-
	20605096 SMAN 1 WARINGINKURUNG		360		-	360	-	-				-	-
	20606850 SMAN 12 TANGERANG		336	820		336	820	-	-			-	820
	20603365 SMAN 7 KAB TANGERANG		327	-		327	-	-	-			-	-
	BEND PENG PEM UPT MALINGPING		326	5.127		326	5.127	-				-	5.127
	20622300 SMAN 1 PULOAMPEL		325	-		325	-	-	-			-	-
	20601873 SMAN 1 WARUNGGUNUNG		314	-		314	-	-	-			-	-
	69816901 SMAN 1 KALANGANYAR		288	73		288	73	-	-			-	73
	BEND PENG BIRO PEMKESRA BANTEN		268	-		268	-	-	-			-	-
	20607866 SMAN 1 CIBEBER		255	512		255	512	-	-			-	512
	20603359 SMAN 1 KOTA TGR SLTN		240	-		240	-	-	-			-	-
	20607854 SMAN 1 WANASALAM		225	1.336		225	1.336	-				-	1.336
	20600465 SMAN 5 PANDEGLANG		222	6.103		222	6.103	-	-			-	6.103
	70011662 SMAN 31 KAB TANGERANG		190	-		190	-	-	-			-	-
	69985873 SMAN 18 PANDEGLANG		184	-		184	-	-	-			-	-
	69986693 SMKN 1 WARINGINKURUNG		183	-		183	-	-	-			-	-
	20601871 SMAN 3 RANGKAS BITUNG		168	-		168	-	-	-			-	-
	20613561 SMAN 29 KAB TANGERANG		165	69		165	69	-	-			-	69
	20601811 SKHN 01 LEBAK		158	-		158	-	-	-			-	-
	69734160 SMAN 7 KOTA SERANG		141	-		141	-	-	-			-	-
	20616187 SMKN 6 KOTA SERANG		130	-		130	-	-	-			-	-
	20607819 SMAN 1 CILELES		125	11.395		125	11.395	-				-	11.395
	20600466 SMAN 4 PANDEGLANG		114	49		114	49	-	-			-	49
	20607862 SMAN 1 MUNCANG		79	3.704		79	3.704	-	-			-	3.704
	20614150 SMAN 1 SOBANG		79	76		79	76	-	-			-	76
	20605058 SMKN 1 KOTA SERANG		53	-		53	-	-	-			-	-
	BEND PENG PEM UPT SERPONG		44	2.957		44	2.957	-	-			-	2.957
	20613866 SMKN 1 PULOAMPEL		37	-		37	-	-	-			-	-
	20603367 SMAN 2 KAB TANGERANG		37	-		37	-	-	-			-	-
	20606846 SMAN 4 TANGERANG		35	1.261		35	1.261	-	-			-	1.261
	20607981 SMAN 1 BOJONGMANIK		27	-		27	-	-	-			-	-
	69986573 SMKN 14 PANDEGLANG		24	302		24	302	-	-			-	302
	20616197 SMKN 1 CIRINTEN		19	-		19	-	-	-			-	-
	20601878 SMAN 1 GUNUNG KENCANA		14	-		14	-	-	-			-	-
	70011722 SMAN 19 PANDEGLANG		14	1.192		14	1.192	-	-			-	1.192
	20603384 SMAN 13 KAB TANGERANG		6	-		6	-	-	-			-	-
	20601872 SMAN 2 RANGKASBITUNG		4	-		4	-	-	-			-	-
	20613528 SMAN 17 KAB TANGERANG		4	-		4	-	-	-			-	-
	20605092 SMAN 1 PONTANG	4	-		4	-	-	-			-	-	

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2024	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	69919380 SKHN 03 LEBAK		3		-	3	-	-				-	-
	20600469 SMAN 14 PANDEGLANG		3		-	3	-	-	-			-	-
	20614057 SMAN 26 KAB TANGERANG		2		-	2	-	-	-			-	-
	20600568 SMKN 6 PANDEGLANG		1		25.574	1	25.574	-				-	25.574
	20623417 SMAN 2 MAJA		1		288	1	288	-				-	288
	20623421 SMKN 1 CURUGBITUNG		0		0	0	0	-	-			-	0
	BEND PENG RSUD CILOGRANG		-		1.450.810	-	1.450.810	-	-			-	1.450.810
	BEND PENG RSUD LABUAN		-		1.196.790	-	1.196.790	-	-			-	1.196.790
	20605107 SMAN 1 KIBIN		-		66.448	-	66.448	-	-			-	66.448
	20613788 SMAN 1 KOPO		-		1.052	-	1.052	-	-			-	1.052
	20605108 SMAN 1 KRAMAT WATU		-		658	-	658	-	-			-	658
	70046399 SMKN 1 BAROS		-		3.901	-	3.901	-	-			-	3.901
	20607901 SMKN 1 KRAGILAN		-		105.331	-	105.331	-	-			-	105.331
	20614541 SMKN 1 TANARA		-		6.105	-	6.105	-	-			-	6.105
	20606250 SMKN 1 CILEGON		-		179.875	-	179.875	-	-			-	179.875
	69816881 SMAN 1 CIHARA		-		660	-	660	-	-			-	660
	70011680 SMAN 4 RKSBTG		-		6.333	-	6.333	-	-			-	6.333
	20616539 SMKN 1 GUNUNG KENCANA		-		222	-	222	-	-			-	222
	20607803 SMKN 1 RANGKASBITUNG		-		362	-	362	-	-			-	362
	20603360 SMAN 8 KAB TANGERANG		-		43.207	-	43.207	-	-			-	43.207
	20607835 SMKN 2 KAB TANGERANG		-		64.502	-	64.502	-	-			-	64.502
	20600434 SMAN 17 PANDEGLANG		-		215	-	215	-	-			-	215
	20600570 SMKN 4 PANDEGLANG		-		444	-	444	-	-			-	444
	70046226 SMKN 18 PANDEGLANG		-		340	-	340	-	-			-	340
	20606847 SMAN 3 TANGERANG		-		3.580	-	3.580	-	-			-	3.580
	20606813 SMAN 9 TANGERANG		-		9.705	-	9.705	-	-			-	9.705
	20606849 SMAN 13 TANGERANG		-		3.374	-	3.374	-	-			-	3.374
	20607924 SMAN 15 TANGERANG		-		536	-	536	-	-			-	536
	20613477 SMAN 2 KOTA TGR SLTN		-		9.840	-	9.840	-	-			-	9.840
	20603368 SMAN 3 KOTA TGR SLTN		-		10.709	-	10.709	-	-			-	10.709
	69939071 SMKN 6 KOTA TANGSEL	-		3.842	-	3.842	-	-				0	3.841
	Jumlah		366.671.526	-	180.948.977	366.671.526	180.948.977	-	-	-	-	0	180.948.977

PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.113.771.536	-	89.694.073	1.035.188.824	168.276.785	841.383,90	-	-	-	841.383,90	167.435.401
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	481.100	-	1.538.100	481.100	1.538.100	7.690	-	-	-	7.690	1.530.410
	Jumlah		1.114.252.636	-	91.232.173	1.035.669.924	169.814.885	849.074,20	-	-	-	849.074,20	168.965.811

an 11 Neraca

Keterangan
15
-

**PIUTANG TRANSFER
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 12 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG TRANSFER DANA BAGI HASIL
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	KOREKSI	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	SALDO PENYISIHAN PIUTANG				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
					D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
								Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5+6-7)	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=8-13
	Piutang DBH PPh Pasal 21	BPKAD	-	-	540.262.847.000	867.832.000	539.395.015.000	-				-	539.395.015.000
	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	BPKAD	-	-	30.755.866.000		30.755.866.000	-				-	30.755.866.000
	Piutang DBH PBB	BPKAD	-	-	5.679.866.000		5.679.866.000	-				-	5.679.866.000
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	BPKAD	-	-	311.969.000		311.969.000	-				-	311.969.000
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	BPKAD	-	-	52.984.000		52.984.000	-				-	52.984.000
	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	BPKAD	-	-	445.793.000		445.793.000	-				-	445.793.000
	Jumlah		-	-	577.509.325.000	867.832.000	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000

No.	Uraian	Nama	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2024	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2025	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2026	Aset Lainnya JT Setelah 2026	< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3-5 TAHUN	> 5 TAHUN	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	SALDO PIUTANG BERSIH
												Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)																
1	Kehilangan Uang pada KPUD Provinsi Banten	WIDAWARTI SUHARA (19600924 198503 2 001)	29 Maret 2004		78.010.180,00	-	-	78.010.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah TP				78.010.180,00			78.010.180	-	-		-	-	-	-	-	
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)																
2	Penggunaan Uang Muka pada Sekretariat DPRD Prov.Banten	Drs Iya Sukiya	14 Juli 2009		566.197.262,00				-	566.197.262	566.197.262				566.197.262	566.197.262	-
3	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 580	TB.Ismu Abunazar, A,md	5 Juni 2009		101.000.000,00				-	101.000.000	101.000.000				101.000.000	101.000.000	-
4	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 613	Budhi Priatna			101.000.000,00				-	101.000.000	101.000.000				101.000.000	101.000.000	-
5	Kehilangan Motor Mega Pro No.Pol A 2127 B	Rudi Wahyu Rudito,STP	16 Desember 2015	24 bulan	6.000.060,00				-	6.000.060	6.000.060				6.000.060	6.000.060	-
6	Kerugian Belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/166-Inspektorat/IV/2018 tanggal 20 April 2018	Jajang	desember 2018	24 bulan	64.994.037,50			-	64.994.038	64.994.038					64.994.038	64.994.038	-
7	Kerugian belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/402.14-Inspektorat/X/2015	Drs. Sumarno Nurpai Putra	desember 2018	3 bulan	5.460.000,00			2.730.000	2.730.000	2.730.000					2.730.000	2.730.000	-
8	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Mohammad Faizal Reza, ST, MM (2020)	6 Januari 2020	24 bulan	63.999.377,00			63.999.377	-	-			-			-	-
9	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Riska Indira,SE	14 September 2020	24 bulan	63.844.816,00			6.000.000	57.844.816	57.844.816				28.922.408		28.922.408	28.922.408
10	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	H.Babar dan Wahyudin Sastrawijaya,S.SO S.,M.SI	18 Desember 2020	24 bulan	358.080.000,00			11.500.000	346.580.000	346.580.000				173.290.000		173.290.000	173.290.000
11	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Endang Saprudin	17 November 2021	24 bulan	153.494.100,00			27.000.000	126.494.100	126.494.100				63.247.050		63.247.050	63.247.050
12	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ir Widodo Hadi, Ir. Cucu Suhara, Indarto Djoemir	19 Januari 2022	10 bulan	8.050.029.000,00			-	8.050.029.000	8.050.029.000			805.002.900			805.002.900	7.245.026.100
13	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ibnu Jafar Saifi (2022)	6 Oktober 2022	24 bulan	4.360.000,00			4.360.000	-	-			-			-	-
14	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Irfan Oktaviansyah	12 Juni 2022	24 bulan	4.404.000,00			4.404.000	-	-			-			-	-
15	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Agung Sugiarto	31 Juli 2023	24 bulan	7.320.550,00			7.320.550	-	-			-			-	-
16	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Atep, S.Sos	18 JUNI 2019		8.400.000,00			-	8.400.000	8.400.000					8.400.000	8.400.000	-
17	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Chaerudin, ST	7 November 2023	24 bulan	14.300.000,00			14.300.000	-	-			-			-	-
18	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Baron Suhadiman	5 Desember 2023	40 bulan	34.500.000,00			18.000.000	16.500.000	12.375.000	4.125.000		1.237.500			1.237.500	11.137.500
19	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2024	Nefi Sukasah	November 2024	2 Bulan	999.250,00			999.250	-	-		-				-	-
20	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Bustomi	Mei 2025	20 Bulan	-		13.400.000	10.000.000	3.400.000	3.400.000		17.000				17.000	3.383.000
21	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Ani Kurniasih	Agustus 2025	1 Bulan	-		1.283.000	1.283.000	-	-		-				-	-
22	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Hendra Gunawan	Oktober 2025	24 Bulan	-		11.700.000	1.200.000	10.500.000	5.850.000	4.650.000	29.250				29.250	5.820.750
23	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Iip Muripudin Tarigan, AMTE	November 2025	20 Bulan	-		9.200.000	460.000	8.740.000	5.520.000	3.220.000	27.600				27.600	5.492.400
24	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2025	Ajum Suryana	November 2025	16 Bulan	-		8.400.000	525.000	7.875.000	6.300.000	1.575.000	31.500				31.500	6.268.500
35	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Cahya Budi, S.Pd. (BOS)	5 Februari 2021	24 bulan	517.950.000,00			189.608.950	328.341.050	328.341.050	-	-		164.170.525		164.170.525	164.170.525
	TOTAL TGR RKUD				10.126.332.453	-	43.983.000	363.690.127	9.806.625.326	9.793.055.326	13.570.000	105.350	806.240.400	429.629.983	850.321.360	2.086.297.093	7.706.758.233
36	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Mukhsin R (BOS)	18 November 2021	24 bulan	94.671.560,00	(3.000.000,00)		10.500.000	81.171.560	81.171.560	-	-		40.585.780		40.585.780	40.585.780
	TOTAL TGR BOS				94.671.560	(3.000.000)	-	10.500.000	81.171.560	81.171.560	-	-	-	40.585.780	-	40.585.780	40.585.780
	TOTAL TGR				10.221.004.013	(3.000.000)	43.983.000	374.190.127	9.887.796.886	9.874.226.886	13.570.000	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
	TOTAL TP/TGR				10.299.014.193	(3.000.000)	43.983.000	452.200.307	9.887.796.886	9.874.226.886	13.570.000	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013

PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 14 Neraca

NAMA PIUTANG : PIUTANG LAINNYA
SUMBER DATA : DAFTAR PIUTANG AWAL, MUTASI PENDAPATAN, DAFTAR PIUTANG AKHIR, DAFTAR UMUR PIUTANG

NO	JENIS PIUTANG LAINNYA	SKPD	SALDO AWAL PIUTANG 2025	PENAMBAHAN PIUTANG	PEMBAYARAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2025	Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
				D	K		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
							Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5-6)	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=7-12
1	Piutang Rekanan atas Uang Muka 20% pengadaan Alkes TA 2013 oleh Dinkes	DINAS KESEHATAN	12.333.916.600	-	7.292.802.000	5.041.114.600	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	-
2	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	592.241.558	-	592.241.558	-	-	-	-	-	592.241.558
3	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	UPTD RSUD Labuan		482.551		482.551	-	-	-	-	-	482.551
4	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		321.942.288		321.942.288	-	-	-	-	-	321.942.288
5	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		55.089.600		55.089.600	-	-	-	-	-	55.089.600
6	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS SOSIAL		2.608.860		2.608.860	-	-	-	-	-	2.608.860
7	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		32.327.442		32.327.442	-	-	-	-	-	32.327.442
8	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	SEKRETARIAT DPRD		387.802.328		387.802.328	-	-	-	-	-	387.802.328
9	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		4.197.759.342		4.197.759.342	-	-	-	-	-	4.197.759.342
10	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENDAPATAN DAERAH		166.065.800		166.065.800	-	-	-	-	-	166.065.800
11	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	BADAN PENGHUBUNG		100.529.483		100.529.483	-	-	-	-	-	100.529.483
	Jumlah		12.333.916.600	5.856.849.251	7.292.802.000	10.897.963.851	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	5.856.849.251

**REKAPITULASI BELANJA DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	URAIAN	SEWA TEMPAT	PREMI ASURANSI	LAINNYA	BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.904.110			216.904.110
2	Dinas Kesehatan	-			-
3	UPT RSUD Banten	-			-
4	UPT RSUD Malingping	-			-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.338.798	174.757.563		281.096.361
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	20.371.738		20.371.738
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
9	Dinas Sosial	-			-
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	22.027.397			22.027.397
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	57.869.863			57.869.863
12	Dinas Ketahanan Pangan	-			-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.808.743			104.808.743
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	12.600.000		12.600.000
15	Dinas Perhubungan	-	76.678.962	93.845.455	170.524.416
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-		89.913.093	89.913.093
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	8.677.049		8.677.049
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	11.886.509		11.886.509
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	59.280.435		59.280.435
22	Dinas Pariwisata	114.042.819			114.042.819
23	Dinas Pertanian	-	5.175.401		5.175.401
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	41.516.339		41.516.339
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.186.760	54.380.150		107.566.910

26	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-			-
27	Biro Hukum	-			-
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-			-
29	Biro Umum	89.051.781	13.825.137		102.876.917
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	68.154.000			68.154.000
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-			-
32	Biro Administrasi Pimpinan	13.643.836			13.643.836
33	Sekretariat DPRD	43.961.644	408.063.760	-	452.025.404
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	85.352.003		85.352.003
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.852.459		6.502.732	15.355.191
36	Badan Pendapatan Daerah	2.316.821.577	161.002.603		2.477.824.180
37	Badan Kepegawaian Daerah	-			-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-		22.906.557	22.906.557
39	Badan Penghubung	-		13.725.249	13.725.249
40	Inspektorat	-			-
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	33.624.590		33.624.590
	JUMLAH	3.215.663.786	1.167.192.239	226.893.086	4.609.749.111

Lampiran 15.1 Neraca

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Belanja Sewa Gedung KCD Kotangsel)	100.3.7/947/Cadintangkotsel/2025	30-Sep-25	PT. ATLANTIS CIPTA KARYA (M. ISNA SURYA HIDAYAT)	290.000.000	959.4/009236/LS/BUD/2025	365	01-Okt-25	30-Sep-26	31-Des-25	273	216.904.110
JUMLAH													216.904.110
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.219.1 /UPTDPJL/2025	07-Agu-25	SRI MULYANAH, SE	35.000.000	36.00/04.0/001253/GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025	366	07-Agu-25	07-Agu-26	31-Des-25	219	20.942.623
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.219 /UPTDPJL/2025	07-Agu-25	SARJA	35.000.000	36.00/04.0/001253/GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2025	366	07-Agu-25	07-Agu-26	31-Des-25	219	20.942.623
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.337.1 /UPTDPJL/2025	03-Des-25	SUBADRA	35.000.000	36.00/04.0/001954/TU/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	366	03-Des-25	03-Des-26	31-Des-25	337	32.226.776
		Sewa Pos Pengamatan Jalan	600.1.9.4/SP.337 /UPTDPJL/2025	03-Des-25	MUHAMAD WILDAN	35.000.000	36.00/04.0/001954/TU/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	366	03-Des-25	03-Des-26	31-Des-25	337	32.226.776
JUMLAH													106.338.798
3	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sewa Bangunan Gedung Kantor	900.1.7.2/0087/KORWIL/PL/DTKT/2025	11-Jul-25	BONAULI REAL ESTATE PT	160.800.000	959.4/006216/LS/BUD/2025	365	20-Feb-25	19-Feb-26	31-Des-25	50	22.027.397
JUMLAH													22.027.397
4	Dinas Pemberdayaan	Belanja Sewa Tanah Bangunan	900.1.3.6/687/SPK/DP3AKKB/2025	19-Des-25	Kuasa Pemilik Rumah	59.500.000	959.4/016693/LS/BUD/2025	365	22-Des-25	21-Des-26	31-Des-25	355	57.869.863
JUMLAH													57.869.863
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEWA GEDUNG	17	26-Sep-25	AHMAD	140.000.000	959.4/010402/LS/BUD/2025	366	01-Okt-25	01-Okt-26	31-Des-25	274	104.808.743
JUMLAH													104.808.743
6	Dinas Pariwisata	Sewa Billboard di Kawasan Keraton Kesultanan Banten	500.13/1566-Dispar/2025	24-Mar-25	CV. CITRA SEROJA	168.720.000	36.00/04.0/000045/LS/3.26.0.0.0.00.01.0000/P2/5/2025	365	24-Mar-25	23-Mar-26	31-Des-25	82	37.904.219
		Sewa Billboard Pariwisata di Kabupaten Pandeglang	500.13/2740-Dispar/2025	03-Jun-25	CV. WARNA CURUG ANGSA	319.680.000	36.00/04.0/000081/LS/3.26.0.0.0.00.01.0000/P2/7/2025	240	03-Jun-25	28-Jan-26	31-Des-25	28	37.296.000
		Sewa Billboard di Kawasan Keraton Kesultanan Serang	500.13/2796-Dispar/2025	04-Jun-25	CV. PUTRA JIWANTAKA MANDIRI	321.456.000	36.00/04.0/000082/LS/3.26.0.0.0.00.01.0000/P2/7/2025	240	04-Jun-25	29-Jan-26	31-Des-25	29	38.842.600
JUMLAH													114.042.819

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Belanja Sewa Gedung Kantor	EP-01K3FJ6KT3V1HWTRBXC6WEOY45	25-Agu-25	INAPROC	79.999.920	No SPM : 931/00079/SPM.GU/INDAG/2025	364	01-Sep-25	30-Agu-26	31-Des-25	242	53.186.760
JUMLAH													53.186.760
8	Biro Umum	Belanja Sewa Bangunan Gudang Belanja Sewa Bangunan Peralatan Sarana dan Prasarana	027/56212462/SPK/UMPLK/25	25-Feb-25	RETMI NAINGGOLAN	112.900.000	36.00/04.0/000133/LS/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/4/2025	365	27-Feb-25	26-Feb-26	31-Des-25	57	17.630.959
		Belanja Sewa Bangunan Gudang Penyimpanan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretaris Daerah	000.3.2/56212672/SPK/UmPlk/25	20-Mei-25	HJ. EUIS AGUSTINI, S.Pd., M.Pd	112.900.000	36.00/04.0/000238/LS/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/6/2025	365	23-Mei-25	22-Mei-26	31-Des-25	142	43.922.740
		Belanja Sewa Bangunan Gudang Belanja Bangunan Gedung Kantor Penyimpanan Barang Milik Daerah (BMD) APK Setda	000.3.2/56212840/SPK/UmPlk/25	14-Mei-25	Drs. MUKHNIZAR	73.800.000	36.00/04.0/000237/LS/4.01.0.0.0.0.00.01.0000/P2/6/2025	365	17-Mei-25	16-Mei-26	31-Des-25	136	27.498.082
JUMLAH													89.051.781
9	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Belanja Sewa Peralatan Jaringan- Sewa Collocation Server LPSE	#EP-01JSP83K072TEF5EZRGEPAFSM4	28-Apr-25	PT. NEWTON CIPTA INFORMATIKA	204.462.000	959.4/004365/LS/BUD/2025	366	02-Mei-25	02-Mei-26	31-Des-25	122	68.154.000
JUMLAH													68.154.000
10	Biro Administrasi Pimpinan	Perpanjangan Sewa Gudang untuk Arsip	027/53836498/SPSG/TU.Biro/ADPIMPR	25-Mar-25	Ruri Apriyanti, SKM	60.000.000	959.4/003331/LS/BUD/2025	365	25-Mar-25	24-Mar-26	31-Des-25	83	13.643.836
JUMLAH													13.643.836
11	Sekretariat DPRD	Sewa Gudang	000.3.1/Perbend.524.PROKEU/SPK.PA	06-Agu-25	ANTON TANTOWI	71.000.000	36.00/04.0/000431/LS/4.02.0.0.0.0.00.01.0000/P2/6/2025	365	15-Agu-25	14. Agu. 2026	31. Des. 2025	226	43.961.644
JUMLAH													43.961.644
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Sewa Bangunan Gudang	027/55759263/PJL/ASET/BPKAD/2025	22-Mar-25	AZIZI	40.000.000		366	22-Mar-25	22-Mar-26	31-Des-25	81	8.852.459
JUMLAH													8.852.459
13	Badan Pendapatan Daerah												
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Pembayaran pekerjaan belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Kepandean UPTD PPD Serang	000.3.2/130/SPK/PJL/UPTD PPD SRG/2025	18-Okt-25	MOHAMAD NASIR	89.000.000	959.4/011323/LS/BUD/2025	365	18-Okt-25	17-Okt-26	31-Des-25	290	70.712.329
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas	UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN SEWA GEDUNG GERAJ CIKANDE UTK UPTD PPD CIRUAS 2025	000.3.2/007/SPK/PJL/UPTD PPD CRS/2025	08-Mar-25	STEVENSON HERI HARTOLO	122.745.900	959.4/001484/LS/BUD/2025	365	08-Mar-25	07-Mar-26	31-Des-25	66	22.195.149
UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN SEWA GEDUNG GERAJ ANYER UTK UPTD PPD Ciruas		000.3.2/015/SPK/PJL/UPTD PPD CRS/2025	27-Mar-25	H.SUJA'I A SAYUTI	103.000.000	959.4/002927/LS/BUD/2025	366	04-Apr-25	04-Apr-26	31-Des-25	94	26.453.552	
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Saketi TA. 2024	000.3.2/002/PJL/SPK-UPTD PPD PDG/2025	13-Mar-25	DR.KARTIRINI	98.000.000	959.4/001520/LS/BUD/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Des-25	72	19.278.689

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar Di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * 7
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Gerai Panimbang TA. 2024	000.3.2/03/PJL/SPK-UPTD PPD PDG/2025	26-Mar-25	H. ABDUL ROHMAN	82.626.050	959.4/002312/LS/BUD/2025	365	02-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	20.599.919
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa Gerai Samsat Graha Raya Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PPD Serpong	000.3.2/004/PJL/SPK/UPTD PPD SRP/2025	15-Feb-25	Bayumi Umar	159.600.000	959.4/001337/LS/BUD/2025	365	15-Feb-25	14-Feb-26	31-Dec-25	45	19.676.712
		Pembayaran Pekerjaan Sewa Ruko Arsip	000.3.2/011/SPK/PJL/UPTD PPD	16-Jun-25	KOPERASI	165.000.000	959.4/005287/LS/BUD/2025	365	16-Jun-25	15-Jun-26	31-Dec-25	166	75.041.096
		Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/012/PJL/SPK/UPTD PPD	21-Nov-25	ANSIS WIJAYA	163.000.000	959.4/013776/LS/BUD/2025	365	21-Nov-25	20-Nov-26	31-Dec-25	324	144.690.411
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Pembayaran Belanja Sewa Gedung Gerai Samsat Kronjo pada UPTD PPD	000.3.2/004/SPK/PJL/BLRJ/2025	14-Mar-25	SOBRI BIN H BONJAN	125.243.000	959.4/001559/LS/BUD/2025	365	14-Mar-25	13-Mar-26	31-Dec-25	72	24.705.468
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung	000.3.2/003/SPK/PJL/BLRJ/2025	08-Mar-25	H. HASANUDIN	156.554.000	959.4/001358/LS/BUD/2025	365	08-Mar-25	07-Mar-26	31-Dec-25	66	28.308.395
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung	000.3.2/014/SPK/PJL/BLRJ/2025	20-Sep-25	RICKI SHUTANTO	89.268.050	959.4/009867/LS/BUD/2025	365	21-Sep-25	20-Sep-26	31-Dec-25	263	64.321.910
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	embayaran Pekerjaan Sewa Gerai Sanqiang	000.3.2/02/PJL/SPK/UPTD.CKL/2025	15-Feb-25	VICTOR WIDJAJA	163.000.000	959.4/000970/LS/BUD/2025	365	15-Feb-25	14-Feb-26	31-Dec-25	45	20.095.890
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Pembayaran Belanja Sewa Gedung (Gerai Samsat Ramanuju) UPTD PPD Cilegon	000.3.2/67/SPK/PJL/UPTD PPD CLG/2025	02-Apr-25	HARUN AL RASYID	140.000.000	959.4/002652/LS/BUD/2025	365	02-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	34.904.110
		Pembayaran Belanja Sewa Gedung (Gerai Samsat Cibeber) UPTD PPD Cilegon	000.3.2/67.1/SPK/PJL/UPTD PPD CLG/2025	03-Apr-25	ZANDRAWATI TOHIR	109.910.800	959.4/002400/LS/BUD/2025	364	03-Apr-25	01-Apr-26	31-Dec-25	91	27.477.700
		UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	900/57759540/PJL/SPK/UPTDKD/2025	26-Mar-25	PT. GITA SEJAHTERA	1.914.430.320	959.4/002832/LS/BUD/2025	365	08-Apr-25	07-Apr-26	31-Dec-25	97
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa	900/55094123/PJL/SP/UPTKD/2025	31-Jul-25	PT.PURINUSA	152.000.000	959.4/007792/LS/BUD/2025	365	02-Agu-25	01-Agu-26	31-Dec-25	213	88.701.370
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa	900/61109646/PJL/SPK/UPTD	01-Nov-25	PT.GITA SEJAHTERA	119.999.880	959.4/013775/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Okt-26	31-Dec-25	304	99.945.106
		Pembayaran Belanja Sewa Bangunan	900/55095500/PJL/SPKUPTKD/2025	01-Nov-25	BENJAMIN IRAWAN	151.000.000	959.4/011387/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Okt-26	31-Dec-24	669	276.764.384
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa Gerai Samsat Sepatan UPTD PPD Kelapa Dua	900/55094715/PJL/SP/UPTKD/2025	01-Nov-25	TJIPTO SURYA	151.000.000	959.4/011386/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Okt-26	31-Dec-25	304	125.764.384
		Pembayaran pekerjaan Belanja Sewa Gedung Arsip UPTD PPD Kelapa Dua	900/55096901/PJL/SP/UPTKD/2025	31-Okt-25	HANS MULYADI	156.000.000	959.4/011388/LS/BUD/2025	365	01-Nov-25	31-Okt-26	31-Dec-25	304	129.928.767
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/19.2.2/SPK/PJL/MLP/2025	08-Mei-25	H OKEU OKTAVIANA ST	70.500.000	959.4/004496/LS/BUD/2025	365	08-Mei-25	07-Mei-26	31-Dec-25	127	24.530.137
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/54884422/E-	28-Nov-25	SOPIAH	47.000.000	900/TU-0002/UPTD PPD	365	01-Dec-25	30-Nov-26	31-Dec-25	334	43.008.219
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	900/54884021/E-	28-Nov-25	KIKI JUNIANSAH	51.700.000	900/TU-0002/UPTD PPD	365	01-Dec-25	30-Nov-26	31-Dec-25	334	47.309.041
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3/212/SPK/PJL/UPTD PPD	09-Mei-25	Monica	148.586.000	959.4/005766/LS/BUD/2025	365	10-Mei-25	09-Mei-26	31-Dec-25	129	52.513.956
		Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/312/SPK/PJL/UPTD PPD	01-Nov-25	EVY MARLINA	107.964.000	959.4/011879/LS/BUD/2025	366	01-Nov-25	01-Nov-26	31-Dec-25	305	89.970.000
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Belanja Sewa Gedung	027/60262219/SPK/PJL/UPTD PPD	02-Agu-25	NUGRAHA	80.000.000	959.4/008129/LS/BUD/2025	366	04-Agu-25	04-Agu-26	31-Dec-25	216	47.213.115
	UPTD Pengelolaan Pendapatan	Pembayaran Belanja Sewa Gedung	003.2/57326769/SPK/PJL/UPTD PP	03-Nov-25	Dra. Hj. IDA FARIDA	100.000.000	959.4/013774/LS/BUD/2025	366	03-Nov-25	03-Nov-26	31-Dec-25	307	83.879.781
	INDUK		Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa	000.3.2/60905389/SPK/PJL/Bapenda/20	2-Des-25	Tri Hastuti	109.000.000	959.4/015426/LS/BUD/2025	366	02-Des-25	02-Des-26	31-Dec-25	336
JUMLAH													2.316.821.577
JUMLAH SEWA DIBAYAR DIMUKA													3.215.663.786

**REKAPITULASI BELANJA PREMI ASURANSI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

Lampiran 15.2 Neraca

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	EP-01KBPMVGB9EK9Y6AJ2M QX0BW5	18022225000542	09-Des-25	PT. ASURANSI RAMAYANA, TBK	186.476.000	36.00/04.0/002413/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	366	09-Des-25	09-Des-26	31-Des-25	343	174.757.563
JUMLAH														174.757.563
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	027/201125/SPK/DRPKP/2025	0203-2525-1225-0014-00	25-Nov-25	PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA	22.458.000	SPJ No. 21/SPJ/1.04.2.10.0.0 0.01.0000/2025	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Des-25	332	20.371.738
JUMLAH														20.371.738
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Dinas Pejabat Esselon II)	000.3.2/5921/Adendum/SP-DPMD/X/2025	18022225000136	17-Okt-25	PT. Asuransi Ramayana Tbk.	6.000.000	36.00/04.0/000101/GU/2.13.0.00.0.00.0 1.0000/PR/11/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Des-25	72	1.180.328
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Roda 4)	000.3.2/5923/Adendum/SP-DPMD/X/2025	18022225000479	17-Okt-25	PT. Asuransi Ramayana Tbk.	58.050.000	36.00/04.0/000090/L S/2.13.0.00.0.00.01. 0000/PR/11/2025	366	13-Mar-25	13-Mar-26	31-Des-25	72	11.419.672
JUMLAH														12.600.000
4	Dinas Perhubungan	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54445216/SPK-DISHUB/2025	18022225000250	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	22.435.000	959.4/006877/GU/B UD/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Des-25	164	10.052.842
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54438471/SPK-DISHUB/2025	18022225000248	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	89.745.000	36.00/04.0/000140/L S/2.15.0.00.0.00.01. 000/P/7/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Des-25	164	40.213.607
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah - Premi Asuransi Kendaraan R4	54438332/SPK-DISHUB/2025	18022225000249	13-Jun-25	PT ASURANSI RAMAYANA	58.945.000	36.00/04.0/000139/L S/2.15.0.00.0.00.01. 000/P/7/2025	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Des-25	164	26.412.514
JUMLAH														76.678.962
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belanja Asuransi Baang Milik Daerah	027/008/A.h.1/SP/K-UKM/2025	1024022125030028	20-Mar-25	PT ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967	40.200.000	36.00/04.0/000076/GU/2.17.0.0.0.0.00.0 1.0000 P2/4/2025	366	20-Mar-25	20-Mar-26	31-Des-25	79	8.677.049
JUMLAH														8.677.049
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	000.4.7.2/200-Dispora/IV/2025	126000221042500037	24-Apr-25	JASA RAHARJA PUTERA	38.161.950	36.00/04.0/000103/GU/2.19.0.00.0.00.0 1.0000/P2/6/2025	366	24-Apr-25	24-Apr-26	31-Des-25	114	11.886.509
JUMLAH														11.886.509
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		102402212580015-1	30-Agu-25	Bumida	19.180.000	959.4/008171/GU/B UD/2025	366	30-Agu-25	30-Agu-26	31-Des-25	242	12.681.858
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125080015	30-Agu-25	Bumida	34.195.000	959.4/008171/GU/B UD/2025	366	30-Agu-25	30-Agu-26	31-Des-25	242	22.609.809
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 2		1024020525100007	09-Okt-25	Bumida	3.779.400	959.4/010573/GU/B UD/2025	366	09-Okt-25	09-Okt-26	31-Des-25	282	2.911.997
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125120003	03-Des-25	Bumida	3.245.000		366	03-Des-25	03-Des-26	31-Des-25	337	2.987.883

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
		Asuransi Kendaraan bermotor Roda 4		1024022125120003-1	03-Des-25	Bumida	19.645.500		366	03-Des-25	03-Des-26	31-Des-25	337	18.088.889
JUMLAH														59.280.435
8	Dinas Pertanian	Asuransi Kendaraan Roda 4		12500002272295	04-Nov-25	SINARMAS	6.149.989		366	04/11/2025	04/11/2026	31/12/2025	308	5.175.401
JUMLAH														5.175.401
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan R2 1. Honda Megapro 2011 (1 Unit) A2103Z 2. Honda Verza 2013 (2 Unit) A2646Z, A2644Z 3. Honda Vario Tecno 2014 (3 Unit) A2991Z, A2990Z, A2989Z 4. Honda Verza 2014 (5 Unit) A2994Z, A2996Z, A3998Z, A2993Z, A2995Z, 5. Kawasaki Dtracker 2013 (2 Unit) A2723Z, A2722Z 6. Honda Megapro 2008 (1 Unit) A2537Z, 7. Gesits 2022 (8 Unit) A4679Z, A4694Z, A4696Z, A4689Z, A4688Z, A4684Z, A4678Z, A4691Z 8. Honda Supra X 2008 (2 Unit) A2533Z, A2536Z 9. Yamaha Jupiter MX 2012 (1 Unit) A2382Z, 10. Honda Satia FU 2015 (2 Unit) A3423Z, A3422Z, 11. Yamaha Xeon 2012 (2 Unit) A2398Z, A24008Z 12. Honda Vario Tecno 2013 (1 Unit) A2683Z, 13. Kawasaki KLX 150 S 2020 (1 Unit) A4348Z,	#EP-01JYDV1S8NKKBCAS5X4P XYGC5F	1024020525070002	26-Jun-25	PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	8.637.600	959.4/006458/GU/BUD/2025	366	26-Jun-25	26-Jun-26	31-Des-25	177	4.177.200
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan R4 1. Toyota Avanza 1.5 S 2009 (4 Unit) A713, A714, A715, A716 2. Toyota Rush 2008 (4 Unit) A664, A668, A662, A71, A667 3. Toyota Avanza Veloz 2013 (1 Unit) A1211 4. Toyota Innova G MT 2008 (1 Unit) A40 5. Suzuki APV 2009 (1 Unit) A687	#EP-01JYGB5WCK7BZ2TCNWWY1 A9N25Z	1024022125070006	26-Jun-25	PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	11.600.000	959.4/006458/GU/BUD/2025	366	26-Jun-25	26-Jun-26	31-Des-25	177	5.609.836

[illegible]

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	No. Polis	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
									Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(8)	(9)	10=(12-11)	(11)	(12)	(13)	14=(12-13)	(15)=(14/10)*8
14	Badan Pendapatan Daerah													
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	BELANJA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN/ ASURANSI KENDARAAN DINAS JABATAN BULAN JUNI 2025	00206/UPTD PPD CIPUTAT/2025	10240221250600001	02-Jun-25	ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA	6.389.000	959.4/005392/GU/BU D/2025	366	02-Jun-25	02-Jun-26	31-Des-25	153	2.670.811
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	ASURANSI KENDARAAN OPRASIONAL UPTD PPD KELAPA DUA	EP-01KAJX8R6WEPTRK8272G WKJR1W	18022225000509	24-Nov-25	ASURANSI RAMAYANA	6.500.000	00001/SPJ-TU/III/2025	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Des-25	328	5.825.137
		ASURANSI KENDARAAN DINAS JABATAN UPTD PPD KELAPA DUA	EP-01KAJX8R6WEPTRK8272G WKJR1W	18022225000508	06-Nov-25	ASURANSI RAMAYANA	28.440.000	00001/SPJ-TU/II/2025	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Des-25	328	25.487.213
	INDUK	Pembayaran Pekerjaan Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Bapenda	000.3.2/53879150.1/SPK/PJB APENDA/2025	128020125000091	11-Nov-25	PT BOSOWA ASURANSI	118.583.755	959.4/014859/LS/BU D/2025	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Des-25	315	102.059.789
	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional Lapangan Roda 4 (Rush) A 1157	EP-01KBEJNE3QWJCCC86HFC QGZKFJ	180222250000551	04-Des-25	Asuransi Ramayana	4.605.000	TUP-04 -00007	366	13-Des-25	13-Des-26	31-Des-25	347	4.365.943
		Belanja Asuransi Kendaraan Lpangan/ Oprasional Roda 4 Isuzu Elp A 7084 B dan 8258	EP-01KBEKDYVVSQ5YVJE1HJ 68KE9T	18022225000554 / 18022225000553	13-Des-25	Asuransi Ramayana	13.980.000	TUP-04 -00008	366	13-Des-25	13-Des-26	31-Des-25	347	13.254.262
		Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional / Lapangan Roda 2 A 6247 Z (nilai di polis 449.720) karena di kuarta saat pengajuan tu salah perencanaan dan sisa diajukan di gu nihil	EP-01KBEK8X1BxB31AKAKW4 Y1E1H5	180222250000552	04-Des-25	Asuransi Ramayana	802.000	TUP-04 -00009	366	13-Des-25	13-Des-26	31-Des-25	347	760.366
		Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 Xpander A 1594	EP-01KBEJVZ2T57KRE5SD9AV HYKY3	180222250000550	03-Des-25	Asuransi Ramayana	6.695.000	TUP-03 -00003	366	13-Des-25	13-Des-26	31-Des-25	347	6.347.445
	Belanja Asuransi Kendaraan Oprasional R2 NMAX (nilai di polis 596.600) karena di kuarta saat pengajuan tu salah perencanaan dan sisa diajukan di gu nihil	EP-01KBEK8X1BxB31AKAKW4 Y1E1H5	180222250000549	02-Des-25	Asuransi Ramayana	244.320	GU 14-0024	366	13-Des-25	13-Des-26	31-Des-25	347	231.637	
JUMLAH														161.002.603
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	EP-01JQ8ND3MAVXDY0W72T4 19AR6K	1024022125040000	26-Mar-25	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	143.100.000	36.00/04.0/000039/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025	366	27-Mar-25	27-Mar-26	31-Des-25	86	33.624.590
JUMLAH														33.624.590
TOTAL PREMI ASURANSI DIBAYAR DIMUKA														1.167.192.239

NO.	Nama SKPD	Pekerjaan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SP2D	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Belanja Dibayar di Muka (Rp)
								Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(11-10)	(10)	(11)	(12)	13=(11-12)	(14)=(13/9)*7
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Belanja lisensi vidio conference zoom meeting	000.3.2/PJPUP D-016/SP/BPSDM D/2025	10-Nov-25	CV. DWI PERWIRA PUTRA	20.300.000	36.00/04.0/000150/TU/5.04.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 Tgl 24 November 2025	366	10-Nov-25	10-Nov-26	31-Des-25	314	17.415.847
			000.3.2/PJPUP D-017/SP/BPSDM D/2025	10-Nov-25	CV. DWI PERWIRA PUTRA	6.400.000	36.00/04.0/000150/TU/5.04.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 Tgl 24 November 2025	366	10-Nov-25	10-Nov-26	31-Des-25	314	5.490.710
													22.906.557
5	Badan Penghubung	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan untuk Pelayanan	-	15-Mei-25	PT. MNC Sky Vision, Tbk	17.636.600	36.00/04.0/000052/GU/5.07.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025	366	15-Mei-25	15-Mei-26	31-Des-25	135	6.505.303
		Belanja Registrasi/Kean ggotaan (Pembuatan Pas Bandara untuk	17659584555767	17-Des-25	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	2.500.000	SPJ No. 0019/BANHUB /SPJ.SAH/01.000/2025	366	17-Des-25	17-Des-26	31-Des-25	351	2.397.541
		Belanja Registrasi/Kean ggotaan (Pembuatan Pas Bandara untuk	17661378947004	19-Des-25	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	5.000.000	SPJ No. 0019/BANHUB /SPJ.SAH/01.000/2025	366	19-Des-25	19-Des-26	31-Des-25	353	4.822.404
													13.725.249
TOTAL BEBAN DIBAYAR DIMUKA-LAINNYA													226.893.086

**PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 16 Neraca

NO	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto	Umur Piutang				Penyisihan Piutang	Saldo Piutang Bersih
			0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Diatas 5 tahun		
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Piutang Pajak Daerah	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
	Pajak Air Permukaan	3.970.600	19.853	-	-	-	19.853	3.950.747
2	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887
	Piutang Retribusi	547.855.163	2.739.276	-	-	-	2.739.276	545.115.887
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
	Piutang Deviden Tahun Buku 2022 PT. LKM Pandeglang	19.601.311	-	1.960.131	-	-	1.960.131	17.641.180
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	350.763.862	849.074	-	-	-	849.074	349.914.788
	Piutang Jasa Giro	180.948.977	-	-	-	-	-	180.948.977
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	168.276.785	841.384	-	-	-	841.384	167.435.401
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	1.538.100	7.691	-	-	-	7.691	1.530.410
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000
	Piutang Dana Perimbangan	576.641.493.000	-	-	-	-	-	576.641.493.000
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	9.874.226.886	105.350	806.240.400	470.215.763	850.321.360	2.126.882.873	7.747.344.013
7	Piutang Lainnya	10.897.963.851	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	5.856.849.251
	Pengadaan Alkes - Dinkes	5.041.114.600	-	-	-	5.041.114.600	5.041.114.600	-
	Piutang atas STS Pengembalian Belanja	5.856.849.251	-	-	-	-	-	5.856.849.251
8	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	-	-	-	-	4.609.749.111
	Belanja Dibayar Dimuka	4.609.749.111	-	-	-	-	-	4.609.749.111
	Jumlah	602.945.623.784	3.713.553	808.200.531	470.215.763	5.891.435.960	7.173.565.807	595.772.057.977

**REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 17 Neraca

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.982.205	37.666.594	17.946.500	18.020.225	54.577.294	-	3.518.800	-	16.180.426	16.158.000	2.052.000
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	70.629.989	53.108.280	44.136.016	6.791.124	10.061.372	-	54.690.810	-	27.081.597	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	109.880.757	24.391.103	679.999	-	85.284.630	123.354.456	-	-	-	-
5	UPTD RSUD BANTEN	391.900	27.047.865	363.636	-	-	-	148.070	-	54.439.000	-	-
6	UPTD RSUD MALINGPING	-	23.885.213	-	-	-	-	-	-	22.040.000	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.483.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000	20.185.350	-	3.885.000	-	-	-	671.424.032	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	304.551.600	-	-	178.438.450	-	-	389.747.700	-	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	896.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.060.757.342	577.222.654	86.837.255	29.376.348	243.077.116	85.284.630	181.712.135	1.061.171.732	119.741.023	16.158.000	2.052.000

NO	SKPD	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG ALAT BENGKEL	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.060.467	52.708.819	6.524.759	24.409.150	115.118.237	10.229.781	2.605.822.803	1.172.244.791	3.460.000
2	Dinas Kesehatan	3.489.062.536	430.106.217	-	-	6.882.000	-	11.981.835	185.370	-
3	UPTD RSUD LABUAN	9.962.895.590	520.358.138	-	1.010.000	2.253.250	-	566.397.786	110.963.210	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	7.920.499.678	1.534.192.914	-	-	1.530.912	-	502.482.719	189.294.201	-
5	UPT RSUD BANTEN	6.153.493.841	13.488.600	-	-	244.000	-	130.383.867	75.854.815	3.058.000
6	UPT RSUD MALINGPING	8.059.982.215	1.779.562.433	-	5.333.328	-	-	942.525.192	120.004.979	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	26.800.950	8.057.968	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	6.741.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	16.620.945	5.390.671	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	16.133.146	20.675.836	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	18.302.500	15.107.400	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.070.000	-	-	-	-	-	1.912.620	4.104.780	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	4.466.400	2.584.800	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	15.427.429	9.129.750	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	1.057.000	1.214.995	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	8.065.625	1.486.845	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	8.107.422	3.602.832	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	58.000	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	1.100.000	-	-	-	31.261.076	13.707.350	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	1.625.000	2.644.575	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	7.867.587	10.399.375	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	2.244.422	2.747.250	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	3.687.350	11.688.300	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.374.000	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.064.600	7.279.380	-	20.039.500	-	-	5.874.480	17.029.819	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	2.298.000	12.136.500	-
27	Dinas Pertanian	18.175.584	9.962.300	-	11.076.675	-	-	39.931.815	43.185.650	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	2.027.940	2.836.362	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	5.257.604	-	-	-	-	10.698.195	23.630.496	4.010.500
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	116.651.733	142.363.384	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	4.500.000	7.639.020	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	9.781.902	1.764.900	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	375.565.650	154.541.000	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	14.673.700	6.560.700	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	106.750.521	28.776.750	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	5.592.952.490	99.700.676	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.729.270	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	2.374.500	5.826.000	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	9.773.008	3.244.330	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	35.824.150	29.640.027	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	17.056.430	10.292.420	-
	Total	35.685.304.512	4.359.657.404	7.624.759	61.868.653	126.028.399		11.269.966.188	2.373.361.397	10.528.500

NO	SKPD	BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.145.000	1.161.684.774	1.337.982.663	732.821.222	16.139.649	565.317.948	82.034.720	124.347.734	161.024.060	1.690.000
2	Dinas Kesehatan	2.790.000	9.622.000	5.006.100	7.899.315	-	-	-	-	10.925.788.316	-
3	UPTD RSUD LABUAN	-	66.386.996	973.221.618	83.653.322	19.044.598	-	67.673.259	277.251.151	8.835.756.210	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	645.000	665.049.074	867.014.756	144.576.684	-	-	295.921.900	292.480.515	8.938.500.324	-
5	UPT RSUD BANTEN	-	90.020.739	717.891.030	136.505.909	8.550.000	-	-	128.995.419	4.791.890.757	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	320.053.994	434.607.389	137.892.424	7.600.000	-	-	77.337.974	3.776.458.719	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	17.567.967	16.147.725	5.118.765	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	10.228.002	4.866.154	16.166.817	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	11.548.554	20.644.990	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.198.800	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-
13	Dinas Sosial	-	2.774.000	4.921.647	1.951.950	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	1.398.000	3.668.680	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	61.300.000	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.918.700	13.814.978	11.449.000	-	-	19.199.998	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	1.509.600	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	16.999.400	17.143.955	118.378.639	3.492.000	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	8.604.999	1.589.298	3.821.619	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2.402.260	572.000	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	4.370.000	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	1.408.500	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	2.783.132	3.516.500	11.047.000	11.810.400	-	-	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	15.357.960	-	3.508.710	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	14.678.250	22.304.960	33.684.000	-	-	-	-	41.410.110	5.564.513
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	15.396.286	623.784	89.758	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.670.660	-	4.600.941	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	173.160	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	95.087.830	64.264.895	12.115.706	-	-	31.381.920	251.970	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	4.500.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	14.287.476	-	-	-	-	14.310.000	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	313.750.014	-	-	-	-	54.230.000	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.149.460	3.664.000	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	209.897.300	-	25.019.400	-	-	28.600.000	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	1.225.645.371	64.857.587	35.858.299	53.935.000	-	277.598.482	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	3.484.500	6.038.300	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	19.454.501	1.202.480	2.020.000	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	10.226.430	-	18.564.353	-	-	19.647.000	-	-	-
	Total	29.580.000	4.331.907.715	4.636.803.194	1.586.639.402	120.571.647	565.317.948	890.597.280	900.664.763	37.471.978.496	7.254.513

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	NATURA	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41=3+...+40
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	19.553.210	-	-	2.250.000	-	8.555.671.831
2	Dinas Kesehatan	39.543.750	-	-	944.466.879	-	-	-	-	15.873.334.318
3	UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	1.438.306.263	-	35.493.506	-	-	23.227.164.084
4	UPTD RSUD CIOGRANG	52.049.800	-	-	1.047.708.928	-	-	-	-	22.795.538.349
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	482.949.527	-	-	-	-	12.815.716.975
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	77.240.176	-	-	-	-	15.784.524.037
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	73.693.375
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	6.741.000
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.963.732.769	193.818.824.495	-	-	-	-	-	-	243.684.313.101
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.591.433.140	396.618.116	-	-	-	-	-	-	7.057.053.783
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	33.409.900
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.101.800	21.800.000	-	-	-	-	-	-	179.338.000
13	Dinas Sosial	-	-	-	23.832.152	-	-	-	-	40.530.949
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	29.623.859
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.995
16	Dinas Ketahanan Pangan	293.655.000	-	3.831.053.987	1.386.836.675	-	-	-	-	5.582.398.132
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.980.900	-	-	-	-	-	-	-	108.073.831
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567.600
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	126.213.000	-	328.295.420
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	4.269.575
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	32.282.877
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	7.965.932
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	19.745.650
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	2.782.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	12.465.000	97.231.000	-	-	-	886.905.193
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	33.301.170
27	Dinas Pertanian	313.548.139	-	2.639.250	-	31.219.875	149.030.000	-	-	1.609.148.871
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	210.900	-	-	-	-	22.082.025
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	50.868.395
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	173.160
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	23.254.048	-	-	-	-	485.371.486
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	18.839.020
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	40.144.278
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	898.086.664
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	41.300.160
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	399.043.971
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	7.350.547.906
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1.729.270
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	8.200.500
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	22.540.138
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	88.141.158
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	75.786.632
	Total	56.400.045.298	194.237.242.612	3.833.693.237	5.456.823.757	128.450.875	184.523.506	128.463.000	-	368.278.517.071

**REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN UNTUK OPERASIONAL PEMDA
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 18 Neraca

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.982.205	37.666.594	17.946.500	18.020.225	54.577.294	-	3.518.800	-	16.180.426	16.158.000	2.052.000
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	70.629.989	53.108.280	44.136.016	6.791.124	10.061.372	-	54.690.810	-	27.081.597	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	109.880.757	24.391.103	679.999	-	85.284.630	123.354.456	-	-	-	-
5	UPT RSUD BANTEN	391.900	27.047.865	363.636	-	-	-	148.070	-	54.439.000	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	23.885.213	-	-	-	-	-	-	22.040.000	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.483.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000	20.185.350	-	3.885.000	-	-	-	671.424.032	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	304.551.600	-	-	178.438.450	-	-	389.747.700	-	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	896.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.060.757.342	577.222.654	86.837.255	29.376.348	243.077.116	85.284.630	181.712.135	1.061.171.732	119.741.023	16.158.000	2.052.000

NO	SKPD	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	SUKU CADANG ALAT BENGKEL	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.060.467	52.708.819	6.524.759	24.409.150	115.118.237	10.229.781	2.605.822.803	1.172.244.791	3.460.000	26.145.000
2	Dinas Kesehatan	3.489.062.536	430.106.217	-	-	6.882.000	-	11.981.835	185.370	-	2.790.000
3	UPTD RSUD LABUAN	9.962.895.590	520.358.138	-	1.010.000	2.253.250	-	566.397.786	110.963.210	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	7.920.499.678	1.534.192.914	-	-	1.530.912	-	502.482.719	189.294.201	-	645.000
5	UPT RSUD BANTEN	6.153.493.841	13.488.600	-	-	244.000	-	130.383.867	75.854.815	3.058.000	-
6	UPT RSUD MALINGPING	8.059.982.215	1.779.562.433	-	5.333.328	-	-	942.525.192	120.004.979	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	26.800.950	8.057.968	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	6.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	16.620.945	5.390.671	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	16.133.146	20.675.836	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	18.302.500	15.107.400	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.070.000	-	-	-	-	-	1.912.620	4.104.780	-	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	4.466.400	2.584.800	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	15.427.429	9.129.750	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	1.057.000	1.214.995	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	8.065.625	1.486.845	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	8.107.422	3.602.832	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	58.000	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	1.100.000	-	-	-	31.261.076	13.707.350	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	1.625.000	2.644.575	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	7.867.587	10.399.375	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	2.244.422	2.747.250	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	3.687.350	11.688.300	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.374.000	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.064.600	7.279.380	-	20.039.500	-	-	5.874.480	17.029.819	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	2.298.000	12.136.500	-	-
27	Dinas Pertanian	18.175.584	9.962.300	-	11.076.675	-	-	39.931.815	43.185.650	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	2.027.940	2.836.362	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	5.257.604	-	-	-	-	10.698.195	23.630.496	4.010.500	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	116.651.733	142.363.384	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	4.500.000	7.639.020	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	9.781.902	1.764.900	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	375.565.650	154.541.000	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	14.673.700	6.560.700	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	106.750.521	28.776.750	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	5.592.952.490	99.700.676	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.729.270	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	2.374.500	5.826.000	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	9.773.008	3.244.330	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	35.824.150	29.640.027	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	17.056.430	10.292.420	-	-
	Total	35.685.304.512	4.359.657.404	7.624.759	61.868.653	126.028.399	10.229.781	11.269.966.188	2.373.361.397	10.528.500	29.580.000

NO	SKPD	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	SUVENIR/CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT	OBAT-OBATAN LAINNYA	NATURA
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.161.684.774	1.337.982.663	732.821.222	16.139.649	565.317.948	82.034.720	124.347.734	161.024.060	1.690.000	19.553.210
2	Dinas Kesehatan	9.622.000	5.006.100	7.899.315	-	-	-	-	10.925.788.316	-	944.466.879
3	UPTD RSUD LABUAN	66.386.996	973.221.618	83.653.322	19.044.598	-	67.673.259	277.251.151	8.835.756.210	-	1.438.306.263
4	UPTD RSUD CILOGRANG	665.049.074	867.014.756	144.576.684	-	-	295.921.900	292.480.515	8.938.500.324	-	1.047.708.928
5	UPT RSUD BANTEN	90.020.739	717.891.030	136.505.909	8.550.000	-	-	128.995.419	4.791.890.757	-	482.949.527
6	UPT RSUD MALINGPING	320.053.994	434.607.389	137.892.424	7.600.000	-	-	77.337.974	3.776.458.719	-	77.240.176
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	17.567.967	16.147.725	5.118.765	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.228.002	4.866.154	16.166.817	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	11.548.554	20.644.990	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.198.800	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	-
13	Dinas Sosial	2.774.000	4.921.647	1.951.950	-	-	-	-	-	-	23.832.152
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	1.398.000	3.668.680	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	61.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1.386.836.675
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.918.700	13.814.978	11.449.000	-	-	19.199.998	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	1.509.600	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	16.999.400	17.143.955	118.378.639	3.492.000	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.604.999	1.589.298	3.821.619	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.402.260	572.000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	4.370.000	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.408.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.783.132	3.516.500	11.047.000	11.810.400	-	-	-	-	-	12.465.000
26	Dinas Pariwisata	15.357.960	-	3.508.710	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	14.678.250	22.304.960	33.684.000	-	-	-	-	41.410.110	5.564.513	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.396.286	623.784	89.758	-	-	-	-	-	-	210.900
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.670.660	-	4.600.941	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	173.160	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	95.087.830	64.264.895	12.115.706	-	-	31.381.920	251.970	-	-	23.254.048
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.500.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	14.287.476	-	-	-	-	14.310.000	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	313.750.014	-	-	-	-	54.230.000	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.252.300	5.149.460	3.664.000	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	209.897.300	-	25.019.400	-	-	28.600.000	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	1.225.645.371	64.857.587	35.858.299	53.935.000	-	277.598.482	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	3.484.500	6.038.300	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	19.454.501	1.202.480	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.226.430	-	18.564.353	-	-	19.647.000	-	-	-	-
	Total	4.331.907.715	4.636.803.194	1.586.639.402	120.571.647	565.317.948	890.597.280	900.664.763	37.471.978.496	7.254.513	5.456.823.757

NO	SKPD	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
1	2	34	35	36	37	38=3+...+37
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	2.250.000	-	8.555.671.831
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	15.833.790.568
3	UPTD RSUD LABUAN	-	35.493.506	-	-	23.227.164.084
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	-	-	-	22.743.488.549
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	12.815.716.975
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	15.784.524.037
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	73.693.375
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	6.741.000
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	901.755.837
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	69.002.526
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	33.409.900
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	60.436.200
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	40.530.949
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	29.623.859
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	2.271.995
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	1.457.689.145
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	59.092.931
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	1.567.600
19	Dinas Perhubungan	-	-	126.213.000	-	328.295.420
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	4.269.575
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	32.282.877
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	7.965.932
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	19.745.650
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	2.782.500
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	97.231.000	-	-	-	886.905.193
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	33.301.170
27	Dinas Pertanian	31.219.875	149.030.000	-	-	1.292.961.482
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	22.082.025
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	50.868.395
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	173.160
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	485.371.486
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	18.839.020
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	40.144.278
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	898.086.664
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	41.300.160
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	399.043.971
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	7.350.547.906
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	1.729.270
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	8.200.500
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	22.540.138
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	88.141.158
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	75.786.632
	Total	128.450.875	184.523.506	128.463.000	-	113.807.535.924

**REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN UNTUK DI JUAL ATAU DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	39.543.750	-	-	39.543.750
3	UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	52.049.800	-	-	52.049.800
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.963.732.769	193.818.824.495	-	242.782.557.264
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.591.433.140	396.618.116	-	6.988.051.256
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.101.800	21.800.000	-	118.901.800
13	Dinas Sosial	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	293.655.000	-	3.831.053.987	4.124.708.987
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.980.900	-	-	48.980.900
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-

NO	SKPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	TOTAL
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	313.548.139	-	2.639.250	316.187.389
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	Total	56.400.045.298	194.237.242.612	3.833.693.237	254.470.981.147

REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN USANG / RUSAK / KEDALUWARSA / LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT BESAR	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	UPTD RSUD CILOGRANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.177.832	-	-
6	UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.239	7.840.000	-
7	UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	299.108.700	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	299.108.700	-	-	-	65.512.071	7.840.000	-

[illegible]

SKPD	OBAT-OBATAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA- JAGA	NATURA	PAKAN	NATURA DAN PAKAN LAINNYA	KOMPONEN RAMBU- RAMBU	PIPA PLASTIK PVC (UPVC)	TOTAL
2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41=3+...+40
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD LABUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD RSUD CILOGRANG	-	-	-	-	818.780	-	-	-	-	818.780
UPT RSUD BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.041.325
UPT RSUD MALINGPING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.901.029
UPTD Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pertanian	-	110.236.854	-	-	-	-	-	-	-	409.345.554
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.155.930
Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektorat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	110.236.854	-	-	818.780	-	-	-	-	1.524.262.618

INVESTASI JANGKA PANJANG
SALDO PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

N0	PERUSAHAAN/LEMBAGA	NILAI PENYERTAAN PROVINSI BANTEN PER 31 DESEMBER 2024	MODAL DISETOR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	MODAL SAHAM PERUSAHAAN / LEMBAGA	PERSENTASE KEPEMILIKAN	Tambahan Nilai Penyertaan Modal	Koreksi	Kapitalisasi Laba (Rugi)	Dividen	Divestasi	NILAI PENYERTAAN PROVINSI BANTEN PER 31 DESEMBER 2025 AUDITED
1	2	3	4	5	6 = 4 / 5	7	8	9	10	11	12 = 3 + 7 + 8 + 9 - 10 - 11
	METODE EKUITAS										
1.	PT. BGD	34.721.539.545	35.361.227.000	35.515.394.013	99,57%		206.266.615	4.309.105.229	-	-	39.236.911.389
2.	PT. BPD BANTEN	1.383.460.775.300	2.165.600.000.000	4.308.864.000.000	66,11%*		-	34.143.170.600	-		1.417.603.945.900
3.	PT. JAMKRIDA	73.191.148.631	51.000.000.000	56.500.000.000	90,27%		-	4.825.144.137	4.329.948.642		73.686.344.126
4.	PD. BPR SERANG	38.886.384.121	15.000.000.000	48.439.478.950	30,97%		-	2.008.449.973	2.049.590.915		38.845.243.179
5.	PD. BPR KERTA RAHARJA	27.481.433.695	15.000.000.000	71.650.000.000	20,94%		-	1.912.437.613	690.411.116		28.703.460.193
6.	PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)	77.409.215.211	80.000.000.000	80.000.000.000	100,00%		-	(20.271.177.029)	-		57.138.038.182
	METODE HARGA PEROLEHAN										
7.	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWABARAT DAN BANTEN,Tbk (BJB)	130.147.464.000	130.147.464.000	2.630.361.000.000	4,95%		-	-	-		130.147.464.000
8.	PT. LKM ARTHA KERTA RAHARJA	3.000.000.000	3.000.000.000	50.000.000.000	6,00%		-	-	-		3.000.000.000
9.	PT. LKM RANGKASBITUNG	1.350.000.000	470.700.000	7.503.500.000	17,99%		-	-	-		1.350.000.000
10.	PD. BPR BERKAH KAB. PANDEGLANG	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000	1,00%		-	-	-		300.000.000
11.	PT. BPR-LEBAK SEJAHTERA	900.000.000	900.000.000	12.300.000.000	7,32%		-	-	-		900.000.000
12.	PT. LKM PANDEGLANG BERKAH	1.050.000.000	1.050.000.000	15.000.000.000	7,00%		-	-	-		1.050.000.000
	JUMLAH	1.771.897.960.504	2.497.829.391.000	7.346.133.372.963		-	206.266.615	26.927.130.522	7.069.950.673	-	1.791.961.406.968

REKAPITULASI ASET TETAP SKPD PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	SKPD	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	872.644.051.924	1.410.357.423.971	2.380.999.813.262	90.073.846.715	388.612.151.935	26.727.857.322	5.169.415.145.129
2	Dinas Kesehatan	43.569.317.990	437.198.419.911	281.695.094.945	9.389.868.056	237.532.142	702.196.100	772.792.429.144
3	UPT RSUD MALINGPING	10.260.537.974	177.738.300.004	147.569.894.339	32.579.376.765	6.105.000	1.105.059.450	369.259.273.532
4	UPT RSUD BANTEN	53.021.148.643	705.950.092.281	459.830.761.079	34.728.796.676	160.139.000	91.985.700	1.253.782.923.378
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.639.942.220.449	346.089.552.930	356.959.122.317	9.055.175.176.354	94.439.002.468	12.463.030.722	17.505.068.105.240
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.097.597.447	36.841.644.417	283.481.777.850	57.836.965.467	5.189.100.913	1.160.566.000	416.607.652.093
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	14.768.766.232	629.578.050	-	-	-	15.398.344.282
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	62.637.519.622	29.141.495.276	153.560.000	-	-	91.932.574.898
9	Dinas Sosial	4.657.100.000	18.268.953.661	36.756.064.019	949.595.629	516.975.600	91.393.000	61.240.081.908
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	76.831.550.000	86.059.674.624	97.491.402.147	605.877.000	36.168.910	95.016.000	261.119.688.680
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	13.576.659.091	15.041.232.884	-	26.565.000	-	28.644.456.975
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	9.655.358.238	11.236.096.092	45.900.000	-	-	20.937.354.330
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.307.436.714	53.061.724.484	30.254.155.689	5.920.511.105	14.800.000	-	91.558.627.993
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	13.548.907.997	26.994.427.681	-	42.173.000	-	40.585.508.678
15	Dinas Perhubungan	683.905.125	121.104.019.536	45.912.788.083	55.705.958.519	568.828.700	-	223.975.499.963
16	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6.000.000	70.570.605.359	17.193.868.502	2.255.778.885	184.152.500	-	90.210.405.247
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	392.250.000	12.920.450.171	21.785.819.938	357.553.250	992.736.000	-	36.448.809.359
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	14.818.944.709	18.891.501.738	309.245.253	-	-	34.019.691.700
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	534.493.020	17.612.708.598	32.856.796.578	478.205.930	102.367.000	-	51.584.571.126
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.784.504.400	17.846.386.403	47.602.929.837	500.405.000	10.969.404.807	-	83.703.630.447
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.949.536.145	43.618.726.005	79.574.910.088	69.522.321.615	1.047.435.200	2.748.896.670	219.461.825.724
22	Dinas Pariwisata	-	13.499.479.117	25.500.980.848	710.308.471	106.510.000	-	39.817.278.436
23	Dinas Pertanian	78.793.935.531	69.099.520.525	56.202.266.690	7.679.293.623	176.123.700	-	211.951.140.069
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.309.850.000	21.489.070.987	20.916.556.895	51.781.367.558	48.840.000	-	95.545.685.440
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.953.705.871	30.873.714.699	42.103.730.872	1.154.836.000	190.290.000	-	148.276.277.442

NO	S K P D	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	8.694.740.185	-	-	700.000.000	-	9.394.740.185
27	Biro Hukum	-	4.139.255.832	-	-	226.938.995	-	4.366.194.827
28	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	4.480.094.573	-	-	-	-	4.480.094.573
29	Biro Umum dan Perlengkapan	299.478.882.999	159.702.076.485	154.635.096.294	6.268.706.470	5.934.122.494	709.356.600	626.728.241.342
30	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	10.051.875.966	-	-	-	-	10.051.875.966
31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	11.589.348.960	146.747.500	-	4.730.000	-	11.740.826.460
32	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	17.457.820.524	-	-	180.918.016	-	17.638.738.540
33	Sekretariat DPRD	-	203.475.435.121	181.326.018.310	9.690.574.270	1.778.340.100	6.353.555.500	402.623.923.302
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	25.088.819.560	24.755.413.188	208.384.240	266.176.100	-	50.318.793.088
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.356.473.746	30.154.458.878	68.500.279.416	601.981.167	222.230.000	-	163.835.423.207
36	Badan Pendapatan Daerah	60.102.813.422	153.016.223.329	231.518.682.854	5.783.582.760	1.217.624.475	-	451.638.926.840
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	23.660.022.546	27.353.308.882	44.598.500	-	-	51.057.929.928
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.972.600.000	26.629.130.344	80.290.938.857	4.687.592.733	75.775.850	-	119.656.037.784
39	Badan Penghubung	11.120.990.000	5.619.089.929	6.753.033.527	45.018.000	255.810.000	-	23.793.941.456
40	Inspektorat Provinsi	-	18.190.960.049	22.431.865.310	792.588.000	26.381.004	-	41.441.794.364
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	17.957.242.869	19.657.462.489	50.800.000	9.390.000	-	37.674.895.357
	HARGA PEROLEHAN	9.363.770.901.401	4.539.113.218.722	5.383.991.912.324	9.506.088.574.010	514.565.838.910	52.248.913.064	29.359.779.358.431
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	3.668.547.668.380	2.338.707.763.571	6.286.748.522.860	38.636.519.886	-	12.332.640.474.699
	NILAI BUKU	9.363.770.901.401	870.565.550.342	3.045.284.148.752	3.219.340.051.149	475.929.319.023	52.248.913.064	17.027.138.883.732

REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP SKPD PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	SKPD	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.366.769.901	189.951.212.450	275.740.183.243	19.174.949.409	45.411.784.324	25.277.818.152	648.922.717.478
2	Dinas Kesehatan	(5.681.285.000)	(35.933.408.499)	(183.775.775.561)	(220.625.200)	-	(97.653.000)	(225.708.747.260)
3	UPT RSUD MALINGPING	-	16.214.071.157	18.863.893.760	70.004.592	-	(18.884.544.635)	16.263.424.874
4	UPT RSUD BANTEN	-	60.278.445	2.831.542.181	327.381.838	-	-	3.219.202.464
5	UPTD RSUD LABUAN	659.508.000	74.366.209.636	95.075.999.419	482.000.920	-	97.653.000	170.681.370.975
6	UPTD RSUD CILOGRANG	5.021.777.000	11.334.050.535	90.521.841.485	-	-	-	106.877.669.020
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.583.226.034	5.376.553.216	15.007.635.040	448.629.985.516	-	(153.556.710.744)	357.040.689.062
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(37.498.715.366)	1.196.843.662	1.336.287.000	-	-	-	(34.965.584.704)
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	(24.122.830)	-	-	-	-	(24.122.830)
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	504.495.100	-	-	-	-	504.495.100
11	Dinas Sosial	-	(770.087.253)	-	-	-	91.393.000	(678.694.253)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	4.471.273.714	1.499.534.815	-	-	-	5.970.808.529
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	168.090.151	-	-	-	-	168.090.151
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	231.900.000	-	-	-	-	231.900.000
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(24.075.786)	805.537.631	2.856.719.498	358.649.483	(9.905.600)	(49.522.000)	3.937.403.226
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	1.638.460.350	399.546.366	-	-	-	2.038.006.716
17	Dinas Perhubungan	-	5.548.670.342	3.455.851.625	8.460.866.050	-	-	17.465.388.017
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	-	6.140.365.500	-	-	-	-	6.140.365.500
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	576.314.660	(4.117.131.144)	-	-	-	(3.540.816.484)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.278.285.720	396.206.955	-	-	-	1.674.492.675
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	1.508.092.000	743.606.800	-	-	-	2.251.698.800
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	(897.163.918)	-	-	512.720.274	-	(384.443.644)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.071.929.990	(1.354.689.011)	199.473.500	(197.600.000)	-	(280.885.521)
24	Dinas Pariwisata	-	349.112.700	-	191.240.000	-	-	540.352.700
25	Dinas Pertanian	-	2.464.714.702	752.346.564	98.455.020	(834.672.600)	(99.250.000)	2.381.593.686
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	7.800.000	-	4.734.534.330	-	-	4.742.334.330
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(922.703.135)	96.887.192	33.288.557	-	-	-	(792.527.386)

NO	SKPD	JENIS ASET						
		TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	NILAI PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	(925.645.000)	-	-	-	-	(925.645.000)
29	Biro Hukum	-	433.065.091	-	-	-	-	433.065.091
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	348.309.476	-	-	-	-	348.309.476
31	Biro Umum dan Perlengkapan	(296.501.000)	(1.771.664.719)	(206.972.890)	-	-	709.356.600	(1.565.782.009)
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	(108.115.014)	-	-	-	-	(108.115.014)
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	182.870.256	-	-	-	-	182.870.256
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	(105.216.500)	-	-	-	-	(105.216.500)
35	Sekretariat DPRD	-	18.042.573.583	38.136.667.856	7.914.312.060	-	-	64.093.553.499
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	168.959.246	-	-	-	-	168.959.246
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(17.870.032.199)	428.406.915	49.276.119	-	2.886.000	-	(17.389.463.165)
38	Badan Pendapatan Daerah	(2.384.080.402)	6.450.753.618	2.168.302.264	17.495.739	-	-	6.252.471.220
39	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.004.050.000	-	-	-	-	1.004.050.000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	720.176.835	58.275.000	-	-	-	778.451.835
41	Badan Penghubung	-	1.347.251.284	706.104.964	-	(30.000.000)	-	2.023.356.248
42	Inspektorat Provinsi	-	373.202.094	908.242.788	-	-	-	1.281.444.882
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	12.132.300	190.596.636	-	-	-	202.728.936
	HARGA PEROLEHAN	75.953.888.048	314.337.475.820	362.277.380.329	490.438.723.256	44.855.212.398	(146.511.459.627)	1.141.351.220.224

SALDO KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024 (Audited) Dan 2025

Lampiran 24 Neraca

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.160.566.000	-	-	-	1.160.566.000	
		A. GEDUNG DAN BANGUNAN	99.319.000	-	-	-	99.319.000	
		1 DED Gedung Satpol PP Provinsi Banten	99.319.000,00	-	-	-	99.319.000	
		B. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.061.247.000	-	-	-	1.061.247.000	
		1 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Wanasalam	543.006.000	-	-	-	543.006.000	
		2 Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Cimuncang	518.241.000	-	-	-	518.241.000	
2	DINAS KESEHATAN		512.410.000	-	-	-	512.410.000	
		1 Perencanaan Gardu Induk RSj dan KO Banten	90.860.000	-	-	-	90.860.000	
		2 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi (Penyusunan Andal Lalin RSJKO)	99.057.000	-	-	-	99.057.000	
		3 Blj Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perenc. & Perancangan Lingk. Bangunan & Landscape (Pembuatan DED Pekerjaan Slasar dan Lansc	96.137.000	-	-	-	96.137.000	
		4 Feasibility Study (FS) Pengembangan RS Labuan	97.653.000	-	-	-	97.653.000	
		5 Belanja Modal Pagar (DED Pemagaran Instalasi Farmasi Provinsi Banten)	29.950.000	-	-	-	29.950.000	
		6 Jasa Konsultasi Manajemen (Review DED RSJKO)	98.753.000	-	-	-	98.753.000	
3	RSUD BANTEN		18.976.530.335	-	18.976.530.335	91.985.700	91.985.700	
		1 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Tekanan/Positif Ruang Ranap dan ICU Gedung Belakang	146.513.675	-	146.513.675	-	0	
		2 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pusat Penanganan Kekerasan	96.866.000	-	96.866.000	-	-	
		3 Pembangunan Bunker Radioterapi	6.537.154.964,00	-	6.537.154.964,00	-	-	
		4 Bangunan Kesehatan (Penguatan Sistem Kesehatan Pembangunan Bunker Brachiththerapy)	6.406.411.865,00	-	6.406.411.865,00	-	-	
		5 JASA KONSULTASI PERENCANAAN BUNKER RADIOTERAPI	198.937.000,00	-	198.937.000	-	-	
		6 asa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan BUNKER Radioterapi	699.148.500,00	-	699.148.500	-	-	
		7 Bangunan Kesehatan (Penguatan Sistem Kesehatan Pembangunan Bunker Branchiththerapy	4.891.498.331,00	-	4.891.498.331	-	-	
		8 Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Singgah untuk Keluarga Pasien				91.985.700	91.985.700	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
4	RSUD MALINGPING		1.105.059.450	-	-	-	1.105.059.450	
		1 DED Pengembangan Gedung dan Lingkungan Lahan Baru Uang Muka 20%	655.420.150	-	-	-	655.420.150	
		2 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Belakang (DED)	449.639.300	-	-	-	449.639.300	
5	UPTD PELATIHAN KESEHATAN		47.186.100	-	-	-	47.186.100	
		1 DED PENGEMBANGAN GEDUNG UPTD PELATIHAN KESEHATAN	47.186.100	-	-	-	47.186.100	
6	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		142.600.000	-	-	-	142.600.000	
		1 Jasa Konsultan Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Gedung Laboratorium BSL 2	47.850.000,00	-	-	-	47.850.000	
		2 DED Pembangunan Gedung BSL 2	94.750.000,00	-	-	-	94.750.000	
7	DINAS SOSIAL		-	-	-	91.393.000,00	91.393.000,00	
		1 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan DED Pagar	-			91.393.000,00	91.393.000,00	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.450.039.170	-	1.325.416.470	26.603.234.622	26.727.857.322	
		1 Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan Umpeg Dindikbud	579.978.500	-	579.978.500	-	-	
		2 Jasa Konsultansi Kelayakan Gedung SMAN 15 Kota Tangerang	99.600.000	-	-	-	99.600.000	
		3 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		4 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		5 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		6 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		7 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473,0	-	-	
		8 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		9 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		10 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		11 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	
		12 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		13	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		14	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		15	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		16	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		17	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		18	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		19	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		20	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		21	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		22	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		23	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		24	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		25	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		26	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		27	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		28	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		29	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		30	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		31	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		32	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		33	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		34	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		35	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		36	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		37	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		38	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		39	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		40	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		41	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		42	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		43	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		44	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		45	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		46	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		47	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		48	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		49	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		50	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		51	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		52	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		53	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.473	-	9.090.473	-	-
		54	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi APBD SMA	9.090.477	-	9.090.477	-	-

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		55 Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SKh Negeri 01 Kab. Serang	99.469.000	-	99.469.000	-	-	
		56 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 1 Cilegon	2.494.140	-	2.494.140	-	-	
		57 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 2 KS Cilegon	20.949.600	-	20.949.600	-	-	
		58 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 3 Cilegon	25.438.800	-	25.438.800	-	-	
		59 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 4 Cilegon	29.928.000	-	29.928.000	-	-	
		60 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 1-SMAN 5 Cilegon	20.949.600	-	20.949.600	-	-	
		61 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 5 Kota Serang	18.767.000	-	18.767.000	-	-	
		62 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 3 Kota Serang	12.511.300	-	12.511.300	-	-	
		63 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 2 Kota Serang	7.819.500	-	7.819.500	-	-	
		64 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 6 Kota Serang	25.022.700	-	-	-	25.022.700	
		65 Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi SMA Wilayah 2-SMAN 8 Kota Serang	34.406.430	-	34.406.430	-	-	
		66 Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab. Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		67 Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab. Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		68 Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab. Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		69 Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab. Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	
		70 Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab. Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan				16.540.850	16.540.850	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		71	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Infrastruktur SMA SMAN 1 Cibeber, SMAN 2 Cibeber, SMAN 1 Carenang, SMAN 7 Kab, Tangerang, SMAN 21 Kab. Tangerang, SMAN 3 Tangerang Selatan			16.540.850	16.540.850	
		72	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas			24.811.275	24.811.275	
		73	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas			24.811.275	24.811.275	
		74	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas			24.811.275	24.811.275	
		75	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 1 SMAN 1 Banjarsari, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Cipanas			24.811.275	24.811.275	
		76	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja			33.081.700	33.081.700	
		77	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja			33.081.700	33.081.700	
		78	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 SMAN 1 Cihara, SMAN 1 Gunung Kencana, SMAN 2 Maja			33.081.700	33.081.700	
		79	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari			33.081.700	33.081.700	
		80	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari			33.081.700	33.081.700	
		81	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 3 SMAN 1 Panggarangan, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari			33.081.700	33.081.700	
		82	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang			19.849.020	19.849.020	
		83	Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang			19.849.020	19.849.020	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		84 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		85 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		86 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 1 SMAN 1 Pandeglang, SMAN 3 Pandeglang, SMAN 5 Pandeglang, SMAN 6 Pandeglang, SMAN 18 Pandeglang				19.849.020	19.849.020	
		87 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020	
		88 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020	
		89 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020	
		90 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020	
		91 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Kabupaten Pandeglang Wilayah 2 SMAN 8 Pandeglang, SMAN 11 Pandeglang, SMAN 12 Pandeglang, SMAN 19 Pandeglang, SMAN CMBBS				19.849.020	19.849.020	
		92 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360	
		93 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360	
		94 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		95 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360	
		96 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Serang SMAN 1 Baros, SMAN 1 Bojonegara, SMAN 1 Carenang, SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Lebakwangi				19.842.360	19.842.360	
		97 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		98 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		99 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		100 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		101 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		102 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 6 Kabtang, SMAN 7 Kabtang, SMAN 8 Kabtang, SMAN 11 Kabtang, SMAN 19 Kabtang, SMAN 23 Kabtang				14.177.871	14.177.871	
		103 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kabupaten Tangerang SMAN 25 Kabtang				14.177.874	14.177.874	
		104 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		105 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		106 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Cilegon SMAN 2 Kota Cilegon, SMAN 3 Kota Cilegon, SMAN 5 Kota Cilegon				33.081.700	33.081.700	
		107 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		108 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	
		109 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Serang SMAN 2 Kota Serang, 6 Kota Serang, 8 Kota Serang				33.081.700	33.081.700	
		110 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	
		111 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	
		112 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	
		113 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang SMAN 6 Kota Tangerang, 11 Kota Tangerang, 13 Kota Tangerang, 14 Kota Tangerang				24.802.950	24.802.950	
		114 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan				33.081.700	33.081.700	
		115 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan				33.081.700	33.081.700	
		116 Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi SMA Wilayah Kota Tangerang Selatan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, 6 Kota Tangerang Selatan, 10 Kota Tangerang Selatan				33.081.700	33.081.700	
		117 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang				24.811.275	24.811.275	
		118 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang				24.811.275	24.811.275	
		119 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang				24.811.275	24.811.275	
		120 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA SMAN 30 Kab. Tangerang, 31 Kab. Tangerang, 32 Kab. Tangerang, 33 Kab. Tangerang				24.811.275	24.811.275	
		121 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA & SMAN 9 Serang				49.647.525	49.647.525	
		122 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA & SMAN 9 Serang				49.647.525	49.647.525	
		123 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SKh Negeri 02 Kabupaten Lebak				97.425.000	97.425.000	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		124 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan USB SKh Negeri 01 Kota Tangerang				98.385.000	98.385.000	
		125 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SKh Negeri 01 Kabupaten Serang				97.000.000	97.000.000	
		126 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 16 Kabupaten Tangerang				7.622.260.288	7.622.260.288	
		127 Pembnagunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 12 Kota Tangerang				8.572.934.295	8.572.934.295	
		128 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros				5.955.877.094	5.955.877.094	
		129 Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Panggarangan				992.652.927	992.652.927	
		130 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam				1.647.094.307	1.647.094.307	
		131 Jasa FS dan Jasa Appraisal Lahan SMKN 7 Kota Tangerang				130.190.960	130.190.960	
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		166.019.741.476	-	164.981.043.144	11.424.332.400	12.463.030.722	
		A. TANAH	1.098.204.546	-	932.131.836	-	166.072.700	
		1 Ruas Jalan Citeras - Tigaraksa	148.500.000,00	-	148.500.000,00	-	-	
		2 BOP TANAH UNTUK JALAN RUAS PALIMA BAROS (lingkar baros	159.605.000,00	-	159.605.000,00	-	-	
		3 BOBP Persiapan Ruas Jalan Palima - Baros (Lingkar Baros)	624.026.836,00	-	624.026.836,00	-	-	
		4 Jasa Konsultansi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang	96.131.550,00	-		-	96.131.550	
		5 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	69.941.150,00	-		-	69.941.150	
		C. GEDUNG DAN BANGUNAN	21.013.767.630	-	20.565.339.008	420.463.200	868.891.822	
		1 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	448.428.622,00	-		-	448.428.622	
		2 Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten	610.179.880,00		610.179.880	-	-	
		3 Bangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Bank Banten	19.955.159.128		19.955.159.128	-	-	
		4 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan				420.463.200	420.463.200	
		D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	143.907.769.300	-	143.483.572.300	11.003.869.200	11.428.066.200	
		1 Penyusunan Dokumen Teknis Kelayakan Pembangunan Jalan Baru Palima - Baros.	48.983.000	-	48.983.000	-	-	
		2 Penyusunan Pengadaan Tanah Kelayakan Pembangunan Jalan Baru Palima - Baros	49.258.000	-	49.258.000	-	-	
		3 DED Jalan Palima - Baros	200.154.000	-	200.154.000	-	-	
		4 Pengadaan Lahan Palima - Baros	373.617.700	-	373.617.700	-	-	
		5 DED Pengaman Pantai Binuangeun	424.197.000,00	-		-	424.197.000	
		6 Jalan Provinsi Pembangunan Jalan Ciparay Cikumpay	69.281.521.750,00	-	69.281.521.750,00	-	-	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
		7 Jalan Provinsi Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya	73.530.037.850,00	-	73.530.037.850,00	-	-	
		8 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Baros Petir		-		10.815.652.000	10.815.652.000	
		9 Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cimanyangray Saluran Irigasi				188.217.200	188.217.200	
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.748.896.670	-	-	-	2.748.896.670	
		1 Perencanaan Fisik, Pertamanan dll - DED Normalisasi Sungai UPTD PPBAPL Curug Barang	68.500.000	-		-	68.500.000	
		2 Jasa Konsultansi DED Zona PPBAPL 3	215.326.125,00	-		-	215.326.125	
		3 Pembayaran termin 1 DED Jetty PP Cikeusik	129.796.740,00	-		-	129.796.740	
		4 DED pembangunan Laboratorium UPTD PPBAPL	49.506.000,00	-		-	49.506.000	
		5 Reviw Masterplant PPBAPL Curugbarang	162.565.050,00	-		-	162.565.050	
		6 Belanja Jasa Konsultansi Review Masterplan PPBPL Curug Barang	81.349.900,00	-		-	81.349.900	
		7 Jasa Konsultansi DED Kawasan PPBAPL Cigorondong Zona 4	190.642.500,00	-		-	190.642.500	
		8 Konsultan Perencanaan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) PPP Labuan	292.067.640,00	-		-	292.067.640	
		9 Pembayaran Termin 2 DED Jetty	216.851.820,00	-		-	216.851.820	
		10 Review Masterplan PPP Labuan	195.909.450,00	-		-	195.909.450	
		11 Konsultan Perencanaan Pembuatan Feasibility Study Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	195.900.570,00	-		-	195.900.570	
		12 Jasa Konsultansi DED Kawasan PPBAPL Cigorondong Zoan 4	192.307.500,00	-		-	192.307.500	
		13 Jasa Konsultansi DED Kwasan PPBAPL Cigorondong Zona 3	217.573.875,00	-		-	217.573.875	
		14 DED Dermaga	98.734.500,00	-		-	98.734.500	
		15 Dokumen Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	441.865.000,00	-		-	441.865.000	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		49.522.000	-	49.522.000	-	-	
		1 Jasa Konsultan Penyusunan DED Jalan Paving ke Daerah Puteran	49.522.000	-	49.522.000	-	-	
			-				-	
12	DINAS PERTANIAN		99.250.000	-	25.000.000	-	-	
		1 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25.000.000	-	25.000.000	-	-	
		2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (DED Perencanaan Auning Parkir Dinas Pertanian)	24.700.000	-	24.700.000	-	-	
		3 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lianya (DED Perencanaan Pagar Dinas Pertanian)	24.800.000	-	24.800.000	-	-	
		4 Belanja Jasa Konsultansi Perencana Asitektur-Jasa Lainnya (Pemagaran Citeras DINAS PERTANIAN)	24.750.000	-	-	-	24.750.000	

NO	SKPD	URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH	2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5-6+7	9
13	SEKREATRIAT DPRD		6.353.555.500	-	-	-	6.353.555.500	
		1 Konsultan Perencanaan Gedung Fraksi	3.521.892.500,00	-		-	3.521.892.500	
		2 JASA KONSULTASI AMDAL GEDUNG DPRD PROVINSI BANTEN & JASA KONSULTASI ANDALALIN GEDUNG DPRD	2.432.931.000,00	-		-	2.432.931.000	
		3 DED Partisi Dinding Lantai 1	99.683.000,00			-	99.683.000	
		4 DED Partisi Dinding Lantai 2	99.683.000,00			-	99.683.000	
		5 DED Partisi Dinding Lantai 3	99.683.000,00			-	99.683.000	
		6 DED Lantai Paripurna	99.683.000,00			-	99.683.000	
14	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		95.016.000,00	-	-	-	95.016.000,00	
		1 Jasa Desain Arsitekturat (Reviu DED)	95.016.000,00	-	-	0,00	95.016.000	
15	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN		-			709.356.599,45	709.356.599,45	
		1 Jasa Konsultan DED Penataan Gedung Gerai Dekranasda dan Perpustakaan Lingkungan Pendopo Lama	-			63.780.600	63.780.600	
		2 Jasa Konsultasi Perecanaan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya Lingkungan Rumah Dinas Wakil Gubernur Gubernur				43.856.100	43.856.100	
		3 Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pendopo gubernur				43.245.600	43.245.600	
		4 Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkungan Pendopo Lama				43.689.600	43.689.600	
		5 Jasa Konsultasi DED Penataan Landscap Area Lingkungan Pendopo Lama				63.447.600	63.447.600	
		6 Jasa Konsultasi DED Penataan Landscap Area Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pendopo Gubernur				63.447.600	63.447.600	
		7 Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Exterior Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				97.069.500	97.069.500	
		8 Jasa Konsultkasi Perencanaan Penataan Interior Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				96.903.000	96.903.000	
		9 Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan AC FRV Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten				96.958.500	96.958.500	
		10 Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan AC FRV Gedung Pendopo Gubernur Provinsi Banten				96.958.500	96.958.500	
			198.760.372.701,00	-	185.357.511.948,65	38.920.302.321,51	52.248.913.064	

SALDO ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

Lampiran 25 Neraca

NO		URAIAN	2024 (Audited)	KOREKSI KURANG SALDO AWAL	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	2025	KETERANGAN
1		2	3	4	5=3-4	6	7	8=5+6-7	
A		Tuntutan Ganti Rugi	19.714.286	-	19.714.286	13.570.000	19.714.286	13.570.000	
B		Aset Tidak Berwujud	35.732.344.452	-	35.732.344.452	7.553.082.673	19.061.792.891	24.223.634.234	
C		Aset Lain-lain							
	1.	Piutang Tunjangan Komunikasi Insentif & Biaya Operasional Pimpinan DPRD	237.655.000	-	237.655.000	-	-	237.655.000	
	2.	Uang Sitaan Kejaksaan atas Tunjangan Perumahan	169.000.000	-	169.000.000	-	-	169.000.000	
	3.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Saldo Kas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat)	-	-	-	-	-	-	
	4.	Aset tetap yang kondisinya rusak berat	869.829.006.066	-	869.829.006.066	108.712.165.309	498.211.195.785	480.329.975.588	
	5.	Uang Titipan Perkara Pajak di UPT Kepala Dua Bapenda Provinsi Banten di Kejaksaan Tinggi Banten	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	
	6.	Kerugian atas permasalahan Pajak Daerah sudah ada penetapan pembebanan namun belum didukung jaminan penyelesaian TGR	4.829.369.200	-	4.829.369.200	-	-	4.829.369.200	
	7.	Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-	
	8	Aset Tetap yang dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota	69.715.747.188	-	69.715.747.188	-	50.862.295.497	18.853.451.691	
		Jumlah Aset Lain-lain	950.763.307.254	-	950.763.307.254	108.712.165.309	555.056.021.082	504.419.451.480	
		JUMLAH ASET LAINNYA	986.515.365.992	-	986.515.365.992	116.278.817.982	574.137.528.259	528.656.655.714	

No	Uraian	Perolehan s.d 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Perolehan Setelah Koreksi	Akumulasi amortisasi sd 2024	Koreksi Akumulasi amortisasi	Penambahan 2025	Pengurangan (Reklas ke aset lain-lain)	Pengurangan (Reklas ke aset tetap)	Akumulasi amortisasi Reklas ke penyusutan aset lain-lain	Perolehan s.d 2025	Beban amortisasi	Akumulasi amortisasi sd 2025	Nilai Buku 2025
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=5+8-9-10	13	14= 6+7+13-11	15= 12- 14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	269.130.000	-	269.130.000	93.546.667	-	213.002.500	-	-	-	482.132.500	59.983.354	153.530.021	328.602.479
2	Dinas Kesehatan	14.547.907.321	-	14.547.907.321	769.163.084	-	1.350.755.500	-	-	-	15.898.662.821	3.663.880.070	4.433.043.154	11.465.619.667
3	RSU Malingping	6.240.278.215	-	6.240.278.215	130.005.796	-	-	-	-	-	6.240.278.215	1.560.069.554	1.690.075.350	4.550.202.865
4	RSUD Banten	4.955.238.000	-	4.955.238.000	3.184.549.208	-	1.387.500.000	-	-	-	6.342.738.000	994.736.500	4.179.285.708	2.163.452.292
5	RSUD Labuan	-	-	-	-	-	1.419.605.000	-	-	-	1.419.605.000	59.150.208	59.150.208	1.360.454.792
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	1.419.672.500	-	-	-	1.419.672.500	59.153.021	59.153.021	1.360.519.479
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	475.858.700	-	475.858.700	400.932.367	-	49.700.000	-	-	-	525.558.700	74.328.250	475.260.617	50.298.083
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	338.500.032	-	338.500.032	100.744.455	-	-	-	-	-	338.500.032	89.158.341	189.902.796	148.597.236
9	Satuan Polisi Pamong Praja	138.250.000	-	138.250.000	41.361.458	-	-	-	-	-	138.250.000	24.737.500	66.098.958	72.151.042
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188.306.000	-	188.306.000	43.192.917	-	-	-	-	-	188.306.000	47.076.500	90.269.417	98.036.583
11	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	384.075.100	-	384.075.100	362.525.504	-	-	-	-	-	384.075.100	21.549.596	384.075.100	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	300.812.000	-	300.812.000	292.645.333	-	49.500.000	49.000.000	-	-	301.312.000	8.666.667	301.312.000	-
14	Dinas Ketahanan Pangan	127.280.000	-	127.280.000	113.692.500	-	-	-	-	-	127.280.000	10.870.000	124.562.500	2.717.500
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	179.250.000	-	179.250.000	56.592.708	-	-	-	-	-	179.250.000	44.812.500	101.405.208	77.844.792
17	Dinas Perhubungan	229.500.000	-	229.500.000	172.125.000	-	566.225.000	-	-	-	795.725.000	586.475.000	758.600.000	37.125.000
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.094.107.660	-	3.094.107.660	1.794.590.180	-	-	-	-	-	3.094.107.660	283.511.915	2.078.102.095	1.016.005.565
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	210.095.000	-	210.095.000	210.095.000	-	-	-	-	-	210.095.000	-	210.095.000	(0)
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	109.400.000	-	109.400.000	84.329.167	-	-	-	-	-	109.400.000	25.070.833	109.400.000	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.900.000	-	216.900.000	160.433.974	-	-	-	-	-	216.900.000	56.466.026	216.900.000	0
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.250.000	-	67.250.000	23.817.708	-	-	-	-	-	67.250.000	16.812.500	40.630.208	26.619.792
24	Dinas Pariwisata	120.379.500	-	120.379.500	40.965.938	-	-	-	-	-	120.379.500	30.094.875	71.060.813	49.318.688
25	Dinas Pertanian	95.000.000	-	95.000.000	49.479.167	-	-	-	-	-	95.000.000	23.750.000	73.229.167	21.770.833
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	96.623.510	-	96.623.510	17.259.805	-	94.005.900	-	-	-	190.629.410	38.399.196	55.659.000	134.970.410
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	135.725.000	-	135.725.000	135.725.000	-	-	-	-	-	135.725.000	-	135.725.000	(0)
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	58.782.360	-	58.782.360	34.289.710	-	-	-	-	-	58.782.360	14.695.590	48.985.300	9.797.060
31	Biro Umum dan Perlengkapan	466.830.500	-	466.830.500	292.770.687	-	-	-	-	-	466.830.500	116.161.063	408.931.750	57.898.750
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	92.800.000	-	92.800.000	79.266.667	-	-	-	-	-	92.800.000	13.533.333	92.800.000	-

No	Uraian	Perolehan s.d 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Perolehan Setelah Koreksi	Akumulasi amortisasi sd 2024	Koreksi Akumulasi amortisasi	Penambahan 2025	Pengurangan (Reklas ke aset lain-lain)	Pengurangan (Reklas ke aset tetap)	Akumulasi amortisasi Reklas ke penyusutan aset lain-lain	Perolehan s.d 2025	Beban amortisasi	Akumulasi amortisasi sd 2025	Nilai Buku 2025
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=5+8-9-10	13	14= 6+7+13-11	15= 12- 14
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Sekretariat DPRD	241.285.000	-	241.285.000	42.250.000	-	-	-	-	-	241.285.000	39.000.000	81.250.000	160.035.000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.633.055.554	-	1.633.055.554	1.528.189.529	-	199.105.000	-	-	-	1.832.160.554	156.404.533	1.684.594.061	147.566.493
38	Badan Pendapatan Daerah	369.690.000	-	369.690.000	226.299.375	-	609.761.273	-	-	-	979.451.273	59.325.188	285.624.563	693.826.710
39	Badan Kepegawaian Daerah	350.035.000	-	350.035.000	350.035.000	-	-	-	-	-	350.035.000	-	350.035.000	-
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Badan Penghubung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Inspektorat	-	-	-	-	-	194.250.000	-	-	-	194.250.000	4.046.875	4.046.875	190.203.125
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	JUMLAH	35.732.344.452	-	35.732.344.452	10.830.873.904	-	7.553.082.673	49.000.000	-	-	43.236.427.125	8.181.918.987	19.012.792.891	24.223.634.234

REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan sd 2024	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Nilai Perolehan sd 2025	Akumulasi Penyusutan 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6=3+4-6	7	8=6+7	9
1	Sisa piutang atas Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dan Dana Operasional Pimpinan DPRD	237.655.000	-	-	237.655.000	-	237.655.000	
2	Uang Sitaan Kejaksaan yang disita dari anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan masa bakti 1999–2004	169.000.000	-	-	169.000.000	-	169.000.000	
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Sekolah (Saldo Kas Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat)	-	-	-	-	-	-	
4	Aset tetap yang kondisinya rusak berat	869.829.006.066	108.712.165.309	42.066.674.844	936.474.496.532	456.144.520.943	480.329.975.588	
5	Uang Titipan Perkara Pajak di UPT Kepala Dua Bapenda Provinsi Banten di Kejaksaan Tinggi Banten	5.982.529.800	-	5.982.529.800	-	-	-	
6	Kerugian atas permasalahan Pajak Daerah sudah ada penetapan pembebanan namun belum didukung jaminan penyelesaian TGR	4.829.369.200	-	-	4.829.369.200	-	4.829.369.200	
7	Aset Tetap yang dalam proses hibah ke Kabupaten/Kota	69.715.747.188	-	38.936.700.000	30.779.047.188	11.925.595.497	18.853.451.691	
	JUMLAH	950.763.307.254	108.712.165.309	86.985.904.644	972.489.567.920	468.070.116.440	504.419.451.480	

REKAP BARANG RUSAK BERAT MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
S/D 2025

Lampiran 25.3 Neraca

NO	SKPD	HARGA PEROLEHAN sd 2024 (AUDITED)	koreksi tambah/ kurang saldo awal	PENGHAPUSAN	MUTASI DEBIT		MUTASI KREDIT	PEROLEHAN 2025	AK PENY				NILAI BUKU
					Audited	Hasil Koreksi			s.d 2024 (Audited)	Koreksi	2025	s.d 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5-6-7-8	10	11	12	13=10+11+12	14=9-13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	153.903.157.231,98	-	16.090.055.927,26	7.788.067.945,01	-	197.600.000,00	145.403.569.249,73	124.519.326.070,97	-	494.919.615,27	124.024.406.455,70	21.379.162.794,03
2	Dinas Kesehatan	7.767.051.758,01	-	-	-	-	-	7.767.051.758,01	3.246.301.579,68	-	-	3.246.301.579,68	4.520.750.178,33
3	RSUD Malingping	1.435.777.000,00	-	14.511.000,00	29.691.000,00	-	-	1.450.957.000,00	1.435.777.000,00	-	15.180.000,00	1.450.957.000,00	-
4	RSUD Banten	5.854.669.794,22	-	243.379.675,00	243.379.675,00	-	-	5.854.669.794,22	5.806.280.732,54	-	-	5.806.280.732,54	48.389.061,68
5	RSUD Labuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DINKES	15.057.498.552,23	-	257.890.675,00	273.070.675,00	-	-	15.072.678.552,23	10.488.359.312,22	-	15.180.000,00	10.503.539.312,22	4.569.139.240,01
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	510.531.940.858,97	-	3.581.378.536,00	18.912.489.943,00	-	794.366.200,00	525.068.686.065,97	179.663.151.383,21	-	450.034.000,46	180.113.185.383,67	344.955.500.682,30
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.609.009.465,09	-	3.275.015.000,00	4.156.783.308,85	-	-	49.490.777.773,94	23.290.470.253,04	-	881.768.308,85	24.172.238.561,89	25.318.539.212,05
9	Satuan Polisi Pamong Praja	810.410.735,00	-	-	575.961.600,00	-	-	1.386.372.335,00	724.319.068,32	-	575.961.600,00	1.300.280.668,32	86.091.666,68
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.149.901.612,00	-	-	-	-	-	1.149.901.612,00	1.149.901.612,00	-	-	1.149.901.612,00	-
11	Dinas Sosial	1.653.069.351,00	-	-	1.511.611.756,07	-	-	3.164.681.107,07	1.340.853.092,67	-	1.511.611.756,07	2.852.464.848,74	312.216.258,33
12	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	846.998.494,55	-	-	2.521.296.864,65	-	-	3.368.295.359,20	786.016.608,33	-	2.519.774.189,65	3.305.790.797,98	62.504.561,22
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	135.295.000,00	-	-	49.000.000,00	-	49.500.000,00	134.795.000,00	135.295.000,00	-	8.666.666,67	126.628.333,33	8.166.666,67
14	Dinas Kelahanan Pangan	275.030.000,00	-	-	-	-	-	275.030.000,00	275.030.000,00	-	-	275.030.000,00	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.283.303.800,00	-	38.725.000,00	62.800.785,64	-	-	2.307.379.585,64	2.189.540.508,33	-	-	2.189.540.508,33	117.839.077,31
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	154.790.000,00	-	-	-	-	-	154.790.000,00	154.790.000,00	-	-	154.790.000,00	-
17	Dinas Perhubungan	21.119.963.793,00	-	1.002.225.000,00	23.582.500,00	-	566.225.000,00	19.575.096.293,00	10.054.302.849,06	-	626.174.166,67	9.428.128.682,39	10.146.967.610,61
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.320.264.800,00	-	-	-	-	-	2.320.264.800,00	2.264.456.175,00	-	-	2.264.456.175,00	55.808.625,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.087.999.003,00	-	-	209.700.000,00	-	-	1.297.699.003,00	1.012.999.003,00	-	209.700.000,00	1.222.699.003,00	75.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.708.632.250,00	-	-	-	-	-	2.708.632.250,00	2.607.404.437,50	-	-	2.607.404.437,50	101.227.812,50
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	358.360.000,00	-	-	30.750.000,00	-	-	389.110.000,00	344.331.875,00	-	30.750.000,00	375.081.875,00	14.028.125,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	602.618.000,00	-	-	1.979.719.204,35	-	-	2.582.337.204,35	602.618.000,00	-	1.932.471.912,68	2.535.089.912,68	47.247.291,67
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.280.648.602,38	-	3.274.988.937,18	3.680.927.050,00	-	-	8.686.586.715,20	3.779.067.102,71	-	653.129.895,51	3.125.937.207,20	5.560.649.508,00
24	Dinas Pariwisata	257.305.200,00	-	-	-	-	-	257.305.200,00	61.324.000,01	-	-	61.324.000,01	195.981.199,99
25	Dinas Pertanian	5.394.574.611,64	-	308.210.000,00	627.688.857,77	-	-	5.714.053.469,41	2.765.638.544,15	-	598.888.857,77	3.364.527.401,92	2.349.526.067,49
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	43.594.645.544,00	-	-	-	-	-	43.594.645.544,00	29.898.045.825,87	-	-	29.898.045.825,87	13.696.599.718,13
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.700.734.492,33	-	882.509.500,00	258.000.000,00	-	89.350.000,00	1.966.874.992,33	1.962.976.044,83	-	80.787.291,67	1.882.188.753,16	104.686.239,17
28	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	750.935.000,00	-	183.000.000,00	432.250.000,00	-	-	1.000.185.000,00	750.935.000,00	-	249.250.000,00	1.000.185.000,00	-
29	Biro Hukum	431.381.552,00	-	-	-	-	-	431.381.552,00	431.381.552,00	-	-	431.381.552,00	-
30	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	113.267.500,00	-	-	126.000.000,00	-	-	239.267.500,00	113.267.500,00	-	126.000.000,00	239.267.500,00	-
31	Biro Umum dan Perlengkapan	21.269.306.216,00	-	2.225.038.751,00	4.851.881.914,00	-	21.053.000,00	23.875.096.379,00	19.648.617.513,51	-	2.375.840.908,84	22.024.458.422,35	1.850.637.956,65
32	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	35.365.013,76	-	35.365.013,76	147.865.013,76	-	-	147.865.013,76	35.365.013,76	-	-	147.865.013,76	-
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.097.540.000,00	-	9.000.000,00	21.910.000,00	-	-	1.110.450.000,00	1.085.352.500,00	-	12.910.000,00	1.098.262.500,00	12.187.500,00
34	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	2.035.403.500,00	-	-	173.840.500,00	-	-	2.209.244.000,00	2.035.403.500,00	-	173.840.500,00	2.209.244.000,00	-
35	Sekretariat DPRD	1.320.137.613,00	-	2.249.000.000,00	2.249.000.000,00	-	-	1.320.137.613,00	1.259.630.240,13	-	-	1.259.630.240,13	60.507.372,87
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.773.198.248,00	-	80.500.000,00	150.600.000,00	-	-	1.843.298.248,00	1.717.536.779,17	-	70.100.000,00	1.787.636.779,17	55.661.468,83
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.655.869.294,00	-	779.056.294,00	51.736.808.530,60	-	-	54.613.621.530,60	2.803.385.406,50	-	2.879.168.969,01	5.682.554.375,51	48.931.067.155,09
38	Badan Pendapatan Daerah	5.653.285.127,91	-	5.330.315.936,81	5.775.027.830,80	-	-	6.097.997.021,90	5.575.393.373,66	-	444.711.893,99	6.020.105.267,65	77.891.754,25
39	Badan Kepegawaian Daerah	1.311.749.500,00	-	-	-	-	-	1.311.749.500,00	1.311.749.500,00	-	-	1.311.749.500,00	-
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.889.530.547,00	-	282.374.000,00	-	-	-	1.607.156.547,00	1.596.956.963,67	-	-	1.596.956.963,67	10.199.583,33
41	Badan Penghubung	836.163.071,76	-	463.932.071,76	385.531.029,98	-	-	757.762.029,98	814.463.071,76	-	86.701.041,78	727.762.029,98	30.000.000,00
42	Inspektorat	1.672.050.260,16	-	-	-	-	-	1.672.050.260,16	1.637.757.668,49	-	-	1.637.757.668,49	34.292.591,67
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.147.672.225,65	-	-	-	-	-	2.147.672.225,65	2.037.024.375,65	-	-	2.037.024.375,65	110.647.850,00
		869.829.006.066,40	-	40.348.580.642,77	108.712.165.309,48	-	1.718.094.200,00	936.474.496.533,11	442.924.436.724,52	-	17.120.841.574,89	456.144.520.944,27	480.329.975.588,84

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	UTANG Perhitungan Fihak Ketiga	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA										UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
					UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL (PENGADAAN ASET TETAP)	UTANG BELANJA BAGI HASIL	JUMLAH UTANG BELANJA		
						UTANG BELANJA BARANG	JUMLAH UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARA AN	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12	13	14	15=11+12+13+14	16	17= 3+4+5+15+16
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	75.418.424	-	-	75.418.424	-	14.938.400.068	-	15.013.818.492	-	15.013.818.492
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	402.993.487	-	-	402.993.487	-	-	-	402.993.487	-	402.993.487
3	RSUD Malingping	-	-	-	-	-	125.437.990	-	-	125.437.990	-	-	-	125.437.990	-	125.437.990
4	RSUD Banten	-	-	50.061.533	-	-	468.158.137	-	6.915.163.718	7.383.321.855	-	-	-	7.383.321.855	-	7.433.383.388
5	RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan	-	-	-	-	-	204.785.296	-	-	204.785.296	-	-	-	204.785.296	-	204.785.296
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	-	80.033.568	-	-	80.033.568	-	-	-	80.033.568	-	80.033.568
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2.583.362.568	-	6.510.544.931	624.559.899	87.050.775	-	7.222.155.605	2.579.582.396	15.055.200.238	-	24.856.938.239	-	27.440.300.806
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	630.293.394	41.631.504	-	-	671.924.898	-	-	-	671.924.898	-	671.924.898
9	Satuan Polisi Pamong Praja						-			-				-	-	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						28.873.740			28.873.740				28.873.740	-	28.873.740
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						36.568.826			36.568.826				36.568.826	-	36.568.826
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	38.254.285	-	-	38.254.285	-	-	-	38.254.285	-	38.254.285
13	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi						57.863.948			57.863.948				57.863.948	-	57.863.948
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana						32.255.508			32.255.508				32.255.508	-	32.255.508
15	Dinas Ketahanan Pangan						14.257.825			14.257.825				14.257.825	-	14.257.825
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						33.543.368			33.543.368				33.543.368	-	33.543.368
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						19.596.436			19.596.436				19.596.436	-	19.596.436
18	Dinas Perhubungan						317.362.937			317.362.937				317.362.937	-	317.362.937
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						36.685.074			36.685.074				36.685.074	-	36.685.074
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						32.489.624			32.489.624				32.489.624	-	32.489.624
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1.840.000	20.127.580			21.967.580				21.967.580	-	21.967.580
22	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga						42.877.544			42.877.544				42.877.544	-	42.877.544
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						40.103.564			40.103.564				40.103.564	-	40.103.564
24	Dinas Kelautan dan Perikanan						134.606.527			134.606.527				134.606.527	-	134.606.527
25	Dinas Pariwisata						27.164.012			27.164.012				27.164.012	-	27.164.012
26	Dinas Pertanian						85.895.912			85.895.912				85.895.912	-	85.895.912
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						12.066.567			12.066.567				12.066.567	-	12.066.567

NO.	SKPD	UTANG Perhitungan Fihak Ketiga	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	UTANG BELANJA										UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	JUMLAH
					UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA					UTANG BELANJA HIBAH	UTANG BELANJA MODAL (PENGADAAN ASET TETAP)	UTANG BELANJA BAGI HASIL	JUMLAH UTANG BELANJA		
						UTANG BELANJA BARANG	JUMLAH UTANG BELANJA JASA	UTANG BELANJA PEMELIHARA AN	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12	13	14	15=11+12+13+14	16	17= 3+4+5+15+16
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						58.200.054			58.200.054				58.200.054	-	58.200.054
29	Sekretariat DPRD						194.909.902			194.909.902				194.909.902	-	194.909.902
30	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						-			-				-	-	-
31	Biro Hukum						-			-				-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi						-			-				-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan						304.944.251			304.944.251				304.944.251	-	304.944.251
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa						-			-				-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan						-			-				-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan						-			-				-	-	-
37	Badan Penghubung						23.327.773			23.327.773				23.327.773	-	23.327.773
38	Inspektorat Provinsi						35.536.194			35.536.194				35.536.194	-	35.536.194
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						27.889.191			27.889.191				27.889.191	-	27.889.191
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	357.517.214	-	-	453.328.359	-	-	453.328.359	-	-	-	453.328.359	-	810.845.573
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	138.497.733.036	-	-	-	37.859.314	-	-	37.859.314	-	-	308.629.634.987	308.667.494.301	-	447.165.227.337
42	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	2.280.000	-	33.387.489	-	-	33.387.489	-	-	-	35.667.489	-	35.667.489
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						75.426.112			75.426.112				75.426.112	-	75.426.112
JUMLAH		-	138.497.733.036	2.990.941.315	2.280.000	7.142.678.325	4.278.420.221	87.050.775	6.915.163.718	18.423.313.039	2.579.582.396	29.993.600.306	308.629.634.987	359.628.410.728	-	501.117.085.079

UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 27 Neraca

No	SKPD	SALDO 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Utang PPN	-	-	-	-	Nihil
2	Utang PPh 21	-	-	-	-	Nihil
3	Utang PPh 22	-	-	-	-	Nihil
4	Utang PPh 23	-	-	-	-	Nihil
JUMLAH		-	-	-	-	

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
(UTANG DARI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK)
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 28 Neraca

NO	TANGGAL	NO BUKTI	PENYEDIA PINJAMAN	URAIAN	SALDO 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
1	31/12/2024	001/JP-UTANG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	Utang jangka pendek bagian utang jangka panjang	138.497.733.036	-	-	138.497.733.036	
2	02/01/2025	40/KM.7/I.1- PENDAPATAN/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[2] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	126.956.255.283	
3	31/01/2025	40/KM.7/I.2-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[4] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	115.414.777.530	
4	28/02/2024	40/KM.7/II-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[5] Selisih Pendapatan DAU berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	103.873.299.777	
5	27/03/2024	40/KM.7/III-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[8] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	92.331.822.024	
6	30/04/2024	40/KM.7/IV-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[14] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	80.790.344.271	
7	28/05/2024	40/KM.7/V-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[19] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	69.248.866.518	
8	30/06/2024	40/KM.7/VI-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[25] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	57.707.388.765	

NO	TANGGAL	NO BUKTI	PENYEDIA PINJAMAN	URAIAN	SALDO 2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7-8	10
9	31/07/2024	40/KM.7/VII-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[38] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	46.165.911.012	
10	29/08/2024	40/KM.7/VIII- UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[40] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	34.624.433.259	
11	30/09/2024	40/KM.7/IX-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[56] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	23.082.955.506	
12	31/10/2024	40/KM.7/X-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[64] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	11.541.477.753	
13	28/11/2024	40/KM.7/XI-UTG/2024	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	[97] Pembayaran Kewajiban atas Pokok Pinjaman ke PT. SMI berdasarkan KMK No:45/KM.7/2022	-	-	11.541.477.753	-	
14	31/12/2025	55/MK/PK/2025	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	Reklas dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	138.497.733.036	-	138.497.733.036	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/MK/PK/2025
JUMLAH					138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 29 Neraca

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungjawaban			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
1. Badan Pendapatan Daerah												
1	SPBUN 38.423-29 Binuangeun Kabupaten Lebak	SEWA TANAH PANGKALAN SPBUN	032/2771-DKP/2022	23-Sep-22	PT. UTAMA WANA JAYA	158.400.000	1462	5-Jan-22	5-Jan-26	31-Dec-25	5	541.724
2	Sekretariat Daerah Provinsi Banten	SEWA ATM Bank Banten	B-0002.3.2/1125/BPKA D/2024	02-Jan-24	Bank Banten	49.972.500	1096	1-Jan-24	31-Dec-26	31-Dec-25	365	16.642.302
3	Kantor Bapenda dan 11 UPT PPD	SEWA ATM Bank Banten	100.3.7/012-Bapenda/2025	21-Apr-25	Bank Banten	459.022.000	730	1-Jan-25	31-Dec-26	31-Dec-25	365	229.511.000
4	Kantor BPKAD & DPRD	SEWA ATM Bank Banten	900.1.14.3/012-BPKAD/2025	02-Jan-25	Bank Banten	82.208.000	730	2-Jan-25	1-Jan-27	31-Dec-25	366	41.216.614
5	UPTD.PPD Cikokol	SEWA ATM Bank BRI	100.3.7/011-Bapenda/2025	21-Apr-25	PT. BRI (Persero) TBK	47.290.000	730	1-Jan-25	31-Dec-26	31-Dec-25	365	23.645.000
6	UPTD.PPD Serpong	SEWA ATM Bank BRI	100.3.7/010-Bapenda/2025	21-Apr-25	PT. BRI (Persero) TBK	40.826.600	547	3-Jul-24	31-Dec-25	31-Dec-25	-	-
7	Kantor BPKAD/ Bapenda Kantor Kas	Sewa Kantor Kas	001 A/PKS/DIR-BB/1/2025	02-Jan-25	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk.	91.670.000	730	02-Jan-25	01-Jan-27	31-Dec-25	366	45.960.575
JUMLAH 1						929.389.100						357.517.214
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang	Sewa Tanah terbangun Gudang	100.3.7/5217-DPUPR/2025	29-Dec-25	PT. POPULER KACA UTAMA	1.798.609.000	366	29-Dec-25	29-Dec-26	31-Dec-25	363	1.783.866.303
2	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran Kota Serang An. CV. Alfa Pratama Mandiri	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/331-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	Alfa Pratama Mandiri	Rp10.500.000	366	8-Jan-25	8-Jan-26	31-Dec-25	8	229.508
3	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Untuk penggunaan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Cipare (Depan Rumah Sakit DKT) Kota Serang An. PT. Innova perkasa	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/3214-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	PT. Innova perkasa	Rp4.900.000	700	20-Jan-25	20-Dec-26	31-Dec-25	354	2.478.000
4	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Serang Cilegon Lampu Merah Kepandean Kota Serang An. PT. Ms Kemakmuran	Retribusi Jalan	593/097.4-DPUPR/2023	3 Februari 2023 s/d 3 Februari 2026	PT. Ms Kemakmuran	Rp3.780.000	366	5-Mar-25	5-Mar-26	31-Dec-25	64	660.984

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
5	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Yusuf Martadilaga Kota Serang An. CV. Muda Karya Utama	Retribusi Jalan	500.10.29.15/3306-DPUPR/2024	31 Desember 2024 s/d 31 Desember 2027	CV. Muda Karya Utama	Rp2.016.000	366	5-Mar-25	5-Mar-26	31-Dec-25	64	352.525
6	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Videotron pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Depan Giant BSD City) Kota Tangerang An. PT. Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.8-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp45.000.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	12.786.885
7	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Serpong Sektor VI dan VII BSD City) Kota Tangerang Selatan An. PT Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.7-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp50.400.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	14.321.311
8	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Raya Pahlawan Seribu (Depan Kantor Old Managemen Office Omo BSD City) Kota Tangerang Selatan An. PT Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	570/097.6-DPUPR/2023	03 Februari 2023 s/d 03 Februari 2026	PT. Bumi Serpong Damai	Rp50.400.000	366	14-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	14.321.311
9	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Veteran (Depan Mall Ramayana) Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/371-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.640.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	3.441.093
10	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Ahmad Yani (Depan Pizza Dominos) Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/365-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	22-Apr-25	22-Apr-26	31-Dec-25	112	942.514
11	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Taktakan Gunung Sari Kota Serang An. PT Dinamis Media Banten	Retribusi Jalan	500.10.29.15/370-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	22-Apr-25	22-Apr-26	31-Dec-25	112	942.514
12	Izin Pemanfaatan Pemakaian Bahu Jalan Jenis Penggunaan Pendirian Papan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan SMAN 1) Kota Serang an.PT. DINAMIS MEDIA BANTEN	Retribusi Jalan	500.10.29.15/368-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	2.911.694
13	Izin Pemanfaatan Jenis Penggunaan Pendirian Papan Reklame/Billboard Pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Pisang Mas) Kota Serang an. PT. DINAMIS MEDIA BANTEN	Retribusi Jalan	500.10.29.15/363-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2026	PT. Dinamis Media Banten	Rp3.080.000	366	12-Dec-25	12-Dec-26	31-Dec-25	346	2.911.694

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
14	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Samping Alun-alun Serang) Kota Serang An. PT Global Promo Agency	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1407-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Global Promo Agency	Rp5.425.000	366	20-May-25	20-May-26	31-Dec-25	140	2.075.137
15	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Samping Bank BNI) Kota Serang An. PT Global Promo Agency	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1406-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Global Promo Agency	Rp10.850.000	366	20-May-25	20-May-26	31-Dec-25	140	4.150.273
16	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan SPBU Pertamina EX Petronas)) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1315-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
17	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Ruko Paramount/Sumarecom Serpong) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1314-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
18	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan RS Ashobirin) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1316-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
19	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Serpong Plaza) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1318-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
20	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan Tangcity) Kota Tangerang Selatan An. PT Bardie Puri Utama	Retribusi Jalan	500. 10.29.15/1317-DPUPR/2025	19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2028	PT Bardie Puri Utama	Rp49.860.000	366	22-May-25	22-May-26	31-Dec-25	142	19.344.590
21	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Curug Legok Parungpanjang (Pertigaan LG) Kabupaten Tangerang An. CV. Bagus Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1704-DPUPR/2025	12 Juni 2025 s/d 12 Juni 2028	CV. Bagus Advertising	Rp7.840.000	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	3.513.005
22	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Curug Legok Parungpanjang (Pertigaan LG) Kabupaten Tangerang An. CV. Bagus Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1705-DPUPR/2025	12 Juni 2025 s/d 12 Juni 2028	CV. Bagus Advertising	Rp3.080.000	366	13-Jun-25	13-Jun-26	31-Dec-25	164	1.380.109
23	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya, Kota Tangerang Selatan (depan Lottemart Alam Sutera) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/1312-DPUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp49.860.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	22.750.328

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
24	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya, Kota Tangerang Selatan (depan agen Bus Rosalia) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/131 1-DPUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp49.860.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	22.750.328
25	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan JPO pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu , Kota Tangerang Selatan (depan Samsat BSD) An. PT Delima Sigoki Media	Retribusi Jalan	500.10.29.15/131 3-DPUPR/2025	09 Mei 2025 s/d 09 Mei 2028	PT Delima Sigoki Media	Rp44.320.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	20.222.514
26	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Birjen Sam'un Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/903-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp3.080.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	1.607.322
27	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Veteran (Depan Mall Ramayana) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/899-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp50.000.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	26.092.896
28	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Depan Bank BNI) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/900-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
29	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Jamsostek) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/898-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
30	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Kantor PP) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/901-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp5.250.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	2.739.754
31	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan SMA 1) Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/902-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp7.140.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	3.726.066
32	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Ahmad Yani (Depan Ciceri Carrefour/McD Kota Serang An. PT Devis Jaya Advertising	Retribusi Jalan	500.10.29.15/897-DPUPR/2025	25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2028	PT Devis Jaya Advertising	Rp46.000.000	366	10-Jul-25	10-Jul-26	31-Dec-25	191	24.005.464

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
33	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani (Perempatan Trip Jamaksari Mcd Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.1-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp2.520.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	1.342.623
34	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Veteran (Alun Alun Timur Seberang Kantor Pos) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.2-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp7.560.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	4.027.869
35	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Mayor Syafei (Pertigaan Rutan Serang) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.3-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp2.520.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	1.342.623
36	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani (KH. Abdul Fatahasan Perempatan Carrefour) Kota Serang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp6.650.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	3.543.033
37	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PDAM Serpong) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.5-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp5.040.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	2.685.246
38	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT. Pratama Abadi Industri) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.4-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp43.200.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	23.016.393
39	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan WTC Serpong) Kota Tangerang An. PT Aneka Karya Advertising	Retribusi Jalan	570/995.6-DPUPR/2023	24 Juli 2023 s/d '24 Juli 2026	PT Aneka Karya Advertising	Rp71.600.000	366	14-Jul-25	14-Jul-26	31-Dec-25	195	38.147.541
40	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan SD Podok Jagung) Kota Tangerang Selatan An. PT Menara Niaga Lestari	Retribusi Jalan	570/1028 - DPUPR/2022	29 September 2023 s/d '29 Sept2026	PT Menara Niaga Lestari	Rp52.920.000	366	23-Dec-25	23-Dec-26	31-Dec-25	357	51.618.689
41	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Thamrin Kec Pinang Kota Tangerang An. PT Menara Niaga Lestari	Retribusi Jalan	570/491-DPUPR/2022	8 Agustus 2023 s/d '8 Agust 2025	PT Menara Niaga Lestari	Rp39.900.000	366	14-Aug-25	14-Aug-26	31-Dec-25	226	24.637.705
42	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame/Billboard pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu Kota Tangherang Selatan An. CV Media Lapan Enem	Retribusi Jalan	500.10.29.15/2033-DPUPR/2025	11 Juli 2025 s/d '3 Juli 2028	CV Media Lapan Enem	Rp7.000.000	366	8-Aug-25	8-Aug-26	31-Dec-25	220	4.207.650

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggung			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
43	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Serpong Raya Kota Tangerang Selatan An PT. Caturkarda Depo Bangunan	Retribusi Jalan	500.10.29.15/174 8-DPUPR/2025	17 Juni 2025 s/d 17Juni 2028	PT. Caturkarda Depo Bangunan	Rp39.600.000	366	6-Oct-25	6-Oct-26	31-Dec-25	279	30.186.885
44	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Pahlawan Seribu (Depan Teras Kota) Kota Tangerang Selatan An PT. Bumi Serpong Damai	Retribusi Jalan	500.10.29.15/309 1-DPUPR/2025	28 Agustus 2025 s/d 28 Agustus 2028	PT. Bumi Serpong Damai	Rp75.200.000	366	15-Oct-25	15-Oct-26	31-Dec-25	288	59.173.770
45	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Bangunan Utilitas Pada Ruas Jalan Pakupatan Palima (syeh Nawawi Al-Bantani) Kota Serang An PT. Aplikanusa Linatasarta	Retribusi Jalan	500.10.29.15/435 9-DPUPR/2025	21 Oktober 2025 s/d '21 Oktober 2028	PT. Aplikanusa Linatasarta	Rp95.000.000	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Dec-25	315	81.762.295
46	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Thamrin (Depan Pabrik Tifico) Kota Tangerang An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/337.2-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp50.760.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	46.044.590
47	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan MH. Tahmirin (Tol Tangerang Jakarta KM 19-00) Kota Tangerang An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	'570/336.1-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp10.000.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	9.071.038
48	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada Billboard Pada Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT .Indah Kiat) Kota Tangerang Selatan An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/337.1-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp5.950.000	366	28-Nov-25	28-Nov-26	31-Dec-25	332	5.397.268
49	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan untuk penggunaan Reklame Pada JPO Pada Ruas Jalan Ruas Jalan Serpong Raya (Depan PT .Indah Kiat) Kota Tangerang Selatan An PT. Zahra Utama Mandiri	Retribusi Jalan	570/336.2-DPUPR/2023	31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026	PT. Zahra Utama Mandiri	Rp47.385.000	366	3-Dec-25	3-Dec-26	31-Dec-25	337	43.630.451
50	Izin Pemanfaatan Sepamdan Situ pada Ruas Jalan Situ Terate An. PT. Sarana Catur Tirtakelola.	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/376-DPUPR/2024	30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2027	PT. Sarana Catur Tirtakelola	Rp 840.000	366	13-Feb-25	13-Feb-26	31-Dec-25	44	100.984
51	Izin Pemanfaatan Sepamdan Pantai pada Ruas Jalan ;Pantai Binuangeun Wanasalam Kab. Lebak An. PT. DINAR DARUM LESTARI	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/131 9-DPUPR/2025	9 Mei 2025 s/d 9 Mei 2028	PT. DINAR DARUM LESTARI	Rp 592.000	366	28-May-25	28-May-26	31-Dec-25	148	239.388
52	Izin Pemanfaatan Sepamdan Sungai Pada Ruas Jalan Sungai Cinambul Kabupaten Pandeglang An. PT. UJUNG GUNUNG SALJU	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/150 4-DPUPR/2025	3 Juni 2025 s/d 3 Juni 2028	PT. UJUNG GUNUNG SALJU	Rp 272.000	366	16-Jun-25	16-Jun-26	31-Dec-25	167	124.109

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
53	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Cidikit dan Cimadur Bayah Kab. Lebak An. PT.CEMINDO GEMILANG Tbk	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/158 3-DUPUR/2025	3 Juni 2025 s/d 3 Juni 2028	PT. CEMINDO GEMILANG Tbk	Rp 25.875.750	366	18-Jun-25	18-Jun-26	31-Dec-25	169	11.948.092
54	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai pada Ruas Sungai Cilemer Kabupaten Pandeglang An. CV. DM TIRTA PERSADA	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/153 3.1-DUPUR/2025	28 Mei 2025 s/d 28 Mei 2028	CV. DM TIRTA PERSADA	Rp 7.924.500	366	27-Jun-25	27-Jun-26	31-Dec-25	178	3.853.992
55	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Ciliman Kabupaten Pandeglang An. PT. Jascleans Hydro Power	Retribusi Sempadam	500.10.29./1984-DUPUR/2025	9 Juli 2025 s/d 9 Juli 2028	PT. Jascleans Hydro Power	Rp 44.037.000	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	24.424.893
56	Izin Penggunaan Tambak Udang pada Ruas Jalan Pantai Pagelaran Kec. Malingping Kab. Lebak An. PT. ROYAL GIHON SAMUDERA	Retribusi Sempadam	500.10.29./1896-DUPUR/2025	1 Juli 2025 s/d 1 Juli 2028	PT. ROYAL GIHON SAMUDERA	Rp 5.500.000	366	22-Jul-25	22-Jul-26	31-Dec-25	203	3.050.546
57	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai pada Ruas Jalan Sungai Cilemer Kab. Pandeglang An. PT. Karya Cipta Mandalawangi	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/223 9-DUPUR/2025	1 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2028	PT. Karya Cipta Mandalawangi	Rp 7.509.000	366	20-Aug-25	20-Aug-26	31-Dec-25	232	4.759.803
58	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Cijalarang pada Ruas Jala Sungai Cijalarang Kabupaten Pandeglang An. PT. Globalindo Agro Lestari	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/224 0-DUPUR/2025	1 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2028	PT. Globalindo Agro Lestari	Rp 408.000	366	21-Aug-25	21-Aug-26	31-Dec-25	233	259.738
59	Izin Pengunaan Tambak Udang pada Ruas Jalan Pantai Pagelaran Kab. Lebak An. PT. SUKSES DAMAI BAHARI	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/189 5-DUPUR/2025	21 Agustus 2025 s/d 21 Agustus 2028	PT. SUKSES DAMAI BAHARI	Rp 6.000.000	366	28-Aug-25	28-Aug-26	31-Dec-25	240	3.934.426
60	Izin Penggunaan Jalan Jembatan untuk Akses Perumahan pada Ruas Jalan Daerah Irigasi Cicinta An. PT. Maja Karya Dev		500.10.29.15/100 5-DUPUR/2024	03 April 2024 s/d 03 April 2027	PT. Maja Karya Dev	Rp 384.000	366	30-Aug-25	30-Aug-26	31-Dec-25	242	253.902
61	Izin Pemanfaatan Sempadan Pantai pada Ruas Jalan Pantai Binuangeun Wanasalam Kab. Lebak An. PT. RADJA UDANG MALINGPING	Retribusi Sempadam	570/075.21-DUPUR/2022	18/04/2022 s/d 18 April 2025	PT. RADJA UDANG MALINGPING	Rp 4.500.000	366	27-Oct-25	27-Oct-26	31-Dec-25	300	3.688.525
62	Izin Pemasangan pipa ke penampungan /tandon pada Ruas Jalan Pantai Binuangeun An. PT. Jonchin Agromina Sejahtera	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/491 1-DPPR/2025	28 November 2025 s/d 28 November 2028	PT. Jonchin Agromina Sejahtera	Rp 1.200.000	366	11-Nov-25	11-Nov-26	31-Dec-25	315	1.032.787
63	Izin Pemasangan Jembatan Penyebrangan pada Ruas Jalan Daerah Irigasi Cibanten An. PT. CAHAYA MATAHARI PERKASA	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 8-DUPUR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	PT. Cahaya Matahari Perkasa	Rp 1.725.750	366	17-Nov-25	17-Nov-26	31-Dec-25	321	1.513.568
64	Izin Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air pada Ruas Sungai Cihara Kabupaten Lebak An. PT. Banyu Daya Perkasa	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/264 3-DUPUR/2023	18 Desember 2023 s/d 18 Desember 2026	PT. Banyu Daya Perkasa	Rp 6.174.000	366	21-Nov-25	21-Nov-26	31-Dec-25	325	5.482.377

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggunggaan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
65	Izin Pemasangan Jembatan Penyebrangan pada Ruas Jalan Daerah Irigasi Cibanten An. Hj. Jumairah	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 7-DPU/PR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	Perorangan	Rp 326.250	366	24-Nov-25	24-Nov-26	31-Dec-25	328	292.377
67	Izin Pemanfaatan Sempadan untuk jaringan pipa air desa karang suraga sungai cipasauran, kec. Cinangka, Kab. Serang, PT. Krakatau Tirta Industri	Retribusi Sempadam	500.10.29.15/250 5-DPU/PR/2023	5 Desember 2023 s/d 5 Desember 2026	PT. Krakatau Tirta Industri	Rp 11.866.250	366	11-Dec-25	11-Dec-26	31-Dec-25	345	11.185.400
JUMLAH 2						3.212.009.500						2.583.362.568
3. RSUD Banten												
1	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Mini Market Gd Garuda Lt.2 dan Gd Rajawali Lt.1	T-100.3.7/0701/RSUB/2025	5-Mar-25	Epi Oliyani, S.Sos	55.958.000,00	365	29/02/2025	28-Feb-26	31-Dec-25	59	9.045.265,75
2	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.1	T-100.3.7/0878/RSUB/2025		Sarmenah	9.000.000,00	365	13-Mar-25	12-Mar-26	31-Dec-25	71	1.750.684,93
3	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.2	T-100.3.7/1247/RSUB/2025/RSUB/2025	14-Apr-25	Nadyla Ratu Gusnia	9.000.000,00	365	15-Apr-25	14-Apr-26	31-Dec-25	104	2.564.383,56
4	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.3	T-100.3.7/0582/RSUB/2025	21-Mar-25	Sairoh	9.000.000,00	365	20-Feb-25	19-Feb-26	31-Dec-25	50	1.232.876,71
5	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.4	T-100.3.7/1563/RSUB/2025	16-May-25	E. Sa'diyah, Sp.di.,M.Ap	9.000.000,00	365	16-May-25	15-May-26	31-Dec-25	136	3.353.424,66
6	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.5	T-100.3.7/0892/RSUB/2025	14-Mar-25	H. Asrori Gojali	9.000.000,00	365	22-Feb-25	21-Feb-26	31-Dec-25	52	1.282.191,78
7	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.6	B-100.3.7/1538/RSUB/2025	2-May-25	Muhamad Saefullah Rahman	9.000.000,00	365	13-May-25	12-May-26	31-Dec-25	133	3.279.452,05
8	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.7	T-100.3.7/1363/RSUB/2025	2-May-25	Kasman	9.000.000,00	365	19-Apr-25	18-Apr-26	31-Dec-25	108	2.663.013,70

NO.	Lokasi	Jenis Pendapatan	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia Barang/Jasa	Nilai Kontrak (Rp)	Jangka Waktu Pertanggungan			Cut off	Sisa Waktu (hari)	Nilai Pendapatan Dibayar di Muka (Rp)
							Jangka Waktu (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14) = (13 / 9) * (7)
9	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.8	T-100.3.7/1562/RSUB/2025	20-May-25	Yusi Yustiani	9.000.000,00	365	20-May-25	19-May-26	31-Dec-25	140	3.452.054,79
10	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha Kantin Area Parkir RSUD Banten No.9	T-100.3.7/1561/RSUB/2025	13-May-25	Randy Granata	9.000.000,00	365	13-May-25	12-May-26	31-Dec-25	132	3.254.794,52
12	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.2			Ely Nursamsiah, SH, MKn	9.000.000,00	365	1-Jan-26	31-Dec-26	31-Dec-25	365	9.000.000,00
13	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.3			Joharudin	9.000.000,00	365	4-Dec-25	3-Dec-26	31-Dec-25	337	8.309.589,04
14	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 No.4	T-100.3.7/0088/RSUB/2025/RSUB/2025	14-Apr-25	Nurhasanah Aida	7.087.500,00	365	8-Jan-25	7-Jan-26	31-Dec-25	7	135.924,66
15	UPT RSUD Banten	Sewa Tempat Usaha kantin Gd garuda lt.2 no.7	T-100.3.7/0406/RSUB/2025/RSUB/2025	16-Apr-25	Ruli Herdiana	7.087.500,00	365	8-Feb-25	7-Feb-26	31-Dec-25	38	737.876,71
JUMLAH 3						169.133.000						50.061.532,88
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (1+2+3)						4.310.531.600,24						2.990.941.315

UTANG BELANJA PEGAWAI - MEDICAL CHECK UP UJI KESEHATAN TERTENTU UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tagihan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Pegawai BKD Provinsi Banten	-	-	2.280.000	-	2.280.000	
JUMLAH			-	-	2.280.000	-	2.280.000	

**UTANG BELANJA BARANG PAKAI HABIS-BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN
PER 31 DESEMBER 2025**

Lampiran 30.2 Neraca

No	Nama SKPD/KEGIATAN	Kontrak		Berita Acara Serah Terima/Kemajuan Pekerjaan		Nama Rekanan	Nilai Kontrak/PHO	Tanggal pembayaran	No SP2D	Utang 2024	Pembayaran 2025	Koreksi (Hasil Verifikasi Inspektorat)	Utang 2025	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 8+11-12+13	15
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN													
1	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kelurahan Ketapang RW. 001 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.1162.PDPP/Perkim-3/2024	15 Oktober 2024	600/BASTHP/1162.UP PSU/Dperkim/2024	22 Januari 2025	CV.Kirana Bangun Konstruksi	-			187.300.000	187.300.000	-	-	
2	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Drainase Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Indah RW. 002 & 005 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.1122.PDPP/Perkim-3/2024	14 Oktober 2024	600/BASTHP/1122.UP PSU/Dperkim/2024	22 Januari 2025	CV.Kirana Bangun Konstruksi	-			373.600.000	373.600.000	-	-	
3	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kp. Sinagar, Ds. Jatake, Kec. Panggarangan, Kab. Lebak	600/SPK.198.BP/UPPSU/Perkim-3/2024	29 Oktober 2024	600/BASTHP/198P.UP PSU/Dperkim/2024	03 Februari 2025	CV. Tugu Raksa Mandiri	-			186.050.000	186.050.000	-	-	
4	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Makmur RW. 008 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.0435/UPPSU/Perkim-3/2024	26 Agustus 2024	600/BASTHP/0435.UP PSU/Dperkim/2024	10 Februari 2025	CV.Putra Dharma Intan Perkasa	-			187.630.000	187.630.000	-	-	
5	Pek. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Psu Permukiman (Jalan Lingkungan) Kelurahan Cipondoh Indah RW. 005, 007, 010 Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	600/SPK.0457/UPPSU/Perkim-3/2024	26 Agustus 2024	600/BASTHP/0457.UP PSU/Dperkim/2024	10 Februari 2025	CV.Putra Dharma Intan Perkasa	-			562.630.000	562.630.000	-	-	
6	Pembangunan Mesjid di Kab Tangerang Lokasi Desa Merak Kec Sukamulya Kab Tangerang	600/SPK.02.BP/UPPSU/Perkim-3/2024	12 September 2024	600/BASTHP-2/PSU/PRKMN/DPERKIM/2024	21 Januari 2025	CV. Bogan	-			828.140.000	828.140.000	-	-	
7	Pembangunan Mesjid di Kab Serang Lokasi Desa Pamarayan Kec Pamarayan Kab Serang	600/SPK.03BP/UPPSU/Perkim-3/2024	12 September 2024	600/BASTHP-3/PSU/PRKMN/DPERKIM/2024	21 Januari 2025	CV. Impala Jaya Perkasa	-			691.600.000	691.600.000	-	-	
8	Pembangunan Mesjid dan Landscape Lokasi Kel Tinggar Kec Curug Kota Serang	600/SPK.01.BP/UPPSU/Perkim-3/2024	02 September 2024	600/BASTHP-1/PSU/PRKMN/DPERKIM/2024	06 Januari 2025	CV. Zulfa Bintang Pratama	-			459.190.000	459.190.000	-	-	
9	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 1	600/SP.233/P2TP/PERKIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	PT. Berkah Teknis Konsultan	-			162.931.000	162.931.000	-	-	
10	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 2	600/SP.234/P2TP/PERKIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	CV. Ratu Cipta Management	-			162.097.000	162.097.000	-	-	
11	Pengawasan pembangunan mesjid di Provinsi Banten 3	600/SP.235/P2TP/PERKIM-3/2024	08 Agustus 2024	-	-	CV. Ratu Cipta Management	-			218.815.000	218.815.000	-	-	
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	600/SPK.1509.UPPSU/DPerkim-3/2025					189.170.000			-	-	(945.850)	188.224.150	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	600/SPK.1351.UPPSU/DPerkim-3/2025					849.792.244	31/12/2025	959.4/017289/LS/BUD/2025	-	752.528.000	-	97.264.244	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
14	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	000.13/012.14/Perkim-Bid.Perum/2025					299.640.000			-	-	-	299.640.000	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
15	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	000.13/012.16/Perkim-Bid.Perum/2025					45.165.000			-	-	-	45.165.000	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
	JUMLAH						1.383.767.244			4.019.983.000	4.772.511.000	(945.850)	630.293.394	

UTANG BELANJA BARANG PAKAI HABIS-MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO 2024-AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	1.840.000	-	1.840.000	
JUMLAH		-	1.840.000	-	1.840.000	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REKAPITULASI UTANG BELANJA (Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		PEMBAYARAN KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
I. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds.Cemplang Kec.Ciomas)	CV. Wijaya Karsa	398.556.000,00	85,00%	324.105.739,00	81,32%	74.450.261,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Dalam (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	CV. Dwi Perkasa	398.337.800,00	91,00%	346.656.805,00	87,03%	51.680.995,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH I									126.131.256	
II. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain										
1	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Pasirpeuteuy - Cijahe	CV. Habib Ridho	4.432.451.000,00	41,75%	2.532.580.775,00	57,14%	1.899.870.225,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH II									1.899.870.225	
III. Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds.Cemplang Kec.Ciomas)	CV. Haza Multi Inovasi	42.920.000,00	91,00%	38.628.000,00	90,00%	4.292.000,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam & Reservoir (Ds. Ciakar Kec. Panongan)	CV. Balabeja Kencana	42.933.000,00	91,00%	38.639.700,00	90,00%	4.293.300,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
JUMLAH III									8.585.300	
IV. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat										
1	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaa Tinggi Banten (Gedung Utama)	CV. Banten Putra Perkasa	3.687.378.100,00	98,00%	3.431.105.322,00	93,05%	256.272.778,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Gedung Kantor BINDA Prov Banten Tahap 1	CV. Pratama Karya	9.176.705.000,00	91,00%	7.823.241.012,00	85,25%	1.353.463.988,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
3	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaa Tinggi Banten	PT. Zhafira Artha Konsulindo	128.958.000,00	91,00%	122.510.100,00	95,00%	6.447.900,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
4	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Tk Adiyaksa Kejaksaa Tinggi Banten	CV. Adipura Legon Persada	49.615.000,00	91,00%	47.134.250,00	95,00%	2.480.750,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
5	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Binda Provinsi Banten Tahap I	PT. Bighi Konsultan Prakasa	128.566.000,00	91,00%	109.281.100,00	85,00%	19.284.900,00	Konsultan Pengawas Pekerjaan
JUMLAH IV									1.637.950.316	

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		PEMBAYARAN KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
V. Utang Belanja Modal (Pengadaan Aset Tetap)										
1	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibiruangeun	CV. Putra Ciceri	8.419.007.700,00	98,00%	7.838.096.169,00	93,10%	580.911.531,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
2	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilemer	PT. Khodijah Putri Jaya Perkasa	7.378.915.860,00	65,00%	4.556.480.544,00	61,75%	2.822.435.316,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
3	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Cisata	CV. Cipta Nayra	8.432.312.320,00	90,00%	7.209.627.034,00	85,50%	1.222.685.286,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
4	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisangu Atas	CV. Mahatama Karya	7.621.699.300,00	80,00%	5.792.491.468,00	76,00%	1.829.207.832,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
5	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilatak	CV. Stara Maju Perkasa	7.762.700.500,00	90,00%	6.637.108.927,00	85,50%	1.125.591.573,00	Pemberian Kesempatan Penyeselsaian Pekerjaan
JUMLAH V									7.580.831.538	
JUMLAH I+II+III+IV+V									11.253.368.634,51	

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REKAPITULASI KEWAJIBAN (RETENSI 5%)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
I. Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain					89.690.869.000,00		84.899.065.949,00		4.484.543.450	
1	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Gobang - Mayak Akses SMKN 1 Curugbitung Desa Ciburuy - Desa Mayak. Kab. Lebak (IJKD)	CV. Mitra Perkasa Mandiri	9.058.826.000,00	100,00%	8.600.001.700,00	94,94%	452.941.300	Pembayaran Retensi 5%
2	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Mejau - Mekarwangi. Kab. Pandeglang (IJKD)	CV. Cakra Dua Bersama	3.846.430.000,00	100,00%	3.605.365.500,00	93,73%	192.321.500,00	Pembayaran Retensi 5%
3	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Sodong - Kadubera Kabupaten Pandeglang (IJKD)	CV. Vir Maju Bersama	3.896.448.000,00	100,00%	3.666.714.600,00	94,10%	194.822.400,00	Pembayaran Retensi 5%
4	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Sukanagara - Sukajaya Kabupaten Serang (IJKD)	CV. Abu Said Contractor	4.326.787.000,00	100,00%	4.101.199.650,00	94,79%	216.339.350,00	Pembayaran Retensi 5%
5	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Surianeun - Pasir Gadung Desa Cimoyan Kabupaten Pandeglang (IJKD)	CV. Masa Agung Jaya	9.377.518.000,00	100,00%	8.900.232.099,00	94,91%	468.875.900,00	Pembayaran Retensi 5%
6	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Warung Jaud - Kasemen Kota Serang (IJKD)	CV. Arya Putra Perkasa	2.848.088.000,00	100,00%	2.702.413.600,00	94,89%	142.404.400,00	Pembayaran Retensi 5%
7	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Desa Sindang Asih - Desa Badak Anom - Desa Daon Kecamatan Sindangjaya	CV. Putra Utama Bajabir	5.732.815.000,00	100,00%	5.441.114.250,00	94,91%	286.640.750,00	Pembayaran Retensi 5%
8	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cadasari - Kaduela	CV. Delta Maputra	7.721.276.000,00	100,00%	7.262.188.600,00	94,05%	386.063.800,00	Pembayaran Retensi 5%
9	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cikeusik - Pasir Tuhur	CV. Putra Cemerlang Utama	3.839.316.000,00	100,00%	3.641.528.200,00	94,85%	191.965.800,00	Pembayaran Retensi 5%
10	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Cimaung - Sukarame	CV. Putra Dua Mandiri	7.199.576.000,00	100,00%	6.824.321.200,00	94,79%	359.978.800,00	Pembayaran Retensi 5%
11	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Kedomas Banjar	CV. Wirama Persada Grup	7.031.752.000,00	100,00%	6.643.092.400,00	94,47%	351.587.600,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
12	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Kemuning - Malanggah	CV. Putra Utama Bajabir	2.329.529.000,00	100,00%	2.209.181.550,00	94,83%	116.476.450,00	Pembayaran Retensi 5%
13	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Lambang Sari (Wadas Lambangsari)	CV. Nurbuat	3.043.959.000,00	100,00%	2.887.708.050,00	94,87%	152.197.950,00	Pembayaran Retensi 5%
14	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Pakupatan - Bendung	CV. Kongsu Baru	3.834.789.000,00	100,00%	3.595.724.550,00	93,77%	191.739.450,00	Pembayaran Retensi 5%
15	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Sukadame - Kubangkondang	CV. Bogan	4.376.965.000,00	100,00%	4.152.824.750,00	94,88%	218.848.250,00	Pembayaran Retensi 5%
16	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Desa Tanjungjaya	CV. Salam Mahaka Karya	2.954.971.000,00	100,00%	2.807.222.450,00	95,00%	147.748.550,00	Pembayaran Retensi 5%
17	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Pintas Kampung Cibangkong RT. 003/003 dengan Kampung Cibaregbeg RT. 002/003	CV. Arfistri Berkah	3.209.834.000,00	100,00%	3.049.342.300,00	95,00%	160.491.700,00	Pembayaran Retensi 5%
18	BINAMARGA	Pembangunan Jalan	Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Usaha Tani Kec Wanasalam Lebak (Binuangan Bunut)	CV. Masa Agung Jaya	5.061.990.000,00	100,00%	4.808.890.500,00	95,00%	253.099.500,00	Pembayaran Retensi 5%
II. Belanja Pemeliharaan					1.741.015.500,00		1.653.964.725,00		87.050.775,00	
19	CIPTA KARYA	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan Kantor Gedung Ex Bliki Serpong	CV. Putra Utama Bajabir	1.741.015.500,00	100,00%	1.653.964.725,00	95,00%	87.050.775,00	Pembayaran Retensi 5%
III. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat					18.832.641.600,00		17.791.366.220,00		941.632.080,00	
20	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Mess Pegawai pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten	PT. Graha Kencana Damai	13.085.304.500,00	100,00%	12.331.395.975,00	94,24%	654.265.225,00	Pembayaran Retensi 5%
21	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (Gedung Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dan Pendopo Kejaksaan Tinggi Banten)	PT. Aries Total Mandiri	2.834.255.100,00	100,00%	2.692.542.345,00	95,00%	141.712.755,00	Pembayaran Retensi 5%
22	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaan Tinggi Banten (TK Adiyaksa)	PT. Sampurna Indo Perkasa	2.664.227.700,00	100,00%	2.531.016.315,00	95,00%	133.211.385,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025 (%)	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)		(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
24	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Layanan Kejaksaa Tinggi Banten (Pembangunan Kanopi Parkir Kejati)	CV. Sinar Putra Perkasa	248.854.300,00	100,00%	236.411.585,00	95,00%	12.442.715,00	Pembayaran Retensi 5%
IV. Utang Belanja Modal (Pengadaan Aset Tetap)					124.874.032.000,00		118.025.698.301,00		7.474.368.700,00	
23	CIPTA KARYA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penataan Pagar dan Parkir BIS	CV. Putra Ciceri	14.296.016.900,00	100,00%	13.581.216.055,00	95,00%	714.800.845,00	Pembayaran Retensi 5%
25	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe Raya	CV. Tetra Jaya Mandiri	7.272.757.000,00	100,00%	6.904.119.151,00	94,93%	363.637.850,00	Pembayaran Retensi 5%
26	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Bayah - Batas Jabar	CV. Putra Cemerlang Utama	9.699.452.000,00	100,00%	9.214.479.400,00	95,00%	484.972.600,00	Pembayaran Retensi 5%
29	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Picung	CV. Trisula Karya Putra	2.588.639.000,00	100,00%	2.420.546.050,00	93,51%	129.431.950,00	Pembayaran Retensi 5%
30	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Maja - Citeras	CV. Naga Hitam Kusuma	5.889.192.000,00	100,00%	5.593.215.400,00	94,97%	294.459.600,00	Pembayaran Retensi 5%
31	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Teluknaga - Dadap	CV. Bina Cipta Kreasi	7.625.823.000,00	100,00%	7.239.835.850,00	94,94%	381.291.150,00	Pembayaran Retensi 5%
32	BINAMARGA	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Ruas Jalan Tigaraksa - Maja	CV. Hanan Putra Pratama	7.761.631.000,00	100,00%	7.373.549.450,00	95,00%	388.081.550,00	Pembayaran Retensi 5%
33	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Tigaraksa - Cisoka	CV. Jala Bangun Indonesia	2.842.914.000,00	100,00%	2.664.839.300,00	93,74%	142.145.700,00	Pembayaran Retensi 5%
34	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Ciomas - Mandalawangi	CV. Karya Pelita Abadi	7.513.901.000,00	100,00%	7.138.205.950,00	95,00%	375.695.050,00	Pembayaran Retensi 5%
35	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Gn. Sari - Mancak - Anyer	CV. Karya Pelita Abadi	9.399.553.000,00	100,00%	8.929.575.350,00	95,00%	469.977.650,00	Pembayaran Retensi 5%
36	BINAMARGA	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari	CV. Galih Cantigi	9.020.969.000,00	100,00%	8.569.920.550,00	95,00%	451.048.450,00	Pembayaran Retensi 5%

NO	BIDANG	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	REALISASI FISIK S.D 31 DESEMBER 2025	REALISASI KEUANGAN		KEWAJIBAN	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8-6)	11
37	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Cimoyan Ruas Jalan Picung - Munjul	CV. Cahaya Surya Imani	6.076.538.000,00	100,00%	5.522.655.100,00	90,88%	303.826.900,00	Pembayaran Retensi 5%
38	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Curug Ciung Ruas Jalan Munjul - Cikeusik	CV. Sumur Ranje	4.274.712.000,00	100,00%	4.035.233.400,00	94,40%	213.735.600,00	Pembayaran Retensi 5%
39	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Pelawad 2 Kota Tangerang	CV. Mulia Arinda	6.916.064.000,00	100,00%	6.499.170.800,00	93,97%	345.803.200,00	Pembayaran Retensi 5%
40	BINAMARGA	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Speelwijk Ruas Jalan Terate - Banten Lama	CV. Sinar Putra Perkasa	4.112.752.000,00	100,00%	3.815.791.400,00	92,78%	205.637.600,00	Pembayaran Retensi 5%
41	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikoncang	CV. Pandeglang Raya Putri	7.491.280.100,00	100,00%	7.085.278.395,00	94,58%	374.564.005,00	Pembayaran Retensi 5%
42	SUMBER DAYA AIR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilampe	CV. Arga Arta Meridien	4.714.918.100,00	100,00%	4.464.542.395,00	94,69%	235.745.905,00	Pembayaran Retensi 5%
43	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Kali Angke	CV. Wijaya Karsa	3.585.634.000,00	100,00%	3.394.515.300,00	94,67%	179.281.700,00	Pembayaran Retensi 5%
44	SUMBER DAYA AIR	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Zaitun	CV. Sejahtera Bersama	3.791.285.900,00	100,00%	3.579.009.005,00	94,40%	189.564.295,00	Pembayaran Retensi 5%
45	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Cipanas - Ciparay	PT. Daya Manunggal Kontraktor	14.940.434.000,00	100,00%	14.110.516.300,00	94,45%	747.021.700,00	Pembayaran Retensi 5%
46	BINAMARGA	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay	CV. Al-Patir	9.672.908.000,00	100,00%	9.177.999.600,00	94,88%	483.645.400,00	Pembayaran Retensi 5%
JUMLAH									12.987.595.005,00	

UTANG BELANJA JASA KANTOR
(Listrik, Air, Telepon, Internet)
Per 31 Desember 2025

Lampiran 30.6 Neraca

No	SKPD	SALDO KEWAJIBAN 2025										
		UTANG JASA TENAGA KESEHATAN	UTANG JASA TENAGA KEBERSI- HAN	UTANG JASA PENGOLAHAN SAMPAH	TELPON	AIR	LISTRIK	LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR / MAJALAH	UTANG KAWAT / FAKSIMILI / INTERNET / TV BERLANGGAN AN	UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI	JAMINAN / ASURANSI-IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPBU DAN BP KELAS 3	JUMLAH
1		3	3	3	5	4	3	7	6			8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	148.500	72.737.924	-	2.532.000	-	-	75.418.424
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	3.341.322	-	126.805.665,00	-	1.972.200	-	270.874.300	402.993.487
3	RSUD Malingping	-	-	-	238.650	-	125.199.340	-	-	-	-	125.437.990
4	RSUD Banten	-	-	-	1.218.734	25.122.695	441.816.708	-	-	-	-	468.158.137
5	RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan	-	5.208.000	32.667.300	610.500	5.249.320	105.476.916	-	55.573.260	-	-	204.785.296
6	RSUD Ciligrang	-	-	-	-	9.803.960	70.229.608	-	-	-	-	80.033.568
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	615.974.599	-	-	8.585.300	-	624.559.899
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	41.631.504	-	-	-	-	41.631.504
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	28.873.740	-	-	-	-	28.873.740
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	36.568.826	-	-	-	-	36.568.826
12	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	36.714.435	-	1.539.850	-	-	38.254.285
13	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	627.552	-	53.643.856	-	3.592.540	-	-	57.863.948
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	-	-		-	32.255.508	-		-	-	32.255.508
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	90.798	-	14.167.027	-		-	-	14.257.825
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-		-	33.543.368	-		-	-	33.543.368
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-		-	19.596.436	-		-	-	19.596.436
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	1.398.600	-	315.664.637	-	299.700	-	-	317.362.937
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	36.685.074	-	-	-	-	36.685.074
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	32.489.624	-	-	-	-	32.489.624
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	17.177.580	2.950.000	-	-	-	20.127.580
22	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga	-	-	-	1.959.150	-	39.054.044	-	1.864.350	-	-	42.877.544
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	40.103.564	-	-	-	-	40.103.564
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	141.989	2.169.445	128.208.063	-	4.087.030	-	-	134.606.527
25	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	27.164.012	-	-	-	-	27.164.012
26	Dinas Pertanian	-	-	-	6.071.304	-	79.824.608	-	-	-	-	85.895.912
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	12.066.567	-	-	-	-	12.066.567

No	SKPD	SALDO KEWAJIBAN 2025										
		UTANG JASA TENAGA KESEHATAN	UTANG JASA TENAGA KEBERSI- HAN	UTANG JASA PENGOLAHAN SAMPAH	TELPON	AIR	LISTRIK	LANGGANAN JURNAL / SURAT KABAR / MAJALAH	UTANG KAWAT / FAKSIMILI / INTERNET / TV BERLANGGAN AN	UTANG BELANJA JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI	JAMINAN / ASURANSI-IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3	JUMLAH
1		3	3	3	5	4	3	7	6			8
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	5.143.840	-	53.056.214	-	-	-	-	58.200.054
29	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	194.909.902	-	-	-	-	194.909.902
30	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	286.927.051	-	18.017.200	-	-	304.944.251
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Penghubung	-	-	-	2.343.321	-	20.984.452	-	-	-	-	23.327.773
38	Inspektorat Provinsi	-	-	-	58.941	-	35.477.253	-	-	-	-	35.536.194
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	27.889.191	-	-	-	-	27.889.191
40	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.949.724	412.217.130	-	37.161.505	-	-	453.328.359
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	37.859.314	-	-	-	-	37.859.314
42	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	58.941	-	33.328.548	-	-	-	-	33.387.489
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	14.747.446	60.678.666	-	-	-	-	75.426.112
	JUMLAH	-	5.208.000	32.667.300	23.303.642	61.191.090	3.747.000.954	2.950.000	126.639.635	8.585.300	270.874.300	4.278.420.221

UTANG BELANJA JASA KANTOR - JASA TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
2	RSUD MALINGPING	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	948.943.985	-	-	-	948.943.985	Utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD Bulan November 2023 dan Utang Jasa Pelayanan ke dr. Ahmad Bahrudin TA. 2023
		Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	1.083.333.333	-	1.083.333.333	Utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD Bulan Desember 2025
JUMLAH			948.943.985	-	1.083.333.333	-	2.032.277.318	

UTANG BELANJA JASA KANTOR - JASA TENAGA AHLI, JASA KONSULTASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	26.901.600	-	-	26.901.600	-	
JUMLAH			26.901.600	-	-	26.901.600	-	

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - BELANJA KONTRIBUTSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI KEPADA BPJS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO 2024-AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7
1	DINAS KESEHATAN	-	270.874.300	-	270.874.300	
JUMLAH		-	270.874.300	-	270.874.300	

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA - BLUD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2023-AUDITED	KOREKSI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7	9
1	RSUD BANTEN	Biaya grabfood & grabmart 16-12-2024 s.d 30-12-2024 (PT. Grab Teknologi Indonesia)	11.323.199	-	-	11.323.199	-	
2	RSUD BANTEN	Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk ke Biomed Periode November (Biomed)	10.400.000	-	-	10.400.000	-	
3	RSUD BANTEN	Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk ke Biomed Periode Desember (Biomed)	13.000.000	-	-	13.000.000	-	
4	RSUD BANTEN	BHP Hemodialisa set BPJS Lengkap non AV Fistula (PT. Sinar Roda Utama)	478.410.000	-	-	478.410.000	-	
5	RSUD BANTEN	Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Drowing Bulan Desember 2024 (PMI Kabupaten Serang)	282.420.000	-	-	282.420.000	-	
6	RSUD BANTEN	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	2.999.117.185	-	2.999.117.185	
6	RSUD CILOGRANG	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	375.651.474	-	375.651.474	
7	RSUD MALINGPING	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	2.032.277.318	-	2.032.277.318	
8	RSUD BANTEN	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	1.508.117.741	-	1.508.117.741	
JUMLAH			795.553.199	-	6.915.163.718	795.553.199	6.915.163.718	

UTANG PENGADAAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 30.8 Neraca

No	Nama SKPD/KEGIATAN	Nomor Kontrak	Nama Rekanan	Keterangan	Nilai Kontrak/PHO	Tanggal pembayaran	No SP2D	Pembayaran/ Koreksi 2024	Utang 2024	Pembayaran 2025	Koreksi	Penambahan 2025	Utang 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6-11	14 = 10+12+13	15
1. RSUD BANTEN														
	Peningkatan Pelayanan BLUD - Pembangunan Bunker Radioterapi		PT. Lambok Ulina	033/OE5-P2407-9919735- E- kat/SPK/RSUB/VIII/2024 TANGGAL 1 AGUSTUS 2024	13.074.309.929			12.943.566.829,00	130.743.100,00	130.743.100	-	-	-	
						04 September 2024	0812/S-PD- LS.01/BLUD/RSUB/IX/2024	3.268.577.482,00	-	-				
						15 November 2024	1237/S-PD-LS.03/BLUD/RSUB/XI /2024	3.268.577.482,00	-	-				
						31 Desember 2024	1536/S-PD-LS.01/BLUD/RSUB/XI I/2024	6.406.411.865,00		-				
	JUMLAH 1				13.074.309.929			25.887.133.658	130.743.100	130.743.100	-	-	-	
2. DINAS SOSIAL														
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				385.843.100			90.869.538	294.973.562	294.973.562	-	-	-	
	Pembangunan Konstruksi Kanopi Parkiran Mobil	SPK No: 027/39428127/SPK/DI NSQS/2023	CV. ALFIN JAYA ABADI	-	187.533.481	-	-	29.720.847,96	157.812.633,04	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Lingkungan Paving Block	SPK No: 027/42125209/SPK/DI NSQS/2023	CV. ADRIAN RIZKY ABADI	-	198.309.619	-	-	61.148.690,32	137.160.928,68	-	-	-	-	
	JUMLAH 2				385.843.100			90.869.538	294.973.562	294.973.562	-	-	-	
3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 16 Kab Tangerang				7.390.021.235	-	36.00/04.0/000849/LS/1.01.2.22. 0.00.02.0000/PR/10/2025	-	-	2.217.006.371	-	580.116.667	5.173.014.864	4.592.898.197 Progres Fisik 92,15%
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 12 Kota Tangerang				8.844.467.342	-	36.00/04.0/000873/LS/1.01.2.22. 0.00.02.0000/PR/10/2025	-	-	2.653.340.203	-	1.111.749.545	6.191.127.139	5.079.377.594 Progres Fisik 87,43%
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Baros				5.858.757.600	-	36.00/04.0/000846/LS/1.01.2.22. 0.00.02.0000/PR/10/2025	-	-	1.757.627.280	-	547.793.836	4.101.130.320	3.553.336.484 Progres Fisik 90,65%
4	Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 1 Panggarangan				881.964.927	-	-	-	-	-	-	64.912.619	881.964.927	817.052.308 Progres Fisik 92,64%
5	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik SMKN 1 Wanasalam				1.559.971.239	-	36.00/04.0/000851/LS/1.01.2.22. 0.00.02.0000/PR/10/2025	-	-	467.991.372	-	196.244.382	1.091.979.867	895.735.485 Progres Fisik 87,42%
	JUMLAH 3				24.535.182.343			-	-	7.095.965.226	-	2.500.817.049	17.439.217.117	14.938.400.068
	JUMLAH (1+2+3)				37.995.335.372			25.978.003.196	425.716.662	7.521.681.888	-	2.500.817.048,64	17.439.217.117	14.938.400.068

UTANG BELANJA TRANSFER (BAGI HASIL PAJAK)
KE KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 30.9 Neraca

No	Kabupaten / Kota	Jenis Pajak Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah (yang dibagi hasilkan)	Perhitungan Bagi Hasil	Hutang BHP 2024	Jumlah Realisasi 2025			Hutang 2025		
						Pembayaran Hutang BHP 2024	Realisasi BHP Tahun 2025	Total	Hutang 2024	Hutang 2025	Total Hutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-7	11=5-8	12 = 10+11
1	KABUPATEN LEBAK	PKB	949.662.600	284.898.780	2.244.678.840	2.244.678.840	284.898.780	2.529.577.620	-	-	-
		BBNKB	522.032.000	156.609.600	1.787.989.500	1.787.989.500	156.609.600	1.944.599.100	-	-	-
		AP	1.690.987.300	845.493.650	64.576.850	64.576.850	750.965.400	815.542.250	-	94.528.250	94.528.250
		PBBKB	64.032.380.608	68.487.667.930	-	-	62.393.874.074	62.393.874.074	-	6.093.793.856	6.093.793.856
		PAJAK ROKOK	119.437.529.346	83.981.589.354	-	-	71.262.073.117	71.262.073.117	-	12.719.516.237	12.719.516.237
		JUMLAH	186.632.591.854	153.756.259.314	4.097.245.190	4.097.245.190	134.848.420.971	138.945.666.161	-	18.907.838.343	18.907.838.343
2	KABUPATEN PANDEGLANG	PKB	857.011.000	257.103.300	1.967.653.260	1.967.653.260	257.103.300	2.224.756.560	-	-	-
		BBNKB	368.224.000	110.467.200	1.411.518.900	1.411.518.900	110.467.200	1.521.986.100	-	-	-
		AP	812.751.600	406.375.800	498.350	498.350	375.536.950	376.035.300	-	30.838.850	30.838.850
		PBBKB	55.942.436.845	60.671.933.610	-	-	55.270.508.121	55.270.508.121	-	5.401.425.489	5.401.425.489
		PAJAK ROKOK	96.818.278.041	63.527.915.671	-	-	51.336.383.423	51.336.383.423	-	12.191.532.248	12.191.532.248
		JUMLAH	154.798.701.486	124.973.795.581	3.379.670.510	3.379.670.510	107.349.998.994	110.729.669.504	-	17.623.796.587	17.623.796.587
3	KABUPATEN SERANG	PKB	1.602.444.300	480.733.290	4.008.475.500	4.008.475.500	480.733.290	4.489.208.790	-	-	-
		BBNKB	628.772.500	188.631.750	1.907.563.050	1.907.563.050	188.631.750	2.096.194.800	-	-	-
		AP	16.012.897.800	8.006.448.900	524.864.950	524.864.950	5.996.650.800	6.521.515.750	-	2.009.798.100	2.009.798.100
		PBBKB	89.798.831.629	90.127.095.115	3.613.746.023	3.613.746.023	66.243.108.017	69.856.854.040	-	23.883.987.098	23.883.987.098
		PAJAK ROKOK	135.261.035.335	93.796.169.018	-	-	79.584.009.164	79.584.009.164	-	14.212.159.854	14.212.159.854
		JUMLAH	243.303.981.564	192.599.078.073	10.054.649.523	10.054.649.523	152.493.133.021	162.547.782.544	-	40.105.945.052	40.105.945.052
4	KABUPATEN TANGERANG	PKB	8.304.307.000	2.491.292.100	94.453.741.460	94.453.741.460	2.491.292.100	96.945.033.560	-	-	-
		BBNKB	6.289.187.000	1.886.756.100	60.647.038.470	60.647.038.470	1.886.756.100	62.533.794.570	-	-	-
		AP	7.899.134.800	3.949.567.400	1.288.641.600	1.288.641.600	3.340.315.500	4.628.957.100	-	609.251.900	609.251.900
		PBBKB	346.479.115.452	220.876.343.091	75.813.337.324	75.813.337.324	164.678.421.180	240.491.758.504	-	56.197.921.911	56.197.921.911
		PAJAK ROKOK	236.974.791.908	156.884.448.412	-	-	133.058.402.950	133.058.402.950	-	23.826.045.462	23.826.045.462
		JUMLAH	605.946.536.160	386.088.407.103	232.202.758.854	232.202.758.854	305.455.187.830	537.657.946.684	-	80.633.219.273	80.633.219.273
5	KOTA CILEGON	PKB	1.428.948.700	428.684.610	10.079.731.830	10.079.731.830	428.684.610	10.508.416.440	-	-	-
		BBNKB	330.141.000	99.042.300	6.444.532.650	6.444.532.650	99.042.300	6.543.574.950	-	-	-
		AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PBBKB	125.974.608.401	63.969.370.431	19.397.029.256	19.397.029.256	48.369.968.487	67.766.997.743	-	15.599.401.944	15.599.401.944
		PAJAK ROKOK	55.310.480.512	44.206.584.381	-	-	37.527.807.181	37.527.807.181	-	6.678.777.200	6.678.777.200
		JUMLAH	183.044.178.613	108.703.681.722	35.921.293.736	35.921.293.736	86.425.502.578	122.346.796.314	-	22.278.179.144	22.278.179.144

No	Kabupaten / Kota	Jenis Pajak Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah (yang dibagi hasilkan)	Perhitungan Bagi Hasil	Hutang BHP 2024	Jumlah Realisasi 2025			Hutang 2025		
						Pembayaran Hutang BHP 2024	Realisasi BHP Tahun 2025	Total	Hutang 2024	Hutang 2025	Total Hutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-7	11=5-8	12 = 10+11
6	KOTA SERANG	PKB	1.501.868.700	450.560.610	6.456.606.240	6.456.606.240	450.560.610	6.907.166.850	-	-	-
		BBNKB	514.057.500	154.217.250	4.815.018.150	4.815.018.150	154.217.250	4.969.235.400	-	-	-
		AP	1.593.795.400	796.897.700	66.669.400	66.669.400	726.239.300	792.908.700	-	70.658.400	70.658.400
		PBBKB	91.303.640.799	64.911.548.254	5.064.636.674	5.064.636.674	59.322.919.816	64.387.556.490	-	5.588.628.438	5.588.628.438
		PAJAK ROKOK	72.329.654.359	54.762.780.818	-	-	46.470.733.026	46.470.733.026	-	8.292.047.792	8.292.047.792
		JUMLAH	167.243.016.758	121.076.004.632	16.402.930.464	16.402.930.464	107.124.670.002	123.527.600.466	-	13.951.334.630	13.951.334.630
7	KOTA TANGERANG	PKB	8.737.951.700	2.621.385.510	102.203.078.896	102.203.078.896	2.621.385.510	104.824.464.406	-	-	-
		BBNKB	3.334.254.000	1.000.276.200	61.110.484.350	61.110.484.350	1.000.276.200	62.110.760.550	-	-	-
		AP	12.468.806.500	6.234.403.250	1.511.885.650	1.511.885.650	4.644.604.100	6.156.489.750	-	1.589.799.150	1.589.799.150
		PBBKB	286.209.111.338	185.982.278.259	55.281.912.582	55.281.912.582	139.139.107.764	194.421.020.346	-	46.843.170.495	46.843.170.495
		PAJAK ROKOK	145.094.204.626	99.895.223.388	-	-	84.815.846.214	84.815.846.214	-	15.079.377.174	15.079.377.174
		JUMLAH	455.844.328.164	295.733.566.607	220.107.361.478	220.107.361.478	232.221.219.788	452.328.581.266	-	63.512.346.819	63.512.346.819
8	KOTA TANGERANG SELATAN	PKB	8.497.901.900	2.549.370.570	89.050.624.650	89.050.624.650	2.549.370.570	91.599.995.220	-	-	-
		BBNKB	4.373.576.300	1.312.072.890	55.239.485.250	55.239.485.250	1.312.072.890	56.551.558.140	-	-	-
		AP	6.967.979.600	3.483.989.800	801.412.950	801.412.950	2.496.992.200	3.298.405.150	-	986.997.600	986.997.600
		PBBKB	235.643.661.685	151.742.414.039	42.729.312.862	42.729.312.862	113.395.424.086	156.124.736.948	-	38.346.989.953	38.346.989.953
		PAJAK ROKOK	115.008.727.084	81.234.610.737	-	-	68.951.623.151	68.951.623.151	-	12.282.987.586	12.282.987.586
		JUMLAH	370.491.846.569	240.322.458.036	187.820.835.712	187.820.835.712	188.705.482.897	376.526.318.609	-	51.616.975.139	51.616.975.139
	JUMLAH PKB		31.880.095.900	9.564.028.770	310.464.590.676	310.464.590.676	9.564.028.770	320.028.619.446	-	-	-
	JUMLAH BBNKB		16.360.244.300	4.908.073.290	193.363.630.320	193.363.630.320	4.908.073.290	198.271.703.610	-	-	-
	JUMLAH AP		47.446.353.000	23.723.176.500	4.258.549.750	4.258.549.750	18.331.304.250	22.589.854.000	-	5.391.872.250	5.391.872.250
	JUMLAH PBBKB		1.295.383.786.757	906.768.650.729	201.899.974.721	201.899.974.721	708.813.331.545	910.713.306.266	-	197.955.319.184	197.955.319.184
	JUMLAH PAJAK ROKOK		976.234.701.211	678.289.321.779	-	-	573.006.878.226	573.006.878.226	-	105.282.443.553	105.282.443.553
	JUMLAH		2.367.305.181.168	1.623.253.251.068	709.986.745.467	709.986.745.467	1.314.623.616.081	2.024.610.361.548	-	308.629.634.987	308.629.634.987

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	URAIAN	SALDO 2024-Audited	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (Pembayaran Utang)	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8
1			NIHIL				
JUMLAH			-	-	-	-	

**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
(UTANG DARI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Lampiran 32 Neraca

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	PENYEDIA PINJAMAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN (PEMBAYARAN 2024)	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01/01/2025	Saldo Awal	Saldo Utang Jangka Panjang	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	-	-	383.457.470.289
2	31/12/2025	001/JP-UTANG/2025	Reklas Utang jangka pendek bagian utang jangka panjang	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	-	138.497.733.036	244.959.737.253
JUMLAH					-	138.497.733.036	244.959.737.253

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI KAS

Lampiran 1 LPE

NO	TANGGAL	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	03/01/2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisa Kas Penerimaan Hibah pada SMKN 5 Kota Tangerang Selatan yang sudah Disetorkan ke RKUN pada 3 Januari 2025	-47.267.100
JUMLAH				-47.267.100

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI PIUTANG

NO	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	UPT RSUD Malingping	Jumlah UPT RSUD Malingping	17.397.394
		Penyisihan Piutang TA. 2024	17.397.394
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN		171.125.876
		Koreksi minus saldo awal piutang TGR atas nama Mukhsin sebesar Rp3.000.000	-3.000.000
		Koreksi penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian	174.125.876
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Badan pendapatan Daerah	8.387.293
		Penyisihan Piutang Jasa Giro 2024	1.833.358
		Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan 2024	37.043
		Penyisihan Piutang PBBKB 2024 sebesar	6.516.892
		JUMLAH	196.910.563

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

NO	TANGGAL	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	31/12/2025	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koreksi minus atas kurang pencatatan saldo awal	-57.600.000
			koreksi nilai persediaan tahun lalu yang sudah di catat sebagai kewajiban	2.517.988.498
2	31/12/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN	koreksi atas Saldo Awal, Saldo Akhir dan Saldo Persediaan diserahkan ke masyarakat untuk untuk Tujuan Berjaga-jaga	510.025.618
JUMLAH				2.970.414.116

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI ASET TETAP

Lampiran 4 LPE

No	SKPD							
		KOREKSI ATAS TANAH	KOREKSI ATAS PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN	KOREKSI ATAS JIJ	ASET TETAP LAINNYA	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6		7	8=(3+4+5+6+7)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.838.904.000	(759.856.240)	2.971.098.064	212.636.720	(192.544.800)	(2.017.129.428)	23.053.108.316
2	DINAS KESEHATAN	-	7.292.802.000				(7.292.802.000)	-
3	UPT RSUD Banten	-	(3.271.300)				(26.457.538)	(29.728.838)
4	UPT RSUD Malingping	-					(23.639.597)	(23.639.597)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-					(25.495.253.988)	(25.495.253.988)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	144.400.000				(3.008.333)	141.391.667
7	DINAS SOSIAL	-					(1.914.518.715)	(1.914.518.715)
8	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	-					(1.474.121.916)	(1.474.121.916)
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						(47.337.348)	(47.337.348)
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-		1.102.562.050			83.333	1.102.645.383
11	DINAS PERTANIAN	-					(68.308.186)	(68.308.186)
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-					(8.562.708)	(8.562.708)
13	Biro Umum dan Perlengkapan	-	8.000.000				554.825.529	562.825.529
14	SEKRETARIAT DPRD	-					(3.607.745.105)	(3.607.745.105)
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-					(14.518.472)	(14.518.472)
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	238.500.000					238.500.000
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-					4.766.820	4.766.820
18	INSPEKTORAT	-					(85.990.114)	(85.990.114)
JUMLAH		22.838.904.000	6.920.574.460	4.073.660.114	212.636.720	(192.544.800)	(41.519.717.766)	(7.666.487.273)

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI ASET LAINNYA

Lampiran 5 LPE

No	SKPD	Koreksi atas Aset Lainnya	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	2	3	4	5=(3+4)
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	(5.982.529.800)		(5.982.529.800)
JUMLAH		(5.982.529.800)	-	(5.982.529.800)

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI KEWAJIBAN

Lampiran 6 LPE

NO	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	2	3	4
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Koreksi Kewajiban sebesar atas kelebihan nilai kewajiban prasarana sarana umum yang dibayarkan pada TA 2024	62.384.502
JUMLAH			62.384.502

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI INVESTASI

Lampiran 7 LPE

NO	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	2	3	4
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi atas investasi yang berasal dari penyesuaian Laba atas Laporan Keuangan PT.Banten Global Development Audited 2024 yang terbit setelah Pelaporan LKPD Audited Provinsi Banten 2024	206.266.615
JUMLAH			206.266.615

LAMPIRAN PERUBAHAN KOREKSI EKUITAS TA. 2025
KOREKSI LAIN-LAIN

Lampiran 8 LPE

NO	SKPD	TRANSAKSI	NILAI KOREKSI
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, JJI Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya	2.540.346.841
2	RSUD Banten	Penghapusan atas Aset Lain-Lain berupa aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yakni Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung dan Bangunan	243.379.675
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penghapusan Aset Tetap Tanah berupa Lahan Akses Tol Serang Timur tidak dilanjutkan karena merupakan Jalan Nasional sebesar minus Rp31.170.200, Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar minus Rp8.018.358.610 dan penghapusan aset lain-lain berupa tanah untuk jalan sebesar minus Rp3.556.028.536	11.605.557.346
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penghapusan Tanaman Perkebunan	9.905.600
5	Dinas Perhubungan	Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	98.800.000
6	inas Kelautan dan Perikanan	Penghapusan Hewan Ternak Ikan Air Tawar Budidaya	197.600.000
7	Dinas Pertanian	Penghapusan Aset Lain-lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar minus Rp353.660.000 serta penghapusan Hewan Ternak Sapi, Kambing Domba dan Tanaman sebesar minus Rp834.672.600	1.188.332.600
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan	624.509.500
9	Biro Umum	Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	211.058.850
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penghapusan Aset Lain-Lain berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	282.374.000
JUMLAH			17.001.864.412



PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)

Kantor Pusat: Ruko Sukses 2 No. 18, Jl. Abdul Latief No. 11
Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42117
Contact WhatsApp: 081288240203 E-mail: Contact@agrobanten.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)**

Nomor S-075/ABM/DU.3/III/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Nur Ma'ruf
Alamat Kantor : Ruko Sukses 2 No. 18, Jl. Abdul Latief No. 11
Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang
Provinsi Banten 42117
Alamat Domisili : Gedung Kalaran A2 No.8 RT 04 RW 05, Kelurahan Lontar
Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepon : +62 858-8133-7111
Jabatan : Sekretaris Perusahaan selaku Asisten Plt. Komisaris

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) ("Perusahaan");
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 12 Maret 2026

PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)
a.n. Direksi



Irfan Nur Ma'ruf
Asisten Plt. Komisaris



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00006/2.1031/AU.2/05/1101-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Agrobisnis Banten Mandiri

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 30 Januari 2025.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 5 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan memiliki piutang usaha kepada Adi Nurhadi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.930.704.500. Piutang tersebut telah melalui proses penyelesaian melalui jalur hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kami juga menarik perhatian pada Catatan 6 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan memiliki piutang lain-lain kepada PT Ternaknesia Farm Innovation dan CV Emka

4

Bangun Nusantara masing-masing sebesar Rp3.250.000.000 dan Rp1.112.220.000 per 31 Desember 2025. Piutang tersebut sedang dalam proses penyelesaian melalui jalur hukum.

Kami juga menarik perhatian pada Catatan 14 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan memiliki investasi pada ventura bersama sebesar Rp4.882.314.328 pada PT Gift Asia Pasific. Pada tahun 2025, manajemen mengakui penurunan nilai atas investasi tersebut sehubungan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sama dengan kegiatan usaha dan operasional entitas ventura bersama.

Kami juga menarik perhatian pada Catatan 24 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa pada tahun berjalan Perusahaan mengidentifikasi adanya transaksi yang terindikasi sebagai penyimpangan (*fraud*) yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Perusahaan telah mengakui dampak kerugian tersebut sebagai beban pada laporan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan serta telah menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemulihan atas dana yang disalahgunakan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Tri Bowo Yulianti



Bowo Priyatno, CPA
No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1101



12 Maret 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.d, 3	6.733.352.077	5.525.180.604
Deposito Berjangka	4	14.000.000.000	36.900.000.000
Piutang Usaha	2.e, 5	9.548.117.504	11.739.075.283
Piutang Lain-lain	6	10.318.934.507	17.122.184.396
Persediaan	2.f, 7	2.159.253.403	1.839.522.949
Uang Muka	8	-	623.032.000
Beban Dibayar di Muka	2.g, 2.j, 9	1.136.630.169	523.500.000
Pajak Dibayar di Muka	2.k, 18.a	139.190.053	-
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	10	32.070.566	-
Jaminan	11	-	60.000.000
Jumlah Aset Lancar		44.067.548.279	74.332.495.232
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2.h, 12	1.535.119.941	1.700.277.166
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.072.747.695 dan Rp89.068.070)			
Aset Tak Berwujud	2.i, 13	867.562.502	1.181.190.411
(setelah dikurangi akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp322.237.498 dan Rp809.589)			
Investasi Pada Ventura Bersama	14	4.882.314.328	-
Aset Pajak Tangguhan	2.k, 18.d	6.850.062.855	864.049.452
Aset Lain	15	-	269.118.668
Jumlah Aset Tidak Lancar		14.135.059.626	4.014.635.697
JUMLAH ASET		58.202.607.905	78.347.130.929

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	16	219.823.473	433.534.395
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.j, 17	10.833.333	40.260.000
Utang Pajak	2.k, 18.a	875.102.845	632.739.766
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>1.105.759.651</u>	<u>1.106.534.161</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.m, 19	263.151.832	135.723.317
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		<u>263.151.832</u>	<u>135.723.317</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>1.368.911.483</u>	<u>1.242.257.478</u>
EKUITAS			
Penyertaan Modal Daerah - Disetor	1.d, 20	80.000.000.000	80.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah (terdiri dari modal disetor sebesar Rp80.000.000.000 berupa uang tunai, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020)			
Saldo Laba		(23.166.303.578)	(2.895.126.549)
JUMLAH EKUITAS		<u>56.833.696.422</u>	<u>77.104.873.451</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>58.202.607.905</u>	<u>78.347.130.929</u>

Serang, 12 Maret 2026
an. Direksi


PT Agrobisnis Banten Mandiri (Persero) Tbk
Irfan Nur Maruf
Asisten Plt. Komisaris

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2.j, 21	101.716.042.933	92.357.870.901
HARGA POKOK PENJUALAN	2.j, 22	99.225.238.753	88.477.341.813
LABA/(RUGI) KOTOR		2.490.804.180	3.880.529.088
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penjualan	2.j, 23	1.880.643.455	1.389.113.924
Beban Administrasi dan Umum	2.j, 24	28.002.547.942	7.530.477.102
Jumlah Beban Operasional		29.883.191.397	8.919.591.026
LABA/(RUGI) USAHA		(27.392.387.217)	(5.039.061.938)
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN	2.j, 25	1.238.443.267	2.953.914.435
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK		(26.153.943.950)	(2.085.147.503)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.k, 18.b		
Pajak Kini		-	-
Pajak Tangguhan		5.986.013.403	701.996.792
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		5.986.013.403	701.996.792
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN		(20.167.930.547)	(1.383.150.711)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		(103.246.482)	(46.175.563)
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(103.246.482)	(46.175.563)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(20.271.177.029)	(1.429.326.274)

Serang, 12 Maret 2026

an. Direksi


 PT Agrobisnis Banten Mandiri (Persero)
 Irfan Nur Ma'ruf
 Asisten Plt. Komisaris

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jumlah Penempatan Modal Daerah	Saldo Laba (Rugi)		Jumlah Ekuitas
		Belum Ditentukan Penggunaanya	Telah Ditentukan Penggunaanya	
Saldo per 1 Januari 2024	80.000.000.000	(111.311.479)	(1.050.147.063)	78.838.541.458
Penempatan Tahun Berjalan	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	-	(46.175.563)	-	(46.175.563)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	(304.341.733)	-	(304.341.733)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-	(1.383.150.711)	-	(1.383.150.711)
Saldo per 31 Desember 2024	80.000.000.000	(1.844.979.486)	(1.050.147.063)	77.104.873.451
Penempatan Tahun Berjalan	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	-	(103.246.482)	-	(103.246.482)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-	(20.167.930.547)	-	(20.167.930.547)
Saldo per 31 Desember 2025	80.000.000.000	(22.116.156.515)	(1.050.147.063)	56.833.696.422

Serang, 12 Maret 2026
an. Direksi


PT Agrobisnis Banten Mandiri (Persero)

Irfan Nur Ma'ruf
Asisten Plt. Komisaris

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

	2025	2024
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba/(Rugi) Bersih	(20.167.930.547)	(1.429.326.274)
Amortisasi dan Penyusutan	569.816.623	(121.318.762)
Pajak Tangguhan	(5.986.013.403)	(864.049.453)
Imbalan Pascakerja	24.182.033	135.723.317
Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu	-	(304.341.733)
Perubahan modal kerja		
Piutang Usaha	2.190.957.779	(2.548.431.763)
Piutang lain-lain	6.803.249.889	8.372.754.185
Uang Muka	(319.730.454)	8.572.000
Persediaan	623.032.000	756.074.576
Beban Dibayar di Muka	(613.130.169)	401.500.000
Pajak Dibayar di Muka	(139.190.053)	-
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	(32.070.566)	-
Jaminan	60.000.000	-
Utang Usaha	(213.710.922)	433.534.395
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(29.426.667)	(12.843.898)
Utang Pajak	242.363.079	123.365.655
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan operasi	(16.987.601.378)	4.951.212.245
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Pelepasan/(Pembelian) Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	(91.031.489)	(1.233.285.637)
Pelepasan/(Pembelian) Aset Tidak Lancar Lainnya	269.118.668	(269.118.668)
Pelepasan/(Penempatan) Investasi	18.017.685.672	-
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan investasi	18.195.772.851	(1.502.404.305)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	1.208.171.473	3.448.807.940
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	5.525.180.604	2.076.372.664
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	6.733.352.077	5.525.180.604

Serang, 12 Maret 2026
an. Direksi


PT Agrobisnis Banten Mandiri (PBM)
Irfan Nur Ma'ruf
Asisten Plt. Komisaris

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

I. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perseroan Daerah Agrobisnis Banten Mandiri atau PT Agrobisnis Banten Mandiri (selanjutnya disebut "Perusahaan") merupakan Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis. Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai penyertaan modal daerah pada Perusahaan.

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Arjamalis Roswar, S.H. SPN., M.H., Nomor 13 tanggal 20 November 2020 di Kota Serang. Akta tersebut telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-0063115.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir tentang pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022. Perubahan anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya nomor AHU-0029366.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022.

Perusahaan berkedudukan di Wilayah Daerah Kota Serang dengan kantor beralamat di Ruko Sukses 2 No. 18, Jalan Abdul Latief No. 11 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42117.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019, maksud pendirian Perusahaan adalah meliputi, mewujudkan keberadaan atau kehadiran Pemerintah Daerah dalam mengelola, menyimpan dan mendistribusikan hasil pertanian Daerah; ikut serta dalam melindungi lahan pertanian, menjaga sumber daya alam pertanian, sarana dan prasarana pertanian serta membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keberlangsungan pertanian di Daerah; melindungi dan berperan serta Pemerintah Daerah dalam mendukung program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan pendirian Perusahaan meliputi:

- 1) menjaga stabilitas harga pangan daerah, melindungi hasil pertanian dan menstabilkan harga pangan agar terjangkau masyarakat;
- 2) menyelenggarakan kegiatan produksi dan usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk;
- 3) mewujudkan perusahaan yang profesional sesuai prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik yang bergerak dibidang pusat produksi dan usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk;
- 4) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis melakukan kegiatan produksi dan usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk.
- 2) Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dapat melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, kegiatan Perusahaan adalah penjualan bahan pangan dan makanan retail.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

c. Organ Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019, pada Bab VIII Pasal 13 menyatakan bahwa organ Perusahaan terdiri dari:

- 1) RUPS;
- 2) Komisaris; dan
- 3) Direksi.

Berdasarkan akta notaris Hilal Fitri, S.H., M.Kn., Nomor 23 tanggal 18 Juli 2025 di Kabupaten Serang tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2025, adalah:

Komisaris

Plt. Komisaris	: Babar Suharso, S.T., M.Si.
Asisten Plt. Komisaris	: Irfan Nur Ma'ruf

Direksi

Pada tanggal 18 Juli 2025, Plt. Direktur telah diberhentikan. Sejak tanggal tersebut sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan belum memiliki Direktur aktif. Selama periode tersebut, operasional Perusahaan dijalankan oleh Asisten Plt. Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dengan akta notaris Hilal Fitri, S.H., M.Kn., Nomor 23 tanggal 18 Juli 2025 bahwa Sekretaris Perusahaan sebagai Asisten Plt. Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi Perusahaan yaitu menjalankan operasional Perusahaan dan memastikan kinerja perusahaan berjalan dengan baik.

Pegawai Perusahaan per 31 Desember 2025 berjumlah 21 orang pegawai tetap dan 17 orang pegawai kontrak.

d. Modal Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal ke dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).

Sampai dengan saat ini, jumlah modal yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp80.000.000.000 atau setara 26,67% dari modal dasar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.000.000.000;
- 2) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.000.000.000;
- 3) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

- a. Pernyataan Kepatuhan
Direksi Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.
- b. Dasar Penyusunan
Perusahaan menetapkan SAK EP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.
Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.
Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.
- c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo dalam Mata Uang Asing
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif tahun berjalan.
- d. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.
- e. Piutang Usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode rata-rata (*average method*).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai ketika realisasi bersih lebih rendah dari pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

g. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya atau disebut metode garis lurus (*straight line method*), dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing. Perkiraan ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, pada saat manfaat diterima.

h. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sesuai dengan harga perolehannya pada tanggal pembelian/perolehan aset. Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap yang disewakan kepada pihak lain disajikan pada kelompok aset tetap disewakan. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif
Kendaraan	16 tahun	6,25%
Inventaris Kantor	4 dan 8 tahun	25% dan 12,5%
Peralatan Usaha	8 tahun	12,5%

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba penghasilan komprehensif pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

i. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset tidak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif
Software	4 Tahun	25,00%

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

j. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

1) Penjualan Barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
- jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan; dan
- biaya yang telah terjadi atau bahkan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

2) Penjualan Jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang telah terjadi atau bahkan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

k. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan mengakui pajak tangguhan. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak pada periode mendatang pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut dipulihkan atau diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut.

l. Transaksi-Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi berelasi sebagaimana diatur SAK EP Bab 33, "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas yang menyusun laporan keuangannya (entitas pelapor):

- 1) orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas
 - a) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;
 - b) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau
 - c) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
- 2) suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya);
 - b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
 - c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama;
 - d) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut;
 - e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi imbalan para pekerja entitas pelapor maupun imbalan pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
 - g) entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor;

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (lanjutan)

l. Transaksi-Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- h) orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

m. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

Perusahaan memiliki pegawai tetap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Perusahaan sudah mencatat dan menyajikan liabilitas imbalan pascakerja pada laporan keuangan. Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dilakukan oleh Manajemen.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS

Terdiri dari:

Kas	2025	2024
Kas Kecil		
Kas ABM Mart	12.189.900	55.406.455
Subjumlah kas	1.214.600	22.071.600
Bank	13.404.500	77.478.055
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk		
Rek. 0776003921		
Rek. 0776007170	1.902.005.746	252.242.551
PT Bank Central Asia Tbk	2.283.952.336	922.722.815
Rek. 2452579937		
Rek. 2452910617	362.271.932	2.714.294.742
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Rek. 1630006097516	895.857.653	215.479.711
PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Rek. 7148751368	323.010.892	542.656.164
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Rek. 8401003957309	277.644.560	491.826.399
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk - Rek. 0112210203001	276.788.764	34.523.886
PT Bank Perekonomian Rakyat Serang - Rek. 00510020124	220.869.887	179.666.671
Subjumlah bank	177.545.807	94.289.610
Jumlah	6.719.947.577	5.447.702.549
	6.733.352.077	5.525.180.604

4. DEPOSITO BERJANGKA

Terdiri dari:

	2025	2024
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	14.000.000.000	29.600.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	5.300.000.000
Jumlah	14.000.000.000	36.900.000.000

Deposito berjangka per 31 Desember 2025 merupakan deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Seri Deposito	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Bunga	Nilai Nominal
A043542	31-Desember-2025	31-Maret-2026	6,75%	1.000.000.000
A049031	27-Oktober-2025	27-Januari-2026	3,50%	1.000.000.000
A049032	29-Oktober-2025	29-Januari-2026	3,50%	3.000.000.000
A049023	1-Desember-2025	1-Januari-2026	6,25%	2.000.000.000
A049037	24-Desember-2025	24-Januari-2026	6,25%	2.000.000.000
A043540	18-Desember-2025	18-Maret-2026	6,75%	2.000.000.000
A043541	18-Desember-2025	18-Maret-2026	6,75%	2.000.000.000
A049380	4-Desember-2025	4-Maret-2026	3,50%	1.000.000.000
Jumlah				14.000.000.000

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

5. PIUTANG USAHA

Merupakan piutang usaha pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.548.117.504 dan Rp11.739.075.283. Piutang usaha merupakan piutang dari penjualan produk. Dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Adi Nurhadi	5.930.704.500	5.930.704.500
Andre	438.800.000	438.800.000
Saija Adinda	315.900.000	315.900.000
Khaerudin (CV Putra Balada 68)	286.996.500	236.427.000
CV Dua Putra Berdikari	230.750.000	230.750.000
Ulfi Suprihatin (Oelvi)	220.500.000	-
PT Semoga Berkat Maslahat	154.000.000	-
Muhit (UPT Pasar Serang)	148.279.000	-
ABM Mart	109.011.439	2.436.963.326
Toko Raja Telor	133.800.000	148.800.000
Toko Jundan	138.900.000	138.900.000
Ucun Suana	132.208.000	-
CV Duta Quality Power Management	114.300.000	114.300.000
Lainnya (nilai piutang dibawah 100jt)	2.059.006.500	2.554.061.000
Jumlah bruto	10.413.155.939	12.545.605.826
Dikurangi: Penyisihan piutang usaha	(865.038.435)	(806.530.542)
Jumlah neto	9.548.117.504	11.739.075.284

Pada tanggal 31 Desember 2025, analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	Jumlah
1 - 30 hari	1.002.382.000
31 - 60 hari	13.399.200
61 - 90 hari	16.235.000
91 - 365 hari	367.559.439
Lebih dari 365 hari	9.013.580.300
Subjumlah	10.413.155.939
Dikurangi:	
Penyisihan piutang usaha	(865.038.435)
Jumlah	9.548.117.504

Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih diatas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha kepada Adi Nurhadi sebesar Rp5.930.704.500, telah dilakukan proses melalui tahapan peradilan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN.TNG tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banten yang diputus dengan Putusan Nomor 177/Pdt/2024/PT.BTN tanggal 3 September 2024. Atas putusan tersebut, para pihak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus dengan Putusan Nomor 4284 K/Pdt/2025. Seluruh langkah hukum yang diperlukan telah diupayakan untuk memastikan penyelesaian kasus, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Isi putusan Pengadilan Tinggi Banten mengadili sebagai berikut: menerima banding dari Perusahaan; menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan banding; menghukum Perusahaan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Merupakan piutang lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.318.934.507 dan Rp17.122.184.396. Piutang lain merupakan piutang kerjasama dan kemitraan dengan Perusahaan. Dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
PT Ternaknesia Farm Innovation	3.250.000.000	3.250.000.000
PT Rizki Indah Makmur	1.461.379.000	4.600.869.400
CV Emka Bangun Nusantara	1.112.220.000	1.112.220.000
PT Agrapana Wukir Panca	1.026.500.000	1.026.500.000
Zul Center (Zul Putra Mandiri)	1.000.000.000	4.986.673.003
PT Bintang Lestari Farm	636.451.515	641.451.515
PT Berkah Bersama Aqidah	595.835.280	620.835.280
PT Khalifa Sembako Agromitra	479.425.000	-
CV Sri Padi	327.500.000	337.500.000
CV Kita Berkah Bersama	275.900.000	275.900.000
UD Alim Putra	255.000.000	255.000.000
Koperasi Lumbung Ternak Banten	158.967.350	158.967.350
PT Lestari Agro Jayantha Nusantara	141.600.000	141.600.000
H. Hamid (Pengolahan Padi)	140.000.000	200.000.000
Proyek Banten Berqurban	109.240.500	109.240.500
Lainnya (nilai piutang dibawah 100jt)	155.107.000	9.900.000
Jumlah bruto	11.125.125.645	17.726.657.048
Dikurangi: Penyisihan piutang lain	(806.191.138)	(604.472.652)
Jumlah neto	10.318.934.507	17.122.184.396

Pada tanggal 31 Desember 2025, analisis umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	Jumlah
1 - 30 hari	-
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
91 - 365 hari	6.000.000
Lebih dari 365 hari	965.400.000
Subjumlah	10.153.725.645
Dikurangi:	11.125.125.645
Penyisihan piutang usaha	(806.191.138)
Jumlah	10.318.934.507

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih diatas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang lain atas PT Ternaknesia Farm Innovation sebesar Rp3.250.000.000 merupakan kerjasama perdagangan ayam karkas frozen dengan nomor kontrak 539/004-PKS.PT.ABM/I/2023 dan 0038/SPK-FN/TN/29.I/2023 tanggal 9 Januari 2023, telah dilakukan proses peradilan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN SRG tanggal 16 Januari 2025. Selanjutnya diajukan akan ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Isi putusan Pengadilan Negeri Serang mengadili, sebagai berikut: mengabulkan eksepsi PT Ternaknesia Farm Innovation mengenai subjek hukum tidak jelas/*obcuurlibels*; menyatakan gugatan Perusahaan tidak dapat diterima; menghukum Perusahaan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp878.000.

Piutang lain atas PT Rizki Indah Makmur sebesar Rp1.461.379.000 merupakan kemitraan perdagangan besar produk fast moving consumer goods dengan nomor kontrak 539/010.PKS.PT.ABM/I/2023 tanggal 24 Januari 2023. Berdasarkan berita acara pelunasan piutang ada upaya pembayaran melalui *cheque*.

Piutang lain atas CV Emka Bangun Nusantara sebesar Rp1.112.220.000 merupakan kemitraan produksi pengolahan padi Wilayah Tangerang Raya dengan nomor kontrak 539/007/PKS.PT.ABM/I/2023 dan 01/PKS/EBN/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, telah dilakukan proses peradilan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.SRG tanggal 28 Maret 2025. Selanjutnya diajukan akan ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Isi putusan Pengadilan Negeri Serang mengadili, sebagai berikut: menolak eksepsi CV Emka Bangun Nusantara; menyatakan gugatan Perusahaan tidak dapat diterima; menghukum Perusahaan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000.

7. PERSEDIAAN

Merupakan persediaan barang jadi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.159.253.403 dan Rp1.839.522.949. Rincian persediaan barang jadi per 31 Desember 2025 berdasarkan lokasi penyimpanan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Gudang Pontang	1.637.479.739	767.553.624
ABM Mart	514.395.664	106.569.325
Konsinyasi di Tangerang	7.378.000	-
Konsinyasi di PT Rizki Indah Makmur	-	965.400.000
Jumlah Persediaan	<u>2.159.253.403</u>	<u>1.839.522.949</u>

8. UANG MUKA

Tidak terdapat saldo uang muka pembelian persediaan per 31 Desember 2025. Sedangkan saldo uang muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp623.032.000. Uang muka tersebut merupakan uang muka pembelian barang persediaan.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Terdiri dari:

	2025	2024
Sewa Dibayar di Muka	822.916.667	520.000.000
Beban Dibayar di Muka - Lainnya	44.594.834	3.500.000
Beban Tangguhan	269.118.668	-
Jumlah	<u>1.136.630.169</u>	<u>523.500.000</u>

10. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima		
Bunga Deposito	25.835.616	-
Investasi Gift Line	6.234.950	-
Jumlah	<u>32.070.566</u>	<u>-</u>

11. JAMINAN

Tidak terdapat saldo jaminan per 31 Desember 2025. Sedangkan per 31 Desember 2024 terdapat saldo jaminan sebesar Rp60.000.000. Jaminan merupakan deposit atas sewa bangunan.

12. ASET TETAP

Terdiri dari:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	1.470.980.000	2.000.000	-	1.472.980.000
Inventaris Kantor	979.334.047	155.553.589	126.687.800	1.008.199.836
Peralatan Usaha	74.322.100	126.687.800	74.322.100	126.687.800
Jumlah	<u>2.524.636.147</u>	<u>284.241.389</u>	<u>201.009.900</u>	<u>2.607.867.636</u>
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	348.063.277	94.352.033	-	442.415.310
Inventaris Kantor	449.252.909	143.414.900	-	592.667.809
Peralatan Usaha	27.042.795	10.621.781	-	37.664.576
Jumlah	<u>824.358.981</u>	<u>248.388.714</u>	<u>-</u>	<u>1.072.747.695</u>
Nilai Buku				
Kendaraan	1.122.916.723			1.030.564.690
Inventaris Kantor	530.081.138			415.532.027
Peralatan Usaha	47.279.305			89.023.224
Jumlah	<u>1.700.277.166</u>			<u>1.535.119.941</u>

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	1.470.980.000	-	-	1.470.980.000
Inventaris Kantor	848.739.069	130.594.978	-	979.334.047
Peralatan Usaha	74.322.100	-	-	74.322.100
Jumlah	2.394.041.169	130.594.978	-	2.524.636.147
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	348.063.277	-	-	348.063.277
Inventaris Kantor	360.184.839	89.068.070	-	449.252.909
Peralatan Usaha	27.042.795	-	-	27.042.795
Jumlah	735.290.911	89.068.070	-	824.358.981
Nilai Buku				
Kendaraan	1.122.916.723			1.122.916.723
Inventaris Kantor	488.554.230			530.081.138
Peralatan Usaha	47.279.305			47.279.305
Jumlah	1.658.750.258			1.700.277.166

Beban penyusutan yang dibebankan ke dalam beban pokok usaha dan beban operasional tahun 2025 masing-masing sebesar Rp9.333.369 dan Rp239.055.345.

13. ASET TAK BERWUJUD

Terdiri dari:

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Software Plaza Banten	786.000.000	7.800.000	-	793.800.000
Software Wanten	396.000.000	-	-	396.000.000
Jumlah	1.182.000.000	7.800.000	-	1.189.800.000
Akumulasi Amortisasi				
Software Plaza Banten	-	214.987.499	-	214.987.499
Software Wanten	809.589	106.440.410	-	107.249.999
Jumlah	809.589	321.427.909	-	322.237.498
Nilai Buku				
Software Plaza Banten	786.000.000			578.812.501
Software Wanten	395.190.411			288.750.001
Jumlah	1.181.190.411			867.562.502

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

14. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Software Plaza Banten	-	786.000.000	-	786.000.000
Software Wanten	15.000.000	381.000.000	-	396.000.000
Aplikasi Absen dan Mark E	27.875.000	-	27.875.000	-
Perangkat Lunak Accurate	36.434.341	-	36.434.341	-
Jumlah	79.309.341	1.167.000.000	64.309.341	1.182.000.000
Akumulasi Amortisasi				
Software Plaza Banten	-	-	-	-
Software Wanten	10.625.000	-	9.815.411	809.589
Aplikasi Absen dan Mark E	19.744.792	-	19.744.792	-
Perangkat Lunak Accurate	9.867.634	-	9.867.634	-
Jumlah	40.237.426	-	39.427.837	809.589
Nilai Buku				
Software Plaza Banten	-			786.000.000
Software Wanten	4.375.000			395.190.411
Aplikasi Absen dan Mark E	8.130.208			-
Perangkat Lunak Accurate	26.566.707			-
Jumlah	39.071.915			1.181.190.411

14. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

Merupakan investasi pada ventura bersama per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.882.314.328 pada PT Gift Asia Pasific tentang penjualan distribusi dan penjualan produk bahan pangan di Provinsi Banten. Informasi investasi pada entitas adalah sebagai berikut:

Investasi Gift Line	Jumlah
	5.000.000.000
Dikurangi: Penurunan nilai investasi	(117.685.672)
Jumlah neto	4.882.314.328

Pada tahun 2025, Manajemen melakukan penurunan nilai investasi karena ketidaksesuaian perjanjian kerjasama dengan kegiatan usaha dan operasional PT Gift Asia Pasific.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah 2025 Nomor 700/0638-Inspektorat/2025 tanggal 12 Desember 2025, terdapat beberapa temuan hasil audit, sebagai berikut:

- Direksi tidak melibatkan pihak Manajemen Perusahaan dalam proses perencanaan KSO, penandatanganan KSO dan akseptasi SKBDN;
- Perusahaan tidak siap menjalankan kerja sama operasional;
- Penyusunan perjanjian kerja sama operasi tidak sesuai ketentuan;
- Dokumen yang digunakan dalam perjanjian kerja sama tidak konsisten.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun investasi pada ventura bersama pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penurunan nilai investasi telah mencukupi untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai investasi.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

15. ASET LAIN

Tidak terdapat saldo aset lain per 31 Desember 2025. Sedangkan per 31 Desember 2024 terdapat saldo aset lain renovasi gudang pontang berupa Rumah Cold Storage milik Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp269.118.668.

Pada tahun 2025, berdasarkan evaluasi Manajemen atas substansi transaksi, saldo aset lain direklasifikasi menjadi beban dibayar di muka yang merupakan beban tangguhan atas renovasi bangunan. Renovasi tersebut dilakukan atas bangunan yang secara hukum tidak dimiliki oleh Perusahaan, tetapi memberikan manfaat ekonomik bagi kegiatan operasional Perusahaan.

Manajemen saat ini sedang mengupayakan proses pengalihan kepemilikan atas aset dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sampai dengan tanggal pelaporan, proses pengalihan kepemilikan tersebut belum selesai dilakukan.

16. UTANG USAHA

Merupakan utang usaha pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp219.823.473 dan Rp433.534.395. Utang usaha pihak ketiga per 31 Desember 2025 merupakan utang usaha Seller pada Plaza Banten. Pembayaran atas utang usaha tersebut telah diselesaikan pada tanggal 2 Januari 2026.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Merupakan biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.833.333 dan 40.260.000. Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 merupakan biaya atas sewa bangunan bulan Desember 2025.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Terdiri dari :

Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

2025	2024
139.190.053	-
139.190.053	-

b. Utang Pajak

Terdiri dari :

PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

2025	2024
18.375.939	10.590.641
75.108.360	54.803.525
227.000	-
781.391.546	567.345.600
875.102.845	632.739.766

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Kini

Perusahaan mengalami kerugian fiskal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.
Perhitungan kerugian fiskal untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	(26.153.943.950)
Koreksi Fiskal	
Beda Waktu	
Penyusutan Aset Tetap	(82.629.377)
Penyisihan/Penurunan Nilai Aset	22.347.412.926
Imbalan Pascakerja	24.182.033
Beda Tetap	
Beban yang tidak dapat dikurangkan	199.441.070
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan bukan objek pajak	(1.254.648.954)
Jumlah Koreksi Fiskal	21.233.757.698
Laba/(Rugi) Fiskal	<u>(4.920.186.252)</u>

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah, sebagai berikut:

	1 Januari 2025	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Laba Rugi Komprehensif	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif lain	31 Desember 2025
Penyusutan Aset Tetap	-	(18.178.463)	-	(18.178.463)
Penyisihan Piutang	310.420.702	4.916.430.844	-	5.226.851.546
Imbalan Pascakerja	29.859.130	5.320.047	-	35.179.177
Kompensasi Kerugian	523.769.620	1.082.440.975	-	1.606.210.595
Jumlah	<u>864.049.452</u>	<u>5.986.013.403</u>	<u>-</u>	<u>6.850.062.855</u>
	1 Januari 2024	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Laba Rugi Komprehensif	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif lain	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	149.028.783	161.391.919	-	310.420.702
Imbalan Pascakerja	-	16.835.253	13.023.877	29.859.130
Kompensasi Kerugian	-	523.769.620	-	523.769.620
Jumlah	<u>149.028.783</u>	<u>701.996.792</u>	<u>13.023.877</u>	<u>864.049.452</u>

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan mencatat manfaat karyawan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Liabilitas imbalan pascakerja tersebut berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh Karyawan sampai dengan tanggal posisi keuangan dan diakui dengan metode akrual. Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang dilakukan oleh Manajemen.

	2025	2024
Saldo awal tahun	135.723.317	-
Pembayaran manfaat	-	-
Penyesuaian beban manfaat karyawan	24.182.033	76.523.877
Penghasilan komprehensif lain	103.246.482	59.199.440
Saldo akhir tahun	263.151.832	135.723.317

Perhitungan imbalan kerja perusahaan dilakukan Manajemen dengan metode *projected unit credit*. Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Tingkat diskonto	6,00%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	3,00%
Umur pensiun	58 Tahun

20. EKUITAS

Terdiri dari:

	2025	2024
Penempatan Modal Daerah - Tunai	80.000.000.000	80.000.000.000
Saldo Laba - Awal Tahun	(2.895.126.549)	(1.511.975.838)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(20.271.177.029)	(1.383.150.711)
Saldo Laba - Akhir Tahun	(23.166.303.578)	(2.895.126.549)
Jumlah Ekuitas	56.833.696.422	77.104.873.451

21. PENDAPATAN USAHA

Terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan Perdagangan Umum	35.068.748.817	30.414.529.018
Pendapatan Perdagangan Digital	61.728.198.272	30.340.780.318
Pendapatan Kerjasama dan Kemitraan	705.562.197	23.933.673.983
Pendapatan ABM Mart	4.213.533.647	7.668.887.582
Jumlah	101.716.042.933	92.357.870.901

Pendapatan diperoleh dari kegiatan usaha penjualan produk pangan dan makanan retail. Pendapatan terbesar diterima dari Biro Umum Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp19.844.882.317 dengan 19,51% (sembilan belas koma lima satu persen) terhadap jumlah pendapatan.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

22. HARGA POKOK PENJUALAN

Terdiri dari:

	2025	2024
HPP - Perdagangan Umum	35.704.731.398	31.550.774.084
HPP - Perdagangan Digital	60.537.858.607	29.630.257.272
HPP - Perdagangan Kerjasama dan Kemitraan	444.022.722	19.751.260.342
HPP - ABM Mart	2.538.626.026	7.545.050.115
Jumlah	<u>99.225.238.753</u>	<u>88.477.341.813</u>

23. BEBAN PENJUALAN

Terdiri dari:

	2025	2024
Beban Pemasaran	60.385.648	243.301.960
Beban Kerjasama dan Proyek	11.854.850	18.764.895
Beban Produksi dan Gudang	269.716.876	226.725.315
Beban Distribusi	417.889.159	335.431.757
Beban Teknologi Informasi	794.930.576	564.889.997
Beban Penyusutan	325.866.346	-
Jumlah	<u>1.880.643.455</u>	<u>1.389.113.924</u>

24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Terdiri dari:

	2025	2024
Beban Personal	3.891.339.999	4.453.521.072
Beban Kantor	888.922.374	1.071.813.788
Beban Penyusutan	253.786.158	370.652.117
Beban Penyisihan dan Penurunan Aset	22.347.412.926	733.599.633
Beban Pajak	256.894.581	124.538.850
Beban Umum Lainnya	364.191.904	776.351.642
Jumlah	<u>28.002.547.942</u>	<u>7.530.477.102</u>

Pada tahun berjalan, Perusahaan mengidentifikasi adanya transaksi yang terindikasi sebagai penyimpangan (*fraud*) yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Berdasarkan hasil penelaahan internal yang dilakukan oleh Manajemen, Perusahaan telah mengakui dampak dari kejadian tersebut sebagai beban kerugian pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif sebesar Rp20.400.000.000.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas kemungkinan pemulihan atas dana tersebut. Namun demikian, mengingat terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dengan jumlah dana yang dapat dipulihkan serta waktu penerimaannya, Perusahaan tidak mengakui klaim pemulihan tersebut sebagai aset pada laporan posisi keuangan.

Sehubungan dengan kejadian penyimpangan (*fraud*), Perusahaan telah menempuh upaya hukum untuk memperoleh pemulihan atas dana yang disalahgunakan.

Pada tanggal laporan keuangan, proses penyelesaian perkara masih dalam tahap persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, hasil akhir dari proses hukum tersebut serta jumlah dana yang dapat dipulihkan oleh Perusahaan masih belum dapat ditentukan secara pasti.

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

25. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan Bunga		
Jasa Giro	47.831.802	15.568.133
Deposito	1.206.817.152	1.367.997.986
Pendapatan Lainnya	141.849.305	1.629.600.797
Beban Lain		
Beban Administrasi Bank	(124.006.111)	(26.736.155)
Beban Pajak Bank	(25.448.881)	(6.313.786)
Beban Lainnya	(8.600.000)	(26.202.540)
Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain	1.238.443.267	2.953.914.435

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

a. Hubungan dengan Pihak Berelasi

Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nama Pihak	Sifat Berelasi
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Satu Pengendali
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	Satu Pengendali
PT Bank Perekonomian Rakyat Serang	Satu Pengendali
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Satu Pengendali
UPT RSUD Banten	Satu Pengendali
Biro Umum	Satu Pengendali
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	Satu Pengendali
Inspektorat	Satu Pengendali
Badan Kepegawaian Daerah	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Satu Pengendali
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan	Satu Pengendali
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Satu Pengendali
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Satu Pengendali
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Satu Pengendali
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Satu Pengendali
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Satu Pengendali
Biro Hukum	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Satu Pengendali

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Nama Pihak	Sifat Berelasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Satu Pengendali
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satu Pengendali
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Satu Pengendali
UTPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Satu Pengendali
Dinas Perikanan	Satu Pengendali
DP3AP2KB	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Satu Pengendali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Satu Pengendali
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Satu Pengendali
Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Satu Pengendali
Dinas Pariwisata	Satu Pengendali
Dinas Perhubungan	Satu Pengendali
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Satu Pengendali
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Pengendali
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Satu Pengendali
UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	Satu Pengendali
Dinas Energi dan SDM	Satu Pengendali
Dinas Sosial	Satu Pengendali
Dinas Ketahanan Pangan	Satu Pengendali
Biro Umum dan Perlengkapan	Satu Pengendali
Dinas Koperasi UMKM	Satu Pengendali

b. Transaksi Berelasi

	2025
Pendapatan Usaha	
Pendapatan Digital	
Biro Umum	19.844.882.317
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten	3.747.848.007
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	3.070.784.600
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.806.703.520
DP3AP2KB	2.792.010.331
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.408.696.417
Biro Umum dan Perlengkapan	2.204.144.375
Dinas Perikanan	2.097.639.803
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.943.316.436
Inspektorat	1.825.867.574
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.605.806.667
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.148.276.175
Dinas Perhubungan	1.105.912.008
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.078.705.078
Subjumlah (dipindahkan)	47.680.593.308

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi Berelasi (lanjutan)

	2025
Subjumlah (pindahan)	47.680.593.308
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	942.518.610
Badan Kepegawaian Daerah	933.822.544
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	880.294.087
Dinas Pariwisata	570.241.879
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	562.399.205
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan	555.210.658
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	536.498.418
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	479.325.478
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	462.874.229
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	454.778.967
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	435.836.354
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	397.633.168
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	375.197.569
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	323.304.627
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	296.666.329
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	265.989.332
UTPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	251.741.173
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	220.418.012
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	167.300.976
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	167.205.696
UPT RSUD Banten	129.687.800
Dinas Energi dan SDM	59.825.665
Dinas Sosial	43.626.700
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	41.935.142
Biro Hukum	41.119.650
UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	17.223.660
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.500.000
Dinas Ketahanan Pangan	7.205.200
Jumlah	57.316.974.436
Pendapatan Kerjasama dan Kemitraan	
Dinas Ketahanan Pangan	261.779.277
Dinas Koperasi UMKM	120.852.695
Jumlah	382.631.972

PT AGROBISNIS BANTEN MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Satuan Rupiah)

26. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo dengan Pihak Berelasi

	<u>2025</u>
Bank	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	4.185.958.082
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	220.869.887
PT Bank Perekonomian Rakyat Serang	177.545.807
Deposito Berjangka	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	14.000.000.000

27. INFORMASI DAN PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, terdapat perkembangan proses hukum di Pengadilan Tinggi Banten yang melibatkan mantan Plt. Direksi Perusahaan terkait dugaan tindak pidana dalam kegiatan kerja sama usaha yang terjadi pada tahun 2025.

Perkara dimaksud sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus Kejaksaan Tinggi Banten dalam penanganan kasus tersebut adalah pada aset *recovery* atas kerugian negara yang terjadi. Oleh karena itu, Manajemen belum dapat menentukan secara pasti dampak yang mungkin timbul terhadap posisi keuangan Perusahaan.

Dalam penanganan kasus tersebut di Kejaksaan Tinggi Banten, pihak penyidik telah menyita sejumlah barang sebagai barang bukti dalam perkara tersebut berupa: (1) Uang tunai sebesar Rp5.280.000.000, yang sudah ditransfer ke rekening RPL 020 PDT Kejari Serang pada tanggal 13 Februari 2026; (2) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Zenix beserta STNK atas nama Sdr. AAW sebagai Direktur PT. KAN; (3) 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno milik Sdr. YU (Plt Direktur PT. ABM); (4) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A55 5G milik Sdr. AAW (Direktur PT. KAN); (5) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau; dan (6) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru. Barang sitaan tersebut, apabila proses persidangan telah selesai dan para terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan dijadikan sebagai objek untuk memenuhi aset *recovery* dalam kasus tersebut.

Saat proses penyelesaian laporan ini, penanganan perkara tersebut masih berjalan di Kejaksaan Tinggi Banten. Dan berdasarkan informasi yang tersedia, pada tanggal 5 Maret 2026 telah dilaksanakan sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang terhadap pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Manajemen menyatakan akan mengikuti perkembangan proses hukum yang berlangsung serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No : 237/DIR-BB/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Set)

Serang, 25 Februari 2026

Kepada Yth.

Bapak Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten

Jl. Syech Nawawi Al Bantani

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang
Provinsi Banten

**Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* periode 31 Desember 2025
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

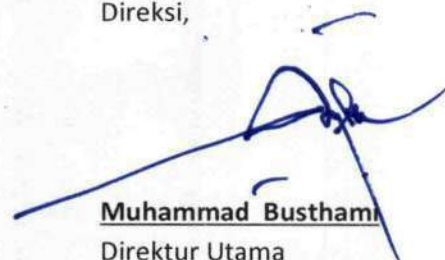
Terlampir kami sampaikan Laporan Keuangan (*Audited*) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk

Direksi,



Muhammad Busthami

Direktur Utama

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**

LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2025 /

As of and For the Year Ended December 31, 2025

dan/ and

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

***DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025***

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned:

1. Nama	Muhammad Busthami	<i>Name</i>
Alamat kantor	Jl. Veteran No. 4, Kel. Cipare Kec. Serang, Banten	<i>Office address</i>
Alamat domisili	Kp. Melayu Barat No. 1 RT 008 RW 006, Kel. Bukit Duri Kec. Tebet, Jakarta Selatan	<i>Domicile address</i>
Nomor telepon	0254 - 7914966	<i>Telephone</i>
Jabatan	Direktur Utama / <i>President Director</i>	<i>Title</i>

Menyatakan bahwa:

Declared that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk;</i> |
| 2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. <i>a. All information presented in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk do not contain any incorrect material information or fact nor omit any material information or fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk | 4. <i>Responsible for the internal control system of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Serang, 25 Februari 2026/February 25, 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk



Muhammad Busthami
Direktur Utama/President Director

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman /</u> <u>Page</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI / STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	i – vi
LAPORAN KEUANGAN PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 / FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025	
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	1 -2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY	4
LAPORAN ARUS KAS / STATEMENT OF CASH FLOWS	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	6 – 99

Laporan Auditor Independen

00006/3.0409/AU.1/07/0126-2/1/II/2026

**Para Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk (Bank) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia. Dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan telah mencatat akumulasi rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.778.249 juta atau 59,24% dari jumlah modal saham dan tambahan modal disetor Bank. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2025 Bank mencatat modal inti hanya sebesar Rp1.415.692 juta. Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Independent Auditor's Report**The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk****Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk (Bank), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statement, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk as of December 31, 2025, and their financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Material Uncertainty Related to Business Continuity

As disclosed in Note 40 to the attached financial statements, the Company has recorded an accumulated net loss for the year ending December 31, 2025 amounting to Rp2,778,249 million or 59.24% of the total share capital and additional paid-in capital of the Bank. In addition, on December 31, 2025 the Bank recorded core capital of Rp1,415,692 million. These conditions, along with other matters disclosed in Note 40 to the attached financial statements, indicate the existence of a material uncertainty which may cause significant doubt regarding the Company's ability to maintain its business continuity. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Selain hal yang diuraikan dalam paragraph Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha, kami telah menentukan hal-hal yang diuraikan dibawah ini sebagai hal audit utama yang dikomunikasikan dalam laporan kami.

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 10 tentang kredit yang diberikan atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah mengakui kredit yang diberikan sebesar Rp5.069.373 juta dan telah menghitung cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp180.621 juta.

Cadangan penurunan nilai atas kredit yang diberikan dihitung oleh manajemen menggunakan metode Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") sesuai dengan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung cadangan penurunan nilai:

- **Penilaian Individual**
Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian secara individual dengan membandingkan antara nilai tercatat kredit yang diberikan dengan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan diterima oleh Bank baik yang bersumber dari pembayaran pokok dan/atau bunga, maupun arus kas dari penjualan jaminan, untuk kredit yang diberikan yang memiliki nilai cukup signifikan dan terdapat bukti objektif penurunan nilai.
- **Penilaian Kolektif**
Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian secara kolektif menggunakan teknik *statistical based* yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan *discount factor*, untuk kredit yang diberikan yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan kredit yang diberikan yang terdapat bukti objektif penurunan nilai namun tidak bernilai signifikan.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal audit utama karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan penilaian memerlukan pertimbangan signifikan manajemen dan perhitungan menggunakan estimasi dan asumsi yang memiliki ketidakpastian yang tinggi yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan Bank.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matters described in the Material Uncertainties Relating to Going Concern paragraph, we have determined the matters described below to be the primary audit matters communicated in our report.

Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans

As disclosed in Note 10 regarding loans to the attached financial statements, as of December 31, 2025, the Bank has recognized the loans amounting to Rp5,069,373 million and has calculated the allowance for impairment losses on loans amounting to Rp180,621 million.

Allowance for impairment of loans is calculated by management using the Expected Credit Loss method ("ECL") in accordance with PSAK 109, "Financial Instruments".

Approach used in calculating allowance for impairment:

- **Individual Assessment**
The Bank calculates the expected credit loss individually by comparing the carrying amount of the loan with the present value of the future cash flows expected to be received by the Company, either from principal and/or interest payments, as well as cash flows from the sale of guarantees, for loans which has a significant value and there is objective evidence of impairment.
- **Collective Assessment**
The Bank calculates the expected credit losses collectively using statistical-based techniques that use several main parameters, consist of, probability of default, loss given default, exposure at default and discount factor, for loans which there is no objective evidence of impairment and loans with objective evidence of impairment but not significant.

The calculation of the allowance for impairment losses on loans is the key audit matter because the carrying amount of loans and valuations requires significant management judgment and calculations using estimates and assumptions that have high uncertainty which could have a material impact on the Bank financial statements.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama, kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi atas pinjaman yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau menunjukkan bukti objektif penurunan nilai.
- Melakukan uji petik atas pinjaman yang diberikan dan mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dan membandingkan hasilnya dengan penilaian manajemen.
- Menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai atas pinjaman yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai.
- Menilai metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian secara kolektif, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default* dan melakukan perhitungan ulang.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 12 atas laporan keuangan terlampir, Bank telah mencatat biaya dibayar dimuka atas laporan keuangan terlampir, bahwa dalam rangka bagian dari penyehatan, Bank telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida) terkait penjaminan kredit mikro dengan nilai penjaminan sebesar Rp800.000 juta sejak tahun 2021. Berdasarkan sertifikat penjaminan sejak 2021, Bank telah mengikat kredit kepada Jamkrida dengan nilai kredit sebesar Rp771.221 juta, dan Rp170.090 juta. Bank telah membuat Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Proses Akuntansi Atas Transaksi Penjaminan Jamkrida, sekaligus merevisi Memorandum tentang mekanisme Hapus Buku Kredit Mikro dan amortisasi selama jangka waktu sertifikat penjaminan. Perjanjian penjaminan tersebut telah mempengaruhi penyesuaian jumlah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit dan jumlah amortisasi selama periode waktu kontrak penjaminan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan terlampir, bahwa dalam rangka proses penyehatan Bank sejak tahun 2020, manajemen Bank telah melakukan penangguhan biaya bersih sebesar Rp892.548 dan Rp472.076 pada periode 31 Desember 2025 dan 2024, terkait penangguhan biaya tersebut akan diamortisasi secara proporsional selama periode waktu yang sudah ditentukan oleh manajemen Bank dengan mempertimbangkan kondisi Keuangan Bank, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Bank dan telah dikomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO

How our audit addressed to key audit matters, we perform audit procedures on this including:

- *Understand and test relevant controls over the identification of loans that have significantly increased credit risk or show objective evidence of impairment.*
- *Conduct a sampling test on loans and evaluate whether there is a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment and compare the results with management's assessment.*
- *Assess the adequacy of the allowance for impairment on loans that have a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment by examining both the amount and timing of future cash flows used by the Bank in calculating impairment losses.*
- *Assessing the methodology and assumptions used in calculating expected credit losses collectively, including determining the probability of default, loss given default and exposure at default and performing recalculation.*

Emphasis of matter

As disclosed in Note 12 to the attached financial report, the Bank has recorded prepaid expenses in the attached financial report, that as part of the restructuring, the Bank has entered into a Cooperation Agreement with PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida) regarding microcredit guarantees with a guarantee value amounting to Rp800,000 million since 2021. Based on the guarantee certificate since 2021, the Bank has committed credit to Jamkrida with a credit value of Rp771,221 million and Rp170,090 million. The Bank make Technical Instructions on the Accounting Process Mechanism for Jamkrida Guarantee Transactions, as well as revise the Memorandum on the Micro Credit Write-Off mechanism and amortization over the term of the guarantee certificate. The guarantee agreement has influenced the adjustment in the amount of allowance for credit impairment losses and the amount of amortization during the period of the guarantee contract. Our opinion is not modified in respect of this matter.

As disclosed in Note 16 to the attached financial statements, that in the context of the Bank's recovery process since 2020, the Bank's management has deferred net costs of Rp892,548 and Rp472,076 for the period of December 31, 2025 and 2024, related to has deferred cost are amortized proportionally over a period of time determined by the Bank's management by considering the Bank's financial condition, which has previously received approval from the Bank's controlling shareholders and has been communicated to the Financial Services Authority. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak dan tidak akan menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan mengambil Tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya. Hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO

Others Information

Management is responsible for other information. Other information consists of information contained in the annual report, but does not include our financial statements and auditor's report. The annual report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not include other information, and therefore, we do not and will not express any form of confidence in such other information.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether such other information contains material inconsistencies with the financial statements or the understanding we obtained during the audit, or contains material information misstatement.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate this to those charged with governance and take appropriate action based on the Auditing Standards established by the Institute of Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami, keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut. Serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajiban estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit based on the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether caused by fraud or error, design and implement audit procedures that are responsive to these risks. And obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that caused by error, because fraud may involve collusion, forgery, omission, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the accounting estimation obligations and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDA, SUHARTONO



Florus Daeli, SE., Ak., MM., CA., CPA., CRA., CLI., CFI., CACP., ASEAN CPA
No. Ijin AP.0126/License No. AP. 0126

Jakarta, 25 Februari/ February 25, 2026
00006/3.0409/AU.1/07/0126-2/1/II/2026



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

Aset	Catatan/ Notes	2025	2024	Assets
Kas	2e,4,37,38,39	183.498	133.328	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2e,2f,5,37,38,39	731.471	456.348	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	2e,2f,6,37,38,39	27.190	11.513	Current accounts in other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2f,2g,7,37,38,39	818.409	450.583	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	2g,2q,8,37,38,39	1.005.527	1.053.236	Securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2g,2q,9,37,38,39	108.734	-	Securities purchased under agreement to resell
Kredit pihak ketiga - setelah di kurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 180.621 dan Rp 243.641	2h,2i,2r,3,10,37 38, 39	4.888.752	3.607.640	Loan third parties - net allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp 180,621 and Rp 243,641, respectively
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11,38,39	34.242	25.042	Accrued interest receivable
Biaya dibayar dimuka	2i,12	753.219	779.365	Prepaid expenses
Aset tetap dan Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 322.550 dan Rp 319.307	2k,13,37	168.008	28.176	Fixed assets and right of use of assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp322,550 and Rp319,307 respectively
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.252	2l,14	2.371	2.371	Foreclosed asset - net allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounting Rp 1,252 respectively
Aset pajak tangguhan	2u,3,32b	230.850	350.240	Deferred tax assets
Aset tak berwujud	2m, 15	80.386	28.708	Intangible assets
Aset lain-lain	16,37,38	968.789	624.562	Others assets
JUMLAH ASET		10.001.445	7.551.112	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2n,16,37	100.017	142.370	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	2o,18,37,38			Deposit from customers
- Pihak ketiga		6.398.400	4.395.442	- Third parties
- Pihak berelasi		21.915	460.399	- Related parties
Simpanan dari bank lain	2p,19,37,38			Deposits from other banks
- Pihak ketiga		1.269.615	690.731	- Third parties
- Pihak berelasi		4.013	3.297	- Related parties
Utang pajak	2u,20	13.060	3.982	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	2v,32	36.678	31.811	Post employments benefit liabilities
Liabilitas lain-lain	21,37	257.591	119.382	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8.101.289	5.847.415	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham untuk seri A dan Rp180 (nilai penuh) untuk seri B dan Rp50 (nilai penuh) untuk seri C. Modal dasar - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 45.459.495.228 saham seri C. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.075.511.715 saham seri A dan 5.335.431.323 saham seri B dan 45.459.495.228 saham seri C pada 31 Desember 2025 dan 2024	22	4.308.864	4.308.864	Share capital - Rp1,000 (full amount) par value per share for A series share and Rp180 (full amount) for B series share and Rp50 (full amount) for C series share. Authorized - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 45,459,495,228 C series shares. Issued and fully paid - 1,075,511,715 A series shares and 5,335,431,323 B series shares and 45,459,495,228 C series shares as of December 31, 2025 and 2024
Tambahan modal disetor	23	381.044	241.475	Additional paid-in capital
Laba belum direalisasi atas nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Unrealized gain on fair value through other comprehensive income
Kerugian aktuarial setelah pajak		(11.503)	(15.871)	Actuarial loss net off taxes
Saldo rugi		(2.778.249)	(2.830.771)	Net loss
JUMLAH EKUITAS		1.900.156	1.703.697	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		10.001.445	7.551.112	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	2s,24,36	570.495	491.804	Interest income
Beban bunga	2s,25	(371.804)	(302.443)	interest expense
Pendapatan bunga - bersih		198.691	189.361	Interest income - net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Administrasi	26	76.348	43.153	Administrative
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pada laporan laba rugi - bersih		20	-	Gain from charges in fair value of financial assets at fair value through profit and loss-net
Lain-lain bersih		9.885	12.924	Others - net
		86.253	56.077	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		284.944	245.438	TOTAL OPERATING INCOME
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan - bersih	27	63.020	122.113	Provision of impairment reverse (losses) on financial assets - net
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Umum dan administrasi	28	(158.769)	(143.437)	General and administrative
Tenaga kerja dan tunjangan	29	(129.669)	(127.961)	Employment and benefits
		(288.438)	(271.398)	
LABA OPERASIONAL - BERSIH		59.526	96.153	NET OPERATING GAIN
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	30	(3.054)	(21.156)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		56.472	74.997	GAIN BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME (EXPENSES) TAX BENEFIT
Pajak tangguhan	2u,31d	(3.950)	(35.667)	Deferred tax
LABA BERSIH		52.522	39.330	NET GAIN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :				Item that would never be reclassified to profit loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial		(3.299)	(1.583)	Actuarial gain (loss)
Pajak tangguhan		726	348	Deferred tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				Item that would be reclassified to profit loss
Perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		2.174	(6.724)	Changes in fair value through other comprehensive income
Pajak tangguhan		(478)	1.479	Deferred tax
		(876)	(6.480)	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		51.646	32.850	TOTAL COMPREHENSIVE GAIN
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (nilai penuh)	2w,33	1,01	0,75	BASIC GAIN PER SHARE AND DILUTED (full amount)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share capital - authorized issued and fully paid	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Penghasilan Komprehensif lain/Other Comprehensive Income	Saldo rugi/Net loss	Jumlah ekuitas/Total equity	
Saldo per 1 Januari 2024	4.308.864	241.475	(11.173)	(2.870.101)	1.669.065	Balance as of January 1, 2024
Keuntungan aktuarial - bersih	-	-	(1.235)	-	(1.235)	Actuarial loss -net
Rugi belum direalisasi atas nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain- bersih	-	-	(3.463)	-	(3.463)	Unrealized loss on fair value through other comprehensive income-net
Jumlah rugi bersih periode berjalan	-	-	-	39.329	39.329	Total net loss for the current year
Saldo per 31 Desember 2024	4.308.864	241.475	(15.871)	(2.830.771)	1.703.697	Balance as of December 31, 2024
Kerugian aktuarial - bersih	-	-	(2.574)	-	(2.574)	Actuarial Loss- net
Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain- bersih	-	-	6.942	-	6.942	Unrealized gain on fair value through other comprehensive income-net
Dana setoran modal	-	139.569	-	-	139.569	Capital deposit fund
Jumlah laba bersih tahun berjalan	-	-	-	52.522	52.522	Total net gain for the current year
Saldo per 31 Desember 2025	4.308.864	381.044	(11.503)	(2.778.249)	1.900.156	Balance as of December 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		561.295	491.275	Receipts of interest
Pembayaran bunga		(366.489)	(300.686)	Payment of interest
Penghasilan operasional lainnya - bersih		86.233	56.077	Receipts of other operating income - net
Pembayaran beban umum dan administrasi		(148.608)	(129.413)	Payment of general and administrative expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan		(124.087)	(122.952)	Payment of personal expenses and benefit
Pendapatan non operasional - bersih		39.508	93.112	Receipts of non-operating expenses - net
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		47.853	87.413	Cash flow before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (Kenaikan) aset operasi :				Decrease (increase) in operating assets:
Efek-efek	8	47.709	(293.415)	Securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	(108.734)	-	Securities purchased under agreement to resell
Kredit	10	(1.281.113)	(273.282)	Loans
Biaya dibayar dimuka	12	26.146	21.480	Prepaid expenses
Agunan yang diambil alih dan aset lain-lain	14,16	(395.906)	(51.422)	Foreclosed asset and other assets
Kenaikan (Penurunan) liabilitas operasi :				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	17	(47.670)	(182.601)	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	19	1.564.473	1.117.527	Deposit from customer
Simpanan dari bank lain	20	579.601	(57.621)	Deposit from other banks
Utang pajak	21	9.077	(81)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	22	138.209	(16.411)	Other liabilities
Liabilitas atas efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	18	-	(150.880)	Securities sold under repurchase agreement securities
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) aktivitas operasi		531.792	113.294	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	13	(8.634)	(2.906)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset sewa guna usaha	13	(1.786)	(6.695)	Acquisition of leased assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(10.420)	(9.601)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Dana setoran modal	24	139.569	-	Capital deposit fund
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		139.569	-	Net cash used in financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		708.795	191.105	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH EQUIVALENTS AND CASH
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1.051.772	860.666	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		1.760.567	1.051.772	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE ENDING OF YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				Cash and cash equivalents at the end of year consist of :
Pengungkapan tambahan				Supplemental disclosures
Kas dan setara kas terdiri dari :				Cash and cash equivalents consist of :
Kas	4	183.498	133.328	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	731.471	456.348	Current account with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	6	27.190	11.513	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	818.409	450.583	Placements with Bank Indonesia and other banks
		1.760.567	1.051.772	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("Bank"), didirikan pada tanggal 11 September 1992. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Nopember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992.

Bank memulai aktivitas operasi di bidang perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 36 tanggal 14 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0012108.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar pada Akta No. 104 tanggal 30 Juni 2010 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" telah berubah nama menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-37404.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Periasman Effendi No. 09 tanggal 20 Desember 2022 tentang perubahan direksi dan komisaris. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH 01.09-0109622 tanggal 23 Desember 2022.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No.673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk ("the Bank") was established on September 11, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on November 10, 1992 and published in Supplement No. 6651 of the State Gazette of Republic Indonesia No. 103 dated December 26, 1992.

The Bank started its commercial banking operations on August 9, 1993.

Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No. 36 dated June 14, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, "PT Bank Pundi Indonesia Tbk" has changed its name to "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk". These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0012108.AH.01.02 Year 2016 dated June 27, 2016. The change in the Bank's name had been approved by Indonesia Financial Services Authority (OJK) through Decision Letter of the Commissioner of Indonesia Financial Services Authority No. 12/KDK.03/2016 dated July 29, 2016.

Based on the Bank's Articles of Association's amendment by Deed No. 104 dated June 30, 2010 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, "PT Bank Eksekutif Internasional Tbk" has changed its name to "PT Bank Pundi Indonesia Tbk". These amendment were approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-37404.AH.01.02 Year 2010 dated July 28, 2010. The change in the Bank's name had been approved by Bank Indonesia through Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/58/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notary Deed of Periasman Effendi No. 9 dated December 20, 2022 concerning changes to the directors and commissioners. Amendments to these Articles of Association have been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Letter No. AHU-AH.01.09-0109622 dated December 23, 2022.

The Bank obtained a license as a commercial bank based on the decision letter No.673/KMK.017/1993 of the Minister of Finance dated June 23, 1993.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sesuai dengan Akta pernyataan keputusan rapat No.08 Tanggal 08 Maret 2023 dari Periasman Effendi Notaris kota Tangerang " PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk" telah berubah nama menjadi " PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk". Perubahan anggaran dasar ini berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, termasuk perubahan nama dan status perseroan serta peralihan saham perseroan berdasarkan peraturan daerah Provinsi Banten No.05 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang pendirian perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Veteran No 6, RW 8, Cipare, Kecamatan Serang, Banten. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 jumlah jaringan cabang-cabang dan kantor-kantor pembantu Bank adalah sebagai berikut:

	2025
Kantor Pusat	1
Kantor Cabang	20
Kantor Cabang Pembantu	17
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank memiliki masing-masing 122 dan 149, Anjungan Tunai Mandiri (ATM).	

b. Penawaran Umum

Pada tanggal 22 Juni 2001, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No.S-1531/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp140 (nilai penuh) per saham. Secara bersamaan diterbitkan 55.500.000 Waran Seri I yang menyertai seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut secara cuma-cuma. Waran tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga Rp175 (nilai penuh) per saham mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai dengan tanggal 12 Juli 2004. Pada tanggal 13 Juli 2001, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Pada tanggal 31 Desember 2004, tidak ada waran yang dikonversi menjadi saham dan semua hak untuk membeli saham sudah berakhir.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In accordance with the Deed of Meeting Decision Statement No. 08 dated March 8, 2023 from Periasman Effendi, Notary of Tangerang City, "PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk" has changed its name to "PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk". This change in the articles of association is based on the regulation of the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia No. 17 of 2023 concerning the implementation of governance for general banks, including changes in the name and status of the company and the transfer of company shares based on the regional regulation of Banten Province No. 05 of 2023 dated December 27, 2023 concerning the establishment of a limited liability company Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk.

The Bank's head office is located in Jl. Veteran No 6, RW 8, Cipare, Kecamatan Serang, Banten. As of December 31, 2025 and 2024 the number of the Bank's branches and representative offices were as follows:

	2025	2024	
Kantor Pusat	1	1	Head Office
Kantor Cabang	20	20	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	17	17	Supporting Branch Office
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 the Bank owns 122 and 149, Automated Teller Machines (ATMs), respectively.			

b. Public Offering

On June 22, 2001, the Bank obtained approval from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) in his letter No. S-1531/PM/2001 to offer its shares to the public at a maximum of 277,500,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share for an offering price of Rp140 (full amount) per share. Simultaneously, the Bank issued 55,500,000 Series I Warrants accompanying the shares offered in the Public Offering. The warrants entitle the holder to purchase newly issued shares of the portfolio with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at a price of Rp175 (full amount) per share from January 13, 2003 until July 12, 2004. On July 13, 2001, these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange). As of December 31, 2004, no conversion of warrants is made and all the rights to purchase through warrants has expired.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum (lanjutan)

Untuk meningkatkan permodalan Bank, yang berdampak terhadap peningkatan jumlah efek, Bank telah melakukan beberapa aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-5949/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sejumlah 5.122.500.000 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 saham lama berhak membeli 6 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 15 September 2011, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. 10116/BL/2011 untuk melakukan penawaran umum terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 3.282.262.230 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 6 saham lama berhak membeli 5 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. 10485/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 1.496.604.923 saham biasa. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 saham lama berhak membeli 27 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp120 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 29 Juli 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-384/D.04-16 untuk melakukan penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham berjumlah 35.416.600.785 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham yang memiliki 1.000 saham biasa seri A berhak membeli 3.293 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp18 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering (continued)

To increase the capital of the Bank, which resulted in increased number of shares, the Bank has conducted several corporate actions such as limited public offering rights issue, as described below:

- On June 30, 2010, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) in his Letter No. S-5949/BL/2010 related to its approval of the limited public offering I for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders at 5,122,500,000 common shares. The holder can exercise the right to purchase 6 new shares for every 1 share held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp100 (full amount) per share.
- On September 15, 2011, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Bapepam-LK in his Letter No. 10116/BL/2011 related to its approval of the limited public offering II for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 3,282,262,230 common shares. The holder can exercise the right to purchase 5 new shares for every 6 shares held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp100 (full amount) per share.
- On August 30, 2012, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Bapepam-LK in his Letter No. 10485/BL/2012 related to its approval of the limited public offering III for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 1,496,604,923 common shares. The holder can exercise the right to purchase 27 new shares for every 100 shares held with a nominal value of Rp100 (full amount) per share at Rp120 (full amount) per share.
- On July 29, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority in his Letter No. S-384/D.04-16 related to its approval of the limited public offering IV for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 35,416,600,785 common shares series B. The holder can exercise the right to purchase 3,293 common shares series B for every 1,000 common shares series A held with a nominal value of Rp18 (full amount) per share at Rp18.35 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum (lanjutan)

- Pada tanggal 24 November 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-694/D.04-16 untuk melakukan penawaran umum terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham berhak membeli 777 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp18 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham.
- Pada tanggal 8 Desember 2020, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-286/D.04-2020 untuk melakukan penawaran umum terbatas VI dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham, sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
- Pada tanggal 30 September 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-177/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum terbatas VII dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham, sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 51.870.438.266 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Susunan Pengurus Bank

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH No. 14 tanggal 26 Agustus 2025, Notaris di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Hoiruddin Hasibuan ¹⁾	Hoiruddin Hasibuan ¹⁾
Komisaris Independen	Deden Riki Hayatul Firman ²⁾	Deden Riki Hayatul Firman ²⁾
Komisaris	Rini Dewiyantri ³⁾	Usman Asshiddiqi Qohara)
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Muhammad Busthami)	Muhammad Busthami)
Direktur	Bambang Widyatmoko)	Bambang Widyatmoko)
Direktur	Rodi Judo Dahono)	Rodi Judo Dahono)
Direktur	Eko Virgianto)	Eko Virgianto)

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering (continued)

- On November 24, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority in his Letter No. S-694/D.04-16 related to its approval of the limited public offering V for the issuance of pre-emptive rights for existing shareholders amounting to 17,937,712,419 common shares series B. The holder can exercise the right to purchase 777 common shares series B with a nominal value of Rp18 (full amount) per share at Rp18.35 (full amount) per share.
- On December 8, 2020, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority with its letter No. S-286/D.04-2020 to conduct a limited public offering VI in the framework of issuing Pre-emptive Rights (HMETD) to shareholders, in accordance with applicable capital market regulations.
- On September 30, 2021, the Bank obtained an effective statement from the Financial Services Authority with its letter No. S-177/D.04/2021 to conduct a limited public offering VII in the context of the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) to shareholders, in accordance with the applicable capital market regulations.

Total of Bank's shares listed on the Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2025 and 2024 and 51,870,438,266 shares.

c. Composition of the Bank's Management

On December 31, 2025 and 2024, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors was based on Notary Deed of Syarifudin No. 14 dated August 26, 2025, Notary in Tangerang City, is as follows:

<u>Board of Commissioners</u>
President Commissioners
Commissioners Independen
Commissioners
<u>Board of Directors</u>
President Director
Director
Director
Director

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus Bank

- ¹⁾ Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen berdasarkan surat Keputusan OJK No. KEPR-126/D.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024.
- ²⁾ Diberhentikan dengan hormat pada 10 April 2025.
- ³⁾ Diangkat sebagai Komisaris *non independent* berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-92/D.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
<u>Komite Audit</u>	
Ketua, merangkap anggota	Deden Riki Hayatul Firman
Anggota	Hoiruddin Hasibuan Douval Hendra Suparyadi

Susunan *Corporate Secretary* dan Ketua Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
Sekretaris Perusahaan	Ferdy Ardian
Ketua Satuan Kerja Audit Internal	Dewi Noorirdawati

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 904 dan 855 karyawan (tidak diaudit).

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's Management

- ¹⁾ *Complied the fit and proper test as Commissioners Independent from Indonesia Financial Services Authority through letter No. KEPR-126/D.03/2024 as of October 18, 2024.*
- ²⁾ *Honorably discharged on April 10, 2025.*
- ³⁾ *Appointed as a non-independent Commissioner based on the decision of the OJK Board of Commissioners Members No. KEPR-92/D.03/2025 dated August 5, 2025.*

The Bank's Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024		<u>Audit Committee</u>
Hoiruddin Hasibuan			<i>Chairman, concurrent member</i>
Douval			<i>Members</i>
Moh. Panji Prasetyo			

The Bank's Corporate Secretary and Head of Internal Audit as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024		<i>Company Secretary Head of Internal Audit</i>
Ferdy Ardian			
Dewi Noorirdawati			

As of December 31, 2025 and 2024 the Bank has a total of 904 and 855 employees, respectively (unaudited).

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors, Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK No. 224 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Bank; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci dari Bank ataupun entitas induk dari Bank.
- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Bank jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - (i) entitas tersebut dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - (ii) merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Bank (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana Bank adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
 - (iii) entitas tersebut dan Bank adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari asosiasi Bank atau asosiasi dari ventura bersama dari Bank;
 - (v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank. Bank adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Bank;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis measurement and preparation of financial statements

The financial statements have been prepared using the historical cost basis, unless otherwise stated. The preparation of these financial statements was based on accrual method, except for cash flows and certain accounts which are measured on the basis explained in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using modified direct method, with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. For the purpose of statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts in Bank Indonesia, current accounts in other banks and placements in Bank Indonesia and other banks that mature within 3 (three) months from acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which also represent the Bank's functional currency. All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Transactions with Related Parties

According to PSAK No. 224 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as:

- 1) A person or a close member of that person's family is related to Bank if that person:
 - (i) has control or joint control over the Bank;
 - (ii) has significant influence over Bank; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Bank or of a parent of the Bank.
- 2) An entity is related to Bank if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and Bank are members of the same group;
 - (ii) an associate or joint venture of the Bank (or an associate or joint venture of a member of a Bank of which the Group is a member);
 - (iii) the entity and Bank are joint ventures of the same third party;
 - (iv) the entity is a joint venture of an associate of the Bank or is an associate of a joint venture of the Bank;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to Bank. If Bank are itself such a plan, the sponsoring employers are also related to Bank;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATAERIAL (lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 224 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah: (lanjutan)

- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Bank jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini: (lanjutan)
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
 - (vii) entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

c. Pelaporan Segmen

Bank melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana bank terlibat dan lingkungan ekonomi dimana bank beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

- terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari bank yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Transactions with Related Parties (continued)

According to PSAK No. 224 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as: (continued)

- 2) An entity is related to Bank if any of the following conditions applies: (continued)
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
 - (vii) entity has significantly influenced by a person identified in (1) (i) or that person is a member of the key management personnel from the entity (or of a parent of the entity).

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

c. Segment Reporting

Bank discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the bank engages and economic environments in which it operates.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same bank);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Segment reporting made by the bank is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

I. Aset Keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ;
- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga atau solely payments of principal and interest (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ;

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasi sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch")

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments

Classification of Financial Assets and Liabilities

I. Financial Assets

The group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition :

- Financial assets measured at amortized cost,
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss ;
- Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:
- Financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- The contractual terms of the financial assets provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets ; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets measured at fair value through profit or loss ;

At initial recognition, the Bank can assign an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch")

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

II. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, atau jika Bank memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi.

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi kecuali:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
3. Kontrak jaminan keuangan.
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar.
5. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrument keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities (continued)

II. Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition;

- Financial liabilities at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified in this category if the liabilities are classified from trading activities or when the Bank elects to designate a financial liability under this category. Changes in fair value are recognized directly in the statements of profit or loss.

- Financial liabilities measured at amortized cost.

The Bank classifies all financial liabilities after initial recognition at amortized cost except:

1. Financial liabilities at fair value through profit or loss.
2. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied.
3. Financial guarantee contracts.
4. Commitment to provide loans at below market interest rates.
5. Contingent benefits recognized by the acquirer in the business combination.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are measured at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

Bank classifies the financial instruments into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification of financial instruments can be seen in the following table:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

II. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities (continued)

II. Financial Liabilities (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 109) / Category as defined by PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh Bank) / Class (as determined by the Bank)
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Efek-efek / Marketable securities
		Obligasi Pemerintah / Government Bonds
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas / Cash
		Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia
		Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ Placements with other bank and Bank Indonesia
		Tagihan lainnya/ Other receivables
		Kredit yang diberikan/ Loans
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ Accrued interest receivable
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	Efek-efek/Securities
		Obligasi Pemerintah/ Government bonds
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial liabilities at fair value through profit or loss	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ Derivative payables- non hedging related
		Liabilitas segera/ Obligation due immediately
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Simpanan nasabah/ Deposits from customers
		Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks
		Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali/ Securities sold under agreements to repurchase
		Beban yang masih harus dibayar/ Accrued expenses
		Liabilitas lain-lain/ Other liabilities

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value) dan perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. When current bid and asking prices are not available, the last price is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the transaction occurs.

For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques and comparison to similar instruments that have observable market prices.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto (*master netting agreements*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyajikan saling hapus antara aset dan liabilitas yang terkait dalam laporan posisi keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Bank menghentikan aset keuangan, jika dan hanya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir) maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan ini terpenuhi:

- Bank tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari aset awal.
- Bank tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas.
- Bank berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The master netting agreement can not be based for presenting offset between assets and liabilities related in the statement of financial position.

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

The bank discontinues a financial asset, if and only if:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Bank transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.

When an entity retains the contractual right to receive cash flows from a financial asset (the original asset), but also bears a contractual obligation to pay the cash flows received to one or more entities (the final recipient), the entity treats the transaction as a transfer of a financial asset, if and only if, all of these conditions are met:

- The bank is not required to pay a specified amount to the final recipient, unless the entity obtains a certain amount equivalent to the original asset.
- The bank is not permitted under the terms of the transfer contract to sell or pledge the original asset except to guarantee the final recipient's right to receive cash flows.
- The bank is obliged to deliver any invoiced cash flows for and on behalf of the final beneficiary without significant delay.

The financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Bank tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- Bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika hanya jika, model bisnis untuk aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Financial asset (or, where applicable, a part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- The Bank retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- The Bank has transferred their rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but have transferred control of the asset.

The financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or has expired.

Reclassification of Financial Instrument

The Bank reclassify financial assets only when the business model for financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying value and the fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income is stated at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is carried at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum diamortisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Pengakuan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instrument (continued)

Reclassification of financial assets from the fair value through other comprehensive income classification to the amortized cost classification is carried at carrying value. The unamortized gain or loss is written off from equity and adjusted for fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost is carried at fair value.

The Bank are not allowed to reclassify financial liabilities.

Recognition of Impairment of Financial Assets

The Bank recognizes an allowance for possible losses on expected credit losses on financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts that impose impairment requirements.

As of reporting date, an entity shall measure the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime, if the credit risk on those financial instruments has increased significantly since initial recognition.

Impairment of Financial Assets

As of reporting date the entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making that assessment, an entity considers changes in default risk that occur over the life of the financial instrument, not changes in the amount of expected credit losses. In making that assessment, the entity compares the risk of default on a financial instrument that occurs at the reporting date with the risk of default on initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

As of reporting date, the entity recognizes only the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial asset as an allowance for losses on financial assets purchased or resulting from deteriorating financial assets.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya bank telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan periode kini ditentukan bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak lagi terpenuhi (tidak meningkat secara signifikan), maka bank mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal pelaporan periode kini.

Bank mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah yang dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya.

Untuk menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit, bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan :

- Jumlah yang tidak biasa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi, Estimasi Kerugian Kredit Ekspektasian mencerminkan jumlah probabilitas tertimbang dan tidak bisa yang ditentukan dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin.
- Nilai waktu atas uang-*discount rate*; dan
- Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan (*forward looking*).

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

As of reporting date, an entity recognizes in profit or loss the amount of changes in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss. An entity shall recognize the amendment of the expected lifetime credit loss as an impairment gain, even though the lifetime expected credit loss is less than the amount of the expected credit loss that was included in the cash flow estimate at initial recognition.

If in the previous reporting period the bank has measured allowance for losses for financial instruments for an amount of expected credit losses over its lifetime, but at the reporting date of the current period it is determined that the credit risk on the financial instrument is no longer fulfilled (does not increase significantly), then the bank measures the allowance for losses in the amount of 12 months expected credit loss at the reporting date of the current period.

The Bank recognizes the amount of the expected credit loss (or credit loss recovered) in profit or loss, as an impairment gain or loss. The amount referred to is an adjustment to the allowance for possible losses on the reporting date where recognition is required.

To determine whether there has been an increase in credit risk, banks consider reasonable and supported information, including forward-looking information.

The Bank measures the expected credit loss on financial instruments in a way that reflects:

- Unusual and probability-weighted amounts determined by evaluating a series of probable outcomes, Estimated Expected Credit Loss reflects a weighted and unbiased probability amount determined by evaluating the possible range of outputs.
- The time value of the money-*discount rate*; and
- Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions (*forward looking*).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, bank tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, bank mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual musiman (termasuk opsi perpanjangan) selama bank terekspos terhadap risiko kredit. Periode tersebut dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktis bisnis yang ada.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian aset keuangan yang terjadi. Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

When measuring expected credit losses, the bank does not have to identify all possible scenarios. However, banks consider the risk or probability of credit loss by reflecting the probability of occurrence and non-occurrence of credit losses, even though the possibility of credit losses is very low.

The maximum period considered in measuring expected credit losses is the seasonal contractual period (including extension options) during which the bank is exposed to credit risk. This period does not cover a longer period even though the longer period is consistent with existing business practices.

Credit - impaired financial asset

Financial asset is impaired in the value of a financial asset when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is impaired by a financial asset includes observable data about the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;
- breaches of contract, such as events of default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible if the borrower had not experienced such difficulties;
- There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The disappearance of an active market for financial assets due to financial difficulties; or
- Purchase or issue of financial assets at a deep discount that reflects the loss of financial assets incurred. It is difficult to identify a single discrete event, however, the combined effect of several events can cause a financial asset to be impaired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan memburuk (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengukur kerugian aset keuangan ekspektasi sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Penyesuaian diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengelompokan kualitas /stage Aset Keuangan

a. Stage 1

Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

b. Stage 2

Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

c. Stage 3

Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Credit - impaired financial asset (continued)

For financial assets that have deteriorated at the reporting date, but not financial assets that were purchased or originated from deteriorating financial assets, an entity shall measure the expected financial asset loss as the difference between the asset's gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at interest rates effective initial financial assets. The adjustments are recognized in profit or loss as an impairment gain or loss.

Financial asset quality classification

a. Stage 1

Includes financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

b. Stage 2

Includes financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels the credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have an objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

c. Stage 3

Includes financial instruments that have been objectively proven to be impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengelompokan kualitas /stage Aset Keuangan (lanjutan)

Cross Staging

Cross Staging antar debitur yang sama akan diterapkan, jika satu debitur (CIF) memiliki multi rekening (fasilitas) dan *stage* yang berbeda akan dilakukan *worst stage* artinya satu debitur akan memiliki *stage* yang terburuk.

Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan perhitungan ECL 12 bulan (*stage 1*) atau ECL seumur hidup (*stage 2*) disebut dengan kriteria *Significant Increase in Credit Risk* (SICR). Penentuan kriteria SICR ini memerlukan pengkajian dan diskusi apakah telah terjadi peningkatan resiko kredit secara signifikan pada tanggal pelaporan.

Dalam PSAK 109 terdapat sebuah *rebuttable presumption* bahwa resiko kredit terhadap aset keuangan akan dianggap meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika pembayaran kontraktual sudah lebih dari 30 DPD. Asumsi ini akan berlaku kecuali jika Bank dapat membuktikan, melalui argumen yang masuk akal dan berdasarkan fakta, bahwa resiko tidak meningkat secara signifikan pada 30 DPD. Selain itu, definisi gagal bayar (*Default*) pada PSAK 109 juga menyebutkan praduga (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar.

Metode Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Kredit Ekspektasian 12 bulan

Jika tidak terjadi peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya

Jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal-baik dinilai secara individu atau kolektif-dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan didukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Financial asset quality classification (continued)

Cross staging

Cross staging between debtors the same will be applied, if one debtor (CIF) has multiple accounts (facilities) and different stages will be the worst stage, meaning that one debtor will have the worst stage.

The main factor in determining whether a financial instrument requires a 12 month ECL (*stage 1*) or lifetime (*stage 2*) ECL calculation is called the *Significant Increase in Credit Risk* (SICR) criterion. Determining the SICR criteria requires reviewing and discussing whether there has been a significant increase in credit risk at the reporting date.

In PSAK 109 there is a *rebuttable presumption* that credit risk to financial assets will be considered to have increased significantly since initial recognition if the contractual payment is more than 30 DPD. This assumption will apply unless the Bank can prove, through reasonable arguments and based on facts, that the risk does not increase significantly at 30 DPD. In addition, the definition of default in PSAK 109 also mentions the *rebuttable presumption* that financial assets that are 90 days in arrears have defaulted.

Expected Credit Losses method.

a. Expected Credit 12 months

If there has been no significant increase since initial recognition. The loss represents the expected credit loss arising from a financial instrument default that may occur within 12 months after the reporting date.

b. Expected credit throughout its life

If the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition - whether assessed individually or collectively - by considering all reasonable and supportable information, including information that is forward-looking.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kriteria Stage Aset Keuangan

a. Stage 1

- Umur tunggakan (DPD) = 0 - 30 hari
- Kolektibilitas 1 atau 2
- Tidak ada *Flagging* Restrukturisasi
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* 12 bulan
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

b. Stage 2

- Umur tunggakan (DPD) = 31 - 90 hari
- Kolektibilitas 2
- Ada *Flagging* Restrukturisasi
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

c. Stage 3

- Umur tunggakan (DPD) > 90 hari
- Kolektibilitas > 2
- *Flagging* POCI
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai neto atau biaya diamortisasi (*Effective Interest Rate To Net Carrying Amount*).

Indikator kualitatif kriteria Stage 2 Aset Keuangan

- a. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat.
- b. Tidak ada pembayaran angsuran.
- c. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat.
- d. Tidak ada pembayaran angsuran.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Financial asset stage criteria

a. Stage 1

- Days pay due (DPD) = 0 – 30 days
- Collectability 1 or 2
- No Restructuring Flagging
- Calculation of expected credit losses using a 12 month probability of default
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

b. Stage 2

- Days pay due (DPD) = 31 – 90 days
- Collectability 2
- On Restructuring Flagging
- Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

c. Stage 3

- Days pay due > 90 days
- Collectability > 2
- Flagging POCI
- Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan
- Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the net value or amortized cost (*Effective Interest Rate To Net Carrying Amount*).

Qualitative indicators of Stage 2 Financial Assets criteria

- a. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time.
- b. No installment payments.
- c. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time.
- d. No installment payments.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Indikator kualitatif kriteria Stage 2 Aset Keuangan (lanjutan)

- e. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat.
- f. Tidak ada pembayaran angsuran.
- g. Peningkatan signifikan pada risiko kredit pada instrumen lain dari peminjam yang sama.
- h. Kebijakan peningkatan monitoring debitur karena peningkatan risiko kredit.
- i. Meningkatnya premi risiko debitur yang disebabkan peningkatan risiko kredit pada debitur.
- j. Perubahan faktor eksternal yang merugikan bisnis dan keuangan debitur.
- k. Penurunan rating internal dan eksternal.

Indikator kualitatif kriteria Stage 3 Aset Keuangan

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur.
 - Penurunan omset melebihi 50%
 - Penurunan laba melebihi 30%
 - Piutang usaha macet melebihi 50% dari total
- b. Pelanggaran perjanjian kredit.
 - Tidak dipenuhinya satu atau lebih syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kredit seperti syarat penandatanganan, syarat pencairan/penarikan, pelanggaran terhadap *covenant* kredit.
 - Penyalahgunaan penggunaan kredit.
 - Adanya masalah hukum dan ekonomi yang signifikan dari debitur.
 - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) permasalahan hukum yang dialami debitur baik yang terkait dengan usaha maupun masalah hukum diluar usaha.
 - Terdapat permasalahan internal keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau penyalahgunaan dana oleh anggota keluarga debitur.
- c. Terdapat kemungkinan bahwa debitur dinyatakan pailit.
 - Terdapat hutang macet kepada pihak ketiga.
 - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tuntutan hukum pailit oleh pihak ketiga.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Qualitative indicators of Stage 2 Financial Assets criteria (continued)

- e. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time.
- f. No installment payments.
- g. Significant increase in credit risk on other instruments from the same borrower.
- h. Policy to increase debtor monitoring due to increased credit risk.
- i. Increased debtor risk premium due to increased credit risk on debtors.
- j. Changes in external factors that are detrimental to the debtor's business and finances.
- k. Internal and external downgrades.

Qualitative indicators of Stage 3 Financial Assets criteria

- a. Significant financial difficulties experienced by debtors.
 - Decreased turnover by more than 50%
 - Profit reduction exceeding 30%
 - Bad debt receivables exceed 50% of the total
- b. Credit agreement violation
 - Failure of one or more of the terms stipulated in the credit agreement, such as signing conditions, disbursement / withdrawal conditions, violation of credit covenants
 - Abuse of use of credit.
 - There are significant legal and economic problems from the debtors.
 - There is at least 1 (one) legal problem experienced by the debtor, whether related to business or legal problems outside the business.
 - There are internal family problems, for example divorce, death, prolonged illness, or misuse of funds by members of the debtor's family.
- c. There is a possibility that the debtor will be declared bankrupt.
 - There is bad debt to third parties.
 - There is at least 1 (one) bankruptcy lawsuit by a third party.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (Delinquency Bucket)

Aset Keuangan dikelompokkan lagi kedalam kelompok tunggakan (*delinquency buckets*) yang merepresentasikan kualitas kredit yang terdiri dari :

- a. Rating 1, yakni untuk kredit yang tidak memiliki tunggakan.
- b. Rating 2, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- c. Rating 3, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.
- d. Rating 4, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Rating 5, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.
- f. Rating 6, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
- g. Rating 7, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- h. Rating 8, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian

Teknik dalam mengevaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian menggunakan metode *Migration Analysis*, dengan menggunakan pendekatan statistik dari data historis kredit berdasarkan segmentasi :

- a. Bank wide
- b. Rating (*stage*)
- c. Produk kredit.

Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian atau *Expected Credit Loss (ECL)* Dalam menentukan besarnya Kerugian Kredit Ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mencakup :

- a. *Probability of default*
- b. *Exposure at default*
- c. *Lost given default*
- d. *Discount factor*
- e. *Forward looking adjustment*

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Credit grouping based on the age of arrears (Delinquency Bucket)

Financial assets are further classified into delinquency buckets, which represent credit quality, consisting of:

- a. Rating 1, which is for credits that are not in arrears.
- b. Rating 2, namely for loans with arrears of principal and / or interest of up to 30 (thirty) days.
- c. Rating 3, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 30 (thirty) days up to 60 (sixty) days.
- d. Rating 4, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 60 (sixty) days up to 90 (ninety) days.
- e. Rating 5, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 90 (ninety) days up to 120 (one hundred and twenty) days.
- f. Rating 6, namely for loans with arrears in principal and / or interest of more than 120 (one hundred twenty) days up to 150 (one hundred and fifty) days.
- g. Rating 7, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 150 (one hundred and fifty) days up to 180 (one hundred and eighty) days.
- h. Rating 8, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 180 (one hundred and eighty) days.

Technique for Evaluating Expected Credit Losses

Techniques in evaluating Expected Credit Losses use the *Migration Analysis* method, using a statistical approach from credit historical data based on segmentation:

- a. Bank wide
- b. Stage
- c. Credit products

Calculation of Expected Credit Loss (ECL) In determining the amount of Expected Credit Loss, the formation of Allowance for Impairment Losses includes:

- a. *Probability of default*
- b. *Exposure at default*
- c. *Lost given default*
- d. *Discount factor*
- e. *Forward looking adjustment*

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

**Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian
(lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang dievaluasi penurunan nilainya dihitung secara individual dan kolektif serta cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk masing-masing untuk kelompok individual dan kolektif tersebut.

Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, aset keuangan yang dievaluasi penurunan nilainya dihitung secara individual dan kolektif serta cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk masing-masing kelompok individual dan kolektif tersebut, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal dari suatu aset (suatu kejadian yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan handal.

Bukti mengenai penurunan nilai meliputi indikasi bahwa peminjam atau kelompok peminjam mengalami kesulitan keuangan secara signifikan, gagal dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya dan terdapat hasil observasi data yang mengindikasikan terdapat penurunan nilai pada estimasi arus kas masa depan, seperti perubahan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan gagal bayar.

Khusus untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan bukti obyektif penurunan nilai sebagai berikut:

1. Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (kredit bermasalah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
2. Semua kredit yang direstrukturisasi.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

**Technique for Evaluating Expected Credit Losses
(continued)**

The Bank assesses, at each reporting date, whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. Impairments for financial assets that are being evaluated are assessed individually and collectively, along with the allowance for impairment loss incurred for both individually and collectively assessment.

A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, impairments for financial assets that are being evaluated are assessed individually and collectively, along with the allowance for impairment loss incurred for both individually and collectively assessment, if and only, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (an "incurred loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Specific to a given loan, the Bank uses additional criteria for determining the objective evidence of impairment as follows:

1. Loans with sub-standard, doubtful and loss collectibility (non-performing loans) in accordance with the regulations of Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks as latest amended by PBI No. 14/15/PBI/2012 date October 24, 2012 about Assessment of Commercial Bank Asset Quality.
2. Restructured loans.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang signifikan, dengan menggunakan metode *discounted cash flows*. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit, Bank menetapkan portofolio kredit adalah sebagai berikut:

- Kredit yang dievaluasi secara individual memiliki nilai signifikan dengan plafon kredit diatas Rp50, yang mengalami penurunan nilai sesuai kolektibilitas 3, 4 dan 5 atau tunggakan (*day past due*/DPD) lebih dari 90 hari (DPD > 90).
- Kredit yang dievaluasi secara kolektif memiliki nilai signifikan dengan plafon kredit diatas Rp50 sampai dengan Rp1.000, dengan kolektibilitas 1 dan 2 atau tunggakan (*day past due*/DPD) kurang atau sama dengan 90 hari (DPD ≤ 90).
- Kredit yang dievaluasi secara kolektif memiliki nilai tidak signifikan dengan plafon sampai dengan Rp1.000.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Technique for Evaluating Expected Credit Losses (continued)

The Bank first determines whether there is objective evidence of impairment of financial assets. Individually made on valuation of financial assets that are individually significant value has decreased, by using the method of discounted cash flows. Financial assets that are not significant but the decline of values and financial assets that do not experience a decrease in value, included in the group of financial assets with similar risk characteristics and assessment done collectively.

If Bank determines there is no objective evidence of impairment exist for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is continuous to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

In performing evaluation of loan impairment, Bank determines loans portfolio is as follows:

- Loans which individually evaluated have significant value with a loan limit above Rp50, which has impairment according collectibility 3, 4 and 5 or day past due (DPD) more than 90 days (DPD > 90).
- Loans which collectively evaluated have significant value, up to Rp50 up to Rp1,000 with collectibility 1 and 2 or day past due (DPD) less or equal to 90 days (DPD ≤ 90).
- Loans which collectively evaluated have insignificant value with plafond up to Rp1.000.

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment individually, if one of the following criteria is met:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

i. Perhitungan penurunan nilai secara individu

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Bank menggunakan metode *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Technique for Evaluating Expected Credit Losses (continued)

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or
2. Restructured loans which individually have significant value.

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through collective, if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value and there is no objective evidence of impairment; or
2. Loans which individually have no significant value; or
3. Restructured loans that individually have no significant value.

i. Calculation of individual impairment

The amount of impairment loss is measured as the difference between the financial asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future impairment losses that have not incurred) discounted using at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is account reduced through impairment and expenses losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If a loan or financial assets held to maturity have a variable interest rate, the discount rate used for measuring each impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of estimated future cash flows of the financial asset with collateral reflects the cash flows that may result from foreclosure collateral less costs for obtaining and selling the collateral, regardless whether or not foreclosure is probable or not.

The Bank uses fair value of collateral method as future cash flows if it fulfill one of the following conditions:

1. Loans are collateral dependent, if the loan repayment is only derived from collateral; or
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legal aspect binding of collateral.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

ii. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates analysis method*, dengan menganalisis kredit pada setiap periode tunggakan (*delinquency stage*) dalam rentang waktu bulanan (30 hari) yang digolongkan dalam 8 (delapan) *bucket* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam "Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapuskan pada tahun berjalan dicatat sebagai pemulihan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Technique for Evaluating Expected Credit Losses (continued)

ii. The calculation of collective impairment

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped based on similar credit risk characteristics such as loan segmentation and arrears status. Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment, estimated based on historical loss experienced for assets that have credit risk characteristics similar to the characteristics of the group's credit risk in the Bank.

The Bank used statistical model analysis methods, namely the roll rates analysis method, by analyzing the delinquent loans in each period (*delinquency stage*) in a monthly range (30 days) were classified in 8 (eight) bucket for the assessment of impairment of financial assets collectively using historical data at least 3 (three) years.

When loans is uncollected, reversing journal is written-off loans with Allowance for impairment. Loans can be written off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges related to loans and securities (in held-to-maturity and loans and receivables) are classified into the "Allowance for Impairment Losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as increasing the debtor's credit rating), the impairment loss previously recognized is reversed by adjusting the allowance account. Total recovery of financial assets are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of loans written-off in the current year is recorded as a recovery of the Allowance for Impairment Losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

ii. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapus bukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

1) Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Bank pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan kerugian penurunan nilai tersebut tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dilaporkan pada biaya amortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Penurunan nilai diakui secara terpisah dengan nilai bruto aset dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas kredit, Bank memakai data kerugian historis untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit secara kolektif sesuai dengan PSAK. Data historis yang digunakan adalah data kerugian historis yang ada dalam Bank sesuai kelompok kredit yang mempunyai tingkat risiko kredit yang sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Technique for Evaluating Expected Credit Losses (continued)

ii. The calculation of collective impairment (continued)

Subsequent recoveries of loans written-off in previous years are recorded as other operating income.

1) Financial assets carried at amortized cost

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that the impairment are individually assessed and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment for impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loan and receivables or held to maturity financial assets that carried at amortized cost for individually assessed has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses) that have not been incurred discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e. the effective interest rate computed at initial recognition). Impairment loss is recognized separately from the gross value of assets and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For the purposes of collective impairment evaluation of loans, the Bank used historical data to determine the impairment on loans collectively in accordance with the requirements of the PSAK. The historical data used is the existing data in accordance with the Bank's loans groups having the same level of credit risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

ii. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

2) Aset keuangan yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dikelompokkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkelanjutan dibawah biaya perolehannya. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai instrumen ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui pada ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Technique for Evaluating Expected Credit Losses (continued)

ii. The calculation of collective impairment (continued)

2) Financial assets classified as available-for-sale

In case of equity investments classified as AFS, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is objective evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income then removed from equity and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment losses on equity investments are not reversed through the statements of profit or loss and other comprehensive income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income in the statements of profit or loss and other comprehensive income. If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss then it recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Segment reporting made by the bank is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the entity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

e. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 3d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada (Catatan 3d).

Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase tertentu atas simpanan nasabah pada Bank Indonesia.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), call money dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 3d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, *call money*, deposito berjangka dan tabungan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada (Catatan 3d).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Current accounts in Bank Indonesia and Other Banks

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 3d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Current accounts in Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment loss and classified as loan and receivables. The specific accounting policy for loan and receivables is disclosed in (Note 3d).

Statutory Reserves Requirement

In accordance with prevailing Bank Indonesia regulation concerning Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Banks, Bank is required to place certain percentage of deposits from customers with Bank Indonesia.

f. Placements in Bank Indonesia and Other Banks

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (BIDF), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 3d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Placements in Bank Indonesia and other banks represent placements in Bank Indonesia Deposit Facility, call money, time deposit and saving.

Placements in Bank Indonesia and other banks are classified as loan and receivables and are stated at amortized cost using EIR less any allowance for impairment losses. The specific accounting policy for loan and receivables is disclosed in (Note 3d).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

g. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dikategorikan sebagai efek utang dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Kebijakan akuntansi untuk efek-efek diungkapkan dalam (Catatan 3d).

h. Kredit

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang dijelaskan pada (Catatan 3d).

Kredit dalam rangka perjanjian sindikasi, dinyatakan sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Setelah syarat dan ketentuan telah dinegosiasi ulang, penurunan nilai yang ada sebelumnya akan diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal sebelum ketentuan kredit dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dalam kategori "past due". Manajemen akan melakukan kaji ulang kredit yang direstrukturisasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh syarat terpenuhi dan pembayaran dimasa datang akan terjadi. Kredit tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan penurunan nilai secara individual atau kolektif, yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan mengikuti perlakuan atas perhitungan penurunan nilai kreditnya.

Beberapa kebijakan internal mengenai restrukturisasi kredit sebagai berikut:

- Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga pinjaman dan masih memiliki prospek usaha

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, da tagihan yang berasal dari fasilitas trade finance yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasikan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

g. Securities

Securities represent investments in Certificates of Bank Indonesia (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), government bonds and corporate bonds are considered as debt securities and classified as HTM and AFS financial assets. The accounting policy for these securities is disclosed in (Note 3d).

h. Loans

Loans are classified as loans and receivables and are stated at amortized cost less allowance for impairment losses. The specific accounting policy for loans and receivables is described in (Note 3d).

Syndicated loans are stated at the principal amount in accordance with the risk portion borne by the Bank.

Loans restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loan conditions. Once the terms have been renegotiated, any previous impairment is measured using the original EIR as calculated before the modification of the terms and the loan is no longer considered "past due". Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assesment, which calculated using the loans's original EIR and follow the impairment assessment of loans.

Some internal policies regarding loan restructuring are as follows:

- *Restructuring granted to debtors who has difficulty of loan payment both loan principal or interest of loan and they still have business prospects*

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as amortized cost.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Kredit (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 3d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

- Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Bank
- Wajib dilakukan analisa ulang atas kemampuan pembayaran kewajiban dan appraisal ulang agunan
- Keputusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat yang berbeda dari pemutus kredit awal
- Wajib disempurnakan legalitas dan pengikatan agunan
- Penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkini mengenai kualitas aktiva produktif

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika kredit sudah masuk dalam kategori macet (kolektibilitas 5) dan tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian dimasa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapus bukukan, disajikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Loans (continued)

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion or risks borne by the Bank

Refer to Note 3d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

- The debtors must submit an application of loan restructuring to the Bank
- Mandatory conducted a re-analysis of the ability of repayment obligations and re-appraisal of collateral
- Decision of the restructuring carried out by different officials from the initial loans authorized
- Mandatory enhanced legal and binding of collateral
- Determination of loans collectibility after restructuring refers to the latest Bank Indonesia regulations concerning the quality of earning assets

Loans are written-off, when loans has been included in loss category (collectibility 5) and there is no realistic prospect of collection in the near future and all collaterals that has sought to be realized or take over. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.

The recoveries of loans written-off presented as other operational income.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are expenses which have been incurred but have not been recognized as expenses in the related period.

Prepaid expenses are recognized as expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income during amortization in accordance with the expected beneficial period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 216, "Aset Tetap", Bank memilih model biaya untuk pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap (kecuali tanah tidak disusutkan) dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tarif penyusutan/ Depreciation rate	Tahun/Years
Renovasi bangunan yang disewa	10-33%	3 – 10
Kendaraan	20%	5
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	20%	5

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun buku untuk memastikan bahwa nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets

In accordance with PSAK No. 216, "Fixed Assets", Bank has decided to use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets (except land that is not depreciated) are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such costs include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

Depreciation are computed using straight-line method, based on the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	Tarif penyusutan/ Depreciation rate	Tahun/Years	
Renovasi bangunan yang disewa	10-33%	3 – 10	Leasehold improvement
Kendaraan	20%	5	Vehicles
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	20%	5	Office equipment, machine and furnitures

The estimated residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed at each reporting date to ensure that such residual values, useful lives and depreciation methods are consistent with the expected pattern of economic benefits from those assets.

Fixed asset that are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset, (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of derecognition.

Disposal of fixed assets can be done in various ways (eg: sold, leased under a finance lease, or donated).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu telah ditelaah setiap akhir tahun pelaporan.

k. Aset dan Liabilitas Sewa

Bank mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Bangunan	10 Tahun/10 Years
Kendaraan	5 Tahun/5 Years
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	5 Tahun/5 Years

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 236 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

Assets under construction are assets that are still in the process of being completed and not yet ready for use, and are intended to be used in business activities. These assets are recorded at the cost incurred.

Estimation of economic life, depreciation method, and residual value are reviewed at each financial year-end.

k. Lease Assets and Liabilities

The Bank recognizes the use rights assets on the inception date of the lease. Use rights assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of the lease obligations. Lease liabilities are the amount of lease payments accrued until the end of the lease term, discounted using the incremental loan interest rate. The cost of lease assets includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease less rental incentives received. Use rights assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset, as follows:

Building
Vehicle
Office equipment, machinery and equipment

If ownership of the leased asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payment reflects the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. Use rights assets are tested for impairment in accordance with PSAK 236 Impairment of Assets Value.

At the inception date of the lease, the Bank recognizes lease liabilities at the present value of future lease payments that will be made over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments) less lease incentive receivables, variable lease payments that are index or interest rate dependent, and the amount expected to be paid in a residual value guarantee. The lease payment also includes the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not dependent on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada ISAK 121. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada ISAK 121, yang tidak diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Penerapan pencatatan PSAK 116 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), Bank:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan PSAK No. 116 (Revisi 2014), "Sewa".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Lease Assets and Liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the incremental loan interest rate of the lessee at the inception date of the lease because the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and less lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there are modifications, changes in the term of the lease, changes in lease payments, or changes in the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases with a duration of less than 12 months and leases of low value assets, as well as elements of the leases, partially or wholly do not apply the recognition principles stipulated by PSAK 116 will be treated the same as operating leases in ISAK 121. lease on a straight-line basis over the lease term in the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is shown under general and administrative expenses in the income statement.

The Bank presents leases that were previously classified as operating leases in ISAK 121, which are not disclosed in the statement of financial position. The application of PSAK 116 listing applies to all leases (except as stated earlier), the Bank:

- Present asset rights as part of property, plant and equipment and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position, measured at the present value of future lease payments;
- Record the depreciation of the use of rights assets and interest on the lease liability in the statement of comprehensive income and loss; and
- Separating the total payment into principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the cash flow statement.

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset in accordance with PSAK No. 116 (Revised 2014), "Leases".

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Transaksi sewa yang dilakukan Bank diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya.

Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual (*lessee*), tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Jika transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera.

Transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan Bank merupakan sewa operasi dan diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;
- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Lease Assets and Liabilities (continued)

The lease transaction entered into by the Bank was classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Lease payment is recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A sale and lease-back transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and lease-back transaction depends upon the type of the lease involved.

If a sale and lease-back transaction results in a finance lease, any excess of the sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognized as income by a seller (*lessee*); instead it shall be deferred and amortized over the lease term.

If a sale and lease-back transaction results in an operation lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any gain or loss shall be recognized immediately.

The sale and lease-back transaction entered into by the Bank was considered as an operating lease and is recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

- a. There is a change in contractual terms, other than a renewal or extension of the agreement;
- b. A renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;
- c. There is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or
- d. There is a substantial change to the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Dalam perlakuan akuntansi sewa oleh *lessee*, sewa pembiayaan, dimana terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Bank, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

l. Agunan yang Diambil Alih dan Properti Terbengkalai

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan atau nilai *outstanding* kredit mana yang lebih rendah. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan. Laba atau rugi yang diperoleh atau berasal dari penjualan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha operasional Bank. Properti terbengkalai ini dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasi. Biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan periode berjalan dibebankan pada saat terjadinya.

Atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK 105 yang berlaku (Catatan 2a).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Lease Assets and Liabilities (continued)

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Under the lessee accounting, finance leases, which transfer to the Bank substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly against statement of profit or loss and other comprehensive income.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership by the end of the lease term.

Operating lease payments are recognized as an expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

l. Foreclosed Assets and Abandoned Properties

Foreclosed assets acquired through loan foreclosures are stated at net realizable value, which is the fair value of the foreclosed asset, net of estimated cost to sell or stated as loan outstanding amount, whichever is lower. The excess of the uncollectible loan balance over the value of the collateral is charged to allowance for impairment losses on non financial asset. Gain or losses earned or incurred from the sale of foreclosed assets are credited or charged to statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Abandoned properties represent Bank's fixed assets in form of property which was not used for the Bank's business operational activity. These properties are stated at net realizable value. Repairs and maintenance expenses for the current period are charge to expense as incurred.

Foreclosed assets and abandoned properties are provided with allowance for impairment losses in accordance with the regulation of PSAK 105 (Note 2a).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

m. Aset Takberwujud

Bank mengklasifikasikan aset takberwujud dalam aset lain-lain, berupa perangkat lunak dan hak paten. Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun atau dengan tarif penyusutan sebesar 20% untuk perangkat lunak dan 10 tahun atau dengan tarif penyusutan sebesar 10% untuk hak paten.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi ditelaah setiap akhir tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika:

- a. Dilepas; atau
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah liabilitas bank dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3d).

o. Simpanan dari Nasabah

Giro merupakan dana nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan dana nasabah yang bisa ditarik setiap saat berdasarkan persyaratan tertentu yang disepakati bersama.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan Bank.

Simpanan dari nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3d).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Intangible Assets

The Bank classifies intangible assets in others assets, such as software and patent. Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any.

Amortization is recognized in statements of profit or loss and comprehensive income using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 years or with depreciation rate of 20% for software and 10 years or with depreciation rate of 10% for patent.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each financial year end.

Intangible assets is derecognition if:

- a. Disposed; or
- b. If there is no expectation of future economic benefit used or released.

n. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recognized at the time of the obligations occurred or receipt of transfer order from customers or other banks.

Liabilities due immediately are stated at the liability amount and classified as financial liabilities measured at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost is explained in (Note 3d).

o. Deposits from Customers

Demand deposits represent deposits from customers that can be used as instruments of payment and can be withdrawn at any time through cheques or transfer of funds with clearing account or other forms.

Savings accounts represent deposits from customers that can be withdrawn at anytime based on certain conditions agreed by both parties.

Time deposits represent deposits from customers that can be withdrawn after a certain time in accordance with the agreement between the customers and the Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities at amortized cost is explained in (Note 3d).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan *interbank call money*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kebijakan akuntansi untuk kewajiban keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada (Catatan 3d).

q. Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dan Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek – efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 3d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of demand deposits, time deposits, saving and interbank call money.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized cost. The specific accounting policy for financial liabilities at amortized cost is explained in (Note 3d).

q. Securities Sold under Repurchase Agreement and Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 3d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Non-Kuangan dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011. Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. Namun, Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

PSAK No. 236 (Revisi 2014) mengenai "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Nilai tercatat aset ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Setiap rugi penurunan atau pemulihan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

s. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga dicatat sesuai dengan PSAK No. 102 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan metode EIR, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, masa yang terpendek, mana yang lebih sesuai sebagai nilai bersih aset atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fee*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Allowance for Impairment Losses on Non-financial Assets and Estimated Losses on Commitments and Contingencies

Starting January 1, 2011, the Bank determines allowance for impairment losses from non-financial assets, based on Bank Indonesia Letter No.13/658/DPNP/IDPnP dated December 23, 2011. The Bank no longer required to provide the provision for possible losses on non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies. However, the Bank still need to calculate the allowance for impairment losses accordance with applicable Financial Accounting Standards.

In compliance with PSAK No. 236 (Revised 2014), "Impairment in Asset Value", asset values are reviewed for any impairment and possible write-down to their fair values whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recovered. On the other hand, a reversal of an impairment loss is recognized whenever there is indication that the asset is not impaired anymore. The amount of impairment loss (reversal of impairment loss) is recognized in the current period's statement of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying values of assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable. Any impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current period.

s. Interest Income and Expense

Interest income and expenses are recorded in accordance with PSAK No. 102 (Revised 2014), "Financial Instruments; Recognition and Measurement".

Financial instruments measured at amortized cost, financial assets and liabilities classified as AFS is recorded using the EIR method, which is the rate that exactly discounts of estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and as an integral part of the EIR.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan EIR awal dan perubahan nilai tercatat dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya Bank meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian EIR sejak tanggal perubahan estimasi.

Pada saat nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang serupa telah diturunkan akibat adanya kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga tetap diakui dengan menggunakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa mendatang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Penerimaan dari kredit yang "diragukan" dan "macet" diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai penghasilan bunga.

t. Pendapatan dan Biaya Lain-lain

Provisi yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset keuangan diakui sebagai penyesuaian atas EIR aset keuangan tersebut.

Seluruh penghasilan dan beban lain-lain yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

u. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 212 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Interest Income and Expense (continued)

The carrying amount of the financial asset or financial liability is adjusted if the Bank revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original EIR and the change in carrying amount is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income. However, for a reclassified financial asset for which the Bank subsequently increases its estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the EIR from the date of the change in estimate.

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been reduced due to an impairment loss, interest income continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Collection from loan classified as "doubtful" and "loss" is recognized as a deduction of loan outstanding. The excess payment from loan outstanding is recognized as interest income.

t. Other Income and Expenses

Fees that are directly attributable to the financial asset are recognized as adjustments to the EIR on such asset.

All of these other income and expenses are recorded in the statement of profit or loss and comprehensive income when incurred.

u. Income Tax

Accounting treatment for income tax is in accordance with PSAK No. 212 (Revised 2014), "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and carryforward tax benefit of unused fiscal losses as long as the probable taxable income will be available in future periods against the deductible and carryforward tax benefit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Pajak tangguhan diakui dengan metode liabilitas atas perbedaan pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling-hapus atas aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama atau kelompok usaha yang bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas atas aset lancar neto.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan dicatat ketika surat ketetapan diterima atau, jika Bank mengajukan banding, ketika hasil banding telah ditetapkan.

v. Imbalan Pasca-kerja

Bank menerapkan PSAK No. 219 (Revisi 2016) "Imbalan Kerja". Bank menghitung dan mencatat imbalan pasca-kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003). Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui segera pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Bank mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial dari liabilitas imbalan kerja diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui laba atau rugi dari *curtailment* pada saat *curtailment* terjadi. Keuntungan atau kerugian *curtailment* terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kewajiban manfaat pasti dan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang diakui sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Income Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at statement of financial position date. Deferred tax is charged to or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax has recognized with liability method through the difference at the reporting date between the bases of tax imposition's asset and liability and the carrying amount for the purpose of financial statement at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liability are offset if there is legally right to offsetting of current tax assets towards current tax liability or deferred tax assets and liability at the same entity or business group that intend to complete assets and liability of net current assets.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Bank, when the result of the appeal is determined.

v. Post-employment Benefits

The Bank have adopted PSAK No. 219 (Revised 2016) "Employee Benefits". The Bank calculates and recognizes post-employment benefit obligation for severance pay, gratuity and compensation in accordance with Labor Law No. 13 dated March 25, 2003 (UU No. 13/2003). Post-employment benefits are unfunded which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension. The actuarial valuation method used to determine the present value of defined-benefit obligation, related current service costs and past service costs is the *Projected Unit Credit*. Current service costs, interest costs, past service costs which are already vested, and effects of curtailments and settlements (if any) are charged directly to statement of profit or loss and other comprehensive income. Past service costs which are not yet vested for working (active) employees are amortized during the employees' average remaining years of service, until the benefits become vested.

The Bank has recognized actuarial gain or loss from employee benefit liability shall be recognized directly in other comprehensive income.

The Bank has recognized gain or loss from curtailment when it occurred. Curtailment's gain or loss consist of the changes that have occurred in value of defined benefit obligation and actuarial gain or loss and past service costs that has recognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Pasca-kerja (lanjutan)

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19)*.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Mulai 2022, berdasarkan siaran pers, Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut

Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Dampak perubahan tersebut atas dibukukan di laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

w. Laba per Saham (LPS)

Sesuai dengan PSAK No. 233, "Laba Per Saham", laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan (dikurangi perolehan kembali saham beredar).

LPS dasar dihitung dengan membagi laba bersih periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan, yaitu sejumlah 51.870.438.266 lembar saham untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 33).

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan oleh karenanya, rugi per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Post-employment Benefits (continued)

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 219: *Employee Benefits* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19)*.

In prior years, the Company attributes benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until the retirement age. In prior years, the Company attributes benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until the retirement age. Starting from 2022, based on the press release, the Company change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the financial statements of the Company as of December 31, 2025 and for the year then ended. The impact of said change on the statement of profit or loss and other comprehensive income in current year.

w. Earnings per Share (EPS)

In accordance with PSAK No. 233, "Earnings per Share", earnings per share is computed based on the weighted-average number of issued and fully paid shares during the period (less treasury stock).

Basic EPS is computed by dividing the net income for the period with the weighted average number of shares outstanding during the period, which are 51,870,438,266 shares for the year ended, December 31, 2025 and 2024 (Notes 33).

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024 accordingly, no diluted loss per share is calculated and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Informasi Segmen

Bank menerapkan PSAK No. 108, "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Segmen adalah bagian khusus dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa untuk lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada manajemen untuk tujuan mengalokasikan sumber daya dalam satu segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, laba rugi bersih, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo transaksi antar kelompok usaha dieliminasi.

y. Provisi

Bank menerapkan PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Provisi diakui jika Bank memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai pasar kini atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Segment Information

The Bank applied PSAK No. 108, "Operating Segments". The revised PSAK requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates. There is no significant impact on the adoption of the revised accounting standard on the financial statements.

A segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged either in providing certain products and services (business segment), or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the management for the purposes of allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, net income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

y. Provision

The Bank adopted PSAK No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are determined by discounting the estimated future cash flow at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value money and the risks specific to the liability.

Provisions are reviewed at each statement of financial position date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang membutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitasnya.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berdampak pada nilai aset dan liabilitas dalam satu periode pelaporan, dimana estimasi dan asumsi tersebut merupakan estimasi terbaik berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Estimasi dan asumsi dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu serta faktor-faktor lain termasuk ekspektasi atas peristiwa yang akan datang, yang mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi.
- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Pertimbangan

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 102 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada (Catatan 3d).

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Bank melakukan penelaahan atas kredit pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu arus kas dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat dari kredit Bank sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.069.373 dan Rp3.851.281. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam (Catatan 10).

3. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

Use of Judgements, Estimates, and Significant Assumptions with Management

Some estimations and assumption made in order to the preparation of a financial statement that requires management's considerations in determining a methodology which is proper to asset valuation and liabilities.

Management make estimation and assumption that impact on the value of its assets and liabilities in one period of reporting, where estimation and the assumption are the best estimation based on Indonesian Financial Accounting Standards.

The estimation and assumption are constantly evaluated and based on past experience and other factors including expectations of events to come affecting:

- The application of accounting policies.
- The reported amounts of assets and liabilities, and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.
- The reported amounts of revenues and expenses reported during reporting year.

Judgements

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering if they meet the definition set forth in PSAK No. 102 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are recognized for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in (Note 3d).

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Bank reviews its loans at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment loss. The carrying amount of the Bank's loan before allowance for impairment loss as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp5,069,373 and Rp3,851,281 respectively. Further details are shown in (Note 10).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan pasca-kerja Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp36.678 dan Rp31.811. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 32).

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp168.008 dan Rp28.176. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 13).

4. KAS

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp183.498 and Rp133.328.

Dalam saldo kas, termasuk uang pada mesin ATM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sejumlah Rp21.134 dan Rp16.770.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Tidak ada saldo kas pada pihak berelasi.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo giro pada Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp731.471 dan Rp456.348, seluruhnya dalam mata uang rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2023 tanggal 30 Juni 2023.

**3. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING (continued)**

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for the recoverable taxable income for the future from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on timing and level of future taxable profits inline with future tax planning strategies.

Post-Employment Benefit Liability

Post-employment benefit obligation is determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. The carrying amount of the Bank's estimated liabilities for post-employment benefits as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp36,678 and Rp31,811, respectively. Further details are discussed in (Note 32).

Depreciation of Fixed Assets and Right of Use Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Bank's fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp168,008 and Rp28,176 respectively. Further details are disclosed in (Note 13).

4. CASH

As of December 31, 2025 and 2024 cash balance amounting to Rp183,498 and Rp133,328 respectively.

Cash balance includes cash in ATM as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp21,134 and Rp16,770, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, all cash are denominated in Indonesian Rupiah. No cash in related parties.

5. CURRENT ACCOUNTS IN BANK INDONESIA

As of December 31, 2025 and 2024, the current accounts in Bank Indonesia amounting to Rp731,471 and Rp456,348 respectively, all the current accounts are in Rupiah

As of December 31, 2023 the Bank's Minimum Statutory Reserve complied with Bank Indonesia (BI) Regulation PBI No. 24/4/PBI/2023 dated March 1, 2023 and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2023 dated June 30, 2023 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 25 Februari 2022, BI mengeluarkan peraturan PBI No. 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan perubahannya PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017, PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 05 April 2018 dan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% dan secara harian sebesar 3,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Bank juga harus memenuhi RIM dan GWM RIM, jika RIM dan GWM RIM Bank kurang dari batas bawah Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 84% atau melebihi batas atas BI yaitu 94% dengan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM insentif BI yang sebesar 14%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2023 tanggal 30 Juni 2023.

Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Rasio Intermediasi Makroprudensial	67,01%	66,64%
Rasio GWM Primer	5,10%	7,10%
Rasio GWM RIM	4,00%	5,00%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

**5. CURRENT ACCOUNTS IN BANK INDONESIA
(continued)**

On February 25, 2022, Bank Indonesia issued regulation PBI No. 24/4/PBI/2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 and amended by PBI No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016, PBI No. 18/14/PBI/2016 dated August 18, 2016, PBI No. 19/6/PBI/2017 dated April 18, 2017, PBI No. 20/3/PBI/2018 dated April 05, 2018 and PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) with Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies, each bank in Indonesia is required to have a minimum demand deposit balance in Bank Indonesia as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at an average of 6.5% and 3.5% on a daily basis and the Secondary GWM which is set at 4% and GWM Loan to Funding Ratio (LFR GWM) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the bank's LFR and target LFR by taking into account the difference between the bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. GWM in United States Dollar is set at 8%.

As of December 31, 2021 Bank maintained RIM and GWM RIM if the RIM and GWM LFR of Bank is less than the Bank Indonesia (BI) lower limit of 84% or exceeds the BI upper limit of 94% with Bank Capital Adequacy Ratio (CAR) is lower than BI CAR incentives of 14%.

As of December 31, 2023 the Bank's Minimum Statutory Reserve complied with Bank Indonesia (BI) Regulation) PBI No. 24/4/PBI/2023 dated March 1, 2023 and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2023 dated June 30, 2023 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency.

As of December 31, 2025 and 2024 the Statutory Reserves are as follows:

Macroprudential Intermediation Ratio
Primary reserve ratio
RIM reserve ratio

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

6. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	17.148	698
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.740	10.256
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	751	-
PT Bank Nusa Tenggara Timur	497	500
PT BPD Jawa Tengah	24	25
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	17
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	10
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1	5
PT Bank Central Asia Tbk	1	2
PT BPD Lampung	1	1
Jumlah	27.190	11.513

Kisaran suku bunga untuk giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah disajikan dalam (Catatan 38).

Klasifikasi kolektibilitas giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah lancar dan tidak ada giro pada bank lain yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Pihak ketiga		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	818.040	450.000
Tabungan antar bank -		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	1
Bank Perkreditan Rakyat	510	633
Diskonto	(143)	(51)
Jumlah	818.409	450.583

Kisaran suku bunga untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam mata uang rupiah diungkapkan dalam (Catatan 38).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, klasifikasi kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah lancar dan tidak ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

6. CURRENT ACCOUNTS IN OTHER BANKS

This account consists of:

	2025	2024
Third parties		
Rupiah		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	698	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.256	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tbk	-	
PT Bank Nusa Tenggara Timur	500	
PT BPD Jawa Tengah	25	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5	
PT Bank Central Asia Tbk	2	
PT BPD Lampung	1	
Total	11.513	

The average interest rates for current accounts in other banks in Rupiah are disclosed in (Note 38).

All the above current accounts with other banks are classified as current and are not blocked nor used as collateral as of December 31, 2025 and 2024.

No allowance for impairment loss, were provided as management believes that all current accounts in other banks are collectible.

7. PLACEMENTS IN BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

This account consist of:

	2025	2024
Third parties		
Bank Indonesia Deposit Facility	450.000	
Interbank savings -		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	1
Bank Perkreditan Rakyat	633	
Diskonto	(51)	
Total	450.583	

The average interest rates for placements in Bank Indonesia and other banks in Rupiah are disclosed in (Note 38).

Based on the prevailing Bank Indonesia regulation, all the above placements in Bank Indonesia and other banks are classified as current and are not blocked nor used as collateral as of December 31, 2025 and 2024.

No allowance for impairment loss were provided as management believes that all placements in Bank Indonesia and other banks are collectible.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

8. EFEK-EFEK

Akun ini terdiri dari obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai wajar melalui laba rugi		
<u>Reksadana</u>		
RD MNC Dana SBN	7.520	-
Biaya perolehan diamortisasi		
<u>Obligasi pemerintah Republik Indonesia</u>		
FR0062	280.859	281.120
FR0064	214.682	214.228
PBS005	100.524	100.877
FR0058	17.189	16.963
PBS003	3.159	3.349
Sub jumlah	616.413	616.536
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
<u>Obligasi pemerintah Republik Indonesia</u>		
FR0096	83.546	79.559
FR0100	20.656	19.520
FR0091	20.464	19.287
FR0082	20.855	19.871
	145.521	138.237
<u>Reksadana</u>		
RD Simas Danamas Instrumen Negara	125.630	-
RD Pinnacle Indonesia Bond Fund	10.460	-
	136.090	-
<u>Sekuritas Rupiah Bank Indonesia</u>		
IDSR020126364S	99.984	-
IDSR030125182S	-	75.000
IDSR100125182S	-	75.000
IDSR170125182S	-	50.000
IDSR070325182S	-	98.463
Sub jumlah	99.984	298.463
Jumlah	1.005.527	1.053.236

Sisa umur jatuh tempo efek-efek biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruhnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Lebih dari 1 sampai 5 tahun	217.892	214.228
Lebih dari 5 tahun	398.521	402.308
Jumlah	616.413	616.536

Jatuh tempo dan tanggal pembayaran bunga dari obligasi adalah sebagai berikut:

Kisaran suku bunga untuk efek-efek diungkapkan dalam (Catatan 39).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, klasifikasi kolektibilitas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah lancar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai.

8. SECURITIES

This account consists of government bonds and corporate bonds which are classified as fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income, amortized cost as follows:

Fair value through profit or loss	
<u>Mutual Funds</u>	
RD MNC Dana SBN	
Amortized cost	
<u>Government bonds of Republic Indonesia</u>	
FR0062	
FR0064	
PBS005	
FR0058	
PBS003	
Sub total	
Fair value through other comprehensive	
<u>Government bonds of Republic Indonesia</u>	
FR0096	
FR0100	
FR0091	
FR0082	
<u>Mutual Funds</u>	
RD Simas Danamas Instrumen Negara	
RD Pinnacle Indonesia Bond Fund	
<u>Bank Indonesia Rupiah Securities</u>	
IDSR020126364S	
IDSR030125182S	
IDSR100125182S	
IDSR170125182S	
IDSR070325182S	
Sub total	
Total	

The remaining maturity of securities amortized cost as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

More than 1 year until 5 years	
More than 5 years	
Total	

The maturity periods and interest payment dates of the securities are as follows:

The average interest rates for securities are disclosed in (Note 39).

Based on the prevailing Bank Indonesia regulation, the collectibility classifications of securities as of December 31, 2025 and 2024 are current.

The management believes that there were no impairment loss on securities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	Jatuh Tempo/ Maturity Period
FR0062	15 April 2042/ April 15, 2042
PBS005	15 April 2043/ April 15, 2043
FR0064	15 Mei 2028/ May 15, 2028
PBS003	15 Januari 2027/ January 15, 2027
FR0058	15 Juni 2032/ June 15, 2032

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Akun ini terdiri dari :

Counterparty/ Counterparty	Jenis efek/ Type of securities	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal mulai/ Start date	Jatuh tempo/ Maturity date	Nilai penjualan kembali/ Resale value	Pendapatan bunga yang belum di realisasi/ Unrealized interest income	Nilai tercatat/ Carrying value
Bank Indonesia	VR0070	111.087	31 Des/ Dec 31, 2025	7 Jan/ Jan 7, 2026	108.835	100	108.734
Jumlah		111.087			108.835	100	108.734

10. KREDIT

Akun ini terdiri dari :

a. Jenis kredit

Pihak ketiga
Konsumsi
Modal kerja
Investasi
Jumlah
Cadangan kerugian penurunan nilai

2025	2024
4.657.485	3.241.625
396.986	583.655
14.903	26.002
5.069.373	3.851.281
(180.621)	(243.641)
4.888.752	3.607.640

8. SECURITIES (continued)

Tanggal Pembayaran Bunga/ Interest payment date	Government Bonds of the Republic of Indonesia
15 April dan 15 Oktober/ April 15 and October 15	FR0062
15 April dan 15 Oktober/ April 15 and October 15	PBS005
15 Mei dan 15 November/ May 15 and November 15	FR0064
15 Januari dan 15 Juli/ January 15 and July 15	PBS003
15 Juni dan 15 Desember/ June 15 and December 15	FR0058

9. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

This account consist of :

10. LOANS

This account consist of :

a. Type of loans

Third parties
Consumer
Working capital
Investment
Total
Allowance for impairment losses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas Bank Indonesia

2025						
	Lancar / Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Sub- Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.678	846	22	-	8.373	17.919
Jasa dunia usaha	-	-	-	-	-	-
Industri	139	378	-	-	5.400	5.917
Pembiayaan rumah	799.567	22.021	980	1.194	35.087	858.849
Pengangkutan, Pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	23.660	-	-	-	27.091	50.751
Perikanan	2.292	45.424	-	-	6.379	54.095
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	25.926	25.926
Lain-lain	3.854.911	74.784	3.332	13.333	109.556	4.055.916
Jumlah	4.689.247	143.453	4.334	14.527	217.812	5.069.373
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32.013)	(7.922)	(796)	(2.390)	(137.500)	(180.621)
Jumlah	4.657.234	135.531	3.538	12.137	80.312	4.888.752

Trading, hotel and Restaurant
Business services
Manufacturing
Housing loan
Transportation, warehousing and communication
Construction
Fisheries
Mining and excavation
Others
Sub-total
Allowance for impairment losses
Total

10. LOANS (continued)

b. By Economic Sector and Collectibility of Bank Indonesia

2025						
	Lancar / Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Sub- Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.678	846	22	-	8.373	17.919
Jasa dunia usaha	-	-	-	-	-	-
Industri	139	378	-	-	5.400	5.917
Pembiayaan rumah	799.567	22.021	980	1.194	35.087	858.849
Pengangkutan, Pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	23.660	-	-	-	27.091	50.751
Perikanan	2.292	45.424	-	-	6.379	54.095
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	25.926	25.926
Lain-lain	3.854.911	74.784	3.332	13.333	109.556	4.055.916
Jumlah	4.689.247	143.453	4.334	14.527	217.812	5.069.373
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32.013)	(7.922)	(796)	(2.390)	(137.500)	(180.621)
Jumlah	4.657.234	135.531	3.538	12.137	80.312	4.888.752

Trading, hotel and Restaurant
Business services
Manufacturing
Housing loan
Transportation, warehousing and communication
Construction
Fisheries
Mining and excavation
Others
Sub-total
Allowance for impairment losses
Total

2024

	Lancar / Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Sub- Standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Perdagangan, perhotelan dan restoran	1.116	1.010	-	780	9.510	12.415
Jasa dunia usaha	111.967	249	-	12.318	33.770	158.303
Industri	859	43	-	-	6.833	7.734
Pembiayaan rumah	775	1.627	-	-	652	3.054
Pengangkutan, Pergudangan dan komunikasi	231.913	-	-	-	5.606	237.519
Konstruksi	24.970	-	-	-	80.446	105.416
Perikanan	16.302	45.424	-	-	227	61.953
Pertambangan dan penggalian	-	36	-	-	25.926	25.961
Lain-lain	3.077.718	47.244	6.148	4.669	103.145	3.238.925
Jumlah	3.465.620	95.633	6.148	17.766	266.114	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.300)	(7.489)	(1.169)	(3.847)	(208.836)	(243.641)
Jumlah	3.443.320	88.144	4.979	13.920	57.278	3.607.640

Trading, hotel and Restaurant
Business services
Manufacturing
Housing loan
Transportation, warehousing and communication
Construction
Fisheries
Mining and excavation
Others
Sub-total
Allowance for impairment losses
Total

c. Menurut Jenis Konsumen

	2025		2024	
Individu	4.894.803	97%	3.264.415	85%
Korporat	174.570	3%	586.866	15%
Jumlah	5.069.373	100%	3.851.281	100%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)		(243.641)	
Jumlah	4.888.752		3.607.640	

Individual
Corporate
Total
Allowance for impairment losses
Net

c. By Type of Customers

	2025		2024	
Individu	4.894.803	97%	3.264.415	85%
Korporat	174.570	3%	586.866	15%
Jumlah	5.069.373	100%	3.851.281	100%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)		(243.641)	
Jumlah	4.888.752		3.607.640	

Individual
Corporate
Total
Allowance for impairment losses
Net

10. KREDIT (lanjutan)

- d. Berikut ini adalah saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas:

	2025			2024			
	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses			Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses			
	Jumlah kredit/ Total loans	Bersih/ Net		Jumlah kredit/ Total loans	Bersih/ Net		
Lancar	4.689.249	(32.013)	4.657.236	3.465.620	(22.300)	3.443.320	Current
Dalam perhatian khusus	143.453	(7.921)	135.533	95.633	(7.489)	88.144	Special mention
Kurang lancar	4.334	(797)	3.537	6.148	(1.169)	4.979	Sub-standard
Diragukan	14.526	(2.390)	12.136	17.766	(3.847)	13.919	Doubtful
Macet	217.812	(137.501)	80.311	266.114	(208.836)	57.278	Loss
Jumlah	5.069.373	(180.621)	4.888.752	3.851.281	(243.641)	3.607.640	Total

- e. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2025		2024		
	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses		Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses		
	Jumlah kredit/ Total loans		Jumlah kredit/ Total loans		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.394	7.790	10.289	7.291	Trading, hotel and restaurant
Jasa dunia usaha	-	-	46.087	7.593	Business service
Konstruksi	27.090	13.083	80.446	77.394	Construction
Industri	5.399	1.136	6.833	6.785	Manufacturing
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	5.606	4.278	Transportation, Warehousing and Communication
Pembiayaan rumah	37.260	32.577	652	498	Housing loan
Perikanan	6.378	6.378	227	173	Fisheries
Pertambangan dan Penggalian	25.925	5.936	25.926	25.814	Mining and excavation
Lain-lain	126.218	73.787	113.962	84.026	Others
Jumlah	236.664	140.687	290.028	213.852	Total

10. KREDIT (lanjutan)

f. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya sebagai berikut:

Berdasarkan Periode Perjanjian

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	177.287	272.337
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	49.149	81.446
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	983.036	677.308
Lebih dari 5 tahun	3.859.901	2.820.190
Jumlah	5.069.373	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)	(243.641)
Bersih	4.888.752	3.607.640

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	233.654	457.006
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	181.321	146.997
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	1.261.130	973.637
Lebih dari 5 tahun	3.393.268	2.273.641
Jumlah	5.069.373	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)	(243.641)
Bersih	4.888.752	3.607.640

- g. Kisaran suku bunga untuk kredit yang diberikan diungkapkan dalam (Catatan 38).
- h. Kredit dijamin dengan deposito berjangka, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.
- i. Kredit Restrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kredit yang direstrukturisasi Bank masing-masing adalah Rp49.907 dan Rp65.769 dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp17.780 dan Rp34.389 pada 31 Desember 2025 dan 2024. Kredit yang direstrukturisasi dilakukan dengan mengubah persyaratan pokok dan bunga serta perpanjangan waktu kredit.

Berikut ini adalah saldo kredit yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas:

	2025	2024
Lancar	6.197	27.338
Dalam perhatian khusus	2.598	3.931
Kurang lancar	72	-
Diragukan	-	780
Macet	41.041	33.720
Jumlah	49.908	65.769
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.780)	(34.389)
Bersih	32.129	31.380

10. LOANS (continued)

f. By Maturity

Classification of loans by maturity based on the term of the loans as stated in the loan agreements and the remaining period until its maturity is as follows:

By Period of Contract

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	177.287	272.337
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	49.149	81.446
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	983.036	677.308
Lebih dari 5 tahun	3.859.901	2.820.190
Jumlah	5.069.373	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)	(243.641)
Bersih	4.888.752	3.607.640

By Remaining Period to Maturity

	2025	2024
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	233.654	457.006
Lebih dari 1 sampai 2 tahun	181.321	146.997
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	1.261.130	973.637
Lebih dari 5 tahun	3.393.268	2.273.641
Jumlah	5.069.373	3.851.281
Cadangan kerugian penurunan nilai	(180.621)	(243.641)
Bersih	4.888.752	3.607.640

- g. The average interest rates for loans are disclosed in (Note 38).
- h. Loans are secured with time deposits, registered mortgages over collateral or power of attorney to sell and by other guarantees generally acceptable to the Bank.
- i. Restructured Loans

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of restructured loans amounting to Rp49,907 and Rp65,769 respectively, with related allowance for impairment loss of Rp17,780 and Rp34,389 and as of December 31, 2025 and 2024, respectively. Restructured loans represent change of principal and interest terms and extension in loans terms.

The collectibility classification of restructured loans as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024
Lancar	6.197	27.338
Dalam perhatian khusus	2.598	3.931
Kurang lancar	72	-
Diragukan	-	780
Macet	41.041	33.720
Jumlah	49.908	65.769
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.780)	(34.389)
Bersih	32.129	31.380

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT (lanjutan)

i. Kredit Restrukturisasi

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	243.641	365.754
Pemulihan nilai selama tahun berjalan	(74.780)	(163.166)
Pembentukan nilai selama tahun berjalan	11.760	41.053
Saldo akhir	180.621	243.641

j. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Berikut ini adalah saldo kredit yang mengalami penurunan kolektibilitas dan tidak mengalami penurunan kolektibilitas pada tahun berjalan 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024
Kredit yang mengalami penurunan kolektibilitas	66.664	52.976
Kredit yang tidak mengalami penurunan kolektibilitas	5.002.709	3.798.305
Jumlah kredit	5.069.373	3.851.281

	2025			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah
Saldo awal	26.977	3.172	213.492	243.641
Pembentukan (Pemulihan) periode berjalan	11.761	(844)	(73.936)	(63.020)
Saldo akhir periode	38.738	2.328	139.556	180.621

	2024			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah
Saldo awal	32.323	27.324	306.107	365.754
Pembentukan (Pemulihan) periode berjalan	(5.346)	(24.152)	(92.615)	(122.113)
Saldo akhir periode	26.977	3.172	213.492	243.641

Tingkat Pemenuhan Penurunan Nilai

	2025	2024
Penurunan nilai sesuai dengan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia	230.684	239.295
Tingkat pemenuhan	78,30%	101,82%

Peraturan Bank Indonesia terkait penurunan nilai adalah No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Sejak 24 Oktober 2012, Bank mengikuti PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit.

10. LOANS (continued)

i. Restructured Loans

Changes in allowances for impairment losses on loans are as follows:

	2025	2024
Saldo awal	243.641	365.754
Pemulihan nilai selama tahun berjalan	(74.780)	(163.166)
Pembentukan nilai selama tahun berjalan	11.760	41.053
Saldo akhir	180.621	243.641

j. Allowance for Impairment Losses

The following are credit balances that have decreased in collectability and have not experienced a decrease in collectability in the current year December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024
Kredit yang mengalami penurunan kolektibilitas	66.664	52.976
Kredit yang tidak mengalami penurunan kolektibilitas	5.002.709	3.798.305
Jumlah kredit	5.069.373	3.851.281

	2025			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah
Saldo awal	26.977	3.172	213.492	243.641
Pembentukan (Pemulihan) periode berjalan	11.761	(844)	(73.936)	(63.020)
Saldo akhir periode	38.738	2.328	139.556	180.621

	2024			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah
Saldo awal	32.323	27.324	306.107	365.754
Pembentukan (Pemulihan) periode berjalan	(5.346)	(24.152)	(92.615)	(122.113)
Saldo akhir periode	26.977	3.172	213.492	243.641

Tingkat Pemenuhan Penurunan Nilai

	2025	2024
Penurunan nilai sesuai dengan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia	230.684	239.295
Tingkat pemenuhan	78,30%	101,82%

Bank Indonesia regulation relate to impairment is No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 on Assets Quality Rating for Commercial Banks as amended by PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009. Since October 24, 2012, the Bank followed the PBI No. 14/15/PBI/2012 date October 24, 2012 about Assessment of Commercial Bank Asset Quality.

The management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover impairment loss on uncollectible loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

10. KREDIT (lanjutan)

- k. Mutasi kredit yang dihapus buku untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 36a), adalah sebagai berikut:

	2025
Saldo awal	1.875.257
Kenaikan / (Penurunan)	54.466
Saldo akhir	1.929.723

- l. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK)
- m. Rasio *Non-performing Loan* (NPL) Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rasio NPL secara bruto masing-masing sebesar 4,67 % dan 7,53 % sedangkan rasio NPL secara neto masing-masing sebesar 1,92% dan 1,98%.
- n. Kredit konsumsi sebagian besar adalah kredit yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten yang dipergunakan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor dan kebutuhan konsumtif lainnya.
- o. Kredit modal kerja terdiri dari kredit berjangka, kredit rekening koran, kredit akseptasi dan cerukan yang diberikan kepada debitur untuk keperluan modal kerja.
- p. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk pembelian barang modal.
- q. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat kredit sindikasi yang diberikan oleh Bank.
- r. Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank dibebani bunga masing-masing 6,00% - 7,20% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 dengan jangka waktu pelunasan berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun dan dibayar melalui pemotongan gaji bulanan.
- s. Rasio kredit usaha mikro kecil terhadap jumlah kredit sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 adalah sebesar 4,65% dan 2,96% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
- u. Jumlah kredit yang dijamin dengan agunan tunai masing-masing sebesar Rp209.794 dan Rp314.465 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
- v. Seluruh saldo kredit dalam mata uang Rupiah.
- w. Jumlah biaya transaksi (provisi) yang menjadi bagian dari kredit adalah RpNihil ada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

10. LOANS (continued)

- k. The movement of loans written-off for the period ended December 31, 2025 and 2024 (Note 36a), are as follows:

	2024	
	1.888.620	Beginning balance
	(13.363)	Increase / (Decrease)
	1.875.257	Ending balance

- l. As of December 31, 2025 and 2024, the Bank was in compliance with Legal Lending Limits (BMPK).
- m. The ratio of *Non-performing Loan* (NPL) in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011. As of December 31, 2025 and 2024, ratio of NPL gross of allowance for impairment losses is 4.67% and 7.53% respectively, while the ratio of NPL net (net of allowance for impairment losses) is 1.92% and 1.98% respectively.
- n. Some of consumer loans are the loans that granted to Banten Provincial Civil State Apparatus which are used for the purchase of houses, vehicles and other consumptive needs.
- o. Working capital loans consist of term loans, overdraft loans, acceptances loans and overdrafts granted to borrowers for working capital purposes.
- p. Investment loans is a medium or long-term loans granted to debtor for the purchase of capital assets.
- q. As of December 31, 2025 and 2024, there were no syndicated loans granted by the Bank.
- r. The Bank charged interest for loans granted to employees for 6.00% - 7.20% per annum for year ended December 31, 2025 and 2024 with repayment periods ranging from 1 to 15 years and paid through monthly payroll deductions, respectively.
- s. The ratio of micro business loans to total loans in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/30/DPNP dated December 16, 2011 is 4.65% and 2.96% on December 31, 2025 and 2024, respectively.
- u. Total loans with cash collateral amounting to Rp209,794 and Rp314,465 respectively, as of December 31, 2025 and 2024.
- v. All loans are denominated in Rupiah.
- w. Total of transaction costs (fees), which became part of the loans is RpNil as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

11. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	2025
Kredit	22.534
Efek-efek	11.708
Jumlah	34.242

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	2025
Asuransi:	
Asuransi Jamkrida	712.179
Asuransi lainnya	38.505
Sewa	1.671
Promosi dan hadiah	227
Lain-lain	637
Jumlah	753.219

Asuransi

Pada tanggal 3 Maret 2021 Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan surat perjanjian kerjasama No.007/DIR/PKS/III/2021 dan No. 028/PKS/DIR-BB/III/21 terkait Penjaminan Kredit Mikro Eks Bank Pundi dengan nilai penjaminan maksimal Rp800.000.000.000 (nilai penuh) dan jangka waktu 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2030.

Berdasarkan sertifikat penjaminan No.PKP-03-2022 30-0002 tanggal diterbitkan 24 Maret 2021 Bank telah mengikat Penjaminan kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten terkait Penjaminan Kredit Mikro Eks Bank Pundi dengan nilai jumlah kredit sebesar Rp771.220.970.581 (nilai penuh) dengan biaya penjaminan sebesar Rp778.933.180.293 (nilai penuh).

Berdasarkan sertifikat penjaminan No.PKP-12-2023 30-0064 tanggal diterbitkan 22 Desember 2023 Bank telah mengikat Penjaminan kredit kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten terkait Penjaminan Kredit Mikro Eks Bank Pundi dengan nilai jumlah kredit sebesar Rp170.089.770.349 (nilai penuh) dengan biaya penjaminan sebesar Rp171.790.668.053 (nilai penuh).

Pada tahun 2023 Bank membuat Petunjuk Teknis No.004/Juknis/AKT-BB/XII/2023 tentang Mekanisme Proses Akuntansi Atas Transaksi Penjaminan Jamkrida, sekaligus merevisi Memorandum No.137/M/DIR-BB/III/2021 tentang mekanisme Hapus Buku Kredit Mikro Eks-Pundi/Eksekutif dengan skema Penjaminan kepada Jamkrida Banten, bahwa pencatatan dan pengakuan transaksi penjaminan kredit Jamkrida sebesar nilai pokok yang dijaminan sesuai klausul subrogasi akan berkurang sesuai dengan hasil penagihan yang dilakukan Bank, dan untuk biaya premi sebesar 1% yang dibayarkan oleh Bank akan dilakukan amortisasi selama jangka waktu sertifikat penjaminan.

Asuransi yang dijaminan Bank ke PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah sebagai berikut:

11. ACCRUED INTEREST RECEIVABLE

This account consists of:

	2024
	13.336
	11.706
Total	25.042

*Loans
Securities
Total*

12. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2024
	733.728
	16.612
	7.471
	559
	20.994
Total	779.365

*Insurance:
Jamkrida insurance
Others insurance
Lease
Promotions and gifts
Others
Total*

Insurance

On March 3, 2021, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Penjaminan Kredit Daerah Banten with a cooperation agreement letter No. 007/DIR/PKS/ III/2021 and No. 028/PKS/DIR-BB/III/21 related to Micro Credit Guarantee for Ex-Pundi Bank with a maximum guarantee value of Rp800,000,000,000 (full amount) and a period of December 1, 2020 to November 30, 2030.

Based on the guarantee certificate No.PKP-03-2022 30-0002 issued date March 24, 2021, the Bank has binded a credit guarantee to PT Penjaminan Kredit Daerah Banten regarding Micro Credit Guarantee of Ex Pundi Bank with a total credit value of Rp771,220,970,581 (full amount) with a guarantee fee of Rp778,933,180,293 (full amount).

Based on the guarantee certificate No.PKP-12-2023 30-0064 issued date December 22, 2023, the Bank has binded a credit guarantee to PT Penjaminan Kredit Daerah Banten regarding Micro Credit Guarantee of Ex Pundi Bank with a total credit value of Rp170,089,770,349 (full amount) with a guarantee fee of Rp171,790,668,053 (full amount).

In 2023 the Bank will make Technical Instructions No.004/Juknis/AKT-BB/XII/2023 concerning Accounting Process Mechanism for Jamkrida Guarantee Transactions, while revising Memorandum No.137/M/DIR-BB/III/2021 concerning the mechanism for writing off Ex-Pundi/Executive Micro Credit Books with a Guarantee Scheme to Jamkrida Banten, that the recording and recognition of Jamkrida credit guarantee transactions is in the amount of the principal amount guaranteed in accordance with the subrogation clause will be reduced according to the results of the collection carried out by the Bank, and the 1% premium fee paid by the Bank will be amortized over the term of the guarantee certificate.

The insurance guaranteed by the Bank to PT Penjaminan Kredit Daerah Banten is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

12. PREPAID EXPENSES (continued)

	2025	2024	
Saldo awal pokok asuransi jamkrida:			Jamkrida insurance principal starting balance:
Nilai kredit	727.464	763.959	Credit value
Nilai premi	7.275	7.277	Premi value
Mutasi:	734.739	771.236	Mutation:
Rekening perantara liabilitas segera (Catatan 17)	(21.551)	(36.494)	Immediate liability brokerage Account (Note 17)
Amortisasi asuransi (Catatan 29)	(1.009)	(1.014)	Amortization insurance (Note 29)
	(22.560)	(37.508)	
Saldo akhir	712.179	733.728	Ending balance

Biaya amortisasi pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.009 dan Rp1.014 (Catatan 28).

The amortization of general and administrative expenses as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp1,009 and Rp1,014 (Note 28).

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS

Rincian aset tetap sebagai berikut:

The detail of fixed assets as follows:

	2025					
	Perubahan selama periode berjalan /Changes during the period					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung						Direct ownership
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Cost</u>
Tanah	-	7.376	-	-	7.376	Land
Bangunan	-	132.193	-	-	132.193	Buildings
Renovasi bangunan yang disewa	166.653	4.452	-	19	171.124	Leasehold
Kendaraan	2.589	18	-	-	2.607	Improvement
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	138.221	4.168	-	-	142.389	Vehicles
Aset dalam pembangunan	19	-	-	(19)	-	Office equipment, machine and furnitures
	307.482	148.207	-	-	455.689	Assets under construction
Aset sewa guna	40.002	1.786	(6.918)	-	34.870	Right of use of assets
Jumlah	347.483	149.993	(6.918)	-	490.558	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Renovasi bangunan yang disewa	161.857	1.964	-	-	163.821	Leasehold
Kendaraan	2.589	-	-	-	2.589	Improvement
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	133.227	3.305	-	-	136.532	Vehicles
	297.673	5.269	-	-	302.942	Office equipment, machine and furnitures
Aset sewa guna	21.634	4.892	(6.918)	-	19.608	Right of use of assets
Jumlah	319.307	10.161	(6.918)	-	322.550	Total
Nilai Tercatat	28.176				168.008	Net-carrying value

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE OF ASSETS
(continued)**

		2024						
		Perubahan selama periode berjalan /Changes during the period						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Pemilikan langsung							Direct ownership	
Biaya perolehan							Cost	
Renovasi bangunan		165.141	1.512	-	-	166.653	Leasehold	
yang disewa							Improvement	
Kendaraan		2.589	-	-	-	2.589	Vehicles	
Perlengkapan, mesin		136.846	1.375	-	-	138.221	Office equipment,	
dan peralatan kantor							machine and furnitures	
Aset dalam pembangunan		-	19	-	-	19	Assets under construction	
		304.576	2.906	-	-	307.482		
Aset sewa guna		39.750	6.695	-	(6.443)	40.002	Right of use of assets	
Jumlah		344.326	9.600	-	(6.443)	347.483	Total	
<u>Akumulasi penyusutan</u>							<u>Accumulated depreciation</u>	
Renovasi bangunan		157.417	4.440	-	-	161.857	Leasehold	
yang disewa							Improvement	
Kendaraan		2.589	-	-	-	2.589	Vehicles	
Perlengkapan, mesin		129.991	3.236	-	-	133.227	Office equipment,	
dan peralatan kantor							machine and furnitures	
		289.997	7.676	-	-	297.673		
Aset sewa guna		22.009	6.068	-	(6.443)	21.634	Right of use of assets	
Jumlah		312.006	13.744	-	(6.443)	319.307	Total	
Nilai Tercatat		32.320				28.176	Net-carrying value	

Beban penyusutan yang dibebankan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.161 dan Rp13.744 (Catatan 28).

Depreciation charged to profit and loss for year ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp10,161 and Rp13,744, respectively (Note 28).

Berdasarkan surat Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda Terbuka) tanggal 30 Desember 2025. Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Bank berupa tanah dan bangunan senilai Rp139.569

Based on Banten Province Regional Regulation Number 4 of 2025 concerning Regional Capital Participation to the Limited Liability Company Banten Regional Development Bank (Perseroda Terbuka) dated December 30, 2025. With this Regional Regulation, the Regional Government has made Regional Capital Participation to the Bank in the form of land and buildings worth Rp139,569.

Aset tetap (termasuk aset yang disewa), kecuali tanah, diasuransikan pada PT Asuransi Askrida Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar Rp70.640 pada tanggal 31 Desember 2023. Pada 31 Desember 2024, diasuransikan pada PT Asuransi Asei Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp165, Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets (include leased assets), except land, are insured with PT Asuransi Askrida Syariah, amounting to Rp and Rp70,640 as of December 31, 2023. On December 31, 2024, they are insured with PT Asuransi Asei Indonesia with a value coverage amounting to Rp165. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover impairment loss on the assets insured.

Aset tetap (termasuk aset yang disewa), kecuali tanah, diasuransikan pada Asuransi Sinar Mas dengan nilai pertanggungan sebesar Rp73.935 pada tanggal 14 April 2025.

Fixed assets (including leased assets), except land, are insured with Sinar Mas Insurance with a coverage value of Rp73,935 as of April 14, 2025.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.

Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned assets.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp168.008 dan Rp278.252

As of December 31, 2025 and 2024, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still used amounting to Rp168,008 and Rp278,252 respectively.

14. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Nilai tercatat	3.623	3.623
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.252)	(1.252)
Jumlah	2.371	2.371

Agunan yang diambil alih terdiri dari tanah dan bangunan.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.252.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dapat terealisasinya agunan yang diambil alih tersebut.

15. ASET TAK BERWUJUD

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Aset tak berwujud	80.386	28.708
Jumlah	80.386	28.708

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Perangkat lunak:		
Biaya perolehan		
Saldo awal	108.906	97.556
Penambahan	57.222	11.350
Saldo akhir	166.128	108.906
Akumulasi amortisasi		
Saldo awal	(92.864)	(89.375)
Penambahan	(7.116)	(3.488)
Saldo akhir	(99.979)	(92.864)
	66.149	16.043
Hak paten:		
Biaya perolehan		
Saldo awal	114	114
Penambahan	80	-
Saldo akhir	194	114
Akumulasi amortisasi		
Saldo awal	(104)	(97)
Penambahan	(5)	(7)
Saldo akhir	(109)	(104)
	85	10

Perangkat lunak - sedang dalam penyelesaian	14.152	12.655
Jumlah nilai tercatat	80.386	28.708

Biaya amortisasi aset takberwujud dicatat pada beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.116, dan Rp3.488 (Catatan 28).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sisa umur dari perangkat lunak berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun dan hak paten berkisar 7 tahun dan dapat diperpanjang.

14. FORECLOSED ASSETS

This account consists of:

	2025	2024	
Nilai tercatat	3.623	3.623	Cost
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.252)	(1.252)	Allowance for impairment losses
Jumlah	2.371	2.371	Total

Foreclosed assets consist of land and buildings.

Changes in the allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp1,252.

Management believes that the allowance for impairment losses of the foreclosed assets is adequate to cover all possible losses that may arise.

15. INTANGIBLE ASSETS

This account consists of:

	2025	2024	
Aset tak berwujud	80.386	28.708	Intangible assets
Jumlah	80.386	28.708	Total

The details of intangible assets are as follows:

	2025	2024	
Perangkat lunak:			Software:
Biaya perolehan			Cost
Saldo awal	108.906	97.556	Beginning balance
Penambahan	57.222	11.350	Addition
Saldo akhir	166.128	108.906	Ending balance
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortization
Saldo awal	(92.864)	(89.375)	Beginning balance
Penambahan	(7.116)	(3.488)	Addition
Saldo akhir	(99.979)	(92.864)	Ending balance
	66.149	16.043	
Hak paten:			Patent:
Biaya perolehan			Cost
Saldo awal	114	114	Beginning balance
Penambahan	80	-	Addition
Saldo akhir	194	114	Ending balance
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortization
Saldo awal	(104)	(97)	Beginning balance
Penambahan	(5)	(7)	Addition
Saldo akhir	(109)	(104)	Ending balance
	85	10	

Perangkat lunak - sedang dalam penyelesaian	14.152	12.655	Software - in progress
Jumlah nilai tercatat	80.386	28.708	Total carrying value

The amortization intangible asset costs recorded in general and administrative expenses as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp7,116 and Rp3,488 respectively (Note 28).

As of December 31, 2025, the remaining terms of software ranged from 1 to 5 years and patent ranged 7 years and are renewable.

16. ASET LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

Beban yang ditangguhkan	
Tagihan - tagihan	
Persediaan kantor	
Lainnya	
Jumlah	

2025	2024
892.548	472.076
66.953	66.346
4.798	6.707
4.490	79.433
968.789	624.562

Deferred charges
Billing
Office supplies
Others
Total

a. Tagihan - tagihan

Tagihan tagihan merupakan tagihan atas penarikan kliring, transaksi atm, tagihan pinjaman dan tagihan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tagihan transaksi atm	
Tagihan bag. pinjaman	
Tagihan bag. kliring	
Tagihan lainnya	

2025	2024
14.258	23.109
1.478	1.074
916	917
50.300	41.245
66.953	66.346

ATM transaction billing
Loan billing
Clearing billing
Other billing

b. Persediaan kantor

Persediaan kantor merupakan persediaan barang cetakan, persediaan materai perangko dan persediaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Barang cetak	
Materai dan perangko	
Lainnya	

2025	2024
2.289	2.244
625	1.497
1.885	2.966
4.798	6.707

Printed goods
Stamps and stamps
Others

c. Beban yang ditangguhkan

BYD aspek keuangan	
BYD Restrukturisasi	
BYD pajak tangguhan	
BYD perpajakan	
BYD lainnya	

2025	2024
275.064	-
128.892	129.243
114.688	-
32.269	-
341.635	342.833
892.548	472.076

BYD financial aspects
BYD Restructuring
BYD deferred tax
BYD taxation
BYD Others

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

a. Billing

Deferred charges are costs for restructuring and other costs which are costs that must be paid by the company, with the following details:

b. Office supplies

Office supplies represent printed materials, postage stamps and other supplies with the following details:

c. Deferred charges

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Pada tahun 2025 Bank Banten mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembebanan Biaya Yang Ditangguhkan (BYD) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Action Plan Penyehatan per 7 April 2021. Jadwal pembebanan yang berlaku saat ini berakhir pada tahun 2030 dinilai dapat mempengaruhi sustainability serta going concern Bank Banten dalam jangka panjang. Sehingga bank telah menyusun dan mengajukan *Action Plan* Penyehatan (APP) sebagai upaya penyehatan dan penguatan kondisi keuangan bank melalui surat Direksi Bank Banten No.1187/Dir-BB/VIII/2025 ditunjukkan kepada Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Provinsi Banten). Dan dari permohonan tersebut telah di setujui Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham pengendali melalui komitmen gubernur dengan No.194/2025 tanggal 15 Oktober 2025 dan No.267/2025 tanggal 28 November 2025 yang ditunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan pernyataan pengungkapan permodalan Bank Banten. Selanjutnya Bank Banten mengajukan permohonan relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.1243/Dir-BB/IX/2025 perihal berupa perpanjangan jangka waktu periode penambahan BYD yang semula berakhir pada tahun 2030 menjadi 2035.

Keterangan	Jumlah	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aspek Keuangan APP I	1.200.414	1.000	15.923	35.827	51.751	67.674	83.597	188.928	188.928	188.928	188.928	188.928
Aspek Keuangan pada Due Diligence per 31 Des 25	275.064	-	3.649	8.210	11.858	15.507	19.156	43.337	43.337	43.337	43.337	43.337
Aspek Perpajakan pada Due Diligence per 31 Des 25	32.269	-	428	963	1.391	1.819	2.247	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
Aset Pajak Tangguhan	115.688	1.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	8.938	8.938	8.938	8.938	8.936
Rencana Pembebanan BYD	1.623.435	2.000	25.000	55.000	80.000	105.000	125.000	246.287	246.287	246.287	246.287	246.285
Sisa BYD		1.621.435	1.596.435	1.541.435	1.461.435	1.356.435	1.231.435	985.147	738.860	492.573	246.285	0

Kebijakan ini secara strategis ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan, kelangsungan usaha dan keberlanjutan Bank Banten dengan mengelola beban keuangan secara lebih realistis dan terukur.

Total nilai biaya yang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pembebanan adalah Rp 1.623 triliun yang terdiri dari biaya APP 1 tahun 2021 sebesar Rp1.2 triliun, Hasil Due Diligence konsultan independent EY sebesar Rp275 miliar, Biaya Yang Ditangguhkan (BYD) teknologi Informasi dan lainnya sebesar Rp32 miliar, dan Aset Pajak Tangguhan Rp115 miliar.

Biaya amortisasi atas BYD restrukturisasi dan BYD lainnya dicatat pada beban non operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.701 dan Rp10.000 (Catatan 30).

Pada tanggal 23 Desember 2024, Berdasarkan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris No.011/RR/KOM-DIR/XII/2024, manajemen Bank telah melakukan penyesuaian jumlah pembebanan biaya diamortisasi untuk tahun 2024 menjadi sebesar Rp10.000 dengan memperhatikan kebijakan yang dibuat manajemen Bank tahun 2020 perihal penyesuaian biaya yang ditangguhkan dan kinerja keuangan bank tahun 2024.

16. OTHER ASSETS (continued)

In 2025, Bank Banten experienced difficulties in fulfilling the obligation to charge Deferred Costs (BYD) according to the schedule set out in the Restructuring Action Plan as of April 7, 2021. The current charging schedule ends in 2030 and is considered to affect the sustainability and going concern of Bank Banten in the long term. Therefore, the bank has prepared and submitted a Restructuring Action Plan (APP) as an effort to rehabilitate and strengthen the bank's financial condition through a letter from the Board of Directors of Bank Banten No. 1187 / Dir-BB / VIII / 2025 addressed to the Controlling Shareholder (Governor of Banten Province). And from this application, the Banten provincial government has approved it as the controlling shareholder through the governor's commitment with No. 194 / 2025 dated October 15, 2025 and No. 267 / 2025 dated November 28, 2025 shown to the Financial Services Authority (OJK) by providing a statement of disclosure of Bank Banten's capital. Furthermore, Bank Banten submitted a relaxation request to the Financial Services Authority (OJK) through letter No. 1243/Dir-BB/IX/2025 regarding the extension of the BYD addition period which originally ended in 2030 to 2035.

This policy is strategically intended to maintain financial soundness, business continuity, and the sustainability of Bank Banten by managing financial expenses in a more realistic and measurable manner.

The total amount of costs proposed for the extension of the amortization period is Rp1,623 trillion, consisting of: APP 1 costs in 2021 amounting to Rp1,2 trillion, Due diligence results from the independent consultant EY amounting to Rp275 billion, Deferred Charges (BYD) related to Information Technology and others amounting to Rp32 billion, and Deferred Tax Assets amounting to Rp115 billion.

Amortization costs for BYD restructuring and other BYD are recorded in non-operating expenses at December 31, 2025 2024 amounting to Rp2,701 and Rp10,000 (Note 30)

On December 23, 2024, Based on the Minutes of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting Number: 011/RR/KOM-DIR/XII/2024, the Bank's management has adjusted the amortized cost charge for 2024 to Rp10,000 by considering the policies taken by the Bank's management in 2020 regarding the adjustment of deferred costs and the Bank's financial performance in 2024.

17. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Rekening perantara asuransi	21.551	36.494
Utang bunga	18.735	13.420
Lain-lain	59.731	92.456
Jumlah	100.017	142.370

Immediate liability insurance
Interest payable
Others
Total

18. SIMPANAN DARI NASABAH

Akun ini terdiri dari:

	2025			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	1.663	721.974	723.637	Demand deposits
Tabungan	828	779.920	780.748	Savings
Deposito berjangka	19.424	4.896.506	4.915.930	Time deposits
Jumlah	21.915	6.398.400	6.420.315	Total

	2024			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	431.700	235.394	667.094	Demand deposits
Tabungan	11	711.611	711.622	Savings
Deposito berjangka	28.688	3.448.437	3.477.125	Time deposits
Jumlah	460.399	4.395.442	4.855.841	Total

a. Giro

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar RpNihil pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo giro seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Kisaran suku bunga untuk giro diungkapkan dalam (Catatan 38).

b. Tabungan

Tabungan yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan atas kredit sebesar RpNihil pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo tabungan seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Kisaran suku bunga untuk tabungan diungkapkan dalam (Catatan 38).

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

This account consists of:

a. Demand deposits

Demand deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to RpNil as of December 31, 2025 and 2024. All demands deposits are in Indonesian Rupiah.

The ranges of interest rates for demand deposits are disclosed in (Note 38).

b. Savings

Savings blocked and pledged as loan collateral amounting to RpNil on December 31, 2025 and 2024. All savings are denominated in Indonesian Rupiah.

The ranges of interest rates for savings deposits are disclosed in (Note 38).

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

Berdasarkan Jangka Waktu Kontrak

By Period of Contract

2025					
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total			
Kurang dari atau 1 bulan	-	1.519.134	1.519.134	1 month or less	
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	9.057	2.122.352	2.131.409	More than 1 month until 3 months	
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	1.077	722.612	723.689	More than 3 months until 6 months	
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	9.290	530.378	539.668	More than 6 months until 12 months	
Lebih dari 12 bulan	-	2.030	2.030	More than 12 months	
19.424	4.896.506	4.915.930			

2024					
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total			
Kurang dari atau 1 bulan	8.963	881.916	890.879	1 month or less	
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	19.107	1.616.230	1.635.337	More than 1 month until 3 months	
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	618	779.022	779.640	More than 3 months until 6 months	
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	166.151	166.151	More than 6 months until 12 months	
Lebih dari 12 bulan	-	5.118	5.118	More than 12 months	
28.688	3.448.437	3.477.125			

Berdasarkan Jatuh Tempo

By Remaining Period to Maturity

2025					
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total			
Kurang dari atau 1 bulan	500	-	500	1 month or less	
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	-	1.000	1.000	More than 1 month until 3 months	
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	17.847	3.994.541	4.012.388	More than 3 months until 6 months	
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	1.077	569.163	570.240	More than 6 months until 12 months	
Lebih dari 12 bulan	-	331.802	331.802	More than 12 months	
19.424	4.896.506	4.915.930			

2024					
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total			
Kurang dari atau 1 bulan	8.963	881.916	890.879	1 month or less	
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	19.107	1.616.230	1.635.337	More than 1 month until 3 months	
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	618	779.022	779.640	More than 3 months until 6 months	
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	166.151	166.151	More than 6 months until 12 months	
Lebih dari 12 bulan	-	5.118	5.118	More than 12 months	
28.688	3.448.437	3.477.125			

Kisaran suku bunga untuk deposito berjangka diungkapkan dalam (Catatan 38).

The ranges of interest rates for time deposits are disclosed in (Note 38).

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp45.466 dan Rp107.663 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo deposito berjangka seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Time deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp45,466 and Rp107,663 as of December 31, 2025 and 2024, respectively. All time deposits are in Indonesian Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat sertifikat deposito yang di amortisasi pada tahun berjalan.

As of December 31, 2025 and 2024, there is no deposits certificate that amortized on current year.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Rincian simpanan dari bank lain terdiri atas:

	2025			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Deposito berjangka	-	1.078.997	1.078.997	Time deposits
Giro	4.013	170.533	174.546	Demand Deposit
Tabungan	-	20.085	20.085	Savings
	4.013	1.269.615	1.273.628	

	2024			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Deposito berjangka	-	533.372	533.372	Time deposits
Giro	3.297	143.795	147.092	Demand Deposit
Tabungan	-	13.564	13.564	Savings
	3.297	690.731	694.028	

Jangka waktu kontrak simpanan dari bank lain, kecuali deposito berjangka, adalah kurang dari atau satu bulan. Jangka waktu kontrak deposito berjangka dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kurang dari atau 1 bulan	480.342	160.659	1 month or less
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	393.350	243.106	More than 1 month until 3 months
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	131.255	17.755	More than 3 months until 6 months
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	74.050	111.852	More than 6 months until 12 months
	1.078.997	533.372	

Kisaran suku bunga untuk simpanan dari bank lain diungkapkan dalam (Catatan 38).

Giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp27.100 dan Rp19.570 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Saldo giro seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Bank adalah sebesar Rp81.055 and Rp186.317 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2024. Saldo deposito berjangka seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Period of contract of deposits from other banks, except time deposits, is a month or less. Period of contract of time deposits from other banks are as follow:

The ranges of interest rates for deposits from other banks are disclosed in (Note 38).

Demand deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp27,100 and Rp19,570 as of December 31, 2025 and 2024. All demands deposits are in Indonesian Rupiah.

Time deposits blocked out and pledged as loan collateral amounting to Rp81,055 and Rp186,317 as of December 31, 2025 and 2024, respectively. All time deposits are in Indonesian Rupiah.

20. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pajak BPHTB	6.979	-	BPHTB tax
Pasal 4 (2)	5.762	3.498	Article 4 (2)
Pasal 21	194	244	Article 21
Pasal 23	90	158	Article 23
PPN	21	83	PPN
Pasal 26	13	-	Article 26
	13.060	3.982	

Besarnya pajak penghasilan terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai "Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak. Ketentuan peralihan dari Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perpajakan untuk tahun fiskal 2007 dan sebelumnya dapat ditetapkan oleh DJP paling lambat pada akhir tahun 2013.

20. TAXES PAYABLE

This account consists of:

The filing of tax returns is based on the Bank's self-assessment of tax liabilities. Based on the Law No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 Regarding General Rules and Procedures of Taxation" which are applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax becomes due. The transitional provisions of the said Law stipulate that taxers for fiscal year 2007 and before maybe assessed by the DGT at the latest at the end of 2013.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kewajiban aspek keuangan	72.828	-
Kewajiban risiko perpajakan	32.269	-
Kewajiban transaksi ATM	27.006	37.238
Asuransi	18.398	7.119
Liabilitas sewa guna usaha	1.047	1.897
Setoran jaminan	2.804	646
Lain-lain	103.239	72.482
	257.591	119.383

Asuransi adalah pembayaran asuransi dari debitur atas kredit yang diberikan untuk kemudian dibayarkan ke perusahaan asuransi.

21. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

Financial liabilities
Tax risk liabilities
ATM transaction liabilities
Insurance
Leases liabilities for business
Security deposits
Others

Insurance is the payment of the debtor for loans and then paid to the insurance company.

22. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan kepemilikan saham Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The details of the Bank's shareholders and their shareholdings as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025 dan/and 2024				
Jenis saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Nilai nominal (Jumlah penuh)/ Nominal amount (Full amount)	Jumlah/ Total	Types of shares
Saham seri A	1.075.511.715	1000	1.075.512	Series A shares
Saham seri B	5.335.431.323	180	960.378	Series B shares
Saham seri C:	45.459.495.228	50	2.272.974	Series C shares
Sub - jumlah	51.870.438.266		4.308.864	Sub - total

2025				
Nama pemegang saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Types of shares
Pemerintah Provinsi Banten	34.289.755.661	66,11%	2.139.556	Banten Provincial Government
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	27.511.900	0,05%	2.154	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Public (each below 5%)
	17.553.170.705	33,84%	2.167.154	
	51.870.438.266		4.308.864	

2024				
Nama pemegang saham	Jumlah saham (Jumlah penuh)/ Number of shares (Full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	Types of shares
Pemerintah Provinsi Banten	34.289.755.661	66,11%	2.139.556	Banten Provincial Government
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	17.580.682.605	33,89%	2.169.308	Public (each below 5%)
	51.870.438.266		4.308.864	

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10 tanggal 21 Juli 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 saham biasa seri B. Setiap pemegang saham yang memiliki 1.000 saham biasa seri A berhak membeli 3.293 saham biasa seri B dengan harga penawaran sebesar Rp18,35 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 29 Juli 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-384/D.04-16.

Based on the Extraordinary Shareholders' Meeting, as documented in Notarial Deed No. 10, dated July 21, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, the Bank's shareholders approved the limited public offering IV in issuance of rights for existing shareholders at a maximum of 35,416,600,785 series B common shares. The shareholder can exercise the rights to purchase 3,293 series B common shares for every 1,000 series A common shares held at Rp18.35 (full amount) per share. On July 29, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Financial Services Authority in Letter No. S-384/D.04-16.

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 35 tanggal 31 Oktober 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham biasa seri B. Pada tanggal 24 Nopember 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-694/D-04/2016.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penawaran umum terbatas IV dan V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 53.354.313.204 lembar saham dengan nilai nominal Rp18 (jumlah penuh) yang berasal dari penawaran umum terbatas IV sebanyak 35.416.600.785 lembar dan penawaran umum terbatas V sebanyak 17.937.712.419 lembar dan dengan demikian jumlah seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 64.109.430.357 lembar saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 06 tanggal 11 Februari 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 37.431.400.914 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (jumlah penuh), dengan demikian seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 43.842.343.952 jumlah lembar saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07 tanggal 6 Desember 2021 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham Bank telah menyetujui penawaran umum terbatas VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Bank telah menambah 8.028.094.314 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (jumlah penuh), dengan demikian seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi 51.870.438.266 jumlah lembar saham.

Berdasarkan laporan informasi atau fakta material tanggal 05 November 2025, dalam rangkaian dari pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dimana Bank Jatim telah melakukan pembelian saham perseroan di *Secondary Market* dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham dengan komposisi sebesar 0,05%.

22. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Extraordinary Shareholders' Meeting, as documented in Notarial Deed No. 35, dated October 31, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, the Bank's shareholders approved the limited public offering V in issuance of rights for existing shareholders at a maximum of 17,937,712,419 series B common shares. On November 24, 2016, the Bank obtained the notice of effectivity from the Financial Services Authority in Letter No.S-694/D-04/2016.

Based on the results of limited public offering IV and V with pre-emptive rights to the Bank's shareholders, the Bank has added 53,354,313,204 shares with nominal value Rp18 (full amount) derived from limited public offering IV for 35,416,600,785 shares and limited public offering V for 17,937,712,419 and thus the Bank's total shares issued and fully paid increased to become 64,109,430,357 shares.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as stated in the Deed No. 06 dated February 11, 2021 from Syarifudin, SH, Notary in Tangerang City, the Bank's shareholders have approved a limited public offering VI with Pre-emptive Rights (HMETD), the Bank has added 37,431,400,914 shares with a nominal value of Rp50 (full amount), thus all issued and fully paid shares of the Bank increased to 43,842,343,952 total shares.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as stated in the Deed No. 07 December 6, 2021 from Syarifudin, SH, Notary in Tangerang City, the Bank's shareholders have approved a limited public offering VII with Pre-emptive Rights (HMETD), the Bank has added 8,028,094,314 shares with a nominal value of Rp50 (full amount), thus the total number of issued and fully paid shares of the Bank increased to 51,870,438,266 total shares.

Based on the material information or fact report dated November 5, 2025, in a series of implementation of the Bank Business Group (KUB) between PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, where Bank Jatim has purchased the company's shares in the Secondary Market at a price of Rp27 with a total of 275,119 lots or 27,511,900 shares with a composition of 0.05%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Surat dari Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) No. SR-288/PB.31/2020 pada tanggal 26 November 2020. Bank mendapat persetujuan untuk mencatat dana hasil RKUD milik pemerintah provinsi Banten sebesar Rp1.551.000 sebagai dana tambahan modal disetor. Pada tanggal 31 Desember 2023 dana tambahan modal tersebut telah direklasifikasi pada modal saham.

Akun ini merupakan agio saham sehubungan dengan penawaran umum pada tahun 2001, 2012, 2016 dan 2022 setelah dikurangi biaya emisi saham dan dana setoran modal dengan perincian sebagai berikut:

	2025	2024
Perbedaan antara harga penawaran saham dengan nilai nominal per saham		
Tahun 2001	11.100	11.100
Tahun 2012	29.932	29.932
Tahun 2016	18.674	18.674
Tahun 2021	216.759	216.759
Biaya emisi saham		
Tahun 2001	(3.434)	(3.434)
Tahun 2010	(7.111)	(7.111)
Tahun 2011	(3.557)	(3.557)
Tahun 2012	(2.905)	(2.905)
Tahun 2016	(10.203)	(10.203)
Tahun 2020	(4.213)	(4.213)
Tahun 2021	(3.567)	(3.567)
Dana setoran modal		
Tahun 2025	139.569	-
	381.044	241.475

Berdasarkan Surat Peraturan Daerah Provinsi Banten No 4 tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda Terbuka) tanggal 30 Desember 2025. Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 139.569.320.000 (nilai penuh). (Catatan 13)

24. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kredit	449.070	384.325
Efek-efek	66.924	63.370
Efek Reverse Repo	35.673	27.863
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	15.293	13.034
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	3.535	3.212
	570.495	491.804

Pendapatan bunga dari efek-efek berasal dari obligasi pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Based on the Letter from the Financial Services Authorization (OJK) No. SR-288/PB.31/2020 on November 26, 2020. The bank received approval to record the proceeds from the RKUD owned by the Banten provincial government amounting to Rp1,551,000 as additional paid-in capital funds. As of December 31, 2023, the additional capital funds have been reclassified to share capital.

This account represents additional paid-in capital in connection with public offering in 2001, 2012, 2016 and 2022 after deducting share issuance and capital contribution funds costs as follows:

Difference between the offering price with par value per share
Year 2001
Year 2012
Year 2016
Year 2021
Share issuance costs
Year 2001
Year 2010
Year 2011
Year 2012
Year 2016
Year 2020
Year 2021
capital contribution funds
Year 2025

Based on Banten Provincial Regulation Letter No. 4 of 2025 concerning Regional Capital Participation into the Limited Liability Company of the Banten Regional Development Bank (Perseroda Terbuka) dated December 30, 2025. The regional government made regional capital participation in the form of regional property in the form of land and buildings amounting to Rp 139,569,320,000 (full value). (Note 13).

24. INTEREST INCOME

This account consists of:

Loans
Securities
Reverse Repo Securities
Placement with Bank Indonesia and other banks
Current account with Bank Indonesia and other banks

Interest income from securities comes from government bonds, Certificate of Bank Indonesia and Deposits Certificates of Bank Indonesia.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

25. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

Simpanan dari nasabah
 Deposito berjangka
 Tabungan
 Giro
 Simpanan dari bank lain
 Liabilitas atas efek-efek yang dijual
 dengan janji dibeli kembali

2025	2024
284.546	227.366
6.108	4.789
28.714	25.631
52.435	43.991
-	665
371.804	302.443

Deposits from customers
Time deposits
Saving
Demand deposits
Deposits from other banks
Securities sold under
repurchase agreement

26. PENDAPATAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

Administrasi kredit
 Denda dan pinalti
 Lain-lain

2025	2024
21.663	17.452
9.405	6.903
45.280	18.798
76.348	43.153

Loan administration
Late payment and penalties
Others

27. KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Akun ini terdiri dari:

Aset keuangan
 Penyisihan (Pemulihan) kerugian
 penurunan nilai kredit (Catatan 10j)
 Penyisihan (Pemulihan) kerugian
 penurunan nilai aset keuangan

2025	2024
(63.020)	(122.113)
(63.020)	(122.113)

Financial assets
Provision (Recovery) for impairment
losses Loans (Note 10j)
Provision (Recovery) of impairment
losses on financial assets

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

Sewa
 Jasa tenaga kerja
 Penyusutan (Catatan 13)
 Honorium tenaga ahli
 Iklan promosi dan pemasaran
 Amortisasi aset takberwujud (Catatan 15)
 Transportasi dan perjalanan dinas
 Perlengkapan kantor
 Listrik air dan gas
 Penagihan kredit
 Komunikasi
 Iuran dan administrasi
 Perbaikan dan pemeliharaan
 Amortisasi asuransi kredit (Catatan 12)
 Pajak dan perizinan
 Premi penjaminan pemerintah (catatan 39b)
 Lain-lain

2025	2024
17.271	23.535
16.031	19.767
10.161	13.744
9.984	16.804
8.477	6.621
7.116	3.488
5.821	5.725
5.246	4.438
3.857	3.855
3.219	7.827
2.821	8.710
1.520	5.925
1.091	1.875
1.009	1.014
421	398
-	10.065
64.725	9.647
158.769	143.437

Operating lease
Outsourcing
Depreciation (Note 13)
Professional fees
Advertising, promotion and marketing
Amortization of intangible assets (Note 15)
Transportation and traveling
Office supplies
Electricity, water and gas
Loan collection
Telecommunication
Administration and Contribution
Repair and maintenance
Amortization credit insurance (Note 12)
Taxes and licenses
Government guarantee premium (Note 39b)
Others

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)**

29. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Gaji dan Upah	99.127	91.133
Kesejahteraan karyawan	23.315	29.865
Imbalan pasca kerja (catatan 32)	5.582	5.009
Pelatihan	1.645	1.666
Biaya tenaga kerja lainnya	-	288
Jumlah	129.669	127.961

Perincian gaji dan tunjangan atas dewan komisaris, direksi dan komite audit adalah sebagai berikut:

	2025				
	Jumlah/ Total	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris	3	2.063	495	2.561	Board of commissioners
Direksi	4	4.488	1.028	5.520	Directors
Komite Audit	2	413	35	450	Audit committee
	9	6.964	1.558	8.531	

	2024				
	Jumlah/ Total	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris	3	1.976	372	2.351	Board of commissioners
Direksi	4	4.488	1.028	5.520	Directors
Komite Audit	2	456	38	496	Audit committee
	9	6.920	1.438	8.367	

Bank belum dapat merealisasi kewajiban pendanaan pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya dikarenakan Bank menyesuaikan anggaran pendidikan dengan situasi dan kondisi Bank secara keseluruhan.

The Bank has not been able to realize the obligation for education and training expense by 5% of prior year's human resources expense since the Bank adjusted the education budget based on the overall current situation and condition of the Bank.

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Denda	(19)	(85)
Amortisasi biaya yang ditangguhkan (Catatan 16)	(2.701)	(10.000)
Lain-lain	(334)	(11.070)
	(3.054)	(21.156)

30. NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) – NET

This account consists of:

Penalties
Amortization of deferred costs (Note 16)
Others

31. PAJAK PENGHASILAN

Akun ini terdiri dari:

- Bank mengalami rugi fiskal untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
- Pajak kini
Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	56.472	74.997
Perbedaan temporer:		
Penyusutan aset tetap	(42)	(293)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(19.485)	8.394
Amortisasi perangkat lunak	5	(468)
Cadangan imbalan pasca kerja - bersih	1.568	2.387
Bersih	(17.953)	10.018
Perbedaan tetap:		
Beban yang tidak boleh dikurangkan - bersih	(3.753)	(987)
Bersih	(3.753)	(987)
Laba fiskal periode berjalan	42.273	86.003
Ditambah akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(760.722)	(932.865)
Rugi fiskal yang tidak dapat diperhitungkan lagi	483.581	86.140
Akumulasi rugi fiskal akhir periode	(234.869)	(760.722)

Menurut peraturan perpajakan, rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak terjadinya kerugian fiskal. Akumulasi rugi fiskal sebesar Rp234.869 dan Rp760.722 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

31. INCOME TAX

This account consists of:

- The Bank is in tax loss position for the periods and years ended December 31, 2025 and 2024.
- Current tax
A reconciliation between loss before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and tax loss is as follows:

Gain before tax per statements of profit or loss
Temporary differences:
Depreciation of fixed assets
Allowance for impairment losses
Software amortization
Provision for post employment benefits-net
Net
Permanent differences:
Non deductible expenses-Net
Net
Fiscal gain for the period
Add accumulated fiscal loss from previous year
Less expired fiscal loss
Accumulated tax losses at the end of period

In accordance with Indonesia tax regulations, tax loss can be offset against the taxable income immediately within a period of five years after the tax loss had incurred. The tax loss amounting to Rp234,869 and Rp760,722 for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

31. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Pajak kini (lanjutan)

	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited (charged) to				31 Desember/ December 31, 2025	
	31 Desember/ December 31, 2024	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment		
Rugi fiskal	167.359	-	-	(115.688)	51.671	Fiscal loss
Akumulasi penyusutan aset tetap	5.460	(9)	-	-	5.451	Accumulated depreciation of fixed asset
Amortisasi perangkat lunak	835	1	-	-	836	Accumulated amortization of intangible asset
Penyisihan kerugian penurunan nilai	167.608	(4.287)	-	-	163.321	Provision of impairment losses
Keuntungan efek-efek yang belum direalisasi	1.981	-	(478)	-	1.503	Unrealized gain on available for sale securities
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.997	345	726	-	8.068	Post-employment benefit liability
	<u>350.240</u>	<u>(3.950)</u>	<u>248</u>	<u>(115.688)</u>	<u>230.850</u>	

	Dikreditkan (dibebankan)/ Credited (charged) to				31 Desember/ December 31, 2024	
	31 Desember/ December 31, 2023	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			
Rugi fiskal	205.230	(37.871)	-	-	167.359	Fiscal loss
Akumulasi penyusutan aset tetap	5.525	(65)	-	-	5.460	Accumulated depreciation of fixed asset
Amortisasi perangkat lunak	938	(103)	-	-	835	Accumulated amortization of intangible asset
Penyisihan kerugian penurunan nilai	165.761	1.847	-	-	167.608	Provision of impairment losses
Keuntungan efek-efek yang belum direalisasi	502	-	1.479	-	1.981	Unrealized gain on available for sale securities
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.125	525	347	-	6.997	Post-employment benefit liability
	<u>384.081</u>	<u>(35.667)</u>	<u>1.827</u>		<u>350.240</u>	

c. Pajak Tangguhan

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

d. Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak Bank dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	56.472	74.997
Manfaat pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	12.424	16.499
Pengaruh pajak:		
Perbedaan tetap	826	217
Pajak tangguhan yang tidak dapat diakui	106.388	18.951
Penyesuaian	(115.688)	-
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	<u>3.950</u>	<u>35.667</u>

31. INCOME TAX (continued)

b. Current tax (continued)

c. Deferred Tax

Management believes that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences, which results in deferred tax assets, can be utilized.

d. A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to loss before tax is as follow:

Gain before income tax
Income tax benefit based on prevailing tax rates
Tax effects of:
Permanent differences
Recognized deferred taxes
Adjustment
Income (Expenses) tax benefit

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

31. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pada tanggal 18 Mei 2020, pemerintah menerbitkan UU No.2 tahun 2020, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia (Perppu) No.1 tahun 2020 menjadi Undang - Undang yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022.

31. INCOME TAX (continued)

On May 18, 2020, the government issued Law No.2 of 2020, which stipulates the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia (Perppu) No.1 of 2020 into Law which, among other things, reduces the corporate income tax rate from the previous 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022.

32. LIABILITAS IMBALAN PASCA - KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank menghitung dan mencatat imbalan pasca-kerja tanpa pendanaan khusus untuk karyawan yang berhak menurut Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial independen. Berikut ini laporan aktuarial independen yaitu:

32. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

As of December 31, 2025 and 2024 The Bank calculated and recorded unfunded defined post-employment benefits to its qualified employees in accordance with Copy Right Law No. 11 Year 2020 based on actuarial calculations independent actuaries. The following independent actuarial report is:

No./ No.	Periode/ Period	Aktuarial Independen/ Independent Actuaries	Tanggal Laporan/ Date of Report
1.	31 Desember/December 31, 2025	KKA Azwir Arifin & Rekan	07 Januari/January 07, 2026
2.	31 Desember/December 31, 2024	KKA Azwir Arifin & Rekan	16 Januari/January 16, 2025
3.	31 Desember/December 31, 2023	KKA Azwir Arifin & Rekan	08 Januari/January 08, 2024

Rincian liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The detail of defined post-employment benefit obligation is as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	36.678	31.811	Present value of defined benefit obligation
Liabilitas imbalan pasca-kerja	36.678	31.811	Post-employment benefit liabilities

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2025	2024	
Laba rugi			Profit loss
Beban jasa kini	3.437	3.184	Current service cost
Beban bunga	2.145	1.826	Interest cost
	5.582	5.009	
Penghasilan komprehensif lainnya			Other comprehensive income
Kerugian (Keuntungan) aktuarial	3.299	1.583	Actuarial (Gain) loss
	3.299	1.583	

Rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of present value of defined benefit liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas awal tahun	31.811	27.841	Actual present value of liability at beginning of year
Beban jasa kini	3.437	3.184	Current service cost
Beban bunga	2.145	1.826	Interest cost
	5.582	5.009	
Kerugian/ (Keuntungan) aktuarial	3.299	1.583	Actuarial loss
Imbalan kerja yang dibayar perusahaan	(4.014)	(2.623)	Employment benefit paid by company
Nilai kini liabilitas imbalan pasti akhir Tahun	36.678	31.811	Ending balance of present value of defined benefit liabilities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

32. LIABILITAS IMBALAN PASCA – KERJA (lanjutan)

Jumlah nilai kini imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Nilai kini liabilitas	36.678	31.811	27.841	Present value of liabilities

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

32. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Present value of defined benefit liability for the year ended December 31, 2024 and for the 2 previous years are as follows:

	2025	2024	
Umur pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji	1,50% per tahun /annum	1,50% per tahun /annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	4,89 - 7,12% per tahun/annum	6,88 - 7,13% per tahun/annum	Discount rate
Tingkat Pengunduran Diri	Tingkat pengunduran diri khusus untuk karyawan account officer diasumsikan sebesar 20% per tahun/ Withdrawal resignation rate for account officer staff assumed up to 20% per annum	Tingkat pengunduran diri khusus untuk karyawan account officer diasumsikan sebesar 20% per tahun/ Withdrawal resignation rate for account officer staff assumed up to 20% per annum	Resignation rate
Tingkat mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality rate

33. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Laba bersih untuk perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian	52.522	39.330	Net Gain for computation of basic and diluted loss per share
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian	51.870.438.266	51.870.438.266	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic and diluted loss per share
Laba Per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	1,01	0,75	Basic Gain per share and diluted (full amount)

33. BASIC GAIN PER SHARE AND DILUTED

The calculation of basic loss per share and diluted are as follows:

34. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, pihak-pihak berelasi adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Sifat Hubungan Pihak-pihak Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan transaksinya adalah sebagai berikut:

34. RELATED PARTIES TRANSACTION

Based on Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks, related parties are individuals and companies who have controlling relationship with the Bank, either direct or indirect, through ownership, management and finance.

Nature of Related Parties Relationship

The nature of relationship with related parties and transactions are as follows:

34. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
Sifat Hubungan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

34. RELATED PARTIES TRANSACTION (continued)
Nature of Related Parties Relationship (continued)

Pihak Berelasi/ Related parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Transaksi/Transaction
Pemerintah Provinsi Banten	Pemegang Saham pengendali Terakhir/ ultimate shareholder	- Giro (Catatan 18)/ Demand deposit (Note 18)
PD BPR Serang	Perusahaan afiliasi/ Affiliated company	- Giro (Catatan 19) / Demand deposit (Note 19) - Deposito berjangka (Catatan 19) / Time deposit (Note 19)
PT. Banten Global Development	Pemegang Saham / Shareholder	- Deposito berjangka (Catatan 18)/ Time deposit (Note 18)
PT Jamkrida Banten	Perusahaan afiliasi/ Affiliated company	- Deposito berjangka (Catatan 18)/ Time deposit (Note 18)
Direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif/ Directors, Commissioners and executive officers	Pengurus /Management	- Giro (Catatan 18) / Demand deposit (Note 18) - Tabungan (Catatan 18) / Savings (Note 18) - Deposito berjangka (Catatan 18) / Time deposit (Note 18) - Modal saham (Catatan 22) / Share capital (Note 22)

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

Significant transaction and balances with related parties are as follows:

	2025		2024		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities (%)	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities (%)	Liabilities
Simpanan dari nasabah (Catatan 18)	21.915	0,27%	460.399	7,88%	Deposits from customers (Note 18)
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)	4.013	0,05%	3.297	0,06%	Deposits from other bank (Note 19)
Jumlah	25.928	0,32%	463.696	7,94%	Total

	2025		2024		
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities (%)	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap jumlah Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities (%)	Interest expense
Beban Bunga	291	0,08%	3.215	0,06%	Interest expense

Penempatan dana dari pihak berelasi dalam bentuk simpanan (Catatan 19)

Giro

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persentase rekening giro pihak berelasi dari jumlah rekening giro masing-masing sebesar 0,78%, dan 53,04%. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tingkat bunga yang diberikan adalah berkisar antara 1,80%.

Tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persentase tabungan pihak berelasi dari jumlah tabungan masing-masing sebesar 0,11% dan 0,01%. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tingkat bunga yang diberikan adalah masing-masing sebesar 0% - 0,96% dan 0% - 5,50%.

Placement of funds from related parties in the form of deposits (Note 19)

Demand Deposits

On December 31, 2025 and 2024, the percentage of demand deposits from related parties to the total demand deposits is 0.78% and 53.04% respectively. As of December 31, 2025 and 2024, interest rates are in the range of 1.80%.

Savings

On December 31, 2025 and 2024, the percentage saving from related parties to the total saving is 0.11% and 0.01% respectively. As of December 31, 2025 and 2024, interest rates are and 0% - 0.96% and 0% - 5.50% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)**

34. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Deposito Berjangka

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persentase deposito berjangka pihak berelasi dari jumlah deposito berjangka masing-masing sebesar 0,40% dan 0,72%, Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tingkat bunga yang diberikan berkisar antara 2,75% - 8,00% dan 2,75% - 9,25%

Pihak berelasi perseorangan yang memiliki saldo simpanan diatas Rp1.000 dan pihak berelasi entitas yang memiliki simpanan diatas 0,5% modal disetor adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya.

	2025	2024
Deposito Berjangka		
PT Jamkrida Banten	12.332	9.560
Direksi, Komisaris dan Pejabat eksekutif bank	3.770	3.631
PT Banten Global Development	-	15.850
Tabungan		
Direksi, Komisaris dan pejabat eksekutif bank	276	619
Giro		
PD BPR Serang	4.013	3.297
PT Jamkrida Banten	998	1.914
RKUD Provinsi Banten	336	429.352
CV Aksata Jaya Consulindo	170	-
PT Banten Global Development	155	428
PT Banten Global Pariwara	5	5

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a. Bank memiliki transaksi komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
KOMITMEN		
Tagihan komitmen	1.719	1.719
Jumlah	1.719	1.719
Liabilitas Komitmen Lainnya	(22.251)	(14.186)
Jumlah	(22.251)	(14.186)
Jumlah tagihan komitmen – bersih	(20.532)	(12.467)
	2025	2024
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Kredit yang hapus buku (Catatan10k)	1.929.723	1.875.257
Penghasilan bunga dalam penyelesaian	797.816	799.309
Jumlah	2.727.539	2.674.566
Liabilitas kontinjensi		
Bank garansi	(26.640)	(2.408)
Jumlah tagihan kontinjensi – Bersih	2.700.899	2.672.158

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank tidak memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi.

34. RELATED PARTIES TRANSACTION (continued)

Transactions with Related Parties (continued)

Time Deposits

On December 31, 2025 and 2024, the percentage saving from related parties to the total saving is 0.40% and 0.72%, respectively. As of December 31, 2025 and 2024, interest rates are in the range 2.75% - 8.00% and 2.75% - 9.25% respectively.

Individual related parties with deposit more than Rp1,000 and entities related parties with outstanding deposits more than 0.5% fully paid shares are as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, there is no compensations given to each members or Board of Directors, Board of Commissioners, Major Shareholders, who are also as employees and other key management.

	2025	2024
Time Deposits		
PT Jamkrida Banten	9.560	
The Bank's Directors, Commissioners and Executive Officers	3.631	
PT Banten Global Development	15.850	
Savings		
The Bank's Directors, Commissioners and executive officers	619	
Demand Deposits		
PD BPR Serang	3.297	
PT Jamkrida Banten	1.914	
RKUD Provinsi Banten	429.352	
CV Aksata Jaya Consulindo	-	
PT Banten Global Development	428	
PT Banten Global Pariwara	5	

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. The Bank has commitment and contingent transactions as follows:

	2025	2024
COMMITMENTS		
Commitment receivables	1.719	1.719
Total	1.719	1.719
Commitment liabilities Others	(22.251)	(14.186)
Total	(22.251)	(14.186)
Total commitment receivables – net	(20.532)	(12.467)
	2025	2024
CONTINGENCIES		
Contingent receivables		
Loans written-off (Note 10k)	1.929.723	1.875.257
Past due interest income	797.816	799.309
Total	2.727.539	2.674.566
Contingent Liabilities		
Bank guarantee	(26.640)	(2.408)
Total contingencies receivables – net	2.700.899	2.672.158

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank does not have commitment and contingent transactions with related parties.

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Komitmen sewa.

Bank memiliki beberapa komitmen sewa operasi untuk kantor-kantor cabang dengan PT Dakara Makmur. Jangka waktu penyewaan berkisar antara 1 – 15 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua pihak. Apabila Bank menunggak pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1 %/oo (satu per mil) per hari dihitung sejak jatuh tempo pembayaran uang sewa.

Adapun pembatasan-pembatasan lain dalam perjanjian sewa tersebut diantaranya yaitu Bank memiliki hak untuk mengakhiri lebih awal setelah tahun ke-13 dari masa sewa dengan membayar ganti rugi kepada PT Dakara Makmur dan Bank juga mengasuransikan gedung serta perlengkapannya. Berikut adalah rincian lokasi gedung yang disewa dari PT Dakara Makmur:

No.	Nama lokasi/ Address of location
1	KC Bandung/ Jl. Astana Anyar No. 42 – 44, Bandung

Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.271 dan Rp23.535 (Catatan 28)

c. Litigasi

Saat ini Bank mempunyai perkara-perkara yang terkait dengan perkara perdata dan perkara sengketa konsumen sejumlah 11 perkara, Bank berstatus sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Lease commitments

The Bank has entered into various operating lease commitments for its branches' premises with PT Dakara Makmur. The terms of the rentals range from 1 to 15 years and renewable upon mutual agreement of both parties. If the Bank arrears the payment will be charged with the calculation of pinalty 1 %/oo (one per mile) per day calculated from due the rent payment.

As for other restrictions in agreement rent is the Bank has the right to end earlier after years of 13 from tenancy by paying the compensation to PT Dakara Makmur and the Bank is also insuring the building and equipment. The following are details of location building lease from PT Dakara Makmur:

Rental expense for the year ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp17,271 and Rp23,535 respectively. (Note 28)

c. Litigation

Currently, the Bank has cases associated with civil case and dispute consumer case total of 11 cases, he Bank's status as the Defendant or co-defendant.

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

Berikut ini rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank dengan debitur yaitu:

1. Kasus Perdata

No/No	No. Perkara/Putusan / Case / Decision No.	Nama Penggugat/ Plaintiff Name	Nilai Gugatan/ Accusation Value	Status/Status
1	No.124/Pdt.G/2020/PN.Sby/ No.124/Pdt.G/2020/PN.Sby	Alvian Bertho	1.000	Sedang di lakukan Upaya Peninjauan Kembali Oleh Bank Banten dan saudara Alivan Bertho / A judicial review effort is currently underway by Bank Banten and Alivan Bertho's brother.
2	No.5/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi/ No.5/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi	Bank Banten	14.061	Menunggu Perbikan Appraisal / Waiting for Appraisal Repair
3	No.19/Eks.HT/2022/PN.JKT.S EL/No.19/Eks.HT/2022/PN.JK T.SEL	Bank Banten	25.712	Akan membuat permohonan lelang eksekusi melalui KPKNL / Will make an execution auction request through the KPKNL
4	No.5/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi/ No.5/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi	Bank Banten	14.061	Masih Menunggu Perbaikan/Appraisal / Still waiting for repair / Appraisal
5	No.6/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi/ No.6/Pdt.Eks/2022/PN.Cbi	Bank Banten	35.490	Masih Menunggu Appraisal Asli / Still waiting for the original appraisal
6	No.784/Pdt.G/2023/PN. Sby/ No.784/Pdt.G/2023/PN. Sby	Ibu Wastri	483	Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan Eksepsi Tergugat I (Bank Banten) terkait Kewenangan Absolut, sehingga atas hal tersebut para Penggugat mengajukan upaya hukum lain yaitu Kasasi yang masih dalam proses dan belum diputus / In the Interim Decision, the Surabaya District Court granted the Exception of Defendant I (Bank Banten) regarding Absolute Authority, so that in this regard the Plaintiffs filed another legal remedy, namely an appeal which is still in process and has not been decided.
7	No.45/Pdt.G/2024/PN.Pkl/ No.45/Pdt.G/2024/PN.Pkl	Ibu Wastri	710	Menang dalam tingkat pertama, dan Putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, atas hal tersebut PENGUGAT mengajukan upaya hukum lain yaitu Kasasi yang sedang dalam proses/ Winning at first instance, and the Appeal Decision Confirmed the Decision of the Pekalongan District Court, regarding this matter the PLAINTIFF filed another legal remedy, namely an appeal which is currently in process.

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation(continued)

The details legal issues encountered by Bank with debtors are as follows:

1. Civil Case

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

1. Kasus Perdata

No/No	No. Perkara/Putusan / Case / Decision No.	Nama Penggugat/ Plaintiff Name	Nilai Gugatan/ Accusation Value	Status/Status
8	No. 31/Pdt.G/2025/PN.PKB/ No. 31/Pdt.G/2025/PN.PKB	Ir. Ahmad Riva'i	309	Telah dilakukan kelengkapan identitas Para Pihak dan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2025 akan dilakukan Mediasi Pertama dengan Mediator Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bahwa pada tanggal 3 September 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk KC Palembang selaku Turut Tergugat telah mengupload Jawaban/Eksepsi ke Ecourt dan agenda selanjutnya pada tanggal 10 September 2025 Replik dari Penggugat atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat; Bahwa pada tanggal 19 November 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memutus perkara tsb dengan Putusan sebagai berikut: Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000/ The identity of the Parties has been completed and then on July 30, 2025 the First Mediation will be conducted with the Mediator Panel of Judges of the Pangkalan Balai District Court that on September 3, 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk KC Palembang as Co-Defendant has uploaded the Answer/Exception to Ecourt and the next agenda on September 10, 2025 Reply from the Plaintiff to the Answers of the Defendants and Co-Defendant; That on November 19, 2025 the Pangkalan Balai District Court has decided the case with the following Decision: Rejecting the PLAINTIFF'S Lawsuit in its entirety and Sentencing the PLAINTIFF to pay court costs in the amount of Rp. 295,000,-

2. Kasus Pidana

2. Criminal Case

No/No	Para Pihak / The Parties	Instansi/ Agency	Pokok Perkara/Subject Matter	Nilai Kasus/Case Value	Status/Status
1	Pelapor / Reporter : Bank Banten Terlapor / Reported : Suryadi Angga Kusuma	Bareskrim Mabes Polri/ Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police Headquarters.	Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan lunas dari pihak Suryadi Angga Kusuma dan Pergantian Aset jaminan yang sebelumnya mencukupi untuk agunan menjadi tidak mencukupi. / Alleged falsification of certificate of settlement from Suryadi Angga Kusuma and replacement of collateral assets that were previously sufficient for collateral to be insufficient.	6.500	Sudah dilakukan pemanggilan para saksi dan telah dilakukan kunjungan ke Lampung, masih menunggu tindak lanjut dari Penyidik. / Witnesses have been summoned and a visit to Lampung has been made, still awaiting follow-up from investigators.

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation (continued)

No/No	Para Pihak / The Parties	Instansi/ Agency	Pokok Perkara/Subject Matter	Nilai Kasus/Case Value	Status/Status
2	-	Kejaksaan Tinggi Banten 07 Juli 2022/ Banten High Prosecutor's Office July 07, 2022.	Berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor PRINT- 688/M.6/Fd.1/07.2022 Tanggal 07 Juli 2022, Adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) Oleh Bank Banten Kepada PT Harum Nusantara Makmur pada tahun 2017. / Based on the investigation warrant of the Banten High Prosecutor's Office Number PRINT-688/M.6/Fd.1/07.2022 dated July 7, 2022, there are allegations of Corruption Crimes, Allegations of Irregularities in Provision of Working Capital Credit Facility (KMK) and Investment Credit (KI) by Bank Banten to PT Harum Nusantara Makmur in 2017.	65.000	Sdr Satyavadin dan Sdr Rayid Samsudin Sudah ditetapkan Menjadi Tersangka oleh kejaksaan Tinggi Banten. Bahwa sudah terdapat Tersangka Baru yang di tetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, ialah Sdr Darwinis selaku Pimpinan Administrasi Kredit. Bahwa agenda selanjutnya ialah pemanggilan dari Pihak Notaris Liz Ambar Sari bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 telah dibacakan putusan an terdakwa Darwinis, yang mana Sdr Darwinis di jatuhi masa tahanan selama 3 tahun dan denda 50 juta / Mr. Satyavadin and Mr. Rayid Samsudin have been named as suspects by the Banten High Prosecutor's Office. That there is a new suspect who has been named by the Banten High Prosecutor's Office, namely Mr. Darwinis as the Head of Credit Administration. That the next agenda is a summons from Notary Liz Ambar Sari that on October 4, 2023, the verdict for the defendant Darwinis has been read, in which Mr. Darwinis was sentenced to 3 years in prison and a fine of 50 million.
3	Pelapor / Reporter :Bank Banten Terlapor / Reported : Sdr Nurul Hidayat		Penggelapan setoran 13 (tiga belas) debitor oleh ex karyawan AO Collection Sdr. Nurul Hidayat sebesar Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah). / Embezzlement of deposits from 13 (thirteen) debtors by former AO Collection employee Mr. Nurul Hidayat amounting to Rp. 81,000,000,- (eighty one million rupiah).	81	Pemanggilan Para Saksi / Summoning of Witnesses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)**

35. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Litigasi (lanjutan)

Pada umumnya perkara perdata atau sengketa konsumen yang dihadapi oleh Bank dikarenakan adanya upaya Bank untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh Debitur atau Penjamin berdasarkan Hak Tanggungan dan kemudian Debitur atau Penjamin melakukan perlawanan atas upaya eksekusi yang dilakukan oleh Bank.

Perkara-perkara tersebut diatas tidak mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha serta keadaan keuangan Bank karena risikonya sudah diperhitungkan sebagai resiko ketika Bank memberikan kredit (resiko kredit macet) dan sudah diberikan pencadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila gugatan dimenangkan oleh Perseroan dalam pengadilan maka putusan atas nilai gugatan akan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya, demikian juga sebaliknya.

35. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Litigation (continued)

Generally, civil case or dispute consumer faced by the Bank due to the Bank's effort to do execution on goods collateral provided by Debtor or Guarantor based on Collateral and Debtor and Guarantor to resistance of execution's effort that has done by the Bank.

That cases has not materially affected on activities and going concern and financial state of the Bank because the risk is calculated as the risk when the Bank provides a loans (loss of credit risk) and it has been provided reserve based on applicable regulation.

If the lawsuit won by the Company in the court, the decision on the value of the lawsuit will be recognized as other operating income, and vice versa.

36. INFORMASI SEGMENT

Kegiatan Bank sepenuhnya adalah bank konvensional sehingga informasi segmen Bank tidak dikelompokkan per segmen usaha hanya dikelompokkan berdasarkan segmen geografis.

36. SEGMENT INFORMATION

Bank activities are entirely conventional bank so that bank segment information is not classified as business segments and is only classified by geographical segment.

	2025			
	DKI Jakarta/ DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside Jakarta	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan bunga	33.817	164.874	198.691	Interest income
Pendapatan lainnya	2.434	83.819	86.253	Other income
	<u>36.251</u>	<u>248.693</u>	<u>284.944</u>	
HASIL				INCOME
Laba bersih	6.613	45.909	52.522	Net income
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih	-	818.409	818.409	Placements in Bank Indonesia and other banks – net
Efek-efek – bersih	-	1.005.527	1.005.527	Securities – net
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	108.734	108.734	Securities purchased under agreement to resell
Kredit – bersih	369.495	4.519.257	4.888.752	Loans – net
Aset tetap – bersih	1.311	166.697	168.008	Fixed assets – net
Aset lainnya	11.321	3.000.694	3.012.015	Other assets
Jumlah aset	<u>382.127</u>	<u>9.619.318</u>	<u>10.001.445</u>	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan nasabah dan dari bank lain	1.893.088	5.800.855	7.693.943	Deposits from customers and from other banks
Liabilitas Lainnya	2.716	404.630	407.346	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	<u>1.895.804</u>	<u>6.205.485</u>	<u>8.101.289</u>	Total liabilities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

36. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

36. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2024			
	DKI Jakarta/ DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside Jakarta	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan bunga	42.206	449.598	491.804	Interest income
Pendapatan lainnya	6.871	49.206	56.077	Other income
	49.077	498.804	547.881	
HASIL				INCOME
Laba bersih	107.610	(68.280)	39.330	Net income
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
ASET				ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia				Placements in Bank Indonesia
dan bank lain – bersih	-	450.583	450.583	and other banks – net
Efek-efek – bersih	-	1.053.236	1.053.236	Securities – net
Kredit – bersih	432.557	3.175.083	3.607.640	Loans – net
Aset tetap – bersih	147	28.029	28.176	Fixed assets – net
Aset lainnya	12.830	2.398.650	2.411.480	Other assets
Jumlah aset	445.534	7.105.581	7.551.115	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan nasabah dan dari				Deposits from customers and from
bank lain	849.446	4.700.424	5.549.870	other banks
Liabilitas Lainnya	1.662	295.886	297.548	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	851.108	4.996.310	5.847.418	Total liabilities

37. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

37. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31Desember 2025 dan 2024:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024:

	2025		2024		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables:
Kas	183.498	183.498	133.328	133.328	Cash
Giro pada Bank Indonesia	731.471	731.471	456.348	456.348	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	27.190	27.190	11.513	11.513	Current accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	818.409	818.409	450.583	450.583	Placements with Bank Indonesia and other banks
Kredit – bersih	4.888.752	4.888.752	3.607.640	3.607.640	Loans – net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	34.242	34.242	25.042	25.042	Accrued interest receivables
Aset lain-lain – bersih	968.789	968.789	624.562	624.562	Other assets – net
Tersedia untuk dijual:					Available for sale:
Efek-efek	375.000	381.594	440.000	436.700	Securities
Dimiliki hingga jatuh tempo:					Held to maturity:
Efek-efek	611.606	616.536	611.606	616.651	Securities
Jumlah	8.638.957	8.650.481	6.360.622	6.362.366	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Liabilitas segera	100.017	100.017	142.373	142.373	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah	6.420.315	6.420.315	4.855.841	4.855.841	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	1.273.628	1.273.628	694.029	694.029	Deposit from other banks
Liabilitas lain-lain	257.591	257.591	119.382	119.382	Other liabilities
Jumlah	8.051.552	8.051.552	5.811.625	5.811.625	Total

**37. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

Aset keuangan

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Estimasi nilai wajar kredit yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Kredit yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Liabilitas keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (biasanya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabilitas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

38. MANAJEMEN RISIKO

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki aset keuangan HTM yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 hanya ada di tingkat pertama sebesar Rp616.536 dan Rp616.651

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki aset keuangan AFS yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 hanya ada di tingkat pertama sebesar Rp381.594 dan Rp436.700

**37. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
(continued)**

The fair values of the above financial assets and liabilities are determined based on the following:

Financial assets

The fair values of financial asset that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as current accounts in Bank Indonesia, current accounts in other banks, placements in Bank Indonesia and other banks and other assets represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The fair values of securities are determined based on the latest published quoted price as of December 31, 2025 and 2024.

The estimated fair value of credit (normally floating interest bearing credit) represents the present value of estimated future cash flows which expected to be received at discounted current market rate. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

Financial liabilities

The fair values of financial liabilities that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as deposits from customers and deposits from other banks, and other liabilities represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity is the amount payable on demand.

Fair value measurements recognized in the statements of financial position

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

38. RISK MANAGEMENT

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has securities as financial assets at HTM. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2025 and 2024 is only in the level 1 of Rp616,536 and Rp616,651, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has securities as financial assets at AFS. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2025 and 2024 is only in the level 1 of Rp381,594 and Rp436,700 respectively.

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki aset keuangan diperdagangkan yaitu efek-efek. Nilai wajar instrumen keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 hanya ada di tingkat pertama masing-masing sebesar RpNihil

Bank, sebagai penyedia jasa keuangan, menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya seperti risiko kredit, risiko pasar/suku bunga, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko reputasi dan risiko strategis.

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut, Bank telah menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko, Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mengacu pada:

- POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum" yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2016
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum" yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2016.

Bank sudah menyusun Laporan Profil Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tersebut sejak periode Desember 2011.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko Bank. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta beberapa komite khusus seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Aset-Liabilitas (ALCO), Komite Kredit, serta Komite Teknologi Informasi. Komite-komite tersebut bertugas mengarahkan Bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan meminimalkan risiko-risiko.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga bertanggung jawab melakukan kaji ulang atas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur Bank untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Bank memonitor risiko kredit untuk meyakinkan bahwa kemungkinan kerugian yang terjadi akibat gagal bayar debitur Bank serta pemenuhan kontrak perjanjian dapat diminimalkan, baik untuk debitur individu maupun kelompok.

Pengelolaan eksposur risiko kredit meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has securities as financial assets at HTM. The fair value of this financial instrument as of December 31, 2025 and 2024, is only in the level 1 of RpNil respectively.

The Bank, being in a financial service industry, is facing various inherent risks in its day-to-day business activities such as credit risk, market/interest rate risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk.

In managing those risks, Bank has improved the Risk Management Policy, Risk Profile and Bank Rating Assessment which refers to:

- POJK No. 4/POJK.03/2016 concerning "Health Level Assessment of Commercial Banks" released on January 27, 2016.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning "Implementation of Risk Management for Commercial Banks" released on March 22, 2016.

The Bank has prepared Risk Profile Report and Bank Rating Assessment based on BI regulation since December 2011.

The members of the Boards of Commissioners and Directors are overall responsible for the risk management of the Bank. Risk management implementation is carried out through establishment of organizational structure, policies and procedures, and various committees such as Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Audit Committee, Asset-Liability Committee, Credit Committee, and Information Technology Committee. These committees provide guidance to the Bank to identify, measure, monitor and mitigate risks.

The Internal Audit also responsible to review the application of risk management and compliance of policies.

Credit Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of debtors to pay principal and interest on credit. The Bank monitors credit risk to ensure that the potential loss from default on the credit and fulfillment of contractual agreements is minimized, at both on individual debtor and group of debtor.

Exposures to credit risk is managed through risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control.

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- Pemberian kredit dilakukan dengan mengutamakan prinsip hati-hati dan berkelanjutan. Kebijakan dan prosedur pemberian kredit disusun secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk pengendalian risiko. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan pada suatu kerangka acuan khusus pemberian kredit dan disetujui serta diketahui oleh pejabat Bank yang berwenang. Mulai tahun 2011, proses persetujuan kredit ditambahkan dengan metode presentasi proposal kredit oleh *Account Officer* di hadapan Komite Kredit Cabang.
- Analisa berkala atas kemampuan debitur untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.
- Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai peraturan Bank Indonesia. Pada 31 Desember 2025 dan 2024, kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga masih dalam BMPK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Sejalan dengan misi Bank, maka sejak tahun 2017, Bank fokus pada pembiayaan konsumen.
- Bank melengkapi sistem pemantauan kinerja cabang dan kualitas portofolio kredit secara nasional dan harian.
- Permintaan jaminan atas kredit kepada debitur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank.
- Pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai untuk tujuan pelaporan keuangan hanya dibentuk atas kerugian yang terjadi pada tanggal laporan keuangan berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai yang tidak didukung dengan bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai dibentuk secara kolektif berdasarkan PSAK dan PAPI 2008.
- Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan ataupun pendukung kredit lainnya yang tercatat dalam laporan posisi keuangan maupun rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024
Laporan posisi keuangan		
Giro pada Bank Indonesia	731.471	456.348
Giro pada bank lain	27.190	11.513
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	818.409	450.583
Efek-efek	1.005.527	1.053.236
Kredit – bersih	4.888.752	3.607.640
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	108.734	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	34.242	25.042
Aset lain-lain – bersih	2.387.119	1.946.754
Jumlah	10.001.445	7.551.115
Rekening administratif		
Komitmen kredit yang belum Ditarik	22.251	14.186
Jumlah	22.251	14.186

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- Lending is conducted by prioritizing prudent and sustainable principle. Lending policies and procedures are developed in a systematic and structured in order to control risk. Lending is conducted within a defined framework specially for lending and are approved and noted at the appropriate level of responsibility within the Bank. Since 2011, lending approval process is added by the method of credit proposals presentation by *Account Officer* in the presence of *Branch Credit Committee*.
- Regular analysis of the ability of debtors to meet interest and principal repayment obligations.
- Monitor Legal Lending Limits (LLL) as required by Bank Indonesia. As of December 31, 2025 and 2024, the loans granted to related parties and third parties are still within the LLL required by Bank Indonesia.
- In line with the Bank's mission, since 2017, the Bank focuses on consumer financing.
- Bank controls the branches performance and loans portfolio quality nationally and daily.
- Collateral requirement as an assurance from debtors are based on the Bank's criteria.
- Allowance for impairment losses are recognized for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statements of financial position based on objective evidence of impairment. For those assets that have no objective evidence, these are assessed using collective assessment in accordance with PSAK and PAPI 2008.
- The maximum exposure to credit risk before collateral or other credit enhancements relating to on-balance items and off-statement of financial position items as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

On-financial position
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Securities
Loans – net
Securities purchased under agreement to resell
Accrued interest receivable
Other assets-net
Total
Off-financial position
Unused customer loan facilities
Total

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur risiko kredit maksimal adalah berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2024 dengan memperhitungkan agunan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Bank memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mempertahankan eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal.

Konsentrasi risiko aset keuangan yang memiliki eksposur risiko kredit.

a. Sektor geografis

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, eksposur risiko kredit atas aset keuangan dan transaksi komitmen dan kontinjensi menurut sektor geografis berdasarkan laporan posisi keuangan dan rekening administratif adalah sebagai berikut:

	2025						Jumlah/ Total
	Jakarta	Sumatera	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Lainnya/ Others	
Laporan posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia	-	-	731.471	-	-	-	731.471
Giro pada bank lain	-	-	27.166	24	-	-	27.190
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	-	-	818.409	-	-	-	818.409
Efek-efek	-	-	1.005.527	-	-	-	1.005.527
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	108.734	-	-	-	-	-	108.734
Kredit - bersih	220.848	137.333	4.112.277	110.096	76.892	231.306	4.888.752
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1.112	1.187	28.761	797	620	1.761	34.238
Aset lain-lain - bersih	51.434	14.114	2.298.887	7.721	5.160	9.808	2.387.124
Jumlah	382.128	152.634	9.022.498	118.638	82.672	242.875	10.001.445
Rekening administrasi							
Komitmen kredit yang belum ditarik	3.156	-	9.811	1.033	6.388	1.863	22.251
Jumlah	3.156	-	9.811	1.033	6.388	1.863	22.251

	2024						Jumlah/ Total
	Jakarta	Sumatera	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Timur/ East Java	Lainnya/ Others	
Laporan posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia	-	-	456.348	-	-	-	456.348
Giro pada bank lain	-	-	11.488	25	-	-	11.513
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	-	-	450.583	-	-	-	450.583
Efek-efek	-	-	1.053.236	-	-	-	1.053.236
Kredit - bersih	276.072	172.293	2.654.379	141.713	91.433	271.750	3.607.640
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	759	1.092	20.463	674	544	1.510	25.042
Aset lain-lain - bersih	168.703	14.217	1.710.374	5.954	5.607	41.898	1.946.753
Jumlah	445.534	187.602	6.356.871	148.366	97.584	315.158	7.551.115
Rekening administrasi							
Komitmen kredit yang belum ditarik	2.214	-	3.272	416	6.639	1.645	14.186
Jumlah	2.214	-	3.272	416	6.639	1.645	14.186

38. RISK MANAGEMENT (continued)

For on-statement of financial position items, the maximum credit risk exposures are based on the net carrying amounts reflected in the statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024 considering the related collateral.

Management believes that it has the ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure.

a. Geographical sectors

As of December 31, 2025 and 2024, the exposure to credit risk on financial assets and commitments and contingencies by geographical sector based on the statement of financial position and administrative accounts is as follows:

On-financial position
Current accounts in Bank Indonesia
Current accounts in other Banks
Placements in bank Indonesia and other banks
Securities
Securities purchased under agreement to resell
Loans - net
Accrued interest receivable

Other assets-net
Total

Off-financial position
Unused customer loan facilities
Total

On-financial position
Current accounts in Bank Indonesia
Current accounts in other Banks
Placements in bank Indonesia and other banks
Securities
Loans - net
Accrued interest receivable

Other assets-net
Total

Off-financial position
Unused customer loan facilities
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Sektor industri

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, eksposur risiko kredit atas aset keuangan dan transaksi komitmen dan kontinjensi menurut sektor industri berdasarkan laporan posisi keuangan dan rekening administratif adalah sebagai berikut:

		2025							
		Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial Statement	Industri/ Manufacturing	Jasa dunia usaha/ Services	Pertanian/ Agriculture	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan									On-financial position
Giro pada Bank Indonesia	731.471	-	-	-	-	-	-	731.471	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	27.190	-	-	-	-	-	27.190	Current accounts in other Banks
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	817.897	512	-	-	-	-	-	818.409	Placements in bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.005.527	-	-	-	-	-	-	1.005.527	Securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	108.734	-	-	-	-	-	108.734	Securities purchased under agreement to resell
Kredit - bersih	-	819.348	4.720	62.881	4.001.803	-	-	4.888.752	Loans - net
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	11.682	14.602	2.862	9	5.083	34.238	Accrued interest receivable	
Aset lain-lain - bersih	-	-	-	-	-	2.387.124	2.387.124	Other assets-net	
Jumlah	2.554.895	967.466	19.322	65.743	4.001.812	2.392.207	10.001.445	Total	Total
Rekening administrasi									Off-financial position
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	22.251	22.251	Unused customer loan Facilities
Jumlah	-	-	-	-	-	-	22.251	22.251	Total

		2024							
		Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial Statement	Industri/ Manufacturing	Jasa dunia usaha/ Services	Pertanian/ Agriculture	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan									On-financial position
Giro pada Bank Indonesia	-	-	456.348	-	-	-	-	456.348	Current accounts in Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	11.488	25	-	-	-	11.513	Current accounts in other Banks
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	-	-	450.583	-	-	-	-	450.583	Placements in bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	-	1.053.236	-	-	-	-	1.053.236	Securities
Kredit - bersih	276.072	172.293	2.654.379	141.713	91.433	271.750	3.607.640	Loans - net	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	759	1.092	20.463	674	544	1.510	25.042	Accrued interest receivable	
Aset lain-lain - bersih	168.703	14.217	1.710.374	5.954	5.607	41.898	1.946.753	Other assets-net	
Jumlah	445.534	187.602	6.356.871	148.366	97.584	315.158	7.551.115	Total	Total
Rekening administrasi									Off-financial position
Komitmen kredit yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	14.186	14.186	Unused customer loan Facilities
Jumlah	-	-	-	-	-	-	14.186	14.186	Total

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar/Suku Bunga

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga options. Sebagai Bank Non Devisa, saat ini Bank hanya terekspos risiko suku bunga.

Risiko suku bunga merupakan bagian risiko pasar bagi Bank. Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga. Adapun transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga seperti: simpanan atau dana pihak ketiga (deposito berjangka, giro dan tabungan), kredit, surat berharga dan penempatan antar bank.

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko suku bunga sesuai dengan batasan, sistem dan prosedur yang telah dibuat untuk menghadapi risiko suku bunga ini. Tujuan utama manajemen risiko suku bunga adalah untuk membatasi dampak buruk dari pergerakan suku bunga yang dapat mengurangi laba dan untuk meningkatkan pendapatan di dalam batasan tertentu. Sebagian besar suku bunga atas simpanan nasabah adalah suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar atau suku bunga yang diumumkan secara periodik, sementara kredit adalah suku bunga tetap.

Untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan Bank, Bank tetap menjaga rasio RSA (*rate sensitivity asset*) terhadap RSL (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%. Pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, rasio RSA/RSL masing-masing sebesar 102,85% dan 108,33%. Dengan rasio yang tidak jauh dari 100% tersebut apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan liabilitas, Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar. Bank juga senantiasa memantau *repricing profile* setiap pengelompokan waktu (*time bucket*) untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* (NII) Bank secara lebih akurat.

Tabel dibawah ini menunjukkan *repricing profile* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga dan diurutkan berdasarkan rentang waktu suku bunga tersebut akan di-*repricing* (untuk *floating rate*) atau tanggal jatuh temponya (untuk *fixed rate*), 31 Desember 2025 dan 2024:

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Market/Interest Rate Risk

Market risk is the risk that arises because of the market variable movement of the portfolio held by the Bank, which could cause adverse movement to the Bank. Market variables are interest rates and exchange rates, including the derivative of these two types of market risk, i.e. changes in options price. As a Non Foreign Exchange Bank, now Bank is only exposed to interest rate risk.

Interest rate risk is a part of market risk. The interest rate risk is the potential loss arising from the movement in market interest rates which opposite with the Bank's transactions that have interest rate risk. The Bank's transactions that have interest rate risk such as: customers' deposits (time deposits, demand deposits, and savings), loans, securities and inter-bank placement.

The Bank's management is responsible for implementing and monitoring the interest risk management policies in accordance with defined limits, system procedures and policy to manage the risk of interest rate. The main objectives of interest rate risk management are to limit the adverse effect of interest rate movements to reduce profits and to enhance earnings within defined parameters. A substantial portion of deposits from customers are entered at floating interest rates, either directly linked to market rates or based upon published rates, while loans are entered at fix interest rates.

To minimize the impact of changes in interest rate risk on the Bank's income, the Bank continues to maintain the RSA (*rate sensitivity asset*) to RSL (*rate sensitivity liabilities*) ratio so that it is not too far from 100%. On position December 31, 2025 and 2024, the RSA/RSL ratio will be 102.85% and 108.33%, respectively. With a ratio that is not far from 100%, if there are parallel changes in interest rates on assets and liabilities, the Bank is not exposed to large interest rate risks. The Bank also always monitors the repricing profile for each time bucket to determine the impact of changes in interest rates on the Bank's Net Interest Income (NII) more accurately.

The table below showed the repricing profile of the assets and liabilities that were sensitive to interest rate exchange arranged by its periodic repricing for floating rates and by its tenor for fixed rates, as of December 31, 2025 and 2024:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Pasar/Suku Bunga (lanjutan)

38. RISK MANAGEMENT (continued)
Market/Interest Rate Risk (continued)

2025						
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total
Aset keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	731.471	-	-	-	-	731.471
Giro pada bank lain	27.190	-	-	-	-	27.190
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	818.409	-	-	-	-	818.409
Efek-efek	389.114	-	-	-	616.413	1.005.527
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	108.734	-	-	-	-	108.734
Kredit - bersih	22.500	25.645	167.957	1.402.978	3.269.672	4.888.752
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	906	60	545	11.213	21.518	34.242
Jumlah	2.098.324	25.705	168.502	1.414.191	3.907.603	7.614.325
Liabilitas keuangan						
Simpanan dari nasabah						
Giro	723.637	-	-	-	-	723.637
Tabungan	780.748	-	-	-	-	780.748
Deposito berjangka	1.519.134	2.131.409	723.689	541.699	-	4.915.931
Simpanan dari bank lain						
Giro	174.546	-	-	-	-	174.546
Tabungan	20.085	-	-	-	-	20.085
Deposito berjangka	480.342	393.350	131.255	74.050	-	1.078.997
Jumlah	3.698.492	2.524.759	854.944	615.749	-	7.693.944
2024						
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total
Aset keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	456.348	-	-	-	-	456.348
Giro pada bank lain	11.513	-	-	-	-	11.513
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	450.583	-	-	-	-	450.583
Efek-efek	-	-	298.503	-	754.733	1.053.236
Kredit - bersih	63.731	39.976	263.978	1.038.448	2.201.507	3.607.640
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	884	387	180	23.591	25.042
Jumlah	982.175	40.860	562.868	1.038.628	2.979.831	5.604.362
Liabilitas keuangan						
Simpanan dari nasabah						
Giro	667.091	-	-	-	-	667.091
Tabungan	711.622	-	-	-	-	711.622
Deposito berjangka	890.878	1.635.337	945.792	5.121	-	3.477.128
Simpanan dari bank lain						
Giro	147.095	-	-	-	-	147.095
Tabungan	13.564	-	-	-	-	13.564
Deposito berjangka	220.758	243.106	69.505	-	-	533.369
Jumlah	2.651.008	1.878.443	1.015.297	5.121	-	5.549.869

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar/Suku Bunga (lanjutan)

Kisaran suku bunga atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Aset keuangan		
Giro pada Bank Indonesia	0 - 1,50%	0 - 1,50%
Giro pada bank lain	0 - 1,00%	0 - 1,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,75 - 4,00%	5,25 - 5,90%
Efek-efek	6,125 - 8,25%	1 - 6,75%
Kredit – bersih	1 - 30,00%	1 - 30,00%
Jumlah		
Liabilitas keuangan		
Simpanan dari nasabah		
Giro	1,81%	0 - 2,50%
Tabungan	0,96%	0 - 5,50%
Deposito berjangka	7,07%	2 - 9,25%
Simpanan dari bank lain		
Giro	0 - 4,5%	0 - 6,50%
Tabungan	0 - 3,2%	0,00 - 5,50%
Inter-bank call money	2 - 4%	2 - 4,00%
Deposito berjangka	3,50 - 6,75%	3,50 - 6,75%

Sensitivitas Suku Bunga

Analisis sensitivitas suku bunga diukur dengan kemampuan eksekusi modal Bank untuk menyerap potensi kerugian dari perubahan suku bunga/fluktuasi suku bunga (BI rate). Berdasarkan data historis BI rate selama satu tahun terakhir, fluktuasi suku bunga (standar deviasi) untuk posisi 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 4,75% dan 6,0%. Hal ini disebabkan karena eksekusi modal bank yang tinggi untuk menutup perubahan suku bunga pada laporan posisi keuangan sehingga Bank dinilai sangat tidak rentan terhadap pergerakan suku bunga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Bank tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada nasabah dan pihak lawan pada saat jatuh tempo.

Bank memantau likuiditasnya dengan menganalisa profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Market/Interest Rate Risk (continued)

The ranges of interest rates for financial assets and liabilities are as follows:

	2025	2024	Financial assets
			Current accounts with Bank Indonesia
			Current accounts with other banks
			Placements with Bank Indonesia and other banks
			Securities
			Loans – net
			Total
			Financial liabilities
			Deposit from customer
			Demand deposits
			Savings
			Time
			Deposits from other banks
			Demand deposits
			Savings
			Inter-bank call money
			Time deposits

Interest Rate Sensitivity

Interest rate sensitivity analysis is measured with capital excess capability to cover interest rate exchange potential loss by making an interest rate/fluctuation interest rate (BI rate). Based on historical data BI rate over the past year, interest rate fluctuation (standard deviation) as of December 31, 2025 and 2024 is 4,75% and 6,0%, respectively. This was due to Bank's capital excess was high enough to cover the impact to interest rate exchange so that the Bank was assessed as not vulnerable to interest rate exchange movements.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank may unable to meet its obligations to customers and counterparties at maturity.

The Bank monitors its liquidity by analyzing its maturity profile of assets and liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) Tbk**
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise specified)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Likuiditas (lanjutan)

38. RISK MANAGEMENT (continued)
Liquidity Risk (continued)

		2025							
		Tidak mempunyai jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 months	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
Nilai tercatat/ Carrying value									
Aset keuangan								Financial assets	
Kas	183.498	183.498	-	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	731.471	731.471	-	-	-	-	-	Current accounts in Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	27.190	27.190	-	-	-	-	-	Current accounts in other Banks	
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	818.409	-	818.409	-	-	-	-	Placements in bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	1.005.527	-	-	-	-	-	1.005.527	Securities	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	108.734	-	108.734	-	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell	
Kredit - bersih	4.888.752	-	22.500	25.645	41.341	126.608	4.672.658	Loans - net	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	34.242	-	42	96	268	589	33.247	Accrued interest receivable	
Jumlah	7.797.823	942.159	949.685	25.741	41.609	127.197	5.711.432	Total	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Liabilitas segera	100.017	100.017	-	-	-	-	-	Liabilities due immediately	
Simpanan dari nasabah	6.420.315	1.504.384	1.519.134	2.131.409	723.689	539.669	2.030	Deposit from customers	
Simpanan dari bank lain	1.273.628	194.631	480.342	393.350	131.255	74.050	-	Deposit from other banks	
Liabilitas lain-lain	257.591	257.591	-	-	-	-	-	Other liabilities	
Jumlah	8.051.551	2.056.623	1.999.476	2.524.759	854.944	613.719	2.030	Total	
Perbedaan jatuh tempo	(253.728)	(1.114.464)	(1.049.791)	(2.499.018)	(813.335)	(486.522)	5.709.402	Maturity gap	
		2024							
		Tidak mempunyai jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 months	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months		
Nilai tercatat/ Carrying value									
Aset keuangan								Financial assets	
Kas	133.328	133.328	-	-	-	-	-	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	456.348	456.348	-	-	-	-	-	Current accounts in Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	11.513	11.513	-	-	-	-	-	Current accounts in other Banks	
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	450.583	-	450.583	-	-	-	-	Placements in bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	1.053.236	-	-	-	-	-	1.053.236	Securities	
Kredit - bersih	3.607.640	-	63.731	39.976	35.174	228.804	3.239.955	Loans - net	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	25.042	-	169	921	41	482	23.429	Accrued interest receivable	
Jumlah	5.737.690	601.189	514.483	40.897	35.215	229.286	4.316.620	Total	
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Liabilitas segera	142.373	142.373	-	-	-	-	-	Liabilities due immediately	
Simpanan dari nasabah	4.855.841	1.378.716	890.878	1.635.337	779.641	166.151	5.118	Deposit from customers	
Simpanan dari bank lain	694.028	160.656	220.761	243.106	17.755	51.750	-	Deposit from other banks	
Liabilitas lain-lain	119.382	119.382	-	-	-	-	-	Other liabilities	
Jumlah	5.811.624	1.801.127	1.111.639	1.878.443	797.396	217.901	5.118	Total	
Perbedaan jatuh tempo	(73.934)	(1.199.938)	(597.156)	(1.837.546)	(762.181)	11.385	4.311.502	Maturity gap	

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Bank telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo (*gap*) antara lain dengan cara menggeser deposito jangka pendek menjadi deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang yaitu dengan pola komitmen. Disamping itu, Bank telah mengelola pola penarikan simpanan nasabah.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko timbulnya kerugian akibat sistem dan pengendalian yang tidak memadai, kesalahan manusia atau kegagalan pengendalian manajemen, termasuk bencana alam, kegagalan sistem, risiko pengelolaan dana, risiko operasi kustodian dan kecurangan (*fraud*).

Kerangka kerja dibentuk untuk memastikan adanya identifikasi dan pengendalian terhadap risiko operasional, termasuk pengendalian melalui kebijakan dan prosedur standar, praktik usaha serta pengawasan kepatuhan. Pengendalian tersebut akan terus ditinjau kembali dan disempurnakan secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank. Ketidadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada adanya proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Bank selalu melakukan penilaian terhadap segala jenis perjanjian yang dilakukan Bank, baik dengan nasabah maupun dengan pihak ketiga sebelum perjanjian tersebut digunakan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada Bank, seperti terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Reputasi berkaitan erat dengan kepercayaan. Tanpa reputasi, maka kepercayaan tidak akan ada karena reputasi merupakan komponen yang sangat penting dalam industri perbankan. Reputasi merupakan salah satu aset Bank yang terpenting, namun justru paling sulit untuk dilindungi. Reputasi dapat menjadi suatu keunggulan kompetitif, namun berpotensi untuk rusak terutama karena perkembangan media dan komunikasi, regulasi yang makin ketat, juga loyalitas nasabah yang menurun.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The Bank undertakes actions to overcome the maturity gap among others by shifting short-term time deposits into time deposits with longer period using commitment pattern. In addition, the Bank has been managing the pattern of withdrawals of customer deposits.

Operational Risk

Operational risk is the risk arising from losses as a result of inadequate systems and controls, human error or management failure, includes the threat of natural disasters, systems failure, funds management risk, custodian operations risk and fraud.

A framework is in place to ensure operational risk is identified and controlled. This includes a variety of controls including formal policies and standard procedures, business practices and compliance monitoring. These controls are subject for regular reviews and updates.

Legal Risk

Legal risk may arise due to the weakness of juridical aspects caused by lack of agreement made by the Bank. Absence and/or changes in regulation which led to a transaction conducted by the Bank to be not in accordance with the regulation and the litigation process arising from third-party lawsuit against the Bank and the Bank against third party.

Bank always make an assessment of any kind of agreement involving the Bank, both with customers and with third parties before the agreement is implemented.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk that may arise due to the non-compliance by the Bank with prevailing regulations and laws. In practice, compliance risks are inherent with the Bank's risks, such as to comply with Minimum Reverse Requirement, Quality of Earning Assets, Allowance for Impairment Loss, Legal Lending Limit and other risk that may arise relating to certain regulations.

Reputation risks are risks which are caused by among others negative publication of the Bank's business or negative perception of the Bank itself.

Reputation is closely related with trust. Without reputation, there will be no trust since reputation is a crucial component in a banking industry. Reputation is one of the Bank's precious assets, nonetheless it is also the most difficult to guard. Reputation can be a competitive advantage, but also potential to be damaged due to development of news and communication, more tightened regulations and declining in customers' loyalty.

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Penilaian risiko reputasi meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inheren terdiri dari pengaruh reputasi dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank, frekuensi dan materialitas eksposur pemberitaan negatif Bank, serta frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Risiko Strategi

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

Penilaian risiko strategi meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inheren terdiri dari kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis Bank, dan pencapaian rencana bisnis Bank.

Pengelolaan Modal

Peraturan Permodalan

Bank Indonesia (BI) menetapkan dan memonitor ketentuan dan persyaratan modal untuk Bank sebagai entitas individu. Bank diharuskan untuk mematuhi peraturan BI sebagai badan pengawas modal.

Bank menggunakan pendekatan Model Standar untuk mengukur risiko kredit, sedangkan untuk risiko operasional menggunakan pendekatan Indikator Dasar.

Perhitungan modal bank umum sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dikelompokkan menjadi modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

Modal Inti (*tier 1*)

Bank wajib menyediakan modal inti (*tier 1*), paling kurang 6% (lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), dan modal inti utama paling kurang 4,5% dari ATMR.

Modal inti terdiri dari:

- a. Modal inti utama, yang mencakup
 - Modal disetor
 - Cadangan tambahan modal
- b. Modal inti tambahan

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

Reputational risk assessment includes inherent risk and quality of risk management implementation. Inherent risk consists of the influence of the reputation of the Bank's owner and related companies, violation of business ethics, the complexity of the Bank's products and business cooperation, materiality and frequency of the Bank's negative news, and the materiality and the frequency of customer complaints.

Strategic Risk

Strategic risks are risks which are caused by among others inappropriate or less responsive in application of the Bank's strategy and making business decisions.

Strategic risk assessment includes inherent risk and quality of risk management implementation. Inherent risk consists of compliance of strategy with the business environment, high risk and low-risk strategy, the Bank's business positioning, and the achievement of the Bank's business plan.

Capital Management

Regulatory Capital

Bank Indonesia (BI) establishes and monitors the terms and conditions for the Bank's capital as an individual entity. Banks are required to comply with regulatory capital of BI as a supervisory board.

The Bank is using the Standard Model approach for measuring credit risk, while for operational risk is measured using the Basic Indicator approach.

The calculation of capital for commercial banks is in accordance with the Bank Indonesia regulation which are grouped into core capital (*tier 1*), supplementary capital (*tier 2*), and additional supplementary capital (*tier 3*).

Core Capital (*tier 1*)

Banks are required to provide the core capital (*tier 1*), at least 6% (five percent) of risk weighted assets (RWA), and common equity tier 1 at least 4.5% of RWA.

Core capital consists of:

- a. Common equity tier 1, includes:
 - Paid in capital
 - Disclosed reserve
- b. Additional tier 1

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Peraturan Permodalan (lanjutan)

Modal Pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap (tier 2) meliputi:

- Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya
- Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap
- Cadangan umum penyisihan penghapusan atas aset produktif yang wajib dibentuk

Berbagai batasan diterapkan untuk unsur-unsur dari modal dasar. Pengaruh pajak tangguhan telah dikecualikan dalam menentukan jumlah laba ditahan untuk modal tier 1, hanya 50 persen dari laba tahun berjalan sebelum pajak tangguhan yang termasuk dalam modal tier 1 dan kualifikasi modal tingkat 2 tidak dapat melebihi modal tier 1. Ada juga pembatasan pada jumlah cadangan penurunan kolektif yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

Operasional/aktivitas perbankan dikategorikan sebagai pembukuan perdagangan (*trading book*) atau pembukuan perbankan (*banking book*) dan ATMR yang ditentukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang mencerminkan berbagai tingkat risiko yang melekat pada aset dan eksposur yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Seperti disebutkan di atas, aset tertimbang menurut risiko memperhitungkan risiko operasional.

Alokasi modal antara kegiatan operasional dan kegiatan khusus, untuk pengembangan usaha didorong oleh optimalisasi pengembalian yang dicapai pada modal yang dialokasikan. Jumlah modal yang dialokasikan untuk setiap operasi atau kegiatan didasarkan terutama pada peraturan modal, tetapi dalam beberapa kasus peraturan tidak mencerminkan sepenuhnya berbagai tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan yang berbeda. Dalam kasus seperti ini kebutuhan modal dapat mencerminkan profil risiko yang berbeda, sesuai dengan tingkat keseluruhan modal untuk mendukung operasional atau kegiatan tertentu yang tidak di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk tujuan pemenuhan peraturan. Proses mengalokasikan modal untuk kegiatan operasional dan kegiatan khusus dilakukan secara independen dari mereka yang bertanggung jawab untuk operasi oleh Risiko Bank dan Kredit Bank, dan ditinjau apakah sudah sesuai atau belum oleh Komite Kredit Bank atau ALCO.

Meskipun memaksimalkan pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko adalah dasar utama yang digunakan dalam menentukan bagaimana modal dialokasikan didalam Bank untuk kegiatan operasional atau kegiatan tertentu, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun juga memperhitungkan sinergi dengan kegiatan operasional dan kegiatan lainnya, ketersediaan manajemen dan sumber daya lainnya dan kesesuaian dari aktivitas dengan tujuan jangka panjang Bank. Kebijakan Bank dalam hal manajemen dan alokasi modal ditinjau secara teratur oleh Direksi.

38. RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Management (continued)

Regulatory Capital (continued)

Supplementary Capital (tier 2)

Supplementary capital shall include:

- Capital instruments in the form of shares or other equity instruments
- Addition paid in capital derived from the issuance of capital instruments classified as supplementary capital
- Common reserve allowance for earning assets which shall be established

Various limits are applied to elements of the capital base. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital, only 50 percent of the profit for the year before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There are also restrictions on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

Banking operations are categorized as either trading book or banking book, and RWA are determined according to specified requirements that reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures that were not recognized in the statements of financial position. As noted above, risk weighted asset in respect of operational risk is included in the measurement.

The allocation of capital between operation and specific activities is, to a large extent, driven by optimization of the return achieved on the capital allocated. The amount of capital allocated to each operation or activity is based primarily upon the regulatory capital, but in some cases the regulatory requirements do not reflect fully the varying degree of risk associated with different activities. In such cases the capital requirements may be flexed to reflect differing risk profiles, subject to the overall level of capital to support a particular operation or activity not falling below the minimum required for regulatory purposes. The process of allocating capital to operation and specific activities is undertaken independently of those responsible for the operation by Bank Risk and Bank Credit, and is subject to review by the Bank Credit Committee or ALCO as appropriate.

Although maximization of the return on risk-adjusted capital is the principal basis used in determining how capital is allocated within the Bank to particular operations or activities, it is not the sole basis used for decision-making. Synergies with other operations and activities, the availability of management and other resource, and the fit of the activity with the Bank's longer term strategic objectives are also taken into consideration. The Bank's policies regarding capital management and allocation are reviewed regularly by the Board of Directors.

39. INFORMASI LAINNYA

- a. Berdasarkan POJK No. 11 /POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)", Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011, perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Perhitungan ATMR untuk risiko operasional diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang "Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar". Berdasarkan surat edaran tersebut, sejak 1 Januari 2011, Bank telah memperhitungkan ATMR untuk risiko operasional dengan perhitungan beban modal risiko operasional 15% dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga periode terakhir.

Perhitungan rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
Untuk risiko kredit	3.703.779	2.761.692
Untuk risiko operasional	272.937	278.888
Untuk risiko pasar	306	-
Modal inti	1.415.692	1.274.849
Modal perlengkapan	45.124	32.310
Jumlah modal inti dan Pelengkap	1.460.816	1.307.159
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM)	36,73%	42,99%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	36,73%	42,99%
Rasio modal inti terhadap aset tertimbang menurut risiko	35,60%	41,93%

- b. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk masing-masing nasabah per masing-masing bank dengan kriteria suku bunga deposito tertentu.

Beban premi penjaminan Pemerintah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar, RpNihil dan Rp10.065 dan dibukukan pada akun beban bunga (Catatan 28).

39. OTHER INFORMATION

- a. In accordance with POJK No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding "Commercial Bank Minimum Capital Adequacy Requirement" and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/37/DPNP dated December 27, 2012 regarding "Minimum Capital Adequacy Requirement and Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)", the Bank is required to fulfill minimum capital based on risk profile.

The calculation of RWA with credit risk is stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding "RWA with Credit Risk Calculation using Standard Approach".

The calculation of RWA with operational risk is stipulated in Bank Indonesia Circular Letter No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 regarding "RWA with Operational Risk Calculation using Basic Indicator Approach". Based on this circular letter, since January 1, 2011, bank has calculated RWA with operational risk in which capital charge with operational risk at 15% of average annual positive gross income for the last three periods.

The calculation of capital adequacy ratio as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
			Risk Weighted Assets (RWA)
			With credit charge
			With operational charge
			With market charge
			Core capital
			Supplementary capital
			Total core and Supplementary
			Capital Adequacy Ratio (CAR)
			With credit and operational risk
			Ratio of core capital to risk weighted assets

- b. Government Guarantee on Obligations of Banks

As of December 31, 2025 and 2024, based on Government Regulation No. 66/2008 dated October 13, 2008 regarding the amount of deposit guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank subject to certain criteria of interest rates of deposits.

The government guarantee premium incurred for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to RpNil and Rp10,065 and respectively, are recognized as part of interest expense (Note 28).

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

c. Perjanjian-perjanjian Signifikan

Perjanjian tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional tanggal 16 Oktober 2024 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Nomor: 092/PKS/DIR-BB/X/2024 dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Agustus 2024 dengan PT Sigma Cipta Caraka dengan tujuan penyediaan Jasa Manajemen Teknologi Informasi, Nomor: 043/PKS/DIR-BB/VI/2024 yang berlaku selama 2 tahun.

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 September 2025 dengan Noesantara Law Firm dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 146/PKS/DIR-BB/IX/2025, yang berakhir tanggal 21 September 2026.

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 September 2025 dengan Law Firm Gaw-Tu dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 148/PKS/DIR-BB/IX/2025, yang berakhir tanggal 21 September 2026.

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 September 2025 dengan PT Putra Banten Mulia dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 147/PKS/DIR-BB/IX/2025, yang berakhir tanggal 21 September 2026.

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 September 2025 dengan PT Andalas Jawadwipa Solution dengan tujuan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit), Nomor: 149/PKS/DIR-BB/IX/2025, yang berakhir tanggal 21 September 2026.

40. SALDO AKUMULASI RUGI DAN RENCANA MANAJEMEN-

Bank mengalami Akumulasi saldo rugi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.778.249 dan Rp2.830.771.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 Bank mencatat modal inti masing-masing sebesar Rp1.415.692 dan Rp1.274.849

39. OTHER INFORMATION (continued)

c. Significant Agreement

Agreement regarding Artajasa Electronic Transaction Service Membership in the context of Implementing National Payment Gates on October 16, 2024 with PT Artajasa Pembayaran Elektronik Number: 092/PKS/DIR-BB/X/2024 with a period of 3 years and can be extended.

Agreement dated August 1, 2024 with PT Sigma Cipta Caraka with the aim of providing Information Technology Management Services, Number: 043/PKS/DIR-BB/VI/2014 which is valid for 2 years.

Agreement dated September 22, 2025 with Noesantara Law Firm with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 146/PKS/DIR-BB/IX/2025, which expired on September 21, 2026.

Agreement dated September 22, 2025 with Law Firm Gaw-Tu with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 148/PKS/DIR-BB/IX/2025 which expired on September 21, 2026.

Agreement dated September 22, 2025 with PT Putra Banten Mulia with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number : 147/PKS/DIR-BB/IX/2025 which expired on September 21, 2026.

Agreement dated September 22, 2025 with PT Andalas Jawadwipa Solution with the purpose of providing third parties Services (Loans settlement), Number: 149/PKS/DIR-BB/IX/2025 which expired on September 21, 2026.

40. ACCUMULATED DEFICIT AND MANAGEMENT PLAN

The Bank experienced an accumulated Bank loss balance on December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp2,778,249 and Rp2,830,771 respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank recorded core capital of Rp1,415,692 and Rp1,274,849 respectively.

40. SALDO AKUMULASI RUGI DAN RENCANA MANAJEMEN (lanjutan)

Berdasarkan rencana bisnis Bank untuk tahun 2025 sampai dengan 2028 tentang penyesuaian bisnis Bank, manajemen Bank telah menetapkan:

- a. Penguatan dan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui optimalisasi pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pertumbuhan portofolio kredit yang prudent dan berkualitas, peningkatan dana murah (CASA), pengembangan fee based income, serta pengelolaan dan pemulihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapusbukukan secara berkelanjutan.
- b. Penguatan service excellence dan operational excellence, melalui digitalisasi produk dan layanan, peningkatan efisiensi proses, serta penguatan jaringan dan kualitas layanan;
- c. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi strategis, termasuk optimalisasi operasional dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah efektif, serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan mitra strategis lainnya.
- d. Penguatan human capital dan tata kelola, melalui penerapan manajemen berbasis kinerja, penguatan praktik manajemen risiko, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.

Manajemen telah menyusun proyeksi keuangan untuk periode setelah tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan asumsi yang dianggap wajar dan dapat dicapai. Proyeksi tersebut menunjukkan perbaikan kinerja profitabilitas, kualitas aset, pengelolaan likuiditas, dan kecukupan permodalan.

Berdasarkan pelaksanaan inisiatif strategis tersebut dan proyeksi keuangan yang telah disusun, Manajemen berkeyakinan bahwa Bank memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha (going concern).

40. ACCUMULATED DEFICIT AND MANAGEMENT PLAN (continued)

Based the Bank's business plan for 2025 to 2028 regarding the Bank's business adjustment, the Bank management has determined:

- a. Enhancement of sustainable quality business growth, through optimization of Regional Government Cash Management (RKUD), prudent expansion of quality loan portfolios, strengthening of low-cost funding (CASA), improvement of fee-based income, and continued management and recovery of non-performing and written-off loans.
- b. Strengthening service and operational excellence, through product and service digitalization, process efficiency improvements, and enhancement of distribution channels and service quality.
- c. Optimization of synergies and strategic collaborations, including operational optimization within the Bank Business Group (KUB), which has become effective, as well as collaboration with Regional Governments and other strategic partners;
- d. Strengthening human capital and governance, through performance-based management, enhancement of risk management practices, and continuous development of employee competencies.

Management has prepared financial projections covering the period subsequent to December 31, 2025, based on assumptions considered reasonable and achievable. These projections indicate improvements in profitability, asset quality, liquidity management, and capital adequacy.

Based on the implementation of these strategic initiatives and the financial projections prepared, Management believes that the Bank has adequate capacity to sustain its operations for the foreseeable future. Accordingly, the accompanying financial statements have been prepared on a going concern basis.

41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat keterangan No: 04/NOT-PE/I/2026, dari Periasman Effendi, SH notaris di tanggerang tanggal 21 Januari 2026, telah diadakan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk, memutuskan :

- Menyetujui pengunduran diri Tuan Bambang Widyatmoko, S.E dari jabatannya selaku Direktur Bisnis Perseroan.
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Rodi Judo Dahono selaku Direktur Operasional Perseroan
- Menyetujui pengangkatan Tuan Deden Apriandhi sebagai Komisaris Perseroan
- Menyetujui pengangkatan Tuan Slamet Riyadi sebagai Direktur Bisnis Perseroan dan Tuan Purbaji Basuki sebagai Direktur Operasional Perseroan.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

Hoiruddin Hasibuan
Deden Riki Hayatul Firman
Rina Dewiyanti
Deden Apriandhi

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Muhammad Busthami
Eko Virgianto
Slamet Riyadi
Purbaji Basuki

Pada tanggal 7 Januari 2026, atas transaksi aset repo periode 31 Desember 2025 sudah di cairkan dan diterima oleh bank.

Counterparty/ Counterparty	Jenis efek/ Type of securities	Jumlah nominal/ Nominal amount	Tanggal mulai/ Start date	Jatuh tempo/ Maturity date	Nilai penjualan kembali/ Resale value	Pendapatan bunga yang belum di realisasi/ Unrealized interest income	Nilai tercatat/ Carrying value
Bank Indonesia	VR0070	111.087	31 Des/ Dec 31, 2025	7 Jan/ Jan 7, 2026	108.835	100	108.734
Jumlah		111.087			108.835	100	108.734

42. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah disetujui Direksi untuk diterbitkan tanggal 25 Februari 2026.

41. SUBSEQUENT EVENT

Based on the statement letter No: 04/NOT-PE/I/2026, from Periasman Effendi, SH, notary in Tangerang dated January 21, 2026, an Extraordinary Shareholders Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk was held, deciding:

- Approved the resignation of Mr. Bambang Widyatmoko, S.E. from his position as Business Director of the Company.
- Approved the honorable dismissal of Mr. Rodi Judo Dahono as the Company's Operational Director
- Approved the appointment of Mr. Deden Apriandhi as Commissioner of the Company
- Approved the appointment of Mr. Slamet Riyadi as the Company's Business Director and Mr. Purbaji Basuki as the Company's Operational Director.

So that the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is:

Board of Commissioners

President Commissioners
Commissioners Independen
Commissioners
Commissioners

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

On January 7, 2026, the repo asset transaction for the period December 31, 2025 was disbursed and received by the bank.

42. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were approved and authorized for issue by the Directors on February 25, 2026.

LAPORAN KEUANGAN
PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan ini dibuat dan disetujui
Direksi PT Banten Global Development
yang akan dilampirkan sebagai Laporan Auditor Independen

Entis Kushendar, SE. AK., MM
Direktur

A. Fatoni, SE., QIA., M.Si.
Direktur

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	i
Laporan Auditor Independen	ii
Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6-25

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

Nomor: 001/BGD/SPD/II/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Entis Kushendar, S.E., Ak., M.M.
Alamat Kantor : Ruko Sembilan No. 8b & 9a, Jl. Jendral Sudirman Sumur Pecung,
Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Batu Indah raya No. 22 RT005/003 Batununggal, Bandung
Telepon : (0254) 8483257
Jabatan : Direktur

2. Nama : A Fatoni, S.E., QIA., M.Si.
Alamat Kantor : Ruko Sembilan No. 8b & 9a, Jl. Jendral Sudirman Sumur Pecung,
Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
Alamat Domisili sesuai KTP : Parung Kulon, RT003/RW004, Duren Mekar, Bojongsari
Telepon : (0254) 8483257
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Banten Global Development;
2. Laporan keuangan PT Banten Global Development ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK Indonesia untuk Entitas Privat);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 27 Februari 2026




Entis Kushendar, SE. AK., MM.
Direktur

A. Fatoni, SE., QIA., M.Si.
Direktur

PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

Ruko Sembilan No. 8b & 9a Jl. Jend. Sudirman Lingkungan Kemang Sumur Pecung, Serang - Banten
T. +62 (254) 8483 257 | F. +62 (254) 8480 043, HP. 0852 1961 2961 | www.banten-global.co.id
e: bgdbanten1@gmail.com



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00010/2.1532/AU.8/05/1907-1/1/II/2026

Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT Banten Global Development

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Banten Global Development** ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2005, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), yang menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Perusahaan telah mengungkapkan perubahan kerangka akuntansi ini beserta dampaknya secara memadai dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagaimana diungkapkan dalam CALK Nomor 2a. Opini kami tidak dimodifikasi terkait dengan penerapan SAK EP ini.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 05 Juni 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SLAMET WAHYUDI RIZQON & REKAN


Muhammad Rizqon, CPA
NRAP: AP.1907



27 Februari 2026

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2d.3.	19.797.991.308	16.309.207.301
Piutang Usaha	2e.4.		
Piutang Lancar		1.080.439.340	1.890.421.358
Pihak Hubungan Istimewa		7.286.865.394	6.164.141.890
Piutang Lain-lain			
Pihak Hubungan Istimewa	2c.5.	17.085.000	18.751.669
Pajak dibayar Dimuka	2n.14a	3.568.905.029	11.036.657.758
Biaya Dibayar Dimuka	2f.6.	691.618.062	738.756.947
Jumlah Aset Lancar		32.442.904.133	36.157.936.924
Aset Tidak Lancar			
Investasi Pada Entitas Asosiasi	2k.7.	19.935.000.000	19.935.000.000
Investasi Pada Entitas Anak	2k.8.	-	-
Aset Tetap	2h.9.		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan			
sebesar Rp.2.216.222.148 pada tahun			
2025 dan sebesar Rp.2.061.272.032			
pada tahun 2024.		4.519.817.802	4.651.467.917
Aset Pajak Tangguhan	2n.14d.	1.148.965.147	1.148.996.622
Aset Lain-Lain	2h.9.	6.120.500.000	6.083.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		31.724.282.949	31.818.464.539
JUMLAH ASET		64.167.187.081	67.976.401.462

Lihatlah catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	10.	2.366.041.333	9.101.452.829
Utang Lain Lain	11.	3.597.595.500	3.311.295.420
Utang Pajak	2m.14b	3.425.707.905	2.928.644.936
Pendapatan Diterima Dimuka	12.	930.123.326	1.189.747.661
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.319.468.064	16.531.140.846
Kewajiban Jangka Panjang			
Imbalan Pasca Kerja	2o.13.	32.856.928	672.864.875
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		32.856.928	672.864.875
Ekuitas			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1000 per saham	15.		
Modal Dasar - 140.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 35.515.240 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.		35.515.240.376	35.515.240.376
Saldo Laba			
- Laba (Rugi) Ditahan		13.971.748.476	9.773.565.315
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		4.327.873.238	5.483.590.051
Jumlah Ekuitas		53.814.862.089	50.772.395.741
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		64.167.187.081	67.976.401.462

Serang, 27 Februari 2026



Entis Kushendar, SE. AK., MM.
Direktur


A. Fatoni, SE., QIA., M.Si.
Direktur

Lihatlah catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2k.16.	27.669.772.735	26.500.911.268
BEBAN POKOK USAHA	2k.17.	(27.456.999.650)	(26.080.746.546)
LABA (RUGI) KOTOR		212.773.085	420.164.722
BEBAN USAHA	2k.18.	(4.240.203.415)	(3.725.120.189)
LABA (RUGI) USAHA		(4.027.430.330)	(3.304.955.467)
PENDAPATAN LAIN-LAIN	2k.19.	9.420.348.647	8.793.123.908
BEBAN LAIN-LAIN	2k.19.	(4.767.291)	(4.578.391)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5.388.151.027	5.483.590.051
Pajak Kini	2m.14c.	1.060.246.313	-
Pajak Tangguhan	2m.14d.	31.476	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		4.327.873.238	5.483.590.051
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
(Kerugian)/keuntungan perhitungan imbalan pasca kerja		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.327.873.238	5.483.590.051

Serang, 27 Februari 2026




Entis Kushendar, SE. AK., MM.

Direktur



A. Fatoni, SE., QIA., M.Si.

Direktur

Lihatlah catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	MODAL SAHAM	SALDO LABA	JUMLAH EKUITAS
Saldo per 31 Desember 2022	2.201.115.240.376	(771.318.240.261)	1.429.797.000.115
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	(148.253.189)	(148.253.189)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	20.915.186.562	20.915.186.562
Saldo per 31 Desember 2023	2.201.115.240.376	(750.551.306.888)	1.450.563.933.481
Pelepasan Entitas Anak:			
- Penyesuaian Sesuai BA Rekonsiliasi	(2.165.600.000.000)	803.857.020.800	(1.361.742.979.200)
- Penyesuaian Sisa Saldo Investasi	(3.490.113.766)	(40.588.076.534)	(44.078.190.300)
- Penyesuaian Lain	3.490.113.766	(3.490.113.766)	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	(602.954.913)	(602.954.913)
Pajak Tangguhan	-	1.148.996.622	1.148.996.622
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	5.483.590.051	5.483.590.051
Saldo per 31 Desember 2024	35.515.240.376	15.257.155.371	50.772.395.740
Pajak Tangguhan	-	-	-
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	(1.285.406.889)	(1.285.406.889)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	4.327.873.238	4.327.873.238
Saldo per 31 Desember 2025	35.515.240.376	18.299.621.720	53.814.862.089

Lihatlah catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan	4.327.873.238	5.483.590.051
Penyesuaian untuk :		
Amortisasi dan Penyusutan Aset Tetap	154.950.117	167.257.908
Imbalan Pasca Kerja	(640.007.947)	(6.325.618)
Pelepasan Entitas	-	(44.078.190.300)
Aset Pajak Tangguhan	31.475	-
Koreksi Laba (Rugi) tahun lalu	(1.285.406.889)	(602.954.913)
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	2.557.439.994	(39.036.622.872)
Kenaikan (Penurunan) Dalam Aset Dan Kewajiban Operasi		
Piutang Lancar	809.982.018	(1.890.421.358)
Piutang Usaha	(1.122.723.504)	(2.106.276.222)
Piutang Lain-lain	1.666.669	300.605.737
Pajak Dibayar Dimuka	7.467.752.729	140.816.709
Biaya Dibayar Dimuka	47.138.885	(738.756.947)
Aset Lain-lain	(37.500.000)	142.000.001
Utang Usaha	(6.735.411.496)	1.650.214.908
Utang Pajak	497.062.969	(1.087.706.273)
Utang Lain-lain	286.300.080	5.137.817
Pendapatan Diterima Dimuka	(259.624.335)	927.664.324
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	3.512.084.009	(41.693.344.176)
Arus Kas Dari (Untuk) Kegiatan Investasi		
Pembelian Aktiva Tetap dan Aset Tidak Berwujud	(23.300.000)	(9.313.500)
Pelepasan Investasi	-	1.405.821.169.500
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	(23.300.000)	1.405.811.856.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Setoran Modal	-	(1.361.742.979.200)
Setoran Dividen	-	-
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	-	(1.361.742.979.200)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	3.488.784.009	2.375.532.624
Kas dan setara kas awal tahun	16.309.207.301	13.933.674.678
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	19.797.991.308	16.309.207.301

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Banten Global Development didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2009 diundangkan tanggal 10 September 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development dan izin prinsip telah diberikan dari Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 503/435/BAKD tertanggal 6 Juli 2010. Selanjutnya pendirian PT Banten Global Development diperkuat dengan dikeluarkannya Akta Nomor 02 tertanggal 30 September 2010 oleh Notaris Rusmaedi, SH, M.Kn yang bertempat di Cilegon, Banten dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52694-AH.01.01 tahun 2010, tertanggal 09 November 2010. Anggaran dasar perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 oleh Notaris Rovandy Abdams, SH dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0934184, tertanggal 25 Mei 2015 mengenai pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam akta no. 7 tanggal 23 April 2014 maksud dan tujuan perseroan ialah jasa, perdagangan, pembangunan, industri, transportasi/angkutan dan pertanian. Guna mendukung aktivitas perusahaan, PT Banten Global Development telah memiliki perijinan dan legalitas sebagai berikut:

- 1). Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 412/08/TRAMTIB/2015 tanggal 30 September 2015 dari Pemerintah Kota Serang.
- 2). Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/03346/IX/SITU/BPTPM/2015 tanggal 30 September 2015 dari Pemerintah - Kota Serang - Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan kewajiban daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 3). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar- Nomor: 3007/03346/IX/PB/BPTPM/2015 tanggal 30 September 2015 dari Pemerintah Kota Serang - Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 4). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - Nomor: 3007714603346 tanggal 30 September 2015 dari Pemerintah Kota Serang - Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, berlaku sampai dengan 30 September 2020.
- 5). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.566.094.5-401.000.
- 6). Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor: 9120201510128 tanggal 02 Mei 2019 dan perubahannya pada tanggal 07 April 2022 dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kantor pusat perseroan terletak di Ruko Semmbilan No. 8B dan 9A - Jl. Jend. Sudirman - Lingkungan Kemang RT.03/09 Kel. Sumur Pecung - Kecamatan. Serang - Kota Serang - Provinsi Banten.

Sejak didirikannya perusahaan milik daerah tahun 2012, yaitu perusahaan Banten Global Development berbentuk Perusahaan Daerah (PD), Pemerintah Provinsi Banten telah menyeter modal ke PD Banten Global Development sebesar Rp1.500.000.000,- pada periode 2007, Rp7.500.000.000,- dan Rp1.096.000.000,- pada periode tahun 2009.

1. UMUM - lanjutan

a. Pendirian dan Informasi Umum - lanjutan

Periode tahun 2010 PD Banten Global Development berubah badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selama berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten telah menyetor modalnya kembali pada periode tahun 2010 ke PD Banten Global Development sebesar Rp1.904.000.000,-. Selanjutnya di dalam Akta Perubahan Badan Hukum No. 02 tanggal 30 September 2010 tertera bahwa Pemerintah Provinsi Banten mengalihkan semua hak dan harta kekayaan yang dimiliki PD Banten Global Development sejumlah Rp14.361.227.000,- untuk PT Banten Global Development dalam hal perubahan bentuk badan hukum PD Banten Global Development menjadi PT Banten Global Development. Selanjutnya pada periode tahun 2011 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Banten masuk bergabung dalam susunan pemegang saham PT Banten Global Development.

Pemerintah Provinsi Banten menyetor modalnya kembali ke PT Banten Global Development sebesar Rp1.500.000.000,- pada 30 Desember 2010, Rp5.500.000.000,- dan Rp4.000.000.000,- pada periode tahun 2011 dan pada periode tahun 2012 perusahaan ada penambahan sebesar Rp12.000.000.000,- dan perusahaan mengembalikan Rp2.000.000.000,- ke kas daerah. Pada periode tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten menyetorkan modalnya kembali sebesar Rp314.600.000.000,-. Dengan demikian jumlah keseluruhan modal disetor sampai dengan periode tahun 2015 sebesar Rp350.111.227.000,-. Sesuai dengan Akta Notaris No.2 tanggal 7 September 2016, Perseroan mendapatkan tambahan modal di setor dari Pemegang Saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp300.000.000.000,- dan KORPRI Banten sebesar Rp4.013.376,- sehingga modal disetornya menjadi Rp650.115.240.376,-. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten menyetor modalnya kembali sebesar Rp1.551.000.000.000,-.

Berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, SH. No 7 tanggal 28 Desember 2023 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa membahas tentang persetujuan perubahan pengurus perseroan dan persetujuan perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), Tbk dan telah disetujuinya pemisahan Bank Banten dari PT Banten Global Development. Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih saham Pemerintah Provinsi Banten pada Perseroan Terbatas PT Banten Development sebesar Rp2.165.600.000.000 dan mengkonversikannya menjadi saham pada Bank Banten beserta seluruh biaya pendirian Bank Banten kepada Pemerintah Provinsi Banten.

b. Komisaris, Direktur dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris Rovandy Abdams, SH. No 7 tanggal 28 Desember 2023 susunan pengurus perseroan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Drs. Ayip Muflich, SH, Msi.
Komisaris	: Razid Chaniago, SH., MH.
Direktur	: Entis Kushendar, SE., AK., MM.
Direktur	: A. Fatoni, SE., QIA., MSI.

Berdasarkan dengan Akta Notaris Rovandy Abdams, SH. No. 4 tanggal 26 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Banten Global Development yang telah dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0130448 tanggal 26 April 2017, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. UMUM - lanjutan

b. Komisaris, Direktur dan Karyawan - lanjutan

Direktur	: Entis Kushendar, SE., AK., MM.
Direktur	: A. Fatoni, SE., QIA., MSi.
Komisaris Utama	: Drs. Ayip Muflich, SH., MSi.
Komisaris	: Razid Chaniago, SH., MH.
Komisaris	: DR. Drs. H. Koesnan A. Halim SH., MM.

Berdasarkan dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 4 November 2020, permodalan telah ditetapkan sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp3.300.000.000.000
Modal Disetor	: Rp2.201.115.240.376
Harga Saham	: Rp 1000 / Lembar

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing 5 orang (tidak diaudit).

Berdasarkan dengan Akta Notaris Rovandy Abdams, SH. No. 10 tanggal 30 Juni 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Banten Global Development, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Direktur	: Entis Kushendar, SE., AK., MM.
Direktur	: A. Fatoni, SE., QIA., MSi.
Komisaris Utama	: Drs. Ayip Muflich, SH., MSi.
Komisaris	: Razid Chaniago, SH., MH.
Komisaris	: Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, MSi

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) dan telah memenuhi semua unsur persyaratannya. SAK EP ini menggantikan SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang wajib penerapannya efektif pada 1 Januari 2025.

Perusahaan telah mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai perubahan kerangka akuntansi dan dampaknya. Diantara dampak dari penerapan SAK EP adalah diakuinya Pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun buku 2025 dan disajikan secara koresponding dengan tahun buku 2024. Dampak ini diungkapkan secara prospektif oleh perusahaan.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan menyatakan laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif tahun 2024, disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan juga disusun dengan dasar harga (beban) perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, disajikan dalam Rupiah (Rp), kecuali dinyatakan lain.

c. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dan setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - lanjutan

c. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa - lanjutan

Perseroan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perseroan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing Biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan Biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian Biaya ditentukan berdasarkan metode perfectual masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan Biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada Biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

h. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar Biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk Biaya-Biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal Biaya pembongkaran aset, Biaya pemindahan aset dan Biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan Biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif lainnya, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - lanjutan

h. Aset Tetap - lanjutan

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Persentase</u>
Gedung	5%
Inventaris Kantor	25%
Kendaraan	12,5% s.d 25%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. Penurunan Nilai Aset

Perseroan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan Biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi Biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan perhitungan basil usaha tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

j. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

k. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

Entitas Asosiasi adalah suatu entitas dimana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari joint venture.

Perseroan mencatat investasi pada entitas anak dengan metode ekuitas (*equity method*) sedangkan investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode Biaya (*cost method*). Dalam metode ekuitas Perseroan mengakui bagian laba atau (rugi) pada entitas anak sesuai dengan porsi kepemilikan dalam laporan laba rugi. Dividen yang diterima dari entitas anak diakui sebagai pengurang saldo investasi, sedangkan dividen yang diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - lanjutan

I. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembecaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

i. Penjualan barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- a) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- b) Perseroan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas barang yang terjual;
- c) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perseroan, dan
- e) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perseroan;
- c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- d) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, saldo harta dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih yang timbul akibat penjabaran mata uang asing tersebut dibebankan ke dalam perkiraan rugi laba tahun yang bersangkutan yaitu pada pendapatan/beban lain-lain selisih kurs.

Kurs yang digunakan untuk konversi US Dolar ke Rupiah pada akhir tahun adalah

	2025	2024
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.782	16.162

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN - lanjutan

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK EP Bab 29 "Pajak Penghasilan", perusahaan mengakui pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lalu. Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari entitas memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasikan dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan.

Entitas mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima, atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

o. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca pensiun dihitung dan dibayarkan berdasarkan kewajiban yang diberikan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") untuk melaksanakan beberapa ketentuan Undang-Undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan sehubungan dengan imbalan pasca pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban imbalan pensiun dihitung secara mandiri oleh perusahaan dengan menggunakan metode projected unit credit yang disederhanakan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun tersebut merupakan kas dan setara kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
	Rp	Rp
Kas :		
Kas Rupiah	7.658.920	779.283
	<u>7.658.920</u>	<u>779.283</u>
Bank :		
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	154.802.959	427.721.760
PT Bank Negara Indonesia, Tbk 8888283829	254.010.209	25.716.258
PT Bank Jabar Banten Syariah	231.519.220	4.990.000
Sub Jumlah	<u>640.332.388</u>	<u>458.428.018</u>
Deposito Berjangka		
Deposito Bank Banten	-	15.850.000.000
Deposito Bank BJBS	19.150.000.000	-
Sub Jumlah	<u>19.150.000.000</u>	<u>15.850.000.000</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>19.797.991.308</u>	<u>16.309.207.301</u>

4. PIUTANG USAHA

	2025	2024
	Rp	Rp
Piutang Lancar		
Piutang COP	918.013.340	974.652.771
Piutang Usaha	-	129.490.000
Piutang KSO	-	786.278.587
Piutang BJBS	19.536.000	-
Piutang Jamkrida	22.200.000	-
Piutang Bank Banten	1.200.000	-
Piutang Sapta Buana Indonesia	119.490.000	-
Jumlah	<u>1.080.439.340</u>	<u>1.890.421.358</u>
Pihak hubungan istimewa		
Piutang Bagi Hasil PT Banten Inti Gasindo	4.735.954.089	1.178.111.133
Piutang Revenue Sharing JO PT.BGD-PT.PMB	411.252.210	2.726.121.458
Piutang Bagi Hasil KSO KE-JAS	2.059.909.299	2.259.909.299
Piutang Bagi Hasil SASTRANS	79.749.796	-
Jumlah	<u>7.286.865.394</u>	<u>6.164.141.890</u>

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
	Rp	Rp
Pihak hubungan istimewa		
Piutang Mantan Direksi	1.589.740.779	1.624.740.779
Piutang Mantan Karyawan	229.187.500	231.354.169
Piutang Mantan Komisaris	59.000.000	59.000.000
Jumlah Piutang Hubungan Istimewa	<u>1.877.928.279</u>	<u>1.915.094.948</u>
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(1.860.843.279)</u>	<u>(1.896.343.279)</u>
Jumlah Piutang Bersih	<u>17.085.000</u>	<u>18.751.669</u>

5. PIUTANG LAIN-LAIN - lanjutan

Piutang Direksi dan Komisaris yang terjadi pada tahun 2015 s.d 2016 dan Karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya telah dicadangkan 100% dan masih terus di lakukan penagihan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
	Rp	Rp
Biaya Dibayar Dimuka COP	691.618.062	738.756.947
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	691.618.062	738.756.947

Merupakan uang muka dalam pembelian kendaraan COP KSO.

7. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
	Rp	Rp
PT. Bank Jabar Banten Syariah	14.000.000.000	14.000.000.000
PT. Jamkrida Banten	5.500.000.000	5.500.000.000
PT. Banten Inti Gasindo	435.000.000	435.000.000
Jumlah	19.935.000.000	19.935.000.000

PT Bank Jabar Banten Syariah, berkedudukan di Jl. Braga No.135 Bandung didirikan tanggal 15 Januari 2010 dengan Akta Notaris FATIAH HELMI No.4 di Jakarta, dengan komposisi kepemilikan saham adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, sebesar 99,07% dengan nilai nominal Rp1.496.890.124.000,- dan PT Banten Global Development sebesar 0.93% dengan nilai nominal Rp14.000.000.000,-.

PT Jamkrida Banten adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Banten Global Development pada tanggal 10 September 2014. Komposisi kepemilikan saham Perseroan Terbatas ini adalah PT Banten Global Development sebesar 9,73%. Perseroan ini dibentuk untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh kemudahan akses permodalan dari lembaga perbankan.

PT Banten Inti Gasindo bergerak dalam bidang distribusi gas alam untuk kebutuhan pabrik di kawasan industri Krakatau Steel. PT Banten Global Development (PT BGD) mulai bergabung sejak tahun 2007 dengan kepemilikan saham sebanyak 100 lembar saham senilai Rp435.000.000,-.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Tahun 2025

Nama Entitas (Lokasi)	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Jumlah
1. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Serang)	Perbankan	66,11%	
- Harga Perolehan			2.169.090.113.766
- Bagian saldo rugi			(763.268.944.266)
- Penyesuaian Sesuai BA Rekonsiliasi Penyerahan Nilai Investasi			(1.361.742.979.200)
- Penyesuaian Sisa Saldo Investasi			(44.078.190.300)
Nilai Tercatat			-
2. PT. Banten Mandiri Ekspres (Serang)	Ekspedisi	55,00%	
- Harga Perolehan			7.712.336.461
- Bagian saldo rugi			(7.712.336.461)
Nilai Tercatat			-

Tahun 2024

Nama Entitas (Lokasi)	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Jumlah
1. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Serang)	Perbankan	66,11%	
- Harga Perolehan			2.169.090.113.766
- Bagian saldo rugi			(763.268.944.266)
- Penyesuaian Sesuai BA Rekonsiliasi Penyerahan Nilai Investasi			(1.361.742.979.200)
- Penyesuaian Sisa Saldo Investasi			(44.078.190.300)
Nilai Tercatat			-
2. PT. Banten Mandiri Ekspres (Serang)	Ekspedisi	55,00%	
- Harga Perolehan			7.712.336.461
- Bagian saldo rugi			(7.712.336.461)
Nilai Tercatat			-

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Berdasarkan akta No. 10 tanggal 23 Februari 2024 oleh Notaris Periasman Effendi, S.H., M.H., Perusahaan telah menyerahkan secara cuma-cuma saham-saham kepada dan untuk dimiliki oleh dan dibaliknama ke atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Peralihan saham yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang sudah ditempatkan dan disetor sebesar Rp.2.165.600.000.000 berasal dari pengambilalihan saham Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada PT Banten Global Development dan dikonversikan menjadi nilai saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Nilai investasi yang tercatat dalam laporan keuangan sebagai dasar penyerahan nilai investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten adalah sebesar Rp1.361.742.979.200,-, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyerahan Nilai Investasi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten No.900.1.1/010-BPKO/2025 Tanggal Senin, 02 Juni 2025.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK - lanjutan

PT Banten Mandiri Express

PT Banten Mandiri Express didirikan pada tanggal 1 Juni 2014 dengan melakukan Nota kerja sama "Pengelolaan Perseroan Terbatas" yang sebelumnya adalah sebuah perseroan komanditer CV. Mandiri Express. Komposisi kepemilikan Saham Perseroan adalah PT Banten Global Development sebesar 55%, Tuan Adi Nugroho sebesar 35% dan Tuan Hendra Permana sebesar 10%. Namun terjadi ketidaksesuaian antara MOU (Nota Kesepakatan Bersama) meliputi penyetoran modal disetor dan Biaya akuisisi, sehingga jenis usaha ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada awal bulan Januari 2016, PT BGD mengambil alih semua saham atas perusahaan ini sesuai akta notaris no.6 tertanggal 18 Januari 2016 dimana pada tahun 2014 perseroan mengalami kerugian sebesar Rp845.948.637,-.

Sejak tahun 2018 PT Banten Mandiri Express sudah tidak beroperasi. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tidak ada laporan keuangan PT Banten Mandiri Express per 31 Desember 2020 dan 2021. Manajemen memutuskan untuk menurunkan nilai investasi ke PT Banten Mandiri Express karena perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

9. ASET TETAP

Aset Tetap perusahaan terdiri dari:

2025				
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Biaya perolehan</u>				
Tanah	3.127.000.000	-	-	3.127.000.000
Gedung	2.824.259.000	-	-	2.824.259.000
Kendaraan	239.865.000	-	-	239.865.000
Furniture	205.040.000	-	-	205.040.000
Inventaris	316.575.950	23.300.000	-	339.875.950
Jumlah	6.712.739.950	23.300.000	-	6.736.039.950
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Gedung	1.412.129.500	141.212.950	-	1.553.342.450
Kendaraan	237.364.999	-	-	237.364.999
Furniture	163.041.774	1.449.750	-	164.491.524
Inventaris	248.735.758	12.287.417	-	261.023.175
Jumlah	2.061.272.031	154.950.117	-	2.216.222.148
Nilai Buku	4.651.467.917			4.519.817.802

2024				
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Biaya perolehan</u>				
Tanah	3.127.000.000	-	-	3.127.000.000
Gedung	2.824.259.000	-	-	2.824.259.000
Kendaraan	239.865.000	-	-	239.865.000
Furniture	205.040.000	-	-	205.040.000
Inventaris	307.262.450	9.313.500	-	316.575.950
Jumlah	6.703.426.450	9.313.500	-	6.712.739.950
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Gedung	1.270.916.550	141.212.950	-	1.412.129.500
Kendaraan	237.364.999	-	-	237.364.999
Furniture	161.350.399	1.691.375	-	163.041.774
Inventaris	224.382.175	24.353.583	-	248.735.758
Jumlah	1.894.014.123	167.257.908	-	2.061.272.031
Nilai Buku	4.809.412.325			4.651.467.917

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

9. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
	Rp	Rp
Pihak Ketiga Yang Terdapat Pada		
PT. Gooyang SW (KSO Bricket Kcu)	6.600.000.000	6.600.000.000
KOHOD (Proyek pengadaan lahan di Paku Haji, Tangerang)	968.790.000	968.790.000
KSO Batu Split	640.450.000	640.450.000
PT. Banten Mandiri Ekspres (BME)	340.607.320	340.607.320
KUB Nelayan	366.525.000	366.525.000
KSO Tambak Udang	264.582.325	264.582.325
PT. Graha Banten Lampung Sejahtera	125.000.000	125.000.000
Koperasi Pegawai PT. BGD	32.470.870	32.470.870
Aset Website	40.000.000	-
Jumlah	9.378.425.515	9.338.425.515
Cadangan Penurunan Nilai	(3.257.925.515)	(3.255.425.515)
Jumlah Bersih	6.120.500.000	6.083.000.000

10. UTANG USAHA

	2025	2024
	Rp	Rp
Akun Ini merupakan Utang Usaha yang terdiri dari		
Hutang KSO	2.332.850.833	8.401.426.421
Hutang AP II	-	666.835.908
Hutang MPM Rent	24.906.500	24.906.500
Hutang Agung Rent	8.284.000	8.284.000
Jumlah	2.366.041.333	9.101.452.829

11. UTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
	Rp	Rp
PT. Ginting & Reksodiputo	3.238.233.000	3.238.233.000
Cadangan Bonus	350.000.000	-
Lainnya	9.362.500	73.062.420
Jumlah	3.597.595.500	3.311.295.420

12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2025	2024
	Rp	Rp
Pendapatan Diterima Dimuka Ditangguhkan	930.123.326	1.001.414.321
Pendapatan Diterima Dimuka Mobil	-	120.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka Gedung	-	68.333.340
Jumlah	930.123.326	1.189.747.661

13. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

	2025	2024
	Rp	Rp
Imbalan Pasca Kerja	32.856.928	672.864.875
	32.856.928	672.864.875

Perusahaan telah membayar Tunjangan Pengabdian Pengurus (Direksi & Komisaris) selama 4 (empat) tahun menjabat terhitung dari tahun 2022 s.d tahun 2025 sebesar Rp 870.331.524,-

Pencadangan tunjangan pengabdian pengurus setiap tahunnya dihitung dengan menggunakan pendekatan aktuarial disamakan dengan perhitungan pencadangan IPK karyawan. Perhitungan aktuarial untuk IPK Karyawan dan beban pengabdian pengurus (Direksi & Komisaris) tahun 2025 sebesar Rp230.323.577,- terdiri dari

1. Beban IPK karyawan sebesar Rp32.856.928,-
2. Beban tunjangan pengabdian pengurus sebesar Rp197.466.649,-

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam neraca, perubahan kewajiban selama setahun, dan beban-beban yang diakui dalam laporan laba-rugi Perseroan:

Saldo Awal Periode	672.864.875	679.190.493
Pembayaran Manfaat	(870.331.524)	-
Beban yang diakui di laporan laba/rugi	230.323.577	70.943.122
Penyesuaian	-	(77.268.740)
Kewajiban (aktiva) akhir periode	32.856.928	672.864.875

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam laporan laba rugi:

Biaya jasa kini	230.323.577	70.943.122
Biaya bunga	-	-
Beban (pendapatan) tahun berjalan	230.323.577	70.943.122

14. PERPAJAKAN

Utang pajak, (beban)/manfaat pajak, dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
	Rp	Rp
a. Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Dibayar Dimuka	685.093.580	-
PPh Pasal 23	-	8.171.496.164
PPN Masukan	2.883.811.449	2.865.161.594
Jumlah	3.568.905.029	11.036.657.758
b. Utang Pajak		
Pph 21	23.760.167	45.554.760
Pph 23	265.784.477	1.151.208
PPh 4 Ayat 2	350.000	350.000
PPN Keluaran	2.881.588.976	2.881.588.968
PPh Pasal 29	254.224.285	-
Jumlah	3.425.707.905	2.928.644.936

14. PERPAJAKAN - lanjutan

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp
Pendapatan bersih sebelum Pajak Penghasilan	5,388,151,027	5,483,590,051
Koreksi Fiskal Positif:		
Biaya Pemakaian Listrik Warehouse	819,819,813	-
Biaya Pemakaian Air Warehouse	37,837,835	-
Biaya Asuransi Karyawan/Ketenagakerjaan	116,452,640	-
Biaya atas denda/sanksi	287,022,183	-
Beban PPh 21	-	262,478,780
Beban Imbalan Pasca Kerja	32,856,928	70,943,122
Biaya Retribusi & Sumbangan	14,250,000	250,000
Biaya Rumah Tangga kantor	11,976,643	-
Biaya Tunjangan Kesehatan	29,581,955	-
Biaya Tunjangan PPh 21 Karyawan	313,808,046	49,677,012
Biaya Jamuan Makan, Rapat	30,564,439	-
Pajak jasa giro	1,991,491	-
Koreksi Fiskal Negatif:		
Pemanfaatan Gudang dan Fasilitas	(857,657,648)	-
Sewa gedung	(80,333,332)	-
Pendapatan Bunga deposito	(859,678,937)	(829,184,931)
Pendapatan Jasa Giro	(9,627,902)	(10,335,052)
Laba (rugi) Kena Pajak	<u>5,277,015,181</u>	<u>5,027,418,981</u>
Pembulatan	5,277,015,000	5,027,419,000
Taksiran Pajak Penghasilan:		
11% (Omset s/d Rp4,8 Milyar)	100,697,033	-
22% (Rp4,8 Milyar s/d Rp50 Milyar)	959,549,280	1,106,032,180
PPh 29 Terutang	1,060,246,313	1,106,032,180
Kredit Pajak		
PPh Pasal 25	-	-
PPh Pasal 23	806,022,028	8,171,496,164
Jumlah kredit Pajak	806,022,028	8,171,496,164
Pajak Terutang PPh 29	<u>254,224,285</u>	<u>(7,065,463,984)</u>

c. Aset Pajak Tangguhan

	1/1/2025	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain	12/31/2025
Penyisihan Piutang	1,133,389,135	(7,260,000)	-	1,126,129,135
Imbalan Pasca Kerja	15,607,487	7,228,524	-	22,836,011
	<u>1,148,996,622</u>	<u>(31,476)</u>	<u>-</u>	<u>1,148,965,146</u>

14. PERPAJAKAN - lanjutan

c. Aset Pajak Tangguhan - lanjutan

	1/1/2024	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan/ (dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain	12/31/2024
Penyisihan Piutang	1.142.427.835	(9.038.700)	-	1.133.389.135
Imbalan Pasca Kerja	-	15.607.487	-	15.607.487
	1.142.427.835	6.568.787	-	1.148.996.622

d. Administrasi Pajak

Undang-undang Perpajakan Indonesia mewajibkan setiap perusahaan menyerahkan SPT atas dasar penilaian sendiri. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

15. MODAL SAHAM

	2025 Rp	2024 Rp
Modal saham	35.515.240.376	35.515.240.376
Laba ditahan tahun lalu	12.728.385.557	8.624.568.693
Rugi tahun berjalan	4.327.873.238	5.483.590.051
	<u>52.571.499.170</u>	<u>49.623.399.119</u>

Berdasarkan Akta Notaris & PPAT Rovandy Abdams, S.H. No 7 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Modal dasar perusahaan adalah senilai Rp140.000.000.000 yang terbagi atas 140.000.000 lembar saham. Modal ditempatkan perseroan sebesar Rp35.515.240.376 yang terbagi atas 35.515.240 lembar saham. Susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Jumlah Modal Saham (Rp)
Pemerintah Daerah Provinsi Banten	99,6%	35.361.227	35.361.227.000
Koperasi Korpri Banten	0,4%	154.013	154.013.376
	100,0%	35.515.240	35.515.240.376

Sehubungan dengan adanya penyerahan nilai investasi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten dari PT. Banten Global Development (BGD) ke Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyerahan Nilai Investasi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten No.900.1.1/010-BPKO/2025 Tanggal Senin, 02 Juni 2025, adapun hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. BGD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development sepakat atas nilai modal disetor Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Banten Global Development senilai Rp2.200.961.227.000,- yang terdiri atas Rp2.165.600.000.000,- ditujukan untuk Pembentukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan Rp35.361.227.000,00 adalah nilai modal disetor Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Banten Global Development.

15. MODAL SAHAM - lanjutan

2. Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development sepakat bahwa terdapat penurunan nilai investasi sebagai akibat dari kerugian komprehensif PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. mulai tahun 2016-2023 sesuai Laporan Keuangan Audited PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. adalah Rp803.857.020.800, sehingga nilai investasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Banten per 31 Desember 2023 yang diserahkan sebesar Rp1.361.742.979.200.
3. Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development sepakat melakukan koreksi berdasarkan hasil rekonsiliasi di atas.

16. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2025 Rp	2024 Rp
Pemanfaatan Gudang dan Fasilitas Sewa	26.702.590.498	25.547.653.483
Pendapatan Sewa Beli	595.733.332	710.549.997
Jumlah Pendapatan Usaha	371.448.905	242.707.788
	<u>27.669.772.735</u>	<u>26.500.911.268</u>

17. BEBAN POKOK USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2025 Rp	2024 Rp
Biaya Konsesi	20.998.637.226	21.626.142.397
Biaya Cargo Charges	3.113.549.605	2.782.772.356
Biaya Pemakaian Listrik Warehouse	819.819.813	1.090.090.095
Beban Langsung (Sewa Mobil)	459.270.270	338.350.000
Biaya Sewa Beli	295.138.885	194.743.053
Biaya Pemakaian Air Warehouse	37.837.835	48.648.645
Biaya Surchages	1.732.746.016	-
Jumlah Beban Pokok Usaha	<u>27.456.999.650</u>	<u>26.080.746.546</u>

18. BEBAN USAHA

Beban usaha ini terdiri dari:

	2025	2024
	Rp	Rp
Beban Asuransi Gedung	2.138.640	2.138.640
Beban Asuransi Kendaraan	-	49.677.012
Beban Asuransi Karyawan/ Ketenagakerjaan	116.452.640	116.156.640
Beban Atas Denda/Sanksi	287.022.183	-
Beban Audit	22.522.523	94.594.596
Beban Bantuan Hukum (Pengacara)	-	20.000.000
Beban Bensin, Toll & Parkir	24.143.860	18.059.600
Beban Fotokopi, Percetakan & Ekspedisi	6.737.700	7.975.350
Beban Gaji, Lembur & THR	2.340.921.972	2.321.796.880
Beban Bonus	350.000.000	-
Beban Hotel Dewan Direksi dan Komisaris	1.847.420	1.300.000
Beban Iklan	9.009.009	40.000.000
Beban Imbalan Pascakerja	32.856.928	70.943.122
Beban Jamuan Makan, Rapat	30.564.439	12.657.540
Beban Kebersihan Dan Keamanan	1.800.000	600.000
Beban Konsultan	5.000.000	10.500.000
Beban Lain	8.369.466	188.576.641
Beban Legalitas	-	7.500.000
Beban Mess	13.640.500	7.368.250
Beban Notaris	15.000.000	24.500.000
Beban Pelatihan	980.000	490.000
Beban Pengabdian Pengurus	197.466.649	-
Beban Pemeliharaan Gedung & Kendaraan	15.419.275	27.352.323
Beban Pemeliharaan Inventaris	4.130.480	6.162.500
Beban Penyimpanan Efek	-	84.427.628
Beban Penyusutan Gedung	141.212.950	141.212.950
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	12.287.417	24.353.583
Beban Penyusutan Peralatan (Furniture)	1.449.750	1.691.375
Beban Perangko & Materai	2.473.000	2.664.500
Beban Perjalanan Dinas	7.580.000	3.369.500
Beban Perlengkapan & Alat Tulis Kantor	27.043.508	21.083.759
Beban Retribusi, Sumbangan & CSR	14.250.000	250.000
Beban Rumah Tangga Kantor	11.976.643	14.002.611
Beban Seminar	-	10.000.000
Beban Sewa Gedung	42.000.000	46.200.000
Beban Sewa Jasa Server Gaji	2.280.000	4.104.000
Beban Sewa Kendaraan	2.300.000	2.100.000
Beban STNK, KIR & Pajak Kendaraan	3.283.000	2.822.300
Beban Telepon, Listrik & Internet	25.272.913	35.200.949
Beban Tunjangan Kesehatan	29.581.955	36.159.160
Beban Tunjangan PPh 21 Karyawan	398.538.595	262.478.780
Beban Umum & Administrasi	30.000.000	500.000
Beban Upah & Honorer	2.650.000	4.150.000
Jumlah Beban Usaha	4.240.203.415	3.725.120.189

19. PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
	Rp	Rp
1) Pendapatan Lain-lain		
Hasil Penyertaan dan Bagi Hasil:		
Revenue Sharing	8.281.168.866	7.663.240.485
Pendapatan Bunga Deposito	859.678.937	829.184.931
Pendapatan Lainnya	269.789.608	290.038.333
Pendapatan Jasa Giro	9.627.902	10.335.052
Pendapatan Bunga Pinjaman	83.335	325.002
Pendapatan Di Luar Usaha	-	105
Bagian Laba dari Anak Perusahaan	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	9.420.348.647	8.793.123.908
2) Beban Lain-lain		
Biaya Admin Bank dan Buku Cek/Giro	2.775.800	2.692.500
Pajak Jasa Giro	1.991.491	1.885.891
PPH Final Ps 4 (2)	-	-
Jumlah Beban Lain-lain	4.767.291	4.578.391
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-lain	9.415.581.357	8.788.545.517

20. Penyajian Kembali

Laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan kembali sehubungan dengan penerapan SAK EP yang berdampak pada munculnya aset pajak tangguhan sebagai berikut:

	Tahun 2024 Disajikan	Tahun 2024 Disajikan Kembali
Aset Pajak Tangguhan	-	1.148.996.622
Laba Di Tahan	8.624.568.693	9.773.565.315
	Tahun 2023 Disajikan	Tahun 2023 Disajikan Kembali
Aset Pajak Tangguhan	-	1.142.427.835
Laba Di Tahan	(771.466.493.457)	(770.324.065.622)

21. Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 27 Februari 2026.



LAPORAN TAHUNAN 2025

**PT. BPR KERTA RAHARJA
GEMILANG (PERSERODA)**

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Ikhtisar Utama	<i>ii</i>
I. Laporan Manajemen	1
Laporan Direksi	1
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	6
II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif	8
III. Kepemilikan	17
IV. Perkembangan Usaha	19
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen	23
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	42
VII. Laporan Keuangan Tahunan	73
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	81
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	82

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji Syukur atas berkah dan Rahmat Allah SWT., perkenankan kami menyampaikan Laporan hasil usaha PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang untuk Tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi dokumen strategi yang cukup memadai sebagai sumber informasi dalam memberikan gambaran umum tentang Kinerja Keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Sepanjang Tahun 2025, kami berupaya meningkatkan fungsi intermediasi dengan menggali potensi sumber dana dari pihak ketiga, dana antar Bank maupun sumber dana lainnya dan meningkatkan ekspansi kredit untuk dapat menunjang pertumbuhan pendapatan guna meningkatkan laba usaha.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah dilakukan melalui pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung real time transaksi dan dalam pelayanan pemberian kredit diarahkan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat menopang pertumbuhan usaha dan pendapatan BPR.

Demikian Laporan Tahunan ini kami susun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan.

PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)

Ikhtisar Tahunan 2025

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Kredit yang Diberikan	Rp 639.667.724.279
Pendapatan Operasional	Rp 119.565.325.413
Beban Operasional	Rp 107.001.182.877
Pendapatan Non Operasional	Rp 785.893.324
Beban Non Operasional	Rp 1.367.226.630
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp 9.135.076.632

Rasio Keuangan

KPMM 33,03%	NPL Neto 0,91%	NPL Gross 2,99%	ROA 1,64%
BOPO 89,49%	NIM 8,51%	LDR 344,35%	Cash Ratio 48,90%

I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia- Nya, sehingga PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) untuk menyediakan solusi perbankan bagi masyarakat khususnya nasabah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong sektor usaha di daerah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Strategi dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2025 bertujuan untuk memelihara pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik, antara lain meliputi :

- a. Perubahan struktur organisasi untuk mengantisipasi perkembangan usaha dan perubahan peraturan perundang- undangan; Kebijakan dalam penataan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai perkembangan usaha dan untuk memenuhi penerapan tata Kelola yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Peningkatan komposisi sumber dana pihak ketiga; Strategi penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan agar mampu meningkatkan nilai transaksi nasabah maupun meningkatkan jumlah nasabah, antara lain melalui strategi promosi untuk mengenalkan produk-produk melalui media social dan sarana promosi lainnya serta pemberian hadiah langsung kepada nasabah.
- c. Perluasan jaringan pelayanan melalui pemanfaatan mobil kas keliling; BPR menyediakan layanan mobil kas keliling untuk mempermudah layanan transaksi nasabah terutama layanan jemput bola tabungan pelajar ke sekolah sekolah.
- d. Perluasan Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang; BPR terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan payroll gaji para ASN, serta dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran produk terutama dalam produk kredit.
- e. Peningkatan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia; Untuk meningkatkan kapabilitas kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) perusahaan direalisasikan dengan program- program pengembangan kualitas SDM melalui beberapa kegiatan Pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun pihak lain.
- f. Pemeliharaan nasabah yang menjadi pangsa pasar utama (captive market) bidang perkreditan yang meliputi para ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- g. Melakukan peningkatan komunikasi dengan nasabah kredit untuk menawarkan produk-produk lain dan mencari informasi- informasi lain dalam rangka peningkatan fitur publik produk dan layanan.

- h. Peningkatan kegiatan promosi dan edukasi nasabah antara lain melalui :
- 1). Strategi promosi dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk memilih dan melaksanakan cara promosi yang tepat bagi bank dan sesuai dengan target nasabah yang dituju.
 - 2). Edukasi nasabah dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagi nasabah tentang produk-produk perusahaan dan prosedur dalam setiap produk yang ada diperusahaan.
 - 3). Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan kebijakan pengembangan Teknologi Informasi diorientasikan untuk meningkatkan kemudahan layanan transaksi nasabah dan menunjang efektifitas dalam setiap penyelenggaraan kegiatan operasional BPR.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) menunjukkan kinerja profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) sebesar **1,64%** dan *Return on Equity* (ROE) sebesar **8,54%**. Pertumbuhan kredit sebesar **15,87%** secara tahunan dengan kualitas kredit yang relatif baik yang ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Gross sebesar **2,99%**. Dari sisi efisiensi operasional, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) berhasil mengendalikan biaya dengan baik, sebagaimana tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar **89,49%**.

Pada akhir tahun 2025, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) juga berhasil memenuhi dan melampaui sebagian besar target keuangan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kinerja manajemen yang solid dalam mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, serta kemampuan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) beradaptasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Indikator Keuangan	Target 2025	Realisasi 2025
Pertumbuhan Kredit	12.43%	15.87%
NPL (Gross)	3.38%	2.99%
NPL (Net)	1.85%	0.91%
BOPO	93.25%	89.49%
ROA	1.33%	1.64%
ROE	4.86%	8.54%

Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang tahun 2025, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) masih menghadapi dinamika perekonomian global, domestik dan regional serta daerah Kabupaten Tangerang yang ditandai oleh ketidakpastian kebijakan moneter, serta meningkatnya persaingan likuiditas dan iklim usaha yang belum kondusif. Dalam kondisi tersebut, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) memfokuskan strategi penyaluran kredit pada pertumbuhan yang berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, serta optimalisasi kapabilitas yang telah dibangun pada

periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) menjalankan beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan *end- to- end credit process* dengan melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses kredit dari awal sampai selesai, mulai dari calon debitur mengajukan pinjaman hingga kredit tersebut lunas atau ditutup. untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit melalui penguatan manajemen risiko dan penerapan disiplin risiko yang konsisten di seluruh segmen.
2. Meningkatkan kualitas kredit eksisting dengan melakukan monitoring kredit yang ketat serta melakukan penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
3. Meningkatkan marketing funding untuk pertumbuhan DPK dalam rangka menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM (*Net Interest Margin*) serta memperkuat likuiditas PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA).
4. Pengembangan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pegawai dan direksi mengikuti pelatihan teknis perbankan dan seminar yang relevan dengan ekonomi dan perbankan
5. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola dengan memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat fungsi pengawasan internal.

Penerapan Tata Kelola

Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Manajemen Risiko

Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko, meliputi :

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris;
- 2) Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan limit risiko;
- 3) Kecukupan proses dan sistem manajemen risiko;
- 4) Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh; dan
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam rangka menetapkan produk dan aktifitas baru.
- 6) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;

Tingkat Kesehatan Bank

Ditinjau dari rasio keuangan, beberapa parameter rasio mencatat mengalami sedikit kenaikan maupun penurunan. Pencapaian rasio-rasio secara keseluruhan masih dalam level rasio yang sehat.

No	Faktor/Komponen Penilaian	2025			
		Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
1	Profil Risiko		2	25	0.5
2	Tata Kelola		2	30	0.6
3	Rentabilitas		2	15	0.3
	- ROA	1.64	2		
	- BOPO	89.49	3		
	- NIM	8.51	2		
4	Permodalan		1	30	0.3
	- KPMM	33.03	1		
	- MIAPB	1910.76	1		
Nilai Komposit		1.7			
Peringkat Komposit		2			
Keterangan		Sehat			

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) bertujuan untuk : (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Sistem pengendalian Internal

1. Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia dan melengkapi wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh pegawai.
2. SKAI melakukan pemeriksaan secara berkala dan insidental terhadap pelaksanaan tugas tiap unit kerja.
3. Pengawasan aktif dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerjanya.
4. Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko pada Dewan Pengawas setiap semester.

Apresiasi dan Penutup

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) menyampaikan terima kasih kepada Dewan

Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) untuk terus tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang memungkinkan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA), untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) mampu menjaga ketahanan kinerja dan stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi serta pengelolaan risiko yang prudent.

Sepanjang tahun 2025, Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dan segenap manajemen Perusahaan. Komisaris juga telah memberikan pandangannya serta menyampaikan sarannya terkait implementasi strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada Tahun 2025 dalam menjalankan tugasnya Komisaris dibantu oleh komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Resiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komisaris menilai bahwa setiap komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan bisnis oleh Direksi, serta memberikan panduan ketika dibutuhkan melalui rapat. Dalam rapat-rapat tersebut, Komisaris meninjau antara lain kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta perkembangan strateginya, dan membahas bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam bisnis serta mengkaji perkembangan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko.

Komisaris percaya bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dengan baik. Komisaris menilai bahwa Direksi senantiasa memperhatikan arahan yang diberikan Komisaris. Hal ini diwujudkan melalui komunikasi proaktif yang terjalin melalui penyelenggaraan rapat koordinasi rutin. Komisaris memandang Direksi senantiasa menjalankan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, independence dalam menjalankan operasionalnya.

Komisaris berharap agar Direksi terus fokus pada empat hal, yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas bisnis untuk membangun fundamental yang kuat, meningkatkan efisiensi, dan berusaha untuk mencapai kepuasan nasabah. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, Komisaris yakin bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) dapat memenuhi target-targetnya pada tahun 2025 maupun tahun-tahun mendatang.

Penutup Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah ditunjukkan sepanjang tahun buku 2025.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fungsi pengawasan secara independen dan objektif, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan Perseroan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga akan senantiasa memperkuat sinergi dengan Direksi dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan.

II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

Daftar Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1.



Nama	AI SUHERLAN
Alamat	KOMP RSS PEMDA BLOK C 3 NO 6 BANJARSARI CIPOCOK JAYA KOTA SERANG
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal Mulai Menjabat	20 Mei 2024
Tanggal Selesai Menjabat	20 Mei 2029
Nomor SK Persetujuan Otoritas	AHU-18264.AH01022024
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	21 Maret 2024
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	20 Juni 1999
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN BPR LVL 2
Tanggal Pelatihan	02 Oktober 2023
Lembaga Penyelenggara	BNSP
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	02 Oktober 2028

2.



Nama	UUS MUSTAUDIE
Alamat	KP KOPIBERA RT 03 RW 03 CINANGKA KABUPATEN SERANG
Jabatan	Direktur Operasional
Tanggal Mulai Menjabat	20 Mei 2024
Tanggal Selesai Menjabat	20 Mei 2029
Nomor SK Persetujuan Otoritas	AHU-18264.AH01022024
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	21 Maret 2024
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	05 Juni 2003
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS TERBUKA
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN BPR LEVEL 2
Tanggal Pelatihan	18 September 2023
Lembaga Penyelenggara	BNSP
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	18 September 2028

3.



Nama	DENI SETIA WAHYUDI
Alamat	KP LONG JAHJA TAKTAKAN KOTA SERANG
Jabatan	Direktur SDM, Umum & Kepatuhan
Tanggal Mulai Menjabat	12 April 2022
Tanggal Selesai Menjabat	12 April 2027
Nomor SK Persetujuan Otoritas	536/KEP.249-HUK/2022
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	26 Mei 2022
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	01 April 2006
Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS MATHLAUL ANWAR PANDEGLANG
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN BPR LEVEL 2
Tanggal Pelatihan	18 September 2023
Lembaga Penyelenggara	BNSP
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	18 September 2028

4.



Nama	BENI SUBARSYAH
Alamat	JL RAYA SOREANG NO 271 CIBEUREUM RT 001/012 DESA/KEL KADU KEC SOREANG KAB BANDUNG
Jabatan	Komisaris Independen
Tanggal Mulai Menjabat	26 September 2022
Tanggal Selesai Menjabat	26 September 2026
Nomor SK Persetujuan Otoritas	506/KEP.763-HUK/2022
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	13 Oktober 2022
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	22 Februari 2010
Nama Lembaga Pendidikan	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMNI
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMPETENSI KOMISARIS
Tanggal Pelatihan	25 Oktober 2021
Lembaga Penyelenggara	BNSP
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	25 Oktober 2026

5.



Nama	BANGBANG PURNAWAN
Alamat	BUKIT PERMATA BLOK F-5 NO 11 RT 003 RW 022 KELURAHAN CILAME KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jabatan	Komisaris Independen
Tanggal Mulai Menjabat	01 September 2025
Tanggal Selesai Menjabat	31 Agustus 2029
Nomor SK Persetujuan Otoritas	AHU-AH.01.09-0322022
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	07 Agustus 2025
Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	01 Juni 2005
Nama Lembaga Pendidikan	IKOPIN
Pendidikan Non Formal Terakhir	SERTIFIKASI KOMPETENSI KOMISARIS BPR
Tanggal Pelatihan	02 April 2024
Lembaga Penyelenggara	BNSP
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	02 April 2027

2. Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris

1.	Nama	Heri Adiyaksa Putra
	Alamat	KP Kebon Kelapa Rt 001 Rw 001 Kel Lembangari Kec Rajeg
	Jabatan	Anggota Komite Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi & Nominasi
	Tanggal Mulai Menjabat	06 Maret 2023
	Tanggal Selesai Menjabat	07 Maret 2027
	Surat Pengangkatan No.	013/PKK/BPR-KRG/III/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	07 Maret 2025
	Pendidikan Terakhir	S2 Hukum
2.	Nama	Ukat
	Alamat	Komp Safira Blok F 1 No 39/40 Rt 006 Rw 006 Kel Sepang Kec Taktakan
	Jabatan	Anggota Komite Audit, Pemantau Risiko, Remunerasi & Nominasi
	Tanggal Mulai Menjabat	06 Maret 2023
	Tanggal Selesai Menjabat	07 Maret 2027
	Surat Pengangkatan No.	012/PKK/BPR-KRG/III/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	07 Maret 2025
	Pendidikan Terakhir	S1 Ekonomi

3. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	IRFAN HILMI HANDRIANA
	Alamat	KAMPUNG SOKA NO 14 RT 004 RW 004 CURUG TANGERANG
	Jabatan	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko
	Tanggal Mulai Menjabat	02 Juli 2021
	Surat Pengangkatan No.	07/KEPDIR/BPRKRG/VII
	Surat Pengangkatan Tanggal	02 Juli 2021
2.	Nama	FRISTY LESTARI
	Alamat	PERUMAHAN CLUSTER ROYAL KARAWACI BLOK B2 NO 6 RT 006 RW 021 SUKABAKTI CURUG TANGERANG
	Jabatan	Kepala Satuan Kerja Audit Intern
	Tanggal Mulai Menjabat	10 Juni 2020
	Surat Pengangkatan No.	20/KEPDIR/BPRKR/VI/2
	Surat Pengangkatan Tanggal	10 Juni 2020
3.	Nama	AHMAD FIRDAUS
	Alamat	TAMAN BANTEN LESTARI D.9E-1 RT 002 RW 002 KEL UNYUR SERANG
	Jabatan	Kepala Kantor Cabang Serang
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Agustus 2023
	Surat Pengangkatan No.	11/KEPDIR-SDM/BPR-KR
	Surat Pengangkatan Tanggal	01 Agustus 2023
4.	Nama	ROCHAIDIN
	Alamat	KAMPUNG BABAKAN PASAR JENGKOL RT 007 RW 001 SETU TANGERANG
	Jabatan	Kepala Kantor Cabang Kelapa Dua
	Tanggal Mulai Menjabat	05 Januari 2022
	Surat Pengangkatan No.	03/KEPDIRSDM/BPRKRG
	Surat Pengangkatan Tanggal	05 Januari 2022

5.	Nama	ABDUL GHANI
	Alamat	KAMPUNG AL FALAH RT 004 RW 002 KRESEK TANGERANG
	Jabatan	Kepala Bagian SDM & Umum
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Agustus 2023
	Surat Pengangkatan No.	11/KEPDIR-SDM/BPR-KR
	Surat Pengangkatan Tanggal	01 Agustus 2023
6.	Nama	DEWI SULASTRI
	Alamat	TAMAN REMBRANDT BLOK S 13 NO 09 RT 001 RW 005 CIAKAR PANONGAN TANGERANG
	Jabatan	Kepala Kantor Cabang Pasar Kemis
	Tanggal Mulai Menjabat	02 Juli 2021
	Surat Pengangkatan No.	07/KEPDIR/BPRKRG/VII
	Surat Pengangkatan Tanggal	02 Juli 2021
7.	Nama	EKA RATNA JUWITA
	Alamat	CITRA RAYA GRAND CATANIA BLOK 02 NO 12 RT 001 RW 004 CIAKAR PANONGAN TANGERANG
	Jabatan	Kepala Kantor Cabang Tigaraksa
	Tanggal Mulai Menjabat	10 Juni 2020
	Surat Pengangkatan No.	20/KEPDIR/BPRKR/VI
	Surat Pengangkatan Tanggal	10 Juni 2020
8.	Nama	TAUFIK FIRDAUS
	Alamat	GRAHA PESONA JL WIDARA W40/26 CITRA RAYA KEL. MEKAR BAKTI KEC PANONGAN KAB TANGERANG
	Jabatan	Kepala Kantor Cabang Balaraja
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Agustus 2023
	Surat Pengangkatan No.	11/KEPDIR-SDM/BPR-KR
	Surat Pengangkatan Tanggal	01 Agustus 2023

9.	Nama	ASHADI RUSWANDI
	Alamat	KOMP.METRO FLORIDA KAV L9 NO.5 RT.004/008 PANGGUNRAWI JOMBANG CILEGON
	Jabatan	Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi
	Tanggal Mulai Menjabat	01 Agustus 2023
	Surat Pengangkatan No.	11/KEPDIR-SDM/BPR-KR
	Surat Pengangkatan Tanggal	11 Agustus 2023
10.	Nama	NATALIA TRI RAHAYU
	Alamat	CLASTER BUKIT PANONGAN HIJAU 1 NO 7 RT 003 RW 004 PANONGAN TANGERANG
	Jabatan	Kepala Bagian Akuntansi & Pelaporan
	Tanggal Mulai Menjabat	04 Juli 2022
	Surat Pengangkatan No.	14/KEPDIRSDM/BPRKRG
	Surat Pengangkatan Tanggal	04 Juli 2022
11.	Nama	RACHMAT SUDRAJAT
	Alamat	CIMUNCANG RT 002 RW 006 SUKAPADA BEUNYING KIDUL BANDUNG
	Jabatan	Kepala Kantor Pusat Operasional
	Tanggal Mulai Menjabat	26 Januari 2024
	Surat Pengangkatan No.	13/KEPDIR-SDM/BPR-KRG/VII/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	30 Juli 2024
12.	Nama	WAWA HERMAWATI
	Alamat	JL. SUNAN KALIJAGA KP. LEUWIRANJI KAB. RANGKAS BITUNG
	Jabatan	Kepala Bagian Operasional
	Tanggal Mulai Menjabat	15 Agustus 2025
	Surat Pengangkatan No.	20/KEPDIR-SDM/BPRKRG/VIII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	15 Agustus 2025

III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	PEMERINTAH KAB TANGERANG
	Alamat	JL HAJI SOMAWINATA NO.1 TIGARAKSA
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp55000000000
	Persentase Kepemilikan	76.76%
2.	Nama	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
	Alamat	JL SYEKH NAWAWI ALBANTANI PALIMA KP3B GEDUNG SKPD TERPADU KOTA SERANG- BANTEN
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp15000000000
	Persentase Kepemilikan	20.94%
3.	Nama	PT. BJB
	Alamat	JL. KEJAKSAAN NO. 12-14 BRAGA KOTA BANDUNG
	Jenis Pemilik	Badan Hukum
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp1050000000
	Persentase Kepemilikan	1.47%
4.	Nama	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
	Alamat	JL DIPONEGORO NO 22 BANDUNG
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp600000000
	Persentase Kepemilikan	0.84%

Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
----	---------------------------	-----------------------------

		TANGERANG
2.	Nama Ultimate Shareholder	PROVINSI BANTEN
3.	Nama Ultimate Shareholder	PROVINSI JAWA BARAT
4.	Nama Ultimate Shareholder	PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN

IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	Perda Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007
Tanggal akta pendirian	06 Juni 2007
Tanggal mulai beroperasi	22 Januari 2008
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	85/4/32.
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	08 April 2022
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-0018264.AH.01.02.TAHUN2024
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	21 Maret 2024
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Deposito dan Tabungan. Menyalurkan kembali dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.
Tempat kedudukan	Kabupaten Tangerang
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Sabar, dan Rekan

PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) adalah sebuah lembaga Perbankan yang berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Sesuai dengan fungsinya keberadaan PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) adalah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam upaya untuk turut serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	119.565.325
Beban Operasional	107.001.183
Pendapatan Non Operasional	785.893
Beban Non Operasional	1.367.227
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	11.982.809
Taksiran Pajak Penghasilan	2.855.413
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.135.077

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	146.679.404	-	-	-	-	146.679.404
Kredit yang Diberikan	601.276.136	19.251.655	1.527.300	3.141.973	14.470.660	639.667.724
a. Kepada BPR	7360.496	-	-	-	-	7.360.496
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	1.599.414	-	-	-	-	1.599.414
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	592.316.226	19.251.655	1.527.300	3.141.973	14.470.660	630.707.814
Jumlah Aset Produktif	747.955.540	19.251.655	1.527.300	3.141.973	14.470.660	786.347.228

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	33,03
Rasio Cadangan terhadap PPKA	111,36
NPL Neto	0,91
NPL Gross	2,99
Return on Assets (ROA)	1,64
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	89,49
Net Interest Margin (NIM)	8,51
Loan to Deposit Ratio (LDR)	344,35
Cash Ratio	48,90

PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) mencatat total aset produktif sebesar Rp786.347.128.310 pada akhir tahun, dengan aset lancar mencapai Rp747.955.540.362. Aset kurang lancar, diragukan, dan macet masing-masing sebesar Rp1.527.300.216, Rp3.141.973.022, dan Rp14.470.660.145. Penempatan pada bank lain tercatat Rp146.679.404.031 dan seluruhnya berada dalam kategori lancar, menunjukkan likuiditas yang kuat.

Kredit yang diberikan berjumlah Rp639.667.724.279, dimana Rp630.707.813.882 miliar diberikan kepada non-bank tidak terkait dan sisanya tersebar di kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	2,99
NPL Neto (%)	0,91

Penyebab Utama Kondisi NPL:

- Produk Kredit Multiguna; terjadinya NPL pada produk kredit Multiguna berupa kredit konsumtif kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), pada umumnya disebabkan oleh :
 - Nasabah Topup ke Bank Lain tanpa melakukan pelunasan ke BPR;
 - Perpindahan tugas pegawai ke luar daerah atau ke dinas/instansi lain;
 - Indisipliner pegawai yang mengakibatkan penurunan jabatan dan/ atau pengurangan penghasilan;
 - Adanya pegawai ASN yang memilih untuk pensiun dini.
- Kredit yang diberikan kepada para pegawai tetap, karyawan swasta, buruh, dsb pada umumnya disebabkan oleh :
 - Pemberhentian hubungan kerja (PHK) dikarenakan pabrik tutup atau pindah keluar kota;
 - Berhenti bekerja karena alasan lainnya;
 - Terbelit banyak utang dan pinjaman online;
 - Pindah alamat yang tidak diketahui.
- Produk Kredit Multi Usaha dan kredit Mikro Raharja; terjadinya NPL pada kredit produktif yang diberikan kepada para usaha mikro dan kecil, disebabkan oleh :
 - Usaha yang terhenti disebabkan oleh berbagai faktor;
 - Omzet usaha yang berkurang karena persaingan usaha, dsb;
 - Pelanggan yang tidak menepati janji pembayaran;
 - Musibah keluarga sakit, dsb;

Langkah Penyelesaian:

Angka pencapaian NPL Gross pada Desember 2025 sebesar 2,99%. Angka NPL ini sangat menantang dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah selama tahun 2025 masih belum maksimal dan memerlukan tindakan perbaikan kolektibilitas dengan terlebih dahulu memetakan kemauan dan kemampuan bayar debitur yang menunggak untuk mengintensifkan penagihah.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Perkembangan usaha PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sampai dengan akhir Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.105.901.083 ribu dari total asset pada tahun sebelumnya (2024) sebesar Rp.667.332.196 ribu menjadi sebesar Rp.773.233.279 ribu pada tahun 2025 atau setara dengan 15.87%, dengan perkembangan komposisi sumber dana sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Sumber Dana	2025		2024		Pertumbuhan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Tabungan	82,071,736	10.68%	71,341,519	10.74%	10,730,217	15.04%
Deposito	103,691,187	13.49%	93,067,098	14.01%	10,624,089	11.42%
Simpanan dari Bank Lain	30,291,427	3.94%	32,311,188	4.86%	(2,019,761)	-6.25%
Pinjaman yang diterima	441,202,264	57.40%	360,669,510	54.28%	80,532,754	22.33%
Ekuitas	111,448,603	14.50%	107,092,854	16.12%	4,355,748	4.07%
Jumlah Sumber Dana	768,705,217	100.00%	664,482,170	100.00%	104,223,047	15.68%

Pada tahun 2025 tidak terdapat perluasan jaringan kantor cabang maupun kantor kas. Untuk menjangkau nasabah lebih luas, BPR melakukan aktifitas operasional dengan Mobil Kas Keliling. Penghargaan diterima oleh PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) selama tahun 2025 :

- Penghargaan dari Infobank atas kinerja Keuangan Tahun Buku 2024 dengan predikat " Sangat Bagus".
- Penghargaan dari TOP BUMD dengan kategori penghargaan Top CEO BUMD 2025 yang diberikan kepada Direktur Utama.
- Penghargaan dari TOP BUMD dengan kategori penghargaan TOP BUMD Award 2025 BPR Bintang 5.
- Penghargaan dari Majalah TOP Bisnis dengan kategori penghargaan TOP GRC Award 2025 Bintang 4.
- Penghargaan dari Majalah TOP Bisnis dengan kategori penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025 yang diberikan kepada Direktur Utama.
- Penghargaan dari Infobank Award dengan kategori penghargaan Excellent For the Financial Performance During 2023-2024.

Perubahan Penting Lain

Tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak terdapat perubahan penting lainnya.

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekonomian

Tinjauan Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif **cukup stabil**, meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga pada kisaran **±5%**, dengan realisasi tahun 2025 sekitar 5,1% dan proyeksi tahun 2026 berada pada rentang **4,9%–5,7%**.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh **konsumsi rumah tangga dan investasi** yang tetap kuat. Peningkatan daya beli masyarakat, dukungan belanja pemerintah, serta berbagai program stimulus dan bantuan sosial turut memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi industri perbankan, termasuk PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA), kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat pada kisaran **12%**, sejalan dengan pemulihan sektor riil. Namun di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan kualitas aset di tengah ketidakpastian global yang berimbas ke perekonomian nasional dan di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah-langkah tersebut penting diambil oleh PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Strategi dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2025 bertujuan untuk memelihara pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik, antara lain meliputi :

1. Perubahan struktur organisasi untuk mengantisipasi perkembangan usaha dan perubahan peraturan perundang-undangan; Kebijakan dalam penataan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai perkembangan usaha dan untuk memenuhi penerapan tata Kelola yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan komposisi sumber dana pihak ketiga; Strategi penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan agar mampu meningkatkan nilai transaksi nasabah maupun meningkatkan jumlah nasabah, antara lain melalui strategi promosi untuk mengenalkan produk-produk melalui media social dan sarana promosi lainnya serta pemberian hadiah langsung kepada nasabah.
3. Perluasan jaringan pelayanan melalui pemanfaatan mobil kas keliling; BPR menyediakan layanan

mobil kas keliling untuk mempermudah layanan transaksi nasabah terutama layanan jemput bola tabungan pelajar ke sekolah sekolah.

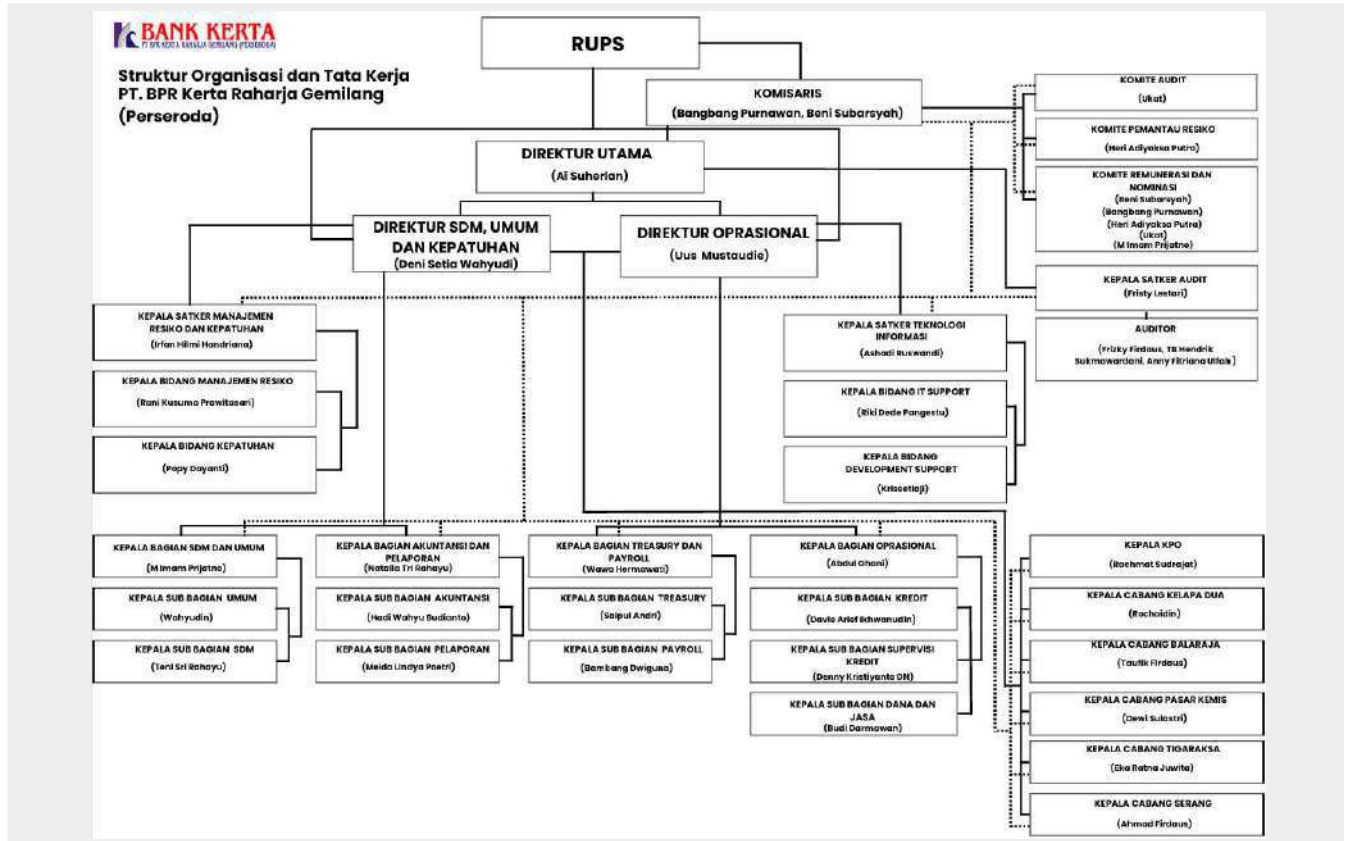
4. Perluasan Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang; BPR terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan payroll gaji para ASN, serta dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran produk terutama dalam produk kredit.
5. Peningkatan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia; Untuk meningkatkan kapabilitas kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) perusahaan direalisasikan dengan program- program pengembangan kualitas SDM melalui beberapa kegiatan Pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal maupun pihak lain.
6. Pemeliharaan nasabah yang menjadi pangsa pasar utama (captive market) bidang perkreditan yang meliputi para ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
7. Melakukan peningkatan komunikasi dengan nasabah kredit untuk menawarkan produk-produk lain dan mencari informasi-informasi lain dalam rangka peningkatan fitur publik produk dan layanan.
8. Peningkatan kegiatan promosi dan edukasi nasabah antara lain melalui :
 - a. Strategi promosi dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk memilih dan melaksanakan cara promosi yang tepat bagi bank dan sesuai dengan target nasabah yang dituju.
 - b. Edukasi nasabah dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagi nasabah tentang produk-produk perusahaan dan prosedur dalam setiap produk yang ada diperusahaan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan kebijakan pengembangan Teknologi Informasi diorientasikan untuk meningkatkan kemudahan layanan transaksi nasabah dan menunjang efektifitas dalam setiap penyelenggaraan kegiatan operasional BPR.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

1. Memiliki kebijakan manajemen risiko yang menekankan pada pembentukan tata kelola manajemen risiko yang sehat dan menata penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Limit risiko dievaluasi kembali sekali dalam 1 satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2. Strategi untuk memitigasi kredit perlu dibuat panduan dan peta portofolio (*portfolio guidance*) sektor ekonomi yang memiliki prospek yang bagus dan yang sedang mengalami penurunan.
3. Melakukan analisa risiko pada beberapa sektor usaha yang dibiayai dan mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
4. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem dan prosedur di BPR untuk menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.

3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) dirancang untuk senantiasa memenuhi tuntutan perkembangan usaha dan dengan menerapkan prinsip tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS

1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan
	Uraian	Tabungan
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito

	Uraian	Deposito
3.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Modal Kerja
	Uraian	Kredit Modal Kerja
4.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Investasi
	Uraian	Kredit Investasi
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Konsumsi
	Uraian	Kredit Konsumsi

5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Sistem Operasional Core Banking System

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan Sistem Akuntansi Terpadu Versi 2.03 dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma). Teknologi Informasi tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan corebanking BPR, layanan transaksi-transaksi online pada setiap kantor BPR dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan layanan nasabah lainnya. Agar dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan serta pengendalian yang efektif dan efisien, maka akan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan penambahan device sesuai kebutuhan.

Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi

1. Kerjasama dengan PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam pemanfaatan System Teknologi Informasi berupa Sistem Akuntansi Terpadu (BPR SATU) versi 2.03 dalam memenuhi kebutuhan corebanking, kebutuhan layanan transaksi online pada setiap jaringan kantor BPR, layanan mobil kas keliling, layanan transaksi payment point dan kebutuhan layanan transaksi elektronik lainnya;
2. Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam kebutuhan perkembangan usaha BPR sehingga dapat mendukung implementasi pelaksanaan SAK EP sesuai Ketentuan Perundang-undangan.
3. Penggunaan system keamanan dalam rangka penyelenggaraan System Teknologi Informasi berupa penggunaan fasilitas pusat data (Data Center) dan pusat pemulihan data (DRC);
4. Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma)

5. Kerjasama dengan Bank Permata, Bank Umum dan/ atau Perusahaan Penyelenggaraan Jasa Pembayaran Lainnya dalam penyelenggaraan layanan Host To Host dalam layanan transaksi elektronik melalui aplikasi GEMA BPR maupun melalui Teller serta penyelenggaraan layanan Virtual Account;
6. Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam mengembangkan aplikasi mobile banking (GEMA BPR) untuk memberikan layanan jasa pembayaran, pembelian dan layanan transaksi elektronik lainnya bagi para nasabah.
7. Kerjasama dengan Sigma dalam pengembangan sistem keamanan transaksi berupa aplikasi Fraud Detection System (FDS) untuk mendukung keamanan transaksi pada Aplikasi Banking Gema BPR.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan Digitalisasi dilakukan melalui upaya-upaya :

1. Membentuk struktur organisasi yang secara khusus dan independent dalam penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dalam menunjang kegiatan operasional BPR;
2. Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi BPR;
3. Menyediakan Pelayanan Mobile Kas Keliling;
4. Melanjutkan proses perizinan MBanking Gema BPR;
5. Menyediakan layanan Call Center BPR dan layanan pengaduan nasabah;
6. Mengembangkan aplikasi Fraud Detection System;
7. Meningkatkan Kerjasama penyelenggaraan Core Banking System melalui penggunaan layanan "SATU FLEXI" dengan PT. Telkom Sigma;

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Penetapan Kebijakan & Prosedur Keamanan Data

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi database, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan fasilitas Pusat Data (data center) dan Disaster Recovery Center (DRC) dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) yang berkedudukan di Gedung German Centre, Serpong. Pusat Data (Data Center) adalah fasilitas utama pemrosesan 28 Annual Report Tahun 2025 data Bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional Bank secara berkesinambungan. Sedangkan Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (DataCenter) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (business continuity).

Pengendalian Akses

Penerapan hak akses berbasis kebutuhan (*user access management*) serta penggunaan autentikasi untuk membatasi akses tidak sah dan menerapkan limit kewenangan approval transaksi. Pengelolaan hak akses dilakukan secara terpusat dan terdokumentasi, meliputi proses permintaan, persetujuan, perubahan, hingga pencabutan akses, dengan melibatkan fungsi terkait sesuai prinsip *segregation of duties*.

Keamanan Jaringan

Mengimplementasikan pengamanan infrastruktur dan jaringan melalui penggunaan *firewall*, *antivirus/endpoint protection*, serta sistem *monitoring jaringan* untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber serta akses tidak sah. *Firewall* dikonfigurasi untuk membatasi lalu lintas jaringan sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku, termasuk pengaturan *port*, *protocol filtering*, dan segmentasi jaringan antara lingkungan internal dan eksternal. Sistem *antivirus* diterapkan pada seluruh perangkat dan diperbarui secara berkala guna melindungi dari *malware* dan ancaman sejenis.

Pemantauan & Audit

Melaksanakan pemantauan secara berkala serta melaksanakan audit internal TI secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yang mencakup evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur, efektivitas pengendalian akses, keamanan sistem dan jaringan, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Hasil pemantauan dan audit didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direksi serta ditindaklanjuti secara tepat waktu, termasuk pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) untuk memastikan penguatan berkelanjutan atas pengendalian keamanan TI.

Peningkatan Kesadaran (*risk awareness*)

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) di seluruh tingkat organisasi melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait keamanan informasi dan risiko siber. Program peningkatan kesadaran dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, serta disesuaikan dengan perkembangan risiko dan teknologi. Selain itu, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) juga mendorong kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang berlaku melalui komunikasi internal dan penguatan budaya sadar risiko. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang bersumber dari faktor manusia (*human error*) serta memperkuat pertahanan lini pertama dalam menjaga keamanan informasi dan keberlangsungan operasional Bank.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan usaha

Perkembangan usaha PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sampai dengan akhir Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.105.901.083 ribu dari total asset pada tahun sebelumnya (2024) sebesar Rp.667.332.196 ribu menjadi sebesar Rp.773.233.279 ribu pada tahun 2025 atau setara dengan 15.87%, dengan perkembangan komposisi sumber dana sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Indikator Keuangan	Tahun		Pertumbuhan	
	2025	2024	Nominal	%
Asset	773,233,279	667,332,196	105,901,083	15.87%
Kredit yang diberikan	639,667,724	576,263,125	63,404,600	11.00%
Tabungan	82,071,736	71,341,519	10,730,217	15.04%
Deposito	103,691,187	93,067,098	10,624,089	11.42%
Simpanan dari bank lain	30,291,427	32,311,188	(2,019,761)	-6.25%
Pinjaman yang diterima	441,202,264	360,669,510	80,532,754	22.33%

Target pasar

Pangsa pasar utama dalam rangka penghimpunan dana tabungan maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit masih didominasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten. Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), pangsa pasar penghimpunan dana tabungan lainnya berupa tabungan pelajar telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dan telah menjangkau para murid/siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui kerjasama langsung dengan pihak sekolah masing-masing.

7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor

1.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) KPO
	Alamat	JL RAYA SERANG KM 15 NO.1 CIKUPA
	Desa/Kecamatan	TALAGASARI
	Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang
	Kode Pos	15510
	Nama Pimpinan	RACHMAT SUDRAJAT
	Nomor Telepon	02159400534
	Jumlah Kantor Kas	0
2.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG KC. KELAPA DUA
	Alamat	RUKO NEWJASMINE JL.KELAPA GADING SELATAN I,HA16-10
	Desa/Kecamatan	PAKULONAN BARAT KEC. KELAPA DUA
	Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang
	Kode Pos	15810

	Nama Pimpinan	ROCHAIDIN
	Nomor Telepon	021-5473175
	Jumlah Kantor Kas	0
3.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG KC BALARAJA
	Alamat	JL. RAYA KRESEK DESA TOBAT
	Desa/Kecamatan	BALARAJA
	Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang
	Kode Pos	15610
	Nama Pimpinan	TAUFIK FIRDAUS
	Nomor Telepon	021-59434047
	Jumlah Kantor Kas	0
4.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG KC.PASAR KEMIS
	Alamat	JLN RAYA OTONOM PASAR KEMIS-CIKUPA NO 1
	Desa/Kecamatan	SINDANG JAYA
	Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang
	Kode Pos	15560
	Nama Pimpinan	DEWI SULASTRI
	Nomor Telepon	021-59711022
	Jumlah Kantor Kas	1
5.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG KC.TIGARAKSA
	Alamat	JL. HAJI ABDUL HAMIS PERUM TIGARAKSA BLOK AN 31 NO. 8 RT.14/007 KEL. KADUAGUNG,
	Desa/Kecamatan	TIGARAKSA
	Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang
	Kode Pos	15720
	Nama Pimpinan	EKA RATNA JUWITA
	Nomor Telepon	021-5992006
	Jumlah Kantor Kas	0
6.	Nama Kantor	PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG KC SERANG

Alamat	RUKO CRYSTAL C&D JL RAYA PANDEGLANG LINGKAR KEBON
Desa/Kecamatan	CIPARE/SERANG
Kabupaten/Kota	Kota Serang
Kode Pos	42117
Nama Pimpinan	AHMAD FIRDAUS
Nomor Telepon	(0294)7928994
Jumlah Kantor Kas	0

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain

1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Permata
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	22 April 2026
	Jenis Kerja Sama	Rekening Virtual
	Uraian Kerja Sama	Penyelenggaraan layanan Host To Host dalam layanan transaksi elektronik melalui aplikasi GEMA BPR maupun melalui Teller serta penyelenggaraan layanan Virtual Account;
2.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank BJB
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 September 2022
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman & Bantuan Pemotongan
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman & Bantuan Pemotongan Gaji ASN untuk Angsuran Ke BPR
3.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Banten
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	26 Januari 2020
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman & Bantuan Pemotongan
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman & Bantuan Pemotongan Gaji ASN untuk Angsuran Ke BPR
4.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Oke Indonesia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank

	Tanggal Kerja Sama	27 Juni 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
5.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank CIMB Niaga
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	28 Februari 2023
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
6.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank J'Trust
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	12 Juli 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
7.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Permata
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	22 Oktober 2021
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
8.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Jatim
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	08 September 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
9.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank Danamon
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	20 Desember 2022
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
10.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank DKI
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	31 Maret 2023

	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
11.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Bank KB Bukopin
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	31 Juli 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
12.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Smart Multi Finance
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	29 Juli 2022
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
13.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Daya Lumbung Asia
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	23 Mei 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
14.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPR Jatim
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	09 Juli 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
15.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	BPR Jombang
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	04 Juni 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman
	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
16.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Athena Surya Prima
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	15 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Pinjaman

	Uraian Kerja Sama	Pinjaman
17.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Jamkrida Banten
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	20 November 2014
	Jenis Kerja Sama	Asuransi Jiwa Debitur
	Uraian Kerja Sama	Asuransi Jiwa Debitur
18.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT Selaras Karya Dinamika Unggul (Sekardiu)
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	06 Juni 2024
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Lainnya
	Uraian Kerja Sama	Perekrutan Karyawan
19.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	01 Januari 2017
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Lainnya
	Uraian Kerja Sama	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan
20.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Damarindo
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	06 Maret 2018
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Lainnya
	Uraian Kerja Sama	Penyediaan pegawai outsorcing
21.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. Telkom Sigma
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	20 Juli 2022
	Jenis Kerja Sama	Kerjasama Lainnya
	Uraian Kerja Sama	Penyedia jasa teknologi informasi
22.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	28 Maret 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito

	Uraian Kerja Sama	Deposito
23.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR Intan Jabar
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	08 Maret 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
24.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Hariarta Sedana
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	24 Maret 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
25.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Muara Sumber Dana
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	03 Desember 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
26.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Lebak Sejahtera Perseroda
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	22 Agustus 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
27.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Berkah
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	01 Juli 2013
	Jenis Kerja Sama	Tabungan
	Uraian Kerja Sama	Tabungan
28.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Serang
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	05 Mei 2012
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito

29.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Central Artha Rezeki
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 Juli 2022
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
30.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Bogor Jabar Perseroda
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	06 Desember 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
31.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR Bank Surya Yudha
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	09 Desember 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
32.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR Syariah Hasanah Mandiri
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	29 Agustus 2025
	Jenis Kerja Sama	Deposito
	Uraian Kerja Sama	Deposito
33.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR ARTADAMAS MANDIRI
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	02 November 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
34.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR BATURAJA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	10 Agustus 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
35.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR RAGAM PERAN MANDIRI

	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	21 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
36.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR BRINGIN DANA SEJAHTERA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	15 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
37.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR HIDUP ARTHA PUTRA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	28 Juli 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
38.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR CENTRAL SEJAHTERA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	10 Oktober 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
39.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR KREDIT MANDIRI
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	20 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
40.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	12 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
41.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR SLEMAN PERSERODA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank

	Tanggal Kerja Sama	11 Oktober 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
42.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR INDRA CANDRA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	25 September 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
43.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR SUPRA ARTAPERSADA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	03 November 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
44.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR GITA MAKMUR UTAMA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	06 September 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
45.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR WELERI MAKMUR
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	05 September 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
46.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR BANK KERTIAWAN
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	17 Oktober 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
47.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR DANA MITRA INDONESIA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	21 November 2024

	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
48.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT BPR NUSA
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	08 Desember 2024
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito
49.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	1. Bank
	Tanggal Kerja Sama	08 Maret 2025
	Jenis Kerja Sama	Penghimpun Dana
	Uraian Kerja Sama	Deposito

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

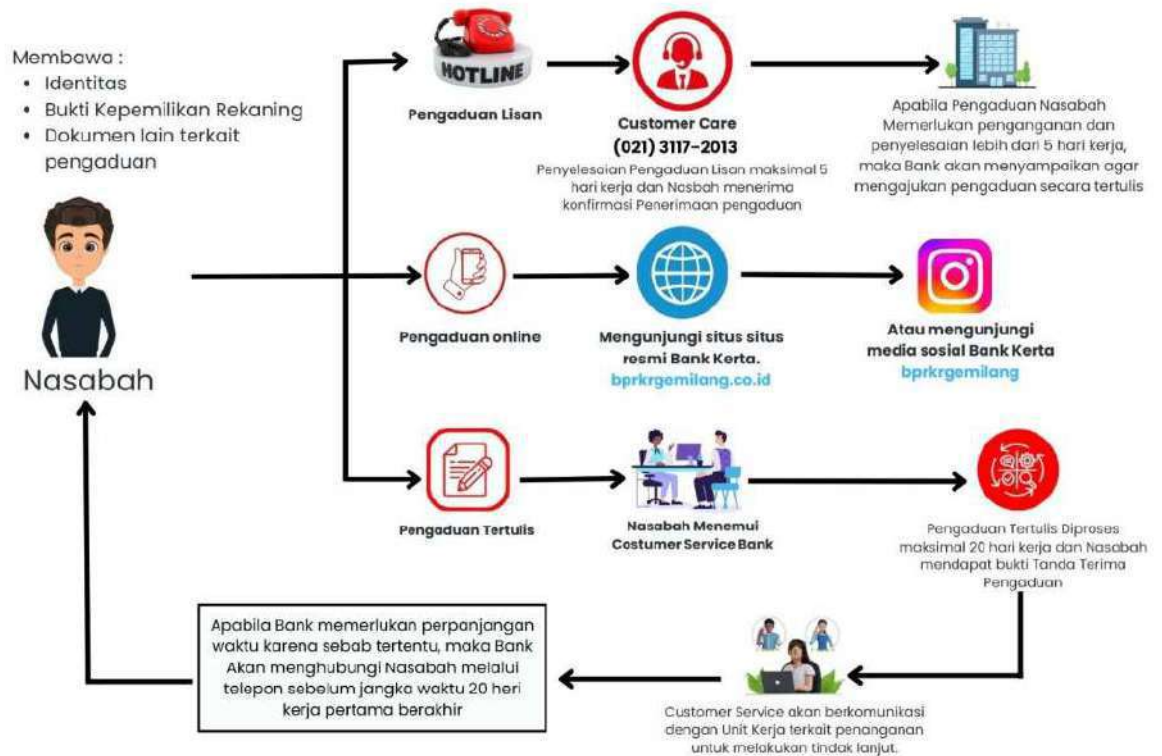
Strategi pemasaran yang efektif, *engagement* kepada nasabah perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) terhadap layanan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) terus berupaya menjaga konsistensi layanan yang fokus pada pelanggan melalui standarisasi kualitas layanan di *front liner* termasuk pada layanan penanganan keluhan pelanggan (*handling complaint*) yang siap memberikan pelayanan bisnis maupun *support* bisnis bagi unit kerja hingga penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam POJK No. 22 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan nasabah akan diproses sebagaimana alur berikut:

Ingin melakukan pengaduan kepada BANK Kerta ?

Berikut alur pengaduan Nasabah



Alur Pengaduan Nasabah

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam menyampaikan pengaduan. Setiap nasabah memiliki akses yang jelas dan terbuka untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun masukan melalui berbagai saluran pengaduan yang telah disediakan.

Pengaduan dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor cabang, melalui layanan telepon Customer Service, secara tertulis di kantor pusat, maupun melalui media elektronik seperti email dan media sosial resmi bank. Seluruh proses dirancang secara sederhana, transparan, dan efisien, sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Setiap pengaduan yang diterima akan ditangani secara profesional oleh petugas yang berkompeten, dengan mengedepankan ketepatan waktu dan kejelasan informasi. Melalui mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif ini, PT BPR Kerta Raharja Gemilang senantiasa berupaya menjaga kepercayaan nasabah serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Pengaduan nasabah, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) pada tahun 2025, terdapat pengaduan nasabah.

No	Jenis Kegiatan	Jenis Produk dan/atau Layanan	Kategori Pembiayaan	Deskripsi Kategori Pembiayaan	Pengaduan Yang Diterima Pada Periode Pelaporan Sebelumnya				Pengaduan Yang Diterima Pada Periode Pelaporan				Total Pengaduan
					Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses	Jumlah	Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses	Jumlah	
1	Konvensional	Deposito	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Konvensional	Tabungan	Jumlah saldo rekening	NIHIL	1	0	0	1	2	0	0	2	3
3	Konvensional	Kewajiban pada Bank Lain	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Konvensional	Kredit/Pembiayaan Investasi	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Konvensional	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	Jumlah tagihan	NIHIL	27	0	0	27	29	0	0	29	56
6	Konvensional	Kredit Tanpa Agunan	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Konvensional	Penempatan pada Bank Lain	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Konvensional	Electronic Banking	Lainnya... (sebutkan)	NIHIL	1	0	0	1	0	0	0	1	1
					29	0	0	29	31	0	0	31	60

10. Tingkat Kesehatan Bank

BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self- assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk- Based Bank Rating*) dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Hasil akhir *self- assessment* TKB metode RGEC berupa Peringkat Komposit (PK), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
2. Good Corporate Governance (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

No	Faktor/Komponen Penilaian	2025			
		Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
1	Profil Risiko		2	25	0.5
2	Tata Kelola		2	30	0.6
3	Rentabilitas		2	15	0.3
	- ROA	1.64	2		
	- BOPO	89.49	3		
	- NIM	8.51	2		
4	Permodalan		1	30	0.3
	- KPM	33.03	1		
	- MIAPB	1910.76	1		
Nilai Komposit			1.7		
Peringkat Komposit			2		
Keterangan			Sehat		

Peringkat Tingkat Kesehatan PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR - *Risk Based Bank Rating*) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) – **SEHAT** dengan rincian untuk masing- masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko berada pada

Peringkat 2 (Rendah), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas : ROA berada pada Peringkat 2, BOPO berada pada peringkat 3 dan NIM berada pada peringkat 2, sedangkan Permodalan : KPMM berada pada peringkat , dan MIAPB berada pada peringkat 1.

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor

Jumlah Pegawai Pemasaran	86 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	31 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	88 orang
Jumlah Pegawai Tetap	152 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	53 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	2 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	11 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	74 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	88 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	148 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	57 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	23 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	128 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	41 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	13 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	0 orang

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi dan PGD Permendagri No.21 tahun 2024
	Tanggal Pelaksanaan	11 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dan PGD Permendagri No.21 tahun 2024
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bulanan BPR/BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	17 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi APOLO Modul Laporan Berkala Bulanan BPR/BPRS
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimtek Implementasi PMK-81 Tahun 2024 Sebagai Dasar Hukum Pemberlakuan Coretax System, Strategi Pengisian SPT Tahunan PPh dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2024 Serta Manajemen Pemotongan / Pemungutann PPh Berdasarkan Ketentuan dan Aplikasi Perpajakan
	Tanggal Pelaksanaan	17 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimtek Implementasi PMK-81 Tahun 2024 Sebagai Dasar Hukum Pemberlakuan Coretax System, Strategi Pengisian SPT Tahunan PPh dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2024 Serta Manajemen Pemotongan / Pemungutann PPh Berdasarkan Ketentuan dan Aplikasi Perpajakan
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar "Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Secara Selektif dan Prudent"
	Tanggal Pelaksanaan	16 Januari 2025

	Jumlah Peserta	7 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Webinar "Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Secara Selektif dan Prudent"
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EDABU Badan Usaha dan Laporan Nonaktif (Update Januari 2025)
	Tanggal Pelaksanaan	14 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EDABU Badan Usaha dan Laporan Nonaktif (Update Januari 2025)
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penyesuaian Struktur Data Laporan Bulanan APOLO BPR
	Tanggal Pelaksanaan	07 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Penyesuaian Struktur Data Laporan Bulanan APOLO BPR
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Penyampaian Kebijakan Pemberntukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
	Tanggal Pelaksanaan	06 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Penyampaian Kebijakan Pemberntukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Tahunan dan Laporan Pelaksanaan dan Hasil Audit Intern
	Tanggal Pelaksanaan	21 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Tahunan dan Laporan Pelaksanaan dan Hasil Audit Intern
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pemaparan dan Diskusi Mengenai Perhitungan Pembentukan CKPN sesuai SAK EP
	Tanggal Pelaksanaan	20 Januari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemaparan dan Diskusi Mengenai Perhitungan Pembentukan CKPN sesuai SAK EP
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Aplikasi Pendukung Laporan Tingkat Kesehatan BPR
	Tanggal Pelaksanaan	24 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Aplikasi Pendukung Laporan Tingkat Kesehatan BPR
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Workshop Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan

		Konsumen (SIPEDULI) Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Pajak Coretax
	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jumlah Peserta	16 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Pajak Coretax
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank.
	Tanggal Pelaksanaan	06 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian Data Pokok Bank.
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan/ Manajemen Pengawasan BUMD Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	13 Februari 2025
	Jumlah Peserta	7 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Pelatihan/ Bimbingan Teknis Pengelolaan/ Manajemen Pengawasan BUMD Tahun 2025
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Term and Condition (T&C) Baru Tahun 2025 Jamkrida Banten
	Tanggal Pelaksanaan	10 Februari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Term and Condition (T&C) Baru Tahun 2025 Jamkrida Banten

	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Analisa 3 Pilar dan Pemanfaatan Artificial Inteligent (Chat GPT) pada Analisa Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	09 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Analisa 3 Pilar dan Pemanfaatan Artificial Inteligent (Chat GPT) pada Analisa Kredit
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM Serta Penyesuaian Laporan Keuangan, SLIK & APOLO Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat
	Tanggal Pelaksanaan	15 Februari 2025
	Jumlah Peserta	47 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM Serta Penyesuaian Laporan Keuangan, SLIK & APOLO Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Implementasi Mobile Banking (GEMA) pada CPNS dan PPPK Kab. Tangerang Th. 2025
	Tanggal Pelaksanaan	22 Februari 2025
	Jumlah Peserta	31 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Implementasi Mobile Banking (GEMA) pada CPNS dan PPPK Kab. Tangerang Th. 2025
19.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Ketentuan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	20 Februari 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Ketentuan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
20.	Nama Kegiatan Pengembangan	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Bisnis BPR/S Pasca Permendagri No.21 / 2024
	Tanggal Pelaksanaan	21 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Bisnis BPR/S Pasca Permendagri No.21 / 2024
21.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Perlindungan Data Pribadi dan Data Governance
	Tanggal Pelaksanaan	25 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Perlindungan Data Pribadi dan Data Governance
22.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan "Service Excellence"
	Tanggal Pelaksanaan	26 Februari 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan "Service Excellence"
23.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Panduan Aplikasi SAK - EP Satu
	Tanggal Pelaksanaan	26 Februari 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Panduan Aplikasi SAK - EP Satu
24.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
	Tanggal Pelaksanaan	28 Februari 2025
	Jumlah Peserta	32 orang

	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan
25.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Perlindungan Data Pribadi dan Data Governance
	Tanggal Pelaksanaan	25 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Perlindungan Data Pribadi dan Data Governance
26.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan "Service Excellence"
	Tanggal Pelaksanaan	26 Februari 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan "Service Excellence"
27.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Online Penyusunan SPT PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Badan Bagi Industri BPR/ BPRS Tahun 2024
	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Online Penyusunan SPT PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Badan Bagi Industri BPR/ BPRS Tahun 2024
28.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SIPETA (Sistem Informasi Pelaporan Tahunan) Untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan BPR/BPRS ke OJK One Click Melalui APOLO
	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Pelatihan Aplikasi Digital SIPETA (Sistem Informasi Pelaporan Tahunan) Untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan BPR/BPRS ke OJK One Click Melalui APOLO
29.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SOJK Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR
	Tanggal Pelaksanaan	17 Maret 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi SOJK Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR
30.	Nama Kegiatan Pengembangan	Penyampaian Kewajiban Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank (Single Customer View)
	Tanggal Pelaksanaan	20 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Penyampaian Kewajiban Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank (Single Customer View)
31.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Manajemen SDM
	Tanggal Pelaksanaan	17 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Manajemen SDM
32.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Update dan Standarisasi Dokumen SMK ISO 27001:2022 (Batch 2)
	Tanggal Pelaksanaan	16 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	

	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Update dan Standarisasi Dokumen SMKI ISO 27001:2022 (Batch 2)
33.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan dan Ujian Serifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kerja Kualifikasi PE Bisnis Operasional dan PE Audit Internal
	Tanggal Pelaksanaan	20 April 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan Ujian Serifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kerja Kualifikasi PE Bisnis Operasional dan PE Audit Internal
34.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimtek Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Pada BPR dan BPRS Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	23 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimtek Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Pada BPR dan BPRS Tahun 2025
35.	Nama Kegiatan Pengembangan	Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA)
	Tanggal Pelaksanaan	22 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan Untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA)
36.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Apresiasi BPR: Membangun Hubungan, Memperkuat Ikatan
	Tanggal Pelaksanaan	28 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Workshop Apresiasi BPR: Membangun Hubungan, Memperkuat Ikatan
37.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Audit Perkreditan BPR
	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Audit Perkreditan BPR
38.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Layanan Otomatisasi VPS Menggunakan Docker untuk Kebutuhan Website dengan Cepat dan Mudah (Pengelolaan VPS Docker mudah dan cepat dengan portainer.io)
	Tanggal Pelaksanaan	26 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar Layanan Otomatisasi VPS Menggunakan Docker untuk Kebutuhan Website dengan Cepat dan Mudah (Pengelolaan VPS Docker mudah dan cepat dengan portainer.io)
39.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Terkait Penerapan Aplikasi Digital dalam Pengelolaan Kredit dan CKPN BPR yang Efektif dan Efisien
	Tanggal Pelaksanaan	04 Mei 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Terkait Penerapan Aplikasi Digital dalam Pengelolaan Kredit dan CKPN BPR yang Efektif dan Efisien
40.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Audit Berbasis Risiko
	Tanggal Pelaksanaan	09 Mei 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Pelatihan Audit Berbasis Risiko
41.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar BPR Go Digital: Menjadi Penyedia Jasa Pembayaran yang Terdaftar di Bank Indonesia
	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jumlah Peserta	11 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar BPR Go Digital: Menjadi Penyedia Jasa Pembayaran yang Terdaftar di Bank Indonesia
42.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EDABU Badan Usaha dan Laporan Nonaktif (Update Mei 2025)
	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EDABU Badan Usaha dan Laporan Nonaktif (Update Mei 2025)
43.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Ketentuan BPR dan BPRS - RSEOJK Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	16 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Ketentuan BPR dan BPRS - RSEOJK Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern BPR/S
44.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital RBA (Risk Baded Audit) untuk melaksanakan Audit Berbasis Risiko di BPR
	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Aplikasi Digital RBA (Risk Baded Audit)

		untuk melaksanakan Audit Berbasis Risiko di BPR
45.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis Master of Ceremony (MC)
	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis Master of Ceremony (MC)
46.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis Penilaian dan Penetapan Autentikasi Arsip
	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis Penilaian dan Penetapan Autentikasi Arsip
47.	Nama Kegiatan Pengembangan	Munaslub Perbarindo : Seminar Nasional dengan tema "Menatap Masa Depan Ekonomi dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR-BPRS" dan Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional
	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Munaslub Perbarindo : Seminar Nasional dengan tema "Menatap Masa Depan Ekonomi dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR- BPRS" dan Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional
48.	Nama Kegiatan Pengembangan	Edukasi Keuangan "Keuangan Sehat, UMKM Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan"
	Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Edukasi Keuangan "Keuangan Sehat, UMKM Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan"
49.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan dan Penyegaran Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Komisaris
	Tanggal Pelaksanaan	12 Juni 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	02. Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan Penyegaran Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Komisaris
50.	Nama Kegiatan Pengembangan	Edukasi Keuangan "Keuangan Sehat, UMKM Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan"
	Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Edukasi Keuangan "Keuangan Sehat, UMKM Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan"
51.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Manajemen Aset Perusahaan
	Tanggal Pelaksanaan	13 Juni 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	03. Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Manajemen Aset Perusahaan
52.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Audit Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	10 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Audit Kredit
53.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud
	Tanggal Pelaksanaan	16 Juni 2025

	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud
54.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	19 Juni 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi SiPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester I tahun 2025
55.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Aplikasi SIPESAT Versi 3.0
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Aplikasi SIPESAT Versi 3.0
56.	Nama Kegiatan Pengembangan	Kick Off Piloting Aplikasi SCV BPR/BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Kick Off Piloting Aplikasi SCV BPR/BPRS
57.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Strategi FRM, Investigasi Fraud dan Risk Based Audit Untuk BPR/S yang Tangguh
	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar Strategi FRM, Investigasi Fraud dan

		Risk Based Audit Untuk BPR/S yang Tangguh
58.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Empowering Retail Sales In Indonesia with AI & Automation
	Tanggal Pelaksanaan	25 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar Empowering Retail Sales In Indonesia with AI & Automation
59.	Nama Kegiatan Pengembangan	Focus Group Discussion (FGD) "KERTA SATU TRILIUN: Dengan Semangat Bersatu, Kita Wujudkan Kerta Menuju Satu Triliun—Langkah Pasti, Hasil Berarti"
	Tanggal Pelaksanaan	02 Juni 2025
	Jumlah Peserta	24 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Focus Group Discussion (FGD) "KERTA SATU TRILIUN: Dengan Semangat Bersatu, Kita Wujudkan Kerta Menuju Satu Triliun—Langkah Pasti, Hasil Berarti"
60.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Memutus Mata Rantai SCAM: Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	26 Juni 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar Memutus Mata Rantai SCAM: Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan
61.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Komisaris
	Tanggal Pelaksanaan	10 Juli 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR

	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Komisaris
62.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD)
	Tanggal Pelaksanaan	10 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD)
63.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Audit Internal BPR Sesuai SEOJK 9/ SEOJK.03/2025
	Tanggal Pelaksanaan	17 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Audit Internal BPR Sesuai SEOJK 9/ SEOJK.03/2025
64.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penilaian Sendiri (Self assessment) terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	16 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Penilaian Sendiri (Self assessment) terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
65.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pendampingan Piloting Aplikasi SCV BPR/BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	22 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR

	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pendampingan Piloting Aplikasi SCV BPR/BPRS
66.	Nama Kegiatan Pengembangan	Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	28 Juli 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Launching Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
67.	Nama Kegiatan Pengembangan	"Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di BPR"
	Tanggal Pelaksanaan	08 Juli 2025
	Jumlah Peserta	46 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	"Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di BPR"
68.	Nama Kegiatan Pengembangan	Strategi dan Teknik Penanganan Kredit Bermasalah
	Tanggal Pelaksanaan	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	52 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Strategi dan Teknik Penanganan Kredit Bermasalah
69.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PE
	Tanggal Pelaksanaan	03 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PE
70.	Nama Kegiatan Pengembangan	Seminar Nasional Perbarindo "Penguatan Cyber Security Menunjang Peran BPR/S dalam

		Mendukung UMKM di Era Digitalisasi Menuju Indonesia Emas"
	Tanggal Pelaksanaan	12 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Seminar Nasional Perbarindo "Penguatan Cyber Security Menunjang Peran BPR/ S dalam Mendukung UMKM di Era Digitalisasi Menuju Indonesia Emas"
71.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Standarisasi Dokumen dan Pelaporan ISO 27001:2022
	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Standarisasi Dokumen dan Pelaporan ISO 27001:2022
72.	Nama Kegiatan Pengembangan	Peluncuran FIR on ML/TF Tahun 2025 kepada BPR: Sosialisasi Terkait Seluruh Rangkaian Penilaian dan Petunjuk Teknis pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	20 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Peluncuran FIR on ML/ TF Tahun 2025 kepada BPR: Sosialisasi Terkait Seluruh Rangkaian Penilaian dan Petunjuk Teknis pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2025
73.	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Membangun Layanan Otomatisasi VPS menggunakan Docker Untuk Kebutuhan Website dengan Cepat dan Mudah
	Tanggal Pelaksanaan	22 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Webinar Membangun Layanan Otomatisasi VPS menggunakan Docker Untuk Kebutuhan Website dengan Cepat dan Mudah
74.	Nama Kegiatan Pengembangan	Online Training "Menggali Harta Karun Kredit Bemasalah Demi Eksistensi BPR"
	Tanggal Pelaksanaan	22 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Online Training "Menggali Harta Karun Kredit Bemasalah Demi Eksistensi BPR"
75.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Online "Aspek Hukum Dalam Perbankan"
	Tanggal Pelaksanaan	27 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Online "Aspek Hukum Dalam Perbankan"
76.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Produk Asuransi Kredit Konsumtif oleh PT Asuransi Bangun Askrida
	Tanggal Pelaksanaan	28 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	21 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Produk Asuransi Kredit Konsumtif oleh PT Asuransi Bangun Askrida
77.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Proses Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	29 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	18 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Proses Kredit
78.	Nama Kegiatan Pengembangan	Economy Mastery Forum 2025 "Unlock

		Opportunities Global Economic Changes" dan 30th Infobank Banking Appreciation 2025
	Tanggal Pelaksanaan	29 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	7 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Economy Mastery Forum 2025 "Unlock Opportunities Global Economic Changes" dan 30th Infobank Banking Appreciation 2025
79.	Nama Kegiatan Pengembangan	Perihal Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
	Tanggal Pelaksanaan	02 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Perihal Pelatihan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
80.	Nama Kegiatan Pengembangan	Peluncuran FIR on ML/TL tahun 2025 : Sosialisasi Lanjutan Terkait Pengisian Kuisisioner
	Tanggal Pelaksanaan	16 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Peluncuran FIR on ML/ TL tahun 2025 : Sosialisasi Lanjutan Terkait Pengisian Kuisisioner
81.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis Perpajakan Ter-Update PPh 21, 3, 4(2), PPh Badan/PPN, Serta Cara Mengurai, Menjawab SP2DK/ Pemeriksaan dan Tantangan Pengelolaan Pajak 2025 (Coretax)
	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis Perpajakan Ter- Update PPh 21, 3, 4(2), PPh Badan/PPN, Serta Cara Mengurai, Menjawab SP2DK/ Pemeriksaan dan Tantangan Pengelolaan Pajak 2025 (Coretax)
82.	Nama Kegiatan Pengembangan	Analisis Kredit Komperhensif
	Tanggal Pelaksanaan	17 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Analisis Kredit Komperhensif
83.	Nama Kegiatan Pengembangan	Evaluasi Kompetensi Pengembangan SDM PT.BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)
	Tanggal Pelaksanaan	22 September 2025
	Jumlah Peserta	42 orang
	Pihak Pelaksana	03. Berkolaborasi Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Evaluasi Kompetensi Pengembangan SDM PT.BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)
84.	Nama Kegiatan Pengembangan	Asistensi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Melalui Cortax Sistem
	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Asistensi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Melalui Cortax Sistem
85.	Nama Kegiatan Pengembangan	Rapat Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2025
	Tanggal Pelaksanaan	19 September 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Rapat Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2025
86.	Nama Kegiatan Pengembangan	Rakernas Perbarindo dan Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Kompetensi SDM dan

		Ekosistem Digital dalam Implementasi GRC Bank Perekonomian Rakyat di Era Inovasi Keuangan"
	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Rakernas Perbarindo dan Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Kompetensi SDM dan Ekosistem Digital dalam Implementasi GRC Bank Perekonomian Rakyat di Era Inovasi Keuangan"
87.	Nama Kegiatan Pengembangan	Seminar Micro Banking Connect 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Bisnis BPR/BPRS/ Koperasi melalui Adopsi Inovasi Digital"
	Tanggal Pelaksanaan	08 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Seminar Micro Banking Connect 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Bisnis BPR/ BPRS/ Koperasi melalui Adopsi Inovasi Digital"
88.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan dan Ujian Serifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kerja Kualifikasi PE Bisnis Operasional
	Tanggal Pelaksanaan	12 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan Ujian Serifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kerja Kualifikasi PE Bisnis Operasional
89.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti Fraud Terintegrasi (SAFT)
	Tanggal Pelaksanaan	09 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Penerapan Strategi Anti Fraud Terintegrasi (SAFT)
90.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Surveillance Sertifikasi ISO
	Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Surveillance Sertifikasi ISO
91.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Implementasi Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan BPR/BPRS Milik Pemda
	Tanggal Pelaksanaan	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Implementasi Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan BPR/BPRS Milik Pemda
92.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Penerapan POJK No.11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Penerapan POJK No.11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
93.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	17 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK Tahun 2025

94.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kredit / Utang Piutang dan Pengikatan Jaminan yang Sempurna Untuk Mempermudah Eksekusi
	Tanggal Pelaksanaan	20 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kredit / Utang Piutang dan Pengikatan Jaminan yang Sempurna Untuk Mempermudah Eksekusi
95.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Strategi Penagihan Kredit / Piutang Macet, Melalui Jalur Perdata dan Jerat Pidana Secara Dini dan Terintegrasi
	Tanggal Pelaksanaan	21 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Strategi Penagihan Kredit / Piutang Macet, Melalui Jalur Perdata dan Jerat Pidana Secara Dini dan Terintegrasi
96.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SI-AKBAR (Sistem Informasi Analisis Kredit Bebas Risiko) Untuk Mempermudah Akses Pembiayaan UMKM di BPR Sesuai dengan POJK no.19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM
	Tanggal Pelaksanaan	21 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Aplikasi Digital SI- AKBAR (Sistem Informasi Analisis Kredit Bebas Risiko) Untuk Mempermudah Akses Pembiayaan UMKM di BPR Sesuai dengan POJK no.19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM
97.	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	21 Oktober 2025

	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah tahun 2025
98.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan BUMD Lembaga Keuangan (SIMPELKEU)
	Tanggal Pelaksanaan	28 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan BUMD Lembaga Keuangan (SIMPELKEU)
99.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Pelaporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Pelaporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
100.	Nama Kegiatan Pengembangan	Forum Jejaring dan Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja di Kawasan Industri
	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Forum Jejaring dan Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja di Kawasan Industri
101.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Online Langkah Praktis Membangun AI Agent Bisnis dengan Barantum

	Tanggal Pelaksanaan	30 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Online Langkah Praktis Membangun AI Agent Bisnis dengan Barantum
102	Nama Kegiatan Pengembangan	Bimbingan Teknis SIGNAL Corporate
	Tanggal Pelaksanaan	06 November 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Bimbingan Teknis SIGNAL Corporate
103	Nama Kegiatan Pengembangan	Fasilitasi Pembiayaan Pelaku Usaha dalam Rangka Peningkatan Produk (DAK)
	Tanggal Pelaksanaan	12 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Fasilitasi Pembiayaan Pelaku Usaha dalam Rangka Peningkatan Produk (DAK)
104	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Perpajakan "Kupas Tuntas Pelaporan SPT Tahunan Badan Era Coretax"
	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Webinar Perpajakan "Kupas Tuntas Pelaporan SPT Tahunan Badan Era Coretax"
105	Nama Kegiatan Pengembangan	Webinar Bank Permata "Transformasi Digital: Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik"
	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai

	Uraian Kegiatan	Webinar Bank Permata "Transformasi Digital: Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik"
106	Nama Kegiatan Pengembangan	Audiensi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA)
	Tanggal Pelaksanaan	13 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Audiensi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA)
107	Nama Kegiatan Pengembangan	Seminar ERM Practice Sharing di Daerah Banten
	Tanggal Pelaksanaan	25 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Seminar ERM Practice Sharing di Daerah Banten
108	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Mekanisme Lelang
	Tanggal Pelaksanaan	24 November 2025
	Jumlah Peserta	7 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Workshop Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Mekanisme Lelang
109	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sistem Pengupahan dan Key Performance Indicator (KPI)
	Tanggal Pelaksanaan	26 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Sistem Pengupahan dan Key Performance Indicator (KPI)

	Nama Kegiatan Pengembangan	KB Bank Seminar Economic Outlook 2026, Navigating Indonesia's Next Growth Wave "Economic Outlook and Political Landscape 2026"
	Tanggal Pelaksanaan	27 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	KB Bank Seminar Economic Outlook 2026, Navigating Indonesia's Next Growth Wave "Economic Outlook and Political Landscape 2026"
111.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Hasil FIR on ML/TF tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	27 November 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Hasil FIR on ML/TF tahun 2025
112.	Nama Kegiatan Pengembangan	Capacity Building SDM BPR dalam Pemahaman Selling Skill, Leadership dan Implementasi APU PPT
	Tanggal Pelaksanaan	28 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Capacity Building SDM BPR dalam Pemahaman Selling Skill, Leadership dan Implementasi APU PPT
113.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sistem Pengupahan dan Key Performance Indicator (KPI)
	Tanggal Pelaksanaan	26 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	03. Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Sistem Pengupahan dan Key Performance Indicator (KPI)

114.	Nama Kegiatan Pengembangan	Online Workshop "Safeguarding Innovation Thru Responsible AI Security"
	Tanggal Pelaksanaan	04 Desember 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Online Workshop "Safeguarding Innovation Thru Responsible AI Security"
115.	Nama Kegiatan Pengembangan	Workshop dan Asistensi Penyusunan RBB BPR
	Tanggal Pelaksanaan	04 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Workshop dan Asistensi Penyusunan RBB BPR
116.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pembekalan tenaga kerja kontrak
	Tanggal Pelaksanaan	01 Desember 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Company Profile dan Peraturan Perusahaan
117.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis BPR
	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi SEOJK Nomor 24/ SEOJK.03/2025 tentang Rencana Bisnis BPR
118.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Risk Based Information Technology Audit (RBITA) untuk Melaksanakan Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi Berbasis Risiko pada BPR-BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	16 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Aplikasi Risk Based Information Technology Audit (RBITA) untuk Melaksanakan Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi Berbasis Risiko pada BPR-BPRS
119.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital Sistem Integrasi Pelaporan Tingkat Kesehatan (SIAP-TKS) BPR/ BPRS untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tingkat kesehatan BPR/BPRS Semester II Tahun 2025 ke OJK Satu Klik ke APOLO
	Tanggal Pelaksanaan	15 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Pelatihan Aplikasi Digital Sistem Integrasi Pelaporan Tingkat Kesehatan (SIAP- TKS) BPR/ BPRS untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tingkat kesehatan BPR/BPRS Semester II Tahun 2025 ke OJK Satu Klik ke APOLO
120	Nama Kegiatan Pengembangan	Online Training "Fiskal & Rekonsiliasi SPT Badan untuk BPR"
	Tanggal Pelaksanaan	19 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Online Training "Fiskal & Rekonsiliasi SPT Badan untuk BPR"
121.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2025

VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Kas dalam Rupiah	3.587.119	3.137.779
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	146.679.404	103.870.647
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	555.224	351.785
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	639.667.724	576.263.125
Provisi yang belum diamortisasi	12.139.661	11.905.210
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	0	0
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	14.367.223	12.796.769
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	17.384.774	17.002.629
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	13.749.178	13.145.221
Aset Tidak Berwujud	230.923	230.923
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	220.748	209.648
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	6.715.368	5.218.162
TOTAL ASET	773.233.279	667.314.631
Liabilitas Segera	2.666.395	928.816
Tabungan	82.071.736	71.341.519
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0

Deposito	103.691.187	93.067.098
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	30.291.427	32.311.188
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	443.534.371	362.506.126
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	2.332.107	1.836.615
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	1.861.667	1.903.646
TOTAL LIABILITAS	661.784.676	560.221.777
Modal Dasar	250.000.000	250.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	178.350.000	178.350.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	17.565	0
Cadangan	0	0
Umum	18.219.919	17.620.307
Tujuan	12.426.043	11.826.431
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	0	0
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.135.077	5.996.116
TOTAL EKUITAS	111.448.603	107.092.854

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Pendapatan Operasional	119.565.325	99.062.104
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		

Surat Berharga	0	0
Giro	804.018	613.108
Tabungan	514.758	346.135
Deposito	1.681.452	2.055.338
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	102.140.418	85.542.545
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	7.994.605	7.144.424
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	314.563	255.940
e. Pemulihan CKPN	4.431.923	1.268.632
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k. Lainnya	1.683.587	1.835.980
Beban Operasional	107.001.183	90.109.870
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	2.259.851	2.278.269
Deposito	6.372.645	6.778.842
Simpanan dari Bank Lain	2.055.669	2.719.811
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	37.825.707	29.288.268
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	441.344	420.809
b. Biaya Transaksi		

Kepada Bank Lain	904.221	843.267
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	403.177	406.590
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0
d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	6.802.555	3.201.911
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	2.848.024	2.548.234
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	29.452.530	27.248.826
Honorarium	736.055	736.055
Lainnya	2.433.949	496.334
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	2.100.330	834.839
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	665.500	633.611
Lainnya	1.795.793	1.483.288
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	1.158.358	1.253.878
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11.100	11.100
f. Beban Premi Asuransi	3.999.204	4.516.740
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	263.459	233.108
h. Beban Barang dan Jasa	3.518.762	3.562.152
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	51.820	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	32.292	47.409
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	868.837	566.529

Laba (Rugi) Operasional	12.564.143	8.952.233
Pendapatan Non Operasional	785.893	701.775
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	292.000	198.000
2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	493.893	503.775
Beban Non Operasional	1.367.227	1.617.058
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	1.367.227	1.617.058
Laba (Rugi) Non Operasional	-581.333	-915.282
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	11.982.809	8.036.951
Taksiran Pajak Penghasilan	2.855.413	2.040.835
Pendapatan Pajak Tangguhan	7681	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9135.077	5.996.116
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	74.637.000	61.637.000
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	6193.794	5.832.582
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	14.906.027	14.220.674
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	4.365.978	4.177.954
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Jutaan Rupiah						
Keterangan	Modal Disetor	Ekuitas	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2023	71.650	0	11.371	17.165	4.551	104.738
Dividen	0	0	0	0	-2.503	-2.503
Pembentukan Cadangan	0	0	455	455	-910	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	-1.138	-1.138
Revaluasi Aset 2025etap	0	0	0	0	0	0

Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	5.996	5.996
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun 2024	71.650	0	11.826	17620	5.996	107093
Dividen	0	0	0	0	-3.298	-3.298
Pembentukan Cadangan	0	0	600	600	-1199	0
DSM Ekuitas	0	18	0	0	0	18
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	-1.499	-1.499
Revaluasi Aset 2025etap	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	9135	9135
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0
Saldo Akhir (per 31 Des)	71.650	18	12.426	18.220	9135	111.449

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
Penerimaan pendapatan bunga	105.140.647	88.557.127
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	7.994.605	7.144.424
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	6.430.074	3.360.553
Pembayaran beban bunga	-49.859.438	-42.329.268
Beban gaji dan tunjangan	-32.622.534	-28.481.215
Beban umum dan administrasi	-13.596.617	-12.576.124
Beban operasional lainnya	-10.922.593	-6.723.263
Pendapatan non operasional lainnya	785.893	701.775
Beban non operasional lainnya	-1.367.227	-1.617.058
Pembayaran pajak penghasilan	-2.855.413	-2.040.835
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	7681	0
Penempatan pada bank lain	-42.808.757	4.889.720
Kredit yang diberikan	-63.170.149	-84.765.240
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	1.497.206	1.010.578
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	-668.821	239.424
Liabilitas segera	1.737.580	26.978

Tabungan	10.730.217	4.083.749
Deposito	10.624.089	278.818
Simpanan dari bank lain	-2.019.761	-15.319.119
Pinjaman yang diterima	80.532.754	87.691.83
Liabilitas imbalan kerja	69.824	0
Liabilitas lain-lain	-41.979	-59.884
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	5.617.279	3.550.321
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	-382.145	31.990
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	11.100
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	615.058	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	232.913	43.090
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	-5.400.850	-3.640.927
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	-5.400.850	-3.640.927
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	449.341	-47516
Kas dan setara Kas awal periode	3137779	3185.295
Kas dan setara Kas akhir periode	3.587.119	3137779

VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan Tahunan kami sampaikan sesuai dengan data hasil pemeriksaan Auditor Independen Akuntan Publik Sabar, dan Rekan No. 00027/2.0923/ AU.8/07/0005-3/1/ II/2026 yang diterbitkan tanggal 25 Februari 2026 dengan opini Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) per tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia. Laporan Akuntan Publik tersedia pada lampiran Laporan Tahunan ini.

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2025
PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang, 28 April 2026



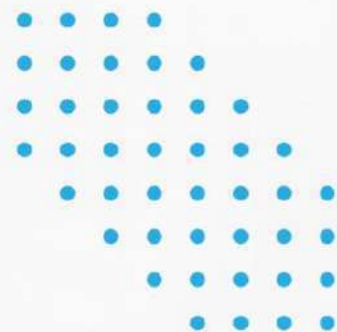
Bambang Purnawan
Komisaris Independen



Ai Suherlan
Direktur Utama



PT Bank Perekonomian Rakyat
Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)
Laporan Keuangan
31 Desember 2025 dan
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
serta
Laporan Auditor Independen





KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00027/2.0923/AU.8/07/0005-3/1/II/2026

Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham
PT Bank Perekonomian Rakyat
Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)
Kabupaten Tangerang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Dr. Sabar, SE., M.Ak., Ak., CA., CFI., CPA., ASEAN CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0005

Izin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

25 Februari 2026



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025**

A S E T

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan Kembali)
		Rp	Rp
Kas	3e,4	3.587.119.400	3.137.778.500
Pendapatan bunga yang akan diterima	3g,5	4.571.746.943	4.165.510.412
Penempatan pada bank lain	3f,6		
Giro		80.046.624.978	53.934.996.323
Tabungan		33.860.623.382	17.983.495.213
Deposito		32.772.155.671	31.952.155.671
Penempatan pada bank lain		146.679.404.031	103.870.647.207
Penyisihan penilaian kualitas aset		(555.223.718)	(351.784.944)
Jumlah		146.124.180.313	103.518.862.263
Kredit yang diberikan	3h,3i,7		
Jumlah kredit yang diberikan		627.528.063.443	564.357.914.376
Penyisihan penilaian kualitas aset		(14.367.222.871)	(12.796.768.786)
Kredit yang diberikan – bersih		613.160.840.572	551.561.145.590
Aset tetap	3k,8		
Biaya perolehan		17.384.773.795	17.002.628.764
Akumulasi penyusutan		(13.749.178.293)	(13.145.220.680)
Nilai buku		3.635.595.502	3.857.408.084
Aset tak berwujud – bersih	9	10.175.000	21.275.000
Aset lain-lain	3l,10	2.118.375.901	1.052.651.648
Aset pajak tangguhan	3o,13b	25.245.201	17.564.578
JUMLAH ASET		773.233.278.832	667.332.196.075

Tangerang, 25 Februari 2026


Uus Mustaudi, SE
Direktur Operasional


Ai Suherlan, SE
Direktur Utama


Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan
Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2025**

LIABILITAS DAN EKUITAS

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan Kembali)
		Rp	Rp
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3m,11	2.666.395.101	928.815.531
Utang bunga	3n,12	1.189.986.096	1.198.376.502
Utang pajak	3o,13a	222.094.053	191.791.855
Simpanan	3p,14	185.762.922.894	164.408.616.945
Simpanan dari bank lain	3p,15	30.291.427.032	32.311.188.286
Pinjaman yang diterima	16	441.202.263.982	360.669.510.289
Liabilitas imbalan kerja	3t,17	229.501.823	159.677.984
Liabilitas lain-lain	18	220.084.916	353.799.632
Jumlah liabilitas		661.784.675.897	560.221.777.024
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	3q,19	71.650.000.000	71.650.000.000
Saldo laba			
Cadangan	3q,20	30.645.961.725	29.446.738.539
Belum ditentukan tujuannya	3q	9.152.641.210	6.013.680.512
Jumlah ekuitas		111.448.602.935	107.110.419.051
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		773.233.278.832	667.332.196.075

Tangerang, 25 Februari 2026


Uus Mustaudi, SE
Direktur Operasional


A. Suherlan, SE
Direktur Utama


Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan
Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025**

	Catatan	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan Kembali)
		Rp	Rp
Pendapatan bunga:			
Bunga kontraktual	3r,22	105.140.646.931	88.557.127.293
Provisi dan administrasi	3r,22	7.994.604.754	7.144.423.762
Jumlah pendapatan bunga		113.135.251.685	95.701.551.055
Beban bunga	3s,23	(49.859.438.031)	(42.329.267.564)
Pendapatan bunga, bersih		63.275.813.654	53.372.283.491
Pendapatan operasional lainnya	24	6.430.073.729	3.360.552.558
Beban operasional:			
Kerugian penurunan nilai aset produktif	25	(7.205.732.289)	(3.608.500.843)
Penyusutan dan amortisasi	26	(1.169.457.613)	(1.264.977.517)
Pemasaran	27	(2.848.023.754)	(2.548.233.705)
Administrasi dan umum	28	(45.918.531.187)	(40.358.890.516)
Jumlah beban operasional		(57.141.744.843)	(47.780.602.581)
Laba operasional		12.564.142.540	8.952.233.468
Pendapatan (beban) non operasional:	29		
Pendapatan non operasional		785.893.319	701.775.486
Beban non operasional		(1.367.226.630)	(1.617.057.960)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(581.333.311)	(915.282.474)
Laba sebelum pajak penghasilan		11.982.809.229	8.036.950.994
Pajak penghasilan:			
Kini	3o,13a	(2.855.413.220)	(2.040.835.060)
Pajak tangguhan	3o,13b	7.680.623	(4.560.471)
Laba setelah pajak		9.135.076.632	5.991.555.463
Penghasilan komprehensif lain		—	—
Laba komprehensif		9.135.076.632	5.991.555.463

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025**

	Modal disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum ditentukan tujuannya	Jumlah ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2023	71.650.000.000	11.371.315.625	17.165.191.288	4.551.158.131	104.737.665.044
Pembagian dividen	—	—	—	(2.503.136.972)	(2.503.136.972)
Pembentukan (penggunaan) cadangan	—	455.115.813	455.115.813	(910.231.626)	—
Pembagian dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan CSR	—	—	—	(1.137.789.533)	(1.137.789.533)
Laba bersih tahun berjalan	—	—	—	5.991.555.463	5.991.555.463
Koreksi dampak perubahan akuntansi	—	—	—	22.125.049	22.125.049
Saldo per 31 Desember 2024	71.650.000.000	11.826.431.438	17.620.307.101	6.013.680.512	107.110.419.051
Pembagian dividen	—	—	—	(3.297.863.764)	(3.297.863.764)
Pembentukan (penggunaan) Cadangan	—	599.611.593	599.611.593	(1.199.223.186)	—
Pembagian dana kesejahteraan, Jasa produksi, tantiem, dan CSR	—	—	—	(1.499.028.984)	(1.499.028.984)
Laba bersih tahun berjalan	—	—	—	9.135.076.632	9.135.076.632
Saldo per 31 Desember 2025	71.650.000.000	12.426.043.031	18.219.918.694	9.152.641.210	111.448.602.935

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025**

	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan kembali)
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	105.140.646.931	88.557.127.294
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	7.994.604.754	7.144.423.762
Pendapatan operasional lainnya	6.430.073.729	3.360.552.558
Pembayaran beban bunga	(49.859.438.031)	(42.329.267.564)
Beban gaji dan tunjangan	(32.622.534.051)	(28.481.215.273)
Beban umum dan administrasi	(13.596.617.372)	(12.576.124.068)
Beban operasional lainnya	(10.922.593.421)	(6.723.263.239)
Pendapatan non operasional lainnya	785.893.319	701.775.485
Beban non operasional lainnya	(1.367.226.630)	(1.617.057.961)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.855.413.220)	(2.040.835.060)
 Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan)/penurunan aset operasi:	 9.127.396.008	 5.996.115.934
Penempatan pada bank lain	(42.808.756.824)	4.889.719.584
Kredit yang diberikan	(63.170.149.067)	(84.765.240.160)
Aset lain-lain	(1.497.205.985)	(1.010.577.668)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	1.773.892.859	1.347.501.341
Penurunan/(kenaikan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	1.737.579.570	26.978.297
Tabungan	10.730.217.010	4.083.749.137
Deposito	10.624.088.939	278.817.582
Simpanan dari bank lain	(2.019.761.254)	(15.319.119.282)
Pinjaman yang diterima	80.532.753.693	87.169.182.633
Liabilitas imbalan kerja	69.823.839	—
Liabilitas lain-lain	(111.802.924)	(59.884.059)
 Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	 4.988.075.864	 2.637.243.339
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(382.145.031)	(649.610.350)
Penyesuaian lainnya	615.057.613	11.100.000
 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	 232.912.582	 (638.510.350)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024**

	2 0 2 5	2 0 2 4 (Disajikan kembali)
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran dividen	3.297.863.764	2.503.136.972
Penyesuaian lainnya	(8.069.511.310)	(4.549.385.961)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.771.647.546)	(2.046.248.989)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	449.340.900	(47.516.000)
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.137.778.500	3.185.294.500
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.587.119.400	3.137.778.500

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
PERNYATAAN DIREKTUR Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan	I
PERNYATAAN AUDITOR INDEPENDEN	II
LAPORAN POSISI KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	1 -2
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN..... Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	4
LAPORAN ARUS KAS..... Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	5
 <i>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI</i>	
1. Umum	6 - 8
2. Kebijakan Akuntansi	8 - 16
3. Penjelasan Laporan Posisi Keuangan..... Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	17 - 26
4. Penjelasan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain..... Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	26 - 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Aktiva Tetap

Lampiran II : Rasio Keuangan BPR

Lampiran III : Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) BPR

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PT BPR SERANG (PERSERODA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dadi Suryadi AR, S.H., M.H
NIK : 3604021508770303
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Griya Permata Asri Blok B 11 No. 12
Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

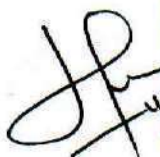
Nama : Teguh Iman Darmawan, S.E
NIK : 3604132302720001
Jabatan : Direktur Bisnis
Alamat : Kp. Karang Kaletak
Desa Samparwadi Kec. Tirtayasa Kab. Serang

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PT BPR SERANG (PERSERODA)** yang berakhir pada tanggal 31 DESEMBER 2025.
2. Laporan keuangan **PT BPR SERANG (PERSERODA)** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **PT BPR SERANG (PERSERODA)** di muat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan **PT BPR SERANG (PERSERODA)** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam **PT BPR SERANG (PERSERODA)**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 27 Maret 2026



Dadi Suryadi AR, S.H., M.H
Direktur Utama

Teguh Iman Drmawan, S.E
Direktur Bisnis

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No. 0007/3.0462/AU.8/07/1059-1/III/2026

Kepada

**Pemegang Saham, Dewan Pengawas Dan Direksi
PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda)
Jalan Raya Serang Jakarta KM. 11 Kaserangan
Kabupaten Serang**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) Tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit (SA) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan atas laporan keuangan terlampir, yang menjelaskan bahwa PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) menerapkan SAK EP untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan pertama kali tersebut, Entitas melakukan penyajian kembali (restatement) atas angka-angka komparatif/periode sebelumnya agar sesuai dengan penerapan SAK EP, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 35.a. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami dilaksanakan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan pada lampiran yang disertakan disajikan untuk tujuan analisis tambahan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan

dalam audit atas laporan keuangan pokok, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar dalam semua hal material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan Nomor: 00014/2.1353/AU.2/07/1484-1/1/1/2025 yang menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material atas laporan keuangan tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2025.

Tanggung Jawab Manajemen atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Manshur, Arifin, Suharyono & Rekan
Pimpinan Cabang/Rekan



Oyong Suharyono, SE., MM., MH., Ak., CA., ACPA., CRBC., CFA., CPI., CPA.
Nomor Register AP. 1059

Bandung, 27 Maret 2026



LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
Kas	3,2.c.	4.524.892.000	3.889.480.300
Penempatan Pada Bank Lain	4,2.d.	90.909.780.384	62.223.887.582
Penyisihan Kerugian ABA	5,2.g.	(255.410.870)	(170.328.664)
Total		90.654.369.514	62.053.558.918
Kredit Yang Diberikan	6,2.e.	467.549.819.103	491.214.622.320
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	7,2.g.	-	(18.432.979.873)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	8,2.f.	(18.070.824.196)	-
Total		449.478.994.907	472.781.642.447
Aset Tetap			
Nilai Prolehan	9,2.h.	23.711.017.072	22.441.171.133
Akumulasi Penyusutan	9,2.h.	(13.302.042.979)	(11.803.290.432)
Total		10.408.974.093	10.637.880.701
Aset Lainnya	10,2.i.	7.146.441.362	12.808.464.361
Total Aset Lainnya		7.146.441.362	12.808.464.361
JUMLAH ASET		562.213.671.876	562.171.026.727

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Segera	11,2.l.	1.761.617.437	3.040.561.733
Utang Bunga	12,2.l.	613.462.843	572.032.615
Utang Pajak	13,2.t.	2.812.296.740	3.529.553.736
Simpanan Dana Pihak Ketiga	14,2.m.	323.961.945.361	316.138.859.377
Simpanan dari Bank Lain	15,2.m.	25.943.805.338	33.076.788.966
Pinjaman Yang Diterima	16,2.l.	84.288.042.062	83.996.924.443
Kewajiban Imbalan Kerja	17,2.q.	122.801.437	1.842.646.183
Kewajiban Lainnya	18,2.l.	29.713.238.579	23.836.917.761
Total Kewajiban		469.217.209.796	466.034.284.815
EKUITAS			
Modal Dasar	19, 1.d.	100.000.000.000	100.000.000.000
Modal Yang Belum Disetor	19, 1.d.	(51.560.521.050)	(51.560.521.050)
Modal Yang Sudah Disetor		48.439.478.950	48.439.478.950
Saldo Laba			
Cadangan	20, 2.n.	38.071.098.452	35.664.557.321
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	20, 2.n.	6.485.884.678	12.032.705.641
Total		44.556.983.129	47.697.262.962
Total Ekuitas		92.996.462.079	96.136.741.912
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		562.213.671.876	562.171.026.727

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

Serang, 27 Maret 2026


Dadi Suryadi AR., S.H., M.H.
Direktur Utama


Teguh Iman Drmawan, S.E.
Direktur Bisnis

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga Kontraktual	21,2.n.	84.177.163.067	94.512.086.251
Pendapatan Provisi Kredit	21,2.o.	3.764.436.547	5.232.056.028
Total Pendapatan Bunga		87.941.599.613	99.744.142.278
Beban Bunga	22,2.n.	(24.840.023.285)	(25.610.541.384)
Pendapatan Neto		63.101.576.329	74.133.600.894
Pendapatan Operasional Lainnya	23,2.n.	16.222.631.858	3.869.020.514
Jumlah Pendapatan Operasional		79.324.208.187	78.002.621.407
Beban Penyisihan Kerugian	24,2.f.	(468.260.630)	(8.155.777.257)
Beban Kerugian Penurunan Nilai	24,2.f.	(16.678.601.300)	-
Beban Pemasaran	25,2.n.	(446.565.122)	(477.113.990)
Beban Administrasi dan Umum	26,2.n.	(10.292.086.903)	(9.939.559.475)
Beban Tenaga Kerja	27,2.n.	(36.190.702.569)	(38.753.333.337)
Beban Penyusutan	28,2.n.	(1.499.234.809)	(1.617.724.717)
Beban Operasional Lainnya	29,2.n.	(3.742.864.759)	(3.424.507.861)
Jumlah Beban Operasional		(69.318.316.092)	(62.368.016.637)
Laba (Rugi) Operasional		10.005.892.095	15.634.604.770
Pendapatan dan Beban Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	30	6.858.654	1.438.935.773
Beban Non Operasional	30	(1.634.608.071)	(1.332.591.022)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(1.627.749.417)	106.344.751
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		8.378.142.678	15.740.949.521
Pajak Kini	31,2.s.	(1.892.258.000)	(3.708.243.880)
Laba (Rugi) Setelah Pajak		6.485.884.678	12.032.705.641

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

Serang, 27 Maret 2026


Dadi Suryadi AR., S.H., M.H.
Direktur Utama


Teguh Iman Drmawan, S.E.
Direktur Bisnis

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Modal		Saldo Laba		Jumlah
	Modal Disetor	Modal Sumbangan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan	
Saldo Awal	48.439.478.950		33.648.601.114	10.079.781.033	92.167.861.097
Pembagian Dividen:	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	(5.543.879.568)	(5.543.879.568)
Cadangan	-	-	2.015.956.207	(2.015.956.207)	-
Tanggungjawab sosial & Lingkungan (CSR)	-	-	-	(302.393.431)	(302.393.431)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(1.814.360.586)	(1.814.360.586)
Tantiem	-	-	-	(403.191.241)	(403.191.241)
Laba (Rugi) periode berjalan	-	-	-	12.032.705.641	12.032.705.641
Saldo Per 31 Desember 2024	48.439.478.950	-	35.664.557.321	12.032.705.641	96.136.741.912
Pembagian Dividen:	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	(6.617.988.102)	(6.617.988.102)
Cadangan	-	-	2.406.541.128	(2.406.541.128)	-
Tanggungjawab sosial & Lingkungan (CSR)	-	-	-	(360.981.169)	(360.981.169)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(2.165.887.015)	(2.165.887.015)
Tantiem	-	-	-	(481.308.225)	(481.308.225)
Laba (Rugi) periode berjalan	-	-	-	6.485.884.678	6.485.884.678
Saldo Per 31 Desember 2025	48.439.478.950	-	38.071.098.449	6.485.884.680	92.996.462.079

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Pendapatan Bunga Kontraktual	84.177.163.067	94.512.086.251
Pendapatan Provisi Kredit	3.764.436.547	5.232.056.028
Pendapatan Operasional Lainnya	16.222.631.858	5.884.976.722
Pendapatan Non Operasional	6.858.654	1.438.935.773
Beban Bunga	(24.840.023.285)	(25.610.541.385)
Beban Penyisihan Kerugian	(468.260.630)	(8.155.777.257)
Beban Cadangan Kerugian Nilai	(16.678.601.300)	-
Beban Pemasaran	(446.565.122)	(477.113.990)
Beban Administrasi dan Umum	(10.292.086.903)	(9.939.559.475)
Beban Tenaga Kerja	(36.190.702.569)	(38.753.333.337)
Beban Penyusutan	(1.499.234.809)	(1.617.724.717)
Beban Operasional Lainnya	(3.742.864.759)	(3.424.507.861)
Beban Non Operasional	(1.634.608.071)	(1.332.591.022)
Pajak Kini	(1.892.258.000)	(3.708.243.880)
Penyisihan Kerugian Bank	85.082.207	(46.663.130)
Kredit yang diberikan	23.664.803.217	4.005.167.828
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(18.432.979.873)	(2.514.317.413)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	18.070.824.196	-
Penyusutan Aset Tetap	1.498.752.547	1.617.724.717
Aset lain-lain	5.662.022.999	(1.458.423.512)
Kewajiban Yang Segera Dibayar	(1.278.944.296)	(32.441.762)
Utang Bunga	41.430.228	22.028.721
Utang Pajak	(717.256.997)	1.350.620.330
Simpanan Dana Pihak Kedua	7.823.085.984	20.906.949.203
Simpanan dari Bank Lain	(7.132.983.628)	5.000.714.856
Kewajiban Imbalan Kerja	(1.719.844.746)	(527.651.798)
Kewajiban Lainnya	5.876.320.818	(4.415.721.422)
Arus kas neto dari aktivitas operasi	39.926.197.334	37.956.648.467
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Aset tetap dan inventaris	(1.269.845.939)	(741.314.546)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(1.269.845.939)	(741.314.546)
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pinjaman Diterima	291.117.618	(44.630.801.670)
Pembentukan Dana Cadangan	2.406.541.128	(2.015.956.207)
Pembayaran Dividen	(6.617.988.102)	(5.543.879.568)
CSR, Dana Kesejahteraan, Tantiem dan Jasa Produksi	(5.414.717.537)	(2.519.945.258)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(9.335.046.892)	(54.710.582.703)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	29.321.304.503	(17.495.248.782)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	66.113.367.881	83.608.616.663
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	95.434.672.384	66.113.367.881
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	4.524.892.000	3.889.480.300
Giro pada Bank Lain	16.834.217.831	29.628.443.984
Tabungan pada Bank Lain	61.605.562.553	19.375.443.597
Deposito pada Bank Lain	12.470.000.000	13.220.000.000
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	95.434.672.384	66.113.367.881

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Landasan Hukum

PD. BPR Serang berkedudukan di Kabupaten Serang Banten Didirikan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang. Peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2010. BPR telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Indonesia nomor 10/9/kep.DpG/2008 Tanggal 30 Juni 2008.

PD BPR Serang telah mengalami perubahan nama dan perubahan badan hukum menjadi PT. BPR Serang (Perseroda) dengan akta pendirian nomor 34 pada tanggal 9 Desember 2019 dihadapan Notaris Burhanuddin, SH., M.Kn di Lebak dan akta pernyataan keputusan rapat pengalihan hak dan kewajiban dari badan hukum lama PD. BPR Serang kepada badan hukum baru PT. BPR Serang (Perseroda) serta mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2020 nomor KEP-36/KR.01/2020 tentang pengalihan izin usaha atas perubahan badan hukum PD. BPR Serang menjadi PT. BPR Serang (Perseroda).

Terakhir terdapat perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Nomor 35 tanggal 21 November 2024 Notaris Lia Shinta Dewi, SH., M.Kn di Kota Serang Tentang Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT Bank Perekonomian Rakyat Serang disingkat "PT BPR Serang". Telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0075454.AH.01.02. Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perusahaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Serang dan Keputusan Kepala OJK Tasikmalaya Nomor S-15/KO.1141/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) Tanggal 18 Desember 2024.

Kantor Pusat PT BPR Serang (Perseroda) berlokasi di Jalan Raya Serang Jakarta KM. 11 Kaserangan, Ciruas, Kab Serang Prov. Banten 42182

b. Fungsi

Fungsi PT BPR Serang (Perseroda) adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Serang.

c. Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan daerah, PT BPR Serang (Perseroda) melakukan kegiatan usahanya berpedoman kepada dua orientasi yaitu :

- a). Orientasi terhadap laba (*profit oriented*), yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b). Orientasi terhadap kepedulian sosial (*social oriented*), yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Serang.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, PT BPR Serang (Perseroda) mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

d. Permodalan

Berdasarkan akta Notaris Burhanudin, SH., M.Kn nomor 34 pada tanggal 9 Desember 2019 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda), modal dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

d. Permodalan (Lanjutan)

Terakhir terdapat perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Nomor 35 tanggal 21 November 2024 Notaris Lia Shinta Dewi, SH., M.Kn di Kota Serang Tentang Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT Bank Perekonomian Rakyat Serang disingkat "PT BPR Serang". Telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0075454.AH.01.02. Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perusabhan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Serang dan Keputusan Kepala OJK Tasikmalaya Nomor S-15/KO.1141/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) Tanggal 18 Desember 2024. Berikut Komposisi Modal dan Pemegang Saham Per 31 Desember 2025:

	Modal Dasar	Presentase	Disetor	Belum Disetor
Pemerintah Kab. Serang	55.000.000.000	53,16%	27.588.930.000	27.411.070.000
Pemerintah Provinsi Banten	15.000.000.000	0,00%	15.000.000.000	-
Pemerintah Provinsi Jabar	15.000.000.000	22,40%	3.450.548.950	11.549.451.050
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	15.000.000.000	24,44%	2.400.000.000	12.600.000.000
	100.000.000.000	100%	48.439.478.950	51.560.521.050

e. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja yang dibentuk sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung-jawab adalah dengan susunan sebagai berikut :

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) Nomor 14 tanggal 07 february 2025 Notaris Lia Shinta Dewi, SH., M.Kn di Kota Serang, mengesahkan dan menetapkan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2025:

- Komisaris Independen (Merangkap Komiaris Utama) : Media Warmah, S.H
- Komisaris : Hendra Indra rachman, S.H
- Direktur Utama : Dadi Suryadi AR., S.H., M.H
- Direktur Bisnis : Teguh Iman Drmawan, S.E
- Direktur Kepatuhan, Umum, dan SDM : -

Susunan Kepegawaian sebagai berikut :

- Kepala SKAI : Dodi Suryana
- Manajer Keuangan : Dedi Mulyadi
- Manajer Bisnis : A. Budiyanoni
- Manajer Supervisi : Deni Kurniawan
- Plt. Manajer Umum dan Legal : Rochilah
- Manajer HRD dan Humas : Rochilah
- Manajer Pelaporan dan Akuntansi : Abdul Latif
- KEAPA Satker Kepatuhan, Manjemen Risiko dan APU PPT : H. Ika Karniwa
- Manajer IT : Adhie Sujib Sudaryo
- Kepala Kantor Pusat Operasional : Muslim, S.E., M.M
- Kepala Cabang Kasemen : Iin Inayati
- Kepala Cabang Anyar : Budi Afero Saepi
- Kepala Cabang Cinangka : Yusuf Kurniadi
- Kepala Cabang Pontang : H. Erik Ramadhani
- Kepala Cabang Carenang : Siti Romlah
- Kepala Cabang Kragilan : Taufik Kemal

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

Jumlah karyawan PT BPR Serang (Perseroda) sebanyak 214 Orang dengan rincian :

- Karyawan Tetap sebanyak	: 207 Orang
- Karyawan Tidak Tetap sebanyak	: 7 Orang
Jumlah	<u><u>214 Orang</u></u>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan PT BPR Serang (Perseroda) periode 2025 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan SAK-EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) dan Pedoman Akuntansi BPR

Laporan keuangan Konsolidasi disusun berdasarkan asumsi dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai *non-performing* dan dicatat secara dasar kas (*cash basis*).

Laporan arus kas menyajikan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dimana dalam metode tersebut laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi yang bersifat non kas.

Disamping itu dihitung pula penangguhan/akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan serta unsur penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

Pada Tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Saldo Penempatan pada Bank Lain disajikan terpisah dengan Penyisihan Kerugian atas Penempatan pada Bank Lain. Penyisihan tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo penempatan pada akhir periode tertentu.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambah biaya kredit. Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

e. Kredit Yang Diberikan (Lanjutan)

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit *performing* diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *non-performing* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat diragukan.

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang, atas asset keuangan atau kelompok keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

BPR melakukan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) didasarkan pada signifikansi portofolio untuk membedakan metode perhitungan dan evaluasinya. Kebijakan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kolektif dan individual:

1. BPR Serang membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan
2. Dalam menghitung rasio KPMM, BPR Serang memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dan CKPN yang dibentuk
3. Dalam hal hasil perhitungan PPKA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk, BPR Serang memperhitungkan selisih perhitungan PPKA atas Aset Produktif dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM
4. Dalam hal hasil perhitungan PPKA atas Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, BPR Serang tidak perlu memperhitungkan PPKA dalam perhitungan rasio KPMM.
5. Pembentukan CKPN berdasarkan principle based BPR Serang mengembangkan model/metode yang dipilih berdasarkan hasil evaluasi penurunan nilai)
6. BPR Serang melakukan proses evaluasi kredit, maka BPR Serang membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang harus memperhatikan :
 - a. CKPN dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan *effective interest rate* (EIR)
 - b. BPR Serang tidak diperbolehkan membentuk CKPN melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok/ kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai.
 - c. CPKN dibentuk sesuai dengan mata uang demonisasi kredit yang diberikan
 - d. Pembentukan CKPN mempertimbangkan beberapa komponen yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD) dari kelompok kredit
 - e. *Probability of Default* (PD), tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan antara lain *Migration Analysis* dan *Roll Rates*. Menggunakan data observasi/ data historis minimal 3 (tiga) tahun terakhir dengan migrasi data 3 (tiga) bulan dan periode evaluasi dilakukan setiap triwulan.
 - f. *Exposure at Default* / EAD adalah baki debet atau sisa pinjaman atau *outstanding*.

Metode Roll Rate Konsep metode ini dengan cara mengukur probabilitas perpindahan (*roll*) kredit dari satu *bucket* keterlambatan ke *bucket* yang lebih buruk dalam jangka waktu tertentu. *Bucket* biasanya 0 hari (lancar), 1-30 hari (DPD1), 31-60 hari (DPD2), 61-90 hari (DPD3). Dasar perhitungan adalah data historis kolektibilitas berdasarkan seberapa besar peluang kredit yang saat ini di *bucket* tertentu akan bergeser ke *bucket* berikutnya hingga akhirnya masuk kategori default/NPL.

Metode Migration menggunakan transition matrix antar kolektibilitas (misalnya kolektibilitas 1-5 sesuai POJK) untuk mengukur probabilitas perpindahan langsung antar kolektibilitas. Dasar perhitungan adalah data historis kolektibilitas kredit (bukan DPD per hari/bulan, tapi status kolektibilitas OJK yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet).

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Lanjutan)

Evaluasi Penurunan Nilai

1. Setiap debitur dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan terhadap kondisi ketepatan pembayaran kewajiban kepada pihak BPR Serang.
2. Setiap agunan debitur dilakukan evaluasi terhadap *recovery* yang akan diperoleh untuk menutup pembayaran debitur.
3. Dilakukan evaluasi terhadap garansi dari pihak lain jika ada komitmen yang bisa direalisasikan untuk menutup potensi risiko ke depan.
4. Evaluasi terhadap prospek usaha debitur dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal.
5. Setiap debitur yang mulai menunggak dilakukan pembinaan dan penagihan oleh petugas yang ditunjuk oleh BPR Serang.
6. Mengupayakan pencegahan melalui pemberian surat tagihan dan/atau kunjungan ke debitur maupun melakukan penilaian kembali terhadap agunan.
7. BPR Serang melakukan validasi/ clasing agar dipastikan kebenaran data dan bersih (hari tunggakan, segmentasi, kolektibilitas) sehingga dasar perhitungan menjadi valid.

Perhirungan CKPN Penurunan nilai

1. Penetapan tingkat signifikasi, dengan kriteria : a) Berdasarkan plafond tertentu yang dibuatkan Surat Keputusan Direksi atau b) 25 debitur terbesar atau 50 debitur besar atau c) Berdasarkan segmentasi;
2. Bukti obyektif penurunan nilai, adanya tunggakan pokok dan/atau bunga dari debitur > 90 hari;
3. Dihitung penurunan arus kas dari *Effective Interest Rate* (EIR)
4. Evaluasi secara individual terhadap : a) Kemampuan membayar debitur b) Nilai agunan c) Jenis asuransi d) Prospek usaha di masa depan;
5. Dokumentasi terhadap evaluasi secara individual agar ditata dokumen dengan baik;
6. Arus kas masa depan dan arus kas saat kredit dicairkan, selisih lebih kecil, BPR Serang akan membentuk CKPN;
7. Bukti pendukung estimasi arus kas untuk penilaian penurunan nilai individual:

No	Estimasi	Keterangan
1.	Kemampuan membayar debitur	- Lembar evaluasi penurunan nilai - Kertas kerja simulasi penurunan nilai (<i>cashflow</i>) - Surat pernyataan kesanggupan membayar dari debitur <i>call report / call memo</i>
2.	Ganti rugi asuransi (klaim)	- Lembar evaluasi penurunan nilai - Kertas kerja simulasi nilai (<i>cashflow</i>) - Surat pengajuan proses klaim ke asuransi
3.	Penjualan agunan	- Lembar evaluasi penurunan nilai - Kertas kerja simulasi penurunan nilai (<i>cashflow</i>) Dasar penilaian harga (appraisal) - Surat pengajuan proses klaim ke asuransi - Surat penawaran harga/ minat pembelian dari calon pembeli dibawah tangan. - Dasar penilaian harga (appraisal) - Pengumuman lelang - Call report/call memo
4.	Restrukturisasi	- Lembar evaluasi penurunan nilai - Kertas kerja simulasi penurunan nilai (<i>cashflow</i>) - PK addendum restrukturisasi - Jadwal angsuran debitur restrukturisasi

8. Bunga pasar tetapkan bunga kontraktual dengan bunga, evaluasi 2 (dua) tahun sekali;

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Lanjutan)

Penurunan nilai secara kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individual dan dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Debitur yang telah dilakukan evaluasi secara individual karena memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai debitur signifikansi tidak lagi dilakukan penilaian secara kolektif.

Evaluasi secara kolektif yaitu :

- a) Kredit yang signifikan yang tidak mengalami penurunan nilai (impairment)
- b) Kredit tidak signifikan yang mengalami penurunan nilai (impairment)

- 9. BPR Serang melakukan analisis setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap data kredit historis; dan
- 10. Penetapan materialitas atas provisi dan administrasi yang bisa diakui langsung.

g. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat perhitungan kewajiban penyisihan kualitas Aset Produktif yang dibentuk oleh BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Terhadap Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan khusus dan Kredit yang diberikan, dengan rincian sebagai berikut:

PPKA Penempatan Pada Bank Lain :

$$\text{PPAP} = 0,5\% \times (\text{Total Penempatan Pada Bank Lain} - \text{Maksimal Penjaminan LPS})$$

PPKA Kredit Yang Diberikan :

PPKA Umum

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Lancar : 0,5 %

PPKA Khusus

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus : 3 %
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar : 10 %
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Diragukan : 50 %
Aktiva Produktif memiliki Kualitas Macet : 100 %

Untuk ketentuan PPKA Khusus Kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020 berlaku sebesar 0,5%, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berlaku sebesar 1%, dan sejak tanggal 1 Desember 2021 berlaku sebesar 3%.

Rincian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan penyisihan aktiva produktif :

- a). 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- b). 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- c). 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- d). 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- e). 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

g. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) (Lanjutan)

- f). 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- g). 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h). 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- i). 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- j). 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai resi gudang; dan
- k). 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

h. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurang akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Pengelompokan Aset	Masa Manfaat Ekonomis	Penyusutan Tarif/Tahun
Bangunan dan Gedung		20 Tahun	5%
Kendaraan Roda 2	Golongan 1	4 Tahun	25%
Kendaraan Roda 4	Golongan 2	8 Tahun	12,5%
Peralatan Kantor 1	Golongan 1	4 Tahun	25%
Peralatan Kantor 2	Golongan 2	8 Tahun	12,5%

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

h. Aset Tetap dan Penyusutannya (Lanjutan)

Aset Tetap yang terjual dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan tersebut dilaporkan dalam Laporan Aktivitas tahun yang bersangkutan.

i. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada saat tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

j. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan aset Bank yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah (disajikan dalam akun "Agunan Yang Diambil Alih" - AYDA).

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Kewajiban

Kewajiban merupakan saldo kewajiban/utang masa kini Bank yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik Bank yang mengandung manfaat ekonomi.

m. Simpanan

Tabungan dan Deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

n. Pembagian Laba

Akun ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2024 BAB IX Tahun Buku dan Penggunaan Laba Pasal 66 Ayat 3 menyebutkan bahwa laba bersih BPR milik Pemerintah Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:

a). Bagian Laba Untuk Daerah / Dividen	: 55%
b). Cadangan	: 20%
c). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	: 3%
d). Tantiem	: 4%
e). Jasa Produksi	: 8%
f). Dana Kesejahteraan	: 10%

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai nonperforming (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (*cash basis*).

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

p. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan Provisi dan Komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

q. Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan sudah mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan SAK ETAP Bab 23 "imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan UU 13 tahun 2003 dan PP Nomor 35 tahun 2021 untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 (6) UU Nomor 11/2020 mengenai Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti kerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut.

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Imbalan kerja yang dicakup merupakan salah satu dari empat jenis berikut:

- a. imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait;
- b. imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah penyelesaian kontrak
- c. imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa terkait; dan
- d. pesangon adalah imbalan kerja yang terutang sebagai akibat dari salah satu berikut
 - i. keputusan entitas untuk melakukan terminasi kontrak kerja pekerja sebelum tanggal purnakarya normal; atau
 - ii. keputusan pekerja untuk menerima pengurangan kontrak kerja secara sukarela untuk dipertukarkan dengan imbalan pesangon tersebut.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

q. Kewajiban Imbalan Kerja (Lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Pembatasan terjadi jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a). Menunjukkan komitmen untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- b). Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi saat suatu entitas melakukan transaksi yang menghapus semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

r. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah POJK 42/POJK.04/2020 adalah sebagai berikut:

- a). Hubungan keluarga karena perkawinan dan Keturunan;
- b). Hubungan antara pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c). Hubungan antara 2 perusahaan di mana terdapat 1 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d). Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung;
- e). Hubungan 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan
- f). Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

s. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kebijakan potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode - periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Pembatasan terjadi jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a). Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill; atau

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

t. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

- b). Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Jumlah pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a). Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
- i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a). memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b). bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

u. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

3. KAS

Jumlah saldo kas dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- Kas	4.524.892.000	3.889.480.300
Jumlah	4.524.892.000	3.889.480.300

Kas terdiri dari :

- Kantor Pusat Non Operasional	-	107.000
- Kantor Pusat Operasional	817.456.000	542.161.200
- Kantor Cabang Kasemen	941.215.500	632.971.000
- Kantor Cabang Anyar	519.521.500	384.942.000
- Kantor Cabang Cinangka	375.545.300	503.145.100
- Kantor Cabang Pontang	650.651.000	460.660.500
- Kantor Cabang Carenang	689.224.500	822.284.600
- Kantor Cabang Kragilan	531.278.200	543.208.900
Jumlah	4.524.892.000	3.889.480.300

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Jumlah saldo penempatan pada bank lain, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis simpanan		
- Giro pada Bank Lain	16.834.217.831	29.628.443.984
- Tabungan pada Bank Lain	61.605.562.553	19.375.443.598
- Deposito pada Bank Lain	12.470.000.000	13.220.000.000
Jumlah	90.909.780.384	62.223.887.582

Giro berdasarkan jenis bank di Kantor Pusat dan Cabang

- PT. Bank Jabar Banten Tbk.	10.666.990.658	13.500.111.872
- PT. Bank Banten, Tbk.	930.285.071	3.190.099.150
- PT. Bank Permata, Tbk.	2.595.897.204	4.686.482.975
- PT. Bank Mega Syariah, Tbk.	294.127.211	894.317.211
- PT. Bank J Trust Indonesia, Tbk.	319.434.951	1.238.570.707
- PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.	90.588.719	2.810.162.279
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	144.374.452	142.995.105
- PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.,	12.456.495	12.431.609
- PT. Bank Andara	853.413.452	685.960.422
- PT. Bank Niaga	275.838.130	276.572.215
- PT. Bank BCA, Tbk.	650.811.487	2.146.336.952
- PT. Bank NISP	-	44.403.487
Jumlah	16.834.217.831	29.628.443.984

Tabungan berdasarkan jenis bank di Kantor Pusat dan Cabang

- PT. Bank Jabar Banten Tbk.	21.946.611.114	12.450.684.444
- PT. BPR Jombang	833.034.493	451.030.035
- PT. Bank Permata, Tbk.	122.389.095	120.695.268
- PT. Bank BRI, Tbk.	2.228.490.857	721.469.431
- PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.	3.541.251.752	40.793.234
- PT. Bank Danamon, Tbk.	271.414.762	268.209.260
- PT. BPR Supra Artha Persada	559.230.615	550.567.235
- PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera	780.661.733	2.226.892.168
- PT. BPR Artha Sukapura	546.237.624	540.286.777
- PT. BPR Berkah (Perseroda)	370.290	11.373.336
- PT. BPR Kertaraharja	287.588.376	106.558.657
Jumlah Pindahan	31.117.280.712	17.488.559.846

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Jumlah saldo penempatan pada bank lain, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
- PT. BPR Sri Artha Lestari	339.154.247	330.711.284
- PT. BPR Hariarta Sedana	73.433.995	60.020.316
- PT. BPR Intan Jabar	511.103.908	542.540.816
- PT. BPR Lestari Banten	734.634	751.624
- PT. Bank NISP	3.333.840.049	340.556.622
- PT. Bank Muamalat	107.344.526	505.180.804
- PT. Bank Delta Artha	386.749.384	6.481.383
- PT. Bank Athena Surya P	1.196.063	492.962
- PT. Bank Jombang Sinarmas	111.198.900	100.147.940
- PT. Bank Mandiri	4.740.774.746	-
- PT. BPR Kas Indonesia	201.401.578	-
- PT. BPR Jatim	20.681.349.811	-
Jumlah penempatan bank dalam tabungan	61.605.562.553	19.375.443.598

Deposito berdasarkan jenis bank :

- PT. Bank Jabar Banten Tbk.	1.620.000.000	1.620.000.000
- PT. Bank Oke Indonesia (d/h PT. Bank Andara)	3.000.000.000	3.000.000.000
- PT. BPR Berkah	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT. BPR Daya Lumbung Asia	950.000.000	1.250.000.000
- PT. BPR Parung Panjang	500.000.000	500.000.000
- PT. BPR Kota Bandung	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Daya Lumbung Mekar Sentosa	800.000.000	-
- PT. BPR Hariarta Sedana	500.000.000	500.000.000
- PT. BPR Bona Pasogit	-	250.000.000
- PT. Bank J Trust Indonesia, Tbk.	-	2.500.000.000
- PT. BPR Prima Dadi Arta	600.000.000	600.000.000
- PT. BPR Kertaraharja	500.000.000	-
- PT. Bank Delta Artha	500.000.000	-
- PT. BPR Mitra Sejahtera	500.000.000	-
Jumlah	12.470.000.000	13.220.000.000

b. Simpanan berdasarkan kolektibilitas

- Lancar	90.909.780.384	62.223.887.582
Jumlah	90.909.780.384	62.223.887.582

5. PENYISIHAN KERUGIAN ANTAR BANK AKTIVA

Jumlah saldo Penyisihan Kerugian antar bank aktiva, dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024
Penyisihan Kerugian ABA yang telah dibentuk	(255.410.870)	(170.328.664)
Jumlah	(255.410.870)	(170.328.664)

Untuk penyisihan Kerugian ABA yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Pasal 23.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

Jumlah saldo kredit yang diberikan sebesar tersebut terdiri dari:

a. Jenis kredit berdasarkan transaksi :

Pokok Kredit yang Diberikan

	2025	2024
- KYD - Kredit Mikro Multi Guna	452.769.923.743	474.904.979.490
- KYD - Kredit Mikro Banten	11.469.870.852	10.766.646.446
- KYD - Kredit Mikro Multi Usaha	8.752.331.708	10.691.682.063
Jumlah Pokok Kredit	472.992.126.304	496.363.307.999

Provisi Kredit yang Diberikan

- KYD - Provisi Kredit dan biaya Administrasi	(5.442.307.201)	(5.148.685.679)
Jumlah Provisi Kredit	(5.442.307.201)	(5.148.685.679)
Total Kredit yang Diberikan	467.549.819.103	491.214.622.320

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Jenis kredit berdasarkan kolektibilitas :

Jenis Kredit	31 Desember 2025					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
KYD - KMG	329.700.869.233	25.985.511.242	14.389.643.593	19.750.619.938	62.943.279.739	452.769.923.743
KYD - KMB	5.373.067.646	757.429.989	606.790.088	859.250.504	3.873.332.626	11.469.870.852
KYD - KMU	5.781.097.445	337.771.956	329.879.404	300.695.117	2.002.887.787	8.752.331.708
Jumlah	340.855.034.324	27.080.713.186	15.326.313.085	20.910.565.558	68.819.500.151	472.992.126.304
Provisi Kredit						(5.442.307.201)
Total Kredit						467.549.819.103

c. Kolektibilitas kredit per Kantor Cabang:

Unit Kerja	31 Desember 2025					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
KPO	99.671.554.196	8.601.612.459	4.778.160.338	5.974.592.601	19.911.213.853	138.937.133.447
Cabang Kasemen	33.796.080.924	3.595.363.640	1.778.403.528	2.789.861.383	6.932.690.102	48.892.399.578
Cabang Anyar	43.599.620.276	5.434.710.824	2.522.053.957	3.584.476.228	10.094.157.231	65.235.018.515
Cabang Cinangka	42.948.796.222	1.663.757.151	392.807.272	769.230.763	2.503.334.821	48.277.926.228
Cabang Pontang	32.072.516.221	2.486.367.682	1.611.448.580	1.652.535.325	6.348.849.948	44.171.717.757
Cabang Carenang	54.953.142.393	2.081.232.794	1.920.930.249	2.366.549.159	12.432.876.298	73.754.730.893
Cabang Kragilan	33.813.324.092	3.217.668.635	2.322.509.161	3.773.320.098	10.596.377.898	53.723.199.885
Jumlah	340.855.034.324	27.080.713.186	15.326.313.085	20.910.565.558	68.819.500.151	472.992.126.304
Provisi Kredit						(5.442.307.201)
Total Kredit						467.549.819.103

d. Jenis kredit berdasarkan kolektibilitas :

Jenis Kredit	31 Desember 2024					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
KYD - KMG	369.745.235.338	34.031.441.743	11.735.813.768	19.475.799.958	39.916.688.684	474.904.979.490
KYD - KMB	5.116.742.716	1.354.109.998	514.979.006	844.121.557	2.936.693.170	10.766.646.446
KYD - KMU	8.343.938.090	147.115.072	-	119.675.836	2.080.953.064	10.691.682.063
Jumlah	383.205.916.144	35.532.666.813	12.250.792.773	20.439.597.351	44.934.334.918	496.363.307.999
Provisi Kredit						(5.148.685.679)
Total Kredit						491.214.622.320

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

e. Kolektibilitas kredit per Kantor Cabang:

Unit Kerja	31 Desember 2024					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
KPO	114.092.834.561	13.506.519.974	3.500.389.317	5.290.707.180	17.591.823.316	153.982.274.348
Cabang Kasemen	37.810.503.020	4.511.312.739	3.007.895.670	2.116.109.650	4.249.227.116	51.695.048.195
Cabang Anyar	46.173.088.259	5.341.357.556	964.362.275	897.775.141	7.534.795.349	60.911.378.581
Cabang Cinangka	44.631.050.738	1.247.641.325	519.553.434	1.179.320.366	1.652.236.070	49.229.801.933
Cabang Pontang	41.398.478.349	1.979.790.182	1.462.100.573	2.776.517.681	4.053.539.506	51.670.426.291
Cabang Carenang	52.865.089.168	2.199.380.740	1.942.453.826	4.440.703.874	6.754.538.627	68.202.166.235
Cabang Kragilan	46.234.872.048	6.746.664.295	854.037.678	3.738.463.460	3.098.174.935	60.672.212.416
Jumlah	383.205.916.144	35.532.666.812	12.250.792.773	20.439.597.351	44.934.334.920	496.363.307.999
Provisi Kredit						(5.148.685.679)
Total Kredit						491.214.622.320

e. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

- Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	2.985.650.476	4.514.123.933
- Lebih dari 1 - 5 tahun	380.983.028.772	395.281.992.354
- Lebih dari 5 - 10 tahun	83.045.801.068	91.479.795.743
- Lebih dari 10 tahun	5.977.645.988	5.087.395.968
	472.992.126.304	496.363.307.999

f. Kredit berdasarkan restrukturisasi

- Perpanjangan jangka waktu Kredit	18.607.628.789	17.891.955.357
	18.607.628.789	17.891.955.357

g. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- 1) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan berupa Sertifikat (SHM), AJB, Leter C dan BPKB yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh BPR;
- 2) Kredit Mikro Multi Guna, Kredit Mikro Banten, dan Kredit Mikro Multi Usaha terdiri dari kredit modal pengembangan usaha, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya;
- 3) Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 12% - 14% dan jangka waktu dari 1 sampai 10 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan;
- 4) Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
- 5) Kredit hapus buku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.613.322.301 dan Rp53.525.480.823

Untuk penyisihan penilaian kualitas aset yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penilaian kualitas aset tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

7. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET

	2025	2024
Jumlah saldo penyisihan penilaian kualitas aset yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:		
Jenis Kredit :		
- KYD - Kredit Mikro Multi Guna	-	(17.301.298.770)
- KYD - Kredit Mikro Banten	-	(240.503.583)
- KYD - Kredit Mikro Multi Usaha	-	(891.177.520)
Jumlah	-	(18.432.979.873)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

7. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (Lanjutan)

	2025	2024
Pembentukan masing-masing kantor :		
- KPO	-	(7.900.324.715)
- Cabang Kasemen	-	(1.016.420.376)
- Cabang Anyar	-	(1.731.425.818)
- Cabang Cinangka	-	(903.600.756)
- Cabang Pontang	-	(828.085.209)
- Cabang Carenang	-	(3.860.264.049)
- Cabang Kragilan	-	(2.192.858.950)
Penyisihan penilaian kualitas aset yang telah dibentuk	-	(18.432.979.873)
Penyisihan penilaian kualitas aset yang wajib dibentuk	-	(18.432.979.873)
Presentase penyisihan penilaian kualitas aset yang telah dan wajib dibentuk		100%

8. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2025	2024
Jumlah saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:		
Jenis Kredit :		
- KYD - Kredit Mikro Multi Guna	(17.624.748.398)	-
- KYD - Kredit Mikro Banten	(9.846.838)	-
- KYD - Kredit Mikro Multi Usaha	(436.228.960)	-
Jumlah	(18.070.824.196)	-
Pembentukan masing-masing kantor :		
- KPO	(10.010.590.296)	-
- Cabang Kasemen	(2.155.527.409)	-
- Cabang Anyar	(1.969.328.966)	-
- Cabang Cinangka	(496.785.384)	-
- Cabang Pontang	(955.392.786)	-
- Cabang Carenang	(948.422.142)	-
- Cabang Kragilan	(1.534.777.213)	-
Cadangan penurunan nilai yang telah dibentuk	(18.070.824.196)	-

9. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dengan rincian sbb:

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal Rp	Penambah Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan :				
Tanah	3.643.871.350	-	-	3.643.871.350
Gedung Kantor	9.293.587.366	378.136.864	-	9.671.724.230
Kendaraan	3.206.055.000	293.200.000	-	3.499.255.000
Inventaris	6.297.657.417	598.509.075	-	6.896.166.492
Jumlah Nilai Perolehan	22.441.171.133	1.269.845.939	-	23.711.017.072
Akumulasi Penyusutan				
Gedung Kantor	4.772.645.732	455.078.013	-	5.227.723.745
Kendaraan	2.526.497.977	320.884.896	-	2.847.382.873
Inventaris	4.504.146.723	722.789.638	-	5.226.936.361
Jumlah Akum. Penyusutan	11.803.290.432	1.498.752.547	-	13.302.042.979
Nilai buku	10.637.880.701			10.408.974.093

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dengan rincian sbb:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal Rp	Penambah Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan :				
Tanah	3.643.871.350	-	-	3.643.871.350
Gedung Kantor	9.244.877.501	48.709.865	-	9.293.587.366
Kendaraan	3.206.055.000	-	-	3.206.055.000
Inventaris	5.605.052.737	692.604.680	-	6.297.657.417
Jumlah Nilai Perolehan	21.699.856.588	741.314.545	-	22.441.171.133
Akumulasi Penyusutan				
Gedung Kantor	4.315.747.437	456.898.295	-	4.772.645.732
Kendaraan	2.214.063.600	312.434.377	-	2.526.497.977
Inventaris	3.655.754.678	848.392.045	-	4.504.146.723
Jumlah Akum. Penyusutan	10.185.565.715	1.617.724.717	-	11.803.290.432
Nilai buku	11.514.290.873			10.637.880.701

10. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Jumlah aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		
- PYAD - Kredit Mikro Multi Guna	4.331.621.216	11.089.079.476
- PYAD - Kredit Mikro Banten	90.053.898	384.709.285
- PYAD - Kredit Mikro Multi Usaha	72.160.756	(40.824.710)
	17.880.287	-
Jumlah	4.511.716.157	11.432.964.051

Pendapatan yang masih harus diterima diakui berdasarkan dari perhitungan bunga kredit lancar.

Aset Lain - Lain (RRA)

Jumlah saldo aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Dibayar Dimuka Sewa Kantor	543.574.333	319.604.000
- Biaya Dibayar Dimuka Asuransi	171.470.855	205.064.236
- Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	750.162.536	614.847.173
- Iuran OJK	-	43.539.634
- Persediaan ATK	22.080.000	11.133.333
- Lainnya	161.103.102	181.311.935
- Fee Penjaminan	6.334.379	-
- Pajak Dibayar Dimuka	980.000.000	-
Jumlah	2.634.725.205	1.375.500.310
Jumlah Aset Lain-Lain	7.146.441.362	12.808.464.361

11. KEWAJIBAN SEGERA

	2025	2024
Jumlah saldo kewajiban segera dengan rincian sebagai berikut :		
- Biller Payment	15.146.309	19.587.725
- Biller Settlement	18.787.656	13.136.325
- Titipan Asuransi	77.490.900	148.428.741
- Titipan Uang Notaris	180.818.145	202.745.035
- KS Titipan	935.277.217	2.375.319.398
- Titipan Lainnya	534.097.209	281.344.510
Jumlah Kewajiban Segera	1.761.617.437	3.040.561.733

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

12. UTANG BUNGA

Jumlah saldo Utang Bunga, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
- Bunga Deposito Jatuh Tempo	14.114.669	14.114.669
- Bunga Deposito Yang Masih Harus Dibayar	599.348.175	557.917.947
Jumlah Utang Bunga	613.462.843	572.032.615

13. UTANG PAJAK

Jumlah saldo utang pajak, dengan rincian sbb :

	2025	2024
- PPh Pasal 21	709.807.304	156.616.141
- PPh Pasal 23 Tabungan	83.341.423	81.095.033
- PPh Pasal 23 Deposito	101.866.284	109.340.233
- PPh Pasal 25 / 29	1.892.258.000	2.864.243.880
- PPh / PPN Perusahaan	15.466.225	309.579.063
- Pajak Lainnya	5.167.172	8.679.386
- PPh Unfikasi	4.390.333	-
Jumlah Utang Pajak	2.812.296.740	3.529.553.736

(lihat catatan No. 31)

14. SIMPANAN DANA PIHAK KETIGA

Jumlah saldo Simpanan Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
- Tabungan	213.692.804.361	210.238.218.377
- Deposito	110.269.141.000	105.900.641.000
Jumlah	323.961.945.361	316.138.859.377

Rincian Tabungan Menurut Jenis Tabungan :

- Tabungan Tamasa	180.738.710.753	176.501.598.153
- Tabungan Anak Sekolah	26.499.964.207	27.580.628.530
- Tabungan Tabprindo	415.572.387	433.979.411
- Tabungan Tapena (Berjangka)	5.545.890.872	4.968.690.719
- Tabungan Umum	492.666.141	753.321.564
Jumlah Tabungan	213.692.804.361	210.238.218.377

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan tingkat suku bunga 1% - 3% Per tahun dari saldo terkecil setiap bulan minimal Rp25.000.

Deposito Berjangka

- Deposito Sampai dengan 1 bulan	8.763.000.000	9.150.000.000
- Deposito Sampai dengan 3 bulan	13.254.200.000	12.053.200.000
- Deposito Sampai dengan 6 bulan	14.921.741.000	14.453.241.000
- Deposito Sampai dengan 9 bulan	348.000.000	518.000.000
- Deposito Sampai dengan 12 bulan	72.982.200.000	69.526.189.999
Jumlah	110.269.141.000	105.700.630.999

Tingkat suku bunga desposito berjangka berkisar antara 1% - 9,95%, suku bunga sepenuhnya belum mengacu kepada bunga maksimal yang ditetapkan LPS, masih ada deposan yang diberikan jasa deposito di atas bunga yang ditetapkan

15. SIMPANAN BANK LAIN

Jumlah saldo Simpanan Bank Lain, dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
- PD. BPR Berkah	243.805.338	176.788.966
- ABP - Deposito Bank Lain 1 Bulan	5.000.000.000	5.350.000.000
- ABP - Deposito Bank Lain 3 Bulan	5.000.000.000	5.150.000.000
- ABP - Deposito Bank Lain 6 Bulan	13.700.000.000	22.400.000.000
- ABP - Deposito Bank Lain 12 Bulan	2.000.000.000	-
Jumlah	25.943.805.338	33.076.788.966

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

16. PINJAMAN DITERIMA

	2025	2024
Jumlah saldo pinjaman diterima dengan rincian sbb. :		
- PT. Bank Oke Indonesia	-	4.687.500.000
- PT. Bank Jabar Banten Tbk.	858.249.963	15.270.070.797
- PT. Bank J Trust Indonesia, Tbk.	-	636.979.321
- PT. BPR Athena Surya Prima	1.343.652.215	920.233.155
- PT. BPR Supra Antarpersada	2.209.939.730	5.684.975.108
- PT. BPR Artha Sukapura	1.311.159.000	3.389.017.000
- PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera	6.228.045.857	9.286.336.278
- PT. BPR Daya Lumbung Asia	5.196.879.392	7.556.136.362
- PT. Sarana Multigriya Financial	-	3.711.099.922
- PT. BPR Jombang	14.083.332.818	18.111.110.316
- PT. BPR Prima Dadi Artha	2.888.888.871	5.555.555.547
- PT. BPR Delta Artha	12.222.222.216	7.222.222.220
- PT. BPR Xen	816.666.667	2.500.000.000
- PT. BPR Jatim	37.777.777.778	-
Jumlah pinjaman diterima lainnya	84.936.814.507	84.531.236.026
Biaya Transaksi	(648.772.445)	(534.311.583)
Jumlah Pinjaman Diterima	84.288.042.062	83.996.924.443

Keterangan Pinjaman Diterima :

- Pinjaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Barat (Persero), Tbk Nomor 055/CKB.KOM/SPPK/2020 tanggal 05 Juni 2020 plafond sebesar Rp20.000.000.000,- jenis fasilitas kredit KMK *installment*, sifat kredit : *Non Revolving*, Jangka waktu 67 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% p.a efektif dengan biaya provisi 0,5%.
- Pinjaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Barat (Persero), Tbk Nomor 026/KBN-KOM/SPPK/2021 tanggal 15 April plafond sebesar Rp20.000.000.000,- jenis fasilitas kredit KMK *installment*, sifat kredit *Non Revolving*, Jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% p.a efektif dengan biaya provisi 0,5%.
- Pinjaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Barat (Persero), Tbk Nomor 019/DKM-KM2/SPPK/2022 tanggal 14 Desember 2022 plafond sebesar Rp30.000.000.000,- jenis fasilitas kredit KMK *installment*, sifat kredit *Non Revolving*, Jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10,25% p.a efektif dengan biaya provisi 0,5%.
- Pinjaman PT BPR Artha Sukapura Nomor 100.111.000002 tanggal 11 Juli 2023 plafond sebesar Rp6.000.000.000 jenis fasilitas kredit KMK korporasi bank lain, jenis kredit Modal Kerja, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% *term loan* dengan biaya provisi 1%.
- Pinjaman PT BPR Athena Surya Prima Nomor 035/PK/XI/2024 tanggal 13 November 2024 plafond sebesar Rp1.000.000.000 jenis fasilitas kredit Modal Kerja UMKM (usaha BPR), jenis kredit Modal Kerja, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 9,5% efektif p.a dengan biaya provisi 0,5%.
- Pinjaman PT BPR Daya Lumbung Asia Nomor 0008/BPR-DLA/KREDIT/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 plafond sebesar Rp5.000.000.000 jenis fasilitas kredit Kredit *Linkpage*, jenis kredit Modal Kerja, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 5,78% *term loan* dengan biaya provisi Rp25.000.000.
- Pinjaman PT BPR Jombang Nomor 900/623/415.51/2023 tanggal 11 Juli 2023 plafond sebesar Rp15.000.000.000 jenis fasilitas kredit Pinjaman Lembaga Keuangan (PLK), jenis kredit Modal Kerja BPR, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% efektif dengan biaya provisi 0,5%.
- Pinjaman PT BPR Jombang Nomor 900/147/415.51/2024 tanggal 22 Februari 2024 plafond sebesar Rp5.500.000.000 jenis fasilitas kredit Pinjaman Lembaga Keuangan (PLK), jenis kredit Modal Kerja BPR, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% efektif dengan biaya provisi 0,5%.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

16. PINJAMAN DITERIMA (Lanjutan)

8. Pinjaman PT BPR Jombang Nomor 900/701/415.51/2024 tanggal 22 Agustus 2024 plafond sebesar Rp7.000.000.000 jenis Sindikasi (Pembiayaan Bersama), jenis kredit Modal Kerja BPR, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% efektif dengan biaya provisi 0,5%.
9. Pinjaman PT. BPR Prima Dadi Artha Nomor PK/PDA-SRP/LKG/0124-001 tanggal 31 Januari 2024 plafond sebesar Rp8.000.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 7.75% efektif dengan biaya provisi Rp120.000.000.
10. Pinjaman PT. BPR Supra Antarpersada berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Linkpage No 157 tanggal 28 Juli 2023 plafond sebesar Rp10.000.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 30 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 11% efektif.
11. Pinjaman PT. Xen berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 12 tanggal 23 Desember 2024 plafond sebesar Rp2.500.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% efektif per tahun dengan biaya provisi kredit Rp25.000.000.
12. Pinjaman PT. Xen berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 11 tanggal 25 Juli 2025 plafond sebesar Rp1.400.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% efektif per tahun dengan biaya provisi kredit Rp14.000.000.
13. Pinjaman PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 8 tanggal 10 September 2024 plafond sebesar Rp10.000.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 11% efektif per tahun dengan biaya provisi kredit Rp50.000.000.
14. Pinjaman PT BPR Jatim (Perseroda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 476/Linkpage/krd.BPR/Cab. Sby/XII/2025 plafond sebesar Rp10.000.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2025 s/d 22 Desember 2028 dengan tingkat suku bunga sebesar 10% efektif per tahun dengan biaya provisi 1%.
15. Pinjaman PT. BPR Delta Artha berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 28 Februari 2024 plafond sebesar Rp10.000.000.000 jenis kredit Modal Kerja *Linkpage*, Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PKS dengan tingkat suku bunga sebesar 10% efektif per tahun dengan biaya provisi kredit Rp50.000.000.

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pascakerja yang disajikan dalam neraca, perubahan kewajiban selama setahun dan beban - beban yang diakui dalam laporan laba - rugi perusahaan:

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	2025	2024
- Saldo awal tahun	1.842.646.183	1.842.646.183
- Penambahan	-	-
- Pengurangan (Dibagikan)	(1.719.844.746)	-
Saldo akhir tahun	122.801.437	1.842.646.183
- Imbalan Pasca Kerja, luran dan Manfaat Pasti	122.801.437	1.842.646.183
- Imbalan Pengabdian	-	-
Saldo akhir tahun	122.801.437	1.842.646.183

Beban imbalan pascakerja diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan ke dalam fungsi beban berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja.

Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja untuk tahun 2025 dan 2024 yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dengan asumsi perhitungan pencadangan dengan menggunakan metode *projected unit credit*, dengan asumsi sebagai berikut:

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Tingkat Diskonto	:	8%
Tingkat Kenaikan Gaji	:	17,75%
Usia Pensiun Normal	:	56
Tingkat Kematian karyawan	:	TMI 3
Tingkat Pengunduran diri	:	Usia
		Tingkat
		15 - 29 / 22%
		30 -34 / 16%
		35 -39 / 19%
		40 - 50 / 28%
		51 - 56 / 15%

Berdasarkan SAK EP Bab 28 tentang "Imbalan Kerja" entitas perusahaan diwajibkan untuk membentuk Cadangan Imbalan Kerja. Pengakuan kewajiban tersebut di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003 yang merupakan liabilitas imbalan pasti dan PP No.35 untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 (6) UU No.11/2020 mengenai Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan. PT BPR Serang (Perseroda) menghitung kewajiban imbalan kerja dengan metode estimasi pencadangan atas karyawan yang akan memasuki usia pensiun / purna bakti.

PT BPR Serang (Perseroda) belum menggunakan jasa aktuaris independen dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. PT BPR Serang (Perseroda) telah mengikutsertakan program JHT untuk seluruh karyawan tetap pada BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah premi asuransi per 31 Desember 2025 yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp8.705.727.445 sebanyak 230 pegawai dan BPR juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Jumlah premi asuransi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun tersebut adalah sebesar Rp2.582.764.420 sebanyak 211 pegawai.

Penentuan Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban imbalan pascakerja dihitung berdasarkan proyeksi internal terhadap 211 pegawai yang terdaftar dalam program DPLK dan program JHT BPJS Ketenagakerjaan mencakup 230 pegawai. Manajemen berpendapat bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja). Pemenuhan kewajiban ini secara konsisten dilakukan melalui setoran iuran rutin ke program DPLK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

18. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Jumlah saldo kewajiban lain-lain dengan rincian sbb. :		
- Penerimaan Setoran Lain	24.012.922.426	23.836.914.861
- Dana Sosial	107.934.069	2.900
- Lain - Lain	5.592.382.084	-
Jumlah Kewajiban Lainnya	29.713.238.579	23.836.917.761

19. MODAL

	2025	2024
Jumlah saldo kepemilikan modal dengan rincian sbb. :		
- Modal Dasar	100.000.000.000	100.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(51.560.521.050)	(51.560.521.050)
Jumlah Modal Yang Telah Disetor	48.439.478.950	48.439.478.950

Terakhir terdapat perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Nomor 35 tanggal 21 November 2024 Notaris Lia Shinta Dewi, SH., M.Kn di Kota Seran Tentang Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT Bank Perekonomian Rakyat Serang disingkat "PT BPR Serang".

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

19. MODAL (Lanjutan)

Telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0075454.AH.01.02. Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perusabhan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Serang dan Keputusan Kepala OJK Tasikmalaya Nomor S-15/KO.1141/2024 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru PT Bank Perkreditan Rakyat Serang (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Serang (Perseroda) Tanggal 18 Desember 2024. Berikut Komposisi Modal dan Pemegang Saham Per 31 Desember 2025:

	Modal Dasar	Presentase	Disetor	Belum Disetor
Pemerintah Kab. Serang	55.000.000.000	53,16%	27.588.930.000	27.411.070.000
Pemerintah Provinsi Banten	15.000.000.000	0,00%	15.000.000.000	-
Pemerintah Provinsi Jabar	15.000.000.000	22,40%	3.450.548.950	11.549.451.050
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	15.000.000.000	24,44%	2.400.000.000	12.600.000.000
	100.000.000.000	100,00%	48.439.478.950	51.560.521.050

20. SALDO LABA

	2025	2024
- Cadangan		
- Cadangan Umum	20.385.918.679	19.182.648.114
- Cadangan Tujuan	17.685.179.773	16.481.909.208
Jumlah Cadangan	38.071.098.452	35.664.557.321
- Laba (Rugi) Belum Ditentukan Tujuannya		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.485.884.678	12.032.705.641
Saldo Laba	44.556.983.129	47.697.262.962

21. PENDAPATAN BUNGA

Jumlah pendapatan bunga tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Bunga Bank

- Giro	293.706.055	922.575.818
- Tabungan	789.796.588	422.671.895
- Deposito Berjangka	605.139.650	387.809.613
Jumlah Pendapatan Bunga Dari Bank Lain	1.688.642.292	1.733.057.326

Pihak Ketiga Non Bank

- Pendapatan Bunga Kredit	82.488.520.775	92.779.028.925
Sub Jumlah	82.488.520.775	92.779.028.925
Jumlah Pendapatan Bunga	84.177.163.067	94.512.086.251

Pendapatan Provisi :

- Pendapatan Provisi Kredit	3.764.436.547	5.232.056.028
Jumlah Pendapatan Provisi	3.764.436.547	5.232.056.028

22. BEBAN BUNGA

Jumlah beban bunga yang dibayarkan , dengan rincian sbb. :

Bunga Bank Lain

- Beban Bunga Pinjaman dari Bank Lain	2.101.963.334	10.901.531.637
- Beban Bunga Simpanan dari Bank Lain	9.456.238.885	2.058.021.573
Jumlah Bunga Pinjaman yang Diterima Lainnya	11.558.202.219	12.959.553.210

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

22. BEBAN BUNGA (Lanjutan)

	2025	2024
Beban Bunga Tabungan		
- Beban Bunga Tabungan	4.912.049.259	4.670.492.168
- Beban Bunga Deposito Berjangka	6.197.175.428	5.999.663.231
- Beban Premi Penjaminan Simpanan	689.958.927	639.717.358
Beban Bunga Lainnya	908.308.313	762.910.997
Jumlah Beban Bunga Tabungan	12.707.491.927	12.072.783.754
Beban Provisi Pinjaman	574.329.139	578.204.421
Jumlah Beban Bunga	24.840.023.285	25.610.541.384

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Jumlah pendapatan operasional lainnya yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut :		
- POL - Pemulihan PPAP Kredit	11.827.760.857	486.350.605
- POL - Penerimaan Kredit Hapus Buku	2.312.817.453	1.246.880.234
- POL - Pendapatan Denda Break deposito	-	2.662.329
- POL - Pendapatan Administrasi Tutup Rekening	250.000	462.142
- POL - Pendapatan Administrasi Ganti Buku	-	398.770
- POL - Administrasi Tabungan	1.240.029.480	1.258.768.547
- POL - Biller Fee	8.067.947	9.064.255
- POL - Lainnya	833.706.122	864.433.633
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	16.222.631.858	3.869.020.514

24. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN

	2025	2024
Jumlah beban penyisihan kerugian dan penyusutan, dengan rincian sebagai berikut :		
Bunga Penyisihan Kerugian		
- Beban Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain	468.260.630	426.582.792
- Beban PPAP Kredit Yang Diberikan	-	7.729.194.465
- Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	16.678.601.300	-
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	17.146.861.930	8.155.777.257

25. BEBAN PEMASARAN

	2025	2024
Jumlah beban pemasaran, dengan rincian sebagai berikut :		
- Promosi & Iklan	446.565.122	477.113.990
Jumlah Beban Pemasaran	446.565.122	477.113.990

26. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2025	2024
Jumlah beban administrasi dan umum, dengan rincian sebagai berikut:		
Beban Asuransi Uang:		
- Beban Asuransi Cash In Safe	90.110.135	66.853.688
- Beban Asuransi Cash In Cashier Box	26.477.507	24.913.602
Beban Asuransi Cash In Transit	323.091.254	346.174.061
Jumlah	439.678.896	437.941.351

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

	2025	2024
Beban Asuransi Gedung, Kendaraan dan Kesehatan:		
- Beban Premi Asuransi Gedung Kantor	96.554.120	88.247.163
- Beban Premi Asuransi Kendaraan	88.239.733	92.036.232
- Beban Premi Asuransi Pensiunan Pegawai (DPLK)	-	263.000
- Beban Premi Asuransi Kesehatan	235.097.886	127.918.507
Jumlah	419.891.739	308.464.902
<u>Beban Pendidikan</u>		
- Beban Pendidikan	1.304.678.401	1.208.073.860
Jumlah	1.304.678.401	1.208.073.860
<u>Beban Sewa</u>		
- Beban Sewa Kantor	393.129.667	425.198.652
- Beban Sewa Kendaraan	428.600.000	329.870.000
- Beban Sewa Lainnya	1.097.149.432	1.371.542.709
Jumlah	1.918.879.099	2.126.611.361
<u>Beban Honorarium Tenaga Ahli:</u>		
- Beban Honorarium Tenaga Akuntan	95.000.000	66.600.000
Jumlah	95.000.000	66.600.000
<u>Beban Pajak-Pajak:</u>		
- Beban Pajak PBB	6.850.557	6.349.191
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	62.797.400	50.062.000
- Beban Pajak Lainnya	18.037.648	930.959
Jumlah	87.685.605	57.342.150
<u>Biaya Pemeliharaan</u>		
- Beban Gedung Kantor	247.235.701	92.489.400
- Beban Kendaraan Bermotor	32.051.233	15.223.300
- Beban Inventaris Kantor	65.552.110	76.402.300
- Beban Suku Cadang Kendaraan	31.737.088	34.837.442
- Beban Perbaikan Peralatan Kantor	49.108.000	46.018.500
- Beban Service Kendaraan	206.927.371	219.909.712
- Beban Lainnya	-	5.893.500
Jumlah Beban Pemeliharaan	632.611.503	490.774.154
<u>Beban Barang dan Jasa Pihak Ketiga:</u>		
- Beban Alat Tulis Menulis	209.088.265	261.229.480
- Beban Pemakaian Barang Cetak	531.259.154	467.112.300
- Beban Kirim Surat/Barang/Dokumen	3.073.160	2.904.500
- Beban Materai/Perangko	15.252.499	23.609.900
- Beban Listrik	418.566.037	427.617.900
- Beban Air dan Gas	8.865.900	7.802.100
- Beban Telepon/Telex/Fax	779.101.962	846.364.660
- Beban Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	865.333.433	761.662.824
- Beban Keperluan Kantor	167.053.126	92.709.813
- Beban Langganan Majalah Koran	16.128.000	16.757.000
- Beban Administrasi Bank	158.834.116	184.435.296
- Beban Konsumsi/Makan Dinas	394.911.642	329.487.141
- Beban Seragam Karyawan	619.650.000	597.533.999
- Beban Honorarium/Jasa Notaris	17.000.000	30.400.000
Jumlah Barang Dan Jasa Pihak Ketiga Pindahan	4.204.117.294	4.049.626.913

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

	2025	2024
Beban Barang dan Jasa Pihak Ketiga (Lanjutan):		
- Beban Pemeliharaan dan Setup Kantor	450.000	-
- Beban Pengembangan IT	7.336.252	4.425.720
- Beban Perjalanan Dinas	522.243.235	555.145.466
- Beban Lainnya	659.514.880	634.553.597
Jumlah Barang Dan Jasa Pihak Ketiga	5.393.661.661	5.243.751.696
Total Beban Umum dan Administrasi	10.292.086.903	9.939.559.475

27. BEBAN TENAGA KERJA

	2025	2024
Merupakan Beban Tenaga Kerja , dengan rincian sebagai berikut:		
- Beban Gaji Direksi dan Karyawan	8.252.951.331	8.393.388.001
- Beban Tunjangan Jabatan / Honor	1.992.384.800	1.987.710.229
- Beban Tunjangan Transport	1.518.525.000	1.574.168.500
- Beban Tunjangan Jamsostek	1.850.791.456	1.954.404.096
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	1.010.795.040	982.364.368
- Beban Tunjangan Natura	2.404.248.272	2.438.301.433
- Beban Tunjangan Uang Makan	1.792.943.625	1.846.541.750
- Beban Tunjangan Kehadiran	7.392.767.374	7.383.015.846
- Beban Tunjangan Hari Raya	3.755.304.304	3.564.358.311
- Beban Gaji Lainnya	2.289.401.315	5.116.398.812
- Beban Uang Lembur	493.229.800	468.889.535
- Beban Perawatan Kesehatan/Check	393.343.697	277.350.520
- Beban Iuran Dana Pensiun	624.857.749	900.000.000
- Beban Tunjangan Lainnya	1.460.578.964	331.153.670
- Beban Honor Dewan Komisaris	663.419.570	1.107.907.834
- Beban Tunjangan Komisaris	295.160.274	427.380.432
Jumlah	36.190.702.569	38.753.333.337

28. BEBAN PENYUSUTAN

	2025	2024
Merupakan Beban Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:		
- Beban Penyusutan Bangunan	453.215.851	456.898.295
- Beban Penyusutan Kendaraan	320.884.898	312.434.379
- Beban Penyusutan Inventaris	725.134.060	848.392.043
Jumlah	1.499.234.809	1.617.724.717

29. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Merupakan Beban Operasional Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:		
- Beban Rapat	-	28.500.000
- Beban Keamanan	72.250.000	59.962.500
- Beban Sumbangan	6.500.000	-
- Beban Relasi Direksi	238.998.600	238.998.600
- Beban Penagihan Kredit	235.029.486	339.130.657
- Beban Hotel/Penginapan Tamu	230.557.834	214.362.672
- Beban Fotocopy	13.872.000	19.413.900
- Beban Perizinan dan Sertifikat Lain	-	1.500.000
Jumlah Pindahan	797.207.920	901.868.329

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

29. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (Lainnya)

	2025	2024
- Beban Promosi atau Iklan	214.425.459	211.626.989
- Beban Denda Sanksi Adminitrasi	54.650.000	-
- Beban Jamuan Tamu	158.085.259	129.577.053
- Beban Souvenir/Bunga/Kartu	1.000.000	1.940.843
- Beban Sumbangan Lainnya	11.520.123	-
- Beban Insentif	1.167.666.878	838.895.358
- Beban Iuran OJK	225.011.515	255.612.271
- Beban Voucher Handphone Kantor	-	150.335
- Beban Dapur Kantor	351.462.348	356.595.560
- Beban Parkir	12.466.500	13.339.000
- Beban Administrasi Bank	139.017.354	239.656.085
- Beban Operasional Lainnya	610.351.403	475.246.038
Jumlah	3.742.864.759	3.424.507.861

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah pendapatan (beban) non operasional lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Non Operasional

- Pendapatan Selisih Kas Lebih	364.407	363.495
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	6.494.247	1.438.572.278
Jumlah Pendapatan Non Operasional	6.858.654	1.438.935.773

Beban Non Operasional

- Beban Bingkisan Hari Raya	472.044.000	442.377.850
- Beban Iuran Perbarindo	29.000.000	26.200.000
- Beban Sumbangan Duka Cita	16.050.000	30.355.473
- Beban Sumbangan	27.964.392	100.044.308
- Beban Denda/Sanksi Administrasi	1.320.000	-
- Beban Non Operasional Lainnya	1.088.229.679	733.613.391
Jumlah Beban Non Operasional	1.634.608.071	1.332.591.022

Total Pendapatan (Beban) Non Operasional

(1.627.749.417)	106.344.751
------------------------	--------------------

31. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antar laba komersil sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Laba Sebelum Pajak

- Pajak Kini	8.601.177.000	3.708.243.880
Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan	8.601.177.000	3.708.243.880

Laba Sebelum Pajak

8.378.142.678 **15.740.949.521**

Koreksi Fiskal Tambah (kurang) beda tetap :

- Pendapatan Jasa Deposito	(605.139.650)	-
- Pendapatan Jasa Tabungan	(789.796.588)	-
- Beban Sumbangan	62.034.515	132.340.624
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	1.010.795.040	982.364.368
- Beban Bingkisan Hari Raya	472.044.000	-
- Beban Denda dan Sanksi	55.970.000	-
Jumlah Pindahan	205.907.317	1.114.704.992

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

31. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

				<u>2025</u>	<u>2024</u>
-	Beban Jamuan Tamu			-	-
-	Beban Souvenir/Bunga/Kartu			1.000.000	-
-	Beban Hotel/Penginapan Tamu			-	-
-	Beban Langganan Majalah Koran			16.128.000	-
	Jumlah			223.035.317	1.114.704.992
	Penghasilan Kena Pajak			8.601.177.995	16.855.654.513
	Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan			8.601.177.000	16.855.654.000
	Volume Pendapatan			104.171.090.125	105.052.098.565
		Tahun 2025	Tahun 2024		
	Tarif Tanpa Fasilitas				
	22%	8.601.177.000	16.855.654.000	1.892.258.940	3.708.243.880
	Jumlah Pajak Kini			1.892.258.940	3.708.243.880
	Jumlah Pajak Kini Dibulatkan			1.892.258.000	3.708.243.880
-	PPH Pasal 25 yang telah disetor			980.000.000	844.000.000
-	Kekurangan (Kelebihan) PPH Pasal 29			912.258.000	2.864.243.880

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2025 dan 2024, dihitung berdasarkan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Undang - Undang No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

BPR memiliki eksposur terhadap risiko yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat di bawah ini:

- Risiko kredit;
- Risiko Operasional;
- Risiko Kepatuhan; dan
- Risiko Likuiditas.

1. Risiko Kredit

Salah satu risiko usaha yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat adalah Risiko Kredit atau *Credit Risk* yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan - kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination, dan persetujuan kredit, penetapan pricing, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. *Credit Risk Policy* secara *bankwide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis dan Entitas Anak dalam menjalankan aktivitas perkreditan. *Credit Risk Policy* direview minimal setahun sekali, untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini.

Sistem pengukuran Risiko kredit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Karakteristik setiap jenis transaksi Risiko Kredit;
2. Jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, khususnya di lingkungan BPR;
3. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi; dan
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional atau historikal.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

1. Risiko Kredit (Lanjutan)

Manajemen BPR dapat melakukan pendendalian Risiko kredit sebagai berikut :

1. Pemisahan Fungsi, Kegiatan pemberian fasilitas kredit hingga pengelolaan Risiko dilakukan oleh bagian yang terpisah sesuai fungsinya, misalnya bagian analisa, memutus serta penagihan kredit macet dilakukan oleh fungsi yang berbeda;
2. Pemantauan Kredit, Pemantauan atas portfolio kredit BPR dilakukan dengan membuat sejumlah laporan secara rutin kepada Manajemen;
3. Persetujuan Kredit, Pemberian kredit harus melalui persetujuan dari pejabat kredit sesuai dengan tingkat otoritas yang dimilikinya; dan
4. Pengendalian Fisik Agunan, Agunan kredit dikelola oleh unit yang berbeda sesuai fungsinya termasuk proses penyimpanannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

2. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari Bank. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan manajemen Risiko operasional adalah meningkatkan pengawasan operasional melalui pengumpulan data kerugian/kejadian Risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas operasional, selain itu data kerugian/kejadian digunakan untuk memperbaiki proses operasional pada aktivitas pekerjaan masing-masing, dan kemudian mengukur tingkat Risiko yang dihitung berdasarkan data tersebut dengan proses sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Operasional;
2. Pengukuran Risiko Operasional;
3. Pemantauan Risiko Operasional;
4. Pengendalian Risiko Operasional; dan
5. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan Risiko yang disebabkan BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya Risiko kepatuhan melekat pada Risiko BPR yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Risiko kredit terkait dengan ketentuan, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan POJK 1 Tahun 2024, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 dan Risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Risiko lain termasuk Risiko akibat kelemahan hukum. Kelemahan aspek hukum anatara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipatuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Pemantauan Risiko kepatuhan umumnya dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Manajemen Risiko, meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi Manajemen Risiko kepatuhan disetiap unit kerja dan melaporkan hasilnya kepada Direktur yang membidangi;
2. Melakukan analisis terhadap trend peningkatan atau penurunan Risiko kepatuhan termasuk tindakan dan upaya yang diperlukan dalam meminimalkan terjadinya kerugian yang lebih besar, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan BPR;
3. Melakukan evaluasi terhadap eksposur Risiko kepatuhan dan dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif sehingga dapat digunakan oleh pihak pengambil Keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan; dan
4. Pemantauan dilakukan terhadap posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per aktivitas fungsional oleh unit kerja terkait. Misalnya pemantauan atas kepatuhan terhadap Perjanjian Kredit, kepatuhan terhadap limit, dan lain-lain.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidak kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dipengaruhi, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan
- b. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Ketidakmampuan Bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkat risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek-aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Mengingat permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud diatas dapat memberikan dampak yang signifikan, maka Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Penerapan risiko untuk risiko likuiditas secara efektif paling kurang mencakupi:

- a. Pengawas aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penempatan limit manajemen risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

33. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasi dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan factor lainnya termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini. Hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Akun ini dipergunakan untuk mencatat perhitungan kewajiban penyisihan aset produktif yang dibentuk oleh BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Terhadap Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan khusus dan Kredit yang diberikan.

BPR menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas kredit yang diberikan.

Lihat catatan 2.g dan 7 yang mengungkapkan besarnya penyisihan penilaian kualitas aset dan penurunan nilai kredit.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

BPR menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas kredit yang diberikan.

Lihat catatan 2.f dan 8 yang mengungkapkan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

33. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (Lanjutan)

Penyusutan

BPR mengakui beban penyusutan asset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi asset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perseroan mereviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 2.h dan 9 Aset Tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

Imbalan Pasacakerja

PT BPR Serang (Perseroda) belum menggunakan jasa aktuaris independen dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. PT BPR Serang (Perseroda) telah mengikutsertakan program JHT untuk seluruh karyawan tetap pada BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah premi asuransi per 31 Desember 2025 yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp8.705.727.445 sebanyak 230 pegawai dan BPR juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Jumlah premi asuransi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun tersebut adalah sebesar Rp2.582.764.420 sebanyak 211 pegawai.

Penentuan Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban imbalan pascakerja dihitung berdasarkan proyeksi internal terhadap 211 pegawai yang terdaftar dalam program DPLK dan program JHT BPJS Ketenagakerjaan mencakup 230 pegawai. Manajemen berpendapat bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja). Pemenuhan kewajiban ini secara konsisten dilakukan melalui setoran iuran rutin ke program DPLK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Dan apabila besarnya imbalan pasca kerja ternyata lebih kecil dari pada jumlah yang terdapat dalam iuran Program DPLK maka selisihnya dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan SAK EP Bab 28 Tentang Imbalan Kerja Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan UU 13 tahun 2003 dan PP Nomor 35 tahun 2021 untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 (6) UU Nomor 11/2020 mengenai Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Pada saat karyawan berhenti kerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan menentukan formulasi tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Pembatasan terjadi jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a. Menunjukkan komitmen untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- b. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

33. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (Lanjutan)

Imbalan Pasacakerja (Lanjutan)

Penyelesaian program terjadi saat suatu entitas melakukan transaksi yang menghapus semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Perusahaan belum mengakui imbalan pasca kerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan *metode projected* unit dan mengakui keuntungan – kerugian aktuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi. Lihat catatan 2.q dan 17 pengakuan iuran Program DPLK PT BPR Serang (Perseroda).

34. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan POJK No. 49/POJK.02/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, yaitu tidak melebihi BMPK sebesar 10% dari modal Bank.

35. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SAK - ENTITAS PRIVAT

Laporan keuangan PT BPR Serang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Ini merupakan laporan keuangan tahunan pertama PT BPR Serang (Perseroda) yang disusun dengan menerapkan SAK EP.

Sebelumnya, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 (dan periode-periode sebelumnya), Perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Dalam mengadopsi SAK Entitas Privat pertama kali, Perusahaan menerapkan ketentuan berdasarkan Bab 35 SAK EP Tentang Ketentuan Transisi SAK Entitas Privat. Tanggal transisi Perusahaan adalah 1 Januari 2025. Perusahaan telah menyusun saldo awal SAK Entitas Privat pada tanggal transisi tersebut dengan:

1. Mengakui semua aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan oleh SAK Entitas Privat;
2. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau liabilitas jika SAK Entitas Privat tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
3. Melakukan reklasifikasi pos-pos yang diakui berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya (SAK - ETAP) namun memiliki tipe yang berbeda berdasarkan SAK EP;
4. Menerapkan SAK Entitas Privat dalam mengukur semua aset dan liabilitas yang diakui.

Adopsi SAK EP ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan andal mengenai posisi keuangan Perusahaan. Perubahan signifikan yang memengaruhi laporan keuangan Perusahaan meliputi:

1. Pajak Penghasilan (Pajak Tangguhan)
Berbeda dengan SAK ETAP yang hanya mengakui beban pajak kini, SAK EP mensyaratkan Perusahaan untuk mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset/liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya.
2. Instrumen Keuangan
Perusahaan kini mengklasifikasikan dan mengukur instrumen keuangan sesuai dengan prinsip SAK EP, termasuk penilaian penurunan nilai aset keuangan berdasarkan bukti objektif yang lebih komprehensif.
3. Penyajian Laporan Keuangan
Perusahaan telah melakukan reklasifikasi dan penyesuaian penyajian pada beberapa pos neraca dan laba rugi untuk mematuhi format yang disyaratkan oleh SAK EP.

b. PENYAJIAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 6.2.e dan 8.2.f, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan Pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp467.549.819.103 dan BPR membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp18.070.824.196. Ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK – EP).

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebagai area audit yang signifikan mengingat saldo akun tersebut mencapai 83,16% dari total aset, sehingga memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. BPR dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan berdasarkan model yang menggunakan kombinasi data internal dan eksternal serta melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk penggunaan asumsi dan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, area ini memerlukan perhatian audit yang lebih mendalam.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

35. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

b. PENYAJIAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) (Lanjutan)

BPR menghitung cadangan kerugian penurunan nilai *Metode Roll Rate* Konsep metode ini dengan cara mengukur probabilitas perpindahan (*roll*) kredit dari satu bucket keterlambatan ke bucket yang lebih buruk dalam jangka waktu tertentu. Bucket biasanya 0 hari (lancar), 1-30 hari (DPD1), 31-60 hari (DPD2), 61-90 hari (DPD3). Dasar perhitungan adalah data historis kolektibilitas berdasarkan seberapa besar peluang kredit yang saat ini di bucket tertentu akan bergeser ke bucket berikutnya hingga akhirnya masuk kategori default / *Non-Performing Loan* (NPL).

Kami melakukan prosedur-prosedur audit atas penyajian CKPN sebagai berikut :

- Kami memperoleh pemahaman atas perhitungan manajemen atas cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan;
- Secara sampel, menguji pengendalian yang relevan atas penentuan rating internal kredit sebagai basis identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau yang terdapat bukti objektif penurunan nilai;
- Menguji pengendalian umum dari Teknologi Informasi (TI) atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai serta pengendalian aplikasi TI atas kelengkapan dan keakuratan data;
- Menguji asumsi-asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara Metode Roll Rate Konsep metode ini dengan cara mengukur probabilitas perpindahan (*roll*) kredit dari satu bucket keterlambatan ke bucket yang lebih buruk dalam jangka waktu tertentu. Bucket biasanya 0 hari (lancar), 1-30 hari (DPD1), 31-60 hari (DPD2), 61-90 hari (DPD3). Dasar perhitungan adalah data historis kolektibilitas berdasarkan seberapa besar peluang kredit yang saat ini di bucket tertentu akan bergeser ke bucket berikutnya hingga akhirnya masuk kategori default / *Non-Performing Loan* (NPL).
- Menguji input data ke model cadangan kerugian penurunan nilai, secara sampel, untuk menilai keakuratan dan kelengkapannya;
- Membandingkan, secara sampel, data yang digunakan pada perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, dengan data yang tercatat di sistem perbankan utama BPR pada tanggal pelaporan;
- Secara sampel, melakukan perhitungan matematis ulang atas perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk memeriksa keakuratan nilai tercatat cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan;
- Menilai kecukupan pengungkapan terkait cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

c. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Jumlah tersebut merupakan saldo tagihan komitmen dan kontinjensi, dengan rincian sebagai berikut :

Aset Komitmen

- Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Belum Ditarik

Jumlah Aset Komitmen

Aset Kontinjensi

- Pendapatan Bunga (Kredit) Dalam Penyelesaian
- Aktiva Produktif yang dihapusbukukan

Jumlah Aset Kontinjensi

	2025	2024
	2.700.000.000	2.700.000.000
	2.700.000.000	2.700.000.000
	28.868.802.588	20.741.810.966
	46.750.906.308	48.925.624.873
	75.619.708.895	69.667.435.839

d. PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank dibentuklah Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3), yaitu sebuah institusi baru menggantikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dasar hukum pembentukan UP3 tersebut antara lain adalah:

- a. Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; dan
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tentang Pembentukan Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Umum.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

35. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

d. PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK (Lanjutan)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program penjaminan tersebut, pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) pemerintah menetapkan besarnya premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BPR telah membayar premi program penjaminan simpanan masing-masing sebesar Rp689.958.927 dan Rp639.717.358.

e. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dasar hukum Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU 2011 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Program APU dan PPT merupakan program dalam rangka penyempurnaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi bank perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi.

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. sumber daya manusia dan pelatihan.

Bank wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT paling lama 12 Bulan sejak diberlakukannya peraturan Bank Indonesia ini.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan tersebut.

PT BPR Serang (Perseroda) telah menyampaikan pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT dan menerapkannya dengan membentuk unit kerja yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi.

f. INFORMASI RATIO KEUANGAN BPR

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	21,68%	24,91%
2) Kualitas Aktiva Produktif		
- Ratio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	16,34%	11,89%
- Non Performing Loan (NPL) Gross	22,21%	15,64%
- Non Performing Loan (NPL) Net	18,39%	11,92%
3) Likuiditas Ratio		
- Loan to Deposit Ratio (LDR)	144,32%	157,01%
- Cash Ratio	23,59%	15,02%
4) Rentabilitas Ratio		
- Ratio BOPO	90,39%	84,91%
- Ratio Return to Asset (ROA)	1,48%	2,85%
- Net Interest Margin (NIM)	11,17%	13,39%

g. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan perjanjian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

35. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Lanjutan)

h. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

i. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
 REKAPITULASI DAFTAR AKTIVA TETAP KONSOLIDASI
 PER 31 DESEMBER 2025
 Dinyatakan dalam rupiah

No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Perolehan Tahun Lalu	Mutasi		Nilai Perolehan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu	Mutasi		Akumulasi Penyusutan Tahun Ini	Nilai Buku
			Penambahan	Pengurangan			Penambahan	Pengurangan		
Aet Tetap										
1	Tanah	3.643.871.350	-	-	3.643.871.350	-	-	-	-	3.643.871.350
2	Gedung Kantor	9.293.587.366	378.136.864	8.000.000	9.663.724.230	4.772.645.732	455.078.013	-	5.227.723.745	4.436.000.485
3	Kendaraan	3.206.055.000	293.200.000	-	3.499.255.000	2.526.497.977	320.884.896	-	2.847.382.873	651.872.127
4	Inventaris	6.297.657.417	598.509.075	5.688.750	6.890.477.742	4.504.146.723	722.789.638	-	5.226.936.361	1.663.541.381
Jumlah Aset Tetap		22.441.171.133	1.269.845.939	13.688.750	23.697.328.322	11.803.290.432	1.498.752.547	-	13.302.042.979	10.395.285.343
Aet Tidak Berwujud										
1	Program Software IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTIVA TETAP & INVENTARIS		22.441.171.133	1.269.845.939	13.688.750	23.697.328.322	11.803.290.432	1.498.752.547	-	13.302.042.979	10.395.285.343

INFORMASI RATIO KEUANGAN BPR
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
PER 31 DESEMBER 2025

Aspek CAMEL	Kondisi Per Aspek	
	Jumlah	Ratio
CAR (Capital Adequesy Ratio):		
1. Modal	75.591.552.836	21,68%
2. ATMR	348.644.644.446	
Asset Quality (KAP)		
1. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan	92.165.581	16,34%
2. Aktiva Produktif	563.901.907	
PPAP		
1. PPAP	18.326.235.066	100,00%
2. PPAPWD	18.326.235.066	
Rentabilitas/Earning		
1. ROA (return on asset)		
Laba disetahunkan	8.378.143	1,48%
Rata-rata total asset	566.759.143	
2. BOPO		
BO disetahunkan	94.158.339	90,39%
PO disetahunkan	104.164.231	
3. NIM (Net Interest Margin)		
Pendapatan Bunga Bersih disetahunkan	63.101.576	11,17%
Rata-Rata Total Aset Produktif	564.987.370	
Likuiditas		
1. Cash Ratio		
Aset Likuid	82.964.672	23,59%
Utang Lancar	351.667.368	
2. Loan Deposit Ratio (LDR)		
Kredit diberikan	467.549.819	144,32%
Total Dana Pihak Ke-3 bkn Bank	323.961.945	
Non-Performing Loan (NPL)		
1. NPL Bruto	105.056.379	22,21%
	472.992.126	
2. NPL Nett	86.985.555	18,39%
	472.992.126	

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG (PERSERODA)
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Per. 31 Desember 2025

No	Komponen	Nominal	CKPN	Nominal Setelah Dikurangi CKPN	Bobot Risiko	ATMR
1	Kas	4.524.892.000		4.524.892.000	0 %	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)			-	0 %	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yg diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yg bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit *)	287.799.488		287.799.488	0 %	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-		-	0 %	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan *)	-		-	15 %	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	90.909.780.384	255.410.870	90.654.369.514	20 %	18.130.873.903
7	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah *) a. Kredit kepada bank lain b. Kredit kepada pemerintah daerah c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah			-	20 %	-
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit *)			-	20 %	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yg memiliki sertipikat yg dibebani dengan hak tanggungan *)	262.459.483		262.459.483	30 %	78.737.845
10	Kredit kepada BUMN/BUMD *)			-	50 %	-
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) *)			-	50 %	-
12	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan *)	307.148.548.991		307.148.548.991	50 %	153.574.274.496
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia *)	5.302.427.185		5.302.427.185	50 %	2.651.213.593
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria *)	9.208.298.610		9.208.298.610	70 %	6.445.809.027
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia *)	1.914.841.386		1.914.841.386	70 %	1.340.388.970
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas *)	80.048.251.009		80.048.251.009	100 %	80.048.251.009
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet **) a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	68.819.500.149		68.819.500.149	100%	68.819.500.149
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	10.408.974.093		10.408.974.093	100 %	10.408.974.093
19	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal			-	100 %	-
20	Aset lainnya selain tersebut di atas	7.146.441.362		7.146.441.362	100 %	7.146.441.362
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum					348.644.464.446

Keterangan:

NO	URAIAN/KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
I	MODAL			
I.1	Modal Inti Utama			
	1.1.1 Modal Disetor	48.439.478.950	100%	48.439.478.950
	1.1.2 Cadangan Tambahan Modal	-		-
	1.1.2.1 Agio (Disagio)	-		-
	1.1.2.2 Modal Sumbangan	-		-
	1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas	-		-
	1.1.2.4 Cadangan Umum	20.385.918.679	100%	20.385.918.679
	1.1.2.5 Cadangan Tujuan	17.685.179.773	100%	17.685.179.773
	1.1.2.6 Laba Tahun - tahun lalu	-	100%	-
	1.1.2.7 Laba Tahun Berjalan Setelah Dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP			
	1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan	6.485.884.678	Paling tinggi 50% apabila Laba atau 100% apabila Rugi	3.242.942.339
	1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-	-		-
	1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-	-		-
	1.1.2.8 Pajak Tangguhan (deferred tax) -/-	-	100%	-
	1.1.2.9 Goodwill -/-	-	100%	-
	1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
	1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	50%	-
	1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	75%	-
	1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	-
	1.1.2.11 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
	1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-		-
	1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-		-
	1.1.2.12 Selisih Kurang antara CKPN dengan PPKA -/-			-
	1.1.2.12.1 Selisih Kurang antara CKPN dengan PPKA -/-	(16.320.790.978)	100%	(16.320.790.978)
	Sub Total Cadangan Tambahan Modal	-		24.993.249.812
	Jumlah Modal Inti Utama	-		73.432.728.762
		-		-
I.2	Modal Inti Tambahan	-	100%	-
		-		-
I.3	Jumlah Modal Inti (I.1+I.2)	-		73.432.728.762
		-		-
II	Modal Pelengkap			
	II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan Tertentu (paling tinggi sebesar 50 % dari modal inti)	-		-
	II.2 Surplus revaluasi aset tetap	-		-
	II.3 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Umum	-		-
	(paling tinggi sebesar 1,25 % dari ATMR)	2.158.824.074	Paling tinggi 1,25% dari ATMR	2.158.824.074
		-		-
	II.4 Jumlah Modal Pelengkap(II.1 + II.2 + II.3)	2.158.824.074	Paling tinggi 100% dari modal inti	2.158.824.074
III	JUMLAH MODAL (I.3+II.4)			75.591.552.836
	Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap			348.644.464.446
	ATMR			348.644.464.446
	Jumlah Modal	21,68%		-
	Rasio KPPMM (%) ATMR			-
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)			-
	Ratio Modal Inti (%)	21,06%		-
	Jumlah Modal Inti			-
	ATMR			-
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)			-
				-

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
dan Laporan Auditor Independen

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	i
Laporan Auditor Independen	ii-iv
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-35



jamkrida banten

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nizar
Alamat Kantor : Jalan Raya Pandeglang KM 04 No 99 Link. Karundang, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
Alamat Tinggal : Park View Residence Blok Y 17/28 RT 003 RW 014 Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten) menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Banten.
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Banten tanggal 31 Desember 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT Jamkrida Banten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola PT Jamkrida Banten yang baik.

Serang, 30 April 2026

PT JAMKRIDA BANTEN



Nizar
Direktur

PT. JAMKRIDA BANTEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00147/2.1353/AU.1/09/1439-1/1/IV/2026

Kepada Yth.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

Jl. Raya Pandeglang No.99 Lingk. Karundang Kel. Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang-Banten
42126

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami telah melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.e. dan Catatan 5 atas Piutang Reasuransi, Entitas menyajikan akun piutang reasuransi sebesar Rp 169.774.276.142. Sampai dengan tanggal laporan auditor, manajemen belum selesai melakukan rekonsiliasi atas data piutang reasuransi tersebut dengan pihak terkait sehingga terdapat perbedaan dengan data pendukung yang tersedia. Oleh karena itu, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo piutang reasuransi dan cadangan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan keuangan. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan atas data yang belum tervalidasi tersebut, cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang reasuransi tersebut diperkirakan sebesar Rp. 17.620.284.927,94,- dan atas cadangan tersebut laporan keuangan berpotensi mengalami penurunan laba serta dapat berubah secara proposional seiring dengan nilai atas hasil proses rekonsiliasi dan validasi data oleh manajemen. Sehingga kami tidak dapat menentukan dampak akhir yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Pembentukan ini mengacu pada PSAK 109 instrumen keuangan.



Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 16 Entitas menyajikan saldo liabilitas berupa premi reasuransi, kafalah ulang dan komisi mitra/ujroh sebesar Rp 87.444.439.171,-. Sampai dengan tanggal laporan auditor, data pendukung atas saldo liabilitas tersebut belum sepenuhnya memadai. Sehubungan dengan belum selesainya proses rekonsiliasi dengan pihak terkait, sehingga terdapat indikasi perbedaan dengan data yang tersedia. Oleh karena itu, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap saldo liabilitas tersebut serta akun terkait lainnya dalam laporan keuangan.

Kami meyakini bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami dengan pengecualian.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor opini 00146/2.1353/AU.1/09/1484-1/1/IV/2025 pada tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RONI PUPUNG**

Izin Usaha : KMK RI No. 1258/KM.1/2021

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RONI PUPUNG**

Pupung Heru Sriwulandaru, Ak.,CPA
NRAP AP.1439



Jakarta, 30 April 2026

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.c, 3.	57.079.896.545	43.150.840.757
Investasi Lancar	2.f, 4.	38.216.822.441	36.131.207.179
Piutang Reasuransi / Penjaminan Ulang / Kafalah Ulang	2.e, 5.	169.774.276.142	88.204.290.848
Pendapatan Yang Akan Diterima	6.	120.902.005	495.546.795
Biaya Dibayar Dimuka	2.m, 7.a.	74.362.010.817	75.889.656.383
Aset Lancar Lain-lain	8.	12.900.004	15.950.862
Jumlah Aset Lancar		339.566.807.953	243.887.492.824
Aset Tidak Lancar			
Investasi Tidak Lancar	2.f, 9.	32.540.695.099	33.306.929.806
Biaya Dibayar Dimuka	2.m, 7.b.	384.100.691.364	395.751.489.284
Aset Tetap			
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.4.639.372.872,- dan 2024 sebesar Rp.4.208.293.450,-)	2.g, 10.	3.850.204.624	4.097.157.147
Aset Tetap Tidak Berwujud			
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.962.886.663,- dan 2024 sebesar Rp.860.630.728,-)	2.h, 11.	293.887.676	374.143.611
Aset Pajak Tangguhan	2.u, 20.a.	7.466.459.587	2.893.868.007
Aset Tidak Lancar Lain-Lain	12.	2.481.364.829	2.122.085.528
Jumlah Aset Tidak Lancar		430.733.303.180	438.545.673.383
Jumlah Aset		770.300.111.133	682.433.166.207
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Klaim	2.n, 13.	82.681.686	-
IJP/IJK yang Ditangguhkan	14.a.	132.488.417.671	117.765.669.413
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	16.	87.444.439.171	40.007.675.262
Utang Pajak	2.u, 20.b.	5.504.866.154	130.183.007
Utang Lain Jangka Pendek	18.a.	13.179.997.136	10.295.471.691
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		238.700.401.817	168.198.999.373
Liabilitas Jangka Panjang			
IJP/IJK yang Ditangguhkan	14.b.	409.210.341.745	418.546.680.811
Titipan IJP ditangguhkan	15.	3.914.288.522	-
Cadangan Klaim	2.o, 17.	35.992.143.563	15.116.356.988
Utang Imbalan Pasca Kerja	2.v, 19.	2.697.316.263	2.116.430.293
Utang Lain Jangka Panjang	18.b.	776.699.783	461.333.479
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		452.590.789.875	436.240.801.571
Jumlah Liabilitas		691.291.191.693	604.439.800.944
Ekuitas			
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.a, 21.	56.500.000.000	56.500.000.000
Cadangan	2.p, 21.a.	18.121.010.460	12.860.818.146
Saldo Laba	LPE, 21.c.	4.387.908.980	8.632.547.118
Jumlah Ekuitas		79.008.919.440	77.993.365.263
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		770.300.111.133	682.433.166.207

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Catatan</i>	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah - Bersih	2.q, 22.	77.860.086.189	54.388.590.402
Beban Klaim - Bersih	2.r, 23.	(61.292.304.741)	(41.132.673.511)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH		16.567.781.449	13.255.916.892
Pendapatan Investasi	2.q, 24.	4.520.915.853	4.273.287.857
Beban Usaha	2.r, 25.	(19.314.508.212)	(19.421.128.003)
LABA (RUGI) USAHA		1.774.189.089	(1.891.923.255)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	26.	3.563.409.284	1.043.395.108
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5.337.598.374	(848.528.147)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
Kini	2.u, 20.c.	(4.758.820.552)	-
Tangguhan	2.u, 20.d.	4.572.591.580	(347.008.999)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(186.228.972)	(347.008.999)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		5.151.369.402	(1.195.537.146)
Penghasilan Komprehensif Lain	27.	194.133.416	237.943.308
LABA (RUGI) SETELAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		5.345.502.818	(957.593.838)

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2023		56.500.000.000	12.860.818.146	9.590.140.956	78.950.959.102
Rugi Tahun Berjalan 2024	LR	-	-	(957.593.838)	(957.593.838)
Saldo Per 31 Desember 2024		56.500.000.000	12.860.818.146	8.632.547.118	77.993.365.264
Cadangan Umum		-	2.397.535.239	(2.397.535.239)	-
Cadangan Tujuan		-	2.862.657.075	(2.862.657.075)	-
Dividen		-	-	(4.329.948.642)	(4.329.948.642)
Laba Tahun Berjalan 2025	LR	-	-	5.345.502.818	5.345.502.818
Saldo Per 31 Desember 2025		56.500.000.000	18.121.010.460	4.387.908.980	79.008.919.440

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan imbal jasa penjaminan (IJP)	187.748.410.785	38.818.110.002
Penerimaan klaim co-guarantee	1.374.499.889	-
Penerimaan klaim penjaminan ulang/reasuransi	53.487.684.448	3.825.366.148
Penerimaan operasional lainnya	61.092.349.474	16.995.345.979
Penerimaan non-operasional	11.747.115.735	-
Pembayaran IJP co-guarantee/IJP penjaminan ulang/premi	(19.688.776.917)	(18.580.443.878)
Pembayaran klaim kepada penerima jaminan	(140.045.052.961)	(31.304.064.370)
Pembayaran beban operasional lainnya	(6.897.403.900)	-
Pembayaran beban non operasional lainnya	(149.272.953)	-
Pembayaran operasional lainnya	(455.467.046)	(1.016.669.073)
Pengeluaran lainnya	(133.747.318.849)	-
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	14.466.767.705	8.737.644.808
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan hasil Investasi	19.755.043.304	579.398.060
Penerimaan penjualan aset tetap	1.550.454.000	-
Penerimaan dari aktivitas investasi lainnya	2.500.000.000	50.000.000
Penempatan investasi yang diperkenankan	(19.856.713.579)	(25.544.247.747)
Perolehan aset tetap	(156.547.000)	(432.607.136)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	3.792.236.725	(25.347.456.823)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran dividen	(4.329.948.642)	-
Pembayaran untuk aktivitas pendanaan lainnya	-	(8.568.560.988)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(4.329.948.642)	(8.568.560.988)
Kenaikan Penurunan Kas dan Setara Kas	13.929.055.788	(25.178.373.003)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	43.150.840.757	68.329.213.760
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	57.079.896.545	43.150.840.757

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Informasi Umum Perusahaan

a. Pendirian Perseroan

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten ("Perusahaan") dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 dan telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dari Notaris Rovandy Abdam, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27779.40.10.2014 tanggal 3 Oktober 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 7 Juli 2025 dari Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0143882 tanggal 25 Juli 2025.

Perusahaan telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-126/D.05/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten. Perusahaan juga telah mendapat izin pembentukan Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-249/NB.223/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Perusahaan beroperasi di Jalan Raya Pandeglang KM 04 Nomor 99 Lingk. Karundang, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Serang - Banten 42126.

b. Maksud dan Tujuan

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris, perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan dapat melaksanakan:

- 1 penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi Koperasi dan UMKM;
- 2 penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi dan UMKM;
- 3 penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan
- 4 penjaminan surat utang;
- 5 penjaminan transaksi dagang;
- 6 penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- 7 penjaminan bank garansi;
- 8 penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- 9 penjaminan letter of credit;
- 10 penjaminan kepabeanaan;
- 11 jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- 12 penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
- 13 penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan pendirian Perusahaan untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum yang terdapat di wilayah Banten. Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

c. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten yang dituangkan dalam Akta Notaris Yasarman, S.H., M.Kn. Nomor 04 tanggal 27 November 2025, susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Informasi Umum Perusahaan - Lanjutan

Dewan Komisaris :

Komisaris : Cep Jandi Anwar
Komisaris Independen : Fahri Muhammad

Direksi

Direktur Utama : Indriyanto Agus Wibowo
Direktur : Nizar

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Fajri Ali
Anggota : Zaenal Abidin Syuja'i

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan disajikan berdasarkan kas dan setara kas. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, hasil kegiatan usaha/operasi atau kinerja perusahaan, arus kas dan perubahan ekuitas perusahaan yang bermanfaat bagi manajemen dan kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Laporan keuangan perusahaan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan atau entitas disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Perusahaan menggunakan tahun kalender yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember sebagai tahun fiskal. Pisah batas (*cut off*) transaksi ditetapkan pada tanggal terakhir tahun fiskal. Laporan keuangan yang disusun untuk pihak lain (ekstern) yaitu OJK, Dewan Pengawas Perusahaan, Instansi lain sesuai dengan aturan yang berlaku, adalah laporan bulanan dan laporan tahunan, sedangkan untuk pihak manajemen (internal) perusahaan, disusun setiap akhir bulan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, dan deposito berjangka serta investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan tidak dijadikan jaminan kredit.

Deposito berjangka dan investasi jangka pendek likuid lainnya yang jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi kurang dari satu tahun dilaporkan sebagai investasi sementara, dan yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan dilaporkan sebagai investasi jangka panjang.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai margin deposit atas fasilitas *letter of credit* dan jaminan hutang bank atau jaminan suatu pekerjaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun disajikan sebagai kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dalam aset tidak lancar lainnya.

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual, dan indikator biaya.

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

d. Sewa Dibayar Dimuka

Sewa dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian jangka pendek dari biaya bayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan bagian jangka panjangnya disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

e. Piutang Co-Guarantee

Piutang *Co-guarantee* adalah suatu program penanggungan resiko klaim bersama antara perusahaan penjaminan kredit dengan perusahaan asuransi. Piutang *Co-guarantee* timbul akibat adanya kredit macet dari nasabah. Nasabah tidak bisa melakukan pembayaran atau kewajibannya kepada pihak Bank. Bank mengajukan klaim kepada perusahaan penjaminan untuk meminta ganti rugi atas kredit macet, lalu pihak perusahaan penjaminan melakukan klaim kepada pihak perusahaan

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut :

1. Aset Keuangan

Aset keuangan perusahaan diklasifikasikan berdasarkan tujuan perolehan dalam kategori sebagai berikut :

- i. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu, yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laba rugi. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai pendapatan bunga.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

f. Instrumen Keuangan - Lanjutan

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi estimasi penurunan nilai.

iii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut sampai dengan jatuh tempo, kecuali; (1) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (2) investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan (3) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

iv. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut sampai dengan jatuh tempo, kecuali; (1) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (2) investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan (3) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. Liabilitas Keuangan

i. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal, perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

4. Penurunan nilai wajar

Pada setiap tanggal akhir periode pelaporan, manajemen menelaah apakah terdapat bukti objektif suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

f. Instrumen Keuangan - Lanjutan

4. Penurunan nilai wajar - Lanjutan

i. Aset keuangan yang dicatat pada biaya diamortisasi

Manajemen menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik resiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Jika aset keuangan memiliki tingkat bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif yang berlaku. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

ii. Jika aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, jumlah data selisih antara biaya (dikurangi pembayaran pokok dan amortisasi) dan nilai wajar saat ini, dikurangi kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi, ditransfer dari defisiensi modal ke laporan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain . Pemulihan sehubungan dengan instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak hapus melalui laporan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

5. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

i. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika : (a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menertima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau (c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menertima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pembertan jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh perusahaan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

f. Instrumen Keuangan - Lanjutan

5. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan - Lanjutan

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan aktual. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi.

g. Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung pada aset tetap yang diperoleh serta biaya restorasi, jika ada. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian cicilan, biaya perolehan dicatat sebesar biaya tunai, selisih jumlah yang harus dibayar dengan biaya perolehan diakui sebagai beban bunga selama periode cicilan.

1. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap

a. Pembelian Aset Tetap Baru

Untuk perolehan aset tetap baru kapitalisasinya ditentukan berdasarkan daftar aset yang dapat dikapitalisasi yang ditetapkan SK Direksi tersendiri. Biaya-biaya lainnya yang terjadi akibat transaksi pembelian aset tetap dapat dikapitalisasi dan menambah harga perolehan aset sepanjang biaya tersebut relevan dan terkait langsung dengan aset tetap yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 20% dari harga perolehan aset yang bersangkutan.

2. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran pemeliharaan dan perbaikan aset tetap yang dapat dikapitalisasi ditentukan Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pengakuan beban penyusutan dihitung sejak tanggal perolehan aset tetap tersebut dengan ketentuan :

- Jika perolehan sebelum tanggal 15, beban penyusutan diakui 1 (satu) bulan pada bulan perolehan
- Jika perolehan setelah tanggal 15, beban penyusutan diakui pada bulan berikutnya

Pengakuan beban penyusutan tersebut dimasukkan setiap penyusunan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Masa Manfaat	Persentase
Kendaraan Bermotor	4 - 5 Tahun	20,00% - 25,00%
Perbaikan Gedung Kantor	3 - 20 Tahun	5,00% - 33,33%
Komputer dan Printer	4 Tahun	25,00%
Peralatan Kantor	4 - 8 Tahun	12,50% - 25,00%
Bangunan	20 tahun	5,00%

h. Aset Tetap Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tidak berwujud dalam bentuk program komputer diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa pemanfaatan program komputer tersebut.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

i. Biaya Tangguhan

Biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi dalam biaya tangguhan. Amortisasi dihitung berdasarkan manfaat ekonomis biaya tangguhan yang bersangkutan. Biaya tangguhan merupakan biaya renovasi bangunan milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang digunakan perusahaan sebagai kantor.

j. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

k. Imbalan Jasa Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan. Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) dimulai pada saat diterimanya nota bank dari Bank Pelaksana dan bukti transfer dari Nasabah yang bersangkutan (kecuali IJP yang dananya diperoleh dari subsidi atau dana hibah dari pemerintah, meskipun dananya belum cair dapat diakui sebagai pendapatan IJP apabila surat jaminan dari pemerintah yang berkaitan dengan pembayaran IJP sudah keluar), dan berakhir pada saat bukti pembukuan (penerimaan jasa jaminan) dibukukan.

l. Komisi/Fee Imbal Jasa Penjaminan (*Fee Based Income*)

Berupa komisi atau fee sebesar 10 % termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari nilai Imbalan Jasa Penjaminan, yang harus dibayar oleh PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda) kepada Bank Sumsel Babel. Komisi/fee imbal jasa penjaminan (*fee based income*) bank pelaksana diakui pada saat sertifikat penjaminan diterbitkan, dan diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat penjaminan. Komisi/fee imbal jasa penjaminan (*fee based income*) bank pelaksana yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai biaya dibayar dimuka.

m. Imbalan Jasa Penjaminan Ulang (*Co-guarantee*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Bab I Ketentuan Umum, Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau mitra *co-guarantee* dalam rangka kegiatan usaha penjaminan ulang. Beban *co-guarantee* diakui pada saat sertifikat penjaminan diterbitkan, dan diakui selama jangka waktu penjaminan serta dialokasikan berdasarkan periode penerbitan sertifikat penjaminan sesuai dengan PSAK 117 – Kontrak Asuransi. Beban *co-guarantee* yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai biaya dibayar dimuka.

n. Klaim/Hutang Klaim

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

n. Klaim/Hutang Klaim -Lanjutan

Hutang klaim merupakan hutang perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh perusahaan. Hutang klaim yang tercatat adalah hutang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Hutang klaim dinyatakan sebesar sisa saldo pinjaman, bunga dan denda yang macet yang menjadi tanggungan perusahaan. Hutang klaim yang timbul dibebankan pada cadangan klaim pada saat terjadinya dan disetujui.

o. Cadangan Klaim

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab II Kegiatan Usaha Pasal 22 Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan klaim paling sedikit 0,01 % (nol koma satu per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung oleh Lembaga Penjaminan.

p. Cadangan Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab II Kegiatan Usaha Pasal 10 ayat (1) Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan. (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.

q. Pendapatan

Seluruh pendapatan dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*), kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3.2, pendapatan bunga/investasi atas penempatan dana dengan pola konvensional dan pendapatan sewa dan servis dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*).

1. Pendapatan Bunga Investasi atas Penempatan Dana dengan Pola Konvensional

Pendapatan bunga investasi dicatat dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan perhitungan pendapatan bunga/investasi harian pada bulan berjalan. Dasar perhitungan hari untuk pisah batas atas akrual bunga deposito dan obligasi menggunakan pendekatan 1 (satu) tahun 365 hari untuk deposito dan 360 hari untuk obligasi.

2. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dan Pengembalian Imbal Jasa Penjaminan

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sebagai pendapatan apabila atas imbal jasa penjaminan (IJP) yang diterima telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) nya, dan disetujui oleh pihak penerima jaminan dan diterima uangnya (*cash basis*), kecuali untuk IJP yang dananya diperoleh dari subsidi atau hibah dari pemerintah, meskipun dananya belum cair dapat diakui sebagai pendapatan IJP apabila surat jaminan dari pemerintah yang berkaitan dengan pembayaran IJP sudah keluar dan telah diterbitkan SP-nya.

IJP yang telah diterima namun belum terbit SP atau telah terbit SP tetapi belum disetujui oleh pihak penerima jaminan, dikredit ke akun penampungan sementara jasa jaminan. Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang sama dengan saat penerimaannya di debit ke akun pendapatan imbal jasa penjaminan. Pengembalian IJP yang berada dalam tahun fiskal yang berbeda dengan saat penerimaannya di debit ke akun beban lain-lain pengembalian IJP.

r. Beban

Seluruh biaya diakui sebagai beban pada saat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran (*accrual basis*), kecuali beban klaim. Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan. Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan. .

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya ('entitas

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya)
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam definisi pihak-pihak berelasi, suatu entitas asosiasi termasuk entitas anak dari entitas asosiasi tersebut dan suatu ventura bersama termasuk entitas anak dari ventura bersama tersebut. Oleh karena itu, misalnya, entitas anak dari entitas asosiasi dan investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut merupakan pihak berelasi satu dengan yang lainnya.

Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi :

- a. Jumlah transaksi
- b. Jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:
 - i. persyaratan dan ketentuan, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk
 - ii. rincian garansi yang diberikan atau diterima
- c. penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
- d. beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

t. Investasi Jangka Panjang

Investasi yang sesuai dengan PMK nomor: 01/PMK.010/2018 pasal 4a mengenai penempatan investasi di luar deposito yaitu; surat berharga negara dan atau surat berharga syariah negara, investasi dalam bentuk surat berharga negara dan atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, obligasi korporasi, dan atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi, saham yang tercatat di bursa efek, reksadana atau reksadana syariah atau investasi dalam bentuk penyertaan langsung dalam penjaminan ulang.

u. Perpajakan

Pajak penghasilan kini adalah beban pajak penghasilan atas laba fiskal tahun berjalan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode lalu dicatat sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari atau dibayarkan kepada kantor pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku. Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Lanjutan

u. Perpajakan -Lanjutan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan tempore yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direview pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

v. Imbalan Kerja (*Employee Benefit*)

Imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan mencakup imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang (imbalan pasca kerja), sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah semua imbalan karyawan yang dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan pengakuan dan karyawan telah memberikan jasanya.

2. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja adalah imbalan jangka panjang yang akan diberikan kepada karyawan pada saat pemutusan kontrak kerja karena pensiun, atau berhenti bekerja, atau mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

w. Sumber Utama Ketidakpastian dan Estimasi

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi berjalan tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, diperlukan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi dan asumsi yang dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dari manajemen perusahaan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan tujuan yang diestimasi semula. Manajemen telah melakukan estimasi dan asumsi terhadap hal-hal yang dijelaskan berikut ini, dan pengungkapan tersebut dipandang telah memadai.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi berjalan tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, diperlukan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi dan asumsi yang dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dari manajemen perusahaan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan tujuan yang diestimasi semula. Manajemen telah melakukan estimasi dan asumsi terhadap hal-hal yang dijelaskan berikut ini, dan pengungkapan tersebut dipandang telah memadai.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *Lanjutan*

w. Sumber Utama Ketidakpastian dan Estimasi - *Lanjutan*

Masa manfaat aset tetap diestimasi sesuai dengan estimasi manfaat ekonomis aset tetap dapat digunakan dalam operasi perusahaan pada saat aset tetap diperoleh. Estimasi tersebut dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Pengaruh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap terhadap penyusutan, jika ada diperlakukan secara prospektif. Manajemen yakin bahwa semua aset tetap dapat dimanfaatkan selama estimasi masa manfaat ekonomisnya. Pada akhir periode pelaporan, manajemen melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap akibat berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, perkembangan teknologi dan lainnya.

Penurunan nilai terjadi bilamana nilai realisasi bersih aset tetap lebih rendah dari nilai pakai, dan penurunan tersebut, jika ada, diakui dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas :		
Kas Unit Konvensional	20.629.300	48.314.000
Kas Unit Usaha Syariah	15.077.800	24.291.000
Jumlah Kas	35.707.100	72.605.000
Bank		
Bank Umum	2.518.130.941	2.029.922.617
Bank Umum Syariah	14.090.971.247	1.577.296.706
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	2.163.181.677	4.160.518.890
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	2.264.976.810	1.348.101.726
Jumlah Bank	21.037.260.675	9.115.839.939
Deposito Berjangka		
Bank Umum	11.450.000.000	8.900.000.000
Bank Umum Syariah	3.450.000.000	3.450.000.000
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	18.075.000.000	18.075.000.000
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	3.500.000.000	3.550.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	36.475.000.000	33.975.000.000
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(468.071.230)	(12.604.182)
Jumlah Kas dan Setara Kas	57.079.896.545	43.150.840.757

- Deposito berjangka dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan dikelompokkan dalam kas dan setara kas. Tingkat bunga deposito berjangka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 8,04% - 2,10% dan 6,00% 2,50%.
- Perhitungan CKKE instrumen keuangan didasarkan pada *investment grading* pada tabel *time horizon default* , sehingga masing-masing instrumen memiliki klasifikasi sendiri atas risiko ekspektasi kerugiannya.

4. Investasi Lancar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Deposito Berjangka		
Bank Umum	800.000.000	600.000.000
Bank Umum Syariah	400.000.000	400.000.000
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	17.300.000.000	16.550.000.000
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	10.750.000.000	10.700.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	29.250.000.000	28.250.000.000
b. Reksadana		
PT Mandiri Manajemen Investasi	1.418.007.220	1.388.562.690
PT PNM Investment Management	4.684.901.158	4.253.769.489
PT MNC Asset Management	2.864.925.485	2.550.000.000
Jumlah Reksadana	8.967.833.864	8.192.332.179
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(1.011.423)	(311.125.000)
Jumlah Investasi Lancar	38.216.822.441	36.131.207.179

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4. Investasi Lancar -Lanjutan

- Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan dikelompokkan dalam investasi lancar.
- SBN yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dikelompokkan ke dalam investasi lancar.
- Tingkat bunga deposito berjangka dan SBN dalam kelompok investasi lancar adalah sebagai berikut:
- Perhitungan CKKE instrumen keuangan didasarkan pada *investment grading* pada tabel *time horizon default* , sehingga masing-masing instrumen memiliki klasifikasi sendiri atas risiko ekspektasi kerugiannya.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito Berjangka	8,14% - 2,90%	8,14% - 2,90%
SBN	8,125% - 5,47%	8,125% - 5,47%

5. Piutang Penjaminan Ulang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang penjaminan ulang	148.975.174.122	67.483.785.245
Piutang Cogar Klaim / Restitusi Jamkrida	14.194.122	-
Piutang kafalah ulang	20.300.400.159	20.026.018.274
Piutang Co-Guarantee	484.507.739	1.070.227.920
Dikurangi : Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	(375.740.590)
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang	169.774.276.142	88.204.290.848

- Piutang penjaminan ulang/kafalah ulang dan co-guarantee merupakan penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra reasuransi dan mitra co-guarantee atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

- Piutang Restitusi adalah piutang yang berasal dari *top up* kredit dari terjamin kepada penerima jaminan atau pelunasan lebih awal sehingga IJP yang telah dibayarkan kepada Jamkrida Banten yang masih memiliki sisa masa penjaminan dikembalikan sesuai dengan perhitunga yang tercantum dalam PKS masing-masing mitra.

- Piutang penjaminan ulang merupakan piutang terhadap PT. Nasional Reasuransi Indonesia sebesar Rp.148.975.174.122,-

- Piutang Kafalah Ulang merupakan piutang terhadap :

PT Best One Asia Reinsurance	20.026.018.274
PT Nasional Reasuransi Indonesia	274.381.885
Jumlah	20.300.400.159

- Piutang co-guarantee merupakan piutang terhadap PT Jamkrida Jawa Barat sebesar Rp.484.507.739
- Perhitungan CKKE instrumen keuangan dengan pendekatan Arus kas Masa Depan atau discounted cash flow (DFC), menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan yield pasar (PHEI), sehingga mencerminkan nilai kini dari arus kas yang diharapkan diterima.
- Entitas menyajikan saldo Piutang Reasuransi sebesar Rp 169.774.276.142. Sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, Entitas belum menyelesaikan rekonsiliasi dengan pihak reasuradur dan data pendukung yang tersedia belum sepenuhnya memadai, sehingga saldo yang disajikan masih mengandung ketidakpastian. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan atas data yang belum tervalidasi tersebut, cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang reasuransi tersebut diperkirakan sebesar Rp. 17.620.284.927,94,- dan atas cadangan tersebut laporan keuangan berpotensi mengalami penurunan laba serta dapat berubah secara material seiring dengan proses rekonsiliasi dan validasi data oleh manajemen, sehingga kami tidak dapat menentukan dampak akhir yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

6. Pendapatan Yang Akan Diterima

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bunga Deposito Yang Akan Diterima	-	71.289.068
Pendapatan Lainnya Yang Akan Diterima	59.189.186	50.148.894
Bunga Obligasi /SBN yg akan diterima	-	153.218.812
Pendapatan IJP yg akan diterima	-	36.290.209
Bagi Hasil Deposito Mudharabah Yang Akan Diterima	-	18.406.399
Pendapatan IJK Yang akan Diterima	61.712.819	77.458.788
Jumlah Pendapatan Yang Akan Diterima	120.902.005	406.812.170

Pendapatan lainnya yang akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Perusahaan, Tetapi belum diterima kasnya sampai akhir periode. Dalam akuntansi, ini dikenal sebagai pendapatan akrual (accrued revenue).

Piutang IJP/IJK merupakan hak perusahaan penjaminan untuk menerima pembayaran, tetapi kasnya belum diterima. Dicatat ketika jasa penjaminan sudah diberikan (akad sudah berjalan), tetapi pembayaran belum dilakukan oleh pihak terjamin atau lembaga penyalur.

7. Biaya Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Bagian Lancar		
Sewa dibayar dimuka	16.428.000	167.848.177
Asuransi gedung kantor	1.078.033	1.622.049
Asuransi kendaraan dibayar dimuka	8.941.019	8.831.141
Asuransi Case In Save, Intransit, dan Box	800.000	1.980.250
Biaya Perijinan	2.326.917	1.425.000
Iuran/Pungutan Assipindo	6.666.667	10.000.000
Beban dibayar dimuka lainnya	49.383.778	538.156.362
Akuisisi dibayar dimuka	17.016.699.200	16.093.005.965
IJP dibayar dimuka	54.830.716.371	52.559.678.175
Ujroh dibayar di muka	1.459.071.374	1.342.848.809
IJK Reas dibayar dimuka	-	4.182.854.699
IJK Cogar dibayar dimuka	969.899.459	981.405.754
Jumlah Bagian Lancar	74.362.010.817	75.889.656.383
b. Bagian Tidak Lancar		
Akuisisi dibayar dimuka	60.454.060.556	63.422.937.212
IJP dibayar dimuka	288.910.631.656	298.416.600.408
Ujroh dibayar di muka	4.252.732.975	3.936.625.889
IJK Reas dibayar dimuka	26.138.203.854	26.555.989.985
IJK Cogar dibayar dimuka	4.345.062.323	3.419.335.790
Jumlah Bagian Tidak Lancar	384.100.691.364	395.751.489.284
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	458.462.702.181	471.641.145.667

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

7. Biaya Dibayar Dimuka - Lanjutan

- IJP/IJK reasuransi dan co-guarantee, dan komisi dan ujroh dibayar di muka diakui selama jangka waktu Penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya sertifikat penjaminan.
- IJP/IJK reasuransi dan co-guarantee dibayar di muka merupakan pembayaran IJP/IJK kepada mitra reasuransi dan co-guarantee selama tahun berjalan yang akan menjadi tahun-tahun mendatang.
- Komisi dan ujroh dibayar di muka merupakan pembayaran komisi dan ujroh kepada bank penerima jaminan dan agen selama tahun berjalan dan tahun-tahun lalu yang akan menjadi tahun-tahun mendatang.
- Akuisisi dibayar dimuka merupakan biaya yang dibayarkan kepada mitra atas IJP yang didapatkan dari mitra berupa fee base income untuk mendapatkan kontrak penjaminan, tetapi manfaatnya mengikuti masa kontrak.

8. Aset Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perlengkapan alat tulis dan pemasaran	12.900.004	15.950.862
Jumlah Aset Lain-lain	12.900.004	15.950.862

9. Investasi Tidak Lancar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surat Berharga Negara (SBN)		
FR0059	9.023.774.625	5.556.528.030
FR0090	3.993.243.051	3.988.175.339
FR0081	-	2.001.125.000
PBS003	6.008.894.792	4.480.673.077
PBS017	-	1.508.069.358
ORI022	-	997.916.667
ORI021	-	998.862.070
ORI023T3	997.967.742	994.483.871
FR064	1.476.375.000	1.466.250.000
PBS032	992.178.571	1.464.151.786
Jumlah Surat Berharga Negara (SBN)	22.492.433.781	23.456.235.198
Giro		
Giro Bjb Syariah Cabang Braga	10.048.449.064	9.850.694.608
Jumlah Giro	10.048.449.064	9.850.694.608
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(187.745)	-
Jumlah Investasi Tidak Lancar	32.540.695.099	33.306.929.806

- SBN jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dikelompokkan ke dalam investasi tidak lancar.
- Investasi tidak lancar berupa SBN dikelompokkan ke dalam investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. SBN disajikan sebesar nilai perolehan diamortisasi.
- Tingkat bunga SBN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 7,00% - 4,90% dan 8,125% - 5,125%.
- Giro BJB Syariah cabang Braga dikelompokkan ke dalam investasi tidak lancar karena jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dapat ditarik dalam waktu yang dekat.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

10. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Harga Perolehan	Saldo awal	2025		Saldo akhir
	1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Tanah	1.627.572.816	-	-	1.627.572.816
Gedung Kantor	3.314.679.184	261.326.766	-	3.576.005.950
Kendaraan	1.517.577.836	-	-	1.517.577.836
Inventaris Kantor	1.845.620.760	-	77.199.866	1.768.420.894
Jumlah	8.305.450.596	261.326.766	77.199.866	8.489.577.496

Akumulasi Penyusutan

Gedung Kantor	1.448.227.770	162.641.871	-	1.610.869.641
Kendaraan	1.437.305.766	51.309.344	-	1.488.615.110
Inventaris Kantor	1.322.759.914	217.128.207	-	1.539.888.121
Jumlah	4.208.293.450	431.079.422	-	4.639.372.872
Nilai Buku - Bersih	4.097.157.146			3.850.204.624

Harga Perolehan	Saldo awal	2024		Saldo akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Tanah	1.627.572.816	-	-	1.627.572.816
Gedung Kantor	3.314.679.184	-	-	3.314.679.184
Kendaraan	1.517.577.836	-	-	1.517.577.836
Inventaris Kantor	1.563.076.192	282.544.568	-	1.845.620.760
Jumlah	8.022.906.028	282.544.568	-	8.305.450.596

Akumulasi Penyusutan

Gedung Kantor	1.285.585.898	162.641.872	-	1.448.227.770
Kendaraan	1.374.988.120	62.317.646	-	1.437.305.766
Inventaris Kantor	1.138.462.096	184.297.818	-	1.322.759.914
Jumlah	3.799.036.114	409.257.336	-	4.208.293.450
Nilai Buku - Bersih	11.821.942.142			4.097.157.146

11. Aset Tetap Tidak Berwujud

Harga Perolehan	Saldo awal	2025		Saldo akhir
	1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Sistem Informasi	1.183.024.339	22.000.000	-	1.205.024.339
Aset tidak berwujud lainnya	51.750.000	-	-	51.750.000
Jumlah	1.234.774.339	22.000.000	-	1.256.774.339

Akumulasi Penyusutan

Sistem Informasi	(808.880.728)	(145.935.935)	(43.680.000)	(911.136.663)
Aset tidak berwujud lainnya	(51.750.000)	-	-	(51.750.000)
Jumlah	(860.630.728)	(145.935.935)	(43.680.000)	(962.886.663)
Nilai Buku - Bersih	374.143.611			293.887.676

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

11. Aset Tetap Tidak Berwujud - Lanjutan

Harga Perolehan	Saldo awal	2024		Saldo akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Sistem Informasi	1.032.961.771	150.062.568	-	1.183.024.339
Aset tidak berwujud lainnya	51.750.000	-	-	51.750.000
Jumlah	1.084.711.771	150.062.568	-	1.234.774.339
Akumulasi Penyusutan				
Sistem Informasi	(661.283.688)	(147.597.040)	-	(808.880.728)
Aset tidak berwujud lainnya	(51.750.000)	-	-	(51.750.000)
Jumlah	(713.033.688)	(147.597.040)	-	(860.630.728)
Nilai Buku - Bersih	1.797.745.459			374.143.611

- Per 31 Desember 2025 dan 2024, aset tidak berwujud lainnya terdiri dari situs web dan perangkat lunak.
- Seluruh beban amortisasi dicatat pada beban administrasi dan umum.
- Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

12. Aset Tidak Lancar Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang karyawan	1.081.397.471	722.118.170
Dana imbalan pasca kerja	1.060.810.497	1.060.810.497
Dana jasa pengabdian pengurus perusahaan	339.156.861	339.156.861
Jumlah Aset Tidak Lancar Lain-lain	2.481.364.829	2.122.085.528

13. Utang Klaim

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban klaim	82.681.686	-
Jumlah Utang Klaim	82.681.686	-

Kewajiban klaim adalah beban klaim yang terjadi di bulan Desember 2025 yang dibayarkan di bulan Januari 2026 dikarenakan terbit pada tahun tersebut.

14. IJP/IJK Yang Ditangguhkan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
IJP/IJK yang ditangguhkan	534.446.660.983	536.312.350.224
IJP AJK yang ditangguhkan	7.252.098.433	-
Jumlah IJP/IJK Yang Ditangguhkan	541.698.759.416	536.312.350.224

a. Bagian Jangka Pendek

Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun (bagian jangka pendek)

IJP/IJK yang ditangguhkan	125.236.319.238	117.765.669.413
IJP AJK yang ditangguhkan	7.252.098.433	-
Jumlah Bagian Jangka Pendek	132.488.417.671	117.765.669.413

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

14. IJP/IJK Yang Ditangguhkan - Lanjutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Bagian Jangka Panjang		
IJP/IJK yang ditangguhkan jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka panjang		
IJP/IJK yang ditangguhkan	409.210.341.745	418.546.680.811
Jumlah Bagian Jangka Panjang	409.210.341.745	418.546.680.811

IJP/IJK yang ditangguhkan merupakan pembayaran premi penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

IJP/IJK yang ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan metode output, yaitu menggunakan kombinasi waktu yang dilalui dan nilai saldo yang dijamin.

IJP AJK adalah imbal jasa penjaminan Asuransi jiwa kredit sesuai dengan POJK 11 tahun 2025 bahwa perusahaan penjaminan tidak boleh menjamin jiwa pada Risiko lredit dari mitra, Perusahaan penjamnan hanya bisa menjamin WP (wan prestasi). Dalam porsi IJP dari mitra disetorkan langsung melalui PT Jamkrida Banten baik dari Risiko Wp maupun Jiwa, dikarenakan Perusahaan penjaminan tidak dapat menjamin jiwa, maka IJP yang disetorkan dari mitra dicatat sebagai titipan IJP AJK, Dimana pada saat pembayaran IJP/Premi reas Jiwa akan dipergunakan melalui IJP/Premi titipan AJK dimaksud.

15. Titipan IJP Ditangguhkan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Titipan IJP Yang Ditangguhkan	3.514.838.674	-
Titipan IJK Yang Ditangguhkan	399.449.848	-
Jumlah Titipan IJP Ditangguhkan	3.914.288.522	-

Titipan IJP/IJK ditangguhkan merupakan bagian dari IJP yang telah diterima oleh Perseroan dari terjamin/pemegang polis penjaminan, namun belum diakui sebagai pendapatan karena jasa penjaminan belum sepenuhnya diberikan.

16. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya Premi Penjaminan Ulang Yang Masih Harus Dibayar	69.878.328.029	25.350.187.634
Biaya Kafalah Ulang Yang Masih Harus Dibayar	9.763.122.665	7.968.004.088
Biaya Kafalah Co-Guarantee Yang Masih Harus Dibayar	1.956.307.233	1.865.069.055
Biaya Komisi Mitra/Agen Yang Masih Harus Dibayar	508.243.434	4.648.965.223
Biaya Ujroh Mitra/Agen Yang Masih Harus Dibayar	5.338.437.810	175.449.262
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	87.444.439.171	40.007.675.262

Biaya premi penjaminan ulang, kafalah ulang, dan kafalah co-guarantee yang masih harus dibayar merupakan utang IJP/IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim kepada mitra reasuransi dan mitra co-guarantee.

Biaya premi komisi dan ujroh mitra/agen merupakan fee yang belum dibayarkan kepada agen dan bank pelaksana atas kegiatan penjaminan.

Entitas menyajikan saldo Utang Penjaminan Ulang dan terkait sebesar Rp 87.444.438.170,76. Sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, Entitas belum melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh dengan pihak terkait dan data pendukung yang tersedia belum sepenuhnya memadai, sehingga saldo yang disajikan masih mengandung ketidakpastian. Kondisi ini dapat berdampak pada kewajaran penyajian saldo liabilitas serta beban terkait dalam laporan keuangan, terutama terkait kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan periode pengakuan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

17. Cadangan Klaim

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo awal cadangan klaim	15.116.356.988	13.963.356.988
Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim	20.875.786.575	1.153.000.000
Jumlah Cadangan Klaim	35.992.143.563	15.116.356.988

Cadangan klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2025 pasal 30 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode; 1) minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

Cadangan klaim juga diatur penerapannya dalam PSAK 109, yang mensyaratkan emtita untuk menghitung menggunakan metode ECL (*expected credit loss*).

18. Utang Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Bagian Jangka Pendek		
Hutang premi BPJS kesehatan karyawan	17.826.861	12.431.883
Titipan IJP	-	2.629.713.479
Hutang subrogasi	4.225.982.672	3.375.033.095
Hutang cash collateral	3.533.323.056	2.442.634.937
Hutang lainnya	142.071.549	1.667.933.229
Hutang komisi penagihan subrogasi	3.277.294	28.116.362
Hutang lancar lain-lain	268.422.401	25.856.908
Hutang koperasi karyawan	18.850.000	2.750.000
Hutang premi BPJS kesehatan karyawan	-	11.121.724
Titipan materai surety	18.240.000	12.950.000
Titipan koperasi Prima Gope Mandiri Sejahtera	-	1.000.000
Kewajiban subrogasi cogar	14.411.250	14.411.250
Kewajiban Co Branding	-	71.367.158
Kewajiban Fee collection subrogasi mitra	-	151.667
Kewajiban Co Branding FLPP	170.559.185	-
Kewajiban dalam penyelesaian	4.767.032.869	-
Jumlah Utang lain-lain jangka pendek	13.179.997.136	10.295.471.691
b. Bagian Jangka Panjang		
Utang jasa pengabdian pengurus	776.699.783	461.333.479
Jumlah Utang lain-lain jangka panjang	776.699.783	461.333.479

- Utang cash collateral merupakan jaminan dari pihak principal (kontraktor) atas surety bond yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- Utang subrogasi merupakan porsi pendapatan subrogasi yang menjadi hak mitra reasuransi yang belum dibayarkan.
- Titipan IJP/IJK merupakan penerimaan premi penjaminan oleh Perusahaan yang belum diterbitkan Sertifikat

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

19. Utang Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban imbalan kerja dihitung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. Perusahaan telah membentuk dana imbalan kerja pada DPLK BRI.

Utang imbalan pascakerja per 31 Desember 2025 berdasarkan laporan aktuaria program imbalan kerja oleh Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki Nomor 045/LAP/KKA-VAB/I/2026 tanggal 26 Januari 2026. Sedangkan per 31 Desember 2024 berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria V. Agus Basuki Nomor 092/LAP/KKA-VAB/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.

Kewajiban imbalan kerja dihitung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Perusahaan telah membentuk dana imbalan kerja pada DPLK BRI.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Usia pensiun normal	: 58 tahun	58 tahun
Tingkat diskonto	: 7,08% per tahun	7,08% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun	5% per tahun
Tingkat mortalitas	: TMI-IV-2019	TMI-IV-2019

Beban yang diakui pada laporan perubahan aset neto dan laporan perhitungan hasil usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya jasa kini	327.964.098	217.884.128
Biaya bunga	216.855.914	94.460.282
Pembayaran pesangon	-	(114.580.517)
(Keuntungan)/Kerugian Aktuaria	36.065.958	258.432.224
Beban (pendapatan) yang diakui	580.885.970	456.196.117

Pergerakan dari nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Nilai sekarang kewajiban awal periode	2.116.430.293	1.660.234.176
Biaya jasa kini	327.964.098	217.884.128
Biaya bunga	216.855.914	94.460.282
Pembayaran pesangon	-	(114.580.517)
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	36.065.958	258.432.224
Nilai sekarang kewajiban akhir periode	2.697.316.263	2.116.430.293
Penyesuaian		
Nilai wajar aset program	-	-
Saldo akhir kewajiban	2.697.316.263	2.116.430.293

20. Perpajakan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Aset Pajak Tangguhan		
Aset Pajak Tangguhan	7.466.459.587	2.893.868.007
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	7.466.459.587	2.893.868.007

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

20. Perpajakan - Lanjutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Utang Pajak		
PPh Pasal 21	607.076.470	82.673.434
PPh Pasal 23	138.969.132	47.509.573
Jumlah Utang Pajak	746.045.602	130.183.007
c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Kini		
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komersial dengan laba	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	5.337.598.374	(848.528.147)
Koreksi Fiskal Beda Waktu Positif (Negatif):		
Beban kerugian kredit ekspektasian	-	296.946.064
Beban cadangan klaim	20.875.786.575	1.153.000.000
Beban jasa pengabdian pengurus	(636.099.404)	(622.864.685)
Beban imbalan pascakerja	544.820.012	750.232.251
Koreksi Fiskal Beda Tetap Positif (Negatif):		
Beban sumbangan / santunan	-	35.789.085
Beban langganan koran	4.200.000	4.200.000
Beban pakaian kerja pegawai	97.480.000	92.415.000
Beban olahraga	17.970.050	15.767.400
Beban rumah tangga kantor	244.075.950	230.607.751
Beban ulang tahun	29.985.000	20.180.728
Beban gathering	39.641.800	112.204.100
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan bukan objek pajak	(4.924.455.847)	(4.686.790.792)
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu Positif (Negatif)	16.293.404.136	(2.598.313.097)
Laba (Rugi) Fiskal	21.631.002.509	(3.446.841.244)
Pembulatan	21.631.002.000	(3.446.841.000)
Pajak kini	4.758.820.552	-
Estimasi Kurang Bayar Pajak Penghasilan	4.758.820.552	-

d. Pajak Tangguhan

Perhitungan pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) pada pendapatan komprehensif lain	Saldo akhir
Beban kerugian kredit	155.353.556	-	-	155.353.556
Cadangan klaim	3.325.598.537	4.592.673.046	-	7.918.271.583
Jasa pengabdian pengurus	(126.365.358)	(139.941.869)	-	(266.307.226)
Beban imbalan pascakerja	233.299.269	119.860.403	-	353.159.672
Jumlah	3.587.886.005	4.572.591.580	-	8.160.477.585

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

20. Perpajakan - Lanjutan

d. Pajak Tangguhan - Lanjutan

	2024			
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) pada pendapatan komprehensif lain	Saldo akhir
Beban kerugian kredit ekspektasian	90.025.422	65.328.134	-	155.353.556
Cadangan klaim	3.071.938.537	253.660.000	-	3.325.598.537
Jasa pengabdian pengurus	10.664.873	(137.030.231)	-	(126.365.358)
Beban imbalan pascakerja	68.248.174	165.051.095	-	233.299.269
Jumlah	3.240.877.006	(347.008.999)	-	3.587.886.005

21. Ekuitas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Modal Saham		
Pemerintah Daerah Provinsi Banten	51.000.000.000	51.000.000.000
PT Banten Global Development	5.500.000.000	5.500.000.000
Jumlah Modal Saham	56.500.000.000	56.500.000.000
b. Cadangan		
Cadangan umum	9.831.245.624	7.433.710.385
Cadangan tujuan	8.289.764.836	5.427.107.761
Jumlah Cadangan	18.121.010.460	12.860.818.146
c. Saldo Laba		
Laba bersih tahun lalu	(957.593.838)	9.590.140.956
Laba tahun berjalan	5.345.502.818	(957.593.838)
Jumlah Saldo Laba	4.387.908.980	8.632.547.118
Jumlah Ekuitas	79.008.919.440	77.993.365.263

Berdasarkan akta Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H., Nomor 14 tanggal 11 November 2016, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp56.500.000.000 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah). Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat pengukuhan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0134157.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 11 November 2016. Berikut komposisi pemegang saham per 31 Desember 2025 dan 2024:

Nama Pemegang Saham		Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (Rp)
Modal Dasar Saham			
Pemerintah Provinsi Banten		51.000	51.000.000.000
PT Banten Global Development		5.500	5.500.000.000
Jumlah		56.500	56.500.000.000

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

21. Ekuitas - Lanjutan

Berdasarkan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) Notaris Yasarman, S.H., M.Kn. Nomor 04 tanggal 27 November 2025, laba perusahaan sebesar Rp9.590.140.957,-. (Sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) laba tersebut telah disetujui untuk digunakan untuk cadangan umum sebesar 25%, cadangan Tujuan 25% dan Dividen sebesar 50% yang jumlah masing masingnya sebagai berikut:

- Cadangan umum	=	2.397.535.239
- Cadangan tujuan	=	2.397.535.239
- Dividen	=	4.795.070.478

Namun PT Banten Global Development tidak mengambil bagian dividen yang sudah diputuskan sehingga perusahaan mencadangkan ke cadangan tujuan sebesar Rp. 465.121.836,-.

22. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

	2025	2024
Pendapatan IJP/IJK bruto		
Pendapatan IJP Kredit Produktif	2.429.476.059	2.365.247.731
Pendapatan IJP Kredit Non Produktif	57.925.852.722	35.836.948.472
Pendapatan IJP/IJK Cogar Produktif	-	499.375
Pendapatan IJP/IJK Cogar Non Produktif	2.123.827.573	2.263.877.880
Pendapatan IJP Bagian Reas	96.102.533.570	104.658.830.213
Pendapatan IJP Restitusi	1.576.337.279	1.946.385.166
Jumlah Pendapatan IJP/IJK bruto	160.158.027.202	147.071.788.837
Beban IJP/IJK reasuransi dan co-guarantee	(79.691.893.932)	(79.740.986.931)
Pendapatan Komisi/Ujroh Penjaminan Ulang		
Pendapatan IJP kredit program non produktif	18.124.464.952	11.100.250.799
Pendapatan fee base subrogasi	-	437.368.253
Jumlah Pendapatan Komisi/Ujroh Penjaminan Ulang	18.124.464.952	11.537.619.052
Beban komisi/ujroh	(20.730.512.033)	(24.479.830.557)
Jumlah IJP/IJK bersih	77.860.086.189	54.388.590.402

Pendapatan IJP/IJK adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin melalui penerima jaminan dalam rangkegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP/IJK dihitung dari tarif IJP/IJK, jenis kredit, plafon kredit dan jangka waktu kredit.

Pendapatan IJP/IJK diakui menggunakan metode output, yaitu menggunakan kombinasi waktu yang dilalui dan nilai saldo yang dijamin.

Beban IJP/IJK reasuransi merupakan premi yang dibayarkan guna mengalihkan risiko klaim ke mitra reasuransi. Besaran premi reasuransi yang menjadi hak mitra reasuransi ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Beban IJP/IJK co-guarantee merupakan premi yang dibebankan kepada terjamin untuk dibayarkan kepada mitran co-guarantee melalui penerima jaminan.

Pendapatan komisi reasuransi (sering juga disebut komisi reas) pada perusahaan penjaminan/asuransi adalah imbalan yang diterima dari perusahaan reasuransi atas penyerahan sebagian risiko (penjaminan) kepada mereka.

Beban komisi/ujroh merupakan komisi/ujroyang dibayarkan kepada bank pelaksana dan agen dengan persentase tertentu dari jumlah IJP/IJK yang diterima Perusahaan.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

23. Beban Klaim

	2025	2024
Beban klaim produktif	2.879.966.352	7.222.218.448
Beban klaim non produktif	127.208.320.241	141.767.460.075
Jumlah Beban Klaim Bruto	130.088.286.593	148.989.678.523
Pendapatan klaim reasuransi/co-guarantee	(89.671.768.427)	(109.010.005.012)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	20.875.786.575	1.153.000.000
Jumlah Beban Klaim bersih	61.292.304.741	41.132.673.511

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari utang pokok, utang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Pendapatan klaim reasuransi/co-guarantee merupakan pendapatan yang diperoleh dari mitra reasuransi/co-guarantee sebesar persentase tertentu dari beban klaim yang dibayarkan Perusahaan berdasarkan kesepakatan.

Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

24. Pendapatan Investasi

	2025	2024
Bunga/bagi hasil deposito berjangka	4.520.915.853	4.273.287.857
Jumlah Pendapatan Investasi	4.520.915.853	4.273.287.857

Pendapatan bunga/bagi hasil deposito berjangka dan Surat Berharga Negara disajikan sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi.

25. Beban Usaha

	2025	2024
Beban Direksi		
Beban gaji direksi	1.373.195.641	1.739.761.023
Beban tunjangan jabatan direksi	-	18.850.000
Beban tunjangan perumahan direksi	-	41.890.000
Beban tunjangan transportasi direksi	22.200.000	50.725.000
Beban DPLK direksi	24.000.000	24.000.000
Beban tunjangan kesehatan / asuransi rawat inap direksi	45.000.000	36.750.000
Beban tunjangan hari raya direksi	164.884.320	74.816.666
Beban tunjangan komunikasi direksi	-	8.000.000
Beban cuti tahunan direksi	82.442.160	74.816.666
Beban jasa pengabdian pengurus perseroan	636.099.404	622.864.685
Beban medical check up direksi	1.530.000	-
Beban PPh pasal 21 direksi	-	641.250
Beban kaca mata direksi	848.250	-
Jumlah Beban Direksi	2.350.199.775	2.693.115.290

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

25. Beban Usaha - Lanjutan

	2025	2024
Beban Komisaris		
Beban gaji dewan komisaris	478.029.691	742.347.986
Beban tunjangan jabatan dewan komisaris	-	4.607.500
Beban tunjangan perumahan dewan komisaris	-	5.440.000
Beban tunjangan transport dewan komisaris	-	29.418.939
Beban DPLK dewan komisaris	13.000.000	17.000.000
Beban tunjangan kesehatan /asuransi rawat inap dewan komisaris	16.500.000	18.000.000
Beban tunjangan hari raya dewan komisaris	61.603.960	61.603.960
Beban konsumsi dewan komisaris	-	11.325.000
Beban PPh pasal 21 dewan komisaris	-	192.500
Beban recruitmen komisaris independen	103.033.250	-
Jumlah Beban Komsaris	672.166.901	889.935.885
	2025	2024
Beban Dewan Pengawas Syariah		
Beban gaji dewan pengawas syariah	180.257.110	333.045.488
Beban tunjangan hari raya dewan pengawas syariah	34.239.436	34.239.436
Beban DPLK dewan pengawas syariah	4.565.000	17.970.000
Beban tunjangan kesehatan dewan pengawas syariah	4.500.000	18.000.000
Beban PPh pasal 21 dewan pengawas syariah	120.000	1.270.000
Beban medical check up dewan pengawas syariah	765.000	-
Jumlah Beban Dewan Pengawas Syariah	224.446.546	404.524.924
	2025	2024
Beban Pegawai		
Beban gaji pegawai	6.668.757.558	5.510.303.688
Beban tunjangan tidak tetap karyawan (Transportasi,Makan,Kehadiran)	1.430.403.378	1.086.288.740
Beban tunjangan tidak tetap karyawan (Keluarga)	270.979.670	244.045.164
Beban tunjangan hari raya pegawai	714.181.623	638.671.097
Beban cuti pegawai	400.923.869	327.140.378
Beban DPLK pegawai (tabungan pensiun)	119.280.000	88.515.000
Beban PPh pasal 21 pegawai	-	2.027.242
Beban PPh pasal 21 gaji pegawai dan pengurus perusahaan	679.212.913	789.907.533
Beban lembur pegawai	34.574.559	25.905.077
Beban pendidikan dan latihan pegawai	248.212.382	130.710.155
Beban premi BPJS kesehatan & ketenagakerjaan pegawai	522.915.175	473.315.506
Beban jasa kini imbalan pasca kerja	327.964.098	750.232.251
Beban bunga imbalan pasca kerja	216.855.914	-
Beban kompensasi	32.495.000	15.623.750
Beban PPh pasal 21 cuti pegawai dan direksi	28.612.167	31.213.132
Beban kaca mata pegawai	2.781.250	6.693.750
Beban jasa produksi pengurus dan pegawai	-	1.430.000.000
Beban psikotes dan publikasi lowongan kerja	901.000	1.250.000
Beban PPh Pasal 21 THR pegawai dan pengurus perusahaan	63.421.909	106.083.729
Beban medical check up pegawai	16.295.000	-
Beban psikotes pegawai	700.000	-
Jumlah Beban Pegawai	11.779.467.466	11.657.926.192

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

25. Beban Usaha - Lanjutan

	2025	2024
Beban Penyusutan		
Beban penyusutan gedung kantor	162.641.872	162.641.872
Beban penyusutan inventaris kantor	207.336.571	184.297.818
Beban penyusutan kendaraan roda empat	61.100.980	62.317.646
Beban penyusutan aktiva tidak berwujud	145.935.935	147.597.040
Beban (kenaikan) penurunan CKKE instrumen keuangan	-	180.000.000
Jumlah Beban Penyusutan	577.015.357	736.854.376
	2025	2024
Beban Operasional		
Beban iuran/pungutan assipindo	17.016.667	37.358.333
Beban sumbangan / santunan	-	35.789.085
Beban perjalanan dinas	447.372.979	275.057.751
Beban RUPS, legal / notaris	88.035.240	40.783.520
Beban auditor KAP	74.370.000	70.000.000
Beban administrasi bank	45.720.088	45.581.978
Beban iuran	58.256.266	15.628.011
Beban pengembangan / relasi bisnis perusahaan	446.051.503	319.623.990
Beban CSR	25.000.000	-
Beban promosi	113.796.416	161.756.503
Beban operasional PPID	535.600	4.862.900
Beban konsinyering	5.128.807	37.877.480
Beban Iuran kadin	-	1.226.250
Beban penagihan subrogasi	-	70.538.146
Jumlah Beban Operasional	1.321.283.566	1.116.083.947
	2025	2024
Beban Administrasi dan Umum		
Beban kebersihan dan keamanan	89.759.386	85.158.122
Beban ATK dan percetakan form- form	116.107.553	58.112.682
Beban iklan	305.976.570	136.561.870
Beban langganan koran / media massa	4.200.000	4.200.000
Beban pengiriman dokumen	17.631.400	16.327.900
Beban materai / benda pos	66.810.000	66.081.500
Beban pakaian kerja pegawai	97.480.000	92.415.000
Beban olahraga	17.970.050	15.767.400
Beban listrik	71.310.760	63.369.739
Beban telepon dan facs	1.949.310	2.194.245
Beban Iuran Internet	173.714.000	133.320.000
Beban asuransi kendaraan	25.752.502	26.002.925
Beban asuransi gedung kantor	7.012.214	6.317.846
Beban asuransi case In save, intransit dan box	5.195.000	5.171.667
Beban rumah tangga kantor	244.075.950	230.607.751
Beban BBM, tol dan parkir kendaraan	328.482.535	271.119.738
Beban ulang tahun (HUT Jamkrida Banten)	29.985.000	20.180.728
Beban pajak bumi dan bangunan kantor	1.083.484	1.719.308
Beban pajak kendaraan	18.417.000	19.381.400
Beban gathering	39.641.800	112.204.100
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	1.662.554.514	1.366.213.920

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

25. Beban Usaha - Lanjutan

	2025	2024
Beban Sewa		
Beban sewa website, hosting, google drive, zoom dan VPS	29.788.802	27.498.500
Beban sewa mobil	459.556.177	315.646.743
Jumlah Beban Sewa	489.344.979	343.145.243
Beban Pemeliharaan		
Beban pemeliharaan kantor	48.775.578	29.181.810
Beban pemeliharaan inventaris kantor	64.095.199	58.643.350
Beban pemeliharaan kendaraan roda empat	98.839.611	116.318.066
Beban pemeliharaan komputer	2.200.000	85.000
Beban pemeliharaan aplikasi	24.118.720	9.100.000
Jumlah Beban Pemeliharaan	238.029.108	213.328.226
Jumlah Beban Usaha	19.314.508.212	19.421.128.003

26. Pendapatan (Beban) Non Operasional

	2025	2024
Pendapatan Lain-Lain		
Pendapatan bunga, bagi hasil, dan bonus	403.539.995	413.502.935
Pendapatan subrogasi	2.939.831.746	1.003.758.950
Pendapatan lain-Lain	223.402.344	186.591.058
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	3.566.774.085	1.603.852.943
Beban Lain-Lain		
Beban non operasional lainnya	3.364.800	560.457.835
Jumlah Beban Lain-Lain	3.364.800	560.457.835
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	3.563.409.284	1.043.395.108

27. Penghasilan Komprehensif Lain

	2025	2024
Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	230.199.374	237.943.308
Keuntungan (Kerugian) Imbal Kerja	(36.065.958)	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	194.133.416	237.943.308

28. Transaksi Pihak yang Berelasi

a. Hubungan dengan pihak berelasi

Transaksi pihak yang berelasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah transaksi dengan pihak berikut:

Nama Pihak	Sifat Hubungan
PT BPD Banten Tbk	Satu pengendali
PD BPR Serang	Satu pengendali
PD BPR Kerta Raharja	Satu pengendali
PT BPR Lebak Sejahtera	Satu pengendali
PD BPR Berkah	Satu pengendali
PT BPR Lebak Sejahtera	Satu pengendali
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbl	Satu pengendali

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

28. Transaksi Pihak yang Berelasi - Lanjutan

a. Hubungan dengan pihak berelasi - Lanjutan

Pemegang saham mayoritas PT BPD Banten Tbk adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Selain itu, Perusahaan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:

	2025	2024
ASET		
Kas dan setara kas		
<u>Bank</u>		
PT BPD Banten Tbk	1.089.223.800	1.903.431.904
PD BPR Serang	217.625.326	655.183.820
PD BPR Kerta Raharja	923.456.538	1.677.895.709
PT BPR Lebak Sejahtera	403.010.235	149.257.975
PD BPR Berkah	115.987.098	265.107.673
PT Bank BJB Syariah	8.044.526.004	236.186.922
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	8.289.967.037	354.390.549
Jumlah	19.083.796.039	5.241.454.553
<u>Deposito</u>		
PT BPD Banten Tbk	9.500.000.000	8.900.000.000
PD BPR Serang	5.400.000.000	4.350.000.000
PD BPR Kerta Raharja	950.000.000	2.500.000.000
PT BPR Lebak Sejahtera	-	2.000.000.000
PD BPR Berkah	5.150.000.000	2.200.000.000
PT Bank BJB Syariah	2.500.000.000	2.600.000.000
Jumlah	23.500.000.000	22.550.000.000

29. Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Perusahaan telah mengidentifikasi kategori risiko yang harus dihadapi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Terkait dengan risiko strategis, kami pertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan;
2. melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko;
3. melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan strategis perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan; dan
4. melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

29. Manajemen Risiko - Lanjutan

b. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK No 11 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan Pasal 5 ayat (3), yaitu paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

Terkait dengan risiko likuiditas, kami pertimbangkan agar masing-masing Unit Kerja dapat mengelola dana yang tersedia secara optimal sehingga dapat diperoleh saldo bank minimal pada tiap akhir periode, misalnya memaksimalkan kegiatan reciprocal bisnis melalui penempatan investasi pada bank mitra sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak di mana pencapaian target funding bank mitra dapat terbantu melalui penempatan investasi dari Perusahaan sedangkan Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan bank mitra agar mempercayakan penjaminan kreditnya pada Perusahaan.

c. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), *Recovery Rate*, dan piutang *Co-Guarantee* /Reasuransi sebagai berikut:

1) Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi IJP/IJK.

Terkait dengan risiko klaim ini, maka dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar melakukan analisa penjaminan secara lebih efektif dengan mengacu pada ketentuan Perusahaan yang berlaku.

2) Recovery Rate

Recovery Rate (RR) dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, dimana formulasinya adalah pembayaran pendapatan subrogasi dibagi beban klaim.

Terkait dengan *Recovery Rate* (RR), dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi baik melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif, rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/mitra, maupun melalui pemberian fee atas penagih subrogasi.

3) Piutang Co-Guarantee /Reasuransi

Piutang co-guarantee /reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan.

Terkait piutang co-guarantee /reasuransi maka dipertimbangkan agar Divisi IT dan Pelayanan dapat aktif berkoordinasi dengan pihak reasuransi maupun co-guarantee dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya.

d. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portfolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Risiko Pasar dapat dilihat dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu *Yield of Investment* (YoI) dan Pencapaian Target IJP Bersih.

1) *Yield of Investment* (YoI)

YoI digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian YoI tahun terkait.

Terkait dengan YoI tersebut dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) melakukan alokasi/diversifikasi portfolio investasi yang optimal;
- b) melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin; dan
- d) melakukan review secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

29. Manajemen Risiko - Lanjutan

d. Risiko Pasar - Lanjutan

2) Target IJP Bersih

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap IJP bersih.

Terkait Target IJP Bersih ini dipertimbangkan pada Divisi Teknik Penjaminan untuk melakukan monitoring terhadap IJP, pendapatan komisi reasuransi, premi co-guarantee, premi reasuransi, beban restitusi.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:

- 1) operasional Perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi Perusahaan;
- 2) risiko hukum langsung adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
- 3) risiko hukum tidak langsung adalah risiko yang disebabkan oleh pihak mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum. Pada tahun 2025 tidak terdapat tuntutan hukum yang berdampak secara finansial ke Perusahaan, sehingga risiko hukum pada tahun 2025 sangat rendah.

Terkait risiko hukum, dipertimbangkan agar masing-masing unit kerja selalu menggunakan dan memedomani ketentuan peraturan Perusahaan yang berlaku.

f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap Perusahaan. Terkait dengan risiko reputasi ini dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan;
- 2) menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran-saluran komunikasi yang dimiliki;
- 3) melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktifitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
- 4) melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggung jawab;
- 5) melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di masyarakat, media, dan media sosial.

30. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 6 Januari 2026, Direktur Utama Entitas meninggal dunia yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Direksi. Peristiwa ini merupakan kejadian setelah tanggal neraca yang tidak memberikan bukti atas kondisi yang telah ada pada tanggal pelaporan, sehingga tidak memerlukan penyesuaian terhadap jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Entitas belum menetapkan pengganti Direktur Utama dan untuk sementara terdapat kekosongan jabatan Direksi. Manajemen menyatakan bahwa proses penunjukan pengganti sedang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan kelangsungan operasional Entitas.

Sebagai bagian dari dokumentasi atas perubahan kondisi manajemen tersebut, Entitas memiliki dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 005/SK/DIR/IV/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Laporan Kekosongan Direktur Utama, yang mencerminkan aktivitas operasional Direksi setelah tanggal pelaporan.

Peristiwa tersebut tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan, namun dapat mempengaruhi aspek tata kelola dan operasional Entitas sampai dengan ditetapkannya pengganti yang definitif.

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Catatan Atas Laporan Keuangan - Lanjutan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada tanggal 30 April 2026.

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MALINGPING
PROVINSI BANTEN**

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
&
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RSUD MALINGPING PROVINSI BANTEN**

DAFTAR ISI

	<u>HALAMAN</u>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
NERACA	3
LAPORAN OPERASIONAL	4
LAPORAN ARUS KAS	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7 - 29

----- 000 -----



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

Jl. Raya Saketi - Malingping KM.1 Malingping

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
TENTANG
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
UPT RSUD MALINGPING
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Susi Mulyani, MM
NIP : 19770315 201101 2 002
Jabatan : Plt. Direktur
RSUD Malingping

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPT RSUD MALINGPING untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
2. Laporan keuangan UPT RSUD MALINGPING disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPT RSUD MALINGPING telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan UPT RSUD MALINGPING tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern UPT RSUD MALINGPING.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malingping, 05 Februari 2026

Plt. Direktur
RSUD Malingping

Materai Rp.10.000

dr. Susi Mulyani, MM
NIP 19770315 201101 2 002



Registered Public Accountant

Mohammad Sunusi & Rekan

Jakarta Garden City, La Seine,
Jl. Mahakam Blok F5 No. 6,
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta 13960

T : (021)-7989258
WA : 0853 7645 7285, 0813 2649 8306
Email : kapmsdanrekan.rh@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00010/2.1392/AU.5/11/1601-1/1/II/2026

Direktur

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternative yang realistis selain melaksanakannya.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN – lanjutan

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN tidak dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas.



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOHAMMAD SUNUSI & REKAN**


MOHAMMAD SUNUSI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT



I. Surono, SE., M.Ak., CA., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP. 1601

Jakarta, 5 Februari 2026



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

		2025			
	Catatan	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN					
Pendapatan jasa layanan kesehatar	C.1	51.736.000.000	56.377.299.245	108,97	51.657.964.194
Pendapatan APBD	C.2	58.033.985.785	57.269.248.716	98,68	96.956.547.784
Pendapatan Hasil Kerjasama	C.3	24.000.000	24.000.000	100,00	47.760.000
Pendapatan lainnya	C.4	240.000.000	195.424.179	100,00	264.520.597
Jumlah Pendapatan		110.033.985.785	113.865.972.140	117,82	148.926.792.575
BELANJA					
Belanja operasi					
Belanja pegawai	C.4	47.198.649.315	46.713.740.025	98,97	36.269.201.899
Belanja barang dan jasa	C.5	61.667.987.148	61.563.718.722	80,54	102.667.123.611
Belanja modal	C.6	3.322.000.000	3.146.185.874	88,25	17.469.431.250
Jumlah Belanja		112.188.636.463	111.423.644.621	84,21	156.405.756.760
SURPLUS/DEFISIT					
		(2.154.650.678)	2.442.327.519	(113,35)	(7.478.964.185)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan					
Anggaran (SiLPA/SiKPA)		(2.154.650.678)	2.442.327.519	(113,35)	(7.478.964.185)

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo Anggaran Lebih (SAL) - awal tahun	2.154.650.677	9.633.614.862
Penggunaan SAL	-	-
	<u>2.154.650.677</u>	<u>9.633.614.862</u>
Surplus/(Defisit) LRA	2.442.327.519	(7.478.964.185)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Setelah Penyesuaian	-	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
SAL akhir tahun	<u>4.596.978.196</u>	<u>2.154.650.677</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
N E R A C A
Tanggal 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	E.1	4.596.978.197	2.154.650.677
Piutang jasa layanan kesehatan	E.2	129.113.427	3.462.081.438
Persediaan	E.3	15.784.524.037	24.068.012.230
Jumlah aset lancar		20.510.615.660	29.684.744.345
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	E.4		
Tanah		10.260.537.974	10.260.537.974
Peralatan dan mesin		177.738.300.003	177.678.021.558
Gedung dan bangunan		147.569.894.339	144.738.352.158
Jalan, irigasi dan jaringan		32.579.376.765	32.251.994.928
Aset tetap lainnya		6.105.000	6.105.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.105.059.450	1.105.059.450
Akumulasi penyusutan		(215.092.431.283)	(191.664.962.560)
Nilai buku		154.166.842.249	174.375.108.508
Aset Lain-lain	E.5		
Software Lainnya		6.240.278.215	7.661.544.215
Akumulasi amortisasi		(1.690.075.350)	(1.551.271.796)
Nilai buku		4.550.202.865	6.110.272.419
Jumlah aset tidak lancar		158.717.045.114	180.485.380.927
JUMLAH ASET		179.227.660.774	210.170.125.272
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang belanja	E.6	2.157.715.308	1.086.307.129
Jumlah kewajiban jangka pendek		2.157.715.308	1.086.307.129
Ekuitas		177.069.945.467	209.083.818.143
Jumlah ekuitas		177.069.945.467	209.083.818.143
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		179.227.660.775	210.170.125.272

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Pendapatan jasa layanan kesehatan	E.1.1	53.223.006.830	50.974.841.188
Pendapatan Hasil Kerjasama	E.1.2	24.000.000	47.760.000
Pendapatan hibah	E.1.3	-	4.861.731.600
Pendapatan lainnya	E.1.4	195.424.179	264.520.597
Jumlah pendapatan		<u>53.247.006.830</u>	<u>56.148.853.385</u>
Beban			
Beban pegawai	E.1.5	40.009.046.401	36.269.201.899
Beban barang dan jasa	E.1.6	70.508.704.475	81.480.246.467
Beban penyusutan dan amortisasi	E.1.7	24.993.589.680	27.284.665.891
Beban penyisihan piutang tak tertagih	E.1.8	648.811	17.397.394
Beban ekstrakomtabel	E.1.9	13.142.000	400.875.300
Jumlah beban		<u>135.525.131.367</u>	<u>145.452.386.952</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		<u>(82.278.124.537)</u>	<u>(89.303.533.567)</u>
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.10	<u>(93.901.029)</u>	<u>(171.244.950)</u>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		<u>(93.901.029)</u>	<u>(171.244.950)</u>
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		<u>(82.372.025.566)</u>	<u>(89.474.778.517)</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan dari jasa layanan kesehatan	C.1	56.377.299.245	51.657.964.194
Pendapatan dari alokasi APBD	C.2	57.269.248.716	96.956.547.784
Pendapatan Hasil Kerjasama	C.3	24.000.000	47.760.000
Pendapatan lainnya	C.4	195.424.179	264.520.597
Jumlah arus kas masuk		<u>113.865.972.140</u>	<u>148.926.792.575</u>
Arus Kas Keluar			
Belanja pegawai	C.5	46.713.740.025	36.269.201.899
Belanja barang dan jasa	C.6	61.563.718.722	102.667.123.611
Jumlah arus kas keluar		<u>108.277.458.747</u>	<u>138.936.325.510</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>5.588.513.393</u>	<u>9.990.467.065</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Penjualan aset tetap	C.7	-	-
Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar			
Perolehan aset tetap	C.7	(3.146.185.874)	(17.469.431.250)
Jumlah arus kas keluar		<u>(3.146.185.874)</u>	<u>(17.469.431.250)</u>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		<u>(3.146.185.874)</u>	<u>(17.469.431.250)</u>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		2.442.327.519	(7.478.964.185)
Kas dan setara kas awal tahun		<u>2.154.650.677</u>	<u>9.633.614.862</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>4.596.978.197</u>	<u>2.154.650.677</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo ekuitas awal tahun	H	209.083.818.143	206.125.462.089
Surplus (defisit) LO	H	(82.372.025.566)	(89.475.911.222)
R/K PPKD	H	50.364.395.092	97.103.134.441
Koreksi yang menambah dan mengurangi ekuitas :			
Koreksi akumulasi penyusutan	H	17.397.394	20.813.009
	H	(23.639.597)	(4.861.731.600)
	H	-	168.882.858
	H	-	3.168.568
Saldo ekuitas akhir tahun		<u>177.069.945.467</u>	<u>209.083.818.143</u>
		177.069.945.467	209.083.818.143
		-	-

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal Dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

A UMUM

1. Riwayat Ringkas RSUD Malingping

Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, diresmikan pada tanggal 31 Mei 2005.

Berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor:01/36.02/IOT/Kes/BKPMPT/2016 tanggal 24 Mei 2016 RSUD Malingping Provinsi Banten ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C.

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan pelayanan selanjutnya ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan tatakelola BLUD pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 900/Kep.399-Huk/2016.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tanggal 21 Desember 2022 memberikan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan tingkat kelulusan PARIPURNA yang berlaku sampai dengan 08 Desember 2026.

2. Lokasi

RSUD Malingping bertempat dan berkedudukan di Jalan Raya Saketi-Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, terdiri dari:

a Dewan Pengawas

Sesuai surat keputusan Gubernur Banten Nomor 445.05/Kep.140-Huk/2023 tanggal 09 Juni 2023, Dewan Pengawas terdiri dari:

Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Ex-Officio
Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Ex-Officio
	: Dr. Adi Rastanto, Sp.BD (K)	Ex-Officio

b Direktur

- dr. RR. Sulestiorini sebagai Pelaksana Harian Direktur UPTD RSUD Malingping Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 06 Januari 2024
- Mochamad Bangkit, S.IP, MM sebagai Pelaksana Tugas Direktur UPTD RSUD Malingping Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan 19 Januari 2026.
- dr. Susi Mulyani sebagai Pelaksana Tugas Direktur UPTD RSUD Malingping Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan saat ini.

c Bagian Sekretariat, membawahkan:

- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan.

d Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:

- Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis
- Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama

e. Bidang Keperawatan, membawahkan:

- a) Seksi Rawat Inap
- b) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus

A. UMUM - Lanjutan

f. Bidang Penunjang, membawahkan:

- a) Seksi Penunjang Medis
- b) Seksi Penunjang Non-Medis

g. Komite

h. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

i. Instalasi

j. Jabatan Fungsional

Jumlah sumberdaya manusia terdiri dari:

Kelompok Jabatan	PNS	Non PNS	Tugsus	Jumlah
Pejabat Struktural	11	0		11
Dokter Spesialis	11	18		29
Dokter Umum	3	1		4
Dokter Gigi	1	0		1
Perawat	15	78	7	100
Bidan	10	23		33
Sanitarian	3	2		5
Perekam Medis	1	2		3
Pisotrafis	0	0		0
Radiografer	1	4		5
Nutrisisionist	2	2		4
Penata Laboratorium/Analisis Kesehatan	1	1		2
Perawat Gigi	2	0		2
Pranata Anastesi	2	0		2
Pranata Refraksionis optisin	0	0		0
Pembimbing Keselamatan Kerja	0	0		0
Teknisi Transfusi darah	0	1		1
Apoteker	4	5	1	10
Asisten Apoteker	0	10		10
Elektromedis	1	0		1
Epidomolog	0	2		2
Kesehatan Masyarakat	3	0		3
Pelaksana	26	141		167
Jumlah	97	290	8	395

395

4. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi dan Misi

Visi “*RSUD MALINGPING MENJADI RUMAH SAKIT WISATA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERDEPAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT DAN WISATAWAN DI BANTEN SELATAN*”

b. Misi

Guna perwujudan visi yang ditetapkan maka langkah tahapan realisasi yang akan dilakukan terkandung dalam Misi Rumah Sakit:

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan yang bermutu dengan spesialisasi yang memenuhi standar yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mutakhir secara selektif dan tepat guna, menjunjung tinggi hukum dan etika dengan tetap melaksanakan fungsi sosial dan upaya kesehatan perorangan di wilayah Banten selatan.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan serta pemanfaatan yang optimal sesuai standar kelas C dengan unggulan pelayanan kedokteran bagi Pariwisata seperti Hiperbarik dan Trauma
- c) Meningkatkan jumlah, kemampuan dan keterampilan SDM kesehatan dan non kesehatan agar seluruh SDM memenuhi kualifikasi yang sesuai standar.
- d)

A. UMUM - Lanjutan

- e) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mampu mengakomodir seluruh jajaran organisasi dalam mencapai kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan pokok Rumah Sakit pada umumnya.
 - f) Mengupayakan pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan acuan dasar kepada falsafah efisiensi biaya (*cost containment*), tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan itu sendiri.
 - g) Mewujudkan sistem dan lingkungan RS yang bermutu sebagai tempat pendidikan, pelatihan, Penelitian dan Pengembangan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk keperluan internal dan eksternal.
- c. Motto
RSUD Malingping memiliki Motto adalah: “*BERTEMU HATI*” (*BERSih, TERTib, berMUtu, dan perHATian*)”

5. Fasilitas Pelayanan

RSUD Malingping memiliki fasilitas pelayanan.

1. Instalasi Rawat Jalan terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| (a) Penyakit Dalam | (n) Gigi |
| (b) Kandungan dan Ginekologi | (o) Psikiatri Jiwa |
| (c) Anak | (p) Paru dan DOTS |
| (d) Bedah | (q) TBMDR |
| (e) THT | (r) Geriatri |
| (f) Mata | (s) Umum |
| (g) Jiwa | (t) MCU |
| (h) Bedah Mulut | (v) Hemodialisa |
| (i) Neurologi/Syarat | (w) HIV/AIDS |
| (j) Paru | |
| (k) Rehabilitasi Medis | |
| (l) Jantung dan Pembuluh Darah | |
| (m) Kulit Kelamin. | |

2. Instalasi Rawat Inap terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|--|
| (a) Rawat Inap Wijaya Kusuma | :VIP 3 tt, Kelas I 14 TT, Kelas II 9 TT, Kelas III 5 |
| (b) Rawat Inap Tulip | : 47 TT |
| (c) Rawat Inap Buogenvile | : 37 TT |
| (e) ICU | : 5 TT |
| (f) Isolasi | : 16 TT |
| (g) Perinatologi | : 5 TT |
| - NICU | : 4 TT |
| - Bayi Sehat | : 10 TT |

3. Instalasi Rawat Jalan Khusus terdiri dari :

- (a) IBS/OKA dan Anastesi
- (b) ICU

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi UPTD RSUD Malingping mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah penuh.

Laporan Keuangan disusun menggunakan konsep harga perolehan (*historical cost*) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Basis AkruaI dan Basis Kas

Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*)

d. Periode akuntansi adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

2. Pendapatan-LRA dan Belanja.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan transfer dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan – LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas RSUD berdasarkan asas bruto.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan- LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

b. Belanja

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis Belanja BLUD), organisasi, dan fungsi/urusan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan Belanja BLUD yang didasarkan pada jenis Belanja BLUD untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi Belanja BLUD pegawai, Belanja BLUD barang dan jasa, Belanja BLUD modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan Belanja BLUD tak terduga.

Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Belanja BLUD menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Belanja BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus Belanja BLUD melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja BLUD (penerimaan kembali Belanja BLUD) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja BLUD dibukukan sebagai pengurang Belanja BLUD pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja BLUD dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Suatu pengeluaran Belanja BLUD akan diperlakukan sebagai Belanja BLUD modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran Belanja BLUD barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja BLUD barang dan jasa dengan obyek Belanja BLUD barang non kapitalisasi. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula. Suatu pengeluaran Belanja BLUD pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja BLUD modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (b) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - (c) bertambah volume; dan/atau
 - (d) bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c) Barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja BLUD pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Belanja BLUD barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komptabel).

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Selisih antara pendapatan-LRA dengan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

3. Pendapatan-LO dan Beban

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO BLUD diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan.

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

b. Beban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan/atau terjadinya konsumsi asset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban RSUD untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran Belanja

BLUD bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan Belanja BLUD.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

4. Aset dan Kewajiban.

a. Aset.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a) Kas dan Setara Kas

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- (a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- (b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

b) Piutang.

Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
- (d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

- (a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- (b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh RSUD.

d) Persediaan

Persediaan dapat terdiri dari:

- (a) Barang konsumsi;
- (b) Bahan untuk pemeliharaan;
- (c) Suku cadang;
- (d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (e) Bahan baku;
- (f) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (g) Barang cetakan;
- (h) Perangko dan materai;
- (i) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- (j) Barang pakai habis lainnya.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dinilai berdasarkan:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (d) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.

e) Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investas itersebut dapat diperoleh RSUD;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga di perlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan aging atas investasi non permanen.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penggunaan metode diatasdidasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f) Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh RSUD/pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD/pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta

(f) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa BLUD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh BLUD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran Belanja BLUD pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

Masa Manfaat, Kapitalisasi, dan Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan sebagai berikut:

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	BATAS MINIMAL KAPITALISASI (RUPIAH)	JENIS PEMELIHARAAN (KAPITALISASI)	PERSENTASE KAPITALISASI	PENAMBAHAN UMUR MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN					
1.3.2.01	ALAT BESAR					
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	2
					>50% s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN					
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR					
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	2.000.000	Renovasi	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	4	2.000.000	Renovasi	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 5 10 15
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR					
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	8	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	8	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 2 4 6
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN					
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 20 % >20 % s.d 40 % >40 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	4	1.000.000	Overhaul	>0 % s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	4	1.000.000	Overhaul	>0 % s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75 %	0 1 2 3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 %s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR					
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	4	1.000.000	Overhaul	>0 %s.d 25 %	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4	1.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN					
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	4	5.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	4	5.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM					
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3

1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	4	2.500.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN					
1.3.2.09.01	SENJATA API	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3

1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	4	1.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.10	KOMPUTER					
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 80% >80 % s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI					
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4	2.500.000	Overhaul	>0 % s.d 25 % >25 % s.d 50% >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 % >25 % s.d 80% >80 % s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN					
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25% s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75%	0 1 2 3
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PERMUNIAN					
1.3.2.13.01	SUMUR	10	10.000.000	Renovasi	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 3 5 8
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10	10.000.000	Renovasi	>0% s.d 25% >25% s.d 50% >50 % s.d 75 % >75%	0 3 5 8
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10	10.000.000	Overhaul	> 0 % s.d 25 % >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 3 5 8
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI					
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50% >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50% >50% s.d 75% >75%	0 1 2 3
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA					
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	4	1.000.000	Renovasi	>0 % s.d 25 % >25% s.d 50% >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.15.03	ALATSAR	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50 % s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.16	ALAT PERAGA					
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI					
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25% >25 % s.d 50 % >50% s.d 75 % >75%	0 1 2 3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.18	RAMBU-RAMBU					
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	20	15.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	5
					>50% s.d 75 %	10
					>75%	15
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	20	15.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	5
					>50% s.d 75 %	10
					>75%	15
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	20	15.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	5
					>50% s.d 75%	10
					>75%	15
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA					
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG					
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45% s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.02	MONUMEN					
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	15.000.000	Renovasi	>0 % s.d 30 %	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA					
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20	15.000.000	Renovasi	>0 % s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85% s.d 100%	20
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI					
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85% s.d 100%	20
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN					
1.3.4.01.01	JALAN	10	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	3
					>45 % s.d 65 %	5
					>65 % s.d 85 %	8
					>85 % s.d 100%	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02	BANGUNAN AIR/IRIGASI					
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0 % s.d 30 %	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65% s.d 85%	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45% s.d 65%	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.03	INSTALASI					
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20

1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0 % s.d 30 %	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45% s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85% s.d 100%	20
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65% s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.4.04	JARINGAN					
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.02	JARINGAN USTRIK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA					
1.3.5.02.01.01.002	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3

Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau duahari.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

b. Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada saat RSUD menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, RSUD harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan RSUD/pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

C.1. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Jasa Layanan Kesehatan	51.736.000.000	56.377.299.245	108,97	51.657.964.194
	51.736.000.000	56.377.299.245	108,97	51.657.964.194

Pendapatan jasa layanan kesehatan terdiri dari:

- Pasien Umum	2.829.467.779
- BPJS	51.197.078.400
- Obat Kronis	2.073.479.454
- COVID	102.900.100
- JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	35.447.010
- TCM (Tes Cepat Molekuler)	57.065.000
- TB RO (Tuberkulosis Resistensi Obat)	81.861.502
	56.377.299.245

C.2. Pendapatan APBD

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Untuk Belanja Operasi				
Belanja pegawai	40.293.795.691	39.808.886.401	98,80	29.518.973.983
Belanja barang dan jasa	15.390.190.094	15.286.049.261	99,32	55.167.031.265
Untuk Belanja Modal				
Peralatan dan Mesin	-	-	-	12.270.542.536
Gedung dan Bangunan	2.350.000.000	2.174.313.054	-	-
	58.033.985.785	57.269.248.716	98,68	96.956.547.784

C.3. Pendapatan Hasil Kerjasama

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Penyewaan Tempat Usaha	24.000.000	24.000.000	100,00	47.760.000
	24.000.000	24.000.000	100,00	47.760.000

Merupakan penggunaan ruangan oleh pihak ketiga dengan melalui kontrak kerjasama penyewaan tempat usaha

C.4. Pendapatan Lainnya

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan lainnya	240.000.000	195.424.179	81,43	264.520.597
	240.000.000	195.424.179	100,00	264.520.597

Pendapatan lainnya terdiri dari:

- Jasa giro	158.699.244
- Penerimaan Denda dan Pengembalian	36.724.935
	195.424.179

C.5. Belanja Pegawai

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja pegawai-APBD	40.293.795.691	39.808.886.401	98,80	29.518.973.983
Belanja pegawai-BLUD	6.904.853.624	6.904.853.624	100,00	6.750.227.916
	47.198.649.315	46.713.740.025	98,97	36.269.201.899
Gaji pokok	12.816.415.056	12.795.004.924	99,83	
Tunjangan	1.691.575.736	1.652.516.655	97,69	
Iuran Jaminan Kesehatan	621.300.000	619.593.742	99,73	
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.035.453	12.074.947	92,63	
Iuran Jaminan Kematian	37.296.360	36.225.008	97,13	
Iuran Tapera	9.000.000	-	-	
Tambahan penghasilan BLUD	25.105.173.086	24.693.471.125	98,36	
	6.904.853.624	6.904.853.624	100,00	
	47.198.649.315	46.713.740.025	98,97	

C.6. Belanja Barang dan Jasa

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja barang dan jasa-APBD	15.390.190.094	15.286.049.261	99,32	55.167.031.265
Belanja barang dan jasa-BLUD	46.277.797.054	46.277.669.461	100,00	47.500.092.346
	61.667.987.148	61.563.718.722	80,54	102.667.123.611
- Jasa Tenaga Kesehatan	15.019.493.504	14.915.492.671	99,31	
- Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keu	200.300.000	200.160.000	99,93	
- Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000	100,00	
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	117.690.370	117.690.370	100,00	
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.798.320	19.798.320	100,00	
- Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.747.900	24.747.900	100,00	
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.277.797.054	46.277.669.461	100,00	
	61.667.987.148	61.563.718.722	80,54	

C.7. Belanja Modal

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana APBD				
Peralatan dan Mesin	-	-	-	12.270.542.536
Gedung dan Bangunan	2.350.000.000	2.174.313.054	92,52	-
Jumlah	2.350.000.000	2.174.313.054	-	12.270.542.536

	2025			Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana BLUD				
Peralatan dan Mesin	-	-	-	5.198.888.714
Gedung dan Bangunan	972.000.000	971.872.820	99,99	-
Jumlah	972.000.000	971.872.820	-	5.198.888.714
Jumlah belanja modal	3.322.000.000	3.146.185.874	94,71	17.469.431.250

Dana APBD			
- Bangunan Kesehatan	2.350.000.000	2.174.313.054	92,52
	2.350.000.000	2.174.313.054	92,52

Dana BLUD			
- Gedung dan Bangunan BLUD	972.000.000	971.872.820	99,99
	972.000.000	971.872.820	99,99

D. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

D.1. Kas dan Setara Kas

	2025	2024
Bank:		
Bank Banten Nomor Rekening-0821000009	4.596.978.197	2.154.650.677
	4.596.978.197	2.154.650.677
Transaksi tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan saat pemerikasan kas sebagai berikut:		
- Jumlah Penerimaan 1 Januari s/d tanggal 14 Januari 2026	140.437.990	
- Jumlah Pengeluaran 1 Januari s/d tanggal 14 Januari 2026	125.437.990	
	15.000.000	
Kas dan setara kas per 14 Januari 2026	4.611.978.197	

D.2. Piutang Jasa Layanan Kesehatan

	2025	2024
Piutang Jasa Layanan Kesehatan terdiri dari:		
BPJS Kesehatan	129.762.238	3.479.478.832
Jumlah piutang bruto	129.762.238	3.479.478.832
Penyisihan piutang tak tertagih	(648.811)	(17.397.394)
Jumlah piutang bersih	129.113.427	3.462.081.438

Umur piutang dan penyisihan piutang sebagai berikut:

	2025		
	Jumlah piutang bruto	Penyisihan piutang tak tertagih % Rupiah	Jumlah piutang bersih
< 1 Bulan	129.762.238	0,50% 648.811	129.113.427
	129.762.238	648.811	129.113.427
	2024		
	Jumlah piutang bruto	Penyisihan piutang tak tertagih % Rupiah	Jumlah piutang bersih
< 1 Bulan	3.479.478.832	0,50% 17.397.394	3.462.081.438
	3.479.478.832	17.397.394	3.462.081.438

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang dikemudian

D.3. Persediaan

	2025	2024
Persediaan terdiri dari:		
Bahan		
Bahan Kimia	23.885.213	64.708.031
Bahan Baku		287.000
Bahan lainnya	22.040.000	41.080.000
Suku Cadang		-
Suku Cadang Alat Kedokteran	8.059.982.215	9.836.303.017
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.779.562.433	2.982.826.778
Suku Cadang Alat Pertanian	5.333.328	1.650.000
Suku Cadang Alat Bengkel		6.253.200
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Alat Tulis Kantor	942.525.192	1.125.913.738
Kertas Dan Cover	120.004.979	130.896.932

D. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA - Lanjutan

Bahan Komputer	320.053.994	374.581.633
Perabot Kantor	434.607.389	725.231.714
Alat Listrik	137.892.424	183.411.353
Perlengkapan Dinas	7.600.000	14.250.000
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.337.974	169.410.346
Obat-Obatan Lainnya		-
Obat	3.776.458.719	-
Natura dan Pakan		8.182.288.087
Natura	77.240.176	228.920.400
	15.784.524.037	24.068.012.230
	15.784.524.037	

Dijumpai barang berupa obat kondisi rusak dan kadaluarsa sebanyak 46 item barang seharga Rp.93.901.029,-. Terhadap barang rusak dan kadaluarsa tersebut sudah bukan menjadi saldo per 31 Desember 2025.

D.4. Aset Tetap

	2025			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	10.260.537.974	-	-	10.260.537.974
Peralatan dan mesin	177.678.021.558	506.428.325	446.149.880	177.738.300.003
Gedung dan bangunan	144.738.352.158	3.592.759.464	761.217.283	147.569.894.339
Jalan, jaringan dan instalasi	32.251.994.928	327.381.838	-	32.579.376.765
Aset tetap lainnya	6.105.000	-	-	6.105.000
Konstruksi dalam pengerjaan	1.105.059.450	-	-	1.105.059.450
	366.040.071.068	4.426.569.627	1.207.367.163	369.259.273.532
			3.219.202.464	
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan mesin	141.326.245.828	14.046.093.439		155.372.339.267
Gedung dan bangunan	40.721.504.488	7.243.671.261		47.965.175.749
Jalan, jaringan dan instalasi	9.617.212.244	2.137.704.023		11.754.916.267
	191.664.962.560	23.427.468.723	-	215.092.431.283
Nilai Buku	174.375.108.508			154.166.842.249

	2024			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	10.260.537.974			10.260.537.974
Peralatan dan mesin	154.884.981.921	22.793.039.637	-	177.678.021.558
Gedung dan bangunan	144.738.352.158		-	144.738.352.158
Jalan, jaringan dan instalasi	31.911.994.928	340.000.000	-	32.251.994.928
Aset tetap lainnya	6.105.000		-	6.105.000
Konstruksi dalam pengerjaan	1.105.059.450		-	1.105.059.450
	342.907.031.431	23.133.039.637	-	366.040.071.068

D. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA - Lanjutan

Akumulasi Penyusutan			
Peralatan dan mesin	119.176.452.040	22.149.793.787	141.326.245.828
Gedung dan bangunan	33.473.417.065	7.248.087.424	40.721.504.488
Jalan, jaringan dan instalasi	7.491.131.761	2.126.080.483	9.617.212.244
	160.141.000.865	31.523.961.694	-
Nilai Buku	182.766.030.565		174.375.108.508

Penambahan dan/atau pengurangan biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

	Belanja Modal	Kapitalisasi/Mutasi	Jumlah
Penambahan			
Peralatan dan mesin		416.458.880	416.458.880,0
Gedung dan bangunan	3.146.185.874	536.543.034,9	3.682.728.908,9
Jalan, jaringan dan instalasi		327.381.837,7	327.381.837,7
Aset tetap lainnya		-	-
Pengurangan			
Peralatan dan mesin		(446.149.880)	(446.149.880,0)
Gedung dan bangunan		(761.217.282,7)	(761.217.282,7)
Jalan, jaringan dan instalasi		-	-
Aset tetap lainnya	-	-	-
Jumlah	3.146.185.874	73.016.590	3.219.202.464

Penyusutan dialokasikan ke beban operasional masing-masing pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp.50.903.436.972,- dan Rp.31.523.961.695,-

D.5. Aset Lainnya

	2025	2024
Aset Tidak Berwujud	6.240.278.215	6.240.278.215
Aset lain-lain	1.450.957.000	1.421.266.000
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(1.690.075.350)	(130.005.796)
Akumulasi amortisasi aset tak lain-lain	(1.450.957.000)	(1.421.266.000)
Nilai buku	4.550.202.865	6.110.272.419

D.6. Utang Belanja

	2025	2024
Utang barang dan jasa	125.437.990	137.363.144
Utang jasa pelayanan medis	2.032.277.318	948.943.985
	2.157.715.308	1.086.307.129

E. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Kegiatan Operasional

E.1.1 Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan

	2025	2024
Pendapatan jasa layanan kesehatan	53.223.006.830	50.974.841.188
Terdiri dari:		
- Pendapatan LRA tahun 2025	56.572.723.424	
- Piutang atas jasa layanan kesehatan tahun 2024	(3.479.478.832)	
- Piutang atas jasa layanan kesehatan tahun 2025	129.762.238	
	53.223.006.830	

E.1.2 Pendapatan Hasil Kerjasama

	2025	2024
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Penyewaan Ruangan	24.000.000	47.760.000
	24.000.000	47.760.000

E.1.3 Pendapatan Hibah

	2025	2024
Hibah dari Kementerian Kesehatan	-	4.861.731.600
	-	4.861.731.600

E.1.4 Pendapatan Lainnya

	2025	2024
Pendapatan lainnya	195.424.179	264.520.597
	195.424.179	264.520.597

E.1.5 Beban Pegawai

	2025	2024
Beban pegawai - APBD	33.104.192.777	29.518.973.983
Beban pegawai - BLUD	6.904.853.624	6.750.227.916
	40.009.046.401	36.269.201.899

E.1.6 Beban Barang dan Jasa

	2025	2024
Beban barang dan jasa - APBD	37.142.588.425	56.182.518.651
Beban barang dan jasa - BLUD	33.366.116.050	25.297.727.816
	70.508.704.475	81.480.246.467

E.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2025	2024
Beban penyusutan dan amortisasi	24.993.589.680	27.284.665.891
	24.993.589.680	27.284.665.891
- Beban Penyusutan	23.433.520.126	
- Beban Amortisasi	1.560.069.554	
	24.993.589.680	

E.1.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	2025	2024
Beban penyisihan piutang tak tertagih	648.811	17.397.394
	648.811	17.397.394

E.1.9 Beban ekstrakomtabel

	2025	2024
Beban ekstrakomtabel	13.142.000	400.875.300
	13.142.000	400.875.300

E.2. Kegiatan Non Operasional

E.2.1 Pendapatan Lain-Lain

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

2025	2024
93.901.029	171.244.950
93.901.029	171.244.950

F CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Capaian kinerja keuangan UPT RSUD MALINGPING diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dipraktikan secara umum pada bidang kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum Daerah di Indonesia. Capaian kinerja keuangan tahun 2025 sebagai berikut:

Capaian Rasio Keuangan									
a. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	Kas dan Setara Kas Kewajiban Jangka Pendek	x 100%	=	$\frac{4.596.978.197}{2.157.715.308}$	x 100%	=	213,05%		
b. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek	x 100%	=	$\frac{20.510.615.660}{2.157.715.308}$	x 100%	=	950,57%		
c. Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	Piutang Usaha x 360 Pendapatan Usaha	x 1 hari	=	$\frac{46.480.833.652}{53.247.006.830}$	x 1 hari	=	0,87		
d. Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset turnover</i>)	Pendapatan Operasional Aset Tetap	x 100%	=	$\frac{53.247.006.830}{179.227.660.774}$	x 100%	=	29,71%		
e. Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian Aset Tetap	x 100%	=	$\frac{(82.278.124.537)}{179.227.660.774}$	x 100%	=	-45,91%		
f. Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian Ekuitas - Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian	x 100%	=	$\frac{(82.278.124.537)}{259.348.070.003}$	x 100%	=	-31,72%		
g. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap Biaya Operasional	Pendapatan Retribusi Biaya Operasional	x 100%	=	$\frac{53.223.006.830}{135.525.131.367}$	x 100%	=	39,27%		
h. EBITDA	Surplus Sebelum Bunga, Pajak Penyusutan dan Amortisasi		=	Rp (57.284.534.857)					

G PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak ada peristiwa penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan jurnal penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.

H TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan UPT RSUD MALINGPING bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang selesai disusun pada tanggal 05 Februari 2026.

----- 000 -----



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

Serta Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025 dan 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

DAFTAR ISI

BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	13
2.1 Asumsi Ekonomi Makro.....	13
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja	13
BAB III	16
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.1.1. Pendapatan RSUD Banten	16
3.1.2. Belanja RSUD Banten	16
BAB IV	21
KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...	22
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	23
BAB V	51
PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN.....	51
5.0 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement)	
5.0.1 Latar Belakang.....	51
5.0.2 Dampak Pada Neraca.....	51
5.0.3 Dampak Pada Laporan Operasional.....	52
5.0.4 Dampak Pada Laporan Arus Kas.....	52
5.0.5 Dampak Pada Laporan Perubahan Ekuitas.....	52

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1	Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	53
5.1.1	Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Entitas Akuntansi.....	53
5.1.1.1.	Penjelasan Pos – Pos Pendapatan RSUD Banten	53
5.1.1.2.	Penjelasan Pos – Pos Belanja RSUD Banten	54
5.1.1.3.	Penjelasan Pos – Pos Surplus/Defisit	68
5.1.1.4.	Penjelasan Pos – Pos Pembiayaan	69
5.1.1.5.	Penjelasan Pos – Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	71
5.1.2	Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Entitas Pelaporan	73
5.1.2.1	Penjelasan Pos – Pos Pendapatan RSUD Banten	73
5.1.2.2	Penjelasan Pos – Pos Belanja RSUD Banten	74
5.1.2.3	Penjelasan Pos – Pos Surplus/Defisit	80
5.1.2.4	Penjelasan Pos – Pos Pembiayaan	81
5.1.2.5	Penjelasan Pos – Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	82
5.2	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	82
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	83
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	83
5.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	83
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	83
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	84
5.3	Penjelasan Pos – Pos Neraca	85
5.3.1	Aset	85
5.3.1.1	Aset Lancar.....	85
5.3.1.2	Aset Tetap	88
5.3.1.3	Aset Lainnya.....	95
5.3.2	Kewajiban	96
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	96
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	99
5.3.3	Ekuitas.....	99

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	100
5.4.1	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas Sebagai Entitas Akuntansi.....	100
5.4.1.1	Ekuitas Awal.....	100
5.4.1.2	Surplus/Defisit LO	100
5.4.1.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	100
5.4.1.4	RK PPKD	101
5.4.1.5	Ekuitas Akhir	101
5.4.2	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas Sebagai Entitas Pelaporan	102
5.4.2.1	Ekuitas Awal.....	102
5.4.2.2	Surplus/Defisit LO	102
5.4.2.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	102
5.4.2.4	Ekuitas Akhir	103
5.5	Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional	104
5.5.1	Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional Sebagai Entitas Akuntansi	104
5.5.1.1	Pendapatan LO.....	104
5.5.1.2	Beban LO.....	105
5.5.1.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional.....	109
5.5.1.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	109
5.5.1.5	Pos Luar Biasa	110
5.5.1.6	Surplus/Defisit LO	110
5.5.2	Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional Sebagai Entitas Pelaporan.....	111
5.5.2.1	Pendapatan LO.....	111
5.5.2.2	Beban LO.....	112
5.5.2.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional.....	116
5.5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	116
5.5.2.5	Pos Luar Biasa	117
5.5.2.6	Surplus/Defisit LO	117
5.6	Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas.....	118
5.6.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	118
5.6.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	119
5.6.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	120

III

*Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.6.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	120
5.6.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	121
5.6.6	Saldo Awal Kas	122
5.6.7	Saldo Akhir Kas.....	122
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN		123
6.1	Sekilas Tentang RSUD Banten	123
6.1.1	Sejarah Singkat RSUD Banten	123
6.1.2	Data Umum RSUD Banten	125
6.1.3	Visi dan Misi RSUD Banten.....	125
6.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Banten.....	125
6.1.5	Struktur Organisasi RSUD Banten	126
6.1.6	Jenis Instalasi Pelayanan RSUD Banten.....	126
BAB VII		128
PENUTUP		128



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

Telepon: (0254) 8490911, 8486654 Website: www.rsud.bantenprov.go.id

Email: rsudbanten@bantenprov.go.id Kode Pos: 42123

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
TENTANG
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN (“RSUD BANTEN”)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Danang Hamsah Nugroho, M. Kes.

Jabatan : Direktur RSUD Banten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSUD Banten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan RSUD Banten disajikan sesuai dengan Standar Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (SAP Nomor 13) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan RSUD Banten telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan RSUD Banten tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern RSUD Banten.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Serang, 7 April 2026



dr. Danang Hamsah Nugroho, M. Kes.
Direktur RSUD Banten

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00083/2.1392/AU.5/11/2033-1/1/IV/2026

Direktur
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANTEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANTEN ("RSUD BANTEN") terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RSUD BANTEN tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap RSUD BANTEN berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal – Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Kami menarik informasi pada point 5.0 bahwa Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah disajikan kembali (restated) untuk mengoreksi kesalahan terkait pengakuan jumlah Kewajiban Jangka Pendek (Belanja yang Masih Harus Dibayar), Pendapatan Diterima Dimuka dan jumlah Beban Barang dan Jasa.

Angka-angka komparatif untuk tahun 2024 yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2025 ini telah disesuaikan untuk mencerminkan koreksi tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - lanjutan

Hal lain

Laporan keuangan RSUD BANTEN yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 22 Januari 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD BANTEN dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi RSUD BANTEN atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternative yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD BANTEN.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN - lanjutan

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal RSUD BANTEN.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD BANTEN untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan RSUD BANTEN tidak dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN



Martogi Marojahan Sitinjak, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 2033

Jakarta, 7 April 2026



PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

LAPORAN REALIASASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	Anggaran APBD 2025 Rp	Anggaran BLUD 2025 Rp	Anggaran Total 2025 Rp	Realisasi APBD 2025 Rp	Realisasi BLUD 2025 Rp	Realisasi Total 2025 Rp	%	Realisasi APBD 2024 Rp	Realisasi BLUD 2024 Rp	Realisasi Total 2024 Rp
PENDAPATAN	5.1.1.1										
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat		0,00	211.750.000.000,00	211.750.000.000,00	0,00	240.164.051.283,40	240.164.051.283,40	113,42%	0,00	176.502.447.703,50	176.502.447.703,50
Pendapatan Usaha Lainnya		0,00	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	1.237.297.121,74	1.237.297.121,74	130,24%	0,00	1.127.450.424,08	1.127.450.424,08
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	212.700.000.000,00	212.700.000.000,00	0,00	241.401.348.405,14	241.401.348.405,14	113,49%	0,00	177.629.898.127,58	177.629.898.127,58
BELANJA	5.1.1.2										
BELANJA OPERASIONAL	5.1.1.2.1										
Belanja Pegawai	5.1.1.2.1.1	70.067.186.300,00	44.610.331.521,00	114.677.517.821,00	69.046.658.433,00	44.447.932.879,00	113.494.591.312,00	98,97%	64.858.928.869,00	23.942.036.367,00	88.800.965.236,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.2.1.2	0,00	159.331.394.017,00	159.331.394.017,00	0,00	159.323.045.652,00	159.323.045.652,00	99,99%	72.556.820.428,00	122.841.662.410,00	195.398.482.838,00
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		70.067.186.300,00	203.941.725.538,00	274.008.911.838,00	69.046.658.433,00	203.770.978.531,00	272.817.636.964,00	99,57%	137.415.749.297,00	146.783.698.777,00	284.199.448.074,00
BELANJA MODAL	5.1.1.2.2										
Belanja Tanah	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.2.2	2.352.500.000,00	8.994.491.382,00	11.346.991.382,00	2.343.713.466,00	8.994.480.104,00	11.338.193.570,00	99,92%	4.957.432.980,00	20.701.666.245,00	25.659.099.225,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.1.2.2.3	0,00	230.743.100,00	230.743.100,00	0,00	222.728.800,00	222.728.800,00	96,53%	4.955.186.831,00	18.174.763.049,00	23.129.949.880,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.2.2.4	0,00	6.449.556.308,00	6.449.556.308,00	0,00	6.449.437.629,00	6.449.437.629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.101.900.000,00	0,00	1.101.900.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		2.352.500.000,00	15.674.790.790,00	18.027.290.790,00	2.343.713.466,00	15.666.646.533,00	18.010.359.999,00	99,91%	11.014.519.811,00	38.876.429.294,00	49.890.949.105,00
JUMLAH BELANJA		72.419.686.300,00	219.616.516.328,00	292.036.202.628,00	71.390.371.899,00	219.437.625.064,00	290.827.996.963,00	99,59%	148.430.269.108,00	185.660.128.071,00	334.090.397.179,00
SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.1.3	(72.419.686.300,00)	(6.916.516.328,00)	(79.336.202.628,00)	(71.390.371.899,00)	21.963.723.341,14	(49.426.648.557,86)	62,30%	(148.430.269.108,00)	(8.030.229.943,42)	(156.460.499.051,42)
PEMBIAYAAN	5.1.1.4										
PENERIMAAN											
SILPA Tahun Lalu		0,00	6.916.516.328,00	6.916.516.328,00	0,00	6.916.516.328,67	6.916.516.328,67	100,00%		14.946.746.272,09	14.946.746.272,09
JUMLAH PENERIMAAN		0,00	6.916.516.328,00	6.916.516.328,00	0,00	6.916.516.328,67	6.916.516.328,67	100,00%	0,00	14.946.746.272,09	14.946.746.272,09
PENGELUARAN											
			0,00						0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETO		0,00	6.916.516.328,00	6.916.516.328,00	0,00	6.916.516.328,67	6.916.516.328,67	100,00%	0,00	14.946.746.272,09	14.946.746.272,09
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.1.5	(72.419.686.300,00)	0,00	(72.419.686.300,00)	(71.390.371.899,00)	28.880.239.669,81	(42.510.132.229,19)	58,70%	(148.430.269.108,00)	6.916.516.328,67	(141.513.752.779,33)

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	6.916.516.328,67	14.946.746.272,09
Penggunaan SAL	5.2.2	(6.916.516.328,67)	(14.946.746.272,09)
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	28.880.239.669,81	6.916.516.328,67
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian		28.880.239.669,81	6.916.516.328,67
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih/(Kurang) Akhir	5.2.5	28.880.239.669,81	6.916.516.328,67

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

NERACA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
ASET	5.3.1		
Aset Lancar	5.3.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1	0,00	6.093.087,00
Kas pada BLU	5.3.1.1.2	28.880.239.669,81	6.910.423.241,67
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	5.3.1.1.3	415.884.925,00	2.368.835.100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.3.1.1.4	(2.079.424,63)	(11.844.175,50)
Belanja Dibayar di Muka	5.3.1.1.5	0,00	30.879.401,75
Persediaan Badan Layanan Umum	5.3.1.1.6	12.815.716.974,75	23.089.281.452,74
Jumlah Aset Lancar		42.109.762.144,93	32.393.668.107,66
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	5.3.1.2		
Tanah	5.3.1.2.1	53.021.148.643,00	53.021.148.643,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.2.2	705.950.092.280,96	689.736.021.123,96
Gedung dan Bangunan	5.3.1.2.3	459.830.761.078,53	440.966.867.318,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.2.4	34.728.796.675,61	34.658.792.083,61
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.2.5	160.139.000,00	160.139.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.2.7	91.985.700,00	19.040.218.835,00
Jumlah Aset Tetap		1.253.782.923.378,10	1.237.583.187.004,10
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.2.6	(773.158.569.304,05)	(698.696.797.581,35)
Nilai Buku Aset Tetap		480.624.354.074,05	538.886.389.422,75
Aset Lainnya			
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.3.1	2.163.452.291,67	1.800.346.604,17
Aset Lain-Lain	5.3.1.3.2	291.768.737,50	0,00
Jumlah Aset Lainnya		2.455.221.029,17	1.800.346.604,17
Jumlah Aset Tidak Lancar		483.079.575.103,22	540.686.736.026,92
JUMLAH ASET		525.189.337.248,15	573.080.404.134,58
KEWAJIBAN	5.3.2		
Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1		
Belanja yang Masih Harus Dibayar	5.3.2.1.3	4.975.393.063,30	1.369.343.188,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	50.061.532,88	86.128.271,56
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.025.454.596,18	1.455.471.459,56
Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		5.025.454.596,18	1.455.471.459,56
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	520.163.882.651,97	571.624.932.675,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		525.189.337.248,15	573.080.404.134,58

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Catatan	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	5.5.2.1		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.5.2.1.1	211.541.793.808,40	167.070.015.303,50
Pendapatan Usaha Lainnya	5.5.2.1.3	1.273.363.860,42	1.041.322.152,52
Pendapatan APBN/APBD	5.5.2.1.4	75.770.733.949,32	148.430.269.108,00
JUMLAH PENDAPATAN		288.585.891.618,14	316.541.606.564,02
BEBAN	5.5.2.2		
Beban Pegawai	5.5.2.2.1	113.494.591.312,00	88.800.965.236,00
Beban Persediaan	5.5.2.2.2	83.623.835.447,44	80.771.070.658,61
Beban Jasa	5.5.2.2.3	88.723.088.583,75	108.955.226.904,69
Beban Pemeliharaan	5.5.2.2.4	5.009.008.871,30	4.997.306.772,00
Beban Perjalanan Dinas	5.5.2.2.5	3.898.310,00	31.798.476,00
Beban Penyusutan Aset	5.5.2.2.6	75.430.050.684,41	80.732.340.400,42
Beban Penyisihan Piutang	5.5.2.2.7	2.079.424,63	11.844.175,50
Beban Lain - Lain	5.5.2.2.8	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		366.286.552.633,53	364.300.552.623,22
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	5.5.2.3	(77.700.661.015,39)	(47.758.946.059,20)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PENDAPATAN (BEBAN) KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Beban Lainnya			
Beban Non Operasional Lainnya	5.5.2.4	(370.041.324,87)	(394.731.777,96)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(370.041.324,87)	(394.731.777,96)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(78.070.702.340,26)	(48.153.677.837,16)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL	5.3.2.2	(78.070.702.340,26)	(48.153.677.837,16)
SURPLUS (DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL DILUAR PENDAPATAN APBD		(125.663.335.323,91)	(196.583.946.945,16)

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
EKUITAS AWAL	5.4.2.1	571.624.932.675,02	619.076.595.364,91
SURPLUS (DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL	5.4.2.2	(78.070.702.340,26)	(48.153.677.837,16)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	5.4.2.3	0,00	0,00
PENERIMAAN LUAR BIASA DARI KLAIM COVID		26.669.307.300,00	0,00
KOREKSI AUDIT ATAS SALDO AWAL EKUITAS		(63.688.500,00)	0,00
LAIN-LAIN		4.033.517,21	702.015.147,27
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		26.609.652.317,21	
EKUITAS AKHIR	5.2.5	520.163.882.651,97	571.624.932.675,02

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

**PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk	5.6.1		
Pendapatan APBD	5.6.1	71.390.371.899,00	148.430.269.108,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.6.1	213.494.743.983,40	176.502.447.703,50
Pendapatan Usaha Lainnya	5.6.1	1.237.297.121,74	1.127.450.424,08
Jumlah Arus Kas Masuk		286.122.413.004,14	326.060.167.235,58
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		113.494.591.312,00	88.800.965.236,00
Pembayaran Jasa		159.323.045.652,00	195.398.482.838,00
Jumlah Arus Kas Keluar		272.817.636.964,00	284.199.448.074,00
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		13.304.776.040,14	41.860.719.161,58
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.6.2		
Arus Kas Masuk			
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2	11.338.193.570,00	25.659.099.225,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2	222.728.800,00	23.129.949.880,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2	6.449.437.629,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	1.101.900.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		18.010.359.999,00	49.890.949.105,00
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(18.010.359.999,00)	(49.890.949.105,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4	17.247.048.239,00	14.243.931.468,00
Jumlah Arus Kas Masuk		17.247.048.239,00	14.243.931.468,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		17.247.048.239,00	14.243.931.468,00
Jumlah Arus Kas Keluar		17.247.048.239,00	14.243.931.468,00
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS		0,00	0,00
PENERIMAAN PENDAPATAN LUAR BIASA		26.669.307.300,00	0,00
KENAIKAN NETO KAS		21.963.723.341,14	(8.030.229.943,42)
KAS DAN SETARA KAS AWAL		6.916.516.328,67	14.946.746.272,09
KAS DAN SETARA KAS AKHIR		28.880.239.669,81	6.916.516.328,67

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah merupakan entitas yang menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Badan Layanan Umum Daerah juga bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, Badan Layanan Umum Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode laporan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Banten disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSUD Banten selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD Banten mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi RSUD Banten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan RSUD Banten menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
26. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Akuntansi
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VI	Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Asumsi Ekonomi Makro

Dengan sistem ekonomi yang terbuka, kinerja perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah serta kebijakan di bidang lain. Tantangan yang dihadapi adalah masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih relatif rendahnya investasi, serta belum memadainya infrastruktur dan perdagangan.

Mengukur potensi – potensi ekonomi, RSUD Banten menetapkan asumsi - asumsi yang digunakan dalam pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Aspek Makro

Tingkat Inflasi	: 3,5%
Pertumbuhan Ekonomi	: 5,10%
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar	: Rp 16.000,00

b. Aspek Mikro

Gaji dan Investasi Subsidi Pemerintah	: Rp 151.590.732.122,00
---------------------------------------	-------------------------

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Realisasi pencapaian target pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 241.401.348.405,14 atau sebesar 113,49% bila dibandingkan dengan target anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 212.700.000.000,00. Realisasi belanja hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp 290.827.996.963,00 atau sebesar 99,59% bila dibandingkan dengan anggaran belanja selama satu tahun sebesar Rp 292.036.202.628,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan indikator kinerja keuangan dan dapat berfungsi bagi manajemen sebagai alat ringkas, objektif, dan mudah dipahami untuk menilai kesehatan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Walaupun belum ada pedoman secara khusus yang dapat menjadi acuan bagi RSUD Banten dalam menilai tingkat kinerja keuangannya, namun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 secara normatif berlaku bagi Badan Layanan Umum, prinsip penilaian kinerja keuangan sebagaimana diatur didalamnya dapat digunakan sebagai acuan konseptual dalam menilai kinerja keuangan RSUD BLUD, khususnya terkait aspek likuiditas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, PER-22/PB/2020 dapat digunakan sebagai *best practice*, bukan dasar hukum langsung.

Pemetaan Rasio Keuangan RSUD Banten mengacu pada PER-22/PB/2020

1. Rasio Likuiditas

Tujuannya menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio Likuiditas	Konsolidasi	BLUD	Makna	Relevansi PER 22
Rasio Kas (Cash Ratio)	821,24%	821,24%	Kemampuan bayar segera	Keberlanjutan Kas
Rasio Lancar (Current Ratio)	1197,44%	1197,44%	Likuiditas Operasional	Risiko gagal bayar

2. Rasio Efisiensi Operasional

Tujuan nya Menilai efisiensi penggunaan sumber daya.

Dinamika Kesehatan Nasional

Dinamika kesehatan nasional pada tahun 2025 merupakan periode krusial karena menjadi tahun transisi besar bagi sistem kesehatan Indonesia. Hal krusial yang tersebut mencakup

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. Rasio Profitabilitas Sosial (Non-Komersial)

RSUD BLUD bukan entitas profit, tetapi tetap dinilai keberlanjutan usahanya.

Rasio Profitabilitas Sosial (Non-Komersial)	Konsolidasi	BLUD	Interpretasi
ROE	UM	UM	Kemampuan ekuitas mendukung layana
ROFA	UM	UM	Produktivitas aset layanan

4. Rasio Aktivitas Aset

Tujuannya mengukur seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Rasio Aktivitas Aset	Konsolidasi	BLUD	Fokus
Fixed Asset Turnover	62,03%	47,12%	Pemanfaatan Aset
Rasio Aset Menganggur	1,93%	1,93%	Risiko Inefisiensi Belanja Modal

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan RSUD Banten tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Pendapatan RSUD Banten

Tahun anggaran 2025, secara keseluruhan pendapatan RSUD Banten dianggarkan sebesar Rp 212.700.000.000,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan RSUD Banten selaku BLUD. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 241.401.348.405,14 atau 113,49% dari anggaran. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan – pendapatan RSUD Banten dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan

- Pelayanan Medik Umum
- Pelayanan Gawat Darurat
- Pelayanan Medik Spesialis Dasar
- Pelayanan Spesialis Penunjang Medik
- Pelayanan Medik Spesialis Lain
- Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut
- Pelayanan Medik Subspesialis
- Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik

b. Pendapatan Lain – Lain BLUD Yang Sah

- Pendapatan Lain-Lain Pelayanan

3.1.2. Belanja RSUD Banten

Belanja Daerah RSUD Banten pada per 31 Desember 2025 diarahkan untuk memenuhi Kebutuhan RSUD Banten dalam rangka melaksanakan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3.1.2.1. Belanja RSUD Banten Selaku SKPD (Entitas Akuntansi)

Tahun anggaran 2025, secara keseluruhan Belanja RSUD Banten selaku SKPD yang termasuk didalamnya belanja yang bersumber dari dana BLUD dan APBD, dianggarkan sebesar Rp 292.036.202.628,00. Sedangkan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 290.827.996.963,00 atau 99,59% dari anggaran. Realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan – belanja RSUD Banten dapat dirincikan:

a. Belanja Operasi

Target : Rp 274.008.911.838,00
Realisasi : Rp 272.817.636.964,00
Prosentase : 99,57%

Yang terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	114.677.517.821,00	113.494.591.312,00
Belanja Barang Dan Jasa	159.331.394.017,00	159.323.045.652,00
	274.008.911.838,00	272.817.636.964,00

b. Belanja Modal

Target : Rp 18.027.290.790,00
Realisasi : Rp 18.010.359.999,00
Prosentase : 99,91%

Yang terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	11.346.991.382,00	11.338.193.570,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	230.743.100,00	222.728.800,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	6.449.556.308,00	6.449.437.629,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
	18.027.290.790,00	18.010.359.999,00

3.1.2.2. Belanja RSUD Banten Selaku BLUD (Entitas Pelaporan)

Tahun anggaran 2025, secara keseluruhan Belanja RSUD Banten sebagai Badan Layanan Umum Daerah merupakan belanja yang bersumber dari dana BLUD dianggarkan sebesar Rp 219.616.516.328,00. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 219.437.625.064,00 atau 99,92% dari anggaran. Realisasi ini

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan – belanja RSUD Banten dapat dirincikan:

a. Belanja Operasi

Target : Rp 203.941.725.538,00

Realisasi : Rp 203.770.978.531,00

Prosentase : 99,92%

Yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Target : Rp 44.610.331.521,00

Realisasi : Rp 44.447.932.879,00

Prosentase : 99,64%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Pegawai BLUD RSU Banten	44.610.331.521,00	44.447.932.879,00
	44.610.331.521,00	44.447.932.879,00

2) Belanja Barang Dan Jasa

Target : Rp 159.331.394.017,00

Realisasi : Rp 159.323.045.652,00

Prosentase : 99,99%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSU Banten	159.331.394.017,00	159.323.045.652,00
	159.331.394.017,00	159.323.045.652,00

b. Belanja Modal

Target : Rp 15.674.790.790,00

Realisasi : Rp 15.666.646.533,00

Prosentase : 99,95%

Yang terdiri dari:

1) Belanja Modal Tanah

Target : Rp 0,00

Realisasi : Rp 0,00

Prosentase : 0,00%

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Modal Tanah BLUD RSUD Banten	-	-
	-	-

2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Target : Rp 8.994.491.382,00
Realisasi : Rp 8.994.480.104,00
Prosentase : 100,00%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD RSUD Banten	8.994.491.382,00	8.994.480.104,00
	8.994.491.382,00	8.994.480.104,00

3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Target : Rp 230.743.100,00
Realisasi : Rp 222.728.800,00
Prosentase : 95,53%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD RSUD Banten	230.743.100,00	222.728.800,00
	230.743.100,00	222.728.800,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Target : Rp 6.449.556.308,00
Realisasi : Rp 6.449.437.629,00
Prosentase : 100,00%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan BLUD RSUD Banten	6.449.556.308,00	6.449.437.629,00
	6.449.556.308,00	6.449.437.629,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Target : Rp 0,00
Realisasi : Rp 0,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Prosentase : 0,00%

URAIAN	TARGET	REALISASI
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD RSU Banten	-	-
	-	-

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Secara umum pencapaian target kinerja di masing – masing program dan kegiatan dapat tercapai dengan cukup baik. Namun demikian, ada beberapa langkah yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas, pengendalian, dan efisiensi yang menyebabkan anggaran yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya terserap 100%.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konveksi-konveksi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten meliputi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas digunakan untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan –LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan - LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Dalam hal belanja badan layanan umum, belanja diakui mengacu pada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (08) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA periode berikutnya.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(09) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;
- c) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	1.000.000,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2.0	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas :	
2.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
2.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
3.0	Aset Lainnya, yang terdiri atas :	
	Hewan dan Tanaman	
3.1	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Tanaman	500.000,00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

- *) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (10) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (11) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (12) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c) Barang / aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (13) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (14) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (15) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (16) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat nonpermanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang di terima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan dan dasar hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian pinjaman, pembentukan / pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a) pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b) pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment :
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
- c) Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari :
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (missal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat :
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun ; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*officialassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah / bangunan / peralatan mesin / buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*useofgoods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investas itersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga di perlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset Lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	JenisAsetTetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap :

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan ; Pelepasan ; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi asset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB V
PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

5.0 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement)

5.0.1 Latar Belakang

Laporan keuangan BLUD RSUD Banten untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah disajikan kembali untuk mengoreksi kesalahan terkait dengan pencatatan beban akrual Beban Masih Harus Dibayar (Kewajiban) pada akun neraca dan Beban Barang dan Jasa pada akun Laporan Operasional.

Kesalahan ini mengakibatkan penyajian terlalu rendah (understated) pada liabilitas dan penyajian terlalu tinggi (overstated) pada laba bersih] untuk periode tersebut. Manajemen telah memutuskan untuk melakukan penyajian kembali guna mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya

5.0.2 Dampak pada Neraca

Berikut adalah dampak penyajian kembali terhadap akun-akun pada Neraca per 31 Desember 2025 :

Akun	Sebelum Restated	Penyesuaian (Debet / Kredit)	Saldo setelah Restated
Kewajiban Jangka Pendek – Belanja yang Masih Harus Dibayar	3.467.275.322,30	1.508.117.741,00	4.975.393.063,30
Kewajiban Jangka Pendek – Pendapatan Diterima Dimuka	49.385.608,22	675.924,66	50.061.532,88

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.0.3 Dampak pada Laporan Operasional

Dampak terhadap Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Akun	Sebelum Restated	Penyesuaian (Debet / Kredit)	Saldo setelah Restated
Beban Jasa	87.214.970.842,75	1.508.117.741,00	88.723.088.583,75
Pendapatan Usaha Lainnya	1.274.039.785,09	675.924,67	1.237.297.121,74
Defisit Operasional	(76.191.867.349,72)	(1.508.793.665,67)	(77.700.661.015,39)

5.0.4 Dampak pada Laporan Arus Kas

Penyajian kembali tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada total arus kas dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan.

5.0.5 Dampak pada Laporan Perubahan Ekuitas

Dampak terhadap Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Akun	Sebelum Restated	Penyesuaian (Debet/Kredit)	Saldo setelah Restated
Ekuitas Akhir	521.672.676.317,64	1.508.793.665,67	520.163.882.651,97
Defisit Operasional	(76.191.867.349,72)	(1.508.793.665,67)	(77.700.661.015,39)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA mencakup pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA; pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

5.1.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Entitas Akuntansi

5.1.1.1. Penjelasan Pos – Pos Pendapatan RSUD Banten

Pendapatan RSUD Banten merupakan komponen jenis pendapatan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD. Anggaran pendapatan RSUD Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 212.700.000.000,00 yang dapat direalisasikan tahun 2025 sebesar Rp 241.401.348.405,14 atau 113,49%. Bila dibandingkan dengan Pendapatan RSUD Banten dan tahun 2024 sebesar Rp 177.629.898.127,58 mengalami kenaikan sebesar Rp 63.771.450.277,56. Peningkatan pendapatan tersebut terutama disebabkan penerimaan pendapatan dari Kementerian Kesehatan atas klaim pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp. 26.669.307.300 sesuai dengan Surat Kemenkes No. KU.04.01/D.VII.3/594/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang didanai APBN. Pendapatan tersebut dicatat sebagai Pendapatan BLUD Jasa Layanan yang dapat disajikan sebagai berikut:

Lain - Lain PAD Yang Sah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan BLUD RSUD Banten	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58
	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58

Pendapatan RSUD Banten bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Usaha Lainnya yang dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan BLUD RSUD Banten	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	211,750,000,000,00	240,164,051,283,40	113,42	176,502,447,703,50
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-	0,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-	0,00	-
Pendapatan Hibah	-	-	0,00	-
Pendapatan Usaha Lainnya	950,000,000,00	1,237,297,121,74	130,24	1,127,450,424,08
	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58

5.1.1.2. Penjelasan Pos – Pos Belanja RSUD Banten

Berdasarkan jenisnya Belanja RSUD Banten sebagai entitas akuntansi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana APBD dan Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Daerah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	274.008.911.838,00	272.817.636.964,00	99,57	284.199.448.074,00
Belanja Modal	18.027.290.790,00	18.010.359.999,00	99,91	49.890.949.105,00
	292.036.202.628,00	290.827.996.963,00	99,59	334.090.397.179,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 292.036.202.628,00 dan terealisasi sebesar Rp 290.827.996.963,00 atau 99,59%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 334.090.397.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp 43.262.400.216,00.

1) Belanja RSUD Banten Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Daerah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi BLUD	203,941,725,538,00	203,770,978,531,00	99,92	146,783,698,777,00
Belanja Modal BLUD	15,674,790,790,00	15,666,646,533,00	99,95	38,876,429,294,00
	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 219.616.516.328,00 dan terealisasi sebesar Rp 219.437.625.064,00 atau 99,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 185.660.128.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 33.777.496.993,00.

2) Belanja RSUD Banten Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Daerah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi APBD	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	137.415.749.297,00
Belanja Modal APBD	2.352.500.000,00	2.343.713.466,00	99,63	11.014.519.811,00
	72.419.686.300,00	71.390.371.899,00	98,58	148.430.269.108,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja RSUD Banten yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 72.419.686.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 71.390.371.899,00 atau 98,58%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 148.430.269.108,00 mengalami penurunan sebesar Rp 77.039.897.209,00.

5.1.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang bersumber dari Dana APBD dan Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Operasi	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	114.677.517.821,00	113.494.591.312,00	98,97	88.800.965.236,00
Belanja Barang	159.331.394.017,00	159.323.045.652,00	99,99	195.398.482.838,00
	274.008.911.838,00	272.817.636.964,00	99,57	284.199.448.074,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 274.008.911.838,00 dan terealisasi sebesar Rp 272.817.636.964,00 atau 99,57%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 284.199.448.074,00 mengalami penurunan sebesar Rp 11.381.811.110,00.

1) Belanja Operasi Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai BLUD	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00
Belanja Barang BLUD	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00
	203,941,725,538,00	203,770,978,531,00	99,92	146,783,698,777,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Operasi yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 203.941.725.538,00 dan terealisasi sebesar Rp 203.770.978.531,00 atau 99,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 146.783.698.777,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.987.279.754,00.

2) Belanja Operasi Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Operasi	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai APBD	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	64.858.928.869,00
Belanja Barang APBD	0,00	-	0,00	72.556.820.428,00
	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	137.415.749.297,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 70.067.186.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 69.046.658.433,00 atau 98,54%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 137.415.749.297,00 mengalami penurunan sebesar Rp 68.369.090.864,00.

5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai baik yang bersumber dari Dana APBD maupun dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai	2025		%	Realisasi 2025
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai APBD	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	64.858.928.869,00
Belanja Pegawai BLUD	44.610.331.521,00	44.447.932.879,00	99,64	23.942.036.367,00
	114.677.517.821,00	113.494.591.312,00	98,97	88.800.965.236,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 114.677.517.821,00 dan terealisasi sebesar Rp 113.494.591.312,00 atau 98,97%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 88.800.965.236,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.693.626.076,00.

1) Belanja Pegawai Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Pegawai BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00
	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Pegawai yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44.610.331.521,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.447.932.879,00 atau 99,64%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 23.942.036.367,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.505.896.512,00.

2) Belanja Pegawai Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	64.858.928.869,00
	70.067.186.300,00	69.046.658.433,00	98,54	64.858.928.869,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Pegawai yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 70.067.186.300,00 dan terealisasi sebesar Rp 69.046.658.433,00 atau 98,54%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 64.858.928.869,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.187.729.564,00.

5.1.1.2.1.2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa baik yang bersumber dari Dana APBD maupun dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Barang Dan Jasa	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00
Belanja Barang Dan Jasa APBD	-	-	-	72,556,820,428,00
	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	195,398,482,838,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Barang Dan Jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 159.331.394.017,00 dan terealisasi sebesar Rp 159.323.045.652,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 195.398.482.838,00 mengalami penurunan sebesar Rp 36.075.437.186,00.

1) Belanja Barang Dan Jasa Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Barang Dan Jasa	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00
	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Barang Dan Jasa yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 159.331.394.017,00 dan terealisasi sebesar Rp 159.323.045.652,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 122.841.662.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 36.481.383.242,00.

2) Belanja Barang Dan Jasa Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Barang Dan Jasa	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Dan Jasa APBD	-	-	-	72,556,820,428,00
	-	-	-	72,556,820,428,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Barang Dan Jasa yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 00,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 72.556.820.428,00 mengalami penurunan sebesar Rp 72.556.820.428,00.

5.1.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin, belanja Modal Gedung Dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Lainnya baik yang bersumber dari Dana APBD dan Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	11,346,991,382,00	11,338,193,570,00	99,92	25,659,099,225,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	23,129,949,880,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	1,101,900,000,00
	18,027,290,790,00	18,010,359,999,00	99,91	49,890,949,105,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 18.027.290.790,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.010.359.999,00 atau 99,91%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 49.890.949.105,00 mengalami penurunan sebesar Rp 31.880.589.106,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1) Belanja Modal Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00
Belanja Gedung dan Bangunan	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00	-
	15,674,790,790,00	15,666,646,533,00	99,95	38,876,429,294,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 15.674.790.790,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.666.646.533,00 atau 99,95%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 38.876.429.294,00 mengalami penurunan sebesar Rp 23.209.782.761,00.

2) Belanja Modal Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Modal APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2,352,500,000,00	2,343,713,466,00	99,63	4,957,432,980,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-	0,00	4,955,186,831,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	-	-	0,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	1,101,900,000,00
	2,352,500,000,00	2,343,713,466,00	99,63	11,014,519,811,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.352.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.343.713.466,00 atau 99,63%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 11.014.519.811,00 mengalami penurunan sebesar Rp 8.670.806.345,00.

5.1.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

3) Belanja Modal Tanah Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Tanah yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4) Belanja Modal Tanah Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Tanah yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00
	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 8.994.491.382,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.994.480.104,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 20.701.666.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp 11.707.186.141,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD	2,352,500,000,00	2,343,713,466,00	99,63	4,957,432,980,00
	2,352,500,000,00	2,343,713,466,00	99,63	4,957,432,980,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.352.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.343.713.466,00 atau 99,63%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 4.957.432.980,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.613.719.514,00.

5.1.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

1) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00
	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 230.743.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 222.728.800,00 atau 96,53%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 18.174.763.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.952.034.249,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD	0,00	0,00	0,00	4,955,186,831,00
	-	-	-	4,955,186,831,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 00,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 4.955.186.831,00 mengalami penurunan sebesar Rp 4.955.186.831,00.

5.1.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan BLUD	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-
	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.449.556.308,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.449.437.629,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.449.437.629,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan APBD	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

5.1.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00.

5.1.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Belanja Modal Aset Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

2) Belanja Modal Aset Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana APBD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana APBD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Modal Aset Lainnya APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Lainnya	-	-	-	1,101,900,000,00
	-	-	-	1,101,900,000,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Lainnya yang berasal dari sumber dana APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 00,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.101.900.000,00.

5.1.1.3. Penjelasan Pos – Pos Surplus/Defisit

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja. Dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 241.401.348.405,14 dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 290.827.996.963,00 maka surplus/defisit realisasi anggaran sebesar (Rp 49.426.648.557,86) Dibandingkan dengan dengan surplus/defisit realisasi anggaran tahun 2024 sebesar (Rp 156.460.499.051,42) mengalami kenaikan sebesar Rp 107.033.850.493,56 yang dapat disajikan sebagai berikut.

Surplus/Defisit LRA	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212.700.000.000,00	241.401.348.405,14	113,49	177.629.898.127,58
Belanja	292.036.202.628,00	290.827.996.963,00	99,59	334.090.397.179,00
	(79.336.202.628,00)	(49.426.648.557,86)	62,30	(156.460.499.051,42)

1) Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dari Sumber Dana BLUD

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja. Dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 241.401.348.405,14 dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 219.437.625.064,00 maka surplus/defisit realisasi anggaran sebesar (Rp 21.963.723.341,14). Dibandingkan dengan surplus/defisit realisasi anggaran tahun 2024 sebesar (Rp 8.030.229.943,42) mengalami kenaikan sebesar Rp 29.993.953.284,56 yang dapat disajikan sebagai berikut.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Surplus/Defisit LRA BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58
Belanja	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00
	(6,916,516,328,00)	21,963,723,341,14	-317,55	(8,030,229,943,42)

2) Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dari Sumber Dana APBD

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja. Dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 71.390.371.899,00 maka surplus/defisit realisasi anggaran sebesar (Rp 71.390.371.899,00). Dibandingkan dengan dengan surplus/defisit realisasi anggaran tahun 2024 sebesar (Rp 148.430.269.108,00) mengalami kenaikan sebesar Rp 77.039.897.209,00 yang dapat disajikan sebagai berikut.

Surplus/Defisit LRA APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	-	-	0,00	-
Belanja	72.419.686.300,00	71.390.371.899,00	98,58	148.430.269.108,00
	(72.419.686.300,00)	(71.390.371.899,00)	98,58	(148.430.269.108,00)

5.1.1.4. Penjelasan Pos – Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja. Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Pembiayaan	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan BLUD	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09
Penerimaan Pembiayaan APBD	-	-	0,00	-
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	-	0,00	-
Pengeluaran Pembiayaan APBD	-	-	0,00	-
	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Mendasar pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.916.516.328,67 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.946.746.272,09 mengalami penurunan sebesar Rp 8.030.229.943,42. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

3) Pembiayaan BLUD

Pembiayaan Netto BLUD merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan BLUD dan Pengeluaran Pembiayaan BLUD yang dapat disajikan sebagai berikut:

Pembiayaan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan BLUD	619,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	-	0,00	-
	619,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09

Mendasar pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.916.516.328,67 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto BLUD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.946.746.272,09 mengalami penurunan sebesar Rp 8.030.229.943,42. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan BLUD sebesar Rp 6.916.516.328,67 merupakan nilai SiLPA tahun 2025
- Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebesar Rp 0,00

4) Pembiayaan APBD

Pembiayaan Netto BLUD merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan APBD dan Pengeluaran Pembiayaan APBD yang dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pembiayaan APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-
	-	-	0,00	-

Mendasar pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 0,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan BLUD sebesar Rp 0,00
- Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebesar Rp 0,00

5.1.1.5. Penjelasan Pos – Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212.700.000.000,00	241.401.348.405,14	113,49	177.629.898.127,58
Belanja	292.036.202.628,00	290.827.996.963,00	99,59	334.090.397.179,00
Surplus/Defisit	(79.336.202.628,00)	(49.426.648.557,86)	62,30	(156.460.499.051,42)
Penerimaan Pembiayaan	6.916.516.328,00	6.916.516.328,67	100,00	14.946.746.272,09
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	6.916.516.328,00	6.916.516.328,67	100,00	14.946.746.272,09
SiLPA/SiKPA	(72.419.686.300,00)	(42.510.132.229,19)	58,70	(141.513.752.779,33)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar (Rp 42.510.132.229,19) mengalami kenaikan sebesar Rp 99.003.620.550,14 dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar (Rp 141.513.752.789,33).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58
Belanja	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00
Surplus/Defisit	(6,916,516,328,00)	21,963,723,341,14	-317,55	(8,030,229,943,42)
Penerimaan Pembiayaan	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	0,00	14,946,746,272,09
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	0,00	14,946,746,272,09
SiLPA/SiKPA	-	28,880,239,669,81	0,00	6,916,516,328,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.880.239.669,81 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.963.723.341,14 dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.916.516.328,67.

2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran APBD

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	-	-	0,00	-
Belanja	72.419.686.300,00	71.390.371.899,00	98,58	148.430.269.108,00
Surplus/Defisit	(72.419.686.300,00)	(71.390.371.899,00)	98,58	(148.430.269.108,00)
Penerimaan Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	-	-	0,00	-
SiLPA/SIKPA	(72.419.686.300,00)	(71.390.371.899,00)	98,58	(148.430.269.108,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar (Rp 71.390.371.899,00) mengalami kenaikan sebesar Rp 77.039.897.209,00 dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar (Rp 148.430.269.108,00)

5.1.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Entitas Pelaporan

5.1.2.1 Penjelasan Pos – Pos Pendapatan RSUD Banten

Pendapatan RSUD Banten merupakan komponen jenis pendapatan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada APBD. Anggaran pendapatan RSUD Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 212.700.000.000,00 yang dapat direalisasikan tahun 2025 sebesar Rp 241.401.348.405,14 atau 113,49%. Bila dibandingkan dengan Pendapatan RSUD Banten dan tahun 2024 sebesar Rp 177.623.805.040,58 mengalami kenaikan sebesar Rp63.771.450.277,56 yang dapat disajikan sebagai berikut:

Lain - Lain PAD Yang Sah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan BLUD RSUD Banten	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,623,805,040,58
	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,623,805,040,58

Pendapatan RSUD Banten bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Usaha Lainnya yang dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan BLUD RSUD Banten	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	211,750,000,000,00	240,164,051,283,40	113,42	176,502,447,703,50
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-	0,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-	0,00	-
Pendapatan Hibah	-	-	0,00	-
Pendapatan Usaha Lainnya	950,000,000,00	1,237,297,121,74	130,24	1,127,450,424,08
	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58

5.1.2.2 Penjelasan Pos – Pos Belanja RSUD Banten

Berdasarkan jenisnya Belanja RSUD Banten sebagai entitas pelaporanterdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1) Belanja RSUD Banten Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Daerah	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi BLUD	203,941,725,538,00	203,770,978,531,00	99,92	146,783,698,777,00
Belanja Modal BLUD	15,674,790,790,00	15,666,646,533,00	99,95	38,876,429,294,00
	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja RSUD Banten tahun anggaran 2025 sebesar Rp 219.616.516.328,00 dan terealisasi sebesar Rp 219.437.625.064,00 atau 99,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 185.660.128.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 33.777.496.993,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang bersumber dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai BLUD	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00
Belanja Barang BLUD	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00
	203,941,725,538,00	203,770,978,531,00	99,92	146,783,698,777,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Operasi yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 203.941.725.538,00 dan terealisasi sebesar Rp 203.770.978.531,00 atau 99,92%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 146.783.698.777,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.987.279.754,00.

5.1.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai yang bersumber dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai BLUD	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00
	44,610,331,521,00	44,447,932,879,00	99,64	23,942,036,367,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Pegawai yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44.610.331.521,00 dan terealisasi sebesar Rp 244.447.932.879,00 atau 99,64%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 23.942.036.367,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.505.896.512,00.

5.1.2.2.1.2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Dan Jasa baik merupakan belanja yang bersumber dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Barang Dan Jasa	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00
	159,331,394,017,00	159,323,045,652,00	99,99	122,841,662,410,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Barang Dan Jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 159.331.394.017,00 dan terealisasi sebesar Rp 159.323.045.652,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 122.841.662.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 36.481.383.242,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin, belanja Modal Gedung Dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Lainnya merupakan realisasi belanja modal dari Dana BLUD sendiri. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Modal BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00
Belanja Gedung dan Bangunan	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00	-
	15,674,790,790,00	15,666,646,533,00	99,95	38,876,429,294,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 15.674.790.790,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.666.646.533,00 atau 99,95%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 38.876.429.294,00 mengalami penurunan sebesar Rp 23.209.782.761,00.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

1) Belanja Modal Tanah Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Tanah yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00
	8,994,491,382,00	8,994,480,104,00	100,00	20,701,666,245,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 8.994.491.382,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.994.480.104,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 20.701.666.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.952.034.249,00.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

1) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00
	230,743,100,00	222,728,800,00	96,53	18,174,763,049,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 230.743.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 222.728.800,00 atau 96,53%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 18.174.763.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.952.034.249,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan BLUD	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-
	6,449,556,308,00	6,449,437,629,00	100,00	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.449.556.308,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.449.437.629,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.449.437.629,00.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Belanja Modal Aset Lainnya Yang Berasal Dari Sumber Dana BLUD

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 yang bersumber dari sumber dana BLUD dapat disajikan sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pengadaan Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, anggaran Belanja Modal Aset Lainnya yang berasal dari sumber dana BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 0,00.

5.1.2.3 Penjelasan Pos – Pos Surplus/Defisit

5.1.2.3.1 Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran Dari Sumber Dana BLUD

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja. Dari realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 241.401.348.405,14 dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 219.437.625.064,00 maka surplus/defisit realisasi anggaran sebesar Rp 21.963.723.341,14. Dibandingkan dengan surplus/defisit realisasi anggaran tahun 2024 sebesar (Rp 8.030.229.943,42) mengalami kenaikan sebesar Rp 29.993.953.284,56 yang dapat disajikan sebagai berikut.

Surplus/Defisit LRA BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58
Belanja	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00
	(6,916,516,328,00)	21,963,723,341,14	-317,55	(8,030,229,943,42)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.4 Penjelasan Pos – Pos Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja. Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Pembiayaan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan BLUD	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	-	0,00	-
	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Mendasar pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.916.516.328,67 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.946.746.272,09 mengalami penurunan sebesar Rp 8.030.229.943.42.

5.1.2.4.1 Pembiayaan BLUD

Pembiayaan Netto BLUD merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan BLUD dan Pengeluaran Pembiayaan BLUD yang dapat disajikan sebagai berikut:

Pembiayaan BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan BLUD	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	-	0,00	-
	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	100,00	14,946,746,272,09

Mendasar pada tabel diatas menunjukkan Realisasi Pembiayaan Netto BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.916.516.328,67 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto BLUD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.946.746.272,09 mengalami penurunan sebesar Rp 8.030.229.943,42. Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Penerimaan Pembiayaan BLUD sebesar Rp 6.916.516.328,67 merupakan nilai SiLPA tahun 2025
- b. Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebesar Rp 0,00

5.1.2.5 Penjelasan Pos – Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.5.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	212,700,000,000,00	241,401,348,405,14	113,49	177,629,898,127,58
Belanja	219,616,516,328,00	219,437,625,064,00	99,92	185,660,128,071,00
Surplus/Defisit	(6,916,516,328,00)	21,963,723,341,14	-317,55	(8,030,229,943,42)
Penerimaan Pembiayaan	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	0,00	14,946,746,272,09
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-
Pembiayaan Netto	6,916,516,328,00	6,916,516,328,67	0,00	14,946,746,272,09
SiLPA/SiKPA	-	28,880,239,669,81	0,00	6,916,516,328,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.880.239.669,81 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.963.723.341,14 dari SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.916.516.328,067.

5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan oleh RSUD Banten berkaitan dengan RSUD Banten sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan entitas pelaporan sehingga diwajibkan menyusun laporan ini.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun – tahun anggaran sebelumnya serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp 6.916.516.328,67 atau turun 53,77% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp 14.946.746.272,09.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2025 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp 6.916.516.328,67) bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (Rp 14.946.746.272,09) terjadi kenaikan sebesar Rp 8.030.229.943,42.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana BLUD RSUD Banten selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.880.239.669,81 atau naik 23,95 % dibandingkan SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.916.516.328,67.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2025 dan tahun 2024 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 28.880.239.669,81 atau naik 23,95% dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.916.516.328,67. Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2025 terdiri dari:

- a. Kelebihan target pendapatan BLUD RSUD Banten sebesar Rp 28.701.348.405,14
- b. Sisa Belanja BLUD RSUD Banten sebesar (Rp 6.737.625.064,00)
- c. SiLPA BLUD RSUD Banten tahun sebelumnya sebesar Rp 6.916.516.328,67

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3 Penjelasan Pos – Pos Neraca

Neraca merupakan bentuk laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Saldo masing-masing aset lancar dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	6.093.087,00	-100,00
Kas pada BLU	28.880.239.669,81	6.910.423.241,67	317,92
Kas Lainnya Setara Kas	-	-	0,00
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	-	-	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	415.884.925,00	2.368.835.100,00	-82,44
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	-	-	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(2.079.424,63)	(11.844.175,50)	-82,44
Belanja Dibayar di Muka	-	30.879.401,75	-100,00
Uang Muka Belanja	-	-	0,00
Persediaan Badan Layanan Umum	12.815.716.974,75	23.089.281.452,74	-44,49
Jumlah	42.109.762.144,93	32.393.668.107,66	29,99

5.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas umum RSUD Banten sampai dengan 31 Desember 2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 6.093.087,00.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.2. Kas Pada BLUD

Kas pada BLUD adalah kas milik RSUD Banten yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, meliputi rekening giro Bank Banten.

Saldo Kas di BLUD tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 28.880.239.669,81 dan Rp 6.910.423.241,67.

Jumlah kas di BLUD Per 31 Desember 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

- Kas pada Bank Banten sebesar Rp 28.880.239.669,81 (rekening koran terlampir)
- Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Banten sebesar Rp 0,00

5.3.1.1.3. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak RSUD Banten atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan dan atau surat pengajuan klaim, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp 415.884.925,00 dan Rp 2.368.835.100,00. Saldo piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025, terinci sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	BPJS Kesehatan	2.368.835.100,00	15.606.299.400,00	175.739.161.223,00	193.714.295.723,00	-
2	BPJS Ketenagakerjaan	-	-	240.976.600,00	-	240.976.600,00
3	BKD Provinsi Banten	-	-	2.280.000,00	-	2.280.000,00
4	PT. Asuransi Jasaraharja	-	-	98.151.825,00	-	98.151.825,00
5	PT. Taspen	-	-	67.976.500,00	-	67.976.500,00
6	RS Drajat Prawiranegara	-	-	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	Jumlah Piutang	2.368.835.100,00	15.606.299.400,00	176.155.046.148,00	193.714.295.723,00	415.884.925,00

5.3.1.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Saldo penyisihan piutang tidak tertagih tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar (Rp 2.079.424,63) dan (Rp 11.844.175,50).

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2025, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025, untuk setiap jenis piutang terinci sebagai berikut

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang
Tahun 2025

No.	Jenis Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Bersih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	BPJS Ketenagakerjaan	240.976.600,00	1.204.883,00	239.771.717,00
2	BKD Provinsi Banten	2.280.000,00	11.400,00	2.268.600,00
3	PT. Asuransi Jasaraharja	98.151.825,00	490.759,13	97.661.065,88
4	PT. Taspen	67.976.500,00	339.882,50	67.636.617,50
5	RS Drajat Prawiranegara	6.500.000,00	32.500,00	6.467.500,00
	Grand Total	415.884.925,00	2.079.424,63	413.805.500,38

Penyisihan piutang tak tertagih sebesar sebesar (Rp 2.079.424,63) merupakan perhitungan penyisihan piutang tahun 2025 yang dapat dihitung sebagai berikut:

Rincian Perhitungan Piutang dan Penyisihan Piutang
Per 31 Desember 2025

Piutang Pasien Perusahaan	Kualitas Piutang	Saldo Piutang	Cad. Penyisihan Piutang	Nominal Cad. Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Bersih
BPJS Ketenagakerjaan	Lancar	240.976.600,00	0,50%	1.204.883,00	239.771.717,00
BKD Provinsi Banten	Lancar	2.280.000,00	0,50%	11.400,00	2.268.600,00
PT. Asuransi Jasaraharja	Lancar	98.151.825,00	0,50%	490.759,13	97.661.065,88
PT. Taspen	Lancar	67.976.500,00	0,50%	339.882,50	67.636.617,50
RS Drajat Prawiranegara	Lancar	6.500.000,00	0,50%	32.500,00	6.467.500,00
Grand Total		415.884.925,00		2.079.424,63	413.805.500,38

5.3.1.1.5. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka yang ada di RSUD Banten tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 30.879.401,75.

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Beban Dibayar Dimuka (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	polis standar kendaraan bermotor	30.879.401,75	0,00	0,00	30.879.401,75	0,00
	Jumlah Piutang	30.879.401,75	0,00	0,00	30.879.401,75	0,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.6. Persediaan Badan Layanan Umum

Persediaan yang ada di RSUD Banten tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing sebesar Rp 12.815.716.974,75 dan Rp 23.089.281.452,74 mengalami penurunan sebesar Rp 10.273.564.477,99 atau (44,49%). Persediaan per 31 Desember 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Rekapitulasi Persediaan
Tahun 2025**

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	391.900,00
2	Bahan Kimia	27.047.865,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	363.636,00
4	Isi Tabung Gas	148.069,56
5	Bahan Lainnya	54.439.000,00
6	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.153.493.841,02
7	Suku Cadang Alat Laboratorium	13.488.600,00
8	Suku Cadang Alat Bengkel	244.000,00
9	Alat Tulis Kantor	130.383.866,65
10	Kertas Dan Cover	75.854.815,15
11	Bahan Cetak	3.058.000,00
12	Benda Pos	-
13	Bahan Komputer	90.020.738,58
14	Perabot Kantor	717.891.030,25
15	Alat Listrik	136.505.909,25
16	Perlengkapan Dinas	8.550.000,00
17	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	128.995.419,23
18	Obat	4.791.890.757,42
19	Natura	482.949.526,64
20	Natura Dan Pakan Lainnya	-
	Jumlah Persediaan	12.815.716.974,75

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik RSUD Propinsi Banten meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Aset Lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik RSUD Provinsi Banten disusutkan, kecuali :

- ✓ Tanah;
- ✓ Aset Lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi;
- ✓ Konstruksi dalam pengerjaan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut :

- ✓ metode penyusutan garis lurus (straight line);
- ✓ dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- ✓ aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan)
- ✓ perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan / pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- ✓ Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali
 - 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - 2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau

terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perkembangan nilai aset tetap RSUD Banten untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji sebagaimana tabel berikut.

Aset tetap Tahun 2025

Keterangan	Tahun 2024 (Rp)
Saldo 1 Januari	1.237.519.498.504,10
Penambahan 1 Januari – 31 Desember	18.010.359.999,00
Pengurangan 1 Januari – 31 Desember	1.746.935.125,00
Saldo 31 Desember	1.253.782.923.378,10
Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember	-773.158.569.304,05
Nilai Buku per 31 Desember	480.624.354.074,05

Aset tetap RSUD Propinsi Banten per 31 Desember 2025 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap
 RSUD Banten
 Per 31 Desember 2025

No.	Aset Tetap	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Aset Tetap (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
1	Tanah	53.021.148.643,00	0,00	0,00	0,00	53.021.148.643,00
2	Peralatan dan Mesin	689.736.021.123,96	0,00	17.717.626.607,00	1.503.555.450,00	705.950.092.280,96
3	Gedung dan Bangunan	440.966.867.318,53	0,00	18.955.879.460,00	91.985.700,00	459.830.761.078,53
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	34.658.792.083,61	0,00	6.449.437.629,00	6.379.433.037,00	34.728.796.675,61
5	Aset Tetap Lainnya	160.139.000,00	0,00	0,00	0,00	160.139.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.976.530.335,00	0,00	91.985.700,00	18.976.530.335,00	91.985.700,00
	Jumlah	1.237.519.498.504,10	0,00	43.214.929.396,00	26.951.504.522,00	1.253.782.923.378,10

Mutasi aset tetap periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.263.424.874,00 meliputi:

- Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 yang menambah aset tetap sebesar Rp 11.338.193.570,00
- Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 yang menambah aset tetap sebesar Rp 222.728.800,00
- Penambahan dari belanja modal jalan, jaringan, dan instalasi tahun 2025 yang menambah aset tetap sebesar Rp 6.449.437.629,00
- Penambahan dari mutasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2025 yang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 6.379.433.037,00
- Penambahan dari mutasi aset KDP menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 yang menambah aset tetap sebesar Rp 18.733.150.660,00
- Penambahan dari mutasi aset KDP menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 yang menambah aset tetap sebesar Rp 91.985.700,00
- Pengurangan dari barang ekstrakomptabel peralatan dan mesin tahun 2025 yang mengurangi aset tetap sebesar Rp 112.784.150,00
- Pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi barang persediaan tahun 2025 yang mengurangi aset tetap sebesar Rp 3.271.300,00
- Pengurangan dari reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi aset tak berwujud tahun 2025 yang mengurangi aset tetap sebesar Rp 1.387.500.000,00
- Pengurangan dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan menjadi KDP tahun 2025 yang mengurangi aset tetap sebesar Rp 91.985.700,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- k. Pengurangan dari reklasifikasi asset tetap jalan, irigasi, dan jaringan menjadi peralatan dan mesin tahun 2025 yang mengurangi asset tetap sebesar Rp 6.379.433.037,00

5.3.1.2.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 53.021.148.643,00 dan Rp 53.021.148.643,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Tanah Sarana Pelayanan Rumah Sakit	53,021,148,643,00	53,021,148,643,00	-	0,00
	53,021,148,643,00	53,021,148,643,00	-	0,00

Adapun mutasi aset tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Tanah Tahun 2025

No.	Tanah	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Tanah (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Tanah	53.021.148.643,00	0,00	0,00	0,00	53.021.148.643,00
	Jumlah Tanah	53.021.148.643,00	0,00	0,00	0,00	53.021.148.643,00

5.3.1.2.2. Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 705.950.092.280,96 dan Rp 689.736.021.123,96 meningkat sebesar Rp 16.214.071.157,00 atau 2,35% dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan Dan Mesin	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Peralatan Dan Mesin	705.950.092.280,96	689.736.021.123,96	16.214.071.157,00	2,35
	705.950.092.280,96	689.736.021.123,96	16.214.071.157,00	2,35

Adapun mutasi aset peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	Peralatan dan Mesin	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Peralatan dan Mesin (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Peralatan dan Mesin	689.736.021.123,96	0,00	17.717.626.607,00	1.503.555.450,00	705.950.092.280,96
	Jumlah Peralatan dan Mesin	689.736.021.123,96	0,00	17.717.626.607,00	1.503.555.450,00	705.950.092.280,96

5.3.1.2.3. Gedung Dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 459.830.761.078,53 dan Rp 440.966.867.318,53 meningkat sebesar Rp 18.863.893.760,00 atau 4,28% dengan rincian sebagai berikut:

Gedung Dan Bangunan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Gedung Dan Bangunan	459.830.761.078,53	440.966.867.318,53	18.863.893.760,00	4,28
	459.830.761.078,53	440.966.867.318,53	18.863.893.760,00	4,28

Adapun mutasi aset gedung dan bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No.	Gedung dan Bangunan	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Gedung dan Bangunan (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Gedung dan Bangunan	440.966.867.318,53	0,00	18.955.879.460,00	91.985.700,00	459.830.761.078,53
	Jumlah Gedung dan Bangunan	440.966.867.318,53	0,00	18.955.879.460,00	91.985.700,00	459.830.761.078,53

5.3.1.2.4. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 34.728.796.675,61 dan Rp 34.658.792.083,61 meningkat sebesar Rp 70.004.592,00 atau 0,20% dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	34.728.796.675,61	34.658.792.083,61	70.004.592,00	0,20
	34.728.796.675,61	34.658.792.083,61	70.004.592,00	0,20

Adapun mutasi aset jalan, irigasi, dan jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025

No.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.658.792.083,61	0,00	6.449.437.629,00	6.379.433.037,00	34.728.796.675,61
	Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.658.792.083,61	0,00	6.449.437.629,00	6.379.433.037,00	34.728.796.675,61

5.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 160.139.000,00 dan Rp 160.139.000,00 meningkat sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Aset Tetap Lainnya	160,139,000,00	160,139,000,00	-	0,00
	160,139,000,00	160,139,000,00	-	0,00

Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No.	Aset Tetap Lainnya	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Aset Tetap Lainnya (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Aset Tetap Lainnya	160,139,000,00	0,00	0,00	0,00	160,139,000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	160,139,000,00	0,00	0,00	0,00	160,139,000,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.2.6. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar (Rp 773.158.569.304,05) dan (Rp 698.696.797.581,35) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Akumulasi Penyusutan	(773.158.569.304,05)	(698.696.797.581,35)	(74.461.771.722,70)	10,66
	(773.158.569.304,05)	(698.696.797.581,35)	(74.461.771.722,70)	10,66

Adapun mutasi akumulasi penyusutan dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No.	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Akm. Penyusutan Peralatan Dan Mesin	-579.388.595.684,65	0,00	-51.518.789.088,81	-345.078.489,58	-630.562.306.283,88
2	Akm. Penyusutan Gedung Dan Bangunan	-107.357.539.509,33	0,00	-30.189.033.452,18	-8.938.574.781,65	-128.607.998.179,86
3	Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	-11.950.662.387,37	0,00	-2.037.602.452,94	0,00	-13.988.264.840,31
4	Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyusutan	-698.696.797.581,35	0,00	-83.745.424.993,93	-9.283.653.271,23	-773.158.569.304,05

5.3.1.2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 91.985.700,00 dan Rp 18.976.530.335,00 mengalami berkurang sebesar Rp 18.884.544.635,00 atau 99,52% dengan rincian sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	91.985.700,00	18.976.530.335,00	(18.884.544.635,00)	-99,52
	91.985.700,00	18.976.530.335,00	(18.884.544.635,00)	-99,52

Adapun mutasi konstruksi dalam pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan 2025

No.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Konstruksi dalam Pengerjaan	18.976.530.335,00	0,00	91.985.700,00	18.976.530.335,00	91.985.700,00
	Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan	18.976.530.335,00	0,00	91.985.700,00	18.976.530.335,00	91.985.700,00

5.3.1.3 Aset Lainnya

5.3.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 2.163.452.291,67 dan Rp 1.800.346.604,17 bertambah sebesar Rp 363.105.687,50 atau 20,17% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Aset Tak Berwujud	2.163.452.291,67	1.800.346.604,17	363.105.687,50	20,17
	2.163.452.291,67	1.800.346.604,17	363.105.687,50	20,17

Adapun mutasi aset tak berwujud dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

No.	Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Aset Tak Berwujud (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Aset Tak Berwujud	4.786.783.325,00	168.454.675,00	1.387.500.000,00	0,00	6.342.738.000,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.986.436.720,83	-198.112.487,50	-994.736.500,00	0,00	-4.179.285.708,33
	Jumlah Aset Tak Berwujud	1.800.346.604,17	-29.657.812,50	392.763.500,00	0,00	2.163.452.291,67

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.3.2. Aset Lain – Lain

Saldo aset lain lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 291.768.737,50 dan Rp 48.389.062,50 atau bertambah sebesar Rp 243.379.675,00 atau 502,96% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lain - Lain	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Aset Lain - Lain	291.768.737,50	48.389.062,50	243.379.675,00	502,96
	291.768.737,50	48.389.062,50	243.379.675,00	502,96

Adapun mutasi aset lain lain dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025

No.	Aset Lain-Lain	Saldo Akhir 31-Des-24 (Rp)	Koreksi saldo awal (Rp)	Mutasi Aset Lain-Lain (Rp)		Saldo Akhir 31-Des-25 (Rp)
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
1	Aset Lain-Lain	6.023.124.469,22	-168.454.675,00	243.379.675,00	0,00	6.098.049.469,22
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	-6.023.124.469,22	216.843.737,50	0,00	0,00	-5.806.280.731,72
	Jumlah Aset Lain-Lain	0,00	48.389.062,50	243.379.675,00	0,00	291.768.737,50

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.2.1.1. Utang Usaha

Saldo utang usaha per 31 Desember 2024 dan 2025 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 berkurang Rp 0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Utang Usaha	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Utang Usaha	-	-	-	0,00
	-	-	-	0,00

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendaptan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 50.061.532,88 dan Rp 86.128.271,56 atau menurun sebesar Rp 36.742.663,34 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Pendaptan Diterima Dimuka	50.061.532,88	86.128.271,56	(36.066.738,68)	-41,88
	50.061.532,88	86.128.271,56	(36.066.738,68)	-41,88

5.3.2.1.3. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Saldo utang belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 telah disajikan kembali (restated). Saldo tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 4.975.393.063,30 dan Rp 1.369.343.188,00 berkurang Rp 2.097.932.134,30 atau 60,51% dengan rincian sebagai berikut. Lihat Catatan 5.0.2 untuk detail penyajian kembali

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Masih Harus Dibayar	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Utang Beban Jasa telepon	1.218.734,00	3.799.129,00	(2.580.395,00)	-67,92
Utang Beban Jasa listrik	441.816.708,00	439.247.760,00	2.568.948,00	0,58
Utang Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	25.122.695,00	-	25.122.695,00	100,00
Utang Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran	3.857.824.742,00	-	3.857.824.742,00	100,00
Utang Beban Makanan Dan Minuman Rapat	11.716.819,00	11.323.199,00	393.620,00	3,48
Utang Beban Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	106.783.365,30	130.743.100,00	(23.959.734,70)	-18,33
Utang Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	530.910.000,00	784.230.000,00	(253.320.000,00)	100,00
	4.975.393.063,30	1.369.343.188,00	3.606.049.875,30	263,34

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 berkurang Rp 0,00 atau 0,00%. Utang tersebut merupakan utang yang bersumber dari dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

Utang Jangka Pendek Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
	-	-	-	0,00

5.3.2.1.5. Utang Kepada BUD

Saldo utang kepada BUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 meningkat Rp 0,00 atau 0,00%. Utang tersebut merupakan utang yang bersumber dari dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kepada BUD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
	-	-	-	100,00
	-	-	-	100,00

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

5.3.2.2.1. Utang Jangka Panjang

RSUD Banten per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih RSUD Banten pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD Banten. Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 520.163.882.651,97 mengalami penurunan sebesar Rp 51.461.050.023 atau (9,00%) jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 571.624.932.675,02.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas Sebagai Entitas Akuntansi

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.4.1.1 Ekuitas Awal

Pada tahun 2025 saldo awal ekuitas RSUD Banten sebesar Rp 571.624.932.675,02 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.4.1.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2025 RSUD Banten sebesar (Rp 78.070.702.340,25) yang merupakan nilai defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

5.4.1.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2025 terdapat perubahan mendasar dan luar biasa atas kebijakan akuntansi ataupun penyesuaian audit atas transaksi keuangan tahun 2025. Dampak luar biasa tersebut adalah penerimaan pendapatan dari Kementerian Kesehatan atas klaim pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp. 26.669.307.300 sesuai dengan Surat Kemenkes No. KU.04.01/D.VII.3/594/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang didanai APBN. Sehingga nilai dampak kumulatif menjadi sebesar Rp 26.609.652.317,21.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirincian sebagai berikut:

RINCIAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN/KEBIJAKAN MENDASAR

Yang Menambah

Koreksi Piutang	-
Koreksi Penyisihan Piutang	11.844.175,50
Koreksi Nilai Aset Tetap	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan	9.302.384.521,23
Koreksi Ekuitas Lainnya	-
Sub Jumlah 1	9.314.228.696,73

Yang Mengurangi

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	-
Koreksi Belanja Dibayar Dimuka	84.370,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	9.310.110.809,52
Sub Jumlah 2	9.310.195.179,52

Jumlah (Sub Jumlah 1 - Sub Jumlah 2) (2) **4.033.517,21**

Penerimaan Luar Biasa dari Claim Covid (3) **26.669.307.300,00**

Koreksi Atas Saldo Awal Ekuitas (4) **(63.688.500)**

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (2+3+4) **26.609.652.317,21**

5.4.1.4 RK PPKD

RK PPKD merupakan akun timbal balik / *reciprocal* yang merupakan akun pencatat transaksi antara transfer sumber daya ekonomi antara PPKD dengan SKPD. Tahun 2025 RK PPKD pada RSUD Banten sebesar Rp 75.770.733.949,32.

5.4.1.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal ekuitas ditambah dengan surplus/defisit LO, ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar serta RK PPKD. Dari perhitungan tersebut, nilai Ekuitas Akhir RSUD Banten tahun 2025 sebesar Rp 520.163.882.651,97 dan tahun 2024 sebesar Rp 571.624.932.675,02.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun ekuitas akhir RSUD Banten tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	571.624.932.675,02	619.076.595.364,91
SURPLUS/DEFISIT -LO	(125.663.335.323,91)	(196.583.946.945,16)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
KOREKSI SALDO EKUITAS	(1.508.793.665,67)	-
KOREKSI SALDO AWAL EKUITAS	(63.688.500,00)	-
LAIN-LAIN	4.033.517,21	702.015.147,27
RK PPKD	75.770.733.949,32	148.430.269.108,00
EKUITAS AKHIR	520.163.882.651,97	571.624.932.675,02

5.4.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas Sebagai Entitas Pelaporan

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.4.2.1 Ekuitas Awal

Pada tahun 2025 saldo awal ekuitas RSUD Banten sebesar Rp 571.561.244.175,02 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.4.2.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit) sebesar (Rp 78.070.702.340,25) merupakan nilai defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi ekuitas pada Neraca.

5.4.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2025 terdapat perubahan mendasar dan luar biasa atas kebijakan akuntansi ataupun penyesuaian audit atas transaksi keuangan tahun 2025. Dampak luar biasa tersebut adalah penerimaan pendapatan dari Kementerian Kesehatan atas klaim pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

26.669.307.300 sesuai dengan Surat Kemenkes No. KU.04.01/D.VII.3/594/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang didanai APBN. Sehingga nilai dampak kumulatif menjadi sebesar Rp 26.609.652.317,21. Adapun dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dirincian sebagai berikut:

RINCIAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN/KEBIJAKAN MENDASAR

Yang Menambah

Koreksi Piutang	-
Koreksi Penyisihan Piutang	11.844.175,50
Koreksi Nilai Aset Tetap	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan	9.302.384.521,23
Koreksi Ekuitas Lainnya	-
Sub Jumlah 1	9.314.228.696,73

Yang Mengurangi

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	-
Koreksi Belanja Dibayar Dimuka	84.370,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	9.310.110.809,52
Sub Jumlah 2	9.310.195.179,52

Jumlah (Sub Jumlah 1 - Sub Jumlah 2) (2) **4.033.517,21**

Penerimaan Luar Biasa dari Claim Covid (3) **26.669.307.300,00**

Koreksi Atas Saldo Awal Ekuitas (4) **(63.688.500)**

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (2+3+4) **26.609.652.317,21**

5.4.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal ekuitas ditambah dengan surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Dari perhitungan tersebut, nilai Ekuitas Akhir RSUD Banten tahun 2025 sebesar Rp 520.163.882.651,98 dan tahun 2024 sebesar Rp 571.624.932.675,02. Adapun ekuitas akhir RSUD Banten tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	571.624.932.675,02	619.076.595.364,91
SURPLUS/DEFISIT -LO	(78.070.702.340,25)	(48.153.677.837,16)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
PENERIMAAN LUAR BIASA DARI CLAIM COVID	26.669.307.300,00	0,00
KOREKSI ATAS SALDO AWAL EKUITAS	(63.688.500,00)	0,00
LAIN-LAIN	4.033.517,21	702.015.147,27
EKUITAS AKHIR	520.163.882.651,98	571.624.932.675,02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

Tujuan Laporan Operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas.

5.5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional Sebagai Entitas Akuntansi

5.5.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak RSUD Banten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Pendapatan Hibah, Pendapatan Usaha Lainnya yang dapat dirincikan sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	KENAIKAN (PENURUNAN)	TREN
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	211.541.793.808	167.070.015.304	44.471.778.505	26,62%
Pendapatan Usaha Lainnya	1.273.363.860	1.041.322.153	232.041.708	22,28%
JUMLAH	212.815.157.669	168.111.337.456	44.703.820.213	48,90%

Realisasi pendapatan LO tahun 2025 sebesar Rp 212.815.833.593,49 meningkat sebesar Rp 44.471.778.504,90 atau 26,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 168.111.337.456,02.

5.5.2.1.1. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 211.541.793.808,40 dan Rp 167.070.015.303,50 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	211.541.739.808,40	167.070.015.303,50

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.1.2. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00

5.5.2.1.3. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.274.039.785,09 dan Rp 1.041.322.152,52 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
Pendapatan Usaha Lainnya	1.273.363.860	1.041.322.153
JUMLAH	212.815.157.669	168.111.337.456

5.5.1.2 Beban LO

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokan jenis beban terdiri dari:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyusutan Aset
- Beban Lain – Lain

Saldo Beban (Beban Jasa) per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali. Realisasi beban tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 366.286.552.633,53

dan Rp 364.300.552.623,22 meningkat sebesar Rp 1.986.000.010,31 atau 0,55%.

Realisasi beban dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Pegawai	113.494.591.312,00	88.800.965.236,00	24.693.626.076,00	27,81
Beban Persediaan	83.623.835.447,44	80.771.070.658,61	2.852.764.788,83	3,53
Beban Jasa	88.723.088.583,75	108.955.226.904,69	(20.232.138.320,94)	-18,57
Beban Pemeliharaan	5.009.008.871,30	4.997.306.772,00	11.702.099,30	0,23
Beban Perjalanan Dinas	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74
Beban Penyusutan Aset	75.430.050.684,41	80.732.340.400,42	(5.302.289.716,01)	-6,57
Beban Penyisihan Piutang	2.079.424,63	11.844.175,50	(9.764.750,87)	-82,44
Beban Lain - Lain	-	-	-	0,00
	366.286.552.633,53	364.300.552.623,22	1.986.000.010,31	0,55

5.5.2.2.1. Beban Pegawai

Realisasi beban pegawai tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 113.494.591.312,00 dan Rp 88.800.965.236,00. Beban pegawai tahun 2024 meningkat sebesar Rp 24.693.626.076,00 atau 27,81%. Beban pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Pegawai APBD	44.447.932.879,00	64.858.928.869,00	(20.410.995.990,00)	-31,47
Beban Pegawai BLUD	69.046.658.433,00	23.942.036.367,00	45.104.622.066,00	188,39
	113.494.591.312,00	88.800.965.236,00	24.693.626.076,00	27,81

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.2.2. Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 83.623.835.447,44 dan Rp 80.771.070.658,61. Beban persediaan tahun 2025 meningkat sebesar Rp 2.852.764.788,83 atau 3,53%. Beban persediaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Persediaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Bahan Bangunan Dan Konstruksi	12.335.200,00	11.006.160,00	1.329.040,00	12,08
Beban Bahan Kimia	21.778.719,35	15.801.813,65	5.976.905,70	37,82
Beban Bahan Bakar Dan Pelumas	367.036.204,00	207.989.300,00	159.046.904,00	76,47
Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	57.587.000,00	(57.587.000,00)	-100,00
Beban Isi Tabung Gas	3.019.268.054,39	2.692.056.071,00	327.211.983,39	12,15
Beban Bahan Lainnya	16.896.000,00	12.672.000,00	4.224.000,00	33,33
Beban Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	0,00
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	39.012.714.716,57	36.752.135.114,37	2.260.579.602,20	6,15
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	7.576.509.667,50	9.430.969.830,74	(1.854.460.163,24)	-19,66
Beban Suku Cadang Alat Bengkel	4.681.300,00	4.700.600,00	(19.300,00)	-0,41
Beban Suku Cadang Lainnya	-	65.000,00	(65.000,00)	-100,00
Beban Alat Tulis Kantor	280.034.878,29	553.807.581,52	(273.772.703,23)	-49,43
Beban Kertas Dan Cover	112.290.057,32	137.458.443,00	(25.168.385,68)	-18,31
Beban Bahan Cetak	2.708.000,00	-	2.708.000,00	100,00
Beban Benda Pos	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
Beban Bahan Komputer	576.863.938,21	502.217.977,00	74.645.961,21	14,86
Beban Perabot Kantor	2.406.211.032,62	1.980.765.085,00	425.445.947,62	21,48
Beban Alat Listrik	348.878.990,25	195.039.160,00	153.839.830,25	78,88
Beban Perlengkapan Dinas	1.892.000,00	1.140.000,00	752.000,00	65,96
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.112.855.286,25	648.687.528,00	464.167.758,25	71,55
Beban Obat	23.543.560.461,33	22.205.878.288,83	1.337.682.172,50	6,02
Beban Natura	5.198.320.941,36	5.361.093.705,50	(162.772.764,14)	-3,04
	83.623.835.447,44	80.771.070.658,61	2.852.764.788,83	3,53

5.5.2.2.3. Beban Jasa

Saldo Beban (Beban Jasa) per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali. Realisasi beban jasa tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 88.723.088.583,75 dan Rp 108.955.226.904,69. Beban jasa tahun 2025 berkurang sebesar Rp 20.232.138.320,94 atau (18,57%).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban jasa dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Jasa APBD	-	35.824.466.976,00	(35.824.466.976,00)	-100,00
Beban Jasa BLUD	88.723.088.583,75	73.130.759.928,69	15.592.328.655,06	21,32
	88.723.088.583,75	108.955.226.904,69	(20.232.138.320,94)	-18,57

5.5.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Realisasi beban pemeliharaan tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 5.009.008.871,30 dan Rp 4.997.306.772,00. Beban pemeliharaan tahun 2025 bertambah sebesar Rp 11.702.099,30 atau 0,23%. Beban pemeliharaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.067.656.784,30	2.506.744.915,00	560.911.869,30	22,38
Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.941.352.087,00	2.490.561.857,00	(549.209.770,00)	-22,05
Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	-	-	-	0,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00
	5.009.008.871,30	4.997.306.772,00	11.702.099,30	0,23

5.5.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi beban perjalanan dinas tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 3.898.310,00 dan Rp 31.798.476,00. Beban perjalanan dinas tahun 2025 berkurang sebesar Rp 27.900.166,00 atau (87,74%). Beban perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban perjalanan dinas dalam negeri	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74
	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74

5.5.2.2.6. Beban Penyusutan Aset

Realisasi beban penyusutan aset tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 75.430.050.684,41 dan Rp 80.732.340.400,42. Beban penyusutan aset tahun 2025 menurun sebesar Rp 5.302.289.716,01 atau 6,57%. Beban penyusutan aset dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Penyusutan Aset	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	51.174.141.302,35	57.270.175.663,66	(6.096.034.361,31)	-10,64
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	21.223.570.429,12	20.769.817.267,62	453.753.161,50	2,18
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan	2.037.602.452,94	1.665.307.073,31	372.295.379,63	22,36
Beban Amortisasi	994.736.500,00	1.027.040.395,83	(32.303.895,83)	-3,15
	75.430.050.684,41	80.732.340.400,42	(5.302.289.716,01)	-6,57

5.5.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 2.079.424,63 dan Rp 11.844.175,50. Beban penyisihan piutang tahun 2025 menurun sebesar Rp 9.764.750,87 atau 82,44%. Dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
BPJS Kesehatan	0,00	11.844.175,50	(11.844.175,50)	-100,00
BPJS Ketenagakerjaan	1.204.883,00	0,00	1.204.883,00	100,00
BKD Provinsi Banten	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
PT. Asuransi Jasaraharja	490.759,13	0,00	490.759,13	100,00
PT. Taspen	339.882,50	0,00	339.882,50	100,00
RS Drajat Prawiranegara	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
	2.079.424,63	11.844.175,50	(9.764.750,88)	-82,44

5.5.2.2.8. Beban Lain – Lain

Realisasi beban lain – lain tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban lain – lain tahun 2025 menurun 0,00 atau 0,00%. Beban lain – lain merupakan beban atas reklasifikasi aset tetap esktrakomtabel. Dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Lain - Lain	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Lain - Lain	-	-	-	-
	-	-	-	-

5.5.1.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Saldo Deifisit per 31 Desember 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0. 3 untuk detail penyajian kembali Pos surplus/defisit dari kegiatan operasional merupakan hasil pengurangan antara pendapatan operasional dengan beban operasional. Realisasi surplus/defisit dari kegiatan operasional tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (76.191.867.349,72) dan (Rp 196.189.215.167,20)

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.1.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi surplus/defisit dari kegiatan non operasional tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (Rp 370.041.324,87) dan (Rp 394.731.777,96). Dapat dirincikan sebagai berikut:

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Reklas Aset Ekstrakomptabel	-	-	-	0,00
Persediaan Usang	(370.041.324,87)	(394.731.777,96)	24.690.453,09	-6,25
	(370.041.324,87)	(394.731.777,96)	24.690.453,09	-6,25

5.5.1.5 Pos Luar Biasa

Realisasi pos luar biasa tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Pos Luar Biasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Tak Terduga	-	-	-	0,00
	-	-	-	0

5.5.1.6 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali . Pos surplus/defisit LO merupakan hasil pengurangan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Realisasi surplus/defisit LO tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (Rp 125.663.335.323,91) dan (Rp 196.583.946.945,16).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional Sebagai Entitas Pelaporan

5.5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak RSUD Banten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, Pendapatan Hasil Kerja Sama, Pendapatan Hibah, Pendapatan Usaha Lainnya yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	211.541.793.808,40	167.070.015.303,50	44.471.778.504,90	26,62
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-	-	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-	-	0,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	1.273.363.860,42	1.041.322.152,52	232.041.707,90	22,28
Pendapatan APBN/APBD	75.770.733.949,32	148.430.269.108,00	(72.659.535.158,68)	-48,95
	288.585.891.618,14	316.541.606.564,02	(27.955.714.945,88)	-8,83

Realisasi pendapatan LO tahun 2025 sebesar Rp 288.585.891.618,14 menurun sebesar (Rp 27.955.714.945,88) atau -8,83% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 316.541.606.564,02.

5.5.2.1.1. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 211.541.793.808,40 dan Rp 167.070.015.303,50 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	211.541.793.808,40	167.070.015.303,50

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.1.2. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00

5.5.2.1.3. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.273.363.860,42 dan Rp 1.041.322.152,52 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Usaha Lainnya	1.273.363.860,42	1.041.322.152,52

5.5.2.1.4. Pendapatan APBN/APBD

Pendapatan APBN/APBD tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 75.770.733.949,32 dan Rp 148.430.269.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	Realisasi TA 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan APBN/APBD	75.770.733.949,32	148.430.269.108,00

5.5.2.2. Beban LO

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokan jenis beban terdiri dari:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyusutan Aset
- Beban Lain – Lain

Saldo Beban (Beban Jasa) per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali. Realisasi beban tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 366.286.552.633,53 dan Rp 364.300.552.623,22 meningkat sebesar Rp 1.986.000.010,31 atau 0,55%.

Realisasi beban dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Pegawai	113.494.591.312,00	88.800.965.236,00	24.693.626.076,00	27,81
Beban Persediaan	83.623.835.447,44	80.771.070.658,61	2.852.764.788,83	3,53
Beban Jasa	88.723.088.583,75	108.955.226.904,69	(20.232.138.320,94)	-18,57
Beban Pemeliharaan	5.009.008.871,30	4.997.306.772,00	11.702.099,30	0,23
Beban Perjalanan Dinas	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74
Beban Penyusutan Aset	75.430.050.684,41	80.732.340.400,42	(5.302.289.716,01)	-6,57
Beban Penyisihan Piutang	2.079.424,63	11.844.175,50	(9.764.750,87)	-82,44
Beban Lain - Lain	-	-	-	0,00
	366.286.552.633,53	364.300.552.623,22	1.986.000.010,31	0,55

5.5.2.2.1. Beban Pegawai

Realisasi beban pegawai tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 113.494.591.312,00 dan Rp 88.800.965.236,00. Beban pegawai tahun 2024 meningkat sebesar Rp 24.693.626.076,00 atau 27,81%. Beban pegawai dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Pegawai APBD	44.447.932.879,00	64.858.928.869,00	(20.410.995.990,00)	-31,47
Beban Pegawai BLUD	69.046.658.433,00	23.942.036.367,00	45.104.622.066,00	188,39
	113.494.591.312,00	88.800.965.236,00	24.693.626.076,00	27,81

5.5.2.2.2. Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 83.557.372.502,82 dan Rp 80.771.070.658,61. Beban persediaan tahun 2025 meningkat sebesar Rp 2.786.301.844,21 atau 3,45%. Beban persediaan dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Persediaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Bahan Bangunan Dan Konstruksi	12.335.200,00	11.006.160,00	1.329.040,00	12,08
Beban Bahan Kimia	21.778.719,35	15.801.813,65	5.976.905,70	37,82
Beban Bahan Bakar Dan Pelumas	367.036.204,00	207.989.300,00	159.046.904,00	76,47
Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	57.587.000,00	(57.587.000,00)	-100,00
Beban Isi Tabung Gas	3.019.268.054,39	2.692.056.071,00	327.211.983,39	12,15
Beban Bahan Lainnya	16.896.000,00	12.672.000,00	4.224.000,00	33,33
Beban Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	0,00
Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	39.012.714.716,57	36.752.135.114,37	2.260.579.602,20	6,15
Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	7.576.509.667,50	9.430.969.830,74	(1.854.460.163,24)	-19,66
Beban Suku Cadang Alat Bengkel	4.681.300,00	4.700.600,00	(19.300,00)	-0,41
Beban Suku Cadang Lainnya	-	65.000,00	(65.000,00)	-100,00
Beban Alat Tulis Kantor	280.034.878,29	553.807.581,52	(273.772.703,23)	-49,43
Beban Kertas Dan Cover	112.290.057,32	137.458.443,00	(25.168.385,68)	-18,31
Beban Bahan Cetak	2.708.000,00	-	2.708.000,00	100,00
Beban Benda Pos	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
Beban Bahan Komputer	576.863.938,21	502.217.977,00	74.645.961,21	14,86
Beban Perabot Kantor	2.406.211.032,62	1.980.765.085,00	425.445.947,62	21,48
Beban Alat Listrik	348.878.990,25	195.039.160,00	153.839.830,25	78,88
Beban Perlengkapan Dinas	1.892.000,00	1.140.000,00	752.000,00	65,96
Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.112.855.286,25	648.687.528,00	464.167.758,25	71,55
Beban Obat	23.543.560.461,33	22.205.878.288,83	1.337.682.172,50	6,02
Beban Natura	5.198.320.941,36	5.361.093.705,50	(162.772.764,14)	-3,04
	83.623.835.447,44	80.771.070.658,61	2.852.764.788,83	3,53

5.5.2.2.3. Beban Jasa

Saldo Beban (Beban Jasa) per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali. Realisasi beban jasa tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 88.723.088.583,75 dan Rp 108.955.226.904,69. Beban jasa tahun 2024 berkurang sebesar Rp 20.323.138.320,94 atau (18,57%).

Beban jasa dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Jasa APBD	-	35.824.466.976,00	(35.824.466.976,00)	-100,00
Beban Jasa BLUD	88.723.088.583,75	73.130.759.928,69	15.592.328.655,06	21,32
	88.723.088.583,75	108.955.226.904,69	(20.232.138.320,94)	-18,57

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Realisasi beban pemeliharaan tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 5.009.008.871,30 dan Rp 4.997.306.772,00. Beban pemeliharaan tahun 2025 bertambah sebesar Rp 11.702.099,30 atau 0,23%. Beban pemeliharaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.067.656.784,30	2.506.744.915,00	560.911.869,30	22,38
Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.941.352.087,00	2.490.561.857,00	(549.209.770,00)	-22,05
Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	-	-	-	0,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0,00
	5.009.008.871,30	4.997.306.772,00	11.702.099,30	0,23

5.5.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi beban perjalanan dinas tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 3.898.310,00 dan Rp 31.798.476,00. Beban perjalanan dinas tahun 2025 berkurang sebesar Rp 27.900.166,00 atau (87,74%). Beban perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban perjalanan dinas dalam negeri	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74
	3.898.310,00	31.798.476,00	(27.900.166,00)	-87,74

5.5.2.2.6. Beban Penyusutan Aset

Realisasi beban penyusutan aset tahun 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp 75.430.050.684,41 dan Rp 80.732.340.400,42. Beban penyusutan aset tahun 2025 menurun sebesar Rp 5.302.289.716,01 atau 6,57%. Beban penyusutan aset dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Penyusutan Aset	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	51.174.141.302,35	57.270.175.663,66	(6.096.034.361,31)	-10,64
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	21.223.570.429,12	20.769.817.267,62	453.753.161,50	2,18
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan	2.037.602.452,94	1.665.307.073,31	372.295.379,63	22,36
Beban Amortisasi	994.736.500,00	1.027.040.395,83	(32.303.895,83)	-3,15
	75.430.050.684,41	80.732.340.400,42	(5.302.289.716,01)	-6,57

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.5.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 2.079.424,63 dan Rp 11.844.175,50. Beban penyisihan piutang tahun 2025 menurun sebesar Rp 9.764.750,87 atau 82,44%. Dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
BPJS Kesehatan	0,00	11.844.175,50	(11.844.175,50)	-100,00
BPJS Ketenagakerjaan	1.204.883,00	0,00	1.204.883,00	100,00
BKD Provinsi Banten	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
PT. Asuransi Jasaraharja	490.759,13	0,00	490.759,13	100,00
PT. Taspen	339.882,50	0,00	339.882,50	100,00
RS Drajat Prawiranegara	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
	2.079.424,63	11.844.175,50	(9.764.750,88)	-82,44

5.5.2.2.8. Beban Lain – Lain

Realisasi beban lain – lain tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban lain – lain tahun 2025 menurun 0,00 atau 0,00%. Beban lain – lain merupakan beban atas reklasifikasi aset tetap esktrakomtabel. Dapat dirincikan sebagai berikut:

Beban Lain - Lain	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Lain - Lain	-	-	-	-
	-	-	-	-

5.5.2.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Saldo Deifisit per 31 Desember 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0. 3 untuk detail penyajian kembali. Pos surplus/defisit dari kegiatan operasional merupakan hasil pengurangan antara pendapatan operasional dengan beban operasional. Realisasi surplus/defisit dari kegiatan operasional tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (Rp - 77.700.661.015,39) dan (Rp 47.822.634.559,20)

5.5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi surplus/defisit dari kegiatan non operasional tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (Rp 370.041.324,87) dan (Rp 394.731.777,96). Dapat dirincikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Reklas Aset Ekstrakomptabel	-	-	-	0,00
Persediaan Usang	(370.041.324,87)	(394.731.777,96)	24.690.453,09	-6,25
	(370.041.324,87)	(394.731.777,96)	24.690.453,09	-6,25

5.5.2.5 Pos Luar Biasa

Realisasi pos luar biasa tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Pos Luar Biasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
	2025	2024		
Beban Tak Terduga	-	-	-	0,00
	-	-	-	0

5.5.2.6 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember tahun 2025 telah disajikan kembali (restated). Lihat Catatan 5.0.3 untuk detail penyajian kembali . Pos surplus/defisit LO merupakan hasil pengurangan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Realisasi surplus/defisit LO tahun 2025 dan tahun 2024 masing – masing (Rp 78.070.702.340,25) dan (Rp 48.153.677.837,16).

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.6 Penjelasan Pos – Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Tujuan dari LAK adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas RSUD Banten tahun 2025 merupakan Arus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Laporan Arus Kas	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	13.304.776.040,14	41.860.719.161,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(18.010.359.999,00)	(49.890.949.105,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Penerimaan Pendaptan Luar Biasa	26.669.307.300,00	0,00
Jumlah	21.963.723.341,14	(8.030.229.943,42)

5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	286.122.413.004,14	326.060.167.235,58
Jumlah Arus Kas Keluar	272.817.636.964,00	284.199.448.074,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	13.304.776.040,14	41.860.719.161,58

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari luar.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

2018	Maret		0,50%
2018	April		0,50%
2018	Mei		0,50%
2018	Juni		0,50%
2018	Juli		0,50%
2018	Agustus	430.000,00	0,50%
2018	September	1.526.658.800,00	0,50%
2018	Oktober	1.376.281.300,00	0,50%
2018	November	1.206.321.000,00	0,50%
2018	Desember	1.300.000.000,00	0,50%
S		5.409.691.100,00	
2018	Januari	-	50%
2018	Februari	-	50%
2018	Maret	-	50%
2018	April	-	50%
2018	Mei	-	50%
2018	Juni	-	50%
2018	Juli	-	50%
2018	Agustus	-	50%
2018	September	-	50%

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	18,010,359,999,00	49,890,949,105,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(18,010,359,999,00)	(49,890,949,105,00)

Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	11,338,193,570,0	25,659,099,225,0
Perolehan Gedung dan Bangunan	222,728,800,0	23,129,949,880,0
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,449,437,629,0	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	1,101,900,000,0
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	18,010,359,999,0	49,890,949,105,0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(18,010,359,999,0)	(49,890,949,105,0)

5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-

5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah misalnya penerimaan perhitungan fihak

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

ke tiga (PFK) dan pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. Penerimaan / pengeluaran PFK yaitu penerimaan / penyeteroran potongan-potongan SP2D seperti potongan taspen, taperum, pajak penghasilan dan PPN ke kas negara.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Jumlah Arus Kas Keluar	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-

Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Jumlah Arus Masuk Kas	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Jumlah Arus Keluar Kas	17,247,048,239,00	14,243,931,468,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	21,963,723,341,14	(8,030,229,943,42)

Penerimaan Pendapatan Luar Biasa

Merupakan penerimaan pendapatan dari Kementerian Kesehatan atas klaim pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp. 26.669.307.300 sesuai dengan Surat Kemenkes No. KU.04.01/D.VII.3/594/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang didanai APBN, yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam RBA RSUD Banten tahun 2025.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Laporan Arus Kas	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	13.304.776.040,14	41.860.719.161,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(18.010.359.999,00)	(49.890.949.105,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Luar Biasa	26.669.307.300,00	0,00
Jumlah	21.963.723.341,14	(8.030.229.943,42)

5.6.6 Saldo Awal Kas

Berikut merupakan rincian saldo awal kas RSUD Banten Tahun 2025 dan 2024:

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal Kas	<u>6,916,516,328,67</u>	<u>14,946,746,272,09</u>

Saldo awal kas tahun 2025 adalah saldo akhir kas tahun 2024.

5.6.7 Saldo Akhir Kas

Berikut merupakan rincian saldo akhir kas RSUD Banten Tahun 2025 dan 2024:

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Saldo Akhir Kas	<u>28,880,239,669,81</u>	<u>6,916,516,328,67</u>

Saldo akhir kas adalah saldo awal ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas selama satu periode tertentu. Rincian saldo kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025

Sado Akhir Kas	2025	2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	6,093,087,00
Bank Pembangunan Daerah Banten	28,880,239,669,81	6,910,423,241,67
No.Rekening 0801000479		
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember	28,880,239,669,81	6,916,516,328,67

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Sekilas Tentang RSUD Banten

6.1.1 Sejarah Singkat RSUD Banten

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat Strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang resmi dioperasikan pada tanggal 3 Oktober 2013 merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten dengan type rumah sakit kelas B yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 01/36/KLS/Kes/BKPM/2015 saat ini tengah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan kemudian pada tahun 2016 RSUD Banten menerapkan pola keuangan BLUD. Sebagai SKPD, RSUD Banten dipimpin oleh Direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Proses pendirian RSUD Banten dimulai pada tahun 2007 dengan penganggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yakni pengadaan lahan seluas 11.126 m², kemudian pada tahun 2008 luas area bertambah menjadi 30.498 m² serta dimulainya pembangunan gedung A dan gedung B. Pembangunan gedung C dan gedung D dilanjutkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi, RSUD Banten memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, keberadaan RSUD Banten bukan hanya memberikan layanan medis, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Sesuai dengan Renstra RSUD Banten 2023 – 2026 ada 4 program kebijakan pengembangan yaitu:

a. Pengembangan SDM

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Penambahan Fasilitas
- c. Penambahan Sarana
- d. Pengembangan standarisasi pelayanan melalui akreditasi termasuk perencanaan perbaikan strategis

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomr 20 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten maka pada tanggal 3 Oktober 2013 RSUD Banten diresmikan dan mulai beroperasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/36/KLAS/KES/BKPMPT/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Penetapan Tipe B dan dengan Nomor 04/36/IOT/KES/BKPMPT/2015 tentang ijin operasional RSUD Banten sebagai rumah sakit dengan tipe B.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, RSUD Banten memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, keberadaan RSUD Banten bukan hanya memberikan layanan medis, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

RSUD Banten ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan dan berperan sebagai rumah sakit rujukan regional. Luas lahan RSUD Banten sekitar 78.360 meter persegi. RSUD Banten dilengkapi fasilitas pelayanan Kesehatan yang komprehensif meliputi:

- a. Instalasi gawat darurat 24 jam
- b. Instalasi rawat jalan dengan poli spesialis dan subspesialis
- c. Instalasi rawat inap berbagai kelas
- d. Instalasi bedah sentral, ICU, NICU, dan PICU
- e. Layanan penunjang medik seperti laboratorium, radiologi, farmasi, bank darah, dan lainnya
- f. Layanan unggulan seperti Cath Lab, Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT), bronchoscopy, endoscopy dan pelayanan mata modern (OCT)

Dalam hal mutu, RSUD Banten berhasil meraih Akreditasi Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) pada tahun 2023. Pengakuan ini menjadi bukti komitmen RSUD Banten dalam menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan pada standar nasional rumah sakit.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

6.1.2 Data Umum RSUD Banten

Nama RS : Rumah Sakit Umum Daerah Banten
Kelas RS : Rumah Sakit Tipe B
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok
Jaya, Kota Serang - Banten
Telp : (0254) 8490911 - 8483442
Email : rsudbanten@bantenprov.go.id
Website : <https://rsud.bantenprov.go.id/>

6.1.3 Visi dan Misi RSUD Banten

Visi

Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah

Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- b. Mengembangkan Kompetensi SDM di seluruh Lini Rumah Sakit
- c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana RS sesuai dengan standar Rumah Sakit Rujukan yang atraktif
- d. Memberikan Pelayanan santun, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- e. Mendukung secara aktif program pemerintah dibidang kesehatan sesuai RPJMD Provinsi Banten

6.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Banten

Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, RSUD Banten mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

6.1.5 Struktur Organisasi RSUD Banten

Berikut merupakan struktur organisasi RSUD Banten tahun 2025

Direktur	: dr. Danang Hamsah Nugroho, Mkes
Wakil Direktur Pelayanan	: dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
Plt. Wakil Direktur Sarana Prasarana	: drg. Fitria Damayanti, M. M.
SDM, Pendidikan dan Pelatihan	
Wakil Direktur Umum Dan Keuangan	: -

Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang :

- a. Kepala Bidang Pelayanan Medis
- b. Kepala Bidang Keperawatan

Wakil Direktur Penunjang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang :

- a. Kepala Bidang Logistik
- b. Kepala Bidang Rekam Medis dan SIM RS

Wakil Direktur Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang :

- a. Kepala Bagian Umum
- b. Kepala Bagian Keuangan

6.1.6 Jenis Instalasi Pelayanan RSUD Banten

Sesuai dengan keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Medik Umum
- b. Pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Medik Spesialis Dasar
- d. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik
- e. Pelayanan Medik Spesialis Lain

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut
- g. Pelayanan Medik Subspesialis
- h. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
- i. Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan RSUD Banten Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13 tentang Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan lingkup RSUD Banten.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTUR RSUD BANTEN

dr. Danang Hamsah Nugroho, Mkes

Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19730702 200501 1 003

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CILOGRANG
PROVINSI BANTEN**

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
&
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RSUD MALINGPING PROVINSI BANTEN**

DAFTAR ISI

	<u>HALAMAN</u>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
NERACA	3
LAPORAN OPERASIONAL	4
LAPORAN ARUS KAS	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7 - 27

----- 000 -----



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY
CILOGRANG

Jl. Nasional III Cijengkol Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak-Banten
Email. rsudciligrangbanten@gmail.com Kode Pos. 42398

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
TENTANG
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN RSUD UWES QORNY CILOGRANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Rian Rahmat Arianto
Jabatan : Plt. Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025
2. Laporan keuangan UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan UWES QORNY CILOGRANG Kabupaten Lebak telah dimuat secara lengkap dan benar
 - b. Laporan keuangan UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ciligrang, 05 Februari 2026

RSUD UWES QORNY CILOGRANG
Plt. Direktur


dr. Rian Rahmat Arianto
NIP. 198203152011011001





Registered Public Accountant

Mohammad Sunusi & Rekan

Jakarta Garden City, La Seine,
Jl. Mahakam Blok F5 No. 6,
Cakung, Jakarta Timur
DKI Jakarta 13960

T : (021)-7989258
WA : 0853 7645 7285, 0813 2649 8306
Email : kapmsdanrekan.rh@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00011/2.1392/AU.5/11/1601-1/1/II/2026

Direktur

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN tanggal 31 Desember 2025, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternative yang realistis selain melaksanakannya.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN – lanjutan

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG PROVINSI BANTEN tidak dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas.



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOHAMMAD SUNUSI & REKAN**



MOHAMMAD SUNUSI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

I. Surono, SE., M.Ak., CA., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP. 1601

Jakarta, 5 Februari 2026



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

		2025		
	Catatan	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN				
Pendapatan jasa layanan kesehatan	C.1	3.990.000.000	4.091.468.443	102,54
Pendapatan APBD	C.2	59.547.844.816	58.047.587.001	97,48
Pendapatan Hasil Kerjasama	C.3	-	11.760.000	100,00
Pendapatan lainnya	C.4	10.000.000	13.656.668	100,00
Jumlah Pendapatan		63.547.844.816	62.164.472.112	117,82
BELANJA				
Belanja operasi				
Belanja pegawai	C.4	1.470.792.376	756.645.000	51,44
Belanja barang dan jasa	C.5	47.783.063.412	47.290.162.473	80,54
Belanja modal	C.6	14.293.989.028	14.000.320.713	88,25
Jumlah Belanja		63.547.844.816	62.047.128.186	97,64
SURPLUS/DEFISIT		-	117.343.926	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan				
Anggaran (SiLPA/SiKPA)		-	117.343.926	-
			117.343.926	

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>2025</u>
Saldo Anggaran Lebih (SAL) - awal tahun	-
Penggunaan SAL	-
	<u>-</u>
Surplus/(Defisit) LRA	117.343.926
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Setelah Penyesuaian	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-
	<u>-</u>
SAL akhir tahun	<u>117.343.926</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
N E R A C A
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	E.1	117.343.926
Piutang jasa layanan kesehatan	E.2	128.377.688
Persediaan	E.3	22.795.538.349
Jumlah aset lancar		23.041.259.963
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	E.4	
Tanah		5.021.777.000
Peralatan dan mesin		11.039.050.535
Gedung dan bangunan		90.521.841.485
Akumulasi penyusutan		(9.601.700.089)
Nilai buku		96.980.968.931
Aset Lainnya	E.5	
Software Lainnya		1.714.672.500
Akumulasi amortisasi		(71.444.688)
Nilai buku		1.643.227.813
Jumlah aset tidak lancar		98.624.196.744
JUMLAH ASET		121.665.456.706
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang belanja	E.6	455.685.042
Jumlah kewajiban jangka pendek		455.685.042
Ekuitas		
Jumlah ekuitas		121.209.771.664
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		121.665.456.706

-

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dan 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>
KEGIATAN OPERASIONAL		
Pendapatan		
Pendapatan jasa layanan kesehatan	E.1.1	4.220.491.245
Pendapatan APBD	E.1.2	58.047.587.001
Pendapatan Hasil Kerjasama	E.1.3	11.760.000
Pendapatan hibah	E.1.4	-
Pendapatan lainnya	E.1.5	13.656.668
Jumlah pendapatan		62.293.494.914
Beban		
Beban pegawai	E.1.6	873.595.000
Beban barang dan jasa	E.1.7	40.173.554.211
Beban penyusutan dan amortisasi	E.1.8	4.880.405.210
Beban penyisihan piutang tak tertagih	E.1.9	645.114
Beban ekstrakomtabel	E.1.10	470.697.665
Jumlah beban		46.398.897.200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		15.894.597.714
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.10	(818.780)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(818.780)
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		15.893.778.933

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan dari jasa layanan kesehatan	C.1	4.091.468.443
Pendapatan dari alokasi APBD	C.2	58.047.587.001
Pendapatan Hasil Kerjasama	C.3	11.760.000
Pendapatan lainnya	C.4	13.656.668
Jumlah arus kas masuk		<u>62.164.472.112</u>
Arus Kas Keluar		
Belanja pegawai	C.5	756.645.000
Belanja barang dan jasa	C.6	47.290.162.473
Jumlah arus kas keluar		<u>48.046.807.473</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>14.117.664.639</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penjualan aset tetap	C.7	-
Arus Kas Masuk		-
Arus Kas Keluar		
Perolehan aset tetap	C.7	(14.000.320.713)
Jumlah arus kas keluar		<u>(14.000.320.713)</u>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		<u>(14.000.320.713)</u>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		117.343.926
Kas dan setara kas awal tahun		<u>-</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>117.343.926</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	<u>2025</u>
Saldo ekuitas awal tahun	-
Surplus (defisit) LO	15.893.778.933
Koreksi yang menambah dan mengurangi ekuitas :	
Koreksi Persediaan	11.797.844.961
Koreksi akumulasi penyusutan	4.792.739.566
Koreksi aset tetap	88.725.408.204
Koreksi kewajiban	-
Lain-lain	-
Saldo ekuitas akhir tahun	<u>121.209.771.664</u>

Catatan terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UWES QORNY CILOGRANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal Dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

A UMUM

1. Riwayat Ringkas UPTD RSUD Cilograng

Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng Provinsi Banten merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten 89 Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Labuan dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng, secara resmi ditetapkan sebagai RSUD yang menerapkan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

RSUD Cilograng telah menempuh akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan telah memiliki sertifikat akreditasi Nomor 00619/U/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 dengan predikat "Madya". Sertifikasi berlaku sampai dengan 15 Mei 2029.

Pada tanggal 26 Mei 2025, Gubernur Banten meresmikan Operasional RSUD Cilograng sebagai rumah sakit type C.

2. Lokasi

RSUD Cilograng bertempat dan berkedudukan di Desa Cijengkol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng sebagai berikut:

Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng sebagai berikut:

a. Direktur

dr. Rian Rahmat Arianto sebagai Pelaksana Tugas Direktur UPTD RSUD Cilograng pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2025 .

b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha

c. Bidang Medis, membawahkan:

- a) Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
- b) Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.

d. Bidang Penunjang, membawahkan:

Seksi Etika, Mutu, Kerjasama dan Pengembangan

e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Jumlah sumberdaya manusia terdiri dari:

Kelompok Jabatan	PNS	Non PNS	Tugsus	Jumlah
Pejabat Struktural	8			8
Dokter Spesialis		19		19
Dokter Umum		19		19
Dokter Gigi	0			0
Perawat		133		133
Bidan		26		26
Sanitarian		3		3
Perekam Medis		10		10

A UMUM

Kelompok Jabatan	PNS	Non PNS	Tugsus	Jumlah
Pisotrafis				0
Radiografer		4		4
Nutrisi		2		2
Penata Laboratorium/Analisis Kesehatan		10		10
Perawat Gigi		5		5
Pranata Anestesi		3		3
Pranata Refraksi optik				0
Pembimbing Keselamatan Kerja		1		1
Teknisi Transfusi darah				0
Apoteker		10		10
Asisten Apoteker		10		10
Elektromedis		1		1
Epidemiolog		1		1
Kesehatan Masyarakat		3		3
Pelaksana	2	83		85
Jumlah	10	343	0	353

4. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi dan Misi

Visi "MENJADI RUMAH SAKIT YANG BERBUDAYA DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN"

b. Misi

Guna perwujudan visi yang ditetapkan maka langkah tahapan realisasi yang akan dilakukan terkandung dalam Misi Rumah Sakit:

- Menyelenggarakan pelayanan, kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya.
- Menyelenggarakan proses bisnis rumah sakit yang sehat dan produktif berbasis digitalisasi.
- Pengembangan SDM yang berkesinambungan sesuai kompetensi dan rencana strategis rumah sakit.
- Pengembangan budaya kerja di segala bidang dengan pendekatan kultur wilayah.
- Menyelenggarakan pelayanan yang mendukung program pemerintah daerah dan pusat.

c. Motto

UPTD RSUD CILOGRANG mempunyai motto:

- | | |
|-----------|--|
| Maju | Terdepan, berkembang dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat II |
| Mandiri | Mencapai kebahagiaan, keseimbangan, dan keselarasan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan di wilayah kerja nya |
| Beriman | Memiliki iman yang kuat, percaya diri, dan berpegang pada nilai-nilai spiritual dalam melayani masyarakat |
| Bersaing | Mempertahankan semangat kompetisi yang sehat, meningkatkan kualitas layanan, dan mengembangkan diri ke arah lebih baik untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat |
| Sejahtera | Mencapai kebahagiaan, keseimbangan, dan keselarasan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang kesehatan di wilayah kerja nya |

5. Fasilitas Pelayanan

RSUD Malingping memiliki fasilitas pelayanan.

1) Instalasi Rawat Jalan terdiri dari :

- Poli Penyakit Dalam
- Poli Kandungan dan Ginekologi
- Poli Anak
- Poli Bedah
- Poli THT
- Poli Mata
- Poli Neurologi/Syarat
- Poli Paru
- Poli Rehabilitasi Medis

A UMUM

- (j) Poli Kulit Kelamin.
 - (k) Poli Paru
 - (l) Poli Umum
 - (m) Poli Gizi
- 2) Instalasi Rawat Inap terdiri dari :
- | | |
|------------------------|-------|
| (a) Rawat Inap Kelas 1 | 12 TT |
| (b) Rawat Inap Kelas 2 | 24 TT |
| (c) Rawat Inap Kelas 3 | 32 TT |
| (e) Rawat Inap VIP | 6 TT |
| (f) Isolasi | 12 TT |
| (g) Perinatologi | 5 TT |
| (h) NICU | 4 TT |
| (i) Nifas | 12 TT |
| (j) -Anak | 8 TT |
| (k) HCU | 3 TT |
| (l) ICU | 6 TT |
- 3) Instalasi Rawat Jalan Khusus terdiri dari :
- | | |
|----------------------|------|
| IBS/OKA dan Anastesi | 8 TT |
|----------------------|------|

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi UPT RSUD CILOGRANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan disajikan dalam rupiah penuh.
Laporan Keuangan disusun menggunakan konsep harga perolehan (*historical cost*) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
- b. Basis Akrua dan Basis Kas
Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*)
- d. Periode akuntansi adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2. Pendapatan-LRA dan Belanja.

- a. Pendapatan-LRA
Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan transfer dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan – LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas RSUD berdasarkan asas bruto.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan- LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

b. Belanja

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis Belanja BLUD), organisasi, dan fungsi/urusan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan Belanja BLUD yang didasarkan pada jenis Belanja BLUD untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi Belanja BLUD pegawai, Belanja BLUD barang dan jasa, Belanja BLUD modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan Belanja BLUD tak terduga.

Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Belanja BLUD menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Belanja BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus Belanja BLUD melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja BLUD (penerimaan kembali Belanja BLUD) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja BLUD dibukukan sebagai pengurang Belanja BLUD pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja BLUD dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Suatu pengeluaran Belanja BLUD akan diperlakukan sebagai Belanja BLUD modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran Belanja BLUD barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis Belanja BLUD barang dan jasa dengan obyek Belanja BLUD barang non kapitalisasi. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula. Suatu pengeluaran Belanja BLUD pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja BLUD modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (b) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - (c) bertambah volume; dan/atau
 - (d) bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c) Barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja BLUD pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

Belanja BLUD barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komptabel).

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Selisih antara pendapatan-LRA dengan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

3. Pendapatan-LO dan Beban

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO BLUD diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan.

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

b. Beban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan/atau terjadinya konsumsi asset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban RSUD untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran Belanja

BLUD bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan Belanja BLUD.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

4. Aset dan Kewajiban.

a. Aset.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a) Kas dan Setara Kas

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- (a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- (b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

b) Piutang.

Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
- (d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

- (a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- (b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh RSUD.

d) Persediaan

Persediaan dapat terdiri dari:

- (a) Barang konsumsi;
- (b) Bahan untuk pemeliharaan;
- (c) Suku cadang;
- (d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (e) Bahan baku;
- (f) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (g) Barang cetakan;
- (h) Perangko dan materai;
- (i) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- (j) Barang pakai habis lainnya.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dinilai berdasarkan:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (d) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.

e) Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investas itersebut dapat diperoleh RSUD;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga di perlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan aging atas investasi non permanen.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f) Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

(a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh RSUD/pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD/pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta

(f) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa BLUD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh BLUD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran Belanja BLUD pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

Masa Manfaat, Kapitalisasi, dan Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan sebagai berikut:

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	BATAS MINIMAL KAPITALISASI (RUPIAH)	JENIS PEMELIHARAAN (KAPITALISASI)	PERSENTASE KAPITALISASI	PENAMBAHAN UMUR MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN					
1.3.2.01	ALAT BESAR					
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	2
					>50% s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	8	10.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN					
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR					
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75 %	6
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	2
					>50 % s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	2
					>50% s.d 75 %	4
					>75%	6
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	4	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	2.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	2
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	4	2.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	2.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50 %	5
					>50% s.d 75%	10
					>75%	15
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR					
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	8	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	2
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	8	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN					
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 20%	0
					>20% s.d 40%	1
					>40 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	4	1.000.000	Overhaul	>0 % s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 %s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR					
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	4	1.000.000	Overhaul	>0 %s.d 25 %	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4	1.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN					
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	4	5.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	4	5.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM					
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	4	2.500.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN					
1.3.2.09.01	SENJATA API	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	4	1.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50%	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 20%	0
					>20% s.d 40%	1
					>40% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.10	KOMPUTER					
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI					
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	4	2.500.000	Overhaul	>0 % s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN					
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PERMUNIAN					
1.3.2.13.01	SUMUR	10	10.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	3
					>50% s.d 75 %	5
					>75%	8
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10	10.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25% s.d 50%	3
					>50 % s.d 75 %	5
					>75%	8
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10	10.000.000	Overhaul	>0 % s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	3
					>50% s.d 75 %	5
					>75%	8
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI					
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA					
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	4	1.000.000	Renovasi	>0 % s.d 25 %	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.15.03	ALAT SAR	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.16	ALAT PERAGA					
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI					
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	2.500.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50% s.d 75 %	2
					>75%	3

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.2.18	RAMBU-RAMBU					
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	20	15.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50%	5
					>50% s.d 75 %	10
					>75%	15
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	20	15.000.000	Overhaul	> 0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50%	5
					>50% s.d 75 %	10
					>75%	15
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	20	15.000.000	Overhaul	>0% s.d 25 %	0
					>25 % s.d 50 %	5
					>50% s.d 75%	10
					>75%	15
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA					
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	4	1.000.000	Renovasi	>0% s.d 25 %	0
					>25% s.d 50 %	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG					
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45% s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.02	MONUMEN					
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	15.000.000	Renovasi	>0 % s.d 30 %	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA					
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20	15.000.000	Renovasi	>0 % s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85% s.d 100%	20
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PAS II					
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	20	15.000.000	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85% s.d 100%	20
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN					
1.3.4.01.01	JALAN	10	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45%	3
					>45 % s.d 65 %	5
					>65 % s.d 85 %	8
					>85 % s.d 100%	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30%	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20
1.3.4.02	BANGUNAN AIR/IRIGASI					
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0 % s.d 30 %	0
					>30% s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100%	20

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45% >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65% s.d 85% >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45% s.d 65% >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45% >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.03	INSTALASI					
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	> 0 % s.d 30 % >30% s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45 % >45% s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85% s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30% s.d 45% >45 % s.d 65 % >65% s.d 85 % >85 % s.d 100%	0 5 10 15 20
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Renovasi	>0% s.d 30% >30 % s.d 45 % >45 % s.d 65 % >65 % s.d 85 % >85 % s.d 100	0 5 10 15 20

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

1.3.4.04	JARINGAN					
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.02	JARINGAN USTRUK	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	20	Tidak ada batas kapitalisasi	Overhaul	>0% s.d 30%	0
					>30 % s.d 45 %	5
					>45 % s.d 65 %	10
					>65 % s.d 85 %	15
					>85 % s.d 100	20
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA					
1.3.5.02.01.01.002	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4	1.000.000	Overhaul	>0% s.d 25%	0
					>25 % s.d 50 %	1
					>50 % s.d 75 %	2
					>75 %	3

Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau duahari.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat / jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

b. Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada saat RSUD menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, RSUD harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan RSUD/pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

C.1. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan

	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Jasa Layanan Kesehatan	3.990.000.000	4.091.468.443	102,54
	3.990.000.000	4.091.468.443	102,54

Pendapatan jasa layanan kesehatan terdiri dari:

- Pasien Umum	503.688.674
- BPJS	3.572.406.300
- Obat Kronis	15.373.469
	4.091.468.443

C.2. Pendapatan APBD

	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Untuk Belanja Operasi			
Belanja pegawai	1.470.792.376	756.645.000	51,44
Belanja barang dan jasa	43.933.063.412	43.440.263.718	98,88
Untuk Belanja Modal			
Peralatan dan Mesin	11.517.989.028	11.285.180.770	97,98
Gedung dan Bangunan	780.000.000	775.900.013	99,47
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000	74.925.000	99,90
Aset Lainnya	1.771.000.000	1.714.672.500	96,82
	59.547.844.816	58.047.587.001	97,48

C.3. Pendapatan Hasil Kerjasama

	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Program sterilisasi (MOW)	-	11.760.000	100,00
	-	11.760.000	100,00

C.4. Pendapatan Lainnya

	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan lainnya	10.000.000	13.656.668	136,57
	10.000.000	13.656.668	136,57
Pendapatan lainnya terdiri dari:			
- Jasa giro		13.656.668	
- Penerimaan Denda dan Pengembalian		-	
		13.656.668	

C.5. Belanja Pegawai

	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja pegawai-APBD	1.470.792.376	756.645.000	51,44
Belanja pegawai-BLUD	-	-	-
	1.470.792.376	756.645.000	51,44

C. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN - Lanjutan

Gaji pokok	104.400.000	-	-
Tunjangan	40.554.696	-	-
Iuran Jaminan Kesehatan	11.520.000	-	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	300.000	-	-
Iuran Jaminan Kematian	600.000	-	-
Iuran Tapera	517.680	-	-
Tambahan penghasilan	1.312.900.000	756.645.000	57,63
BLUD	-	-	-
	1.470.792.376	756.645.000	51,44

C.6. Belanja Barang dan Jasa

2025			
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja barang dan jasa-APBD	43.933.063.412	43.440.263.718	98,878
Belanja barang dan jasa-BLUD	3.850.000.000	3.849.898.755	99,997
	47.783.063.412	47.290.162.473	98,968
- Belanja Barang Pakai Habis	9.820.421.985	9.604.994.450	97,81
- Belanja Jasa Kantor	30.198.475.025	30.023.917.438	99,42
- Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	458.384.402	442.903.927	96,62
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.900.000	20.239.780	92,42
- Belanja Sewa Hotel	72.300.000	71.300.000	98,62
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	290.220.000	289.465.800	99,74
- Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	230.700.000	230.700.000	100,00
- Belanja Pemeliharaan	2.821.066.000	2.737.288.323	97,03
- Belanja Perjalanan Dinas	19.596.000	19.454.000	99,28
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.850.000.000	3.849.898.755	99,997
	47.783.063.412	47.290.162.473	98,97

C.7. Belanja Modal

2025			
	Anggaran	Realisasi	%
Dana APBD			
Peralatan dan Mesin	11.517.989.028	11.285.180.770	97,98
Gedung dan Bangunan	780.000.000	775.900.013	99,47
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000	74.925.000	99,90
Aset Lainnya	1.771.000.000	1.714.672.500	96,82
Jumlah	14.143.989.028	13.850.678.283	97,93
2025			
	Anggaran	Realisasi	%
Dana BLUD			
Peralatan dan Mesin	150.000.000	149.642.430	-
Gedung dan Bangunan			-
Jumlah	150.000.000	149.642.430	-
Jumlah belanja modal	14.293.989.028	14.000.320.713	97,95

D. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

D.1. Kas dan Setara Kas

	2025
<u>Bank:</u>	
Bank Banten Nomor Rekening-0890099157	117.343.926
	117.343.926
Transaksi tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan saat pemeriksaan kas sebagai berikut:	
- Jumlah Penerimaan 1 Januari s/d tanggal 15 Januari 2026	47.926.705
- Jumlah Pengeluaran 1 Januari s/d tanggal 15 Januari 2026	-
	47.926.705
Kas dan setara kas per 15 Januari 2026	165.270.631

D. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA - Lanjutan

D.2. Piutang Jasa Layanan Kesehatan

	2025
Piutang Jasa Layanan Kesehatan terdiri dari:	
BPJS Kesehatan	129.022.802
Jumlah piutang bruto	129.022.802
Penyisihan piutang tak tertagih	(645.114)
Jumlah piutang bersih	128.377.688

Umur piutang dan penyisihan piutang sebagai berikut:

	2025		
	Jumlah piutang bruto	Penyisihan piutang tak tertagih % Rupiah	Jumlah piutang bersih
< 1 Bulan	129.022.802	0,50% 645.114	128.377.688
	129.022.802	645.114	128.377.688

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang dikemudian hari.

D.3. Persediaan

	2025
Bahan Kimia	109.880.757
Bahan Bakar dan Pelumas	24.391.103
Bahan Baku	679.999
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.284.630
Isi Tabung Gas	123.354.456
Suku Cadang Alat Kedokteran	7.920.499.678
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.534.192.914
Suku Cadang Alat Bengkel	1.530.912
Alat Tulis Kantor	502.482.719
Kertas dan Cover	189.294.201
Benda Pos	645.000
Bahan Komputer	665.049.074
Perabot Kantor	867.014.756
Alat Listrik	144.576.684
Suvenir / Cendera Mata	295.921.900
Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	292.480.515
Obat	8.938.500.324
Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	52.049.800
Natura	1.047.708.928
	22.795.538.349

Dijumpai barang berupa obat kondisi rusak dan kadaluarsa sebanyak 94.494 item barang seharga Rp.110.806.925,-. Terhadap barang rusak dan kadaluarsa tersebut sudah bukan menjadi saldo per 31 Desember 2025.

D.4. Aset Tetap

	2025		
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan
Biaya Perolehan			
Tanah		5.021.777.000	-
Peralatan dan mesin		11.039.050.535	-
Gedung dan bangunan		90.521.841.485	-
Jalan, jaringan dan instalasi			-
	-	106.582.669.020	-

D.4. Aset Tetap - Lanjutan

Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan mesin	318.430.533	318.430.533
Gedung dan bangunan	9.283.269.556	9.283.269.556
Jalan, jaringan dan instalasi	-	-
	9.601.700.089	9.601.700.089
Nilai Buku	-	96.980.968.931

Penyusutan dialokasikan ke beban operasional pada tahun 2025 sebesar Rp.9.601.700.089,-

D.5. Aset Lainnya

	2025
Aset Tidak Berwujud	1.714.672.500
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(71.444.688)
Nilai buku	1.643.227.813

D.6. Utang Belanja

	2025
Utang barang dan jasa	80.033.568
Utang jasa layanan	375.651.474
	455.685.042
Utang belanja dan jasa terdiri dari:	
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	9.803.960
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	70.229.608
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD-jasa layanan	375.651.474
	455.685.042

E. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Kegiatan Operasional

E.1.1. Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan

	2025
Pendapatan jasa layanan kesehatan	4.220.491.245
Terdiri dari:	
- Pendapatan LRA tahun 2025	4.091.468.443
- Piutang atas jasa layanan kesehatan tahun 2024	-
- Piutang atas jasa layanan kesehatan tahun 2025	129.022.802
	4.220.491.245

E.1.2. Pendapatan APBD

	2025
Untuk Belanja Operasi	44.196.908.718
Untuk Belanja Modal	13.850.678.283
	58.047.587.001

E.1.3. Pendapatan Hasil Kerjasama

	2025
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Penyewaan Ruangan	11.760.000
	11.760.000

E.1.3. Pendapatan Hibah

	2025
Hibah dari Kementerian Kesehatan	-
	-

E. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

E.1.4. Pendapatan Lainnya

	2025
Pendapatan lainnya	13.656.668
	13.656.668

E.1.5. Beban Pegawai

	2025
Beban pegawai - APBD	873.595.000
Beban pegawai - BLUD	-
	873.595.000

E.1.6. Beban Barang dan Jasa

	2025
Beban barang dan jasa - APBD	37.694.017.161
Beban barang dan jasa - BLUD	2.479.537.050
	40.173.554.211

E.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2025
Beban penyusutan dan amortisasi	
	9.673.144.776
- Beban Penyusutan	4.808.960.523
- Beban Amortisasi	71.444.688
	4.880.405.210

E.1.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	2025
Beban penyisihan piutang tak tertagih	645.114
	645.114

E.1.10. Beban ekstrakomtabel

	2025
Beban ekstrakomtabel	470.697.665
	470.697.665

E.2. Kegiatan Non Operasional

E.2.1. Pendapatan Lain-Lain

	2025
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(818.780)
	(818.780)

F PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak ada peristiwa penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan jurnal penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.

G TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan UPT RSUD UWES QORNY bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, yang selesai disusun pada tanggal 05 Februari 2026.

----- 000 -----

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI (MID) LABUAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

I. Surat Pernyataan Direksi	3
II. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan RSUD BLUD LABUAN	5
III. Laporan Keuangan RSUD BLUD LABUAN	8
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	8
2. Neraca Per 31 Desember 2025	9
3. Laporan Operasional Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	11
4. Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	13
5. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	15
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	16
7. Catatan atas Laporan Keuangan	17



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD MUHAMMAD IRSYAD DJUWAEI LABUAN

Jl. Raya Labuan - Pandeglang, Kec. Labuan, Pandeglang, Banten, Kode Pos 42264

Telepon: (0253) 5132006 Email: uptdrsudlabuan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : dr. Jana Sunawati, M.H.
NIP : 19750630 200604 2 010
Jabatan : Plt Direktur
Alamat kantor : Jalan raya Labuan – Pandeglang, Kec. Labuan, Kab.
Pandeglang, Banten. 42264

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
2. Laporan Keuangan UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak ada mengandung fakta tindak kecurangan (*Fraudalance*) yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen;
3. Laporan Keuangan RSUD Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
4. Semua informasi Laporan Keuangan UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam telah dimuat secara lengkap dan benar;
5. Laporan Keuangan UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta materia;
6. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam UPTD RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Pandeglang, 30 Januari 2026

Plt Direktur,



dr. Jana Sunawati, M.H

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00009/2.1392/AU.5/11/1601-1/1/2026

Plt Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BLUD MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI (MID) LABUAN

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Rumah SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BLUD MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI (MID) LABUAN, terlampir, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MID LABUAN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Khusus Badan Layanan Umum yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Standar Akuntansi Pemerintahan khusus Badan Layanan Umum tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Tanggung jawab auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas.



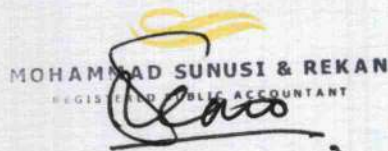
Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini wajar dengan pengecualian bagi audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BLUD MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI (MID) LABUAN per tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan khusus Badan Layanan Umum tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN



I. Surono, SE., M.Ak., CA., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP. 1601

Jakarta, 30 Januari 2026



KANTOR AKUNTAN PUBLIK MOHAMMAD SUNUSI & REKAN

Jakarta Garden City, La Seine,
Jl. Mahakam Blok F5 No. 6, Cakung,
Jakarta Timur DKI Jakarta 13960

III.LAPORAN KEUANGAN RSUD LABUAN

1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PERIODE : 01 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,050,000,000.00	9,119,099,815.93	(2,069,099,815.93)	129.35
4.1.02	Retribusi Daerah	7,000,000,000.00	9,086,420,964.62	(2,086,420,964.62)	129.81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50,000,000.00	32,678,851.31	17,321,148.69	65.36
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7,050,000,000.00	9,119,099,815.93	(2,069,099,815.93)	129.35
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	46,527,284,339.00	44,845,690,909.50	1,681,593,429.50	96.39
5.1.01	Belanja Pegawai	1,732,017,963.00	1,056,311,104.00	675,706,859.00	60.99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44,795,266,376.00	43,789,379,805.50	1,005,886,570.50	97.75
5.2	BELANJA MODAL	8,830,077,875.00	8,662,724,825.00	167,353,050.00	98.10
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,752,325,075.00	6,663,079,825.00	89,245,250.00	98.68
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282,644,800.00	261,040,000.00	21,604,800.00	92.36
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24,108,000.00	24,000,000.00	108,000.00	99.55
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,771,000,000.00	1,714,605,000.00	56,395,000.00	96.82
	JUMLAH BELANJA DAERAH	55,357,362,214.00	53,508,415,734.50	1,848,946,479.50	96.66
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48,307,362,214.00)	(44,389,315,918.57)	(3,918,046,295.43)	91.89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(48,307,362,214.00)	(44,389,315,918.57)	(3,918,046,295.43)	91.89

2. NERACA

PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN
NERACA
PER : 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
1101	Kas dan Setara Kas	2.119.099.815,93	0,00	2.119.099.815,93	0,00
11010	Kas di BLUD	2.119.099.815,93	0,00	2.119.099.815,93	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00
11040	Piutang Retribusi Jasa Umum	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00
1110	Penyisihan Piutang	(10.890.933,85)	0,00	(10.890.933,85)	0,00
11100	Penyisihan Piutang Pendapatan	(10.890.933,85)	0,00	(10.890.933,85)	0,00
11101	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11110	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Persediaan	23.227.164.084,16	16.455.970.604,20	6.771.193.479,96	41,15
11120	Barang Pakai Habis	23.227.164.084,16	16.455.970.604,20	6.771.193.479,96	41,15
11121	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	27.513.559.736,24	16.455.970.604,20	11.057.589.132,04	67,19
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1201	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	Investasi-Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ASET TETAP				
1401	Tanah	659.508.000,00	0,00	659.508.000,00	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	75.785.814.636,25	0,00	75.785.814.636,25	0,00
1403	Gedung dan Bangunan	95.075.999.419,14	0,00	95.075.999.419,14	0,00
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	482.000.920,00	0,00	482.000.920,00	0,00
1405	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	97.653.000,00	0,00	97.653.000,00	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(61.846.665.161,55)	0,00	(61.846.665.161,55)	0,00
14070	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(42.835.148.928,09)	0,00	(42.835.148.928,09)	0,00
14071	Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(18.961.307.804,29)	0,00	(18.961.307.804,29)	0,00
14072	Akumulasi Penyusutan Jalan,	(50.208.429,17)	0,00	(50.208.429,17)	0,00
14073	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	110.254.310.813,84	0,00	110.254.310.813,8	0,00

17	ASET LAINNYA				
1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	Dana Transfer Treasury Deposit	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	137.767.870.550,08	16.455.970.604,20	121.311.899.945,8	737,19
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	204.785.296,00	0,00	204.785.296,00	0,00
21060	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
21061	Utang Belanja Barang dan Jasa	204.785.296,00	0,00	204.785.296,00	0,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21070	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
21071	Utang Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00
21072	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
21073	Utang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
21074	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	204.785.296,00	0,00	204.785.296,00	0,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
22040	Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	204.785.296,00	0,00	204.785.296,00	0,00
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
3101	Ekuitas	137.563.085.254,08	16.455.970.604,20	121.107.114.649,8	735,95
31010	Ekuitas	137.563.085.254,08	16.455.970.604,20	121.107.114.649,8	735,95
	JUMLAH EKUITAS	137.563.085.254,08	16.455.970.604,20	121.107.114.649,8	735,95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	137.767.870.550,08	16.455.970.604,20	121.311.899.945,8	737,19

3. LAPORAN OPERASIONAL

PROVINSI BANTEN

DINAS KESEHATAN

UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN

LAPORAN OPERASIONAL

PER : 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	11.297.286.585,93	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	11.264.607.734,62	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	32.678.851,31	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7303	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	11.297.286.585,93	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	42.665.000.367,53	0,00
8101	Beban Pegawai	1.148.946.104,00	0,00
8102	Beban Barang dan Jasa	41.300.845.430,93	0,00
810201	Beban Persediaan	6.721.017.636,43	0,00
810202	Beban Jasa	28.862.370.471,00	0,00
810203	Beban Pemeliharaan	1.785.129.024,50	0,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	48.264.421,00	0,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.884.063.878,00	0,00
8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00
8105	Beban Hibah	0,00	0,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	10.890.933,85	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	204.317.898,75	0,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00

82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	21.757.198.861,34	0,00
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.214.613.932,47	0,00
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.518.484.882,87	0,00
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.100.046,00	0,00
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
8208	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00
8209	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	64.422.199.228,87	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(53.124.912.642,94)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(53.124.912.642,94)	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(53.124.912.642,94)	0,00

4. LAPORAN ARUS KAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBD	46,508,415,734.50	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	9,086,420,964.62	-
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-
7	Pendapatan Hibah	-	-
8	Pendapatan Giro	32,678,851.31	-
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)	55,627,515,550.43	-
10			
11	Arus Keluar Kas		
12	Pembayaran Pegawai	1,056,311,104.00	-
15	Pembayaran Barang dan Jasa	43,789,379,805.50	-
18	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d 15)	44,845,690,909.50	-
19	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-18)	10,781,824,640.93	-
20			
21	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
22	Arus Masuk Kas		
23	Penjualan atas Tanah	-	-
24	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
25	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
26	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
28	Penjualan Aset Lainnya	-	-
29	Penerimaan dari Divestasi	-	-
30	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d 30)	-	-
32			
33	Arus Keluar Kas		
34	Perolehan Tanah	-	-
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	6,663,079,825.00	-
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	261,040,000.00	-
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,000,000.00	-
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
39	Perolehan Aset Lainnya	1,714,605,000.00	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
41	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d 41)	8,662,724,825.00	-
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-42)	(8,662,724,825.00)	-

45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
46	Arus Masuk Kas		
47	Penerimaan Pinjaman	-	-
48	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	-	-
49	Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d 48)	-	-
50			
51	Arus Keluar Kas		
52	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
53	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	-	-
54	Penyetoran ke Kas Daerah	-	-
55	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d 54)	-	-
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (49-55)	-	-
57			
58	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
59	Arus Masuk Kas		
60	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
61	Jumlah Arus Masuk Kas (60)	-	-
62			
63	Arus Keluar Kas		
64	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
65	Jumlah Arus Keluar Kas (64)	-	-
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (61-65)	-	-
67			
68	Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas BLU (19+43+56+66)	2,119,099,815.93	-
69	Saldo Awal Kas dan Setara Kas BLU	-	-
70	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLU (68+69)	2,119,099,815.93	-
71	Saldo Akhir Kas (68+69)	2,119,099,815.93	-

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	16,455,970,604.20	16,455,970,604.20
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(53,124,912,642.94)	0,00
3	R/K PPKD	46,508,415,734.50	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	127,723,611,558.32	0,00
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	0,00	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
457	KOREKSI INVESTASI	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	127,723,611,558.32	0,00
	EKUITAS AKHIR	137,563,085,254.08	16,455,970,604.20

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025**

NO	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL	0.00	0.00
3	Subtotal (1 - 2)	0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	(44,389,315,918.57)	0.00
5	Subtotal (3 + 4)	(44,389,315,918.57)	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
7	R/K PPKD	46,508,415,734.50	
8	Lain - Lain	0.00	0.00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7+8)	2,119,099,815.93	0.00

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Umum

1.1 Dasar Hukum penetapan UPTD RSUD Labuan .

Rumah Sakit Umum Daerah Labuan ditetapkan sebagai unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan.

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan UPTD RSUD Labuan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah UPTD RSUD Labuan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan UPTD RSUD Labuan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan UPTD RSUD Labuan Tahun 2025 untuk memberikan informasi terhadap pelaksanaan kinerja keuangan sebagai berikut :

- a. Memberi informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan di UPTD RSUD Labuan.
- b. Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta terjadinya penyebab terjadinya selisih antara realisasi dan anggarannya.
- c. Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya
- d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- e. mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024, dasar hukum penetapan APBD Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Bantuan Keuangan;
18. Keputusan Gubernur No.582 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.4 Organisasi Perangkat Daerah UPTD RSUD Labuan

Hingga 19 Januari tahun 2026, UPTD RSUD Labuan dipimpin oleh dr. Susi Mulyani, MM sebagai Plt. Direktur UPTD RSUD Labuan selaku Pengguna Anggaran, namun sejak 20 Januari 2026, Plt Direktur UPTD RSUD Labuan adalah dr. Jana Sunawati, MH.

Susunan Organisasi dan data kepegawaian serta tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Labuan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025
- Direktur	1 orang
- Kepala Bagian Sekretariat	1 orang
- Kepala Bidang Penunjang	1 orang
- Kepala Bidang Pelayanan Medis	1 orang
• Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
• Kepala Seksi Etika, Mutu, Pengembangan dan Kerja Sama RS	1 orang
• Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat	1 orang
• Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan	1 orang
Staf terdiri dari	
▪ Aparatur Sipil Negara (Perawat Ahli Muda)	1 orang
▪ Pegawai BLUD	351 orang
▪ Pegawai Paruh Waktu	1 orang
Jumlah Pegawai	361 orang

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target pendapatan BLUD UPTD RSUD Labuan pada tahun 2025 adalah Rp.7.050.000.000,00.

Realisasi pendapatan UPTD RSUD Labuan Tahun Anggaran 2025 s.d 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp. 9.119.099.815,93 atau sebesar 129,35% melebihi dari pagu anggaran sebesar Rp.7.050.000.000,00.

Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 55.357.362.214,00 untuk membiayai 2 Program dengan 9 Kegiatan. Diantaranya sebagai berikut:

Table 1

Rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA. 2025

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan BLUD	7.050.000.000,00
Jumlah		7.050.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.820.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.863.120.363,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.400.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.869.850.600,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.028.700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.230.246.156,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.915.982.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.000.000.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	12.709.914.395,00
Jumlah		55.357.362.214,00

Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. 46.527.284.339,00 Sedangkan alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 8.830.077.875,00.

Realisasi Belanja RSUD Labuan Tahun Anggaran 2025 s.d 31 Desember 2025 terserap sebesar Rp.53.492.126.342,50 atau 96,63% dari pagu anggaran sebesar Rp.55.357.362.214,00. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.44.829.401.517,50 atau 96,35% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 8.662.724.825,00 atau 98,10 % dari anggaran.

2.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Table 2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00

2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

- **) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

- c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai

Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
- a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO. Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda

untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (07) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (08) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (09) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (10) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.

- (11) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (12) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (13) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (14) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (15) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (16) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (17) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (18) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (19) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (20) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (21) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (22) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (23) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (24) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (25) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (26) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (27) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (28) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (29) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (30) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

Tabel 3

Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (31) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (32) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

Table 4 Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (33) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (34) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (35) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (36) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (37) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (38) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (39) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (40) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum

selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- (41) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (42) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (43) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (44) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN RSUD MID LABUAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Anggaran Belanja Tahun 2025 pada UPTD RSUD Labuan di bebaskan menggunakan dana APBD dan Anggaran BLUD sedangkan anggaran pendapatan UPTD RSUD Labuan merupakan pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan BLUD atas layanan Kesehatan.

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa sedangkan Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll. Dalam hal ini pendapatan yang dimaksud untuk RSUD Labuan merupakan pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak yaitu lain-lain PAD yang sah berupa pendapatan BLUD dari layanan Kesehatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi

Pada Tahun 2025, target Pendapatan Retribusi Daerah/BLUD UPTD RSUD Labuan adalah sebesar Rp.7.050.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh juta rupiah)

Realisasi Pendapatan yang diterima oleh UPTD RSUD Labuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9.119.099.815,93 atau sebesar 129,35% dari pagu anggaran sebesar Rp.7.050.000.000,00. Adapun Rincian Anggaran pendapatan dan Realisasi pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Table 5

Pendapatan BLUD RSUD Labuan Provinsi Banten TA 2025

No	Pagu Anggaran	Realisasi Pendapatan	Lebih/kurang	%	Keterangan
1	7,050,000,000.00	9,119,099,815.93	2,069,099,815.93	129.35	Realisasi retribusi kesehatan UPTD RSUD Labuan tahun 2025 sebesar Rp9.119.099.815,93 atau 129,35 % dari target pendapatan sebesar Rp7.050.000.000,-

Table 6

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Labuan Provinsi Banten TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%
	Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	
2	3	4	5 = 4 - 3	6
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,050,000,000.00	9,119,099,815.93	(2,069,099,815.93)	129.35
Retribusi Daerah	7,000,000,000.00	9,086,420,964.62	(2,086,420,964.62)	129.81
Lain-lain PAD yang Sah	50,000,000.00	32,678,851.31	17,321,148.69	65.36
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7,050,000,000.00	9,119,099,815.93	(2,069,099,815.93)	129.35

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja UPTD RSUD Labuan pada TA 2025 adalah sebesar Rp.53.508.415.734,50 atau 96,63% dari total anggaran yang terdiri atas realisasi belanja APBD sebesar Rp.46.508.415.734,50 dan Realiasi dari belanja BLUD sebesar Rp.6.983.710.608,00 dan terdapat kelebihan pembayaran pajak (PPH dan PPN) pada belanja BLUD sebesar Rp.16.289.392,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp.55.357.362.214,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Table 7 Realisasi Belanja UPTD RSUD Labuan Provinsi Banten TA 2025

BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	46,527,284,339.00	44,845,690,909.50	1,681,593,429.50	96.39
Belanja Pegawai	1,732,017,963.00	1,056,311,104.00	675,706,859.00	60.99
Belanja Barang dan Jasa	44,795,266,376.00	43,789,379,805.50	1,005,886,570.50	97.75
BELANJA MODAL	8,830,077,875.00	8,662,724,825.00	167,353,050.00	98.10
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,752,325,075.00	6,663,079,825.00	89,245,250.00	98.68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282,644,800.00	261,040,000.00	21,604,800.00	92.36
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24,108,000.00	24,000,000.00	108,000.00	99.55
Belanja Modal Aset Lainnya	1,771,000,000.00	1,714,605,000.00	56,395,000.00	96.82
JUMLAH BELANJA DAERAH	55,357,362,214.00	53,508,415,734.50	1,848,946,479.50	96.66

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.44.845.690.909,50 atau 96,39% dari pagu anggaran sebesar Rp.46.527.284.339,00 yang terdiri atas realisasi belanja operasi APBD sebesar Rp.38.255.585.801,50 dan realisasi belanja operasi BLUD sebesar Rp.6.573.815.716,00 dan terdapat kelebihan pembayaran pajak (PPH dan PPN) pada belanja BLUD sebesar Rp.16.289.392,00. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.056.311.104,00 atau 60,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.732.017.963,00 yang terdiri atas realisasi belanja pegawai APBD sebesar Rp.1.052.311.104,00 dan Realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp.4.000.000,00.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.43.789.379.805,50 atau 97,75% yang terdiri atas realisasi belanja APBD sebesar Rp.37.203.274.697,50 dan realisasi yang menggunakan dana BLUD sebesar Rp.6.586.105.108,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp.44.795.266.376,00.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.8.662.724.825,00 atau 98,10% dari pagu anggaran sebesar Rp.8.830.077.875,00. yang terdiri atas belanja sebesar

Rp.8.252.829.933,00 untuk Realisasi belanja Modal APBD dan Rp.409.894.892,00 untuk Realisasi belanja Modal BLUD. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut :

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 adalah sebesar Rp.0,-

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp.6.663.079.825,00 atau sebesar 98,99% yang terdiri atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin APBD Rp.6.253.184.933 dan Rp.409.894.892,00 untuk realisasi belanja peralatan dan mesin BLUD dari pagu anggaran secara keseluruhan (APBD +BLUD) sebesar Rp.6.752.325.075,00.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp.261.040.000,00 atau 92,36% dari pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 282.644.800,00.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 atau 99,55% dari pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.24.108.000,00.

4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp.1.714.605.000,00 atau 96,82% dari pagu anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.771.000.000,00.

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2025 UPTD RSUD Labuan menganggarkan pendapatan sebesar Rp.7.050.000.000,00 dan anggaran belanja sebesar Rp.55.357.362.214,00 sehingga defisit anggaran direncanakan sebesar Rp.(48.307.362.214,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp.(44.389.315.918,57), hal ini terjadi karena realisasi pendapatan BLUD yang melampaui target anggaran. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Perhitungan Surplus/(Defisit) Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025		Selisih Lebih/ (Kurang)
		Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 3
1	PENDAPATAN	7.050.000.000,00	9.119.099.815,93	129,35	2.069.099.815,93
2	BELANJA DAN TRANSFER	55.357.362.214,00	53.508.415.734,50	96,66	(1.848.946.479,50)
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(48.307.362.214,00)	(44.389.315.918,57)	91,89	3.918.046.295,43

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.297.286.585,93 yang merupakan pendapatan BLUD dari pendapatan Retribusi daerah dan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2025

Uraian	2025	2024	Naik/Turun (%)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	11.297.286.585,93	0,00	
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	
Retribusi Daerah-LO	11.264.607.734,62	0,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	
Lain-lain PAD yang Sah-LO	32.678.851,31	0,00	

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp.64.422.199.228,87. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Realisasi Beban - LO Tahun 2025

BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	42.665.000.367,53	0,00
Beban Pegawai	1.148.946.104,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	41.300.845.430,93	0,00
Beban Persediaan	6.721.017.636,43	0,00
Beban Jasa	28.862.370.471,00	0,00
Beban Pemeliharaan	1.785.129.024,50	0,00
Beban Perjalanan Dinas	48.264.421,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	3.884.063.878,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	10.890.933,85	0,00
Beban Aset Ekstrakontable	204.317.898,75	0,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	21.757.198.861,34	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.214.613.932,47	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.518.484.882,87	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.100.046,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAERAH	64.422.199.228,87	0,00

- Beban operasi yang dikenakan Pajak Penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), melalui mekanisme pemotongan pada saat pengajuan pembayaran ke BPKAD melalui Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D).

4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,-. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Defisit Non Operasional - LO Tahun 2025

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00

4.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penyusunan CaLK untuk penjelasan pada Neraca ini hanya akan dijelaskan pada pos-pos yang memiliki nilai nominal yang tertera pada Laporan Neraca LKPD UPTD RSUD Labuan TA 2025

4.3.1 Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau Entitas

Aset memiliki karakteristik yang berbeda dengan komponen laporan keuangan lainnya. Sehingga Anda dapat mengenali aktiva dengan melihat karakteristiknya. Adapun karakteristik aset yaitu adalah:

- Memiliki manfaat ekonomi yang diperoleh untuk masa yang akan datang
- Dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan
- Hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu

Jenis-Jenis Aset digolongkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Berikut adalah penjelasannya:

Jumlah Aset pada UPTD RSUD Labuan tahun 2025 adalah sebesar Rp.137.767.870.550,08

Tabel 12
Aset T.A 2025

Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR	27.513.559.736,24	16.455.970.604,20	11.057.589.132,04	67,19
ASET TETAP	110.254.310.813,84	0,00	110.254.310.813,84	0,00
JUMLAH ASET	137.767.870.550,08	16.455.970.604,20	121.311.899.945,88	737,19

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan jenis aktiva yang paling liquid. Maksudnya, substansi tersebut paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aktiva lancar memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Umumnya, jangka waktu perputaran aset lancar selama 1 tahun atau dalam satu siklus norma perusahaan. Berikut adalah penjelasan rincian Aset Lancar:

Jumlah Aset Lancar tahun 2025 adalah sebesar Rp.27.513.559.736,24 dan Aset Lancar tahun 2024 adalah sebesar Rp.16.455.970.604,20

Tabel 13
Aset Lancar T.A 2025

Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2.119.099.815,93	0,00	2.119.099.815,93	0,00
Kas di BLUD	2.119.099.815,93	0,00	2.119.099.815,93	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00
Penyisihan Piutang	(10.890.933,85)	0,00	(10.890.933,85)	0,00
Penyisihan Piutang	(10.890.933,85)	0,00	(10.890.933,85)	0,00
Persediaan	23.227.164.084,16	16.455.970.604,20	6.771.193.479,96	41,15
Barang Pakai Habis	23.227.164.084,16	16.455.970.604,20	6.771.193.479,96	41,15
JUMLAH ASET LANCAR	27.513.559.736,24	16.455.970.604,20	11.057.589.132,04	67,19

4.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan Bendahara baik berupa Tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas dan Setara Kas pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.119.099.816,93, terdiri dari:

- Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,-
- Kas di BLUD yaitu saldo rekening pada Bank Banten dengan rekening no 0764008006 sebesar Rp.2.119.099.816,93.

4.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang di miliki oleh bendahara pengeluaran APBD yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca dan untuk TA 2025 sisa kas s.d

tanggal 31 Desember 2025. Kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp.0,00 dan kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2025

4.3.1.1.2 Piutang

Pengakuan Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Jumlah piutang yang di akui UPTD RSUD Labuan TA 2025 adalah sebesar Rp.2.178.186.770,00 yang merupakan piutang pelayanan pasien BPJS.

Berikut adalah rincian Jumlah Piutang UPTD RSUD Labuan pada neraca:

Tabel 14
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah T.A 2025

Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa	2.178.186.770,00	0,00	2.178.186.770,00	0,00

4.3.1.1.2.1. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 15

Klasifikasi Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Tabel 16

Penyisihan Piutang T.A 2025

Keterangan	Jumlah Piutang Tahun 2025	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang 2025
Penyisihan Piutang	2,178,186,770.00	Lancar	0.50%	10,890,933.85
Piutang BPJS Obat Kronis	16,494,770.00	Lancar	0.50%	82,473.85
Piutang BPJS Kesehatan	2,161,692,000.00	Lancar	0.50%	10,808,460.00

Jumlah Penyisihan piutang untuk TA 2025 sejumlah Rp.(10.890.933,85).

4.3.1.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.23.227.164.084,16 dan di Tahun 2024 terdapat saldo persediaan sebesar Rp.16.455.970.604,20. Nilai persediaan tersebut merupakan rekonsiliasi antara RSUD Labuan dengan BPKAD yang dituangkan dengan Berita Acara no.000.2.3.2/1186.6/TWIV/ Persediaan – BPKAD.04/2025 tanggal 31 Desember 2025. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 17
Persediaan T.A 2025

Persediaan		
Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Bahan Bangunan dan Konstruksi	70,629,988.60	0.00
Bahan Kimia	53,108,280.09	5,328,000.00
Bahan Bakar dan Pelumas	44,136,016.02	0.00
Bahan Baku	6,791,124.00	0.00
Bahan/Bibit Tanaman	10,061,372.45	0.00
Isi Tabung Gas	54,690,810.00	0.00
Bahan Lainnya	27,081,597.10	0.00
Suku Cadang Alat Kedokteran	9,962,895,590.27	8,612,287,499.00
Suku Cadang Alat Laboratorium	520,358,137.65	0.00
Suku Cadang Alat Pertanian	1,010,000.10	0.00
Suku Cadang Alat Bengkel	2,253,250.00	0.00
Alat Tulis Kantor	566,397,786.28	0.00
Kertas dan Cover	110,963,210.16	0.00
Bahan Komputer	66,386,995.74	0.00
Perabot Kantor	973,221,617.77	323,660,000.00
Alat Listrik	83,653,321.94	0.00
Perlengkapan Dinas	19,044,597.64	0.00
Suvenir/Cendera mata	67,673,259.00	0.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	277,251,150.88	189,970,000.00
Obat	8,835,756,209.55	7,324,725,105.20
Natura	1,438,306,263.08	0.00
Natura dan Pakan Lainnya	35,493,505.84	0.00
JUMLAH	23,227,164,084.16	16,455,970,604.20

Tabel mutasi Persediaan

MUTASI PERSEDIAAN
TAHUN 2025

NAMA BARANG	SALDO AWAL		TOTAL BERTAMBAH		TOTAL BERKURANG		SALDO AKHIR	
	JML	HARGA	JML	HARGA	JML	HARGA	JML	HARGA
PERSEDIAAN								
BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	-	-	1,390.00	71,889,994.00	20.00	1,260,005.40	1,370.00	70,629,988.60
BAHAN KIMIA	1,440.00	5,328,000.00	20,522.00	206,633,804.00	20,675.00	158,853,523.91	1,287.00	53,108,280.09
BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	-	12,544.29	251,424,790.00	9,544.29	207,288,773.98	3,000.00	44,136,016.02
BAHAN BAKU	-	-	145.00	6,791,124.00	-	-	145.00	6,791,124.00
BAHAN/BIBIT TANAMAN	-	-	401.44	11,916,691.99	73.60	1,855,319.54	327.84	10,061,372.45
ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	24.00	58,193,348.00	24.00	58,193,348.00	-	-
ISI TABUNG GAS	-	-	31,310.44	225,646,076.00	22,104.44	170,955,266.00	9,206.00	54,690,810.00
BAHAN LAINNYA	-	-	786.42	42,552,206.54	210.50	15,470,609.44	575.92	27,081,597.10
SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	680,556.00	8,612,287,499.00	128,499.00	3,941,560,480.27	199,587.00	2,590,952,389.00	609,468.00	9,962,895,590.27
SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	-	-	2,363.00	1,128,161,053.29	1,216.00	607,802,915.64	1,147.00	520,358,137.65
SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	-	-	40.00	4,040,000.40	30.00	3,030,000.30	10.00	1,010,000.10
SUKU CADANG ALAT BENGKEL	-	-	10.00	2,702,800.00	3.00	449,550.00	7.00	2,253,250.00
ALAT TULIS KANTOR	-	-	58,215.00	774,741,521.75	43,196.00	208,343,735.47	15,019.00	566,397,786.28
KERTAS DAN COVER	-	-	1,456.00	130,785,861.00	207.00	19,822,650.84	1,249.00	110,963,210.16
BAHAN KOMPUTER	-	-	658.00	76,024,209.00	89.00	9,637,213.26	569.00	66,386,995.74
PERABOT KANTOR	1,932.00	323,660,000.00	19,911.00	1,280,547,342.16	9,640.00	630,985,724.39	12,203.00	973,221,617.77
ALAT LISTRIK	-	-	2,128.00	172,306,545.00	931.00	88,653,223.06	1,197.00	83,653,321.94
PERLENGKAPAN DINAS	-	-	245.00	32,371,763.80	128.00	13,327,166.16	117.00	19,044,597.64
SUVENIR/CENDERA MATA	-	-	3,515.00	240,461,157.70	2,613.00	172,787,898.70	902.00	67,673,259.00
ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	605.00	189,970,000.00	2,726.00	123,971,037.20	405.00	36,689,886.32	2,926.00	277,251,150.88
OBAT	5,333,984.00	7,324,725,105.20	1,435,273.00	4,049,759,381.26	1,176,525.00	2,538,728,276.91	5,592,732.00	8,835,756,209.55
NATURA	-	-	40,226.26	1,786,162,131.76	11,723.20	347,855,868.68	28,503.06	1,438,306,263.08
NATURA DAN PAKAN LAINNYA	-	-	1,622.90	40,496,646.40	171.06	5,003,140.56	1,451.84	35,493,505.84
JUMLAH	6,018,517.00	16,455,970,604.20	1,764,011.75	14,659,139,965.52	1,499,116.09	7,887,946,485.56	6,283,412.66	23,227,164,084.16

4.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap tahun 2025 per tanggal 31 Desember pada Neraca adalah sebesar Rp.110.254.310.813,84. Perhitungan Aset Tetap serta Penyusutannya telah dilakukan rekonsiliasi antara RSUD Labuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut adalah rincian dan penjelasan nilai aset tetap pada neraca 2025:

Tabel 18
Aset Tetap T.A 2025

Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET TETAP				
Tanah	659.508.000,00	0,00	659.508.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	75.785.814.636,25	0,00	75.785.814.636,25	0,00
Gedung dan Bangunan	95.075.999.419,14	0,00	95.075.999.419,14	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	482.000.920,00	0,00	482.000.920,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam	97.653.000,00	0,00	97.653.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(61.846.665.161,55)	0,00	(61.846.665.161,55)	0,00
Akumulasi Penyusutan	(42.835.148.928,09)	0,00	(42.835.148.928,09)	0,00
Akumulasi Penyusutan	(18.961.307.804,29)	0,00	(18.961.307.804,29)	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan,	(50.208.429,17)	0,00	(50.208.429,17)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	110.254.310.813,84	0,00	110.254.310.813,84	0,00

4.3.1.2.1 Tanah

Nilai aset tetap pada neraca berupa tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.659.508.000,00. Merupakan pemindahan aset antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diserahkan dengan Berita Acara no.000-2-3-2/2828/DINKES/2025; tanggal 23 Juni 2025.

4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2025 adalah Rp.75.785.814.636,25.

Jumlah sebesar Rp75.785.814.636,25 telah dilakukan Rekonsiliasi Aset antara RSUD Labuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.785.814.636,25 yaitu dengan:

- Belanja dari DPA RSUD Labuan Tahun 2025 sebesar Rp.8.197.366.926,25
- Hasil pemindahan aset antar SKPD sebesar Rp.67.588.447.710,00, diserahkan dengan Berita Acara no.000.2.3.2/5300/DINKES/2025; tanggal 11 September 2025.

4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp.95.075.999.419,14. Yang diperoleh melalui belanja sebesar Rp.261.040.000,00 dan hasil dari pemindahan aset antar SKPD Pemda Provinsi Banten sebesar Rp.94.814.959.419,14, yang diserahkan dengan Berita Acara no.000.2.3.2/2828/DINKES/2025; tanggal 23 Juni 2025.

4.3.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo asset untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca tanggal 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp.482.000.920,00. Yang diperoleh (setelah rekon Aset) melalui hasil dari pemindahan aset antar SKPD sebesar Rp.482.000.920,00, yang diserahkan dengan Berita Acara no.000.2.3.2/2828/DINKES/2025; tanggal 23 Juni 2025.

4.3.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp.97.653.000,00. Yang diperoleh melalui hasil dari pemindahan aset antar SKPD sebesar Rp.97.653.000,00, yang diserahkan dengan Berita Acara no.000.2.3.2/2828/DINKES/2025; tanggal 23 Juni 2025.

4.3.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap di UPTD RSUD Labuan pada neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp.61.846.665.161,55.

Jumlah sebesar Rp.61.846.665.161,55 telah dilakukan Rekonsiliasi Aset antara RSUD Labuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

4.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek UPTD RSUD Labuan yang masih belum dibayar pada akhir tahun pelaporan tahun 2025 adalah kewajiban jangka pendek sebesar Rp.204.785.296,00 sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjangnya adalah Rp.0,00

Tabel 19
Kewajiban TA 2025

No	Uraian	Utang 2025		
		APBD	BLUD	JUMLAH
2	KEWAJIBAN	204,785,296.00	0.00	204,785,296.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	204,785,296.00	0.00	204,785,296.00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Berikut adalah Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca 2025:

Tabel 20

Kewajiban Jangka Pendek TA 2025

No	Uraian	APBD	BLUD	Jumlah
2.1	Kewajiban Jangka Pendek			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Utang Belanja	204,785,296.00	0.00	204,785,296.00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	JUMLAH	204,785,296.00	0.00	204,785,296.00

4.3.2.1.1 Utang Belanja

UPTD. RSUD Labuan memiliki Utang Jangka Pendek berupa Utang Belanja, per 31 Desember 2025 Utang Belanja RSUD Labuan sejumlah Rp.204.785.296,00 utang tersebut berupa Utang Belanja tagihan listrik, tagihan air, tagihan angkut sampah, tagihan internet, dan tagihan telepon bulan Desember 2025.

Adapun rincian Utang belanja per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Utang Belanja TA 2025

No	Uraian	TA 2025
1	Utang Belanja	
1.1	Tagihan Listrik bulan Desember 2025	105,476,916.00
1.2	Tagihan Air bulan Desember 2025	5,249,320.00
1.3	Tagihan Angkut Sampah Non Medis bulan Desember 2025	5,208,000.00
1.4	Tagihan Internet bulan Desember 2025	55,573,260.00
1.5	Tagihan Telepon bulan Desember 2025	610,500.00
1.6	Tagihan Biaya Pemusnahan Sampah Medis bulan Desember 2025	32,667,300.00
	JUMLAH	204,785,296.00

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas.

Ekuitas per 31 Desember 2025 pada Neraca Adalah sebesar Rp.137.563.085.254,08. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

4.4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Sebagai Entitas Akuntansi

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 22

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD RSUD H.MUHAMMAD IRSYAD DJUAWELI LABUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No	URAIAN	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	16,455,970,604.20	16,455,970,604.20
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(53,124,912,642.94)	0,00
3	R/K PPKD	46,508,415,734.50	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	127,723,611,558.32	0,00
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	0,00	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
457	KOREKSI INVESTASI	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	127,723,611,558.32	0,00
	EKUITAS AKHIR	137,563,085,254.08	16,455,970,604.20

4.4.1.1 Ekuitas Awal

Pada tahun 2025 saldo awal ekuitas UPTD RSUD Labuan sebesar Rp.16.455.970.604,20 yang merupakan saldo akhir ekuitas pada tahun 2024.

4.4.1.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO UPTD RSUD Labuan tahun 2025 sebesar Rp.(53.124.912.642,94) yang merupakan nilai surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

4.4.1.3 R/K PPKD

Terdapat penyesuaian melalui Rekening/Koreksi PPKD (Pemerintah Pusat/Kementerian/Daerah) sebesar Rp.46.508.415.734,50 pada tahun 2025, yang berkontribusi positif terhadap ekuitas.

4.4.1.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada tahun 2025 terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp.127.723.611.558,32. Yang merupakan saldo mutasi masuk (antar SKPD) sebesar Rp.128.228.445.209,32 dikurangi dengan saldo mutasi keluar (antar SKPD) sebesar Rp.(504.833.651,00).

4.4.1.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal ekuitas ditambah dengan surplus/defisit LO, ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar serta dari perhitungan tersebut, nilai Ekuitas Akhir UPTD RSUD Labuan tahun 2025 sebesar Rp.137.563.085.254,08 dan tahun 2024 sebesar Rp.16.455.970.604,20.

4.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARN LEBIH

- 4.5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00 adalah merupakan Saldo Kas/Bank RSUD BLUD Labuan posisi 1 Januari 2025, pada tanggal tersebut RSUD Labuan belum berdiri.
- 4.5.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2025 sebesar Rp44.389.315.918,57 adalah merupakan SURPLUS/DEFISIT Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.
- 4.5.3 R/K PPKD sebesar Rp46.508.415.734,50 tahun 2025 adalah merupakan realisasi belanja yang berasal dari APBD.
- 4.5.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir 31 Desember 2025 sebesar Rp2.119.099.815,93 adalah merupakan Saldo Kas/Bank di RSUD Labuan, posisi 31 Desember 2025.

BAB VI

PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan UPTD RSUD Labuan, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja SKPD UPTD RSUD Labuan pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.